

PEMBERDAYAAN BAHASA INDONESIA MEMPERKUKUH BUDAYA BANGSA DALAM ERA GLOBALISASI

Risalah
Kongres Bahasa Indonesia VIII



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2011



PEMBERDAYAAN BAHASA INDONESIA MEMPERKUKUH BUDAYA BANGSA DALAM ERA GLOBALISASI

**Risalah
Kongres Bahasa Indonesia VIII**

PERPUSTAKAAN
BADAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**HADIAH
BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
2011

**Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa
dalam Era Globalisasi**

ISBN 978.979.069.079-0

Penyunting Penyelia

Yeyen Maryani, S.R.H. Sitanggang

Penyunting Pelaksana

Dendy Sugono, Mustakim, S.R.H. Sitanggang, Amran Tasai,
Abdul Rozak Zaidan, Sriyanto, Suladi, Ririen Ekoyanantiasih,
Rini Adiati Ekoputranti, S.S.T. Wisnu Sasangka, Dedi Puryadi, Fairul Zabadi,
Prih Suharto, Ebah Suhaebah, Djamari, Ani Mariani

Pewajah Kulit

Efgeni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Penerbit

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta Timur 13220

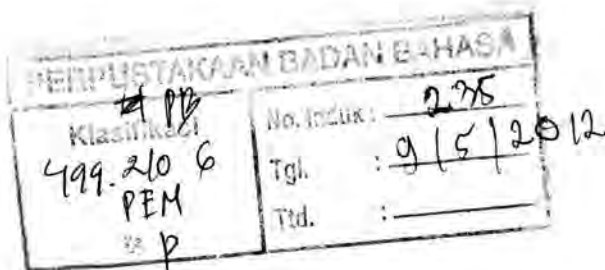
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

499.210 6

PEM pemberdayaan#ju
p Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi: Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII,--Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
xii,1015 hlm.; 24 cm

ISBN 978.979.069.079-0

1. Bahasa Indonesia-Temu Ilmiah



KATA PENGANTAR
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA

Kongres Bahasa Indonesia VIII (KBI VIII) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14—17 Oktober 2003 silam bertema "Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi". Penyelenggaraan KBI VIII ini berbeda dengan kongres-kongres sebelumnya. Hal ini tecermin dari tema yang dipilih, yaitu mengangkat tema kontekstual yang berkaitan langsung dengan munculnya tatanan kehidupan dunia yang baru sebagai akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang amat pesat serta kaitannya dengan gerakan reformasi yang bergulir sejak 1998 dan era otonomi daerah yang mulai diberlakukan pada tahun 2001.

Tema besar itu dijabarkan ke dalam tiga pokok bahasan yang mencakupi bahasa, sastra, dan media massa. Topik dalam pokok bahasan bahasa mengangkat masalah kontekstual dengan upaya meningkatkan mutu bahasa Indonesia dalam menghadapi budaya global, baik dalam konteks pendidikan maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pokok bahasan bahasa ini pun dibahas secara khusus topik tentang perkembangan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA). Adapun topik bidang sastra membahas pemantapan peran sastra Indonesia dan daerah, peningkatan mutu karya sastra, dan peningkatan apresiasi sastra dalam kaitannya dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi informasi, serta peningkatan mutu pendidikan sastra.

Topik seputar media massa merupakan bidang bahasan baru dalam kongres ini. Berbeda dengan kongres-kongres sebelumnya, dalam KBI VIII topik ini disediakan secara khusus karena masalah bahasa dalam media massa sangat kompleks sekaligus menarik dan dinamis. Selain itu, kita pun sudah memahami bahwa media massa memiliki peran strategis dalam masyarakatan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahkan, dalam era globalisasi saat ini media massa berpengaruh besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia sekaligus dapat memengaruhi cara berbahasa masyarakat. Pokok bahasan yang disajikan dalam bidang ini, antara lain, peran media massa dalam meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia, dampak pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa terhadap dunia pendidikan dan masyarakat luas, serta peran media massa dalam memasyarakatkan dan meningkatkan apresiasi sastra.

Dalam KBI VIII ini disajikan sekitar 80 makalah yang merupakan makalah dari peserta undangan (atas permintaan Panitia KBI VIII berdasarkan pertimbangan ketokohan, kepakaran, keahlian, pengalaman, serta kemampuan membahas topik tersebut), makalah swakarsa (atas inisiatif peminat), dan makalah para peserta dari mancanegara. Makalah-makalah

tersebut disajikan dalam sidang pleno, sidang kelompok, dan diskusi panel. Peserta KBI VIII itu sendiri diperkirakan berjumlah 1.000 orang, terdiri atas peserta undangan dan peserta biasa yang berasal dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, dosen, guru, tokoh masyarakat, budayawan, peminat bahasa dan sastra, dan wakil organisasi profesi dari dalam dan luar negeri.

Banyak pelajaran penting yang dapat kita petik dari makalah-makalah KBI VIII ini, terutama tentang “keberadaan” bahasa Indonesia pada era globalisasi saat ini dan upaya memantapkan “keberdayaan”-nya. Oleh karena itu pula, meskipun tidak semua makalah dapat dimuat dalam buku ini, saya berharap terbitnya buku yang berisi kumpulan makalah KBI VIII ini berguna untuk pemberdayaan bahasa Indonesia dalam memperkuat budaya bangsa.

Jakarta, 14 November 2011

Yeyen Maryani

DAFTAR ISI

iii

Kata Pengantar
Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

v

Daftar Isi

1

Laporan Pelaksanaan
Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII

12

Laporan Menteri Pendidikan Nasional

15

Sambutan Wakil Presiden RI yang Diwakili oleh Menko Kesra

18

Laporan Badan Pertimbangan Bahasa

SIDANG PLENO

23

Bahasa Indonesia sebagai Pemerkuh Persatuan Bangsa
dan Kesatuan Negara

Susilo Bambang Yudhoyono

32

Bahasa Indonesia, Pendidikan Nasional, dan Kehidupan Bangsa

A. Malik Fadjar

39

Undang-Undang Bahasa Sebagai Sarana Pemantapan Politik
Bahasa Nasional

Harimurti Kridalaksana

49

Sanksi terhadap Pelanggaran Bahasa
Koesnadi Hardjosoemantri

56

Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional
Harkristuti Harkrisnowo

68

Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Pendukung Pengembangan
Aplikasi Teknologi Bahasa
Arry Akhmad Arman

80

Bahasa Indonesia Diterjang Pengglobalan: *What to be Done?*
Hernowo

98

Membangun Suasana Demokratis dalam Pendidikan Sastra di Sekolah
Yus Rusyana

109

Institusi Keagamaan sebagai Sarana Pembinaan Bahasa Indonesia
Yunan Yusuf

SIDANG KELOMPOK

115

Pembalikan Pergeseran Bahasa Daerah untuk Memperkukuh
Ketahanan Budaya
Asim Gunarwan

133

Pemekaran Fungsi Bahasa Daerah demi Ketahanan Budaya Bangsa
Aron Meko Mbete

155

Masa Depan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah
Abdul Wahab

171

Revitalisasi Bahasa Daerah Bali di Tengah Persaingan Bahasa Indonesia,
Daerah, dan Asing untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya
Ida Bagus Putra Yadnya

188

Mengkaji Aspek Prosodik Bahasa-Bahasa di Indonesia
Sugiyono

202

Perencanaan dan Praktis Bahasa di Singapura
dalam Menghadapi Globalisasi
Kamsiah Abdullah

225

Peranan Guru dalam meningkatkan Kemahiran Berbahasa Indonesia Siswa
Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi
Sarwidji Suwandi

239

Mencari Model Penutur Bahasa Indonesia: Guru, Birokrat, Jurnalis
C. Ruddyanto

254

Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia
Helena Agustin

271

Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Asing Non-Inggris:
Khususnya Bahasa Mandarin
Hermina Sutami

292

Perkembangan Bahasa Indonesia dari Aspek Teori Linguistik
Hein Steinhauer

303

Kualitas Laras Bahasa Hukum Berikut Kesalahkaprahannya
Yayah B. Lumintaintang

333

Perkukuh Budaya Bangsa dengan Memantapkan Peran Bahasa Daerah
I Wayan Bawa

343

Reaktualisasi Peran Bahasa Indonesia dalam Konteks Lokalisasi
dan Globalisasi

Widada

355

Surat Melayu Beriluminasi sebagai Sumber Kajian Interdisipliner

Mu'jizah

368

Ajaran dalam Buku-Buku *Niti* untuk Wanita
sebagai Kontrol Pengembangan Feminisme dalam Masyarakat

Sri Widati

384

Multikulturalisme Sastra Indonesia Modern Memanfaatkan Peran Sastra
Indonesia Modern dalam Menghadapi Budaya Global

Puji Santosa

402

Puisi dan Kesadaran Berbangsa: Indonesia sebagai Malin Kundang

Jamal D. Rahman

418

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran
Bahasa Indonesia

Paulina Pannen, M. Yunus, Teguh Prakoso

432

Sastra Indonesia dan Multimedia

Medi Lukito

447

Kelangsungan Hidup Bahasa Melayu dan Penguatan Ketahanan
Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi

Dato' A. Azis Deraman

470

Kesetaraan Perlakuan
Bambang Kaswanti Purwo

485

Pemanfaatan Permainan Bahasa sebagai Bahan Pengajaran Bahasa dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pengajaran Ilmu Bahasa di Indonesia

I Dewa Putu Wijana

503

"Ketoprak Komedi" di TVRI Jawa Tengah
(Upaya Media Elektronika di Daerah dalam Memelihara Bahasa dan Budaya Daerah)

Gunoto Saparie

517

Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia di Italia

Faizah Sunoto Rivai

546

Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia: Keadaannya Sekarang dan Prospek Masa Datang

Ismet Fanany

567

Peningkatan Mutu Pengajaran di Beijing

Huang Cheng Fang

583

Perkembangan dan Pengembangan Peristilahan Bahasa Indonesia di Bawah Lembaga-Lembaga Resmi Kebahasaan

Jerome Samuel

590

Khazanah Kamus-Kamus Indonesia dan Melayu di Rusia

Victor A. Pogadev/Damindjuk

601

ICT dan Pengajaran Bahasa Indonesia di Dalam dan Luar Negara

Paitoon M. Chaianara

623

Peningkatan Mutu Kemampuan Berbahasa Indonesia melalui Ujian Kemampuan Bahasa Indonesia: Kasus di Jepang

Yumi Kondo

634

Kesan Seorang Penutur Asing Bahasa Indonesia
tentang Ragam Tulis "Asal Jadi Saja"

Bruce F. Jarvis

655

Pengembangan Bahasa Indonesia di Suriname

Roesman Darmohoetomo

664

Pengajaran BIPA di Indonesia

Fuad Abdul Hamied

676

Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Pembelajaran EFL:
Dapatkah Terwujud di Sekolah Kita?

Chuzaimah Dahlan Diem

690

Peran Media Massa Elektronik
dalam Meningkatkan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia di Era Reformasi

Parni Hadi

699

Peranan Media Massa Cetak dalam Peningkatan Mutu Penggunaan
Bahasa Indonesia

Tarman Azzam

707

Bahasa Media Massa: Laras Bahasa Jurnalistik yang Perlu Dikembangkan

Mulyadi Eko Purnomo

729

Mengkaji Ulang Peran Media Massa dalam Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa Indonesia

Kasmansyah

744

Bahasa Indonesia dalam Editorial Media Indonesia

Yusrita Yanti

768

Ketersediaan, Kebermanfaatan dan Kebermaknaan Bahasa Minangkabau dalam Media Surat Kabar, Radio, dan Televisi di Padang, Sumatera Barat dalam memelihara Bahasa dan Budaya Minangkabau

M. Zaim

781

Peran Media Massa dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa melalui Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar: Pemberdayaan Ragam Bahasa Indonesia

Imelda Yance

791

Bahasa Indonesia, Industri Budaya Populer, dan Televisi

Garin Nugroho

793

Penyakit Menular Sok-Inggris dalam Bahasa Indonesia

Remy Silado

SIDANG PANEL

807

Topik 1:

Masalah Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Dunia Pendidikan

Suminto A. Sayuti, Suparno,

Satriyo Sumantri Brojonegoro, Indra Djati Sidi

826

Topik 2:

Peran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa

Oentarto Sindung Mawardi, Benyamin Lakitan,

Muhammad Adnan Tiro, Robert Sibarani

874

Topik 3:

Bahasa Indonesia sebagai Sarana Administrasi Negara dan Kegiatan Kenegaraan

Anwar Supriadi, D.P. Tampubolon, Dendy Sugono

912

Topik 4:

Peran Media Massa di Daerah dalam Memelihara Bahasa
dan Budaya Daerah

**Darlis Sofyan (Yus Rusyana), Sofyan Harahap,
Arwan Tuti Artha, M. Hoesni Thamrin**

952

Topik 5:

Peran Organisasi Kebahasaan dan Kesastraan dalam Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa

**Sumardi, Soenjono Dardjowodjojo,
Riris K. Toha Sarumpaet, T.D. Asmadi**

965

Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII

973

Laporan Kepala Pusat Bahasa
dalam Penutupan Kongres Bahasa Indonesia VIII

975

Sambutan Menteri Pendidikan Nasional
dalam Penutupan Kongres Bahasa Indonesia VIII

LAMPIRAN

977

Daftar Pemakalah Dalam dan Luar Negeri

980

Daftar Peserta Dalam dan Luar Negeri

1005

Panitia Penyelenggara

LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA VII

Dendy Sugono

Kepala Pusat Bahasa selaku Ketua Panitia Penyelenggara
Kongres Bahasa Indonesia VIII

Berbagai perubahan telah terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik sebagai akibat globalisasi maupun reformasi. Pada saat berbicara tentang globalisasi, orang berpikir tentang jati diri sebuah bangsa. Dalam kondisi seperti itu peran bahasa menjadi strategis karena bahasa menjadi salah satu lambang jati diri bangsa.

Setelah reformasi sistem pemerintahan yang dahulu sentralistik kini menuju desentralistik. Masyarakat yang dahulu menjadi sasaran pembangunan kini didorong menjadi pelaku dalam pembangunan bangsa. Di sisi lain rasa persatuan dan kesatuan tergoyahkan dan perilaku masyarakat pun mengalami perubahan. Dalam kondisi seperti itu, bahasa perlu didorong untuk kembali memainkan peran sebagai alat pemersatu bangsa dan sarana pemelihara kesatuan negara, sebagaimana amanat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Dalam menyongsong peringatan 75 tahun Sumpah Pemuda, Pusat Bahasa menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VIII dengan tema “Bahasa Indonesia memperkuat ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi”. Tema itu diharapkan dapat merangsang berbagai pemikiran yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut melalui perbincangan bahasa, sastra, dan media massa. Meskipun demikian, Kongres Bahasa Indonesia VIII ini memiliki benang merah yang amat erat bertalian dengan kongres sebelumnya. Sehubungan dengan itu, pada awal persidangan ini saya, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, menyampaikan laporan pelaksanaan putusan Kongres Bahasa Indonesia VII yang diselenggarakan tanggal 26—30 Oktober 1998 di hotel ini.

Dalam putusan Kongres Bahasa Indonesia VII ada tiga masalah pokok, yaitu (1) masalah kedudukan dan fungsi bahasa, (2) peningkatan mutu bahasa sebagai sarana komunikasi, dan (3) peningkatan mutu apresiasi serta daya cipta sastra. Selain ketiga masalah pokok itu, Kongres Bahasa Indonesia VII memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti putusan kongres itu. Berikut saya sampaikan laporan pelaksanaan putusan Kongres Bahasa Indonesia VII.

1. Kedudukan Bahasa dalam Era Globalisasi

Untuk memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta memperjelas kedudukan bahasa asing di Indonesia,

Kongres Bahasa Indonesia VII memutuskan perlunya dipersiapkan dan dilakukan tindak lanjut yang terpadu dan terarah mengenai enam hal di bawah ini.

a. **Bahasa Indonesia**

Ada tujuh butir tindak lanjut yang perlu direalisasi dalam upaya memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam pelaksanaan selama lima tahun ini telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut.

- 1) Pembinaan Bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini Departemen Pendidikan Nasional), tetapi juga oleh departemen/instansi lain serta organisasi profesi dan dunia usaha. Dalam hubungan dengan itu, telah dilakukan rapat koordinasi yang menghadirkan wakil pemerintah provinsi (para asisten yang membidangi bahasa/kebudayaan), ketua Bappeda, ketua DPRD, kepala Balai/Kantor Bahasa, serta para koordinator pemasyarakatan bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia. Atas kesepakatan rapat koordinasi itu pula, pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia, sebagai salah satu usaha pembinaan bahasa Indonesia, tidak hanya di tingkat ibukota provinsi, tetapi harus menjangkau kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu, telah dilakukan penyuluhan ke berbagai instansi pemerintah di Jakarta dan di luar Jakarta. Selain instansi pemerintah, dengan pihak swasta pun telah dilakukan kerja sama dalam upaya peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia. Di samping organisasi profesi kebahasaan dan ke-sastraan, kerja sama telah dilakukan dengan Ikatan Notaris Indonesia dalam upaya peningkatan mutu bahasa akta notaris.
- 2) Pengindonesiaan nama dan kata asing telah dilanjutkan ke seluruh ibukota provinsi melalui Balai/Kantor Bahasa dan para koordinator. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala karena ada anggapan masyarakat bahwa reformasi adalah kebebasan, termasuk kebebasan dalam penggunaan bahasa oleh masyarakat. Untuk itu, Pusat Bahasa mengambil langkah penyediaan berbagai buku pedoman atau petunjuk penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Buku *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing* telah direvisi dan diterbitkan secara lebih meluas.
- 3) Ihwal pemanfaatan buku rujukan yang dipersiapkan dan/ atau diterbitkan Pusat Bahasa dalam pengembangan bahan ajar, se-saat lagi akan diluncurkan kamus pelajar sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas.

Selain kamus, diterbitkan pula Ensiklopedia Sastra Indonesia, Refleksi Sastra Indonesia, dan Sastra Melayu Lintas Daerah.

- 4) Dalam hubungan dengan peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia guru semua bidang studi di semua jenis dan jenjang pendidikan, telah dimulai penyuluhan para guru bidang studi nonbahasa Indonesia. Selain itu, telah dan akan ditingkatkan hubungan kerja sama Pusat Bahasa dengan perguruan tinggi penyelenggara tenaga kependidikan, antara lain telah ditandatangani piagam kerja sama Pusat Bahasa dengan Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Negeri Surabaya.
- 5) Peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia para pejabat dan tokoh masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyegaran penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar di ibukota provinsi, bahkan sampai ke ibukota kabupaten dan kota pada sejumlah provinsi. Dalam kaitan dengan keteladanan para pejabat dan tokoh tersebut, telah dilakukan pemilihan lima orang tokoh berbahasa Indonesia lisan terbaik, yaitu Soesilo Bambang Yudoyono, Eep Syaifullah, Noercholis Madjid, Yusril Ihza Mahendra, dan Prajoto. Mereka baru saja menerima penghargaan.
- 6) Peningkatan pemyarakatan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dilakukan melalui perluasan kerja sama Pusat Bahasa tidak hanya dengan gubernur, tetapi juga dengan bupati dan walikota di seluruh Indonesia. Untuk itu, telah dilakukan penandatanganan piagam kerja sama Pusat Bahasa dengan gubernur dan bupati/walikota di Sumatra Selatan, Lampung, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk memperluas jangkauan itu, Pusat Bahasa telah membentuk unit pelaksana teknis, yang bernama Balai Bahasa Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Jayapura, dan Kantor Bahasa Pontianak, Palangkaraya, Palu, dan Manado. Tahun ini empat kantor bahasa itu ditingkatkan statusnya menjadi balai bahasa dan tahun ini pula akan berdiri lima kantor bahasa Jambi, Lampung, Samarinda, Kendari, dan Mataram. Dengan demikian, pada tahun ini Pusat Bahasa memiliki 22 unit pelaksana teknis di 22 provinsi dan pada tahun depan diupayakan pendirian tujuh unit pelaksana teknis di provinsi yang belum memiliki Balai/ Kantor Bahasa.
- 7) Penghargaan terhadap tokoh yang berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, khususnya dalam kerja sama

Mejelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim), telah diberikan kepada

- a. Tokoh Perintis Mabbim
- b. Tokoh Pakar Bidang Ilmu
- c. Ahli Mabbim
- d. Sekretariat Mabbim

Penghargaan kepada stasiun televisi yang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dalam pemberitaan telah diberikan kepada TVRI, RCTI, dan SCTV, dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra 2002.

b. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

Ada tiga butir tindak lanjut bidang pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing yang telah direalisasi sebagai berikut.

- 1) Pengajaran dan pemasyarakatan bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara BIPA dan Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing
- 2) Pemasyarakatan ke luar negeri dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Departemen Luar Negeri. Dalam rangka pengembangan program, bahan ajar, dan metodologi telah dilakukan Konferensi Internasional Bahasa Indonesia untuk orang asing Oktober 2001 di Denpasar, Bali, bekerja sama dengan IALF. Konferensi yang sama akan diadakan tahun 2004 di Makassar bekerja sama dengan Universitas Negeri Makassar.
- 3) Kantor perwakilan RI di luar negeri, melalui kerja sama dengan Departemen Luar Negeri dan Atase Pendidikan, telah mulai aktif memasyarakatkan BIPA, seperti di Australia, Papua Nugini, Jepang, Jerman, Suriname, dan beberapa negara di Timur Tengah.

c. Bahasa Daerah

Empat butir tindak lanjut pembinaan dan pengembangan bahasa daerah telah direalisasi sebagai berikut.

- 1) Dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia agar lebih terencana, telah diselenggarakan Konferensi Bahasa Daerah pada tahun 2000 di Jakarta yang menghadirkan wakil dari pemerintah di

daerah di samping pakar bahasa dan sastra. Hasil konferensi itu telah diterbitkan.

- 2) Usaha menggiatkan dan mendorong penerbitan buku, surat kabar, dan majalah dilakukan melalui imbauan dan pemberian izin penerbitan kembali hasil penelitian Pusat Bahasa oleh beberapa pemerintah di daerah.
- 3) Pemanfaatan sumber rujukan terbitan Pusat Bahasa dalam penyusunan bahan ajar muatan lokal pengajaran bahasa daerah dilakukan melalui penerbitan kembali kamus bahasa daerah oleh Pusat Bahasa (bersama penerbit) ataupun oleh pemerintah daerah. Di samping itu, telah dirintis penyusunan model muatan lokal pengajaran bahasa daerah (Aceh, Batak Toba, Dayak Ngaju, dan bahasa Mandar), bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan (dahulu) dan pemerintah di daerah serta rencana melanjutkan rintisan tersebut, bekerja sama dengan Asosiasi Tradisi Lisan.
- 4) Ihwal pemberian penghargaan oleh pemerintah kepada tokoh yang telah berjasa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah *belum terlaksana*.

d. Bahasa Asing

Ada empat butir tindak lanjut yang bertalian dengan penguasaan bahasa asing dan realisasi keempat butir tindak lanjut itu sebagai berikut.

- 1) Dalam upaya peningkatan kemampuan peserta didik berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, telah dan sedang dilakukan peninjauan kembali Kurikulum 1994 dan dirancang kurikulum baru yang dikenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi oleh Pusat Kurikulum dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta pengadaan laboratorium bahasa di sekolah-sekolah menengah.
- 2) Pemberian kemudahan dalam upaya peningkatan mutu pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, jalur luar sekolah *belum dilakukan* walaupun telah ada usaha ke arah itu.
- 3) Pengembangan sarana, prasarana, dan ketenagaan pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di perguruan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 4) Penggalakan penerjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia telah dimulai kegiatan penerjemahan di Pusat Bahasa,

sekalipun belum dalam skala besar, dan rintisan kerja sama dengan Himpunan Penerjemah Indonesia.

e. Organisasi Profesi

Empat butir tindak lanjut yang berkaitan dengan organisasi profesi terealisasi sebagai berikut.

- 1) Dalam hubungan dengan keterlibatan organisasi profesi, termasuk organisasi kebahasaan, dan dunia usaha dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, organisasi profesi kebahasaan dan kesastraan telah mengambil peran dalam penyelenggaraan pertemuan secara berkala (tahunan, dua tahunan, dan tiga tahunan) dalam upaya pembahasan masalah kebahasaan dan kesastraan serta peningkatan tenaga kebahasaan dan kesastraan.
- 2) Pusat Bahasa telah meningkatkan hubungan kerja sama dengan organisasi kebahasaan dalam penyelenggaraan seminar kebahasaan dan kesastraan. Dengan Ikatan Notaris Indonesia, telah dilakukan penandatanganan piagam kerja sama dan akan dilakukan pembenahan bahasa di kalangan notaris.
- 3) Dalam upaya pengembangan organisasi profesi bidang pengajaran bahasa, telah dibentuk Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APBIPA) pada tahun 1999 di Bandung, sedangkan organisasi dosen bahasa Indonesia telah dibentuk pada tahun 2002 di Jakarta yang disebut Forum Komunikasi Dosen Bahasa Indonesia (FKDBI) dan organisasi pengajar bahasa Indonesia di sekolah lanjutan telah ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekalipun kini ada yang tidak aktif.
- 4) Dalam upaya peningkatan hubungan kerja sama dengan organisasi bidang kewartawanan, telah lahir Forum Bahasa Media Massa pada tahun 2003 yang melakukan diskusi masalah bahasa media massa cetak dan elektronik setiap bulan.

f. Pemerintah Daerah

Tiga butir tindak lanjut yang bertalian dengan peran pemerintah daerah terealisasi sebagai berikut.

- 1) Peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah sudah memperlihatkan kemajuan dengan telah ditandatanganinya piagam kerja sama sejumlah gubernur dan bupati/walikota, tetapi *belum semua gubernur dan bupati/walikota melakukan hal itu.*

- 2) Keterlibatan ahli bahasa di daerah dalam pembinaan bahasa Indonesia di lingkungan pemerintah daerah belum maksimal sekalipun sudah ada pemerintah daerah yang telah memanfaatkan ahli bahasa di daerah dalam peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia.
- 3) Pemerintah daerah *belum membuka peluang para sarjana bahasa daerah*, kecuali peluang kerja di Balai/Kantor Bahasa, unit pelaksana teknis Pusat Bahasa, di daerah sejak 1999 yang lalu, bahkan dua tahun terakhir telah diterima sekitar 180 pegawai negeri sipil di unit pelaksana teknis tersebut.

2. **Peningkatan Mutu Bahasa sebagai Sarana Komunikasi**

Ada sembilan rumusan tindak lanjut dalam upaya peningkatan mutu bahasa sebagai sarana komunikasi. Kesembilan butir tindak lanjut itu realisasinya sebagai berikut.

- a. Pengembangan peristilahan dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi dilakukan melalui peningkatan kerja sama kebahasaan Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang kini telah dihasilkan sekitar 265.000 istilah dalam berbagai bidang ilmu. Perkembangan kosakata tergambar pada kamus bahasa Indonesia, kini dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* telah tercatat sekitar 78.000 lema/sublema.
- b. Ihwal penggunaan eufemisme untuk menutupi kenyataan negatif ataupun untuk kesopansantunan dikampanyekan melalui pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar.
- c. Peningkatan mutu pengajaran bahasa yang lebih menekankan pada keterampilan berbahasa dan kemampuan mengapresiasi sastra dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum yang kembali menekankan ihwal keterampilan berbahasa Indonesia dan kemampuan apresiasi sastra Indonesia.
- d. Ihwal penerapan kaidah bahasa baku dalam penyusunan buku ajar telah ditingkatkan hubungan kerja sama dengan Pusat Perbukuan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan penilaian buku-buku ajar dari aspek penggunaan bahasa Indonesia. Adapun dalam penyusunan instrumen evaluasi telah dirintis hubungan kerja sama dengan Pusat Pengujian, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- e. Tentang penguasaan bahasa baku sebagai syarat utama dalam kepegawaian (penerimaan, penempatan, kenaikan pangkat, dan sebagainya) telah disiapkan sarana Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dan telah dilakukan pendekatan-pendekatan kerja sama

dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahkan sebagai syarat tenaga kerja asing di Indonesia.

- f. Di samping *Tata Bahasa Baku* dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* telah disusun dan diterbitkan, akan diluncurkan sebentar lagi, *Kamus Bahasa Indonesia sekolah Dasar*, *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, dan *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas*. Sementara itu, tata bahasa sekolah sudah disusun masih dalam bentuk naskah.
- g. Penelitian laras bahasa telah dan sedang dilakukan di sejumlah wilayah untuk keperluan penyusunan buku penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai laras bahasa.
- h. Ihwal penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan norma sosial budaya dan berkonotasi vulgar pada iklan, masih *belum ditemukan jalan yang strategis untuk mengatasi itu*, bahkan kini penggunaan bahasa dalam iklan makin memprihatinkan.
- i. Buku-buku pedoman penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar terbitan Pusat Bahasa telah dikaji kembali disesuaikan dengan tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dalam era global. Untuk itu, telah direvisi *Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 1, Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing*, telah disusun *Buku Praktis Bahasa Indonesia 2*, dan glosarium yang memuat istilah bidang ilmu dalam bahasa Inggris dengan padanan bahasa Indonesia.

3. Peningkatan Apresiasi dan Daya Cipta Sastra

Rumusan tindak lanjut yang berkaitan dengan peningkatan apresiasi dan daya cipta sastra telah diupayakan realisasinya sebagai berikut.

a. Peningkatan Apresiasi Sastra

Lima rumusan tindak lanjut dalam hubungan dengan peningkatan apresiasi sastra telah dilakukan upaya sebagai berikut.

- 1) Peningkatan mutu pengajaran sastra melalui upaya memperbanyak kegiatan membaca dan membahas karya-karya sastra serta memperbanyak latihan menulis karya sastra di sekolah-sekolah telah dilakukan Taufiq Ismail dan kawan-kawan sastra-wan. Dalam hubungan dengan penyediaan sarana belajar, Taufiq Ismail dan kawan-kawan juga telah menyebarkan buku sastra ke sekolah-sekolah. Sementara itu, Pusat Bahasa pun sedang menyiapkan distribusi buku yang lain ke sekolah. Ihwal pelajaran sastra sebagai *mata pelajaran otonom belum dapat ditindaklanjuti*

karena kurikulum yang kini berlaku dan kurikulum yang akan berlaku pun menggunakan pendekatan integratif.

- 2) Dalam hal dukungan dan penggiatan penerbitan buku sastra Indonesia dan daerah, telah dilakukan penerjemahan dan penyaduran serta penerbitan buku-buku cerita rakyat hasil penelitian dan hasil sayembara penulisan karya sastra di kalangan anak-anak dan remaja.
- 3) Ihwal perpustakaan yang memiliki buku sastra Indonesia dan daerah di seluruh pelosok tanah air *belum dapat direalisasi*, kecuali rencana distribusi buku ke sekolah-sekolah tahun depan.
- 4) Pelibatan sastrawan dalam pengembangan komunitas sastra Indonesia dan daerah telah dilakukan, antara lain dalam kegiatan bengkel sastra di daerah-daerah.
- 5) Penulisan kritik sastra sebagai jembatan karya sastra dan pembacanya, antara lain, telah dilakukan penelitian dan penyusunan *Refleksi Sastra Nusantara, Sastra Melayu Lintas Daerah, Ensiklopedia Sastra Indonesia Modern dan Puisi Indonesia Sebelum Kemerdekaan: Sebuah Catatan Awal*.

b. Peningkatan Daya Cipta Sastra

Delapan rumusan tindak lanjut yang berhubungan dengan peningkatan daya cipta sastra realisasinya sebagai berikut.

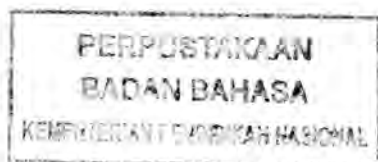
- 1) Kemudahan untuk memperluas wawasan sastrawan melalui keikutsertaan dalam forum internasional, antara lain, dilakukan dengan melibatkan sastrawan dalam pertemuan regional baik dalam rangka kerja sama Majelis Sastra Asia Tenggara maupun dalam forum lain.
- 2) Hambatan kebebasan berekspresi dan kebebasan penyebarluasan karya sastra telah teratasi oleh perubahan keadaan dalam alam reformasi.
- 3) Ihwal perlindungan hak cipta karya sastra kini telah ada Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- 4) Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh sastra yang berjasa dalam pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia telah dilakukan pemberian penghargaan kepada tiga orang sastrawan setiap tahun pada kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra, penghargaan dari negara Thailand (SEA Write Award), hadiah sastra Mastera dari Malaysia, serta Anugerah Mastera dari Brunei Darussalam dalam kerangka kerja sama sastra Asia Tenggara.

- 5) Ihwal penerbitan karya sastra terpilih dari komunitas sastra di berbagai daerah sebagian telah dilakukan oleh masyarakat sekali-pun *belum terkoordinasi*.
- 6) Karya sastra yang terbit di media cetak telah mulai diteliti, tetapi belum sampai ke penerbitan dalam bentuk antologi.
- 7) Penerjemahan karya sastra Indonesia dalam upaya lebih mem-perkenalkan karya sastra Indonesia ke forum internasional telah dilakukan para sastrawan, sekalipun masih amat terbatas.
- 8) Penerjemahan karya sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia telah dilakukan pada cerita rakyat, belum sampai ke sastra modern

4. Rekomendasi

Dalam hubungan dengan masih ada putusan Kongres Bahasa Indonesia VI yang belum atau sedang ditindaklanjuti dan dalam upaya menindak-lanjuti putusan Kongres Bahasa Indonesia VII, Kongres Bahasa Indonesia VII memberikan lima butir rekomendasi. Kelima butir rekomendasi itu telah ditindaklanjuti sebagai berikut.

- a. Putusan Kongres Bahasa Indonesia VI yang belum terealisasi ialah (1) terbentuknya undang-undang kebahasaan dan (2) peningkatan status Pusat Bahasa menjadi lembaga nondepartemen dengan nama Lembaga Kebahasaan Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Upaya ke arah itu telah dilakukan melalui pengem-bangan cakupan tugas dan fungsi Pusat Bahasa serta pengembangan ketenagaan serta pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/O/2002 tahun 2002.
- b. Pertemuan nasional untuk mengembangkan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 dalam rangka penyusunan kebijakan nasional yang lebih mutakhir dan menyeluruh di bidang bahasa dan sastra telah dilakukan Seminar Politik Bahasa tahun 1999 dan hasilnya pun telah diterbitkan.
- c. Pertemuan nasional untuk membahas strategi pembinaan bahasa dan sastra Indonesia telah dilakukan setiap tahun dalam bentuk Rapat Koordinasi Pemasarakatan Bahasa Indonesia yang dihadiri oleh wakil pemerintah provinsi, Bappeda, dan DPRD, serta Kepala Balai/Kantor Bahasa dan Koordinator Pemasarakatan Bahasa Indo-nesia serta Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Bahasa. Dalam hubungan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra



daerah telah dilakukan Koferensi Bahasa Daerah sebagaimana saya sampaikan dibagian depan laporan ini.

- d. Pengembangan lebih lanjut terbitan Pusat Bahasa telah dilakukan melalui peninjauan *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* yang telah dibahas bersama Malaysia dan Brunei Darussalam September 2003 di Pulau Langkawi, Malaysia, dan kini akan memasuki tahap cetak terbatas. Dalam hubungan dengan pengembangan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (1998)* telah dan sedang dilakukan penyusunan ke tata bahasa yang lebih praktis untuk pendidikan. Di samping itu, terus dilakukan penelitian untuk penyempurnaan tata bahasa tersebut. Mengenai kamus, telah dilakukan revisi *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan diterbitkan sebagai edisi ketiga tahun 2001. Kamus itu mengalami perbaikan, baik mengenai ketaatan pada lema, sublema, label, definisi, maupun penambahan lema baru.
- e. Dalam hubungan dengan penyebarluasan hasil terbitan Pusat Bahasa di pasar bebas, telah dilakukan penerbitan kembali buku, kamus, glosarium, pedoman, dan sebagainya, yang sebentar lagi sebagian akan diluncurkan dan sudah dapat diperoleh di toko-toko buku.

Dalam rangka penciptaan iklim berkarya telah dilakukan sayembara penulisan puisi, cerita pendek bagi pelajar/mahasiswa, penulisan pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra bagi guru. Dalam hubungan dengan peningkatan apresiasi sastra, telah dan terus dilakukan kegiatan bersastra, seperti festival musikalisasi puisi ataupun penyelenggaraan bengkel sastra yang para pemenangnya diundang dalam kongres ini.

Dalam rangka penyebarluasan hasil penelitian dan penyusunan telah diterbitkan sejumlah buku yang sebagian akan diluncurkan sebentar lagi. Dalam upaya peningkatan pelayanan kebahasaan dan kesastraan dalam kongres ini digelar pameran yang sebentar lagi akan diresmikan pembukaannya. Untuk itu, pada saatnya nanti Bapak A. Malik Fadjar, Menteri Pendidikan Nasional, kami mohon memberikan piagam penghargaan kepada para pemenang sayembara kebahasaan dan kesastraan, meluncurkan terbitan sejumlah buku, dan membuka Pameran Kebahasaan dan Kesastraan.

Terima kasih.

Jakarta, 14 Oktober 2003

LAPORAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KEPADA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM KONGRES BAHASA INDONESIA VIII
DI HOTEL INDONESIA
Jakarta, 14 Oktober 2003

Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia yang diwakili Bapak
Yusuf Kalla, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Jenderal MPR dan DPR
Yang mulia para duta besar negara sahabat,
Yang berbahagia para pencinta bahasa Indonesia,

Assalamualaikum w.w.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini untuk secara bersama-sama mengikuti upacara pembukaan Kongres Bahasa Indonesia VIII yang akbar di tempat yang mulia ini dalam rangka menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tujuh puluh lima tahun yang lalu, 28 Oktober 1928, para pemuda pejuang bangsa untuk pertama kalinya mengikrarkan sumpah suci yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan kebangsaan kita yang, antara lain, dimotori oleh Muhammad Yamin. Sepuluh tahun kemudian (1938) diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Selanjutnya, 16 tahun kemudian pada bulan yang sama atau 49 tahun yang lalu pemuda Yamin telah menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan melaporkan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia II kepada Presiden Soekarno pada pembukaan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Setelah di Medan, penyelenggaraan Kongres baru dapat dilakukan pada 28 Oktober 1978, bertepatan dengan 50 tahun Sumpah Pemuda dengan peserta 419 orang. Sejak itu Kongres Bahasa Indonesia selalu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan hingga kini penyelenggaraannya sudah mencapai bilangan ke delapan. Peserta kongres sejak yang pertama sampai dengan yang sekarang terus-menerus meningkat sebagai bukti bahwa sebagian dari kita masih memiliki perhatian yang besar terhadap bahasa nasional.

Perhatian yang amat besar terhadap bahasa nasional itu tentulah sangat membesarkan hati mengingat dalam era globalisasi sekarang ini pengaruh bahasa asing khususnya bahasa Inggris amat besar. Kalau besarnya perhatian khalayak akan Kongres Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai bukti masih besarnya kecintaan masyarakat kita kepada bahasa

Indonesia, kita tidak perlu cemas akan masa depan bahasa nasional kita itu. Memang, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini makin terasa kuatnya pengaruh bahasa asing dalam pemakaian bahasa kita sehari-hari sehingga tidak sedikit di antara kita yang sangsi akan ketahanan bahasa nasional kita itu. Oleh karena itu, sebagai wujud perhatian pemerintah, penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia VIII sangat tepat.

Selanjutnya, dalam forum ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan Kongres sebagai berikut.

1. Kongres Bahasa Indonesia VIII yang bertema "Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi" ini merupakan kongres yang pertama kali diadakan dalam abad ke-21 yang penentuan pesertanya amat memperhatikan aspirasi daerah.
2. Peserta kongres terdiri atas pejabat, tokoh, pakar, budayawan, ilmuwan, sastrawan, dosen, guru, dan pencinta bahasa Indonesia yang datang dari berbagai pelosok tanah air dan kota-kota besar dunia yang negaranya menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia. Kalau peserta Kongres Bahasa Indonesia I dan II antara 200 dan 300 orang, Kongres Bahasa Indonesia VII 850 orang, Kongres Bahasa Indonesia VIII mencapai 1.047 orang, bahkan masih banyak peminat yang terpaksa tidak mendapatkan tempat. Besarnya minat masyarakat terhadap kongres ini menggambarkan begitu besar perhatian masyarakat terhadap masalah bahasa dan sastra serta media massa.
3. Pemakalah kongres terdiri atas 63 orang dari dalam negeri dan 18 orang dari luar negeri. Dari jumlah itu, di antaranya terdapat pemakalah swakarsa (atas inisiatif sendiri) yang berasal dari dalam dan luar negeri.
4. Dalam acara pembukaan ini akan diserahkan penghargaan kepada tokoh berbahasa Indonesia lisan terbaik, sastrawan, pemenang sayembara mengarang cerpen remaja, pemenang sayembara mengarang puisi SLTP, serta guru pemenang sayembara pembelajaran bahasa dan guru pemenang sayembara pembelajaran sastra, serta guru pemenang sayembara menulis cerpen dan mengulas novel. Pelaksanaan kegiatan itu di bawah koordinasi Departemen Pendidikan Nasional.
5. Pada kesempatan pembukaan kongres ini akan diluncurkan terbitan buku kebahasaan dan kesastraan yang berupa *Kamus Pelajar SD, SLTP, dan SLTA, Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani, Ensiklopedia Sastra Indonesia Modern, Adab dan Adat: Refleksi Sastra Nusantara, Adakah Bangsa dalam Sastra?, Puisi Indonesia Sebelum Kemerdekaan: Sebuah Catatan Awal*, dan beberapa buku lainnya. Di samping itu, selama Kongres berlangsung akan diadakan Pameran Buku Kebahasaan dan Kesastraan.

6. Kongres Bahasa Indonesia VIII ini merupakan forum peninjauan kembali apa yang telah dilakukan selama lima tahun dan pembahasan berbagai masalah kebahasaan dan kesastraan serta sumbangan media massa dalam merumuskan kebijakan nasional pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra.
7. Melalui forum ini, saya mohon kesediaan Bapak Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan penghargaan dan menyampaikan sambutan Wakil Presiden sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia VIII dan pameran buku.

Terima kasih.

Wassalamualaikum w.w.

Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc.

**SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA PERESMIAN PEMBUKAAN KONGRES BAHASA INDONESIA VIII
(Diwakili Oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat)
Jakarta, 14 Oktober 2003**

1. Dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa, bahasa Indonesia telah memainkan peran politis dalam menumbuhkan dan menggalang persatuan dan kesatuan untuk membangun satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan, Indonesia (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928).
2. Proklamasi kemerdekaan itu dinyatakan dalam bahasa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pun ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia meningkat statusnya, tidak hanya sebagai bahasa persatuan, tetapi berkedudukan sebagai bahasa negara (UUD 1945 Pasal 36).
3. Kebinekaan potensi alam, lingkungan, sosial, budaya, dan bahasa daerah merupakan kekayaan budaya yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara, tetapi dapat juga menimbulkan gejala disintegrasi bangsa. Dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa, bahasa Indonesia mampu memainkan peran sebagai penggalang dan perekat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kini kebinekaan sebagai kekayaan bangsa itu perlu terus dilestarikan melalui penanaman sikap apresiatif terhadap kebhinekaan itu sehingga terjadi saling menghargai yang pada akhirnya tergalang persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Tatanan kehidupan dunia telah berubah, globalisasi yang ditandai dengan pemberlakuan pasar bebas--yang akan dimulai tahun 2010 untuk kawasan Asia Pasifik dan 2020 secara keseluruhan--akan meningkatkan arus barang dan jasa serta tenaga kerja di wilayah Indonesia. Kondisi itu akan membawa pengaruh pada perilaku masyarakat dalam bertindak dan berbahasa, antara lain timbulnya kecenderungan penggunaan bahasa asing dalam berbagai bidang kehidupan.
5. Dalam persiapan perdagangan bebas masuknya pelaku bidang perdagangan dan jasa dari luar negeri perlu dipersiapkan regulasi domestik antara lain, standar kemampuan berbahasa Indonesia supaya komunikasi dalam perdagangan bebas di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, berbagai pihak yang terkait dengan perdagangan bebas dalam kerangka WTO perlu berkoordinasi dalam penentuan standar kompetensi bahasa. Oleh karena itu, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia harus terus dikembangkan dan diproses pembakuannya dalam upaya meningkatkan citra bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional

dan bahasa negara yang disegani masyarakat luas baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.

6. Kemajuan teknologi informasi telah membuka batas wilayah negara dan bangsa. Melalui teknologi informasi ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi secara langsung. Dalam kondisi itu secara tidak langsung telah terjadi kontak budaya antarbangsa. Unsur-unsur budaya yang masuk lewat teknologi ini ada yang memacu kemajuan budaya bangsa, tetapi ada pula yang tidak sejalan dengan budaya bangsa, terutama dampak bagi generasi muda. Gejala itu tidak dapat dibendung dan dikontrol.
7. Dalam menghadapi persaingan global dan pembangunan ketahanan budaya yang tangguh, perlu dilakukan peningkatan mutu sumber daya manusia muda yang unggul melalui dunia pendidikan. Mutu pendidikan ditingkatkan melalui peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia karena penguasaan bahasa Indonesia menjadi kunci keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, perlu dirancang sistem pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan dengan memperhatikan asas manfaat dan daya pikat.
8. Dalam dinamika kehidupan global, bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan identitas. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bendera Merah Putih, Bahasa Negara, Lagu Kebangsaan, Lambang Negara, dan Kebinekaan harus selalu diaktualisasikan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengenai bahasa Indonesia, demi memantapkan peran dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional ataupun sebagai bahasa negara, lambang identitas bangsa itu perlu terus diupayakan pengembangannya sebagai bahasa modern agar tetap terpelihara citra dan martabatnya sebagai lambang kebanggaan nasional.
9. Reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum telah digulirkan sejak 1998, hampir seluruh lapisan masyarakat terlibat akan gerakan reformasi pada ketiga bidang itu. Namun, hampir-hampir orang kehilangan perhatian pada masalah bahasa, kalau ada justru akan melakukan reformasi terhadap tata cara atau aturan dalam berbahasa. Kebebasan yang dikumandangkan reformasi merambah pada kebebasan dalam berbahasa. Gejala itu tampak pada munculnya kembali penggunaan bahasa asing di tempat-tempat umum pada papan nama, petunjuk, iklan, dan kain rentang. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebagai alat berpikir, berekspresi, dan berkomunikasi yang merupakan jiwa bangsa Indonesia perlu terus diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan.

10. Kongres Bahasa Indonesia VIII yang menghadirkan tokoh, pakar, pemikir, pelaku pembangunan, dan masyarakat pencinta bahasa dan sastra dari dalam dan luar negeri ini harus dapat memberikan sejumlah alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang telah saya kemukakan tadi. Saya ingatkan kembali bahwa dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, terutama bagi generasi ke depan, saya telah men-canangkan Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2002 yang lalu. Oleh karena itu, Kongres ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sebagai upaya memantapkan peran bahasa Indonesia sebagai pemerkukuh ketahanan budaya bangsa.
11. Kongres ini diharapkan dapat merumuskan berbagai upaya dan langkah strategis dalam pemantapan peran bahasa Indonesia sebagai pemerkukuh ketahanan budaya bangsa dalam memasuki tatanan kehidupan dunia yang baru, globalisasi yang telah di ambang pintu.

LAPORAN KETUA BADAN PERTIMBANGAN BAHASA

Mien A. Rifai

Badan Pertimbangan Bahasa, Pusat Bahasa

Tujuh puluh lima tahun yang lalu, saat tanah air tercinta kita masih dikangkangi penjajah yang berkekuasaan mutlak, segelintir pelopor pendiri negara ini dengan semangat kepemudaannya secara lantang mencanangkan ke seluruh dunia "pengakuan" bahwa mereka bernegara dan berbangsa satu yaitu Indonesia, dan bahwa mereka "menjunjung" satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tujuh belas tahun kemudian pernyataan mereka menjadi terwujud dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, yang undang-undang dasarnya menyatakan dengan tegas bahwa bahasa negaranya adalah bahasa Indonesia. Tonggak-tonggak sejarah ini bakal terus ditulis dengan tinta emas dalam sejarah panjang perjuangan kita, yaitu kalau tekad bernegara dan berbangsa serta berbahasa satu itu betul-betul terjiwai, terhayati, dan teramalkan dengan sepenuh hati oleh kita semua, penduduk yang bertumpah darah di bumi Indonesia.

Tujuh puluh lima tahun hanyalah merupakan suatu penggal lintasan pendek dalam sejarah, apalagi karena pasang surut suatu negara sangat rentan terhadap pengaruh faktor luar yang terkadang tidak terlihat keterkaitan fisiknya secara langsung. Demam globalisasi yang sekarang melanda dunia karena kemajuan pesat teknologi informasi, telah menonjolkan peran ekonomi sebagai suatu faktor penting yang harus dicermati pengaruhnya terhadap perjalanan sejarah sesuatu negara di masa mendatang. Pengaruh ini semakin terkentara terutama bila dihubungkan dengan kepentingan makna kebangsaan yang terkait dengannya, seperti tersaksikan di negara-negara yang dulu tergabung dalam negara Yugoslavia dan Uni Soviet Rusia. Oleh karena itu, bergantung pada kitalah apakah Indonesia sebagai sebuah negara, dan juga Indonesia sebagai suatu bangsa, akan mudah terkena pengaruh global yang secara tidak disadari sekarang telah berada di tengah-tengah kita di sini ini.

Sejarah memerlihatkan bahwa saat ini bahasa Indonesia ternyata merupakan suatu pulau kestabilan yang berpotensi dapat menyelamatkan negara dan bangsa yang terombang-ambing oleh landaan dan gulungan ombak krisis bermultidimensi yang bernuansa globalisasi itu. Apa pun kritikan yang dilontarkan orang mengenai statusnya, betapa pun keluhan yang digerutukan orang tentang kelengaan upaya pemajuannya, bagaimana pun ketidakpedulian serta kemampuan pemakainya yang diduga telah dan akan mengganggu kelancaran pengembangannya, kepesatan kemajuan

bahasa Indonesia sebenarnya amatlah meyakinkan. Sesudah dijunjung sebagai bahasa persatuan selama tujuh puluh lima tahun lamanya, dari suatu bahasa yang semula tidak masuk hitungan dan diragukan kemampuannya, sekarang bahasa Indonesia telah menjadi medium yang dapat dipakai seluas-luasnya untuk mengomunikasikan apa saja, mulai dari sumpah serapah paling jorok sampai diseminasi ilmu angkasa luar atau bioteknologi beraras molekul atau atom terenik sekalipun. Sistem ejaannya telah dan terus dipermodern, tata bahasanya sejauh-jauhnya dicoba dibakukan, pembentukan istilahnya dilandasi pedoman yang tersusun secara dinamis sehingga pencendekiaan dan pemekarannya dimungkinkan dilakukan semaksimalnya. Sebagai akibatnya dalam kurun waktu kurang dari delapan dasawarsa khsanah kosakata bahasa Indonesia secara nyata telah meningkat hampir empat kali lipat, seperti dapat disaksikan dari edisi terakhir *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Adapun jumlah kosakatanya akan lebih menakjubkan lagi jika ratusan ribu istilah ilmiah yang telah disepakati oleh pakar, ilmuwan dan pandit di kawasan serantau diperhitungkan pula. Memang harus diakui bahwa jumlah kosakata besar tidak menjamin "kesehatan" sesuatu bahasa jika pemakaiannya tidaklah berdasarkan kecendekiaan dan ketaatan-asasan yang tinggi.

Kita harus berani secara jujur mengakui bahwa sejempit kemajuan yang terhitung pesat itu terjadi berkat berfungsinya suatu lembaga yang dibebani tanggung jawab untuk menanganinya, sekalipun penilaian sebagian orang terhadap lembaga itu untuk beberapa waktu mendatang mungkin akan terus bernada minor. Kita wajib berterima kasih kepada semua jajaran pimpinan dan staf serta karyawan Pusat Bahasa (serta lembaga-lembaga yang menjadi pendahulunya) atas segala jerih payah usahanya selama ini menjaga keterlaksanaan semua kemajuan yang telah dicapai bahasa Indonesia itu. Mereka telah menyumbangkan segenap kemampuan yang terkerahkannya, bekerja dalam keadaan serba terbatas baik daya maupun dana, bermitra dengan pesaing yang lebih tangguh, serta berkiprah di bawah naungan kepranataan yang mungkin dapat dianggap kurang menguntungkan sehingga sulit mengembangkan wibawanya.

Sekalipun kemajuan pengembangan bahasa Indonesia telah tersaksikan dan terekam, kita tidak boleh berpuas diri serta lalu berpangku tangan, sebab masih merupakan kewajiban mulia kita bersama untuk terus "menjunjung" bahasa persatuan kita itu. Apalagi karena dalam beberapa dasawarsa terakhir telah ditengarai terjadinya kekurangcermatan penggarisan kebijakan umum dan pemilihan strategi pembelajaran bahasa di Indonesia secara keseluruhan. Keadaannya memang agak memerihatinkan sehingga sulit untuk membantah kesimpulan seorang pengamat yang baru-baru ini secara tegas menyatakan bahwa "bahasa Indonesia orang Indonesia itu rusak, bahasa Inggrisnya gawat, dan bahasa daerahnya tidak karuan."

Menyadari pelbagai kekurangan yang dihadapi ini, dapatlah dimengerti jika salah satu putusan Kongres Bahasa Indonesia VI (1993) merekomendasikan agar dibentuk lembaga nondepartemen dengan nama Lembaga Kebahasaan Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena sampai dilaksanakannya Kongres Bahasa Indonesia VII masih ada putusan KBI VI yang terhutang, Kongres Bahasa Indonesia VII (1998) antara lain merekomendasikan agar putusan KBI VI yang belum tuntas dapat dilaksanakan, serta diselenggarakan pertemuan nasional untuk mengembangkan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975, disusun strategi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, disempurnakan pelbagai terbitan Pusat Bahasa, dan diupayakan penyebarluasannya lebih merata lagi. Untuk menopang pelaksanaan rekomendasi tersebut, KBI VII lebih lanjut mengusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa yang beranggotakan pakar bahasa dan sastra, tokoh masyarakat, dan pakar bidang lain yang memunyai minat dan perhatian terhadap bahasa dan sastra, serta diberi tugas khusus mengupayakan peningkatan status kelembagaan Pusat Bahasa, serta memberikan nasihat-baik diminta ataupun tidak diminta-kepada Pusat Bahasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, termasuk pelaksanaan putusan KBI VII.

Menanggapi rekomendasi KBI VII itu, dengan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 162/P/2002 tertanggal 15 Agustus 2002 dibentuklah Badan Pertimbangan Bahasa, sebagai suatu lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Mendiknas melalui Kepala Pusat Bahasa untuk masa bakti lima tahun 2002--2007 serta beranggotakan 18 orang. Sesuai dengan penugasannya, pada saat ini BPB memiliki Panitia Ad Hoc Kepranataan dan Panitia Ad Hoc RUU Kebahasaan serta suatu Badan Pekerja.

Dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII tahun 2003 ini dua makalah sidang pleno yang berkaitan dengan tugas Panitia Ad Hoc RUU Kebahasaan, yaitu makalah yang bertajuk "Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Kebahasaan" (dipersiapkan oleh Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana) dan "Sanksi terhadap Pelanggaran Bahasa" (dipersiapkan oleh Prof. Dr. Koesnadi Hardja-soemantri) akan disajikan. Kedua makalah tersebut kemudian akan dikembangkan sebagai cikal bakal naskah akademik penyusunan RUU Kebahasaan seperti direkomendasikan KBI VI, serta memang diperintahkan pula oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen tahun 2002. Untuk menampung berbagai pendapat dan keinginan masyarakat dalam rangka menemukan upaya dan langkah yang tepat guna meningkatkan status kelembagaan instansi yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan yang merupakan tugas Panitia Ad Hoc Kepranataan, sedang dipersiapkan suatu kuesiner peninjauan, yang antara lain akan dibagikan kepada sejumlah peserta KBI VIII ini.

Dalam beberapa kali pertemuannya, baik yang berupa Sidang Paripurna, Rapat Panitia Ad Hoc, maupun Rapat Badan Pekerja, Badan Pertimbangan Bahasa juga memberikan perhatian penuh terhadap dua topik utama kebahasaan, berturut-turut dampak globalisasi dan timbulnya ancaman ke arah disintegrasi bangsa. BPB berpendapat bahwa kedua masalah tersebut perlu dihadapi dan diatasi secara bersungguh-sungguh dalam waktu tidak terlalu lama, terutama melalui pemanfaatan peran bahasa secara optimum. Selain itu pelbagai kiat lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Bahasa juga terus dilakukan. Misalnya sekarang sedang dijajaki kemungkinan agar *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dapat diakses melalui internet, yang secara nyata akan meningkatkan penyebaran terbitan Pusat Bahasa seperti direkomendasikan pula oleh KBI VII.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI PEMERKUKUH PERSATUAN BANGSA DAN KESATUAN NEGARA

Susilo Bambang Yudhoyono

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan

Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, damak dan sejahtera untuk kita semua,

Hadirin yang saya hormati,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas rahmat dan rida-Nya sehingga kita dapat bertemu di ruang ini dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.

Saya mendapatkan kehormatan yang tinggi untuk ikut menyumbangkan pikiran saya pada forum yang terhormat ini. Izinkan saya sebelum menyampaikan judul yang dimintakan oleh panitia untuk memberikan beberapa pengantar ringan. Judulnya agak berat yang ditugaskan kepada saya pada forum hari ini, yaitu "Bahasa Indonesia sebagai Pemerkuh Persatuan Bangsa dan Kesatuan Negara". Itu sama dengan hipotesis yang harus saya isi dan simpulkan. Akan tetapi, nanti itu akan saya bawa secara ringan dan sederhana tanpa mengurangi judul yang sangat penting itu dan kita bisa membahasnya secara lebih lugas dan mudah.

Pengantar saya, hidup kita ini selalu ada dalam dua sisi, konon begitu para filsuf mengatakan: yang baik dan yang tidak baik, yang buruk dan yang menyenangkan. Yang ingin saya antarkan pada siang ini adalah cerita yang baik dan cerita yang tidak baik, dalam bahasa Inggris *good news* dan *bad news*. Cerita yang tidak baik untuk panitia. Saya diminta untuk menyuguhkan makalah sebenarnya, tapi karena kepadatan tugas, saya tidak bisa memenuhi itu, mohon maaf. Itu buruk, tetapi berita baiknya, panitia telah memaafkan saya. Katanya, "*Okelah untuk SBY ndak apa-apa, yang penting dia datang dan bicara*". Yang kedua, saya 48 jam berada di Palu dan di Poso. Bagi yang belum mengenal Sulawesi Tengah, perjalanan dari Palu ke Poso itu sekitar lima jam lewat darat. Kami harus mengunjungi daerah-daerah yang baru saja ada insiden atau peristiwa baru sehingga--berita tidak baiknya--saya belum sempat menyusun suatu catatan yang sistematis. Namun, berita baiknya, cuaca hari ini bagus. Meskipun pesawat kami tadi sudah mengudara, seperempat jam kemudian mendarat kembali karena satu mesinnya mati. Di udara saya masih sempat tulis-tulis membuat catatan kecil. Itu berita baik yang harus saya ke depan kepada hadirin sekalian.

Saya adalah praktisi. Saya bukan ahli bahasa. Saya pengguna bahasa. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan judul yang diberikan oleh panitia kepada saya tadi akan saya dekati dengan pengalaman

empirik saya, pengetahuan saya menangani berbagai hal di Indonesia ini, terutama yang berkaitan dengan integrasi nasional, dengan keutuhan bangsa, dan kepentingan nasional. Yang lain dikaitkan dengan peran dan arti penting bahasa Indonesia sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu sebagai pemerkukuh persatuan bangsa dan kesatuan negara.

Saya akan menyampaikan masalah ini dengan urutan yang sederhana. Pertama, akan saya kedepankan tiga pendekatan untuk melihat masalah ini. Pendekatan pertama adalah konsep integrasi nasional dan yang kedua adalah konflik jati diri atau konflik identitas. Saya tidak tahu *konflik* itu sudah menjadi bahasa Indonesia atau belum dan di sini saya lihat judulnya juga Kongres Bahasa Indonesia. *Kongres* itu kata asli bahasa Indonesia atau bukan. Ya, kita agak rileks sedikit, nanti tidak maju-maju kalau kita harus mengingat-ingat harus kata asli atau tidak. Pendekatan kedua akan saya sampaikan tentang konflik identitas atau konflik jati diri. Kemudian, pada pendekatan yang ketiga saya ingin melihat bahasa Indonesia dalam perkembangan kehidupan nasional yang dinamis dan dalam era globalitas. Saya akan melihat sedikit kepentingan kita dalam konteks dunia yang tengah dan terus berubah seperti itu. Dari tiga pendekatan ini akan saya uraikan secara singkat, saya diberi waktu sekitar 25 atau 30 menit sehingga 30 menit berikutnya lagi untuk bertukar pikiran di antara kita. Setelah saya uraikan satu demi satu secara singkat, akan saya tutup dengan konklusi. Demikian kalau kita ingin membangun politik terhadap permasalahan-permasalahan tadi bagaimana politik yang saya tawarkan tentu dari kaca mata dan cara pandang saya terhadap masalah itu.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Konflik integrasi nasional dapat saya urai dengan rumusan "dalam keadaan seperti apa sebuah negara dikatakan memiliki integrasi nasional yang baik?". Kalau kalimat ini diubah menjadi kalimat negatif menjadi "dalam keadaan apa pula sebuah bangsa mengalami ancaman disintegrasi?" Ada tiga hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah faktor ideologis, yang kedua adalah faktor sosial, dan yang ketiga adalah faktor teritorial.

Politik ideologis yang dianut oleh bangsa itu dalam keadaan baik jika tidak ada upaya politik untuk mengganggu atau mengancam ideologi itu. Dalam hal ini ideologi kita adalah Pancasila. Maka, kita mengatakan--secara ideologis--kita dalam keadaan baik karena tidak ada ancaman terhadap ideologi itu yang--kalau tidak bisa kita atasi--mengganggu integrasi nasional kita. Kemudian, kalau terjadi konflik komunal, disintegrasi sosial sebagaimana yang terjadi, meskipun alhamdulillah sudah sangat menurun dan dapat kita pulihkan satu per satu, yaitu di Maluku, Maluku Utara, Poso---yang baru saya kunjungi--dan Kalimantan Tengah, maka--kalau itu masih terjadi--integrasi sosial kita, kohesi sosial kita menjadi tidak bagus, yang muaranya juga nanti mengganggu integrasi nasional. Itu faktor kedua.

Setelah ideologi, sosial. Yang ketiga teritorial. Kalau ada upaya untuk mengganggu keutuhan wilayah kita, yang populer kita sebut gerakan separatis, sebagaimana yang terjadi di Aceh dan di Papua dan kalau itu tidak dapat kita atasi, keutuhan teritorial kita terancam. Kalau itu kita biarkan, muaranya adalah goyahnya integrasi nasional. Dalam kaitan ini, sebuah negara dapat dikatakan memiliki integrasi nasional yang baik apabila ditinjau dari segi ideologi, sosial, dan teritorial negara itu terkelola baik dan tidak ada ancaman ke arah itu.

Mari kita lihat dan kita kaitkan dengan peran atau sumbangan bahasa Indonesia. Konflik komunal kita yang terjadi juga di banyak negara atau disintegrasi nasional yang terjadi di sejumlah negara, itu masih diperburuk dengan faktor bahasa. Sebagai contoh, saya pernah bertugas di bekas negara Yugoslavia. Perpecahan negara Yugoslavia akhirnya menyebabkan tidak ada lagi negara Yugoslavia, sebagaimana yang dipimpin oleh Tito yang lalu karena baik pihak Kroasia, Serbia, maupun Bosnia Herzegovina itu kebetulan memiliki suatu ciri yang berbeda-beda. Identitasnya berbeda, agamanya berbeda, rasnya, dan kemudian bahasanya berbeda. Bisa dibayangkan kalau sejumlah konflik di negeri ini, baik yang horizontal maupun konflik vertikal itu juga tidak menggunakan bahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa masing-masing, tentu lebih buruk situasi yang kita hadapi. Di sini kita melihat faktor—bagaimana pun sejarah membuktikan—bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu mengurangi secara signifikan tajamnya konflik yang terjadi di negeri kita ini, baik itu konflik komunal maupun konflik kedaulatan atau yang kita sering sebut dengan separatisme. Dalam kata lain, agar di masa depan tidak terjadi benturan lagi mengingat bangsa kita yang majemuk, akar konfliknya banyak, dan mengingat bahwa bahasa Indonesia betul-betul sebagai unsur penyelamat, mari kita lestarikan, kita pelihara, kita kukuhkan penggunaan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional. Itu pendekatan saya yang pertama, letak dan peran bahasa Indonesia dalam upaya memelihara dan mempertahankan integrasi nasional.

Pendekatan yang kedua adalah konflik jati diri. Di dunia ini banyak sekali terjadi konflik yang menyangkut jati diri. Misalnya, Kurdi melakukan gerakan politik di Irak dan di Turki. Ada juga di Inggris, Irlandia Utara melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Kemudian, juga ada di tempat-tempat lain yang menggambarkan gerakan disnasionalisme. Seolah-olah itu menjadi kecenderungan dan realitas di dunia ini, pasca-Perang Dunia II, dan bahkan pasca-Perang Dingin. Kalau itu berhadapan dan faktor bahasa menjadi bagian penting di situ, konflik identitas itu juga bisa menimbulkan permasalahan yang serius dalam keberadaan dan keberlanjutan kehidupan sebuah bangsa. Mari kita lihat sekarang negara-negara lain yang menjadi sulit karena faktor-faktor itu dan negara-negara lain yang mampu mengatasi keadaan, misalnya Belgia. Belgia itu sebuah negara yang memiliki tiga bahasa. Pertama, mereka menggunakan bahasa Prancis, sebagian dari

penduduk maupun pemerintahnya, yang kedua menggunakan bahasa Belanda, dan yang ketiga menggunakan bahasa Jerman. Tiga bahasa itu digunakan, tetapi mereka relatif tidak memiliki masalah, tetap bersatu bangsanya. Amerika Serikat, mereka juga berasal dari bangsa mana pun di dunia, yang juga menggunakan bahasanya masing-masing. *The melting park*, itulah mereka. Tapi, negara itu bisa mengatasi keadaannya, tidak ada disintegrasi nasional karena faktor bahasa, dan bahasa Inggris digunakan secara luas dan resmi oleh pemerintah Amerika Serikat.

Bagaimana dengan Indonesia? Kita bersyukur betul karena meskipun puluhan bahkan ratusan bahasa yang digunakan di wilayah ini, di tanah air ini. Akan tetapi, sejak 1928 kita telah membangun konsensus dasar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu, saya ungkapkan tadi ada contoh negara-negara yang mengalami permasalahan internal, permasalahan dalam negeri karena konflik yang kebetulan menggunakan bahasa yang berbeda, dan ada juga negara-negara yang berhasil mengatasi masalah itu, termasuk Indonesia sendiri. Jawaban dari semua itu tiada lain adalah dengan semangat *bhinneka tunggal ika* dan dengan bukti sejarah yang berupa konsensus dasar itu, mari kita gunakan bahasa Indonesia tetap sebagai bahasa nasional, jangan sampai luntur. Itu pendekatan yang kedua.

Pendekatan yang ketiga, kita ingin melaporkan dinamika dan perkembangan situasi di tanah air pada masa transisi ini atau pada era reformasi ini karena hal itu ada kaitannya dengan tantangan sekaligus "ancaman" terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Sekaligus di sini akan saya jelaskan kecenderungan dan realitas baru pada tingkat dunia yang itu pun memberikan tantangan kepada pembinaan bahasa Indonesia. Kita mulai dari dalam negeri. Era reformasi ini ditandai dengan sebuah gerakan, demokratisasi yang jelas. Dengan demokratisasi muncul manifestasi atau pancaran kebebasan yang meluas di masyarakat kita. Kebebasan, *freedom* dalam bahasa Inggris. Pemacuan hak-hak asasi manusia. Orang bebas berbicara, bebas menyampaikan pendapat, bebas memilih karena hal itu dianggap merupakan hak asasinya dan bagian dari demokratisasi. Ada desentralisasi pemerintahan, ada pemberlakuan otonomi daerah, bahkan otonomi khusus. Ini adalah gerakan yang meninggalkan pusat, keluar. Kalau kita tidak waspada, kita bisa menghadapi sejumlah persoalan misalnya, yang ekstrem, atas nama hak, saya punya hak asasi. Saya boleh memilih kenapa berbahasa Indonesia, mengapa tidak saya berbahasa Jawa, berbahasa Sunda, berbahasa Bugis, dan lain-lain. Peraturannya jangan dikembalikan pada negara, jangan ditekan sana ditekan sini, dan sebagainya. Kalau itu terjadi, berarti ada persoalan yang harus kita hadapi. Atas nama hak asasi manusia, kebebasan, dan kebetulan ada realitas desentralisasi pemerintahan, dan otonomi daerah, bisa jadi ada tantangan yang berkaitan dengan itu.

Dari segi globalisasi, tidak bisa dihindari bahwa aturan main dan budaya dunia sekarang ini membuat mobilitas dan interaksi di antara warga dunia serta di antara bangsa dan negara menjadi sangat tinggi. Manusia, keuangan, modal atau kapital, industri, informasi, itu semua memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Melihat interaksi perdagangan internasional dengan standardisasi internasional, dengan yang disebut *e-commerce*, dan sejumlah realitas bam pada tingkat dunia ini, hampir tidak mungkin sebuah negara menolak hadirnya istilah-istilah bahasa asing, kata-kata bahasa asing, dalam atau sebagai bagian dari interaksi global tadi. Tidak bisa dihindarkan adanya penggunaan bahasa asing sepenuhnya. Bahasa Inggris barangkali, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Jepang, dan lain-lain. Ini bisa menimbulkan permasalahan di dalam negeri kita.

Mari kita melihat bagaimana upaya kita meletakkan bahasa Indonesia tetap sebagai bahasa nasional dan meletakkannya sebagai pemerkuh integrasi nasional yang saya dibutkan tadi. Ini semua tentu memerlukan, ini pikiran saya, masuknya bahasa-bahasa atau istilah asing. Istilah asing atau kata-kata asing di negara kita dalam konteks interaksi global tadi tidak harus menjadikan ancaman yang serius terhadap bahasa Indonesia. Kita memerankan bahasa Indonesia sebagai sebuah taman sari dengan tetap menempatkan bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya apa? Dalam taman sari yang indah, yang luas ini, yaitu bahasa Indonesia, bisa jadi muncul pohon-pohon kecil, bunga-bunga kecil yang tidak mengubah campuran taman sari kita tadi, bahasa Indonesia, yang hadir karena globalisasi. Dengan demikian, taman sari kita tetap indah, luas, dan tidak perlu terganggu oleh hadirnya pohon dan bunga-bunga kecil. Barangkali pohon dan bunga-bunga kecil itu memperindah taman sari dan dalam bahasa Inggrisnya *garden*. Kalau bahasa Indonesia dengan kerangka, dengan budaya, dengan penggunaan, dengan keluasan penggunaannya di masyarakat luas sudah menjadi tuan rumah dalam negerinya, kehadiran kata-kata asing atau istilah-istilah asing itu juga tidak menggantikan tuan rumah. Ia sebagai tamu, tamu-tamu yang bersahabat barangkali. Entah bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa apa pun itu tetap menjadi tamu bagi tuan rumah yang berdaya di negeri ini.

Satu-satunya solusi barangkali, saya paham ada dua pendekatan. Pak Wardiman juga menjelaskan kepada saya dua hari yang lalu bagaimana cara pandang ahli bahasa, bagaimana cara pandang kita terhadap interaksi yang tidak bisa dielakkan itu. Satu cara berpikir saya yang barangkali sederhana saya mengibaratkannya seperti itu tadi. Sebuah taman sari yang indah, luas, milik kita, dan kita menjadi tuan rumah yang berdaya yang menentukan masa depan kita sendiri. Penggunaan bahasa asing tidak perlu dimusuhi. Tidak perlu ada konflik antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Cina, dan bahasa-bahasa lain sepanjang kita sebagai warga negara Indonesia mengerti betul kapan kita berbahasa Inggris, kapan kita

berbahasa Arab, kapan kita berbahasa Prancis, dan sebagainya. Ini bagian dari kecintaan kita kepada bahasa, bangsa, dan negara.

Kalau kita memaksakan semua harus mengerti bahasa Indonesia, demikian juga kalau kita bernegosiasi dagang di Thailand, itu menjadi sulit kalau kita memaksakan mereka semua harus mengerti bahasa Indonesia. Bagi yang bisa berbahasa Cina, silahkan. Bagi yang bisa berbahasa Inggris ketika tadi rapat di Washington D.C., silakan. Akan tetapi, menjadi ganjil dan tidak masuk akal jika berbicara di tempat kita sendiri separuh bahasanya adalah bahasa Inggris atau dua pertiga bahasanya bahasa asinglah mungkin. Kalau sedikit-sedikit kan itu menambah gaya begitu, katanya lebih hebat. Kalau bahasa Indonesia justru tertutup oleh bahasa asing, menurut saya, itulah yang tidak benar. Karena itu, lihatlah tempatnya, konteksnya, dan kapan kita menggunakan bahasa asing itu.

Itulah tiga hal yang saya urai secara sederhana. Kalau boleh saya tutup, sebagai konklusi dan solusi sekaligus dalam masalah-masalah yang kita hadapi, saya ingin menegaskan hal-hal berikut. *Pertama*, mari kita pertahankan dan kita kembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita untuk menghadapi ancaman disintegrasi nasional dan konflik jati diri. *Kedua*, ancaman terhadap keberadaan dan perkembangan bahasa Indonesia itu juga berhimpit dengan alam kebebasan, demokratisasi, pemacuan hak asasi manusia, desentralisasi pemerintahan, dan otonomi daerah sekarang ini. Mari kita pastikan desentralisasi pemerintahan yang memang perlu, otonomi daerah yang memang penting, dan kemudian demokratisasi dan pemacuan hak asasi manusia yang juga penting sebagai agenda reformasi kita. Itu semua jangan mengganggu dan mengancam keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Itu konklusi yang kedua. *Ketiga*, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kehadiran istilah dan kata-kata asing dalam bahasa Indonesia yang terjadi karena proses interaksi global dalam era globalisasi ini hendaknya tidak menggantikan peran, tidak mengganggu keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagaimana saya contohkan tadi, hal itu hendaknya menjadi taman sari sehingga bahasa Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu yang ketiga. *Keempat* yang terakhir, tidak perlu ada konflik antarbahasa. Ia bagian dari kebesaran dunia, tetapi yang penting sebagai bangsa Indonesia, marilah kita gunakan bahasa Indonesia secara luas, di tempat-tempat yang tepat, dan menggunakan bahasa asing apabila memang perlu digunakan pada tempat dan keadaan yang tepat pula.

Sebagai penutup, sebuah ilustrasi, saya dan kawan-kawan sudah mulai membiasakan dalam forum yang mengharuskan saya berbicara dalam bahasa Inggris, kalau saya menyebut *beliau* tidak mungkin *your excellency* Mr. Wardiman, yang lebih patut adalah *Bapak Wardiman*. Kita pergunkan *selamat datang di Indonesia*, kita pergunkan *go to Bali yang indah, the beautiful Bali*. Mulailah digunakan istilah-istilah kecil seperti itu. Mereka

akhirnya tentu juga senang menggunakan istilah itu. Minggu lalu saya berada di Australia, di Canbera dan Melbourne, saya memberikan ceramah di University of Melbourne. Ya, beberapa orang di sana yang ketemu saya, banyak yang mengucapkan *selamat datang, selamat siang, apa kabar, bapak tinggal di mana?* Mengapa kita tidak mulai dalam sepuluh kalimat bahasa Inggris, kita selipkan satu dua kata bahasa Indonesia yang populer, yang memang mereka harus sering mengucapkan seperti itu. Ini ilustrasi, barangkali masih banyak lagi ilustrasi Bapak Ibu sekalian untuk memperkaya bahasa kita dan menggunakan bahasa Indonesia yang kita cintai.

Sekian, wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2003
Judul Makalah : Bahasa Indonesia sebagai Pemerkukuh Persatuan Bangsa dan Kesatuan Negara
Pemakalah : Susilo Bambang Yudhoyono
Pemandu : Wardiman Djojonegoro
Pencatat : 1. Ardianto Bahtiar
2. Ida Ayu Mirah Purwati

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Mahmudah (Universitas Muhamadiyah Makassar)
Bagaimana sikap Bapak menghadapi anak buah Bapak yang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak tepat?
2. **Pertanyaan:** Yudi Eka Prasetya (BEM UGM)
Bagaimana strategi kesatuan diterapkan dalam situasi otonomi daerah?
3. **Pertanyaan:** Abege Ratu (Manado)
Masyarakat Sulawesi Utara memiliki bahasa pemersatu yang mempersatukan empat etnik di Sulawesi Utara, yaitu bahasa Melayu Manado.
4. **Pertanyaan:** Martin Lumempo (Manado)
Apa tindakan yang akan diambil pemerintah menghadapi penggunaan bahasa daerah yang bisa jadi akan mengancam disintegrasi bangsa?
5. **Pertanyaan:** Rahayu Prihatmi (Universitas Diponegoro)
Bagaimana perlakuan terhadap bahasa daerah yang merupakan warga negara kita sendiri. Sebab kalau bahasa daerah sampai terbunuh akan membunuh budaya daerah itu sendiri.

Jawaban:

Negara tidak boleh menjadi negara peraturan. Kehidupan sebuah negara tidak semua harus ditangani atas nama negara. Ada sebagian wilayah yang harus diserahkan kepada *civil society*. Di masa lalu terjadi kesalahan cara pandang yang membuat negara mengatur segala urusan kemasyarakatan (*sentralisme*). Semangat reformasi ini membangun paradigma baru yang berkaitan dengan hubungan negara dan masyarakat. Paradigma baru itu memandang bahwa negara tidak boleh

mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat dan tidak boleh semua urusan dijadikan undang-undang dan peraturan sepanjang menyangkut urusan norma-norma tradisi.

Dengan paradigma itu saya akan menjawab semua pertanyaan tadi.

1. Cara mengingatkan kesalahan berbahasa orang lain tidak lagi harus dengan cara-cara yang keras (teguran, hukuman). Cara terbaik adalah dengan memberikan teladan berbahasa yang baik lewat para tokoh-tokoh, guru-guru, pejabat publik, dan kita semua.
2. Undang-undang tentang bahasa Indonesia harus ada sebab diatur dalam revisi UUD '45. Hal ini adalah amanat rakyat dan dalam pembuatan undang-undang itu harus melibatkan semua pihak.
3. Citra diri militer yang saat ini dipandang buruk merupakan bagian dari cara pandang masa lalu, paradigma masa lalu. Paradigma masa lalu tidak salah semua. Paradigma yang baik dan patut kita pertahankan sedangkan yang buruk kita perbaiki bersama. Negara dan aparaturnya menjalankan kewajiban untuk mempertahankan wilayah Indonesia dan masyarakat turut melibatkan diri secara aktif menurut konstitusi. Perubahan ini memerlukan waktu karena menyangkut struktur, kultur, dan kebiasaan.
4. Penggunaan bahasa daerah yang tidak proporsional, tidak pada tempatnya, memang dapat mengancam integrasi bangsa. Sikap kita adalah berpedoman pada regulasi yang diatur dalam undang-undang dan regulasi yang tidak diatur dalam undang-undang.
5. Bahasa daerah adalah bagian dari budaya, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan nasional, dan bahasa asing adalah sarana komunikasi kita dengan dunia luar. Jadi kita harus menempatkan diri dalam berbahasa secara tepat sesuai tempat, situasi, dan konteks.

BAHASA INDONESIA, PENDIDIKAN NASIONAL, DAN KEHIDUPAN BERBANGSA

H.A. Malik Fadjar

Menteri Pendidikan Nasional

Pendahuluan

Dalam situasi global, regional, dan nasional seperti yang kita alami saat ini masalah identitas bangsa sering menjadi salah satu topik pembicaraan. Bangsa Indonesia yang saat ini boleh dikatakan berada dalam situasi yang memprihatinkan, baik karena masalah ekonomi, politik, maupun sosial, harus memberikan perhatian lebih besar terhadap masalah tersebut dengan tidak mengabaikan aspek kehidupan lainnya.

Kalau kita mengkaji penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia I-VII dalam situasi yang berbeda-beda dan dengan tujuan yang berbeda-beda pula, kita pun harus menentukan arah yang jelas dalam penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia VIII ini. Tema yang ditetapkan oleh panitia kongres yang berbunyi "Pemberdayaan bahasa Indonesia memperkuat ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi" sudah tepat karena tema ini memungkinkan kita untuk membahas tidak hanya masalah substansi kebahasaan, tetapi juga aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang erat kaitannya dengan aspek kebahasaan itu. Masalah kebahasaan murni saya serahkan sepenuhnya kepada para pakar bahasa untuk membahasnya, sedangkan makalah ini akan membicarakan pokok-pokok di luar substansi kebahasaan yang erat kaitannya dengan aspek pendidikan dan kehidupan berbangsa.

Kongres Bahasa Indonesia I diselenggarakan pada zaman penjajahan. Tentu tujuan yang ingin dicapai pada waktu itu berbeda dengan kongres bahasa Indonesia berikutnya karena yang diutamakan pada saat itu ialah menggalang kekuatan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Kongres-kongres bahasa selanjutnya yang diselenggarakan pada zaman kemerdekaan atau setelah kita merdeka pasti berorientasi pada hal lain dan diarahkan untuk tujuan yang sesuai dengan prioritas pembangunan pada masa itu. Walaupun demikian, benang merah penyelenggaraan kongres bahasa Indonesia ternyata tetap ada dan dipertahankan, yaitu kesadaran berbangsa dan berbahasa Indonesia. Sampai saat ini tampaknya benang merah itu memang selalu ada karena kongres bahasa Indonesia memang merupakan salah satu bentuk perwujudan kesadaran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap amanat Sumpah Pemuda yang merupakan dasar pemikiran dan titik tolak penyelenggaraan kongres bahasa Indonesia selama ini.

Bahasa Indonesia selain merupakan bahasa nasional juga me-

upakan bahasa negara. Oleh karena itu, sangatlah wajar kalau setiap orang dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia agar ia dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan dapat menjaga dan menikmati haknya sebagai seorang warga negara. Dalam hubungan itulah pendidikan dalam arti yang luas mempunyai peran kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama ini bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, telah berupaya dengan berbagai cara, terutama melalui pendidikan formal untuk menghasilkan warga negara Indonesia yang sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, hingga saat ini tampaknya sulit bagi kita untuk menemukan orang Indonesia yang puas dengan prestasi yang telah kita capai. Oleh karena itu, Kongres Bahasa Indonesia VIII ini diharapkan mampu membawa angin segar, menciptakan suasana yang cerah dalam dunia pendidikan, khususnya pengajaran bahasa Indonesia di sekolah termasuk masyarakat bahasa Indonesia yang dapat menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi. Mungkin ada baiknya kalau kita mengingat-ingat kembali ungkapan yang berbunyi "Bahasa mencerminkan bangsa."

Pendidikan

Pendidikan nasional saat ini mempunyai landasan yang lebih mantap dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal itu tidak berarti bahwa masalah pendidikan serta merta teratasi. Kita masih harus bekerja keras dalam berbagai sektor pendidikan untuk memungkinkan kita memfungsikan pendidikan nasional dengan baik agar kita dapat mencapai tujuan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut pada Bab II, Pasal 3, yang berbunyi "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Dari rumusan di atas jelas tampak betapa rumitnya persoalan yang kita hadapi. Segala dana dan daya perlu kita kerahkan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Anggaran pendidikan yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat sedikit banyak telah terjawab dengan adanya ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 yang sudah diamendemen, Pasal 31, Ayat (4) yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyeleng-

garaan pendidikan nasional." Walaupun demikian, hal itu tidak menjamin bahwa tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan mudah. Karena sarana utama yang diperlukan untuk menanamkan kesadaran, pengertian, dan pemahaman tujuan pendidikan nasional itu bukanlah semata-mata dana. Di sinilah bahasa Indonesia dapat berperan sebagai sarana utama untuk melancarkan tercapainya tujuan tersebut, dalam arti bahwa semua pihak mulai dari pengelola pendidikan sampai dengan masyarakat luas perlu berkomunikasi secara aktif dan efektif agar dapat bersinergi dalam menggalang kebersamaan untuk mencapai tujuan itu. Dengan kata lain, penguasaan bahasa Indonesia yang baik sangat diperlukan oleh para pengelola dan pelaksana pendidikan, peserta didik, orang tua, dan warga masyarakat pada umumnya sebagai modal utama untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pendidikan nasional saat ini memperkenalkan dan memasyarakatkan orientasi "baru" yang disebut dengan keterampilan hidup (*life skill*) yang di dalamnya juga terdapat kompetensi berkomunikasi. Dengan demikian, orientasi ini sejalan dengan harapan kita tadi agar kita semua mahir berbahasa Indonesia. Dalam hubungan ini, Departemen Pendidikan Nasional melalui Pusat Bahasa sedang mengembangkan sarana pengujian yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

Pengajaran Bahasa Indonesia

Selama ini pengajaran bahasa Indonesia pada hampir semua jenis dan jenjang pendidikan selalu mendapat sebutan mata pelajaran yang membosankan, menakutkan, gersang, terlalu teoretis, dan sebagainya. Singkatnya, pengajaran bahasa Indonesia tidak atau kurang diminati peserta didik. Kongres Bahasa Indonesia VIII diharapkan dapat memberikan jalan keluar atau sekurang-kurangnya saran untuk mengubah citra buruk tersebut menjadi sesuatu yang memesonakan. Oleh karena itu, jadikanlah pengajaran bahasa Indonesia itu sesuatu yang menarik, menyenangkan, bermanfaat, dan mencerdaskan.

Perlu saya tambahkan bahwa setiap kali saya menggunakan kata bahasa Indonesia, termasuk pengajarannya, kecuali konteks bahasanya, harus diartikan sebagai bahasa dan sastra karena bahasa dan sastra itu ibarat dua sisi sebuah mata uang. Jika hanya ada satu saja, uang itu bukanlah mata uang yang berguna. Jadi, pengajaran bahasa Indonesia harus seiring dan sejalan dengan pengajaran sastra atau sebaliknya. Janganlah pengajaran sastra atau pengajaran bahasa, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diarahkan untuk mencetak sastrawan atau ahli bahasa/linguis.

Kompetensi membaca dan menulis merupakan dua kompetensi pokok yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, terutama para guru dan

peserta didik kalau kita mengharapkan tumbuhnya atau berkembangnya budaya baca dan tulis dalam masyarakat kita.

Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi tidak hanya dibutuhkan oleh warga negara Indonesia. Warga negara asing pun cukup banyak yang berminat untuk mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia. Berdasarkan informasi yang saya terima, pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perkembangannya cukup menggembirakan. Oleh karena itu, kongres ini diharapkan dapat memberikan masukan yang memungkinkan kita memperbaiki citra Indonesia di luar negeri. Seperti halnya beberapa negara asing, selain negara yang berbahasa Inggris mampu memperkenalkan budayanya di Indonesia melalui kursus bahasa asing yang diselenggarakan oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), baik di dalam maupun di luar negeri perlu direncanakan atau diprogramkan secara lebih terperinci.

Dalam kaitannya dengan perdagangan bebas yang pelaksanaannya sudah makin mendesak, kita perlu menyediakan kursus-kursus BIPA yang tepat guna, untuk memungkinkan berlangsungnya alih teknologi dengan lebih cepat dan lebih lancar.

Berdasarkan informasi yang sempat saya baca atau saya dengar, salah satu keluhan yang sangat gencar mengenai pengajaran bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan kita ialah ketidaksesuaian alat ukur yang berupa ujian akhir nasional dengan materi yang diberikan di sekolah. Hal itu pun saya harapkan agar disoroti dengan cermat dalam kongres ini.

Kehidupan Berbangsa

Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam era globalisasi seperti sekarang ini yang ditandai, antara lain, oleh derasnya arus informasi mengenai teknologi dan nilai budaya asing, masalah identitas bangsa merupakan salah satu topik yang perlu didiskusikan. Masalah ini bertambah rumit dengan adanya gejala mendewakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dan menomorduakan bahasa nasional atau bahasa negara. Oleh karena itu, politik bahasa yang kita anut ialah menempatkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing itu sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dalam hubungan ini, perlu saya tegaskan bahwa tidak pernah ada larangan untuk menguasai atau menggunakan bahasa asing itu, terutama bahasa Inggris, selama penggunaannya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Namun, yang terjadi sampai saat ini ialah penggunaan bahasa asing yang tidak pada tempatnya atau tidak pada situasi yang tepat.

Kita tidak boleh mengesampingkan manfaat bahasa asing, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pada saat yang sama, kita juga

harus menanamkan kecintaan, kebanggaan, dan kesetiaan kita terhadap bahasa nasional dan bahasa daerah kita masing-masing. Pada sisi lain, bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional juga perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pemakainya terpenuhi. Demikian pula halnya, dengan bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu bagi sebagian terbesar penduduk Indonesia. Hubungan timbal balik antar-ketiga bahasa itu, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, perlu diatur sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan dan keharmonisan dalam pengajaran dan pemakaiannya sebagai sarana komunikasi. Para pakar bahasa dan pengajaran bahasa perlu mendalami masalah tersebut agar keseimbangan dan keharmonisan itu dapat terwujud, baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahasa Indonesia pun perlu mulai diperkenalkan di luar negeri dengan lebih terencana dan terarah agar eksistensi bangsa ini makin mantap. Dalam hubungan ini, mutu pengajaran bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing perlu ditata dengan lebih rapi.

Dalam kaitannya dengan bahasa daerah, khususnya bahasa ibu, perlu diteliti dengan lebih saksama agar penetapannya sebagai bahasa pengantar atau mata pelajaran di sekolah dasar memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Sebagaimana diketahui, hasil penelitian UNESCO menunjukkan bahwa pendidikan yang menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar lebih berhasil jika dibandingkan dengan pendidikan yang tidak menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar. Sementara itu, hasil penelitian dalam negeri mengisyaratkan adanya generasi yang tidak menguasai bahasa ibunya dengan baik.

Program pemberantasan buta bahasa Indonesia tampaknya sampai saat ini belum berhasil dengan memuaskan dan penguasaan bahasa Indonesia para lulusan pendidikan menengah ke atas sering dikeluhkan oleh pengguna jasa mereka, termasuk dosen di perguruan tinggi.

Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan oleh adanya gerakan separatis yang sangat mengganggu kestabilan dalam negeri. Jika kenyataan ini bersumber dari kurang tebalnya rasa kebangsaan, pendidikan nasional melalui pengajaran bahasa Indonesia mungkin dapat berperan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal tersebut.

Dalam kehidupan berbangsa kita pasti perlu berkomunikasi, baik antarwarga maupun antara warga masyarakat dan pemerintah. Kalau kita tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, mungkinkah kita dapat memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? Apa manfaat media massa, baik cetak maupun elektronik, yang demikian banyak kalau kita tidak mahir berbahasa Indonesia? Bagaimanakah nasib suatu negara yang asing dengan kehidupan sastra? Bukankah mutu kesastraan suatu bangsa juga menggambarkan

tingkat peradaban bangsa itu?

Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat merangsang kita semua untuk memikirkan jawaban yang tepat guna menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi persoalan atau tantangan yang kita hadapi.

Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunarwan, Asim. 2000. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia di dalam Era Globalisasi". Dalam Hasan Alwi dkk. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa Sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Moeliono, Anton M. 2000. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi". Dalam Hasan Alwi dkk. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa Sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sudarsono, Juwono. 2000. "Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Acara Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia VII di Istana Negara". Dalam Hasan Alwi dkk. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa Sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sudarsono, Juwono. 2000. "Kebinekaan Bahasa, Pembangunan Bangsa, dan Era Globalisasi".
- Huda, Nuril. 2000. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing". Dalam Hasan Alwi dan Dendy Sugono (Editor). *Politik Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Politik Bahasa Nasional: Departemen Pendidikan Nasional

LAPORAN SIDANG

Hari, tanggal : Selasa, 14 Oktober 2003
Judul Makalah : Bahasa Indonesia, Pendidikan Nasional, dan Kehidupan Bangsa
Pemakalah : A. Malik Fajar (dibacakan oleh Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda)
Pemandu : Dendy Sugono
Pencatat : 1. Dedi Puryadi
2. Ni Luh Partami

ISU

1. Ujian akhir nasional bahasa Indonesia belum memenuhi standar atau alat ukur ujian yang diharapkan.
2. Pemberantasan buta bahasa Indonesia belum berhasil dengan memuaskan.
3. Pengajaran bahasa dan sastra di sekolah jangan diarahkan untuk mencetak sastrawan atau ahli bahasa.
4. Mutu pengajaran bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing perlu ditata lebih rapi.
5. Pengajaran bahasa Indonesia harus lebih berperan dalam menanggulangi separatis yang mengganggu kestabilan nasional.
6. Pengajaran bahasa daerah/bahasa ibu lebih dimantapkan.

UNDANG-UNDANG BAHASA SEBAGAI SARANA PEMANTAPAN POLITIK BAHASA NASIONAL

Harimurti Kridalaksana

"De Maleische taal, welke voor hare aanleering wemlg filologische aaleg eischt en welke reeds sedert langen tijd de voertaal is tusschen de inboorlingen en mede tusschen Inlanders van de verschillende deelen van Insulinde onder ling, zal in de toekomst de aangewezen taal zijn voor geheellndie" (Bahasa Melayu, yang untuk mempelajarinya sedikit mempersyaratkan kemampuan filologis dan yang sejak lama menjadi bahasa pengantar di antara penutur asli dan juga di antara penduduk pribumi dari pelbagai bagian Insulide, pada masa yang akan datang akan menjadi bahasa yang cocok untuk seluruh Hindia)

Suardhy Surjaningrat (Ki Hajar Dewantara) 1916

Latar Belakang

Dalam versi terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah mengalami 4 kali perubahan) terdapat beberapa ketentuan mengenai bahasa, yakni sebagai berikut.

Pasal 32 ayat (2): Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pasal 36: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36C: Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dalam undang-undang.

Mengingat bahwa dalam versi terakhir itu tidak ada lagi penjelasan sebagaimana termuat dalam versi awal UUD 1945 adalah wajar bila Pasal 36C baru itu, khususnya mengenai bahasa, dianggap sebagai amanat agar Pasal 32 dan 36 itu dijabarkan dalam bentuk undang-undang organik.

Agar sebuah undang-undang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat umum, tidak cukup alasan yuridis, yakni perintah dari undang-undang dasar, seperti itu saja yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunannya. Ada dua pertimbangan lagi yang mesti dipahami dan dipastikan untuk keperluan itu, yakni pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis. Kedua pertimbangan itu harus disertai pemahaman yang cermat tentang situasi bahasa dewasa ini.

Itulah salah satu latar belakang mengapa Badan Pertimbangan Bahasa bersama dengan Pusat Bahasa memikirkan dan mengadakan pengkajian untuk mengajukan sebuah undang-undang bahasa.

Dalam pada itu selama bertahun-tahun di tengah masyarakat sudah berkembang pemikiran dan pembahasan agar negeri ini mempunyai politik bahasa yang eksplisit sehingga bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing yang lazim di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan bangsa dalam arti seluas-luasnya. Hingga kini apa yang disebut politik bahasa nasional itu masih berupa kesepakatan masyarakat dan belum menjadi dokumen formal.

Kalau perintah UUD 45 di atas menjadi landasan yuridis bagi undang-undang bahasa nasional sehingga masyarakat tidak ragu-ragu sedikit pun untuk melaksanakannya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, semua yang dirumuskan sebagai politik bahasa nasional itu dapat dijadikan pertimbangan sosiologis dan filosofis.

Kesepakatan Masyarakat tentang Politik Bahasa Nasional

Konsep dan istilah *politik bahasa nasional* digulirkan pertama kali oleh Slametmuljana dalam pidato penerimaan jabatan guru besar Universitas Indonesia pada 16 Mei 1959. Bertolak dari pemaparan atas kegagalan politik bahasa kolonial penjajah Belanda, secara komprehensif aspek makro dan mikro persoalan bahasa dalam alam kemerdekaan Indonesia dibahas di dalamnya--persoalan dan cara pemecahan yang selalu muncul, baik dalam pelbagai pembahasan dalam karya-karya kebahasaan maupun dalam pertemuan umum tentang bahasa baik sebelum pidato itu, yakni sejak Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 hingga Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1998, yang pasti terulang lagi dalam Kongres tahun 2003 ini. Walaupun perulangan itu, di satu pihak, tidak perlu kita sesali karena persoalan bahasa tidak dapat dipisahkan dari persoalan kehidupan berbangsa bangsa kita, sebagai konsekuensi dan implementasi Sumpah Pemuda 1928, tetapi di pihak lain, selama tidak ada dukungan yuridis terdapat suasana ketidakpastian menyangkut beberapa prinsip yang sudah disepakati.

Entah berapa likur pertemuan tingkat nasional, termasuk sekian kali kongres bahasa Indonesia di atas, entah berapa puluh pertemuan tingkat lokal, yang membahas kedudukan dan masa depan bahasa di negeri ini, namun yang tampak ialah perkembangan dalam fokus yang dibahas.

Sebagai pertemuan yang digagas dan diprakarsai bukan oleh ahli bahasa atau sastrawan, melainkan oleh praktisi bahasa, yakni wartawan muda (ketika itu) Soemanang dan Soedarjo Tjokrosisworo, Kongres Bahasa Indonesia I 1938 di Solo bertujuan dan memutuskan hal-hal praktis yang menyangkut penggunaan dalam hal-hal praktis dan pembinaan bahasa Indonesia di masa depan.

Setelah penyelenggaraannya diambil alih oleh pemerintah, yakni sejak Kongres Bahasa Indonesia II 1954 di Medan, beberapa fokus baru muncul. Yang menonjol di antaranya ialah pembahasan tentang fungsi bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, peranan sastra Indonesia dalam pengembangan bahasa, dan pentingnya dunia pendidikan dalam pengembangan bahasa. Karena para akademisi bahasa makin berperan, banyak aspek ilmiah dibahas, pemikiran para praktisi, ditambah dengan para birokrat dan sastrawan, tetap menonjol—semuanya didasarkan atas kepedulian pada keadaan bangsa pada saatnya, terutama yang yang menyangkut bahasa.

Walaupun ada pergeseran fokus yang diperhatikan, pada dasarnya semua pertemuan itu bertujuan untuk mengukuhkan dan memantapkan konsensus nasional untuk

1. mengekalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa,
2. mempertegas fungsinya dalam kehidupan berbangsa,
3. memuliakan bahasa-bahasa daerah sebagai kekayaan sosial budaya bangsa, dan
4. senantiasa mengorientasikan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan konstelasi dunia, khususnya dengan mempertegas fungsi bahasa-bahasa asing.
5. memanfaatkan perkembangan bahasa-bahasa di dunia dengan karya sastra dan karya intelektualnya demi kemajuan peradaban Indonesia.

Bahwa kemudian masalah sastra Indonesia, daerah, dan asing dibahas orang dalam pelbagai pertemuan bahasa adalah wajar mengingat pengembangan sastra berarti pengekalan dan pengayaan jati diri bangsa. Begitu pula halnya dengan penekanan pada peranan pendidikan dalam bahasa.

Situasi Kebahasaan Indonesia Dewasa Ini

Pada waktu bahasa Melayu diresmikan menjadi bahasa persatuan dan diberi nama bahasa Indonesia, para pencetus Sumpah Pemuda tidak memperhatikan bahasa Melayu jenis apa yang akan digunakan (mengingat begitu banyaknya variasi dalam bahasa Melayu). Dalam Kongres Bahasa Indonesia I, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa bahasa Indonesia didasarkan atas bahasa Melayu Riau yang sudah disesuaikan dengan alam baru Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya karena bahasa Indonesia sudah dianggap tidak sarna dengan bahasa Melayu, jadilah bahasa yang memang tidak sama dengan bahasa asal itu. Lebih dari itu, dewasa ini tanpa direncanakan dan tanpa ada yang mengatur, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pertama atau bahasa ibu bagi lebih dari 20 juta anak Indonesia--sesuatu yang mungkin tidak

diramalkan oleh para pelopor bahasa Indonesia. (Bahwa tumbuhnya penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu merupakan hilangnya potensi sekian banyak pengguna bahasa daerah sebagai bahasa ibu itu menjadi titik perbenturan di antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, kiranya dapat dipahami).

Sebagai bahasa yang tumbuh secara alamiah demikian, selain mempunyai fungsi komunikatif interpersonal dan fungsi-fungsi lain, bahasa Indonesia memperoleh dua "beban" tambahan, yakni, pertama, bahasa itu menjadi sarana untuk memandang alam sekitarnya; dan kedua, bahasa itu menjadi objek dua kekuatan, yakni kekuatan sentrifugal dan kekuatan sentripetal.

Sebagai sarana untuk memandang alam sekitarnya, bahasa Indonesia menjadi bagian yang integral dari pribadi penuturnya dengan sarana itu penutur sambil tumbuh membangun sistem nilai dan mengorientasikan dirinya terhadap lingkungannya. Kalau kita berbicara tentang "melestarikan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa", itulah juga yang kita maksud pada tataran kehidupan berbangsa.

Sebagai bahasa alamiah, karena kekuatan sentrifugal, bahasa Indonesia menumbuhkan dialek dan ragam bahasa, yang apabila tidak dikendalikan akan menjadi bahasa-bahasa sendiri. Kekuatan sentripetal berusaha mengubah keanekaragaman menjadi keseragaman yang apabila tidak dikendalikan akan terjadi uniformisasi yang mematikan kreativitas. Pembakuan bahasa atau standardisasi bahasa semestinya dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedua kekuatan itu (Pembakuan bahasa bukan dimaksudkan untuk mencapai keseragaman bahasa, melainkan untuk memantapkan fungsi pelbagai ragam [satu diantaranya adalah ragam baku] disertai unsur-unsur bahasa sebagai pengungkapnya, mulai dari lafal dan ejaan sampai ke wacana).

Sementara itu, bangsa Indonesia sebagai warga dunia mau tak mau harus bergaul dengan warga lain dengan bahasa internasional yang sedang unggul; dewasa ini dengan Bahasa Inggris. Dengan kekuatan politik dan ekonomi yang dahsyat bahasa itu disebar ke mana-mana, sehingga di negeri kita menjadi pesaing berat bagi bahasa nasional. Karena bangsa kita sudah bertekad untuk mempertahankan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, kita tidak dapat berpangku tangan dan harus bisa menjawab pertanyaan, "Apakah kita hanya mau jadi objek, dan siapkah kita untuk menjadi subjek yang ikut mengatur perubahan dan pengubahan sosial budaya, termasuk bahasa, dan mampu menentukan nasib sendiri?"

Ruang Lingkup Undang-Undang Bahasa

Undang-undang disusun demi manfaat bagi masyarakat. Undang-undang disusun dan dilaksanakan untuk bertindak lebih mantap bagi

kepentingan masa depan. Tersurat di situ mana hak dan mana kewajiban. Jelas ditulis mana ketentuan dan mana sanksi.

Bahasa sebagai struktur konvensional yang digunakan manusia juga mengandung ketentuan dan sanksi, mulai dari ketidakmengertian atas ujaran bahasa yang tidak purna-bentuk sampai ke ketidakberterimaan atas ujaran yang tidak sesuai dengan waktu, tempat atau hubungan sosial. Bahasa jadinya mempunyai ranah privat dan ranah publik. Ranah privat bahasa adalah tanggung jawab pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah, misalnya, kebiasaan santun berbahasa atau tertib berbahasa tulis. Di situlah tempat, dan asal muasal "bahasa yang baik dan benar" dengan sanksi keluarga dan sanksi edukatif.

Bidang-bidang seperti kewajiban membina bahasa daerah, kewajiban mengembangkan sastra, penggunaan bahasa nasional atau bahasa asing dalam dunia diplomatik, kewajiban menggunakan bahasa baku dalam komunikasi resmi adalah ranah publik yang sanksinya bersifat administratif.

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang bahasa itu tujuannya untuk menegaskan bidang penggunaan bahasa yang harus menggambarkan pemuliaan dan pengunggulan bahasa nasional dan pelbagai aspek bahasa lain yang mendukungnya.

KEPUSTAKAAN

- Setyowati, Erni, *et.al.* 2003. *Bagaimana Undang-Undang Dibuat*. Jakarta: The Asia Foundation & Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia
- Fishman, J.A. 2001. "Language Policy: Linguistic Perspectives" dalam Smelser & Baltes 2001.12:8361-5
- Hasil-hasil Kongres Bahasa Indonesia Pertama dan Kongres Bahasa Indonesia Kedua. Jakarta: Lembaga Linguistik, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia
- Alwi, Hasan & Dendy Sugono (ed). 2000. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Keputusan Kongres Bahasa Indonesia I-V Tahun 1938--1988. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (Keppres 188/1998)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Keppres 44/1999)

Suprpto, Maria Farida Indrati. 1996. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius

Persandingan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

Putusan Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII, Jakarta 26--30 Oktober 1998. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Slametmuljana. 1959. *Politik Bahasa Nasional: Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bahasa Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Smelser, Neil J. & Paul B. Baltes (eds). 2001. *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. Amsterdam: Elsevier

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

Zolberg, A.R. 2001. "Language Policy: Public Policy Perspectives" dalam Smelser & Baltes 2001.12:8365-73

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal	: Rabu, 15 Oktober 2003
Judul Makalah	: Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Bahasa
Penyaji	: Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana
Pemandu	: Prof. Dr. Zainuddin Thaha
Pencatat	: 1. Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina, M.Hum. 2. Dra. Ni Luh Komang Candrawati, M.Hum.

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Dr. Abdul Wahab (Universitas Negeri Malang)
Gagasan pembuatan undang-undang ini merupakan gagasan yang mulia. Yang saya tanyakan adalah sebagai berikut.
 - (1) Siapa yang akan menjaga pelanggaran undang-undang ini?
 - (2) Apakah sudah siap pribadi-pribadi yang duduk di legislatif, eksekutif, dan yudikatif mengenai kepekaan mereka terhadap undang-undang ini.

Jawaban:

Penegakan hukum, tentunya kalau DPR dan MPR sudah mengesahkan perubahan UUD dan memasukkan pasal yang lebih banyak daripada yang dahulu yang menyangkut bahasa. Itu merupakan kepedulian mereka bagi masa depan bangsa dan bahasa kita secara umum. Bila dilaksanakan, ada konsekuensinya, yaitu ada sanksinya. Sanksi itu beberapa macam, misalnya sanksi hukum, sosial, dan administratif. Soal penegak hukum terserah pada kita semua. Itulah sebabnya mengapa sosialisasi undang-undang itu perlu diintensifkan.

2. **Pertanyaan:** A. Ratun Untoro (Kantor Bahasa Manado)
Undang-undang ini supaya diberlakukan pertama-tama kepada pejabat-pejabat pemerintah yang melanggar kebahasaan itu. Baru, diturunkan terus-menerus karena 200 juta lebih masyarakat Indonesia masih banyak yang buta huruf dan situasi kebahasaan kita di tanah air yang belum diatur secara rapi.

Jawaban

Seperti yang diutarakan Bapak Ratun dari Manado, yaitu pucuk pemerintah yang harus melaksanakan. Hal itu sebenarnya menyangkut sanksi sosial. Di dalam undang-undang yang menyangkut ranah publik,

sanksinya tidak hanya sanksi sosial, tetapi sanksi biasa yang akan kita beri ancaman juga sanksi administratif. Undang-undang itu lebih berkaitan dengan administrasi negara, tidak dengan sanksi pidana atau sanksi sosial. Jadi, kalau kita tidak berbahasa dengan baik, kita akan dikecam orang, tetapi tidak ada sanksi hukumnya.

3. **Pertanyaan:** Asruni (Universitas Negeri Jember)

Bahasa Indonesia diturunkan dari bahasa Melayu dulu untuk menyongsong persatuan dan kesatuan dalam rangka kemerdekaan. Di era globalisasi ini kita dituntut mempertahankan persatuan tersebut. Kami menanyakan kembali tentang politik bahasa nasional.

- a. Bahasa Indonesia dituntut harus eksis dan juga bangsa Indonesia masih memiliki jati diri, etika, dan kompetensi dengan bahasa asing. Apakah penutur bahasa Indonesia bisa *legawa* jika bahasa daerah dan bahasa Inggris masih eksis? Ketiganya tidak dapat didiskriminasi.
- b. Saya mohon politik bahasa nasional direvisi dan dipikirkan kembali.

Jawaban

Mengenai politik bahasa nasional, bahasa Inggris, dan bahasa daerah sudah sering dibicarakan. Saya akan mencari apa yang menjadi aspirasi kita tentang bahasa asing dalam menghadapi globalisasi.

- a. Terhadap bahasa asing kita senantiasa mengorientasikan diri untuk menghadapi perubahan konstilasi dunia. Khususnya, mempertegas fungsi bahasa asing. Jadi, kita maju dengan kepribadian kita.
- b. Kita memanfaatkan perkembangan bahasa di dunia dengan karya sastra yang intelektual untuk memajukan kepribadian bangsa Indonesia.

4. **Pertanyaan:** Prof. Dr. I Wayan Bawa (Universitas Udayana)

Salut dengan ide ini karena kita tidak mempunyai undang-undang bahasa. Dapat dikatakan undang-undang bahasa ini terlambat. Substansi apa saja yang akan masuk dalam undang-undang bahasa tersebut. Misalnya, bagaimana bahasa Inggris diajarkan di TK?

Jawaban

Pengajaran bahasa Inggris di TK lebih bersifat pedagogis, bukan pertimbangan dari segi hukum. Itu berguna bagi perkembangan pendidikan anak-anak. Ini sesuai dengan paham Sapir W. bahwa bahasa digunakan sebagai alat untuk memandang alam sekitarnya.

5. Pertanyaan: Kornel (Akademi di Jakarta)

Keberadaan bahasa ditentukan oleh keberterimaan bahasa sendiri. Berarti, bahasa kalau diundangkan, saya pikir ada proses pemaksaan.

Wujud sanski itu apa saja. Bagaimana menumbuhkan sikap, kesadaran, rasa memiliki bahasa yang potensial menjadi bahasa ilmiah dan bahasa dunia.

Jawaban:

Memang berkali-kali kita lakukan penumbuhan sikap, tetapi kali ini melangkah ke dalam undang-undang. Misalnya pelaksanaan EYD sebagai contoh bahwa kita hidup berbahasa secara teratur. Itu dilaksanakan secara keseluruhan tanpa masalah walaupun ada kesalahan-kesalahan kecil. Pelanggaran EYD tidak ada sanksi luhur, tetapi mereka yang melanggar di tegur (ada sanksi sosial).

- a. Ada lagi sanski edukatif, kalau di sekolah tidak menggunakan EYD tentu nilai kita turun.
- b. Pembinaan bahasa keseluruhan bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada ketentuan sosial yang lebih bermanfaat dari pada ancaman-ancaman.

6. Pertanyaan: Anonim

Di satu pihak bahasa Indonesia semakin meningkat pemakaiannya di lain pihak ada lonceng kematian bagi bahasa daerah. Ada kontradiksi, memelihara bahasa daerah dan meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia.

Jawaban

Kita harus memuliakan bahasa daerah sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Naskahnya kita tekad untuk melaksanakan ini, bukan menyangkut masalah ketentuan atau undang-undang. Memang, banyak hal yang menyangkut masa depan bangsa kita dan bahasa kita.

7. Pertanyaan: Prof. Dr. Asim Gunarwan (Universitas Indonesia, Depok)

Dalam rangka membalikkan pergeseran bahasa daerah kira-kira pasalnya berbunyi apa.

Jawaban

Sebenarnya, ini belum sampai bunyi pasal-pasal, tetapi gagasan awal yang mendasar. Harus ada naskah akademik. Ini yang penting disusun, hal apa yang harus dirumuskan di dalam rumusan undang-undang sebab yang namanya undang-undang itu hanya rumusan terakhir dari proses yang panjang.

Simpulan Pemandu

1. Saya rasa, bahasa ini, selain dapat diatur bisa mengatur yang lain-lain, tetapi bahasa itu dapat diatur dengan undang-undang.
2. Peserta pada umumnya mendukung adanya/terbentuknya undang-undang bahasa ini. Sebenarnya sudah lama bahasa itu sendiri digunakan untuk membuat undang-undang, tetapi bagaimana bahasa itu sendiri dibuatkan undang-undangnya. Ini yang menjadi persoalan kita sekarang ini.
3. Kongres Bahasa Indonesia VIII mudah-mudahan dapat memperkuat rekomendasi sebelumnya, tidak sampai pada Kongres IX nanti, undang-undang tersebut berwujud. Tugas Pusat Bahasa dan Dewan Pertimbangan Bahasa untuk bekerja keras mewujudkan terciptanya undang-undang ini. Tidak usah khawatir kalau undang-undang itu sudah ada lalu Pusat Bahasa berubah menjadi polisi bahasa, dan kita semua menjadi polisi bahasa. Itu tidak demikian. Terutama bagi pejabat-pejabat negara yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau menggunakan bahasa dalam situasi yang mengharuskan negara tidak digunakan bahasa negara itu, maka saya kira masyarakat Indonesia perlu memberikan sanksi atau teguran paling rendah, yaitu teguran moral.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN BERBAHASA

Koesnadi Hardjasoemantri¹

Pendahuluan

- 1) Pengguna bahasa Indonesia menampakkan gejala makin kurang memperhatikan kaidah bahasa. Gejala itu makin meluas dan meliputi berbagai unsur masyarakat, termasuk kalangan penyelenggara negara/pejabat pemerintahan.
- 2) Masyarakat paternalistik, termasuk masyarakat Indonesia, melihat perilaku pemimpin untuk dijadikan pegangan.
- 3) Penggunaan bahasa Indonesia oleh para pejabat yang terjadi sampai sekarang tidak atau belum merupakan teladan yang baik. Sebaliknya, apa yang dapat dilihat dalam praktik? Penutur dan penulis bahasa Indonesia kurang memperhatikan kaidah bahasa yang telah ditetapkan.
- 4) Pelanggaran berbahasa berarti tidak menggunakan kaidah bahasa yang telah ditetapkan, yaitu Ejaan Yang Disempurnakan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri pada tahun 1972 beserta ketentuan-ketentuan lainnya dari Pusat Bahasa.
- 5) Dalam keputusan menteri tersebut tidak dicantumkan pasal tentang sanksi atas pelanggaran ketentuan EYD. Sebuah keputusan menteri tidak dapat mencantumkan ketentuan tentang sanksi kecuali sanksi yang bersifat sanksi, administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat di lingkungan departemen yang bersangkutan yang berkaitan dengan materi yang diatur. Jadi, sanksi itu tidak dapat bersifat umum.

Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Pejabat

- 1) Pejabat pemerintahan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pejabat yang berpendidikan di zaman kolonial Belanda dan pejabat yang mengenyam pendidikan di zaman kemerdekaan.
- 2) Pejabat kategori pertama mempunyai kedisiplinan dalam menggunakan kaidah bahasa yang terbawa oleh kebiasaan menggunakan kaidah bahasa asing dengan baik. Dalam menerapkan kaidah bahasa Indonesia disiplin itu tetap digunakan. Yang banyak dialami kesukaran oleh pejabat kategori pertama ini adalah banyaknya kosakata yang harus dipakai, lebih-lebih dengan banyaknya singkatan yang digunakan.

¹ Guru Besar (Emiritus) Hukum Lingkungan FH-UGM, Rektor UGM (1986—1990), Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UGM (mulai 2002)

- 3) Pejabat kategori kedua kurang memperhatikan kedisiplinan penggunaan kaidah bahasa, Padahal, selama pendidikan formal, pengajaran bahasa Indonesia telah mereka lalui. Para pejabat ini lebih banyak dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dalam masyarakat daripada dengan tertib melaksanakan kaidah bahasa Indonesia.
- 4) Gambaran tersebut tentu tidak berlaku secara hitam putih. Cukup banyak pejabat berpendidikan zaman kolonial yang kurang memperhatikan kaidah bahasa Indonesia dan cukup banyak pula pejabat yang berpendidikan di zaman kemerdekaan yang secara konsisten menerapkan kaidah bahasa Indonesia.

Sikap Masyarakat

- 1) Kecuali masyarakat ke dalam yang mengamati penggunaan bahasa Indonesia, pada umumnya masyarakat tidak memperhatikan bahasa yang digunakan pejabat. Mereka tidak peduli apakah pejabat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar ataukah tidak.
- 2) Yang justru terjadi adalah bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar oleh para pejabat mudah menular kepada yang lain, terutama kepada pejabat yang merupakan bawahan pejabat yang bersangkutan.
- 3) Media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang merupakan corong masyarakat, jarang pula menyoroti penggunaan bahasa Indonesia oleh para pejabat.
- 4) Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia oleh para pejabat yang tidak memperhatikan kaidah bahasa Indonesia, berlanjut tanpa ada mekanisme kontrol.

Upaya Yang Perlu Dilakukan

- 1) Upaya yang dapat dilakukan meliputi dua cara, yaitu cara preventif dan cara kuratif.
- 2) Cara preventif terkait dengan upaya untuk memperkuat kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar melalui lembaga pendidikan dan pelatihan. Di lembaga tersebut perlu diperhatikan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga diperoleh kedisiplinan penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditetapkan. Kebiasaan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama di jenjang pendidikan dan pelatihan akan berlanjut pada waktu yang bersangkutan mulai bekerja di lembaga pemerintahan.
- 3) Cara kuratif terkait dengan upaya untuk memberikan koreksi kepada tulisan pejabat yang bersangkutan, baik yang berupa laporan, sambutan maupun makalah. Koreksi itu dilakukan oleh sebuah tim

yang khusus diadakan di lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Dengan demikian, tulisan tersebut telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia dan dapat merupakan contoh yang baik.

- 4) Cara kuratif ini dapat pula melalui penataran khusus yang diadakan untuk para pejabat yang diwajibkan oleh kepala lembaga pemerintahan yang bersangkutan untuk diikuti. Cara ini terutama dititikberatkan pada kemampuan penuturan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 5) Kombinasi antara dua cara kuratif tersebut akan membawa pejabat yang bersangkutan kepada kemampuan untuk memperbaiki diri dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 6) Guna melaksanakan cara preventif dan cara kuratif tersebut, perlu kiranya Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, membentuk sebuah tim khusus yang mempersiapkan program peningkatan kemampuan pejabat berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sanksi yang Perlu Diberikan

- 1) Sanksi yang tersedia di bidang hukum meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
- 2) Dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang dapat diterapkan adalah sanksi administratif, yang arahnya lebih banyak ditujukan kepada pemberian insentif dan disinsentif.
- 3) Pemberian insentif dan disinsentif dapat dikaitkan dengan persyaratan kenaikan pangkat bagi pejabat yang bersangkutan, dalam arti bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh pejabat yang bersangkutan diberikan penilaian positif untuk kenaikan jenjang kepangkatannya, sedangkan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar diberikan penilaian negatif.
- 4) Cara penilaian kemampuan berbahasa bagi pejabat yang bersangkutan, baik yang meliputi penuturan maupun penulisan, perlu disusun oleh Pusat Bahasa dan diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan ke dalam sistem penilaian jenjang kepangkatan.
- 5) Di samping dimasukkan ke dalam sistem penilaian jenjang kepangkatan, penilaian kemampuan berbahasa bagi pejabat dapat pula dikaitkan dengan pemberian penghargaan kepada pejabat yang paling baik berbahasa Indonesia yang baik dan benar pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sebagai perangsang untuk berprestasi dalam berbahasa Indonesia.

Penutup

- 1) Jika di atas diutarakan tentang kemampuan pejabat dalam berbahasa Indonesia yang kadar kecenderungannya menurun, keadaan menjadi lebih parah dengan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar oleh media massa serta media film, terutama sinetron. Bahasa yang digunakan dalam tayangan sinetron lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa Betawi yang umumnya digunakan oleh anak muda.
- 2) Dengan tidak menutup mata tentang perlu adanya dinamika dalam penggunaan bahasa, tetapi pada batas tertentu kaidah bahasa tidak boleh ditinggalkan.
- 3) Pengalaman penyaji makalah sebagai pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi menunjukkan bahwa pemahaman kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar kurang dikuasai para mahasiswa karena mereka tidak terbiasa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam penulisan maupun dalam penuturan.
- 4) Arus menggunakan bahasa bebas sesuai dengan keinginan penutur sebagaimana berlaku sekarang perlu dihadapkan pada program peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2003
Judul Makalah : Sanksi Terhadap Pelanggaran Berbahasa
Penyaji : Koesnadi Hadjasoemantri
Pemandu : Ignas Kleden
Pencatat : 1. Ketut Mandala Putra
2. Zaenal Hakim

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Dr. Yayah B. Lumintintang (Pusat Bahasa)

Sering memberikan penyuluhan ke berbagai instansi, terutama bawahan, pejabat yang berusaha melemparkan permasalahan bahasa Indonesia kepada atasan karena merasa atasan yang paling berkepentingan dengan penyuluhan bahasa Indonesia, terutama mengenai bahasa surat dinas/birokrasi. Bagaimana dengan sikap pejabat yang tidak menghargai program Pusat Bahasa yang mengeluarkan banyak biaya?

Jawaban:

Pusat Bahasa perlu mengadakan interaksi (dialog) dengan pejabat tinggi (Setjen) untuk meyakinkan pentingnya bahasa Indonesia. Setiap tim departemen memberikan koreksi terhadap teks/naskah sambutan yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan di Pusat Bahasa.

2. Pertanyaan: Nelson (Balai Bahasa Medan)

Sehubungan dengan sanksi sosial dan administratif terhadap pelanggaran berbahasa, di samping Pusat Bahasa mendirikan UKBI sebagai ukuran berbahasa yang baik dan benar. Bagaimana jika Pemerintah tidak melaksanakannya, apakah ada sanksi?

Jawaban

Sanksi administratif dapat dikenakan pada sistem kenaikan pangkat dan jabatan dengan cara memperlambat proses kenaikan pangkat bagi seorang PNS. UKBI dapat dipergunakan sebagai perangkat untuk mengetahui kemampuan berbahasa.

3. Pertanyaan: Nelson (Balai Bahasa Medan)

Saya setuju dengan sanksi bagi para pejabat yang tidak berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, sebelum dijatuhi sanksi, mereka

harus diberi pelajaran dulu. Setelah melalui proses pembelajaran/penataran itu, dapatlah mereka diberi sanksi, baik sanksi administratif, maupun sanksi sosial.

Jawaban:

Dalam menjalankan sanksi, BKN perlu diikutsertakan. Perlu diingat bahwa para pejabat di daerah itu kurang mendapat mendidikan. Penempatan mereka sama sekali tidak mendapatkan persyaratan itu (penataran bahasa Indonesia). Bila dibuat prosedur, dalam kata sambutan yang ditulis tidak boleh ada singkatan, harus lengkap. Sebagai contoh, penyingkatan *assalamualaikum* yang dibuat a.w.w., di Jawa Barat akan dibaca "awewe"; *interupsi* bolak-balik dikatakan "instruksi-instruksi"; *distribusi* menjadi "retribusi". Dalam hubungan ini saya setuju sanksi sosial lewat pers bagi para pejabat, tetapi bahasa pers pun harus baik dulu.

4. Pertanyaan: Macelo (Nusa Tenggara Timur)

Siapa yang (paling) berani memberi sanksi kepada pejabat?

Sanksi kepada para pejabat harus melalui satu sistem, yaitu lewat (pelambatan) kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Apabila hal itu dimasukkan sebagai salah satu kriteria, setiap pejabat akan berusaha untuk menaikkan pangkat dan menaikkan jabatan.

5. Pertanyaan: T.D. Asmadi (*Kompas*)

Saya setuju para pejabat yang tidak berbahasa Indonesia yang baik dan benar mendapat sanksi yang seberat-beratnya karena pejabat merupakan sumber informasi. Kami mendapatkan pernyataan atau kata-kata yang tidak tepat, misalnya Pusat Bahasa sudah mengalihkan istilah *underpass* dengan 'terowongan'; ada *busway* sebetulnya 'jalur khusus bus'; juga aparat keamanan sering menggunakan TKP 'tempat kejadian perkara', kenapa tidak disebut 'tempat kejadian saja'; lalu "curanmor" dst.

Sopan saja, Pusat Bahasa memiliki catatan siapa pejabat yang berbahasa Indonesia **terburuk** dan **terbaik**.

Jawaban:

Saya setuju para pejabat diberi sanksi. Mengenai istilah/singkatan "TKP dan curanmor" merupakan dinamika perkembangan bahasa dalam kepolisian. TKP merupakan istilah teknis kepolisian. Saya tidak keberatan. Dalam penetapan-penetapan istilah itu ada komisi-komisi yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Dalam hal ini perlu mengikutsertakan pihak kepolisian dalam pembentukan istilah.

Keppres yang dipenuhi kata-kata istilah asing menurut saya kurang tepat karena Keppres itu merupakan keputusan penting dari orang pertama di Indonesia (Presiden). Dalam kaitan ini, Keppres yang disusun oleh Sekretaris Kabinet bukan hanya dari sudut instansi, tetapi ada baiknya dijadikan sasaran penataran.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL

Harkristuti Harkrisnowo

Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

"... baik bahasa maupun hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat, yang merupakan pula sebagian dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu ... bahasa dan hukum itu saling berhubungan, saling pengaruh, malahan dianggap sebagai penjelmaan masyarakat dan kebudayaan, yang sebaliknya pula dipengaruhi baik oleh bahasa maupun oleh hukum ... " [Sutan Takdir Alisyahbana]

Hubungan yang erat antara bahasa dan hukum sebagaimana dilukiskan oleh Alisyahbana di atas memang sangatlah tidak mungkin untuk diabaikan. Dalam masyarakat mana pun, hukum, sebagai salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial, dirumuskan utamanya melalui bahasa walau ada simbol-simbol lain yang juga cukup penting untuk menetapkan hukum. Hukum hanya dapat berjalan efektif manakala ia dirumuskan dengan tegas dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat dan harus dapat dikomunikasikan dengan baik pada subjek-subjek hukum yang dituju. Apabila anggota masyarakat tidak memahami makna ketentuan yang dirumuskan dapat diduga bahwa akibatnya akan menyebabkan aturan hukum tersebut tidak dapat berjalan. Dari sisi lain, apabila hukum tidak dirumuskan dengan jelas dan para pelaksana dan penerapnya di lapangan pun tidak memahaminya, hal ini jelas akan berdampak pada mutu penegakan hukum tersebut.

Hal ini tidak hanya berlaku untuk bahasa Indonesia tentunya. Pada masa lalu--dan sebagian juga masih berlaku sampai kini--hukum adat di berbagai wilayah Indonesia, yang umumnya tidak dalam bentuk tertulis pun diturunkan dari satu generasi ke generasi lain melalui bahasa. Tidak perlu dibayangkan betapa tersendatnya kehidupan masyarakat hukum ada tanpa adanya bahasa.

Cukup mengherankan karenanya apabila bahasa Indonesia dalam bidang hukum ini sangat sedikit memperoleh perhatian dari para pakar hukum sendiri. Sebagai contoh, mata kuliah bahasa Indonesia tidak merupakan mata kuliah wajib di semua fakultas hukum di Indonesia.¹

¹ Sebagai pengecualian, khusus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahasa Indonesia diberikan pada setiap strata pendidikan, dari S-1 sampai dengan program

Masalah dalam Bahasa Hukum Indonesia

Walaupun hukum telah ada dan mengada di Indonesia sejak adanya masyarakat, tetap harus diakui bahwa penggunaan bahasa dalam dokumen hukum Indonesia--selanjutnya disebut sebagai Bahasa Hukum Indonesia--telah sejak lama dipandang sebagai penggunaan bahasa yang dimaksudkan hanya untuk kalangan hukum, bukan kalangan awam. Pandangan ini muncul karena kesulitan masyarakat pada umumnya untuk memahami makna rumusan-rumusan hukum dan juga pernyataan-pernyataan yang menjadi muatan dokumen hukum. Perumusan kalimat yang sangat panjang, dengan anak dan cucu kalimat yang berderet-deret, disertai dengan istilah-istilah hukum-khususnya yang diambil atau disadur dari bahasa asing--telah menempatkannya sebagai suatu dunia tersendiri, seakan terlepas dari dunia bahasa Indonesia umumnya.

Bahasa semacam ini biasanya dijumpai dalam pelbagai dokumen hukum, seperti

- a. peraturan perundang-undangan (mulai dari undang-undang sampai dengan surat-surat keputusan),
- b. surat edaran lembaga,
- c. surat perjanjian atau kontrak,
- d. akta notaris,
- e. putusan atau penetapan pengadilan, dan
- f. berita acara pemeriksaan pada berbagai tingkat.

Berkenaan dengan masalah ini, Yus Badudu pernah mengatakan bahwa kondisi yang muncul dalam masyarakat mengakibatkan adanya

“anggapan bahwa bahasa hukum Indonesia tidak mengungkapkan keaslian bahasa Indonesia sehingga seolah-olah bahasa hukum itu bahasa dengan corak sendiri yang tidak sejalan dengan bahasa umum yang digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian, bahasa hukum menjadi bahasa yang sukar dipahami”

Harus diakui bahwa menulis dokumen hukum sama sekali bukan tugas yang ringan dan sederhana, apalagi apabila dokumen itu berupa keputusan dari suatu lembaga. Penulis dokumen bukan hanya dituntut untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasannya, tetapi juga memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Menurut amatan penulis, berbagai masalah yang timbul dalam hal itu mencakup, antara lain, kebiasaan atau kecenderungan 'kalangan hukum' untuk

doktor.

- a. merumuskan atau menguraikan sesuatu dalam kalimat yang
- b. panjang dengan banyak anak kalimat,
- c. menggunakan istilah-istilah khusus hukum tanpa penjelasan,
- d. menggunakan istilah ganda atau samar-samar,
- e. menggunakan istilah asing (karena sulit mencari terjemahan bahasa Indonesia yang memiliki makna yang sama dan tepat dengan istilah asli), dan
- f. enggan bergeser dari format yang telah ada (misalnya yang dijumpai dalam akta notaris).

Akan tetapi, sejumlah orang berpendapat bahwa hal-hal di atas bukanlah 'masalah' dalam penggunaan bahasa di bidang hukum. Justru hal-hal tersebut merupakan karakteristik bahasa hukum, yakni karena adanya kekhususan dalam

- a. istilah yang digunakan,
- b. komposisi, dan
- c. gaya bahasa.

Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum dan juga tidak membuka peluang interpretasi ganda. Hal yang disebut terakhir ini sangat penting untuk menghindari agar kepastian hukum dapat dijamin. Permasalahan yang berkenaan dengan bahasa hukum Indonesia sebenarnya pernah dibicarakan dalam satu seksi pada Kongres Bahasa Indonesia II yang diadakan oleh Jawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 28 Oktober--2 November 1954 di Medan². Dua puluh tahun kemudian, pada tahun 1974, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan simposium bahasa dan hukum di kota yang sama. Hasil simposium itu kemudian dibukukan Prof. Mahadi, S.H. dan Drs. Sabaruddin Ahmad³. Pertemuan ilmiah yang dihadiri oleh pakar hukum dan pakar bahasa Indonesia itu menghasilkan empat konstataasi, yakni sebagai berikut.

1. Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.
2. Karakteristik bahasa hukum terletak pada kekhususan istilah, komposisi, serta gaya bahasanya.

² Panuti Sudjiman (1997). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bahan untuk kalangan sendiri.

³ Mahadi dan Sabaruddin Ahmad (1979). *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional/Binacipta.

3. Bahasa hukum Indonesia sebagai bagian bahasa Indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya harus tetap, terang, mono-semantik, dan harus memenuhi syarat estetika.
4. Simposium melihat adanya kekurangsempurnaan di dalam bahasa hukum yang sekarang dipergunakan, khususnya di dalam semantik kata dan komposisi kalimat⁴.

Walaupun konstataasi ini telah tiga dasawarsa silam disampaikan, ternyata sampai saat ini tidak atau belum ada lembaga yang bergerak untuk menindaklanjutinya. Sebagai akibatnya, dokumen-dokumen hukum masih saja ditulis dengan berbagai komposisi dan gaya yang tidak selalu mengacu pada kaidah umum bahasa Indonesia. Satu hal yang juga sering menimbulkan permasalahan di lapangan adalah penggunaan istilah-istilah hukum yang masih belum baku sehingga antara satu dokumen dan dokumen lainnya tidak jarang terdapat diskrepansi.

Sangat disayangkan pula bahwa penulisan dokumen hukum yang dilakukan pada saat ini belum memiliki bentuk yang baku yang berlaku secara nasional. Bahkan, apabila menilik hasil rancangan perundang-undangan yang disusun oleh berbagai departemen, misalnya, masing-masing memiliki keinginan sendiri-sendiri dalam membuat perumusan hukum.

Apabila dibandingkan dengan produk hukum yang berupa putusan pengadilan, akta notaris dan perjanjian dalam bidang bisnis, perumusan dalam produk hukum yang berupa perundang-undangan memang lebih baik, khususnya memakai kalimat yang relatif lebih singkat dan istilah-istilah yang digunakan pun pada umumnya dijelaskan sebelumnya (walau terkadang ada pula ketentuan-ketentuan yang memakai istilah yang berbeda untuk hal yang sama atau istilah yang sama untuk hal yang berbeda).

Kondisi yang disebut terakhir ini tampaknya cukup besar kaitannya dengan meningkatnya frekuensi dan mutu program pelatihan perancangan perundang-undangan yang umumnya diselenggarakan oleh fakultas-fakultas hukum. Meskipun tidak semua program semacam ini memasukkan unsur bahasa Indonesia ke dalam kegiatannya, panduan umum dalam perancangan setidaknya menolong untuk menghindari perumusan yang berbelit-belit dan kabur atau samar-samar (*vague*). Oleh karena itu, dalam arena penulisan produk-produk hukum lainnya perlu disusun rambu-rambu untuk meningkatkan kualitas penggunaan kaidah bahasa Indonesia laras hukum.

Hal itu sangat penting mengingat bahwa untuk merumuskan suatu kalimat yang memiliki akibat hukum, setiap klausul dan peristiwa yang dikemukakan harus tegas dan jelas.

⁴ Ibid, hal. 130

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Produk Hukum

Untuk menunjukkan sejumlah permasalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam produk hukum yang telah diurai tersebut, berikut ini akan diberikan beberapa contoh yang diambil dari berbagai dokumen.

1. Teks dari Bagian 'Pertimbangan' dalam Putusan Pengadilan

... bahwa jual beli saham dari penggugat asal kepada tergugat asal I selaku pemilik baru terjadi pada tanggal 24 Oktober 1984 (bukti P-4), maka meskipun dalam Pasal 4 "Surat Kesepakatan Bersama" telah disebutkan bahwa semua jaminan pribadi para pemilik saham dan pengurus yang lama, yaitu berupa jaminan *avaliste* dan jaminan tanggung renteng (*borgtocht*) kepada Bapindo akan dibatalkan, lalu diganti dengan jaminan-jaminan dari pemilik dan pengurus yang baru, dan untuk itu tergugat asal III telah memberikan persetujuannya atas kesepakatan penggugat asal dengan tergugat asal I tersebut, akan tetapi ternyata setelah kredit dinyatakan macet, para pemilik dan pengurus baru PT ... tersebut belum memberikan jaminan pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 4 Surat Kesepakatan Bersama tersebut di atas;

Dalam Putusan Lain Dikemukakan

Menimbang, bahwa tergugat berpendapat kuasa yang diberikan itu tidak cuma-cuma alasannya minyak tanah merupakan suatu kebutuhan pokok hidup, karena merupakan barang dagangan yang mudah laku, yang berarti mudah memperoleh untung yang besar hal ini telah dimengerti oleh masyarakat, karena itu banyak orang yang menginginkan supaya dapat diangkat menjadi agen minyak tanah oleh Pertamina, tetapi untuk dapat diangkat menjadi agen tersebut tidak mudah, karena itu minyak tanah merupakan barang dagangan yang mempunyai sifat monopoli, maka dari itu kuasa tersebut tidak cuma-cuma yaitu dengan suatu upah yang berupa pembagian keuntungan yang diperoleh selama melaksanakan penyaluran dan sendiri hal itu tidak disebutkan, tetapi dalam praktik hal ini selalu dengan upah, yaitu dengan adanya pembagian keuntungan yang mungkin diperoleh dalam pelaksanaan surat kuasa itu;

2. Contoh Penggalan Akta Notaris

- pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan. Pukul empat belas kosong-kosong waktu Indonesia Barat telah menghadap kepada saya, ..., Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini:

1.a. Tuan

Direktur Utama PT ...

Bertempat tinggal di ...

Pemegang Kartu Tanda Pendudukan Nomor: ...

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, mewakili Direksi dari--dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas berkedudukan di
- Dan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut dalam akta ini Direksi Perseroan Terbatas tersebut telah peroleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana yang dinyatakan pada butir 1.b. di bawah ini, demikian guna memenuhi ketentuan pasal "ayat ... dari Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut yang telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ... Sedangkan perubahan terakhir dari susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan tersebut termuat dalam akta tertanggal ... Nomor ... yang minuta aktanya dibuat oleh Sarjana Hukum, Notaris di ... yang salinan resminya dengan bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris ...

Seperti halnya dengan para hakim, notaris-notaris juga menganggap bahwa tidak perlu ada perubahan terhadap komposisi Akta yang mereka buat karena tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pemikiran semacam ini, menurut pendapat penulis, perlu dikaji kembali, untuk menegaskan bahwa bahasa dalam akta notaris sebagai bahasa Indonesia bukan sekadar memakai bahasa Indonesia dalam arti harfiah (bukan bahasa lain), tetapi juga perlu menerapkan kaidah bahasa Indonesia umumnya. Kekhususan gaya dan istilah yang dipakai dalam dokumen hukum memang diakui, tetapi tidak berarti bahwa penulisannya tidak perlu mengacu pada

kaidah umum bahasa Indonesia.

Peran Praktis Hukum dan Perancang Peraturan Perundangundangan

Melihat kecenderungan yang ada, tidak mudah untuk mengatakan bahwa kesadaran dan keinginan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar telah merambah ke semua aktor yang berperan dalam perumusan produk-produk hukum. Padahal, peran mereka dalam pengembangan hukum sangatlah signifikan. Perancangan dokumen hukum mempunyai implikasi yang sangat luas dalam dunia hukum karena pada tahap inilah telah ditentukan nilai dan norma-norma yang akan diberlakukan bagi masyarakat, termasuk cara-cara penerapannya.

Secara filosofis, ketentuan hukum dituntut untuk bersandar pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia untuk dapat diterima sebagai norma yang mengatur mereka. Pada sisi yuridis, hukum juga dituntut untuk selaras dengan ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi yang telah diputuskan sebelumnya sebagaimana adagium *lex superior derogat legi inferiori*. Oleh karena itu, dalam merumuskan suatu produk hukum, para perumusannya harus benar-benar menguasai materi yang dihadapinya, dan kemudian mengungkapkan pikiran tersebut dalam rumusan *et rei*, yang bermakna adanya kesesuaian pikiran dengan objek. Prinsip-prinsip itu pada dasarnya merupakan rambu-rambu dalam merumuskan materi hukum yang telah diterima secara universal.

Dalam konteks ini, Arief Sidharta dalam *Struktur Ilmu Hukum Indonesia* mengutip Moehtar Kusumaatmadja⁵

... tugas ilmu pengetahuan hukum positif adalah menyusun fakta-fakta mengenai kaidah II menjadi suatu kesatuan yang sistematis sehingga dapat dikuasai. Untuk dapat menyusun secara sistematis keseluruhan asas dan kaidah ini sehingga dapat kita menggunakannya sebagai dasar mengambil keputusan, maka dilakukan analisis, pembentukan pengertian dan penggolongan (kategorisasi) dan klasifikasi (dalam arti menempatkan pengertian-pengertian itu dalam suatu susunan yang berkaitan menurut unsur-unsur persamaan yang dimiliki pengertian-pengertian itu ...

Berangkat dari konsep-konsep hukum yang telah dirumuskan ber-

⁵ Arief Sidharta (1998). *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Universitas Parahyangan, hal. 11

sama, masalah selanjutnya adalah bagaimana agar perumusan hukum benar-benar mengungkapkan hal-hal yang ingin diungkapkan serta dipahami oleh para warga yang kelak akan diaturnya. Bagian ini merupakan suatu hal yang masuk dalam lingkup bahasa. Sebagai acuan yang harus dipergunakan, baik oleh para penerap hukum maupun oleh warga masyarakat, perumusan dalam produk hukum dituntut untuk bersifat komunikatif, dapat dipahami masyarakat awam. Tentunya ini selaras dengan fungsi instrumental yang dimainkan oleh hukum dalam suatu masyarakat yang teratur.

Peran para perancang hukum dan juga praktisi hukum bukanlah peran yang kecil dalam pengembangan hukum, termasuk ilmu hukum. Tanpa adanya penalaran hukum yang menyeluruh dan penguasaan bahasa Indonesia yang baik, yang akan dihasilkan adalah produk hukum yang kurang memenuhi fungsinya, baik sebagai sarana pengatur ketertiban, penyelesaian sengketa maupun pemberi arahan pada masyarakat.

Untuk dapat mencapai adanya keselarasan antara kaidah hukum dan kaidah bahasa Indonesia, para pakar (akademisi dan praktisi) dalam kedua bidang ini tampaknya perlu duduk bersama untuk membicarakannya. Penyusunan format yang baku untuk berbagai produk hukum memang tidak mungkin dihasilkan dalam waktu yang singkat mengingat begitu kompleksnya masalah hukum yang berkenaan dengan seluruh kehidupan masyarakat.

Penutup

Untuk dapat mendorong penggunaan bahasa hukum Indonesia yang lebih baik dalam rangka pengembangan hukum, diperlukan setidaknya, upaya-upaya yang sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti konstataasi yang telah dihasilkan dalam simposium bahasa dan hukum tiga puluh tahun lalu. Apabila mengingat bahwa antarsarjana hukum saja sulit untuk mencapai kesepakatan tentang suatu konsep atau interpretasi rumusan hukum, memang upaya ini tidak ringan untuk diwujudkan. Akan tetapi, tentunya ini tidak berarti bahwa masalah ini dapat diabaikan begitu saja. Dorongan yang terus-menerus terhadap pada aktor hukum harus dilakukan, khususnya para petinggi hukum di Indonesia, agar menyadari akan pentingnya masalah bahasa dalam perumusan produk-produk hukum.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2003
Judul Makalah : Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional
Pemakalah : Harkristuti Harkrisnowo
Pemandu : Prof. Dr. Ki Supriyoko
Pencatat : 1. Luh Anik Maryani
2. Zaenal Hakim

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Ichwan Imsahid (Fakultas Sastra, Universitas Hasanudin, Makassar)

Bagaimana masyarakat harus memahami sendiri bahasa hukum itu? Berkaitan dengan panjangnya bahasa hukum itu sendiri, yang beranak bercucu, dan bercicit kalimat, bahasa hukum menjadi sulit dipahami oleh masyarakat bahkan oleh pakar bahasa sekalipun. Pertanyaan saya, langkah apa yang harus diambil sebagai jalan untuk mengantisipasi pertanyaan awal tadi?

Jawaban

Satu-satunya jalan adalah dengan mengatakan kepada mereka (pakar hukum) bahwa mereka adalah bagian dari kami (masyarakat) dan tidak perlu merasa eksklusif. Seharusnya mereka (pakar hukum) menggunakan bahasa yang sama atau yang dapat dimengerti oleh masyarakat.

2. **Pertanyaan:** Panca (Universitas Pasundan, Bandung)

Hukum adalah bahasa. Pada masa sekarang ini produk hukum sudah bergeser dari suri teladan masyarakat. Apakah hal ini merupakan bias dari ketidakmonosemantisan bahasa hukum? Apakah hasil ketidakmonosemantisan tersebut mengakibatkan produk hukum Indonesia belum menjadi supremasi?

Jawaban

Kecenderungan untuk memakai bahasa yang samar dan rumusan yang panjang adalah refleksi pelaksanaan hukum itu sendiri. Hal itu berkaitan dengan keadaan di Indonesia, yaitu belum adanya supremasi hukum yang berkeadilan. Saya tambahkan berkeadilan karena hukum seharusnya tidak meraja. Pertimbangan lain mungkin karena masalah

hukum itu sendiri sudah cukup banyak dan kompleks, tidak hanya sekadar masalah bahasa. Hal itu mungkin menyebabkan mengapa teman-teman praktisi hukum tidak begitu memperhatikan masalah bahasa. Selain itu, bahasa hukum sekarang 50% berasal dari masa lalu. Bahkan kitab undang-undang hukum pidana dan perdata kita masih merupakan ciptaan Belanda, tahun 1848/1886. Norma-norma di Belanda sudah berubah, tetapi di negara kita masih tetap. Jadi, jika dilakukan perubahan, perubahan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi bahasa maupun materi hukum itu sendiri. Makna jamak atau *multiinterpretable* dalam bahasa hukum sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyelewengkan hukum itu sendiri. Karena penggunaan bahasa bermakna jamak tersebut tidak dilarang, maka boleh dirumuskan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Hal itu membuat supremasi hukum tersebut tidak berjalan.

3. Pertanyaan: Pranowo (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta)

Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa tulis sebagai alat komunikasi harus mampu membela diri di hadapan pembaca, dalam arti pembaca mampu memahami makna tanpa kehadiran penulis. Kenyataan bahwa bahasa hukum sulit dipahami oleh masyarakat awam, tampaknya disengaja oleh teman-teman praktisi hukum agar mereka selalu dapat mendampingi pasal-pasal mereka. Mendampingi pasal berarti *fulus*. Sebenarnya kaidah-kaidah bahasa tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum. Sebaiknya pakar hukum dan pakar bahasa duduk berdampingan saling percaya diri, saling mempercayai bahwa bahasa hukum seperti yang ibu contohkan, sebenarnya dapat dipotong-potong menjadi bahasa yang lebih komunikatif tanpa kehilangan maknanya yang betul. Saya amati bahwa penggunaan bahasa hukum yang amburadul mencerminkan pelaksanaan hukum yang amburadul.

Jawaban

Mungkin memang ada kesengajaan, tetapi penggunaan bahasa hukum yang berbelit-belit tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Menurut saya, Indonesia tidak perlu meniru negara lain. Jika Indonesia bisa menggunakan bahasa yang komunikatif, mengapa tidak? Ketika saya menanyakan kepada teman-teman mengapa masyarakat harus didampingi, mereka menanggapi, "kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah". Pemakaian bahasa dalam formulasi hukum perundang-undangan, SK menteri dapat dikatakan sudah lumayan. Hal ini dikarenakan oleh adanya tim dan proses penyaringan sebelum keputusan itu dikeluarkan. Namun, bahasa dokumen-dokumen yang dibuat secara individual, seperti kontrak dan putusan pengadilan masih perlu diper-

hatikan karena yang membuat dokumen tersebut adalah hakim atau panitera yang hanya mementingkan isi putusan dan bukan bahasanya.

Catatan saya, di Dirjen Perundangan memang belum ada unit khusus yang menangani bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa hukum. Selain itu, seringkali para mahasiswa hukum (S2 dan S3) hanya mau menyadari pentingnya bahasa Indonesia saat mereka kuliah saja. Akan tetapi, saat sudah lulus dan kembali bertugas, masalah bahasa tersebut tidak lagi dipedulikan. Saya kesulitan untuk mengajak teman-teman praktisi hukum berdiskusi masalah bahasa. Sampai sekarang hanya ada satu orang yang peduli walaupun hanya pada **fungtuasi** dan **teknik penulisan**, yaitu Prof. Koesnadi Harjasumantri. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu untuk bersama-sama mengajak teman-teman praktisi hukum berdiskusi bahwa kaidah hukum tidak bertentangan dengan kaidah bahasa.

4. Pertanyaan: Kamsiah Abdulah (Singapura)

Untuk mempermudah bahasa hukum di Singapura, pemerintah memberikan contoh-contoh kontrak antara individu dengan orang ramai. Kementerian *Man Power*, misalnya, menyediakan *website* tentang contoh kontrak rumah yang menerangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kontrak-mengontrak rumah. Contoh kontrak ini bisa *download* dan ditandatangani oleh pihak-pihak dalam perjanjian dan surat ini adalah sah. Jadi, hal seperti ini bisa diterapkan juga di Indonesia untuk menghemat *cost*.

Jawaban

Terima kasih atas usulan Ibu. Indonesia seharusnya seperti Singapura, tetapi di Indonesia dokumen hukum dibuat oleh swasta sehingga keinginan negara belum sepenuhnya terwakili.

5. Pertanyaan: Muhamad Sahid (Ujung Pandang)

Bahasa hukum Indonesia memang berliku-liku karena umumnya bahasa tersebut adalah hasil terjemahan. Terjemahan yang baik harus tahu bahasa sumber, bahasa sasaran, dan isi hukum itu sendiri. Hukum di Indonesia kebanyakan berasal dari Eropa. Bahasa hukum dalam Al Quran sangat singkat dan jelas. Hukum Islam bukan negara Islam, tidak *usah* negara Islam. Jadi, teman-teman hukum sebenarnya dapat mengangkat hukum-hukum Islam tersebut.

Jawaban

Penggunaan hukum Islam sudah dimulai di Nangroe Aceh Darusalam, tetapi masih banyak masalah. Jika memakai hukum Islam harus memakai mazhabnya siapa? Itu yang masih perlu dipikirkan.

5. Pertanyaan: ... (...)

Saya curiga, praktisi hukum masih bertahan pada lima hal (kecenderungan/kebiasaan berbahasa di kalangan hukum) tadi. Contohnya, penggunaan kata “tidak tak terbatas” menghasilkan produk presiden seumur hidup. Ini adalah bahasa hukum yang membingungkan. Oleh karena itu, mohon kesepakatan 30 tahun lalu itu (tercantum dalam makalah) segera dilaksanakan karena supremasi hukum perlu segera ditegakkan.

Jawaban

Ketentuan-ketentuan hukum kita memang berupa terjemahan. Pada tahun 1945 bahasa kita masih terbatas, bahkan sampai tahun 2000 UUD masih dianggap lebih dari kitab suci karena tidak boleh diubah. Akibat penerjemahan, amandemen konstitusi masih *amburadul*, baik dari segi materi maupun pengalimatannya.

8119

5.11.21

PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI PENDUKUNG PENGEMBANGAN APLIKASI TEKNOLOGI BAHASA

Arry Akhmad Arman

Dosen dan Peneliti "Human Machine Interface"

Departemen Teknik Elektro, ITB

Email : aa_arman@rocketmail.com

Abstrak

Perkembangan dimensi perangkat buatan manusia yang semakin kecil serta tuntutan kenyamanan berinteraksi yang semakin tinggi telah menyebabkan berkembangnya "teknologi bahasa". Teknologi ini sangat *language dependent* dan merupakan bidang yang bersifat multidisiplin sehingga pengembangan teknologi ini untuk bahasa Indonesia menghasilkan tantangan yang menarik dan memerlukan kerja sama berbagai pihak, terutama para ahli dari bidang teknologi komputasi dan linguistik. Ketersediaan berbagai hasil penelitian di bidang linguistik, khususnya bahasa Indonesia, akan sangat membantu pengembangan berbagai aplikasi teknologi bahasa untuk bahasa Indonesia. Makalah ini akan membahas secara garis besar tentang teknologi-teknologi yang dapat dikategorikan sebagai teknologi bahasa, bagaimana perkembangannya di Indonesia serta kebutuhan data-data atau hasil penelitian linguistik untuk menunjang pengembangan teknologi tersebut.

Kata kunci : Teknologi Bahasa

Pendahuluan

Manusia banyak menggunakan bahasa untuk berinteraksi atau berkomunikasi antarmanusia. Bahasa dapat dibedakan menjadi bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dari sudut pandang yang lain, bahasa sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bahasa alami serta bahasa buatan. Bahasa alami adalah bahasa yang berkembang secara alami dan digunakan untuk berkomunikasi antarmanusia, misalnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Bahasa buatan adalah bahasa yang secara sengaja dikembangkan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya, bahasa pemrograman komputer.

Interaksi antara manusia dan komputer saat ini lebih banyak menggunakan bahasa buatan yang berbentuk tulisan. Teknologi komputer saat ini tidak mempunyai kesulitan yang berarti untuk melakukan proses bahasa

buatan yang tertulis, misalnya, menerima perintah formal dalam bentuk tertulis untuk mengakses suatu *database* atau mengartikan pola pikir manusia yang dituangkan dalam suatu bahasa pemrograman komputer. Namun demikian, teknologi komputer sekarang masih mempunyai banyak keterbatasan untuk memproses bahasa alami, serta bahasa lisan.

Jika mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia sebagai komunitas pengguna bahasa Indonesia yang cukup besar, pengembangan teknologi ini untuk aplikasi bahasa Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Teknologi Bahasa

Sampai saat ini teknologi yang berkaitan dengan bahasa dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

- 1) Teknologi pengenalan ucapan (***speech recognition***), yaitu teknologi yang berfungsi untuk mengubah bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Sebagai contoh, sebuah ucapan "saya ingin makan" akan diubah menjadi tulisan "saya ingin makan".
- 2) Teknologi teks ke ucapan (***text to speech***, selanjutnya disebut TTS), yaitu teknologi yang berfungsi untuk mengubah informasi teks yang dihasilkan oleh komputer menjadi ucapan. TTS sering disebut pula dengan istilah penyintesa ucapan atau ***speech synthesizer***.
- 3) Teknologi pemrosesan bahasa alami (***natural language processing*** atau NLP), adalah teknologi yang berfungsi melakukan pemrosesan bahasa alami. Teknologi ini biasanya menerima dan menghasilkan informasi dalam bentuk tekstual (bahasa tulisan).

a. Teknologi *Speech Recognition*

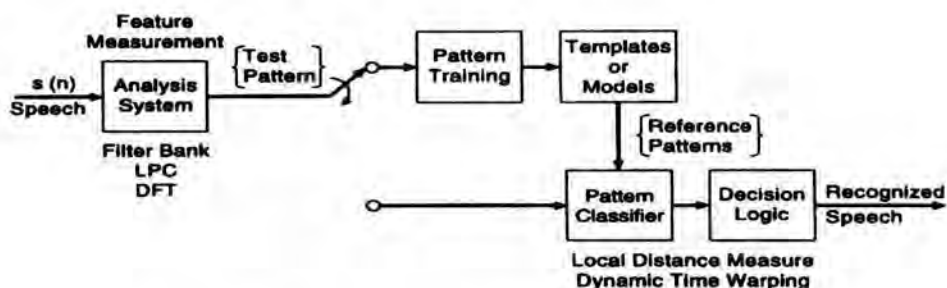
Sistem *speech recognition* atau pengenalan ucapan adalah sistem yang berfungsi untuk mengubah bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Masukan sistem adalah ucapan manusia, selanjutnya sistem akan mengidentifikasi kata atau kalimat yang diucapkan dan menghasilkan teks yang sesuai dengan apa yang diucapkan.

Gambar berikut memperlihatkan konfigurasi tipikal suatu sistem pengenalan ucapan. Sinyal ucapan ($s(n)$) pertama kali akan dilewatkan pada bagian penganalisis ucapan untuk mendapatkan besaran-besaran atau ciri-ciri yang mudah diolah pada tahap berikutnya. Untuk setiap ucapan yang berbeda akan dihasilkan pola ciri yang berbeda. Sistem dioperasikan pada dua mode yang berbeda.

Pertama adalah mode belajar. Pada mode ini sistem akan diajarkan oleh sejumlah kata atau kalimat yang memenuhi suatu kriteria tertentu. Setiap contoh kata atau kalimat ajar tersebut akan menghasilkan pola

tertentu yang akan dipelajari oleh sistem dan disimpan sebagai *template* atau referensi.

Kedua adalah mode produksi atau pengenalan ucapan. Pada mode ini setiap kalimat yang ingin dikenali akan ditentukan polanya. Berdasarkan hasil perbandingan dengan *template* atau referensi, modul klasifikasi pola serta pengambil keputusan akan mengidentifikasi kata atau kalimat yang diucapkan.



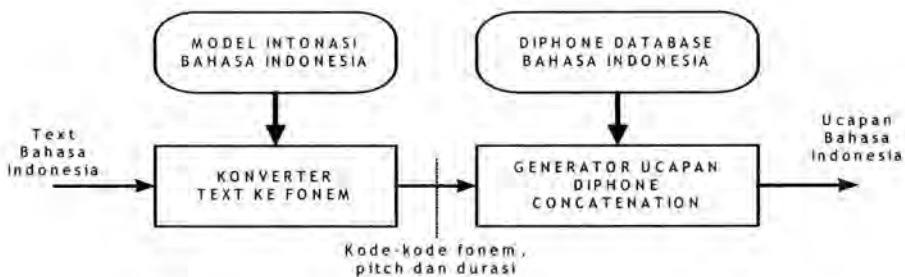
Gambar 1.1 Blok Diagram Sistem Pengenal Ucapan

Pada prinsipnya, teknik-teknik atau algoritma yang digunakan pada sistem pengenal ucapan tidak bersifat sensitif terhadap bahasa. Artinya, sistem yang sama dapat digunakan untuk bahasa apa pun. Namun demikian, kemampuan sistem untuk mengenali ucapan pada bahasa tertentu sangat bergantung pada *template* atau referensi yang diperoleh melalui proses belajar di dalam sistemnya itu sendiri. Untuk melatih sistem pengenal ucapan agar dapat digunakan untuk suatu bahasa yang baru, diperlukan korpus untuk melatih sistem tersebut. Korpus yang dimaksud adalah berupa rekaman ucapan yang heterogen dalam volume yang sangat besar serta memenuhi kriteria teknis tertentu.

b. Teknologi *Text to Speech*

Secara fungsional, *text to speech* atau TTS melakukan proses sebaliknya dari sistem pengenal ucapan. Namun demikian, pendekatan implementasinya sama sekali berbeda. Artinya, komponen-komponen pembentuk kedua sistem tersebut sama sekali berbeda.

Pada dasarnya TTS adalah suatu sistem yang dapat mengubah text menjadi ucapan. Suatu sistem pensintesa ucapan atau *text to speech* pada prinsipnya terdiri dari dua subsistem, yaitu (1) bagian konverter teks ke fonem (*text to phoneme*) dan (2) bagian konverter fonem ke ucapan (*phoneme to speech*).



Gambar 1.2 Blok Diagram Sistem Text to Speech

Bagian konverter teks ke fonem berfungsi untuk mengolah kalimat masukan dalam suatu bahasa tertentu yang berbentuk teks menjadi urutan kode-kode bunyi yang direpresentasikan dengan kode fonem, durasi, serta *pitch*-nya. Setiap bahasa memiliki aturan cara pembacaan dan cara pengucapan teks yang sangat spesifik. Hal itu menyebabkan implementasi unit konverter teks ke fonem menjadi sangat spesifik terhadap suatu bahasa (*language dependent*).

Bagian konverter fonem ke ucapan akan menerima masukan kode-kode fonem serta *pitch* dan durasi yang telah dihasilkan oleh bagian sebelumnya. Berdasarkan kode-kode tersebut, bagian ini akan menghasilkan bunyi atau sinyal ucapan yang sesuai dengan kalimat yang ingin diucapkan.

Ada beberapa alternatif teknik yang dapat digunakan untuk implementasi bagian konverter fonem ke ucapan. Dua teknik yang paling banyak digunakan adalah *formant synthesizer*, serta *diphone concatenation*. Saat ini, teknik kedua lebih banyak digunakan karena dapat menghasilkan ucapan dengan kualitas yang lebih alami.

c. Teknologi Natural Language Processing

Teknologi *natural language processing* (NLP) atau pemrosesan bahasa alami adalah teknologi yang memungkinkan untuk melakukan berbagai macam pemrosesan terhadap bahasa alami yang biasa digunakan oleh manusia. Sistem itu biasanya mempunyai masukan dan keluaran berupa bahasa tulisan (teks). NLP mempunyai aplikasi yang sangat luas. Beberapa di antara berbagai kategori aplikasi NLP adalah sebagai berikut:

- 1) **Natural language translator**, yaitu *translator* dari satu bahasa alami ke bahasa alami lainnya, misalnya, *translator* bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dan sebagainya. *Translator* bahasa alami bukan hanya kamus yang menerjemahkan kata per kata,

tetapi harus juga mentranslasikan sintaks dari bahasa asal ke bahasa tujuannya.

- 2) **Translator bahasa alami ke bahasa buatan**, yaitu *translator* yang mengubah perintah-perintah dalam bahasa alami menjadi bahasa buatan yang dapat dieksekusi oleh mesin atau komputer. Sebagai contoh, *translator* yang memungkinkan kita memberikan perintah bahasa alami kepada komputer. Dengan sistem seperti itu, pengguna sistem dapat memberikan perintah dengan bahasa sehari-hari, misalnya, untuk menghapus semua *file* kita cukup memberikan perintah **"Komputer, tolong hapus semua file!"** *Translator* akan mentranslasikan perintah bahasa alami tersebut menjadi perintah bahasa formal yang dipahami oleh komputer, yaitu **"dir. <ENTER>".**
- 3) **Text summarization**, yaitu suatu sistem yang dapat "membuat ringkasan" hal-hal yang penting dari suatu wacana yang diberikan.

Kesulitan utama yang dihadapi oleh NLP adalah masalah ambiguitas yang terdapat pada bahasa alami. Ambiguitas dapat muncul pada berbagai tingkat, mulai kata, frasa, atau kalimat. Salah satu dampaknya adalah kesulitan memilih interpretasi yang paling tepat untuk suatu kata atau kalimat yang bersifat demikian. Manusia sendiri melakukan hal tersebut berdasarkan analisis konteks yang didukung pengetahuan yang dimiliki di dalam otaknya. Mesin atau komputer yang tidak dilengkapi pengetahuan seperti itu menjadi sulit melakukannya. Jika NLP diterapkan untuk aplikasi bahasa lisan, kesulitan lainnya mungkin terjadi. Dalam bahasa lisan, manusia sangat sering membentuk ucapan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa yang digunakan.

Aplikasi-Aplikasi Teknologi Bahasa

Banyak manfaat yang dapat dicapai dari ketersediaan aplikasi teknologi bahasa, khususnya untuk bahasa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan teknologi bahasa.

1) Alat Bantu Membaca untuk Tunanetra

Alat bantu membaca bagi tunanetra mempunyai masukan berupa teks tercetak (misalnya buku) dan mempunyai keluaran berupa ucapan dari teks tercetak yang diberikan. Pada prinsipnya ada dua komponen utamanya, yaitu bagian "pengenal karakter" yang menggunakan teknologi OCR (*optical character recognition*), serta bagian TTS. Dengan alat bantu ini, orang tunanetra dapat membaca suatu buku atau dokumen. Bahkan,

jika teks yang ingin dibaca sudah tersedia di dalam komputer, dengan teknologi *text to speech* dapat langsung diucapkan.

2) Alat Bantu Bicara untuk Tunawicara

Alat bantu membaca bagi tunawicara mempunyai masukan posisi tangan yang dideteksi oleh suatu sensor dan unit identifikasi. Rangkaian huruf yang diidentifikasi akan disusun membentuk suatu kata yang pada akhirnya akan diumpankan pada bagian TTS. Prototip sistem seperti ini pernah dikembangkan di Departemen Teknik Elektro ITB, pada tahun 2000 [EA2000].

3) Online Translator

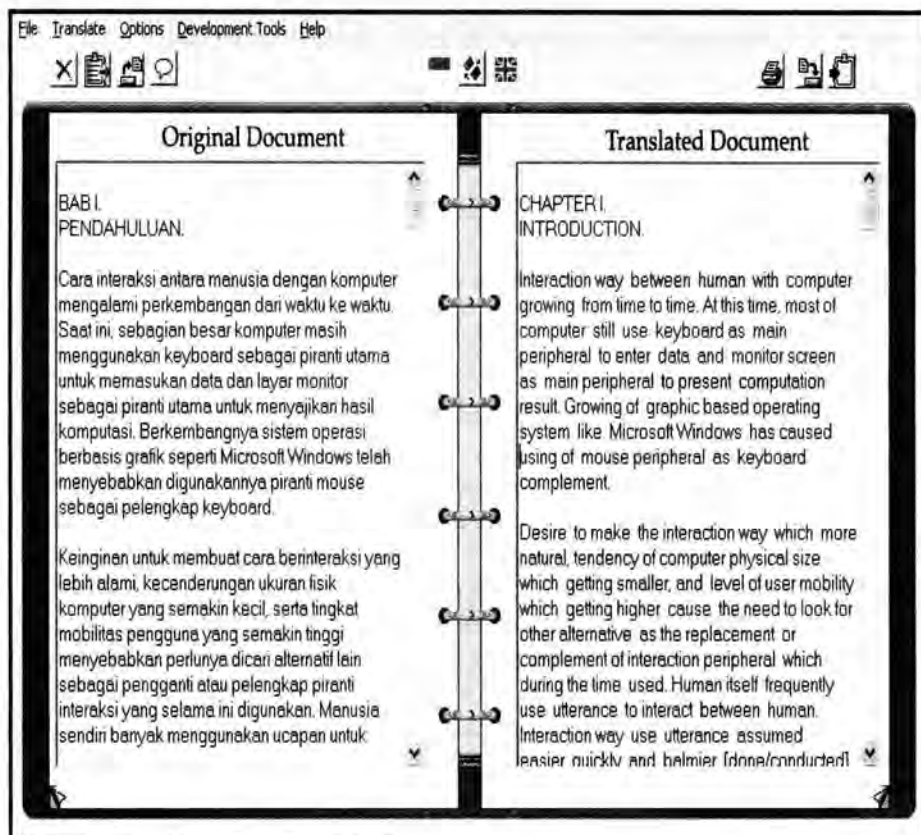
Online translator yang dimaksud di sini adalah *translator* yang secara otomatis dapat menerjemahkan kalimat lisan dari suatu bahasa alami (misalnya bahasa Inggris) menjadi ucapan hasil terjemahannya dalam bahasa alami lainnya (misalnya bahasa Indonesia). *Online translator* terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, *speech recognition*, berfungsi untuk mengenali rangkaian kata dari bahasa sumber menjadi teks dalam bahasa sumber. Bagian berikutnya adalah *translator* teks ke teks. Hasil bagian kedua ini adalah kalimat bahasa tujuan yang masih berupa teks. Bagian ketiga berupa sistem TTS dalam bahasa tujuan. Aplikasi seperti itu mungkin untuk dikembangkan karena teknologi *speech recognition* sudah banyak dikembangkan. *Translator* bahasa pun sudah banyak dikembangkan, termasuk *translator* bahasa Inggris ke Indonesia.

4) Talking Email atau Aplikasi Lainnya

TTS juga memungkinkan diintegrasikan dengan berbagai program aplikasi, seperti email, *web browser*, aplikasi-aplikasi multimedia, atau aplikasi-aplikasi lainnya.

5) Aplikasi Telephony

TTS dapat digunakan pada aplikasi *telephony*, seperti sistem informasi *billing* atau sistem informasi lainnya yang diucapkan secara lisan. TTS juga dapat digunakan untuk konversi dari SMS (*short message system*) ke ucapan sehingga pesan SMS dapat didengar. Dengan demikian, TTS memungkinkan untuk mendengar pesan SMS sambil melakukan aktivitas yang menyulitkan untuk membacanya, seperti sedang mengendarai mobil. Dengan TTS tersebut, memungkinkan pula untuk meneruskan pesan SMS ke sistem telepon biasa (PSTN). *Speech recognition* memungkinkan pencarian informasi secara lisan.



Perkembangan Teknologi Bahasa di Indonesia

Bagaimana perkembangan teknologi bahasa di Indonesia? Walaupun jauh tertinggal dibandingkan dengan kondisi di negara-negara maju, tidak sedikit hasil penelitian atau produk komersial di bidang teknologi ini. Dari tiga kategori besar teknologi bahasa yang sudah dibahas sebelumnya, sudah banyak hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan pada bidang *text to speech* dan *natural language processing*.

Sejak tahun 2000, peneliti dari ITB telah berhasil mengembangkan *text to speech* bahasa Indonesia yang berkualitas cukup baik. Bahkan, pada tahun 2003 program tersebut disediakan di internet dan diperbolehkan untuk digunakan untuk aplikasi nonkomersial dan nonmiliter secara cuma-cuma (<http://indotts.melsa.net.id>). TTS tersebut merupakan TTS bahasa Indonesia yang pertama dan sampai saat ini masih dapat dikatakan satu-satunya TTS bahasa Indonesia yang lengkap disertai intonasi bahasa Indonesia yang cukup baik. Untuk dapat menghasilkan intonasi yang baik, TTS tersebut dilengkapi dengan model intonasi bahasa Indonesia didalamnya.

Model intonasi tersebut dikembangkan khusus untuk TTS tersebut karena sebelumnya belum ada model intonasi bahasa Indonesia yang pernah dikembangkan.

Di bidang *natural language processing* (NLP) banyak pihak yang melakukan berbagai kegiatan di bidang ini, misalnya, di BPPT dan di ITB. Beberapa penelitian dan pengembangan yang pernah dilakukan diantaranya pengembangan sistem *translator* Bahasa Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris atau bahkan *translator* multibahasa, seperti penelitian Internasional yang turut dilakukan oleh BPPT. Khusus untuk *translator*, bahkan sudah ada produk komersial yang sudah lama dipasarkan. *Translator* bahasa alami adalah suatu sistem yang tidak mudah dan dapat dikatakan hampir tidak mungkin membuat *translator* yang sempurna seperti kemampuan manusia. Namun demikian, banyak inovasi yang dapat dilakukan untuk membuat *translator* yang kualitasnya baik dalam menerjemahkan berbagai dokumen.

Gambar di atas memperlihatkan salah satu *prototype translator* yang masih sedang dikembangkan oleh peneliti dari ITB. Sebagai perbandingan, di bawah ini adalah contoh hasil translasi dari sumber yang sama yang dilakukan oleh *software translator* komersial.

CHAPTER I. ANTECEDENT.

Way of interaction [among/between] human being with natural computer [of] growth from time to time. In this time, most computers still use keyboard as especial apparatus for the input of [screen/sail] and data monitor as especial apparatus to present result of computing. Expanding of it operating system base on graph like Microsoft Windows have caused the using of apparatus of mouse as complement of keyboard.

Desire to make the way of have more natural interaction [to], tendency of computer physical measure which smaller, and also mount consumer mobility which was excelsior cause the importance of searched [by] other alternative in the place of or complement of interaction apparatus was which during the time used. Human being alone using many utterances to.

Berdasarkan informasi dari pertemuan-pertemuan yang melibatkan peneliti teknologi bahasa, beberapa pihak tengah mengembangkan teknologi *speech recognition* untuk bahasa Indonesia, misalnya di ITS. Namun, jika dibandingkan dengan dua teknologi lainnya, perkembangan teknologi ini di Indonesia masih relatif lambat. Sampai saat ini, belum ada produk atau hasil pengembangan di bidang ini yang siap diaplikasikan.

Bahasa Indonesia dan Pengembangan Teknologi Bahasa

Ketersediaan data-data linguistik serta hasil penelitian linguistik akan sangat menunjang pengembangan berbagai sistem serta aplikasi teknologi bahasa. Saat ini para pengembang teknologi ini masih merangkap menjalankan fungsi sebagai seorang peneliti bahasa karena banyak data linguistik yang diperlukan yang belum tersedia untuk bahasa Indonesia. Pada tabel berikut ini penulis mencoba membuat daftar kebutuhan data-data serta hasil penelitian linguistik yang akan sangat bermanfaat untuk pengembangan teknologi bahasa. Tentunya masih banyak hal lain yang diperlukan di luar apa yang tercantum dalam tabel tersebut.

No.	Dukungan Data/Hasil Penelitian Linguistik	Diperlukan
1	Daftar fonem serta alofon yang baku untuk bahasa Indonesia	SR dan TTS
2	Rekaman ucapan dengan berbagai intonasi baku bahasa Indonesia yang dianotasi per frasa, per kata, serta per fonem	TTS dan Pemodelan Intonasi
3	Rekaman ucapan berbagai intonasi untuk kalimat yang sama dengan pengucap yang berbeda-beda dialeknya, baik dialek daerah maupun dialek karena tujuan pengucapan yang berbeda (cerita, berita, dialog, dan sebagainya)	TTS dan Pemodelan Intonasi
4	Data durasi fonem-fonem bahasa Indonesia pada berbagai kondisi yang berbeda	TTS dan SR
5	Rekaman kata/kalimat dari sekumpulan orang yang heterogen dengan distribusi fonem yang seimbang	SR
6	<i>Part of speech bahasa Indonesia</i> yang baku serta <i>sub-part-nya</i> .	NLP
7	Korpus kalimat yang sudah dianotasi per kata (penandaan jenis kata)	NLP
8	Kamus baku bahasa Indonesia berbentuk elektronik (file komputer).	NLP
9	Paralel language bahasa Indonesia dengan bahasa lain	NLP

Penutup

Penelitian-penelitian di bidang teknologi bahasa adalah penelitian multidisiplin yang memerlukan dukungan paling tidak dari para ahli linguistik serta para ahli teknologi yang mempunyai keterkaitan di bidang ini. Jika diaktifkan dengan fenomena globalisasi, banyaknya jumlah penduduk Indonesia, serta persentase yang mempunyai kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa asing, pengembangan teknologi bahasa menjadi sangat penting dan strategis.

Saat ini sudah mulai ada forum-forum pertemuan linguistik yang melibatkan para teknolog yang mempunyai minat terhadap teknologi bahasa, misalnya, beberapa kegiatan yang telah dilakukan bersama-sama oleh Unika Atmajaya, BPPT, dan ITB. Dari forum tersebut terlihat adanya keinginan yang besar dari kedua belah pihak untuk saling bekerja sama.

Marilah kita memanfaatkan keadaan yang sudah mulai tercipta ini dengan memikirkan program-program yang lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, A. Akhmad, dll. 2001. "Prosody Model for Indonesia"
- Arman, A. Akhmad, dll. 2001. "Prosody Model for Indonesia Language", APCC 2001 Proceeding, Tokyo.
- Arman, A. Akhmad. 1999, "*Analisis Transisi Sinyal Ucapan Bahasa Indonesia*", Workshop on Electro, Communication and Information III Proceeding, Bandung
- Arman. A. Akhmad, 1999. "*Analisis Fonem pada Sinyal Ucapan Bahasa Indonesia*", Workshop on Electro, Communication and Information III Proceeding, Bandung
- Dutoit, Thierry. 1997. "An Introduction to Text-to-Speech Synthesis", Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.
- Halim, Amran. 1969. "Intonation in Relation to Syntax in Indonesia". Disertasi di University of Michigan.

LAPORAN SIDANG

Hari, tanggal : Rabu, 15 Oktober 2003
Judul Makalah : Pengembangan Bahasa Indonesia Sebagai Pendukung
Pengembangan Aplikasi Teknologi Bahasa
Pemakalah : Arry Akhmad Arman
Pemandu : Multamia R.M.T. Lauder
Pencatat : 1. I Nengah Budiasa
2. Adi Triyono

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Prof. Dr. Amran Halim (Universitas Sriwijaya, Palembang)
 - a. Saya mendapat kesan yang sangat mendalam dan merasa sangat kagum dengan apa yang telah Anda paparkan. Pertanyaan saya, apakah bahasa Indonesia bisa dimasukkan dalam daftar bahasa-bahasa translasi, seperti bahasa Inggris dan Jepang?
 - b. Apa yang keluar dari ucapan teks menjadi ucapan yang sangat baik dan bermakna? Saya sangat kagum dengan hasil itu, tetapi bagi saya, ada sesuatu yang hilang, yaitu unsur emosionalnya. Bagaimana halnya dengan panjang pendeknya durasi intonasi yang ada dalam teks itu, yaitu intonasi yang memiliki makna semantik dan yang tidak memiliki makna semantik?

Jawaban:

Negara-negara, seperti Cina dan Jepang mengembangkan teknologi bahasa ini dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mempunyai pikiran bahwa bahasa Indonesia tidak diperlukan dalam teknologi ini dan teknologi ini dapat dihasilkan untuk memotivasi pembelajaran bahasa asing. Untuk bahasa Indonesia relatif mudah diprogram dan dikembangkan dengan bahasa-bahasa lain karena aturan (tata bahasanya) sederhana. Untuk memprogram intonasi dalam teknologi bahasa memang sulit dan harus menganalisis dari bidang sintaksisnya. Yang sederhana dan masih perlu disempurnakan untuk mendapatkan hasil intonasi bahasa yang mendekati intonasi bahasa alam.

2. **Pertanyaan:** Drs. Agus Jokopurwadi (Universitas Bengkulu)
 - a. Ada bahasa yang sifatnya kompleks dan ada yang sederhana. Kalau terjemahan yang dilakukan terjemahan satu kata lawan satu kata.

Bagaimana halnya dengan bahasa Jawa yang memiliki banyak makna (satu kata memiliki lebih dari satu makna).

b. Apa pentingnya penelitian durasi dalam bahasa Indonesia?

Jawaban

Untuk membuat translitasi/terjemahan harus dilakukan dengan kerja keras. Saya cenderung berpendapat untuk 10--15 tahun ke depan mesin translasi tidak bisa menyamai manusia, tetapi untuk jangka panjang ada kemungkinan bisa mengoperasikan teknologi ini. Untuk terjemahan satu lawan satu bisa diakali dengan pengkategorian subjek dengan membuat level-level verba dalam bahasa yang ditransliterasi. Misalnya, ada kata dahar (halus) untuk manusia dan nada (kasar) untuk binatang dalam bahasa Sunda. Namun, di balik itu kita tidak usah pesimistis dan kita dapat mengambil manfaat dari teknologi ini. Durasi itu memiliki signifikasi yang ada batasnya atau symfikan tidaknya durasi ada batas-batas tertentu. Yang jelas, durasi itu bersifat relatif tergantung pada jenis tranliterasi yang kita butuhkan.

BAHASA INDONESIA DITERJANG PENGGLOBALAN? WHAT IS TO BE DONE

Hernowo

Semua manusia mesti dicetak secara seragam dan dibentuk sesuai dengan satu rancangan yang telah ditetapkan sehingga mereka semua menjadi budak yang bergantung pada mesin pabrik "kekaisaran dunia". Semua orang harus menjadi satu jenis (penampilan fisiknya), satu jiwa, mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sama, gaya hidup yang sama, serta cara berpikir dan berimajinasi yang seragam....

Ali Syari'ati

Empat orang sahabat menemukan sekeping mata uang. Orang pertama, seorang Persia, berkata, "Dengan mata uang ini, aku akan membeli *anggur*." Orang kedua, seorang Arab, menyatakan keberatannya, "Tidak, kita harus membeli *inab*." Orang ketiga, seorang Turki, mengatakan, "Aku tidak ingin *inab*, aku menginginkan *uzum*." Sementara itu, yang terakhir, seorang Yunani, mengatakan bahwa ia tidak tertarik pada apa yang ditawarkan oleh tiga orang sahabat sebelumnya. "Aku," katanya, "ingin *stafili*."

Kita dapat membaca anekdot tersebut dalam *Matsnawi* karya Jalaluddin Rumi. Lewat buku-menariknya, *Tantangan Dunia Islam Abad 21: Menjangkau Informasi*, Ziauddin Sardar kemudian menggunakan kisah di atas untuk membahas pentingnya menyusun sebuah strategi informasi di dunia muslim dalam kerangka tiga unsur kunci: informasi, ilmu pengetahuan, dan kebijakan. Mari kita simak penjelasan Sardar.

Maulana Rumi menceritakan bahwa karena keempat orang sahabat itu tidak mengetahui arti di balik apa yang dikatakan masing-masing, mereka kemudian terlibat pertengkaran. Mereka memiliki informasi, tetapi tidak memiliki pengetahuan.

Ketika pertengkaran sedang memuncak, lewatlah seorang yang bijaksana. Orang ini kemudian mendamaikan para sahabat yang sedang bertengkar, dan berkata, "Aku bisa memenuhi keinginan kalian semua dengan uang yang kalian temukan. Syaratnya, kalian harus percaya dengan sepenuh hati. Sekeping uang ini akan menjadi empat, dan kalian berempat akan rukun kembali."

Orang bijak itu kemudian pergi dan membeli buah *anggur*. Begitu ia kembali, keempat orang sahabat itu menjadi gembira. Ternyata, semua mereka, dengan bahasanya masing-masing, telah menyatakan kebutuhan-nya akan hal yang sama, yaitu *anggur*.

Anekdote dari Maulana Rumi ini merupakan suatu upaya yang jelas untuk membedakan tiga konsep: informasi, ilmu pengetahuan, dan kebijakan. Informasi digambarkan di sini sebagai keinginan empat orang sahabat untuk makan *anggur*, *inab*, *uzum*, dan *stafili*. Keinginan ini dapat diartikan sebagai “fakta-fakta” yang tidak tertata dan tidak berhubungan satu sama lain.

Orang bijak yang dapat meredakan pertengkaran mereka itu mampu menyusun fakta-fakta ini menjadi sebuah kesatuan informasi yang tertata berkat pengetahuan yang dimilikinya. Berkat kebijakannya, ia mampu menerapkan pengetahuannya dengan informasi yang sepenuhnya telah diasimilasikan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan penuh pengertian.

Mula-mula saya merasa kesulitan membuat makalah ini. Kesulitan utama yang saya alami terutama saat ingin memenuhi permintaan panitia agar saya dapat menjawab empat pertanyaan yang dilayangkan kepada saya. Mengaitkan era perdagangan bebas dengan kebahasaan sungguh bukan persoalan gampang.

Saya kemudian mengirimkan keempat pertanyaan dan tema kongres bahasa ke *mailing-list* (*milis*) yang saya ikuti. Selain ke *milis*, saya juga melemparnya ke beberapa teman yang, menurut anggapan saya, dapat membantu saya. Saya yakin bahwa suatu persoalan apabila dipecahkan bersama akan menjadikan persoalan itu lebih ringan dihadapi.

Alhamdulillah, *e-mail* saya mendapat respons dan pembahasan. Rata-rata *e-mail* yang masuk ke *mail-box* saya memang bernadakan sebuah pernyataan yang membuat saya semakin sadar bahwa apa yang ingin saya tulis untuk kongres bahasa kali ini merupakan persoalan yang luas dan kompleks.

Strategi informasi apa pun bagi dunia muslim harus berusaha menempatkan informasi di dalam konteks ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan kebijakan tradisional. Kita tampaknya mempunyai kesulitan tertentu dalam memahami dan mengapresiasi kualitas yang terakhir ini. Namun, dalam keadaan dunia muslim sekarang ini yang dipenuhi oleh pelbagai problem yang meluas, pelik, dan saling berkaitan dan secara lebih umum kondisi umat manusia, yang dipenuhi oleh meningkatnya secara eksponensial pelbagai krisis, tak ada yang bisa dianggap lebih fatal daripada memudarnya kebijakan ini.

The Shorter Oxford Dictionary memberikan definisi umum mengenai istilah *wisdom* (kebijaksanaan) sebagai kemampuan untuk memberikan penilaian secara benar mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan perilaku atau kadangkala juga diartikan, sekalipun agak longgar, sebagai akal sehat khususnya dalam menangani masalah-masalah yang bersifat praktis. Mengenai penilaian adil ini, Nabi Muhammad saw. pernah bersabda, “Sepatah kata bijak yang mampu dicerna seseorang adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya.”

Saya membawa-bawa kisah Maulana Rumi yang dimaknai secara memikat oleh Sardar untuk saya jadikan pintu masuk memahami dunia kita saat ini. Dunia kita mengalami perubahan dahsyat akibat, salah satunya, membanjirnya informasi dari banyak sumber. Ini dicirikan dengan sebuah dunia yang disebut sebagai “dunia *cyberspace*”. Sebuah dunia yang di dalamnya terjadi koneksi besar-besaran antara sumber informasi yang satu dan sumber informasi yang lain, yang dapat diidentifikasi dengan nama internet.

Majalah *Tempo* edisi 22 Juni 2003 pernah melaporkan percepatan sekian kali lipat yang akan dibawa internet dalam mentransfer dan mengakses data. Teknologi internet kembali mengalami revolusi besar. Setelah bekerja selama tiga tahun, Steven Low menuntaskan sebuah mahakarya yang akan mengubah peradaban dunia. Profesor ilmu komputer di California Technology Institute, Amerika Serikat, ini berhasil merancang protokol baru untuk komunikasi internet. Protokol berbasis bahasa mesin ASCII ini menjadi *doping* bagi kecepatan akses internet. “Ini protokol dengan kecepatan kedipan mata manusia,” ujar Low.

Oleh para perancangannya, protokol baru ini disebut FAST TCP (*fast active queue management scalable transmission control protocol*). Boleh dibilang bahwa ini generasi mutakhir dari *transmission control protocol* (TCP) yang telah dikenal sebelumnya. Hebatnya, protokol baru ini membuat kecepatan akses internet meningkat tajam.

Dalam uji coba awal pengiriman data dari Pasadena, Amerika Serikat, ke Jenewa, Swiss (yang berjarak 10.037 kilometer), terlihat perbedaan kecepatan transfer data lewat internet. Dengan TCP, kecepatan pengiriman sekitar 266 *megabit per seconds* (Mbps) dengan tingkat efisiensi hanya 27 persen. Hebatnya lagi, para ahli jaringan itu mampu membuat FAST TCP “paralel” dengan kecepatan yang tak terbayangkan: 9,8 *gigabit per seconds* (Gbps). Kecepatan itu sebanding dengan 980 ribu kali akses dari telkomnet instan di Indonesia.

Nah, dengan memahami dunia kita seperti itu, apa yang dapat kita rencanakan dan siapkan agar bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dapat ikut berkembang bersama dunia yang berubah secara sangat cepat dan mengglobal? Tampaknya, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk membuat bahasa Indonesia berdaya dalam arus pengglobalan adalah dengan melakukan revolusi atas penggunaan bahasa Indonesia di bidang apa pun, terutama berkaitan dengan tulis-menulis.

Dalam mencoba menunjukkan pentingnya melakukan revolusi atas penggunaan bahasa Indonesia itulah, saya akan memaparkan serbaringkas landasan pemikiran saya lebih dahulu. Landasan saya ini saya bangun dari sebuah buku karya Gordon Dryden dan Jeannette Vos yang berjudul *the learning revolution: to change the way the world learn*. Di dalam buku ini, kedua penulis berusaha menunjukkan secara *snapshot* tentang telah

terjadinya perubahan besar-besaran dalam cara belajar (*how to learn*). Beberapa orang di hampir seluruh penjuru dunia telah merevolusi cara-cara belajar mereka berdasarkan hasil-hasil riset mutakhir tentang otak.

Perubahan dalam cara belajar itu tidak hanya menghasilkan capaian yang dua atau tiga kali lipat lebih besar daripada capaian sebelumnya. Proses perubahan cara belajar yang merevolusi itu benar-benar mampu meningkatkan capaian yang beratus-ratus kali lipat. Inilah yang disebut sebagai perubahan yang meng-*quantum*!

Buku *The Learning Revolution* sendiri telah mencontohkan dengan bagus berkaitan dengan cara sebuah buku dapat meng-*quantum*-kan pembacanya. Meskipun ketebalannya mencapai lebih dari lima ratus halaman, buku ini—lewat cara-cara membaca khas yang dianjurkan oleh kedua penulisnya—dapat diakses dan dipahami oleh seorang pembaca dalam tempo lima belas hingga tiga puluh menit. Ini benar-benar sebuah revolusi. Buku ini memang mencoba menyajikan materinya lewat cara-cara yang berbeda, terutama bagaimana sebuah gagasan yang disajikan lewat buku dapat merangsang seorang pembaca menggunakan seluruh kekuatan otaknya secara optimal.

Pada zaman ini sebagian besar orang di dunia menghabiskan waktunya dengan bahasa. Kecuali tidur dan mengunyah makanan, hidup ini hampir-hampir tak bebas dari bahasa. Bahkan, dalam tidur pun ada orang yang bicara, kalau bukan bermimpi berbincang dengan orang lain. Ketika sendirian pun, orang sibuk berbahasa dengan buku atau majalah di tangan, *walkman*, atau televisi di hadapannya.

Sebagian besar waktu berpacaran di kalangan remaja dimakan bahasa, entah di telepon, di surat, atau di taman. Bahasa meluber di tempat kita bekerja di kantor atau toko, belajar di sekolah, berdebat di ruang pengadilan, atau mengisi teka-teki silang di kamar penjara. Di dunia ini, banyak darah dan air mata mengucur gara-gara bahasa. Pedang dihunus dan massa dimobilisasi karena bahasa. Aneka kebahagiaan, kehormatan, sakit hati, dan kekecewaan berawal dan berakhir dengan kata-kata.

Para sastrawan mendapatkan jati dirinya dengan bahasa. Para pengacara, hakim, jaksa, sarjana, guru, perancang iklan dan wartawan mendapatkan nafkahnya dari kemahiran berbahasa. Sejumlah warga negara, seperti Sri Bintang Pamungkas dan Budiman Sudjatmiko, dipenjara karena bahasa.

Kisah manusia adalah kisah liku-liku berbahasa. Bagaimana persisnya bahasa bisa menggerakkan dunia dengan kekuatan yang mahadahsyat ini? (Dr. Ariel Heryanto dalam "*Perlawanan dalam Kepatuhan*").

Salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah berkaitan dengan bagaimana buku itu menyajikan gagasan penulisnya sehingga gagasan tersebut mudah disantap dan dinikmati oleh pembacanya adalah dengan memenuhi sekujur halaman kiri buku dengan kata-kata yang

mensugesti. Buku itu menyebut kata-kata yang diletakkan secara sangat khusus itu sebagai poster. Hal itu disebut sebagai poster lantaran kata-kata itu dapat dibesarkan dan kemudian ditempelkan di dinding di depan meja belajar atau meja kerja seseorang sehingga dapat dipahami maknanya setiap hari. Dengan memahami makna positif dari kata-kata tersebut, insya Allah, seseorang akan digerakkan untuk melakukan apa yang diminta oleh kata-kata itu sehingga seseorang dapat merasakan manfaat langsung dari kata-kata itu.

Buku itu juga memberikan solusi praktis dalam membantu pembacanya memecahkan sebuah masalah. Buku tersebut berupaya keras mengajak pembacanya untuk segera menindaki makna yang diserap dari kata-kata yang dihadapkannya. Misalnya, di halaman 26 kita dapat menemukan kata-kata ciptaan Robert C. Shank, penulis *engines for learning*, yang “membumi”, “To learn it, do it!”. Di halaman 32 kita dapat menemukan kata-kata ciptaan Jeannette Vos yang berbunyi, “*Your own model for a new learning world: You learn by what you see, hear, taste, smell, touch, do, imagine, intuition, and feel.*” Bahkan, bab penutup buku itu masih berusaha meyakinkan para pembaca yang berasal dari mana pun bahwa, “*Just do it! how any country can lead the learning revolution, anda so can you.*”

Lalu, apa yang dikatakan oleh buku tersebut tentang dunia kita yang sedang bergerak dan berubah secara sangat cepat serta mengglobal? Buku itu memprediksi akan ada enam belas macam kecenderungan utama yang akan membentuk dunia di masa depan. Berkaitan dengan tema pembahasan kita, sedikitnya ada tujuh hal yang dapat kita pelajari dari enam belas kecenderungan tersebut.

Pertama, zaman komunikasi instan. Teknologi penyimpanan dan penyajian informasi telah berkembang luar biasa. Ini memungkinkan orang untuk mengakses informasi secara instan dalam pelbagai bentuk. Kemampuan tersebut telah merevolusi bisnis, pendidikan, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, manajemen, dan hampir segala sesuatu yang kita ketahui.

Kedua, dunia tanpa batas-batas ekonomi. Secara tak terelakkan, kita juga bergerak menuju sebuah dunia yang memungkinkan sebagian besar perdagangan menjadi tak terbatas layaknya Internet. “Jin telah keluar dari botolnya”: transfer uang tunai dari pelbagai belahan bumi—sekurang-kurangnya \$1,3 triliun per hari—telah mengubah sifat pekerjaan dan perniagaan dunia.

John Naisbitt, penulis *Megatrends 2000*, mencantumkan ekonomi global sebagai salah satu prediksi utamanya. “Itulah arah yang dituju dunia sebuah ekonomi dunia-tunggal. Memang, ada kecenderungan sebaliknya, berupa proteksionisme di sepanjang jalannya, tetapi kecenderungan utamanya tetap bergerak menuju dunia yang memungkinkan berlangsungnya perdagangan bebas antarnegara.”

Ketiga, empat lompatan menuju ekonomi dunia-tunggal. Walaupun sistem keuangan internasional telah mendorong pertumbuhan ekonomi dunia-tunggal, ada empat lompatan menuju masa depan yang menjanjikan: (1) kontinuitas kepemimpinan Amerika di bidang-bidang strategis seperti inovasi elektronik dan juga kepemimpinannya di dunia “konvergensi” yang baru; (2) kelahiran kembali Eropa sebagai entitas ekonomi tunggal, sebagai model bagi komunitas terpadu; (3) munculnya “macan-macan ekonomi” yang dinamis sebagai model bagi negara kecil; dan (4) kebangkitan Cina, negara berpenduduk terbanyak di dunia, sebagai model bagi negara terbelakang dengan penduduk besar.

Keempat, perdagangan dan pembelajaran (*learning*) melalui internet. Dengan mengaitkan keempat lompatan di atas dengan dunia perdagangan dan pendidikan, kita memperoleh gambaran mengagumkan tentang dunia masa depan. Seperti ditunjukkan dalam Proyek Li, orang tidak hanya berkomunikasi secara cepat ke seluruh penjuru dunia, tetapi mereka dapat berdagang dan belajar secara instan pula.

Kelima, penemuan terbaru tentang otak yang mengagumkan. Beberapa kalangan mengatakan bahwa era 1970-an merupakan dekade eksplorasi angkasa; 1980-an merupakan dekade pertumbuhan ekonomi; dan 1990-an merupakan dekade penemuan ruang batin—ketika akhirnya orang menghargai dan memanfaatkan potensi luar biasa otak manusia.

Keenam, nasionalisme budaya. Dengan semakin mengarah ke ekonomi dunia-tunggal, kita semakin mengembangkan gaya hidup global. Akan tetapi, kita juga mengamati kecenderungan yang berlawanan, yang disebut oleh Naisbitt sebagai nasionalisme budaya. “Semakin kita mengglobal dan menjadi saling bergantung secara ekonomi, kita pun semakin bertindak manusiawi; kita semakin menegaskan kekhasan kita, semakin ingin mempertahankan bahasa kita, dan berpegang teguh pada akar dan kebudayaan kita. Walaupun Eropa bergabung secara ekonomi, saya kira bangsa Jerman akan semakin Jerman, dan bangsa Prancis akan semakin Prancis,” tulis Naisbitt.

Hampir enam tahun saya mengajar bahasa dan sastra Indonesia di SMU (Plus) Muthahhari, Bandung. Saya mengajar hanya kelas dua dan pada hari Sabtu. Setiap Sabtu itu saya menghabiskan waktu enam jam untuk mengajar di tiga kelas yang berbeda. Setiap kali bertemu dengan murid-murid saya, senantiasa saya berpesan bahwa saya tidak sedang mengajarkan teori bahasa. Saya sedang membagikan pengalaman saya berkaitan dengan bagaimana menggunakan bahasa.

Saya mendorong murid-murid saya untuk berlatih menggunakan bahasa Indonesia setiap hari dengan cara mengekspresikan secara bebas atau menulis di buku harian milik mereka. Bagi saya, bahasa dapat menjelma menjadi semacam “senjata” yang ampuh apabila digunakan secara kontinu dan konsisten.

Apabila bahasa yang mereka kuasai dapat mereka gunakan untuk “merumuskan” diri mereka, saya *kok* yakin bahwa mereka akan tidak dibingungkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar diri mereka. Apabila bahasa dapat mereka gunakan untuk “mengikat” perjalanan hidup mereka yang sangat mengesankan, saya *kok* yakin bahwa mereka akan merasa bangga dengan kehidupan mereka. Apabila bahasa mereka gunakan untuk “menunjukkan” apa saja yang ada di dalam diri mereka, saya *kok* yakin bahwa mereka akan menemukan potensi unik mereka.

Ketujuh, ledakan praktik mandiri. Komputer pribadi saat ini mampu melakukan berbagai pekerjaan yang selama ini kita lakukan dengan bantuan para ahli: menyiapkan warisan, menangani rekening, membeli saham dan obligasi, dan menghitung pajak. Setiap orang yang bijaksana menyadari bahwa kesehatan juga dipengaruhi oleh perbuatan kita: apa yang kita makan dan minum dan bagaimana kita berolahraga.

Akan tetapi, di bidang “pendidikan”, perubahan itu muncul secara perlahan. Renate Nummela Caine dan Geoffrey Caine, pakar pendidikan asal California, menjelaskan dalam buku mereka, *Making Connections: Teaching and the Human Brain*, “Salah satu fungsi sekolah adalah menyiapkan siswa untuk menghadapi dunia nyata. Mereka perlu disadarkan tentang harapan yang mereka pikul, tantangan yang mereka hadapi, dan kemampuan yang perlu mereka kuasai. Kita berasumsi bahwa sedikit banyak sekolah dapat memenuhi tujuan itu. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Sekolah hanya menanamkan ilusi dan mengaburkan tantangan yang sebenarnya. Khususnya, sekolah gagal menangani dampak media elektronik.”

Kritik tersebut tentu saja berlaku untuk sekolah yang mengubah diri dengan cepat, dan mendorong para siswanya untuk mengendalikan dunia mereka sendiri. Akan tetapi, bukankah hal itu tidak terjadi di sebagian besar sekolah? Pandangan kami adalah bahwa proses belajar akan semakin mandiri: diarahkan-sendiri dan dipenuhi sendiri.

*

Baik, kini tibalah kita di bagian akhir dalam mencoba mendudukkan bahasa Indonesia di tengah arus pengglobalan yang sedang berlangsung secara besar-besaran. Apa yang dapat kita lakukan? Dari mana kita mesti mulai mengurai masalah (kalau ada) dan ke mana arah yang harus kita tuju? Apakah ada langkah-langkah praktis dan mudah kita lakukan untuk memahami sekaligus mencari sebuah solusi?

Dalam surat undangan yang ditujukan kepada saya, panitia kongres meminta saya untuk membahas topik “Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Perdagangan Bebas”. Panitia berharap agar saya dapat, setidaknya, memberikan jawaban atas empat pertanyaan berikut.

Pertama, bagaimana dampak perdagangan bebas terhadap perkembangan pemakaian bahasa Indonesia? *Kedua*, apa kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam era perdagangan bebas? *Ketiga*, apa manfaat yang diperoleh dan kerugian yang dialami jika bahasa asing tidak boleh digunakan dalam perdagangan bebas di Indonesia? *Keempat*, strategi apa yang harus dilakukan agar bahasa Indonesia memainkan peran strategis dalam perdagangan bebas di Indonesia?

Setelah semua itu, di dalam surat undangan yang ditujukan kepada saya tersebut, panitia menyertakan juga selembaar edaran umum yang menjelaskan maksud diadakannya Kongres Bahasa Indonesia VIII Tahun 2003. Di antara isi edaran umum tersebut terdapat uraian tentang tema dan pokok bahasan. Tema kongres adalah “Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi”. Kemudian, tema tersebut dijabarkan ke dalam tiga pokok bahasan (bahasa, sastra, dan media massa). Saya memilih yang berkaitan dengan cakupan bahasa meliputi tujuh hal berikut.

Bagaimana, misalnya, (1) memantapkan peran bahasa Indonesia dalam menghadapi budaya global? Bagaimana (2) meningkatkan mutu bahasa Indonesia dalam memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Bagaimana (3) meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam memantapkan kesadaran berbangsa? Bagaimana (4) meningkatkan mutu pendidikan bahasa Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat madani? Bagaimana (5) mengembangkan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing (BIPA)? Bagaimana (6) meningkatkan mutu pengajaran bahasa asing di Indonesia? Bagaimana (7) memantapkan peran bahasa daerah dalam memperkukuh ketahanan budaya bangsa?

Begitu saya membaca kembali secara berulang-ulang tentang hal-hal yang diinginkan oleh panitia kongres, saya tiba-tiba teringat kepada Ali Syari’ati. Syari’ati dikenal sebagai salah seorang cendekiawan—bahkan bisa digolongkan ke dalam seorang pemikir-tercerahkan (*rausyanfikir*)—Iran yang tulisan-tulisannya “menggerakkan”. Dia, bersama beberapa tokoh lain, disebut-sebut sebagai arsitek keberhasilan Revolusi Islam Iran.

Saya mengenal Syari’ati lewat buku-buku karyanya. Mengenang Syari’ati sembari merujuk ke buku *The Learning Revolution*, membuat saya ingin menyatakan bahwa untuk memecahkan persoalan bahasa Indonesia di tengah arus pengglobalan, perlu ditemukan cara-cara yang revolusioner. Lewat kekuatan bahasa yang revolusioner pula, Syari’ati setidaknya telah berhasil memberikan contoh kepada saya bagaimana mengobarkan semangat revolusi di negerinya dalam rangka membebaskan diri dari keter tindasan dan dominasi pihak asing.

Mengapa seseorang bisa berpikir lain sekali dari tindakannya sehari-hari dan mengapa kita tidak dapat menyimpulkan dengan mudah bagaimana

seseorang hidup hanya dari mendengar buah pikirannya? Mengapa seorang pejabat tinggi yang korup tingkah lakunya, gemar mengemukakan pemikirannya tentang kejujuran dan pemerintahan yang bersih? Bagaimana menjelaskan bahwa seorang intelektual yang sangat otoriter dalam sikap-sikapnya tidak henti-hentinya berbicara dan menulis tentang demokrasi, kebebasan, dan pluralisme?

Dapatkah kita memahami mengapa seorang politikus yang pergaulannya sangat elitis, gemar berbicara tentang penderitaan rakyat? Pertanyaan-pertanyaan sejenis ini muncul hampir setiap hari dalam kehidupan kita dan sangat mungkin bahwa semua hal yang harus dipertanyakan sudah diterima sebagai wajar belaka dan bukan lagi suatu inkonsistensi yang perlu diselidiki. (Ignas Kleden ketika memberi sambutan di acara Penghargaan Achmad Bakrie 2003 di Hotel Niko, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2003, sebagaimana disampaikan oleh *Media Indonesia*, edisi Minggu, 17 Agustus 2003).

Akhirnya, Iran dipimpin oleh Ayatullah Khomeini berhasil menunjukkan jati dirinya. Setelah merenungkan secara dalam rahasia kesuksesan revolusi tersebut, yang saya rasakan salah satunya adalah berkaitan dengan faktor bahasa. Lagi, merujuk kepada Syari`ati, kita dapat belajar bagaimana Syari`ati mengungkapkan pandangannya dengan “meminjam” bahasa revolusioner kaum kiri.

“What Is To Be Done” adalah salah satu judul tulisan Syari`ati yang sangat saya sukai dan bernada “menggerakkan”. Tulisan lain Syari`ati berjudul unik pula, yaitu “From Where Shall We Begin”. Dengan memanfaatkan bahasa revolusioner seperti itu, bahasa kemudian seperti memiliki “tenaga dahsyat” yang ada kemungkinan, dapat membantu kita melakukan sebuah perubahan secara sangat mendasar.

Selain Syari`ati, saya juga ingin bersandar pada gagasan Sardar, Ignas Kleden, Ariel Heryanto, Dryden dan Vos, serta Taufik Abdullah dalam memecahkan persoalan kebahasaan yang diberikan kepada saya. Saya juga akan memanfaatkan pengalaman saya bergulat hampir dua puluh tahun dengan bahasa Indonesia di sebuah penerbit. Saya juga akan memanfaatkan cara-cara revolusioner—kalau ini boleh dikatakan demikian—berkaitan dengan eksperimen saya selama mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia. Dalam eksperimen tersebut, saya berusaha keras untuk menunjukkan kepada murid-murid saya bagaimana proses penggunaan bahasa Indonesia secara tertulis dapat menggairahkan seseorang untuk peduli kepada bahasa miliknya sendiri.

Tentu saya tak mungkin memecahkan semua persoalan yang diberikan kepada saya. Saya bahkan ingin buru-buru berapologi bahwa usulan pemecahan yang saya tuliskan di sini benar-benar tidak sistematis dan terumuskan dengan baik. Bahkan, ada kemungkinan, saya ingin mengusulkan suatu pemecahan, tetapi sebenarnya saya tidak mengusulkan apa-apa.

Merujuk ke Lee dan Das Gupta—yang mengatakan bahwa membaca dalam arti yang sebenarnya (*comprehensive reading*) adalah bukan sekadar pengenalan (*recognition*) terhadap huruf-huruf dan bukan pula sekadar kesanggupan mengeja (*spelling*) suku kata tak berarti (*non-sense syllables*)—bahasa tulis yang mengalir dapat membantu si pembaca mencapai makna secara sangat cepat dan nyaman.

Untuk memahami bahan bacaan, seseorang harus dapat menemukan sendiri di mana dia harus meletakkan tekanan, intonasi, nada suara, ekspresi tertentu dan isyarat-isyarat lain yang menjadikan bahan bacaan itu dapat dipahami artinya. Pada tahap ini membaca bukan lagi sekadar mengenal huruf dan bagaimana mengeja gabungan suku kata dan kata atau membaca-tanpa-mengerti, melainkan sanggup memahami saripati suatu penuturan melalui rangkaian kalimat-kalimat sebagai suatu keutuhan. (Lihat makalah Prof. Dr. Fuad Hassan, “Perihal Perkembangan Anak dan Pelajaran Membaca”, yang ditulis pada 23 November 2000).

Bagaimana seseorang yang menggunakan bahasanya dapat menyampaikan gagasan secara enak dan mengalir? Dia harus terlebih dahulu terbiasa mengungkapkan dirinya secara tertulis. Dia harus berusaha keras untuk membuka apa saja yang tersimpan di dalam dirinya dan mengeluarkan secara bebas tanpa tekanan. Dia harus memecahkan kendala-intel internal berekspresi diri ini sebelum masuk ke proses mengekspresikan hal-hal yang berada di luar dirinya.

Sungguh, saya hanya ingin mencoba fokus pada pemecahan persoalan yang berkaitan dengan bagaimana bahasa Indonesia dapat berkembang dan berdaya untuk dapat digunakan dalam menggali dan kemudian memunculkan hal-hal unik nan menarik yang terdapat di “alam” Indonesia. “Alam” Indonesia yang saya maksudkan di sini merupakan “alam” batin alias pengalaman yang sudah berlangsung puluhan bahkan, mungkin, ratusan tahun yang tersimpan di dalam setiap “diri” orang Indonesia.

Menurut saya, untuk dapat menggali keunikan “alam” Indonesia dan untuk dapat memunculkan hal-hal istimewa yang dimilikinya, seseorang perlu memiliki *keprigelan* dalam menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis. Apakah mungkin keunikan dan kekayaan “alam” Indonesia dapat diungkapkan secara pas persis dalam bahasa selain bahasa Indonesia? Apakah mungkin kehebatan dan *kedigdayaan* “alam” Indonesia dapat ditampilkan secara dahsyat dan memukau apabila orang yang berkehendak menampilkan itu tidak menguasai kemampuan dalam menyusun bahasa Indonesia secara tertulis?

Dengan mempelajari hal-hal yang disampaikan oleh Ignas dan Taufik Abdullah, Taufik Abdullah mengatakan, “Apakah bahasa dan alat utama yang dimilikinya, yaitu kata, hanya penamaan belaka atautkah memang merupakan wakil sesungguhnya dari realitas atau pikiran dan perasaan dari sang pemberi pesan?” Kiranya sudah saatnya bahasa Indonesia dikaitkan

benar dengan masalah penulisan dalam konteks apa pun. Bagi saya, menulis itu “mengikat”. Menulis lainnya berjanji kepada diri sendiri bahwa apa yang akan ditulis merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Menulis juga merupakan salah satu cara mengeluarkan sekaligus menampilkan sifat-sifat dan karakter seorang penulis.

Menurut Zahorik, “Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta dan konsep yang sudah siap diterima, melainkan ‘sesuatu’ yang harus dikonstruksi”. Bagi saya, salah satu cara mengonstruksi pengetahuan secara efektif adalah lewat menulis. Kegiatan menulis mengajak seseorang untuk menyusun dan menyampaikan pemahaman secara sangat ketat. Selama itu, menulis saya persepsi sebagai kegiatan “mengikat”, “merumuskan”, dan “menunjukkan” seongkah makna.

Saya melihat bahwa kita perlu membenahi secara radikal cara-cara pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Bahasa Indonesia dan juga para penggunanya, kadang menjadi tidak berdaya lantaran pengajaran bahasa Indonesia seolah-olah dijauhkan dari realitas “alam” Indonesia yang terus berkembang sangat pesat. Pengajaran bahasa Indonesia sepertinya tidak mampu lagi melibatkan karakter-karakter unik bangsa Indonesia sendiri karena para penggunanya tidak secara sungguh-sungguh diajak untuk menggunakan bahasa Indonesia, terutama dalam hal menulis.

Di SMU (Plus) Muthahhari saya mengajak para siswa untuk setiap hari menuliskan hal-hal tertentu, yang benar-benar dialaminya, di catatan harian milik mereka secara sangat bebas. Mereka saya minta untuk “melepaskan” sebebas mungkin (*unleashing*) potensi-unik yang mereka miliki. Proses *unleashing* ini harus dilakukan setiap hari sehingga pada suatu saat ketika menulis mereka sudah tidak lagi terbebani dengan kegiatan menulis. Akhirnya, kegiatan menulis menjelma menjadi sebuah cara mengalirkan dirinya ke lembaran-lembaran kertas secara menyenangkan.

Kepada setiap murid saya, saya menekankan agar setiap menuliskan pikiran dan perasaannya, mereka berupaya keras melibatkan diri mereka. Gunakan kata ganti orang pertama (saya) untuk menggali isi sang diri. Tuliskan secara bebas seluruh pengalaman dan tunjukkan secara berani hal-hal yang dimiliki sang diri.

Saya yakin bahwa apabila mereka mau membiasakan diri menulis setiap hari tentang diri mereka, insya Allah mereka akan *prigel* dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk keperluan memunculkan potensi unik mereka. Di kelas saya memang lebih kerap mendiskusikan hasil-hasil eksplorasi mereka dalam memakai “alat” bernama menulis. Inilah cara saya membuat pengguna bahasa Indonesia dan juga bahasa Indonesia itu sendiri menjadi berdaya.

Dalam konteks yang lebih luas, strategi informasi yang diusulkan Sardar saya kira juga tepat digunakan sebagai salah satu cara membuat bahasa Indonesia tetap dapat bertahan di tengah arus gencar pengglobalan

bahasa dunia. Yang diperlukan—merujuk Sardar—hanya *wisdom*. Dalam bahasa Indonesia, *wisdom* bisa berarti *kebijakan* dan “kebijakan”. Kebijakan yang satu berarti kebijaksanaan (*wisdom*), sementara “kebijakan” yang lain berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).

Saya menganjurkan kepada murid-murid saya untuk belajar bahasa di dunia yang lebih luas daripada sekolah. Saya mengumpulkan bahan pengajaran saya dari majalah, koran, internet, tabloid, buku, publikasi, katalog, siaran pers, iklan, radio, televisi, dan segala jenis sumber informasi yang saya kumpulkan setiap hari selama seminggu.

Saya mendorong murid-murid saya untuk menggunakan kemampuan membaca dan menulis secara aktif dan benar-benar disadari. Bacalah apa pun yang dapat kamu baca. Dengarkanlah apa pun yang ingin kamu dengar. Setelah kamu membaca dan mendengarkan secara aktif, lanjutkan kegiatan itu dengan “mengikat” atau menuliskan apa pun yang berkesan dan terkait erat dengan pengalaman dirimu.

Begitulah cara belajar bahasa di sebuah era yang sangat cepat berubah dan mengglobal seperti saat ini. Kamu mungkin akan merasa bingung bagaimana meletakkan diri kamu di alam nyata yang terus bergerak. Sekolah—apalagi kelas-kelas yang kamu masuki—*kayaknya* tidak bisa lagi dijadikan tempat utamamu untuk menyerap sesuatu yang berharga dan bermakna. Dunia di luar sekolahlah yang harus kamu jadikan sumber utama proses belajarmu agar kamu terus dapat bergerak dengan arus sejarah yang sebenarnya.

Para pengguna bahasa Indonesia—terutama para pejabat pemerintah yang terlibat dengan perdagangan bebas—perlu “bijak” dalam menjalankan strateginya. Yang lebih penting, “kebijakan” yang diambil oleh setiap departemen, misalnya, harus benar-benar saling terkait dan berjalan secara sinergis. Untuk dapat sampai ke sebuah rumusan “kebijakan” yang sinergis, masing-masing pihak perlu melihat secara saksama unsur kedua dari strategi informasi yang diusulkan Sardar, yaitu soal ilmu pengetahuan.

Selama ini penggunaan bahasa Indonesia secara tertulis dalam bentuk yang ditujukan untuk menyiarkan peraturan atau mengabarkan strategi pemerintah dalam memasuki pasar global cenderung belum diwujudkan secara menarik dan menggairahkan. Mencari buku yang representatif tentang rencana Indonesia memasuki pasar bebas dan apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat masuk ke pasar bebas dengan penuh percaya diri, masih saya rasakan sulit. Di sini tentu “kebijakan” yang melibatkan semua pihak perlu digalang dan direncanakan secara matang dan memberdayakan semua pihak.

Terakhir, saya ingin menyinggung soal proses pemberdayaan bahasa Indonesia dan pengguna bahasa Indonesia berkaitan dengan buku sekolah.

Saya melihat tidak sedikit buku sekolah yang malah memperdaya bahasa Indonesia, terutama bahasa tulis dan juga memperdaya pengguna bahasa, yaitu anak-anak sekolah. Kebanyakan buku sekolah ditulis dengan bahasa tulis yang kurang menggairahkan penalaran. Ini dapat dibuktikan secara cepat dari petunjuk tentang siapa pengarang yang tertera di sampul buku.

Saya amati bahwa jarang sekali buku sekolah yang mencantumkan secara gamblang autoritas pengarang dalam ke-*prigel*-annya menulis. Rata-rata, autoritas pengarang disajikan dalam bentuk yang bukan menguasai keprigelan menulis. Bahkan, ada beberapa buku sekolah yang dibuat ke-royokan dan tidak jelas siapa sebenarnya para penulisnya itu. Ini berakibat pada buruknya penyajian bahasa yang harus dibaca oleh anak-anak sekolah. Akibat kesulitan mencerna bahasa, ada kemungkinan anak-anak sekolah tersebut menjadi trauma apabila membaca sebuah buku.

Saya berpendapat bahwa bahasa Indonesia akan dapat berdaya apabila penggunaannya—dalam hal ini digunakan sebagai bahasa tulis—benar-benar dapat memberdayakan si pengguna bahasa tulis, yaitu para pembaca. Sebagai contoh konkret, penerjemahan teks kitab suci alquran yang tidak memenuhi kaidah penalaran, akan dapat membuat seorang muslim tepedaya sehingga merasa tidak mampu memahami kitab sucinya dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks lain, seorang siswa yang kesulitan memahami buku pelajaran akan merasa tidak berdaya dan kemudian menyalahkan dirinya. Padahal, bisa jadi bukan dia yang tidak mampu membaca, melainkan teks yang dibacanyalah yang tidak tersusun dengan baik.

Dalam buku karya David Clutterbuck, *The Power of Empowerment: Release the Hidden Talents of Your Employees*, saya menemukan rumusan menarik tentang hakikat pemberdayaan. Ternyata hukum pemberdayaan itu berbunyi seperti ini “Tidak ada seorang pun bisa diberdayakan oleh orang lain; individu-individu harus memberdayakan diri mereka sendiri.” Nah, sebelum bahasa Indonesia dapat berdaya di tengah arus gencar pengglobalan, bahasa Indonesia harus dapat diberdayakan dulu di tengah masyarakatnya sendiri. Bagaimana cara memberdayakan bahasa Indonesia di tengah masyarakatnya sendiri? Bahasa Indonesia harus digunakan secara tertulis secara jernih, indah, dan tertata, serta “menggerakkan” pikiran si pengguna bahasa tertulis tersebut—apakah dia sebagai penulis atau pembacanya.

Jika membaca kembali tentang apa yang saya rumuskan dalam memecahkan persoalan bahasa Indonesia dalam cecaran arus gencar pengglobalan, saya memang lebih cenderung menggunakan strategi internal. Artinya, marilah kita melakukan sesuatu untuk memberdayakan “diri” kita sendiri lebih dahulu, ketimbang mengaitkan pemberdayaan itu dengan hal-hal di luar “diri” kita. Yang saya maksud dengan “diri” adalah pengguna bahasa Indonesia yang asli orang Indonesia. Apabila kita tidak mencoba memperbaiki cara-cara penggunaan bahasa Indonesia di sekolah, misalnya,

ada kemungkinan kita tidak mampu melangkah lebih jauh untuk masuk ke strategi eksternal yang melibatkan pihak luar atau dunia internasional. Apabila kita paksaan untuk tetap merumuskan strategi eksternal—sebelum strategi internal dijalankan secara revolusioner, kita bisa-bisa malah memperdaya, bukan memberdayakan bahasa Indonesia dan penggunanya.

Teks adalah salah satu *liberating forces* yang penting jika tak hendak dikatakan yang terpenting,” kata Taufik Abdullah. “Dengan tulisan atau teks, pencerahan bangsa bisa diharapkan akan terjadi.” Di tengah serbuan gencar pengglobalan yang oleh Syariat berdampak pada kemungkinan terbentuknya “keseragaman” atau pemusnahan jati diri—“semua orang harus menjadi ‘hewan-hewan konsumen’, semua bangsa harus dilepaskan sama sekali dari keasliannya, mereka harus membuang karakteristik-karakteristik spiritual, sejarah, agama, dan etnis mereka”—bahasa Indonesia perlu segera di-jelmakan menjadi salah satu *liberating forces*!

BAHAN BACAAN

- Abdullah, Taufik. 1996. “Situasi Kebahasaan Masa Kini: Kepungan Eksternal dalam Perkembangan Bahasa dan Wacana di Indonesia”. Dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Ahmed, Akbar S. 1993. *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, Bandung: Mizan.
- Armstrong, Thomas. 2003. *Sekolah Para Juara: Menerapkan Multiple Intelligences di Dunia Pendidikan*. Bandung: Kaifa.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1990. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Bandung: Mizan.
- Al-Faruqi, Isma’il R., dan Al-Faruqi, Lois Lamya, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, Mizan, Bandung, 1998.
- Brunner, Laurel, dan Zoran, Jevtic. 1998. *Mengenal Internet for Beginners*, Bandung: Mizan.
- Buick, Joanna, dan Zoran, Jevtic. 1997. *Mengenal Cyberspace for Beginners*, Bandung: Mizan.
- Buzan, Tony. 2003. *Head Strong: Memperkuat Hubungan Otak dan Tubuh untuk Mendapatkan Fisik dan Mental yang Fit*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Clutterbuck, David. 2003. *The Power of Empowerment: Menggali dan Meningkatkan Potensi Karyawan Anda*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. "Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)".
- Dinno, dkk. 2003. *Larik Lirik Mencuatkan Potensi Unik: Apresiasi Musik Siswa-Siswi SMU (Plus) Muthahhari*. Bandung: Penerbit MLC.
- Dryden, Gordon dan Jeannette, Vos. 1999. *The Learning Revolution: To Change the Way the World Learns*, The Learning Web. revised and updated: New Zealand.
- Frank, Marjorie. 1995. *If You're Trying to Teach Kids How to Write....* Revised Edition. Incentive Publications Inc., Tennessee.
- Hassan, Fuad. "Perihal Perkembangan Anak dan Pelajaran Membaca". makalah yang ditulis pada 23 November 2000.
- Hernowo (ed.). 2003. *Quantum Writing: Cara Cepat dan Bermanfaat untuk Merangsang Munculnya Potensi Menulis*. Bandung. MLC.
- Heryanto, Ariel. 2000. *Perlawanan dalam Kepatuhan: Esai-Esai Budaya*, Mizan, Bandung: Mizan.
- Krashen, Stephen D. 1993. *The Power of Reading: Insights from the Research*, Colorado: Libraries Unlimited Inc.
- Kuntowijoyo. 1991. "Perlunya Ilmu Sosial Profetik", dalam Kuntowijoyo pada *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Kuroyanagi, Tetsuko. 1985. *Totto-Chan: Si Gadis Kecil di Tepi Jendela*. Jakarta: Pantja Simpati.
- La Feber, Walter. 2003. *Michael Jordan dan Neo-Kapitalisme Global*, Yogyakarta: Jendela.
- Matabaca. "Buku sebagai Produk Kebudayaan". Edisi Khusus Tahunan, Vol. 1/No. 12/Agustus 2003.
- Mukerja, Dilip, *Brainfinity*, Oxford University Press, Singapura, 1997.
- Nadjib, Emha Ainun. 1995. *Oples: Opini Plesetan*. Bandung: Mizan.
- Naisbitt, John, dll. 2001. *High Tech High Touch: Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi*. Bandung: Mizan.
- Negroponte, Nicholas. 1998. *Being Digital: Menyiasati Hidup dalam Cengkeraman Komputer*. Bandung: Mizan.

- Rakhmat, Jalaluddin. "Berhala Globalisme dan Ekonomi Global". Makalah tidak diterbitkan.
- Rose, Colin, dan Malcolm J. Nicholl. 1997. *Accelerated Learning for the 21st Century: The 6-Step Plan to Unlock Your M.A.S.T.E.R Mind*. Great Britain: Piatkus.
- Said, Edward W. 1995. *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*. Bandung: Mizan.
- Sardar, Ziauddin. 1988. *Tantangan Dunia Islam Abad 21: Menjangkau Informasi*. Bandung: Mizan.
- Sassy Girl, Miss. 2003. *Menulis Diary Membangkitkan Rasa Percaya Diri*. Bandung: MLC.
- Slouka, Mark. 1988. *Ruang yang Hilang: Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*. Bandung: Mizan.
- Syari'ati, Ali. 1988. *Membangun Masa Depan Islam: Pesan untuk Para Intelektual Muslim*. Bandung: Mizan.
- Tobias, Cynthia Ulrich. 1996. *Cara Mereka Belajar Fokus pada Keluarga.*, Jakarta.
- Wen, Syaling. 2003. *Future of the Media: Memahami Zaman Teknologi Informasi*. Batam: Lucky Publishers.
- Widjanarko, Putut. 2000. *Elegi Gutenberg: Memposisikan Buku di Era Cyberspace*. Bandung: Mizan.
- Zaleski, Jeff. 1999. *Spiritualitas Cyberspace: Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagamaan Manusia*. Bandung: Mizan.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2003
Judul Makalah : Bahasa Indonesia Diterjang Pengglobalan: *What is To Be Done?*
Penyaji : Ir. Hernowo
Pemandu : H. K.M.A. M. Usop
Pencatat : 1. Sastri Sunarti
2. Adi Triyono

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Zailili (Kendari)
Apa perbedaan bahasa lisan dan bahasa tulis?
2. **Pertanyaan:** Danunya Danawati (Universitas Udayana)
Bagaimana kalau ujian negara dikaitkan dengan metode quantum?
3. **Pertanyaan:** Martea (SMU 8 Manado)
Mata pelajaran di sekolah terlalu banyak sehingga siswa tidak memiliki waktu untuk membaca karya sastra. Bagaimana masalah ini?

Jawaban

- a. Tujuan pengembangan bahasa tulis adalah untuk mengungkapkan ide, pikiran secara struktural.
 - b. Ujian Negara
 - c. Tes "tertulis akan musnah" dari buku Howard Gardner Multipel Choice kurang baik karena tidak merekonstruksi pemikiran sedangkan menulis di baliknya.
 - d. Anak-anak harus dimotivasi untuk membaca dan menulis.
4. **Pertanyaan:** Asim Gunarwan
 - a. Quantum dalam bahasa Indonesia apa?
 - b. Masing-masing (hadiah) dalam proses pembelajaran apa tidak berbahaya.
 5. **Pertanyaan:** Suharti (SLTP Negeri 45 Kodya Bandung)
Apa kemudahan dan kesulitan metode quantum untuk pelajaran bahasa dan sastra Indonesia.

Jawaban

- a. Quantum adalah pembelajaran yang menyenangkan agar terjadi sinergi atau interaksi antara guru dan siswa sehingga emosi kegembiraan itu menular seperti radiasi yang keluar".
- b. Reward bukan untuk iming-iming siswa, melainkan mengajarkan siswa mencintai buku.

MEMBANGUN SUASANA DEMOKRATIS DALAM PENDIDIKAN SASTRA DI SEKOLAH

Yus Rusyana

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Pendahuluan

Oleh Ketua Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia VIII saya diminta untuk menyusun makalah yang berjudul "Peningkatan Mutu Pendidikan Sastra di Sekolah dalam Membangun Kehidupan Masyarakat Demokratis". Frasa *kehidupan masyarakat demokratis* itu saya persempit saja menjadi *suasana demokratis di dalam kelas* sehingga makalah ini berjudul seperti tercantum di atas.

Pertanyaan tentang bagaimana kondisi pendidikan sastra di sekolah dewasa ini, yang diajukan oleh Panitia, tidak saya jawab. Yang saya lakukan adalah membayangkan bagaimana suasana kelas yang demokratis dan mengemukakan kegiatan apa yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sastra untuk membangun suasana pendidikan yang demokratis itu.

Gambaran itu dapat digunakan sebagai bandingan terhadap kondisi pendidikan sastra di sekolah dewasa ini dan berdasarkan itu dapat diketahui apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sastra yang juga menjadi pertanyaan yang diajukan oleh Panitia.

Tulisan ini berupa esai dan disusun terutama berdasarkan gagasan serta pemikiran penulis yang diperoleh melalui pengalaman mengajar dan berdasarkan masalah-masalah yang sering disampaikan oleh para guru kepada penulis dalam berbagai kesempatan. Tentulah di dalamnya ada pula pemikiran yang berasal dari bacaan, tetapi sebagian sudah terpadu dengan pandangan penulis sendiri.

Suasana Kelas yang Demokratis

Suasana kelas dibangun oleh para pelakunya, guru dan para siswa. Mereka melakukan kegiatan, yaitu guru mengajar dan para siswa belajar. Perbuatan guru pada waktu mengajar dan perbuatan siswa waktu belajar serta interaksi guru dengan siswa, dan interaksi siswa dengan siswa merupakan proses dalam kegiatan berkelompok. Interaksi itulah yang menimbulkan karakteristik kelas keseluruhannya. Dalam keadaan demikian, para siswa bukan saja memiliki kualitas yang umum atau homogen, melainkan juga mengalami perubahan karena keanggotaannya sebagai warga kelas.

Kehidupan demokratis mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga. Di dalamnya, terdapat sikap hidup sebagai manusia yang beradab dan bermartabat, yang menghormati sesama manusia sebagai makhluk Tuhan melalui tindakan-tindakan yang berkeadilan.

Suasana kelas yang demokratis terjadi apabila perbuatan-perbuatan guru dan para siswa itu dilandasi dengan nilai-nilai yang demikian itu. Sifat autokratis, misalnya, dicairkan oleh kontrol atau respons kelompok keseluruhan sehingga tidak terjadi dominasi oleh satu pihak, misalnya, oleh guru atau beberapa orang siswa. Para siswa mendapat kesempatan untuk berlatih sebagai pemimpin dan, juga, sebagai pengikut bagi yang lain. Dengan demikian, diharapkan tumbuh kerja sama dan sekaligus kompetisi yang sehat di antara mereka. Hal itu dapat terjadi apabila setiap orang memiliki tanggung jawab serta kewajiban yang jelas dan memiliki penghormatan kepada orang lain.

Suasana kelas yang demikian juga memungkinkan para siswa untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir untuk memeriksa serta memecahkan masalah. Mereka juga memperoleh pengalaman untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai dan menjadikannya sebagai pedoman dalam bergaul dengan orang lain. Para siswa pun didorong untuk mengembangkan kemampuannya mengerjakan berbagai tugas dan didorong untuk berbuat secara kreatif.

Bagaimana suasana kelas yang demokratis dalam pendidikan sastra? Hal itu dapat diamati pada pelaku serta kegiatannya, yaitu siswa dan guru serta komponen-komponen pembelajarannya.

Siswa bersifat aktif. Siswa berbuat dengan menggunakan berbagai daya yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengalaman bersastra yaitu menggunakan pancaindra, lisan, pikiran, perasaan, imajinasi, dan kalbunya. Dengan menggunakan daya-daya itu, siswa memperoleh pengalaman mengapresiasi hasil sastra dan pengalaman berekspresi sastra. Kegiatan untuk mengapresiasi sastra adalah membaca, mendengarkan, dan menonton hasil sastra, sedangkan kegiatan untuk berekspresi sastra berupa kegiatan melisankan dan menulis karya sastra. Selain untuk memperoleh pengalaman bersastra, siswa melakukan kegiatan untuk memperoleh pengetahuan sastra, yaitu bertolak dari pengalamannya ia memperluas pengalamannya itu dengan menggunakan informasi tentang sastra dari berbagai sumber dengan bimbingan gurunya. Pengetahuan tentang sastra itu digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengalaman bersastra.

Siswa, dalam memperoleh pengalaman dan pengetahuan sastra itu, melakukan pula interaksi, dengan sesama siswa dan dengan gurunya. Dalam interaksi itu, siswa menyadari adanya berbagai pendapat orang lain, yang tidak selalu sama dengan pendapatnya dan berusaha untuk memahami serta menghargainya. Terjadi diskusi dengan menggunakan nalar serta

mengemukakan argumen yang berupa bukti yang berasal dari apa yang telah dialaminya dan berupa informasi yang berasal dari berbagai sumber yang diketahuinya. Dengan kegiatan-kegiatan bersastra yang dilakukannya itu, siswa menjadi terbiasa aktif, mandiri, mampu berkomunikasi, mampu bekerja sama, dan saling menghargai. Mereka juga menemukan dan menjunjung nilai-nilai, seperti nilai estetik, etik, saintifik, dan nilai religius yang terkandung dalam sastra yang telah dialaminya secara konkret dan yang telah ditelaahnya.

Pelaku lainnya dalam pendidikan sastra adalah guru yang bertugas mengajar. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran, membimbing, dan memotivasi siswa dalam kegiatan belajar. Yang tidak kurang pentingnya ialah menciptakan atmosfir kelas yang dapat mendorong siswa untuk melakukan perbuatan yang berguna, misalnya, membaca karya sastra. Begitu pula ia perlu menciptakan hubungan guru-siswa yang menyenangkan. Guru perlu mempunyai semangat dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru sastra. Berkenaan dengan hasil sastra, guru harus sudah membaca hasil sastra dari berbagai jenis dan berbagai periode, khususnya yang langsung terkait dengan substansi yang akan diajarkan. Ia pun perlu menelaah karya sastra yang telah dibacanya sehingga ia mampu menikmati dan memahaminya.

Tentulah guru sastra selain memiliki pengalaman bersastra, perlu pula memiliki pengetahuan kesastraan, seperti teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, dan sosiologi sastra, khususnya yang berkenaan dengan karya sastra yang dipilih menjadi bahan ajar. Pengetahuan kesastraan itu bukanlah untuk disampaikan sebagai teori yang lepas dari pengalaman siswa mengapresiasi hasil sastra, melainkan sebagai landasan yang digunakan pada waktu mengapresiasi dan menelaah hasil sastra. Bagaimanapun pengajaran sastra harus benar ditinjau dari segi ilmu sastra.

Dalam pembelajaran, guru dituntut untuk mengevaluasi hasil belajar, yaitu kemampuan siswa mengapresiasi hasil sastra dan berekspresi sastra. Evaluasi dilakukan pada proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Hal yang merupakan masalah adalah bagaimana evaluasi harus dijalankan agar dapat dikenakan pada perilaku siswa yang nyata. Perlu ditemukan instrumen berkenaan dengan kegiatan apresiasi dan ekspresi ini sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap kegiatan bersastra. Perlu diciptakan instrumen yang lebih sahih, terpercaya, dan mudah dilaksanakan.

Perangkat dalam Pendidikan Sastra

a. Kurikulum

Pelajaran Sastra Indonesia sudah tercantum dalam kurikulum di sekolah dasar serta madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama serta madrasah tsanawiyah, dan di sekolah menengah atas serta madrasah aliyah.

Proses penyusunan kurikulum yang baru (pascakurikulum 1994) sedang berlangsung dan sudah sampai pada tahap finalisasi.

Berkenaan dengan mata pelajaran sastra, dalam konsep kurikulum yang baru, terdapat standar kompetensi bersastra yang meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Sebagai contoh di sini dikutip perumusan kemampuan bersastra kelas satu sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, sebagai berikut.

Kemampuan Bersastra

1. Mendengarkan

Standar kompetensi:

- a. Mampu mendengarkan dan memahami serta menanggapi berbagai ragam wacana lisan sastra.
- b. Mendengarkan dan merefleksi pembacaan puisi dan memahami dongeng yang diperdengarkan.

2. Berbicara

Standar kompetensi:

- a. Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai jenis wacana lisan.
- b. Menanggapi pembacaan cerpen, mendongeng untuk orang lain, dan berbalas pantun.

3. Membaca

Standar kompetensi:

Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan sastra.

Membaca dan mendiskusikan isi puisi, membaca dan mengomentari buku cerita anak, membaca dan mengomentari buku kumpulan dongeng, dan membaca dan mendiskusikan isi buku cerita anak terjemahan.

4. Menulis

Standar kompetensi:

Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai bentuk tulisan sastra.

Menulis puisi dan menulis pantun.

Itulah contoh yang ada dalam kurikulum. Porsi pelajaran bersastra dan pelajaran berbahasa keadaannya seimbang. Hal lain seterusnya, seperti penyusunan silabus dan model pembelajaran, diserahkan kepada guru di daerahnya masing-masing. Begitu pula penentuan hasil sastra yang dibaca diserahkan kepada guru.

Demikianlah kurikulum yang baru itu (pasca 1994) dalam pelaksanaannya berdiversifikasi sesuai dengan kebutuhan daerah dan keadaan sekolah. Hal itu menuntut kesiapan dan kemampuan setiap daerah untuk mengembangkan dan melaksanakannya. Keadaan kurikulum dan kebijak-

sanaan dalam pelaksanaannya seperti itu, kiranya membuka kemungkinan untuk terciptanya suasana pendidikan sastra yang demokratis di sekolah.

b. Hasil Sastra

Dalam pengajaran sastra, hasil sastra merupakan salah satu landasannya di samping ilmu sastra dan ilmu pendidikan. Pengajaran sastra hendaknya bertolak dari pengalaman bersastra, yaitu pengalaman mengapresiasi sastra dan berkespresi sastra. Pengalaman dengan hasil sastra itulah yang dijadikan landasan untuk kemudian diperdalam dan diperluas dengan menggunakan ilmu sastra. Percakupan serta pengurutan bahan dan penyajiannya dilakukan dengan landasan ilmu pendidikan.

Hasil sastra yang digunakan hendaknya dipilih dengan mempertimbangkan keadaan hasil sastra dan keadaan siswa. Keadaan hasil sastra, antara lain, jenis hasil yang tersedia dalam khazanah sastra Indonesia meliputi dongeng, cerita pendek, hikayat, novel, drama, puisi, dan esai. Juga, hasil sastra terjemahan dari sastra daerah dan sastra asing. Keadaan itu tergambar pula dalam jumlah hasil sastra pada setiap jenis dan pada setiap kurun waktu. Begitu pula ukuran panjang pendek, penggunaan bahasa ragam lama dan ragam baru serta konvensi kesastraannya. Keadaan itu tergambar pula dari latar belakang yang beragam alam, sosial, dan budaya. Segi lainnya adalah pengarangnya: pria wanita, persebaran geografis, dan kurun waktu hidup pengarang. Tingkat kerumitan pembacaan bagi siswa juga merupakan bagian dari gambaran keadaan hasil sastra. Dari segi wujudnya terdapat buku yang masing-masing berisi sebuah hasil sastra (novel drama), kumpulan hasil sastra dari seorang pengarang (puisi cerpen), dan antologi.

Gambaran keadaan siswa di sekolah dan madrasah adalah berkenaan dengan tingkat perkembangan dirinya, yaitu perkembangan berpikir, merasa, berimajinasi, dan kompetensi membacanya, baik dalam kenyataan maupun menurut tuntutan kurikulum.

Dalam pemilihan buku hasil sastra, segi yang dipertimbangkan berkenaan dengan hasil sastra ialah bahasa, konvensi sastra, dan kandungan budayanya. Kriteria pemilihan adalah kesesuaian hasil sastra itu dengan tingkat perkembangan diri siswa dan kesesuaian dengan kompetensi membaca siswa. Jumlah hasil sastra perlu memenuhi keperluan selama pendidikan pada setiap jenjang sekolah. Pemilihan hasil sastra dipertimbangkan pula dari segi keragaman dalam jenis, kurun waktu, latar belakang sosial budaya, pengarang, tingkat kerumitan, dan wujud buku.

c. Buku Pelajaran

Buku pelajaran ialah buku yang digunakan sebagai sarana belajar di sekolah untuk menunjang program pembelajaran. Buku itu diperuntukkan

bagi siswa, yang dalam penggunaannya tidak habis sekali pakai. Buku pelajaran menyediakan materi yang tersusun untuk keperluan pembelajaran. Di dalamnya tersimpan pengetahuan yang memberi kemudahan bagi siswa untuk belajar mandiri. Buku pelajaran mengikuti kurikulum dengan cara menafsirkan kurikulum untuk kepentingan penyajian di kelas. Paham baru dalam pendidikan secara bertahap tercermin dalam materi dan susunan buku pelajaran. Pembaharuan kurikulum berdampak langsung pada buku pelajaran.

Di masa lalu buku pelajaran disusun oleh Pusat Perbukuan dan diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Sekarang pengadaan buku pelajaran diselenggarakan oleh penerbit swasta, sedangkan pemerintah pusat, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pusat Perbukuan, menentukan pedoman pengendalian mutu buku pelajaran. Standar penilaian buku pelajaran meliputi isi atau materi buku pelajaran, penyajian materi, bahasa serta keterbacaan, dan nilai-nilai edukasi. Penerbit mengajukan buku untuk dinilai. Hasil penilaian disertai saran perbaikan disampaikan kepada penerbit dan pengarang. Buku yang telah dinilai dan memenuhi standar diumumkan kepada masyarakat. Sekolah dapat memilih untuk membeli buku di antara buku yang memenuhi standar itu. Pengadaan buku seperti itu, kiranya memungkinkan terjadinya standar mutu yang sama dan perwujudan yang beragam dalam buku-buku pelajaran, termasuk buku pelajaran sastra.

d. Perpustakaan Sekolah

Keperluan pembelajaran tidaklah cukup hanya ditunjang oleh buku pelajaran. Perlu tersedia berbagai jenis buku yang lain. Untuk pendidikan sastra sudah tentu diperlukan buku-buku yang berisi hasil sastra, berupa novel, cerita pendek, hikayat, dongeng, drama, puisi, serta kritik dan esai sastra. Bahkan, untuk pelajaran sastra diperlukan pula bacaan berupa narasi faktual, seperti riwayat hidup (biografi, autobiografi, memoar) dan cerita sejarah (peristiwa sejarah yang dikisahkan).

Pelajaran sastra juga membutuhkan buku-buku lain, seperti buku ilmiah, khususnya buku ilmu sastra, dan bacaan ilmiah populer serta kamus umum, kamus istilah, ensiklopedi, peta, majalah, dsb. Semua itu, sebaiknya, terhimpun di perpustakaan sekolah. Dengan adanya perpustakaan sekolah, para siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan minatnya masing-masing melalui kegiatan membaca di perpustakaan. Minat dan kebiasaan membaca akan meningkat sebab tersedia fasilitasnya untuk itu.

1. Berbagai Kegiatan dalam Pelajaran Sastra

Untuk memperoleh kemampuan mengapresiasi sastra, bereksresi sastra, dan menelaah hasil sastra, dapat dipilih kegiatan belajar dari yang dikemukakan di bawah ini.

a. Kegiatan untuk Memperoleh Kemampuan Mengapresiasi Sastra

- 1) Mendengarkan pembacaan puisi
- 2) Mendengarkan pembacaan cerita pendek
- 3) Mendengarkan penuturan dongeng
- 4) Mendengarkan pembacaan atau pembawaan dialog/drama
- 5) Mendengarkan pembacaan kutipan novel
- 6) Menonton pementasan drama
- 7) Membaca puisi
- 8) Membaca cerita pendek
- 9) Membaca drama
- 10) Membaca novel
- 11) Membaca kritik sastra
- 12) Membaca resensi tentang karya sastra

b. Kegiatan untuk Memperoleh Kemampuan Berekspresi Sastra

- 1) Berceritera (menuturkan dongeng)
- 2) Berdeklamasi
- 3) Membaca nyaring novel
- 4) Membawakan dialog
- 5) Mementaskan drama
- 6) Menulis puisi
- 7) Menulis cerita pendek
- 8) Menulis dongeng
- 9) Menulis dialog atau drama pendek

c. Kegiatan untuk Memperoleh Kemampuan Menelaah Hasil Sastra

- 1) Menilai hasil sastra
- 2) Meresensi buku sastra
- 3) Menganalisis hasil sastra

Dalam setiap kegiatan itu terdapat rincian kegiatan berkenaan dengan segi tertentu dalam hasil sastra yang dijadikan bahan pelajaran. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang langsung dengan hasil sastra itu diharapkan siswa memperoleh pengalaman bersastra dan pengetahuan tentang sastra. Mereka pun terlibat dalam aktivitas individual dan kelompok berkenaan dengan sastra, serta mengalami perkembangan pada dirinya masing-masing dan keseluruhan kelas. Dengan cara itu para siswa dan guru membangun suasana kelas yang demokratis. Diharapkan pengalaman hidup secara demokratis dalam kelas itu akan menjadi model bagi para siswa dalam menjalani kehidupannya di masyarakat.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal	: Rabu, 15 Oktober 2003
Judul Makalah	: Membangun Suasana Demokratis dalam Pendidikan Sastra di Sekolah
Pemakalah	: Prof. Dr. Yus Rusyana
Pemandu	: M. Rapi Tang
Pencatat	: 1. Meity Taqdir Qodratilah 2. Adnan Usmar

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Ipar Dik (Sulawesi Utara)

Sebenarnya makalah ini ideal, tetapi tidak ideal bagi beberapa daerah yang dalam pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralistik tidak menguntungkan. Jika sastra merupakan cermin peradaban bangsa, saya mengusulkan agar guru bahasa dan guru sastra di sekolah dipisahkan. Menurut pengalaman saya sebagai tenaga pelatih bengkel sastra di Manado dan di Sulawesi Utara, saya melihat banyak guru bahasa di sekolah tidak memahami sastra dan tidak bisa menulis sastra.

Permasalahan lain ialah buku sastra di daerah saya, yaitu daerah perbatasan yang berdekatan dengan Filipina, merupakan barang istimewa dan langka. Berkaitan dengan itu, jika listrik dan bahan lain dapat disubsidi oleh Pemerintah Pusat, mengapa buku-buku sastra tidak disubsidi untuk didistribusi ke sekolah-sekolah? Daerah kekurangan buku sastra. Di samping itu, kurikulum yang ada di sekolah tidak memuat secara bervariasi pengarang, misalnya jumlah pengarang banyak di Indonesia dan luar negeri. Yang ada di dalam kurikulum sekolah ialah karya pusisi atau karya sastra lainnya dari pengarang angkatan 30-an, 45, dan 66. Kita perlu merumuskan strategi pengajaran sastra, yaitu dengan memisahkan guru sastra dan guru bahasa sehingga guru sastra itu memiliki kapasitas dan kompetensi mengajarkan sastra.

Jawaban:

Pemisahan guru bahasa dan sastra sudah dikemukakan pada Kongres Bahasa Indonesia 1988, tetapi perjuangannya sulit. Hal itu berhubungan dengan masalah kepegawaian/administratif. Hal itu mungkin merugikan guru bahasa dan sastra selama ini karena spesialisasinya mengajarnya terlalu disempitkan. Saya kira usaha yang sekarang, meskipun secara keseluruhannya dapat dihujat, saya melihat di sekolah,

mungkin secara sporadis, ada perbaikan-perbaikan pembelajaran tersebut. Diharapkan bahwa guru didorong sehingga mereka tidak hanya dipresentasikan bahwa mereka begini atau begitu karena di sekolah banyak juga melakukan kemajuan. Jadi, pemisahan itu berkaitan dengan masalah kepegawaian. Jika memang ingin dipisahkan, hal itu dapat dilakukan secara intern.

Ihwal agar buku sastra didistribusikan, saya mendukung. Sebenarnya pihak Dikdasmen (Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah) menyampaikan buku-buku itu ke sekolah, tetapi saya tidak tahu persis bagaimana pemerataannya.

Tentang pengarang, misalnya sastrawan kontemporer tidak mendapat perhatian, sekarang sebenarnya ada kesempatan. Silakan saja sekolah memilih contoh karya sastra dan berbagai daerah karena hal itu ditentukan oleh pusat.

Hal itu juga dikaitkan dengan ujian yang bersifat nasional, para penguji yang menyusun soal pun harus adil, harus mengetahui perkembangan baru. Jangan hanya bertanya sesuatu yang dimutlakan, misalnya bertanya tentang novel tertentu, kecuali jika hal itu sudah menjadi kesempatan bahwa di antara keragaman itu ada karya sastra yang harus diketahui oleh siapa pun anak Indonesia atau ada alternatif dari buku-buku yang ditawarkan. Jadi, hal itu ditawarkan oleh kurikulum sekarang. Kurikulum sekarang hanya menentukan kolom-kolom yang sangat terbatas, yaitu *kompetensi dasar materi pokok* dan *indikator*. Untuk penyusunan silabus, pemilihan bahan dan bagaimana pembelajaran terserah kepada kita di daerah.

2. **Pertanyaan:** Muhammad Nurahmad (SMUN 8 Yogyakarta)

(1) Sensasi dan substansi

(2) Kompetisi dan kompetensi

Saya tidak sependapat dengan pemisahan guru bahasa dan guru sastra karena biayanya mahal. Yang saya inginkan ialah bukan masalah guru, metode, siswa, atau kurikulum, melainkan justru pengajaran sastra akan berhasil jika pendekatannya jelas. Hingga saat ini termasuk saya, pendekatan sastra dan pendekatan pembelajaran sastra belum dipahami benar. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar perguruan tinggi yang memproduksi guru bahasa dan sastra perlu membekali guru-guru itu dengan ilmu sastra dan ilmu bahasa. Hal itu penting karena ketika mereka menjadi guru, mereka sulit belajar untuk meningkatkan kemajuannya karena dengan sekian jumlah jam yang ada. Untuk itu, pendekatan yang paling penting ialah pendekatan kontekstual atau yang dikenal dengan *contextual teaching and learning* yang pada hakikatnya ialah siswa bukan mengetahui, melainkan mengalami.

Jawaban

- (1) Tentang pemisahan guru sebagai bandingan dengan pemikiran penanya pertama, sudah saya katakan bahwa ada kesulitan dalam hal admisnitasi sehingga hal itu diselesaikan dalam lingkungan sekolah saja.
- (2) Pembekalan seperti apa yang harus diberikan kepada guru oleh perguruan tinggi? Menurut pengalaman saya, harus ada pelatihan karena hal itu sangat berguna bagi mereka jika: pelatihan yang konkret tentang pembelajaran diberikan. Andaikan kita sudah menyetujui bahwa pembelajaran menulis, misalnya itu ditekankan, guru memerlukan contoh pembelajaran. Jadi, yang penting penekannya ialah pembelajaran karena hal itu sangat praktis bagi guru di samping guru dibekali dengan ilmu sastra dan ilmu bahasa.

Untuk pendekatan kontekstual, kita menggunakan berbagai pendekatan. Saya sendiri tidak mengharamkan teori. Di dalam pembelajaran itu tentu saja saya menekankan pengalaman mengapresiasi, pengalaman bereksprei. Namun, pengalaman apresiasi juga akan diperdalam dengan teori. Setelah kita memiliki pengalaman tentang sesuatu, biasanya kita ingin tahu, misalnya siapa pengarang ini, dari periode kapan, dsb. Hal itu dapat kita lihat dalam ensiklopedia. Pengetahuan itu dapat memperdalam apresiasi.

3. Pertanyaan: Haryadi (Universitas Negeri Yogyakarta)

Ada hal yang menarik dalam makalah ini, terutama tentang evaluasi. Namun, dalam makalah tidak disebutkan bagaimana mengevaluasi pembelajaran sastra yang menciptakan suasana yang demokratis. Sementara itu, kita mengetahui bahwa pembelajaran apa pun ujungnya ialah evaluasi. Yang ingin saya tanyakan ialah konsep yang ditawarkan kepada kami, yaitu bagaimana mengevaluasi pembelajaran sastra yang menciptakan suasana demokratis. Sehubungan dengan itu, untuk pembelajaran saya mengusulkan agar pembelajaran sastra yang demokratis itu memperhatikan *diskusi, karya kelompok, presentasi, dan respons*. Bagaimana pendapat Bapak?

Jawaban

Tentang evaluasi diperlukan pembicaraan yang khusus. Tadi saya katakan bahwa dalam proses pengajaran, evaluasi tersebut langsung digunakan oleh guru untuk mengadakan perbaikan. Jadi, evaluasi di sini dimaksudkan untuk kepentingan pembelajaran itu sendiri. Namun, di dalam ujian akhir atau ujian nasional harus benar-benar dipertimbangkan tidak saja untuk pengajaran sastra atau bahasa, tetapi semuanya karena bagaimanapun guru diarahkan oleh soal-soal seperti itu. Untuk itulah, sebetulnya di sini diharapkan ada pusat pengukuran atau

evaluasi seperti badan yang ada di jalan Gunung Sahari. Kita dapat meminta kepada mereka untuk memberikan soal-soal itu yang sesuai dengan hakikat pengajaran sastra. Sehubungan dengan pembelajaran yang Anda usulkan, saya setuju. Hal itu sejalan dengan apa yang saya kemukakan, yaitu memberi pengalaman kepada siswa, tidak hanya *berapresiasi*, tetapi juga *berekspresi*, *berdikusi*, dan *berbicara*.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2003
Judul Makalah : Institusi Keagamaan Sebagai Sarana Pembinaan Bahasa Indonesia
Pemakalah : H.M. Junan Jusuf
Pemandu : Sam Mukhtar Chaniago
Pencatat : 1. Toha Maksum
2. Meity Taqdir Qodratillah

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Zaenuddin Hakim (Balai Bahasa Makassar)

- a. Saya ingin meluruskan apa yang pernah saya baca sekaitan dengan kalimat yang tadi Bapak kemukakan, yakni *Awwaluma khalaqallah al-kalam*, sedangkan teks yang saya baca: *awwaluma khalaqallah alqalam*. Bagaimana kira-kira tentang hal itu?
- b. Peran bahasa Arab dalam pengayaan khazanah istilah dan kosakata Bahasa Indonesia sudah kita akui. Betapa tingginya peran itu. Sehubungan dengan itu, apa yang akan dan mungkin telah dilakukan oleh institusi keagamaan dalam pengembangan bahasa Indonesia seterusnya?
- c. Ihwal masalah tafsir sebagaimana yang tadi Bapak katakan, menurut saya, tafsir alquran (meskipun itu menggunakan bahasa Arab, apalagi menggunakan bahasa Indonesia) tidak akan persis semua makna hakiki yang terkandung di dalam Alquran dan yang terdapat dalam bahasa Arab sekalipun. Namun, yang terpenting ialah bagaimana kita dapat mengungkapkan makna mungkin, sebagian kecil dari ayat-ayat, ke dalam bahasa lain. Jadi hal itu tidak mungkin sama persis 100%.

Jawaban

- a. Sebenarnya, hadis itu ada empat versi
 - 1) *awwalumaa khalaqallah al-qalam* populer di kalangan *Fir'ah*
 - 2) *awwalumaa khalaqallah al-kalam* populer di kalangan *mutakallimin*
 - 3) *awwalumaa khalaqallah al-agl* populer di kalangan *Failusuf*
 - 4) *awwalumma khalaqallah ar-ruuh* populer di kalangan *sufi*.
- b. Bagi saya, pembinaan bahasa Indonesia baru dapat terlaksana ter-bina jika kita memakainya. Itulah sebenarnya esensi dari pembinaan

bahasa. Masalah ialah bagaimana institusi keagamaan memakai bahasa Indonesia secara baik dan benar.

- c. Tentang tafsir, tidak ada tafsiran yang menyalin semua makna dari kata asal ke dalam terjemahan secara utuh. Namun, hendaknya jangan terjadi tafsir yang kita berikan ini malah memberikan pengertian yang jauh sekali dari keinginan yang dikembangkan dalam konsep agama, seperti kata *jihad* yang saya contohkan. Itu yang harus kita hindari. Memang, semua tafsir itu sifatnya relatif. Relativitas itu yang kemudian kita bicarakan dalam wacana kebahasaan. Yang diinginkan ialah bahwa konsep-konsep agama yang bulat utuh itu hendaknya dapat ditransfer. Jika bisa seutuhnya, ya alhamdulillah. Jika tidak bisa, janganlah kita memberi makna yang jauh sekali dari apa yang diinginkan semula.

2. Pertanyaan: Junaiyah H.M. (Pusat Bahasa)

- a. Jadi Bapak katakan bahwa betapa sulitnya menerjemahkan kata Arab *qalbu* ke dalam bahasa Indonesia. Juga Bapak katakan bahwa dengan kesulitan itu menunjukkan betapa miskinnya bahasa Indonesia. Sudahkah diusahakan untuk mencari. Setelah diusahakan dan tidak ditemukan barulah dikatakan miskin. Jika belum, jangan terlalu cepat menuduh bahasa Indonesia miskin.
- b. Jika sulit menerjemahkan hal seperti itu, apakah selama ini sudah ada kerja sama dalam penerjemahan Alquran atau kitab suci yang lain antara Pusat Bahasa dan Departemen Agama. Selama ini, yang saya lihat ialah hasil terjemahan ahli agama ke dalam bahasa Indonesia, bukan ahli agama yang didampingi oleh ahli bahasa.

Jawaban

- a. Maaf, jika tadi saya katakan *miskin*. Hal itu sebenarnya saya pinjam dari para ahli bahasa juga. Mereka mengatakan bahwa banyak kata asing yang sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, di dalam alquran ada konsep *dzarah*, yakni 'benda yang terkecil'. Pada tahun 1930-an (tafsir pertama muncul dari Mahmud Yunus) digunakan *bijisawi* untuk *dzarah*. Tahun 1960-an, (tafsir Zaenuddin Hamidi) *dzarah* di tafsirkan *dzarah* dengan *debu*. Tahun 1970-an, Buya Hamka menerjemahkan *dzarah* dengan *atom*. Konsepnya ialah 'yang terkecil'. Pertanyaannya, apakah atom merupakan yang terkecil sekarang? Ternyata tidak. Para ahli fisika modern mengatakan bahwa atom dapat dicincang lagi. Apa namanya dalam bahasa Indonesia? Ya *dzarah* 'zarah' itulah. Itu hanya suatu contoh, dan memang banyak kata dalam bahasa agama kita yang sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Itu merupakan tugas para ahli bahasa kita.

- b. Saya tidak tahu secara persis tentang Departemen Agama ihwal kebijakannya di sana. Yang jelas, di perguruan tinggi UIN, kerja sama dengan Pusat Bahasa yang konkret dalam bentuk penelitian belum pernah ada. Paling tinggi, pascasarjana UIN dulu pernah meminta Pak Amran sebagai dosen Bahasa Indonesia. Ternyata, menulis disertasi keagamaan tanpa penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menggiring pengertian kepada hal yang sering memunculkan kekeliruan. Sekarang Pascasarjana UIN sangat ketat dalam pemakaian bahasa Indonesia. Harus ada pembimbing khusus untuk bahasa Indonesia karena mereka sudah terbiasa memakai struktur bahasa Arab. Ini usul konkret saya kepada Pusat Bahasa untuk pelatihan para mubaliq, yakni kerja sama Pusat Bahasa dengan Fakultas Dakwah UIN supaya mudah birokrasinya.

3. Pertanyaan: Mulyani M. Nur (SMUN 5 Semarang)

- a. Dalam sebuah pertemuan antartokoh agama, pernah saya mendapat bantahan yang cukup sengit. Mereka tidak rela jika tulisan *assalumu'alaikum* tidak memakai tanda petik lagi. Demikian juga, *jumat* hanya ditulis *jumat*, *salat*, inginnya ditulis dengan *h*. Masih banyak kata yang jika ditulis dengan bahasa Indonesia baku, tampaknya mereka tidak rela. Hal itu perlu dicari jalan keluarnya. Setidak-tidaknya ada wakil dari unsur ulama yang masuk dalam perumusan kata baku seperti itu. Dengan demikian, Pusat Bahasa dapat menyosialisasikan kemauan atau putusannya. Sementara itu, masyarakat dan tokoh agama dapat menerima pembakuan kata dengan baik.
- b. Di dalam Alquran ditemukan penerjemahan *kami* yang saya kira berbeda dengan bahasa Arab. Seperti kata *nahnu*, dalam bahasa Arab menyatakan *aku* dalam pengertian tinggi. Namun, di dalam alquran *nahnu* diterjemahkan dengan *kami*. Padahal, *kami* artinya jamak. Hal itu akan berbahaya jika pihak institusi agama (Depag) tidak mencoba menafsirkan atau mengertikan sesuai dengan bahasa baku. Berarti di situ Tuhan itu jamak. Hal itu pernah ditanyakan kepada para ulama dan dijawab bahwa pengertian *nahnu* itu adalah *aku dalam keadaan tinggi*, 'aku tinggi'. Namun, di dalam bahasa mempunyai pengertian lain, yaitu jamak. Jika hal itu terus berlangsung tanpa perubahan, baik dari Depag maupun Pusat Bahasa, hal itu akan menjadi berlarut-larut dan kemudian akan menjadi penafisiran yang makin salah.

Jawaban

Hal itu memperkuat minat saya, keinginan saya untuk menjalin kerja sama Fakultas Dakwah dengan Pusat Bahasa.

- a. *Nahnu* di dalam Alquran dijelaskan mengandung makna *joint venture* antara Allah dan manusia. Contohnya, ayat yang mengatakan *inna nahnu nadzalnadziqra wa innalahu la haafidhun*, 'kamilah yang menurunkan Alquran itu dan kami pulalah yang memeliharanya'. Makna memelihara adalah memelihara secara *spiritual*, *immaterial* turun dari *luh mahfuz* ke langit dunia. Kemudian ayat-ayat itu dipelihara manusia. Ayat-ayat itu dihafal, ditulis, dan dicetak serta dipelajari. Jika penafsiran *nahnu* tidak dipahami, terjadilah kesalahpahaman itu. Hal itu perlu dijelaskan dalam hermeneutik Alquran ketika dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia, yakni bahasa *nahnu* di situ penuturnya ialah Allah, tetapi konsep yang dikandungnya ialah *joint* antara Allah dan manusia. Jika kita kumpulkan ayat-ayat Alquran yang memakai kata *nahnu* selalu berujung kepada pelaksanaan pekerjaan, yaitu melibatkan makhluk di dalam kegiatan pekerjaan itu.
- b. Pembakuan itu penting. *Jum'at* menjadi *Jumat*. Hal itu terasa aneh di pesantren. *Shalat* menjadi *salat*. Juga, Buya Hamka sering mengkritik tentang kata *nikmat*. *Nikmat* yang kemudian ditulis dalam kamus-kamus kita dengan 'nikmat'. *Ni'mat* berarti 'anugerah', sedangkan *nikmat* berarti 'siksa'. Jauh sekali artinya. *Nikmat* yang ditulis dengan *kaf* berarti 'siksaan'. *Ni'mat* dengan *ain* berarti 'anugerah'. Salah menulis dan salah membaca menjadi salah konsep. Untuk itu diperlukan pembakuan istilah tersebut.

4. Pertanyaan: Mahmudah (Universitas Muhammadiyah Makassar)

Saya ingin bertanya tentang sebuah ayat *arrijaalu qawwamuna 'ala annisa*. Berkaitan dengan penafsiran, yaitu laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita! Apakah tafsiran itu sudah sesuai?

Jawaban

Sebaiknya membaca ayat itu jangan berhenti sampai di situ karena jika dipotong, wanita menjadi rendah. Ayat itu dilanjutkan dengan ... *bimma fadhdhalallahu lahum* 'laki-laki menjadi pemimpin dalam hal-hal yang memang dilebihkan!

5. Pertanyaan: Abdul Gani Azi (Banda Aceh)

- a. Dalam menjawab pertanyaan Ibu Junaiyah H.M., bahwa Bahasa Indonesia miskin dilihat dari segi istilah. Sebenarnya hal itu tidak menjadi masalah. Tidak ada bahasa yang miskin. Semua bahasa dapat menguraikan apa saja dalam hal apa pun. Istilah *zarah* sudah dipakai orang, tidak perlu diterjemahkan menjadi *atom*. Juga tentang struktur bahasa, yaitu bahwa struktur bahasa dalam terjemahan itu sangat dipengaruhi oleh struktur bahasa Arab sehingga tidak enak

dibaca. Tidak lancar jika kita baca terjemahannya, termasuk terjemahan dari Departemen Agama. Namun, hal itu sudah jauh lebih baik daripada terjemahan yang lain meskipun struktur bahasanya masih terpengaruhi bahasa Arab.

- b. Ihwal *nahnu* 'joint venture', saya ingin bertanya tentang ayat: *tsumma ilaina iyyabahum* mungkin *tsumma 'alaina hisaabahun*. Mungkin itu salah ucap, 'Alaina dan ilaina itu nahnu bukan? Jika *nahnu* apakah manusia menghisap manusia?

Jawaban

Dalam ilmu tafsir *nahnu* sering disebut *joint venture*. Namun, tidak semua pemakaian *nahnu* disebutkan dalam makna *joint venture*. Jika kita memberi penjelasan *inna illaina iyyabahum wa inna 'waalaina isabahum* secara moral dalam (saya pinjam dari Immanuel Kant) kesadaran tentang akhirat itu dibangun oleh kesadaran moral sekarang. Jadi, jika hisab itu yang terpahami hanya nanti saja, ya nanti sajalah. Padahal, dalam konteks kejahatan dan pelanggaran, hisab itu, juga sudah terlaksana di dunia ini. *Haa sibū qabla antu haasabu* 'hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh orang lain'

6. Pertanyaan: Siti Hawa (Universitas Negeri Makassar)

Saya ingin bertanya tentang kata *huwa* yang merujuk kepada 'ia laki-laki tunggal'. Namun, mengapa kata *huwa* sering digunakan untuk merujuk kepada Tuhan, sedangkan Tuhan tidak dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan.

Jawaban

Ada masalah psikologis di sini. Firman Tuhan atau kalam Tuhan itu dalam keyakinan agama ialah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kata. Namun, ajaran ini harus disampaikan kepada manusia. Oleh sebab itu, Tuhan menggunakan bahasa manusia agar pesan ini bisa ditangkap oleh manusia. Sayangnya bahasa manusia hanya mempunyai dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan (*huwa* dan *hiyaa*), tidak ada bentuk ketiga. Oleh karena itu, Allah menggunakan kata *huwa* bukan *hiyya* karena kultural masyarakat ketika itu menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih atas. Lihatlah konsep berbagai ajaran agama di dunia, selalu mempersonifikasi Tuhan dalam bentuk maskulin, bukan feminin. Mungkin ada satu atau dua yang menyebutkan Dewi Sri. Di Indonesia, kita menyebut Ibu Pertiwi bukan Bapak Pertiwi. Yang jelas, konsepnya itu ialah sesuatu eksistensi yang besar, kuat, maha-, dan segalanya. Maha, dipakailah kata *huwa* bukan *hiyya*.

- 7. Pertanyaan:** Drs. H.M. Tantowi Yunus, S.H. (Majelis Adat Kebudayaan Melayu Indonesia, Sumatra Utara)
- a. Sumbangan bahasa agama sangat banyak dalam bahasa Indonesia. Tidak hanya agama Islam, tetapi juga agama Hindu, seperti *surga* dan *nirwana*. Sehubungan dengan itu, untuk memperjuangkan Bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu menjadi bahasa ke-4 dalam keagamaan, figur Hamzah Samsuri sangat berperan. Berkat beliau, tersebarlah agama Islam dengan kitab-kitabnya yang hebat. Hal itu juga dibantu oleh Sultan Iskandar Muda pada waktu itu (abad ke-15 dan ke-16).
 - b. Bahasa Arab Melayu sangat berperan pada awal perkembangan agama Bahasa Arab Melayu lebih mencerdaskan. Untuk itu, kita mempunyai tugas untuk menjaga. Kita sepakat dalam pengembangan ejaan-ejaan. Pemakaian bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia perlu dipelihara dalam rangka mencari makna yang lebih dalam daripada bahasa-bahasa asing. Persoalannya, banyak generasi muda yang sangat rendah dalam memahami itu.

Jawaban

Saya kira pemakaian bahasa Melayu pertama sekali sebagai *Lingua franca* secara nasional ketika itu berkembang menjadi bahasa Indonesia. Kita perlu terus menjaga dengan terus mencari kandungan makna dalam pengalihbahasaan berbagai konsep dari bahasa asing. Sayangnya, anak-anak kita sekarang ini tidak lagi memahami konsep dasar bahasa Melayu itu. Mahasiswa saya, baik S-1, S-2, maupun S-3 ketika ditanya apakah arti kata beradu, dijawabnya 'berantam, berkelahi' beradu dalam bahasa Melayu artinya 'istirahat'. Hal itu disebabkan oleh tidak lagi dibacanya karya-karya Pujangga baru kita tahun 1930-an. Untuk itu, saya menggarisbawahi pernyataan Pak Tantowi bahwa bahasa Arab Melayu pada perkembangan agama sangat berperan. Ketika itu, ketika saya di SD, sulit membedakan kata *kumbang*, *kambing*, *kembang*, dan *kembung* sebab tulisannya sama. Hal itu perlu ada persepsi kultural di kepala kita untuk membaca itu. Jadi, bahasa Arab Melayu lebih mencerdaskan daripada yang lain. Salah menulis dan salah membaca, misalnya seharusnya *kumbang* menjadi *kembung* merupakan hal yang dapat terjadi. Saya kira hal itu merupakan tugas kita sebagai penutur bahasa Indonesia. Sebagai generasi penerus, saya juga sepakat dengan Pak Tantowi untuk mengembangkan ejaan kita supaya lebih sempurna.

PEMBALIKAN PERGESERAN BAHASA DAERAH UNTUK MEMPERKUKUH BUDAYA BANGSA

Asim Gunarwan
Universitas Indonesia

1. Pendahuluan

Tajuk makalah ini diangkat dari salah satu subtopik Kongres Bahasa Indonesia VIII ini, yakni "Pemantapan Peran Bahasa Daerah dalam Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa." Dengan sengaja makalah ini tidak bertolak dari nosi budaya daerah; alih-alih itu, ia mencoba mengaitkan bahasa daerah (yang diasumsikan mempunyai kaitan yang erat dengan budaya daerah) dengan usaha memperkukuh budaya bangsa, budaya bangsa Indonesia. Penalarannya adalah sebagai berikut. Bahasa mempunyai peran yang penting dalam hubungannya dengan budaya suatu masyarakat, yaitu sebagai alat transmisi budaya itu dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Jika asumsi dasar ini diterima, implikasi yang dapat ditarik ialah bahwa melemahnya bahasa dapat menyebabkan menurunnya budaya masyarakat yang bersangkutan. Artinya, ada korelasi positif di antara bahasa dan ketahanan budaya.

Kalau kebudayaan diartikan, mengikuti Goodenough (Geertz, 1973: 11), sebagai "terdiri atas apa saja yang perlu diketahui atau dipercayai [oleh seseorang] agar ia dapat bertindak laku dengan cara yang berterima oleh para anggota [masyarakat]", tersirat bahwa bahasa memegang peran yang penting di dalam proses untuk mengetahui dan memercayai itu. Intinya: bahasa adalah komponen kebudayaan yang penting, dan karenanya, ia mempunyai peran yang penting di dalam ketahanan kebudayaan.

Asumsi dasar yang lain yang dipakai sebagai titik tolak bahasan makalah ini adalah bahwa budaya Indonesia (di dalam arti budaya pan-Indonesia) itu belum wujud. Berdasarkan asumsi ini, dapat diduga bahwa penggunaan frase budaya bangsa di dalam subtopik di atas adalah kesengajaan Panitia Kongres untuk menghindari istilah budaya Indonesia, yang dapat berkonotasi budaya yang dianut oleh semua warga Indonesia. Sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, tampaknya kebijakan kebudayaan kita akan terus berorientasi kepada kemajemukan budaya (*cultural pluralism*). Karena itu, budaya bangsa di dalam konteks Indonesia dapat diartikan sebagai kumpulan dari kebudayaan daerah (KD): KD Sunda, KD Minangkabau, KD Batak, KD Manado, KD Bugis, KD Papua, KD Jawa, dsb.

Argumentasi yang akan dikemukakan di sini adalah bahwa karena bahasa-bahasa daerah (BD-BD) di Indonesia cenderung bergeser, pembalikan pergeserannya wajib diusahakan jika kita hendak melestarikan dan memantapkan peran BD dalam memperkukuh ketahanan KD, yang pada

gilirannya akan memperkuat budaya bangsa. Peran BD sebagai penopang KD, dan secara tidak langsung peran KD sebagai penopang budaya bangsa, tidak dapat dimantapkan jika BD dibiarkan bergeser, menjadi lemah, dan akhirnya punah.

2. Bahasa dan Kebudayaan

Hubungan di antara bahasa dan kebudayaan dapat dirunut dari dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama, yang mengacu kepada kesemestaan budaya, mengatakan bahwa bahasa, seperti halnya kepercayaan dan mata pencaharian, adalah komponen penting kebudayaan. Jika kebudayaan didefinisikan sebagai totalitas pola perilaku, seni, kepercayaan, lembaga serta hasil karya dan buah pemikiran manusia, yang menjadi ciri-ciri suatu masyarakat, pentingnya bahasa itu terletak pada kenyataan bahwa, seperti yang disinggung di depan, ia memegang peran yang penting sebagai alat transmisi budaya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya.

Pandangan yang lain diturunkan dari hipotesis Sapir-Whorf, yang sering disebut hipotesis Whorf saja, yang sekarang dikatakan sebagai terdiri atas dua versi, yaitu versi kuat dan versi lemah. Versi kuat memostulatkan bahwa bahasa *menentukan* cara berpikir penggunaannya; jadi, peran bahasa bersifat deterministik. Versi lemah memostulatkan bahwa bahasa *memengaruhi* cara berpikir para penggunanya; versi ini bernada relativistik. Tepatnya, hipotesis Whorf itu dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut (Lee, 1981: 81). Versi kuat, yang sering dirujuk sebagai determinisme linguistik, dapat dirinci menjadi dua, yaitu yang sangat kuat dan yang tidak terlalu kuat, yang kedua-duanya tidak berterima di kalangan linguistik zaman sekarang. Yang sangat kuat mengatakan bahwa bahasa menentukan (*determines*) cara berpikir dan yang tidak terlalu kuat mengatakan bahwa bahasa memengaruhi cara berpikir. Versi lemah, yang biasanya dirujuk sebagai relativitas linguistik, juga dapat dirinci menjadi dua: versi yang tidak terlalu lemah dan versi yang sangat lemah. Yang pertama itu memostulatkan bahwa bahasa yang berbeda menentukan cara berpikir secara berbeda-beda. Yang kedua memostulatkan bahwa bahasa yang berbeda memengaruhi cara berpikir secara berbeda-beda. Versi yang sangat lemah itulah yang pada umumnya berterima di kalangan linguistik dewasa ini.

Perspektif yang mana pun yang kita pakai, yakni apakah perspektif kesemestaan budaya atau perspektif Whorf, dan jika perspektif Whorf ini yang kita pakai, versi yang mana pun dari keempat-empat versi yang disebutkan di atas, kita akan melihat bahwa hubungan bahasa dan budaya adalah erat. Di dalam hal ini, Fishman (1991:20-24) melihat tiga macam hubungan di antara bahasa dan budaya. Ketiganya adalah: (1) bahasa terkait dengan budaya secara indeksikal (*indexically related*); (2) bahasa terkait dengan budaya secara simbolis; dan (3) bahasa terkait dengan budaya secara sebagian-sebagian dan secara keseluruhan.

Bahasa dikatakan berkaitan dengan budaya secara indeksikal karena hanya dengan bahasa yang bersangkutanlah artifak yang dihasilkan budaya itu dapat disebutkan dengan tepat. Demikian pula, pengungkapan nilai-nilai budaya dan pandangan dunia hanya dapat dilakukan secara tepat dengan menggunakan bahasa yang bersangkutan. Menurut Fishman (hlm. 20), hal itu dimungkinkan karena bahasa dan budaya telah tumbuh bersama-sama selama jangka waktu yang begitu lama sehingga tercipta hubungan yang sangat serasi di antara keduanya.

Bahasa dikatakan terkait dengan budaya secara simbolis karena yang satu menjadi simbol dari yang lain. Berbahasa Bali, misalnya, adalah lambang identitas budaya Bali, yang selanjutnya berimplikasi bahwa orang Bali yang tidak dapat berbahasa Bali tidaklah mewakili identitas budaya Bali, dan pada gilirannya tidak mewakili budaya Bali.

Bahasa dikatakan terkait dengan budaya karena baik secara sebagian maupun secara keseluruhan terdapat kesalingrujukan dan ketergantungan di antara keduanya. Bagian-bagian tertentu, atau bahkan keseluruhan budaya itu diungkapkan, dilaksanakan, dan direalisasikan dengan menggunakan bahasa yang secara tradisional dipakai untuk itu. Begitu banyak bagian dari budaya diungkapkan (terutama secara verbal), seperti nyanyian (tembang), mantra, adat-istiadat, peribahasa, sejarah, *piwulang* (pelajaran), dongeng, cara bertegur sapa, makian, dan falsafah sehingga kalau diungkapkan dengan menggunakan bahasa lain, daya magisnya, cita rasanya, daya tariknya akan hilang. Sedemikian erat hubungan di antara bahasa dan budaya di dalam hal ini sehingga dapat dikatakan bahwa pola sosialisasi anak, langgam budaya hubungan antar-personal, prinsip-prinsip etika yang menopang kehidupan sehari-hari, semuanya berkaitan dengan bahasa yang secara tradisional dipakai untuk itu. Tidaklah berlebihan jika Bassnett (1992:14) mengibaratkan bahasa dengan jantung ketika dia mengatakan "*language is the heart within the body of culture.*"

Eratnya hubungan di antara bahasa dan kebudayaan itu dipertegas oleh Smolicz (1980:1), yang mengatakan bahwa nilai-nilai inti (*core values*) merupakan salah satu komponen yang paling dasar dari kebudayaan suatu masyarakat dan bahwa bagi masyarakat tertentu, misalnya, masyarakat Polandia (hlm. 2), nilai-nilai inti itu mencakupi bahasa. Artinya, bahasa adalah penghubung yang tidak terlarutkan (*indissoluble link*) yang menentukan masyarakat Polandia sebagai kelompok sosial dan budaya yang membedakannya dari masyarakat yang lain. Tampaknya, bagi banyak kelompok etnik di Indonesia, bahasa merupakan bagian dari nilai-nilai inti itu, dan karenanya kematian bahasa tertentu akan menyebabkan kematian budaya yang bersangkutan.

3. Pergeseran BD

Sebuah bahasa dikatakan bergeser atau mengalami pergeseran jika dan bila para anggota suatu masyarakat bahasa secara kolektif (mulai) tidak lagi menggunakan bahasa tradisional mereka, dan alih-alih itu mereka (mulai) menggunakan bahasa yang lain. Lawan dari pergeseran bahasa adalah pemertahanan bahasa, dan hal ini terjadi jika masyarakat bahasa yang bersangkutan tetap menggunakan bahasa tradisional mereka walaupun misalnya ada desakan dari bahasa lain.

Ada beberapa alasan mengapa suatu bahasa terdesak oleh bahasa lain. Alasan-alasan itu dapat berupa faktor sosiolinguistik, faktor demografis, faktor psikologis, dan faktor ekonomik. Faktor-faktor ini terutama dipicu oleh adanya persaingan bahasa. Di Indonesia, dapat diasumsikan bahwa persaingan yang ada adalah persaingan di antara bahasa Indonesia (BI) dan bahasa daerah (BD).

Adanya persaingan menyebabkan ada bahasa yang dapat kalah bersaing. Bahasa yang kalah bersaing itu menjadi terancam dan biasanya terdesak ke ranah rumah: ia terutama dipakai oleh anggota rumah tangga di antara mereka di rumah mengenai topik-topik kerumahtanggaan. Jika desakan itu berkelanjutan, akhirnya bahasa yang terancam itu dapat punah atau menjadi bahasa seremonial belaka.

Kekalahan BD dalam bersaing dengan BI itu antara lain disebabkan oleh perbedaan kekuatan di antara keduanya. Di dalam hal ini, Gunarwan (1999) membandingkan kekuatan BD dan BI itu berdasarkan konsep geolinguistik seperti yang dikemukakan oleh Mackey (1973). Hasil perbandingan itu terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Perbandingan Kepadaan Geolinguistik antara BI dan BD

Kekuatan Bahasa	Indikator	Hasil Perbandingan
Kekuasaan Bahasa	(1) Demografi	BI>BD
	(2) Dispersi	BI>BD
	(3) Mobilitas	BI>BD
	(4) Ekonomi	?
	(5) Ideologi	BI=BD
	(6) Kebudayaan	BI>BD
Daya Tarik Bahasa	(1) D T Status	BI>BD
	(2) D T Teritorial	BI>BD
	(3) D T Interlingual	BI>BD
Daya Tekan Bahasa	(1) Ciri-ciri Perilaku	BI>BD
	(2) Akulturasi Konsep	BI>BD (?)

Sumber: Gunarwan (1999)

Di dalam hal demografi, BI menang atas BD karena jumlah penutur BI (baik yang asli maupun yang bukan) adalah jauh lebih besar daripada jumlah penutur BD yang jumlah penuturnya sangat besar, misalnya bahasa Jawa. Apalagi, jika BI itu disebut sebagai bahasa Melayu (BM) (nama aslinya), sehingga ia mencakup Bahasa Malaysia, bahasa Melayu Brunei Darussalam, bahasa Melayu Singapura (dan konon ada bahasa Melayu Muang Thai Selatan dan Filipina Selatan).

Menurut Mackey, indikator demografi juga mengacu ke penghasilan per kapita, dan di dalam hal ini, akan menarik jika pendapatan per kepala penutur suatu BD dibandingkan dengan pendapatan per kepala rakyat negara-negara ber-BM. Karena tertopang oleh pendapatan per kepala rakyat Brunei Darussalam, Malaysia, dan (penutur bahasa Melayu) Singapura, dapat kita duga dengan kemungkinan kesalahan yang kecil bahwa di dalam hal ini BD cenderung kalah dari BI/BM. Singkatnya, $BI > BD$ di dalam hal demografi.

Di dalam hal dispersi atau persebaran dapat kita asumsikan, tanpa harus menggunakan rumus-rumus Mackey, bahwa BI menang atas BD, bahkan BD yang jumlah penuturnya sangat besar seperti bahasa Jawa. Daerah penggunaan BI adalah dari Sabang sampai Merauke dan bahkan mencakupi Malaysia dan Brunei Darussalam, sedangkan daerah penggunaan bahasa Jawa terbatas di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan sebagian besar Provinsi Jawa Timur. (Ada penutur bahasa Jawa di Suriname dan Kaledonia Baru, tetapi jumlah penuturnya tidak besar dan tampaknya menyusut dengan cepat.)

Di dalam hal mobilitas tampaknya, penutur BI dapat lebih luas bergerak daripada penutur yang hanya tahu BD saja. Di dalam konsep geolinguistik Mackey, indikator ini diikuti berdasarkan jumlah warga suatu negara yang berbahasa X ke negara lain per tahun serta berapa jarak ibu kota negara itu ke tempat yang dikunjungi. Untuk makalah ini, perhitungan itu dapat kita dasarkan pada berapa orang penutur bahasa daerah X bepergian ke tempat lain per tahun, serta berapa jarak tempat yang dikunjungi dari ibu kota provinsi yang bersangkutan. Sekali lagi, tanpa menguantifikasikan variabel ini, dapat kita asumsikan bahwa di dalam hal mobilitas ini penutur asli BI/BM berjumlah lebih besar daripada penutur BD. Di dalam tinjauan geolinguistik ini berarti bahwa $BI/BM > BD$.

Di dalam kuantifikasi geolinguistik itu Mackey menghitung variabel mobilitas itu secara horizontal saja. Kita dapat juga menghitung variabel ini secara vertikal. Di dalam hal ini barangkali kita dapat menghitung jumlah warga masyarakat daerah tertentu yang berhasil bergerak ke atas dalam arti menduduki jabatan-jabatan tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penutur jati BI/BM yang juga berhasil menduduki jabatan-jabatan tinggi. Tertaklук kepada penelitian yang canggih, tampaknya dapat diasumsikan bahwa $BI/BM = BD$.

Mackey menghitung indikator ekonomi berdasarkan produk yang dihasilkan oleh negara atau negara-negara yang berbahasa tertentu. Dapat kita duga bahwa produk ekonomi suatu masyarakat BD tidak dapat menyamai produk ekonomi negara Indonesia. Namun, setidaknya-tidaknya dapat kita asumsikan bahwa di dalam hal indikator ekonomi ini BI dan BD tidak dapat disandingkan di dalam persaingan.

Mackey menguantifikasikan indikator ideologi berdasarkan apakah bahasa yang ditinjau kekuatannya itu dipakai sebagai pengemban suatu ideologi (misalnya dulu bahasa Rusia adalah pengemban ideologi marksis) dan kemudian kuantifikasi dihitung berdasarkan jumlah penuturnya. Kalau suatu bahasa tidak dipakai sebagai bahasa pengemban ideologi, kuantifikasi dilakukan berdasarkan apakah bahasa itu dipakai sebagai bahasa liturgi (misalnya bahasa Latin dan Arab) dan penghitungan didasarkan pada berapa jumlah pemeluk agama yang bersangkutan. Karena BI dan BD bukan pengemban ideologi (kecuali, mungkin, ideologi Pancasila bagi BI), dapat kita asumsikan bahwa di dalam hal indikator ideologi ini BD tidak kalah dari BI.

Mackey menguantifikasikan indikator kebudayaan berdasarkan jumlah judul buku yang diterbitkan di dalam suatu bahasa. Di Indonesia jumlah judul buku yang ditulis di dalam BI jelas jauh lebih besar daripada jumlah judul buku yang ditulis di dalam BD. Karena itu, dapat kita asumsikan bahwa di dalam hal indikator kebudayaan ini; $BI > BD$.

Mackey membagi daya tarik bahasa menjadi tiga, yakni (1) daya tarik status, (2) daya tarik interlingual, dan (3) daya tarik teritorial. Yang pertama itu mengacu ke status atau gengsi. Daya tarik status suatu bahasa diukur berdasarkan apakah bahasa itu berstatus bahasa kenegaraan, resmi ataukah sekadar vernakular yang statusnya tidak tinggi. Mengingat bahwa di negara kita BI adalah bahasa negara dan bahwa BD mungkin berfungsi hanyalah sebagai bahasa resmi kedaerahan, dapat kita simpulkan bahwa status BI lebih tinggi daripada status BD, dan karenanya daya tarik orang daerah untuk mempelajari BI, lepas dari kenyataan bahwa BI adalah bahasa pengantar di berbagai-bagai ranah, adalah lebih besar daripada daya tarik orang daerah mempelajari BD, bahkan BD mereka sendiri sekalipun.

Daya tarik interlingual suatu bahasa mengacu ke kekuatan bahasa itu untuk dipelajari oleh anggota masyarakat bahasa yang lain karena adanya banyak kesamaan kedua bahasa yang bersangkutan. Banyaknya kesamaan bahasa akan cenderung memudahkan orang mempelajari bahasa yang mempunyai daya tarik itu. Karena pada umumnya BI dan BD adalah bahasa-bahasa serumpun, dapat kita inferensikan bahwa orang daerah akan mudah mempelajari BI. Jadi, di dalam hal ini $BI > BD$.

Daya tarik teritorial mengacu ke kedekatan lokasi suatu masyarakat bahasa ke masyarakat bahasa yang lain. Sekadar contoh, daya tarik teritorial bahasa Turki bagi penutur BI adalah kecil karena jauhnya letak Turki dari Indonesia. Sebaliknya, daya tarik teritorial bahasa Prancis bagi

orang Belanda adalah besar karena kedekatan Negeri Belanda dari Prancis. Di dalam hal BI, lokasinya dapat dikatakan bertumpang tindih dengan lokasi BD, dan karena itu, daya tarik teritorial BI bagi penutur BD besar. Di dalam konsep geolinguistik Mackey, hal ini dikatakan bahwa BI memang alas BD atau $BI > BD$.

Faktor yang ketiga, daya tekan bahasa, mengacu ke seberapa besar suatu bahasa menekan bahasa yang lain karena *dominasi* bahasa yang menekan itu. Mackey merinci faktor ini menjadi dua indikator, yaitu (1) ciri-ciri perilaku dan (2) akulturasi konsep. Yang pertama itu berkaitan dengan seberapa sering perilaku berbahasa seseorang dipengaruhi oleh suatu bahasa: di ranah pekerjaan, di ranah hiburan, di radio, televisi, atau media yang lain. Di Indonesia keterpaparan (*exposure*) warga daerah terhadap BI jelas lebih besar daripada terhadap BD sehingga di dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa $BI > BD$.

Indikator yang kedua oleh Mackey dikuantifikasikan berdasarkan semacam tes, yakni berapa kata disebutkan di dalam suatu bahasa alih-alih bahasa lain oleh seseorang bila ia diminta untuk menyebutkan kata dengan cepat, dengan diberi konsepnya. Jika jumlah kata di dalam bahasa X lebih besar daripada jumlah kata di dalam bahasa Y, hal ini menunjukkan bahwa bahasa X > bahasa Y.

Apa yang diuraikan di atas menunjukkan (1) bahwa BI dan BD memang bersaing dan (2) bahwa di dalam persaingan itu BD cenderung kalah dan terdesak.

Gejala tergesernya BD karena desakan BI itu terjadi pada bahasa Lampung (BL) (Gunarwan, 1994). Hal ini dapat diinferensi dari pola pemilihan bahasa yang digunakan di ranah rumah oleh 233 orang warga keluarga Lampung, seperti yang terlihat di dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Skala Implikasional Pemilihan BI atau BL di Ranah Rumah Menurut Kelompok Umur Responden Survei (N = 233)

Kelompok Umur	N	Nilai Rata-Rata Pemilihan
≥ 60	9	1.00
51 – 60	18	1.00
41 – 50	27	1.21
31 – 40	64	2.02
21 – 30	84	2.39
≤ 20	34	3.43

Sumber: Gunarwan

(1 = selalu/jampir selalu BL; 2 = BL $\geq$ BI; 3 = BL > BI; 4 = BL > BL; 5 = selalu/hampir selalu BI)

Skalabilitas = 100%

Seperti yang terlihat pada Tabel 2 itu, makin muda orang Lampung makin besar kecenderungannya menggunakan BI alih-alih BL di ranah rumah. Jika gejala ini berkelanjutan, dapat dibayangkan bahwa lama-lama BL akan mengalami kematian, yakni setelah generasi tertentu tidak lagi mewariskan BL kepada generasi berikutnya.

Dapat diasumsikan bahwa kecenderungan tergesernya bahasa berkaitan dengan jumlah penuturnya: bahasa minor cenderung lebih cepat tergeser daripada bahasa mayor. Jika asumsi ini benar, tampaknya hal ini menjelaskan mengapa bahasa-bahasa daerah di Indonesia, terutama yang termasuk bahasa minor, banyak yang tergeser. Bagaimana-pun juga pada akhirnya yang menentukan adalah para penutur bahasa yang bersangkutan, sesuai dengan pandangan yang sekarang berterima di kalangan pakar sosiolinguistik atau sosiologi bahasa. Satu contoh adalah bahasa Bayso di Etiopia Selatan (Brenzinger, 1991), seperti yang dikutip oleh Mesthrie (1999:44), yang walaupun jumlah penuturnya hanyalah sekitar 500 orang pada 1990, ia telah berhasil bertahan selama 1000 tahun.

Bahasa mayor seperti bahasa Jawa (BJ) pun tidak bebas dari kecenderungan mengalami pergeseran. Seperti yang ditemukan Gunarwan (1996, 2000, 2002 a, 2002 b) dewasa ini tidak sedikit keluarga muda di kota-kota di Jawa mulai menggunakan BI di ranah rumah. Dari penelitian survei di kalangan orang Jawa, dengan 103 responden dari Yogyakarta dan 93 responden dari Surabaya, ditemukan (Gunarwan, 2002b) bahwa nilai pemilihan bahasa untuk ranah rumah menurun secara taat asas dengan menurunnya parameter umur. Dengan membagi semua responden menjadi empat kelompok (sesuai dengan hasil pengelompokan Duncan), nilai pemilihan bahasa untuk masing-masing adalah seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Nilai Pemilihan Bahasa di Ranah Rumah Responden Jawa Berdasarkan Variabel Kelompok Umur (Empat Kategori)

No.	Kelompok Umur	N	Nilai
1.	41 - 50, 51 - 60, $\geq$ 61	82	4,568
2.	31 - 40	46	4,113
3.	21 - 40	40	3,513
4.	< 20	28	2,786

Seperti yang tersirat, kuantitas penggunaan BJ cenderung turun, dan sebaliknya kuantitas penggunaan BJ cenderung naik menurut parameter umur.

Yang menarik adalah bahwa nilai penggunaan BJ itu berkorelasi positif dengan sikap terhadap BJ (Gunarwan, 2002b), seperti yang terlihat pada Gambar 1 ini. Artinya, makin negatif sikap responden terhadap BJ, makin menurunlah kuantitas penggunaan BJ. Jika kelak BJ benar-benar mati, tidak kurang dari Fishman (komunikasi pribadi) yang menyayangkan-
kannya.

<i>Attitude Index</i>	<i>Choice Index</i>	1.000	
<i>Attitude Index</i>	<i>Pearson Correlation</i>		
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		470**
	<i>N</i>	196	,000
<i>Choice Index</i>	<i>Pearson Correlation</i>	470	196
	<i>Sig. (2 tailed)</i>	000	1.000
	<i>N</i>	196	196

**= Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Sumber: Gunarwan (2002b)

Gambar 1
**Faksimile Korelasi Pearson antara Sikap
terhadap BJ dan Penggunaan BJ**

Anehnya, kecenderungan pergeseran BJ ini belum (tidak?) menarik perhatian masyarakat Jawa atau bahkan pakar-pakar atau linguis-linguis BJ. Hal ini berbeda dengan masyarakat Lampung, yang mulai mengusahakan pembalikan pergeseran BL begitu mereka mengetahui bahwa bahasa mereka terancam.

Penelitian pemakaian bahasa di kalangan keluarga Bali (di daerah Singaraja dan Denpasar) (Gunarwan, 2001a) dan di kalangan keluarga Banjar (di Banjarmasin) (Gunarwan, 2001b) juga menunjukkan gejala yang serupa: terjadi ketirisan diglosia BI-BD. Yang perlu dicatat ialah bahwa ketirisan diglosia bahasa Indonesia-bahasa Banjar itu kecil sekali, seperti yang tersirah dari hasil pengelompokan Duncan (Uji Tebaran Ganda Duncan) yang berikut (Gambar 2).

Duncan's Multiple Range Test for variable X41D				
$\alpha = 0,05$ Df=104 MSE=0.502246,				
	Duncan Grouping	Mean	N	Age
	A	4,750	4	≥ 61
	A			
B	A	4,476	21	51 – 60
B	A			
B	A	4,429	35	41 – 50
B	A			
B	A	4,200	10	31 – 40
B	A			
B	A	*4,185	27	:5 20
B				
B		4,000	13	21 – 30

Gambar 2:

Faksimile Pengelompokan Duncan atas Data Pemilihan Bahasa Banjar Menurut Variabel Kelompok Umur di Kalangan Warga Banjarmasin

Tertakluk kepada penelitian yang lebih canggih, dapat diduga bahwa kecilnya ketirisan diglosia bahasa Indonesia-bahasa Banjar itu adalah akibat tingginya vitalitas etnolinguistik suku Banjar.

4. Pembalikan Pergeseran Bahasa

Sagi bahasa yang sedang bergeser, pertanyaannya adalah apakah pergeseran bahasa itu harus dihentikan (dan kalau dapat dibalikkan) ataukah dibiarkan terus bergeser dan akhirnya bahasa itu mati. Fishman (1991) mengibaratkan bahasa yang sedang mengalami pergeseran itu sebagai anggota keluarga yang sedang sakit. Terserah kepada keluarganya apakah si sakit dicarikan obat agar (dapat) sembuh atau dibiarkan terus sakit, sakitnya lebih parah, dan akhirnya mati. Jika ia dibiarkan mati, mungkin pertimbangannya adalah bahwa penyakitnya sudah terlalu parah atau bahwa sekiranya ia disembuhkan, ia tidak akan berguna lagi. Mungkin ketidakbergunaan bahasa yang dihidupkan lagi itu berkaitan dengan masalah yang diperoleh dari usaha pelestariannya. Atau, mungkin juga, hal itu disebabkan oleh pemikiran masyarakatnya bahwa bahasa mereka dianggap bukan bagian yang penting dari *core value* keetnisan masyarakat itu, seperti halnya bahasa Gaelik bagi masyarakat Irlandia, menurut Smolicz (1980:6).

Sebagai salah satu usaha yang keberhasilannya banyak dipertanyakan), bahasa yang terancam perlu diajarkan di sekolah. Menurut Hinton (1999), pengajaran bahasa yang sedang terancam berbeda dengan pengajaran bahasa yang tidak terancam. Tujuannya jelas berbeda, dan implikasi yang dapat ditarik dari pendapat Hinton adalah bahwa tujuan pengajaran bahasa yang sedang terancam hendaklah tidak ditekankan pada aspek kognitif semata-mata, tetapi yang lebih penting adalah aspek afektif, yakni agar pemelajar bersikap positif dan mencintai bahasa itu.

Sesuai dengan pandangan yang berterima sekarang, yakni bahwa hidup atau matinya bahasa bergantung pada para penuturnya, keputusan membiarkan bahasa bergeser atau bertahan itu semata-mata bergantung pada sikap masyarakat bahasa itu sendiri. Tidak ada yang dapat diusahakan oleh pakar mana pun serta dengan jalan apa pun untuk membalikkan pergeseran bahasa jika dan bila masyarakat bahasa itu sendiri sudah berkeputusan untuk membiarkan bahasanya mati.

Ada lagi alasan yang "nasionalistik" mengapa pergeseran BD tidak perlu dibalikkan. Alasan ini mengacu ke istilah yang dikemukakan oleh Fishman (1972), seperti yang diulas oleh Fasold (1984:2-7). Kedua-dua istilah itu ialah nasionisme dan nasionalisme. Yang pertama itu berkaitan dengan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di dalam arti luas. Yang kedua mengacu ke perasaan yang tumbuh (dan kemudian menjadi dasar) dari nasionalitas, yakni satuan sosiokultural yang terdiri atas orang-orang sebagai anggota-anggota suatu satuan sosial yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain, Nasionalitas itu ada bukan karena skala lokal semata-mata. Pengertian nasionalitas menurut Fishman ini berbeda dengan pengertian suku atau kelompok etnik, yang ia perikan sebagai satuan sosiokultural yang lebih sederhana, lebih kecil, lebih partikularistik dan lebih lokalistik daripada pengertian nasionalitas itu, Jadi, sebagai satuan sosiokultural, nasionalitas lebih besar daripada suku atau kelompok etnik.

Peran bahasa di dalam nasionisme berbeda dengan peran bahasa di dalam nasionalisme. Masih menurut Fishman, ada dua bidang yang di dalamnya bahasa memegang peran penting: (1) administrasi pemerintahan umum dan (2) pendidikan. Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan komunikasi di dalam dan di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang ada serta di antara pemerintah dan rakyat. Tentu saja untuk komunikasi itu diperlukan bahasa, dan sepanjang yang berkaitan dengan keefisienan" (dan keefektifan) komunikasi, bahasa apa pun boleh dipakai. Karena tuntutan bersifat pragmatis, bahasa yang paling tinggi derajat keefisienannya yang patut dipilih sebagai alat komunikasi agar *nasion* yang bersangkutan berfungsi secara efektif di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak menjadi masalah apakah bahasa itu berasal dari luar wilayah negara atau apakah ia adalah bahasa setempat.

Pendidikan juga memerlukan bahasa, yakni bahasa pengantar. Di dalam hal ini, sepanjang yang berkaitan dengan keefisienan komunikasi, bahasa apa pun dapat dipakai dan, seperti halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan, bahasa yang patut dipilih adalah bahasa dengan derajat keefisienan yang paling tinggi.

Peran bahasa dalam nasionalisme ternyata lebih subtil. Hal ini karena bahasa-seperti juga kebudayaan, agama, dan sejarah merupakan komponen nasionalisme. Masih menurut Fishman, *language serves a link with the glorious past and with authenticity* (Fasold, 1984: 3). Bahasa bukanlah sekadar wahana sejarah suatu nasionalitas; ia adalah sejarah itu sendiri. Sepanjang yang menyangkut otentisitas, yang baik adalah jika suatu nasionalitas mempunyai bahasanya sendiri (bukan bahasa nasionalitas yang lain atau yang "diimpor" dari wilayah lain) sebagai komponen dan simbol nasionalismenya.

Peran lain yang dipunyai bahasa dalam kaitannya dengan nasionalisme adalah apa yang oleh Garvin dan Mathiot (1956) disebut fungsi pemersatu (*unifying*) dan pemisah (*separatist*). Fungsi yang pertama itu mengacu ke perasaan para anggota suatu nasionalitas bahwa mereka disatupadukan serta diidentifikasi dengan orang-orang lain yang menggunakan bahasa yang sama. Fungsi yang kedua itu merujuk ke perasaan para anggota suatu nasionalitas bahwa mereka berbeda dan terpisah dari orang-orang yang berbahasa lain. Dapat diduga dari sinilah timbulnya pendapat bahwa BD tidak perlu dilestarikan: BD berpotensi melemahkan rasa nasionalisme.

Dari apa yang dikemukakan di atas, tampaknya kita dihadapkan kepada dua pilihan yang saling bertentangan. Di satu sisi, demi nasionalisme dan nasionalisme, BD perlu dibiarkan bergeser, terus bergeser, dan akhirnya pupus. Di sisi yang lain, BD perlu dilestarikan agar kebudayaan daerah (KD) tidak menjadi lemah dan, implikasinya, agar budaya bangsa tetap kukuh dan kebijakan kemajemukan budaya dapat diteruskan.

Jika demi kukuhnya budaya: bahwa BD memang harus dilestarikan, pemerintah Indonesia perlu secara aktif mengusahakannya. Yang jelas, mempertahankan BD yang tidak bergeser saja sulit, apalagi membalikkan pergeseran bahasa. Diperlukan usaha yang terencana dengan baik, lengkap dengan rumusan visi dan misi, serta cetak baru dan sistem pemantauan pelaksanaan rencana yang juga baik.

Singkatnya, untuk usaha pembalikan pergeseran bahasa (PPS), kita memerlukan teori agar usaha kita tidak asal membalikkan arah bahasa yang sedang terancam. Teori itu, yang dapat dianggap sebagai bagian dari teori perencanaan (perancangan) status bahasa, dikemukakan oleh Fishman (1990, 1991, 1993). Gaung teori ini, yang sekarang lazim disebut teori PPS, tampaknya belum banyak berkumandang di

Indonesia, dan karena itu, ada baiknya jika ia disinggung di sini.

Titik tolak teori ini adalah bagaimana kita mendiagnosis dan merawat bahasa yang terancam. Untuk mendiagnosis itu, Fishman membuat skala yang mengingatkan kita kepada skala Richter: makin tinggi skalanya makin kuat goncangan gempanya, dan analoginya adalah makin kuat keterancaman bahasa yang bersangkutan. Skala 8 mencerminkan keterancaman yang paling buruk: bahasa yang bersangkutan sudah hampir punah, dari penuturnya tinggal orang-orang tua, yang di dalam usaha pembalikan itu dijadikan sumber korpus bahasa. Skala 1 mencerminkan keadaan yang paling baik: bahasa yang pernah terancam itu sekarang sudah dipakai di sekolah, tempat bekerja, pemerintahan, dan media.

PPB dimulai dengan mengenali (mengidentifikasi) derajat keterancaman bahasa yang bersangkutan. Di sini peran peneliti bahasa sangatlah penting. Langkah-langkah berikutnya adalah menyusun program PPB sesuai dengan skala yang teridentifikasi itu. Jika program di tingkat skala ini dinilai berhasil, langkah selanjutnya adalah menyusun program PPB pada tingkat yang lebih tinggi, dan demikian seterusnya sehingga tercapai tingkat yang aman, yang ditandai oleh terjaminnya kelangsungan transmisi antargenerasi bahasa yang pernah terancam itu.

Agar lebih jelas, berikut ini adalah ringkasan teori PPB Fishman tersebut dalam bentuk skala, yang ia sebut *Graded Intergenerational Dislocation Scale* (GIDS), yang menunjukkan babak-babak yang perlu dilalui PPB. Secara lengkap GIDS itu adalah seperti yang di bawah ini. (Cara membacanya adalah dari bawah ke atas.)

1. Pendidikan, tempat kerja, media massa, pelaksanaan pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi dan di tingkat nasional.
2. Media massa dan layanan pemerintahan lokal/regional.
3. Tempat kerja lokal/regional, baik di antara sesama penutur bahasa yang bersangkutan maupun di antara penutur bahasa itu dan penutur bahasa lain.
4. Sekolah umum bagi anak-anak masyarakat bahasa yang bersangkutan, yang sebagian pelajarannya diberikan di dalam bahasa tersebut, tetapi yang pengawasan kurikuler dan penentuan stat terutama dilakukan di dalam bahasa yang lain (yakni bahasa yang lebih dominan/bahasa nasional).
- 4a. Sekolah alih-alih pendidikan wajib, dan pengawasan kurikuler dan penentuan stat terutama dilakukan di dalam bahasa yang bersangkutan.

II. PPB bertujuan melampaui diglosia setelah diglosia tercapai

1. Sekolah untuk pemerolehan keaksaraan (*literacy*), bagi orang tua dan orang muda, dan bukan alih-alih pendidikan wajib.
2. Ranah rumah-keluarga-lingkungan yang merupakan konsentrasi antar-

generasi dan demografi: basis untuk transmisi bahasa yang PPB-nya sedang diusahakan.

3. Interaksi budaya dengan menggunakan bahasa yang bersangkutan, yang melibatkan generasi-generasi yang lebih tua, yang berbasis komunitas.
4. Rekonstruksi bahasa yang terancam dan pemerolehan bahasa itu di kalangan orang dewasa.

I. PPB bertujuan mencapai diglosia

Tujuan I bagi kita adalah bagaimana menciptakan diglosia BI-BD. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia konstelasi BI dan BD tidak dapat lain: BI berfungsi tinggi (T) dan BD berfungsi rendah (R), kecuali kalau kita ingin mendirikan negara baru dengan BD sebagai bahasa nasionalnya. Jadi, bagi kita usaha PPB dapat dikatakan berhasil jika dan bila BD lestari dipakai di ranah R dan BI di ranah T. Yang menjamin transmisi antargenerasi BD adalah tetap dipakainya BD itu di ranah rumah atau keluarga, terlebih lagi jika ia tetap dipakai di ranah yang lebih luas. Jadi, minimal BD harus dipakai oleh orang tua kepada anak di rumah. Inilah yang dapat menghindari terjadinya disrupsi pewarisan BD itu. Inilah yang dapat menangkal terjadinya diskontinuitas pewarisan BD.

5. Penutup

Alur pikiran yang diikuti di dalam penulisan makalah ini ialah bahwa di dalam negara Indonesia, yang menganut pandangan kemajemukan budaya atau *cultural pluralism* (alih-alih *cultural singularism*), kebudayaan daerah (KD) perlu dipelihara sebagai penopang kebudayaan bangsa. Salah satu cara untuk melestarikan KD adalah dengan melestarikan BD, yang adalah jantung KD itu. Jadi, inferensinya adalah bahwa untuk memperkuat budaya bangsa, secara tidak langsung kita wajib menjaga agar BD tidak bergeser dan, akhirnya, tidak pupus.

Pembalikan pergeseran BD sebagai usaha pembinaan BD adalah usaha yang sah karena penjelasan konstitusi telah menetapkan bahwa bahasa-bahasa yang dibina oleh masyarakat pamakainya dihargai dan dipelihara oleh negara karena bahasa-bahasa itu adalah bagian daripada kebudayaan Indonesia yang hidup. Atas dasar ini sudah sepatutnya jika Pusat Bahasa, misalnya, ikut aktif dan bahkan proaktif membina BD. Pemerintah pun perlu ikut aktif membiayai usaha-usaha itu agar ia tidak dituduh menjalankan kebijakan pembunuhan bahasa (*linguicide*). Masyarakat daerah sendiri harus aktif dan proaktif melaksanakan pembinaan itu dengan membentuk semacam tugas utama menyusun perencanaan pembalikan pergeseran BD, dan perencanaan itu, agar mempunyai probabilitas keberhasilan, haruslah yang baik, lengkap dengan deskripsi visi dan misi yang jelas, termasuk deskripsi strategi yang akan ditempuh. Teori pembalikan pergeseran bahasa (Fishman, 1991) perlu dipertimbangkan.

Alih-alih pembentukan satuan tugas seperti itu (yang dimungkinkan di dalam konteks otonomi daerah), pembinaan BD dapat diserahkan kepada balai/kantor bahasa di daerah yang sudah waktunya didirikan oleh Pusat Bahasa di semua provinsi. Yang tidak kurang pentingnya adalah mencari perintis pembinaan BD, seperti Ben Yehuda di Israel dulu, yang tanpa mengenal lelah memikirkan, mengusulkan, melaksanakan usaha-usaha pembinaan BD.

Usaha pembinaan BD itu hendaklah menjadi bagian dari usaha pembinaan kebudayaan daerah (KD). Konsekuensinya adalah bahwa otonomi daerah hendaklah tidak terbatas pada otonomi politik dan ekonomi, tetapi mencakupi juga otonomi kebudayaan.

Sekiranya ada tuduhan bahwa usaha-usaha pembangkitan BD dan KD itu sama saja dengan pembangkitan provinsialisme atau primordialisme daerah, hal ini dapat dibantah bahwa soal pelestarian bahasa (dan budaya) daerah ini adalah soal hak asasi manusia. Hal ini dijamin oleh PBB, yang di dalam Pasal 27 dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) dinyatakan:

"In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in conformity with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language."

Sebagai penutup, tampaknya ada empat belas hal yang perlu kita pertimbangkan jika kita hendak memperkuat budaya bangsa melalui pemantapan peran BD. Hal-hal itu adalah sebagai berikut:

- (1) BD memang secara potensial dapat berperan sebagai penopang KD, yang pada gilirannya dapat berpotensi memantapkan budaya bangsa.
- (2) Agar dapat menjalankan perannya, BD harus dijaga agar tidak bergeser.
- (3) BD, dan juga semua bahasa pada umumnya, dapat dijaga agar tidak bergeser jika transmisi antargenerasi tidak terganggu. Dengan perkataan lain, BD mempunyai peluang tidak akan bergeser jika tidak terjadi disrupsi atau dislokasi pewarisan antargenerasi BD itu.
- (4) Disrupsi pewarisan antargenerasi BD tidak akan terjadi jika ia dipakai secara berkelanjutan minimal di dalam ranah rumah (keluarga).
- (5) Yang dapat menyebabkan BD tergeser adalah adanya disrupsi transmisi antargenerasi BD itu. Hal ini terjadi jika orang tua tidak mengajarkan (menggunakan) BD itu kepada generasi berikutnya, yang berarti generasi ini tidak akan mengajarkannya kepada generasi berikutnya lagi karena mereka tidak menguasai BD itu.
- (6) Pergeseran BD tidak dapat dibalikkan dengan mengajarkannya di

sekolah, apalagi jika pengajarannya menekankan aspek kognitif belaka alih-alih aspek afektif.

- (7) Implikasi butir (6) itu ialah bahwa pengajaran menulis dan membaca huruf atau aksara daerah tidak dapat menjamin BD tidak bergeser. Hal yang sama juga berlaku pada penggunaan huruf atau aksara daerah untuk nama jalan.
- (8) Untuk pembalikan pergeseran BD kita harus puas jika dan bila kita berhasil mendudukkan BD sebagai pengemban fungsi rendah di dalam situasi diglosik yang melibatkan BI sebagai pengemban fungsi tinggi. Yang penting adalah menjaga agar diglosia itu tidak tiris.
- (9) Untuk mendudukkan BD sebagai bahasa ranah rendah (rumah, keluarga, persahabatan intraetnik), perlu ada gerakan sosial berbahasa daerah.
- (10) Gerakan sosial itu sebaiknya dimotori oleh orang (atau orang-orang) daerah yang mencintai BD dan KD, dengan dukungan finansial, institusional, dan implementasional dari pemerintah melalui Pusat Bahasa dan balai/kantor bahasa.
- (11) Perlu dibina kerja sama di antara para pembina BD, Balai Bahasa, dan universitas di daerah untuk mengadakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembalikan pergeseran bahasa daerah. Pedoman penelitian untuk itu hendaklah dibuat oleh Pusat Bahasa. Demikian pula, Pusat Bahasa perlu membekali balai/kantor bahasa dengan teori PPB.
- (12) Usaha PPB, sebagaimana usaha pada umumnya, mempunyai peluang berhasil dan peluang gagal. Tampaknya, peluang berhasil banyak berkaitan dengan vitalitas etnolinguistik masyarakat yang bersangkutan. Inilah yang perlu dibina.
- (13) Gerakan sosial PPB perlu dilakukan, senyampang pada umumnya keterancaman BD belum mencapai skala 8 pada GIDS. Lagi pula, kita perlu memanfaatkan proyeksi Naisbitt (1994), yang mengatakan bahwa ketika bahasa Inggris menjadi bahasa kedua bagi kebanyakan orang--akibat globalisasi--bahasa ibunda menjadi lebih penting, dan karenanya para penuturnya akan berusaha mempertahankannya.
- (14) Agar pembalikan pergeseran BD mempunyai pijakan hukum, perlu ada Undang-Undang Kebahasaan yang mencakupi pasal-pasal tentang PPB. Kalau rencana undang-undang sudah dibuat, ia perlu disosialisasikan, agar masukan-masukan dapat diberikan oleh mereka yang berminat.

Tak Melayu hilang di bumi, kata Hang Tuah. Orang-orang daerah sepatutnya bersemboyan "Tak BD hilang di bumi!"

Rujukan

- Basnett, S. 1992. *Translation Studies*. London/New York: Methuen
- Fasold, Ralph W. 1984. *The Sociolinguistics of Society*. Oxford/New York: Basil Blackwell
- Fishman, Joshua A. 1972. *Languages and Nationalism*. Rowley, MA: Newbury House
- Fishman, Joshua A. 1990. "What is Reversing Language Shift (RLS) and How can it Succeed?" *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. Vol. 11, No.1 & 2, 5-36
- Fishman, Joshua A. 1991. *Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Language*. Clevedon, UK: Multilingual Matters
- Fishman, Joshua A. 1993. "Reversing Language Shift: Successes, Failures, Doubts and Dilemmas." Dalam E.H. Jahr [ed.]. 69-81 Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. Princeton (?), USA: Basic Books
- Gunarwan, Asim. 1994. "The Encroachment of Indonesian upon the Home Domain of the Lampung Language Use: A Study of the Possibility of a Minor-Language Shift." Makalah pada Konferensi Internasional VII Linguistik Austronesia. Leiden, 22-27 Agustus
- Gunarwan, Asim. 1996. "Tindak Tutur Mengkritik dengan Parameter Umur di Kalangan Penutur Jati Bahasa Jawa: Implikasinya pada Pembinaan Bahasa." Makalah pada Kongres II Bahasa Jawa. Malang, 22-26 Oktober
- Gunarwan, Asim. 1999. "Kedudukan dan Tantangan Bahasa Daerah di dalam Abad yang Akan Datang." Makalah pada Kongres Linguistik Nasional, Jakarta, 28--31 Juli
- Gunarwan, Asim. 2001a. "Indonesian and Balinese among Native Speakers of Balinese: A Case of Stable Bilingualism?" Makalah pada Simposium Internasional II tentang Bilingualisme. Bristol, UK, 18-20 April.
- Gunarwan, Asim. 2001b. "Indonesian and Banjarese Malay among Banjarese Ethnic in Banjarmasin City: A Case of Diglosia Leakage?" Makalah pada Simposium Internasional V tentang Linguistik Melayu/Indonesia. Leipzig, Jerman, 16--17 Juni
- Gunarwan, Asim. 2002a. "Persepsi Nilai Budaya Jawa di Kalangan Orang Jawa: Implikasinya pada Penggunaan Bahasa." Makalah pada PELBBA ke-16, Unika Atma Jaya, Jakarta, 22-23 Juli.

- Gunarwan, Asim. 2002b. "The Unstable State of the Indonesian Javanese Bilingualism: Evidence from Language Use in the Home Domain." Makalah pada Simposium Internasional I tentang Bilingualisme, Vigo, Spanyol, 23--26 Oktober
- Hinton, L. 1999. "Teaching Endangered Language." Dalam Spolsky, Bernard (ed.), 74-77
- Jahr, E.H. (ed.). 1993. *Language Conflict and Language Planning*. Berlin: Mouton de Gruyter
- Lee, Victor. 1981. "Linguistic and social determinism." Dalam *Social Aspects of Language*. Manchester: The Open University, 72-94
- Mackey, William F. 1973 *Three Concepts for Geolinguistics*. Cirb Publication. Quebec: Centre international de recherches sur le bilinguisme
- Mesthrie, R. 1999. "Language Loyalty." Dalam Spolsky, Bernard (ed.), 4247
- Naisbitt, John. 1994. *Global Paradox*. New York: Avon Books
- Smolicz, J. 1980. "Language as a Core Value of Culture." *RELC Journal*, Vol 11 No.1, 1-13
- Spolsky, Bernard [ed]. 1999. *Concise Encyclopedia of Educational Linguistics*. Amsterdam: Elsevier

PEMEKARAN FUNGSI BAHASA DAERAH DEMI KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Aron Meko Mbete
Universitas Udayana

1. Pendahuluan

Dalam perspektif sosiopolitik-linguistik, perkembangan repertoar dan perubahan gejala kebahasaan masyarakat Indonesia, dari ekabahasaan yang berbahasa ibu bahasa daerah menjadi dwibahasawan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, merupakan gejala yang sangat menarik untuk dikaji dan "dipersoalkan" secara terus-menerus. Gejala tersebut akan selalu merangsang untuk dikaji karena bagi bangsa Indonesia, semboyan *bhinneka tunggal ika* tetap dipertahankan, keanekaragaman bahasa daerah tetap diberi ruang dan hak hidup berdampingan dengan bahasa nasional.

Adalah kenyataan bahwa sebagian besar anak Indonesia yang berada di kota-kota, juga yang berasal dari keluarga dwisuku, dan yang berpendidikan relatif tinggi, sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Di sisi lain, kendatipun sebagian besar anak-anak dan generasi muda di pedesaan memang masih berbahasa ibu bahasa daerah, gejala menurunnya mutu penguasaan dan penggunaan bahasa daerah serta rendahnya apresiasi generasi muda terhadap sastra dan budaya daerah, menjadi keprihatinan generasi tua. Tidak lancar dan tidak berhasilnya pewarisan (transmisi) bahasa daerah antargenerasi penutur, menurut hasil survei UNESCO, seperti dikutip oleh Lauder (2001:124--126), memilukan. Dari 90 bahasa minoritas yang disurvei di sejumlah negara, hanya 36% terwaris secara mulus, 64% tidak terwaris secara baik, 32% berfungsi, 68% bahasa minoritas itu tidak berfungsi lagi. Gambaran awal kehidupan bahasa-bahasa minoritas di sejumlah negara itu, kendati perlu diteliti kembali, tidak terlalu berbeda jauh dengan kondisi terakhir bahasa-bahasa minoritas di Nusantara.

Perkembangan bahasa Indonesia yang bermula dari bahasa Melayu Riau sebagai *lingua franca* di pelbagai wilayah Nusantara, dan kemudian menjadi bahasa nasional dan bahasa negara, bahkan makin diminati oleh banyak bangsa, antara lain, Australia, Jepang, Korea, Jerman, dan Italia, diterima sebagai prestasi budaya bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Pada masa yang akan datang perkembangan bahasa Indonesia sebagai komponen kebudayaan Indonesia dan sebagai jembatan antarbangsa akan makin pesat pula. Kendatipun demikian, mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan wilayah penyebarannya yang belum merata, patut diprihatinkan. Masih banyak warga bangsa Indonesia

yang rendah mutu penguasaan dan pemakaiannya, masih banyak pula warga bangsa yang buta bahasa Indonesia, bahkan masih ada wilayah Tanah Air ini yang belum menjadi daerah pakai bahasa nasional itu. Buta huruf dan buta bahasa, selain rendahnya gizi anak Indonesia selama krisis multidimensi berkepanjangan ini, menjadi indikator rendahnya mutu manusia Indonesia¹. Keadaan yang demikian ini jelas memengaruhi usaha pemerataan pembangunan karena pemahaman konsep pembangunan umumnya berkaitan dengan pemahaman makna dan konsep pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia (bandingkan dengan Meoliono, 1981:2).

Nasionalisme yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini sejak awal abad ke-20, khususnya semangat *Soempah Pemoeda*, 28 Oktober 1928, diharapkan masih tertanam kuat dalam setiap sanubari warga bangsa. Nasionalisme kewilayahan Nusantara yang utuh diteguhkan di bawah sumpah "*Satoe tanah air, tanah air Indonesia*, kesatuan jiwa dan semangat sebagai bangsa yang majemuk dilandasi sumpah "*Satoe bangsa, bangsa Indonesia*" dan roh budaya kebahasaan perekat kebersamaan didasari sumpah "*Mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia*". Trisumpah itu kita sadari sebagai tiang penyangga utama wilayah tanah dan air yang luas, pengikat bangsa yang majemuk, keanekaan bahasa dan budaya sebagai penciri jati diri bangsa Indonesia.

Secara budaya, memang harus diakui bahwa bahasa Indonesialah yang telah merekatkan masyarakat Indonesia yang multietnik ini menjadi satu bangsa. Di sisi itu disadari bahwa bahasa Indonesia pula yang telah menunjukkan jati diri dan martabat bangsa kita sebagai bangsa yang mampu membangun kebudayaan Indonesia. Adalah kenyataan bahwa melalui sistem pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni sastra, dan juga seni lainnya yang diwahanai bahasa Indonesia itulah yang menunjukkan perkembangan bahasa Indonesia, kemajuan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Rintisan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan '45, Angkatan '66, dan perjalanan bahasa Indonesia hingga kini pula, sastra Indonesia hadir. Politik Orde Baru yang sentralistik dan kebijakan penyeragaman, yang dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa, memang cukup berhasil mengembangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pembangunan dan bahasa modern.

Seiring dengan penyebaran bahasa dan kebudayaan Indonesia yang

¹ Simak Tajuk Rencana Harian *Kompas*, edisi 12 Juli 2003, berjudul "Inilah Potret Kualitas Manusia Indonesia" yang mengutip penilaian UNDP dan dengan merujuk Hasil Penelitian Litbang Depdiknas, memperlihatkan fakta rendahnya kemampuan bahasa anak-anak berusia 15 tahun.

semakin intens dan meluas, juga kehadiran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagian besar bahasa-bahasa daerah "terlantar". Salah satu komponen budaya bangsa itu kurang dihormati, kurang dihargai, dan kurang dipelihara oleh negara dan oleh para ahli warisnya. Padahal, dalam butir 2 Pasal 32 UUD 1945, hasil amandemen, dirumuskan bahwa "*Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional*". Dalam perspektif konstitusi dapat disimpulkan bahwa pengabaian dan pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi selama perjalanan negara bangsa ini. Negara dan masyarakat Indonesia yang mengaku ahli waris nilai-nilai budaya bangsa telah menelantarkan warisan leluhur mereka.

Era otonomi daerah dan era desentralisasi pengelolaan negara, khususnya di bidang kebudayaan ini memerlukan kepedulian baru terhadap nasib warisan budaya itu jikalau bahasa-bahasa daerah itu masih disepakati tidak dibiarkan mengalami kerapuhan dan kepunahan. Ciri-ciri kerapuhan, bahkan tanda-tanda kematian sejumlah bahasa lokal akan dicoba diperikan di bawah ini. Selanjutnya, ancaman pemberdayaan melalui pemekaran kembali fungsi sosial-kulturalnya pada ranah adat-budaya dan ranah agama dianjurkan, di sisi ranah keluarga.

Sistem pendidikan sebagai instrumen dan jalur formal penerusan (transmisi) tradisi dan budaya masa lalu, khususnya dalam bentuk pengajaran bahasa daerah, masih memprihatinkan karena sebagaimana iklim pendidikan nasional kita yang masih terjebak formalisme. Rusyana (1999:73-75) yang mengajukan fakta tentang nasib buruk bahasa-bahasa daerah besar, apalagi bahasa-bahasa kecil yang banyak itu, ternyata di dua belas provinsi di Indonesia, hanya sejumlah kecil bahasa daerah yang diajarkan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Diinformasikan bahwa hanya bahasa Aceh dan Gayo di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bahasa Batak (Toba, Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo) dan bahasa Melayu di Provinsi Sumatera Utara, bahasa Rejang di Provinsi Bengkulu, bahasa Lampung di Provinsi Lampung, bahasa Sunda di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dialek Cirebon dan Indramayu di Jawa Barat, bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur, bahasa Madura di Jawa Timur, bahasa Dayak (Simpang dan Kanayatan) di Provinsi Kalimantan Barat, bahasa Banjar dan bahasa Kutai di Provinsi Kalimantan Timur, bahasa Tombulu, Tonsawang, dan Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara, bahasa Bugis, Makasar, Mandar, dan Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan, bahasa Tolaki, Muna, dan Wolio di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta bahasa Bali di Provinsi Bali, diajarkan di sekolah-sekolah dasar dan menengah. Bahasa-bahasa daerah kecil lainnya di wilayah tersebut di atas tidak diajarkan. Secara nasional, ternyata jauh lebih banyak wilayah provinsi yang tidak

menjadikan bahasa daerah sebagai bahan pengajaran di sekolah-sekolah. Bahasa daerah hanya sebagai "titipan" dalam penerapan kurikulum muatan lokal mewarnai. Terlepas dari seberapa jauh keberhasilan pengajaran bahasa daerah tersebut, tanda kecil penghargaan dan pemeliharaan atas unsur budaya bangsa di provinsi-provinsi itu masih tampak. Sementara itu, masih sangat banyak bahasa daerah kecil lainnya di luar ke-12 provinsi tersebut di atas yang memang belum dilirik, baik oleh para ahli warisnya, oleh lembaga pendidikan formal, maupun oleh pemerintah daerah.

Sebelum melangkah cepat pada era global ini, peninjauan kembali masa lalu untuk menelusuri sejarah budaya merupakan sebuah kearifan yang tetap penting. Adalah fakta sejarah bahwa sebelum bahasa Indonesia mulai "menggeser" dan menyusutkan fungsi bahasa-bahasa daerah, semua bahasa daerah di Indonesia ini telah menjalankan fungsi kemasyarakatan dan fungsi transmisi nilai-nilai budaya antargenerasi (lihat Halliday, 1977:8). Khazanah nilai budaya lokal dan perangkat norma sosial guyub tuturnya diwahanai dan diwariskan dalam kemasan bahasa daerah. Kendatipun berskala lokal dan berdimensi primordial, "prestasi" kebahasaan generasi terdahulu yang membangun identitas komunitas etnik itu, masih patut diacu (bandingkan dengan Ahmad, 2002:439-441). Seiring dengan arus perubahan global yang makin menderas, transformasi sosial-kultural dan perubahan tatanan kebahasaan Nusantara ditengarai pula dengan dominasi bahasa nasional, sementara di sisi lain bahasa daerah makin terjepit. Bahasa Indonesia dengan fungsinya sebagai sarana komunikasi utama masyarakat kota, seperti juga budaya metropolitan dengan kedahsyatan teknologi elektronik yang teknikal dan digital, telah membius generasi muda. Gejala konsumtif, materialistik, dan hedonistik yang mewarnai budaya masyarakat Indonesia melanda pula generasi penerus yang makin sepi dari tradisi, terputus dari akar masa lalu. Ini adalah kenyataan budaya bangsa di tengah era global, yang tampaknya makin sulit disaring, dipilih, dipilah, dan diintegrasikan ke dalam wadah "jati diri bangsa Indonesia".

2. Tanda-Tanda Kerapuhan Bahasa Daerah

Sebagian besar bahasa daerah di Indonesia tergolong bahasa kecil karena hanya didukung oleh kurang dari satu juta penutur, makin lama makin menyusut jumlah pendukungnya, dan umumnya tidak memiliki tradisi tulis (lihat Ferguson, 1971:324-326). Kecuali bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Bali, Batak, dan Bugis yang memang didukung oleh berjuta-juta penutur dan bertradisi tulis asli, aksara Arab, dan tradisi tulis Latinnya yang dikembangkan selama ini, sebagian besar bahasa daerah tidak mengenal tradisi tulis. Tersendat-sendatnya pewarisan, pembakuan, pengembangan, dan upaya pemberdayaannya, berakar juga

dari persoalan ketidakberaksaraan bahasa-bahasa daerah.

Sejumlah bahasa di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Tenggara, misalnya, hanya didukung oleh beberapa ribu, beberapa ratus penutur, bahkan di antaranya hanya didukung oleh beberapa puluh penutur. Jumlah penutur muda pendukung bahasa-bahasa daerah itu makin menyusut karena arus transmigrasi, urbanisasi, dan mobilitas sosial lintas etnik dan daerah yang makin kuat menggejala. Berdasarkan hasil penelitian Bagus, dkk. (1998), Gunarwan (2002), Mbete (2002), ranah keluarga sebagai benteng terakhir, khususnya di kota dan desa-desa yang sudah tergolong maju, bahasa daerah tidak mendapat posisi dan tungsi penting lagi karena sudah diambil alih oleh bahasa Indonesia. Banyak ahli waris muda usia yang sudah malu, tidak percaya, dan tidak mampu menggunakan bahasa daerah. Makin kecil bahkan makin langka pula "ahli-ahli" budaya dan bahasa daerah yang mencintai dan mengembangkan bahasa, sastra, dan budaya daerahnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, dan jika dikaitkan dengan tahapan ancaman kematian menurut Fishman (1991:88--109; lihat juga Reyhner, 1999), sejumlah bahasa daerah memang sudah berada pada taraf delapan, taraf yang rapuh dan mencemaskan. Di antara bahasa--bahasa daerah di Indonesia ini memang ada yang hanya "menyisakan" segelintir penutur tua dan secara lingual tidak interaktif lagi antar-generasi. Banyak generasi muda berpendidikan tinggi dan tingkat mobilitasnya pun tinggi, tidak mampu lagi berbicara dan berdialog dalam bahasa daerah dengan generasi tuanya dalam hal adat dan budaya lokal. Kenyataan juga menunjukkan bahwasanya telah terjadi kesenjangan lingual dan kultural kedaerahan antargenerasi. Penguasaan dan penggunaan ragam halus, ragam baku, dan gaya "beku" yang estetik dan kaya makna budaya pada sejumlah bahasa daerah yang tergolong besar, terlebih lagi bahasa daerah kecil, terbatas pada generasi tua dengan jumlah yang kian mengecil pula.

Pemakaian bahasa daerah antargenerasi masih tetap hadir. Artinya, fungsi praktis, fungsi sosial (walaupun kering makna kultural) memang masih tampak. Akan tetapi, hilangnya budaya dongeng kemasinibu sebelum tidur, sementara di sisi lain akrabnya VCD impor yang menerobos desa pascaelektrifikasi, makin menjauhkan generasi muda dari akar sejarah, budaya lokal, dan lingkungannya. Inilah, antara lain, gejala serius rapuhnya ketahanan bahasa dan budaya bangsa di tengah era global ini. Gejala perubahan tanda jati diri pada sebagian warga masyarakat yang telah maju dan berwawasan global, namun tanpa akar lokal, perlu dikaji lebih dalam agar arah perubahan mental manusia dan bangsa Indonesia dapat dipahami.

Daya dukung penutur muda bahasa-bahasa daerah kecil dan besar,

kendatipun harus didata secara lebih tuntas, diduga kuat makin berkurang. Peminggiran bahasa daerah karena posisinya yang subordinat yang memang harus berkolokasi dalam koridor kebahasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, menggejala kuat. Walaupun harus diakui pula bahwa di sisi lain, tingkat mutu pemakaian bahasa Indonesia pun masih rendah. Namun, rendahnya mutu dan lemahnya daya baca masyarakat Indonesia yang lebih tergiur pada media televisi dan VCD menunjukkan pula rendahnya mutu manusia Indonesia. Kerapuhan lingual-kultural perlu disikapi, dikritisi, dan diwaspadai. Lebih daripada itu, upaya revitalisasi bahasa dan budaya daerah, seiring dengan peningkatan mutu penggunaan dan perluasan wilayah pakai bahasa Indonesia, serta penguasaan bahasa asing pada era global ini, menjadi tugas yang sangat mendesak untuk diemban.

3. Pemekaran Fungsi Bahasa Daerah

Pemberdayaan dan pemekaran fungsi sebagai upaya revitalisasi bahasa-bahasa daerah harus diupayakan dalam kerangka kebahasaan nasional dan mondial. Secara nasional bahasa Indonesia harus tetap menempati posisi tertinggi dan superordinat dalam skala nilai kebahasaan dan kebudayaan, sedangkan bahasa daerah tetap menjadi penopang kehidupan bahasa nasional. Akan tetapi, dinamika dan kemajuan bahasa Indonesia, "dituntut" pula untuk turut mendorong kehidupan bahasa daerah. Sementara itu, sumber daya bahasa Inggris sebagai bahasa asing utama perlu dikuasai, disusul sejumlah bahasa asing lainnya, sesuai dengan dinamika dan kekuatan arus budaya global. Visi kedwibahasaan yang berimbang dengan lebih dominannya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa modern yang mewahani ilmu pengetahuan, teknologi, dan sastra Indonesia modern, merupakan paradigma alternatif terbaik. Kedwibahasaan, dalam arti menguasai dan menggunakan dua bahasa atau lebih (Mackey, 1961; Romaine, 1997; McKay dan Hornberger, 1996), bagi masyarakat Indonesia pada era global ini seharusnya merupakan kemauan dan kebijakan politik yang berpijak pada hak kultural, hak lingual, dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Adalah konvensi, jikalau selain bahasa Indonesia yang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya yang "mengatasi" bahasa-bahasa Nusantara dan bahasa-bahasa asing mana pun di negeri ini, bahasa-bahasa daerah patut dicintai lagi, dipelajari, dikuasai, dipercayai, dan digunakan kembali sebagai sarana primordial, perekat etnik, sumber daya budaya, dan wahana budaya nasional yang ada di pelbagai daerah.

Penataan, pemilahan, dan pengalokasian fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing pada era global ini merupakan sebuah "keniscayaan". Bahasa daerah yang dipelihara oleh para pemiliknya selayaknya tetap dijadikan ciri jati diri dan sarana komunikasi utama di lingkup

lokalnya oleh sebagian besar para ahli warisnya. Ini adalah tuntutan budaya pada era global dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan lokal. Globalisasi dan modernisasi kebahasaan, bagaimanapun juga, diharapkan tetap berakar nasional dengan realitas lokal. "Pembagian ranah-ranah pakai" di antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing, menjadi sangat penting agar bahasa Indonesia sebagai bahasa besar dan modern serta bahasa Inggris sebagai bahasa dunia, tidak harus mencaplok dan "menggusur" bahasa-bahasa daerah.

"Jebolnya" fungsi bahasa pada ranah keluarga sebagai benteng pertahanan terakhir bahasa daerah, seharusnya belum menjadi "kiamat" bagi bahasa-bahasa daerah untuk bernapas kembali. Seiring dengan adanya gejala masyarakat Indonesia dan negara-negara berkembang yang mulai menyadari kembali makna warisan masa lalu dalam semangat nasionalisme budaya (Lihat Naisbitt dan Aburdene, 1990:126) dan terkait pula dengan otonomi daerah, peluang pemberdayaan bahasa daerah masih tetap terbuka. Di sisi ranah keluarga yang juga diupayakan demi revitalisasi bahasa daerah, secara fungsional dua ranah kehidupan bahasa daerah, yakni: (1) ranah adat dan budaya lokal dan (2) ranah agama, dapat digarap untuk memberdayakan kembali bahasa daerah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

3.1 Pemberdayaan Bahasa Daerah dalam Ranah Adat dan Budaya Lokal

Modernisasi kehidupan masyarakat Indonesia di bidang kebahasaan tetap berorientasi nasional dan berakar lokal sesuai dengan potensi, daya hidup, dan daya dukung yang ada. Pada era global dan pasar bebas ini bahasa Inggris memang harus dapat dikuasai oleh sebagian warga masyarakat lokal di pelbagai wilayah Nusantara. Dengan demikian, interaksi dan transaksi (bisnis) pada era pasar bebas dapat berlangsung. Di sisi lain, penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dapat terus berlangsung dalam rangka memperkaya dan merangsang daya cipta masyarakat untuk mampu bersaing dengan bangsa manapun. Bagi bangsa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan sarana cipta sastra Indonesia modern harus terus-menerus ditingkatkan mutu pemakaiannya, sekaligus juga sebagai sarana pemersatu, identitas bangsa, dan sarana komunikasi nasional.

Akan tetapi, modernisasi yang berakar di lingkungan Nusantara mensyaratkan penggalian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya budaya lokal warisan leluhur, kekayaan masa lalu yang masih relevan, termasuk bahasa, sastra, dan budaya daerah. Peluang hidup bahasa daerah pada era otonomi daerah ini harus dapat dimanfaatkan secara lebih konsepsional, bersistem, dan berkelanjutan. Hal ini sesuai

pula dengan makna butir (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Bahasa, sastra, dan budaya daerah merupakan potensi keanekaragaman daerah yang harus diberdayakan kembali, terutama menghadapi era perubahan dan era budaya global yang keras menerjang masyarakat. Niat dan upaya nyata pemberdayaan kembali khazanah budaya Nusantara itu sejalan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, khususnya Bab II butir 10.f, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ihwal "penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah. Pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa yang bersumber pada hasil pengkajian ini pun merupakan upaya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bab I butir 3.

Sehubungan dengan isi undang-undang tersebut, dan sesuai pula dengan kondisi akhir bahasa, sastra, dan budaya daerah, pengembangan dan pemekaran kembali fungsi-fungsi bahasa daerah dalam segi-segi kehidupan sosial-budaya masyarakatnya merupakan upaya yang sangat penting. Berkaitan dengan gagasan itu, pemanfaatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional, serta penjabaran aksi-aksi kultural masyarakat penuturnya melalui lembaga sosial-budaya yang baru dapat dilakukan secara sistematis dan pragmatis. Kegiatan budaya daerah dalam sejumlah seginya itu tidak dapat dipisahkan dari bahasa daerah. Kegiatan yang dimaksudkan itu merupakan kewenangan para pemimpin lembaga-lembaga tradisional, khususnya lembaga-lembaga adat yang di banyak daerah sudah sangat melemah fungsinya sejak puluhan tahun silam, seiring dengan menguatnya sistem kekuasaan baru. Padahal, sebagian dari lembaga-lembaga formal yang baru itu ternyata kurang legitimatif dan tidak apresiatif pada kekayaan budaya bangsa.

Keanekaragaman potensi budaya daerah dalam banyak aspeknya dapat dijadikan bahan dan ajang pemfungsian kembali dan pemberdayaan bahasa daerah. Banyak potensi sastra-budaya daerah yang hampir tenggelam dan asing bagi generasi muda. Upacara tradisional dalam siklus hidup manusia dan pertanian yang unik, yang menjadi sarana penyatu kelompok dan "ramah" lingkungan, masih cukup potensial. Legenda, mite, dongeng, fabel, dan puisi-puisi asli yang potensial dari pelbagai etnik mulai menghilang dari kehidupan modern. Muatan lokal dalam kurikulum yang berorientasi formal, yang secara konsepsional baik, perlu diubah dengan lebih mendalami dan memanfaatkan aneka

potensi budaya daerah.

Pendidikan dan pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah, Indonesia, dan asing secara sinergis, sesungguhnya dapat dibangun bersama oleh lembaga pendidikan formal, lembaga adat dan budaya, dan pemerintah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang konkret. Lomba bercerita atau mendongeng dalam bahasa daerah dapat dilakukan dengan biaya murah sebagai upaya menggali dan memanfaatkan tema-tema lokal. Setiap etnik pasti memiliki mite, legenda, fabel, dongeng, dan permainan rakyat yang dapat dilombakan. Kegiatan ini dapat pula diikuti dengan lomba bercerita dan mendongeng dalam bahasa Indonesia dengan tema lokal pula, bahkan juga lomba bercerita dan berdongeng dalam bahasa Inggris, tetap dengan tema yang bersumber pada mite, legenda, fabel, dongeng, dan cerita rakyat yang ada di wilayah budayanya. Pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan budaya, dengan demikian merupakan langkah terobosan yang sangat strategis dalam kaitan dengan upaya mengembangkan rasa tanggung jawab para ahli warisnya dan meningkatkan partisipasi masyarakat pendukung bahasa, sastra, dan budaya daerah.

Festival ataupun lomba bercerita dan mendongeng dalam bahasa daerah², baik dengan ragam praktis dan kolokial, maupun dengan ragam baku dan indah, dengan tema-tema sastra daerah, nasional dan mondial, dapat diikuti oleh murid-murid sekolah dasar kelas rendah dan berlanjut pada kelas-kelas tinggi. Selanjutnya, lomba bercerita dalam bahasa Indonesia dengan tema lokal, nasional, dan mondial itu dapat pula diikuti oleh para pelajar pada jenjang SMTP, sedangkan bercerita dalam bahasa Inggris dengan tema lokal, nasional, dan mondial akan diikuti oleh para siswa sekolah menengah umum dan kejuruan. Penggalan kembali unsur-unsur budaya lama yang potensial dan masih relevan dengan kehidupan masa kini, yang diikuti pula pengembangannya dengan tema-tema nasional dan mondial, membuktikan bahwa masyarakat pemiliknya bertanggung jawab memelihara, menghormati, dan dapat menapasi kembali bahasa daerah yang mulai rapuh, bahasa Indonesia yang belum dipraktekkan secara lisan dan tertulis, dan bahasa Inggris yang masih kering di negeri ini. Pemberdayaan dwiarah, dari bawah (*bottom up*) dengan prakarsa masyarakat dan lembaga-lembaga adat dan budaya mesti disinkronkan dengan program dari atas (*top down*) yang diprakarsai oleh pemerintah, khususnya lembaga pendidikan formal, balai/kantor bahasa, dan instansi terkait lainnya.

² seperti yang telah digelar oleh Sanggar Mayang Sari di Bengkulu 17 Juli 2003 lalu, Jika saja dilakukan juga dengan bahasa daerah setempat (*Kompas*, 18 Juli 2003), yang kemudian dapat dilakukan pula di daerah lain, merupakan upaya pemberdayaan bahasa dan sastra daerah pula.

Upaya pemberdayaan bahasa daerah dalam bentuk mendongeng atau bercerita berfungsi untuk membangun kembali tradisi lisan yang digusur oleh media elektronik dan merangsang tumbuhnya budaya baca-tulis. Kegiatan berbahasa lisan itu dapat diiringi pula dengan kegiatan penulisan kembali tema-tema sastra lama atau tradisi lisan lain, baik dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa Inggris dengan kemasan-kemasan baru. Sayembara menulis kembali, termasuk lomba menulis esei dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing sesuai dengan penjenjangan di atas, menumbuhkan daya cipta, apresiasi, dan kecintaan, tidak saja terhadap budaya warisan leluhur dan budaya nasional dari daerah lainnya, tetapi juga budaya dunia yang diserapnya melalui media elektronik televisi dan radio serta media cetak yang sudah mulai menerobos desa. Cara ini memungkinkan generasi muda merasa dekat kembali, akrab, dan berinteraksi lagi dengan lingkungan budaya dan lingkungan alam tempat mereka hidup. Dengan demikian, pengembaraan mental generasi muda berskala dunia tetap berpijak pula pada lingkungan asalnya.

Untuk memfungsikan kembali bahasa daerah melalui ranah adat dan budaya itu, pembakuan bahasa, termasuk tata tulisnya, dan penggalian potensi sastra dan tradisi lisan daerah mendahului upaya pemberdayaan bahasa daerah. Tugas besar dan berat ini menuntut prioritas yang ketat dan tepat. Di sisi itu, penggalian aneka potensi budaya daerah dan pembakuan bahasa serta ejaan pada era otonomi daerah ini, diperlukan kecermatan, perlakuan yang proporsional dan arif agar potensi dialek-dialek, subkultur, dan subetnik tidak dipinggirkan. Setiap dialek, subkultur, dan subetnik diberi ruang dan peluang yang sama untuk berkembang, bersaing secara sehat, dan hidup sederajat. Ini berarti realitas keanekaragaman tetap dapat dipertahankan. Kesulitan dan kompleksitas permasalahan teknis di lapangan tidaklah mesti menghambat upaya pemfungsian kembali bahasa, sastra, dan budaya daerah.

Kegiatan bercerita dan atau mendongeng dapat dilakukan tidak hanya melalui lembaga formal sekolah, tetapi juga melalui kegiatan budaya masyarakat umumnya, berkaitan dengan kalender adat dan acara peringatan peristiwa penting lingkup lokal dan nasional. Dalam memperingati hari-hari bersejarah tingkat nasional dan lokal, kegiatan kebahasaan, kesusastraan, dan kebudayaan secara terpadu dapat dilakukan. Di beberapa daerah seperti di Bali, Batak, Toraja, Surakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Bengkulu, yang kegiatan budayanya sudah mulai tumbuh kembali pun perlu terus diperluas dan diintensifkan. Untuk lebih memekarkan fungsi budaya, sayembara lagu-lagu daerah dengan syair berbahasa daerah sangat penting dilakukan untuk merangsang daya cipta, sekaligus menghidupkan bahasa daerah.

Pemberdayaan dan revitalisasi bahasa, sastra, dan budaya daerah

bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat dan lembaga-lembaga tradisional dan modern yang perlu ditumbuhkan. Rangsangan untuk munculnya program dari bawah (*bottom up*) dalam pembangunan budaya sudah saatnya digalakkan di tengah pesatnya pembangunan ekonomi. Bersama lembaga sekolah di sekitarnya dan dengan sponsor swasta, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sinergisitas pemberdayaan dapat dibangun untuk mengimbangi derasny arus budaya global yang telah merambat hingga ke pedalaman Nusantara.

3.2 Pemberdayaan Bahasa Daerah dalam Ranah Agama

Masyarakat Indonesia diidentifikasi sebagai masyarakat yang religius, sebagai masyarakat yang beragama dalam konteks keanekaragaman. Setiap agama, dengan pelbagai jenis kegiatan keagamaannya, menggunakan bahasa sebagai sarana utama, baik ritual maupun dakwah. Kegiatan pengajian, pengajaran agama (katekese), dan darma wacana menggunakan bahasa sebagai sarana utama. Kegiatan persembahyangan sebagai wujud penciptaan hubungan yang transendental dengan Tuhan, baik perseorangan maupun kelompok, baik terucapkan maupun yang tidak terucapkan, sudah tentu menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi.

Bahasa Indonesia yang digunakan, seperti juga bahasa daerah, yang diperkaya dengan unsur-unsur bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan Islam, unsur-unsur bahasa Latin dalam kehidupan keagamaan Katolik, dan unsur-unsur bahasa Sansekerta dalam kehidupan keagamaan Hindu di Bali dan Jawa merupakan "bahasa Suci". Kegiatan-kegiatan keagamaan selama ini telah menjadi kekuatan fungsional dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah (bandingkan dengan Pei, 1971:191--193). Realitas sosial-religius dan potensi budaya ini sesungguhnya dapat didayagunakan untuk turut berperan khusus memekarkan fungsi bahasa-bahasa daerah.

Menurut pengalaman dan pengamatan lapangan, fungsi bahasa daerah dalam kehidupan keagamaan Katolik di Flores berhasil dirintis dan diemban oleh para misioner Eropa sejak awal abad ke-20. Penerjemahan Injil dalam bahasa daerah di Flores (bahasa Manggarai, Ngadha, Lio, Sikka, Lamaholot) seperti juga dalam bahasa Batak, Bali, Biak, Sentani merupakan upaya pemberdayaan bahasa daerah di bidang keagamaan. Akan tetapi, sangat disayangkan karena buku-buku terjemahan itu tidak digunakan, dan bahkan telah digantikan dengan buku-buku terjemahan dalam bahasa Indonesia. Padahal, hingga tahun 1960-an, terutama sebelum munculnya perubahan untuk menggunakan bahasa Indonesia, wacana keagamaan dalam bentuk doa, nyanyian, pengajaran, dan kotbah para pastor Eropa (Belanda, Jerman,

Chekoslowakia) dalam bahasa-daerah yang cukup baku dalam perayaan misa hari Minggu dinilai oleh para generasi tua, di antaranya kini masih hidup, lebih efektif, lebih menyentuh nurani, meresap, dan inkulturatif. Sangat disayangkan karena pengembangan keberaksaraan masyarakat melalui buku-buku keagamaan yang berbahasa daerah, rintisan para pemimpin agama itu, hanya menjadi pajangan di perpustakaan atau di gudang, serta mulai dimakan rayap.

Persembahyangan di tempat-tempat ibadah (masjid, langgar, gereja, pura, vihara) berlangsung dalam bahasa Indonesia. Pengajian, katekese, dan darma wacana berlangsung pula dalam bahasa Indonesia. Bagi generasi muda, sarana bahasa itu berfungsi, namun bagi generasi tua, yang umumnya tidak menguasai bahasa Indonesia ragam formal dalam kotbah yang sarat dengan konsep teologis dan abstrak itu, kurang berfungsi sehingga muatan peran religius menjadi kurang dipahami. Patut diingat bahwa sebagian (besar) generasi tua kini banyak yang putus sekolah, buta huruf, bahkan sebagian di antaranya buta bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan pada sejumlah penganut agama (Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu) di beberapa daerah, khususnya masyarakat penutur bahasa Jawa, bahasa Muna di Sulawesi Tenggara, sejumlah penutur tua bahasa-bahasa daerah di Flores, Bima, Sumbawa, Sasak, Bali, dan Papua, pemakaian bahasa daerah dalam kegiatan keagamaan masih sangat memprihatinkan, karena bagi sebagian besar generasi tua di perdesaan khususnya, seperti disinggung di atas tidak menguasai bahasa Indonesia, Pengajaran keagamaan, doa, khotbah, dan syair nyanyian kerohanian diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Buku-buku keagamaan dari bahasa-bahasa sumber, seperti Arab dan Latin, khususnya Alkitab dan Wedha, yang pada awal perkembangan agama Kristen itu sudah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa daerah, kini asing bagi umatnya.

Adalah pengakuan yang jujur dari masyarakat bahwa aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan keimanan dirasakan lebih tepat jika diungkapkan dalam bahasa daerah. Ini pengakuan kelompok penutur tua yang masih menguasai bahasa daerah dan menggunakannya dalam mengekspresikan perasaan religius mereka. Fungsi ekspresif ini berkaitan dengan nuansa dan emosi religius yang memang lebih tepat diungkapkan dengan bahasa yang telah diakrabi sejak kecil, yakni bahasa daerah. Bahasa daerah yang dikuasai dan dijiwai sejak kecil di lingkungannya sebagai bahasa ibu dan sarana primordial keetnikan itulah yang dirasakan "lebih mampu" digunakan untuk mengekspresikan iman mereka.

Bertolak dari realitas masyarakat di atas, kiranya pemberdayaan

bahasa daerah dapat dilakukan pula melalui jalur keagamaan. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup di perdesaan dan di pedalaman Nusantara yang belum menguasai dan belum menggunakan bahasa Indonesia dapat dipastikan menguasai bahasa daerah. Sehubungan dengan kondisi objektif kebahasaan masyarakat itu, para pemimpin kelima agama besar: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, sebagai kelompok strategis, dapat berperan lebih dalam lagi untuk memberdayakan bahasa daerah di lingkungannya, khususnya di perdesaan. Kelompok pemimpin informal ini sesungguhnya sangat potensial dan strategis, bahkan sangat menentukan bagi keberhasilan upaya pemberdayaan bahasa daerah melalui kegiatan keagamaan. Para penutur andalan yang dikategorikan sebagai kelompok pemimpin informal di bidang keagamaan ini, demikian pula para pemimpin lembaga-lembaga tradisional, serta penutur ideal asli bahasa daerah yang diharapkan masih ada, jumlahnya memang sangat sedikit, seperti juga jumlah penutur asli sejumlah bahasa daerah Nusantara. Akan tetapi, minoritas jumlah penutur bukanlah faktor yang selalu menentukan kerapuhan dan kepunahan bahasa, jikalau daya religius masyarakat tuturnya dapat diberdayakan, dan ditumbuhkannya tanggung jawab mereka untuk merevitalisasi bahasa daerah (Lihat, Simpson, 1980:236-238). Agama, dengan demikian, dapat menjadi jalur harapan yang dapat diandalkan untuk "menyelamatkan" bahasa-bahasa daerah kecil di banyak wilayah Nusantara.

Harus diakui bahwa kelompok profesional keagamaan, sebagai kelompok pemimpin informal, mempunyai pengaruh sangat besar bagi umat yang dibawahinya. Tindakan, perilaku, dan energi tuturan mereka khususnya, masih menjadi panutan dan kebutuhan kelompok dan lapisan masyarakat mana pun. Pengajaran, pengajian, renungan, khotbah, nyanyian, dan doa mereka, sebagaimana yang ditayangkan melalui televisi, masih setia untuk didengar, disimak, dipanuti, dan ditiru oleh masyarakat. Indonesia, termasuk pilihan bahasa dan cara berbahasa mereka, di samping kandungan prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, serta warna khas kepribadian mereka. Harus diakui pula bahwa kelompok pemimpin informal ini dikaruniai dengan talenta kebahasaan.

Talenta mereka, khususnya talenta kebahasaan bahasa daerah Nusantara, selain bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Latin, dan bahasa Sansekerta, dapat didayagunakan untuk pemekaran fungsi religius bahasa daerah.

Kendatipun tidaklah semua aspek kehidupan keagamaan mesti diungkapkan dalam bahasa daerah, paling tidak bagi masyarakat kota dan masyarakat yang majemuk, agama-agama dengan pemimpin lembaga dan kekuatan umatnya yang juga merupakan pendukung bahasa daerahnya dapat diandalkan untuk menjadi pencerah harapan,

pemulih kerapuhan, pencegah ketergusuran total, dan "penyelamat" kepunahan bahasa-bahasa daerah di Nusantara. Dengan demikian, sejumlah bahasa daerah di Nusantara ini tetap melanggengkan keanekaragaman bahasa, sastra, dan budaya tetap berkemampuan *mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia* dalam kerangka bhinneka tunggal ika dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Catatan Penutup

Di tengah kondisi masyarakat yang transisional, di tengah kedwibahasaan yang belum stabil dan di tengah menguatnya gejala ketercerabutan akar lokal, pemekaran fungsi bahasa daerah melalui dua ranah penting, yakni ranah adat-budaya dan ranah agama, dapat dipertimbangkan sebagai strategi pemberdayaan bahasa-bahasa daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia di perdesaan dan pedalaman belum menguasai bahasa Indonesia, penguasaan bahasa daerah generasi muda pun belum memadai. Sementara itu, sejumlah bahasa daerah masih "menyisakan" kelompok kecil penutur asli yang fasih berbahasa daerah.

Kelompok kecil penutur yang tersisa itu potensial dan strategis dalam kerangka pemberdayaan bahasa daerah melalui ranah adat-budaya dan ranah agama. Termasuk di dalam kerangka pemberdayaan ini adalah kelompok terdidik yang fasih berbahasa Indonesia sehingga kedwibahasaan yang agak berimbang dapat berkembang.

Pemekaran fungsi bahasa daerah melalui ranah adat dan budaya mempunyai fungsi ganda. Selain pemekaran fungsi bahasa daerah, penggalian dan pemanfaatan kembali nilai-nilai budaya lokal yang relevan serta juga pemberdayaan kembali lembaga-lembaga tradisional yang kurang, bahkan tidak berfungsi selama ini merupakan fungsi lainnya yang dapat diwujudkan. Sehubungan dengan ikhtiar itu, kegiatan kebahasaan di masyarakat yang dipadukan secara sinergis dengan kegiatan susastra dan budaya yang bertema lokal, nasional, dan mondial dengan menggunakan bahasa daerah setempat, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, layak dikelola secara bersistem dan berkesinambungan. Pemanfaatan kelompok pemimpin informal tersebut sangat penting agar guyub tutur yang makin berdwibahasa ini berkembang dalam keseimbangan hidup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Agama, melalui peranan para pemimpin, lembaga, dan umatnya, dapat berperan nyata memekarkan fungsi bahasa daerah dalam sebagian kegiatan keagamaan. Penggunaan bahasa daerah di kalangan pemimpin agama dalam kegiatan keagamaan, misalnya, pengajian, katekese, dan darma wacana, memang menuntut kecintaan dan pengorbanan untuk mempelajari kembali bahasa daerah di lingkungan

keagamaannya dan mempraktikkannya dalam diskursus sosial-religius, dalam wejangan-wejangan, dalam khotbah-khotbah, dan doa-doa mereka. Upaya ini sekaligus juga lebih mendekatkan dan lebih memberakarkan agama-agama di tengah khazanah bahasa dan budaya Nusantara yang majemuk ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hassan 2002. *Imbasan*. Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Bagus, I Gusti Ngurah, I Wayan Bawa, Aron Meko Mbete, Ni Luh Sutjiati Beratha. 1998. "Kedwibahasaan di Bali dan Nusa Tenggara". Denpasar: Laporan Penelitian dengan Biaya URGE Batch IV.
- Bright, Williams 1971. *Sociolinguistics*. New York: Blackwell.
- Eastman, Carol M. 1983. *Language Planning: An Introduction*. San Fransisco: Chandler & Sharp Publishers Inc.
- Fairclough, Norma 1995. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Blackwell Pub.
- Ferguson, Charles 1971. "National Sociolinguistics Profile Formula" dalam William Bright (Ed.) *Sociolinguistics*. New York: Mouton & Co.
- Fishman, J.A. 1991. *Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundation of Assistance O Threatened Languages*. Clevedon UK: Multilingual Matters.
- Fishman, Joshua A., Charles Ferguson, Jyotirindra Das Gupta (Eds.) 1973. *Language Problems of Developing Nations*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Halliday, M.A.K. 1977. *Explorations in the Functions of Language*. London: Edward Arnold.
- Haugen, Einar, J.D. Maclure, D.S. Thomson (Ed.) 1980. *Minority Languages Today*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Husen, Ida Sundari dan Rahayu Hidayat (Penyunting). 2001. *Meretas Ranah: Bahasa, Semiotika, dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Lauder, R.M.T. 2001. "Upaya Menjajaki Situasi Kebahasaan di Seluruh Dunia". Dalam Ida Sundari Husen et.al. *Meretas Ranah*, halaman 118-137.

- McMahon, April M.S. 1999. *Understanding Language Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mbete, Aron Meko 1994. "Fungsi Bahasa Lio, Ngada, dan Sikka, Flores. Laporan Penelitian dengan biaya *The Toyota Foundation*.
- _____. 2000. "Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah: Mencermati Konstitusi, Kenyataan, dan Tuntutan Perubahan" dalam *Jurnal Ilmu Bahasa Verba*, volume 2 Nomor 1 Oktober 2000. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- _____. 2001. "Ungkapan-Ungkapan Verbal pada Etnik Lio, Flores, dan Fungsinya dalam Melestarikan Lingkungan". Penelitian Dasar Direktorat Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional.
- Moeliono, Anton M. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Naisbit, John & Margaret Aburdene, 1990. *Sepuluh Arah Baru Tahun 1990-an: Megatrends 2000*. Terjemahan F.X. Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Pei, Mario 1971. *Kisah daripada Bahasa*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Bhratara.
- Reyner, Jon. 1999. "Some Basics of Indigenous Language Revitalization". Dalam Jon Reynher, *et.al.* (Ed.), *Revitalizing Indigenous Languages*. Flagstaff, AZ: Northern Arizona University.
- Rosidi, Ajip, 1999. *Bahasa Nusantara: Sebuah Pemetaan Awal. Gambaran tentang Bahasa-Bahasa Daerah di Nusantara*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Simpson, J.M.Y. 1980. "Challenge of Minority Languages". Dalam E. Haugen, *et.al.* *Minority Languages Today*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Soebadio, Haryati, 1991. *Kesinambungan Nilai Budaya Indonesia dalam Era Kebangkitan Nasional II*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Suzanne, Romaine 1995. *Bilingualism*. Oxford: Blackwell.
- Anonim. 2001 *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001*. Bandung: Citra Umbara.
- _____. Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi.

KATA PENGANTAR

LAPORAN SIDANG

- Hari, tanggal : Kamis, 16 Oktober 2003
- Judul makalah : 1. Pembalikan Pergeseran Bahasa Daerah untuk
Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa
2. Pemekaran Fungsi Bahasa Daerah demi
Ketahanan Budaya Bangsa
- Pembicara : 1. Asim Gunarwan
2. Aron Meko Mbete
- Pemandu : Aron Meko Mbete
- Pencatat : 1) Mustamin Basran
2) Arman

TANYA JAWAB

1. **Penanya:** Yayah B. Yayah Lumintaintang (Pusat Bahasa)

- (1) Menuju masyarakat Indonesia yang baru yaitu masyarakat bilingualisme diglosia yang stabil memberlakukan sistem pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa ke dua sebagai betul-betul sistem pendidikan bagian dari sistem pendidikan bahasa Indonesia. Bagian dari sistem pendidikan baru melalui program UNESCO.
- (2) Kelas 3 baru belajar bahasa Indonesia
- (3) Bahasa pada ranah-ranah segera dilakukan penelitian persebaran ranah pemakaian bahasa daerah di setiap ranah. Yang tidak dibatasi yang lazim menurut Smith dan Rose atau Fishman ada sekian banyak ranah pemakaian bahasa. Itu semua perlu diteliti bahasa daerah pada setiap ranah atau seberapa jauh pengaruh persentase peran bahasa daerah untuk setiap ranah.
- (4) Diperbanyak kegiatan guyuban-guyuban dan paguyuban generasi muda, asosiasi-asosiasi yang memperlakukan bahasa daerah. Sejauh mana bahasa daerah di berlakukan dalam guyuban generasi muda.

2. **Penanya:** Nurdin Yatim

Saya setuju semua dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pak Asim Gunarwan, kecuali penelitian yang dilakukan di Lampung saya tidak. Apakah Pak asim pengikut dari David Cristal yang mengembangkan teori *language death*. Sebagai Sociolinguis dengan menerima istilah bahasa daerah itu sendiri merupakan suatu kemajuan kalau kita menerjemahkan bisa dikatakan *local brightly*. Tidak seorang pun yang berbicara satu bahasa. David Cristal sendiri berkata bahwa nantinya bahasa di Afrika

akan karena matinya penuturnya. Saya menerima istilah kalau mati penuturnya. Tapi kalau masih ada penuturnya, maka yang terjadi adalah transformasi atau perubahan bentuk metamorfosa dari bahasa tertentu yang selama ini kita katakan bahasa daerah ke bentuk lain seperti terjadi hanya di kebanyakan bahasa daerah yang lain. Yang di Indonesia ini saya kira itu yang ingin saya kemukakan.

3. **Penanya:** Muhammad (Dewan Kesenian)

Saya sangat mendukung usulan dari Bapak Aron Meko Mbete tentang penggunaan ranah agama dalam pemekaran fungsi bahasa. Untuk lebih kongkretnya, saya ingin menggambarkan bagaimana pondok-pondok pesantren di Jawa mungkin juga di luar Pulau Jawa, yang menggunakan tradisi kelisanan maupun keberaksaraan dalam sistem pengajarannya. Dan, ternyata pondok-pondok pesantren itu di Jawa Tengah misalnya yang saya tahu, sangat berhasil dalam melestarikan bahasa daerah yang memiliki cara-cara bertutur yang berlapis-lapis dengan lapis *kromo madya*, *kromo inggil*, dan *ngoko* khususnya dalam hubungan antara santrinya dengan kijainya. Saya sangat heran mengapa tradisi lisan yang dikembangkan dengan sangat konsiten itu tidak diberi kesempatan untuk mempresentasikan tradisi mereka dalam Kongres Bahasa ini. Kalau ini suatu kealpaan, mohon dicatat dan diperbaiki pada Kongres yang akan datang. Adalah suatu fakta bahwa pondok pesantren itu merupakan suatu basis pertahanan dan ketahanan budaya, baik lokal maupun nasional, yang sangat ampuh, baik dalam menjaga tradisi lokal dalam bidang eligitas maupun dalam melawan penjajah.

4. **Penanya:** Abdul Azis (Banda Aceh)

Saya sangat tertarik pada kedua uraian membicarakan kembali mengenai bahasa daerah. Saya sangat setuju dengan ide Pak Asim sangat bagus, tetapi apakah istilah diglosia tepat untuk situasi seperti di negeri kita. Asal mulanya dari situasi yang ditemukan oleh para peneliti di Norwegia dan di negara-negara Arab yang sesungguhnya hanya dua bahasa. Makanya, istilahnya diglosia situasi di negeri kita sama dengan di negeri Cina. Bahasa banyak betul, tapi yang digunakan adalah bahasa Mandarin di tempat kita bahasa Indonesia merupakan sebagai *lingua franka*. Jadi, barangkali ide dari Pak Asim ini kalau bisa kita munculkan istilah baru bukan diglosia, tetapi multiglosia.

Jawaban:

Perlu kita meberlakukan saran UNESCO, sepeti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ketahui, pada tahun 1952 itu ada guru yang menyarankan supaya pendidikan dasar itu dimulai dengan menggunakan bahasa *ethnic language* sebagai bahasa pengantar supaya anak-anak itu tidak merasa

terkejut. Ini baik untuk jadi UNESCO menerangkan supaya awal-awal pendidikan anak itu diberikan bahasa pengantar bahasa ibu. Ini baik. Apakah kita akan memberlakukan di Indonesia itu? Pertanyaan Bu Yayah ini tentu saja saya pribadi setuju sekali, tetapi tidak bisa disamaratakan karena kenyataannya adalah bahwa di kota, terutama di Indonesia ini, anak-anak tidak lagi menggunakan bahasa ibu di sekolah atau mereka langsung menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Kalau ini diberlakukan secara menyeluruh, kita, misalnya di Jakarta harus mengajarkan menurut bahasa ibunda si anak untuk kelas satu sampai tiga, misalnya, ini halangannya adalah bahwa di Jakarta bahasa ibunda anak itu tidak homogen. Ada Sunda, Jawa, Minang, dan sebagainya. Saya kira, sukar diberlakukan, namun di daerah-daerah, misalnya di pedesaan yang sedikit banyak bahasanya itu homogen artinya, bahasa Jawa semua atau Sunda semua, barangkali ini dapat diberlakukan. Jadi, jawaban saya, saya setuju diberlakukan, terutama demi pemertahanan bahasa yang perlu saya garis bawahi dengan menggunakan bahasa daerah di sekolah ini tidak akan menjamin bahasa daerah itu langgeng atau lestari digunakan terus. Yang langgeng itu adalah seperti yang disarankan oleh Fishman, pakailah bahasa daerah di ranah keluarga. Bahwa di ranah-ranah lain itu tidak dipakai, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah hindari dislokasi pewarisan bahasa daerah atau inagetan itu inilah yang bisa menjamin kelangsungan atau kelastarian bahasa yang bersangkutan itu. Penelitian di berbagai ranah sangat penting dan kalau ini dilakukan oleh Pusat Bahasa, maka saya juga akan terlibat karena saya ini konsultan. Tokohnya adalah dialektologi kalau yang dimaksud acuannya itu kita mencari isoglos batas-batas bahasa daerah mana yang dipakai di daerah tertentu. Di strata sosial mana saja bahasa daerah itu dipakai. Tapi, mohon diingat bahwa kalau kita berbicara mengenai teori Fishman, yang diutamakan adalah ranah rumah atau ranah keluarga karena kalau di ranah-ranah lain kita menganjurkan digunakan bahasa daerah ini mungkin bisa terjadi konflik.

Untuk Prof. Yatim dari Makassar

Istilah mati, Bapak tidak setuju. Tapi, ini ada di dalam kepustakaan pergeseran bahasa. Jadi dibedakan *language death* atau kematian bahasa itu terjadi jika bahasa itu tidak lagi dipakai oleh suatu masyarakat mungkin karena penduduknya tidak ada seperti bahasa Latin mengalami kematian bahasa atau *language death*. Ini mengapa karena bahasa Latin tidak mempunyai penutur asli lagi. Jadi, istilah *language death* atau kematian bahasa itu memang ada dipakai dalam kepustakaan pergeseran bahasa. Kalau Pak Nurdin tidak setuju dengan istilah *language death* barangkali dipakai *language lost* (kehilangan bahasa). Andaikata suatu ketika bahasa Melayu di Singapura tidak lagi dipakai, ini tidak dapat dikatakan bahwa

bahasa Melayu telah mengalami *language death*. Yang tepat bahwa bahasa Melayu di Singapura mengalami *language lost* karena di tempat lain di Nusantara ini bahasa Melayu masih digunakan.

Jawaban: untuk Pak Muhammad

Mangapa tidak diundang tokoh-tokoh dari pesantren? Pesantren merupakan basis penggunaan bahasa daerah. Saya setuju. Tapi, kalau kita kembali ke teori Fishman tadi, yang penting itu ranah rumah. Ranah rumah ini yang harus tetap menggunakan ranah bahasa daerah agar tidak terjadi dislokasi. Istilah pembalikan setuju tetapi apakah di Indonesia digunakan istilah diglosia? Kalau berbicara mengenai dua bahasa yang berbagi fungsi: yang satu berfungsi tinggi, yang lain berfungsi rendah. Kalau mencakup dua bahasa saja memang istilahnya adalah diglosia. Dalam hal ini diglosia di Indonesia umumnya menyangkut bahasa Indonesia sebagai pengembangan ranah tinggi dan bahasa daerah sebagai pengembangan ranah rendah dan konstelasinya memang harus begitu di negara Republik Indonesia. Fungsi harus diemban oleh bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia dipakai untuk ranah pendidikan, ranah pemerintahan, ranah pekerjaan sedangkan ranah rendah atau kekeluargaan atau intraetnik ini dipakai bahasa daerah. Jadi, selama ada pembagian fungsi ini, istilah diglosia bahwa ada istilah lain yang juga mencakupi bahasa-bahasa yang lebih dari dua. Memang ada di Malaysia seperti diuraikan oleh Freud, di sana malah di antara warga Cina dipakai poliglosia yang menyangkut berbagai-bagai bahasa Inggris, bahasa Melayu. Apakah di Indonesia dipakai multiglosia, saya kira tergantung keperluan kita.

Untuk Pak Azis

Pak Asim mengusulkan supaya bahasa daerah wajib digunakan di sekolah dalam konteks belajar-mengajar. Saya kira tidak bisa digunakan bahasa daerah di sekolah. Pertama gurunya menguasai bahasa daerah atau tidak. Sekarang mobiltitas penduduk Indonesia sangat tinggi. Orang Madura mengajar bisa di Aceh dan sebagainya. Bahasa daerah tidak bisa dilarang. Ini adalah hak asasi. Bahasa daerah mana yang harus digunakan? Kalau bahasa daerah Madura, pasti ada kendala. Orang tidak mengerti penggunaannya. Pemerintah tidak bisa melarang bahasa daerah selama bahasa Indonesia dijunjung tinggi.

Aron Meko Mbete: Untuk Abdullah

Saya tetap berpendapat bahwa tidak hanya pada ranah keluarga, bahwa bahasa daerah itu berfungsi kepada ranah adapt. Ada tradisi itu dihidupkan kembali. Lemaga-lembaga tradisional diberi ruang gerak kembali. Saya yakin bahasa daerah bisa hidup kembali sebab sudah

pasti. Kalau nuansa budaya lokal daerah itu dituturkan dalam bahasa Indonesia, tidak akan pernah bias lengkap atau untuk ini pendapat saya. Kemudian, yang kedua, jikalau pada usia-usia kelas rendah SD, kelas bawah SD itu, guru-guru di daerah atau di luar perkotaan diberikan juga tugas untuk mengutarakan ilmu untuk ranah pendidikan ilmu, pengetahuan dalam bahasa daerah juga saya yakin bahasa daerah akan hidup kembali. Kalau pada kelas atas, mungkin lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Tapi, kelas bawah di perdesaan sebaiknya bahasa daerah difungsikan juga sebagai bahasa pengantar pendidikan. Saya tidak menggeneralisasi. Belum semua ranah agama pada semua agama itu begitu tidak berarti tidak ikut melestarikan bahasa daerah. Bukan! Tapi, secara kasus bisa saja pada daerah-daerah tertentu yang kebetulan Katolik yang saya teliti, bahasa daerah tidak berfungsi lagi. Saya tanyakan pada orang tua maupun anak-anak muda. Jikalau khotbah maupun nyanyian itu dalam bahasa Indonesia, bagaimana perasaan Anda? Mereka mengatakan, terjadi kehampaan karena mereka tidak mengerti apa-apa dalam bahasa Indonesia khotbah atau pengajaran. Jadi, karena bahasa Indonesia di pedesaan belum dikuasai betul oleh masyarakat Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia itu tidak difungsikan dalam ranah agama ini? Saya dapatkan dalam penelitian di Lampung. Saya mengusulkan supaya pada ranah-ranah keagamaan digunakan bahasa daerah yang ada di perdesaan. Tetapi, bahasa Indonesia tetap digunakan pada tingkat nasional sebab bahasa Indonesia lebih baik. Seperti yang diusulkan Pak Muhammad agar lembaga-lembaga keagamaan dalam kongres yang akan datang diberi juga kesempatan untuk memprestasikan makalah tentang peran agama apakah mendukung bahasa Indonesia saja atau bahasa daerah juga. Ini perlu sekali informasi itu. Komentar saya, Pak, terima kasih. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar mata pelajaran keberatan saya. Barangkali bahasa daerah belum dilengkapi istilah-istilah yang biasa dipakai. Bayangkan kalau Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu mengajar ilmu kimia dengan menggunakan bahasa Jawa. Kedengarannya pasti akan aneh.

MASA DEPAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA DAERAH

Abdul Wahab

Universitas Negeri Malang

Abstrak

Kondisi bahasa, sastra, dan aksara daerah justru pada zaman merdeka ini mengalami kemunduran secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif, bahasa daerah banyak kehilangan sifat hakiki, yaitu pengurangan dan bahkan kehilangan ciri linguistik untuk merepresentasikan pola pikiran, keyakinan, dan perilaku masyarakat penutur aslinya dalam perspektif budaya daerah sendiri. Ekspresi untuk melahirkan budaya daerah menjadi terbatas pada tindak paralinguistik saja. Stratifikasi bahasa yang dapat dipakai untuk menyatakan hierarki sosial, usia, pendidikan, dan penghormatan antara interlocutan makin berkurang dan sebagian bahkan hilang. Kecuali yang terdapat pada beberapa daerah, sastra daerah pun tidak berkembang dan tidak mendapatkan atmosfer untuk berkembang meskipun orang asing banyak yang tertarik untuk menerjemahkan karya sastra daerah itu. Aksara daerah demikian pula halnya. Secara kuantitatif, generasi muda yang berasal dari keluarga pemilik asli bahasa, sastra, dan aksara daerah tidak mampu melihat pentingnya fungsi dan kedudukan bahasa, sastra, dan aksara daerah. Generasi di bawah usia 20 tahun kurang atau tidak memedulikan penggunaan aksara daerah secara reseptif maupun secara produktif. Ini merupakan kehilangan budaya yang sulit dipulihkan kembali jika kita juga tidak peduli terhadap masalah budaya ini. Padahal, jika kita mau memedulikan, kita masih punya waktu walau sulit. Bahasa, sastra, dan aksara daerah merupakan suatu kekayaan, yang jika kita fungsikan banyak manfaat yang dapat kita petik. Di samping kemampuan kita sendiri untuk mempersepsi budaya daerah dengan perspektif pandangan hidup masyarakat daerah, pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah bisa digunakan untuk menyatakan segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang dapat menjunjung tinggi budaya nasional. Atas dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah daerah diharapkan secara sungguh-sungguh melaksanakan isi undang-undang itu terutama dalam upaya memfungsikan dan melestarikan bahasa, sastra, dan aksara daerah dalam satu ikatan budaya nasional Indonesia.

Bagaimana Kondisi Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah Saat Ini?

Untuk memperoleh potret kondisi bahasa, sastra, dan aksara daerah, idealnya dilakukan penelitian etnografis, terutama pada bahasa-bahasa

daerah yang jumlah penuturnya besar dan memiliki sistem tulisan sendiri. Karena penelitian semacam itu makan waktu yang lama dengan biaya yang sangat tinggi, apa yang saya bentangkan di sini adalah hasil kajian kepustakaan, terutama hasil kongres bahasa daerah (bahasa Bali dan bahasa Jawa), dan hasil wawancara saya dengan mahasiswa program S-2 dan S-3 yang penutur asli bahasa Bali, Jawa, Bugis, Makasar, Bima, Lampung, dan Batak (yaitu bahasa daerah yang mempunyai sistem tulisan sendiri).

Sebenarnya, kondisi bahasa, sastra, dan aksara daerah saat ini sudah berkali-kali dibentangkan, disedihkan, ditangiskan, dan dijeritkan oleh para pemeduli bahasa daerah dalam kongres-kongres bahasa daerah, antara lain Kongres Bahasa Bali, mulai kongres yang pertama sampai kongres yang kelima dan Kongres Bahasa Jawa dari kongres pertama sampai dengan kongres yang ketiga.

Seandainya bahasa-bahasa Nusantara lainnya dengan jumlah penutur yang besar, seperti bahasa Dayak, Batak, dan Bugis, juga mengadakan kongres bahasa daerah semacam Kongres Bahasa Bali dan Kongres Bahasa Jawa, potret yang akan disajikan tentang kondisinya akan senada, yaitu potret yang suram.

Pada Kongres III Bahasa Bali, misalnya, terasa adanya jati diri orang Bali yang mulai (atau sudah?) goyah sehingga diperlukan peningkatan pembinaan dan pengembangan bahasa Bali yang merupakan cerminan jati diri orang Bali itu. Pernyataan ini saya buat atas dasar tema yang diambil oleh penyelenggara kongres yang kelima. Goyahnya jati diri orang Bali dan budayanya itu tercermin dalam menurunnya kualitas sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa Bali di kalangan penuturnya, di dalam dan luar keluarga.

Orang Bali menyadari bahwa bahasa Bali mempunyai fungsi yang sangat penting, antara lain, (1) sebagai lambang kebanggaan daerah dan masyarakat Bali, (2) sebagai lambang identitas daerah dan masyarakat Bali, (3) sebagai alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat Bali, (4) sebagai pendukung sastra daerah Bali dan sastra Indonesia, dan (5) sebagai sarana pendukung budaya daerah dan budaya nasional Indonesia. Sayang dalam kehidupan sehari-sehari, sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan bahasa Bali Alus (analog dengan *krama inggil* dalam bahasa Jawa), terutama di Bali Utara, menurun. Stratifikasi bahasa ini jarang (tidak dipakai lagi?) apabila seseorang berbicara dengan orang dari kasta yang lebih tinggi.

Sebagai gambaran tentang menurunnya penggunaan stratifikasi ini, orang Bali dari generasi yang berusia 30 tahun ke atas masih mampu secara aktif menggunakannya. Orang Bali dari generasi yang berusia antara 20 dan 30 tahun sudah mulai kurang aktif, sedangkan orang Bali dari generasi yang berusia kurang dari 20 tahun sudah tidak peduli lagi. Keadaan di Bali Selatan masih lebih baik. Ada beberapa alasan mengapa kondisi semacam

itu bisa terjadi pada orang-orang Bali Utara. Alasan pertama yang paling ditonjolkan ialah adanya demokratisasi. Karena itu, ada keyakinan pada sementara orang Bali Utara bahwa kehidupan kekastaan digeser oleh adanya perbedaan warna. Tidak jarang orang Bali dari kasta yang lebih tinggi mempunyai status ekonomi, jabatan, dan pendidikan yang lebih rendah dari orang yang berkasta lebih rendah. Alasan kedua ialah adanya keyakinan secara historis bahwa Bali Utara itu tempat pengasingan atau pengucilan sebagai hukuman bagi orang-orang Bali Selatan yang vokal atau menentang sikap, kebijakan, dan perilaku raja-raja yang ada di Bali Selatan. Alasan ketiga ialah banyaknya pendatang dari luar Bali yang kemudian bermukim di Bali Utara sehingga orang Bali yang ingin mengadakan komunikasi dengan para pendatang ini menggunakan bahasa Indonesia atau ragam bahasa Bali yang tidak halus.

Bagaimana keadaan sastra Bali? Sastra daerah Bali merupakan bukti historis masyarakat Bali. Sehubungan dengan itu, sastra daerah Bali sebagai salah satu bagian dari kebudayaan Bali berkedudukan sebagai wahana ekspresi budaya, yang di dalamnya terekam pengalaman estetika, religi, sosial, politik, dan aspek lain dalam kehidupan masyarakat Bali. Pengalaman hidup orang Bali dengan segala macam aspeknya itu unik dan memikat budaya lain sehingga ada sebagian cerita Bali yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain, ke dalam bahasa Inggris, seperti "Mati Salah Pati" oleh Gde Aryantha Soethama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh dua orang penutur asli bahasa Inggris; penerjemah yang pertama ialah Vern Cork dengan pengalihan judul menjadi "Death by Misfortune" dan penerjemah kedua ialah Jennifer Lindsay dengan perubahan judul menjadi "The Wrong Kind of Death." Cerita pendek "Luh Galuh" oleh Putu Oka Sukanta juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh dua orang penutur asli bahasa Inggris, yaitu Vern Cork dan oleh Mary Zurbuchen tanpa adanya perubahan judul, karena cerita pendek itu memaparkan pengalaman hidup gadis Bali yang bernama Luh Galuh. Satu lagi cerita pendek yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penutur asli bahasa ini ialah "Mega Hitam di atas Pulau Kahyangan" yang ditulis oleh Putu Oka Sukanta oleh Vern Cork dengan perubahan judul dalam bahasa Inggris "Storm Clouds over the Island of Paradise."

Dengan melihat sikap orang asing yang sangat positif terhadap sastra Bali karya sastra Bali diterjemahkan ke dalam bahasanya, dengan tujuan supaya pengalaman hidup orang Bali yang sangat unik itu melengkapi aspek kehidupan yang tidak mereka dapatkan dalam budayanya, saya berpendapat bahwa sastra Bali itu memiliki nilai humanisme universal.

Bagaimana kondisi aksara Bali dewasa ini? Bangsa yang memiliki aksara sendiri sebenarnya mencerminkan adanya budaya baca tulis, keinginan untuk mendokumentasikan segala bentuk kehidupan agar dapat diketahui, dipelajari, dan dinikmati oleh orang lain antargenerasi dan antar-

generasi tanpa batas ruang dan waktu. Itulah sebabnya Kongres Bahasa Bali V menyimpulkan bahwa aksara Bali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan budaya masyarakat Bali. Melihat fungsinya, aksara Bali digunakan dalam *nyastra*, seni, pendidikan, adat, dan agama Hindu. Dalam kehidupan sehari-hari, *Juru Arah* di Bali, misalnya, menyampaikan *wewarah*-nya dalam bahasa Bali yang masih tertulis dalam huruf Bali. Karena itu, upaya pelestarian dilakukan melalui jalur formal dan jalur nonformal. Lewat jalur formal, secara umum aksara Bali diajarkan mulai tingkat sekolah dasar sampai kelas dua SMU dan secara khusus, aksara Bali diajarkan sampai tingkat perguruan tinggi bagi mahasiswa yang mengambil jurusan yang terkait dengan budaya dan sastra Bali. Lewat jalur nonformal upaya pelestarian aksara Bali dilakukan dengan pemberian fungsi aksara itu seperti penggunaannya oleh *Juru Arah* tersebut. Sayang, pada kalangan generasi muda Bali yang sekarang ini berusia 20 tahun ke bawah, penguasaan aksara Bali secara receptif apalagi secara produktif, ada kecenderungan memudar.

Bagaimana halnya dengan kondisi bahasa, sastra, dan aksara daerah lainnya seperti Batak, Bugis, Bima, dan Lampung? Perkembangan bahasa, sastra, dan aksara daerah pada daerah ini memiliki nasib yang sama seperti yang terjadi pada daerah Bali. Pada bahasa Bali, seperti halnya dengan yang terjadi pada bahasa Jawa, stratifikasi dan ekspresi kehalusan masih terdapat pada leksikon dan kaidah sintaksis. Akan tetapi, pada bahasa yang saya sebut terakhir di atas ini, stratifikasi bahasa dan ekspresi kesantunan sudah tinggal dalam ekspresi paralinguistik saja. Saya percaya bahwa pada zaman dahulu bahasa ini memiliki stratifikasi bahasa dan ekspresi kesantunan yang tidak hanya tercermin dalam paralinguistik, melainkan pada leksikon dan wujud sintaksis sebagaimana yang terdapat pada ciri bahasa Nusantara. Hilangnya leksikon dan wujud sintaksis pada bahasa ini merupakan suatu kealpaan yang besar karena sikap tidak peduli kita terhadap bahasa daerah.

Seerti halnya yang terjadi pada bahasa daerah lainnya di Indonesia, pemakaian bahasa daerah yang saya sebut pada paragraf di atas ini terdesak oleh pemakaian bahasa Indonesia. Di antara orang dewasa Batak, Bugis, Makasar, Lampung, dan Bima, misalnya, frekuensi penggunaan bahasa Indonesia lebih tinggi dari penggunaan bahasa daerahnya, baik untuk urusan formal maupun nonformal. Sebagai ilustrasi, jika dalam keluarga terdapat ayah yang berpenutur asli bahasa Bugis dan ibu yang berpenutur asli bahasa Makasar, komunikasi antara suami istri lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah, yaitu bahasa Bugis atau bahasa Makassar. Komunikasi antara orang tua dan anak pun selalu menggunakan bahasa Indonesia meski dalam keluarga dari suku yang sama.

Pada bahasa-bahasa yang saya bahas pada paragraf di atas, penggunaan bahasa daerah dilakukan oleh generasi usia 40 tahun ke atas.

Berbeda dengan yang terjadi di Bali dan di Jawa, pada daerah yang saya sebut belakangan itu tak terdapat media cetak dalam bahasa daerah.

Sastra pada daerah-daerah ini, terutama sastra modern, tertulis dalam bahasa Indonesia dengan seting Indonesia. Sastra khas daerah sukar ditemui. Sastra kuno seperti "Nenek Malomo" ditulis dalam bahasa Bugis dengan aksara Bugis pada lontar. Pelestarian sastra semacam ini justru terdapat di desa. Semakin masuk ke jantung kota, minat terhadap sastra daerah oleh penutur aslinya semakin berkurang (atau tidak ada.) Upaya pelestarian sastra dan kesenian daerah masih terbatas pada penelitian yang terbatas pula pada kegiatan pendataan saja, belum sampai kepada pemberian fungsi.

Kehidupan aksara Batak, Bugis, Lampung, dan Bima tidak sebaik kehidupan aksara Bali. Kini hanya sebagian generasi yang berusia 40 tahun ke atas saja yang mampu mengenali aksara daerah. Itu pun terbatas pada tingkatan rekognitif, bukan pada tingkatan produktif. Pada kalangan generasi usia 20 tahun ke bawah, aksara daerah itu mereka anggap sebagai hiasan museum belaka.

Nasib aksara Bima tidak hanya memprihatinkan, tetapi sudah tinggal kenangan sebab aksara yang pernah berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dalam urusan administrasi pemerintahan dan representasi, karya sastra itu kini sudah musnah seperti musnahnya burung dodo di planet bumi ini. Menurut ingatan orang Bima, tradisi menulis *bo'* [buku] dengan bahasa dan aksara Bima dimulai oleh Perdana Menteri Tureli Nggampo Makapiri Solo setelah mempelajari sistem administrasi kerajaan Goa dan Luwu'. Karena alasan pengembangan agama Islam di Bima, pada 15 Muharam 1005 (13 Maret 1645), Sultan Abi'l Khair Sirajuddin memerintahkan agar *bo'* selanjutnya ditulis di atas kertas [bukan di atas lontar] dengan menggunakan bahasa Melayu [bukan bahasa Bima] dengan rupa tulisan yang diridai oleh Allah [yang dimaksud aksara Arab] (Chambert-Loir dan Salahuddin, 1999: xii).

Bahasa Jawa adalah bahasa dengan jumlah penutur yang paling besar di Indonesia dan masih ditambah lagi dengan mereka yang tinggal di belahan bumi yang lain seperti di Afrika Selatan dan Suriname. Bagaimana kondisi bahasa, sastra, dan aksara Jawa sekarang? Kondisi bahasa Jawa dewasa ini sebenarnya telah saya bentangkan dua kali dalam dua kongres kebahasaan yang bertaraf internasional. Yang pertama, saya bentangkan pada Kongres Bahasa Jawa III di Yogyakarta pada bulan Juli 2001 melalui makalah saya yang berjudul "Dampak Kealpaan Penutur Bahasa Jawa terhadap Perilaku Bangsa", dan yang kedua, saya bentangkan pada Kongres Linguistik Nasional Masyarakat Linguistik Indonesia di Denpasar, Bali pada Juli 2002, dengan judul "Kealpaan Terhadap Penghormatan dan Pemeliharaan Bahasa Daerah Pengemban Kebudayaan Nasional."

Pada Kongres Bahasa Jawa III itu saya katakan bahwa bahasa Jawa sekarang ini telah mengalami penurunan secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas, stratifikasi bahasa Jawa yang ada—*krama inggil*, *krama andhap*, *krama lugu*, *ngoko ndhap*, dan *ngoko lugu*—yang sudah tertata secara rapi dan indah itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dalam berbahasa oleh sebagian besar penutur asli bahasa Jawa. Kesalahan pemilihan leksikon, sintaksis, dan semantis dalam bertutur kata sering terjadi pada kalangan penutur bahasa Jawa. Secara kuantitas, penggunaan bahasa Jawa *krama inggil* dan *krama andhap* frekuensinya sangat kecil, dalam kalangan keluarga dan masyarakat untuk urusan formal dan nonformal, terutama pada kalangan generasi muda. Bahkan, pada kalangan keraton (yang diharapkan merupakan pusat tempat mempertahankan dan melestarikan kualitas dan kuantitas bahasa Jawa), interaksi sehari-hari dengan menggunakan bahasa Jawa. Frekuensinya tidak setinggi frekuensi interaksi sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam penelitiannya, Dr. Pranowo (1998:x) mengungkapkan kenyataan sebagai berikut.

Kemampuan berdwibahasa [bahasa Jawa dan bahasa Indonesia] kerabat keraton tidak jauh berbeda dengan masyarakat di luar keraton. Kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia lebih baik daripada kemampuan berbahasa Jawa. Faktor penyebabnya antara lain pengaruh modernisasi yang tidak mungkin dihindari, anggapan bahwa penggunaan bahasa Indonesia lebih praktis daripada bahasa Jawa, keyakinan bahwa kemampuan bahasa Jawa kurang memiliki nilai ekonomis, dan lain-lain. Kenyataan seperti ini memperjelas bahwa peranan keraton Kesultanan Yogyakarta [dalam hal pemeliharaan budaya dan bahasa Jawa] sudah bergeser. Zaman dahulu, keraton berperan sebagai pusat bahasa dan budaya [Jawa], ... sekarang tidak [lagi] demikian.

Saya amati, kehalusan bertutur kata yang tercermin dalam stratifikasi bahasa Jawa sudah mengalami erosi berat. Anak muda tidak lagi mau dan mampu berbahasa *krama* dengan orang tuanya dan dengan orang lain yang lebih tua sebagai wujud adanya rasa hormat (yang mestinya etikanya begitu). Dari 87 orang mahasiswa saya yang berasal dari etnik Jawa, program S-1 bahasa Inggris yang mengambil mata kuliah binaan saya, tidak seorang pun berbahasa *krama* dengan orang tuanya. Dalam simulasi berbahasa *krama* yang baik dan benar, tidak seorang pun mampu melakukannya. Paling tidak ini yang terjadi di Malang dan sekitarnya. (Mudah-mudahan di daerah Jawa lainnya keadaan semacam di Malang itu masih lebih baik.) Pada kalangan anak-anak muda, sulit bagi kita mengharapkan sapaan yang didahului dengan ujaran “*Nuwun sewu ...*”, atau “*Kepareng ...*”, dan yang semacamnya yang digunakan sesuai dengan fungsinya.

Menurunnya kualitas bahasa Jawa bagi penutur aslinya tecermin dalam banyak makalah yang disajikan pada Kongres Bahasa Jawa III itu. H. Budiono Herusatoto, sarjana filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, misalnya, menulis tentang terjadinya rancu pikir di kalangan penutur asli bahasa Jawa dalam memahami makna *tata karma* dan *unggah-ungguh*. Menurut Herusatoto, ada tiga sebab yang menjadikan rancu pikir itu: (a) dalam mengartikan dan memahami makna kata *unggah-ungguh* dan *tata karma*, kebanyakan penutur asli bahasa Jawa menggunakan nalar dan rasa bahasa Indonesia [bukan nalar dan rasa kebahasaan dari perspektif bahasa dan budaya Jawa]; (b) buku pegangan pokok atau kamus yang dijadikan sebagai sumber untuk memahami arti kedua istilah itu adalah kamus dalam bahasa Indonesia, [yang tidak dapat menyentuh rasa dalam perspektif bahasa dan budaya Jawa]; dan (c) penulis dan peneliti yang non-Jawa tidak mau melihat dari pandangan perspektif budaya dan bahasa Jawa, melainkan memandangnya dari perspektif budaya dan bahasanya sendiri.

Terhadap menurunnya kualitas bahasa Jawa ini, I Wayan Bawa dari Fakultas Sastra Universitas Udayana, juga menuturkan dalam Kongres Bahasa Jawa III bahwa telah terjadi pengausan kemampuan menggunakan *undha-usuk* bahasa Jawa bagi etnik Jawa yang bermukim di Denpasar, Bali. Pada forum yang sama, Kisyani Laksono dari Universitas Negeri Surabaya, dalam kajiannya tentang identifikasi dialek dan subdialek bahasa Jawa di Jawa Timur bagian timur dan Blambangan menunjukkan bahwa pemilihan kosa kata ragam *ngoko* dan *krama* mengalami kekacauan.

Yang menarik perhatian ialah hasil pengamatan Christian Gossweiler, doktor teologi dari Universitas Negeri Tübingen, Jerman. Menurut Grossweiler, situasi bahasa Jawa dan bahasa daerah di Indonesia mengalami nasib yang sama dengan dialek dan bahasa daerah di Eropa; secara khusus, bahasa Jawa mengalami nasib yang sama dengan bahasa *Retorumantsch*. Menurunnya kualitas bahasa daerah itu disebabkan oleh adanya upaya memupuk rasa nasionalisme dengan menggunakan bahasa nasional, dan mengalpakan bahasa daerah. Menurutny (yang rasanya juga berlaku di Indonesia) industrialisasi dan faktor lain mendukung upaya itu, apalagi dalam era globalisasi ini ada pelbagai perkembangan yang mencampurkan dan menyeragamkan bahasa dan budaya di seluruh dunia. Dalam bidang bahasa, bahasa Inggris dianggap sebagai satu-satunya bahasa internasional yang makin banyak digunakan di seluruh dunia.

Selain faktor tersebut, khusus mengenai situasi bahasa daerah di Indonesia, Gossweiler melihat ada lagi faktor lain yang memengaruhi menurunnya kualitas bahasa daerah, khususnya di Jawa, yaitu (1) orang tua mempunyai anggapan bahwa pendidikan dwibahasa menjadi penghalang proses pendidikan anak; (2) tidak ada lembaga bahasa daerah yang aktif menanggulangi masalah menurunnya bahasa daerah; (3) program penerbitan buku dan kursus bahasa daerah sulit didapat; (4) belum ada usaha

menyesuaikan bahasa daerah dengan kebutuhan modern; (5) tidak ada upaya para sesepuh yang mendorong pemakaian bahasa daerah meski penggunaan bahasa daerah itu jelek sekali pun; (6) belum ada upaya memupuk budaya multibahasa yang memberi kebebasan, bahkan peranan bahasa-bahasa daerah; dan (7) belum tampak adanya jaringan kerja dan koordinasi di antara sesama forum peduli perkembangan bahasa daerah.

Bagaimana kondisi sastra Jawa dewasa ini? Meskipun penghormatan dan pemeliharaan bahasa Jawa hanya terbatas pada pencantuman gagasan dalam UUD 1945 Pasal 36 dan aturan tambahannya, sastra Jawa berkembang terus dari zaman ke zaman. Pada zaman bahasa Jawa kuna (periode sebelum jatuhnya Kerajaan Majapahit), ada beberapa karya sastra yang terkenal, antara lain, *Arjunawijaya*, *Arjunawiwaha*, *Bharatayuda*, *Mahabharata*, *Nagara Kertagama*, *Nitisastra*, dan *Sutasoma*. Pada abad pertengahan, karya sastra yang terkenal, antara lain *Calon Arang*, *Dewa Ruci*, *Pararaton*, *Sri Tanjung*, dan *Tantri Kamandaka*. Pada zaman baru, sastra Jawa dapat dibagi menjadi dua—sastra tradisional dan sastra modern. Karya sastra Jawa tradisional dapat dibaca pada *Serat Ambiya*, *Serat Arjuna Sasrabau*, *Serat Bratayuda*, *Serat Centhini*, *Serat Menak*, *Serat Nitipraja*, *Serat Pustaka Raja*, *Serat Rama*, *Serat Sabda Jati*, *Serat Sastra Gendhing*, *Serat Surya Raja*, *Serat Wedhatama*, dan *Serat Wulangreh*. Kreativitas menciptakan karya sastra modern oleh penutur asli bahasa Jawa terus berlangsung hingga sekarang meski tidak ditulis dalam aksara Jawa. Hasil ciptaan dalam karya sastra itu, antara lain, *Anteping Tekad*, *Candhikala Kapuranta*, *Dokter Wulandari*, *Dongeng Sato Kewan*, *Hera-Heru*, *Jarot*, *Kemandang*, *Kidung Wengi ing Gunung Gamping*, *Kinanthi*, *Kirti Njunjung Drajad*, *Kreteg Emas Jurang Gupit*, *Layang Saka Paran*, *Mendhung Kesaput Angin*, *Nalika Langite Obah*, *Ngulandara*, *Pupus kang Pepes*, *Sinta*, *Serat Durcara Arya*, *Serat Rangsang Tuban*, *Serat Riyanta*, *Serat Gerilya Sala*, *Siter Gadhing*, *Sri Kuning*, *Sumpahmu Sumpahku*, *Timbreng*, *Trem*, dan belum termasuk karya sastra dengan seting Jawa yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Karya sastra yang sebut di atas itu berbentuk prosa. Puisi (dalam bahasa) Jawa yang pernah dimuat pada berbagai media cetak antara tahun 1940 dan tahun 1980, dikumpulkan oleh Suripan Sadi Hutomo (almarhum) dalam satu antologi, yaitu *Antologi Puisi Jawa Modern 1940–1980*.

Selama manusia hidup, ia tidak akan berhenti memiliki pengalaman yang mengesankan. Sastra, pada hemat saya, merupakan jelmaan pengalaman itu dalam bahasa yang terpilih, dalam bahasa yang secara sadar atau tidak oleh penulisnya dinyatakan atas dasar prinsip estetika. Itulah sebabnya, betapa pun jelek atmosfir yang melingkunginya, sastrawan tidak akan berhenti berkreasi. Saya kira, begitulah yang terjadi pada para sastrawan Jawa, Bali, Makasar, Bugis, Batak, Lampung, Sunda, dan lain-lainnya di tanah air ini.

Bagaimana halnya dengan aksara Jawa saat ini? Meskipun penutur asli bahasa Jawa merupakan penutur yang jumlahnya paling besar dibandingkan dengan penutur bahasa daerah lainnya di Nusantara, nasib aksara Jawa lebih buruk dari nasib aksara Bali. Aksara Jawa sekarang ini kedudukannya sebagai pengetahuan saja yang diajarkan kepada siswa sekolah dasar mulai kelas tiga sampai dengan kelas lima. Pengajaran aksara Jawa sekarang tidak sampai menjadi keterampilan karena tidak difungsikan sebagai representasi ortografis bahasa Jawa. Oleh karena itu, mata pelajaran bahasa Jawa, termasuk pengetahuan menuliskan aksara Jawa, tidak akan dapat menempati kedudukan sebagai kebutuhan hidup orang Jawa, tetapi dianggap sebagai siksaan oleh para siswa. Mereka beranggapan bahwa pengajaran pengetahuan menulis aksara Jawa itu hanya menambah beban pekerjaan saja.

Meskipun Belanda didakwa sebagai biang keladi menurunnya derajat bahasa, sastra, dan aksara Jawa (dalam Riyadi, 2002:5), pemerintah Belanda sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia masih menghormati dan memelihara aksara Jawa dengan memberikan fungsi pada urusan resmi, misalnya, dalam peringatan akan bahasa listrik dan pecahan mata uang, sebagaimana terdapat pada lampiran makalah ini. Pada mata uang logam mulai *ketheng*, *sen*, *benggol*, *kelip*, *kethip*, dan seterusnya, terdapat tiga macam aksara—aksara Jawa, Arab, dan Latin. Sekarang, setelah bangsa sendiri merdeka, aksara Jawa itu tidak dipakai dalam mata uang. Begitu pula untuk keperluan lain, aksara daerah (kecuali aksara Bali) tidak difungsikan lagi.

Generasi Jawa di bawah umur 50 tahun tahu akan huruf Jawa, tetapi tidak dapat membaca dengan lancar, apalagi menulisnya sebagai alat melahirkan cipta, rasa, karsa, dan karyanya, baik yang menyangkut urusan formal maupun yang menyangkut urusan informal dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat Apa yang Diperoleh apabila Kita Mempertahankan dan Mengembangkan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah?

Pertanyaan ini sebenarnya mempunyai ikutan atau pelibatan makna bahwa sudah ada keraguan terhadap nilai budaya sendiri, sebagai akibat ketidakmampuan kita menghormati dan memelihara budaya daerah. Pemahaman budaya suatu bangsa dapat dilakukan secara mendalam jika pemahaman itu dilakukan atas dasar perspektif budaya bangsa itu sendiri, bukan dari perspektif budaya asing. Demikian pula halnya dengan pemahaman budaya, bahasa, sastra, dan aksara daerah. Pemahaman budaya, bahasa, sastra, dan aksara daerah dapat dicapai kedalamannya apabila kita mampu melihatnya dari perspektif budaya, bahasa, sastra, dan aksara daerah itu sendiri.

Dengan mengingat definisi *budaya* sebagai “pola keyakinan, sikap, dan perilaku yang dipelajari oleh suatu bangsa yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya,” saya percaya bahwa keyakinan, sikap, dan perilaku suatu etnik selalu dinyatakan dalam bahasa daerah yang dipergunakan dalam interaksi antaranggota etnik itu. Banyak ungkapan yang mencerminkan keyakinan, sikap, dan perilaku suku bangsa kita ini yang tidak dapat dinyatakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing. Di samping itu, hasil pengalaman hidup dan pemikiran yang sudah berlangsung berabad-abad, misalnya, dalam hal seni dan budaya dengan segala aspeknya, seperti model pakaian, masakan, obat-obatan, dan keperluan rias, hanya dapat diungkap dan dipahami secara sempurna dalam bahasa daerah yang ada di Nusantara ini.

Dalam masalah sastra juga banyak terdapat ungkapan yang hanya bisa dinyatakan dalam bahasa daerah untuk mempertahankan keindahan dan makna yang dikandungnya. Tidak heran jika kita mendapatkan pemakaian bahasa daerah dalam ranah sastra Indonesia, pengarangnya lebih *sreg* menggunakan bahasa daerah daripada menggunakan bahasa Indonesia. Pengarang novel atau cerita pendek yang berasal dari Batak, Bali, Lampung, Makasar, Bugis, Jawa, dan lain-lain yang ada di Nusantara ini tidak dapat lepas dari penggunaan bahasa daerah masing-masing. Dengan menggunakan ungkapan bahasa daerah itu, pengarang tetap dapat menyampaikan maksud yang dikehendaki tanpa mengorbankan aspek keindahannya.

Bahasa daerah yang ada di Nusantara ini tidak lebih rendah dari bahasa yang ada di dunia, termasuk bahasa yang ada di Asia, seperti bahasa Arab, Thai, Tamil, Mandarin, Jepang, dan Korea. Bahasa-bahasa itu tetap dipertahankan oleh masyarakat penutur aslinya karena eksistensi bangsa ini tidak dapat dilepaskan dari bahasanya. Bahasa-bahasa itu dipelajari oleh bangsa lain bukan karena kemampuan komunikasi bahasa itu dalam ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan interaksi umat manusia lebih tinggi dari bahasa daerah kita. Bahasa itu menjadi begitu bergengsi karena kualitas manusia dengan etos kerja yang tinggi menjadikan bangsa-bangsa itu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang lebih kreatif, bukan karena bahasanya. Bahasa merupakan representasi untuk mengungkapkan segala sesuatu yang mereka capai itu. Bangsa lain, termasuk oleh bangsa Indonesia, mempelajari bahasa Jepang, Cina, Korea, Inggris, dan lain-lain karena memang hasil kerja keras mereka yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya itu memang dibutuhkan.

Seandainya bangsa yang saya sebutkan itu tidak memiliki prestasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang tinggi, bahasa mereka tidak akan dipelajari oleh bangsa lain di dunia. Sebaliknya, seandainya bangsa kita yang beraneka ragam suku ini juga memiliki prestasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang tinggi dan dinyatakan dalam bahasa dengan aksara daerah masing-masing, bangsa lain akan lebih memperhatikan

bahasa daerah yang kita miliki. Jangan karena kualitas bangsa dengan etos kerja dan disiplin yang rendah sehingga prestasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budayanya rendah, lalu menganggap bahwa bahasa, sastra, dan aksara daerah dialpakan begitu saja. Prestasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya sudah miskin, mau mengalpakan budaya, bahasa, sastra, dan aksara daerah yang dimiliki. Apa yang dapat kita andaikan sebagai tanda bahwa kita ini eksis di dunia ini?

Budaya yang sudah memiliki sistem tulisan sendiri menandakan bahwa budaya itu memiliki derajat yang tinggi sebab dalam budaya itu segala pola pikiran, keyakinan, dan perilaku pemiliknya terekam untuk dipelajari dan kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, tanpa batas ruang dan waktu. Berapa jumlah bangsa dan bahasa yang ada di dunia ini tak terhitung banyaknya. Berapa budaya yang memiliki sistem tulisan sendiri, perkiraan saya tidak lebih dari lima persen. Perkiraan ini saya dasarkan atas banyaknya bahasa yang ada di Indonesia. Tidak kurang dari lima ratus bahasa, tetapi bahasa yang memiliki sistem tulisan sendiri tidak ada lima persen dari seluruh bahasa yang ada di Nusantara ini.

Menciptakan simbol, sebagai suatu sistem tulisan, yang dapat menyatakan semua aspek cipta, rasa, karsa, dan karya suatu bangsa dengan budaya dan bahasanya tidak mudah. Lima kali, sepuluh kali, atau berapa kali pun dilakukan kongres bahasa belum tentu dapat merumuskan simbol sebagai suatu sistem tulisan yang dapat diterima oleh suatu budaya untuk merekam semua pola pikiran, keyakinan, dan perilaku dan dipelajari serta diwariskan kepada generasi mendatang tanpa batas ruang dan waktu.

Demikianlah halnya dengan sistem tulisan daerah yang ada dalam budaya Nusantara ini, seperti aksara Batak, Bali, Bugis, Jawa, Lampung, dan Bima. Saya percaya, banyak dokumentasi pola pikiran, keyakinan, dan perilaku budaya daerah ini yang tak ternilai harganya yang direkam dengan sistem tulisan daerah itu, baik yang masih ada di museum di Tanah Air maupun yang ada di museum mancanegara, terutama yang ada di Eropa dan Amerika, seperti yang pernah saya lihat di Smithsonian Institution di Washington D.C.

Jika sistem tulisan daerah ini lenyap dari bumi Nusantara, generasi yang sangat bertanggung jawab ialah generasi yang sekarang ini, terutama individu-individu yang secara formal diberi tanggung jawab untuk menghormati dan memelihara aksara daerah itu. Saya katakan generasi yang sekarang sebab sekarang ini masih ada individu-individu yang mampu menguasai aksara daerah itu untuk tujuan rekognitif dan produktif, tetapi kita tidak memberikan atmosfer yang menunjang penghormatan dan pemeliharaan aksara daerah tersebut. Kita tidak mau mempelajari aksara daerah itu, kemudian menurunkan kepada generasi berikutnya. Padahal, jika ada niatan, kita masih belum kematian dian. Atas dasar pemikiran tersebut, saya meneriakkan suara pecinta dan pemeduli hidupnya aksara daerah agar

aksara daerah itu tetap dipelihara dan dihormati, bukan dibiarkan mati tidak terurus.

Bagaimanakah Cara Memelihara Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah?

Sebelum melakukan tindakan penghormatan, penyelamatan, dan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah, yang utama ialah adanya kemauan untuk menghormati, menyelamatkan, dan memelihara bahasa, sastra, dan aksara daerah itu sendiri. Adanya kemauan yang keras akan memberi semangat untuk mencari cara. Sebenarnya untuk menghormati dan memelihara bahasa dan sastra daerah, Kongres Bahasa Bali dan Kongres Bahasa Jawa selalu merumuskan butir-butir tindakan, mulai dari rumusan perda, keterlibatan pemerintah daerah, sampai dengan langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan. Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, misalnya, telah mengeluarkan *Buku Pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Bali*, atas dasar Peraturan Daerah Nomor 3/1992, yang secara khusus diperkuat oleh Edaran Gubernur Nomor 1/1995, tentang Penulisan Papan Nama dengan Dwi Aksara Bali.

Dengan mengambil analogi yang terdapat pada Kongres Bahasa Bali dan Kongres Bahasa Jawa, penyelamatan, pemeliharaan, dan penghormatan bahasa daerah, terlebih dahulu pemilik dan penutur asli bahasa daerah itu sendiri perlu dibuat sadar bahwa daerah itu berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah dan masyarakat penuturnya; (2) lambang identitas daerah dan masyarakat penuturnya; (3) alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat; (4) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia; dan (5) sarana pendukung daerah dan budaya Indonesia.

Apabila pemilik dan penutur asli bahasa daerah sadar bahwa begitu besar dan pentingnya fungsi bahasa daerah, perlu diupayakan peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah, mencakup upaya meningkatkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan berbahasa daerah melalui jalur formal--pendidikan dan pengajaran di sekolah dan jalur informal--dengan memfungsikan bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pembinaan sastra daerah juga perlu didahului dengan penanaman kesadaran kepada seluruh rakyat Indonesia dan pemilik sastra daerah bahwa sastra daerah merupakan bukti historis masyarakat daerah. Sehubungan dengan itu, sastra daerah sebagai salah satu bagian dari sastra Indonesia berkedudukan sebagai wahana ekspresi budaya Indonesia, yang di dalamnya terekam pengalaman etika, estetika, moral, agama, dan sosial masyarakat daerah. Dalam kedudukannya sebagai wahana ekspresi budaya, sastra daerah memiliki fungsi sebagai perekam kebudayaan daerah dan pemelihara, pemupuk, dan penumbuh solidaritas daerah.

Apabila kesadaran akan begitu besar dan pentingnya sastra daerah telah timbul, pembinaan yang perlu dilakukan ialah meningkatkan mutu

apresiasi sastra daerah. Upaya peningkatan ini bisa dilakukan lewat pendidikan, pengajaran, pemasyarakatan, dan pemberdayaan sastra daerah. Secara konkret, (1) adakan pendidikan dan pengajaran sastra daerah tersendiri sebagai matapelajaran dalam kurikulum, bukan merupakan bagian kecil dari pendidikan dan pengajaran bahasa daerah; (2) adakan guru-guru sastra daerah yang bermutu; (3) adakan atmosfer yang bermutu untuk mendukung penciptaan karya sastra yang bermutu pula; (4) manfaatkan tokoh-tokoh sastra daerah yang masih kreatif dan produktif; dan (5) berikan penghargaan yang wajar kepada sastrawan daerah, dan adakan penerjemahan karya sastra yang memiliki nilai universal.

Singkatnya, pengembangan sastra daerah adalah upaya untuk meningkatkan mutu sastra daerah agar sastra daerah itu dapat dimanfaatkan sebagai media ekspresi pencarian dan pencerminan jati diri dalam membangun masyarakat daerah yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Kegiatan pengembangan meliputi penelitian dan penulisan.

Aksara daerah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan budaya daerah. Dengan melihat fungsinya, aksara daerah telah dan dapat digunakan lagi dalam kehidupan bersastra, berseni, pendidikan, adat, agama, serta komunikasi tulis sehari-hari. Dengan kata lain, aksara daerah itu dapat diberi kedudukan yang tinggi seperti yang terdapat pada mata uang logam zaman Belanda berikut ini.





Anehnya, kita berada dalam zaman kemerdekaan, tetapi justru pada alam kemerdekaan ini sendiri, bahasa, sastra, dan aksara daerah tidak kita pelihara, tidak kita hormati, apalagi kita junjung tinggi seperti pada zaman penjajahan. Sebenarnya, jika kita mau, bahasa dan penulisan aksara daerah dapat saja dicantumkan pada mata uang resmi Indonesia. Masih banyak ruang pada mata uang kita itu yang dapat memuat bahasa dan aksara daerah kita. Perhatikan betapa banyaknya ruang pada mata uang kertas kita seandainya kita mau memberi muatan bahasa dan aksara daerah.



Saya kira, tidak hanya pada mata uang saja, aksara daerah itu bisa kita beri kedudukan yang terhormat. Pada petunjuk-petunjuk produk Indonesia pun, bisa saja kita muati bahasa dan aksara daerah sebagaimana para produsen Cina, Jepang, Korea, Thailand, dan lain-lain, yang dengan bangganya men-

cantumkan bahasa dan aksara mereka masing-masing pada petunjuk pemakaian produknya.

Mungkin ada yang berpikiran begini. Jika bahasa dan aksara daerah itu kita cantumkan pada mata uang, tidakkah akan menimbulkan rasa iri hati dan sentimen kedaerahan? Untuk menangkis kecurigaan semacam itu, kita memunculkan bahasa dan aksara daerah pada mata uang secara seri. Mata uang tertentu dengan bahasa dan aksara Bali, Batak, Bugis, Jawa, dan sebagaimana yang sudah kita lihat pada mata uang kita dengan seri gambar pahlawan nasional, seni tari dan lain sebagainya yang berasal dari daerah.

Untuk menutup makalah saya ini, ada dua hal yang ingin saya tekankan. Saya melihat semua kegiatan semacam kongres ini dari dua segi: segi *ergon* dan segi *energiae*. Dari segi *ergon*, kita sadar bahwa Kongres Bahasa Indonesia ini akan merumuskan hasil kongres untuk dideseminasikan ke lembaga pemerintah dan disosialisasikan kepada masyarakat ramai, tetapi itu saja tidak cukup. Kita juga harus memperhatikan segi *energiae*-nya, adanya dinamika untuk menindaklanjuti hasil kongres ini dengan perbuatan nyata. Karena pembinaan dan pengembangan budaya, bahasa, sastra, dan aksara daerah itu diserahkan kepada pemerintah daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan undang-undang itu dengan segala konsekuensinya, sedangkan pemerintah pusat mengatur perekatan budaya, bahasa, sastra, dan aksara daerah menjadi budaya nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandana, I Gde Wayan Soken. 2003. "Sekilas Tentang Fungsi dan Asal-Usul Aksara Bali." Dalam *Aksara, Jurnal Bahasa dan Sastra* No. 21, Tahun XIII, 2003. Denpasar: Balai Bahasa Denpasar.
- Bawa, I Wayan. 2001. "Pengausan Kemampuan Menggunakan *Undha-Usuk* Bahasa Jawa Bagi Etnik Jawa setelah Satu Tahun Tinggal di Denpasar." Kongres Bahasa Jawa III di Yogyakarta, Juli 2001.
- Brata, Suparto. 2002. "Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa dalam Kaca Mata Pengarang." Seminar Regional Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa di Balai Bahasa Surabaya, September 2002.
- Chambert-Loir, Henri dan Siti Maryam R. Salahuddin. 1999. *Bo' Sangaji (Catatan Kerajaan Bima)*. Jakarta: Ecole Francais d'Extreme-Orient Yayasan Obor Indonesia.

- Gossweiler, Christian. 2001. "Jenggelekipun Basa-Basa Daerah Wonten Tengahing Globalisasi: Refleksi Pengalaman ing Eropa lan ing Indonesia." Kongres Bahasa Jawa III di Yogyakarta, Juli 2001.
- Herusatoto, Budiono. 2001. "Rancu Pikir dalam Memahami Makna Kata Tata-Tata Krama dan *Undha-Usuk*." Kongres Bahasa Jawa III di Yogyakarta, Juli 2001.
- Laksono, Kisyani. 2001. "Identifikasi Dialek dan Subdialek Bahasa Jawa di Jawa Timur Bagian Utara dan Blambangan". Kongres Bahasa Jawa III di Yogyakarta, Juli 2001.
- Riadi, Slamet. 2002. "Kebijakan Bahasa dan Sastra Jawa." Seminar Regional Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa di Balai Bahasa Surabaya, September 2002.
- Wahab, Abdul. 2001. "Dampak Kealpaan Penutur Bahasa Jawa terhadap Perilaku Bangsa." Kongres Bahasa Jawa III di Yogyakarta, Juli 2001.
- Wahab, Abdul. 2002. "Kealpaan terhadap Penghormatan dan Pemeliharaan Bahasa Daerah Pengemban Kebudayaan Nasional." Kongres Masyarakat Linguistik Indonesia di Denpasar, Bali, Juli 2002.
- Widati, Sri. 2002. "Kontribusi Hasil Penelitian terhadap Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa." Seminar Regional Pengajaran Bahasa dan Sastra Jawa di Balai Bahasa Surabaya, September 2002.
- , 1966. *Pembinaan Bahasa Aksara dan Sastra Bali (Pedoman Penulisan papan nama dengan Aksara Bali)*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- , 2001. *Makalah Kongres Bahasa Jawa III*.
- , 2002. *Kumpulan Makalah Kongres Bahasa Bali V*. Denpasar: Kerja Sama Pemerintah Propinsi Bali, Badan Pembinaan Bahasa Aksara dan Sastra Bali, Fakultas Sastra Unud, dan Balai Bahasa Denpasar.

REVITALISASI BAHASA DAERAH (BALI) DI TENGAH PERSAINGAN BAHASA NASIONAL, DAERAH, DAN ASING UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA

Ida Bagus Putra Yadnya
Universitas Udayana

Dasar Pemikiran

Keterkaitan antara bahasa dan budaya bagaikan dua sisi mata uang sehingga diskusi mengenai bahasa tanpa mengaitkan budaya menjadi kurang holistik. Sebaliknya, pendiskripsian budaya hanya mungkin melalui penggunaan bahasa. Sebagai bagian dari budaya, bahasa merupakan mediasi pikiran, perasaan, dan perbuatan. Bahasa tidak saja dipahami sebagai sarana komunikasi, tetapi juga bisa dipandang sebagai suatu sumber daya untuk menyingkap misteri budaya, mulai dari perilaku berbahasa, identitas dan kehidupan penutur, pendayagunaan dan pemberdayaan bahasa sampai dengan pengembangan serta pelestarian nilai budaya. Bahasa menerjemahkan nilai dan norma, skema kognitif manusia, persepsi, sikap dan kepercayaan manusia tentang dunia para pendukungnya (Liliweri, 2001:120). Wahab (1995:37-39) meyakini bahwa gagasan yang menyatakan bahwa kandungan budaya tecermin dalam bahasa sudah lama dan sudah banyak diutarakan oleh pakar. Boas, misalnya, menunjukkan adanya tidak saja hubungan timbal balik antara pikiran dan bahasa, tetapi juga antara bahasa dan adat, antara bahasa dan perilaku etnik serta bahasa dan perubahan yang terjadi dalam budaya. Pernyataan yang lebih tegas lagi diberikan oleh Bloomfield yang menekankan bahwa sedemikian kuat hubungan budaya itu terhadap bahasa sehingga kekayaan atau kemiskinan suatu budaya tecermin dalam bahasanya. Bahkan, sebagaimana yang dikutip James (2002), Bassnett (1998:13--14) menggambarkan hubungan antara bahasa dan budaya sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan kematian salah satunya ditentukan oleh yang lain dengan menyatakan bahwa bahasa merupakan *the heart within the body of culture* sehingga kelestarian kedua aspek tersebut saling tergantung satu sama lainnya. Berdasarkan pandangan tersebut kita akan menyadari betapa pentingnya untuk selalu menjaga kelestarian bahasa (nasional dan daerah) guna memperkuat budaya nasional dan keabadian budaya daerah sebagai pilar *bhinneka tunggal ika*, jati diri bangsa Indonesia.

Dasar mengikuti pandangan Fishman (1985), hubungan bahasa dengan budaya bisa dilihat dalam tiga perspektif, yakni (1) sebagai bagian dari budaya, (2) sebagai indeks budaya, dan (3) sebagai simbol budaya. Sebagai bagian dari budaya, bahasa merupakan pengejawantahan perilaku manusia. Misalnya, upacara, ritual, nyanyian, cerita, doa merupakan tindak

tutur atau peristiwa wicara. Semua yang ingin terlibat dan memahami budaya tersebut harus menguasai bahasa karena dengan itu barulah mereka bisa berpartisipasi dan mengalami budaya tersebut. Dari pandangan ini muncullah wacana atau rasionalisasi bahwa pergeseran budaya atau hilangnya bahasa yang sangat dekat dengan kebudayaan merupakan pertanda terjadinya perubahan yang luar biasa. Sebagai indeks budaya, bahasa dipersepsikan juga mengungkapkan cara berpikir dan menata pengalaman penuturnya yang dalam bidang tertentu muncul dalam item leksikal, dan sebagai simbol budaya, bahasa menunjukkan identitas budaya etnik. Dalam keadaan bahasa diposisikan sebagai simbol budaya, tidak mengherankan jika bahasa tertentu menjadi simbol dari sebuah etnokultur yang bisa membawa eksese suatu pergeseran atau bahkan pergerakan bahasa atau “onflik” bahasa.

Persaingan atau “konflik” bahasa merupakan fenomena laten yang bisa muncul ke permukaan akibat kontak bahasa dan kurang tepatnya perencanaan bahasa. Konflik bahasa bisa muncul kapan saja yang terdapat kontak bahasa, khususnya pada masyarakat memprediksikan multilingual. Konflik bahasa muncul dari konfrontasi standar yang berbeda, nilai, dan struktur perilaku yang akhirnya mempengaruhi citra identitas, latar belakang, pendidikan dan kesadaran kelompok. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dibentuk dari perbedaan, termasuk perbedaan bahasa. Di samping ke-*bhinneka*-an bahasa daerah yang dimiliki dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kebutuhan akan penguasaan bahasa asing, terutama Inggris, menguatkan status masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multilingual. Situasi kebahasaan seperti ini tentu saja berpotensi menimbulkan persaingan atau konflik (bahasa daerah, nasional, dan asing) yang kalau tidak dicermati dan diantisipasi bisa membawa dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidup bahasa, terutama bahasa daerah sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan fleksibel. Dengan bertolak dari pemikiran bahwa sebuah kongres bukanlah ajang perdebatan teoretik-akademik, tetapi lebih berupa forum urun pendapat dan gagasan (*sharing ideas*) yang berorientasi pada hasil (*product oriented*), secara umum makalah ini mencoba mengidentifikasi masalah yang bisa menjadi sumber konflik untuk memancing perhatian dan keterlibatan peserta kongres dalam memikirkan situasi kebahasaan (bahasa Indonesia, daerah, dan asing, terutama Inggris) dewasa ini dan di masa mendatang serta menyadarkan kita semua akan perlunya kaji ulang perencanaan bahasa nasional dan daerah. Secara khusus makalah ini mencoba memberi alasan mengapa usaha revitalisasi perlu dilaksanakan dan menawarkan sejumlah alternatif bagaimana merevitalisasi bahasa daerah untuk memperkuat ketahanan budaya.

Mengapa Revitalisasi Bahasa Daerah Diperlukan?

Alasan mengapa perlu pencermatan dan revitalisasi terhadap bahasa daerah muncul dari semakin meningkatnya wacana kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah yang telah ditandai secara awal oleh mulai merosotnya jumlah penutur, adanya persaingan bahasa (desakan bahasa Indonesia dan bahasa asing), dan semakin berkurangnya loyalitas penutur terhadap pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa ibu, sekaligus sebagai simbol budaya. Dalam kondisi sebagai masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan sosial di alam reformasi, kita sekarang menyaksikan persaingan tiga bahasa, yaitu bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Kebijakan bahasa nasional dalam pengalokasian fungsi ketiga bahasa ini memperlihatkan sikap masyarakat dan Pemerintah terhadap bahasa tersebut. Di dalam peta persaingan ini, cukup banyak penelitian, pakar, dan pengamat bahasa melihat kecenderungan menyusutnya fungsi bahasa daerah dan terbatas pada ajang keluarga, informal, dan hiburan sehingga daya tahan dan daya saingnya menjadi semakin rapuh dan tidak mungkin mengimbangi bahasa nasional atau asing apalagi mengalahkannya. Walaupun kita menyadari bahwa beberapa bahasa daerah lebih tegar menghadapi ekspansi bahasa Inggris dan desakan bahasa Indonesia (seperti bahasa Jawa), keluhan dan kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah makin santer sementara pada konteks global bahasa Inggris tetap unggul. Gejala kepunahan suatu bahasa tidak saja terjadi pada komunitas yang berada di daerah mayoritas berbahasa lain dari bahasa ibunya seperti yang diperlihatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumalia (2003) dan Maha Indra (2003)¹. Moerdiono (1988) sudah mensinyalir bahwa hampir di seluruh daerah di Indonesia terdapat keluhan mengenai gejala kemunduran pemakaian bahasa daerah.² Bahasa Bali, misalnya, diprediksikan oleh Bagus (2001) dalam makalah berjudul "Beberapa Pemecahan dalam Pengembangan Bahasa Bali" yang disajikan dalam Seminar di Ambang Kematian Bahasa Bali di Denpasar 26 Mei 2001, dan diungkapkan kembali pada Kongres Bahasa Bali V 13--16 November

¹ Kedua peneliti ini menunjukkan secara signifikan ketidakbertahanan bahasa Jawa dan kecenderungan penutur bahasa Jawa (sebagai bahasa ibu) lebih memilih berbahasa Bali di lingkungan penutur mayoritas berbahasa Bali. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sumalia .2003. "Pemakaian Bahasa antara Suami-Istri di dalam Rumah Tangga Masyarakat Kampung Islam Kecicang Kabupaten Karangasem" dalam *Aksara, Jurnal Bahasa dan Sastra*, Nomor 21 Tahun XIII Maret 2003 (pp. 109--121), dan Maha Indra. 2003. "Faktor-Faktor Pendukung Ketidakbertahanan Bahasa Jawa pada Masyarakat Jawa di Kampung Jawa Singaraja" dalam *Aksara, Jurnal Bahasa dan Sastra*, Nomor 21 Tahun XIII Maret 2003 (pp. 68--82)

² Lihat Moerdiono, 1988. "Bahasa Indonesia dalam Tugas Penyelenggara Pemerintahan". Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia V, Jakarta: Depdikbud

2001, akan punah sebelum akhir abad ini.³ Walaupun pernyataan seperti itu memiliki alasan dan setiap kepedulian terhadap kelangsungan hidup bahasa daerah patut diberikan apresiasi, kekhawatiran yang ditunjukkan tidaklah harus berlebihan dan berkembang ke arah sikap pesimistis, apalagi selalu mencari kambing hitam. Gejala ini harus dicermati melalui pencarian jawaban terhadap mengapa terjadi kemunduran pemakaian bahasa daerah mengingat keberlangsungan atau kepunahan suatu bahasa daerah bukan karena faktor bahasa itu sendiri, tetapi lebih cenderung pada faktor nonbahasa. Di samping itu, kepunahan suatu bahasa tidaklah bisa dihitung secara matematik dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Sebagaimana yang dikutip oleh Reyhner (2000), Fishman memostulatkan kontinum delapan taraf situasi apakah suatu bahasa akan mengalami suatu kepunahan atau berkembang ke arah yang dinamis. Taraf 8 merupakan situasi bahasa daerah yang berada pada ambang kepunahan dan taraf 1 merupakan situasi bahasa menuju pada perkembangan yang dinamis. Taraf 8 ditandai dengan situasi kebahasaan yang dalam hal ini hanya sedikit sekali orang tua yang mampu berbahasa daerah sebagai bahasa ibu. Taraf 7 adalah situasi kebahasaan yang dalam hal ini suatu bahasa memiliki masih cukup banyak penutur, tetapi dari generasi tua (berusia lanjut) yang tidak lagi memiliki anak kecil. Taraf 6 adalah situasi yang dalam hal ini masih terdapat penggunaan bahasa ibu antargenerasi di rumah. Taraf 5, bahasa masih hidup dan digunakan dalam lingkup minoritas dan bahkan di sekolah. Taraf 4, situasi yang dalam hal ini bahasa minoritas diharuskan pada pendidikan sekolah dasar. Taraf 3 bahasa daerah digunakan di tempat kerja oleh para pekerja dalam lingkungan kerja khusus; taraf 2 bahasa daerah digunakan dalam pemerintah setempat (lokal) dan media massa dari komunitas minoritas, dan taraf 1, bahasa daerah tersebut digunakan dalam tataran pemerintahan yang lebih tinggi dan pendidikan tinggi. Walaupun penahapan tersebut tidak bisa langsung bisa diterapkan pada semua bahasa (termasuk bahasa Bali), pendapat tersebut bisa dipakai sebagai acuan introspeksi untuk mencermati taraf situasi bahasa daerah masing-masing.

³ Pernyataan senada juga pernah dibuat terhadap kelangsungan hidup bahasa Lampung. Sebagaimana dikutip oleh Bambang Kaswanti Purwo (2000:14-15), berdasarkan suatu penelitian sosiolinguistik Gunarwan (1994) meyakinkan bahwa bahasa Lampung dapat punah dalam waktu 75--100 tahun lagi yang secara statistik tidak mungkin punah mengingat jumlah penuturnya di atas 100.000, yakni 1.500.000. Diungkapkan walaupun penutur bahasa Lampung yang berusia 51 tahun masih murni menggunakan bahasa Lampung di rumah, tetapi mereka yang berumur 41--50 sudah tidak selalu menggunakan bahasa tersebut di rumah. Yang disayangkan dari penelitian tersebut adalah alasan mengapa penutur Lampung itu meninggalkan atau tidak mau lagi memakai bahasa ibunya tidak dipersoalkan dalam penelitian tersebut.

Persaingan bahasa asing, nasional, dan daerah memang sedang berlangsung dan berdampak pada sikap/perilaku berbahasa masyarakat kita. Era kesejagatan yang lebih populer dikenal dengan istilah globalisasi bercirikan keterbukaan, persaingan, dan kesalingtergantungan antarbangsa serta dibarengi oleh derasnya arus informasi yang menembus batas geografi, suku, ras, agama, dan budaya. Ciri keterbukaan yang dimiliki oleh globalisasi mengindikasikan terjadinya proses interaksi antar bahasa dan budaya. Dalam era persaingan bebas, penguasaan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih harus meningkatkan sumber daya manusia secara kuantitatif dan kualitatif sehingga ketergantungan akan sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar sangat terasa.

Untuk menjembatani interaksi dan komunikasi lintas bahasa dan budaya, penguasaan bahasa asing (khususnya bahasa Inggris) menjadi suatu kebutuhan utama. Bahasa Inggris telah berkembang menjadi medium komunikasi internasional yang penting dan medium pencitraan diri secara intelektual dan sosial.⁴ Pentingnya peranan bahasa Inggris tidak saja terletak pada jumlah pemakaiannya sebagai bahasa ibu serta luas penyebaran pemakaiannya secara geografis, tetapi juga akibat pengaruh politik dan ekonomi dari negara yang memakai bahasa Inggris itu sebagai bahasa ibu.⁵ Lebih menarik dari ketiga fakta tersebut, Quirk *et.al* (1972:2) melihat pentingnya bahasa Inggris dewasa ini terletak pada "beban wahana" (*vehicular load*) yang dimilikinya, yakni seberapa jauh bahasa Inggris itu berfungsi sebagai media bagi ilmu pengetahuan, kesusastraan atau manifestasi kebudayaan yang dipandang agung lainnya. Bahasa Inggris telah berkembang menjadi *lingua franca* dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat ilmiah. Bahkan perkembangan persepsi terhadap bahasa Inggris tersebut tidak berhenti pada alasan praktis-pragmatis untuk mengungkapkan jati diri dan penguasaan informasi, tetapi telah berkembang lebih jauh menyangkut prestise dan manfaat ekonomis. Dampaknya bagi situasi kebahasaan di Indonesia adalah terjadinya dilema persaingan bahasa dan kecenderungan penilaian yang lebih terhadap bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa

⁴ Hal ini terasa khususnya di kalangan masyarakat akademik. Berdasarkan survei terhadap 1776 mahasiswa dari 21 program S-1 di Indonesia, 86 persen dari mahasiswa menyatakan bahasa Inggris sangat penting dalam pendidikan mereka (Kweldju, 2001:36 dalam jurnal ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia, *Linguistik Indonesia*, Februari 2001, Tahun 19, Nomor 1)

⁵ Penjelasan yang lebih komprehensif bisa dilihat pada paper Soenjono Dardjowidjojo (2000), "Bahasa Asing sebagai Bahasa Pengantar dalam Sistem Pendidikan" yang disampaikan dalam Kongres Bahasa Indonesia VII dan diterbitkan kembali

Indonesia yang membawa implikasi terhadap perencanaan dan pengembangan bahasa nasional dan daerah.

Yang cukup mengagetkan adalah hasil survei Gunarwan (1993) atas 126 orang subjek dari Jakarta, Bandung, dan Palangkaraya. Dalam penelitian tersebut terungkap angka rata-rata penilaian subyek atas 11 ciri-ciri penutur bahasa Indonesia dan penutur bahasa Inggris secara keseluruhan menempatkan bahasa Inggris lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Lebih lanjut Gunarwan (1997) membandingkan kepadaan geolinguistik bahasa Inggris dengan kepadaan geolinguistik bahasa Indonesia dan menemukan petunjuk yang mengisyaratkan bahwa daya tarik bahasa Inggris, berdasarkan indikator daya tarik status, lebih besar daripada daya tarik bahasa Indonesia.⁶ Dalam lingkup yang lebih kecil, fenomena ini bisa diilustrasikan dengan mengambil Bali sebagai contoh. Sebagai daerah pariwisata, Bali sangat terbuka dengan interaksi lintas bahasa dan budaya dan mensyaratkan keterampilan berbahasa asing untuk bisa berpartisipasi dan mengambil manfaat (ekonomi) dari aktivitas pariwisata tersebut. Sejalan dengan pesatnya perkembangan pariwisata di Bali daya tarik fungsi bahasa Inggris sangat terasa sekali di kalangan masyarakat Bali. Sebagaimana yang dikutip Sutjaja (1995:4-5) survei bahasa asing yang dilakukan Subproyek Upgrading Dosen Bahasa Inggris tahun 1970 mengungkapkan bahwa bahasa Inggris dipandang sebagai bahasa asing yang paling penting bagi Bali diikuti oleh bahasa Jepang dan Jerman pada urutan kedua dan ketiga. Di samping itu bahasa Inggris juga merupakan bahasa pertama yang digunakan dalam interaksi dengan orang asing, sedangkan bahasa Belanda dan Jepang pada urutan kedua dan ketiga. Sebanyak bisnis 90,04 % responden mengakui bahwa wisatawan asing lebih suka dilayani dengan menggunakan bahasa asing dan untuk melayani wisatawan dalam kepentingan, 76,66% mengakui menggunakan bahasa Inggris. Data yang lebih mutakhir adalah survei situasi bahasa asing di Bali yang dilakukan mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Udayana (1994) terhadap 200 responden yang terbagi dalam dua kelompok (yang terlibat langsung dalam pariwisata dan masyarakat umum di Kecamatan Kuta, Sanur⁷, Kabupaten Badung, Kotamadya Denpasar, dan Kecamatan Ubud dan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 99% responden menyatakan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang paling dibutuhkan. Temuan yang kedua adalah bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang paling banyak digunakan untuk komunikasi (97%) dan

⁶ Ringkasan perbandingan kedua bahasa dapat dilihat dalam tulisan Asim Gunarwan (2000) yang berjudul "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia di dalam Era Globalisasi" dalam risalah Kongres Bahasa Indonesia VII (hal. 52--55)

⁷ Sekarang Sanur menjadi bagian Kotamadya Denpasar, sedangkan Kuta tetap di bawah Kabupaten Badung.

59% mengakui bahwa penguasaan bahasa asing memengaruhi karier mereka. Bahkan, 92% responden menyatakan dirinya bangga bisa menguasai bahasa asing. Ini mengindikasikan adanya persepsi fungsi bahasa (asing) tidak hanya terbatas pada fungsi praktis-pragmatis dan ekonomis saja, tetapi sudah mengarah kepada gengsi (*self esteem*). Bukti empiris relevan lainnya yang mendukung bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi di bidang pariwisata adalah data mengenai jumlah pramuwisata berbahasa Inggris yang paling banyak dan setiap tahunnya diperkirakan terus meningkat. Tahun 1992, pramuwisata berbahasa Inggris berjumlah 739 laki-laki dan 33 wanita dari 1.528 pramuwisata yang tercatat. Tahun 1993 menjadi 1.065 laki-laki dan 33 wanita dari 2.398 pramuwisata yang tercatat resmi dalam *Statistik Pariwisata Bali* (1993). Jumlah ini hampir dua kali lipat jumlah pramuwisata berbahasa Jepang (423 laki-laki dan 59 wanita tahun 1992 dan 612 laki-laki dan 80 wanita pada tahun 1993) yang menempati urutan kedua. Konsekuensi dari jaminan yang bisa dijanjikan oleh penguasaan bahasa Inggris menjadikan bahasa asing ini salah satu bahasa yang dipelajari oleh paling banyak orang di Bali. Fenomena ini sampai batas-batas tertentu menjadi salah satu penyebab cukup kuat atas pilihan dan motivasi belajar bahasa (Bali) dan menyusutnya popularitas bahasa Indonesia dan bahasa Bali.

Di samping menyusutnya popularitas bahasa Indonesia akibat nilai ekonomis dan prestise yang dijanjikan oleh bahasa internasional, bahasa Indonesia juga dihadapkan pada tuduhan sebagai penyebab keterasingan masyarakat terhadap bahasa daerahnya. Perencanaan status bagi bahasa Indonesia telah membatasi ruang gerak bahasa daerah untuk merambah atau keluar dari sekadar ranah budaya. Arus reformasi, otonomi daerah dan wacana demokratisasi juga menyadarkan masyarakat penutur bahasa daerah akan keberadaan, potensi dan posisi bahasanya. Kebijakan bahasa nasional mulai dikritisi dan wacana *bhinneka tunggal ika* tidak lagi hanya wacana politik, tetapi juga wacana linguistik. Sebagai ilustrasi kita bisa mengadakan introspeksi terhadap keberterimaan bahasa Bali.

Pada kenyataannya eksistensi bahasa Bali terutama di daerah perkotaan makin mengkhawatirkan walaupun belum bisa dikatakan telah terpinggirkan (marginal). Gejala linguistik seperti ini juga dirasakan oleh Jendra (2002:48—49) yang mensinyalir pemakaian bahasa Bali di dalam sejumlah kehidupan rumah tangga telah menyusut dan telah tersaingi oleh pemakaian bahasa Indonesia. Di dalam situasi kontekstual yang masih berbau tradisional juga bahasa Bali telah banyak didesak oleh pemakaian bahasa Indonesia. Kecenderungan ke arah keterpinggiran bahasa Bali tersebut diakibatkan paling sedikit oleh tiga hal, yakni (1) status bahasa Bali, (2) loyalitas masyarakat penutur, dan (3) strategi pembinaan dan pengembangan bahasa Bali.

Status bahasa Bali adalah sebagai bahasa daerah dan merupakan bahasa ibu bagi masyarakat Bali yang berfungsi sebagai bahasa komunikasi antar masyarakat Bali. Dalam kebijakan bahasa nasional, fungsi bahasa daerah ditetapkan sebagai (1) lambang kebanggaan daerah; (2) lambang identitas daerah; (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah; 4) sebagai sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia; dan (5) sebagai pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa Indonesia; (2) bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia/atau pelajaran lain; dan (3) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Dalam keadaan tertentu, bahasa daerah dapat juga berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah.⁸

Rumusan fungsi utama bahasa daerah pada kebijakan tersebut tidaklah mengundang masalah. Akan tetapi, di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, kedudukan bahasa daerah muncul sebagai pendukung dan pemer kaya serta sebagai alat bantu memperlancar pengajaran bahasa Indonesia. Dalam posisi dan hubungan yang tidak simetris seperti itu akan tertutup kesempatan bagi bahasa daerah untuk bisa menggantikan fungsi bahasa Indonesia di luar ranah keluarga, masyarakat, dan budaya daerah. Walaupun kebijakan bahasa nasional merumuskan bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara berfungsi sebagai pemer kaya bahasa dan sastra daerah yang mengesankan hubungan timbal balik (hubungan saling memperkaya) antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia, kalau dicermati lebih saksama dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional rumusan fungsi bahasa Indonesia sebagai "alat" pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya akan tetap mengundang interpretasi dan manipulasi. Hal ini masih membuka kemungkinan rumusan kebijakan bahasa nasional yang sudah baik ini diperalat dengan dalih "penyeragaman", "kemanunggalan", dan "persatuan dan kesatuan" untuk mendesak atau memaksakan pemakaian bahasa Indonesia yang akhirnya berbuntut ketidakberdayaan bahasa daerah sehingga *bhinneka tunggal ika* sebagai jati diri bangsa kehilangan ke-*bhinneka*-annya.

Keberadaan bahasa Bali menjadi semakin terancam karena dominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Komunikasi resmi terlebih lagi komunikasi massa, baik lisan maupun tulis, serta audio-visual hampir semua menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Bali menjadi

⁸ Untuk lebih jelas lihat Depdiknas, 2000. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa* (hlm. 217—238)

direduksi menjadi sekadar bahasa komunikasi anak di rumah sehingga anak kurang menghargai bahasa ibu. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar di sekolah berdampak negatif yang sangat luas terhadap perkembangan bahasa daerah pada umumnya dan Bali pada khususnya. Kebijakan ini telah menutup kemungkinan fungsi bahasa Bali merambah ranah-ranah di luar bidang budaya etnik.

Akibat kompetisi bahasa (Bali, Indonesia dan asing terutama Inggris) di dalam gejala dinamika budaya mutakhir bernuansa global tanpa akar budaya lokal dan ikatan nasional yang kuat telah mengubah orientasi masyarakat Bali, khususnya sikap terhadap bahasa daerahnya. Masyarakat makin bersikap pragmatis terhadap pemakaian dan belajar bahasa sehingga loyalitas berbahasa Bali makin luntur yang kalau tidak disadari dan terus dibiarkan oleh masyarakat akan menimbulkan alienasi penutur terhadap bahasa daerahnya sendiri.

Laporan penelitian sosiolinguistik yang dilakukan Gunarwan (2002) mengenai kedwibahasaan (Indonesia-Bali) pada masyarakat penutur bahasa Bali menunjukkan pergeseran sikap bahasa generasi muda penutur bahasa Bali. Walaupun penelitiannya menyimpulkan situasi kedwibahasaan masyarakat penutur bahasa Bali masih stabil dan jauh lebih baik dari situasi kedwibahasaan di Lampung, Gunarwan secara empirik menunjukkan bahwa generasi muda Bali cenderung memiliki sikap kurang positif terhadap bahasa Bali dan menggunakan bahasa Indonesia dalam ranah keluarga.⁹ Studi kasus mengenai pemertahanan bahasa Bali di lingkungan Perumahan Monang-Maning Kodya Denpasar yang dilakukan oleh Adnyana dkk. pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa walaupun khasanah kebahasaan penutur bahasa Bali masih cukup baik, dibandingkan dengan golongan tua, golongan muda mempunyai kemampuan berbahasa Bali yang relatif kurang. Di samping itu, walaupun golongan muda masih dapat mempertahankan bahasa Bali sebagai bahasa ibu, disinyalir mulai ada kecenderungan pergeseran, yakni 16,7% anak muda tidak lagi menjadikan bahasa Bali sebagai bahasa ibu. Walaupun penggunaan bahasa Bali pada ranah keluarga masih cukup dominan, bahasa Indonesia juga sudah mulai dijadikan alternatif dan kecenderungan penurunan penggunaan bahasa Bali oleh golongan muda disertai dengan kenaikan penggunaan bahasa Indonesia oleh golongan muda. Walaupun disimpulkan secara umum pemertahanan bahasa Bali masih cukup baik, khususnya pada ranah keluarga, ketetangaan, dan kekariban, terlihat adanya pergeseran penggunaan bahasa Bali ke dalam bahasa Indonesia dari generasi tua ke generasi muda. Titik peralihan awal

⁹ Lihat Gunarwan. 2002. "Indonesian and Balinese Among Native Speakers of Balinese: A Case of Stabel Bilingualism?" *Bahasa dan Sastra*, Volume 20 Nomor 1. Edisi Januari – Maret 2002. Depdiknas:Pusat Bahasa (pp. 1-16).

pergeseran ditemukan pada golongan muda yang berumur antara 15--25 tahun dengan menggunakan bahasa campuran bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, peralihannya ke dalam bahasa Indonesia terlihat pada anak muda di bawah 15 tahun.

Di samping melunturnya loyalitas penutur bahasa Bali, perencanaan bahasa daerah selama ini terkesan lebih menitikberatkan perencanaan status (*status planning*) dan perencanaan korpus (*corpus planning*), tetapi mengesampingkan perencanaan sosial (*social planning*) sehingga perencanaan bahasa terfokus pada pemantapan status, kodifikasi yang preskriptif berupa standardisasi bahasa, tata bahasa dan penggunaan bahasa, tetapi melupakan penuturnya (*language user*). Oleh karena itu, perlu paradigma baru dalam perencanaan bahasa daerah Bali serta usaha revitalisasi bahasa Bali secara konkret.

Bagaimana Merevitalisasi Bahasa Bali?

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kepunahan suatu bahasa tidak sepenuhnya diakibatkan oleh bahasa itu sendiri, tetapi cenderung diakibatkan oleh faktor nonbahasa. Fakta empirik yang dikemukakan sebelumnya mengungkapkan bahwa ketidakberdayaan bahasa daerah berfungsi sejajar dengan bahasa nasional dan merosotnya loyalitas pemakaian bahasa daerah, terutama di kalangan generasi muda di perkotaan, disebabkan oleh lebih dominan sikap dan perilaku penuturnya sendiri dibandingkan oleh dampak alokasi fungsi bahasa (terutama bahasa nasional dan daerah) yang dirumuskan dalam kebijakan bahasa nasional. Oleh karena itu, hendaknya strategi revitalisasi difokuskan pada masyarakat penuturnya. Perencanaan alternatif dan langkah-langkah konkret yang perlu diambil oleh Pemerintah dan masyarakat bahasa dalam rangka merevitalisasi bahasa Bali adalah sebagai berikut.

Usaha untuk merevitalisasi bahasa Bali harus dilakukan secara sengaja (*voluntary*) dan memberi kemudahan, fasilitas, dan kemungkinan melalui metode pewarisan bahasa antargenerasi di lingkungan keluarga dari orang tua kepada anak-anak. Dalam hal ini, para orang tua perlu didorong untuk menggunakan bahasa Bali dan menciptakan lingkungan dalam masyarakat dan anak-anak bisa menggunakan bahasa Bali, termasuk dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Ketergantungan (total) pada Pemerintah, dalam hal ini Pusat Bahasa atau balai bahasa, atau juga ketergantungan pada pemerintah daerah, perlu diubah ke arah swadaya masyarakat pewaris dan penutur bahasa Bali, sedangkan iklim dan fasilitasi disiapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam perencanaan bahasa Bali, perencanaan status (*status planning*) dan perencanaan korpus (*corpus planning*) perlu berjalan sejajar

dengan perencanaan sosial (*social planning*). Dalam perencanaan status, di samping status yang dimiliki sebagai sarana komunikasi, bahasa Bali perlu sekali diberikan beban wahana (*vehicular load*) yang lebih besar sehingga pemakaian bahasa Bali bisa merambah ranah di luar ranah budaya dan kegiatan komunikasi dalam keluarga. Jika bahasa Bali tetap hidup, tidak cukup hanya semakin banyaknya anak-anak dan orang dewasa mempelajari bahasa Bali. Lingkungan kebahasaan juga harus diciptakan sehingga bahasa Bali bisa digunakan secara eksklusif. Sangat ideal sekali kalau bisa memberikan bahasa Bali suatu prestise dengan menjadikan bahasa Bali secara gradual sebagai bahasa "gaul" di kalangan anak-anak dan remaja sehingga anak-anak yang belajar bahasa Bali akan terus menggunakan sepanjang masa remajanya sampai mereka menjadi orang tua yang nantinya mewariskannya kembali kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, loyalitas berbahasa (*language loyalty*) di kalangan masyarakat Bali akan makin kuat dan ini merupakan kunci tetap hidupnya bahasa Bali yang pada akhirnya memperkuat ketahanan budaya.

Dalam perencanaan korpus usaha pengembangan bahasa Bali hendaknya diarahkan kepada percepatan kesejajaran daya ungkap bahasa Bali dengan bahasa Indonesia bahkan dengan bahasa asing misalnya melalui penyerapan kosa kata Indonesia, bahasa daerah lain atau mungkin bahasa asing untuk mewadahi konsep kehidupan, iptek, dan tata kehidupan modern lainnya. Langkah ini harus pula didukung dengan gerakan penyadaran kepada masyarakat penutur bahasa Bali bahwa penyerapan unsur bahasa lain ke dalam bahasa ibu bukanlah masalah pencemaran bahasa, tetapi proses pemerayaan bahasa sehingga resistensi terhadap gejala bahasa yang alami dalam masyarakat multilingual ini menjadi berkurang kalau tidak bisa dihilangkan. Standardisasi bahasa Bali yang mengenal *unda-usuk* (*speech level*) perlu diarahkan pada pengedepanan pembakuan item leksikal atau ungkapan yang lebih netral atau bebas dari muatan stratifikasi sosial tradisional (seperti kasta) untuk menjadikan bahasa Bali lebih egaliter sesuai dengan kecenderungan pemakaiannya masa kini dan pergeseran masyarakat Bali ke arah yang lebih demokratis. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk membatasi atau menghindarkan penutur bahasa Bali untuk beralih bahasa yang diakibatkan oleh adanya *sor singgih* bahasa berupa ragam halus dan kasar dengan kaidah yang preskriptif dan membuat penutur generasi muda takut salah dan mengarah kepada penggunaan bahasa lain (Indonesia) pada ranah yang seharusnya dapat diwahanai oleh bahasa daerah.

Dalam perencanaan sosial, pemasyarakatan bahasa Bali perlu diarahkan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Bali, terutama di kalangan generasi muda, dan mendorong pewarisan bahasa Bali antargenerasi di lingkungan keluarga. Langkah lain yang perlu ditempuh adalah mempertahankan jalur agama, pendidikan, dan kebudayaan sebagai

jalur pengembangan bahasa Bali untuk ranah yang potensial dalam konsep kelangsungan hidup bahasa Bali. Di samping itu, dorongan dan bantuan perlu diupayakan untuk penerbitan media berbahasa daerah yang baru serta memberikan apresiasi kepada media massa, baik pemerintah maupun swasta (baik koran, majalah, radio maupun televisi), yang telah menyediakan kolom, waktu untuk mengisi acara bernuansa budaya daerah dan menyiarkan acara berbahasa Bali. Yang tidak kalah pentingnya adalah usaha yang terus-menerus mengampanyekan pemakaian bahasa daerah melalui hiburan dan pertunjukan kesenian tradisional yang merupakan kesenangan masyarakat luas di Bali atau institusi pemerintah yang menangani pembinaan dan pengembangan bahasa seperti balai bahasa serta institusi swasta seperti organisasi kemasyarakatan tradisional dan adat sampai institusi pendidikan informal seperti kursus bahasa daerah (Bali).¹⁰

Di samping keharmonisan antara perencanaan status dan korpus dengan perencanaan sosial, perlu usaha untuk meminimalkan konflik bahasa melalui ancangan multilingualisme simetris nondiskriminatif, yang bahasa dominannya (bahasa Indonesia) berfungsi atas dasar kesejajaran dengan bahasa Bali. Pemerintah Daerah harus, memanfaatkan momentum keterbukaan (reformasi dan otonomi daerah) untuk mengadakan evaluasi, penyesuaian, dan penetapan kebijakan baru mengenai perencanaan bahasa daerah melalui sinergi antara kaum intelektual daerah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari segi kebijakan bahasa nasional, seperti yang disarankan Purwo (2000:30), salah satu cara untuk mencegah kepunahan bahasa daerah adalah perbaikan kebijakan bahasa nasional melalui penghapusan cara penyuluhan dan pembinaan dari atas ke bawah (*top-down*) yang mengesankan terus-menerus mendesak/memaksakan pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan menghidupkan *kebhinneka-an* dengan mendudukan bahasa daerah sebagai harta karun bangsa Indonesia sama tinggi, setara dengan bahasa persatuan (bahasa Indonesia). Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam masyarakat penutur bahasa daerah yang memiliki *unda usuk* seperti bahasa Bali menghindarkan diri dari perilaku berbahasa yang diskriminatif untuk menghindarkan pemboikotan bahasa terselubung seperti kecenderungan penggunaan bahasa Indonesia karena lebih netral dan bebas dari nuansa kasta pada peristiwa

¹⁰ Mulai pertengahan tahun 2002 telah mengudara radio lokal bernama Radio Genta Suara Sakti Bali yang seluruh acaranya menggunakan bahasa Bali. Koran lokal *Denpasar Post* sejak 2001 telah menyelenggarakan "Gita Denpost Award" bagi para pencipta, penyanyi, produser, disain kulit kaset, dan penata musik lagu pop Bali untuk anak dan dewasa. Sejak bergulirnya reformasi dan otonomi daerah, TVRI telah banyak menyediakan waktu siaran bagi acara seni budaya dan sastra daerah Bali, bahkan sejak Mei 2002 telah beroperasi televisi lokal Bali TV yang memfokuskan siaran bernuansa Bali.

wicara antara partisipan yang berbeda status sosial tradisional (kasta) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan solidaritas.

Simpulan

Bahasa Bali sebagai bagian dari budaya, indeks budaya, dan simbolik budaya harus tetap dipertahankan kelestariannya sejajar dengan bahasa nasional. Meningkatnya wacana kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah yang telah ditandai secara awal oleh mulai merosotnya jumlah penutur, adanya persaingan bahasa (desakan bahasa Indonesia dan bahasa asing), dan semakin berkurangnya loyalitas penutur terhadap pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan sekaligus sebagai pendukung buaya Bali, usaha revitalisasi bahasa Bali perlu dilakukan untuk menjaga kelestariannya dan tetap kukuhnya budaya Bali.

Untuk mencapai hasil yang maksimal revitalisasi dan pelestarian bahasa Bali, hendaknya berlangsung melalui pewarisan antargenerasi di rumah oleh keluarga tidak dalam kebijakan Pemerintah. Peraturan dan keputusan dibuat Pemerintah hanya bisa memberikan lingkungan yang lebih bersahabat tetapi bukan pengganti bagi usaha lapisan bawah (*grassroots*) yang difokuskan pada menggunakan bahasa Bali di rumah-rumah dan pada setiap acara/even sosial kemasyarakatan.

Kesadaran/loyalitas berbahasa Bali merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkuat fungsi bahasa Bali sebagai lambang jati diri dan pendukung nilai-nilai luhur budaya daerah khususnya nilai-nilai religius.

Keberhasilan usaha revitalisasi, pengembangan, dan pelestarian bahasa Bali memerlukan pengorbanan, bantuan, dan kedisiplinan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. (Ed.), 2000. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa. Depdiknas
- Artha Adnyana, Ida Bagus. dkk. 1998. *Pemertahanan Bahasa Bali: Studi Kasus di Lingkungan Perumahan Monang-Maning, Kodya Denpasar*. Denpasar: Politeknik Negeri Bali.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 2001. "Beberapa Pemecahan dalam Pengembangan Bahasa Bali". Makalah pada Seminar di Ambang Kematian Bahasa Bali di Denpasar, 26 Mei 2001.
- Dardjowidjojo, Soenjono (2000), "Bahasa Asing sebagai Bahasa Pengantar dalam Sistem Pendidikan". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII

- Fishman, Joshua. 1985. "Language". Dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper. *The Social Science Encyclopedia*. London: Boston, and Henley.
- Gunarwan, Asim. (2000). "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia di dalam Era Globalisasi" Risalah Kongres Bahasa Indonesia VII (hal. 52-55)
- _____. 2002. "Indonesian and Balinese Among Native Speakers of Balinese: A Case of Stable Bilingualism?" Dalam *Bahasa dan Sastra*, Volume 20 Nomor 1. Edisi Januari – Maret 2002. Depdiknas: Pusat Bahasa (hal. 1-16).
- James, Kate (2002). "Cultural Implications for Translation". Dalam *Translation Journal and the Authors*, 2002, Volume 6, No. 4 October 2002; URL:<http://accurapid.com/journal/htm>.
- Jendra, I Wayan. 2002. "Kehidupan Bahasa Bali di Tengah Kehidupan Masyarakat Majemuk". Fakultas Sastra Unud dan Balai Bahasa Denpasar (hal. 47—52)
- Liliweri, Alo, Dr.M.S. 2001. *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Maha, Indra. 2003. "Faktor-Faktor Pendukung Ketidakbertahanan dalam Bahasa Jawa pada Masyarakat Jawa di Kampung Jawa Singaraja". *Aksara, Jurnal Bahasa dan Sastra*, Nomor 21 Tahun XIII Maret 2003 (hal. 68—82)
- Moerdiono. 1988. "Bahasa Indonesia dalam Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, 1--13. Jakarta: Depdikbud.
- Purwo, Bambang Kaswanti. 2000. "Bangkitnya Kebhinekaan Dunia Linguistik dan Pendidikan". Orasi Ilmiah pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Linguistik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada 10 November 2000. Jakarta: Mega Media Abadi.
- Quirk, Randolph *et. al.* 1972. *A Grammar of Contemporary English*. London: Longman
- Reyhner, Jon. 2000. *Some Basics of Indigenous Language Revitalization* Jon.Reyhner@nau.edu Copyright © 2000 Center for Excellence in Education Northern Arizona University
- Sumalia. 2003. "Pemakaian Bahasa antara Suami-Istri di dalam Rumah Tangga Masyarakat Kampung Islam Kecicang Kabupaten

Karangasem". *Aksara, Jurnal Bahasa dan Sastra*, Nomor 21 Tahun XIII Maret 2003 (hal. 109—121)

Sutjaja, I Gst. Made. 1995. "Foreign Language Situation in Bali". Makalah Seminar on Business English and TOEIC and Workshop on Communicative English for Small Business in Bali, 31 Juli - 1 Agustus 1995.

Wahab, Abdul. 1995. "Cerminan Budaya dalam Bahasa: Kasus Retorika Indonesia". Dalam Abdul Wahab *Isu Linguistik: Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Surabaya: Airlangga University Press (hlm. 37—56).

LAPORAN SIDANG

Hari, tanggal	: Kamis, 16 Oktober 2003
Judul Makalah	: 1. Masa Depan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah 2. Revitalisasi Bahasa Daerah (Bali) di Tengah Persaingan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya
Penyaji	: 1. Abdul wahab 2. Ida Bagus Putra Yadnya
Pemandu	: Gufron Ali Ibrahim
Pencatat	: 1. Junaiyah 2. I Wayan Budiarta

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Rahayu Prihatini (Universitas Diponegoro, Semarang)
Kuantitas dan kualitas pemakaian bahasa daerah menurun barangkali berkaitan dengan anjuran Pusat Bahasa pada masa lalu, yaitu "Gunakan Bahasa Indonesia dengan Baik dan Benar," serta anjuran agar bahasa daerah diajarkan dari TK sampai kelas tiga, kemudian baru bahasa Indonesia. Bahasa daerah memang perlu digunakan di lingkungan rumah tangga, tetapi banyak orang tua yang tidak berbahasa daerah dengan anak-anaknya. Soal konflik yang Bapak disampaikan tadi tidak terjadi di daerah-daerah itu. Balai Bahasa itu meneliti dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah.
2. **Pertanyaan:** Anshari (Universitas Negeri Makassar)
Dalam banyak hal pendapat Pak Wahab benar. Barangkali kita harus mengubah paradigma, yakni dari yang selama ini bahasa daerah hanya menjadi alat seharusnya menjadi tujuan. Egomonis harus ditepis agar pihak minoritas memiliki kesempatan yang sama dengan yang lain dan pihak mayoritas harus ikhlas memberikan kesempatan yang sama itu. Demikian pandangan saya!
3. **Pertanyaan:** Titik (IKIP Singaraja)
Dari tadi kita pesimistis bahwa bahasa daerah akan punah. Saya ingin berbagi pengalaman empirik yang terjadi di Singaraja. Di sana sudah ada berbagai usaha untuk menuliskan aksara Bali, misalnya, pada papan nama atau papan petunjuk arah. Siaran radio swasta, misalnya, memiliki acara yang menggunakan bahasa Bali. Orang luar yang akan ikut dalam acara itu harus berbahasa Bali. Demikian juga ketika

bertelepon. Di Singaraja dilakukan berbagai lomba berbahasa Bali, seperti dalam lomba bercerita, lomba menjadi pewara, atau menjadi penyiar.

4. **Pertanyaan:** Ivan Adilla (Universitas Andalas, Padang)

Saya ingin berbagi pengalaman. Bahasa Minangkabau tidak memiliki aksara. Di antara sesama orang Minang tuturan berlangsung dalam bahasa lisan. Akan tetapi, jika tuturan itu dituliskan, pada umumnya digunakan huruf Latin karena bahasa Minang tidak memiliki aksara sendiri.

Jawaban: Abdul Wahab

Saya tidak mengatakan bahwa bahasa daerah tertentu akan punah. Yang dikhawatirkan punah adalah aksara daerah. Habitat berbahasa daerah hendaknya dijaga dengan baik. Caranya, antara lain:

- a) menganjurkan para orang tua untuk memulai menggunakan bahasa daerah di lingkungan rumah tangga;
- b) mencetak guru-guru bahasa daerah yang bermutu;
- c) memberikan penghargaan yang wajar terhadap mereka yang selalu aktif menggunakan bahasa daerah.

Jawaban: Ida Bagus Putra Yadnya

Saya yakin perumusan pemakaian bahasa daerah (khususnya bahasa Bali), terutama bukan karena persaingan antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing yang amat kuat di Bali, melainkan juga karena sikap penutur. Oleh karena itu, perhatian tentang bahasa Bali harus dimulai dari rumah tangga. Sekarang acara di TV Denpasar ada yang memakai bahasa Bali, bahkan ada yang menayangkan sekitar 75% lebih acara tentang kebudayaan Bali. Jadi, kekhawatiran bahwa bahasa Bali akan punah tidak benar. Saya optimis bahwa aksara Bali tidak akan punah karena bahasa Bali sudah mempunyai program komputerisasi.

MENGAJAI ASPEK PROSODIK BAHASA(-BAHASA) INDONESIA

Sugiyono

Pusat Bahasa, Depdiknas RI

Pengantar

Berbicara tentang bahasa di Indonesia dalam hal jumlah, kita boleh menepuk dada. Selain kaya dengan sumber daya alam, juga betapa kayanya negeri ini dengan bahasa yang masing-masing memiliki kekhasan. Dalam catatan terakhir, tidak kurang dari 500-an bahasa tersebar di wilayah Indonesia. Meskipun jumlah itu masih perlu diverifikasi dengan kajian dialektologi yang memadai--peta bahasa-bahasa di Indonesia sedang disusun--tampaknya angka itu cukuplah menjadi jaminan bahwa penelitian bahasa dan sastra di Indonesia tidak akan pernah kehabisan objek untuk dikaji.

Akan tetapi, berbicara tentang bahasa dari segi upaya pengkajiannya secara ilmiah, kita masih harus bekerja keras untuk bisa bangga. Penelitian kebahasaan di Indonesia, untuk tujuan apa pun, masih merupakan tantangan yang tidak mudah diselesaikan. Amat banyak bahasa yang belum diteliti selain juga amat banyak aspek kebahasaan yang belum terjamah. Tahun 1999 tercatat bahwa hingga 1996, Pusat Bahasa menerbitkan tidak kurang dari 157 buah terbitan berupa laporan hasil penelitian terhadap sekitar 160 bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (Effendi, 1999: 115). Jumlah kajian dan jumlah bahasa yang dikaji tentu akan lebih dari jumlah itu apabila karya tulis mahasiswa dan kajian-kajian peneliti di luar Pusat Bahasa juga dapat dihitung.

Berapa pun jumlah kajian yang telah dilakukan terhadap bahasa-bahasa di Indonesia, dapat dipastikan bahwa kajian-kajian itu belum mencakupi seluruh aspek kajian bahasa secara proporsional. Dengan berbagai alasan, kajian terhadap bahasa lisan dari aspek fonetik, amat "sangat" kurang. Disadari atau tidak, keadaan seperti itu tidaklah menguntungkan, baik bagi upaya kodifikasi bahasa-bahasa di Indonesia yang umumnya berpangkal pada tradisi lisan¹ maupun menguntungkan perkembangan pengajaran bahasa dan linguistik di Indonesia. Kehilangan besar akan dapat dirasakan karena perubahan kualitas akustik bahasa dari generasi ke generasi.

¹ Dari beratus-ratus bahasa yang ada di Indonesia, hanya 11 bahasa yang mempunyai sistem aksara: bahasa Bali, Jawa, Sunda, Bugis (Makassar), Karo, Mandailing, Toba, Rejang, Kerinci, Lampung, dan Melayu. Itu pun sebagian besar--bahkan mungkin semua--fungsi aksara itu sudah digantikan oleh aksara Latin.

Kajian terhadap Prosodik Bahasa-Bahasa Indonesia

Kajian prosodi di Indonesia tidak tumbuh sebesar di Eropa atau di Amerika. Hingga tahun 1990-an, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia baru bahasa Indonesia yang dikaji dari perspektif prosodi yang umumnya dilakukan oleh peneliti Eropa atau oleh linguist Indonesia dengan bantuan peneliti Barat. Di antara kajian itu, dapat disebutkan kajian linguist Belanda seperti Ebing (1992, 1994, 1997), Ode (1994), van Zanten (1994), Ebing dan van Heuven (1997), van Heuven dan van Zanten (1997), serta kajian Halim (1969), dan Laksman (1991).

Kajian prosodik terhadap bahasa-bahasa Indonesia ini kembali di-
giatkan pada era 2000-an. Pada awal periode itu, muncul Remisjen (2001) yang mengkaji prosodi kata bahasa-bahasa Raja Ampat (Maluku); Sugiyono (2002, 2003) yang mengkaji intonasi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia; dan Rahyono (2003) mengkaji intonasi bahasa Jawa ragam Keraton Yogyakarta. Selain itu, beberapa kajian prosodik juga sedang dilakukan terhadap Batak dan Melayu Betawi, dan yang lebih menggembirakan adalah bahwa Pusat Bahasa mulai mendesain serangkaian penelitian terhadap prosodi bahasa Indonesia secara menyeluruh yang akan bermuara pada penulisan tata bahasa Indonesia ragam lisan.

Akan tetapi, sesungguhnya perbincangan dan kajian prosodi bahasa Indonesia sebenarnya telah dimulai bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Halim (1969) mencatat bahwa pada tahun 1812 William Marsden telah mengawali perbincangan tentang tekanan kata bahasa Indonesia dalam bukunya yang berjudul *A Grammar of the Malayan Language*. Setelah itu, pembicaraan tentang prosodi bahasa Indonesia dalam arti yang terbatas itu juga ditemukan dalam buku Adam dan Butler (1943), Kahler (1948), dan Verguin (1955). Pembicaraan tentang prosodi kemudian dapat ditemukan dalam Alisjahbana (1949), Pane (1950), Fokker (1960), Halim (1969), Samsuri (1971), Ebing (1997), sedikit dalam Suparno (1993), dan juga *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (1998).

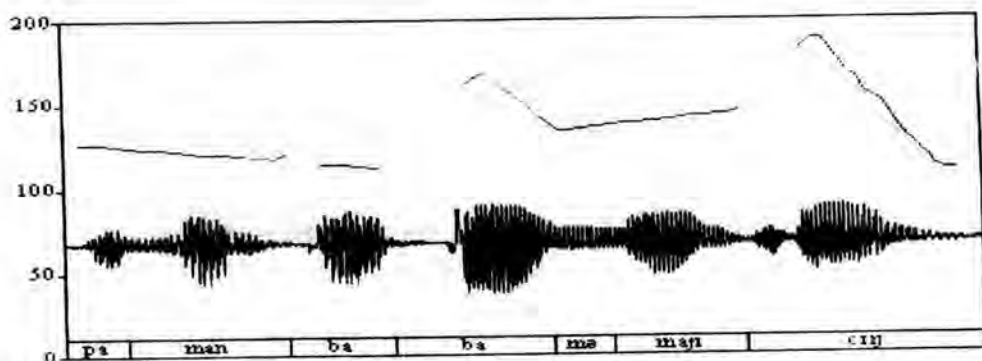
Kajian prosodi di Indonesia umumnya dilakukan dengan pendekatan impresionistik. Dalam arti yang amat terbatas, kajian Pane (1950) dapat dianggap sebagai pangkal tolak kajian intonasi bahasa Indonesia yang menggunakan pendekatan instrumental. Dalam buku *Mentjari Sendi Baru Bahasa Indonesia*, Pane dengan bantuan musikus terkenal Indonesia—Kusbini—mencoba mendeskripsi intonasi bahasa Indonesia dengan membandingkan tinggi rendah nada dalam tuturan dengan nada-nada Piano. Meskipun demikian, kajian Pane masih tetap berbasis impresionistik karena deskripsinya masih mengandalkan impresi atau persepsi atas nada-nada dalam tuturan itu. Hingga batas tertentu, kajian Halim (1969) mengawali kajian intonasi bahasa Indonesia dengan alat ukur yang akurat yang disebut mingograf. Akan tetapi, karena menggunakan teknik notasi Pike (1946) yang hanya mengenal lima tingkat tinggi nada, hasil pengukuran yang akurat itu harus

kembali mengalami simplifikasi. Apa pun hasilnya, terbukti kajian Halim itulah yang amat berpengaruh terhadap setiap pembicaraan tentang intonasi bahasa Indonesia, bahkan juga bahasa Melayu pada umumnya.

Bagaimanapun juga, masih banyak rumpang hasil kajian terhadap prosodi bahasa Indonesia yang dicapai setakat ini. Dalam hal intonasi, misalnya, lambang-lambang visual dan notasi yang digunakan menunjukkan karakteristik lagu kalimat bahasa Indonesia yang terlalu umum.

1. Saya.....memetik mangga. (Alisjahbana, 1949)
2.  (Pané, 1950)
Di a gu ru.
3. Ruméh mahél. (Halim, 1969)
2 33_r / 2 21_r#
4. Orang itu membaca bukunya. (Samsuri, 1971)
#2 2 2 3 2 2 2 2 3 1#

Meskipun notasi numerik sudah digunakan, pertanyaan berapa sesungguhnya tinggi nada yang direpresentasikan oleh nada-nada itu masih menjadi masalah. Melalui kajian eksperimental, tampaknya hasil deskripsi intonasi terdahulu dapat secara lebih akurat dideskripsikan. Dalam kontur intonasi berikut, selain dapat dikenali pola alir nada juga dapat diketahui secara pasti frekuensi fundamental nada yang membentuk kontur itu.



Gambar 1
Kontur Intonasi Deklaratif Bahasa Indonesia

Dengan mengonversikan frekuensi fundamental dari satuan Hz menjadi satuan semiton,² bahkan tinggi nada di dalam kontur itu dapat pula dinotasikan seperti dalam skala musik. Dalam deskripsi kontur seperti yang tampak pada gambar di atas posisi nada dalam tuturan bahkan dapat dilacak hingga satuan milidetik.

Perspektif Kajian Prosodi

Teori tuturan *hypo-hyper* yang dikembangkan Lindblom (1990), yang mengemukakan bahwa orang yang berbicara cenderung menyampaikan ciri akustis seminimal mungkin, sementara orang yang mempersepsi tuturan itu cenderung menuntut ciri akustis sebanyak-banyaknya. Kecenderungan itu disebut juga kecenderungan seperti itu sebagai gejala *over-to under-articulation* atau disebut juga sebagai *speech economy* atau *low-cost and high-cost production behaviour* (Farnetani, 1999:381) Dalam teori itu, orientasi pembicara dan pendengar dalam komunikasi ini pada dasarnya sama, yaitu ketersampaian pesan meskipun dengan perspektif yang berbeda. Bagaimanapun juga, makin lengkap ciri akustik yang disertakan pada sebuah tuturan, makin mudah tuturan itu dipersepsi maknanya secara benar. Dari dua perspektif itu, setiap ciri prosodik sebuah tuturan mempunyai ambang yang berbeda pula.

Kerangka pikir dalam teori Lindblom itu tampaknya sejalan dengan model semiotika Buhler (1934) yang di dalamnya mengungkapkan ikatan sebab antara benda dan dunia konseptual, dan hubungan di antara pembicara dan pendengarnya. Aspek semiotis ungkapan (*Ausdruck*), rangsangan

² Semiton adalah satuan beda tinggi F_0 seperti beda nada antara tuts piano yang satu ke tuts berikutnya. Beda F_a antara nada E dan F atau antilra nada C dan $^{\#}C$ adalah satu semiton.

(*Appel*), dan gambaran (*Darstellung*) menandai hubungan antara pembicara, pendengar, dan objek melalui medium tanda bahasa yang menjadi inti proses semiotis (baca Baldinger, 1980:231). Pemaknaan tanda-tanda semiotis itu haruslah dilakukan dalam proses interaksi tanpa melepaskan tanda itu dari konteks interaksi. Makna sebuah tanda bahasa termasuk di dalamnya konfigurasi nada di dalam intonasi--bukan hanya ditentukan oleh hubungan tanda itu dengan dunia konseptualnya, melainkan juga amatlah ditentukan oleh persepsi penutur dan pendengar terhadap tanda itu.

Kajian terhadap ciri akustik hendaknya dilakukan dari dua perspektif, yaitu perspektif produksi yang meneliti ciri akustik tuturan ketika tuturan itu diucapkan dan perspektif persepsi yang meneliti ciri akustik tuturan ketika tuturan dipahami oleh pendengar. Dalam kajian persepsi diungkapkan relasi stimulus--respons antara tuturan dengan kesadaran psikologis orang yang mempersepsi tuturan itu. Dengan kata lain, kajian ini mengaitkan ciri akustik tuturan dengan respon perseptual pendengar atas tuturan itu. Kajian seperti ini biasa dilakukan dalam persepsi tutur (*speech perception*) yang merupakan bagian dari psikolinguistik dan psikoakustik yang merupakan bagian psikofisik. Akan tetapi, sebelum kajian persepsi itu, penelitian ini diawali dengan pendeskripsian ciri akustik tuturan dengan pendekatan fonetik eksperimental.

a. Fonetik Eksperimental

Dalam kerangka fonetik, persepsi tutur biasanya merupakan upaya pengenalan dan identifikasi segmen-segmen tunggal. Kajian persepsi tutur difokuskan ke kemampuan seseorang dengan pendengaran normal untuk mengidentifikasi dan membedakan bunyi-bunyi tunggal atau fonem bahasa aslinya. Akan tetapi, selain persepsi terhadap segmen tunggal itu yang disebut persepsi fonetik (*phonetic perception*), juga didapati persepsi dalam tataran kata yang berkenaan dengan proses akses leksikal (*lexical access*) atau pengenalan kata (*spoken word recognition*) (Hayward, 2000:105). Untuk satuan bahasa yang lebih luas, juga banyak didapati persepsi tutur yang mengambil kalimat sebagai stimulus. Beberapa kajian fonetik eksperimental seperti yang dilakukan Ebing (1994), Maria dan Terken (1994), Gossenhoven *et. al* (1997), Gussenhoven dan Chen (2000), serta van Heuven dan Haan (2000, 2(01) menggunakan ciri prosodi sebagai fokus stimulus. Dengan fokus itu, kajian persepsi tutur biasanya ingin menetapkan pengaruh manipulasi ciri prosodi terhadap pengertian subjek.

b. Persepsi Tutur dalam Psikolinguistik

Ada beberapa teori yang dikembangkan untuk mengkaji persepsi tutur dalam psikolinguistik. Selain teori-teori yang bertolak pada prinsip *bottom up processing* dan *top down processing* (baca Yen Komshian, 1993:120; Caron, 1992:28), dalam persepsi tutur juga dikenal teori yang

berbasis pada prinsip interaktif atau *connectionist model* (Caron, 1942:40). Basis teori yang terakhir itu adalah gabungan dari dua basis teori sebelumnya.

Dari berbagai teori yang dikembangkan dengan model koneksionis atau interaktif, teori jejak (*trace theory*) lebih tepat untuk kajian ini. Teori yang dikembangkan oleh Elman dan McClelland (1986) dengan inspirasi dari model Marslen-Wilson (baca Yeni-Komshian, 1993:126; Caron, 1992:57) ini beranalogi pada model jaringan syaraf dianggap sebagai sistem pemrosesan yang disebut *simpul (nodes)*. Simpul-simpul itu terbagi dalam beberapa tataran yang merepresentasikan tingkatan seperti bunyi dan kata. Setiap tataran berada dalam suatu jaringan simpul dan masing-masing berfungsi sebagai detektor ciri fonetis dan leksikal masukan akustis yang diterima sistem itu. Yang dijadikan dasar pikir oleh teori ini tampaknya adalah sistem ingatan yang disebut pemeliharaan jejak (*trace maintenance*), yaitu bahwa setiap stimulus bunyi selalu meninggalkan jejak dalam ingatan sebelum stimulus berikutnya muncul.

Setiap simpul itu mempunyai tingkat nonaktif (*resting level*), ambang (*threshold*), dan tingkat aktif (*activation level*) yang masing-masing menandai derajat pada tataran mana intensitas masukan akustis tertentu berposisi. Jika ada stimulus yang mengonfirmasi bahwa masukan dapat diterima oleh simpul tertentu, derajat aktivasi simpul itu naik hingga melampaui ambangnya. Sebaliknya, jika tidak ada konfirmasi, derajat aktivasi akan turun melampaui ambangnya hingga ke tingkat nonaktif.

Simpul-simpul dalam sistem ini secara ketat terhubung satu sama lain dan ketika simpul tertentu mencapai ambangnya, boleh jadi hal itu akan memengaruhi simpul-simpul lain yang berhubungan. Jadi, sebuah simpul yang mencapai ambangnya akan menaikkan aktivasi beberapa simpul lain yang berhubungan sekaligus juga akan menekan aktivasi simpul-simpul yang lain. Hubungan antara simpul di tataran yang satu dan simpul tataran yang lain bersifat saling dorong (*excitatory*), sedangkan hubungan antarsimpul dalam satu tataran bersifat saling tahan (*inhibitory*). Jadi, simpul fonem tertentu mungkin mendorong aktivasi simpul kata dan simpul kata, sekaligus akan mengaktifkan simpul fonem lain. Misalnya, bunyi [b] dan [o] akan mendorong aktivasi simpul kata-kata yang dimulai oleh suku [bo] seperti *bola*, *botak*, dan *bokap*, sekaligus menekan aktivasi simpul kata yang dimulai oleh suku [bi], [ba], [be], [bu] sehingga kata-kata seperti *bidak*, *badut*, *bedak*, dan *budak* akan diletakkan dalam derajat nonaktif. Karena bersifat saling menahan, probabilitas bunyi yang telah diidentifikasi sebagai bunyi tertentu seperti [b] diasumsikan telah menahan aktivasi simpul bunyi-bunyi lain seperti [d] atau [p]. Dalam bahasa Inggris, misalnya, simpul fonem [k] dan [æ] mengaktifkan simpul yang berkorespondensi dengan kata *cat* 'kucing' yang pada gilirannya nanti mendorong simpul itu untuk fonem [k], [æ], dan [t]. Bersamaan dengan itu,

aktivasi simpul [æ] menahan simpul [A] dan karena itu juga menghambat aktivasi kata *cut* 'memotong' dan *cup* 'cangkir'. Yang menarik dari model ini adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi kata bahkan meski *input*-nya cacat atau tidak lengkap. Aktivasi simpul-simpul tertentu dapat digunakan pendengar untuk mengakses simpul leksikal yang ciri simpul bunyinya telah diperoleh.

c. Psikoakustik

Kajian serupa itu dalam bidang fisika biasanya dilakukan dengan ancangan psikoakustik yang pada dekade terakhir ini juga banyak diterapkan dalam linguistik, terutama dalam perlinguistik di Eropa. Psikoakustik adalah bagian dari psikofisik, yaitu Hmu yang mengkaji hubungan antara gejala fisik dengan kesadaran subjektif manusia. Dalam kaitan dua hal itu, gejala fisik berlaku sebagai stimulus, sedangkan kesadaran subjektif manusia berlaku sebagai respon. Secara terpisah, pengukuran dan identifikasi ciri gejala fisik dilakukan oleh fisika, sedangkan pengukuran dan identifikasi kesadaran subjektif manusia dilakukan oleh psikologi. Jika psikofisik mengkaji pengaruh psikologis semua maujud fisik, seperti cahaya, panas, musik, dan juga suara, psikoakustik mengkaji pengaruh maujud fisika yang berupa bunyi akustik terhadap kesadaran psikologis pendengarnya (baca Small, 1973:343).

Kajian psikoakustik meletakkan proses pendengaran normal (*normal hearing process*) sebagai dasar pijakan atau titik tolak. Hal terpenting dalam kajian psikoakustik adalah ambang mutlak (*absolut threshold*) dan kepekaan mutlak (*absolut sensitivity*). Ambang mutlak--yang sering disebut *ambang saja*--merujuk ke nilai stimulus yang jika dilampaui akan memicu respons positif dan sebaliknya jika tidak dilampaui akan memicu respons negatif (Small, 1973:348). Jadi, ambang merepresentasikan nilai unik dari serangkaian stimulus sebagai sebuah kontinum. Sayangnya, ambang itu seringkali berubah-ubah meski stimulus yang digunakan sama dan subjek yang mendengarkan pun sama. Akibatnya, ambang tidak benar-benar bisa berada pada satu titik nilai unik seperti yang dikonsepkan.

Selain ambang dan kepekaan mutlak, dalam psikoakustik juga dicari ambang pembeda (*differential threshold*) dan kepekaan pembeda (*differential sensitivity*). Ambang pembeda adalah ukuran kemampuan pendengar untuk membedakan perubahan terkecil dalam stimulus (baca Small, 1973:373). Sementara itu, kepekaan pembeda adalah ukuran perubahan terkecil yang menentukan nilai ambang. Jika perubahan nilai stimulus yang amat kecil sudah berpengaruh terhadap keberterimaan ambang, dapat dikatakan kepekaan pendengar amat tinggi. Sebaliknya, jika perubahan nilai stimulus yang diperlukan untuk mengubah keberterimaan ambang besar, tingkat kepekaan pendengar amat rendah.

Aspek Kajian Prosodi

a. Segmental dan Suprasegmental

Selain unsur leksikal yang kemudian dirangkai untuk sebuah struktur, sebuah tuturan juga mempunyai unsur lain yang mengkarakterisasi struktur leksikal sehubungan dengan bagaimana struktur itu harus dituturkan. Dari kacamata fonetik, unsur yang pertama disebut unsur segmental, dan unsur yang mengkarakterisasi unsur segmental itu disebut unsur suprasegmental atau prosodi. Unsur segmental berkaitan dengan bunyi-bunyi tunggal, sedangkan unsur suprasegmental berkaitan dengan ciri akustik lain yang menyertai bunyi-bunyi tunggal itu. Setiap bunyi segmental mempunyai durasi, frekuensi, dan intensitas yang ketiganya biasa disebut durasi intrinsik, nada intrinsik, dan intensitas intrinsik. Setiap bunyi vokal mempunyai ciri akustik yang disebut formant--biasanya dibedakan atas formant satu (F_1) dan formant dua (F_2)--yang ditentukan oleh bentuk dan ukuran rongga mulut, rongga faring, dan dalam beberapa hal juga rongga hidung (Hayward, 2000:54).

Unsur suprasegmental merupakan sisi lain ciri akustik yang melengkapi unsur segmental. Antara ciri segmental dan suprasegmental dibedakan oleh fakta bahwa ciri suprasegmental itu ditetapkan dengan perbandingan ciri segmen yang satu dengan ciri segmen yang lainnya di dalam sekuen segmen, sementara ciri segmental dapat ditetapkan tanpa melihat kaitan segmen yang satu dengan segmen yang lain. Dengan kata lain, kajian suprasegmental akan melihat ciri segmen secara sintagmatik, sedangkan kajian segmental akan melihat segmen-segmen secara paradigmatis (baca Lehiste, 1970:2). Dalam hal itu yang dipentingkan adalah melihat interelasi segmen yang satu dengan segmen lainnya, baik yang mendahului maupun yang mengikuti satuan itu. Karena hubungan sintagmatik itulah posisi suatu segmen di awal (*initial*), tengah (*medial*), dan akhir (*final*) menjadi amat penting. Jadi, analisis suprasegmental memandang objeknya sebagai satu deretan segmen sebagai kontinum yang membentang mengikuti struktur sintaktis.

b. Prosodi Kata dan Prosodi Kalimat

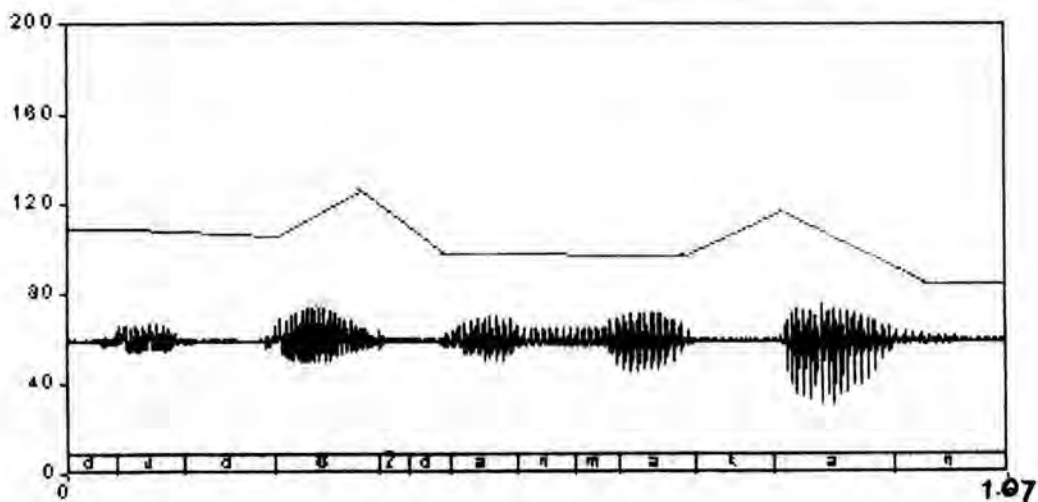
Kajian terhadap ciri prosodi sebuah bahasa dibedakan atas domain kajiannya. Setakat ini, domain itu dibedakan atas kata dan kalimat. Prosodi kata akan mengkaji aspek-aspek suprasegmental seperti tekanan kata, sedangkan prosodi kalimat atau prosodi posleksikal mengkaji struktur melodik dan struktur temporal sebuah tuturan. Akan tetapi, kajian prosodi dalam domain yang lebih luas, yaitu wacana, juga mulai dilakukan orang. Termasuk dalam kajian yang terakhir itu adalah kajian tentang *turn-taking* dalam dialog. Hasil kajian tentang *turn-taking* itu akan memberikan petunjuk prosodik kapan seorang mitra tutur boleh mengambil gilirannya untuk berbicara.

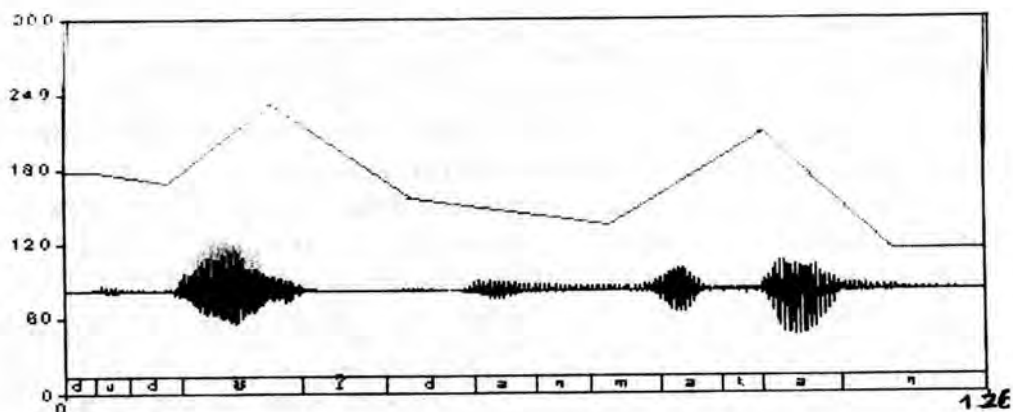
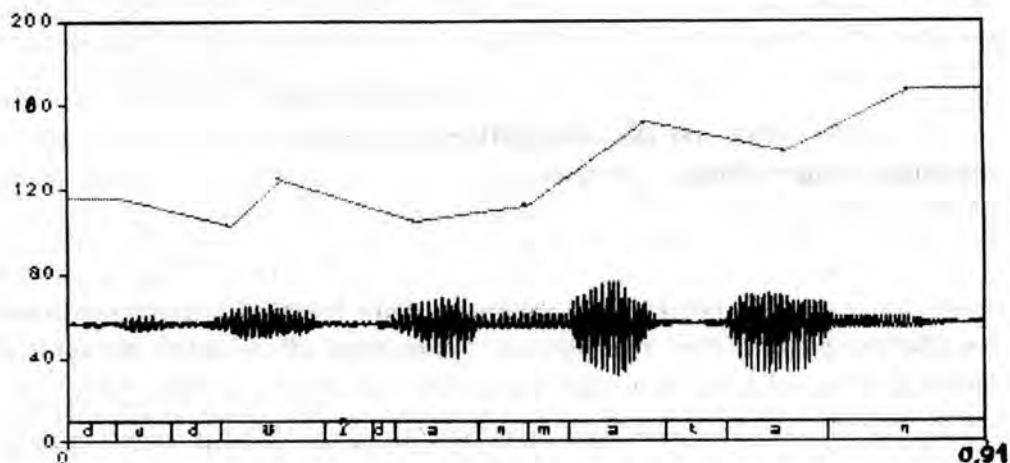
c. Struktur Melodik dan Struktur Temporal

Dalam pembicaraan ciri prosodik tuturan selalu dipisahkan antara struktur melodik dengan ritme atau struktur temporal (van Heuven, 1994:3; Nootboom, 1999:641). Istilah struktur melodik—yang juga dikenal sebagai *intonasi*—digunakan untuk menyebut seperangkat kaidah untuk mengkarakterisasi variasi nada yang melapisi sebuah tuturan dalam bahasa tertentu, sedangkan struktur temporal adalah seperangkat aturan yang menentukan pola durasi dalam tuturan. Batasan ini sedikit berbeda dengan yang diberikan oleh Nootboom (1999:641) yang menyebut ciri prosodik itu sebagai ritme tuturan yang diberi pengertian sebagai aspek durasi tuturan yang dikendalikan penutur (*speaker-controlled aspect of speech timing*).

Peran Ciri Prosodik

Struktur leksikal dan aspek segmental tuturan dalam contoh berikut sama, tetapi aspek suprasegmentalnya membuat makna tuturan itu berbeda. Pola melodik ketiga tuturan seperti tampak dalam gambar berikut menampilkan perbedaan yang amat jelas atas satu struktur leksikal, yaitu *duduk dan makan*. Tuturan pertama adalah tuturan bermodus deklaratif sebagai jawaban atas pertanyaan, misalnya, *Apa yang dilakukannya?*; tuturan kedua bermodus interogatif ekoik yang mengulang kalimat deklaratif, sedangkan tuturan yang ketiga merupakan tuturan perintah agar seseorang duduk dan makan.





Gambar 2
Kontur Melodik Deklaratif, Interogatif, dan Imperatif

Perbedaan yang jelas dapat dilihat pada julat nada yang menampakkan kecenderungan bahwa julat nada tuturan deklaratif lebih kecil daripada julat nada tuturan interogatif, dan kedua-duanya lebih kecil daripada julat nada tuturan imperatif. Selain itu, ekskursi puncak nada pada kontur melodik tuturan imperatif tampak lebih besar dibandingkan ekskursi puncak nada dalam dua tipe tuturan yang lain. Perbedaan yang juga tampak jelas adalah kecenderungan arah garis dasar (*baseline*) kontur yang cenderung turun pada kontur deklaratif dan imperatif, tetapi cenderung naik pada kontur interogatif. Akibatnya, nada final deklaratif dan imperatif berada di bawah nada dasar, sedangkan nada final interogatif berada di atas nada dasar.

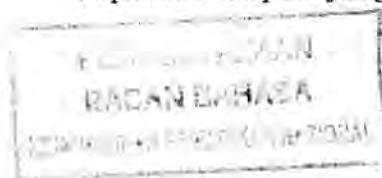
Kecenderungan lebih besarnya julat nada interogatif dibandingkan julat nada dan kecenderungan lebih tingginya nada final interogatif dibandingkan nada final deklaratif juga ditemukan dalam bahasa Melayu lain (Sugiyono, 2003:147; 156).

Collier (1993) mengatakan bahwa ciri prosodi mempunyai fungsi demarkasi, yaitu sebagai pewatas dalam tuturan. Sebagai pewatas antar-kalimat, prosodi menandai kohesi leksikal dalam satu saluan informasi yang ditonjolkan di antara satuan-satuan lain. Dalam hal ini pembatas prosodik berfungsi sebagai penekanan sehingga makna tuturan menjadi lebih transparan bagi pendengar. Pembatas inilah yang disebut *perceptual boundary strength* (PBS). Prosodi juga dapat digunakan untuk memarkahi batas antarsatuan informasi, seperti pewatas antarkata atau antarfrasa yang dapat dipahami oleh pendengar. Pada tataran wacana, pewatas itu memiliki ekuivalensi dengan pewatas lain dan pada tataran yang lebih tinggi daripada struktur wacana, prosodi menjadi pewatas, misalnya, untuk pergantian topik dalam monolog dan pemarkah *turn-taking* dalam percakapan. Van Heuven (1994:3) memerinci fungsi ciri prosodik atas tiga macam, yaitu (1) memberi pewatas domain atau bagian tuturan (misalnya, paragraf, kalimat, atau frasa); (2) memberi sifat tertentu pada intonasi yang ditampilkan dalam domain (misalnya, sebagai pernyataan atau pertanyaan); dan (3) menonjolkan konstituen tertentu (van Heuven, 1994:3).

Yang juga tidak dapat diingkari adalah bahwa setiap pembicara dapat menghasilkan komposisi nada yang bervariasi, baik karena organ-organ tuturnya maupun karena terinterferensi oleh sistem prosodi bahasa-bahasa lain yang juga dikuasai oleh seorang penutur. Akan tetapi, interaksi antara pembicara dan pendengar tetap saja komunikatif dalam ciri prosodik yang bervariasi itu walaupun tetap saja ada celah-celah yang dapat memicu ketaksaan. Kenyataan itu mengisyaratkan bahwa meskipun telah ada batasan atau pola prosodik yang harus dipatuhi dalam merealisasikan sebuah tuturan, bagaimanapun ciri prosodi mempunyai toleransi atas perbedaan yang beragam pula. Apabila ciri prosodi telah melampaui batasnya, ketaksaan atau bahkan ketakbermaknaan boleh jadi akan muncul.

Penutup

Baik untuk tujuan kodifikasi, untuk pengembangan pengajaran bahasa, maupun untuk pengembangan linguistik di Indonesia, kajian terhadap ciri akustik, terutama prosodi bahasa-bahasa di Indonesia perlu segera dilakukan. Alasan pertama mengapa kajian itu segera dilakukan adalah kenyataan bahwa mengingat pergantian generasi secara alami besar kemungkinan akan membawa perbedaan kualitas akustik suatu bahasa. Kajian bahasa lisan mendesak untuk dilakukan karena pengkajiannya secara diakronis tidak mungkin dilakukan. Kajian kodifikatif tentu akan mendapatkan korpus yang tidak tepat apabila kualitas akustik korpus yang



dikajinya telah mengalami pergeseran.

Kedua, kajian bahasa yang setakat ini dilakukan barulah salah satu sisi bahasa yang tidak merupakan bagian pokok. Karena bahasa-bahasa di Indonesia berakar pada tradisi kelisanan, aspek-aspek akustik memegang peranan penting dalam bahasa-bahasa itu. Sayangnya, dengan berbagai alasan, justru aspek yang begitu penting itulah yang tidak tertangani secara baik oleh linguis-linguis Indonesia. Kajian linguistik di Indonesia setakat ini baru menangani fenomena permukaan dari bahasa-bahasa di Indonesia.

Kajian yang tidak sekadar permukaan itu harus mengangkat ciri akustik, baik segmental maupun suprasegmental, baik pada tataran prosodi kata maupun prosodi kalimat, baik dengan perspektif produksi maupun persepsi. Perihal bagaimana kajian seperti itu harus dilakukan, tentu saja kajian impresionistik sudah tidak tepat lagi. Dengan perangkat kajian fonetik akustik yang kian sederhana, pengkajian dengan pendekatan instrumental semestinya tidak dihindari lagi.

PUSTAKA ACUAN

- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1983 (1949). *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-44. Jakarta: Dian Rakyat.
- Alwi, Hasan; Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Moeliono. 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Baldinger, Kurt. 1980. *Semantics Theory: Toward Modern Semantics*. Oxford: Basil Blackwell.
- Caron, Jean. 1992. *An Introduction to Psycholinguistics*. Diterjemahkan oleh Pownal, Tim dari *Pnecis de psycholinguistique* (1984). New York: Harvester.
- Collier, R. 1993. "On the Communicative Function of Prosody: Some Experiment". Dalam *IPO Annual Progress Report 28*, 1993:67-- 75.
- Ebing, Ewald. 1997. *Form and Function of Pitch Movements in Indonesian*. Leiden: Research School CNWS.
- Effendi, S. 1999. "Penelitian Bahasa dan Sastra Daerah". Dalam Ayip Rosidi, (Ed.). 1999. *Bahasa Nusantara: Suatu Pemetaan Awal*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

- Farnetani, Edda. 1999. "Coarticulation and Connected Speech Processes". Dalam Hardcastle, William J. and John Laver. 1999. *The Handbook of Phonetics Sciences*. Oxford: Basil Blackwell.
- Halim, Amran. 1974 (1969). *Intonation in Relation to Syntax in Bahasa Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hayward, Katrina. 2000. *Experimental Phonetics*. Harlow: Longman.
- Lapoliwa, Hans. 1988. *Pengantar Fonologi 1: Fonetik*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lehiste, Ilse. 1970. *Suprasegmentals*. Cambridge: The MIT Press.
- Nooteboom, Sieb. 1999. "The Prosody of Speech: Melody and Rhythm". Dalam Hardcastle, William J. and John Laver. 1999. *The Handbook of Phonetics Sciences*. Oxford: Basil Blackwell.
- Ode, Cecilia and Vincent J. van Heuven (eds.). 1994. *Experimental Studies of Indonesian Prosody (Semaian 9)*. Leiden: Rijksuniversiteit te Leiden.
- Pane, Armjin. 1950. *Mentjari Sendi Baru Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahyono, F.X. 2003. "Intonasi Ragam Bahasa Jawa Keraton Yogyakarta Kontras Deklarativitas, Interogativitas, dan Impemtivitas." Disertasi Universitas Indonesia.
- Remisjen, Bert. 2001. *Word-Prosodic System of Raja Ampat Languages*. Disertasi Universiteit Leiden.
- Rogers, Henry. 2000. *The Sound of Language: All Introduction to Phonetics*. Harlow: Logman.
- Samsuri. 1971. *Tjiri-Tjiri Prosodi Kalimat Bahasa Indonesia*. Malang: FKSS-IKIP Malang.
- Small, Arnold M. 1973. "Psychoacoustics". Dalam Minifie, Fred. D.; Thomas J. Hixon; and Frederick Williams. 1973. *Normal Aspect of Speech, Hearing, and Language*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sugiyono. 2002. "Ciri Akustis Pemarkah Deklaratif dan Interogatif Bahasa Melayu Kutai". Dalam *Bahasa dan Sastra* Vol. 20 Nomor I Edisi Januari-Maret 2002.
- Sugiyono. 2002. "Pitch Marker of Interrogativity in Indonesian: Psychoachoustics Approach". Makalah dalam *International Symposium of Linguistics and Speech-Hearing Sciences 2002*, Kuala Lumpur, 21-22 Oktober 2002.

- Sugiyono. 2003a. "Pemarkah Prosodik Kontras Deklaratif dan Interogatif Bahasa Melayu Kutai." Disertasi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2003b. "Struktur Melodik Kalimat Bahasa Indonesia". Makalah Seminar Membawa Bahasa Indonesia ke Era Globalisasi melalui Teknologi Bahasa, Komunikasi, dan Informasi, BPPT Jakarta, 18 September 2003.
- van Zanten, Ellen dan Vincent J. van Heuven. 1994. "Effect of Word Length and Substrate Language on the Temporal Organisation of Words in Indonesian". Dalam Ode, Cecilia dan Wim Stokhof (eds.). 1997:201-216.
- van Zanten, Ellen. 1989. *Vokal-Vokal Bahasa Indonesia: Penelitian Akustik dan Perseptual*. Diterjemahkan oleh Hakim, Lukman dari *Tire Indonesian Vowels: Acoustic and Perceptual Explorations*. Jakarta: Balai Pustaka.

PERENCANAAN DAN PRAKTIS BAHASA DI SINGAPURA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI

Prof. Madya Dr. Kamsiah Abdullah

Perencanaan bahasa merupakan suatu keperluan bagi setiap negara yang membangun, terutama negara yang mempunyai masyarakat majmuk, kepelbagaian bangsa, bahasa dan budaya. Perencanaan atau perancangan bahasa dilakukan dengan teliti dalam bentuk perundangan atau dasar-dasar bagi dilaksanakan dalam institusi-institusi pemerintah atau pun bukan pemerintah. Dasar bahasa mencerminkan segala keutamaan, aspirasi yang berkait dengan keadaan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan masyarakat dan dirancang sebegitu rupa sehingga ia dapat memuaskan semua pihak yang berkepentingan iaitu dari segi penyediaan, penerusan, dan penurunan tonggak-tonggak yang penting bagi kelompok masyarakat negara bangsa.

Dalam banyak negara, (Canada, Malaysia, Brunei, Filipina antara lain) matlamat perancangan bahasa sama ada secara terang atau tersirat ialah kedwibahasaan dan penguasaan sekurang-kurangnya dua bahasa dan ini biasa merujuk kepada pengasingan bahasa (*linguistic compartmentalization*), pada peringkat individu dan juga pada peringkat masyarakat. Pengasingan tersebut berubah atau beranjak mengikut perubahan masa disesuaikan dengan keperluan kedua-duanya, masyarakat dan juga individu; dan ini pula mempunyai fungsi dalam mobiliti sosial, mobiliti geografi, tekanan-tekanan yang disebabkan oleh perubahan kependudukan (demografi), perubahan teknologi dan keutamaan politik, antara lainnya.

Di Singapura, tekanan geografi hampir tiada, begitu juga perubahan demografi juga amat minimal, jikapun ada kerana kadar populasi negara ini sengaja dirancang supaya kekal *status-quo*, iaitu 78% kaum Cina, 14% Melayu, dan 8% India. Faktor yang mungkin boleh mengubahnya ialah kaum mendatang yang menjadi penduduk tetap, kebanyakan dari kaum majoriti, kaum Cina. Hanya perubahan teknologi dan keutamaan politik yang merangsang perubahan penggunaan bahasa. Faktor perubahan dalam teknologi yang berupa perkembangan internet dan alat komunikasi pantas menyebabkan munculnya desa global atau globalisasi, yang kesannya akan dibincang kelak. Faktor politik pula terangkum dalam perencanaan bahasa dan dasar-dasar bahasa yang dikuatkuasakan oleh pemerintah dalam sistem pendidikan.

Kertas kerja ini membincangkan ciri-ciri utama penggubalan dasar dan kesan pelaksanaan, amalan atau praktis dasar tersebut, dipandang dari sudut kesan kepada pelbagai kaum dan budaya, khususnya implikasi terhadap bangsa dan bahasa Melayu.

Untuk penakatan negara yang tidak mempunyai hasil alam semula jadi, hanya sumber manusia sahaja, maka rencana bahasa, terutama dalam pendidikan di sekolah dirancang sebegitu rupa sehingga ia dapat memuaskan semua pihak yang berkepentingan iaitu dari segi penyediaan dan penurunan nilai-nilai dan tonggak yang penting bagi kelompok masyarakat tertentu seperti budaya, agama, ekonomi, dan sosial.

Perencanaan bahasa di sini dimaksudkan rancangan atau rencana dasar-dasar bahasa yang dilakukan oleh pihak yang berwibawa untuk mengekalkan ataupun mengubah sikap atau perlakuan sesuatu masyarakat.

Dasar bahasa pula ditakrif oleh Kaplan dan Baldauf (1997) sebagai "*a body of ideas, laws, regulations, rules and practices intended to achieve the planned language change in the society or system*". Ini bermaksud perubahan bahasa peringkat makro yang dirancang atau direncanakan, biasanya oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa. Jadi, ia menyangkut soal status bahasa, pemilihan bahasa atau dialek, soal bahasa kebangsaan dan soal bahasa pengantar dalam sistem persekolahan. Juga, setelah dasar-dasar utama dimaktubkan, dasar-dasar kecil pelaksanaannya harus dipatuhi dan diamalkan pula.

Persoalan bahasa dianggap sesuatu yang sensitif dan diberi perhatian oleh pemerintah kerana perkaitannya dengan jati diri, maruah, bangsa, negara dan masyarakat, dan, bagi negara baru merdeka perancangan bahasa diselaraskan dengan keperluan politik dan sosial yang dihasratkan. Dengan itu, bahasa bukan lagi dipandang sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan warga atau rakyat, bahkan dasar bahasa menjadi suatu alat atau pelancar negara untuk menangani berbagai masalah dalam bidang politik, sosial, kebudayaan, dan ekonomi. Terutamanya dasar bahasa menjadi alat pencapaian wawasan, matlamat dan visi negara-negara yang lazim tertumpu pada soal mencipta satu rupa bangsa dan keinginan menonjolkan citra diri bangsa yang baru merdeka di tengah-tengah pentas dunia, selepas keluar dari belenggu penjajahan.

Ketika baru merdeka, kebanyakan negara menggunakan gandingan dua alat, iaitu bahasa dan pendidikan untuk dijadikan landasan yang dapat menyempurnakan aspirasi-negara dan juga rakyat yang terdiri dari berbagai bangsa dan kaum. Oleh yang demikian, perancangan bahasa secara praktisnya bermakna perancangan bahasa pengantar atau bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan.

Keadaan ini tidak mudah dan lebih kompleks dalam negara yang mempunyai penduduk yang begitu majmuk, bukan sahaja dari segi bahasa yang digunakan untuk komunikasi, tetapi juga dari segi agama, taraf pendidikan, akses kepada keperluan ekonomi, dan sebagainya. Dalam pemerhatian Stewart W.A. (1968) ada dua jalan utama yang dipilih oleh negara yang berbilang bahasa dan berbilang kaum, iaitu:

- 1) penghapusan, melalui pendidikan atau undang-undang, semua bahasa, kecuali satu bahasa yang akan dijadikan bahasa kebangsaan
- 2) pengiktirafan dan pemeliharaan bahasa-bahasa yang dianggap penting dalam negara, ditambah dengan pengangkatan satu atau dua bahasa lain untuk urusan rasmi dan komunikasi di luar sempadan negara tersebut.

Negara Singapura mengambil jalan kedua iaitu "**pragmatic multi lingualism**". Empat bahasa yang penting dan digunakan oleh sebahagian besar dari penduduk negara sebelum berkerajaan sendiri iaitu bahasa Cina, Tamil, Inggeris dan Melayu, diiktiraf sebagai **bahasa-bahasa rasmi**. Bahasa Melayu, yang ketika itu amat penting dari segi politik untuk menyertai Persekutuan Tanah Melayu, diangkat menjadi **bahasa kebangsaan**. Keadaan ini selaras dengan nisbah kaum-kaum yang besar di kota raya ini yang mempunyai mayoriti kaum Cina dan kaum minoriti Melayu dan India. Hakikat bahawa bahasa Melayu ialah bahasa perantaraan yang difahami oleh sejumlah besar (67%) rakyat Singapura, dan bahasa peribumi (*indigenous*) diiktiraf melalui pengangkatan bahasa tersebut sebagai bahasa kebangsaan. Menurut banci (Census) 1957, kaum Cina (15 tahun ke atas) yang memahami bahasa Melayu ialah 58.1%, yang boleh menuturkannya ialah 32.5%. Bagi kaum India pula peratusnya lebih tinggi, 97.4% boleh memahaminya dan 88.3% boleh menuturkannya. Bahasa Inggeris yang telah pun digunakan dengan meluas oleh kaum elit dalam pemerintahan penjajah dan dalam sektor perdagangan dijadikan sebagai salah satu bahasa rasmi. Dasar ini selaras dengan proses demokrasi atau aspirasi rakyat dalam keadaan yang lebih demokratik.

Dasar-dasar utama bahasa ini diumumkan dalam Parlimen melalui ucapan Yang di Pertuan Negara, Encik Yusof Ishak:

- Layanan yang sama kepada keempat-empat bahasa rasmi iaitu Cina, Tamil, Inggeris, dan Melayu.
- Menghapuskan dan menghentikan perlakuan tidak rata, diskriminasi dan ketidakpercayaan terhadap sekolah-sekolah 'vernakular' (terutama sekolah-sekolah Cina)
- Pembelajaran bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, di samping satu dua bahasa kaum terbesar masyarakat.

Dasar ini dirancang, terutamanya ialah untuk **perpaduan** bangsa Singapura yang terikat dengan Tanah Melayu. Menteri Luar ketika itu S. Rajaratnam, ditukil sebagai berkata "*The sooner the various communities can communicate with one another through one common language, which is the national language, the better.*"

Tujuan bahasa kebangsaan bukanlah untuk 'menjualnya' kepada orang-orang yang telah pun berbahasa Melayu, tetapi menggalakkan penggunaannya kepada mereka yang tidak menggunakannya. Pengangkatan

bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak bermakna mengabaikan bahasa-bahasa lain.

Terkandung dalam dasar ini ialah impian untuk menjadi satu masyarakat majmuk yang bersepadu dan harmonis melalui pendidikan bahasa yang terancang. Jalannya ialah untuk mempelajari sekurang-kurangnya dua bahasa (*equally conversant in two or more languages*). Ini termasuk bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu apabila Singapura bertaraf berkerajaan sendiri. Ini terangkum dalam dasar **Pelajaran Dwibahasa** yang dilahirkan seawalnya pada tahun 1956 melalui Laporan Jawatankuasa Semua Parti (All Party Committee Report dan dilaksanakan pada tahun 1966.

Perkara pokok dalam dasar kedwibahasaan Singapura, bukanlah bahasa Kebangsaan dan satu bahasa lain iaitu bahasa ibunda, tetapi ialah **kedwibahasaan yang berat kepada bahasa Inggeris**. Ini jelas dalam dasar bahasa Inggeris yang dipelajari sebagai **bahasa pertama** atau bahasa pengantar semua mata pelajaran di sekolah, sama ada sekolah rendah, menengah, maktab rendah, atau universiti. Pemberatan terhadap bahasa Inggeris, iaitu bahasa kerja (*working language*) yang diwarisi dari penjajahan ini dibuat kerana ia bukan salah satu bahasa kaum terbesar dan oleh itu menjadi alat netral perhubungan harmonis antara kaum, juga alat modernisasi, dan alat perantara dalam menguasai ilmu sains dan teknologi. Status dan pelaksanaan dasar bahasa Inggeris ini tidak pernah tergugat, sekalipun dalam masa Singapura berpadu secara politik dalam Malaysia.

Dalam sistem pendidikan, bahasa-bahasa ibunda, Mandarin bagi orang-orang Cina dan Tamil bagi orang-orang India yang menggunakan bahasa tersebut, termasuk bahasa Melayu dikategorikan sebagai **bahasa kedua**. Penamaan istilah bahasa pertama dan kedua adalah berbeza (terbalik) dari yang lazim digunakan (yang terangkum dalam laporan bertajuk "*The Use of Vernacular Languages in Education: The Report of the UNESCO Meeting of Specialists 1951*") yang menerangkan bahawa "*Second language is the language acquired by a person in addition to his mother tongue*". Namun penggunaan istilah ini memberi semacam pertanda (signal) yang berkesan bahawa yang paling penting dan yang nombor satu ialah bahasa Inggeris, bukan bahasa kebangsaan ataupun bahasa ibunda masing-masing.

Dasar dwibahasa yang berteraskan bahasa Inggeris selaras dengan pandangan pemerintah yang menempatkan fungsi bahasa tersebut dalam domain-domain yang berprestij dan antara bangsa yang telah pun dikuasai oleh kaum elite. Namun dasar dwibahasa mempunyai ciri kedemokrasian-nya, iaitu dasar ini dilaksanakan dengan ketat untuk semua bangsa-bangsa utama di Singapura. Tidak ada dan tidak dibenarkan pengecualian dari segi pembelajaran bahasa pertama dan bahasa kedua ini sehingga dasar ini mempercepat terbentuknya satu sistem pendidikan nasional yang utuh setelah terkuburnya berbagai jenis sekolah asal vernakular akibat dari kepentingan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan. Setiap kanak-kanak di-

wajibkan mempelajari bahasa ibunda masing-masing. Jadi, bahasa Mandarin untuk masyarakat Cina, Tamil untuk masyarakat India dan Melayu untuk kanak-kanak rumpun Melayu.

Keutamaan bahasa ibunda ini diperuntukkan dalam kurikulum sekolah untuk memenuhi fungsinya sebagai benteng dari pembudayaan Barat, penyaluran budaya Asia/Timur dan pentingnya dalam pemahaman diri dan identiti semua kaum. Ini terutamanya mustahak bagi kaum Cina, khususnya remaja-remaja Cina yang telah 'kehilangan akar budaya' mereka sendiri. Dasar yang sekali gus menyokong pembinaan umum sosial, budaya, dan ekonomi pada satu tahap berupaya mengerah sumber-sumber kemanusiaan yang sedia ada di samping memperkukuh solidariti dan integrasi antara kaum.

Anjakan Dasar Bahasa di Tahun-Tahun 80-an

Tangan pemerintah yang kuat dapat dilihat dalam perubahan dasar bahasa yang dimulakan pada 7 September 1979 melalui kempen (kampanye) mempromosi pertuturan dalam bahasa Mandarin "Speak Mandarin". Rencananya ialah mengurangkan 'beban' belajar bahasa tersebut yang bukan bahasa ibunda kebanyakan rakyat kaum Cina (1980, 64.4% murid-murid Darjah 1 Cina menggunakan dialek, hanya 25.9% menggunakan Mandarin) dengan cara menggalakkan ibu bapa menggunakannya di rumah supaya anak-anak kecil senang menguasai bahasa tersebut.

Anjakan status bahasa-bahasa rasmi berlaku-dasar 'pola dominan bahasa Inggeris dan pola sampingan bahasa kebangsaan' berubah kepada 'pola dominan Inggeris dan Mandarin. Sekolah-sekolah berbagai aliran sama ada telah pupus atau akan pupus. Dasar Dwibahasa dalam sistem pendidikan diperhalusi, kurikulum bahasa dan sokongan terhadapnya seperti buku-buku teks, guru-guru terlatih dikembangkan sejak Tony Tan menjadi Menteri Pendidikan. Dasar yang diterajui beliau termaktub dalam Sistem Pelajaran Baru 1990 di mana bahasa kedua dikenali sebagai bahasa ibunda dan pengaliran murid (*streaming*) dilakarkan dalam bingkai yang baru. Tegasnya dasar baru ini cuba memperbaiki kegenjutan sistem yang lama di samping memperkukuh mana-mana yang relevan dan harus dikekalkan. Diakui bahawa kedwibahasaan (yang seimbang dan baik dalam dua bahasa) bukanlah begitu mudah dikuasai oleh semua murid yang berbagai latar-belakang sosio-ekonomi, bahasa dan budaya. Ramai di antara mereka yang tidak mendapat sokongan, pendedahan, dan pengajaran yang mencukupi sama ada di rumah atau di sekolah.

Faktor-Faktor Utama Menjenterai Anjakan Dasar

Pada 1980-an warga Singapura yang berbahasa dialek Cina lebih ramai daripada yang mengetahui Mandarin. Pembelajaran bahasa itu menimbulkan tekanan kepada murid-murid Cina yang menggunakan dialek

seperti Hokien, Kantonis, Teochew, Hakka, dan lain-lain, terutama kepada kaum Cina- Baba yang berbahasa ibunda bahasa Melayu.

Kesedaran tentang peranan penting bahasa yang digunakan oleh negara Republik Cina dan untuk kepentingan peluang-peluang ekonomi yang melebar di negara tersebut membawa kepada perubahan dasar yang bukan kecil ini. Ucapan para menteri sering merujuk kepada peluang-peluang di Negara Cina dan kemungkinannya muncul sebagai gergasi ekonomi dan *major players* dalam dunia. Bahasa Mandarin akan menjadi sebagai alat perpaduan kaum Cina di Singapura, dapat menjalin persefahaman yang lebih tinggi dengan Republik Cina dan yang akan dipupuk-menjadi perantara (*broker*) kepada Barat dan Eropah dalam usaha-usaha perniagaan mereka dengan PRC.

Globalisasi Tiba

Globalisasi iaitu gelombang besar yang menghakis sempadan-sem-padan negara kepada satu bentuk desaraya yang maha besar telah datang secara yang mendadak ke seluruh pelosok dunia dan diterima pula sebagai satu proses yang sarwajagat sifatnya. Masa dan tempat hampir tidak bermakna, manusia tidak tersekat oleh kedudukan atau negara permastautinan mereka, juga tidak terhad dari segi masa sebenar atau *real time*—apa yang berlaku bukan sahaja dapat dilihat oleh berjuta-juta manusia dua tiga jam kemudian tetapi dapat dilihat, dikawal, dan diberi respons pada detik yang hampir semasa.

Informasi begitu mudah diperolehi, makin banyak mencurah-curah diterima dan dikembangkan hingga mengelirukan orang ramai dan redundant. Peranan media massa menjadi begitu penting—tetapi dalam masa yang sama segala perubahan kepada teknologi cepat-pantas ini tidak dinikmati oleh sebahagian dunia yang masih bergerak secara perlahan seolah-olah dalam zaman yang tidak tercecah oleh peradapan baru.

Maklumat yang terkawal atau tersembunyi tidak ada tempat lagi, segala sesuatu yang hendak dicari boleh didapati menerusi internet. Dalam sekelip mata, informasi boleh sampai ke merata dunia dan dunia sendiri dapat 'melihat' apa yang dulu tidak dapat terfikir oleh akal. Media yang terpenting pada masa kini bukan teknologi sahaja tetapi bahasa.

Dengan tiba-tiba bahasa Inggeris menjadi bahasa komunikasi dunia global sejajar dengan keagongan teknologi Amerika sebagai *super power* dan Negara berbahasa Inggeris Israel, Britain, Australia menjadi rakannya. Di Eropah maupun Rusia, bahasa-bahasa seperti Perancis, Itali, Jerman, Sepanyol, Belanda juga berjuang menghadapi hakikat bahasa *super* ini, bahasa Inggeris, dan menerima hakikat bahawa pada taraf dunia sekarang. Masing-masing bahasa belum dapat menandingi bahasa Inggeris yang telah menjadi bahasa globalisasi.

Di Singapura, keupayaan berbahasa Inggeris dan bahasa ibunda dilihat sebagai satu aset yang amat berharga. Menjadi dwibahasa dan dwibudaya menunjang nilai-nilai tradisi dan membolehkan kita memetik ke dalam dunia sains, teknologi dan ekonomi antarabangsa

Kesan Globalisasi terhadap Sosio-Budaya

Di seluruh dunia perubahan sosial dan budaya yang pesat mengikuti globalisasi ini dan ia memberi kesan yang besar terhadap cara kita bekerja dan berpikir.

Dalam konteks ini, globalisasi dimaksudkan ialah globalisasi yang dicetuskan oleh kebudayaan Barat.

“Globalisasi yang bersumberkan kebudayaan Barat pada waktu ini mewarnai kehidupan duniawi hampir seluruh umat sedunia, tentang hal yang berkaitan dengan sistem nilai dan produk dalam pelbagai bidang kehidupan, daripada hiburan dan kesenian hingga teknologi maklumat, bahasa, dan pemikiran”.

Datuk Haji Abdul Rahim bin Abu Bakar

Budaya popular Barat dirangkul oleh kaum remaja yang menjadi *warga dunia* yang serupa. Terjadi apa yang dikatakan *homogenisation* (keadaan dan perlakuan manusia yang condong ke arah serupa atau menyerupai satu dengan lain dan tenggelamnya budaya *local* atau setempat. Gejala ini tidak semestinya buruk, kerana komunikasi antara budaya akan menjadi lebih erat dan lebih bermakna. Namun, ketegangan (*tension*), kepayahan yang ditemui dan rasai dalam zaman ‘peralihan’ dari budaya setempat (*localization*) melalui proses *homogenization* kepada budaya global tetap wujud dalam setiap masyarakat.

Ketegangan yang muncul di beberapa buah negara boleh memberi kesan yang menggegarkan kestabilan dalam berbagai aspek budaya—seperti corak percantuman/penyebatian baru antara bahasa dan budaya,

- kemunculan masyarakat-masyarakat yang menganut aneka budaya,
- pemindahan penduduk secara besar-besaran,
- berbagai jenis kod untuk berkomunikasi – SMS, chat yang bercabang kepada mikro kultur atau kebudayaan mikro.

Kesan Globalisasi terhadap Status Bahasa-Bahasa di Singapura

Perubahan-perubahan ini membawa bersama perubahan dalam pertalian antara bahasa-bahasa, kedudukan dan penyebaran ilmu serta persoalan jati diri dan sebagainya. Di negara-negara Timur, khususnya Cina, Jepun, dan Korea, bahasa Inggeris yang berkedudukan sebagai satu bahasa asing dan di ajar pada umumnya di peringkat sekolah menengah kini dikaji

semula, dan besar kemungkinan akan menjadi lebih penting dan diajar di peringkat yang lebih rendah lagi memandangkan pada reaksi. Di negara-negara yang membangun juga bahasa dunia tersebut sedang galak dipelajari dan dikembangkan.

Dalam satu segi globalisasi juga telah melemahkan kuasa pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan yang berkait dengan wibawa sesuatu bahasa iaitu dalam penggalakan atau penolakan sesuatu bahasa di kalangan masyarakat. Kewibawaan ditentukan sendiri oleh warga pengguna bahasa tanpa campur tangan dari kuasa yang berwenang. Ekonomi baru telah mewujudkan pasaran baru bagi bahasa. Peta bahasa yang baru sudah mula muncul. Sebagaimana Amerika menjadi satu-satunya kuasa maha besar (superpower) dunia, maka dengan itu bahasa Inggeris muncul sebagai bahasa dunia sejagat tiada tandingannya. Sempadannya begitu luas dan merata ke seluruh aspek kehidupan terutama di kota-kota besar sehingga tiada negara yang boleh ignor-nya.

Besarnya informasi yang boleh didapati dalam bahasa Inggeris di internet dan Landskap ekonomi yang berubah di hampir setiap negara. di negeri Cina dan India telah membuat bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin. Warga Republik Rakyat Cina mempelajari bahasa Inggeris dengan gigihnya untuk meraih peluang-peluang ekonomi. Nilai bahasa sudah begitu terkait dengan nilai ekonomi khususnya nilai pekerjaan.

Rombakan situasi ini kini kian jelas, ia payah untuk dibendung, sehingga daripada lemas menongkah arus itu lebih baik belajar mengharungi arus. Begitu apabila negara berbahasa Melayu yang besar menukarkan arah kiblat dasar bahasanya maka ini memberi signal bahasa perubahan dasar tentang bahasa Melayu telah berlaku walaupun tidak demikian hakikatnya buat masa ini.

Perdana Menteri Singapura dalam ucapan Rapat Hari Kebangsaan Singapura kemahiran kecekapan bahasa Inggeris Singapura yang unggul telah pun dijejaki negara lain. Di Korea, misalnya, ada ibu bapa yang menghantar anak mereka untuk dibedah lidahnya supaya dapat menuturkan 'R' yang perlu untuk berbicara dalam bahasa Inggeris mengikut model sebutan yang baik. (*rice* bukan *lice*)

Kejayaan Perancangan dan Pelaksanaan Sistem Dwibahasa

Kejayaan perancangan dan pelaksanaan sistem dwibahasa dapat dilihat dari meningkatnya bilangan orang-orang yang literat dalam dua bahasa ini. Dari tahun 1990 hingga tahun 2000 kadar literasi dalam dua bahasa bagi penduduk berumur 15 tahun ke atas meningkat dari 45% kepada 56%. Rumah tangga yang menggunakan bahasa Inggeris juga meningkat (dari 1990 – 2000) dari 19% ke 23% keseluruhannya.

Jadual 1: Kadar literasi Umum (semua kaum)

	1970	1990	2000
Kadar literasi umum (%)	69	89	93
Peratus literat dalam 2 bahasa atau lebih	20	45	56
Peratus literat dalam bahasa Inggeris	47	63	71

Nota: Perangkaan 1970 untuk semua penduduk, 1990 dan 2000 termasuk penduduk Tetap. Tahun 1970 ialah untuk mereka yang berumur ke atas 10 tahun, 1990 dan 2000 untuk mereka yang berumur 15 tahun ke atas)

Perkara yang tidak dapat dinilai dalam statistik di atas ialah setinggi mana darjah kedwibahasaan, kecekapan menguasai dua bahasa, di kalangan individu. Mackey (1987) menyatakan bahawa, *"No society is so organized that its citizens are required to manipulate two codes with equal proficiency in all aspects of life"*

Kesan Perancangan Bahasa terhadap Masyarakat Cina

Semasa di ambang kemerdekaan, sebelum perancangan bahasa yang tegas diaktakan sebagai dasar, masyarakat Cina kebanyakan adalah penutur jati berbagai dialek Cina Selatan seperti Hokien, Teochew, Kantonis, Hainan, Hakka dan Mandarin. (Chua 1964). Setelah pelaksanaan dasar-dasar bahasa iaitu pada tahun 1980 dapat diperhatikan anjakan bahasa telah berlaku. Data-data ini didapati dari Banci penduduk 1980 (Khoo 1981) yang meliputi soalan tentang penggunaan bahasa rumah oleh masyarakat Cina. Pada tahun tersebut 80% rumah tangga Cina menyatakan bahawa mereka menggunakan dialek di rumah mereka, 10 % menggunakan Mandarin, dan kurang dari 10% menggunakan bahasa Inggeris. Sepuluh tahun kemudian, dalam Banci penduduk 1990 telah didapati satu perubahan yang besar. Kini hanya 50 % sahaja yang menggunakan Dialek-dialek Cina (turun 30%), lebih kurang 30 % telah bertutur dalam Mandarin dan 20 % dalam bahasa Inggeris.

Walaupun statistik ini menunjukkan kenyataan bahasa yang digunakan dalam rumah dan keluarga sahaja, bukan di domain yang lain, tetapi ia cukup jelas untuk membuktikan bahawa satu anjakan bahasa telah berlaku di kalangan masyarakat Cina-mereka telah meninggalkan dialek dan lebih bertumpu kepada Mandarin yang dahulunya hanya digunakan oleh kaum elit budaya sahaja.

Dalam konteks perancangan bahasa di Singapura, tidak salah jika ditanggapi bahawa dasar-dasar dan pelaksanaannya dalam sekolah dan masyarakat (*public*) telah berjaya dengan begitu cepat. Masyarakat Cina, yang

dahulunya berpecah-pecah di dalam golongan kumpulan dialek masing kini bersepadu dalam satu bahasa elit mereka, iaitu Mandarin. Memang melalui dasar ini pemerintah telah dapat memujuk masyarakat Cina yang berbahasa Inggeris supaya belajar menggunakan Mandarin. Di samping itu, kesan terbesar ialah di kalangan remaja, mereka yang muda, yang telah berangsur-angsur berubah bercakap dalam bahasa Mandarin, tidak seperti golongan yang lebih tua, yang masih tetap dengan dialek masing-masing. *Trend* begini semakin jelas di tahun-tahun mendatang.

Persaingan antara bahasa Mandarin dan Inggeris dalam dominasi bahasa di Singapura tidak berlaku secara negatif. Bahasa Mandarin telah menggantikan dialek-dialek Cina yang banyak itu sebagai bahasa standar yang tinggi, indah, berbudaya dan berwibawa, tetapi ia tidak menandingi bahasa Inggeris yang juga digunakan dan dipelajari oleh masyarakat Cina yang mencapai tahap tinggi dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Dengan demikian dasar perancangan bahasa ini menghasilkan *additive bilingualism* bukan *subtractive bilingualism* dan juga *bidialektisme* di kalangan masyarakat Cina. Taraf bahasa Mandarin kini ialah kedua pentingnya, di bawah bahasa Inggeris.

Faktor yang menyokong perubahan ke Mandarin ini ialah kempen *Speak Mandarin* yang dilancarkan di seluruh negara. Kedua ialah pengkakalan, sebenarnya 'peningkatan' sembilan buah sekolah-sekolah aliran Cina yang kuat ciri kecinaannya menjadi sekolah-sekolah SAP (*Special Assistance School*) yang bernada elitis dan super, menawarkan dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan juga Mandarin pada taraf bahasa pertama. Sebelum ini bahasa ibunda, walaupun bahasa kebangsaan di ajar pada taraf bahasa kedua sahaja.

Statistik tahun 2000 mengukuhkan dapatan ini, rujuk jadual-jadual berikut:

Jadual 2 Kadar Literasi Masyarakat Cina

	1970	1990	2000
Kadar literasi umum (%)	66	89	92
Peratus literat dalam 2 bahasa atau lebih	16	40	52
Peratus literat dalam bahasa Inggeris	35	59	68

Nota: Perangkaan 1970 untuk semua penduduk, 1990 dan 2000 termasuk penduduk Tetap. Tahun 1970 ialah untuk mereka yang berumur ke atas 10 tahun, 1990 dan 2000 untuk mereka yang berumur 15 tahun ke atas)

Peningkatan Penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan kaum Cina dapat dilihat dalam jadual di bawah ini. Dalam jadual yang sama ditunjukkan juga peningkatan yang lebih besar dalam penggunaan bahasa Mandarin tetapi dalam masa yang sama kemerosotan dalam penggunaan dialek.

Jadual 3
Kaum Cina (Berumur 5 Tahun ke Atas) yang Tinggal di Rumah-Rumah Privet

Bahasa	1990	2000
Inggeris	19.6	23.9
Mandarin	30.0	45.1
Dialek Cina	50.1	30.7
Melayu	0.3	0.2
Tamil	-	-

Kesan terhadap Bahasa Tamil dan Masyarakat Keturunan India

Bahasa Tamil pula mungkin menurun penggunaannya kerana bilangan penutur yang sememangnya sedikit. Bagi masyarakat India ini, oleh kerana bilangan yang menggunakan salah satu bahasa rasmi, iaitu bahasa Tamil amat kecil (64% daripada masyarakat India, pada tahun 1980), mereka di beri kelonggaran mempelajari bahasa lain dari Tamil jika mereka tidak menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa ibundanya. Selain dari bahasa Tamil, sebilangan kecil menggunakan bahasa Punjabi, Hindi, Gujerati, Urdu, Benggali, Malayalam, Telegu atau Sinhali. Bahasa utama rumah tangga orang-orang India ialah sebagai berikut:

Jadual 4 Bahasa Utama Rumah Tangga Orang-Orang India

	1980	1990
Bahasa Inggeris	24.3	34.8
Bahasa Melayu	8.6	13.5
Bahasa Tamil	52.6	43.7

Masyarakat India, pada tahun 2000 (mengikut Census 2000) adalah masyarakat yang paling literat, iaitu kadar literasi, 95% berbanding dengan kaum Cina, 92%, dan kaum Melayu 94%. Begitu juga pada tahun-tahun sebelumnya (lihat jadual). Mereka juga yang menunjukkan kadar literasi yang paling tinggi dalam bahasa Inggeris, sejak 1970--2000. (Kaum Cina dari 45% hingga 68%; Melayu dari 43% hingga 80%). Kadar literasi dalam dua bahasa juga telah meningkat. Kadar literasi dalam dua bahasa atau lebih

pula menunjukkan bahawa masyarakat India kedua tingginya di belakang masyarakat Melayu.

Jadual 5 Kadar Literasi Masyarakat India

	1970	1990	2000
Kadar literasi Umum (%)	83	92	95
Peratus literat dalam 2 bahasa atau lebih	35	59	67
Peratus literat dalam bahasa Inggeris	57	80	87

Nota: Perangkaan 1970 untuk semua penduduk, 1990 dan 2000 termasuk penduduk Tetap. Tahun 1970 ialah untuk mereka yang berumur ke atas 10 tahun, 1990 dan 2000 untuk mereka yang berumur 15 tahun ke atas)

Perencanaan bahasa di Singapura menjejaskan kaum India, dengan kemerosotan penggunaan bahasa tersebut, dari 52.6% pada tahun 1980 kepada hanya 43.7% pada 1990. Pemilihan kod atau bahasa untuk domain-domain tertentu seperti di taman permainan, di rumah, dalam lingkungan rakan-rakan dan lingkungan sosial di dapati telah menurun dan diganti oleh bahasa Inggeris (Ramiah 1991). Dengan demikian, kesan dari praktis perancangan di sekolah telah membawa kepada penurunan penggunaan Tamil tetapi peningkatan penggunaan bahasa Inggeris.

Dwibahasa yang mengakibatkan satu bahasa naik sementara yang satu lagi turun itu diistilahkan sebagai *subtractive bilingualism* (Gopinathan, 1994). Sifat masyarakat India yang pragmatik dalam pemilihan bahasa dapat dilihat di kalangan mereka yang bukan Tamil. Mereka memilih bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua di sekolah (dan ramai yang masih meneruskannya). Tetapi, selepas promosi terhadap bahasa Mandarin dan kesedaran tentang pentingnya bahasa tersebut dalam ekonomi global (dengan masuknya Republik Cina dan ekonomi dunia), ada segelintir dari mereka yang mula mengambil Mandarin dan bukan lagi bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.

Fenomena ini mungkin akan lebih terserlah di masa akan datang jika dasar bahasa di ubah kepada suatu dasar yang lebih bebas, misalnya, membenarkan kaum berbahasa Tamil mengambil bahasa Melayu atau Mandarin sebagai bahasa kedua di sekolah, sebab pendekatan yang pragmatik ini bukan sahaja kerana kemajuan ekonomi PRC, tetapi juga kerana kurangnya nilai ekonomi bahasa Tamil.

Kesan Perancangan terhadap Bahasa Melayu dan Masyarakat Melayu

Pada zaman awal kemerdekaan apabila Singapura berhasrat menjadi sebahagian dari Malaysia. Bahasa Melayu menjadi bahasa penting, yang menjadi jambatan untuk membawa penduduk Singapura menyeberang ke Tambak Johor. Bahasa Melayu di ajar di semua sekolah pemerintah dan bukan pemerintah, sekolah aliran Cina, Tamil, dan lain-lain. Pelajaran menengah atau sekolah menengah Melayu juga ditubuhkan dan berkembang dengan maju ketika dalam Malaysia. Tetapi, keadaan ini tidak lama. Apabila perpisahan antara Singapura dan Malaysia berlaku, penekanan tentang pentingnya pelajaran dalam bahasa Inggeris dan pendidikan dwibahasa di-amalkan. Bahasa Melayu yang diajar sebagai bahasa kebangsaan dihadkan pembelajarannya hanya kepada murid-murid Melayu sahaja sebagai bahasa kedua. Mengikut dasar pelajaran ini bangsa dan kaum lain (kecuali kaum India bukan Tamil) tidak dibenarkan mengambil bahasa Melayu, dan oleh kerana ini akibatnya ialah kemerosotan bilangan pelajar bahasa Melayu dan kelebihan guru-guru bahasa Melayu. Ini diikuti dengan penutupan sekolah-sekolah Melayu pada 1983.

Kesan dasar baru selepas perpisahan politik ini ialah terbukanya jalan bagi pendidikan Inggeris sepenuhnya bagi kanak-kanak Melayu. Pada mulanya bahasa tersebut yang tidak digunakan sebagai bahasa basahan di rumah, dikatakan menjadi penyebab kelemahan murid-murid Melayu dalam pendidikan dan kurangnya bilangan murid-murid yang mendapat pelajaran tinggi di politeknik dan universiti.

Jadual 6 Peratus Kumpulan Darjah 1 Penduduk yang Masuk ke Universiti

Tahun	1987	1989	1991	1993	1995	1997
Cina	12.7	16.2	16.4	20.0	21.4	24.2
Melayu	1.8	2.9	2.7	3.1	3.4	3.09
India	6.1	7.7	6.6	8.5	9.3	10.0
Keseluruhan	10.5	13.7	13.8	17.0	18.4	20.4

Kegenjotan ini jelas kelihatan dalam bidang pekerjaan profesional dan gaji pekerja-pekerja Melayu yang rendah jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain. Mobiliti sosial melalui pendidikan yang berteraskan bahasa Inggeris tidak berlaku bagi masyarakat Melayu, umumnya.

Namun, walaupun secara relatif, pencapaian orang-orang Melayu dalam pencapaian bahasa khususnya tahap literasi dan kedwibahasaan adalah tinggi, jika dibandingkan dengan tahap literasi mereka pada masa-masa yang lalu dan juga jika dibandingkan dengan kaum Cina dan India. Statistik di bawah ini mungkin tidak termasuk golongan yang tidak tahu membaca

dan menulis dalam huruf Rumi bahasa Melayu, tetapi pandai mengaji Al-Quran yang juga termasuk sebagai satu jenis literasi (membunyikan huruf-huruf Arab tanpa mengetahui bahasanya)

Jadual 7 Kadar Literasi Masyarakat Melayu

	1970	1990	2000
Kadar literasi umum (%)	74	90	94
Peratus literat dalam 2 bahasa atau lebih	35	69	78
Peratus literat dalam bahasa Inggeris	43	72	80

Nota: Perangkaan 1970 untuk semua penduduk, 1990 dan 2000 termasuk penduduk Tetap. Tahun 1970 ialah untuk mereka yang berumur ke atas 10 tahun, 1990 dan 2000 untuk mereka yang berumur 15 tahun ke atas)

Jika dibandingkan dengan dua kaum terbesar lainnya di Singapura, tahap kedwibahasaan Melayulah yang paling tinggi sekali iaitu 78%, berbanding dengan kaum Cina 52% dan India 67%. Begitu juga jika dilihat dari segi peningkatan atau kemajuan literasi dalam bahasa Inggeris masyarakat Melayu, yang meningkat penguasaannya dalam lingkungan 37%, berbanding dengan kaum India 30% dan kaum Cina, 24%.

**Jadual 8 Penggunaan Bahasa di Kalangan Melayu
(Bahasa yang Paling Kerap Digunakan di Rumah)**

	1990	2000
Bahasa Inggeris	6.2%	7.9%
Bahasa Melayu	93.7	91.6

Persoalan sama ada gejala ini menjejaskan penggunaan bahasa Melayu di kalangan masyarakat Melayu telah diperkatakan dan dikaji. Pandangan beberapa pihak yang melihat lumrahnya peristiwa *code switch* dari bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris dan apa yang diistilahkan sebagai 'pencemaran bahasa Melayu' memang berlaku (Suratman Markasan, Kamsiah Abdullah, 1986; Roksana Bibi Abdullah, 2002). Tetapi, gejala ini adalah perkara yang lazim dalam ujaran-ujaran mereka yang dwibahasa dan adalah akibat dari corak pendidikan yang diterima oleh seseorang individu, (antara sebab-sebab lain, dalam hal ini seluruhnya dalam bahasa Inggeris). Motivasi

dan sikap murid-murid Melayu terhadap bahasa Inggeris adalah lebih tinggi dan lebih positif daripada terhadap bahasa Melayu (Kamsiah 1985).

Penggunaan bahasa Inggeris yang meluas juga adalah fungsi tingkat pendidikan dan tingkat sosio-ekonomi, di mana lebih tinggi taraf pendidikan dan lebih tinggi taraf sosio-ekonomi, maka lebih keraplah penggunaan bahasa Inggeris mereka (lihat jadual berikut) atau sebaliknya kurang menggunakan bahasa Melayu. Pada tahun 2000, hanya 2.3% mereka yang di universiti menggunakan bahasa Melayu. Di peringkat menengah 19.9 menggunakan bahasa tersebut di rumah secara kerap.

Pakir (1991) menubuhkan satu model yang terdiri dari tiga-segi berlapis-lapis untuk menunjukkan fungsi kunci atau penjaga bagi ekspresi bahasa Inggeris sebenarnya bergantung kepada darjah kefasihan dalam bahasa itu dan ini tentu bermakna merujuk kepada tingkat pendidikan. Tingkat paling bawah dan rendah ialah bahasa Inggeris *colloquial* yang *rudimentary* dan *intimate*, peringkat 1 adalah taraf asas dan berlaras *casual*, peringkat 2 selaras dengan taraf sederhana dan *consultative*, lebih tinggi lagi ialah peringkat *adept* dan *careful* dan yang paling tinggi, peringkat *advanced* dan *formal*. Pengguna bahasa Inggeris yang sangat tinggi tingkat pendidikan mereka mempunyai kuasa (*empowered*) menggunakan kedua-dua bentuk standard dan juga *colloquial*. Dari perangkaan tentang tingkat tertinggi pendidikan didapati hanya segelintir sahaja di kalangan pelajar Melayu yang mencapai tahap universiti, dan ini bermakna segelintir sahaja yang menguasai tingkat kefasihan yang *standard*, *advanced* dan *formal* itu.

Perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Singapura tentang kelulusan dalam mata pelajaran Peringkat GCE 'O' iaitu di akhir sekolah menengah menunjukkan bahawa kefasihan dan kecekapan bahasa Melayu yang masih amat baik jika dibandingkan dengan peratus kelulusan bahasa Inggeris.

Jadual 9 Peratus Kelulusan Murid Melayu di Peringkat GCE 'O'

	1980	1990	1999
Bahasa Inggeris	20.2%	49.3%	61.4%
Bahasa Melayu	93.9	99.1	98.4
Matematik	28.5	53.3	60.8
Sains	33	44.4	62.1

Namun, ini tidak bermakna bahawa sekali gus, penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu golongan sosio-ekonomi dan pelajaran tinggi ini juga sama-sama tinggi dan baik. Ramai mahasiswa Melayu kini kekok berbahasa Melayu. Namun, kajian Kamsiah 1995, yang mengkaji corak dan ciri-ciri penguasaan bahasa Melayu/Inggeris pelajar-pelajar Melayu di seko-

lah menengah mendapati bahawa penguasaan bahasa Inggeris mempunyai kesan positif terhadap penguasaan bahasa Melayu para respondennya.

Anjakan Bahasa dalam Masyarakat Melayu (Terhadap Dialek-Dialek Melayu)

Sepanjang lebih kurang 50 tahun praktis perancangan bahasa, dengan pemberatan terhadap bahasa Inggeris menyebabkan bukan sahaja lebih banyak keluarga dan rumah tangga yang menggunakan bahasa tersebut tetapi kepelbagaian linguistik (*linguistic heterogeneity*) dalam masyarakat juga turun dengan berkurangnya pendedahan kepada bahasa ibunda dan dialek-dialek Melayu yang subur sebelum kemerdekaan. Dan, ini menyukar tugas untuk membangunkan elita bahasa ibunda dan juga Melayu.

Trend selama inilah ialah *maintenance* pengekalan bahasa ibunda (atau separuh dwibahasa) secara praktiknya apa yang berlaku ialah fasa *transitional*, iaitu peralihan di mana bahasa-bahasa ibunda sedikit demi sedikit diganti oleh bahasa Inggeris yang berkemungkinan berlanjutan sehingga menjadi apa yang disebut sebagai *subtractive bilingualism* atau kedwibahasaan yang merosot. Perkara ini telah terjadi di kalangan masyarakat Tamil.

Di kalangan rumpun Melayu, bahasa Jawa, Boyan, Bugis, Minangkabau, Banjar telah turun angka penggunaannya, sangat sedikit atau hampir tiada generasi muda yang menggunakan dialek-dialek tersebut walaupun di kalangan keluarga. Ramai generasi ketiga penutur bahasa ini sudah tidak memahaminya langsung. Perangkaan dari Censur 1957 hingga 2000 menunjukkan trend ini. (Kamsiah Abdullah, 1997). Pada tahun 1957, di antara warga Singapura, termasuk 14,517 dikategorikan sebagai kumpulan bahasa Jawa, 14,344 terdiri dari kumpulan bahasa Boyan dan beberapa ratus orang dalam kumpulan Bugis, Minangkabau, Banjar, dan lain-lain.

Dalam kajian Kamsiah, 1997, yang menyelidiki penggunaan bahasa di kalangan guru-guru pelatih Institut Pendidikan Nasional didapati bahawa hanya bahasa Boyan yang mungkin tidak pupus di Singapura. Dalam masyarakat tersebut 1.2% menggunakan sebagai bahasa utama dengan bapa. Sebagai bahasa kedua kekerapannya, 6% menggunakannya dengan ibu, 5% dengan adik-beradik, 13% dengan datuk, dan 19% dengan nenek. Tentang bahasa Jawa pula ia tidak lagi diajar kepada generasi muda, dan hanya 3.8% yang menggunakan dengan orang tua. Jadi, dalam masa 50 tahun anjakan bahasa yang besar telah berlaku di kalangan masyarakat Melayu yang kini berbahasa Melayu dan Inggeris tanpa variasi-variasi lain seperti mengetahui dialek Cina yang terdapat pada masa dahulu.

Anjakan ke arah bahasa baku atau bahasa Indonesia dengan kemerosotan bahasa-bahasa kecil daerah mungkin mudah berlaku di kalangan kaum minoriti Indonesia.

Bahasa dan Sebutan Baku Bahasa Melayu

Agaknya tidak lengkap jika membicarakan perencanaan bahasa di Singapura jika tidak menyentuh perkembangan bahasa dan Sebutan Baku Bahasa Melayu atau lebih tepat sebutan baku yang baru.

Singapura mengikut jejak Malaysia pada akhir 1990 untuk menggunakan suatu sebutan baku yang berbeza dari yang digunakan oleh media dan orang ramai. Variasi ini antara lain, ditandai oleh bunyi 'a' untuk menggantikan bunyi 'e' yang kerap digunakan bagi akhir perkataan yang dieja dengan huruf 'a'. Sebutan begini lebih dekat dengan sebutan orang-orang Indonesia dan juga di sebelah utara Malaysia. Tujuan asalnya ialah supaya bahasa Melayu yang diucapkan di Singapura selaras dengan yang diakui di Malaysia. Segala prasara pemerintah digunakan untuk merealisasikan sebutan tersebut, yang diwajibkan pengajarannya di peringkat sekolah rendah dan menengah.

Ini dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dan melibatkan latihan khas bagi guru-guru bahasa Melayu. Setelah lebih satu dekad, sebutan ini berjaya dimasukkan ke dalam bilik darjah bahasa Melayu, murid-murid yang melalui sistem ini menggunakannya apabila perlu. Media masa, terutama media television dan radio diwajibkan menggunakan sebutan variasi ini. Namun demikian, sebutan yang dikenali sebagai sebutan baku ini hanya wujud di institusi formal yang sempit sahaja. Ia tidak menjadi bahasa kolokuil dalam situasi yang tidak formal yang lebih semula jadi.

Apabila Malaysia menghapuskan sebutan baku ini beberapa tahun lalu, situasi bahasa Melayu di Singapura agak mengelirukan. Tetapi perancangan standardasi sebutan ini kini tetap diteruskan. Oleh kerana sebutan adalah peribadi sifatnya dan menyentuh jati diri dan psikologi penggunaanya, masa peralihan dari sebutan lazim dahulu kepada sebutan yang baru mungkin memakan masa yang agak lama (jika pun ia berjaya dijiwai oleh orang-orang Melayu). Sebutan baku terpaksa bersaing bukan sahaja dengan bahasa yang lebih selesa dan mesra, tetapi dengan bahasa berprestij tinggi dalam negara, atau keadaan 'diaglosia' antara bahasa Melayu dan Inggeris.

Kini sudah mula muncul dua variasi bahasa Melayu-bahasa formal dan tidak formal, bahasa Melayu golongan elite Melayu atau variasi akademik dan variasi rakyat terbanyak dan variasi basahan. Kemunculan dua variasi dalam domain penggunaan dan fungsi bahasa Melayu yang semakin sempit agak menjejaskan pemilihan bahasa Melayu dalam persaingan antara kod-kod dengan bahasa lain, khususnya Inggeris.

Selain itu, sama ada BM sebutan baku dan lama akan mewujudkan keadaan diaglosia di kalangan variasi bahasa Melayu sendiri amat menarik diperhatikan. Untuk perancangan atau penghalusan selanjutnya tentang perkara ini perlu dilakukan kajian mendalam yang bersifat menyeluruh dan merangkumi berbagai aspek seperti aspek sosial, psikologikal, kultural juga ekonomi dan politik.

Akhir Bicara

Perancangan bahasa yang pragmatik sifatnya melalui dasar-dasar yang tegas, memandang jauh ke depan serta pelaksanaannya yang cekap dan menyeluruh telah membawa kesan yang amat positif dalam pendidikan dan juga ekonomi. Namun, kesan perancangan selama lebih dari lima dekad ini tidak memberi kesan yang sama kepada semua golongan masyarakat. Ada masyarakat yang meraih faedah yang lebih dengan kesan sosio-ekonomi yang positif, ada pula yang mempunyai kesan negatif terhadap bahasa asal atau ibunda.

Kesan perancangan ini terhadap masyarakat Melayu amat besar, dengan membuka tingkap dunia bahasa dan budaya Barat. Lebih jauh dari itu kami tidak pasti. Kenyataan Timbalan Perdana Lee Hsien Loong dalam *The New Paper*, 20 Oct 1998, bahawa:

“Selepas tiga dekad pembinaan negara bangsa, Melayu Singapura telah menjadi berbeza dari Melayu-Malaysia atau peribumi Indonesia; sebagaimana orang India Singapura berbeza dari orang India di India, orang-orang Cina Singapura berbeza dari orang Cina dari PRC (Republik Rakyat Cina), Taiwan, atau Hongkong”

ini akan mungkin ada kebenarannya. Dan, mungkin perbezaan hanya pada kulit sahaja bukan intinya. Secara lahiriahnya ini hanya mungkin berlaku apabila logat bahasa Melayu yang digunakan di Singapura, hasil dari perencanaan sebutan baku, telah begitu bervariasi dari bahasa Melayu yang dituturkan di Malaysia.

BIBLIOGRAFI

- Fishman, J.A (ed) (1970). *Readings in the Sociology of Language*. The Hague, Paris: Mouton.
- Gopinathan, S, Saravanan, V. & Ho W.K. Ethnicity Managemenat and Language Education Policy: Towards an Alternative Model of Language Education in our Schools. Kertas kerja di IPS Forum, Ethnic Relations in Singapore. 24 Oktober 2002.
- Kamsiah Abdullah. *Kita Seharusnya Mencari Kaedah Yang Lebih Bermakna Dalam 'Mengaji' Al-Quran*. (*Titian*). Bil 36 Jun 2002. p19 – 21.
- Kamsiah Abdullah. 2002. *Rangkai Penelitian Bahasa dan Pemikiran*. Singapura: Deezed.

- Kamsiah Abdullah, 1985. Attitude and Motivation of Malay Students in Secondary Schools in Singapore Towards English and Malay, **Singapore Journal of Education**, 7(1): 45 – 55.
- Kamsiah Abdullah, 1987. The Bilingual Ability Study (English – Malay) of a sample of Primary three Pupils. In Ho Wah kam (ed), *The Bilingual Ability of A Sample of Primary Three Pupils*, Singapore: Institute of Education.
- Kamsiah Abdullah dan Bibi Jan Ayyub. *Language Issues in the Malay Community in Singapore*. Trends In Language Society and Education in Singapore: Issues and Trends. 2nd edition, Eds: Gopinathan, Pakir, Ho & Saravanan, Singapore: Times Academic Press. (1998) p 179 - 190.
- Kaplan, R & Baldauf, R.B. 1997. *Language Planning: From Practice To Theory*, Clevedon: Multilingual Matters Pte Ltd.
- Lily Zubaidah Rahim. 1998. *The Singapore Dilemma: The Political and Educational Marginality of the Malay Community*. Malaysia. Oxford University Press.
- Ramiah, K. 1991. The Pattern of Tamil Language Use among Primary School Tamil Pupils in Singapore. *Singapore Journal of Education*, 11 (2): 35 – 43.
- Saravanan Gopinathan S, Saravanan, V. and Ho Wah Kam in Ethnicity Management and Language Education Policy: Towards an Alternative Model of Language Education in Our Schools. Paper IPS Research Forum, Ethnic Relations in Singapore, 24 Oktober 2002
- Stewart, W.A. 1968. A Sociolinguistic Typology for Describing National Multilingualsim” . in Joshua Fishman (ed), *Readings in Sociology of Language*. 2nd edition. The Hague: Mouton, 1970.
- Xu Daming, Chew Cheng Hai and Chen Songcen, 1998. *Language Use and Language Attitudes in the Singapore Chinese Society in Language, Society and Education in Singapore: Issues and Trends In Language Society and Education in Singapore: Issues and Trends*. 2nd edition , Eds: Gopinathan, Pakir, Ho & Saravanan, Singapore: Times Academic Press. Hal 133 -154.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal	: Jumat, 17 Oktober 2003
Judul Makalah	: 1. Mengkaji Aspek Prosodik Bahasa(-Bahasa) Indonesia 2. Perencanaan dan Praksis Bahasa di Singapura dalam Menghadapi Globalisasi
Pemakalah	: 1. Sugiyono 2. Kamsiah Abdullah
Pemandu	: Ilsa Mayuni
Pencatat	: 1. Ni Wayan Aryani 2. Edi Setiyanto

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Muh Abdul Khak (Balai Bahasa Bandung)
 - a. Untuk Pak Sugiyono. Memang sebagian istilah yang Pak Sugiyono sampaikan, bagi saya terutama, mungkin juga bagi yang lain, agak kurang dikenal karena sangat teoretis. Akan tetapi, tidak ada salahnya saya ingin menanyakan manfaat langsung penelitian ini, terutama untuk pembakuan bahasa Indonesia. Saya berpikir sederhana saja, misalnya, Pak Sugiyono sudah menemukan data untuk kalimat interogatif, kalimat deklaratif. Untuk pembakuan bahasa Indonesia masalahnya memang dialeknya banyak, daerahnya juga banyak. Apakah untuk tujuan pembakuan itu harus digunakan semua alat tes terhadap semua dialek itu sehingga untuk cara berpikir mudahnya mungkin dicari rata-ratanya yang baku itu seperti apa. Yang kedua, apakah alat ini bisa juga untuk menguji kalimat-kalimat yang sebenarnya bukan kalimat yang normal? Dalam pragmatik ada istilah lokusi, perlokusi, dan seterusnya yang orang harus memahaminya dalam konteks, bukan kalimat ujaran yang keluar itu. Apakah alat itu bisa dipakai untuk itu.
 - b. Untuk Ibu Kamsiah. Ibu mengatakan bahwa bahasa Melayu resmi itu adalah bahasa kebangsaan. Di Indonesia ini ada dua istilah, ada bahasa kebangsaan atau bahasa nasional dan ada bahasa resmi negara. Apakah hal itu dibedakan di Singapura yang kenyataannya sampai saat ini justru bahasa Inggris yang menjadi bahasa perhubungan secara luas. Saya tahu, Singapura berdekatan dengan Indonesia, negara yang sangat taat hukum. Apakah ada aturan hukum yang mengatur itu sehingga mungkin juga sampai pada,

katakanlah, sanksi-sanksi. Yang kedua soal bahasa Inggris masuk ke ranah rumah tangga tadi, adakah usaha pemertahanan dari sekelompok orang misalnya Melayu dan Tamil sendiri untuk membatasi atau membentengi jangan sampai ada kebocoran diglosia yang menyebabkan bahasa Inggris langsung masuk ke rumah tangga. Mungkin dari sisi pemertahanan apakah ada usaha ke sana?

2. **Pertanyaan:** Sujiyatno (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa, Departemen Pertahanan)

Saya guru bahasa Indonesia siswa asing. Setiap tahun paling tidak ada tiga siswa yang akan sekolah komando kesatuan TNI, misalnya 1 dari AL, 1 dari AU, 1 dari AD. Secara singkat untuk Ibu, bagaimana pengajaran bahasa Indonesia di sana? Selama ini kami akui siswa dari Singapura itu termasuk yang cukup bagus berbahasa Indonesia, selain dari Australia. Yang kedua, saya minta pendapat Ibu, mungkinkah bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Melayu menjadi alat komunikasi resmi di ASEAN mengingat dari kurang lebih 500 juta penduduk ASEAN itu. Mungkin lebih dari setengah dari jumlah itu bisa menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Melayu. Ini saya acu dari siswa kami dari Thailand. Dia dari angkatan laut yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan bahasa Indonesia di Thailand dan dia berharap bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa resmi di ASEAN?

3. **Pertanyaan:** Ahmad Badariswan (Palembang, Sumatera Selatan)

Saya mewakili masyarakat pencinta bahasa Indonesia dari Sumatera Selatan, Palembang. Pertanyaan saya tujukan kepada yang terhormat Ibu Hajjah Kamsiah. Di dalam buku ini ada disebutkan oleh Ibu bahwa situasi kependudukan di Singapura 78% kaum China, 14% Melayu, dan 8% India, tentunya menyangkut juga bahasa dan kebudayaannya. Tadi juga Ibu singgung dan lebih jelas saya baca bahwa hal ini atau keadaan ini akan dipertahankan. Ada kebijakan untuk mempertahankan *status quo* dengan persentase seperti ini. Malahan kelihatannya tadi, untuk mempertahankan *status quo*, kalau akan berubah, China malah akan mendatangkan orang mungkin dari Hongkong atau negeri China. Jadi, pertanyaan saya bagaimanakah sikap bangsa Melayu atau kaum Melayu sebagai penduduk asli Singapura, khususnya kaum elite Melayu, lebih khusus lagi sikap dan pendirian Ibu sendiri yang saya yakini juga termasuk etnik Melayu? Bagaimana sikap menghadapi situasi ini? Pertama, yang sangat saya garis bawahi mempertahankan *status quo* 75% China ini kalau akan berkurang didatangkan dari luar?

Saya sendiri sangat prihatin dalam hal ini, termasuk keprihatinan terhadap bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu. Terima kasih.

Jawaban: Sugiyono

Saya melihat manfaatnya ada tiga hal, tetapi dapat kita bagi menjadi dua. Manfaat kajian prosodik itu yang pertama, orientasinya ke belakang, yaitu untuk kodifikasi. Selama ini kodifikasi bahasa-bahasa di Indonesia itu hanya difokuskan pada bahasa tulis. Padahal itu, sekali lagi kita itu berpangkal pada tradisi lisan. Dari sekitar 500 lebih bahasa daerah di Indonesia itu hanya 11 yang punya sistem tulisan. Yang pertama manfaat kodifikasi jika dari penutur generasi ke generasi mengalami penurunan kualitas akustik. Jawa Solo dan Yogya yang dulu *klemak klemek*, sekarang sudah lebih cepat. Nadanya pun rentangnya sudah relatif lebih tinggi, tidak seperti zaman Sembodro, Arjuna. Kodifikasi itu pasti. Pusat Bahasa dan balai-balai juga bertugas mengodifikasi bahasa-bahasa di Indonesia. Kalau dari 500 baru sekitar 160 bahasa terkodifikasi, itu berarti tugas masih banyak. Sekitar 340 bahasa lagi yang harus dikodifikasikan secara tertulis dan 500 yang secara lisan. Pengembangan kedua untuk pengajaran bahasa. Di dalam *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* penjelasan bagaimana intonasi kalimat-kalimat harus diperlakukan seperti apa masih sangat minim dan tidak jelas. Kekayaan variasi pengujaran kurang tecermin. Jika akan diajarkan, hal itu masih sangat kurang, perlu penggalian lagi. Hanya untuk menentukan yang baku secara lisan, sampai sekarang atau kapan, hal itu masih menjadi tanda tanya. Apakah intonasi baku sama dengan intonasi yang tidak mencerminkan bahasa daerah. Itu bukan jaminan karena masyarakat Indonesia bilingual. Teori otonomi, bahwa otak terbagi dua, sudah ditolak sehingga sistemnya campur-campur. Selama ini kodifikasi masih struktural sehingga fokusnya pada pemilahan subjek, predikat, dan seterusnya. Sangat berbeda dengan pendekatan akustik, yang meskipun leksikalnya sama, jika intonasi berbeda mengungkapkan maksud yang berbeda. Bagaimanapun warna daerah tetap melekat pada tuturan. Tidak mungkin mengatakan, misalnya, penutur Batak tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baku. Yang dapat dilakukan hanya kodifikasi, bukan pembakuan, kecuali pada masa adanya generasi-generasi baru yang kualitas intonasi bahasa daerahnya sangat lemah sehingga seperti mengungkapkan intonasi baru.

Kodifikasi dilakukan dengan dua cara, yaitu produksi dan persepsi. Aspek produksi dikaji dengan fonetik eksperimental. Aspek persepsi dikaji dengan pendekatan persepsi tutur.

Alat ini juga dapat digunakan untuk mengkaji kalimat-kalimat taknormal, misalnya untuk memastikan tuturan *saya beli* sebagai

fraseologis atau predikatif? Yang fraseologis hanya memunculkan satu puncak nada, sedangkan yang predikatif menghasilkan dua puncak.

Jawaban: Kamsiah Abdullah

Bahasa kebangsaan dan bahasa resmi semua memiliki undang-undang. Bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam surat-menyurat pemerintah dengan rakyat dan dalam forum-forum. Ada empat bahasa resmi, yaitu Melayu, Inggris, China, Tamil. Bahasa kebangsaan adalah bahasa yang memperlihatkan nilai bangsa, yaitu negara yang berada di kawasan Melayu. Bahasa kebangsaan terlihat seperti pada lagu kebangsaan dan perintah dalam militer.

Seperti pernyataan Bapak Menteri semalam, hak pemerintah mengatur bahasa tidaklah sepenuhnya. Sebagian yang lain, yang sifatnya pribadi, menjadi hak masyarakat untuk secara alamiah mengatur pemakaiannya. Jadi, dalam percakapan rumah tangga, pemakaian bahasa Inggris tidak dilarang. Saat ini, bahasa Melayu masih sering dipakai seperti bahasa Inggris. Akan tetapi, ke depan mungkin justru bahasa Inggris yang akan dipakai.

Pengajaran bahasa Indonesia atau Melayu Singapura bagi orang-orang asing dan militer sebenarnya ada, tetapi bersifat elite sedikit; bukan berdasar keturunan, melainkan kebolehan atau keupayaan seperti ditawarkan di universitas-universitas.

Kemungkinan pemanfaatan bahasa Melayu sebagai bahasa di ASEAN, meskipun ada yang mengusahakan, menurut saya pribadi tidak mungkin karena adanya globalisasi. Pada era globalisasi bahasa Inggrislah yang akan menjadi bahasa super yang harus dikuasai oleh setiap orang, termasuk Singapura, Bangkok, dan Vietnam, bukan bahasa Melayu. Pemimpin-pemimpin di Asia harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja mereka.

Usaha *status quo* terhadap budaya dan bahasa Melayu, bangsa Melayu selaku pihak minoritas harus akur dengan kelompok mayoritas (China). Tanpa keakuran, minoritas maupun mayoritas, akan mengalami kemusnahan.

Rasa kekurangpuasan pihak minoritas tidak dibahas secara ramai, tetapi langsung dilaporkan kepada pemerintah atau agen-agen pemerintah.

PERANAN GURU DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA SISWA BERDASARKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Sarwiji Suwandi

FKIP Universitas Sebelas Maret, Ketua I HPBI Cabang Surakarta

Pendahuluan

Permasalahan pokok dalam bidang pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Menurut Sunardi (2003: 1), kritik yang memerlukan perhatian serius dalam bidang pendidikan adalah kekurangmampuan para lulusan memanfaatkan hasil pendidikan mereka untuk memecahkan berbagai masalah aktual.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan berarti (Depdiknas, 2002a: 1)

Berbagai faktor penyebab dapat disenaraikan untuk menjelaskan masih redahnya mutu pendidikan tersebut. Pendidikan lebih berorientasi pada pengembangan intelegensi akademik (membuat manusia pintar) dan kurang memperhatikan terbentuknya manusia yang berbudaya (*educated and civilized human being*). Pendidikan cenderung direduksi sebagai proses untuk “lulus” dan sebagai akibatnya praktik pendidikan kurang memperhatikan aspek pemberdayaan. Faktor penyebab lain adalah penerapan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak konsekuen dalam kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan. Penerapan pendekatan itu lebih ditekankan pada aspek masukan—misalnya pengadaan buku dan alat pelajaran serta perbaikan sarana-prasarana pendidikan—dan kurang memperhatikan proses.

Upaya memperbaiki mutu kebijakan dan praktik pendidikan perlu dilakukan. Proses pendidikan hendaknya mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Pembelajaran dalam dunia pendidikan hendaknya tidak hanya *content oriented* melainkan lebih pada *process oriented*. Pendidikan dituntut mampu mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, kreatif, produktif, dan demokratis. Pendidikan memiliki peranan penting mempersiapkan peserta didik menyongsong masa depan, masa depan bangsa dan masa depan dirinya (Sarwiji Suwandi, 1999:16).

Bertitik tolak pada masih rendahnya mutu pendidikan, Pemerintah mengupayakan penyempurnaan kurikulum. Penyempurnaan atau pembaharuan kurikulum dilakukan dalam rangka mengantisipasi berbagai perubahan dan tuntutan kebutuhan masa depan yang akan dihadapi oleh siswa sebagai warga bangsa agar mereka mampu berpikir global dan bertindak sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal (*think globally but act locally*). Untuk itu, pembaruan kurikulum itu tentu harus didasari oleh alasan substantif dan tidak boleh hanya sekadar demi perubahan itu sendiri. Pembaruan kurikulum semestinya diabdikan pada terwujudnya praktik pembelajaran yang lebih berkualitas bagi peserta didik menuju terwujudnya sumber daya manusia yang andal dan unggul.

Kurikulum yang baik sangat diperlukan dalam praktik pendidikan. Namun, sebagai masukan instrumental, kurikulum yang baik belum menjamin mutu pendidikan akan baik pula. Mutu proses dan hasil pendidikan akan lebih banyak bergantung pada guru sebagai pihak yang mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam praktik pembelajaran. Ditegaskan oleh Sarwiji Suwandi (2001:1, 2002c:46) bahwa peranan penting guru tidak saja bertalian dengan mentransmisikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mentransmisikan dan mengembangkan nilai-nilai.

Berkenaan dengan peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan di atas, ada suatu pandangan yang menyatakan bahwa anak akan belajar lebih baik melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan yang alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak “mengalami” apa yang dipelajarinya, bukan “mengetahui”-nya. Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi “mengingat” jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang (Depdiknas, 2003:1).

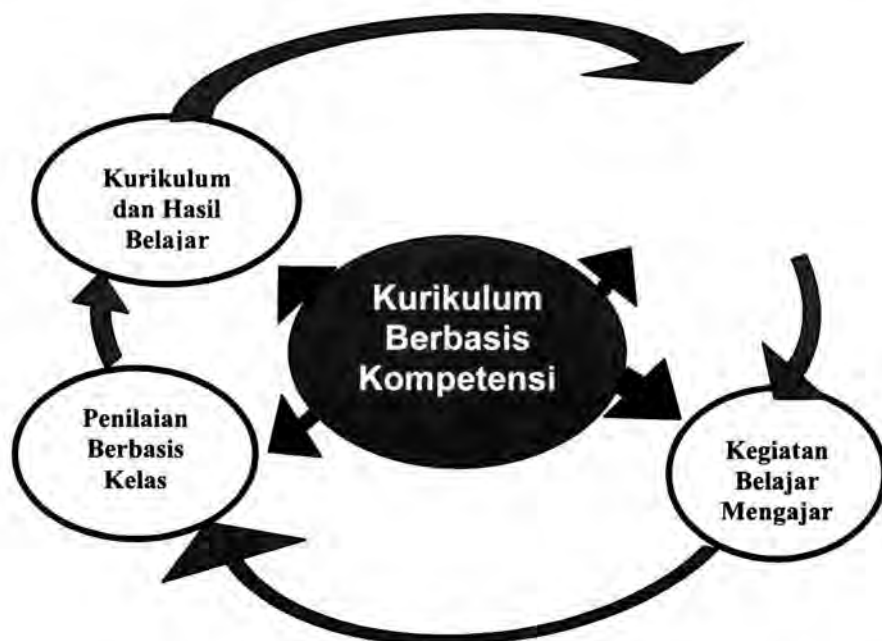
Sejalan dengan uraian di atas, makalah ini akan menjelaskan ihwal Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)—khususnya Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, implikasi KBK, dan peranan guru dalam meningkatkan kemahiran berbahasa siswa berdasarkan KBK.

Ihwal Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum dikembangkan dengan pendekatan berbasis kompetensi agar lulusan pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Pertimbangan lainnya adalah agar sistem pendidikan nasional dapat merespons secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta tuntutan desentralisasi. Dengan demikian lembaga pendidikan tidak akan kehilangan relevansi program pembelajarannya terhadap kepentingan daerah dan karakteristik peserta didik dan tetap memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kurikulum yang verdiversifikasi (Depdiknas, 2002b:6).

Apakah kurikulum berbasis kompetensi itu? Menurut Kniep (dalam Suyono, 2002: 28), *a competency-based curriculum starts with identification of the competencies each learner is expected to master, states clearly the criteria and conditions by which performance will be assessed, and defines the learning activities that will lead to the learner to mastery of targeted competency*. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi setidaknya memiliki tiga karakteristik utama, yakni (1) berpusat pada siswa (*focus on learners*), (2) memberikan mata pelajaran dan pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual (*provide relevan and contextualized subject matter*), dan (3) mengembangkan mental yang kaya dan kuat pada siswa (*develop rich and robust mental models*).

Menurut Siskandar (2002: 2-3), KBK merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. KBK merupakan kerangka inti yang memiliki empat komponen seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Dasar Kurikulum Berbasis Kompetensi

1. Kurikulum dan Hasil Belajar (KHB)

KHB memuat perencanaan pengembangan kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai dengan 18 tahun. KHB memuat kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator pencapaian hasil belajar dari TK sampai dengan kelas XII.

2. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

KBM memuat gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik.

3. Penilaian Berbasis Kelas (PBK)

PBK memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik melalui identifikasi kompetensi/hasil belajar yang telah dicapai, pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai serta peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan.

4. Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah (PKBS)

PKBS memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi pula dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum, pengembangan perangkat kurikulum (antara lain silabus), pembinaan profesional tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem informasi kurikulum.

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak kompetensi memiliki sejumlah karakteristik: (1) kompetensi bersifat dinamis (*a competency is dynamic*), (2) kompetensi berkembang dari waktu ke waktu (*a competency develops over time*), (3) kompetensi adalah keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu (*a competency is about skills and knowledge that people do something with*), dan (4) kompetensi terukur (*a competency is assessable*) (*Ministry Developers Collaborative*, 2003). Dengan demikian, jelaslah bahwa kompetensi itu terus berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan. Berkenaan dengan keterampilan dan pengetahuan, pada akhirnya pembelajar tidak hanya dapat mengatakan tentang kompetensinya, tetapi dapat menunjukkan atau mendemonstrasikan keterampilan dan keahliannya itu.

Dalam hal mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (BSI), jika dicermati, sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara KBK dengan kurikulum sebelumnya (Kurikulum 1994). Dijelaskan dalam

KBK bahwa mata pelajaran BSI adalah program untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap Bahasa dan Sastra Indonesia. Fungsi mata pelajaran BSI adalah sebagai (1) sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa; (2) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya; (3) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) sarana penyebarluasan pemakaian BSI yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah; (5) sarana pengembangan penalaran; dan (6) sarana menimbulkan pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khazanah kesusastraan Indonesia.

Rumusan pengertian dan fungsi mata pelajaran BSI di atas hampir sama dengan yang terdapat dalam Kurikulum 1994. Namun, perlu diakui bahwa ada elaborasi dalam KBK. Selain mengadopsi lima butir fungsi mapel BSI yang terdapat dalam Kurikulum 1994, KBK menambahkan satu butir lagi, yaitu mapel BSI berfungsi sebagai sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khazanah kesusastraan Indonesia. Elaborasi tersebut menunjukkan bahwa KBK menekankan pentingnya siswa memahami budaya Indonesia yang majemuk (pluralistik).

KBK—sebagaimana Kurikulum 1994—menekankan pembinaan dan peningkatan kompetensi komunikatif siswa, yaitu siswa terampil menggunakan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. Ia juga menekankan penguasaan keterampilan hidup. Hal itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Keterampilan hidup (*life skill*) harus dimiliki individu sehingga memungkinkan ia mendapat jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, misalnya keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpikir logis, keterampilan berpikir kritis, keterampilan menganalisis, hubungan interpersonal, kesadaran diri, dan pemecahan masalah. Termasuk dalam keterampilan ini adalah kemampuan yang membuat individu percaya diri, toleran terhadap keberagaman, mau bekerja sama dengan individu atau kelompok, dan mempunyai tanggung jawab bersama.

Penekanan pada aspek keterampilan dalam kegiatan pembelajaran sangatlah tepat. Dalam kenyataan hidup orang sering dituntut memiliki kompetensi yang bersifat sangat spesifik; dalam dunia kerja sangat dituntut kerja sama, pembagian tugas, dan tanggung jawab bersama (*sharing assignment and responsibility*). Oleh karena itu, pembelajaran yang steril dari peristiwa yang berlangsung di luar sekolah tidaklah tepat. Pembelajaran atau pendidikan umumnya harus dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dalam kesatuan yang utuh.

Penekanan pada aspek intelektual, emosional, dan sosial itu sesungguhnya selaras dengan praktik pembelajaran bahasa yang menekankan kemampuan siswa mengekspresikan fungsi bahasa. Menurut Richards, Platt,

dan Waber (1985:115-116), bahasa memiliki tiga fungsi utama, yaitu (1) fungsi deskriptif, (2) fungsi ekspresif, dan (3) fungsi sosial. Fungsi pertama adalah untuk menyampaikan informasi faktual. Fungsi kedua ialah memberi informasi mengenai pembicara itu sendiri, mengenai perasaannya, kesenangannya, prasangkanya, dan pengalamannya yang telah lewat. Fungsi ketiga ialah melestarikan hubungan sosial antarmanusia.

Pentingnya aspek intelektual, emosional, dan sosial perlu disadari oleh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Goleman (1995: xiii) memperlihatkan faktor yang terkait mengapa orang yang ber-IQ tinggi gagal, sedangkan orang yang ber-IQ sedang-sedang menjadi sukses. Perbedaannya sering terletak pada kemampuan yang disebutnya kecerdasan emosional yang mencakup pengendalian diri, semangat dan ketekunan, motivasi diri, empati dan kecakapan sosial. Keterampilan itu perlu diajarkan kepada peserta didik untuk memberi mereka peluang yang lebih baik dalam memanfaatkan potensi intelektual mereka.

Implikasi Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Perubahan sebuah kurikulum sudah barang pasti memunculkan implikasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam tinjauannya tentang KBK, Sarwiji Suwandi (2002a:12-15) mengemukakan sejumlah implikasi atas penerapan KBK tersebut. Implikasi itu dikemukakan berikut ini.

Pertama, implikasinya terhadap pembuatan rencana pembelajaran oleh guru. Pembuatan rencana pembelajaran yang "formalistik" dan lebih memenuhi "tuntutan kedinasan semata-mata" perlu dievaluasi. Penghabisan waktu untuk pembuatan persiapan mengajar secara formal kiranya perlu dikaji ulang. Berkenaan dengan itu, penyusunan rencana pembelajaran berbasis CTL (*Contextual Teaching and Learning*) kiranya merupakan pilihan yang tepat.

Kedua, implikasinya terhadap kegiatan belajar-mengajar (KBM). Kegiatan belajar mengajar mata pelajaran BSI harus senantiasa diarahkan pada peningkatan kemahiran berbahasa, baik secara reseptif maupun ekspresif. Dalam kegiatan bersemuka antara siswa dan guru di kelas dan tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya guru selalu mengupayakan agar siswa terlibat dalam aktivitas menggunakan bahasa untuk berkomunikasi; siswa aktif melakukan kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk itu, guru perlu mengupayakan agar siswa dapat belajar secara aktif, efektif dan menyenangkan (*active, joyful and effective learning* (AJEL). Siswa tidak menganggap kegiatan pembelajaran sebagai beban, sebaliknya melakukannya dan merasakannya sebagai hal yang mengasyikkan.

Ketiga, implikasinya terhadap kemampuan guru. Guru dituntut memiliki keterampilan yang andal serta memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai kompetensi yang harus dimiliki siswa. Dalam hal mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru dituntut memiliki keterampilan berbahasa

serta memiliki pemahaman yang baik tentang unsur dan kaidah tata bahasa Indonesia. Tanpa bekal itu, guru akan menemui kesulitan dalam membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran. Guru yang baik adalah guru yang dapat dijadikan figur teladan bagi siswa, baik dalam kecakapan akademik maupun hal-hal lain di luar bidang akademik.

Keempat, implikasinya terhadap penilaian hasil belajar. Sejalan dengan tujuan pembelajaran adalah siswa memiliki keterampilan berbahasa, tes yang dikembangkan dan digunakan haruslah tes yang dapat mengukur kompetensi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Idealnya, tes harus dapat mengukur seberapa jauh keterampilan berbahasa siswa. Namun, berkenaan dengan kepraktisan, kompetensi membaca dan menulis saja yang dapat diukur melalui tes hasil belajar, seperti tes akhir semester atau UAN. Untuk itu, pemberdayaan terhadap guru agar mampu mengembangkan dan menyusun instrumen tes yang mengukur kompetensi berbahasa siswa perlu dilakukan. Sementara itu, untuk menilai kompetensi berbicara siswa dapat dilakukan dengan pendekatan *continuous assessment*. Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan proses, yang dilakukan selama KBM berlangsung.

Kelima, implikasinya terhadap sikap mental penyelenggara pendidikan, khususnya guru. Sesuai dengan tuntutan kurikulum agar siswa dapat menjadi manusia yang demokratis, maka kegiatan pendidikan harus berlangsung dalam suasana demokratis pula. Selain dalam lingkup manajemen sekolah dan bahkan sistem pendidikan pada umumnya, demokratisasi pendidikan harus dapat diwujudkan dalam bentuk yang sederhana dan riil, yaitu demokratisasi pembelajaran di kelas. Sarwiji Suwandi (1999:19) menyatakan bahwa guru perlu membuka diri untuk menerima masukan bahkan kritikan. Guru yang selalu menyampaikan pernyataan, sementara itu siswa dituntut "duduk manis" dan menyerap isi ceramahnya; guru yang memosisikan dirinya sebagai yang paling tahu segala hal di depan peserta didik; guru yang kurang mendorong timbulnya prakarsa; dan guru yang kurang memberikan ruang terjadinya dialog demi terbangunnya iklim akademik dan ilmiah adalah sosok guru yang bukan saja tidak sesuai dengan tuntutan KBK, tetapi juga tidak sesuai dengan paradigma baru pendidikan. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar yang mutlak dan selalu benar, tetapi ia boleh dan bisa saja salah atau kurang pada sisi tertentu. Untuk itu, dalam dunia keilmuan guru hendaklah tidak terjebak dalam pemikiran monolitik, dikotomik, dan preskriptif dengan menempatkan dirinya pada posisi yang "benar".

Guru perlu mengupayakan terciptanya kondisi masyarakat belajar (*learning community*). Konsep ini menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh melalui *sharing* antarteman dan antarkelompok. Untuk itu, guru perlu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok belajar. Keanggotaan dalam

kelompok itu hendaknya bersifat heterogen. Dengan demikian, melalui kelompok itu dimungkinkan siswa yang kurang bisa belajar dari yang mampu atau siswa yang mampu mengajari yang lemah, yang tahu memberi tahu yang belum tahu, yang mempunyai gagasan segera memberi usul, dan sebagainya.

Masyarakat belajar dapat terjadi apabila terdapat proses komunikasi dua arah; terdapat hubungan dialogis. Kegiatan saling belajar bisa terjadi jika tidak ada pihak yang dominan dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa segan untuk bertanya, tidak ada pihak yang menganggap paling tahu, dan semua pihak mau saling mendengarkan. Setiap pihak harus merasa bahwa setiap orang lain memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang berbeda yang perlu dipelajari.

Iklim pembelajaran yang digambarkan di atas memungkinkan munculnya keberanian pada diri siswa untuk mengemukakan pendapat, bertanya, mengkritik, dan sebaliknya berani mengakui kekurangan apabila memang mereka melakukan kesalahan. Pembelajaran demikian memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi siswa untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya.

Keenam, implikasinya terhadap perlakuan pembelajaran. KBK merupakan kurikulum berdiversifikasi. Diversifikasi itu terutama ditujukan kepada siswa yang memiliki kemampuan lebih. Untuk itu, guru perlu mendorong kreativitas siswa melalui pengembangan belajar berdasarkan pengalaman dan minat anak. Kegiatan siswa di kelas tidak harus sama sebab anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang kurang.

Ketujuh, implikasinya terhadap pengembangan atau penjabaran kurikulum serta penentuan sumber dan sarana belajar. Kurikulum dapat dielaborasi oleh daerah dan/atau sekolah sesuai dengan kondisi dan kepentingan daerah atau sekolah. Hasil elaborasi itu berupa silabus. Sementara itu, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta semangat perubahan yang tercermin pada KBK, sumber dan sarana belajar yang bersifat sentralistik tidak relevan. Sekolah, khususnya guru, dapat memilih dan bahkan menyusun bahan ajar (buku) yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai dalam kurikulum.

Peranan Guru dalam Meningkatkan Kemahiran Berbahasa Siswa

Terdapat banyak variabel yang terlibat dalam sebuah interaksi edukatif antara siswa dan guru dan karenanya banyak variabel pula yang turut menentukan keberhasilan belajar anak. Namun, guru tetap dipandang sebagai variabel penting dan menduduki posisi sentral dalam menyukseskan

keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Rendahnya mutu guru sebagai faktor determinan penyebab rendahnya mutu dari suatu sekolah, dan sebaliknya. Siswa yang berprestasi pada umumnya memiliki akses untuk berkembang dengan lebih baik di bawah asuhan guru yang profesional serta memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Demikian pula halnya dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.

Siswa sulit belajar sendiri tanpa bimbingan guru yang mampu mengemban tugasnya dengan baik. Para siswa dapat belajar dengan baik jika guru telah mempersiapkan lingkungan positif bagi mereka untuk belajar. Penegasan tentang peranan penting guru dikemukakan oleh Sudiarto (1993:28). Dipaparkannya bahwa pentingnya guru dalam sistem pendidikan ditunjukkan oleh peranannya sebagai pihak yang harus mengorganisasi elemen lain seperti sistem kurikulum, sistem penyajian bahan pelajaran, sistem administrasi, dan sistem evaluasi.

Berdasarkan beberapa implikasi yang telah disebutkan, guru memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan komunikatif siswa. Dan untuk itu, guru terlebih dahulu harus memiliki kemampuan komunikatif itu. Menurut Canale (1983:6), kemampuan komunikatif terbentuk dari empat kompetensi, yaitu kompetensi gramatika, kompetensi sosiolinguistik, kompetensi wacana, dan kompetensi strategi. Untuk menyuksekkan tanggung jawab itu, Sarwiji Suwandi (2002b:12-14) mengemukakan sejumlah peranan penting yang diemban guru dalam upaya mengefektifkan pembelajaran bahasa Indonesia. Uraian berikut akan menjelaskan berbagai peranan guru tersebut.

Pertama, peranan guru sebagai perencana pembelajaran yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, guru perlu menyusun rencana pembelajaran berbasis CTL alih-alih menyusun rencana pembelajaran yang selama ini cenderung "formalistik" atau untuk memenuhi tuntutan kedinasan. Ha-hal pokok yang perlu diperhatikan guru antara lain adalah penentuan kompetensi dasar yang akan dikembangkan, media pembelajaran yang akan digunakan, skenario pembelajaran (berkenaan aktivitas yang akan dilakukan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran), dan penilaian yang akan dilakukan.

Berkenaan dengan perencanaan materi ajar, guru hendaknya mampu menyiapkan atau mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Materi ajar harus benar-benar sesuai dengan jenis kegiatan pembelajaran (dialog, tanya jawab, bercerita, bermain peran, dan kegiatan berbahasa yang lain) dan tujuan pembelajaran bahasa (meningkatkan kemahiran berbahasa dan kemampuan mengapresiasi karya sastra). Bahan ajar itu hendaknya disesuaikan pula dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswanya.

Untuk keperluan di atas, kegiatan yang dapat dilakukan guru adalah memilih teks dan menambahkan beberapa pertanyaan/tugas, dan kemudian

menjadikannya sebagai bahan ajar di kelas. Jika materi ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran belum tersedia, hal yang dapat dilakukan guru antara lain adalah memodifikasi bahan ajar yang berasal dari bahan autentik (dari buku, karya sastra, koran, majalah, alam, nara sumber, pengalaman dan minat anak, hasil karya siswa, dan sebagainya).

Kedua, peranan guru sebagai fasilitator yang kreatif dan dinamis. Peranan ini berkaitan erat dengan arah KBM untuk meningkatkan kemahiran berbahasa siswa. Guru diharapkan dapat menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran atau manajemen kelas yang bervariasi, mengatur kelas dalam suasana yang menyenangkan, serta menyiapkan dan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menantang partisipasi aktif siswa dalam kegiatan berkomunikasi. Guru secara kreatif mampu menyediakan atau menciptakan berbagai media pembelajaran serta mengoptimalkan penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran. Peranan penting guru sebagai fasilitator ditegaskan oleh Brown (2000:7) yang menyatakan bahwa guru bertugas membimbing dan memfasilitasi siswa dalam belajar.

Sebagai fasilitator dalam pembelajaran, guru perlu banyak memberi latihan dan kesempatan kepada siswa untuk berbahasa. Siswa harus difasilitasi untuk mampu menggunakan bahasa, baik reseptif maupun ekspresif, baik lisan maupun tertulis. Dalam kegiatan belajar-mengajar, setiap siswa perlu memperoleh kesempatan untuk belajar dan “mengajar” (bertanya, menjawab pertanyaan, menjelaskan, mengemukakan pendapat, dan sebagainya). Selain itu, guru perlu mengupayakan terjadinya pengayaan pengalaman siswa. Guru juga perlu senantiasa memberi dorongan agar siswa sendiri secara sadar dan berencana melakukan pengayaan terhadap pengalaman yang telah dimilikinya.

Ketiga, peranan guru sebagai model. Salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan pendekatan kontekstual adalah pemodelan (*modeling*), yaitu terdapatnya model yang bisa ditiru siswa. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, guru hendaknya dapat menjadi model yang baik bagi para siswa, baik yang berkaitan dengan performansi berbahasa (yang mencakup empat aspek keterampilan berbahasa), karya, maupun bidang apresiasi sastra. Guru diharapkan dapat berperan sebagai figur yang dapat diteladani. Namun, yang perlu diingat bahwa guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Model juga dapat didatangkan dari luar, baik yang berupa sosok orang, aktivitas, maupun karya tertentu. Guru Bahasa Indonesia dapat mendatangkan wartawan atau sastrawan, menunjukkan kolom berita atau karya ilmiah, dan sebagainya.

Keempat, peran guru sebagai motivator. Aktivitas siswa dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Penguatan itu, menurut Pah (1985:6-8), dapat bersifat verbal dan dapat pula yang nonverbal. Penguatan verbal—yang antara lain

berupa pujian, dukungan, pengakuan—dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat. Sementara itu, penguatan nonverbal dapat berupa: mimik dan gerakan badan, cara mendekati (*proximity*), pemberian sentuhan, pemberian kegiatan yang menyenangkan (berhubungan dengan penampilan yang diberi penguatan), dan penggunaan simbol atau benda sebagai insentif. Perlu juga dihindari kecenderungan peran guru sebagai “hakim bahasa”. Guru dituntut memiliki kemampuan akomodatif terhadap pendapat yang dikemukakan oleh siswa. Kekurangakomodatifan guru akan berdampak pada kurang atau tidak berkembangnya kreativitas (berbahasa) siswa.

Kelima, peran guru sebagai evaluator. Seperti telah dipaparkan di atas, selain penilaian hasil, penilaian proses sangat diperlukan dalam kegiatan belajar-mengajar. Dengan penilaian proses, perkembangan kemahiran berbahasa atau kompetensi komunikatif siswa dapat diketahui. Dalam hubungan ini, peranan guru dalam memberikan umpan balik terhadap kesalahan berbahasa siswa sangat bermakna, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam rangka mewujudkan keterampilan berbahasa siswa.

Selaras dengan tujuan pembelajaran bahasa yang digariskan dalam KBK, penilaian (*assessment*) tidak dilakukan pada akhir periode pembelajaran, tetapi dilakukan bersama secara terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Karena penilaian menekankan proses pembelajaran, data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran yang benar seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari (*learning how to learn*) sesuatu, bukan ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi pada akhir pembelajaran. Dengan demikian, kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan melulu hasil, dan dengan berbagai cara. Tes hanya salah satu alat penilaian.

Dalam konteks KBK, guru harus mampu melakukan penilaian yang sebenarnya (*authentic assessment*). Adapun karakteristik *authentic assessment* adalah (a) penilaian dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran, (b) bisa digunakan untuk formatif dan sumatif, (c) yang diukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta, (d) berkesinambungan, (e) terintegrasi, dan (f) dapat dipakai sebagai feed back. Sementara itu, hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswa meliputi: PR, kuis, presentasi, demonstrasi, karya siswa, laporan, hasil tes tertulis, karya tulis, dan sebagainya. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan guru meliputi penilaian proses ataupun penilaian hasil. Penilaian juga tidak semata-mata dilakukan oleh guru; tetapi dapat juga dilakukan oleh siswa

Penutup

Kurikulum yang baik sangat diperlukan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. Kurikulum Berbasis Kompetensi—yang merupakan hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya—kita asumsikan merupakan sebuah kurikulum yang baik. Namun, yang penting disadari oleh semua pihak bahwa betapapun baiknya sebuah kurikulum belum menjamin keberhasilan pendidikan dan pembelajaran. Bersamaan dengan upaya penyempurnaan kurikulum tersebut hendaknya secara simultan dilakukan perbaikan mutu pembelajaran. Pembelajaran hendaknya tidak *text book oriented* dan “mensterilasi” anak-anak dari lingkungan dan kehidupan sehari-hari mereka. Pembelajaran hendaknya mampu memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuan serta mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya. Pembelajaran hendaknya mampu memfasilitasi siswa untuk mengalami sendiri dalam lingkungan yang alamiah. Pembelajaran hendaknya memberikan peluang dan latihan kepada anak untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuannya

Pembelajaran yang berkualitas atau pembelajaran yang efektif tersebut akan sangat ditentukan oleh (1) ketersediaan guru-guru yang kompeten dan profesional, guru yang memiliki kemampuan reflektif; (2) keorganisasian sekolah yang dapat memfasilitasi keterlaksanaan belajar dan mengajar (di ruang kelas, sekolah, atau masyarakat); dan (3) partisipasi masyarakat dalam penyediaan sumber dorongan, termasuk penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan perkataan lain, implemtasi KBK dapat berhasil dengan baik jika dijiwai oleh penerapan kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, H. Douglas. 2000. *Principles of Language Learning and Teaching, Fourth Edition*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall Regents.
- Canale, Michael. 1983. "From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy," dalam Jack C. Richards dan Richards W. Schmidt, (Ed.) *Language and Communication*. London: Longman.
- Depdiknas. 2002a. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep Dasar*. Jakarta: Direktorat SLTP Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
- _____. 2002b. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Puskur Balitbang.
- _____. 2003. *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)*. 2002. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
- Goleman, Daniel. 1997. *Emotional Intelligence*, Terjemahan T. Hermaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ministry Developers Collaborative. 2003. *Competency-based Curriculum: Introduction*. (<http://www.mindevelopers.org/competency.html>), Diakses 29 Juni 2003.
- Pah, D.N. 1985. *Keterampilan Memberi Penguatan*. Jakarta: P2LPTK Ditjen Dikti Depdikbud.
- Richards, Jack, John Platt, dan Heidi Waber. 1985. *Longman Dictionary of Applied Linguistics*. England: Longman.
- Sarwiji Suwandi. 1999. "Reformasi Pendidikan Mewujudkan Manusia Kreatif, Produktif, dan Demokratis" dalam *Motivasi*, Edisi XXIII. Surakarta: FKIP Universitas Sebelas Maret.
- _____. 2001. "Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Indonesia" Makalah disajikan dalam Semnas XI Bahasa dan Sastra Indonesia, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia, Denpasar Bali 10—12 Juli 2001.
- _____. 2002a. "Kurikulum Berbasis Kompetensi: Sebuah Tinjauan Awal" Makalah disajikan dalam Semnas Pembelajaran Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana UNS, 18 Februari 2002.

- _____. 2002b. "Peningkatkan Kompetensi Berbahasa Siswa Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi" Makalah dibentangkan pada Semiloka Kurikulum Berbasis Kompetensi, Dinas Diknas Semarang, 16 April 2002.
- _____. 2002c. "Upaya Meningkatkan Kemampuan Profesional Guru Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Supervisi Klinis". Dalam *Varidika*, Vol 14, No. 24. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Siskandar, H. 2002. "Kurikulum Berbasis Kompetensi dan peningkatan Minat Baca" Makalah disajikan pada Simposium Nasional Pembelajaran Bahasa, Unnes, 14 Oktober 2002.
- Sudiarto. 1993. *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sunardi. 2003. "Pendidikan Progresif: Paradigma untuk Mengejar Keteringgalan Kualitas Pendidikan di Indonesia". Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sebelas Maret 16 Januari 2003.
- Suyono, 2002. "Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kondisi Penerapannya di Sekolah", Makalah disajikan pada Simposium Nasional Pembelajaran Bahasa, Unnes, 14 Oktober 2002.

MENCARI PENUTUR MODEL BAHASA INDONESIA: GURU, BIROKRAT, DAN JURNALIS

C. Ruddyanto

Pusat Bahasa

Pendahuluan

Perencanaan bahasa di Indonesia sudah berlangsung puluhan tahun dan dapat dikatakan mulai tertata sejak berdirinya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, lembaga yang diserahi tanggung jawab untuk itu, pada tahun 1975. Sudah sewajarnya diajukan pertanyaan, misalnya, seberapa tingkat keberhasilan yang dicapai oleh lembaga kebahasaan itu dan upaya apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan itu. Untuk menjawab pertanyaan itu perlu ada evaluasi terhadap semua tahap perencanaan bahasa beserta implementasi dan hasilnya. Itulah salah satu hal yang akan disinggung dalam makalah ini agar evaluasi benar-benar menjadi bagian dari perencanaan bahasa di Indonesia.

Untuk meningkatkan efisiensi kerja lembaga ini, salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah ketepatan pemilihan sasaran program. Dalam hal ini evaluasi itu harus didasarkan pada hasil pengkajian tentang pemakaian bahasa oleh berbagai kalangan yang menunjukkan kelompok penutur bahasa Indonesia yang pengaruhnya paling besar terhadap penutur pada umumnya. Mereka itu dapat diberi prioritas tinggi sebagai sasaran perencanaan bahasa.

Sementara evaluasi formal semacam itu belum dilakukan, di sini diusulkan tiga kelompok penutur sebagai model berdasarkan beberapa pertimbangan dan pengamatan. Ketiga kelompok itu adalah guru, birokrat, dan jurnalis. Di sini saya juga memberi ulasan atas hasil survei yang saya lakukan terhadap ketiga kelompok itu.

Perencanaan Bahasa di Indonesia

Proses perencanaan bahasa di Indonesia digambarkan secara sederhana dengan dua kata pada nama Pusat Bahasa yang dahulu: pengembangan dan pembinaan. Istilah *pengembangan bahasa* digunakan untuk menyebut usaha mengembangkan sandi bahasa (Moeliono, 1985: 78) yang oleh Ferguson (1968) dibagi atas pengaksaraan, pembakuan, dan pemodernan. Pengembangan bahasa yang didefinisikan seperti itu merupakan perencanaan korpus (Haugen, 1983). Pengembangan dilakukan dengan intensif karena sebagai bahasa yang relatif "muda", bahasa Indonesia harus mampu berfungsi sebagai bahasa resmi dalam berbagai keperluan. Sementara itu, istilah *pembinaan bahasa* mengacu ke usaha untuk memperbaiki mutu pemakaian bahasa dan meningkatkan jumlah pemakai, yang antara lain

dilakukan dengan menyebarkan hasil pengembangan atau kodifikasi bahasa. Jadi, sebagai bagian dari perencanaan bahasa, pembinaan bahasa itu dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meyakinkan penutur untuk berbahasa seperti yang diidealkan perencana bahasa dan yang dikodifikasi melalui pengaksaraan, penyusunan tata bahasa, dan pengembangan leksikal. Pembinaan dilakukan berdasarkan norma bahasa yang sudah disepakati dan/atau yang baru saja dipilih dan dianjurkan untuk disepakati. Dalam literatur Indonesia istilah itu sering dipadankan dengan *language cultivation* (lihat misalnya Moeliono (1985:6, 9)), tetapi istilah *cultivation approach* oleh Neustupný (1974:44) digunakan untuk menyebut salah satu ancangan perencanaan bahasa yang dikontraskan dengan *policy approach*. Menurut dia, ancangan pembinaan dan ancangan kebijakan tidak dapat dilakukan bersamaan. Yang pertama biasa terjadi di negara industri yang sudah maju, sedangkan yang terakhir di negara yang kurang berkembang.

Dalam berbagai program yang berpayung pada proses pengembangan dan pembinaan bahasa itu, sejauh yang saya ketahui, Pusat Bahasa tidak pernah secara khusus melakukan kegiatan evaluasi secara formal. Oleh sebab itu, seperti yang disarankan oleh Lapoliwa (1998), saya menganggap sudah saatnya para perencana bahasa di Indonesia memberi perhatian yang lebih terhadap evaluasi dalam upaya penanganan masalah kebahasaan yang semakin kompleks di negeri ini. Evaluasi itu perlu dilakukan untuk melihat apakah yang sudah dilakukan selama ini telah merupakan upaya terbaik dengan hasil seperti yang diharapkan.

Adalah Rubin (1971) yang dianggap pencetus gagasan ini. Dia mengusulkan kegiatan ini sebagai tahap akhir dari perencanaan bahasa. Pada Lapoliwa (1998) yang disebutkan di atas itu pun evaluasi ditempatkan pada akhir proses. Namun, pendapat yang berkembang kemudian sejak Rubin itu adalah bahwa evaluasi tidak hanya merupakan tahap akhir yang akan berguna untuk penyusunan rencana yang baru. Menurut Karam (1974:109) evaluasi itu meliputi pemantauan dan penilaian terhadap hasil penyusunan rencana dan implementasinya, termasuk perkembangan bahasa itu sendiri. Dalam kata-kata Dua (1991), evaluasi itu dapat dilaksanakan di tingkat mikro dan makro dengan fokus pada arah kebijakan, proses implementasi, atau hasil perencanaan. Dengan demikian, seperti disarankan Daoust (1997), evaluasi itu adalah bagian integral dari perencanaan bahasa yang berorientasi jauh ke masa depan untuk mengubah bahasa dan pemakaian bahasa. Lebih tegas lagi, Kaplan and Baldauf (1997:91—92) menyebutkan bahwa evaluasi seharusnya berlangsung pada setiap tahap dari proses perencanaan bahasa.

Fishman (1974) mengamati bahwa evaluasi memang sesuatu yang tidak menyenangkan untuk semua perencanaan, termasuk perencanaan bahasa. Jika dibandingkan dengan waktu, dana, dan tenaga yang digunakan untuk perencanaan, terlalu sedikit yang dicurahkan untuk evaluasi yang

sebetulnya bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan perencanaan itu. Pengamatan Fishman itu tepat sekali untuk konteks Indonesia. Selama ini, kalau pun dilakukan, evaluasi itu tidak tampak dalam penyusunan rencana dan pelaksanaannya. Juga tidak jelas di tempatkan di mana tulisan evaluatif yang sebagian besar dilakukan pihak lain di luar perencana bahasa dan yang umumnya dikemas dalam wujud kritik. Tulisan yang dimaksud, misalnya, adalah Abdullah (1998), Heryanto (1996), dan Suprpto (2001).

Penutur Model sebagai Sasaran Pembinaan Bahasa

Seperti yang disebutkan di atas, pembinaan bahasa adalah salah satu aspek perencanaan bahasa. Semakin besar jumlah penutur bahasa dan semakin beragam latar belakang bahasa ibu, pendidikan, dan budaya penuturnya, serta semakin luas wilayah geografis pemakaian bahasa itu, semakin beratlah tugas pembinaan bahasa itu dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan biaya yang sangat besar dan sumber daya manusia yang berkeahlian tinggi. Demi efisiensi biasanya dibuat prioritas, baik yang menyangkut ragam bahasa yang akan dikembangkan maupun kelompok penutur yang akan dibina pemakaian bahasanya.

Hal itulah yang dilakukan oleh Pusat Bahasa. Sejak berdirinya, lembaga ini lebih menitikberatkan pembakuan dan pembinaan ragam bahasa tulis resmi. Dengan demikian, pemakai bahasa yang menjadi sasaran kegiatan itu juga lebih terbatas pada mereka yang pekerjaan dan tugas sehari-harinya menggunakan ragam itu (lihat Sugono *et al.*, 1998:82). Pemberian prioritas seperti itu dapat saja mengundang tanggapan, baik yang bernada protes maupun saran untuk lebih meluaskan sasaran. Muadz (2000), misalnya, menggugat pengabaian pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, terutama untuk bahasa pengantar di sekolah. Kaswanti Purwo (2000) mempersoalkan mengapa ragam tak resmi tidak mendapat perhatian. Sementara itu, Halim (1998) melihat bahwa cara penyampaian program bahasa Indonesia di televisi yang tidak memperhatikan keterpahaman oleh penduduk di pedesaan mengakibatkan kesenjangan hasil pembinaan bahasa antara daerah perkotaan dan pedesaan. Bagaimanapun ketersediaan dana dan tenaga yang ada di Pusat Bahasa, pembuatan prioritas adalah keharusan. Pertanyaannya adalah bagaimana prioritas itu dibuat sehingga pembinaan bahasa lebih efektif dan juga efisien.

Bahasa terbentuk oleh kesepakatan. Semakin banyak orang yang melibatkan diri di dalam itu semakin mantap pula bahasanya. Kesepakatan berbahasa dapat diprakarsai oleh seseorang atau suatu lembaga yang terus-menerus berusaha meyakinkan orang untuk mengikutinya, tetapi dapat pula terjadi begitu saja dan orang dengan kemauan sendiri ikut dalam kesepakatan itu dengan alasan masing-masing. Pada hakikatnya pembinaan

bahasa adalah usaha untuk menarik orang sebanyak-banyaknya ke dalam kesepakatan itu.

Kesepakatan berbahasa juga akan semakin kokoh jika para penuturnya memiliki keyakinan bahwa cara berbahasa yang disepakati itu adalah yang terbaik. Hal ini mengandaikan kemampuan orang untuk menilai baik-buruknya objek kesepakatan itu. Dalam banyak hal, kemampuan seperti itu berkaitan erat dengan kemampuan bernalar yang antara lain dihasilkan melalui pendidikan atau pelatihan intelektual yang memadai. Itulah sebabnya, Neustupný (1974:44) beranggapan bahwa pembinaan bahasa dapat dilakukan pada masyarakat industri yang modern.

Jika Indonesia tidak dapat digolongkan ke dalam masyarakat yang seperti itu, tidaklah berlebihan jika kita tidak dapat mengharapkan bahwa penutur bahasa Indonesia pada umumnya memiliki kemampuan untuk menilai baik-buruknya cara berbahasa tertentu sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Dengan kata lain, cara berbahasa kita lebih ditentukan oleh kebiasaan mengikuti saja apa yang dilakukan orang. Sebagai contoh, pada masa lalu, setelah seorang pemimpin atau pejabat menggunakan kata *revolusi*, *demokrasi terpimpin*, *era globalisasi* dan *nilai tambah*, pemakaian kata-kata itu tidak pernah absen dari bacaan dan pendengaran orang pada hari-hari selanjutnya. Saat ini pun kata-kata seperti *kolaborasi* dan *wacana* berhamburan seperti anai-anai selepas hujan malam. Lihat juga bagaimana menjamurnya nama pengunjuk rasa yang menggunakan akronim yang aneh-aneh, juga menjamurnya judul acara televisi seperti “Paparasi” (Paparan BLA BLA BLA), Poles (Polisi Selebritis), “Otista” (Obrolan Artis dalam Berita) yang seperti penyakit menular. Gejala yang sama terjadi ketika diperkenalkan istilah *BBWI* (alih-alih *WIB – Waktu Indonesia Barat*) yang tidak berdasar. Dalam sekejap masyarakat luas ikut-ikutan memakainya dengan tidak mempertimbangkan cermat-tidaknya istilah itu. Dapat diamati pula penggunaan konjungsi *di mana*, yang dulu dianggap sebagai pengaruh bahasa asing, tetapi sekarang ini seperti wabah tanpa fungsi jelas selain memberi kesan bahwa si penutur bermaksud menggunakan bahasa secara formal.

Situasi seperti itu menunjukkan adanya penutur yang dijadikan model, baik perseorangan maupun kelompok. Yang dijadikan penutur model itu dapat saja pemimpin masyarakat, pejabat, atau sosok yang menjadi anutan. Dapat juga mereka itu adalah sekalgan penutur yang memiliki kewibawaan yang bersumber dari jabatan, kedudukan, atau profesinya. Pemakaian bahasa yang mendominasi pajanan (*exposure*) penutur yang lain secara intensif juga berpeluang menjadi anutan walau sering tanpa disadari. Dengan demikian, pejabat pemerintahan, tokoh partai, politikus, tokoh masyarakat dan agama, para penulis dan sastrawan, artis, dosen dan guru, jurnalis, dan sebagainya adalah penutur yang pemakaian bahasanya sangat potensial menjadi model bagi penutur yang lain adalah.

Seperti telah disebutkan di atas, Pusat Bahasa memang menetapkan sasaran pembinaan bahasa. Mereka adalah masyarakat umum, karyawan instansi pemerintah dan swasta, guru, dan ahli bahasa (Sugono *et al.*, 1998: 82). Di sini terlihat bahwa Pusat Bahasa telah mencoba mengidentifikasi adanya penutur model, tetapi tetap memasukkan masyarakat umum sebagai sasaran. Pertanyaannya, seberapa besar perhatian yang dicurahkan ke penutur model itu melebihi dari yang lainnya sehingga dapat disebut prioritas sasaran.

Jika penutur model sudah ditetapkan, pertanyaan berikut adalah bagaimana menentukan metode pembinaan yang tepat. Selama ini Pusat Bahasa menggunakan baik metode kontak langsung maupun tak langsung untuk menyebarkan informasi dan pokok-pokok bahasa yang direkomendasikan. Kegiatan penyebaran informasi kebahasaan yang dilakukan Pusat Bahasa meliputi penyuluhan klasikal, pelayanan informasi telewat telepon dan surat, penyiaran program kebahasaan melalui televisi (berhenti sejak 2000) dan radio, serta penerbitan (Sugono *et al.*, 1998: 82–85). Dua tahun terakhir ini juga digunakan media internet dengan pembuatan laman atau *website*.) Semua ini perlu dievaluasi apakah efektif menjangkau sasaran yang dimaksud dan sesuai dengan selera mereka sehingga dapat menarik perhatian kelompok-kelompok itu. Jika tidak, perlu dipikirkan cara lain yang lebih tepat.

Menarik juga disimak apa yang dilaporkan oleh Cooper (1989: 60). Kaum feminis berhasil meyakinkan American Psychological Association untuk mengganti ungkapan yang seksis (misalnya *chairman* dengan *chairperson*) dalam jurnal dan terbitan mereka yang lain. Gerakan ini ternyata bergema di banyak tempat. Selain itu, ia juga melaporkan sebuah kegiatan yang digolongkannya sebagai perencanaan bahasa yang ditujukan kepada lembaga pemerintah dan badan usaha di Amerika Serikat. Kegiatan itu telah berhasil memperbaiki keterpahaman berbagai dokumen seperti formulir yang dikeluarkan pemerintah, peraturan, instruksi dan undang-undang. Sementara itu, Shuy (1987) juga mengisahkan hal serupa. Social Security Administration di Amerika meminta bantuan ahli bahasa untuk membuat pemakaian bahasa tulis mereka lebih jelas dan efektif. Jika hal itu dilakukan di Indonesia, sangat mungkin bahasa yang digunakan oleh lembaga pemerintah dan swasta dapat menjadi model bagi penutur pada umumnya.

Guru, Birokrat, dan Jurnalis

Di atas telah disebutkan ada beberapa kalangan yang potensial sebagai penutur model. Dengan asumsi bahwa peningkatan efisiensi masih perlu dilakukan, Pusat Bahasa sebaiknya memilih dari sejumlah kelompok itu mana yang perlu mendapat perhatian lebih besar dalam pembinaan bahasa. Kriterianya adalah pengaruh paling besar pada pemakaian bahasa

masyarakat luas. Mungkin juga perlu diperhatikan variabel pendidikan, usia dan jenis kelamin. Di sini saya memilih tiga kelompok, guru, birokrat, dan jurnalis, yang menurut saya patut memperoleh prioritas tinggi dengan pertimbangan seperti berikut ini.

Para ahli yang bekerja di bidang nonbahasa amat sangat (*overwhelmingly*) setuju bahwa guru dan kaum muda adalah dua kelompok mediator dalam upaya memodernkan perilaku masyarakat luas (Fishman, 1974:97). Pembinaan bahasa di Indonesia sebenarnya juga dapat digolongkan ke dalam usaha pembaruan bahasa yang bermuara pada pemodernan. Jika penyejajaran itu dapat diterima, maka mereka itu juga dapat diharapkan sebagai penutur model yang akan mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Hal itu sejalan dengan pendapat Karam (1974:109) yang menganggap bahwa lembaga pendidikan adalah tempat yang cocok bagi penyebaran hasil kodifikasi sebagai implementasi rencana bahasa. Singapura sudah mencoba melaksanakan hal itu. Usaha untuk memperbaiki mutu bahasa Inggris dilakukan melalui dunia pendidikan yang menyiapkan generasi muda sebagai anggota masyarakat utama masa depan (Kuo, 1980:118). Oleh sebab itu, pemerintah Singapura mendatangkan penutur asli bahasa Inggris untuk mengajar di sekolah setempat dan melatih guru-guru sekolah (De Souza, 1980:228). Malaysia juga bertumpu pada sekolah dalam upayanya memodernkan bahasa nasional (Asmah Haji Omar, 1992:409). Di Israel, Akademi Bahasa Ibrani yang bertugas menghidupkan kembali bahasa itu sebagai bahasa sehari-hari juga menyebarkan istilah-istilah yang telah disetujui melalui sekolah-sekolah (Cooper, 1989: passim). Sementara itu, negara-negara Maghrib, yaitu Moroko, Tunisia, dan Algeria secara bertahap berhasil mengganti bahasa kolonial Prancis dengan bahasa Arab di berbagai sektor pengajaran, di samping di sektor media dan administrasi (lihat Breton, 1991:154). Contoh itu menunjukkan bahwa dunia pendidikan merupakan ranah pilihan untuk perencanaan bahasa dengan alasan dan tujuan yang berbeda.

Di Indonesia guru memang menjadi agen penyebarluasan norma bahasa yang dikodifikasi dalam buku-buku tata bahasa. Sayangnya, sebagai peletak dasar kemahiran berbahasa, pengajaran bahasa di sekolah sering menjadi sasaran keprihatinan. Djojonegoro (1998) pernah mengharapkan pemakaian bahasa guru menjadi teladan bagi peserta didik, tetapi hasil penelitian Suparno (2000) memperlihatkan kenyataan yang jauh panggang dari api. Sekalipun demikian, bagaimana pun pada umumnya sekolah adalah tempat penutur bahasa Indonesia memperoleh bahasa formal. Dalam situasi multibahasa hampir-hampir tidak ada tempat yang memungkinkan penutur terpajan pada pemakaian bahasa Indonesia formal seajek sekolah dengan waktu lebih dari dua puluh jam seminggu. Pemakaian bahasa guru, lebih-lebih pengajar bahasa Indonesia, menjadi model berbahasa bagi murid sekurang-kurangnya sewaktu berada di lingkungan sekolah dan, lebih

khusus lagi, selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Apa yang mereka ajarkan selain merupakan salah satu sumber pemerolehan bahasa Indonesia, juga menjadi acuan berbahasa. Walaupun jangkauan pengaruhnya sebatas dinding kelas, guru bertugas mengantarkan siswa ke tingkat tertentu kemahiran berbahasa yang sangat mungkin terus berkembang selepas masa pendidikan.

Kekuatan pers untuk membentuk opini tidak diragukan lagi. Banyak pemimpin besar dunia yang jatuh atau terguncang posisinya karena pemberitaan di media massa. Nixon pada masa lalu dan Tony Blair akhir-akhir ini adalah contohnya. Di Indonesia, walau belum ada kasus yang sepadan dengan kedua contoh itu, pers juga ditakuti oleh mereka yang berkuasa. Pembredelan koran dan majalah yang pernah terjadi menunjukkan hal itu. Namun, tentu kekuatan pers tidak hanya dalam pembentukan opini, tetapi juga pengaruh pemakaian bahasanya. Bahkan dalam proses pembakuan bahasa, bahasa pers bersaing dengan bahasa yang diajarkan di sekolah yang sering tidak diikuti oleh pers (Moeliono, 1989).

Tentang mutu pemakaian bahasa Indonesia oleh pers sudah banyak tulisan yang mengulasnya. Tidak hanya dari kalangan di luar pers, tetapi bahkan juga dari lingkungan mereka sendiri. Sekadar menyebut beberapa, ada Lubis (1983), Kurnia (1992), dan Assegaf (2000). Bahasa pers yang tidak sesuai dengan norma yang ditetapkan, terlebih yang diajarkan di sekolah, bahkan menuai tuduhan pers sebagai perusak bahasa. Hal itu sebetulnya bukan karena parahnya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan, tetapi terlebih karena dominannya bahasa pers itu dalam aktivitas berbahasa masyarakat sehari-hari. Keadaan serupa sangat mungkin juga terjadi pada ranah lain, tetapi kebetulan tidak teramati oleh banyak orang.

Patut dicatat pula bahwa kalangan pers bukan tidak menyadari kelemahan itu. Majalah *Tempo* dapat dikatakan sebagai perintis membenahan bahasa pers dengan menempatkan redaktur bahasa yang andal. Juga ada Forum Bahasa Media Massa (FBMM), sebuah perguyupan insan pers yang mengadakan pertemuan berkala untuk membicarakan masalah bahasa di media massa. Semua itu menunjukkan kepedulian pers untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasanya.

Bahasa birokrasi dalam kadar tertentu juga menjadi anutan. Mungkin tidak cukup sering masyarakat umum berhadapan langsung dengan birokrat, tetapi tidak berarti mereka jarang terpajan pada pemakaian bahasa birokrat. Masyarakat terpajan pada pemakaian bahasa birokrat melalui pengumuman, edaran, surat dinas, formulir isian, teks peraturan, dan ujaran baik langsung maupun lewat media massa. Bahasa birokrasi itu tidak jarang terimak (*imitated*) dalam kegiatan sosial mereka: surat-menyurat, pengumuman, pidato sambutan, atau pembicaraan dalam rapat di tingkat RT-RW atau organisasi kemasyarakatan yang lain.

Pajanan masyarakat umum pada bahasa birokrat juga berlangsung secara tidak langsung, yaitu melalui pers. Dhakidae (1996) melihat bahwa dominasi birokrasi dalam jurnalisme Indonesia sangat besar. Pers menjadi corong penyiaran program-program pemerintah. Dengan demikian, skala pajanan tak langsung ini jauh lebih besar daripada yang langsung karena tidak terbatas lagi oleh dinding-dinding kantor pemerintah. Apalagi pemerintah, setidaknya partai yang memerintah, ikut menerbitkan media yang disebar sampai ke desa-desa. Itu sebabnya, pengimakan bahasa birokrat berlangsung sangat cepat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa guru, birokrat, dan jurnalis memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pemakaian bahasa dari kalangan penutur yang lain. Idealnya, corak bahasa yang dikembangkan ketiga kalangan itu menjadi laras tersendiri yang mempunyai tempatnya sendiri. Bahasa yang diajarkan di sekolah menjadi laras akademik; pers mengembangkan laras jurnalistik; sedangkan birokrasi memiliki larasnya sendiri. (Dalam komunikasi pribadi, seorang pengajar di Monash University, Basoeki Koesasi, menyebutnya "bahasa pejabat".) Akan tetapi, perbedaan ranah pemakaiannya sering mengalami kesulitan sehingga tidak jarang mahasiswa mengerjakan tugas perkuliahan dengan menggunakan bahasa jurnalistik dan guru memperagakan bahasa birokrat ketika berbicara di depan murid-muridnya.

Sifat pajanan ke pemakaian bahasa ketiga kalangan itu pun berbeda-beda. Di bangku sekolah, sebagian besar penutur usia sekolah hampir setiap hari berkomunikasi dengan guru. Tentu saja tempat dan waktunya tertentu. Tidak dapat disangkal, jurnalis (dan juga birokrat yang memanfaatkan media massa) merupakan penutur yang pemakaian bahasanya mengatasi batas ruang dan waktu. Media cetak, misalnya, dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. Kelebihannya yang lain adalah dalam hal modus dan substansinya yang beragam. Jumlah penutur yang terpajan pun tentunya jauh lebih besar.

Ada gejala yang menarik, yaitu media massa tertentu, terutama televisi, membatasi penyapaan khalayak pendengarnya walaupun siarannya dapat diakses siapa pun. Misalnya, dengan memperagakan pemakaian bahasa asing (tegasnya, Inggris) secara berlebihan, ada kesan bahwa informasi yang disajikan hanya untuk konsumsi masyarakat tertentu yang memahami bahasa itu. Tidak jarang, memang, narasumberlah yang menebar kata-kata asing itu, dengan tidak membayangkan mereka berbicara kepada semua lapisan masyarakat. Namun, lebih menyedihkan, pembaca berita, yang seharusnya menyadi "penerjemah" yang menapis obralan kata asing itu justru ikut-ikutan memamerkan kemampuan berbahasa asingnya. Padahal, pengelola televisi selalu mengusahakan agar siarannya dapat diterima oleh kalangan masyarakat seluas-luasnya, siapa pun dan di mana pun.

Beberapa Catatan dari Hasil Survei

Sebuah survei sedang saya lakukan tahun ini terhadap para guru, birokrat, dan jurnalis. Guru yang saya survei adalah guru bahasa Indonesia di sekolah menengah umum dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang mengajar bahasa Indonesia dan guru sekolah dasar yang mengajar di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Birokrat diambil dari karyawan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sedangkan jurnalis berasal dari berbagai media, cetak dan elektronik, yang juga bekerja di Jakarta. Survei ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh keberterimaan sejumlah bentuk bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Bahasa, mulai dari kata sampai kalimat, termasuk cara penulisannya. Selain itu, pengetahuan mereka akan hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan, kegiatan, dan produk Pusat Bahasa yang menyiratkan pemahaman mereka tentang adanya perencanaan bahasa. Hal itu akan dilihat korelasinya dengan penerimaan mereka atas tawaran Pusat Bahasa.

Hasil awal survei itu memperlihatkan bahwa ada korelasi antara profesi dan kesadaran tentang perencanaan bahasa. Pengetahuan para guru lebih besar daripada dua kelompok yang lain, sedangkan birokrat paling kecil. Guru sangat mungkin bersifat ingin tahu lebih banyak tentang Pusat Bahasa dan produknya karena mereka dapat memetik manfaatnya untuk tugas mereka sebagai pengajar. Sementara itu, pengetahuan birokrat yang minim itu sangat mungkin disebabkan oleh tidak termanfaatkannya produk Pusat Bahasa oleh mereka walaupun banyak kegiatan pelatihan dan penyuluhan telah dilakukan untuk mereka.

Jurnalis ternyata adalah kelompok yang paling banyak menerima bentuk-bentuk bahasa yang ditawarkan Pusat Bahasa, disusul berturut-turut oleh guru dan birokrat. Sekali lagi di sini terlihat bahwa birokrat lebih sulit melakukan inovasi bahasa. Bahasa mereka cenderung konservatif. Guru lebih mudah menyesuaikan diri walau tidak seleluasa jurnalis. Sangat mungkin bahasa guru cenderung normatif, tidak mudah berubah jika sudah ada norma yang ditetapkan sebelumnya. Pers lebih mudah melakukan pembaruan. Ini agaknya disebabkan oleh kecenderungan banyaknya tantangan untuk menemukan ungkapan baru baik untuk menghindari kesan terpaku pada bentuk klise maupun memang untuk mengungkapkan hal-hal yang baru. Dengan demikian, bahasa jurnalis cenderung kreatif.

Yang menarik, kesadaran akan adanya perencanaan atau kebijakan bahasa tidak berkorelasi dengan penerimaan tawaran Pusat Bahasa. Sekalipun guru tahu lebih banyak tentang kebijakan bahasa itu, hal itu tidak dengan sendirinya menyebabkan mereka menerima banyak tawaran Pusat Bahasa. Ini perlu penelitian lebih lanjut untuk mencari penyebabnya. Menurut pengalaman saya, banyak di antara mereka yang pernah ikut pelatihan untuk para birokrat mengeluh bahwa atasan mereka sering tidak dapat menerima jika mereka ingin menerapkan apa yang pernah diberikan.

Artinya, hierarki menjadi kendala bagi penggunaan bentuk bahasa yang baru. Yang terjadi pada guru dan jurnalis tidak sedemikian mengganggu. Dalam beberapa hal mereka lebih leluasa. Hal seperti ini jelas harus dipertimbangkan oleh Pusat Bahasa dalam menyusun program penyuluhan.

Tidak ditemukan korelasi yang signifikan antara faktor usia, pendidikan, dan gender dalam hubungannya dengan pemahaman tentang kebijakan bahasa ataupun penerimaan tawaran Pusat Bahasa. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan prioritas berdasarkan ketiga hal itu. Namun, tetap perlu dipertimbangkan penutur mana yang posisinya lebih strategis dalam menyebarkan bentuk bahasa yang direkomendasikan.

Penutup

Memilih penutur model untuk dijadikan sasaran yang diprioritaskan dapat membantu mengefisienkan kerja Pusat Bahasa. Namun, hal itu harus dilakukan melalui penelitian yang saksama dan kemauan untuk mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan. Hal itu akan menjamin akuntabilitas lembaga ini, alih-alih sekadar melakukan sesuatu karena ketbetulan sumber yang diperlukan tersedia. Penelitian dan evaluasi yang disajikan di sini masih bersifat permulaan dan dimaksudkan hanya sebagai ilustrasi untuk memperjelas saran yang diajukan. Tentu saja tidak hanya dalam hal sasaran pembinaan yang memerlukan pemilihan prioritas.

REFERENSI

- Alwi, Hasan. 1998. *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Alwi, Hasan. 2000. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Alwi, Hasan and Dendy Sugono (eds.). 2000. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Asmah Haji Omar. 1992. "Malay as Pluricentric Language" dalam Michael Clyne (ed.). *Pluricentric Languages: Differing Norms in Different Nations*. Berlin: Mouton de Gruyter. hlm. 401—420.
- Assegaf, Djafar H. 2000. "Bahasa Koran, Radio, dan Televisi Perlu Pembinaan Menyeluruh". Dalam Hasan Alwi dan Dendy Sugono (ed). hlm. 195—201.
- Breton, Roland. 1991. "The Handicaps of Language Planning in Africa" dalam David F. Marshall. (ed.) 1991. *Language Planning: Focusschrift in Honor of Joshua A. Fishman on the Occasion of His 65th Birthday*. Amsterdam: John Benjamins.
- Cobarrubias, J and J. A. Fishman (ed). 1983. *Progress in Language Planning*. Berlin: Mouton Publisher.
- Cooper, Robert L. 1989. *Language Planning and Social Change*. Cambridge: Cambridge University Press
- Daoust, Denise. 1997. "Language Planning and Language Reform" dalam Florian Coulmas (ed.). *The Handbook of Sociolinguistics*. Oxford: Blackwell. hlm. 436—452
- De Souza, Dudley. 1980. "The Politics of Language: Language Planning in Singapore" dalam E.A. Afendras dan E.C.Y. Kuo (eds.). Hlm. 203—232.
- Dhakidae, Daniel. 1996. "Bahasa, Jurnalisme, dan Orde Baru" dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed). hlm. 146—151.
- Djojonegoro, Wardiman. 1998. "Peran Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Beberapa Pokok Sumbangan Pikiran". Dalam Hasan Alwi *et al.* hlm. 47—50.

- Dua, Hans R. 1991. "Language Planning in India: Problems, Approaches and Prospects" dalam David F. Marshall (ed.) *Language Planning: Focusschrift in Honor of Joshua A. Fishman on the Occasion of His 65th Birthday*. Amsterdam: John Benjamins, hlm. 105—133.
- Ferguson, Charles A. 1977. "Sociolinguistic Setting of Language Planning". Dalam Joan Rubin *et al.* (ed). *Language Planning Processes*. The Hague: Mouton.
- Fishman, J.A. 1974. "Language Modernisation and Planning in Comparison with Other Types of National Modernisation and Planning". Dalam J.A. Fishman (ed.). *Advances in Language Planning*. hlm. 79—102
- Gopinathan, S. 1980. "Language Policy in Education: A Singapore Perspective" dalam E.A. Afendras dan E.C.Y. Kuo. hlm. 175—202.
- Halim, Amran. 1998. "Kesinambungan dalam Kebijaksanaan Bahasa Nasional" dalam Alwi *et al.*, hlm. 133—140.
- Haugen, Einar. 1983. "The Implementation of Corpus Planning: Theory and Practice" dalam J. Cobarrubias dan J. A. Fishman (eds.). hlm. 269—289.
- Heryanto, Ariel. 1996. "Bahasa dan Kuasa: Tatapan Postmodernisme". Dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (eds.), hlm. 94—103.
- Kaplan, Robert B. and Richard B Baldauf, Jr. 1997. *Language Planning: From Practice to Theory*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Karam, F.X. 1974. "Toward a Definition of Language Planning". Dalam J.A. Fishman (ed.). *Advances in Language Planning*, hlm. 103—124
- Kaswanti Purwo, Bambang. 1998. "Menuntut Kesetaraan". Dalam Dendy Sugono. hlm. 113—116.
- Kuo, Eddie C.Y. 1980. "Multilingualism and Mass Media Communications in Singapore". Dalam E.A. Afendras dan E.C.Y. Kuo. hlm. 116—136.
- Lapoliwa, Hans. 1998. "Strategi Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa: Beberapa Pokok Pikiran". Dalam Alwi *et al.*, hlm. 449—455.
- Lubis, Muchtar. 1983. "Media Massa, Bahasa Indonesia, dan Pembangunan Nasional" dalam Amran Halim dan Yayah B. Lumintang. *Kongres Bahasa Indonesia III*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hlm. 282—301.
- Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan.

- Moeliono, Anton M. 1985. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Ancangan Alternatif dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Moeliono, A.M. 1989. "Indonesian Language: Development and Cultivation. Paper presented at the Third Tun Abdul Razak Conference, Ohio University, 1-2 April.
- Mua'adz, M. Husni. 2000. "Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar dan sebagai Mata Pelajaran dalam Sistem Pendidikan". Dalam Alwi *et al.* hlm. 77—90.
- Neustupný, J.V.1974. "Basic Treatment of Language Problems". Dalam J.A. Fishman (ed.). *Advances in Language Planning*. hlm. 37—48.
- Rubin, Joan 1971."Evaluation and Language Planning" dalam Joan Rubin dan B.H. Jernudd (ed). *Can Language Be Planned?* Honolulu: East-West Center and the University Press of Hawaii.
- Kurnia, Sayuti. 1992. "Peranan Koran-Koran Indonesia dalam Pengembangan Bahasa Indonesia". Dalam A. Murad dan S.R.H. Sitanggang. *Kongres Bahasa Indonesia IV*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hlm. 288—299.
- Shuy, Roger W.1987. "Changing Policy in a Bureaucracy". Dalam *Georgetown University Round Table on Language and Linguistics 1987*. Washington D.C.: Georgetown University Press, hlm. 152—174
- Sugono, Dendy. 1998. *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947—1997*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Suparno. 2000. "Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah". Dalam Hasan Alwi *et al.* hlm. 687—697.
- Suprpto, Riga Adiwoso. 2001 "Politik Bahasa dan Bahasa Politik". Makalah yang disampaikan dalam PELLBA, Universitas Atma Jaya, 24-25 Juli.
- Taufik, Abdullah. 1998. "Pusat Bahasa: Kenangan dan Harapan" dalam Sugono. Hlm. 125—130.

LAPORAN SIDANG

- Hari, tanggal : Rabu, 15 Oktober 2003
- Judul makalah : 1. Peranan Guru dalam Meningkatkan Kemahiran Berbahasa Indonesia Siswa Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi
2. Mencari Penutur Model Bahasa Indonesia: Guru Birokrat, dan Jurnalis
- Penyaji : 1. Sarwidji Suwandi
2. C. Ruddyanto
- Pemandu : Khairil Ansyari
- Pencatat : 1. Ni Putu Ekatini Negari
2. Suyono Suyatno

TANYA JAWAB

1. Penanya: Suharti (SLTP 45 Kodya Bandung)
 - a. **Pertanyaan:**
Apa kelemahan dan keunggulan penerapan KBK di SLTP? Idealnya, berapa jumlah murid dalam satu kelas?
 - b. **Jawaban:** Pak Sarwiji
Kurikulum setiap periodik perlu ditinjau kembali. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 1984 dan 1994 sebetulnya sudah berbasis kompetensi. Diperlukan adanya perubahan interaksi proses belajar mengajar di kelas untuk mengimplementasikan KBK. Jumlah siswa maksimal untuk satu kelas merupakan suatu masalah dilematis. Hal itu merupakan tanggung jawab manajemen sekolah.
2. **Penanya:** Surya Ade Putra
 - a. **Pertanyaan:**
Apakah Pusat Bahasa tidak memerlukan badan advokasi untuk membela bahasa Indonesia agar tidak disalahgunakan, misalnya untuk tujuan penipuan?
 - b. **Jawaban:** C. Ruddyanto
Badan untuk advokasi bahasa tidak diperlukan. Janji yang bersifat penipuan bukan merupakan masalah kebahasaan.

3. **Penanya:** Ahmad Batan (SMU Negeri Makassar)
- a. **Pertanyaan:**
Bagaimana dengan penyuluhan di daerah-daerah?
Lembar informasi perlu diperbanyak dan dikirimkan ke daerah-daerah.
- b. **Jawaban:** C. Ruddyanto
Sejak tahun 1992 sudah diadakan penyuluhan ke daerah-daerah yang bekerja sama dengan guru-guru.
4. **Penanya:** Kisumi (Guru SLTP)
- a. **Pertanyaan:**
Sebaiknya CTL jangan dianggap satu-satunya pendekatan dalam proses pembelajaran
- b. **Jawaban:** Sarwiji Suwandi
Aspek pembelajaran tidak hanya bersifat kognitif. Untuk itu, berbagai pendekatan dalam proses pembelajaran bisa digunakan.
5. **Penanya:** Mohamad Hasri (SLTP Negeri 5 Makassar)
- a. **Pertanyaan:**
Banyak karya siswa yang menarik, tetapi hanya beredar di kalangan siswa itu sendiri. Kalau mungkin, diadakan lembaga yang mengumpulkan karya siswa yang baik di tingkat kecamatan, kabupaten, dan seterusnya.
- b. **Jawaban:** Sarwiji Suwandi
Memang perlu pengumpulan karya anak didik yang berprestasi, antara lain bisa diwujudkan lewat majalah dinding. Dengan demikian, siswa yang lain akan mencontohnya.
6. **Penanya:** Nur Ahmad (SMU Negeri 8 Yogyakarta)
- a. **Pertanyaan:**
Kurikulum apa pun hasilnya tergantung pada guru yang mengajar.
- b. **Jawaban:** Sarwiji Suwandi
Guru sebagai pelaksana proses pembelajaran bertugas mentransfer nilai-nilai yang memerlukan suatu pedoman, Pedoman itu berupa kurikulum. Kurikulum dianggap baik apabila mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.

PENINGKATAN MUTU PENGAJARAN BAHASA INGGRIS DI INDONESIA

Helena I. R. Agustien
Universitas Negeri Semarang

Sesuai dengan tema dan pokok pembicaraan yang ditetapkan oleh penyelenggara kongres bahasa kali ini, makalah ini akan menyoroti situasi pengajaran bahasa Inggris di Indonesia saat ini. Situasi yang dapat dilatakan tidak menggembirakan ini sedang dicoba untuk diperbaiki dengan viajarkannya bahasa Inggris sejak tingkat SD. Oleh karena itu, bagian kedua makalah ini akan menyoroti pengajaran Bahasa Inggris di SD dengan beberapa implikasinya. Bagian terakhir membahas strategi yang disarankan untuk memperbaiki situasi, antara lain dengan membuat perencanaan yang saksama untuk pengajaran yang berkelanjutan dari SD hingga SMU dengan memperhatikan perkembangan teori dan hasil-hasil penelitian mutakhir. Hal ini disarankan agar terjadi perubahan ke arah yang positif dalam pengajaran bahasa Inggris di negara ini.

Situasi Pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia

Untuk membahas mutu pengajaran bahasa Inggris (BI) biasanya orang perlu melihat hasil pengajaran bahasa tersebut yang dapat berupa tinggi atau rendahnya nilai atau terpenuhi atau tidaknya harapan-harapan yang tercantum dalam kurikulum yang konon berbasis kompetensi. Jika fokus diarahkan ke pencapaian nilai, baik nilai hasil ujian bahasa Inggris nasional maupun ujian masuk perguruan tinggi, sulit dikatakan bahwa pengajaran BI di Indonesia pada umumnya telah berhasil. Jika dilihat dari segi pemerolehan kompetensi komunikatifnya, secara umum masyarakat melihat bahwa pengajaran BI di sekolah belum mampu memenuhi harapan yang terdapat dalam kurikulum. Banyak fakta menunjukkan bahwa mereka yang mampu berkomunikasi dalam BI dalam arti yang sesungguhnya biasanya adalah siswa yang memiliki fasilitas untuk belajar BI di luar sekolah mereka dengan mengikuti berbagai kursus privat ataupun lewat lembaga. Dengan memperhatikan hasil pengajaran yang seperti ini, sulit dikatakan bahwa (proses) pengajaran BI bermutu tinggi. Namun, istilah *pengajaran yang bermutu* masih dapat diperdebatkan karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas bukan hanya ditentukan oleh guru pengajarnya melainkan juga oleh faktor-faktor lain yang melingkupinya. Faktor dominan pertama yang memengaruhi proses pengajaran adalah kurikulum BI yang berlaku.

a. Kurikulum Bahasa Inggris

Beberapa tahun terakhir ini praktisi pendidikan di Indonesia disibukkan oleh istilah kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Di negara maju seperti Amerika, misalnya, KBK sudah lama dikenal terutama di lingkungan pendidikan keterampilan, seperti mekanik dan ahli kecantikan. Dalam kurikulum, lembaga pendidikan semacam itu tertulis jelas kompetensi atau kemampuan apa yang diharapkan dimiliki oleh lulusan setelah mengikuti pendidikan. Seorang penata rambut, misalnya, diharapkan dapat terampil mengeriting, meluruskan, memotong, dan mencuci rambut setelah dinyatakan lulus. Seorang pemilik salon yang akan mempekerjakan lulusan akan melihat apakah orang yang melamar kerja memiliki deretan kompetensi tersebut di atas tanpa mempertanyakan dan bagaimana proses belajarnya, apa materi ajarnya, bagaimana silabusnya. Yang penting adalah apakah lulusan memiliki kompetensi.

Rumusan kompetensi setiap program pendidikan di negara maju biasanya tidak terlepas dari mimpi atau visi sebuah negara. Sebuah negara yang memiliki mimpi untuk menjadi negara paling hebat dalam segala hal harus merumuskan dengan jelas jenis kompetensi apa saja yang harus dimiliki warga negaranya. Oleh karena itu, jenis pendidikan yang diselenggarakan negara terarah kepada pencapaian mimpi bersama sebuah bangsa. Langkah berikutnya adalah kerja keras dalam rangka pemerolehan kompetensi.

Dengan beranalogi ilustrasi di atas, sebuah KBK selayaknya dirumuskan *in terms of* jenis-jenis kompetensi yang diharapkan diperoleh oleh lulusan program BI. Artinya, KBK tidak menentukan metode pengajaran apa yang sebaiknya digunakan, materi ajar mana yang harus dicakup, dan sebagainya. KBK merumuskan kompetensi-kompetensi apa yang nantinya ditagihkan kepada lulusan sesuai dengan kebutuhan sebuah negara.

Meskipun visi negara Indonesia belum dirumuskan dengan jelas, terutama dalam hal jenis kompetensi yang diperlukan negara, tampaknya masyarakat Indonesia yang sedang berkembang ini setuju bahwa pendidikan bahasa Inggris diharapkan menghasilkan lulusan yang terampil berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis agar bangsa ini dapat belajar dari bangsa lain dan berkomunikasi untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan media bahasa Inggris. Jika demikian, sebuah KBK harus merumuskan dengan jelas jenis kompetensi yang ditagihkan kepada lulusan, yakni berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang secara teoretis dikenal dengan *communicative competence* atau kompetensi komunikatif (KK).

Untuk merumuskan KK dengan bertanggung jawab diperlukan keahlian para pakar yang mempelajari atau meneliti di bidang ini. Sejak Del Hymes (1972) mencetuskan konsep *communicative competence* terdapat banyak usaha dari para peneliti untuk merumuskan kompetensi apa saja yang diperlukan agar seseorang dapat berkomunikasi dalam sebuah bahasa.

Sebuah tinjauan yang bermanfaat tentang evolusi konsep KK ini diulas dengan baik oleh Taylor (1988). Sekelompok peneliti (Celce Murcia, Dornyei dan Thurrell 1995) berhasil merumuskan KK secara terperinci yang dimaksudkan untuk memberi panduan praktis bagi mereka yang merencanakan program pengajaran BI. Sebuah kurikulum yang berbasis kompetensi selayaknya merumuskan kompetensinya dengan mengacu kepada teori yang ada karena teori tersebut merupakan hasil penelitian para pakar selama bertahun-tahun.

Dengan menengok KBK untuk pengajaran BI di Indonesia yang ada saat ini, sulit menghilangkan kesan bahwa kompetensi dirumuskan berdasarkan materi ajar yang secara tradisional memang menjadi acuan utama dalam pengajaran. Terdapat kesan bahwa kurikulum disusun dengan melihat materi/pokok bahasan, kemudian dirumuskan kompetensinya. Jika ini modus yang diambil dalam penyusunan kurikulum, proses penyusunannya berjalan terbalik: materi dulu, baru kemudian kompetensi. Kurikulum ini mengandung beberapa masalah: rumusan kompetensi komunikatifnya tidak dirumuskan dengan jelas (terutama landasan teorinya), kurikulum menetapkan materi pokok, kurikulum menganjurkan metode pengajaran tertentu. Jika konsekuensi, sebuah KBK seharusnya hanya menagih kompetensi yang pemerolehannya diukur dengan sejumlah indikator. Persoalan materi, metode pengajaran, pengalaman belajar dan lainnya bukan merupakan *concern* utama sebuah KBK. Pihak yang menyelenggarakan pengajaranlah yang memutuskan materi apa saja yang diperlukan untuk menjamin pemerolehan sebuah kompetensi.

Implikasi KBK adalah adanya kebebasan penyelenggara pendidikan untuk menyusun silabusnya, menentukan materi ajarnya, dan memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Seorang pengajar yang kreatif seharusnya merayakan kehadiran KBK yang disusun dengan memberi keleluasaan kepada penyelenggara untuk menentukan pilihannya sehingga masa-masa semua harus seragam boleh berlalu.

Dapat disimpulkan bahwa KBK yang saat ini berlaku mengandung masalah substansial teoretis sehingga para praktisi pendidikan terkadang berkesimpulan bahwa kurikulum ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya, hanya namanya yang berubah. Kebingungan ini cukup beralasan karena untuk beralih dari paradigma lama kurikulum berbasis materi ke kurikulum berbasis kompetensi diperlukan perubahan *mindset* yang tentunya tidak dapat terjadi dalam semalam, baik di tingkat pembuat kebijakan maupun di tingkat pelaksana.

b. Silabus

Setelah kurikulum disusun, tugas berikutnya adalah penyusunan silabus. Sebuah silabus yang memberi informasi memadai adalah silabus

yang tidak hanya memuat indikator hasil belajar, tetapi juga memberikan gambaran tentang pengalaman pembelajaran atau (*learning experiences*) yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Meskipun guru bebas menentukan pengalaman pembelajaran macam apa yang sebaiknya dimiliki oleh siswanya, ada baiknya guru juga memiliki acuan tentang variasi pengalaman pembelajaran yang pernah diberikan orang lain untuk memperkaya wawasannya.

Kurikulum sekolah Australia, misalnya (Board of Studies 1994), mencantumkan secara eksplisit pengalaman pembelajaran apa saja yang diharapkan diberikan kepada siswa untuk menunjang pencapaian hasil belajar tertentu. Pengalaman pembelajaran bukan hanya diberikan untuk memperoleh kompetensi tertentu, tetapi juga untuk mengembangkan sikap yang dikehendaki. Kurikulum kita juga mengharapkan berkembangnya sikap positif terhadap bahasa dan sebagainya, hanya saja aspek sikap ini belum masuk dalam acara silabus sehingga terkesan bahwa pengembangan sikap baru merupakan basa-basi yang tidak direncanakan benar alokasi pembelajarannya.

Sudah tiba saatnya kita memperhatikan dengan serius aspek sikap terhadap bidang studi yang diharapkan menjadi motor penggerak yang mendorong siswa belajar sendiri dan mandiri. Pembentukan sikap tidak hanya dilakukan melalui kata-kata atau nasihat, tetapi terutama melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Untuk memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat dan menyenangkan, guru, dibantu dengan silabus yang terinformasikan perlu merencanakan dengan saksama seluruh proses pembelajaran.

Selain pengalaman pembelajaran, silabus yang bermanfaat juga memuat contoh materi seperti jenis teks yang disarankan untuk digunakan dan aspek apa saja dari teks tersebut yang perlu disoroti. Selain itu, silabus juga memuat penjelasan mengenai teori yang melandasi pendekatan yang diambil oleh kurikulum dalam bahasa yang sederhana. Dengan demikian, guru pengguna silabus memahami keterkaitan landasan filosofi dan materi yang digunakan. Silabus semacam ini memberi informasi mengenai apa, mengapa, dan bagaimana kurikulum diimplementasikan.

Dengan membaca kurikulum (2001) yang kita miliki, timbul kesan bahwa silabus tersebut tidak disusun dengan satu pemahaman yang komprehensif terhadap makna kompetensi dan apa yang selayaknya dilakukan untuk mencapainya. Silabus yang ada masih jauh dari memadai dan tidak menolong guru untuk memahami, apalagi melaksanakan, amanat kurikulum. Akibatnya, guru berpendapat bahwa kurikulum ini tidak ada bedanya dengan yang lalu dan pengajaran kembali lagi ke materi yang sudah ada.

Sebuah silabus yang lengkap juga memuat glosari atau daftar penjelasan istilah teknis yang digunakan dalam silabus serta daftar bacaan yang dapat digunakan guru untuk belajar lebih lanjut. Untuk menyusun silabus macam ini diperlukan sebuah tim profesional yang andal yang

menjiwai benar landasan-landasan teorinya agar tidak timbul kesan bahwa silabus disusun berdasarkan kerangka sebuah proyek yang harus jadi tanggal sekian dan ditulis oleh mereka yang kebetulan memiliki koneksi atau akses ke Depdiknas.

Masalah lain yang kita hadapi adalah hambatan pihak birokrasi yang terlalu membatasi dan menyeragamkan format kurikulum semua bidang studi. Misalnya, kurikulum/silabus tidak boleh terlalu tebal, tidak melebihi sekian halaman. Hal ini merepotkan sebab hal-hal yang sifatnya substantif, seperti contoh materi dan penjelasan teoretis yang membantu guru, terpaksa dikorbankan demi batasan halaman. Hasilnya adalah kurikulum yang bukunya berukuran kecil, tidak menarik, baik ujud fisiknya maupun isinya. Seharusnya buku kurikulum/silabus dibuat sedemikian rupa agar menarik penampilannya dan bermanfaat isinya sehingga siapa pun yang memegangnya merasa bangga dan melihatnya sebagai dokumen yang berharga.

c. Materi Ajar

Ketidakjelasan rumusan kompetensi komunikatif dalam kurikulum berimbas ke tataran materi ajar yang dikembangkan oleh berbagai pihak. Beberapa kelompok penulis tampaknya secara intuitif dapat meraba dan memperkirakan kompetensi yang diharapkan dan biasanya kelompok penulis ini secara akademik berkualifikasi tinggi dan menguasai bahasa Inggris dengan baik. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak penulis buku ajar yang sebenarnya belum berkualitas penulis karena mereka masih bergulat dengan masalah linguistik dasar sehingga ditemukan kalimat-kalimat yang tidak gramatikal. Hal ini dapat dengan mudah diamati mulai dari melihat judul-judul buku yang beredar di pasaran. Sebuah buku bahasa Inggris untuk anak-anak diberi judul, *Let's Listening, Speaking, Reading and Writing* yang, anehnya, lolos dari tangan penyunting (jika ada). Patut dipertanyakan, kalau judulnya saja sudah tidak bertata bahasa, bagaimana pula isinya?

Contoh masalah lain menyangkut wacana. Sejumlah buku SLTP yang digunakan di Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan ilustrasi mengenai bagaimana parahnya mutu materi ajar BI. Cukup banyak *reading passages* yang ditulis tanpa pertimbangan wacana yang jelas. Sebuah teks, betatapun pendek atau sederhananya, seharusnya memenuhi minimal tiga syarat (Swales, 1990). Pertama, teks harus memiliki tujuan komunikatif tertentu; kedua, teks memiliki struktur tertentu untuk mendukung tujuan komunikatifnya; ketiga, teks memiliki realisasi linguistik tertentu yang juga mendukung tujuan komunikatifnya. Banyak bacaan (yang sering dijadikan bahan diskusi mahasiswa S-2 Unnes) yang terdapat di buku-buku BI untuk SLTP tidak memenuhi syarat-syarat tersebut karena, mungkin saja, penulisnya tidak paham benar tentang gagasan TEKS yang bukan hanya berarti

rentetan kalimat. Di sini terdapat banyak masalah yang tidak mungkin diuraikan dalam makalah ini.

Intinya adalah bahwa jika orang yang seharusnya masih berada di tahap pengguna buku memaksakan diri untuk menulis buku sehingga siswa kita dipajankan kepada teks-teks BI yang tidak otentik. Misalnya, teks *conversation* yang disajikan biasanya penuh dengan tanya jawab untuk meminta dan memberi informasi (*logico-semantic negotiation*) dan bukan/kurang pada saling bertukar *stance* atau sikap pribadi terhadap isu yang sedang dibahas (*interpersonal negotiation*). Strategi ini berbeda dengan strategi yang biasa digunakan penutur asli dalam percakapan santai yang menunjukkan dominasi negosiasi interpersonal (Eggins, 1990). Sebuah penelitian (Agustien, 1998) menunjukkan bahwa ketika mahasiswa Indonesia bercakap santai dengan orang asing, mereka cenderung menggunakan strategi logiko-semantik dan bukan interpersonal. Seorang penulis buku sebaiknya memahami informasi penting semacam ini sehingga ia dapat menyusun teks yang berterima.

d. Mutu dan Beban Guru

Sulit dipungkiri bahwa sejak diberlakukannya ujian masuk perguruan tinggi yang bersifat nasional dan serentak, jurusan bahasa Inggris perguruan tinggi negeri (PTN) tidak dapat menyaring siapa yang layak masuk ke jurusan BI dan siapa yang tidak. Salah satu akibatnya adalah banyaknya lulusan SMU yang masuk ke jurusan BI untuk belajar bahasa Inggris dari “nol” seakan-akan tidak pernah belajar BI sebelumnya. Hal ini sangat berbeda dengan situasi sekitar tahun 1970-an ketika mahasiswa yang diterima harus lulus ujian tertulis berbahasa Inggris ditambah ujian lisan. Dengan masukan seperti ini, mahasiswa siap dijadikan guru BI setelah tiga tahun belajar. Kalau saat ini masukan jurusan BI terdiri atas lulusan SMU yang baru mau belajar dari tingkat yang paling dasar, sulit bagi lembaga untuk menjadikan mereka guru bahasa Inggris dalam waktu empat tahun.

Untuk memperoleh bahasa baru, lamanya dan intensitas belajar bahasa sangat menentukan yang berbeda dengan belajar ilmu pengetahuan sosial lainnya yang bisa “dikebut”. Untuk membuat orang menjadi pembicara yang percaya diri dalam bahasa asing diperlukan pemerolehan bukan hanya pengetahuan. Proses pemerolehan inilah yang rumit dan tampaknya berjalan seiring dengan waktu. Lamanya seseorang belajar bahasa Inggris sangat menentukan tingkat pemerolehannya. Seseorang yang masuk jurusan BI dengan pengetahuan yang sangat minim sulit diharapkan untuk siap menjadi guru yang lancar mengajar bahasa Inggris. Akibatnya, adalah banyaknya guru yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam mengajar BI sehingga siswa tidak memperoleh model berbahasa yang memadai.

Persoalan lain yang tidak kalah rumitnya adalah besarnya jumlah siswa di kelas merupakan realita yang sulit diingkari sehingga sulit bagi guru untuk mengelola proses belajar yang ditargetkan memperoleh kompetensi komunikatif. Mungkin perlu direnungkan kembali apakah target kompetensi yang ditetapkan cukup realistis mengingat kendala nyata yang dihadapi di lapangan. Kenyataan lain yang hingga kini belum berubah adalah kesejahteraan guru yang kurang memadai sehingga guru tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan proses belajar mengajar yang bervariasi dan menarik. Pengajaran bahasa Inggris di Indonesia lebih merupakan pemberian pengetahuan daripada proses pembelajaran yang mengarah ke pemerolehan bahasa.

Rupanya persoalan ketidakmampuan siswa menguasai BI sebagaimana yang diinginkan pada waktu mereka lulus SMU dicoba untuk dipecahkan dengan mengenalkan BI sejak dini. Pembuat kebijakan mengizinkan pengajaran BI sejak kelas empat sekolah dasar dengan harapan agar proses pematangan ke BI lebih lama sehingga lebih baik hasilnya. Sebelum izin ini menjadi ketetapan ada baiknya jika gejala ini direfleksikan.

Implikasi Pengajaran Bahasa Inggris sejak Sekolah Dasar

Cameron (2001:1) mengungkapkan perbedaan antara mengajar bahasa untuk orang dewasa dan mengajar untuk anak-anak yang intinya adalah bahwa anak-anak adalah pelajar yang antusias dan bersemangat. Mereka lebih ingin menyenangkan gurunya daripada temannya. Mereka senang mengikuti kegiatan apa saja meskipun mereka tidak tahu mengapa atau bagaimana mereka melakukannya. Akan tetapi, mereka juga cepat bosan dan menjadi enggan jika tugas yang diberikan ternyata sulit. Cameron berpendapat bahwa pelajaran atau kegiatan yang sukses adalah pelajaran yang diarahkan kepada kebutuhan pembelajaran anak-anak dan bukan yang diarahkan kepada tuntutan yang ada dalam unit buku pelajaran atau yang diarahkan ke kehendak guru.

Para ahli seperti Piaget (dalam Cameron, 2001), Vygotsky (1962) dan Halliday (1975) bersatu pendapat dalam hal bagaimana dan mengapa anak belajar bahasa. Anak belajar bahasa *to make sense of the world*; untuk memaknai apa yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, anak-anak belajar bahasa dan memperolehnya karena bahasa memiliki fungsi yang penting dalam hidupnya: *to construe reality* (Halliday dan Matthiessen, 2000). Semangat dan kapasitas besar yang dimiliki anak-anak merupakan modal besar yang barangkali dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan bahasa asing sejak dini. Pengenalan bahasa Inggris sejak SD, jika dilaksanakan dengan saksama, berpotensi menciptakan anak-anak yang berdwibahasa atau bermultibahasa simultan. Oleh karena itu, perlu dikaji benar bagaimana potensi ini dapat menjadi kenyataan dengan memperhatikan beberapa hal.

Pertama, secara alamiah anak-anak belajar bahasa melalui kegiatan mendengarkan dan setelah mereka paham apa yang didengar, kemudian mereka siap belajar menulis. Jadi, “silabus alamiah” mulai dari bahasa lisan ke bahasa tulis: dari orasi ke literasi. Sejalan dengan pernyataan Cameron (2001) di atas, pengajaran BI di SD berpotensi berhasil mencapai kompetensi komunikatif jika anak-anak diberi kesempatan untuk banyak mendengar dan merespons bahasa lisan yang digunakan di dalam kelas untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Untuk itu, diperlukan guru-guru yang sangat lancar berbahasa Inggris untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bahasa Inggris seperti memberi instruksi, menghibur anak yang kesakitan, dan menyatakan kegembiraan jika anak berhasil melakukan sesuatu dsb. Guru tidak hanya berperan sebagai sumber pengetahuan tetapi juga menguasai BI yang digunakan untuk menyertai tindakan (*language accompanying action*) yang pada gilirannya akan ditiru oleh anak-anak karena gurulah yang mereka tiru.

Implikasi pertama adalah guru bahasa Inggris SD haruslah guru Bahasa Inggris yang menguasai bahasa lisan dengan sangat baik, yang idealnya adalah guru yang pernah belajar di negara yang berbahasa Inggris sehingga tahu benar apa yang dikatakan guru penutur asli apabila memuji, menegur, mendisiplinkan siswa dsb. Jika guru dapat menguasai ungkapan lisan seperti ini, besar kemungkinan *listening comprehension* siswa akan berkembang pesat sebab dengan cara mendengarkan semacam inilah anak-anak belajar bahasa pertama dari ibunya. Singkatnya, semangat dan potensi anak-anak yang sangat istimewa dalam memperoleh bahasa lisan seharusnya diberi kesempatan untuk berkembang semaksimal mungkin. Hal ini dapat terjadi jika guru memberikan model yang baik dalam hal ucapan dan ungkapan serta piawai dalam mengelola kegiatan yang disukai anak-anak dan menyertai kegiatan tersebut dengan bahasa yang lazim digunakan oleh penutur asli. Bahasa yang didengar anak-anak dari gurunya selayaknya adalah bahasa yang memberi makna kepada kehidupan atau kegiatan mereka. Jika ini diperoleh, anak-anak mulai belajar bahasa untuk keperluan refleksi menuju ke literasi.

Implikasi kedua adalah perlunya kesadaran akan perbedaan bahasa lisan dan tulis dalam menyiapkan guru Bahasa Inggris. Seorang guru BI yang kompeten adalah guru yang dapat berbahasa Inggris lisan dengan gaya bahasa lisan dan berbahasa Inggris tulis dengan gaya bahasa tulis. Ia adalah guru yang berwicara dan beraksara (“berwicaksara”). Sayangnya, hingga kini kurikulum pendidikan BI di universitas belum secara eksplisit menyoroti hal ini meskipun terdapat mata kuliah Berbicara dan Menulis. Untuk membangun kesadaran ini, kurikulum pendidikan Bahasa Inggris di Unnes menawarkan *literacy education* (pendidikan kewicaksanaan) sebagai salah satu mata kuliah. Dalam mata kuliah ini calon guru diharapkan memiliki

perspektif yang jelas dalam mengelola pengembangan kewicaraan menuju keaksaraan siswanya.

Kebutuhan ini terasa mendesak karena BI sudah mulai banyak diajarkan di SD, dan justru di tingkat inilah peran guru menjadi sangat penting dan menentukan. Patut dipertimbangkan agar pendidikan kewicaksanaan menjadi mata kuliah utama dalam kurikulum pendidikan bahasa Inggris bagi calon guru. Tidak jelas mengapa mata kuliah ini belum masuk dalam kurikulum Indonesia sementara di negara-negara maju hampir semua jurusan *English Education* menempatkan *literacy education* sebagai mata kuliah penting. Dengan demikian, implikasi ketiga adalah perlu adanya pergeseran paradigma dari pengajaran BI sebagai bahasa asing menjadi pengajaran BI sebagai proses pengembangan kewicaksanaan bahasa asing sejak SD hingga SMU atau universitas. Diperlukan sebuah skema besar dengan orientasi kewicaksanaan yang jelas sehingga usaha pengajaran BI sejak SD hingga SMU dapat lebih terpadu. Jurusan BI yang menyiapkan calon gurupun perlu mengikuti perubahan paradigma ini yang diharapkan dapat memperbaiki situasi pengajaran bahasa Inggris di Indonesia.

Strategi untuk Meningkatkan Mutu Pengajaran Bahasa Inggris

Sebuah skema besar berlandaskan paradigma baru diperlukan untuk memaknai pengajaran BI di Indonesia. Paradigma baru tersebut meliputi beberapa pertimbangan pokok yang sebaiknya difahami benar oleh birokrat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan oleh praktisi pendidikan BI. Proses pemahaman ini terkadang memakan waktu karena proses tersebut melibatkan kegiatan belajar atau membaca yang bagi sementara orang merupakan pekerjaan yang sulit dikarenakan oleh kurangnya fasilitas atau waktu. Berikut adalah uraian singkat mengenai beberapa pertimbangan pokok yang seyogyanya melandasi pengambilan keputusan dalam perencanaan pendidikan bahasa Inggris.

a. Definisi Kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi

Dalam bahasa awam, orang yang dikategorikan memiliki kompetensi bahasa Inggris adalah orang yang mampu berbahasa Inggris lisan dan tertulis dengan baik dan benar menurut konteks komunikasinya. Canale, (1983) dan Celce-Murcia, *et al.*, (1995) mengatakan bahwa secara teoretis orang yang memiliki kemampuan demikian disebut sebagai orang yang memiliki kompetensi wacana (*discourse competence*), yakni kemampuan menyusun atau memproduksi teks berdasarkan konteks budaya dan konteks situasi (Halliday, 1985a) yang melingkupinya. Artinya, ketika orang bercakap-cakap atau berpidato, orang tersebut menciptakan teks yang maknanya dapat dipahami jika pihak yang mencoba menafsirkan maknanya

memahami konteks budaya dan konteks situasi yang melingkupi percakapan atau pidato tersebut. Orang asing yang mencoba *nguping* percakapan orang lain terkadang sulit memahami maknanya karena pemahaman tidak hanya ditunjang oleh pengetahuan mengenai bahasa, melainkan juga pengetahuan mengenai konteks budaya dan situasi.

Jika masyarakat berharap bahwa hasil pendidikan BI adalah manusia Indonesia yang cakap berkomunikasi dalam BI, yang mereka harapkan adalah manusia Indonesia yang telah memperoleh kompetensi wacana. Oleh karena itu, kata *kompetensi* dalam istilah kurikulum berbasis kompetensi selayaknya didefinisikan sebagai kompetensi wacana. Kompetensi wacana menjadi *ultimate goal* pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Dalam model kompetensi yang disusun oleh Celce-Murcia, *et al.* (1995). Kompetensi wacana didefinisikan sebagai kemampuan dalam hal *selection, sequencing, and arrangement of words, structures, sentences and utterances to achieve a unified spoken or written text* (Celce-Murcia, *et al.*, 1995:13).

Kata-kata kunci dalam definisi tersebut meliputi pemilihan dan pengaturan untuk mencapai kesatuan. Kompetensi ini otomatis mensyaratkan berbagai hal yang dipilih, diatur dan cara mencapai kesatuan. Untuk mencapai kompetensi utama ini diperlukan kompetensi tindak tutur (*actional*), linguistik (*linguistic*) sosiokultural (*sociocultural*) dan kompetensi strategi (*strategic*). Ketika orang berkomunikasi lisan, orang tersebut melakukan berbagai tindak tutur (atau langkah retorika dalam komunikasi tertulis) dan untuk merealisasikan tindak tutur diperlukan kompetensi linguistik (bunyi, kata, kalimat dsb.). Model tersebut digambarkan di halaman berikut.

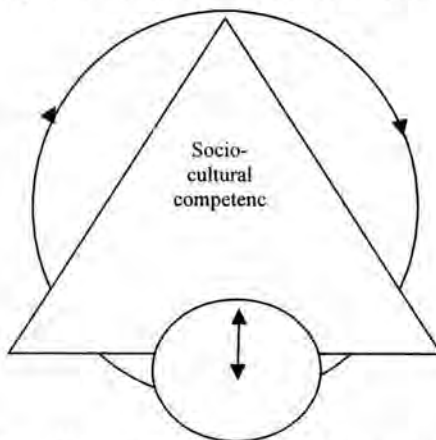


Diagram: Representasi skematik kompetensi komunikatif (Celce-Murcia, *et al.* 1995:10)

Pilihan linguistik tersebut tidak lepas dari pertimbangan sosiokultural atau konteks seperti jalur komunikasi yang digunakan (*mode*), dengan siapa seseorang berkomunikasi dan bagaimana relasi interpersonalnya (*tenor*),

serta topik apa yang sedang dikomunikasikan (*field*) (Halliday, 1985a). Selain itu, orang juga perlu memiliki kompetensi strategi untuk mengompensasi atau mengatasi masalah yang timbul dalam proses komunikasi seperti mengulang, parafrase, dan menjelaskan. Kompetensi inilah yang dijadikan *building blocks* untuk menyusun wacana yang melibatkan struktur wacana, kohesi, deiksis, dan koherensi untuk menciptakan sebuah berbagai *genre* atau jenis teks. Dengan demikian, sebuah kurikulum bahasa berbasis kompetensi yang konsekuen selayaknya menjabarkan dengan rinci (sebagaimana terdapat dalam usulan Celce-Murcia *et al.*, 1995) perihal apa saja yang perlu dicakup untuk mencapai kompetensi wacana. Setelah, misalnya, sebuah butir kompetensi tindak tutur meminta jasa/barang dirumuskan dalam kurikulum, para praktisi pengguna kurikulum memutuskan realisasi linguistik apa saja yang diperlukan atau variasi ungkapan apa saja yang perlu diajarkan pada tingkat tertentu dsb. Guru sebagai orang yang paling dekat dan memahami kebutuhan komunikasi siswanya memutuskan materi yang disajikan di dalam kelas yang berasal dari berbagai sumber.

b. Pertimbangan Kewicaksanaan (*literacy*)

Pengajaran Bahasa Inggris bagi penutur asli atau bagi pemakai BI sebagai bahasa kedua meletakkan pendidikan BI dalam perspektif kewicaksanaan dan keaksaraan (kewicaksanaan) atau *literacy*. Kewicaksanaan mencakup kemampuan menggunakan bahasa lisan dan tulis dalam berbagai *genre*. Jika para penutur asli BI harus bekerja keras berlatih berbicara dan menulis atau menjadi *literate* atau berwicaksana, seyogyanya pengajaran BI di Indonesia mengamati kompetensi apa saja yang mereka ingin capai sehingga gagasan kita mengenai insan yang berwicaksana dalam BI tidak menyimpang dari apa yang lazim dimiliki penutur asli.

Kurikulum BI di negara maju tempat BI digunakan sebagai bahasa pertama atau kedua pada umumnya berbasis (kompetensi) wacana yang fokusnya adalah *the creation of unified spoken and written texts* (Australia 1994, Singapore, 2001). Kompetensi ini jugalah yang sedang kita usahakan untuk dicapai. Literatur terkini yang ditulis berdasarkan banyak penelitian juga merekomendasikan perspektif kewicaksanaan dalam pendidikan bahasa (Palmer *et al.*, 1994; Celce-Murcia dan Olshtain, 2001; Kern 2000; McCarthy dan Carter, 1994) yang berorientasi kepada wacana. Implikasinya, kurikulum BI seyogyanya melihat jenis teks (*genre*) apa saja yang banyak hadir dalam budaya Inggris dan yang menjadi target kewicaksanaan sekolah penutur asli meskipun tingkat kerumitannya pasti lebih rendah.

Dengan pertimbangan ini, aspek kompetensi linguistik yang dipilih sengaja diarahkan untuk pengembangan kemampuan misalnya melakukan pembicaraan untuk bertransaksi, bersosialisasi santai, berpidato, menulis

berbagai kartu ucapan, menulis instruksi, naratif, *recount*, eksposisi dsb. Setiap jenis teks tersebut memiliki tujuan komunikatif tertentu, struktur wacana tertentu dan ciri realisasi linguistik tertentu (Swales 1990). Dalam menyusun materi ajar, guru atau penulis seyogyanya memperhatikan benar jenis teks yang dikembangkan yang tentunya dengan mempertimbangkan tingkat kerumitannya. Menyusun teks naratif, misalnya, dapat dimulai dari SD, mulai dengan hanya lima kalimat, hingga SMU mungkin sampai cerita pendek.

Di sini dirasakan perlunya mempertimbangkan tingkat kewicaksanaan BI lulusan SD, SLTP, dan SMU/SLTA. Misalnya, lulusan SD ditargetkan sampai tingkat performatif--dapat membaca dan menulis untuk kebutuhan anak-anak sehari-hari--tingkat SMP sampai ke tingkat fungsional dapat berkomunikasi interpersonal untuk keperluan social, baik lisan maupun tertulis--tingkat SMU sampai ke tingkat fungsional memperoleh akses ke informasi seperti karya ilmiah populer dsb. (Wells, 1987).

Implikasi uraian ini adalah bahwa pengajaran BI di Indonesia perlu mencermati usaha yang dilakukan penutur asli untuk mengembangkan kewicaksanaan, dan dengan titik tolak yang berbeda tingkat kewicaksanaan untuk tiap jenjang pendidikan ditetapkan. Yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya memahami jenis teks apa saja yang banyak digunakan dalam budaya komunikasi Inggris dan bagaimana jenis teks tersebut dikenalkan kepada siswa dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.

Jika berbicara mengenai teks, orang sering mengasosiasikannya dengan teks tertulis. Terdapat pula kecenderungan para penulis buku yang, disadari atau tidak, menyamaratakan bahasa tulis dan bahasa lisan sehingga dialog yang dikembangkan dalam buku ajar sepi dari ciri bahasa lisan. Para ahli mengatakan *writing is not speech written down* yang menyiratkan adanya perbedaan yang signifikan sebagai implikasi kedua modus komunikasi tersebut. Halliday (1985b) memandang bahasa lisan sebagai bahasa yang secara gramatikal rumit atau diwarnai oleh *grammatical intricacy* sedangkan bahasa tulis adalah bahasa yang padat kata atau diwarnai oleh *lexical density*. Di antara kedua modus yang ekstrem tersebut tentunya terdapat gradasi seperti sebuah kontinum dari bahasa yang paling lisan hingga yang paling tulis. Email, misalnya, adalah contoh bahasa tulis yang biasanya bergaya lisan. Pemahaman akan makna perbedaan ini akan memberikan perspektif yang segar dalam penulisan materi ajar di Indonesia.

c. Materi Ajar

Sejalan dengan bahasan di atas, materi ajar BI mulai tingkat SD hingga SLTA perlu dirancang sebagai satu kesatuan dengan memperhatikan perkembangan usia dan kemampuan bernalar siswa. Banyak hasil penelitian ataupun pengamatan empiris yang menunjukkan bahwa anak-anak di

bawah usia pubertas sangat potensial dalam memperoleh kemampuan mengucapkan bunyi bahasa baru dengan baik. Pemerolehan bahasa secara alamiah juga bermula dari anak-anak yang mendengar bahasa dari lingkungannya baru kemudian mereka berbicara dan kemudian belajar menulis kata-kata yang sudah diketahuinya. Hal ini selaras dengan kontinum yang bermula dari bahasa yang paling lisan, yakni bahasa yang menyertai tindakan hingga bahasa yang paling tulis, yakni bahasa akademik atau bahasa sebagai refleksi sebagaimana diuraikan di atas.

Potensi anak-anak yang hebat dalam mendengarkan dan menirukan ini selayaknya menjadi pertimbangan pengelola pendidikan bahasa. Jika anak-anak adalah pemeroleh bahasa lisan yang andal maka seharusnya anak-anak memperoleh *input* yang memadai yang memajukan mereka kepada bahasa Inggris yang nyata. Di kelas, masukan yang sangat diandalkan adalah guru sehingga seorang guru BI di SD idealnya adalah guru yang sangat fasih berbahasa Inggris yang mampu mengiringi semua kegiatannya dengan bahasa Inggris. Misalnya, jika ada anak yang jatuh, guru mengungkapkan kekagetannya, simpatinya, hiburannya, perawatannya dalam bahasa Inggris. Jika murid berisik di kelas, guru mengelola situasi dalam bahasa Inggris dengan berbagai instruksi. Bentuk kegiatan belajarnya tidak akan jauh dari kebutuhan anak untuk berinteraksi dan beraktivitas dan bukan hanya mengajarkan kosakata atau pola kalimat. Anak-anak perlu mendengar banyak contoh nyata sebelum mereka bisa menirukan; mereka memerlukan BI yang menyertai tindakan mereka.

Kegiatan menulis dimulai ketika mereka sudah mengenal ungkapan yang sering digunakan dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan berwacana mereka hingga tingkat SLTA. Singkatnya, rancangan pendidikan BI dimulai dari bahasa yang paling lisan hingga yang paling tulis. Ini akan berdampak besar dalam hal menyiapkan materi ajar.

Sebagaimana disebutkan di atas, kurikulum berbasis kompetensi tidak menentukan materi apa yang harus dicakup. Kurikulum hanya menetapkan kompetensi yang ditagihkan pada setiap jenjang pendidikan serta indikator pencapaiannya. Adalah tugas pengembang materi atau pengajar untuk menetapkan materi apa yang diajarkan untuk mencapai kompetensi tertentu. Untuk menetapkan materi diperlukan seseorang yang berkompeten dan memahami benar paradigma yang melandasi kurikulum berbasis kompetensi.

Pengembang materi sebaiknya adalah guru bahasa Inggris profesional yang pernah bermukim di negara yang berbahasa Inggris yang mengetahui benar ungkapan apa yang digunakan orang dalam konteks tertentu. Ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan tata bahasa seperti terdapatnya ungkapan-ungkapan yang "*un-English*"; kata-kata dan pola kalimatnya berbahasa Inggris, tetapi ungkapan tersebut tidak pernah digunakan oleh

penutur asli. Jika dimungkinkan, penutur asli profesional dilibatkan sebagai anggota tim penulis untuk menjamin “keinggrisan” bahasa yang digunakan.

Pengembang materi sebaiknya adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang teks atau wacana mengingat teks apapun yang disajikan dalam buku diharapkan memenuhi syarat sebuah teks baik teks dalam hal tujuan komunikatifnya, struktur teksnya dan realisasi linguistiknya. Betapapun sederhananya sebuah teks, misalnya bacaan yang terdiri atas lima kalimat pendek, tetap harus memperhatikan kriteria tersebut. Pengembang juga harus memahami berbagai genre bahasa Inggris yang realisasinya disesuaikan dengan tingkat kewicaksanaan yang ditargetkan. Sebuah teks ekspositori, misalnya, tidak harus rumit dengan kosakata yang canggih jika diperuntukkan bagi siswa SMP.

Pengembang materi sebaiknya memahami benar nuansa makna yang ditonjolkan dalam teks yang berbeda-beda. Dalam teks percakapan, misalnya, makna interpersonal lebih ditonjolkan, sedangkan dalam bacaan yang bersifat memberi informasi, makna ideasional lebih menonjol. Demikian pula dengan makna tekstual yang berperan dalam menyusun informasi yang ditonjolkan atau yang kurang ditonjolkan. Pemahaman akan metafungsi bahasa ini akan sangat membantu pengembang memperkaya variasi teksnya yang disusun berdasarkan pemahaman yang komprehensif terhadap teks.

Pengembang materi sebaiknya memahami benar perbedaan bahasa lisan dan tulis untuk menghindarkan terjadinya teks percakapan yang terasa kaku karena bahasa yang digunakan lebih bergaya tulis. Pengembang sebaiknya mengetahui benar bagaimana proses belajar menulis berlangsung, dengan memberi panduan selangkah demi selangkah hingga siswa memperoleh kompetensi yang ditargetkan. Pengembang yang kompeten memahami benar perkembangan atau evolusi dari bahasa lisan di SD hingga bahasa tulis di STLA.

Dengan melihat demikian beratnya syarat pengembang materi, barangkali sudah saatnya Depdiknas mengembangkan *database* untuk menginventarisasi siapa saja di negara ini yang dapat dijangkau untuk menyusun sumber belajar (bukan buku paket) yang dapat dijadikan acuan oleh para praktisi di lapangan untuk menentukan materi ajarnya. Sumber belajar ini berisi informasi seperti contoh teks yang lengkap dengan penjelasannya agar penggunaannya mengerti mengapa teks tertentu dipilih, aspek apa yang ditonjolkan, aspek linguistik apa saja yang perlu dijelaskan. Dengan demikian, guru masih memiliki kebebasan memilih materinya sendiri, selain ia juga mampu menentukan pilihan yang baik dari sumber otentik lainnya.

Pengembangan sumber belajar ini tampaknya perlu dijadikan prioritas utama untuk membantu pemahaman guru terhadap materi ajar yang diharapkan disajikan kepada siswa dalam rangka pencapaian tujuan

kurikulum berbasis kompetensi. Prioritas berikutnya adalah pengembangan kualitas guru bahasa Inggris untuk memperbaiki situasi yang ada saat ini.

d. Peningkatan Kualitas Guru

Uraian di atas menunjukkan pentingnya penguasaan bahasa Inggris lisan oleh para guru bahasa Inggris yang mengajar di SD sementara banyak guru bahasa Inggris SD yang tidak berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris. Jika pemerintah setuju akan pentingnya mengembangkan bahasa Inggris sejak SD, perlu diambil langkah-langkah yang berani dengan memberikan pendidikan khusus bagi para guru SD. Idealnya mereka dimasukkan ke dalam kursus intensif di negara berbahasa Inggris dan diteruskan dengan magang di sekolah-sekolah di negara tersebut agar mengalami dan menghayati bagaimana seharusnya mengelola kegiatan belajar mengajar bahasa. Diharapkan kegiatan semacam ini akan dapat berdampak langsung kepada kualitas proses belajar mengajar di Indonesia.

Peningkatan mutu guru bahasa Inggris tidak dapat dilakukan dengan modus yang sama dengan peningkatan mutu guru bidang studi lain. Yang tidak diperoleh oleh guru bahasa Inggris yang belajar di Indonesia adalah kesempatan menggunakan bahasa dengan penutur asli dan kesempatan memahami makna dalam konteksnya yang asli. Jika guru tidak memiliki kompetensi sosiokultural, sulit diharapkan ia dapat mengembangkan kompetensi sosiokultural siswanya. Banyak mahasiswa pascasarjana yang mengungkapkan kekurangan mereka dalam aspek ini yang kiranya patut menjadi perhatian pembuatan kebijakan.

Kursus intensif dan magang di luar negeri ini diperlukan juga oleh guru SLTP dan SLTA sebab masih banyak guru kita yang tidak mampu melakukan *scaffolding talk* dalam bahasa Inggris. *Scaffolding talk* adalah bahasa lisan yang digunakan guru untuk mengelola kelas yang seratus persen berbahasa Inggris. Hal ini melibatkan banyak macam ungkapan *appraisals* yang tidak dapat dipelajari dari buku dan lepas konteks. Guru akan memahami *scaffolding talk* jika ia menyaksikan dan mengalami proses belajar mengajar pada saat magang. Selain itu, perlu adanya kursus penyegaran guru secara rutin agar para guru juga mengikuti perkembangan teori dan pandangan baru yang menyangkut pendidikan bahasa. Misalnya, kurikulum bahasa Inggris berbasis kompetensi yang saat ini sedang disiapkan berlandaskan model kompetensi yang disebut di atas dengan segala implikasinya termasuk pemahaman terhadap kompetensi utamanya, jenis teks yang digeluti untuk mencapai kompetensi tersebut, perbedaan bahasa tulis dan bahasa lisan, konteks budaya yang melahirkan *genre* dan konteks situasi yang melahirkan teks, tindak tutur dan realisasi linguistiknya, materi ajar harus melayani kompetensi dan bukan sebaliknya dan sebagainya. Jika perubahan fundamental filosofis ini tidak ter-

komunikasikan karena guru terbiasa berorientasi kepada materi, dikhawatirkan rumusan kompetensi dalam kurikulum tidak akan memiliki dampak berarti di lapangan.

Dalam menghadapi tuntutan zaman global ini tampaknya diperlukan redefinisi pendidikan bahasa Inggris yang semestinya dimulai dari pengembangan kurikulum yang memiliki landasan teori yang memadai. Kurikulum bahasa Inggris yang dikembangkan sebaiknya berupa kurikulum yang terpadu dan berkesinambungan mulai tingkat SD hingga SMU agar jelas tertera fokus pengembangan bahasanya. Selanjutnya, adalah pengembangan sumber belajar oleh para ahli dapat menjadi contoh materi ajar yang dapat dikembangkan oleh para praktisi. Hal ini semua perlu disertai dengan pengembangan kompetensi guru dalam berbahasa Inggris lisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, H.I.R. 1998. *Interlanguage Communication Strategies in Sustained Casual Conversations*. Thesis Ph.D. Macquarie University, Sydney.
- Agustien, H.I.R. 2003. "Membangun Kompetensi Kewicaksanaan". Makalah di PELBA 17. Universitas Atmajaya, Jakarta.
- Board of Studies. 1994. *K-6 English Syllabus and Support Document*. New South Wales.
- Cameron, L. 2001. *Teaching Languages to Young Learners*. UK: Cambridge University Press.
- Celce-Murcia, M., Z. Dornyei, S. Thurrell 1995. "Communicative Competence: A Pedagogically Motivated Model with Content Specifications." In *Issues in Applied Linguistics*, 6/2, hlm 5-35.
- Celce-Murcia, M. Olshtain, E. 2001. *Discourse and Context in Language Teaching: A Guide for Language Teachers*. UK: Cambridge University Press.
- Curriculum Planning and Development Division. 2001. *English Syllabys 2001 for Primary and Secondary Schools*. Singapore.
- Dorney, Z. dan S. Thurrell. 1992. *Conversation and Dialogues in Action*. New York: Prentice Hall.
- Eggins, S. 1990. *Keeping the Conversation Going*. Thesis Ph.D. New South Wales University, Sydney.
- Gerot, L. dan P. Wignell. 1995. *Making Sense of Functional Grammar*. Sydney: Antepodean Educational Enterprises.

- Chomsky, N. 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Halliday, M.A.K. 1978. *Language as Social Semiotic*. London: Edward Arnold
- Halliday, M.A.K. 1985a/1994. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.
- Halliday, M.A.K., and Hasan 1985. *Language Context and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective*. Victoria: Deakin University Press.
- Halliday, M. A.K. 1985b *Spoken and Written Language*. Geelong: Deakin University Press.
- Halliday, M.A.K. dan C. Matthiessen, 2000. *Constructing Experience Through Meaning: A language based approach to cognition*. London: Continuum.
- Hymes, D. 1972. "On Communicative Competence". Dalam J. Pride dan Holmes (eds.): *Sociolinguistics*. Harmondsworth: Penguin.
- Kern, R. 2000. *Literacy and Language Teaching*. Oxford: Oxford Applied Linguistics.
- Matthiessen, C. 1995. *Lexicogrammatical Cartography: English Systems*. Tokyo: International Language Sciences Publishers.
- McCarthy, M. Carter, R. 1994. *Language as Discourse: Perspectives for Language Teaching*. London: Longman.
- NCELTR 1992. *English for Social Purposes: A Handbook for Teachers of Adult Literacy*. Sydney: Macquarie University.
- Palmer, B., M.L. Hafner, M.F. Sharp. 1994. *Developing Cultural Literacy through the Writing Process: Empowering All Learners*. USA: A Longwood Professional Book.
- Pusat Kurikulum. 2001. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMU*. Jakarta.
- Swales, J. 1990. *Genre Analysis*. UK: Cambridge University Press.
- Taylor, D.S. 1988. "The Meaning and Use of the Term 'Competence' in Linguistics and Applied Linguistics". In *Applied Linguistics*, Vol 9. no 2: Oxford University Press. Hlm148-168.
- Vygotsky, L. 1962. *Thought and Language*. New York: Wiley.
- Wells, B. 1987. Apprenticeship in Literacy. Dalam *Interchange* 18,1/ 2:109-123.

PENINGKATAN MUTU PENGAJARAN BAHASA ASING NONINGGRIS: KHUSUS BAHASA MANDARIN

Hermi Sutami

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

Pengajaran Bahasa Asing NonInggris

Sejak tahun 70-an di sekolah menengah umum (dulu sekolah menengah atas/SMA) juga diajarkan bahasa asing lainnya seperti Jerman, Prancis di samping bahasa Inggris. Bahasa Jerman dan Prancis di sejumlah sekolah menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa jurusan sosial budaya. Menjelang akhir tahun 70-an bahasa Jepang mulai diajarkan di sekolah-sekolah menengah umum. Hal yang sebaliknya terjadi pada bahasa Jerman dan Prancis. Sejak tahun 90-an jumlah sekolah yang mengajarkan bahasa Jerman dan Prancis mulai menurun, bahkan ada sekolah yang tidak mengajarkannya lagi, atau hanya sebagai mata pelajaran pilihan atau ekstrakurikuler.

Perkembangan baru terjadi setelah turunnya Suharto di tahun 1998 dan naiknya Gus Dur menjadi Presiden RI tahun 2000. Pada tahun yang sama terbit Keppres No. 6 tahun 2000 tentang diperbolehkannya orang Cina menjalankan segala bentuk ekspresi kebudayaan Cina, termasuk mempelajari bahasa Cina beserta aksaranya. Dengan adanya Keppres ini serta merta minat mempelajari bahasa Mandarin tersalurkan secara terbuka,¹ baik dalam bentuk pengajaran nonformal maupun formal. Dewasa ini bahasa Mandarin diajarkan dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah umum, bahkan ada *playgroup* yang menawarkan pengajaran bahasa Inggris dan Mandarin kepada kanak-kanak usia prasekolah.

Mengingat gejala meluasnya pengajaran bahasa Mandarin, sudah sepatutnya pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional turun tangan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan sesuai dengan Politik Bahasa Nasional secara tepat. Makalah ini membahas pengajaran bahasa Mandarin di jalur pendidikan formal pada jenjang sekolah menengah dengan tujuan agar pengajaran bahasa itu dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Pengajaran Bahasa Mandarin

Dalam *Politik Bahasa Nasional* ditegaskan bahwa bahasa Inggris, Jerman, Prancis berkedudukan sebagai bahasa asing di Indonesia. Pada saat

¹ Semasa pemerintahan Suharto pengajaran bahasa Mandarin diadakan secara diam-diam dalam bentuk kursus privat di samping di FIBUI dan FS Darma Persada

Politik Bahasa Nasional disusun tahun 1980 bahasa Mandarin belum diajarkan di sekolah menengah atas, oleh karena itu bahasa itu tidak tercakupi. Namun, kita semua paham akan kedudukan bahasa Mandarin sebagai bahasa asing di negara ini. Fungsinya adalah sebagai alat untuk membantu mempercepat proses pembangunan negara dan bangsa, dan sebagai alat komunikasi dengan bangsa lain (Kartono 1980:125; Retmono 1980:133), dalam hal ini bangsa Tionghoa di Tiongkok, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan tempat lainnya. Adapun pengajaran bahasa Mandarin dimaksudkan untuk menghasilkan siswa yang mampu membaca buku dan bahan cetak lainnya yang menggunakan aksara Han, agar pada tahap lanjut mereka dapat mempelajari ilmu pengetahuan dari negara tersebut seperti sejarah, politik, seni, obat-obatan Cina, dan pengobatan tradisional akupunktur.

Dalam pendidikan formal bahasa Mandarin hendaknya dibedakan antara jenjang sekolah menengah dan jenjang perguruan tinggi dengan tujuan pengajaran yang berbeda. Pada jenjang perguruan tinggi tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga peneliti, tenaga siap pakai sebagai guru dan bukan guru seperti pemandu wisata, sekretaris, penerjemah.

Pada jenjang sekolah menengah tujuannya lebih bersifat praktis. Selain dapat membaca buku cerita sederhana dalam aksara Han, siswa diharapkan dapat mengerti garis besar isi berita atau percakapan di televisi dan radio, mampu membuat karangan sederhana dengan karakter Han, berkomunikasi dengan orang Tiongkok, Taiwan, Singapura, dan Malaysia dalam bahasa Mandarin. Tujuan lain yang sangat berguna adalah memahami kebudayaan, adat-istiadat dan kebiasaan orang Tionghoa melalui bahasa. Hal ini perlu dilakukan mengingat jumlah penduduk Indonesia keturunan Cina cukup banyak dan peran mereka di bidang perekonomian cukup besar. Tujuan terakhir ini dinilai sangat penting. Melalui pemahaman budaya lewat bahasa diharapkan seluruh rakyat Indonesia, baik pribumi maupun non-pribumi keturunan Cina, dapat hidup saling hormat menghormati, penuh rasa persaudaraan tanpa ada rasa curiga sebagai akibat tidak memahami latar belakang budaya masing-masing. Dengan demikian, apa yang disebut masalah Cina dan Peristiwa Mei 1998 atau yang serupa tidak terjadi lagi. Untuk memenuhi kebutuhan di bidang budaya ini dibutuhkan guru yang tidak hanya mahir berbahasa Mandarin saja, tetapi juga mempunyai latar belakang pendidikan sejarah, kesusasteraan, budaya Tiongkok.

Kondisi Pengajaran Bahasa Mandarin Dewasa Ini

Sejak dikeluarkan Keppres No. 6 tahun 2000 sejumlah sekolah mengajarkan bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran wajib, atau ekstrakurikuler dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah umum, terutama di sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya keturunan Cina. Dari hasil

pengamatan terhadap sekolah-sekolah tersebut diperoleh pandangan umum di bidang bahasa dan pengajaran bahasa

Di bidang bahasa, bahasa yang diajarkan belum memenuhi kriteria bahasa Mandarin Baku (bMB)². Ketidakkakuan ini terutama tercermin pada lafal dan intonasi. Hal itu berkaitan dengan penguasaan bahasa Mandarin para guru yang memperoleh kemahiran berbahasa Mandarin di sekolah Cina Indonesia. Dari sudut fonetik—segmental dan suprasegmental—bahasa Mandarin di Indonesia (bMI) dipengaruhi oleh bahasa daerah di Tiongkok seperti bahasa Hokkian, Hakka, Tiociu dan juga bahasa Indonesia serta bahasa daerah di Indonesia. Misalnya, bMI tidak mengenal bunyi retrofleksi yang sangat kental dalam bMB, adanya kalimat berbahasa Mandarin tetapi berintonasi Indonesia. Di bidang gramatika susunan SPO taklangsung O langsung diterapkan ke dalam semua kalimat bahasa Mandarin. Dalam hal ejaan banyak guru tidak menguasai ejaan Hanyu Pinyin yang menggunakan huruf Latin. Ejaan ini merupakan sarana mempelajari bahasa Mandarin pada tahap awal. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh saat mereka bersekolah tidak diajarkan ejaan tersebut. Sebaliknya, anak-anak Indonesia akrab dengan huruf Latin. Hanya dengan frekuensi pertemuan dua jam satu minggu siswa diharuskan dapat menulis dan menghapuskan karakter Han merupakan hal yang sangat sulit dicapai.

Di bidang pengajaran bahasa tampak bahwa penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Mandarin tidak direncanakan secara matang. Ketidakmatangan itu tampak dari tidak ada silabus, kualitas guru yang tidak memenuhi syarat, dan bahan ajar yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan. Ada kesan bahwa mata pelajaran itu diadakan hanya karena bahasa Mandarin sedang populer di masyarakat.

Pada tingkat sekolah dasar bahasa Mandarin diajarkan kepada siswa kelas 4 ke atas. Pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum bahasa itu diajarkan sejak kelas 1. Bahan ajar yang digunakan cukup beragam. Karena belum ada buku ajar bahasa Mandarin yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan anak Indonesia, pihak sekolah menyerahkan pilihan dan penentuan buku ajar kepada guru yang bersangkutan. Dengan demikian, dijumpai bermacam-macam buku ajar terbitan Tiongkok, Taiwan dan Singapura mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah umum. Pilihan tersebut bergantung pada kualitas guru.

² Yang dimaksud dengan bahasa Mandarin Baku adalah bahasa Mandarin yang menjadi bahasa nasional negara RRC (Putonghua)

Ada hal menarik untuk diungkapkan mengenai orang yang menyebut dirinya "guru" bahasa Mandarin³. Para "guru" ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang semasa diperbolehkannya berdiri sekolah Cina memang sudah berprofesi sebagai guru, seperti guru sejarah, guru berhitung, guru ilmu bumi, guru Bahasa Mandarin dan sebagainya. Kelompok ini rata-rata berusia di atas 50 tahun. Kemampuan berbahasa Indonesia mereka pada umumnya tidak begitu baik, hanya menguasai ragam percakapan sehari-hari.
- 2) Mereka yang pernah mengenyam pendidikan sekolah Cina sampai tingkat sekolah menengah pertama (*ch@zh~ng*) atau menengah atas (*g~ozh~ng*). Kemahiran berbahasa Mandarin dan bahasa Cina klasik mereka yang di tingkat SMU lebih tinggi daripada yang di tingkat SMP. Kemampuan berbahasa Indonesiannya ada yang seperti kelompok (1), tetapi ada yang baik.
- 3) Mereka yang pernah mengenyam pendidikan sekolah Cina di tingkat sekolah dasar (*xi/oxu?*). Kemahiran berbahasa Mandarin mereka masih pada taraf dasar. Kemahiran berbahasa Indonesiannya beragam. Jika mereka melanjutkan ke sekolah berpengantar bahasa Indonesia setidaknya sampai tingkat SMU, bahasa Indonesiannya pasti lebih baik daripada yang hanya sampai tingkat SMP saja.
- 4) Mereka yang setelah Peristiwa Mei 1998 pergi belajar bahasa Mandarin ke RRC. Bagi yang tamatan SMU, bahasa Indonesiannya lebih baik daripada tiga golongan di atas. Lafal bahasa Mandarinnnya juga lebih baik karena sebagian besar dari mereka belajar bahasa Mandarin di RRC, sehingga lafalnya belum terpengaruh lafal bahasa Mandarin Indonesia. Di sana mereka mengikuti kursus bahasa Mandarin untuk orang asing selama 1-2 tahun. Ada yang meneruskan belajar bisnis dan bidang lainnya. Namun, di RRC tidak ada kursus untuk menjadi guru. Mereka ini setelah kembali ke Indonesia mencoba menjadi guru.

Empat jenis kelompok inilah yang menjadi guru bahasa Mandarin di sekolah-sekolah di Jakarta. Dari sudut keprofesian kelompok pertama tidak asing lagi mengajar di depan kelas, tetapi hanya sedikit dari mereka yang memang guru bahasa. Kelompok kedua terdiri dari mereka yang memang tidak berprofesi sebagai guru. Mereka diangkat sebagai guru karena dianggap sebagai penutur asli. Seorang penutur asli oleh awam diasumsikan juga guru bahasa sehingga secara otomatis dianggap "pantas" menjadi guru. Dengan demikian, jadilah mereka guru bahasa Mandarin tanpa memiliki pengetahuan tentang metodologi pengajaran bahasa atau pengetahuan budaya Tiongkok. Bila intuisinya sebagai guru cukup kuat, ia akan memilih

³ Sebelum 1967 di Indonesia berdiri sekolah Cina yang berbahasa pengantar bahasa Mandarin.

buku ajar yang tepat dan menggunakan teknik mengajar yang tepat dan baik. Kelompok ketiga tidak berbeda jauh dengan kelompok kedua. Dari segi kemahiran bahasa Mandarin mereka pada umumnya meningkatkan kemahiran bahasanya di lingkungan keluarga, pergaulan atau meningkatkan diri melalui les privat dan belajar mandiri. Kelompok keempat paling sempurna di bidang fonetik dan tata bahasanya.

Keempat golongan di atas pada dasarnya bukan tamatan sekolah guru. Dengan latar belakang bukan sebagai guru bahasa dapat diperkirakan bagaimana kualitas pengajaran mereka dan hasil yang diberikan. Siswa tidak menguasai ejaan Hanyu Pinyin, lafal tidak baku, apalagi karakter Han. Mereka hanya menguasai percakapan yang sangat sederhana seperti salam, memperkenalkan diri dalam bentuk kalimat sederhana, yang memperparah keadaan walaupun nilai ulangan bahasa Mandarin jelek, hal itu tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Ini membuat siswa malas, acuh tak acuh belajar. Terlebih lagi tidak ada teknik menghafal karakter Han secara logis. Di dalam benak mereka tertanam pendapat bahwa bahasa Mandarin sangat susah, apalagi karakternya.

Dengan kualitas guru seperti saat ini tidak mengherankan bila tujuan pengajaran tidak tercapai. Penyebabnya karena guru tidak tahu metode dan teknik mengajar, bahan ajar yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan anak Indonesia. Terlebih lagi, mereka tidak dapat menyampaikan pelajaran dengan baik karena bahasa Indonesianya pun tidak baik.

Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Mandarin

Beberapa sumbangan pikiran akan diajukan dalam meningkatkan mutu pengajaran bahasa Mandarin dewasa ini. Pada dasarnya ada empat hal yang perlu diperhatikan, yakni: (1) kekhasan bahasa Mandarin, (2) kurikulum dan silabus, (3) guru, dan (4) buku ajar.

a. Kekhasan Bahasa Mandarin

Kekhasan bahasa Mandarin diperoleh melalui membandingkannya dengan bahasa Indonesia. Tabel di bawah ini menunjukkan persamaan dan perbedaan bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia	Bahasa Mandarin
1. Tidak berton	1. Berton, 4 ton dasar dan 1 ton netral dengan 5 varian, ton bersifat distingtif
2. Memiliki bunyi bersuara b [b], d [d], g[g], j[i]	2. Hanya memiliki bunyi bersuara l[l], m[m], [n], ng [ŋ], r[ʐ]
3. Tidak memiliki bunyi	3. Memiliki bunyi aspirasi p [p'], t

aspirasi	[t'], k[k'], c [ts'], q [tʃ'], ch [tʃ']
4. Tidak memiliki bunyi vokal dan konsonan retrofleksi	4. Memiliki vokal retrofleksi i[ɨ], I[ɨ], konsonan retrofleksi zh [tʃ], ch [tʃ], sh [ʃ], r [ʃ]
5. Bahasa fonemis	5. Bahasa morfemis, setiap morfem bermakna, merupakan gabungan bunyi tertentu, satu morfem diwujudkan oleh satu karakter Han
6. Ragam tulis menggunakan aksara Latin	6. Ragam tulis menggunakan aksara Han. Aksara Latin muncul dalam Ejaan Hanyu Pinyin guna mentranskripsikan karakter Han dalam kosa kata.
7. Kaya afiksasi	7. Tidak kaya afiksasi
8. Tidak mengenal kala, mengenal aspek	8. Tidak mengenal kala, mengenal aspek
9. Tidak semua nomina memiliki penggolong	9. Semua nomina memiliki penggolong
10. Dalam konstruksi FN induk di sebelah kiri pemerik	10. Dalam konstruksi FN induk di sebelah kanan pemerik
11. Dalam kalimat kata <i>adalah</i> bersifat opsional	11. Dalam kalimat kata <i>shi</i> 'adalah' wajib hadir
12. Tipe kalimat: verbal, nominal, ajektival, preposisional	12. Tipe kalimat: verbal, ajektival, preposisional
13. Urutan kata tidak menentukan ketakrifan	13. Urutan kata menentukan ketakrifan
14. Perbedaan bahasa lisan dan tulis sangat besar	14. Perbedaan bahasa lisan dan tulis tidak besar
15. Bahasa Melayu kuno tidak digunakan lagi dalam bahasa Indonesia	15. Bahasa Cina klasik atau semi klasik masih digunakan dalam surat dagang atau resmi

Tabel 1: Persamaan dan perbedaan bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia

Lima belas butir pada Tabel 1 tidak menunjukkan persamaan dan perbedaan kedua bahasa itu sudah tuntas. Ke-15 butir itu merupakan hal pokok yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun silabus.

b. Tujuan Pengajaran

Kurikulum dan silabus⁴ disusun atas dasar pendekatan dan metode. Pendekatan dan metode ditetapkan sesuai dengan tujuan pengajaran. Littlewood (1985:1-13) berpendapat ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pendekatan:

- 1) tujuan pengajaran;
- 2) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut

Dalam bab (2) diutarakan tujuan pengajaran bahasa Mandarin adalah menghasilkan siswa yang mampu membaca buku dan bahan cetak lainnya yang menggunakan aksara Han, mengerti percakapan orang, mampu menulis dalam karakter Han, dan mampu berkomunikasi dengan orang asing dalam bahasa Mandarin.

Saya mengusulkan pelajaran Bahasa Mandarin mulai diberikan kepada siswa sekolah menengah pertama, dilanjutkan ke sekolah menengah atas sebagai mata pelajaran wajib. Murid sekolah dasar sebaiknya tidak diajari bahasa itu mengingat pada usia sekolah dasar sebaiknya mereka ditempa menguasai bahasa nasional, bahasa Indonesia, sampai baik lebih dahulu. Setelah mempunyai dasar yang kuat dan baik, baru diajarkan bahasa asing. Dengan demikian, perkembangan bahasa Indonesia mereka di tingkat selanjutnya tidak terganggu. Alasan lain, pemikiran bahwa bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, persatuan bangsa dan alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya (Halim, 1980:23) sudah sepatutnya ditanamkan sejak usia dini. Tujuannya, agar penghargaan terhadap bahasa Indonesia tidak luntur oleh karena bahasa asing⁵.

⁴ Stern (1987:19-20) mengungkapkan adanya perbedaan terminologi. Di Inggris digunakan *syllabus*, di Amerika Serikat dan Kanada digunakan *curriculum*, *program* atau *course of study*. Robertson (1971:564) seperti yang dikutip oleh Yalden (1987b:18) membedakan silabus dari kurikulum. Kurikulum adalah "...the curriculum includes the goals, objectives, content, processes, resources and means of evaluation of all the learning experiences planned for pupils both in and out of the school and community through classroom instruction and relate programs..." Silabus didefinisikannya "a statement of the plan for any part of the curriculum, excluding the element of curriculum evaluation itself"; "the syllabus should be viewed in the context of an ongoing curriculum development process". Stern mendefinisikan silabus "a statement on the subject matter, topics, or areas to be covered by the course leading to the particular examination." Silabus merupakan penjabaran terperinci dari kurikulum. Jadi, silabus memuat seperangkat keterangan tentang aktivitas guru, bukan seperangkat perintah untuk murid, pengaruhnya terhadap siswa tidak langsung karena masih ada peran unsur lain, yaitu metodologi.

⁵ Perlu diteliti manfaat pengajaran bahasa asing seperti Inggris dan Mandarin bagi anak usia prasekolah dan sekolah dasar.

Bahasa Mandarin yang diajarkan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dibagi ke dalam tingkat dasar dan tingkat menengah. Di bawah ini disajikan tujuan setiap tingkat.

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah
1. Mampu membaca dan menulis dalam ejaan Hanyu Pinyin	1. Mampu membaca dan menulis dalam ejaan Hanyu Pinyin beserta karakter Han
2. Mengerti percakapan sederhana	2. Mengerti percakapan yang agak kompleks
3. Mampu berbicara dengan topik sederhana, dapat menyanyi lagu anak-anak	3. Mampu membuat karangan pendek
4. Mampu menulis 25-30 karakter Han atas dasar makna radikal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari	4. Mampu berbicara dengan penutur bahasa Mandarin, dapat menyanyi lagu pop

Tabel 2: Tujuan pengajaran tingkat dasar dan menengah

Pada tingkat dasar diajarkan keterampilan membaca serta menulis dalam ejaan Hanyu Pinyin⁶, menyimak dan berbicara. Dalam keterampilan menyimak siswa dilatih di bidang fonetik, baik fonem segmental maupun suprasegmental. Dalam keterampilan berbicara siswa diajarkan dapat mengutarakan dan bertanya tentang identitas, alamat, keluarga, sekolah dan hal lain di seputar kehidupan mereka. Keterampilan menulis karakter Han menempati urutan terakhir. Tujuannya untuk menanamkan pemikiran bahwa menggambarkan karakter Han tidak sukar. Caranya? Di sinilah diperlukan pelatihan bagi guru dengan menggunakan metode baru, yakni atas dasar konsep dan bunyi yang tertuang di dalam setiap karakter⁷. Dianjurkan pengajaran bersifat santai, seperti dalam pelajaran menggambar. Mengingat tahap ini merupakan pengenalan terhadap karakter Han, jumlah karakter yang diajarkan tidak mencapai separuh dari kosakata yang dipelajari. Mengajarkan lagu anak-anak merupakan cara melatih lafal dan menumbuhkan minat belajar.

Pada tingkat dasar siswa diharapkan sudah terampil membaca dan menulis ejaan Hanyu Pinyin serta dapat menulis beberapa puluh

⁶ Ejaan yang menggunakan huruf Latin ini berbeda dengan EYD dalam pelafalan: huruf b dilafalkan [p], p[p'], d[t], t[t'], g[k], k[k'], j [tɕ], r[ʃ]. Beijing dilafalkan [peitɕin], Guangzhou dilafalkan [kuanŋtʃou].

⁷ Sampai saat ini guru menyuruh siswa menghafal urutan guratan, tanpa tahu makna apa yang terkandung di dalam setiap karakter.

karakter Han. Pada tingkat menengah siswa diwajibkan dapat membaca dan menulis 75% karakter Han yang dipelajari. Di samping keterampilan menulis karakter Han, siswa diajari keterampilan mengarang, dan berkomunikasi. Lagu masih tetap merupakan sarana menghilangkan kejenuhan siswa, disajikan dengan mengosongkan bagian tertentu. Siswa sambil mendengar lagu sambil mengisi bagian kosong tersebut.

c. Pendekatan

Dalam Politik Bahasa Nasional (Retmono, 1980:139) ditegaskan urutan kemampuan yang diajarkan adalah membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Empat kemampuan tersebut cocok untuk bahasa yang menggunakan aksara Latin. Bahasa non-Latin seperti bahasa Mandarin, menggunakan huruf Latin sebagai alat bantu pada tahap awal saja. Pada tahap menengah dan lanjut huruf Latin tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, khusus untuk bahasa Mandarin, menulis hendaknya dibedakan antara (1) menulis karakter Han dan Hanyu Pinyin; (2) mengarang. Untuk kepentingan bahasa Mandarin ada lima kemampuan yang diajarkan: menulis dalam Ejaan Hanyu Pinyin dan karakter Han, membaca, menyimak, mengarang, dan berbicara. Urutan kemampuan yang diajarkan pada tingkat dasar adalah menulis dan membaca dalam Hanyu Pinyin, menyimak, berbicara; pada tingkat menengah adalah menulis dan membaca dalam karakter Han, mengarang, berbicara atau berkomunikasi dengan penutur bahasa Mandarin. Keterampilan lisan dan tulis tercakupi dalam dua jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan tujuan pengajaran di atas, keterampilan berbicara mendapat porsi yang sama, baik di tingkat dasar maupun menengah. Setelah lulus sekolah menengah atas diharapkan mereka dapat berkomunikasi dengan penutur bahasa Mandarin lainnya. Pendekatan yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif pada hakikatnya berpandangan bahwa kalimat yang diucapkan mengungkapkan nosi dan fungsi (Johnson dan Morrow 1981 seperti yang dikutip Nababan, 1993:67-8). Pendekatan ini menitikberatkan fungsi-fungsi komunikasi seperti mencari dan menyampaikan informasi; mengungkapkan perasaan seperti minta maaf, memuji, menyatakan setuju, menyesal; tata cara dalam pergaulan seperti menyapa, berpamitan, berkenalan, memberi salam, dan sebagainya. Dalam penyusunan silabus hendaknya ditentukan fungsi komunikasi apa saja hendak diajarkan pada setiap tingkatan dan bagaimana urutannya.

d. Metode

Metode ditetapkan setelah penentuan pendekatan. Mackey (1965) memberikan empat langkah sebagai pedoman memilih metode pengajaran bahasa, yakni (1) seleksi, (2) gradasi, (3) penyajian, dan (4) pengulangan.

(1) Seleksi

Beberapa pedoman dalam penyeleksian pengajaran bahasa Mandarin, antara lain:

- (a) Alasan : komunikasi, membaca
- (b) Siapa : siswa SMP, SMU
- (c) Tingkatan :  dasar : SMP
menengah : SMU
- (d) Ragam : modern, baku, lisan
- (e) Orientasi :  dasar : guru
menengah : murid
- (f) Sifat pengajaran: wajib
- (g) Waktu : 1x seminggu @ 2 jam
- (h) Tempat : sekolah, kelas

(2) Gradasi

Gradasi dilakukan setelah selesai melakukan seleksi. Gradasi atau penjenjangan perlu dilaksanakan mengingat kita tidak dapat mengajarkan sekaligus semua keterampilan. Perlu dibedakan antara gradasi pengajaran keterampilan, dan gradasi tingkat kesulitan bahasa.

(a) Gradasi berdasarkan pengajaran keterampilan:

Tingkat Dasar: - Hanyu Pinyin, baca dan tulis (penguasaan 100%)
- lafal, ton, intonasi
- bicara dengan topik sederhana
- menulis karakter Han yang mudah diingat dan akrab dengan kehidupan sehari-hari (50 karakter)

Tingkat Menengah:

- bicara dengan topik agak rumit
- baca teks dalam Hanyu Pinyin dan karakter Han
- menulis karakter Han (menguasai 75% dari seluruh kosakata)
- menulis karangan sederhana

(b) Gradasi berdasarkan tingkat kesulitan bahasa

Gradasi tingkat kesulitan bahasa dilakukan setelah melakukan analisis perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin di

bidang fonetik (segmental dan suprasegmental) dan sintaksis (frasa, klausa, kalimat).⁸ Maujud mana yang mirip atau sama dengan bahasa Indonesia, maujud itulah yang diajarkan lebih dulu. Bidang fonetik segmental lebih dahulu diajarkan dari pada suprasegmental. Dalam bidang segmental bunyi-bunyi yang sama dengan bahasa Indonesia seperti konsonan b, d, t, m, n, ng, f, h diajarkan lebih dahulu dari pada konsonan aspirasi p, t, k, konsonan dental z, c, s dan konsonan retrofleks zh, ch, sh, r⁹. Hal yang sama dilakukan terhadap bunyi vokal. Bahasa Mandarin mengenal vokal η seperti dalam bahasa Jerman dan bahasa Belanda. Gradasi berikutnya adalah bidang suprasegmental, dari empat ton dasar beserta ton tambahan, ton mana yang diajarkan lebih dahulu dan bila mana mengajarkan sandi ton. Gradasi di bidang sintaksis juga memerlukan analisis persamaan dan perbedaan jenis frasa, kalimat antara bahasa Mandarin dan Indonesia.

(3) Penyajian

Penyajian dibedakan antara penyajian bahan ajar dan teknik penyajian. Mengingat silabus ini didasari oleh pendekatan komunikatif, penyajian bahan ajar hendaknya mengikuti konsep dan ranah bahasa (*notion* dan *domain*), seperti identifikasi diri, dan anggota keluarga. Teknik penyajian dapat dilakukan dengan pelbagai macam alat peraga, menggunakan gerakan tangan dalam mengajarkan ton, dan sebagainya. Perlu diadakan pelatihan teknik mengajar kepada para guru.

(4) Pengulangan

Cara pengulangan bermacam-macam, misalnya dikte menulis karakter Han dan pinyin, latihan bercakap-cakap secara berkelompok, dan drama kecil.

Setelah melakukan empat langkah di atas, baru disusun kurikulum dan silabus yang akan dijabarkan di bawah ini.

e. Kurikulum

Kurikulum bahasa Mandarin memuat latar belakang, tujuan umum, sasaran, proses, isi pengajaran secara garis besar dan sarana yang

⁸ Bahasa Mandarin tidak tergolong bahasa yang kaya secara morfologis seperti bahasa Indonesia. Bahasa ini hanya mengenal beberapa buah prefiks dan sufiks, tidak ada infiks.

⁹ Bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia keduanya mengenal bunyi konsonan r, tetapi cara berartikulasinya tidak sama. Dalam bahasa Mandarin r merupakan konsonan retrofleks, diucapkan dengan melengkungkan apeks sampai ke palatum.

digunakan di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

f. Silabus

Hal yang dimuat dalam kurikulum akan dijabarkan secara terperinci ke dalam silabus yang disusun secara pedagogis (Widdowson, 1987:65; 1990:127). Dalam silabus bahasa Mandarin tidak hanya disebutkan topik pelajaran sesuai dengan konsep dan ranah, tetapi juga cara penyajiannya. Langkah-langkah dalam penyusunan silabus komunikatif didasari oleh metode yang sudah dijelaskan dalam subbab 4.4. Ada dua langkah dalam penyusunan silabus:

(1) Analisis kebutuhan siswa, didasari oleh beberapa faktor:

- (a) Usia  : dasar: SMP: 12-14 tahun
menengah: SMU: 15-17 tahun
- (b) Bakat : diasumsikan semua anak berbakat bahasa
- (c) Minat : hal-hal yang terdapat di sekitar kehidupan mereka, seperti: teman, sekolah, keluarga, permainan, olah raga, dan sebagainya.
- (d) Waktu : siswa hanya punya waktu 1x per minggu tatap muka @ 2 jam. Waktu untuk mengerjakan pr hanya 2 jam seminggu.
- (e) Daya tampung kelas : umumnya jumlah siswa dalam sebuah kelas sekitar 20-30. Bila memungkinkan jumlah siswa tidak lebih dari 20 orang.
- (f) Latar belakang budaya: siswa tidak mengenal kebudayaan Tiongkok, mereka hidup di alam kebudayaan Indonesia. Walaupun ada, jumlahnya tidak banyak.

(2) Analisis bahasa

Hasil analisis bahasa mencerminkan struktur silabus yang akan disusun. Pokok-pokok kebahasaan yang akan diajarkan antara lain:

(a) Fungsi bahasa

Pada tingkat dasar dan menengah fungsi emotif atau ekspresif seperti mengungkapkan perasaan, memberi tahu, bertanya, menyuruh akan diajarkan melalui satuan sintaktis yang menjalankan fungsi tersebut seperti kalimat tanya, kalimat berita, kalimat interjeksi, dan kalimat perintah.

(b) Konsep dan Ranah Bahasa

Berdasarkan konsep dan ranah bahasa diajarkan pelbagai hal, seperti: mengidentifikasikan diri sendiri dan anggota keluarga, mengutarakan kegiatan di sekolah, di rumah dan waktu senggang, aktivitas sehari-hari misalnya ke toko buku, menemani ibu berbelanja, cara pergi dan pulang sekolah, dan cuaca.

(c) Kegiatan Berbahasa:

- Tingkat dasar:
 - meniru lafal, ton, intonasi
 - berbicara: beri salam, beri ucapan terima kasih, bertanya
 - menyimak: mengerti pertanyaan, balas memberi salam, mengerti perkataan orang lain
 - dikte dalam ejaan Hanyu Pinyin
 - membaca teks sederhana dalam ejaan Hanyu Pinyin
- Tingkat menengah:
 - membaca teks dalam karakter Han
 - berbicara: bertanya, minta tolong, minta maaf, mengutarakan pendapat
 - menyimak: mengerti pembicaraan orang lain, mengerti pertanyaan, permintaan orang lain
 - menulis karakter Han
 - dikte dalam karakter Han dan ejaan Hanyu Pinyin

(d) Tingkat Keterampilan Bersosialisasi

Salah satu tujuan belajar bahasa asing agar supaya dapat bersosialisasi dengan penutur bahasa itu dan terampil menggunakan bahasa untuk tujuan: memberi salam, minta maaf, minta bantuan, memberi ucapan selamat, berkenalan, memberi salam perpisahan.

g. Guru

Sejak bahasa Mandarin dan aksara Han diperbolehkan pada 2000, secara tiba-tiba bermunculan banyak kursus, banyak sekolah mengajarkan bahasa Mandarin. Keadaan ini menyebabkan pengadaan tenaga guru terasa sangat dipaksakan. Dengan segala keterbatasan yang ada—karena memang tidak ada persiapan untuk mengadakan pengajaran bahasa Mandarin secara formal, diangkatlah orang-orang tertentu se-

bagai guru. Pada bab 3 sudah diutarakan kondisi pengajaran yang memerlukan perbaikan dan peningkatan mutu.

Untuk mencapai tujuan pengajaran perlu disusun perencanaan yang matang. Rencana ini terdiri atas rencana jangka panjang dan jangka pendek. Rencana jangka panjang bertujuan menghasilkan tenaga guru lulusan universitas di Indonesia yang mahir berbahasa Indonesia dan bahasa Mandarin, mempunyai latar belakang sarjana Sinologi. Hal ini dimaksudkan agar seorang guru mempunyai pengetahuan tentang sejarah, budaya, sosial negara RRC. Di samping mengajar bahasa, seorang guru juga dapat memperkenalkan sejarah dan budaya Cina, misalnya siapa Kaisar Pu Yi, Qinshi Huangdi; apa yang disebut Gugong, Yiheyuan; makna perayaan Imlek, dan perayaan Pecun.

Untuk rencana jangka pendek hal yang paling mendesak dilakukan adalah mengadakan pelatihan bagi para guru di bidang metode pengajaran, bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda telah membentuk subkonsorsium yang menangani pengajaran bahasa Mandarin pada jalur nonformal. Melalui kerja sama dengan beberapa universitas di RRC, subkonsorsium ini telah beberapa kali mengadakan pelatihan guru di bidang bahasa Mandarin dan metode pengajaran bahasa di RRC dan Indonesia. Usaha yang telah dirintis oleh subkonsorsium Dirjen PLSP ini sangat baik. Namun, arah dan tujuan yang hendak dicapainya belum dirumuskan dengan jelas. Sampai seberapa jauh keberhasilan pelatihan yang sudah dijalankan belum ada evaluasinya.

Beberapa saran bagi panitia subkonsorsium dalam mengadakan pelatihan¹⁰:

- 1) Pelatihan terdiri atas metode pengajaran, kemahiran bahasa Mandarin, kemahiran bahasa Indonesia.
- 2) Pelatihan dapat dilakukan oleh pakar pengajaran bahasa Mandarin dan Indonesia yang bekerja sama dengan universitas di RRC.
- 3) Pelaksanaan analisis kebutuhan guru dalam metode pengajaran, kemahiran bahasa Mandarin, kemahiran bahasa Indonesia.
- 4) Kekurangan yang ditemukan akan diisi melalui pelatihan. Pihak konsorsium memberitahukan pihak universitas RRC mengenai isi atau mata pelajaran yang akan diajarkan.
- 5) Pelatihan metode pengajaran dan kemahiran bahasa Mandarin dapat dilakukan dengan mengadakan kerja sama antara pakar Indonesia dan pakar RRC.

¹⁰ Penulis pernah mengikuti pelatihan guru bahasa Mandarin di Universitas BLCU, Beijing, dan Universitas Jinnan, Guangzhou.

- 6) Pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia dilakukan oleh pakar bahasa Indonesia.
- 7) Pelatihan dibedakan atas tingkat dasar dan menengah. Peserta pelatihan mengikuti tes penempatan untuk menentukan tingkatannya.
- 8) Diadakan tes untuk menentukan kelulusan.

Saran lain di samping pelatihan adalah mengadakan ujian kelayakan mengajar Bahasa Mandarin. Hanya mereka yang lulus ujian itu dapat menjadi guru di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Ujian kelayakan ini hendaknya bersifat nasional. Orang yang mengantungi ijazah tersebut dapat mengajar di sekolah mana saja di Indonesia.

h. Buku Ajar

Di toko buku dijumpai pelbagai jenis buku pelajaran bahasa Mandarin untuk anak-anak dan orang dewasa. Buku-buku tersebut ada yang ditulis oleh orang Indonesia, ada juga terbitan Singapura. Buku-buku terbitan Singapura sebenarnya ditujukan untuk anak-anak Singapura keturunan Cina yang sedikit banyak sudah berbahasa Mandarin. Oleh karena itu, buku-buku tersebut sudah menggunakan karakter Han walaupun untuk murid sekolah dasar. Buku demikian jelas tidak cocok bagi anak Indonesia yang "buta" aksara Han.

Buku-buku karangan orang Indonesia, terutama untuk jenjang sekolah menengah, terasa sangat kurang, tidak lebih dari lima saja. Sebagian besar tentang penulisan karakter Han. Belum tampak buku pelajaran tingkat dasar atau menengah yang menunjukkan kepakaran si penulis di bidang pengajaran bahasa. Hampir semua buku memiliki pola yang sama. Pertama-tama disajikan teks, kemudian kosakata baru, lalu penjelasan tata bahasa dan terakhir adalah latihan.

Untuk mengatasi kekurangan ini hendaknya Departemen Pendidikan Nasional, melalui subkonsorsiumnya, melaksanakan proyek penyusunan buku ajar. Dalam penyusunan ini dilakukan analisis kebutuhan siswa Indonesia dan analisis bahasa. Berdasarkan hasil analisis, disusun buku ajar dengan pendekatan komunikatif. Sebuah buku yang dapat memnuhi kebutuhan anak Indonesia di bidang fonetik, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik bahasa Mandarin.

Penutup

Bahasa Mandarin merupakan bahasa asing yang sejak tiga tahun terakhir mulai diajarkan dalam pendidikan formal di Indonesia sebagai mata pelajaran wajib atau ekstrakurikuler. Karena izin penyelenggaraannya dikeluarkan secara tiba-tiba, akibatnya timbul ketidaksiapan pengajaran dari sudut metode pengajaran, guru dan bahan ajar. Dapat dibayangkan bagaimana "paniknya" sekolah mencari guru Bahasa Mandarin. Padahal,

selama 30 tahun tidak ada sekolah yang menghasilkan guru bahasa Mandarin. Akibatnya bermunculanlah guru-guru yang tidak memenuhi syarat menjadi guru.

Keadaan demikian dapat diperbaiki dengan melakukan tindakan yang melibatkan Departemen Pendidikan Nasional, pakar pengajaran bahasa Mandarin dan pakar pengajaran bahasa. Depdiknas melalui subkonsorsiumnya menyusun sebuah proyek terpadu yang terdiri dari rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang yang masing-masing sudah dipaparkan. Pada setiap rencana kerja dilakukan analisis tujuan, kebutuhan secara matang, agar supaya arah dan langkah pengajaran dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Namun, yang perlu dilakukan saat ini adalah melaksanakan rencana jangka pendek. Rencana itu mencakup penyusunan kurikulum dan silabus, peningkatan mutu guru di bidang metode mengajar, kemahiran bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, H. Douglas. 2000. *Principles of Language Learning and Teaching*. New York: Longman.
- Halim, Amran. 1980a. "Fungsi Politik Bahasa Nasional". Dalam *Politik Bahasa Nasional 1*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 13-25.
- _____. 1980b. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia". Dalam *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 19-28.
- Hidayat, Rahayu. 1993. "Mata Kuliah Bahasa Cina". Makalah untuk Lokakarya Kurikulum-silabus-SAP, PS Cina, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jakarta 5-7 Februari 1993.
- Mackey, William F. 1965. *Language Teaching Analysis*. London and Harlow: Longmans.
- Nababan, Sri Utari Subyakto. 1993. *Metodologi Pengajaran Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, Giri. 1980. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia" dalam *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 121-130.
- Littlewood, William T. 1985. "Integrating the new and the old in a Communicative Approach". Dalam Bikram K. Das (ed.) *Communicative Language Teaching*. Singapura: SEAMEO Regional Language Centre. Anthology Series 14, hlm.1-29.
- Retmono. 1980. "Pengajaran Bahasa Asing dalam Rangka Politik Bahasa Nasional". Dalam *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 131-142.
- Stern, H.H. 1987. "Directions in Syllabus Design". Dalam Makhan L. Tickoo (ed.) *Language Syllabuses: State of the Art*. Singapura: SEAMEO Regional Language Centre. Anthology Series 18. Hlm.19-32.
- Sutami, Hermina. 1993. "Model Silabus Bahasa Mandarin Tingkat Dasar" Makalah Lokakarya Linguistik Terapan FIB UI. Jakarta 7-17 Juni 1993.
- _____. 1994. "Pengajaran Kemahiran Berbahasa Mandarin". Makalah Kongres Nasional Masyarakat Linguistik Indonesia. Palembang 1-5 Juni 1994.

- _____. 1996. "Perencanaan Penyelenggaraan Kursus Bahasa Mandarin Praktis". Makalah Seminar Sehari PS Cina FIB UI, 7 Juli 1996.
- Widdowson, H.G. 1987. "Aspects of Syllabus Design". Dalam Makhan L. Tickoo (ed.) *Language Syllabuses: State of the Art*. Singapura: SEAMEO Regional Language Centre. Anthology Series 18. hlm. 65-89.
- _____. 1990. *Aspects of Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
- Yalden, Janice. 1987a. "Defining 'Syllabus': Problems and Proposals". Dalam Makhan L. Tickoo (ed.) *Language Syllabuses: State of the Art*. Singapura: SEAMEO Regional Language Centre. Anthology Series 18. Hlm.44-49.
- _____. 1987b. *The Communicative Syllabus: Evolution, Design and Implementation*. London: Prentice-Hall International.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal	: Rabu, 15 Oktober 2003
Judul Makalah	: 1. Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia 2. Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Asing Non-Inggris: Khusus Bahasa Mandarin
Pemakalah	: 1. Helena Agustin 2. Hermina Sutami
Pemandu	: Bahren Umar Siregar
Pencatat	: 1. I Made Budiasa 2. T. Syarfina

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Hamzah Mahmud (Universitas Hasanuddin Makassar)
 - a. Mengingat begitu rumitnya karakter HAN dalam bahasa Mandarin, apakah tidak ada usaha para linguist dari Cina untuk mempermudah karakter HAN itu sendiri?
 - b. Berapa jumlah karakter HAN yang harus dikuasai sehingga orang dapat berkomunikasi dengan lancar?

Jawaban: Hermina Sutami

- a. Pemerintah RRC pada tahun 1995 pernah menyederhanakan karakter HAN yang jumlah awalnya 2000 karakter menjadi 21 guratan dan disederhanakan lagi menjadi 7 guratan. Usaha ini sangat membantu orang asing yang mau belajar bahasa Mandarin. Namun, Taiwan tidak menyederhanakan karakter HAN dengan alasan tidak ingin merusak keindahan bahasa Mandarin tersebut.
 - b. Jumlah karakter HAN yang harus dikuasai agar orang dapat berkomunikasi dengan lancar adalah 2000.
2. **Pertanyaan:** Mansoer Pateda (Gorontalo)
 - b. Apakah ada dialek-dialek dalam bahasa Mandarin?
 - c. Apakah ada proses afiksasi di dalam bahasa Mandarin?

Jawaban: Hermina Sutami

- a. Dalam bahasa Mandarin tidak ada dialek. Saya lebih cenderung menyebutnya bahasa daerah. Di sana ada 55 bahasa daerah seperti bahasa Hokian, tetapi bahasa utamanya adalah bahasa Mandarin.

- b. Dalam bahasa Mandarin, ada
- | | |
|---------|----|
| sufiks | 12 |
| infiks | 1 |
| prefiks | 2 |
| afiks | 4 |

3. **Pertanyaan:** Daliman Edi Subroto (Universitas Sebelas Maret, Solo)
- Tadi menurut Ibu, bahasa Mandarin *tone* bersifat distingtif, sedangkan setahu saya perubahan kata dengan *tone* bersifat morfemik.
 - Bagaimana ejaan bahasa Mandarin diubah menjadi ejaan Latin.
 - Apakah Ibu setuju bahasa Inggris diajarkan di sekolah dasar.
 - Bagaimana membentuk materi bahasa Inggris yang akan diajarkan untuk anak TK dan SD.
 - Masalah apa yang layak untuk topik disertasi yang berhubungan dengan pengajaran Bahasa Inggris di SD.

Jawaban: Hermina Sutami

- Setiap morfem mempunyai *tone* tertentu dan setiap *tone* mempunyai karakter tertentu. Dalam bahasa Mandarin satu karakter mempunyai *tone* tertentu, makna tertentu, dan juga satu suku kata tertentu. Jadi, kalau distingtif ada maknanya dan juga bersifat morfemis. Dari sudut fonetik bahasa yang *bertone*.
- Tidak dapat direalisasikan karena teks bahasa Cina berangkai dan rumit.
- Ketika merencanakan pendidikan bahasa Inggris masih terpaku materi apa yang akan diajarkan, metode pengajaran apa yang tepat. Seolah-olah apa yang ingin dicapai sudah jelas. Jadi, kita harus berkompetensi yang terlibat wacana lisan dan tulisan. Dalam membuat materi harus ada *transectional*. Ibu Helene setuju bahwa sekolah dasar ada pengajaran bahasa Inggris dengan adanya mata pelajaran listening dan pengajarannya dengan sumber daya manusia yang baik.
- Kita harus berasumsi bahwa bahasa Inggrisnya nol dan belum diajarkan di SD. Oleh karena itu, pada semester I dibiasakan dengan *listening* yang baik untuk penguasa dan mengelola kelas. Baru semakin lama semakin ditingkatkan dengan *writting*. Tahun depan ada rencana disusun kurikulum dari SD, karena Depdiknas mulai merespon kehendak untuk menerapkan bahasa Inggris untuk SD secara berbeda-beda dengan mempertimbangkan silabus alamiah.
- Yang penting adalah bagaimana kemampuan guru SD untuk melakukan *scalfholding talk* karena di situlah kunci keberhasilan di SD.

4. **Pertanyaan:** Maria (Palangkaraya)
Bagaimana pendapat Ibu tentang penguasaan bahasa Inggris di PGSD.

Jawaban:

Tentang PGSD belum bisa dijawab. Kita harus kerja keras bersama dan kita harus bersabar tentang hal ini.

PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA DARI ASPEK TEORI LINGUISTIK

Hein Steinhauer

Universitas Leiden, Universitas Nijmegen

Sesuai dengan pesanan Panitia Penyelenggara makalah ini membahas masalah yang berikut:

- a. Bagaimana perkembangan aspek bahasa Indonesia? Manfaat apa yang diperoleh dari perkembangan bahasa Indonesia dipandang dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan politik?
- b. Kendala apa yang dihadapi dalam usaha peningkatan mutu pengembangan bahasa Indonesia?
- c. Apa saja faktor pendukung usaha peningkatan mutu perkembangan bahasa Indonesia?
- d. Jelaslah, pertanyaannya lebih gampang daripada menjawabannya.

Yang harus dijelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan bahasa Indonesia itu. Almarhum pakar sociolinguistik C.D. Grijns pernah membawakan ceramah yang berjudul "Does Indonesian exist?". Masalahnya dikaitkannya dengan banyaknya ragam dan corak "bahasa" Melayu yang dibedakan pada tahun dua puluhan abad yang lalu, dan yang merupakan kontinum tanpa batas yang jelas. Sementara sociolinguist masa kini malah berpendapat bahwa konsep "bahasa" tidak dapat dibenarkan karena yang dapat diamati adalah variasi dan kontinum-kontinum di dalam suatu ekologi kebahasaan yang mencakupi jauh lebih banyak daripada kaidah tata bahasa dan kamus saja (band. misalnya Mühlhäusler, 1996 dan 2002).

Menurut Mühlhäusler, para linguist yang menyusun tata bahasa dan kamus memutar kenyataan karena mereka secara artifisial membendakan sesuatu yang tidak diskret, batasnya kabur, dan sifatnya tidak tetap. Konsep bahasa sebagai gabungan tata bahasa dan kamus menurutnya hanya dapat dibenarkan untuk bahasa-bahasa nasional yang dibakukan seperti yang di Eropa. Berbeda dengan "artefak" itu, bahasa alamiah tidak jelas batasnya dan tidak ada tata bahasa yang dibakukan sehingga variasinya banyak.

Menurut hemat saya, perbedaan antara bahasa baku dan bahasa alamiah tidak setajam seperti dirumuskan oleh Mühlhäusler: ada masyarakat bahasa alamiah yang merupakan suku terasing sehingga batas bahasanya jelas; jumlah penuturnya pun kecil sehingga variasinya diduga terbatas juga. Akan tetapi, bahkan jika Mühlhäusler benar, pemerian suatu kontinum bahasa alamiah dengan segala kekaburan batasnya dan variasinya yang banyak itu hanya dapat dilakukan dengan berpijak pada salah satu unsur dari kontinum itu, misalnya varietas bahasa C dari kontinum A-B-C-D. Variasi yang bisa ada di dalam varietas bahasa C itu tidak mungkin sembarangan saja sehingga dapat diberikan kendalanya dan fungsinya.

Dengan kata lain, simpati terhadap ancangan Mühlhausler yang menitik-beratkan ekologi bahasa (Lih. Mühlhausler, 1996:2--8) tidak melepaskan kita dari kewajiban memerikan (kontinum) bahasa dengan menyusun antara lain sebuah tata bahasa dan kamus. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan Grijns "does Indonesian exist?" harus dijawab dengan "iya". Tetapi, bagaimana klasifikasinya sesuai dengan tipologi Mühlhausler itu? Apakah bahasa Indonesia adalah bahasa alamiah (yang batasnya kabur dan penuh variasi) atau artefak ala bahasa nasional di Eropa?

Ada yang berpendapat bahwa "bahasa" Melayu Manado, "bahasa" Minang, "bahasa" Melayu Ambon, "bahasa" Melayu Jakarta, dan sebagainya merupakan dialek bahasa Indonesia. Kalau begitu ada tiga kemungkinan: 1) bahasa Indonesia adalah kontinum bahasa yang tidak jelas batasnya dan bervariasi banyak, 2) bahasa Indonesia adalah nama payungan untuk kelompok varietas bahasa yang sebagiannya mungkin dapat dibedakan secara diskret, sebagiannya pun merupakan kontinum tanpa batas yang jelas, atau 3) bahasa Indonesia adalah artefak yang sebagai unsur dari 1) atau 2) didiskretkan melalui pembakuan.

Sebagai peserta pada Kongres Bahasa Indonesia VIII ini kita harus berpegang pada penafsiran yang ketiga. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa yang didefinisikan tata bahasanya dalam *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (TBBBI) dan kosakatanya dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Mungkin perlu ditambahkan: kedua-duanya dalam edisi mutakhir (Alwi dkk., 1998 dan 2000), walaupun perbedaan antara edisi mutakhir dengan edisi sebelumnya cukup menonjol sehingga muncul pertanyaan apakah bahasa Indonesialah yang berubah atau kita. Dalam hal kosakata jawabannya jelas: tidak ada bahasa yang kosakatanya tetap, kecuali bahasa yang sudah punah. Dalam hal tata bahasa perubahannya jauh lebih pelan: jadi, perbedaan antara berbagai edisi TBBBI bukanlah akibat perubahan bahasa Indonesia, melainkan akibat perubahan pengertian dan ancangan kita atau tim penyusunnya.

Definisi bahasa Indonesia sebagai gabungan tata bahasa dan kosakatanya yang "baku" itu membedakannya dari semua "varietas nonbaku", yang mencakup semua varietas bahasa yang bercorak Melayu, artinya yang lebih mirip dengan bahasa Indonesia baku daripada dengan bahasa daerah di Indonesia yang tidak bercorak Melayu itu. Masalah varietas bahasa apa saja yang bercorak Melayu itu, atau sejauh mana ada alasan untuk menganggap bahasa Melayu Manado dan sebagainya sebagai dialek bahasa Indonesia tidak akan saya singgung dalam makalah ini. Tingkat kemiripan dan perbedaan antara dua bahasa tidak dapat dikuantifikasi. Jadi, kriteria untuk menentukan kemelayuan suatu bahasa tidak mungkin objektif kalau dibandingkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa Biak, bahasa Jawa bercorak Melayu. Namun kalau bahasa Biak diganti dengan bahasa Melayu Manado, bahasa Jawa menjadi bahasa yang lain.

Berdasarkan pendefinisian bahasa Indonesia seperti di atas, masalah yang diajukan oleh panitia itu akan saya bahas dalam paragraf-paragraf berikut ini.

Perkembangan Aspek Bahasa Indonesia

Kata *perkembangan* didefinisikan dalam KBBI sebagai 'perihal berkembang'. Awalan *ber-* dalam kata *berkembang* menyatakan bahwa peristiwanya yang bersifat positif ('menjadi lebih besar/luas/sempurna') dilihat dari perspektif yang netral terhadap poros aktif-pasif: perkembangannya bisa spontan dan bisa direkayasa. Soalnya sekarang: adakah aspek yang menjadi lebih besar/luas/sempurna? Menurut hemat saya, bahasa Indonesia tidak berubah secara berarti, setidaknya-tidaknya sejak Kongres Bahasa Indonesia VII lima tahun yang lalu. Edisi baru dari TBBBI pun tidak terbit kali ini. Paling-paling aspek apresiasi bahasa Indonesia yang berubah walaupun mungkin tidak semata-mata ke arah yang "lebih besar" atau "lebih sempurna". Sebenarnya inti kritik terhadap bahasa Indonesia yang baku dari dulu tidak berubah secara mendasar:

"Kenapa kita harus menuruti para "ayatollah" bahasa di Pusat itu saja?" "Kita sendiri yang mampu menentukan bagaimana harus berbicara." "Bahasa beliau-beliau itu kaku, tidak dapat dipakai kalau mau santai sedikit." "Kosakatanya tidak memadai." Sekarang ini kritik seperti itu agaknya diwarnai oleh kebencian terhadap sentralisme Orde Baru, sekaligus terkandung di dalamnya kekecewaan terhadap para "ayatollah bahasa" itu, karena tetap ada kesenjangan antara bahasa baku yang resmi dengan bahasa sehari-hari.

Manfaat Perkembangan Bahasa Indonesia dari Segi Sosial Budaya, Politik, dan Ekonomi

Masalah ini sesungguhnya di luar kemampuan saya untuk membicarakannya. Apa yang akan saya kemukakan di bawah sini merupakan perkiraan dan dugaan saja. Manfaat itu rasanya bukan tidak bercampur dengan rugi.

Dalam masyarakat multibahasa perkembangan bahasa yang satu jaranglah sejalan dengan perkembangan bahasa yang lain. Perbandingan data dari sensus tahun 1980 dan 1990 membuktikan bahwa perkembangan bahasa Indonesia membahayakan bahasa daerah: persentase dari penduduk yang berbahasa daerah menurun sedangkan persentase yang berbahasa Indonesia sebagai bahasa pertama naik (lihat Steinhauer, 1994 untuk angka-angka mengenai bahasa daerah yang besar). Keadaan diglosia atau poliglosia yang pada awalnya stabil menjadi goyah dengan masuknya bahasa Indonesia sebagai pilihan baru, lengkap dengan ranah yang baru pula. Akibatnya peran ranah yang tradisional dalam pergaulan sehari-hari

berkurang sehingga kesempatan untuk menggunakan bahasa daerah. Status bahasa Indonesia sebagai bahasa kekuasaan, kehidupan kota, serta kemodernan tidak jarang mengakibatkan bahwa bahasa daerah dianggap ketinggalan zaman dan kurang berharga. Dengan demikian, kebudayaan yang didukung bahasa daerah itu. Generasi penerusnya akan meremehkan nilai-nilai generasi sebelumnya sebagai lambang kekolotan, tidak akan meneruskan kebudayaan dan bahasanya lagi. Hal itu gambaran yang cukup menyedihkan, tetapi proses seperti itu dapat diamati di semua benua (band. misalnya Mühlhausler 1996, Bradley & Bradley, 2001). Kita harus menjaga agar kebudayaan daerah jangan dihapuskan begitu saja. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kebudayaan itu harus dibekukan seperti benda museum. Kebudayaan yang hidup selalu berubah. Kalau bahasa Indonesia dengan nilai-nilai yang diungkapkan oleh penuturnya berkontak dengan bahasa daerah, kebudayaan daerah akan dipengaruhi. Akibat sosial budaya menjadi negatif, jika penutur bahasa daerah akan merasa dirinya minder justru karena mereka berbahasa daerah yang "kolot" itu. Perkembangan bahasa Indonesia hanyalah menjadi pemerayaan budaya jika bahasa daerah dikembangkan juga, atau paling sedikit jika timbulnya rasa minder pada penutur bahasa minoritas itu dicegah sedapat-dapatnya.

Dari segi ekonomi juga perkembangan bahasa Indonesia, dalam arti persebarannya yang lebih luas, dapat dinilai secara negatif dan positif. Ekonomi pedesaan kurang memerlukan jalinan hubungan dengan orang yang berlainan bahasa. Sebaliknya, ekonomi yang dianggap lebih maju, yaitu ekonomi pasar, bergantung pada adanya pasaran, dan makin besar pasaran itu makin menguntungkan untuk ekonominya. Di negara multi-bahasa seperti Indonesia pasaran itu biasanya mencakup lebih dari satu (masyarakat) bahasa, itu yang menyulitkan perdagangan sehingga diperlukan bahasa yang supraetnik atau *lingua franca* untuk mengatasi kesulitan itu. Makin luas pengetahuan penutur bahasa Indonesia makin besar pasaran yang dapat dilayani dan dimanfaatkan, tanpa perlunya bantuan penerjemah dengan segala ongkos tambahannya. Jadi, dari sudut pandangan perusahaan besar, perkembangan bahasa Indonesia harus dinilai positif.

Aspek yang negatif dari perkembangan ekonomi pasar itu adalah kenyataan bahwa kehidupan tradisional pedesaan tidak dapat dipertahankan: di banyak desa di kepulauan Alor (NTT) misalnya, laki-laki dewasa merantau untuk mencari pekerjaan di ibu kota kabupaten, di Kupang, di Kalimantan, bahkan sampai di Malaysia. Kegiatan mereka di dalam sistem ekonomi pedesaan setempat tidak (dapat) diambil alih oleh kaum wanita yang mereka tinggalkan di desa itu. Pengetahuan mereka yang khas (misalnya mengenai teknik perikanan, obat-obatan tradisional, dan pada umumnya tentang lingkungan setempat) tidak diteruskan lagi kepada anak-anak mereka, yang wajib bersekolah untuk belajar "muatan pusat" yang kurang sesuai dengan kehidupan lokal mereka. Maka dari segi

perseorangan dan masyarakat desa segi positif dari perkembangan ekonomi berkat perkembangan bahasa Indonesia itu belum tentu mengimbangi segi negatifnya. Namun, ekonomi pasar tidak dapat ditiadakan untuk memulihkan kembali ekonomi tradisional. Kita pun tidak bisa lagi membuat api tanpa pemantik. Jadi, masa depan kita adalah di tangan orang yang berbahasa Indonesia.

Penalaran seperti ini juga berlaku untuk bahasa Inggris sehubungan dengan ekonomi yang diglobalisasi. Jadi, tidak akan mengherankan kalau pada konperensi UNCT AD yang berikut penasihat Bush akan mengecap bahasa yang bukan bahasa Inggris sebagai penghalang perdagangan bebas, yang karena itu harus dilarang dan diberantas. Jelaslah, pendapat seperti itu sendiri yang harus diberantas. Kalau semua orang sama bahasanya, sama pandangannya, sama tanggapannya, dunia menjadi neraka. Keberagaman bahasa dan kebudayaan tidak kurang penting daripada keberagaman alam dan bahan-bahan genetis.

Dari segi politik perkembangan satu bahasa sebagai bahasa supranetnis yang resmi harus dinilai positif, asal dampak sosial budaya yang negatif dapat dicegah. Bahasa yang dimiliki bersama tidaklah menjamin kerukunan sosial. Makin banyak orang mengerti hasutan, makin rawan masyarakatnya. Namun, orang yang fasih berbicara bisa bertengkar mulut, sedangkan orang yang kehilangan kata tinggal baku hantam saja.

Demokrasi di parlemen Eropa dijamin dengan memperbolehkan anggota menggunakan bahasanya masing-masing, yang secara simultan diterjemahkan oleh segudang penerjemah (misalnya dari bahasa Finlandia ke bahasa Portugis, dari bahasa Denmark ke bahasa Yunani). Semua berkas resmi, keputusan, peraturan dan undangundang diterjemahkan ke dalam semua bahasa yang resmi. Dalam praktek di luar itu bahasa Perancis dan Inggris yang paling banyak digunakan sebagai "bahasa kerja". Dengan bertambahnya jumlah negara anggota Uni Eropa pada 2004 masalah bahasa bertambah hangat, dan ada yang menduga bahwa perkembangan kebahasaan dalam praktek akan mengarah ke bahasa persatuan: "makin banyak bahasa, makin banyak bahasa Inggris". Di Indonesia dengan ke-500 bahasanya pemecahan seperti dalam parlemen Eropa tidak mungkin diwujudkan dan tidak perlu juga: bahasa persatuan sudah ada. Namun, supaya perwakilan rakyat memang mewakili rakyatnya anggota DPR harus berbicara bahasa rakyat. Jalan yang paling singkat ialah pengembangan bahasa Indonesia sampai dikuasai oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengurangi pentingnya bahasa daerah.

Kendala dalam Usaha Peningkatan Mutu Pengembangan Bahasa Indonesia

Rumusan masalah ini oleh Panitia menyiratkan bahwa usaha pengembangan bahasa Indonesia belum memadai, melainkan perlu ditingkatkan mutunya. Sebagaimana tersirat dalam uraian saya di atas saya berpendapat, bahasa Indonesia sendiri sudah mantap. Kalau sementara pengritik mencela tidak memadainya kosakata bahasa Indonesia, mereka sebenarnya mencela kosakata mereka sendiri. Kosakata suatu bahasa adalah kumpulan kosakata semua penuturnya. Kosakata bahasa Inggris lebih besar daripada kosakata presiden Bush. Bukan bahasa Indonesia atau Melayu yang kekurangan kata, melainkan mungkin kebanyakan penuturnya yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Hal itu tidak berarti bahwa tidak ada kesenjangan dalam kosakata bahasa Indonesia (jika dibandingkan dengan bahasa yang lain, biarpun itu bahasa daerah seperti bahasa Leti, bahasa negara tetangga seperti Laos, ataupun bahasa Inggris). Kesenjangan selalu dapat ditemukan, dunia berubah terus, tetapi kesenjangan itu dapat diisi dengan kata pinjaman atau rekaan yang baru. Mutu para pengembang bahasa dalam usaha itu tidak dapat kita persoalkan. Namun, kesuksesan usaha mereka tergantung dari beberapa hal.

Tidak ada gunanya melawan arus bawah. Kalau masyarakat sudah memeluk kata tertentu untuk konsep tertentu, usaha untuk menggantinya dengan kata yang lain boleh diduga akan percuma. Melawan arus atas pun menjadikan sukses kurang pasti. Dalam era globalisasi ini bahasa Inggris meresap ke mana-mana. Adaptasinya ke dalam bahasa Indonesia diduga lebih menjamin diterimanya istilah baru itu daripada ciptaan baru atau pungutan dari bahasa daerah yang tidak diketahui orang banyak.

Dalam adaptasi itu kelas kata sedapat mungkin dipertahankan. Tidak jarang ditimbulkan kerancuan akibat dipakainya kata yang dalam bahasa Inggris merupakan adjektiva sebagai nomina dalam bahasa Indonesia (dalam bentuk yang secara fonologis diadaptasi). Misalnya, "saya tidak suka *sintaktis*" (didengar dari mahasiswa Indonesia), "bahasa Indonesia yang dipakai sekarang ini sangat tidak manusiawi", masih terlalu *standar pada bahasa yang benar*" (Sutopo, 1996:48), dan sebaliknya, misalnya: "... , betapa *phobia* pun sebagian di antara kita akan kata "politik" (Pabottingi, 1996:213, dikutip dalam Loven, akan terbit: 6).¹

Faktor yang paling menentukan dalam pengembangan bahasa Indonesia adalah usaha penyuluhan. Jika yang ditegaskan dalam penyuluhan segi luar bahasa saja (ejaan, tanda baca, peristilahan untuk unsur gramatikal) masyarakat umum akan kehilangan semangat dan perhatian.

1 Dalam bahasa lisan konstruksi seperti ini juga terdapat dengan kata yang bukan pungutan. Bandingkan: "... itu bahasa Betawi sekali" (Loven, akan terbit: 328). "Itu yang kadang-kadang ... membikin pihak yang bukan orang Betawi itu ... jadi pengaburan" (Loven, akan terbit: 298), "Bapak saya sangat tentara" (wawancara dengan Mbak Tutut, Kompas 1992(?))

Menurut hemat saya, ada dua hal yang sedapat mungkin harus ditekankan dalam pemasyarakatan bahasa Indonesia itu:

- 1) Fungsi bahasa Indonesia yang khas di dalam keadaan diglosia yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya bahasa Indonesia saja yang harus menjadi lambang negara dan kebanggaan penduduknya, melainkan justru kebinekaan bahasa dan budayanya. Bukan hanya fungsi bahasa Indonesia yang harus disoroti, melainkan juga fungsi bahasa daerah, termasuk berbagai varietas bahasa Melayu. Bukanlah hanya kekayaan bahasa Indonesia, melainkan kekayaan akan bahasa di Indonesia yang harus disadari dan disadarkan. Dengan menomorduakan bahasa daerah dan fungsinya di dalam sistem diglosia itu pengertian terhadap bahasa Indonesia dengan fungsinya tidak bakal ditingkatkan.
- 2) Fungsi unsur bahasa Indonesia. Penjunjung bahasa Indonesia harus sadar akan daya semantisnya. Berkat kosakatanya, kemungkinan derivasionalnya dan sintaktisnya serta sistem infleksionalnya, maka bahasa Indonesia mampu mengungkapkan perbedaan semantis yang khas. Tidak cukup kalau pelajar bahasa Indonesia diajari bahwa bentuk tertentu mungkin atau mungkin juga, jika tidak dijelaskan apa makna bentuk itu dan dalam hal apa makna itu berbeda dengan alternatif-alternatifnya atau dari bentuk-bentuk yang lain di dalam paradigma infleksionalnya.

Tanpa pengertian mengenai maknanya pemakai bahasa Indonesia paling-paling akan berhasil menjadi pembeo, tetapi bukan penutur yang bernalar. Ternyata kemampuan berbahasa oleh sementara orang masih dicampuradukkan dengan kemampuan murid meneriakkan "subjek!" atau "bilabial!" atas pertanyaan guru atau master kuis "apa unsur pertama dalam kalimat *bahasanya indah*." Dalam Kongres Bahasa Indonesia yang lalu Prof. Bambang Kaswanti Purwo menyebut kasus seorang guru bahasa Indonesia yang menyuruh muridnya menulis seribu kali kata *ambo*; dan *sepol* dengan alasan bahwa *oi* itu merupakan diftong yang jarang ditemukan dalam kosakata Indonesia sehingga penulisannya harus betul-betul dilatih dengan baik. Hal seperti itu dapat dianggap eksese. Tetapi ancangan yang nonsemantis, yang tidak terarah kepada kemahiran berbahasa berkat pengertian mengenai maknanya, juga terasa dalam TBBBI.

Dalam bagian awal TBBBI sampai halaman 117 berbagai pengertian linguistik (yang relevansinya untuk kemahiran bahasa tidak selalu mencolok) dibicarakan sepanjang lebar, akan tetapi pengertian yang paling mendasar yaitu pengertian *makna* tidak didefinisikan. Saya sadari bahwa definisi ilmiahnya tidak sederhana dan pencantumannya dalam buku seperti TBBBI mungkin akan membingungkan pembacanya saja. Saya duga bahwa setiap pembaca (yang bukan linguist) mempunyai pengertian tentang makna yang kurang lebih sebagai berikut: kemungkinan bentuk bahasa untuk menimbulkan pikiran tertentu pada pendengar/pembaca jika bentuk

itu diucapkan atau ditulis. Secara tersirat pengertian makna itulah yang diterapkan dalam bab-bab. mengenai semantik verba, walaupun penjelasan tentang makna berbagai kategori bentuk dapat diperinci lebih lanjut. Akan tetapi, dalam subbab mengenai "Nomina dari Segi Perilaku Semantisnya" (Alwi dkk. 1998:214--217) digunakan pengertian makna yang berbeda, sehingga pembaca bisa disesatkan. Di situ makna dan kategori gramatikal disamakan dengan acuannya seperti dalam kalimat berikut:

(1) *Kuda hijau saya merokok selusin jeruk.*

(2) *Gadis itu akan mengawini Achmad minggu depan.*

Kedua kalimat ini dinyatakan tidak berterima karena acuan dari kalimat (1) tidak ada dalam dunia yang nyata, sedangkan "dalam tata budaya Indonesia ... nomina [sic] seperti *gadis* dapat melakukan banyak perbuatan, tetapi ada pula perbuatan yang umumnya tidak dilakukan oleh seorang wanita" (Alwi dkk.:215).

Pengamatan saja bahwa "(a) tidak ada kuda yang berwarna hijau, (b) kalau pun ada, kuda tidak melakukan perbuatan merokok, dan (c) kalau pun ada kuda yang merokok, bukan jeruk yang dirokok" (*op.cit.*:214) sudah membuktikan bahwa kalimat (1) itu mempunyai makna: ditimbulkan pikiran pada pembacanya tentang peristiwa yang lazim ditemukan dalam, film komik atau mimpi. Kalimat (2) pun mempunyai makna karena menimbulkan pikiran mengenai kebudayaan matriarkal atau Madonna.

Justru dengan mengajukan contoh kalimat dan konstruksi yang acuannya bersifat khayalan dapat dijelaskan keluwesan dan daya semantis bahasa. Dengan menyatakan bahwa kalimat dan konstruksi yang *acuannya* aneh-aneh, menurut pengalaman kita sehari-hari, adalah tidak berterima, pemakai bahasa akan dibungkam, kreativitasnya, angan-angannya, dan mimpinya seakan-akan dilarang. Dengan demikian, cita-cita reformasi pun menjadi tidak gramatikal.

Dalam bagian TBBBI yang tidak menyamakan makna dengan acuannya pembicaraan makna tidak selalu mendalam dan komprehensif. Terlalu sering terdapat pengamatan tentang adanya bentuk yang berbeda tanpa penjelasan yang rinci mengenai perbedaan semantisnya. Mengenai awalan *ber-* pada adjektiva seperti *gembira*, *hati-hati*, atau *terus terang* dikatakan bahwa itu "sebenarnya bersifat manasuka ... tetapi kadang-kadang muncul sedikit perbedaan dalam hal makna dan pemakaiannya" (*op.cit.*:138), tetapi apa perbedaan itu tidak dijelaskan; tentang pasangan *hati-hati* dan *berhati-hati*, *terus terang* dan *berterus terang* dan *bahagia* dan *berbahagia* kemudian dikatakan "tidak menunjukkan perbedaan makna"

(Alwi dkk.:140).² Frasa seperti "verba-verba berikut yang harus dimengerti maknanya secara sendiri-sendiri" (Alwi dkk.:127) yang muncul di sana sini tidak pernah disertai oleh keterangan tentang makna itu. Afiks seringkali disebut "tidak wajib" atau "manasuka" sehingga ditimbulkan kesan bahwa kehadirannya tidak penting karena tidak membedakan arti juga, padahal itu menyangkut kasus seperti *berdasar* dan *berdasarkan*, *memperistri* dan *memperistrian*.

Saya sadari bahwa kritik saya ini cukup gampang dan merumuskan apa sebenarnya perbedaan makna yang ada "meskipun kadang-kadang perbedaan makna ini sangat halus" (Alwi dkk.:123) sering merupakan tantangan. Tetapi kalau tidak diusahakan secara konsisten dan setuntastuntasnya, citra bahasa Indonesia tidak dapat ditingkatkan. Dalam pada itu, upaya untuk memerikan dan menyadarkan segi semantis bahasa Indonesia demi pengembangannya menghadapi dua kendala: teori linguistik, dan sikon pemakaian bahasa Indonesia dalam Orde Saru.

Teori bahasa yang "modern", "mutakhir", "dari Amerika", pendeknya teori generatif dalam berbagai versinya menitikberatkan bentuk dan sintaksis tanpa menghiraukan maknanya, dengan alasan bahwa makna itu termasuk "modul" yang lain. Namun, teori itu bertujuan untuk memvisualisasi hipotesis bahwa (sintaksis) semua bahasa di dunia merupakan pengembangan tata bahasa universal. Untuk mengajarkan dan memasyarakatkan suatu bahasa yang konkret perangkat hipotesis mengenai tata bahasa universal seperti itu sangat kurang memadai.

Dalam zaman Presiden Soeharto, bahasa Indonesia menjadi alat "komunikasi" Orde Baru atau lebih tepat alat "nonkomunikasi". Batas antara diskusi dan subversi menjadi tipis, kenyataan diselimuti dengan eufemisme, kelobotisme melimpah, dan pidato lebih berfungsi untuk mengungkapkan dan mengesahkan hierarki daripada untuk menyapaikan informasi.

Faktor Pendukung Usaha Peningkatan Mutu Perkembangan Bahasa Indonesia

Membahas masalah ini sebagai orang luar juga agak sukar bagi saya. Pusat Bahasa dengan balai penelitiannya sebagai lembaga penyuluhan yang utama sudah berubah dengan cukup drastis, dan belum dapat diukur atau diramalkan sejauh mana ada dampak dalam usaha peningkatan mutu perkembangan bahasa Indonesia.

Faktor positif yang penting adalah kesadaran pada para pengamat

² Menurut hemat saya, sura orang bias gembira, pertanyaannya hati-hati, kata-katanya terus terang, sedangkan orangnya bergembira, berhati-hati dalam bertanya, dan berterus terang dalam protesnya.

dan pencinta bahasa Indonesia akan adanya "bahasa yang baik dan benar", dengan menekankan bahwa situasi yang lebih santai tidak mengharuskan ragam bahasa Indonesia yang baku dan resmi, keseganan terhadap bahasa Indonesia dapat dikurangi. Namun, faktor yang paling penting menurut hemat saya adalah kebebasan pers dan pendapat setelah reformasi. Bahasa Indonesia tidak digunakan lagi untuk menutupi kenyataan melainkan untuk menyebutnya. Seolah-olah maknanya dikembalikan kepadanya.

Akhir kata, saya tekankan sekali pentingnya mencurahkan perhatian kepada bahasa daerah juga, biarpun bahasa itu kecil dan jauh dari pusat. Ada harapan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan kemungkinan baru dalam hal itu. Yang jelas, pendapat (yang tidak diungkapkan, tetapi yang bukan tidak ada) bahwa dwibahasawan sama dengan orang cacat, dan bahwa orang yang beradab harus ekabahasa seperti kebanyakan orang Eropa atau Amerika Serikat, harus dibasmi. Sebaliknya yang benar bahwa dwibahasawan atau multibahasawan mendekati manusia yang ideal, orang ekabahasalah yang sebenarnya sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan et.al. 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Alwi, Hasan, Dendy Sugono, Abdul Rozak Zaidan. 2000. "Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pembangunan Bangsa". *Risalah Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Bradley, David dan Maya Bradley (penyusun). 2001. *Language Endangerment and Language Maintenance*. London: Routledge Curzon
- Loven, Klarijn. "Si Doel and Beyond". Discourse on Indonesian television in the 1990s" Universitas Leiden.
- Mühlhausler, Peter. 1996. *Linguistic Ecology. Language change and linguistic imperialism in the Pacific region*. London-New York: Routledge
- 2000 "Why one Cannot Preserve Languages (but Can Preserve Language Ecologies)". Bradley & Bradley (2001): 3439
- Pabottingi, Mochtar. 1996 "Bahasa, Politik, dan Otosentrisitas". Dalam Yudi Latif & Idi Subandy Ibrahim (ed), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan Pustaka: 213-20
- Purwanto, Agus R. Sutopo. 1996. "Sulih Suara Dewasa Ini di Indonesia". Dalam: Ruddyanto, C. (ed.), *Seminar Sehari Meningkatkan Mutu Sulih Suara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: hal. 33-44
- Steinhauer, Hein. 1994. "The Indonesian language situation and linguistics: Prospects and Possibilities", *Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde* 150:755-84

KUALITAS LARAS BAHASA HUKUM BERIKUT KESALAHKAPRAHANNYA

Hj. Yayah B. Mugnisjah Lumintaintang
Pusat Bahasa

Pendahuluan

Bahasa hukum tergolong ke dalam salah satu jenis laras bahasa yang memiliki prestise atau gengsi sosial tinggi karena komunitas sosial pengguna laras bahasa ini memang sebuah komunitas sosial berstatus/bergengsi tinggi. Mereka adalah perancang dan sekaligus perumus peraturan perundang-undangan (*legislative drafter*) dan pembentuk undang-undang atau pengundang-undang (*legislator/wetgever*). Komunitas sosial ini menyebut laras bahasa yang dipakai mereka sebagai *bahasa hukum, yang dianggap berbeda dari bahasa Indonesia resmi*.

Sejalan dengan era reformasi dan demokrasi setakat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) konon telah memenuhi fungsinya; produk peraturan perundang-undangan yang diterbitkannya cukup tinggi. Pusat Bahasa, selaku pembina bahasa Indonesia, melalui penyuluhnya, berada di tengah-tengah komunitas tersebut, menjadi pendamping ahli dari segi bahasa. Acuan utama komunitas sosial tersebut adalah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, yang merupakan produk revisi dari Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1960, tentang pokok yang sama.

Sayangnya, putusan presiden yang demikian besar wibawanya itu masih mengandung aneka kesalahan kebahasaan, mulai dari bagian *penamaan, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran*-nya sehingga seluruh produk hukum setakat ini, secara sadar dan taat asas, menyajikan berbagai kesalahan gramatikal dan penulisan (Lumintaintang, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, dan 2001). Sebagai salah seorang pembina bahasa, saya pun menjadi salah seorang pendamping bahasa Indonesia untuk produk hukum itu, di DPR RI. Keadaannya betul-betul *salah kaprah*: jawaban atas pertanyaan, tanggapan atas permintaan, atau masukan atas inisiatif sendiri dari pendamping bahasa, kadang-kadang didengar kadang-kadang tidak berkenan; terkesan sangat alot, nyaris tidak berdaya. Sebagai peneliti, telitian saya menunjukkan bahwa sistem bahasa Indonesia tulis baku dalam ranah ini belum secara taat asas diterapkan; laras bahasa hukum Indonesia perlu ditingkatkan kadar kebakuan/keformalannya, yang sekaligus dapat meningkatkan kadar keterpahaman pembacanya.

Keadaan seperti dikemukakan di atas sudah selayaknya diperbaiki. Itulah sebabnya, pada kesempatan yang luar biasa ini (Kongres Bahasa Indonesia VIII),

saya mengangkat/menyoroti masalah bahasa hukum sebagai topik pembicaraan dalam makalah ini, dengan perhatian pada penyamaan konsep/pengertian bahasa hukum Indonesia, berikut tolok ukurnya, bagaimana kondisinya setakat ini, dan bagaimana pula strategi peningkatan kadar keformalan, yang sekaligus dapat meningkatkan kadar keterpahamannya.

Tolok Ukur Laras Bahasa Hukum berikut *Kesalahkaperahannya*

Pengertian *bahasa hukum* dalam makalah ini merujuk hasil Simposium Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1974 (dalam Saleh, 1992) yang memberikan pandangan tentang arti dan kedudukan bahasa hukum Indonesia, yakni sebagai berikut: (1) bahasa hukum Indonesia adalah *bahasa Indonesia* yang digunakan dalam kehidupan hukum Indonesia, yang karena fungsinya, bahasa hukum memiliki karakteristik tersendiri; (2) kekhasan bahasa hukum terletak pada kekhususan istilahnya, komposisi, dan gayanya, seperti tampak pada perundang-undangan, keputusan hakim, akta notaris, atau dalam konvensi internasional; (3) bahasa hukum itu milik seluruh masyarakat dan bukan semata-mata milik para ahli hukum.

Selain acuan di atas, makalah ini juga merujuk ciri-ciri bahasa hukum Indonesia menurut Moeliono (1974) yang tidak membedakannya dari ciri bahasa pada topik yang lain, seperti halnya dengan jenis topik ilmiah lainnya:

- (1) lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan;
- (2) objektif dan menekan prasangka pribadi;
- (3) memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran;
- (4) tidak beremosi dan menjauhkan taksiran yang bersensasi;
- (5) cenderung membekukan makna kata, ungkapan, dan paparannya berdasarkan konvensi;
- (6) gaya bahasa keilmuan tidak dogmatis atau fanatik;
- (7) gaya bahasa keilmuan bercorak hemat, hanya kata yang dipakai;
- (8) bentuk, makna, dan fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil dari yang dimiliki kata biasa. (Bandingkan juga Tamimi, 1993 serta Lambcock V. Nahattands, 1999)

Dengan pertimbangan pengertian serta tolok ukur di atas, tata bahasa yang diacu adalah tata bahasa baku: pengalineaan, pengalimatan, pembentukan dan pemilihan katanya, termasuk kosakata serta peristilahannya. Demikian pula, penulisannya mengindahkan kaidah penulisan yang resmi, yaitu menggunakan sistem penulisan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Keempat buku petunjuk ini tampaknya juga dipakai sebagai acuan kebahasaan dalam penyusunan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, IIIA/170. Dengan melihat konteks acuan/rujukan

dikemukakan di atas, seyogianya tidak terjadi *kesalahkaprahan* dari segi kebahasaan di dalam praktik penyusunan produk hukum itu jika sikap terhadap bahasa hukum Indonesia sama-sama terjaga.

Memang di dalam kenyataannya, keadaan tersebut tidaklah selalu mulus. Telitian Lumintaintang melalui teknik analisis galat membuktikan masih tingginya kekerapan pemakaian struktur kalimat yang tidak gramatikal, termasuk pemanfaatan unsur leksikal yang belum memenuhi kaidah berbahasa dengan baik dan benar. Dalam bagian berikut diperlihatkan data faktual tentang penyimpangan-penyimpangan ketatabahasaan tersebut, termasuk bentuk serta pilihan katanya.

Kualitas Bahasa Hukum Indonesia Setakat Ini

Seperti telah dikemukakan, sebagai sebuah laras bahasa, bahasa hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik laras bahasa yang lain. seperti laras bahasa jurnalistik dan keilmuan. Telitian Lumintaintang (1993, 1994, dan 1995) telah mendeskripsikan bentuk dan pilihan kata serta pengalimatan, berikut permasalahannya, khususnya dalam bahasa perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengandung norma hukum yang bersifat umum dan abstrak serta yang berfungsi menetapkan (harus melakukan perbuatan/perintah), larangan (harus tidak melakukan perbuatan), pembebasan (boleh tidak melakukan perbuatan /petunjuk), dan pengizinan (boleh melakukan perbuatan) masing-masing tampak di dalam karakteristik bentuk dan pilihan kata serta pengalimatan bahasa hukum ini. Namun, di samping deskripsi tentang karakteristiknya, dia juga memperlihatkan banyaknya penyimpangan norma ketatabahasaan, seperti dalam pengalimatan, bentuk dan pilihan kata serta penulisannya. Berikut adalah analisisnya.

a. Kasus Ejaan: Huruf Kapital dan Tanda Baca (Tanda Titik Dua, Tanda Koma, Titik Koma, dan Tanda Petik)

Kasus penyimpangan norma ketatabahasaan, antara lain, ditandai oleh sikap ketidaktaatan di dalam penerapan kaidah ejaan. Yang paling tidak taat asas adalah pemakaian huruf kapital. Bahkan, penerapan kaidah yang satu ini terkesan emosional; sesuatu yang penting, sesuatu yang mahal, sesuatu yang keramat, dan sesuatu yang menasional cenderung dinyatakan dengan huruf kapital. Ketidaktaatan yang lainnya tampak pada pemakaian tanda basa, seperti pemakaian tanda baca koma, titik koma, dan titik dua serta pemakaian tanda petik. Berikut adalah contohnya.

- (1) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
 - a. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

- b. *Jasa Hukum* adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
 - c. *Klien* adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
- (Ayat 1--3), Pasal 1, Bab I, tentang Ketentuan Umum, UURI, No.18, 2003, tentang Advokat)

Dalam contoh di atas tampak kesalahan penulisan kata *Undang-Undang* (dengan huruf kapital) sebanyak dua kali. Selain itu, huruf awal kata yang terdapat dalam rincian, yaitu *Advokat ...*, *Jasa Hukum ...*, dan *Klien* Ketiga kata tersebut tidak perlu ditulis dengan huruf kapital karena merupakan bagian-bagian rincian kalimat yang berfungsi sebagai bagian subjek kalimat. Pemakaian tanda baca titik dua dalam kalimat itu juga tidak benar karena kalimat di atas belum lengkap. Oleh karena itu, penulisan ejaan dalam kalimat di atas harus disunting; suntingannya dapat sebagai berikut.

2a. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

- a. *advokat* adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
 - b. *jasa hukum* adalah jasa yang diberikan advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;
 - c. *klien* adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat;
- (Ayat 1--3), Pasal 1, Bab I, tentang Ketentuan Umum, UURI, No. 18, 2003, tentang Advokat)

Sebagai bagian komposisi bahasa hukum Indonesia, gaya pengalimatan seperti pada contoh kalimat di atas sangatlah tinggi. Oleh karena itu, sejalan dengan adanya itu, sangat tinggi pula penyimpangan kaidah penulisan.

Contoh berikutnya masih tentang huruf kapital. Yang sangat menonjol juga adalah pemakaian huruf kapital yang menunjukkan bahwa yang dijamin itu merupakan sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, dan sebagainya. Kasus seperti ini pasti ada pada setiap produk hukum di Indonesia karena ini menyangkut tetapan-tetapan yang dirancang pada setiap undang-undang yang disusun oleh dua lembaga tinggi negara, yakni DPR RI dan Presiden. Berikut adalah cuplikan datanya

(2) **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2002
TENTANG
PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

- a. bahwa ...;
- b. bahwa ...;
- c. bahwa ...;
- d. bahwa ...;
- e. bahwa...;
- f. bahwa ...;
- g. bahwa ...;
- h. bahwa ...;

Mengingat :

...

**Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK
(UURI No. 31, 2002, tentang Partai Politik)

Dari data di atas tampak bahwa huruf kapital itu dinyatakan secara emosional. Menurut kaidah, jika kita ingin menonjolkan kata atau kalimat, kata atau kalimat itu dinyatakan dengan huruf miring (*Italic*), bukan dengan huruf kapital. Jadi, huruf kapital penuh dalam konteks kalimat tersebut (jika itu memang tepat dianggap penting/menonjol) sebenarnya harus dinyatakan dengan huruf miring. Pada hemat saya, yang paling tepat mendapat huruf miring itu hanyalah bunyi tetapan UURI tersebut, yaitu ***Undang-Undang tentang Partai Politik***. Frasa DPRRI dan Presiden Republik Indonesia tidak perlu dikapitalpenuhkan. Begitu pula, frasa Memutuskan Tidak perlu harus dikapitalkan. Selain itu, frasa BERKAT TUHAN YANG MAHA ESA, yang berfungsi sebagai keterangan kalimat, yang disajikan di bawah frasa nama undang-undang, juga tidak harus dikapitalkan; huruf pertama saja yang dikapitalkan itu. Tanda koma setelah frasa Presiden Republik Indonesia hendaknya dipindahkan ke bagian akhir frasa Berkat Tuhan Yang Maha Esa karena menurut kaidah, tanda koma harus disajikan pada akhir ungkapan pengantar kalimat; sementara di antara subjek dan predikat langsung tidak dipisahkan oleh tanda koma. Dengan demikian, suntingannyadapat sebagai berikut.

(2a) **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR 31 TAHUN 2002
TENTANG
PARTAI POLITIK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa ...;
- b. bahwa ...;
- c. bahwa ...;
- d. bahwa ...;
- e. bahwa...
- f. bahwa ...;
- g. bahwa ...;
- h. bahwa ...;

Mengingat :

...

Dengan Persetujuan Bersama antara
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneaia
dan
Presiden Republik Indonesia
Memutuskan

Menetapkan

Undang-Undang tentang Partai Politik.
(UURI No. 31, 2002, tentang Partai Politik)

Kasus selanjutnya berkaitan dengan huruf kapital yang dipakai untuk bukan nama diri.

Contoh:

- (3) Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - ...
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;.
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah

...
Dalam contoh kalimat di atas huruf kapital dipakai untuk menuliskan jenis kata benda yang tidak merupakan nama diri. Sebaliknya, frasa nama diri *angka 1* tidak mendapat huruf kapital. Dengan kata lain, pemakaian huruf kapital itu cenderung terbalik-balik. Selain itu, terdapat pemakaian tanda koma di antara subjek dan predikat kalimat dalam contoh itu. Oleh karena itu, penulisan seperti itu harus segera disunting; suntingannya dapat sebagai berikut.

- (3a) Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 meliputi
- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - ...
 - c. penerimaan negara;
 - d. pengeluaran negara;
 - e. penerimaan daerah;
 - f. pengeluaran daerah;.
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah

Masih tentang tanda baca; ini kasus pemakaian tanda petik. Dalam laras bahasa hukum Indonesia pemakaian tanda petik seperti pada contoh kalimat kasus berikut cukup banyak dan taat asas. Namun sayang, ketaatasannya itu tidak didukung oleh fungsinya yang legal dalam kalimat. Seperti diketahui, terdapat lima butir kaidah yang mengatur fungsi tanda petik. Namun, tidak satu butir pun kaidah yang menyatakan bahwa tanda petik berfungsi sebagai pengapit kata yang dipentingkan, seperti tampak pemakaiannya pada kalimat berikut.

- (4) Yang dimaksud dengan “Organisasi Advokat” dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini.
(Penjelasan atas UURI Nomor 18 tentang Advokat, II Pasal Demi Pasal, Huruf f)

Tanda petik pada frasa “Organisasi Advokat” (dalam contoh ini ada dua) berikut huruf kapitalnya (termasuk pemakaian huruf kapital pada nama jenis) yang mengganggu pemantapan penerapan kaidah harus disunting. Berikut adalah salah satu suntingannya.

- (4a) Yang dimaksud dengan *organisasi advokat* dalam ayat ini adalah organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (4) undang-undang ini

Contoh pemakaian tanda petik yang lain adalah berikut.

- (5) Yang dimaksud dengan “penegak hukum” adalah Pengadilan Tinggi untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Advokat. (KUN/7/03)

Penyuntingan atas kalimat di atas bukan hanya terhadap pemakaian tanda petik melainkan juga terhadap huruf kapital yang tidak menyatakan nama diri. Suntingannya adalah seperti berikut.

- (5a) Yang dimaksud dengan *penegak hukum* adalah pengadilan tinggi untuk semua lingkungan peradilan, kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan advokat.

b. Bentuk dan Pilihan Kata

Sistem pembentukan kata bahasa Indonesia menyatakan bahwa kombinasi awalan *ke-* dan akhiran *-an* (**ke-+...-an**) serta awalan *pe-* dan akhiran *-an* (**pe-+...-an**), seperti pada bentuk *kesimpulan* dan *ketetapan* serta *penyimpulan* dan *penetapan*, menunjukkan makna ‘hal/proses menyimpulkan, menetapkan’; hasilnya adalah *simpulan* dan *tetapan*. Secara analogis, bentuk kata sekelas itu banyak kita pakai sesuai dengan tuntutan komunikasi, termasuk dalam pemakaian bahasa hukum Indonesia, yaitu kata *keputusan* pada contoh kalimat berikut.

- (6) Pengambilan *keputusan* oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan *selamat-lambatnya* satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
(UURI No, 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 20 Ayat (5))

...

Makna bentuk kata *keputusan* seperti pada konteks kalimat hukum di atas adalah 'proses memutuskan'; hasilnya adalah putusan (bukan keputusan). Namun, seperti halnya pada konteks kasis kalimat yang lain, bentuk kata *putusan* cenderung belum memasyarakat daripada bentuk *keputusan*. Bahkan, bentuk kata *ketetapan* yang dipakai dalam konteks *tetapan* (maksudnya *hasilnya*, bukan *prosesnya*) sama sekali bergeming dalam ranah bahasa yang amat bergengsi ini. Semua produk hukum kita, di antaranya, disebut surat ketetapan dan surat keputusan, bukan surat tetapan dan surat putusan. Hal lain sehubungan dengan kalimat di atas adalah pemakaian kata *selambat-lambatnya*. Acuan bahasa hukum Indonesia (***Keputusan*** Presiden RI No.44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden) menyatakan bentuk kata *selambat-lambatnya* seharusnya menjadi *paling lambat*. Jadi, kalimat di atas seyogianya disunting; suntingannya dapat sebagai berikut.

- (5a) Pengambilan *putusan* oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan *paling lambat* satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Kasus lain yang tampak pada pemilihan bentuk kata bahasa hukum Indonesia adalah penggunaan bentuk/kata dasar yang sama baik pada subjek maupun predikat kalimat sehingga kalimat tersebut menjadi kurang apik. Berikut adalah contohnya..

- (6) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam dan kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

...

(UURI No. 17, Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; Bab II, Pasal 6, Ayat (2), tentang Kekuasaan atas Pengeelolaan Keuangan Negara)

Penggunaan kata yang sama seperti pada kalimat di atas seyogianya dihindarkan; salah satunya disunting dengan kata yang jika disandingkan betul-betul tidak menyalahi kelaziman.; misalnya, kata *kekuasaan* biasanya bersandingan dengan *diserahkan kepada* atau *diberikan kepada*; berikut adalah suntingannya.

- (6a) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
 - a. *diserahkan/diberikan* kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. *diserahkan/diberikan* kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam dan kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

...

Kaidah kebahasaan lain yang belum secara taat asas diterapkan adalah penggunaan istilah asing; masih terdapat penyimpangan dari putusan acuan. Menurut putusan Butir 183 Kepres RI No. 44 Tahun 1999, penggunaan kata atau frasa asing hendaknya didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)). Namun, data menunjukkan sebaliknya; padanannya tidak ada; yang tampak hanya istilah asingnya saja. Berikut adalah contohnya.

- (7) Dalam mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
(Penjelasan atas UURI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, I. Umum, 1 Dasar Pemikiran Butir 4)

Sesuai dengan kaidah, seharusnya kata atau frasa asing dalam contoh kalimat di atas dicarikan padanannya terlebih dahulu, kemudian istilah asingnya disajikan dengan huruf miring, seperti tampak pada suntingan berikut.

- (7a) Dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik/ bersih (*good governance*) pada penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar.

Berikut ini merupakan contoh sejenis dengan kasus kalimat di atas, yaitu penyajian istilah asing tanpa padanannya (sekalipun ada) dalam bahasa Indonesia.

- (8) Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(Penjelasan atas UURI No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara,I Umum, 1.Dasar Pemikiran Angka 5)

Kaidah lain yang berkaitan dengan pilihan kata menuntut agar dalam merumuskan ketentuan perundang-undangan hendaknya digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Rumusan berikut adalah rumusan yang senantiasa tampil dalam bahasa hukum Indonesia mulai UUD 45 sampai dengan produk hukum tahun 2003 ini; saya yakin untuk tahun-tahun yang akan datang pun rumusan itu akan muncul. Rumusan berikut cenderung berstruktur bahasa lisan karena yang tampil dalam tulisan hanya sebuah frasa saja yang dapat berfungsi sebagai predikat kalimat. Rumusan ini selalu dipakai pada produk hukum berupa penjelasan atas butir-butir (pasal/ayat) yang disajikan dalam undang-undang. Sebagai bahasa yang tingkat keformalannya tinggi, seyogianya frasa berikut disempurnakan menjadi kalimat tulis baku.

- (9) *Cukup jelas* (Penjelasan atas UURI No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara)
(10) *Telah jelas* (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX, Pasal 26 , Ayat 2)

Selain menuntut struktur yang memenuhi syarat gramatikal, pemakaian kata *cukup jelas* terkesan belum jelas. Mengapa kata *cukup* itu tidak tidak boleh

disunting?. Bukankah kata *cukup* itu secara statistik belum seratus persen. Demikian juga halnya dengan frasa *telah jelas* (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX, Pasal 26, Ayat 2) yang menjadi rumusan terdahulu/pertama dipakai. Menurut hemat saya, rumusan keduanya (yang hanya berupa frasa itu) hendaknya dilengkapi hingga menjadi kalimat tulis baku bahasa hukum. Seyogianya pula ungkapan acuan, “Ini dari *sononya*.” (yang senantiasa berkumandang di parlemen bangsa kita) tidak lagi terdengar. Mengapa seakan tabu meningkatkan kualitas ketatabahasaan untuk kedua rumusan tersebut. Seyogianya kedua rumusan itu sekurang-kurangnya seperti berikut.

<i>Rumusan ini jelas.</i>	atau	<i>Rumusan ini telah jelas.</i>
<i>Rumusan pasal ini jelas.</i>	atau	<i>Rumusan pasal ini telah jelas.</i>
<i>Rumusan ayat ini jelas.</i>	atau	<i>Rumusan ayat ini telah jelas.</i>

Bahasa Indonesia ragam baku memiliki sistem pembentukan kata yang sudah relatif mantap. Namun, di dalam praktiknya, pemakai bahasa/penutur, termasuk dalam bahasa hukum Indonesia, ada yang tidak memberlakukan sistem itu secara taat asas sehingga kalimat menjadi bertele-tele atau berpanjang-panjang. Salah satunya adalah pemanfaatan awalan **pe-** sebagai nomina pelaku; awalan ini belum sepenuhnya secara taat asas dipraktikkan di dalam pemakaian. Contoh yang sangat tinggi kekerapan pemakaiannya kini adalah kalimat *Banyak orang jahat*, yang secara baik dan benar menjadi *Banyak penjahat*; *Banyak orang datang* disebut *Banyak pendatang*. Akan tetapi, langka penutur yang mengatakan *Banyak orang baik* menjadi *Banyak pembaik*; *Banyak orang pergi* menjadi *Banyak pemergi*. Data juga memperlihatkan bahwa secara analogis pemakaian bentuk-bentuk kata seperti itu cukup banyak. Berikut adalah contoh kalimatnya.

- (11) **Pelaku usaha** di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan **pelaku usaha** dan kepentingan umum.
(UURI No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan **Praktek** Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab II, Pasal 2)

Bukankah dalam bahasa Indonesia resmi *pelaku usaha* itu adalah *pengusaha*, analog dari kata *penjahat*, *pembaik*, *pendatang*, dan *pemergi*? Demi mantapnya sistem tata bahasa baku bahasa Indonesia, demi efektifnya kalimat, seyogianya kalimat tersebut disunting. Siapa lagi yang harus memberlakukan atau memberdayakan sistem bahasa Indonesia kita ini jika bukan kita sebagai warga bangsa Indonesia. Untuk itu, salah satu suntingannya adalah berikut..

- (12a) **Pengusaha** di Indonesia, dalam menjalankan kegiatan usahanya, berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan **pengusaha** dan kepentingan umum.

Demikian pula halnya untuk kalimat-kalimat yang tertera pada UURI No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan **Praktek** Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab II, Pasal 4, dan seterusnya; seperti yang tampak berikut, hendaknya diperbaiki/disunting.

- (13) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain kasus pembentukan awalan **pe-** pada contoh di atas, tampak dua kali pemakaian konjungtor **dan atau**, tanpa pencantuman *tanda garis miring* (yang bermakna **atau**) di tengahnya serta pemakaian kata *praktek* Tanpa tanda garis miring di antara kedua konjungtor itu, kalimat tersebut tidak bermakna. Kata *praktek tidak baku*; yang baku adalah *praktik* karena kita punya *praktikum*. Jadi, sistemnya harus diberlakukan (diberdayakan); tanda garis miring pun harus dipakai sehingga suntingan atas kalimat di atas adalah sebagai berikut.

- (13a) Pengusaha dilarang membuat perjanjian dengan pengusaha yang lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan atas produksi, dan/atau pemasaran barang, dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Masih tentang awalan *pe-*; secara analogis pembentukan kata dari contoh kalimat kasus di atas tampaknya secara kreatif diberdayakan oleh para jurnalis/wartawan elektronik kita ketika mereka memberitakan topik hukum atau kriminalitas. Mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi (karena tingginya frekuensi pemberitaan tentang peristiwa pengeboman) kasus yang terjadi pada awalan *pe-* ragam bahasa hukum itu kita dengar pula dari media elektronik. Berikut adalah contoh kalimatnya.

- (14) Asmar Latin Sani yang diduga sebagai **pelaku peledakan bom** di Hotel Marriot, Jakarta, ternyata pernah memiliki serbuk bahan peledak sebanyak 50 kg. (SCTV, Liputan 6 Siang /09/08/03)

- (15) Hartatik Rizal, sang ibu, mengharapkan aparat kepolisian dapat segera menangkap **para pelaku penculikan** anaknya(SCTV, Show Pagi/03/08/03)

Baik dalam bahasa hukum Indonesia maupun bahasa jurnalistik, ketika memberitakan topik hukum melalui/media elektronik, tampak pemakaian awalan *pe-* yang kurang efektif. Media elektronik yang sangat berhitung tentang durasi tentunya sangatlah tidak ekonomis jika tidak memilih bentuk yang lebih singkat, tetapi tidak bersistem:

<i>pelaku peledakan bom</i>	---> <i>peledak bom</i> atau <i>pengebom</i>
<i>pelaku penculikan</i>	---> <i>penculik</i>

Dengan memperhatikan sistem, kalimat-kalimat di atas dapat disunting sebagai berikut.

- (14a) Asmar Latin Sani, yang diduga sebagai **peledak bom/ pengebom** di Hotel Marriot, Jakarta, ternyata pernah memiliki serbuk bahan peledak sebanyak 50 kg.
- (15a) Hartatik Rizal, sang ibu, mengharapkan agar aparat kepolisian dapat segera menangkap **para penculik** anaknya

....

c. Kasus Pengalimatan

1) Tidak Bersubjek

Contoh berikut merupakan contoh kalimat yang paling tepat jika ditautkan dengan acuan yang *salah kaprah*. Sampai dengan saat ini, para pendamping bahasa di parlemen nyaris tidak berdaya menghadapi dan meyakinkan para pemegang kekuasaan bahasa dalam ranah tersebut bahwa struktur kalimat pada rumusan perintah di bagian penutup perundang-undangan itu tidak memenuhi syarat gramatikal. Berikut adalah kalimatnya.

...

- (16) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembar Negara Republik Indonesia.

Struktur kalimat di atas belum memenuhi kaidah bahasa perundang-undangan yang mengacu kaidah ragam bahasa tulis baku. Jika dilihat dari jumlah klausanya, kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat yang berpola klausa anak kalimat diikuti klausa induk kalimat. Ketidagramatikalannya struktur kalimat itu tampak pada tidak hadirnya unsur yang berfungsi sebagai

subjek kalimat pada klausa induk; klausa anak kalimatnya mengandung subjek, yaitu *setiap orang*.

Agar setiap orang mengetahuinya. (Anak Kalimat)

... memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembar Negara Republik Indonesia. (Induk Kalimat)

Menurut sistem kalimat ragam baku, klausa induk wajib mengandung subjek kalimat, sedangkan klausa anak boleh tidak mengandung subjek; itu pun jika unsur yang mengisi fungsi subjek pada induk dan anak kalimat sama; contohnya,

1. Saya sehat.
 2. Saya berlari laun (*jogging*).
- Agar (saya) sehat, saya berlari laun.

Namun, jika tidak sama, subjek pada induk dan anak kalimat itu harus dinyatakan secara eksplisit; misalnya,

1. Saya tidak bekerja.
 2. Anak saya sakit.
- Saya tidak bekerja jika anak saya sakit.

Pada struktur kalimat di atas, subjeknya tidak sama; subjek anak kalimat *semua orang*; subjek induk kalimat tidak ada, bukan *semua orang* (tidak mungkin penerapannya *semua orang memerintahkan pengundangan undang-undang ini* Yang memerintahkan dalam konteks kalimat itu adalah yang menandatangani undang-undang tersebut, yakni Presiden Republik Indonesia. Jadi, struktur kalimat itu harus disunting agar tidak rancu dan agar tercapai kadar kebakuaannya, termasuk penyuntingan atas pemakaian huruf kapitalnya yang tidak sejalan dengan kaidah EYD. Suntingannya dapat sebagai berikut:

- (16a) Agar setiap orang mengetahuinya, Presiden Republik Indonesia memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembar Negara Republik Indonesia.

Selain dengan penyuntingan di atas, struktur kalimat itu juga gramatikal jika predikat pada klausa induk kalimat berupa verba pasif *di-*. Namun, itu akan menyebabkan kalimat tidak mengandung bentuk verba yang selari (tidak memenuhi syarat paralelisme: *mengetahuinya* dan *diperintahkan*); berikut adalah suntingannya:

- (16b) Agar setiap orang **mengetahuinya, diperintahkan** pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembar Negara Republik Indonesia.

Namun, jika kita buka bagian penutup semua produk hukum kita setakat ini, sejalan dengan putusan parlemen (DPR RI dan Presiden RI), struktur kalimat kasus/yang tidak gramatikal itu tetap terpampang. Alasannya adalah bahwa kalimat itu "dari *sono-nya*" sudah begitu; maksudnya dari awal disusunnya undang-undang di negara kita ini.

2) Tidak Berpredikat

Telah dikemukakan bahwa kadar keformalan bahasa hukum Indonesia tinggi; struktur kalimatnya seyogianya dimarkahi oleh sekurang-kurangnya kehadiran satu subjek dan satu predikat. Namun, data berikut tidak sejalan dengan kaidah tersebut karena predikatnya tidak hadir secara eksplisit. Yang hadir dalam konstruksi contoh berikut hanyalah subjek sertas frasa preposisi yang berfungsi sebagai keterangan kalimat.

- (17) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 29.227.632.304 ,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah), dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Menurut kaidah ragam tulis baku, pemakaian frasa preposisi sebagai predikat kalimat hendaknya tidak dianjungkan. Struktur kalimat di atas seyogianya mengandung unsur yang berfungsi sebagai predikat kalimat yang bukan frasa preposisi secara eksplisit; misalnya, dengan mencantumkan kata *adalah*, seperti pada kalimat perbaikan berikut ini.

- (17a) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) **adalah** sebesar **Rp29.227.632.304,00** (dua puluh sembilan *miliar* dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah), dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Suntingan atas kalimat di atas juga mencakupi penulisan bilangan dalam rupiah dan kata *miliar* yang tidak sejalan dengan kaidah.

3) Penggalan Kalimat

Data juga memperlihatkan adanya pemakaian penggalan kalimat; dalam

konstruksi kalimat, ia tampak sebagai sebua klausa kalimat majemuk setara/koordinatif. Berikut adalah contohnya.

- (18) Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota selaku pengguna anggaran/ pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (*outcome*). **Sedangkan Pimpinan unit** organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN
(Penjelasan atas UURI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; I Umum.1 Dasar Pemikiran Angka 6)

Kata *sedangkan* merupakan konjungtor intrakalimat dalam kalimat majemuk setara/koordinatif yang menghubungkan makna 'mempertentangkan' klausa pertama dan klausa kedua. Sesuai dengan fungsinya, yaitu konjungtor intrakalimat, kata tersebut menghubungkan kata dengan kata dari kedua klausa tersebut. Itu berarti bahwa kata *sedangkan* tidak mungkin mendapat huruf **awal s kapital**. Dengan kata lain, kata *sedangkan* bukan merupakan konjungtor intrakalimat. Oleh karena itu, kalimat di atas harus disunting; suntingannya adalah sebagai berikut.

- (18a) Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/b upati/walikota, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/peraturan daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (*outcome*), **sedangkan** pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN

Kalimat tersebut tampak sangat panjang; ini dapat dikatakan merupakan salah satu karakteristik laras bahasa hukum Indonesia. Namun, struktur kalimat di atas dapat dijadikan dua bah kalimat, seperti berikut.

- (18b) Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota, selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan

kan dalam undang-undang tentang APBN/peraturan daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (*outcome*). **Akan tetapi**, pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN

4) Keselarian/Paralelisme

Sepintas telah disampaikan kasus tentang keselarian/paralelisme. Produk hukum, seperti perundang-undangan atau bahasa notaris, seyogianya menyajikan struktur kalimat yang terjaga dari keselarian bentuk tata bahasanya sehingga kadar keterpahaman produk ini betul-betul tercapai. Jika satu gagasan dinyatakan dengan kata benda, gagasan lain yang sejajar seyogianya pula dinyatakan dengan kata benda. Demikian juga, jika satu gagasan dinyatakan dengan kata kerja (misalnya kata kerja aktif), gagasan yang lainnya dinyatakan dengan kata kerja aktif pula. Berikut adalah contoh kasus kalimat yang tidak selari.

- (19) Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, *terbinanya watak dan jati diri* bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran. Indonesia.
(UURI No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran , Bab II, Pasal 3)

Struktur kalimat diatas belum memperlihatkan keselarian secara maksimum karena gagasan yang diungkapkan dalam kalimat yang mengandung rincian ini tidak dinyatakan secara selari: *memperkuat ...*, ***terbinanya*** ..., *mencerdaskan ...*, *memajukan ...*, *membangun ...*, dan *menumbuhkan ...*. Jika keselarian itu ingin kita capai dengan ver aktif, berikut adalah salah satu suntingannya.

- (19a) Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkuat integrasi nasional, *membina watak dan jati diri* bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran. Indonesia.

Contoh sejenis itu frekuensinya tinggi dalam bahasa hukum Indonesia; semua isi atau substansi perundangan-undangan sejenis itu akan menggunakan struktur kalimat yang tidak selari (berikut penggunaan huruf kapitalnya) dan parlemen berkeberatan jika ahli bahasa menyuntingnya. Berikut adalah salah satunya contohnya pula.

- (20) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. **warga negara** Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. **lulus ujian** yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. **magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun** terus menerus pada kantor Advokat;
 - h. **tidak pernah dipidana** karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidanas penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. (KUN/48-49/03)

Dalam struktur kalimat tersebut, keselarian tidak terjaga karena terdapat pemakaian kata kerja aktif dan pasif pada bagian rinciannya. Ini juga harus disunting agar kalimat tersebut menjadi apik. Berikut adalah salah satu sutingannya.

- (20a) Menjadi advokat harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. berwarga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. berijazah sarjana atau pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ayat (1);
 - g. memiliki sertifikat kelulusan ujian dari organisasi advokat;
 - h. pernah magang paling sedikit dua tahun terus-menerus di kantor advokat;

- i. tidak pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- j. berperilaku baik, jujur, tanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. (KUN/48-49/03)

Pemakaian struktur kalimat yang tidak selari mudah kita temukan dalam bahasa hukum Indonesia; berikut ini adalah contohnya yang lain.

- (21) Anggota KPI berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. **dipidana** penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
 (UURI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran/Bab III, Pasal 10, Ayat 4)

Struktur kalimat tersebut dapat diselarikan sebagai berikut

- (21a) Anggota KPI berhenti karena:
 - f. masa jabatan berakhir;
 - g. meninggal dunia;
 - h. mengundurkan diri;
 - i. **menjalani pidana** penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - j. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

5) Pelesapan Subordinator yang

Data penelitian juga menunjukkan adanya gejala pelesapan subordinator. *yang*. Gejala ini dapat menurunkan kadar keformalan bahasa hukum Indonesia karena struktur kalimat menjadi kurang baku. Berikut adalah contohnya.

- (22) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. (UURI No. 32 tahun 2002, tentang Penyiaran, Bab V Pasal 16, Ayat (1))

Kehadiran subordinator *yang* sebelum frasa *berbentuk badan hukum* (dengan tidak membubuhkan tanda koma) juga dapat meningkatkan kadar kejelasan makna kalimat. Dengan demikian, struktur kalimat bukan saja mengalami peningkatan kadar kebakuan melainkan juga kadar kejelasan maknanya. Berikut adalah salah satu suntingannya:

- (20a) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) Huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial **yang** berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Di samping data kasus bahasa hukum Indonesia gaya perundang-undangan, berikut juga saya sajikan contoh kasus bahasa hukum Indonesia dalam komposisi akta notaris. Dalam register/laras bahasa ini saya selaku pembaca betul-betul merasa harus sangat sabar memahami organisasi per-nalaran penyusunnya. Dengan kata lain, saya dituntut untuk meningkatkan kadar keterbacaan bahasa akta notaris. Berikut adalah contohnya.

- (21)
- Pada hari ini, Jum'at tanggal empatbelas Maret tahun duaribu tiga (14-3-2003) ; -----
--
 - Berhadapan dengan saya, Haji RIZUL SUDARMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
 1. Tuan Doktorandus MUHAMMAD SOLIHAT, lahir di Cikampek, pada tanggal sembilanbelas Nopember seribu sembilan-ratus enampuluh (19-11-1960) , Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Lengkong, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 007, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Penduduk Nomor : 09.5404.191160.0298 ; -----
 2. Tuan Doktorandus DADDY ROHANADY, lahir di Kuningan pada tanggal tigapuluh satu Agustus seribu sembilanratus enampuluh dua (31-8-1962), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Tanah 80, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Pemegang Katu Penduduk Nomor : 09.5407.310862.0112 ; -----

3. Tuan Doktorandus AFENDI, Master of Business -----
Administration, lahir di Bandung pada tanggal satu
Januari seribu sembilanratus enampuluh enam (1-1-
1966), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Kelompok Pertanian, Rukun
Tetangga 009 Rukun Warga 010, Kelurahan Pasar
Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.
010166.7037; -----

- Para penghadap sudah dikenal oleh saya, Notaris; -----
Para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut
di atas menerangkan bahwa tanpa mengurangi izin dari
yang berwenang dengan ini mendirikan suatu perseroan
terbatas yang anggaran dasarnya adalah sebagai berikut: --

(Akta Peseroan Terbatas/No. 51/PT Gdsl/14/3/003)

Data memperlihatkan bahwa alinea pembuka akta notaris selalu disajikan dalam struktur kalimat inversi. Demikian juga contoh data di atas. Namun, struktur kalimat selanjutnyacenderung didominasi oleh pola SPOK Dengan tidak harus mengubah karakteristik/ciri-ciri laras bahasanya, baik ciri leksikal maupun ciri sintaksisnya, contoh bagian wacana bahasa akta notaris di atas dapat ditingkatkan derajat kebakuannya sehingga terangkat juga kadar keterpahamannya.

Data juga menunjukkan bahwa penulisan akta notaris sangat mengabaikan kaidah EYD. Penerapan kaidah EYD, khususnya tanda baca dan huruf kapital, cenderung tidak sesuai dengan kaidah. Penyimpangan penerapan kaidah EYD itu justru dianggap sebagai unsur pembeda kebahasaan dari laras bahasa tulis yang lainnya. Peningkatan derajat kebakuan bahasa akta notaris itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut; (1) menyunting struktur sintaksisnya (tanpa mengubah gayanya), baik dengan menggabungkan unsur-unsur sintaksis yang tampak beserakan (terpenggal-penggal) karena pemanfaatan tanda baca dan huruf kapital yang tidak sesuai dengan kaidah maupun dengan melengkapi ketidakhadiran fungsi-fungsi gramatikalnya, seperti subjek atau predikat kalimatnya; (2) menyunting penulisannya dengan acuan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia (PUII)*.

Untuk langkah yang pertama, struktur kalimat yang berpola inversi itu (Keterangan-Predikat-Subjek/KPS) pada alinea pembukanya, yaitu ***Pada hari ini, Jumat, ..., berhadapan dengan saya, ..., Doktorandus Muhammad Solihat, ...; Doktorandus Daddy Rohanady, ...; Doktorandus Afendi, M.B.A.,*** diselarikan dengan struktur kalimat selanjutnya, yang berpola biasa,

SPO(K). Sehubungan dengan hal ini, data Lumintaintang (2002) menunjukkan bahwa kecenderungan tertinggi gaya bahasa notaris adalah gaya kalimat kompleks, kemudian kalimat berimbang, dengan dominasi pada predikat dari verba pasif **di-** dan **ter-**, kemudian verba **me-** dan **ber-**. Hal ini tampak pada contoh yang saya sajikan. Dari strukturnya juga memperlihatkan adanya pengaruh bahasa daerah (interferensi gramatikal) seperti halnya tampak pada contoh di atas (**Para penghadap sudah dikenal oleh saya, Notaris; -----**). Struktur kalimat ini harus disunting menjadi kalimat baku. (**Para penghadap sudah saya kenal** atau **yang sudah saya kenal ...**)

Langkah kedua melakukan penyuntingan dari segi penulisannya. Yang sangat mencolok adalah penggunaan tanda pisah/tanda hubung yang memisahkan unsur-unsur kalimat sehingga terpenggal-penggal dan struktur kalimat menjadi tidak gramatikal. Apa pun pertimbangan/alasan para penyusun akta notaris itu, struktur kalimat bahasa hukum seyogianya mencerminkan ragam bahasa baku (*frozen variety*) karena kadar keformalannya sangat tinggi, seyogianya pula terhindar dari pemakaian unsur yang tidak baku. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tidak mengubah karakteristiknya, seyogianya tanda hubung/tanda pisah, termasuk tanda-tanda baca lain, berikut huruf kapitalnya, disesuaikan dengan kaidah EYD. Pilihan kata *suatu* juga disunting dengan kata *sebuah* karena yang dibicarakan jelas/tentu. Berikut adalah dua strategi penyuntingan atas bagian wacana laras bahasa notaris disajikan di atas.

(21a)

Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas Maret, tahun dua ribu tiga, saya, *Haji Rizul Sudarmadi*, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sudah saya kenal, dan yang akan saya sebutkan pada bagian akhir akta ini, berhadapan dengan

1. Doktorandus *Muhammad Solihat*, lahir di Cikampek pada tanggal sembilan belas November, tahun seribu sembilan ratus enam puluh, warga negara Indonesia, karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta: Tanjung Lengkong, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Penduduk Nomor 095404.1911600298;
2. Doktorandus *Daddy Rohanady*, lahir di Kuningan pada tanggal tiga puluh satu Agustus, tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua, warga negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta: Kampung Tanah 80, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Klender,

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Penduduk Nomor 095407310862.0112;

3. Doktorandus *Afendi*, Master of Business Administration, lahir di Bandung pada tanggal satu Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam, warga negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kelompok Pertanian, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.53040101667037.

Para penghadap yang bertindak dalam kedudukan di atas menerangkan bahwa tanpa mengurangi izin dari yang berwenang, dengan ini mereka mendirikan sebuah perseroan terbatas, yang anggaran dasarnya adalah sebagai berikut:

Strategi suntingan yang lain adalah seperti berikut.

(21b)

Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas Maret, tahun dua ribu tiga, saya, Haji Rizul Sudarmadi, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta, berhadapan dengan nama-nama berikut dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sudah saya kenal, yang akan saya sebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Doktorandus *Muhammad Solihat*, lahir di Cikampek, pada tanggal sembilan belas November tahun seribu sembilan ratus enam puluh, warga negara Indonesia, karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta, Tanjung Lengkong, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Penduduk Nomor 09.5404.191160.0298;
2. Doktorandus *Daddy Rohanady*, lahir di Kuningan pada tanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua, warga negara Indonesia, karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta, Kampung Tanah 80, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Penduduk Nomor 09.5407.310862.0112;
3. Doktorandus *Afendi*, Master of Business Administration, lahir di Bandung pada tanggal satu Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam, warga negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kelompok Pertanian, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.53040101667037.

Para penghadap bertindak dalam kedudukan di atas dan menerangkan bahwa tanpa mengurangi izin dari yang berwenang, dengan ini mereka mendirikan sebuah perseroan terbatas yang anggaran dasarnya adalah sebagai berikut: ...

Langkah selanjutnya untuk peningkatan kualitas bahasa akta notaris serta kadar keterpahaman/keterbacaannya dapat dipertimbangkan langkah-langkah yang saya tempuh di atas.

Strategi Peningkatan Mutu Bahasa Hukum Indonesia (Peran Praktisi hukum)

Strategi apakah yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan laras bahasa hukum Indonesia? Menurut hemat saya, beberapa acuan berikut, yaitu (1) *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, (2) *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, (3) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dan (4) *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* produk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (kini Pusat Bahasa) hendaknya menjadi bagian yang dijadikan acuan para penyusun produk hukum atau para penyusun garis haluan bidang hukum sehingga tidak ada lagi acuan “ini dari *sononya*” yang menentukan putusan-putusan yang berhubungan dengan konteks bahasa hukum Indonesia. Selain itu, menurut hemat saya, sudah saatnya salah satu wadah perencanaan penyusunan peristilahan, yakni Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia (MABBIM), melanjutkan rencana kerja para pakar dan pemegang garis haluan bidang hukum terdahulu yang sudah merintis upaya dan menyusun strategi peningkatan kualitas bahasa hukum Indonesia.

Strategi lain yang lebih tegas adalah segera diwujudkannya pertemuan atau lokakarya (apa pun istilahnya) yang dihadiri oleh tiga unit/komponen besar pemegang kekuasaan bahasa hukum, yaitu Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman dan ..., Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan didampingi oleh Pusat Bahasa, untuk menyatukan tekad/sikap dalam mewujudkan lebih mengupayakan peningkatan kualitas bahasa hukum Indonesia.

Penutup

Telitian terhadap laras bahasa hukum Indonesia melalui percontoh produk hukum Indonesia: perundang-undangan, surat edaran, peraturan pemerintah berikut penjelasannya, dan keputusan pemerintah, termasuk bahasa notariat (Lumintaintang, 1993, 1994, 1995, dan 1999), serta produk hukum yang diterbitkan dari 2000—2003, menunjukkan bahwa kadar kebakuan bahasa resmi dalam bidang hukum Indonesia masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Masalah utama, pada hemat saya, berkaitan dengan masalah

bilingualisme, khususnya tentang bilingualitas, karena bahasa Indonesia memang merupakan bahasa kedua bagi umumnya orang Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa untuk ragam bahasa baku masih banyak penutur/pemakai bahasa Indonesia yang tidak menyadari sejauh mana kadar ke-bilingualitasannya, termasuk penutur pada ranah bahasa hukum Indonesia. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas terhadap bahasa resmi tidak harus dirasakan sebagai beban, tetapi harus disikapi sebagai tuntutan.

Di dalam upaya peningkatan itu, diperlukan aneka strategi, di antaranya dapat dilakukan melalui pelatihan khusus bagi para penulis produk hukum, penyediaan sarana kebahasaan yang dapat menjadi pendamping/pembantu secara langsung, seperti memiliki kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum, tata bahasa Indonesia baku, berikut acuan lain yang berkaitan dengan penulisan dan mekanisme pemanfaatan unsur/istilah bahasa asing. Strategi yang paling utama adalah bagaimana kita mau dan mampu mengatasi sikap suka akan atau melanggengkan *kesalah-kaprahan* pada *kaprahnya*, tetapi menegakkan sistem pemakaian bahasa yang baik dan benar, tidak terkecuali bagi laras bahasa hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan *at al.* 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Attamimi, A. Hamid S. 1988. "Bahasa Indonesia dalam Perundang-Undangan" Dalam S.R.H. Sitanggang *et al.* Editor. *Kongres BhasaIndonesia VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Praturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan :Presiden. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Pajak, Pabean dan Cukai, dan Perbendaharaan.
- Lumintaintang, Yayah. B.1994. "Laras Bahasa Hukum dan Permasalahannya". Dalam *Bahasa dan Sastra*. 3. IV.
- _____.1995. "Laras Bahasa Hukum: Bentuk dan Pilihan Kata". Laporan Penelitian Rutin Mandiri. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- _____.1996. "Laras Bahasa Hukum: Pengalimatan". Laporan Penelitian Rutin Mandiri. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- _____.2000. Kualitas Laras Bahasa Hukum Produk 1993—1999. Laporan

Penelitian Rutin Mandiri. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

_____. 2001. "Pemakaian Bentuk Sangkal dalam Wacana Peradilan di DKI Jakarta". Laporan Penelitian Rutin Mandiri : Jakarta: Pusat Bahasa

Moeliono, Anton M. 1974. "Ciri-Ciri Bahasa Keilmuan". Kertas Kerja dalam Simposium Bahasadan Hukum di Medan.

Said, Saleh. 1992. "Bahasa Hukum sebagai Objek dan Subjek Pembangunan Nasional". Dalam Murad *et al.* Editor. *Kongres Bahasa Indonesia IV*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Saleh, Ismail. 1983. "Bahasa Indonesia sebagai Sarana untuk Menciptakan Tertib Hukum dalam Masyarakat". Dalam S.R.H. Sitanggang *et al.* Editor *Kongres Bahasa Indonesia V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

LAPORAN SIDANG

- Hari, tanggal, pukul : Jumat, 17 Oktober 2003
- Judul : 1. Perkembangan Bahasa Indonesia dari Aspek Linguistik
2. Kualitas Laras Bahasa Hukum Berikut Kesalahkaprahannya
- Penyaji : 1. Hein Steinhauer
2. Yayah B. Lumintaintang
- Pemandu : Mirna Laksman
- Pencatat : 1. Dhanu Proyo Prabowo
2. Murmahyati

TANYA JAWAB

1. **Penanya:** Samsu Rizal (Balai Bahasa Banda Aceh)
 - (1) Untuk Hein steinhaur
Apa alasan bahasa Indonesia tidak berkembang?
 - (2) Untuk Yayah B. Lumintaintang
Apakah Pusat Bahasa sudah bersinerji dengan lembaga pemerintah yang lain untuk merumuskan bahasa yang baik dan benar dalam bahasa hukum?

Jawaban

- (1) Hein Steinhaur
Tidak ada perkembangan bahasa Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun (sejak KBI VII), khususnya dalam bidang tata bahasa. Akan tetapi, dalam hal kosakata terdapat perkembangan (pengayaan).

- (2) Yayah B. Lumintaintang
Ada sinergi antara Pusat Bahasa dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya untuk membahas masalah hukum.

2. **Penanya:** Bruce F. Jarvis (3 Olney Street, Awaba NSW 2283 Australia)
Apakah Pusat Bahasa melakukan pemeriksaan terhadap produk undang-undang sebelum disahkan?

Jawaban:

Pusat Bahasa melakukan pendamping di parlemen dalam membahas produk hukum. Hal itu dilakukan agar produk hukum yang dikeluarkan oleh parlemen dapat menjadi contoh bagi aktivitas kebahasaan di masyarakat, misalnya di media massa.

3. **Penanya:** Yudi (BEM Universitas Gadjah Mada)

- (1) Apakah bahasa Indonesia dapat bebas nilai atau dapat independen dalam mengontrol bahasa hukum?
- (2) Bagaimana pandangan Bu Yayah terhadap perundang-undangan yang sangat interpretatif?

Jawaban:

- (1) Agar bahasa hukum bebas nilai, bahasa hukum harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
- (2) Memang, ada kalimat-kalimat yang ambigu di dalam kontrak dan dokumen negara. Perundang-undangan memang interpretatif karena penggunaan kalimat-kalimat yang ambigu.

4. **Penanya:** Suharti (SLTP Negeri 45, Bandung)

Bagaimana memberdayakan Pusat Bahasa dalam bidang hukum?

Jawaban: Yayah B. Lumintaintang

Masalah hukum bukan wewenang Pusat Bahasa.

PERKUKUH BUDAYA BANGSA DENGAN MEMANTAPKAN PERAN BAHASA DAERAH

I Wayan Bawa

Fakultas Sastra, Universitas Udayana

Latar Belakang

Setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia, berusaha setiap saat agar budaya bangsanya selalu kukuh, terpelihara, dan lestari. Budaya bangsa Indonesia, yang terlihat dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah budinya bangsa Indonesia. Dalam hal ini, termasuk bahasa-bahasa daerah di Indonesia adalah unsur kebudayaan Indonesia, yang dikatakan dalam penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 akan tetap dihormati dan dipelihara oleh negara.

Dalam penjelasan Pasal 32 dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, itu dapat diketahui hal-hal sebagai berikut (lebih lanjut lihat UUO 1945 Pasal 32 Perubahan Keempat).

- 1) Budaya bangsa (kebudayaan Indonesia) adalah buah budinya seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Bahasa-bahasa daerah yang terdapat diseluruh Indonesia termasuk budaya bangsa
- 3) Unsur budaya bangsa itu tetap dihormati dan dipelihara oleh negara.

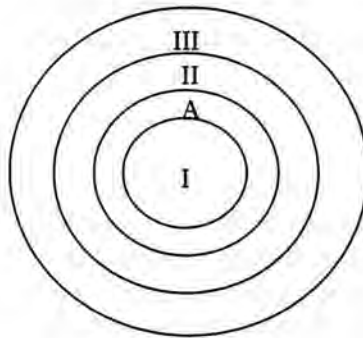
Jika disepakati teori de Saussure (1993: 12), bahasa yang disebutnya *langue* adalah khazanah tanda, yaitu objek linguistik yang konkret dan integratif. Objek linguistik itu memiliki dua wujud yang disebut *signifiant* (penanda) dan *signifie* (petanda) atau citra akustik dan konsep. Dengan demikian, bahasa itu sebagai citra akustik dan konsep, merupakan unsur budaya dan juga bisa mewahana budaya (kebudayaan) itu.

Dalam makalah ini akan dibahas bahwa dengan memantapkan peran bahasa daerah akan dapat memperkuat budaya bangsa. Selanjutnya, patut dibahas usaha memantapkan peran bahasa daerah itu serta hal-hal yang mendukung dan menghambatnya.

Hubungan Bahasa dan Kebudayaan

Jika dilihat hubungan bahasa dan kebudayaan yang digambarkan oleh Masinambow (1980), bahasa itu mempunyai peran yang sangat penting.

Perhatikan Gambar 1 di bawah ini (lihat juga Bawa dalam Tjok Rai Sudartha, dkk., 1993:164).



- I = Unsur kebudayaan lingkaran I (hasil dan/atau proses pengalaman individu).
- A = Bahasa
- II = Unsur kebudayaan lingkaran II (hasil dan/atau proses pengalaman masyarakat).
- III= Unsur kebudayaan lingkaran III (hasil dan/atau proses pengalaman dengan alam).

Dengan melihat gambar di atas, bahasa itu, selain salah satu unsur kebudayaan, juga mewahandai semua budaya vokal, sebagai hasil dan/atau proses interaksi manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, atau dengan alam. Demikian pula halnya peran bahasa daerah dalam kaitan budaya daerah sebagai salah satu unsur budaya bangsa.

Bahasa Daerah dan Budaya Bangsa

Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat yang terdiri atas dua ayat sebagai berikut.

Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

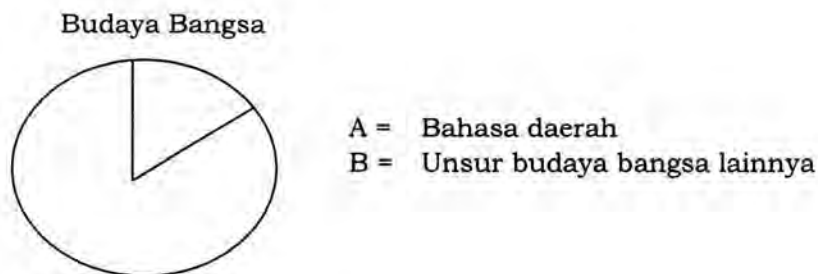
Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dalam dua ayat, Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat di atas terlihat bagaimana kedudukan bahasa daerah, siapa yang wajib memeliharanya, dan mengapa bahasa daerah patut dipelihara. Dalam dua ayat tersebut terlihat dengan jelas hubungan bahasa daerah dengan budaya bangsa (budaya nasional) secara hukum.

Bahasa daerah sebagai bagian dari budaya daerah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahasa daerah adalah bagian dari kebudayaan nasional (budaya bangsa) karena merupakan kekayaan budaya nasional. Bahasa daerah itu wajib dipelihara oleh negara karena negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia (ayat 1). Pemeliharaannya diserahkan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, Pasal 11 (2001: 16--17): bahwa yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota "meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja".

Dalam Ayat (2), Pasal 32, Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat (2002: 20) tersebut dengan jelas disebutkan bahwa bahasa daerah itu adalah kekayaan budaya bangsa. Oleh karena itu, kekayaan budaya bangsa itu patut dipelihara, artinya patut dibina dan dikembangkan.

Gambar 2



Perkukuh Budaya Bangsa dengan Pemantapan Peran Bahasa Daerah

Bahasa daerah seperti tergambar dalam butir 3 (lihat Gambar 2) di atas merupakan salah satu unsur budaya bangsa dengan zat bahasa daerah tersebut salah satu unsur budaya (dalam hal ini bahasa daerah unsur budaya bangsa), maka bahasa itu memiliki bentuk, makna, dan fungsi atau peran (de Saussure, 1933:12). Memantapkan bentuk, makna yang terkandung oleh bahasa itu, dan memantapkan perannya merupakan usaha memperkuat budaya bangsa. Dalam kesempatan ini penulis hanya membahas masalah memperkuat budaya bangsa melalui usaha memantapkan peran bahasa daerah. Dengan demikian, patut mendapat pembahasan mengapa dengan memantapkan peran bahasa daerah dapat memperkuat budaya bangsa dan bagaimana cara untuk memantapkan peran bahasa daerah itu.

a. Hubungan Peran Bahasa Daerah dengan Memperkukuh Budaya Bangsa

Dalam *Rumusan Seminar Politik Bahasa* (Alwi dan Dendi Sugono, Editor, 2000: 220) disebutkan tentang kedudukan dan fungsi (peran) bahasa daerah: bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa daerah karena dalam kegiatannya bahasa daerah itu digunakan sebagai sarana perhubungan dan pendukung kebudayaan di daerah atau di dalam masyarakat etnik terutama di Indonesia.

Adapun fungsi bahasa daerah yang dirumuskan dalam Seminar tersebut: (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, serta (5) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Bahasa daerah juga berfungsi mendukung fungsi bahasa Indonesia. Fungsi itu (1) mendukung bahasa Indonesia, (2) bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan/atau pelajaran lain, dan (3) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia.

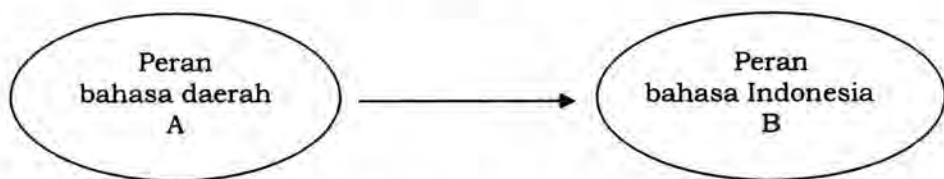
Mengingat bahasa daerah adalah kekayaan budaya bangsa (UUD 1945 Perubahan Keempat, Pasal 32, ayat (2)), memantapkan bahasa daerah, termasuk memantapkan fungsinya merupakan kegiatan memantapkan budaya bangsa. Memantapkan fungsi bahasa daerah berarti memantapkan atau memperkuat, (1) kebanggaan daerah sebagai bagian dari Indonesia, (2) lambang identitas Indonesia sebagai bangsa yang memiliki aneka budaya yang dirumuskan dalam semboyan *bhinneka tunggal ika* 'berbeda-beda (tetapi) itu satu', (3) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, dan (4) sarana pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia yang juga artinya memperkuat budaya bangsa karena, baik sastra daerah, maupun sastra Indonesia juga merupakan unsur budaya bangsa.

Dalam seminar di atas juga disebutkan bahwa peran bahasa daerah adalah mendukung fungsi bahasa Indonesia dalam hal memperkaya bahasa Indonesia dan menyebarkan bahasa Indonesia, khususnya digunakan sebagai bahasa pengantar dalam mengajarkan bahasa Indonesia dan/atau pelajaran lain pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu.

Bahasa Indonesia, selain sebagai wahana budaya lokal bangsa Indonesia, juga merupakan salah satu unsur budaya bangsa. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional memiliki fungsi (1) lambang nasional kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah. Dengan demikian, memantapkan fungsi (peran) bahasa daerah dalam kaitan peran bahasa Indonesia berarti memperkuat lambang kebanggaan dan identitas

nasional (bangsa), memperkuat alat pemersatu bangsa, dan memperkuat alat perhubungan antarbudaya daerah sebagai bagian dari budaya bangsa.

Untuk lebih jelasnya, hubungan peran bahasa daerah dengan peran bahasa Indonesia yang sama-sama merupakan unsur budaya bangsa dapat digambarkan sebagai berikut.



A = Bahasa bahasa daerah.

B = Bahasa Indonesia.

→ = Peran bahasa daerah mendukung peran bahasa Indonesia.

Jadi, memantapkan peran bahasa daerah berarti memantapkan peran bahasa Indonesia yang juga berarti mengukuhkan budaya bangsa (bahasa Indonesia adalah salah satu unsur budaya bangsa).

Cara Memantapkan Bahasa Daerah

Peran (fungsi) bahasa akan mantap jika mutu pemakaian dan mutu bahasa itu dimantapkan. Demikianlah halnya memantapkan peran bahasa daerah berarti perlu ada usaha untuk memantapkan mutu pemakaian dan mutu bahasa daerah itu.

Memantapkan mutu pemakaian dan mutu bahasa berarti melakukan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa. Pembinaan bahasa yang berarti usaha meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa (lihat Hasan Alwi dan Dendy Sugono, Editor, 2000: 223). Usaha pembinaan itu, antara lain, dapat dilakukan melalui pengajaran dan pemasyarakatan. Demikianlah pula halnya cara untuk memantapkan peran bahasa daerah yaitu melalui pemantapan mutu pemakaian bahasa daerah yang antara lain dapat dilakukan melalui pengajaran dan pemasyarakatan.

Peningkatan mutu pengajaran bahasa daerah agar mutu pemakaiannya meningkat, selain melalui pengembangan kurikulum, juga disertai dengan pengembangan bahan ajar, memanfaatkan metode yang tepat, pengembangan tenaga pengajar, dan mengembangkan sarana pendidikan bahasa.

Pengembangan bahasa ajar bahasa daerah sering bertumpu pada bahan ajar yang bersifat linguistik saja, tanpa mengingat fakta budaya yang berada di balik bahasa itu. Dalam hal ini, Bloomfield (1933:499) telah mengingatkan kita dengan kata-katanya sebagai berikut.

Whoever is accustomed to distinguish between linguistic and non-linguistic behavior, will agree with the criticism that one schools deal too much with the former, drilling the child in speech response phases of arithmetic, geography, or history, and neglecting to train him in behavior toward his actual environment.

Bahan ajar bahasa daerah patut mengangkat budaya yang ada di lingkungan anak didik. Dengan cara itu, di samping pengajaran bahasa kering dan kurang menarik, juga menyebabkan anak didik tersebut akan tercabut dari budaya lingkungannya. Dengan demikian, bahasa daerah tersebut akan mampu mewahandai keseluruhan budaya yang ada di lingkungan anak didik sehingga mutu pemakaian bahasa daerah itu meningkat.

Pengembangan kurikulum bahasa daerah diarahkan agar anak didik tidak hanya tahu tentang bahasa daerah itu, tetapi terutama agar anak didik tersebut terampil menggunakannya dalam berbagai peran, baik dalam kaitan formal maupun tidak formal. Pengembangan serta pemanfaatan metode pengajaran bahwa yang tepat akan sangat membantu dalam langkah pembinaan bahasa daerah, lebih-lebih dilaksanakan oleh tenaga pengajar yang berkualitas serta dibantu oleh sarana pendidikan yang lengkap.

Selain melalui pengajaran, pembinaan bahasa daerah juga dapat dilakukan melalui pemasyarakatan bahasa itu. Melalui pernasyarakatan bahasa dimaksudkan agar setiap penutur bahasa ini memiliki sikap positif terhadap bahasanya serta menciptakan situasi yang kondusif. Kegiatan pemasyarakatan bahasa daerah dapat dilakukan antara lain melalui penerbitan, penyelenggaraan lomba kegiatan berbahasa daerah (antara lain lomba baca puisi, lagu berbahasa daerah, dan lomba berpidato dalam bahasa daerah), dan mendorong agar semua kegiatan vokal yang sepatutnya diperankan oleh bahasa daerah menggunakan bahasa daerah.

Suatu bahasa, termasuk bahasa daerah akan mampu melaksanakan peranannya dengan baik jika mutu bahasa itu baik. Mutu bahasa itu akan meningkat jika dilakukan, antara lain, kegiatan penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan (lihat juga Alwi dan Dendy Sugono, Editor, 2000: 226).

Penelitian bahasa daerah ditujukan terhadap bahasa daerah itu, yaitu mengenai penutur dan penuturannya. Penelitian terhadap bahasa daerah itu dimaksudkan untuk mengetahui struktur bahasa itu, fungsi, dan nilai yang terdapat di dalamnya. Penutur bahasa itu patut diteliti untuk mengetahui sikapnya dan mengapa penutur bahasa itu memiliki sikap seperti itu (positif atau negatif). Penelitian terhadap penuturan (pemakaian) bahasa itu patut diteliti agar diketahui medan pemakaian bahasa daerah itu. Apakah semua medan pemakaian bahasa daerah seperti yang dirumuskan dalam *Politik Bahasa Nasional* (Halim, Editor, 1976) dan *Politik Bahasa* (Alwi dan Dendy Sugono, Editor, 2000) sudah diperankan oleh bahasa daerah itu.

Selanjutnya, melalui penelitian dapat juga diketahui sejumlah penyebab mengapa bahasa daerah itu tidak mampu berperan secara optimal dalam medan pemakaiannya.

Peningkatan mutu bahasa daerah melalui pembakuan dengan maksud agar bahasa itu dapat dipakai dalam segala keperluan, khususnya dalam pemakaian bahasa daerah. Pembakuan bahasa daerah itu antara lain ditujukan pada pembakuan ejaan, peristilahan, tata bahasa, dan penyusunan kamus.

Bahasa daerah akan berkembang, selama ditunjang oleh kegiatan penelitian dan pembakuan, juga sangat menentukan adalah kegiatan pemeliharaan bahasa daerah yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat, Pasal 32, ayat (2) bahwa bahasa daerah dipelihara oleh negara. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, Pasal 11, pemeliharaan bahasa daerah tersebut (bahasa daerah salah satu unsur kebudayaan) wewenangnya diserahkan kepada daerah otonomi provinsi (kabupaten/kota).

Adapun bentuk pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain, dengan menyiapkan anggaran penelitian, pembakuan, dan pemasyarakatan bahasa daerah itu, menyiapkan kondisi yang kondusif terhadap pemakaian bahasa daerah, dan memberikan penghargaan terhadap para pejuang bahasa daerah bersangkutan.

Pendukung dan Penghambat Pemantapan Peran Bahasa Daerah

a. Pendukung

Dalam bagian ini dapat disebutkan sejumlah pendukung yang bisa digunakan untuk memantapkan peran bahasa daerah. Pendukung dari segi hukum sudah ada, yaitu Undang-Undang Oasar 1945, termasuk Perubahan Keempat (tahun 2002) pada Pasal 32, ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, khususnya pasal 11, Politik Bahasa Nasional 1976, dan Politik Bahasa 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Politik Bahasa Nasional 1976.

Selain mendapat dukungan dari segi hukum, pemeliharaan bahasa-bahasa di Indonesia didukung juga oleh adanya Pusat Bahasa di Jakarta dan sejumlah balai penelitian bahasa di beberapa daerah di Indonesia. Munculnya sejumlah organisasi prafesi kebahasaan juga bersifat mendukung pembinaan dan pengembangan bahasa, khususnya dalam hal pemasyarakatan bahasa. Sikap sejumlah pemerintah daerah terhadap bahasanya yang sangat positif sangat mendukung pemeliharaan bahasanya. Dalam hal ini dapat disebutkan antara sikap positif Pemerintah Daerah Prapinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali yang tetap mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja

daerah untuk pembinaan dan pengembangan bahasa daerahnya (antara lain penyiapan dana untuk kongres bahasa daerahnya).

b. Penghambat

Majunya transportasi, telekomunikasi, dan forisme menyebabkan pelestarian budaya nasional dan lokal, termasuk budaya daerah dengan bahasa daerahnya sangat sulit dilaksanakan. Lebih-lebih penguasaan budaya lokal termasuk bahasa daerahnya memiliki dampak sosial yang sangat kecil. Keadaan yang demikian itu menyebabkan penutur bahasa daerah itu sedikit yang mau menjadi peneliti, pengajar, mahasiswa/siswa, pembina, pengembang, dan tenaga pemasyarakatan bahasa-bahasa daerah itu. Lebih-lebih di sejumlah daerah, pemerintah daerahnya tidak hirau terhadap dasar hukum pemeliharaan bahasa daerah sebagai bagian budaya bangsa, yaitu ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat dan Pasal 11, Undang-Undang Otonomi Daerah 1999.

Selain beberapa faktor di atas yang menjadi penghambat untuk memantapkan peran bahasa daerah, juga merupakan suatu kenyataan bahwa sejumlah bahasa daerah di Indonesia sudah tidak dipelihara lagi oleh penuturnya.

Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

- 1) Budaya bangsa adalah budaya Indonesia yang dilandasi oleh budaya daerah, termasuk dilandasi dan diwahanai oleh bahasa daerah yang sangat beragam, serta dilengkapi dengan unsur budaya asing yang diperlukan.
- 2) Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah yang berarti, antara lain, memantapkan peran bahasa daerah (bahasa daerah bagian budaya bangsa) berarti melakukan usaha untuk memperkuat budaya bangsa.
- 3) Dasar hukum memperkuat budaya bangsa melalui pemeliharaan bahasa daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat, Pasal 32, ayat (1) dan ayat (2) dan Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, Pasal 11. Melalui realisasi pengadaan lembaga kebahasaan seperti Pusat Bahasa dan beberapa balai bahasa di sejumlah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia verkeinginan untuk memperkuat budaya bangsa.
- 4) Pengaruh budaya internasional yang memanfaatkan kemajuan komunikasi, ditambah dengan sikap penutur dan pemerintah yang tidak positif terhadap bahasa daerahnya, menyebabkan bahasa daerah tidak terpelihara dengan baik. Keadaan yang demikian itu menyebabkan budaya bangsa tidak kukuh.

b. Rekomendasi

- 1) Pemerintah, baik Pusat maupun daerah, hendaknya merealisasikan kehendak rakyat Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat dan Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, khususnya yang menyangkut pemeliharaan bahasa daerah dalam rangka memperkuat budaya bangsa.
- 2) Setiap pelaksana pemerintah, baik di Pusat maupun di daerah, hendaknya tetap positif terhadap pembinaan dan pengembangan budaya bangsa termasuk memiliki sikap positif terhadap bahasa-bahasa daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono (ed.). 2000. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Anonim. 2002. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Surabaya: Bina Pustaka Tama.
- Bawa, I Wayan dkk. 1982. "Membina dan Mengembangkan Bahasa Bali dalam Beberapa Fungsinya". Makalah yang dibawakan dalam Seminar Memperingati Sumpah Pemuda Ke-54, di Singaraja, 28 Oktober.
- Bawa, I Wayan. 1985. "Keadaan dan Perkembangan Bahasa Bali Dewasa Ini". Dalam Soedarsono (Ed.) *Keadaan dan Perkembangan Bahasa, Sastra, Etika, Tatakrma, dan Seni Pertunjukan Jawa, Bali dan Sunda* oleh, him 15--39.
- , 1993. "Melihat Sifat Orang Bali dari Sifat Bahasanya". *Widya Pustaka*, Tahun X, Edisi Khusus (Persembahan Kepada Sang Guru), Januari, hlm. 7--11.
- , 2002. "Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah di Era Otonomi". Dalam *Festchrift Tujuh Puluh Tahun Pale Maurits Simatupang* oleh Ied Veda Sitepu (ed.), hlm 41-47.
- Bloomfield, L. 1933, 1966. *Language*. New York: Holt.
- Dardjowidjojo, Soejono. 2003. *Psikolingustik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Ova Indonesia.

- Halim, Amran (ed). 1976. *Politik Bahasa Nasional*, Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Halim, Amran. 1979. *Pembinaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Masinambow, E.K.M. 1980. "Struktur Bahasa sebagai Cermin Pandangan Hidup". Dalam *Tersurat dan Tersirat*, hlm. 1--19.
- Poedosoedarmo, Soepomo. 2501. *Filsafat Bahasa*. Muhammadiyah University Press.
- Saussure, Ferdinand de. 1993. *Cours de Linguistique Generale*. Cetakan Ke-2. Diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat, *Pengantar Lingustik Umum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Simatupang, Maurits. 2002. *Budaya Indonesia yang Superetnis*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

REAKTUALISASI PERAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTEKS LOKAL DAN GLOBAL

Widada Hs.

Balai Bahasa Semarang

Pendahuluan

Tujuan dari pemilihan judul makalah ini adalah usaha untuk mengangkat kembali peran bahasa Indonesia yang selama ini telah ada. Seiring dengan perubahan zaman tentunya peran bahasa Indonesia yang selama ini perlu ditinjau kembali, perlu dirumuskan, dan didefinisiulangkan kembali. Hal itu mengingat perjalanan bahasa Indonesia sudah banyak dengan pengalaman, yaitu dari masa sebelum kemerdekaan, masa awal kemerdekaan, dan hingga masa reformasi sekarang ini. Apalagi sekarang ini, bahasa Indonesia hidup dalam dua era sekaligus yaitu era globalisasi dan era otonomi daerah (era kelokalan). Dengan demikian, kiranya banyak hal yang perlu didiskusikan atau dikaji ulang mengenai peran bahasa Indonesia.

Heterogenitas di Indonesia juga merupakan kenyataan sejarah, sekaligus tantangan dalam pengelolaan negara ini. Hal itu sejalan dengan makna Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang salah satu butir untuk disepakati, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Hal itu berarti juga telah disepakati bahwa bahasa Indonesia dijadikan suatu alat pemersatu bangsa Indonesia yang mempunyai latar budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda.

Setelah berjalan hampir enam dasawarsa, kiranya perlu dilihat kembali peran bahasa Indonesia selama ini. Dalam hal ini, sering timbul pertanyaan yang perlu direnungkan bersama apakah peran bahasa Indonesia yang fungsinya sebagai alat komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sudah berhasil. Kenyataan yang terdapat pada masyarakat Indonesia hingga awal milenium ketiga ini masih banyak di antara rakyat Indonesia yang masih buta huruf, bahkan buta ilmu pengetahuan. Tentunya kenyataan ini ada kaitan langsung dengan peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan, yang mau tidak mau, harus dipikirkan kembali agar bahasa Indonesia benar-benar menjadi sarana yang efektif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Beban berat yang dipikul oleh bahasa Indonesia dirasakan semakin tambah banyak dan tambah rumit. Hal itu disebabkan oleh masyarakat kita harus menghadapi dua fase atau masa secara bersamaan, yaitu era atau masa kelokalan (era otonomi daerah) dan masa kesejagatan (era keglobalan). Keadaan seperti itu dialami pula oleh keberadaan bahasa Indonesia pada saat ini. Sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh bahasa Indonesia agar

pada masa mendatang kedudukan dan fungsi (istilah yang digunakan penulis = peran) bahasa Indonesia tetap dapat dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan. Memang sudah dirumuskan sejak lama kebijakan bahasa nasional itu, yang meliputi keberadaan bahasa beserta fungsinya di Indonesia. Akan tetapi, waktu telah menuntun perkembangan kebahasaan di Indonesia ke arah lain, yang harus kita ketahui ke mana arah itu bermuara. Dengan demikian, penulis dalam makalah ini akan mencoba merumuskan atau mendefinisikan ulang arah kebijaksanaan bahasa nasional dalam era otonomi daerah dan era global ini.

Peran Bahasa Indonesia dalam Era Otonomi Daerah

Pada awal era reformasi wacana disintegrasi bangsa cukup banyak dijadikan topik pembicaraan oleh masyarakat dan ancaman daerah yang ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang terbukti melakukan ancaman itu adalah di Provinsi NAD dengan gerakan separatisnya yang menyebut dirinya GAM. Ada pendapat yang mengatakan bahwa gerakan separatistis itu muncul disebabkan oleh latar belakang adanya perbedaan etnik, bahasa, agama, dan budaya. Di samping itu, penyebab munculnya gerakan separatistis itu juga disebabkan oleh faktor primordialisme, seperti ketidakadilan di antara kelompok yang ada oleh negara (Widjan, 2003). Hal itulah yang terjadi di Indonesia, untung saja bukan faktor bahasa yang menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, sebelum faktor bahasa dimanfaatkan untuk dijadikan alasan munculnya gerakan separatistis di Indonesia, sebaiknya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pada era otonomi daerah itu perlu diperhatikan lebih saksama.

Kiranya perlu diperhatikan pernyataan Menteri Pendidikan Nasional yang disampaikan pada Konferensi Bahasa Daerah tahun 2000, bahwa kehidupan bahasa daerah yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 selama dipelihara oleh pemakaiannya di dalam kerangka otonomi daerah akan memperoleh peluang yang lebih terbuka untuk dikelola dengan lebih baik asalkan pemerintah daerah yang bersangkutan memiliki perhatian yang besar. Dengan menguatnya identitas kedaerahan, dikhawatirkan bahasa daerah sebagai sumber orientasinya akan menggeser keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya usaha peneguhan komitmen bangsa ini terhadap bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Rasa kebanggaan terhadap bahasa daerah bagi masyarakatnya harus ada batasnya sehingga jangan sampai melunturkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang bahasa daerah telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga diharapkan bahasa daerah lebih mendapat peluang untuk tetap lestari dan dapat dijadikan sumber

pengembangan bahasa nasional. Dalam masa sekarang ini, perilaku masyarakat yang “kebablasan” dalam mengartikan otonomi daerah berakibat pada berbagai penyimpangan terhadap peraturan yang ada. Sebagai bukti konkret, terdapat beberapa instansi pemerintah di sebuah provinsi tertentu, pada setiap hari Jumat harus berpakaian batik dan berkomunikasi dengan bahasa daerah tertentu. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia sehingga seluruh aktivitas yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, tidak tertutup kemungkinan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia dan budaya Indonesia akan menjadi peristiwa yang tragis. Oleh karena itu, segeralah Pemerintah membuat kebijakan atau usaha tertentu agar peristiwa yang dicontohkan itu tidak meluas ke daerah lain.

Dalam menetapkan kebijakan pengembangan dan pembinaan bahasa daerah, pemerintah daerah hendaknya tidak hanya memperhatikan kepentingan bahasa daerah yang dimiliki, tetapi juga harus tetap memikirkan usaha pembinaan bahasa Indonesia di wilayahnya. Hampir selama otonomi daerah diberlakukan banyak pemerintah daerah yang tidak memasukkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu di dalam program rutin tahunan. Hal itu berakibat selama beberapa waktu seperti program pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terputus di tengah jalan, sedangkan program pembinaan dan pengembangan bahasa daerahnya justru mendapat porsi yang relatif banyak. Oleh karena itu, pemerintah daerah pada hakikatnya berusaha memperhatikan kepentingan bahasa daerahnya dengan tetap mengacu kepada terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta pengembangan bahasa Indonesia. Memang sudah seharusnya apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu dilakukan, baik oleh pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Otonomi daerah secara konseptual menciptakan pola hubungan yang khas antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dalam pengembangan bahasa daerah diharapkan dapat mendukung dalam usaha pengembangan bahasa Indonesia. Untuk itu, bahasa daerah perlu ditingkatkan pengembangannya agar pada gilirannya akan dapat dimanfaatkan dalam usaha pengembangan bahasa nasional. Dengan demikian, bahasa daerah memiliki peran yang amat penting dalam mewujudkan pengembangan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Di dalam proses pelaksanaan pengembangan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah perlu memberikan kebebasan ruang gerak kepada lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, dalam upaya pengembangan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Di daerah yang belum memiliki lembaga yang menangani masalah kebahasaan ini hendaknya diberi fasilitas berupa kemudahan, baik yang berkaitan dengan dana maupun fasilitas lain, agar segera terbentuk lembaga

yang menangani masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di daerah tersebut.

Peran Bahasa Indonesia dalam Era Global

Perkembangan bahasa Indonesia pada saat ini memperlihatkan perubahan yang cukup pesat. Berbagai istilah dan kosakata dari disiplin ilmu tertentu mewarnai corak fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari setiap konsep dan gagasan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangannya dapat diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Walaupun demikian, tidak bisa diingkari bahwa pertumbuhan istilah dan kosakata dalam bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berada dalam percaturan internasional. Hal itu tentulah merupakan sesuatu yang wajar dan alamiah dalam setiap bahasa yang hidup akibat adanya kontak antarbahasa dan antarbudaya yang ada.

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat tergantung pada peran dan mutu bahasa sebagai sarannya. Tanpa bahasa dalam perannya sebagai sarana komunikasi, berbagai gagasan atau konsep tentang istilah baru yang muncul di ranah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin dapat merambah dan menyebar luas ke dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bahasa menunjukkan kesejajaran yang saling mendukung. Jadi, perkembangan bahasa Indonesia itu diharapkan selalu sejajar dengan perkembangan iptek. Secara tidak langsung ternyata bahasa Indonesia mampu mengemban tugas sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai sarana untuk mengembangkan produk budaya bangsa (Sunaryo, 1987).

Dalam memasuki era kesejagatan (globalisasi) Indonesia harus berhadapan dengan era teknologi dan informasi yang berdampak pada timbulnya masalah baru. Dalam menghadapi masa depan itu Indonesia turut serta menggantungkan harapan pada perkembangan teknologi dan informasi global yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Pada masa depan itu akan terjadi perubahan sebagai hasil adanya evolusi yang meliputi (1) evolusi pendidikan, (2) evolusi teknologi, (3) evolusi pengetahuan, (4) evolusi demografis, dan (5) evolusi dalam kebangkitan hal-hal yang tidak terduga (Wurianto, 2002:233). Kelima evolusi tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau eksistensi suatu bangsa yang salah satunya pada aspek kebahasaannya.

Arus globalisasi itu melaju dengan cepat ke berbagai negara di dunia. Kecepatan arus itu dibarengi munculnya berbagai konsep dan gagasan baru yang tentu saja berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, yang di dalamnya termasuk perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek erat kaitannya dengan perkembangan bahasa yang berfungsi sebagai sarana pendukungnya. Arus globalisasi yang mengakibatkan perubahan sosial akan berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia (Abdullah, 2000). Istilah dan kosakata yang berkaitan dengan iptek yang berasal dari bahasa asing akan membanjiri dan mengepung kehidupan masyarakat kita. Hal itu dipertegas lagi adanya dampak pelaksanaan pasar bebas yang akan melanda tata kehidupan di seluruh bangsa. Kenyataan seperti tersebut menimbulkan berbagai tantangan dan harapan dalam masyarakat sehingga tidak berlebihan apabila sebagian dari masyarakat kita mempunyai pendapat bahwa dengan menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, segala tantangan di masa depan dapat diatasi. Hal itu mulai ada gejalanya, yaitu di dalam dunia pendidikan, sebagai bukti di kota Semarang. Yayasan pendidikan tertentu menerapkan program yang menggunakan bahasa pengantar bahasa asing (Inggris dan Mandarin) dalam proses pembelajaran siswa pada hari-hari tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkembangan bahasa yang terdapat di Indonesia perlu diarahkan kepada proses yang mendukung pada kondisi yang positif, yaitu menuju pada perkembangan bahasa Indonesia modern. Pemodernan bahasa Indonesia itu wajib dilakukan agar dapat terus tumbuh dan berkembang mengikuti proses perubahan zaman. Salah satu aspek yang dapat dilakukan dalam pemodernan itu adalah berupa usaha pemekaran istilah dan kosakata (Moeliono, 1985) sehingga bahasa Indonesia akan berkembang menjadi bahasa Indonesia modern dengan ciri, yaitu bersikap terbuka dan konsisten dalam menerima pengaruh dari bahasa asing, cermat dan efisien dalam penggunaan kata dan maknanya sesuai dengan konteksnya (Sunaryo, 1998). Hal itu berarti bahwa dalam era globalisasi ini bahasa Indonesia harus mampu menjadi sarana komunikasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa akan datang.

Hakikat bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan bahasa tersebut terjadi adanya kontak bahasa dan budaya lain sehingga tidak dihindari bahwa istilah dan kosakata asing serta daerah juga ikut mewarnai perwujudan bahasa Indonesia pada masa depan. Keadaan bahasa Indonesia yang seperti itu harus kita sadari betul sehingga laju perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia dalam era globalisasi itu tidak terbentur pada kendala-kendala tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern (Widada, 1999). Untuk itu, maka perlu adanya suatu kesepakatan niat dan tekad untuk melakukan pembenahan diri dengan menyiapkan bahasa Indonesia dengan baik.

Kenyataan adanya kekurangan pada masa lalu dapat dijadikan sebuah cermin untuk melihat masa depan. Membanjirnya kosakata/ istilah asing dan daerah dalam bahasa Indonesia sempat merisaukan beberapa kalangan sehingga banyak di antara pakar bahasa yang mencoba untuk menerjemahkan atau mengindonesiakan setiap kata atau istilah asing tersebut. Istilah dan kosakata yang telah mapan atau akrab pada masyarakat Indonesia dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa serumpun justru semakin bertambah asing. Pemunculan kosakata dan istilah baru dari bahasa asing atau daerah yang diciptakan oleh para cendekiawan atau para pakar ilmu tertentu itu merupakan sumbangan sangat berharga bagi usaha pengembangan bahasa Indonesia asalkan semuanya itu dilandasi oleh pemikiran yang positif. Oleh karena itu, masyarakat pemakai bahasa Indonesia tidak perlu cemas karena pada akhirnya pemakai bahasa itu sendiri yang menentukan kosakata atau istilah baru itu diterima atau ditolak.

Strategi Peningkatan Peran Bahasa Indonesia

Usaha untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia pada era otonomi dan era global sekarang ini adalah sebagai kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera dilakukan. Hal itu memang harus segera dilakukan oleh Pemerintah sebelum dampak negatif dari kedua era tersebut benar-benar mengancam keberadaan bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini penulis ingin menyumbangkan sedikit pemikiran untuk mengatasi hal itu. Adapun strategi yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kembali peran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Strategi Peningkatan Pembinaan Bahasa Indonesia

Pembinaan bahasa Indonesia yang telah dilaksanakan selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Hal itu disebabkan oleh adanya beberapa keterbatasan yang ada, seperti keterbatasan tenaga, waktu, dan juga dana. Agar pembinaan pada masa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, tentunya perlu adanya strategi yang harus ditempuh, yaitu:

1. meningkatkan jumlah objek pembinaan, yaitu dari kelompok yang sama sekali belum dapat berbahasa Indonesia dan kelompok orang yang belum terampil berbahasa Indonesia;
2. meningkatkan intensitas pembinaan bahasa Indonesia, yaitu meningkatkan jumlah kegiatan pembinaan bahasa Indonesia agar hasilnya dapat lebih merata sampai ke daerah terpencil;

3. meningkatkan kerja sama dalam pembinaan bahasa Indonesia dengan berbagai kalangan, baik dari instansi pemerintah daerah maupun dari lembaga swasta tertentu.

b. Strategi Peningkatan Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia

Menegaskan kembali kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sesuai dengan rumusan yang telah disepakati bersama adalah suatu keharusan. Adapun kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa kebangsaan yang memiliki fungsi salah satunya sebagai alat pemersatu bangsa. Di samping itu, kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara, yang tercantum dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jelaslah bahwa bahasa Indonesia harus dapat sebagai alat untuk menyatukan masyarakat dari berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda. Selain itu, fungsi yang tidak kalah penting dari bahasa Indonesia pada waktu yang akan datang adalah sebagai sarana untuk menyatukan kesamaan dalam berpikir dan perasaan. Berdasarkan hal tersebut, usaha meningkatkan peran bahasa Indonesia perlu digalakkan sehingga eksistensi bahasa Indonesia di masa depan bertambah mantap.

c. Perumusan Kembali Hubungan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah

Bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah merupakan kekayaan yang kurang diperhatikan. Padahal, bahasa daerah itu sebagai faktor penting dalam pembentukan kebudayaan dan identitas nasional, termasuk di dalamnya adalah pembentukan bahasa nasional. Kekayaan yang kurang diperhatikan itu dapat berupa jumlah bahasa daerah dengan dialeknya, ragam bahasa, dan jumlah penutur yang cukup besar. Kekayaan bahasa daerah itu harus dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, kiranya perlu perumusan kembali kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengelola bahasa daerah yang dimanfaatkan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia. Jika pada masa lalu proses pemerikayaan kosakata dari bahasa daerah dilakukan hanya secara pasif, pada waktu yang akan datang proses itu harus dilakukan secara aktif. Bahasa Indonesia tidak hanya sekadar menerima kekayaan dari bahasa daerah, tetapi sekarang harus dilakukan penjarangan kosakata dari sumber bahasa daerah, yang secara potensial dapat dikembangkan sebagai kekayaan dalam bahasa Indonesia. Kalau program pemerikayaan ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, niscaya hasilnya akan

berdampak positif proses pengembangan bahasa Indonesia yang dapat mengakomodasi dari berbagai sumber bahasa daerah secara merata, baik bahasa daerah besar maupun bahasa kecil sama-sama diperhatikan. Kebijakan hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat meletakkan secara tepat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam situasi kedwibahasaan.

d. Kebijakan Pengembangan Bahasa Indonesia dari Unsur Bahasa Asing

Selain tantangan lokal, bahasa Indonesia ternyata menghadapi tantangan global yang sangat substansial. Tantangan teknologi dan informasi tidak dapat lagi dihindari, tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia di masa depan. Agar bahasa Indonesia dapat bertahan identitasnya di masa datang, mulai sekarang harus dipikirkan strategi dalam melakukan ekspansi ke dalam bahasa teknologi dengan melakukan proses penerjemahan dan penyerapan unsur-unsur bahasa asing. Di dalam proses penerjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tidak hanya sekadar mengganti kosakata/istilah asing ke kosakata bahasa Indonesia, tetapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah sikap masyarakat terhadap citra dunia teknologi dalam imajinasi masyarakat (Abdullah, 2001). Strategi yang lebih diutamakan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia adalah proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.

e. Peningkatan Struktur Kelembagaan

Dalam era otonomi daerah sekarang ini hampir seluruh kewenangan pemerintah telah dilimpahkan ke pemerintah daerah. Hal itu berarti segala kebijakan program ditentukan di daerah dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang. Lembaga atau instansi di pemerintah daerah memegang peran yang penting dalam pengelolaan setiap kegiatan. Program pengembangan bahasa Indonesia agar berhasil dengan baik di masa akan datang harus dilakukan pengalihan tugas dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah melalui lembaga yang ditunjuk. Hal itu berarti harus dibuka/didirikan kantor pembantu di setiap kabupaten/kota yang langsung menangani kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Adanya program kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah provinsi selama ini ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kedudukan Pusat Bahasa perlu dinaikkan eselonnya, langsung di bawah Menteri Pendidikan Nasional, agar Pusat Bahasa termasuk balai bahasa/kantor bahasa memiliki wibawa di mata pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Strategi yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan meningkatkan struktur kelembagaan Pusat Bahasa (termasuk

Balai Bahasa/Kantor Bahasa) itu dengan cara mencari dukungan politik dari lembaga perwakilan rakyat, baik di Pusat maupun di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1999. *Bahasa Nusantara: Posisi dan Penggunaannya Menjelang Abad Ke-21*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeliono, M. Anton, 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Jembatan.
- Sunaryo, Adi. 1993. "Bahasa dalam Strategi Kebudayaan". *Majalah Kebudayaan*. No. 5 Tahun III/1994. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tampubolon, Daulat P. 2001. "Peran Bahasa dalam Memajukan Bangsa". *Linguistik Indonesia*. Tahun 19/1. Jakarta: MLI.
- Widada. 1999. "Peranan Bahasa Indonesia Memasuki Milenium III". *Kajian Sastra*. No. 27+28/XXIV. Semarang: Fakultas Sastra Undip.
- Widjan, Aden S.Z. 2003. "Solusi Mencegah Sparatisme". *Jawa Post*. Tanggal 23 Mei 2003.
- Wurianto, Arif Budi. 2002. "Globalisasi, Teknologi Informasi dan Peran Bahasa". *Linguistik Indonesia*. Tahun 20/2. Jakarta : MLI.

LAPORAN SIDANG

- Hari, Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2003
- Judul Makalah : 1. Perkukuh Budaya Bangsa dengan Memantapkan Peran Bahasa Daerah
2. Reaktualisasi Peran Bahasa Indonesia dalam Konteks Lokalisasi dan Globalisasi
- Pemakalah : 1. I Wayan Bawa
2. Widada
- Pemandu : Pudentia M.P.S.S.
- Pencatat : 1. Sri Haryatmo
2. Arman

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Drs. H.M. Yusuf (Universitas Khairun, Maluku Utara)
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Dalam praktiknya pengajaran itu banyak tidak sesuai dengan undang-undang tersebut karena munculnya kata-kata pinjaman dari bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa. Di samping itu, banyak kata yang diadopsi dari bahasa asing. Bagaimana komentar Anda?
2. **Pertanyaan:** Drs. Muh Abdul Khak, M.Hum. (Balai Bahasa Bandung)
 - a. Menanggapi kegelisahan dari pemakalah atas pengajaran bahasa Inggris di TK, hal itu sah-sah saja. Menurut saya, pembelajaran bahasa daerah hendaknya diawali dari rumah tangga, sedangkan wilayah pendidikan hendaknya diberi otonomi khusus.
 - b. Bahwa strategi yang diungkapkan oleh pemakalah bukanlah hal yang baru lagi. Yang penting hendaknya dibuat model pembinaan bahasa Indonesia yang lebih menyenangkan. Ungkapan pemakalah pada halaman 8 yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai sarana untuk menyatukan kesamaan dalam berpikir dan perasaan, mohon komentar Anda!
3. **Pertanyaan:** Sukadi (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta)
Untuk Pak Widada:
 - a. Komentar saya tentang istilah *evolusi*. Menurut saya, yang benar adalah *revolusi*, bukan *evolusi*, karena berkaitan dengan pendidikan.
 - b. Komentar tentang butir 7 yang berkaitan dengan pembinaan bahasa. Mengapa tidak disinggung tentang media (*internet*), pembinaan yang digunakan sebagai sarana pembinaan bahasa Indonesia?

- c. Mengapa Pusat Bahasa tidak memikirkan pemanfaatan media internet dalam pembinaan bahasa Indonesia! Dalam bahasa dan sastra Indonesia media ini bisa menjadi terobosan dalam pembinaan bahasa, bahkan bahasa induk dapat menjadi bahasa internasional.

4. **Pertanyaan:** Makmur Anwar (Palangkaraya)

Ada komentar bahwa pembinaan bahasa di daerah sangat kurang karena alasan klasik, yaitu kurangnya dana. Dalam otonomi daerah, pembinaan bahasa daerah diserahkan kepada daerah masing-masing. Bagaimana dengan pembinaan bahasa Indonesia di daerah? Dalam hal penerbitan bagaimana Pusat menangani penerbitan buku tidak hanya untuk pelajar, tetapi juga untuk guru. Karena di daerah tidak ada penerbit, bagaimana kalau penerbit seperti IKAPI membuka cabang di daerah?

5. **Pertanyaan:** Prof. Dr. Putu (Yogyakarta)

Konsep *de Saussure* tentang *langue*, menurut saya, kurang tepat. Yang benar *langue* itu bersifat abstrak, bukan bersifat konkret. Yang bersifat konkret adalah *parole*. Komentar yang kedua adalah *budaya vokal* juga kurang tepat. Apakah tidak lebih tepat jika dikatakan *budaya verbal*?

Jawaban:

- a. Tentang dominasi budaya Jawa menurut I Wayan Bawa bergantung pada sumber daya manusia yang bersangkutan. Semakin banyak SDM daerah yang bersangkutan, semakin banyak kontribusi yang disumbangkan. Jadi, marilah kita berlomba-lomba meningkatkan SDM masing-masing agar kontribusi kita semakin bertambah.
- b. Dalam menanggapi pertanyaan kedua ada konsep *catur guru* (empat guru), yaitu:
- 1) guru orang tua,
 - 2) guru di sekolah (pengajar),
 - 3) guru penguasa (pemerintah),
 - 4) guru.

Dari keempat konsep di atas yang paling tepat adalah konsep pertama karena merupakan identitas, baru bahasa nasional dan bahasa asing. Jadi, keempatnya harus dilaksanakan secara serentak.

- c. Untuk menangani itu ada dua hal, yaitu (1) bahwa konsepnya itu sudah jelas, terletak pada Undang-Undang Dasar 1945 dan (2) Pemerintah sudah mempunyai lembaga yang menangani pembinaan dan pengembangan bahasa, yaitu Pusat Bahasa dan balai bahasa di daerah. Dari kedua hal itu, bergantung pada kesungguhan kita bersama dalam pembinaan bahasa. Kita harus bersungguh-sungguh melakukan pembinaan bahasa.

Jawaban: Widada untuk Yusuf

1. Dominasi bahasa daerah (Jawa) tidak dapat dipungkiri. Hal inilah yang diperbaiki, tidak hanya untuk guru bahasa Indonesia, tetapi juga untuk guru perlu yang lain.
2. Dalam mengadopsi bahasa daerah secara dominasi harus dihilangkan. Untuk itu, dibutuhkan tim penjaringan kosakata bahasa daerah. Hal ini akan berdampak positif terhadap warga yang memiliki bahasa daerah tersebut.

Jawaban: Widada untuk Abdul Khak

Otonomi sekolah itu ditafsirkan bermacam-macam, seolah-olah sekolah dapat bertindak secara bebas, termasuk dalam hal pengambilan kebijakan tentang penggunaan bahasa. Hal ini sangat memprihatinkan. Yang dimaksud dengan kaitannya dengan kesamaan pikiran dan perasaan adalah kesamaan dalam hal interpretasi.

Jawaban: Widada

Istilah yang benar adalah *evolusi*, bukan *revolusi*. Kaitannya dengan media pembinaan, saya sangat setuju bahwa pembinaan yang ideal adalah melalui internet. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh instansi besar, sedangkan untuk sekolah-sekolah di pelosok tanah air belum dimungkinkan.

Balai Bahasa Palangkaraya hendaknya segera didirikan, yang mempunyai fungsi pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan ke-sastraan. Pembinaan bahasa Indonesia di daerah memang masih kurang karena alasan adana. Jika anggaran pendidikan bisa mencapai 20%, pembinaan bahasa Indonesia diharapkan akan terlaksana. Pembina bahasa Indonesia itu adalah Pusat Bahasa dan UPT-nya di daerah.

Saran

1. Ikram (Bengkulu)
Pembinaan bahasa hendaknya melibatkan lembaga adat.
2. I Wayan Bawa (Universitas Udaya, Bali)
Dalam era otonomi ini hendaknya Pusat Bahasa membantu pembinaan bahasa daerah di daerah dan tidak hanya menyerahkan kepada daerah.

SURAT MELAYU BERILUMINASI SEBAGAI SUMBER KAJIAN INTERDISIPLINER

Mu'jizah

Pusat Bahasa, Jakarta

Pengantar

Di antara sekian banyak naskah (*manuscript*) nusantara terdapat satu jenis yang disebut surat beriluminasi, yang oleh para peneliti Barat sering disebut surat emas (*golden letter*), yaitu surat bergambar yang sebagian besar menggunakan tinta emas. Surat itu dipakai sebagai sarana komunikasi dalam hubungan diplomasi antara raja-raja Nusantara dan Pemerintah Kolonial atau sebaliknya antara Pemerintah Kolonial dan raja-raja nusantara. Gambar pada naskah dalam ilmu pernaskahan (*kodikologi*) disebut iluminasi, suatu istilah yang pada awalnya digunakan sebagai proses pengemasan pada beberapa halaman naskah untuk memperoleh keindahan. Namun, pada perkembangannya istilah itu mengacu pada gambar yang membingkai teks yang dipakai sebagai gambar muka (*frontispiece*) yang tidak hanya dipakai sebagai hiasan, tetapi juga bermakna, seperti yang dikatakan Folsom (1990:40) bahwa iluminasi pada naskah, selain untuk memperindah halaman, juga berfungsi untuk menjelaskan teks.

Surat beriluminasi sudah dipakai di nusantara pada masa yang panjang, melampaui 400 tahun, sejak abad ke-16. Surat Melayu tertua ditemukan di Ternate pada 1521 yang ditulis oleh Sultan Abu Hayat kepada Raja Portugal, John III, yang berisi pemberitahuan tentang pembunuhan Raja Ternate yang tua, Bayan Sirullah, dan pedagang Portugal, Francisco Serrao karena diracun. Surat Melayu beriluminasi termegah berasal dari Sultan Iskandar Muda, Aceh, yang ditulis tahun 1615 kepada Raja James I Inggris. Surat yang hampir satu meter itu digambar dengan motif bunga popi memakai tinta emas (Gallop, 1994:120). Selain kedua surat tersebut, masih ada ratusan meter surat lain serupa yang ditulis di atas kertas dengan aksara Jawi dalam bahasa Melayu.

Tradisi penulisan surat beriluminasi ini berkembang di kerajaan-kerajaan di nusantara. Dari data yang terkumpul, daerah yang mengenal tradisi penulisan itu di antaranya Aceh, Banjarmasin, Batavia, Bima, Johor, Pontinak, Riau, Lingga, Mempawah, Palembang, Trengganu, dan Ternate. Bahkan, daerah yang tidak berbahasa ibu bahasa Melayu, seperti Banten dan Madura, juga mengenal tradisi ini. Menurut Lohanda (1987), surat seperti itu berfungsi sebagai pintu gerbang masuk ke dalam pemikiran masyarakat masa lalu sebab di dalamnya kita menemukan berbagai aktivitas, seperti perubahan kekuasaan, nama-nama penguasa, dan intrik kerajaan. Dengan begitu, beragam sistem sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, dan

perdagangan dijumpai di dalamnya. Dengan kekayaan seperti itu, sebagai hasil tradisi tulis nusantara, surat tersebut dapat menjadi bahan kajian yang berharga, terutama jika dikaitkan dengan kajian interdisipliner, seperti filologi, kodikologi, paleografi, linguistik, sejarah, epigrafi, dan kaligrafi.

Surat Beriluminasi Koleksi Arsip Nasional

Surat beriluminasi sampai saat ini disimpan dalam berbagai koleksi, baik di dalam maupun di luar negeri. Di Indonesia surat-surat itu ditemukan dalam koleksi Arsip Nasional. Di Belanda koleksi itu disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, *Algemeene Rijkarchief*, Den Haag, dan Perpustakaan KITLV. Di Inggris lembaga seperti British Library, Bodleian Library, dan Cambridge University Library merupakan tempat penyimpanan surat beriluminasi. Di Paris, Perancis, naskah jenis itu disimpan di *Bibliothèque Nationale*.

Dalam tulisan ini surat beriluminasi yang akan dibicarakan diambil dari beberapa surat beriluminasi yang ada dalam koleksi Arsip Nasional. Di lembaga itu disimpan sekitar 17 surat beriluminasi yang berasal dari beberapa raja nusantara. Tujuh berkas surat itu seperti disebutkan di bawah ini.

1) Palembang

- (1) Surat Ratu Ahmad Nadjamauddin, Palembang, kepada Jenderal van der Cappelen, 7 April 1823 M.
- (2) Surat Sultan Ahmad Nadjamuddin, Palembang, kepada Gubernur Jenderal Van der Cappelen, 6 Sya'ban 1238 H.
- (3) Surat Ratu Ahmad Nadjamuddin, Palembang, kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 26 November 1823 M.
- (4) Surat Ratu Husin Dilaudin, Palembang, kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 26 November 1823 M.

2) Pontianak

- (1) Surat Sultan Syarif Abdurrahman ibn Habib Husen Al Kadri, Pontianak, kepada Pemerintahan Wilayah Borneo Barat, 13 Februari 1848 M..
- (2) Surat Sayyid Syarif Usman, Pontianak, kepada Gubernur Jenderal Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Cappelen, 13 Mei 1823 M.
- (3) Surat Sultan Sayid Syarif Abdurrahman, Pontianak, kepada Gubernur Jenderal Belanda, 18 November 1848 M.
- (4) Surat Sultan Syarif Yusuf bin Almarhum Sultan Syarif Hamid al-Kadri, Pontianak, kepada Gubernur Jenderal Otto van Rees, 11 November 1886 M.

3) Banjarmasin

Surat Pangeran Mangkubumi, Banjar (Borneo), kepada Komisaris Tobias, 1239 H.

- 4) Mempawah
Surat Pangeran Adinata Krama Panembahan Adi Djaja, Mempawah (Kalimantan), kepada pemerintah Hindia Belanda, 26 Mei 1823 M.
- 5) Makassar
Surat Sultan Taniti, Makassar, kepada Wakil Gubernur Jenderal Pieter Merkus, 5 Maret 1831 M.
- 6) Riau
 - (1) Surat Sultan Muzaffar Syah bin Sultan Mahmud Syah, Riau, kepada Gubernur Jenderal Jan Jacob van Rochussen, 6 Sya'ban 1264 M.
 - (2) Surat Raja Muda Ali, Riau, kepada Jan Jacob van Rochussen, 1265 H.
- 7) Madura
 - (1) Surat Panembahan Natakusuma, Bangkalan (Madura), kepada Gubernur Jenderal Mr. Johan Wilhelm van Lansberger, 11 Mei 1876 M.
 - (2) Surat Sultan Pangeran Adipati Arya Suryakesuma Reganata, Pamekasan (Madura), kepada Gubernur Jenderal Belanda, 1749 M.
 - (3) Surat Adipati Cakradiningrat, Madura, kepada Hendrik Markus de Kock, 1827 M.
 - (4) Surat Sultan Cakradiningrat, Madura, kepada Gubernur Jenderal van der Capellen, 4 September 1823 M.

Format Surat Beriluminasi

Surat Melayu beriluminasi dibuat dengan formulasi tertentu dan biasanya ada delapan bagian yang selalu muncul, yakni (1) iluminasi, (2) cap, (3) kepala surat, (4) puji-pujian, (5) isi, (6) bingkisan, (7) penutup, dan (8) alamat surat.

Iluminasi sebagai penghias surat merupakan keindahan visual yang langsung dapat dinikmati. Keindahan dalam sastra Melayu, menurut Braginsky (1994:25), mempunyai dua pengertian. Indah dalam pengertian pertama lebih dititikberatkan pada aspek luaran yang dapat dirasakan oleh pancaindera. Dalam tradisi sastra Melayu dan Islam, umumnya keindahan berpuncak potensi kreatif Ilahi (kekayaan) yang menempel pada benda. Indah dalam pengertian yang kedua berarti elok, yang menitikberatkan pada aspek dalaman yang hakiki dan tersembunyi. Aspek dalaman itu terkait dengan kebaikan, kebajikan, yang sifatnya imanen yang dimiliki oleh keindahan itu sendiri.

Keindahan visual pada iluminasi diketahui dari motif dan paduan warna yang dipakai. Pada surat-surat duka untuk Raja Willem II yang disampaikan oleh Raja Ali, Raja Muzaffar Syah, dan Pangeran Adipati Aryakesuma Reganata, misalnya, iluminasi dipakai sebagai bingkai teks, hanya motifnya berbeda. Pada surat Sultan Muzaffar Syah, Lingga, motif dasar berupa tangkai-tangkai bunga yang tersebar di seluruh bingkai surat dan bagian pinggir diberi motif awan yang berbentuk sulur. Hiasan di atas

teks berupa kubah yang pucuknya tepat berada di bawah kepala surat. Keseluruhan iluminasi berwarna emas, tanpa variasi warna lain.

Motif itu berbeda dengan motif surat Raja Ali dari Riau yang dibingkai dengan hiasan yang sangat beragam. Bingkai luar dan bingkai teks motifnya sama, sulur daun dan bunga lotus. Di atas bingkai teks terdapat kubah yang di dalamnya terdapat sebuket bunga, berupa bunga krisan, matahari, melati, dan di bagian bawah diberi motif awan. Bingkai yang membentuk kubah dibentuk dengan garis ganda yang isinya penuh dengan titik-titik yang verbaris. Tepat di atas kubah terdapat kepala surat yang bentuknya menyerupai matahari terbit, lengkap dengan pancaran cahayanya, dan di dalamnya tertulis *qauluhu al-haq*. Di sudut kanan dan kiri diberi motif awan yang di sekitarnya bertebaran bunga melati. Gambar pada bingkai kanan bagian atas dihiasi motif dasar swastika berwarna emas yang di beberapa bagiannya diselipi bunga matahari berwarna merah. Pada bagian tengah terdapat cap, sedangkan bagian bawah terdapat sebuah vas bunga dengan rangkaian bunga yang menarik, ros, krisan, dan matahari dengan beberapa tangkai bunga halus.

Kedua gambar di atas berbeda dengan surat Sultan Cakradiningrat dari Madura yang hiasannya lebih sederhana, tetapi tetap indah. Bingkai luar dibatasi dengan garis ganda berwarna emas. Begitu juga dengan bingkai dalam, pembatas teks. Di antara kedua bingkai itu terdapat motif daun anggur berwarna hijau dan buah anggur berwarna ungu. Motif itu berbentuk sulur yang dirangkai dengan pita merah muda yang di atasnya bukan lagi kubah, tetapi bola api berwarna emas. Pada bagian bawah juga terdapat motif daun anggur dengan pita yang berbentuk sulur yang di sekitarnya berhias taburan bunga melati.

Motif menarik juga terlihat pada surat Sultan Ahmad Nadjamuddin, Palembang, yang iluminasinya juga membingkai teks. Motif yang ada di dalamnya tangkai-tangkai bunga matahari dengan warna dasar kuning. Di atas teks terdapat kubah yang di dalamnya ada serangkaian bunga dengan hiasan ros dan melati dengan paduan warna kuning dan coklat. Di pucuk kubah terdapat sepucuk bunga yang letaknya tepat di bawah kepala surat yang ditulis indah (kaligrafi).

Motif-motif di atas selain berfungsi sebagai hiasan, juga merupakan simbol-simbol bermakna yang artinya tidak langsung dimengerti karena maknanya tersembunyi di balik simbol tersebut.

Cap pada surat sangat bervariasi bentuknya dan kebanyakan berupa lingkaran dengan kelopak yang jumlahnya sangat beragam. Bahan cap juga ada yang dari jelaga lampu berwarna hitam dan *wax* berwarna merah. Di atas cap terdapat tulisan yang sebagian besar beraksara Jawi, aksara Arab, aksara Latin, dan ada yang tanpa tulisan.

Cap pada surat Raja Ali, Riau, ditulis dengan aksara Latin dan Arab. Tulisan dalam sksara Latin, *Onder Koning van Riouw*, dan tulisan aksara

Jawi, *Beribu elu-elu Maharaja Besar Duli Almarhum Yang Dipertuan Raja Ja'far*. Cap Sultan Muzaffar Syah tertulis dalam aksara Jawi, *Al-wasik billah rabbu al-'arasy Sultan Mahmud Muzaffar Syah Ibn Sultan Mahmud Syah, Sanah 1351*, sama dengan surat Sultan Nadjamudin yang capnya berbunyi, *Alamat diberi Paduka Sultan Ratu Ahmad Nadjamudin Ibn Susuhunan Husin Diyauudin fi Balad Palembang dar as-salam*. Hanya cap dalam surat Sultan Cakradiningrat, Madura, yang tidak ada tulisannya.

Cap dalam keempat surat yang disebutkan di atas sama-sama diletakkan di pias kanan, hanya tempatnya berbeda. Cap dalam surat Raja Ali, Sultan Muzaffar Syah, dan Sultan Nadjamuddin diletakkan di tengah, sejajar dengan teks. Sementara itu, dalam surat Pangeran Adipati Aryakesuma Reganata cap diletakkan agak di bawah. Peletakan cap itu mempunyai arti karena berkaitan dengan hubungan antara pengirim dan penerima surat.

Kepala surat ditulis dengan aksara Jawi, seperti kepala surat Sultan Nadjamuddin yang berbunyi *Qauluhu al-Haq wa kalamuhu as-sadiq* sama dengan surat Raja Ali dan Sultan Muzaffar Syah. Namun, tulisannya berbunyi, *qaulu al-haq* 'perkataan yang benar'. Kepala surat sering juga ditulis dengan kaligrafi yang beragam bentuk.

Puji-pujian merupakan kalimat pembuka dan sering mulai dengan kalimat yang hampir sama. Intinya memuji-muji orang yang dikirim surat. Kalimat awal yang sering muncul *Bahwa ini warkat al-ikhlas wa tuhfat al-ajnas yang terbit daripada fuad al-azkiyat yang termaktub di dalamnya beberapa tabik dan selamat yaitu daripada...* atau *Bahwa inilah warkat al-ikhlas wa tuhfat al-ajnas yang terbit daripada fuad al-azkiyat yang termazkur dalamnya tabik dan hormat yang...* Setelah itu, disebutkan nama pengirim surat dan diikuti dengan kalimat lain dengan berbagai gaya bahasa, misalnya metafora dan simile. Dalam surat Raja Ali dinyatakan *Maka barang dikuasakan Tuhan seru sekalian alam apalah kiranya datang ke hadapan majlis Sri Paduka Yang Dipertuan Besar Minister van Staat Gurnadur Jenderal dari tanah Hindia Nederland Jan Jakub Rochussen yang terhiasi dengan bintang besar yang pertama maha dari singa Nederland dan bintang besar rajawali merah dari negeri Prusian dan bintang besar dari maharaja Leopad di negeri Belgia serta lagi menjadi opsir besar tanda kehormatan dari negeri Peransis serta terhiasi dengan bintang besar dari negeri Brasilia yang bersemayam di atas kerajaan negeri Betawi*.

Bagian isi merupakan inti surat yang menyatakan beragam masalah, mulai sanjungan atas kerja Pemerintah Kolonial, penyerahan senjata dan harta, status kekuasaan daerah, penyitaan garam, penganugerahan gelar, permohonan legitimasi, surat pemberitahuan, pemberian bantuan, perdagangan, penyerahan kekuasaan, sampai surat duka cita. Bagian isi ini ditandai dengan kata *wa ba'dahu* atau *sebermula*. Dalam surat yang berisi rasa duka cita saat meninggalnya Raja Willem II, yang datang dari tiga raja, informasinya saling melengkapi. Dalam surat Aryakesuma Reganata,

Pamekasan (Madura) isinya berbunyi, *wa ba'dahu kemudian daripada itu maka aalah hamba menjunjungkan sekeping tanda yang sedarah ini ke bawah duli Sri Paduka Yang Dipertuan Besar daripada menyatakan tulus ikhlas serta minta kebaikan pertambatan dan perhubungan berkasih-kasihan jua adanya serta hamba merafa'kan suatu pertili ke bawah Duli Yang Dipertuan Besar daripada maktub Sri Paduka Yang Dipertuan Besar tertulis pada 14 hari bulan Mei tahun 1849 yaitu telah sampailah kepada hamba yang selamat al-khair adanya. Maka bermaklumlah hal Sri Paduka Yang Dipertuan Besar sudah menerima khabar yang saat kedukaan dari Welanda menyatakan bahwa dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala pada 17 hari bulan Maret tahun ini Sri Paduka Maharaja Welanda, yaitu Baginda Raja Willem yang kedua telah kembali ke rahmatullah ta'ala. Maka sakitnya baginda itu hanyalah 4 hari saja dan umurnya sehingga 56 tahun 3 bulan, sebelas hari. Dalam surat Sultan Muzaffar Syah, Lingga, isinya Wa bahdahu al-kalam al-mazkur barang mafhum kiranya Sri Paduka sahabat kita adalah kita memberitakan halnya seperti warkat daripada Sri Paduka sahabat kita yang termaktub kepada 14 hari bulan Mei tahun 1849 itu telah sampailah kepada kita dengan selamat sempurnanya kepada dua hari bulan Sya'ban hari Kamis, jam pukul 4 maka kita membuatlah dengan beberapa adapt istiadat segala raja-raja yang besar-besar yang empunya ini takhta kerajaan. Maka apabila terbukalah daripada alfakih darinya serta kita tetap daripada awal sejahteranya hingga sampailah kepada sy-t-r. Maka termazkurlah di dalamnya menyatakan kepada tujuh belas hari bulan Maret tahun ini sr-ytl-s maharaja Welanda yaitu Baginda Raja Willem yang kedua telah kembali ke rahmatullah ta'ala. Raja Ali, Riau, menyampaikan suratnya dengan Wa ba'duhu al-kalam al mazkur maka adalah kita melayangkan warkat al-ikhlas ini kepada Sri Paduka sahabat kita yang hal kita sudah menerima warkat al-mahabbah daripada Sri Paduka sahabat kita kepada 12 hari bulan Rajab yaum al-isnain, pukul sepuluh. Maka kita sambutlah dengan sehabis-habisnya kehormatan kita. Maka kita bacalah daripada awal sya...¹ hingga akhir yang termazkur di dalamnya pintu khabar yang memberi duka cita di atas kita serta isi negeri sekaliannya, yaitu daripada kemangkatan Sri Paduka Maharaja Willem yang kedua itu. Maka kita pun sangatlah menaruh kedukaan dan percintaan akan Sri Paduka Baginda Maharaja itu yang selama baginda maharaja itu bersemayam di atas takhta kerajaan negeri Welanda*

Bingkisan merupakan bagian yang juga menarik karena berbagai pemberian dijadikan hadiah. Misalnya, dalam surat Panembahan Wijaya dari Mempawah dinyatakan bahwa bingkisan yang diberikan kepada Gubernur Jenderal di Batavia berupa cincin intan dua batang; bunyinya *Kemudian suatu pun tiada alamat al-hayat yang dipesertakannbdh ini hanyalah persembahan cincin intan dua batang tiada dengan sepatutnya. Maka lebih-*

¹ tiga huruf tidak terbaca karena kertas sobek.

lebih ampun jua adanya. Sultan Syarif Abdul Rahman ibn Almarhum Husain Alkadri dari Pontianak memberikan hadiah kepada Alexander Philip Baron van der Capellen dengan *emas a-w-r-y 20 bonggol, berat 40 ringgit tiada dengan sepertinya.*

Penutup surat ditandai ditandai dengan perbedaan spasi, bagian ini berada agak di bawah, terpisah dengan bagian lain. Biasanya kalimat dimulai dengan kata *termaktub* atau *tersurat*. Setelah itu diikuti penyebutan nama tempat dan waktu penulisan. Bagian ini disebut juga alamat surat. Dalam surat Sultan Muzaffar Syah ditulis waktu penulisan surat, *6 Sya'ban 1265*, dalam surat Raja Ali, *15 Sya'ban 1265*, dan pada dalam surat Pangeran Adipati Arya Reganata pada bulan *Juni 1849*.

Surat Beriluminasi sebagai Sumber Kajian Interdisipliner

Dengan formulasi seperti diuraikan di atas terlihat bahwa surat beriluminasi sebagai hasil tradisi tulis di nusantara menjadi sumber pengetahuan yang kaya karena dapat diteliti dengan kajian interdisipliner. Kajian itu penting seperti yang dikatakan Magetsari (1991) bahwa kajian interdisipliner perlu dilakukan karena suatu ilmu tidak akan memperoleh hasil yang maksimal apabila hanya mengandalkan pengetahuan yang dikembangkan sendiri tanpa kontribusi dari ilmu lain. Untuk memperoleh hasil yang maksimal itu kajian interdisipliner pada surat beriluminasi perlu juga diterapkan. Ilmu-ilmu itu di antaranya filologi, kodikologi, paleografi, linguistik, sejarah, kaligrafi, dan epigrafi.

Filologi yang mempelajari teks jelas sangat erat kaitannya dengan surat jenis ini. Hanya tradisi penyalinan yang banyak ditelusur dalam filologi hampir tidak ditemukan dalam naskah jenis ini. Teks tiap surat hampir selalu merupakan naskah tunggal (*codex unicus*), satu teks yang mandiri, sehingga cara kerja filologinya juga harus disesuaikan. Edisi teks yang cocok untuk bahan ini adalah edisi faksimile (edisi fotografis), edisi diplomatis, dan edisi kritis. Di antara ketiga metode itu, edisi faksimile yang disertai dengan edisi kritis merupakan metode yang paling sesuai karena edisi faksimile memperlihatkan bentuk asli surat lengkap dengan figur gambar, sedangkan edisi kritis dapat membantu pembaca memahami isi teks. Teks yang ada dalam tiap surat sejalan dengan konsep filologi modern yang memandang setiap teks mempunyai kualitasnya sendiri karena setiap teks dilahirkan dari latar belakang sosial dan zaman yang berbeda.

Lain dengan filologi yang sudah jauh berkembang, kajian kodikologi di Indonesia masih ketinggalan dan langka dan sering kali diabaikan. Ikram (1994) mengatakan bahwa pengabaian itu terjadi karena para peneliti langsung menceburkan diri pada suatu teks tanpa mengetahui asal-usul sejarahnya, padahal asal-usul sejarah teks itu diteliti melalui ilmu ini. Tanpa pengetahuan sejarah naskah, teks sering tidak ditempatkan dalam konteks budayanya sehingga sebagai dokumen bahan itu tidak dapat dimanfaatkan

secara optimal, bahkan mengkaji isinya pun tidak akan sempurna karena konteksnya tidak jelas.

Dalam kajian kodikologi keberadaan surat beriluminasi sangat penting. Chambert-loir (1999:7) juga mengatakan bahwa segi estetis yang berkaitan dengan gambar yang banyak ditemukan dalam naskah nusantara masih sangat jarang dilakukan. Padahal, bahan itu sangat menarik untuk dikaji. Motif yang ada dalam surat itu dapat dicirikan gayanya, baik daerah maupun masa. Gaya tersebut dapat membantu pengungkapan sejarah teks dalam naskah sastra yang juga bergambar yang tidak diketahui masa penulisannya. Dengan begitu, kodikologi dapat membantu tekstologi. Kajian iluminasi yang dapat membuka sejarah teks pernah dilakukan oleh Grabar (1984) yang berjudul *The Illustrations of the Maqamat*.

Motif yang ada dalam iluminasi juga merupakan simbol bermakna dan pengungkapan makna tersebut merupakan suatu yang sangat berarti sama halnya dengan pemaknaan teks. Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Nasr (1986) yang berjudul *Animal Symbolism in Warqa wa Gushah*. Penelitian serupa pernah saya upayakan dalam memaknai teks gambar yang berisi ajaran martabat tujuh (Mu'jizah, 2000). Bukan hanya itu yang bisa dikaji dari surat beriluminasi, melainkan juga bagaimana tradisi penulisan surat Melayu beriluminasi di Nusantara ini karena, selain mempunyai kesamaan, tiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Bahkan, bahan naskah, seperti tinta, kertas, bahan menggambar, iluminator, proses pembuatan, dan penulis surat merupakan bahan yang menarik untuk dikaji. Demikian juga halnya dengan gaya tulisan tangan.

Gaya tulisan yang ada dalam surat beriluminasi dapat dikaji dengan pendekatan paleografi, studi yang mempelajari tulisan kuno. Kajian ini penting untuk penelitian prasasti (Robson, 1978). Dengan kajian itu, perkembangan tulisan di nusantara dapat dipantau sebab biasanya macam tulisan dan bentuk huruf berbeda menurut zaman dan daerah asal naskah, begitu juga dengan gaya penulisnya. Dengan begitu, paleografi juga penting sebab membantu penafsiran teks dengan tepat, jangan sampai salah tafsir. Dari kajian ini terlihat bantuan kajian paleografi pada kodikologi dan filologi. Beberapa pakar yang mulai tertarik menyingkap misteri ini, di antaranya Roger Toll (2001) yang mengkaji gaya tulisan Encik Husin bin Ismail yang banyak menyalin naskah Melayu.

Linguistik, yang mempelajari bahasa, juga penting untuk kajian surat beriluminasi sebab di dalam surat inilah dapat diketahui tuturan raja-raja di seluruh nusantara sebab tuturan yang ada dalam surat Melayu beriluminasi berasal dari beragam daerah dan masa yang berbeda. Dengan begitu, sejarah perkembangan bahasa, pengaruh bahasa, dan studi bandingan bahasa-bahasa Melayu bisa dipantau. Dari bahasa yang dipakai, kita juga dapat meneliti berbagai ragam pemakaian dengan melihat siapa yang menggunakan, dan dari kalangan mana ia berasal. Selain itu, kajian linguistik murni

juga bisa diterapkan dengan melihat pemakaian ejaan, kosakata, frasa, dan struktur kalimat. Banyak linguist yang sudah memakai teks hasil suntingan para filolog sebagai bahan penelitian bahasa. Misalnya, Omar (1991) mengkaji bahasa Melayu yang dipakai pada abad ke-16 dalam teks *Aqa'id al-Nasafi*. Gallop (2002) mengatakan bahwa surat-surat Melayu abad ke-16 yang ada dalam koleksi Inggris mempunyai kekhasan dalam pemakaian bahasa, terutama dalam puji-pujian.

Kajian sejarah jelas sangat penting untuk surat jenis ini karena kita bisa memantau kapan dan dalam situasi apa surat tersebut dibuat atau dikirim. Banyak nama dan peristiwa yang bisa dilacak untuk menyusun sejarah lokal (daerah). Beberapa nama yang disebutkan perlu diidentifikasi, kapan dia berkuasa, dan dalam rangka apa dia mengirim surat tersebut. Dalam tiga surat yang disebutkan di atas, misalnya, muncul nama seperti Sultan Muzaffar Syah, Raja Ali, Pangeran Adipati Aryakesuma Reganata, Jan Jacob van Rochussen, Raja Willem II, dan Raja Willem III. .

Sultan Muzaffar Syah yang nama aslinya Sultan Mahmud adalah anak Sultan Muhammad yang disingkirkan Belanda karena pihak Belanda sudah merasa sultan itu tidak dapat bekerja sama lagi dengan mereka. Pengangkatan Sultan Mahmud saat itu terkesan dipaksakan oleh Belanda karena usianya masih sangat muda, 15 tahun. Setelah diangkat menjadi sultan, Sultan Mahmud diberi gelar Sultan Muzaffar Syah (1834—1857). Sultan yang berkedudukan di Lingga ini seorang raja yang berpengaruh bukan hanya di tanah kekuasaannya, melainkan juga di Johor, Pahang, dan Trengganu. Pada tahun 1836 Sultan Muzaffar Syah dipaksa Belanda membantu untuk memberantas orang-orang yang mengganggu keamanan Belanda dan Inggris. Akan tetapi, usahanya itu tidak berhasil karena para pengganggu tidak takut kepadanya. Setelah melihat gejala itu, Belanda membuat perjanjian pada tanggal 22 Juni 1836 yang isinya berkisar tindakan menjaga keamanan pelayaran di lautan.

Pada suatu saat Sultan Muzaffar Syah mengusulkan kepada Belanda agar tanah kekuasaan Kerajaan Melayu Riau di Semenanjung Malaka yang pernah diserahkan kakeknya, Sultan Abdur Rahman, pada *Traktaat London* dikembalikan. Akan tetapi, permintaan itu ditolak karena hal itu sudah terikat dalam perjanjian. Sejak saat itu timbul keretakan hubungan antara sultan dan pihak Belanda hingga pada 12 Oktober 1857, Residen Niewenhuyzen, menggantinya dengan Tengku Sulaeman yang bergelar Sultan Sulaeman Badrul Alam Syah (Sejarah Riau, 1977:326—331).

Raja Ali menduduki jabatan Raja Muda VIII menggantikan Raja Abdrurrahman, Yang Dipertuan Muda VII. Ia sepupu Raja Ali Haji, pengarang Riau yang sangat terkenal dan produktif. Pada masa Raja Ali menjadi raja muda, kegiatan intelektual di Pulau Penyengat meningkat. Sayangnya, jabatan itu tidak lama dipegangnya karena Armada Belanda di

bawah Laksamana Van Braam menggempur Riau, dan Yang Dipertuan Muda Ali menyingkir dan menetap di Sukudana (Sejarah Riau, 305).

Pangeran Adipati Arya Reganata seorang adalah bupati dari Pamekasan, Madura. Sejak tahun 1624 seluruh Madura terdiri atas lima kerajaan, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Blega, dan Arubaya, yang semuanya berada dalam taklukan Mataram di bawah Sultan Agung. Sejak 1745 VOC berkuasa, kelima kerajaan itu dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Madura Barat, Pamekasan, dan Sumenep. (Abdurrahman, 1971).

Kaligrafi dalam surat emas terlihat indah dan menarik. Bagian surat emas yang menampilkan keindahan tulisan ini biasanya dijumpai pada kepala surat, pembuka surat, dan penutup surat, bahkan kadang-kadang tulisan pada cap. Berbagai tipe tulisan, gaya, dan bentuk tulisan yang dibuat dengan seni yang tinggi ini dapat menjadi bahan kajian. Di bawah ini diambil beberapa kaligrafi yang ditemukan dalam surat pada bagian kepala surat, pembuka surat, dan penutup surat..





Arkeologi, khususnya epigrafi yang mengkhususkan diri pada tulisan yang ada pada inskripsi mempunyai perhatian pada tulisan-tulisan yang ada di atas cap. Cap yang dibuat dari logam ini bagian atasnya diberi tulisan dengan beragam huruf, kalimat, dan gaya. Kajian epigrafi Islam yang mendalam tentang beragam tulisan di atas cap surat-surat Melayu baru saja dilakukan oleh Gallop (2002) dengan judul “Malay Seal Inscription: A Study of Islamic Epigraphy”.

Untuk melihat kekayaan tradisi tulis nusantara, khususnya pada surat beriluminasi dilampirkan beberapa contoh cap dan surat-surat tersebut yang ada dalam koleksi Arsip Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. 1992. *Kaidah Menulis Karya-Karya Master Kaligrafi Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Behrend, T.E.1993. "Manuscript Production in Nineteenth-Century Java, Codicology and the Writing of Javanese Literary History. Dalam *BKI*, 149.
- Burckhardt, Titus. 1985. *The Art of Islam: Language and Meaning*. England: Westerham Press.
- Cooper, J.C. 1978. *An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols*. Great Britain: Thames & Hudson.
- Folsom, Rose. 1990. *The Calligraphers Dictionary*. London: Thames and Hudson.
- Gallop, Anabel Teh dan Bernard Arps. 1991. *Golden Letters: Writing Traditions of Indonesia; Surat Emas: Budaya Tulis di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lontar.
- Gallop, Annabel The. 1994. *The Legacy of the Malay Letter*. London: The British Library.
- 2002. “Malay Seal Inscription: A Study of Islamic Epigraphy”. Disertasi
- 2002. “Malay Seal Inscription: A Study of Islamic Epigraphy”.

- Grabar, Oleg. 1984. *The Illustrations of the Maqamat*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Herwandi. 2002. "Kaligrafi Islam pada Makam-Makam di Aceh Darussalam: Telaah Sejarah Seni Abad XVI—XVIII M. Jakarta: Program Pascasarjana UI.
- Jessica, Rawson. 1984. *Chinese Ornament: the Lotus and the Dragon*. London: British Museum.
- Magetsari, Noerhadi. 1999. "Interdisipliner bagi Perkembangan Ilmu Arkeologi" Makalah dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi, Yogyakarta.
- McGlynn, John H. dkk. 1996. *Illuminations: The Writing Traditions of Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lontar.
- Molen, Willem van der. 1993. "Many Greetings from Madura: An Exercise in Eighteenth Century Codicology". Dalam *BKI*, 149.
- Mu'jizah. 1992. "Illuminations and Illustrations in Malay Manuscripts at the National Library". *Dalam International Workshop on Indonesian Studies No.7: Southeast Asian Manuscripts*. Leiden, 14--16 Desember 1992.
- , 2000. Pemaknaan Simbol Ilustrasi dalam Sebuah Teks Mistik: Kajian Kodikologis disertai Edisi Teks. Tesis Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Mulyadi, Rujati. 1994. *Kodikologi Melayu di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Nasr, Hoessein. 1986. *Animal Symbolism in Warqa wa Gulshah*. London: World of Islam Festival.
- Omar, Asmah. 1991. *Bahasa Melayu Abad ke-16: Satu Analisis Berdasarkan Teks Melayu Aqa'id al-Nasafi*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka .
- Ricklefs, M.C. dan P. Voorhoeve. 1977. *Indonesian Manuscripts in Great Britain: A Catalogue of Manuscripts in Indonesian Languages in British Public Collections*. London: Oxford University Press.
- Robson, S.O.1988. *Principles of Indonesian Philology*. Holland: Foris Publication Series.
- Teeuw, A. 1988. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Wieringa, E.P. 1998. *Catalog of Malay and Minangkabau Manuscripts in the Library of Leiden University and Other Collections in the Netherlands*. Leiden: Legatum Warnerianum in Leiden University Library.

Lampiran

1. Cap



AJARAN DALAM BUKU-BUKU NTTI UNTUK WANITA SEBAGAI KONTROL PENGEMBANGAN FEMINISME DALAM MASYARAKAT

Sri Widati

Balai Bahasa Yogyakarta

Pengantar

Pada era komunikasi global saat ini semua informasi dari setiap penjuru dunia dengan mudah dapat masuk ke negara kita tanpa dapat dibendung. Dengan sistem jaringan komunikasi yang semakin canggih, baik pada jaringan media cetak maupun elektronik, sistem komunikasi antarnegara menjadi semakin terbuka. Komunikasi yang terbuka pada hakikatnya menyarankan kemudahan hubungan antarbangsa dan antar-informasi tentang berbagai aspek kehidupan. Bahkan, hampir setiap kali terjadi perkembangan baru akan dengan cepat pula masuk di berbagai negara dan berakulturasi dengan kebudayaan setempat. Batas negara dapat dikatakan menjadi sangat samar.

Di sektor kebudayaan pun hampir sulit dikenali kembali asal sumbernya sehingga memudahkan erosi kesadaran masyarakat terhadap nilai spesifik etniknya yang bersumber pada serat kebudayaannya. Nilai spesifik itu pada hakikatnya adalah unsur penting yang menjadi pembeda suatu etnik dengan etnik lainnya, misalnya etnik Jawa dengan etnik yang lain di negeri ini. Namun, di sisi lain kebudayaan memang memiliki sifat dinamis dan cenderung mengikuti perubahan yang terjadi pada elemen lingkungannya, terutama apabila kebudayaan itu sendiri memiliki celah-celah yang rentan. Pada bagian seperti itulah dimungkinkan informasi baru itu dapat masuk--dan seringkali tanpa dapat diseleksi ataupun dibendung--dan secara tiba-tiba tersadari telah menjadi bagian dari kebudayaan pribumi. Kita baru meyakini akan hal itu ketika pada awal Reformasi (1997) muncul berbagai kekacauan yang sangat krusial, sangat mengejutkan, karena munculnya sebuah fakta empirik baru yang menunjukkan bahwa bangsa kita telah terlepas dari akar budaya halusnyanya dan bergeser ke kebudayaan rakyat atau budaya kasar (baca budaya kecil). Hal itu membuktikan bahwa telah terjadi celah kosong dalam serat-serat budaya halus. *Undha-usuk* dalam berkomunikasi dalam bahasa Jawa hampir-hampir tidak tampak lagi karena pergeseran pemakaian ragam bahasa *krama* ke ragam *ngoko*. Proses penipisan budaya etnik inilah yang selanjutnya--dengan tanpa disadari--melepas beberapa mata rantai kultural yang menandai kita sebagai suatu warga etnik yang spesifik.

Khususnya pada masyarakat Jawa, fakta empirik tersebut ditunjukkan dengan lepasnya konsep *alus* dan *rasa* yang mendasari tatanan ke-

budayaan besar atau kebudayaan priayi. Ristriksi yang semula amat ketat melindungi sumber deontik seakan-akan katubnya terbuka lebar sehingga pengendalian diri yang diikat oleh konsep *alus* dan *rasa* pada budaya *adiluhung*--yang dianut kelompok priayi atau wong *luhur*--menipis. Akibatnya, keterbukaan yang menjadi ciri khas kebudayaan *wong cilik* tampak menonjol, menggantikan keterbatasan ekspresi yang mengekang kebebasan individu (bandingkan Koentjoroningrat, 1974:7,8). Konsep hidup baru pada awal era globalisasi yang menonjolkan kompetisi individu itu pada saat ini tampak lebih berterima oleh berbagai lapisan masyarakat karena tatanan lama yang disebarluaskan melalui tradisi lisan dan tradisi tulis--melalui buku-buku *piwulang* atau *niti*--dianggap sangat membatasi ekspresi dan tidak efektif lagi. Sayangnya, pembebasan diri itu dikenakan secara global, tanpa penyaringan. Banyak tatanan tradisional yang sebenarnya masih perlu dipertahankan ditolak untuk digantikan secara total oleh konsep yang lebih baru. Misalnya, demi demokratisasi, anak-anak muda tidak lagi menggunakan ragam *krama*--apalagi *krama inggil*--bila bercakap-cakap dengan orang yang lebih tua, apalagi dengan orang tuanya. Ragam *ngoko* dan bahasa Indonesia "ditugasi" menggantikan tingkat tutur yang kultural. Pergeseran sosial yang berlangsung secara cepat telah menghapus ciri hormat yang biasanya digunakan masyarakat Jawa kepada yang dituakan--yang terkandung dalam sistem tingkat tutur--dengan cara yang lain (Poedjosoedarma dkk, 1979:59--63).

Proses Penipisan Budaya dan Arus Kesadaran Feminisme

Globalisasi memang berpotensi positif bila ditilik dari tataran iptek, tetapi menjadi berpotensi negatif bila dampaknya meminimalisasi kesetiaan masyarakat pada kekayaan nilai-nilai budaya etniknya, terutama terhadap serat budaya spesifik, yang menunjukkan konsep dasar priayi, yaitu *alus* dan *rasa*.

Pada dasarnya informasi yang baru itu bersifat eksotik dan akan menimbulkan pertanyaan kepada serat budaya yang dianut sebelumnya. Keadaan ini, bila berlangsung secara lama, akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) pihak yang berkait, yaitu kelompok pendukung dan penentang. Pembaruan konvensi biasanya lebih berterima di lingkungan masyarakat elit berpendidikan formal menengah ke atas dan/atau kelompok yang berwawasan modern. Kadang-kadang keberterimaan itu berlangsung tanpa memperhatikan faktor negatif yang dimungkinkan muncul. Beberapa gejala yang menandai hal itu ialah menipisnya rasa hormat (*urmat*), tradisi gotong-royong digantikan dengan materialisme, kebersamaan digantikan dengan individualisme, yang semuanya menunjukkan terabaikannya konsep *alus* dan *rasa*. Padahal, perilaku itu amat khas karena sebagai tanda kultural etnik. Terlepasnya serat budaya itu tampak pada hubungan antarpersonal, misalnya, dalam sikap tutur yang kacau, yang berdampak pada lunturnya

sikap santun kepada sesama, serta lunturnya nilai *rasa* yang menjaga sikap ksatria yang semula dianggap luhur.

Hardjowirogo (1983:46--90) melihat hal itu dari gejala lenyapnya loyalitas masyarakat kepada negara, atasan, lembaganya,--bahkan kepada orang tua--dan lunturnya sikap jujur dan *sumarah*. Keadaan seperti itulah yang mungkin oleh Ranggawarsita disebut "jaman edan" karena yang tampak saat ini adalah penjungkirbalikkan tatanan-tatanan mapan. Ajaran pengendalian diri dan hidup tertata seperti yang tertuang dalam sumber-sumber deontik--berupa buku-buku *niiti* atau *piwulang*--hampir tidak pernah dilihat lagi karena ajaran modern yang berlandas kepada asas demokrasi dan logika itu saat ini dirasa lebih tepat dan berdaya guna.

Salah satu pembaruan yang mengejutkan konvensi budaya Jawa ialah tatanan "keselarasan" hubungan antara laki-laki (Ψ) dengan perempuan (Ξ) yang tampak terusik secara keras oleh arus kesadaran feminisme, khususnya sejak tahun 1970-an. Feminisme bukan hanya tuntutan kesetaraan atau emansipasi walaupun kedua istilah tersebut datang dari Barat. Feminisme lebih menonjolkan kesadaran individual yang seringkali dianggap radikal karena kecurigaan pandangan ini atas terjadinya diskriminasi pada suatu kelompok masyarakat tertentu (baca: terutama perempuan) sebagai akibat bias dari praktik patriarki. Patriarki yang menjadi bagian dominan dari kebijakan tatanan budaya etnik itu terlihat dengan jelas pada hampir semua aspek kehidupan masyarakatnya. Biasanya sangat kentara pada kehidupan, berupa kecenderungan dalam kebijakan internal yang memihak pada kelompok tertentu, yaitu laki-laki (Ψ). Radikalisme pada feminisme ditunjukkan dengan kesadaran jender pengikutnya berupa tuntutan pembongkaran dan penghapusan kepada pusat atau akar yang dirasa merugikan perempuan itu. Secara acak kelompok ini menganggap seluruh tatanan kebudayaan--termasuk bahasa masyarakat--berbias gender karena semuanya merupakan produk patriarkhis (bandingkan Rosaldo and Louise Lampere, 1974; Lackoff, 1978; Nurhadi, 1988; Vincent, 1982; Kwelju, 1991, 1992). Hal itu juga dapat diarahkan kepada lembaga agama yang secara acak dianggap berlaku diskriminatif terhadap perempuan (Ξ). Itulah sebabnya, dalam persebarannya di berbagai penjuru dunia, terutama di negara berkembang, gerakan kesadaran ini sering berbenturan dengan budaya tradisi dan agama, atau kepercayaan yang telah lama dianut dengan patuh oleh masyarakat setempat. Termasuk ketika kesadaran ini masuk di Indonesia, pada pertengahan abad ke-19, gerakan ini harus berhadapan dengan serat budaya etnik yang masih amat tegar menata berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk tatanan dalam hubungan antarpersona. Oleh karena itu, tidak semua pendukung arus kesadaran feminisme di setiap negara--terutama di negara-negara berkembang--dapat menerima secara utuh gagasan feminisme yang berasal dari kebudayaan Barat itu. Alasan dasarnya ialah karena keterikatan mereka pada beberapa serat budaya yang

disadari masih relevan di negerinya dalam kaitannya dengan nasionalisme (bandingkan Mulder, 1981). Radikalisme feminisme Barat yang berbenturan dengan hampir seluruh nilai-nilai tradisi itu ditakutkan akan menghapus identitas spesifik.

Kebudayaan etnik, pada hakikatnya, tidak turun begitu saja dari langit, tetapi dibangun melalui proses panjang dari waktu ke waktu hingga pada gilirannya disepakati secara konvensi. Dengan demikian, kebudayaan suatu etnik bukan hanya tatanan sesaat, melainkan merupakan tatanan yang historis, unik, dan menata suatu kelompok masyarakat secara kompleks. Spesifikasi masyarakat Eropa dan Asia yang terbangun atas dasar iklim, etos kerja, dan pandangan hidup, keadaan ekonomi, dan politik yang spesifik itu juga dapat amat berbeda dengan kebudayaan dalam masyarakat di negara berkembang. Perilaku yang di Eropa (Barat) dianggap menindas dan memeras perempuan (Ξ), mungkin sekali bagi perempuan (Ξ) di negara ketiga adalah bagian dari kesadaran dan kesetiaan, bahkan termasuk kewajiban. Atas dasar fakta tersebut, Bhasin dan Khan (edisi Indonesia, 1995:4; bandingkan Ruthven, 1985; Djajanegara, 2000:3--7) mencoba mendefinisikan istilah feminisme secara lebih umum, yaitu suatu arus kesadaran akan adanya penindasan atau pemerasan terhadap perempuan--baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja,--serta adanya kesadaran untuk mengubahnya.

Gerakan feminisme--dalam persepsi yang lebih lunak, yang disebut gerakan emansipasi--sebenarnya sudah mulai berembus dari negara Barat sejak akhir abad ke-19, dan mulai menunjukkan efektivitasnya di Hindia Belanda, terutama pada kalangan wanita elit berpendidikan Belanda. Pada kelompok ini sudah terjadi asimilasi kebudayaan pribumi dengan Barat (Belanda) selama waktu yang cukup lama sehingga penepisan serat kebudayaan etnik di lingkungan ini lebih awal terjadi. Pada diri Kartini, misalnya, penipisan serat-serat budaya tersebut didukung oleh kemahirannya dalam bahasa asing sehingga memperluas cakrawalanya melalui media ini. Hal itu tampak pada perilaku R.A. Kartini dan dialog tentang gagasan-gagasan emansipasinya yang dihimpun Abendanon. Di situ terbaca dengan jelas kesadaran dirinya pada asas kesetaraan laki-laki (Ψ) dengan perempuan (Ξ) di sektor domestik (dalam keluarga) dan di sektor publik (dalam masyarakat). Ia juga mulai memperbincangkan kesadaran dirinya sebagai wanita yang amat dibatasi geraknya oleh tradisi Jawa kepada kawan-kawannya orang Belanda, misalnya Stella, Ny. Abendanon Madri, dan Dr. Adriani karena ia merasa bahwa kehadiran wawasannya itu belum berterima di lingkungannya. Dengan penguasaan bahasa asing (Belanda dan sedikit Prancis) R.A. Kartini menjelajahi pandangan emansipasi itu melalui buku berbahasa Belanda dan Prancis. Penipisan kesadaran pada budaya etnik itu menjadikannya sebagai pionir mediator bagi masuknya informasi feminisme

pada waktu itu, yang dilakukannya melalui dialog lisan dan tertulis (Soelastin-Soetrisno, 1989; Toer, 1963: 109).²

Kartini mengaku bahwa penguasaan bahasa Jawanya sangat kurang sehingga menjadi kendala baginya dalam proses pemahaman nilai-nilai kultural dalam naskah Jawa yang berhuruf Jawa.³ Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa gagasan tentang emansipasi yang dibicarakan R.A. Kartini-bersama kawan-kawan Belandanya itu--masih dalam lingkup amat terbatas. Ia dapat dikatakan telah mendahului masyarakatnya. Lain halnya di Barat atau Eropa karena di sana feminisme bukan lagi isu, melainkan suatu kesadaran yang sedang diperjuangkan dengan keras dan disosialisasikan ke berbagai penjuru.

Sebagai daerah jajahan Belanda, di kalangan terpelajar isu emansipasi ini pun dengan cepat pula masuk di daerah-daerah Hindia Belanda.⁴ Hal itu ditandai dengan mulai banyaknya topik tentang perempuan di dalam beberapa rubrik media massa berbahasa Belanda, yang pembacanya masih terbatas pada kelompok elit berpendidikan Belanda pula (bandingkan Ras, 1979:2). Pro dan kontra tentang gerakan tersebut terlihat juga dalam beberapa buah karya sastra Jawa waktu itu, seperti dalam *Serat Rangsang Tuban* (1912) karya Padmosoesastra, *Serat Dharma Sanyata* (1917) karya R.Ngt. Kartasiswojo, *Katresnan* (1922) karya M. Soeratman, *Supraba lan Suminten* (1923) karya Kamsa, *Kirti Njunjung Drajat* (1924) karya Jasawidagda, *Gawaning Wewatekan* (1928) karya Koesoemodigda, dan sebagainya. Tema dasar yang digarap dalam buku novel tersebut dapat dikatakan sebagai ajang berpolemik masyarakat Jawa tentang dinamika budaya yang terjadi di tengah kehidupan masyarakatnya, terutama tentang posisi wanita dan pergeseran konsep hidup priyayi.

Pada periode pacsa-R.A. Kartini isu tentang emansipasi perempuan (E) itu berkembang, dan pada tahun 1970-an secara jelas mengarah kepada pembongkaran ketidaksetaraan gender, menentang berbagai praktik

² Banyak orang mengatakan (termasuk Harsya Bachtiar) bahwa R.A. Kartini masih gagal dalam mewujudkan perjuangan emansipasinya karena ia bersedia menjadi istri kedua.

³ Dalam buku *Panggil Aku Kartini Saja* (1963:81, 82) Pramudya menyebutkan bahwa Kartini mengaku sempat belajar mempelajari *Serat Wedhatama*, tetapi ia merasa sulit menangkap artinya. Ia juga tidak pernah menulis dalam bahasa Indonesia. Itu berarti bahwa ia tidak membaca naskah Jawa dan naskah Indonesia yang pada waktu itu sudah mulai banyak dicetak.

⁴ Pada tahun 1965, paman Kartini, R.M.A. Tjandranegara (bupati di Rembang) menuliskan catatan kisah perjalanannya ke Belanda dengan judul *Cariyos Bab Lampah-lampahipun Raden Mas Poerwalelana*. Jenis sastra yang digunakannya adalah jenis fiksi Barat baru yang menekankan fakta-fakta empirik. Ia juga tidak tahu bahwa di masanya juga telah muncul pengarang pria (Soerjawidjaja) yang menulis sebuah karya fiksi berjudul *Mbok Randha Guna Wacana*, yang mulai mengangkat masalah wanita di dalamnya.

patriarki--dengan dukungan gerakan feminisme yang bergerak pada tataran kesetaraan jender (Fakih, 2000). Gerakan feminisme memang tidak hanya menuntut kesetaraan antara laki-laki (Ψ) dan perempuan (Ξ) (emansipasi), tetapi juga menuntut pengembalian semua hak (dan kewajiban) perempuan yang telah dilesapkan oleh tradisi patriarkhi. Namun, yang penting dicatat ialah bahwa hingga kini persoalan pro dan kontra terhadap kesadaran feminisme ini terus berlanjut. Selain itu, terdapat tanda-tanda dalam masyarakat Jawa--dari kelompok pro dan kontra feminisme--ini untuk menunjukkan perjuangan dalam mempertahankan ideologi masing-masing. Di kelompok yang kontra tampak berupaya untuk mencari kembali akar budayanya yang terlepas, terutama yang berkaitan dengan perempuan (Ξ).

Kontroversi tentang Ajaran untuk Perempuan (Ξ) dalam Buku-Buku Niti

Serat budaya yang melandasi konsep hidup masyarakat Jawa tersebut hanya dapat ditemui dalam buku ajaran (*niti*) yang ditulis di masa pemerintahan kerajaan Mataram Islam dahulu, seperti dalam *Serat Panitisastra*, *Wedhatama* (K.G.P.A.A, Mangkoenegara IV), *Wulangreh* (Sunan Pakoeboewono IV), dan *Serat Centhini* yang berisi ajaran atau *niti* (*wulang*) umum ini sengaja ditulis untuk diajarkan kepada keluarga raja dan rakyat (*kawula*) dalam rangka menebalkan jati diri sebagai masyarakat Jawa. Dalam pengantar *Wulang Dalem Warni-warni* karya Pakubuwono IX disebutkan bahwa ajaran dalam *niti* atau buku *wulang*, misalnya *Panitisastra*, itu dibacakan pada setiap *paseban* sebagai tuntunan kepada *sentana dalem* (kerabat raja) (lihat *Panitisastra* pupuh 1, *dhandhanggula*, bait 24). Adapun *niti* khusus untuk perempuan--misalnya *Serat Candrarini* (versi Rangawarsita dan versi Mangkoenegara IV), *Serat Wulang Estri*, (K.G.P.A.A. Pakoealam II), *Wulang Reh Putri* (Mangkoenegara), dan *Serat Wulang Putri*--diajarkan secara khusus kepada kaum perempuan di *kaputren*, yang selanjutnya jdisosialisasikan ke masyarakat luas.

Pada dasarnya, ajaran pokok dalam buku *niti* yang khusus itu mengarahkan perempuan (Ξ) mendasari perilaku mereka kepada konsep *alus* dan *rasa*. Hal ini adalah tindak lanjut dari pandangan patriakat yang mengedepankan laki-laki (Ξ) pada sektor publik yang "dinilai" penuh kekerasan, sedangkan perempuan (Ξ) ditempatkan pada sektor domestik, yaitu tempat yang berkebalikan, yaitu yang penuh dengan kelembutan, kesabaran, dan kasih. Dalam kaitannya dengan posisi di muka/depan untuk laki-laki (Ψ) dan perempuan (Ξ) di posisi rumah (belakang) ini persepsi secara global terhadap wanita sering diabaikan. Padahal, dalam *Bausastra Jawa* (Poerwadarminta, 1939:56, 515; 579) kata *istri* bersinonim dengan *garwa*, *bojo*, dan *rabi*, *semah*, dan *somah* yang artinya ialah *sisihane wong bebojoan* atau 'pasangan, atau pendamping orang yang menikah'. Jadi, seorang istri bukanlah sekadar *kanca wingking* 'teman di belakang', tetapi kawan, atau pendamping, atau pasangan hidup dalam pernikahan. Hal itu ditegaskan

dengan adanya kata *garwa* yang diartikan sebagai akronim dari kata *sigaraning nyawa* 'belahan jiwa'. Namun, hubungan egaliter antara laki-laki (Ψ) dan perempuan (Ξ) ini menjadi taksa ketika muncul kata baru, yaitu *simah*. Kedekatan unsur konsonan dalam silabelnya menyarankan kedekatan makna dengan kata *somah* dan *simah*. Akan tetapi, menurut Subalidinata (1968), bahwa kata *simah* adalah akronim dari *isine omah* yang berarti 'isi rumah'. Di sinilah, diperkirakan telah terjadi juga lepasnya mata rantai-mata rantai hubungan makna antara laki-laki (Ψ) dan perempuan (Ξ) dalam ikatan pernikahan itu. Demikian juga halnya dengan konsep tentang hubungan laki-laki (Ψ) dan perempuan (Ξ) yang dianggap sangat berpihak kepada laki-laki (Ψ).

Serat Candrarini, misalnya, sebenarnya tidak hanya menekankan agar perempuan (Ξ) bersikap sabar, *nrima*, tawakal, pasrah, atau penekanan kepada konsep 'setia'. Dalam naskah itu pula tercantum sikap hidup cermat, tanggap, dan terampil, seperti yang di-*candra*-kan oleh R. Ng. Ranggawarsita dan K.G.P.A.A. Mangkoenegara IV dalam *Serat Candrarini* itu. Oleh kedua pengarang besar Jawa ini penempatan Gandawati yang pandai pada posisi keempat dan Srikandhi yang cermat dan cekatan itu pada posisi kelima bukanlah semena-mena. Posisi keempat dan kelima adalah posisi akhir atau penutup dan karena sifatnya yang berkebalikan dengan sifat tipologis-tradisional dari ketiga istri Arjuna yang dahulu (Sembadra, Manuhara, Ulupi), yaitu lembut, halus, sabar, *sumarah* dan pandai meladeni suami, maka kedua posisi penutup oleh hadirnya sikap Gandawati dan Srikandhi ini menisyaratkan sebagai bagian yang penting, yang harus digarisbawahi. Namun, pembaca buku *Serat Candrarini* yang mungkin sebagian besar telah mengikuti dengan patuh garis patriarkat--dapat laki-laki maupun perempuan--seringkali atau cenderung mengalpakan atau melesapkan *candra* (gambarn) dari watak atau sikap kedua tokoh "feminis Jawa" dari istri-istri Arjuna ini. Bahkan, oleh kaum feminis radikal ajaran dalam buku *niti* ini, bersama *niti* lain tentang perempuan seringkali dihujat sebagai sumber bencana bagi perempuan dan sekaligus hambatan sosialisasi feminisme. Di sisi lain, poligami yang dilakukan Arjuna adalah gambaran tradisi tipologis laki-laki bangsawan Jawa, yang secara tersirat menyarankan egoisme dan rasa pemilikan yang absolut dari laki-laki (Ψ) terhadap perempuan (Ξ). Dari sudut pandang feminisme hal itu memang dianggap sebagai sumber penindasan hak asasi perempuan (Ξ) dalam keluarga dan masyarakat. Namun, ironisnya, ajaran dalam *niti* yang tetap ber-sumber pada konsep *alus* dan *rasa* ternyata masih banyak diikuti dengan setia oleh sebagian besar masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Ajaran untuk perempuan (Ξ) itu sebenarnya tidak hanya ditulis dalam buku khusus, tetapi kadang-kadang juga menjadi bagian dari buku-buku *niti* untuk umum, misalnya dalam *Serat Wulangreh* dan *Serat Centhini*. Kecuali dalam *Serat Panitisastra*--yang ditulis dalam zaman Majapahit--

terjadi perbedaan yang kontras bila ajaran untuk wanita itu menjadi bagian dari buku *niti* untuk umum. Dalam buku *niti* untuk umum itu posisi perempuan sejajar dengan posisi laki-laki, yang wajib dihormati dengan tanpa perbedaan. Berikut ini beberapa kutipan ajaran untuk perempuan dalam buku *niti* untuk umum.

(1)

*Poma-poma wekasingsun,
mring kang maca layang iki,
lair batin denestokna,
saunine layang iki,
lan den bekti mring wong tuwa,
ing lair prapta ing batin.*

(Pangkur, bait 16)

‘Perhatikan pesanku,
kepada yang membaca surat (naskah) ini,
laksanakan sungguh-sungguh,
apa pun isi naskah ini,
dan berbaktilah kepada orang tua,
dari lahir sampai bati.’

(2)

*Pramilane rama ibu denbekteni,
kinarya jalaran,
anane badan puniki,
weruhken padhang hawa.*

(Maskumambang, bait 10)

‘Oleh karena itu hormatilah ayah ibu,
sebagai perantara,
kehadiranmu ini,
hingga dapat menikmati kehidupan.’

(3)

*Saking ibu rama margane udani,
mila maratuwa lanang,
wadon denbekteni,
aweh rasa ingkang nyata.*

(Maskumambang, bait 13)

‘Dari ibu bapak asalmu melihat (hidup),
karenanya mertua laki-laki,
perempuan hormatilah,
dengan cita rasa sesungguhnya.’

Dari kutipan tersebut semakin nyata bahwa konsep *rasa* yang mendasari kesadaran hormat kepada orang tua (siapa pun) amat kuat diajarkan dalam *Serat Wulangreh*. Dalam kaitannya dengan ajaran ini, dalam hubungan antarmanusia, orang Jawa menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga sehingga perempuan wajib menghormatinya. Namun, dalam hubungan antara anak dengan orang tua, perempuan (Ξ) ditempatkan pada posisi sejajar dengan laki-laki (Ψ).

Sikap masyarakat ini menandai proses akulturasi antara unsur kebudayaan pribumi dan unsur kebudayaan asing itu seringkali membuka sela-sela dalam serat budaya etnik. Rumpang itulah yang mengizinkan dan sekaligus faktor pendorong marginalisasi budaya etnik ke tepi kesadaran masyarakatnya demi tuntutan penyetaraan individu dalam konsep kebudayaan global. Proses akulturasi tersebut di beberapa negara dapat berlangsung cepat. Sebaliknya, beberapa negara masih memiliki akar budaya kuat, terutama yang tersimpan dalam sumber deontik buku *niti*-nya, seperti di Jawa--seringkali ajaran-ajaran di dalamnya menjadi sistem kontrol yang menolak dengan kuat masuknya kesadaran feminisme radikal.

Hal keberterimaan R.A. Kartini terhadap konsep emansipasi perempuan pada zamannya terjadi karena dua hal. Pertama, ia terampil dalam beberapa bahasa asing (Belanda dan Prancis) yang menyebabkan ia mampu membaca banyak referensi tentang emansipasi dari luar. Kedua, di sisi lain, dengan tipisnya pengetahuannya tentang serat budaya etniknya--dan ia tidak pernah menulis dalam bahasa daerah--ia hampir tidak mengenal karya pengarang Jawa yang sezaman yang banyak terbit, selain *Serat Wedhatama*. Kedua hal tersebut hampir sama dengan kondisi masyarakat kita saat ini di tengah semakin canggihnya sistem media massa cetak dan elektronik. Kartini ialah simbol kelompok perempuan (Ξ) dari elit berpendidikan tinggi yang menguasai sedikitnya bahasa asing, bahasa Inggris. Di sisi yang lain, masyarakat Jawa yang mayoritas jumlahnya lebih besar. Mereka adalah kelompok perempuan (Ξ) menengah ke bawah yang berpendidikan menengah ke bawah, yang sebagian besar masih taat pada *angger-angger* yang digariskan dalam buku *niti* atau melalui ajaran sehari-hari dalam keluarga dan komunitasnya. Penyebaran sastra lisan dari mulut ke mulut juga masih berlangsung dalam kelompok ini sehingga sosialisasi bahwa wanita harus setia, sabar, *legawa* kepada nasib masih dapat didengar dalam sosialisasi semacam ini. Dalam sastra tulis, para pujangga kerajaanlah yang pada umumnya diberi kekuasaan oleh raja untuk menuliskan *angger-amgger* dan *piwulang* bagi masyarakat.

Di lembaga pemerintahan Jawa kerajaan memiliki tradisi kepujangaan di keraton dan tradisi itu juga digunakan untuk menurunkan pranata penting bagi rakyat. Mereka rupanya sangat menyadari arti sastra (*sas* dan *tra*) adalah alat untuk mengajar, yang sejajar dengan pandangan filsuf Itali (Horatio) tentang fungsi pokok sastra, yaitu fungsi *dulce* (menye-

nangkan) dan *utile* (berguna). Pandangan itu ternyata sangat efektif karena melalui sastra jenis *niti* atau *piwulang* ini tercipta pranata penting untuk mengarahkan jalan hidup masyarakat Jawa. Hingga kini pun ajaran dasar dalam buku-buku *niti* masih dapat dirunut dalam perilaku sebagian besar masyarakat Jawa dari kelas sosial menengah ke bawah.

Dalam sastra Jawa, *niti* tertulis yang pertama ialah *Panitisastra* -- yang ditulis pada masa Majapahit atau abad ke-8--dan di dalamnya terkandung banyak *panyandra* untuk perempuan (☿) dan beberapa ajaran khusus untuk perempuan (☿) pula. Berikut ini contoh *panyandra* dan ajaran bagi perempuan (☿) yang memang mengandung bias laki-laki.

(1)

.....
lamung mukyaning wanudya,
tan lyon gemuhing kang payudara kalih,
ingema neng papreman.

(pupuh V, bait 5)

‘.....
 Keutamaan bagi perempuan,
 Tida lain sintalnya kedua payudara,
 Untuk ditimang di ranjang.’

(2)

.....
Lamun mungguh ing wanudya yen alaki,
Oleha anak lanang.

(pupuh IV, bait 3)

‘Adapun bagi seorang bagi seorang wanita apabila bersuami,
 hendaknya mendapat anak laki-laki’

Ketika Surakarta mengalami krisis sosial (abad ke-18), naskah *Paniti-sastra* itu disalin kembali tanpa perubahan dengan tujuan agar dapat sebagai pegangan hidup masyarakat. Sejak itu kerajaan membentengi masyarakatnya secara spiritual melalui *niti*, baik yang bersifat umum maupun khusus (untuk laki-laki/putra raja [♂], untuk perempuan [♀], dan untuk anak muda). Begitu juga halnya dengan situasi yang dianggap kacau. Pada saat ini banyak masyarakat Jawa yang mencoba merunut kembali akar budaya leluhurnya karena mereka merindukan “kedamaian” akan membawa jiwa mereka kembali pada ketenangan masa lalu. Sastra Jawa sejak peralihan abad ke-19 menuju abad ke-20 menunjukkan gambaran kegalauan masyarakatnya itu sebagai fakta empirik yang menonjol. Secara

perbandingan, situasi kacau (*chaos*) saat ini juga bermiripan dengan yang pada terjadi zaman kerajaan Mataram sejak abad ke-18, yang berlanjut hingga abad ke-19, yaitu ketika kerajaan benar-benar mengalami krisis kekuasaan teritorial akibat tekanan kolonial Belanda, banyak *niti* ditulis. Pada saat itu perhatian kerajaan beralih membentengi *kawula*-nya secara politik ke benteng mental-spiritual. Cara efektif penguasa kerajaan dalam mendidik spiritual masyarakatnya paling ialah dengan menciptakan *angger-angger* atau aturan secara tidak langsung, yaitu melalui sastra.

Di era globalisasi saat ini isu tentang perempuan semakin berkembang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang masyarakat Jawa sebagai bagiannya. Keberterimaan unsur budaya terhadap arus kesadaran baru ini pada setiap negara memang tidak sama, bergantung pada kesepakatan kulturalnya, perkembangan sosial-politik negara, sumber daya manusia bangsa, dan tingkat ekonomimasyarakat. Bahkan, kata seorang sosiolog, Hippolyte Taine (dalam Damono, 1978:21) faktor perbedaan iklim pada suatu daerah pun dapat menyebabkan suatu kebudayaan masyarakat berbeda.

Simpulan

Laju perkembangan informasi dunia memang tidak dapat dibendung. Begitu pula halnya dengan arus kesadaran feminisme sebagai kesadaran baru terus mengalir tanpa henti melalui berbagai media elektronik dan buku itu, hampir setiap hari muncul. Situasi seperti ini di satu sisi menciptakan keadaan kacau (*chaos*) di tengah masyarakat Indonesia karena banyak yang gamang kepada ideologi baru yang berasal dari Barat itu. Namun, kesadaran baru itu memang diperlukan untuk mengoreksi kesadaran lama yang tidak relevan lagi di abad ini. Ideologi lama yang telah mapan itu memang tidak muncul begitu saja di tengah sebuah komunitas, tetapi melalui proses dialog panjang yang tanpa henti dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kesadaran baru seperti feminisme harus beradaptasi dengan budaya etnik lokal.

Pergeseran demi pergeseran yang mengarah pada kesetaraan gender memang terus terjadi dalam masyarakat, tetapi pada kenyataannya, pergeseran ideologi hanya berterima di lingkungan tertentu. Hasil riset di mana pun tetap menunjukkan fakta bahwa pergeseran ideologi di sejumlah negara berkembang (termasuk Indonesia) itu berlangsung lambat, terutama bila dilihat dari sudut pandang atau tuntutan feminisme radikal. Fakta dalam karya sastra Jawa yang ditulis hingga sastra modern sekarang ini tetap cenderung merespon hal tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun menipis, kesadaran kepada serat budaya etnik masih efektif dalam menanggapi masukan informasi budaya dari luar.

Feminisme bukan harus dihindari, melainkan harus dijalankan sesuai dengan budaya masyarakatnya. Artefak dalam sastra Jawa me-

nunjukkan bahwa tidak semua ajaran untuk perempuan (E) menolak kesadaran feminisme. Namun, pandangan umumnya, masyarakat cenderung melihatnya secara global yang mengedepankan unsur dominan dari sistem budaya patriarkat. Pandangan yang telah sangat lama dipegang itu memang tidak mudah dihapus, dan pandangan itulah yang dianggap menghambat laju kesadaran feminis. Masyarakat Jawa hendaknya kembali mengamati lebih dalam aspek kultural etniknya agar mengerti secara renik serat budayanya yang positif dan yang negatif. Rasanya, pada saat ini gerakan feminisme di Indonesia mulai menyadari hal itu dan mengarahkan diri kepada keselarasan jender, dengan meminimalisasi bias jender ke arah laki-laki (Ψ). Banyak contoh dalam kehidupan masyarakat Jawa saat ini yang menunjukkan penolakan kepada kekuasaan absolut laki-laki (Ψ) dan bergerak ke arah pemberdayaan perempuan (E). Hal itu digambarkan dengan jelas oleh para pengarang sastra Jawa, baik pria maupun wanita, dengan tawaran solusi yang mengarah kepada hubungan serasi atau selaras antara kedua jenis kelamin ini, seperti yang disebutkan dalam *Bausastra Jawa*, dan seperti yang terselip dalam ajaran pada beberapa buku *niti*. Dengan demikian, apabila hal itu berlangsung secara baik, pada masa depan nanti ajaran dalam buku *niti* tersebut menjadi penuntun bagi kaum feminis Indonesia dalam menyetarakan peran perempuan (E). Dengan cara seperti itu, feminisme di Indonesia akan menjadi aliran feminis yang khas, dan yang berbeda dari feminisme Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basin, Kamla dan Nighat Said Khan. 1993. *Feminisme dan Relevansinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Kalyanamitra.
- Damono, Sapardi Djoko. 1978. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hardjowirogo, Marbangun. 1983. *Manusia Jawa*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Djajanegara, Soenarjati. 2000. *Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lackoff, Robin. 1975. *Language and Woman's Place*. New York and London: Harsper & Row Publisher.
- Mulder, Niels. 1981. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press dan Sinar Harapan.

- Poedjosoedarma, Soepomo. 1979. *Tingkat Tutar Bahasa Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1939. *Bausastra Jawa*. Groningen, Batavia: J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschapij.
- Ras, J.J. 1979. *Javanese Literature since Independence*. The Hague: Martinus Nijhof.
- Ruthven, K.K. 1985. *The Feminist Literary Criticism: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sulastin-Sutrisno, 1979. *Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsanya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rosaldo, Michelle Zimbalist, dan Louise Lamphere. 1974. *Woman, Culture, and Society*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Toer, Pramudya Ananta. 1963. *Panggil Aku Kartini Saja*. Jakarta: Pembangunan.
- Vincent, Monica. 1982. *A Woman Place?*. Harlow, Essex: Longman Group Limited.
- Wellek, Renne dan Austin Warren. 1956. *Theory of Literature*. New York and London: Harcourt Brace & World Inc.
- Widati, Sri dkk. 2001. *Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern Periode Prakemerdekaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

LAPORAN SIDANG

- Hari, Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2003
- Judul Makalah : 1. Surat Melayu Beriluminasi sebagai Sumber Kajian Interdisipliner
2. Ajaran dalam Buku-buku *Niti* untuk Wanita sebagai Kontrol Pengembangan Feminisme dalam Masyarakat
- Pemakalah : 1. Mu'jizah
2. Sri Widati
- Pemandu : Abdul Rozak Zaidan
- Pencatat : 1. Supriyanto Widodo
2. Junaiyah

TANYA JAWAB

- Pertanyaan:** Sri Rahayu
Serat *Niti* dapat sebagai penghamat feminisme radikal. Sering feminis tidak hanya wanita, tetapi juga pria, misalnya Bapak Sindunoto. Apakah feminisme selalu negatif? *Simah* tidakkah untuk istri, tetapi juga untuk suami, atau *simah* itu netral. Bagaimana pendapat Ibu?
- Pertanyaan:** Agus Joko Purwadi (Universitas Bengkulu)
Saya sangat setuju jika kesetaraan jender digerakkan karena saya bisa melakukan pekerjaan perempuan dan perempuan dapat mengerjakan pekerjaan laki-laki. Ada satu hal yang mengganggu pikiran saya: masalah goda-menggodanya. Perempuan yang berpakaian seronok tidak mau dikatakan penggoda, tetapi apabila ada perempuan berpakaian rapi, lalu digoda laki-laki, saya setuju laki-laki itu dikebiri. Bagaimana tanggapan Ibu?
- Pertanyaan:** Medy Lukito (Penulis)
Apa pendapat Ibu tentang penulis perempuan yang menulis secara vulgar? Bagaimana dengan gerakan feminisme yang vulgar. Jika tidak layak untuk umum, apa yang harus kita lakukan?
- Pertanyaan:** Yulita Fitriana (Balai Bahasa Pekanbaru)
Surat beriluminasi itu penuh dengan gambar. Apakah gambar itu mempunyai makna atau tidak? Apakah ada motif khas iluminasi Riau?

5. **Pertanyaan:** Jonner Sianipar (Balai Bahasa Jayapura)
Apakah kembang ini selalu hadir dalam naskah beriluminasi? Apakah ada surat yang tidak ada gambar kembang? Apakah surat yang bergambar kembang itu tepat untuk surat diplomasi?
6. **Pertanyaan:** Yus Rusyana (UPI Bandung)
 - a. Surat bergambar dapat didekati dari berbagai sudut, misalnya dari sudut budaya, pengirim, teks, yang dikirim, dan suasana batin.
 - b. Mengapa surat beriluminasi banyak berisi puji-pujian. Apakah isi surat itu mencerminkan budaya pengirimnya atau pengirim itu ada dalam penguasaan yang dikirim?
7. **Pertanyaan:** Rodi (Blitar)
Apakah penulis surat *niti* selalu pria. Menurut saya sastra lama tidak selalu bagus.
8. **Pertanyaan:** ... (Bandung)
 - a. Naskah dipandang sebagai *codex unicus*. Jika ada naskah yang korup, edisi teks seperti apa yang akan dihasilkan?
 - b. Bagaimana bentuk kajian teks yang sudah mengalami penyalinan dengan berbagai varian?
 - c. Apakah dalam naskah varian munculnya gambar-gambar itu merupakan kreasi penyalin?

Jawaban: Mu'jizah

Sampai saat ini surat beriluminasi dari Riau kurang dalam hal kuantitas. Apakah iluminasi itu bermakna, itulah yang akan diteliti. Yang jelas, iluminasi itu bukan hanya sekadar untuk keindahan, tetapi pasti punya makna. Itu semua pasti ada maknanya. Apakah ada kekhasan surat Riau. Pola-polanya baru dikumpulkan dan belum dapat ditetapkan motifnya secara rinci. Yang dari Madura, misalnya, mudah dilihat polanya, begitu juga yang dari Palembang.

Untuk Pak Jonner: Memang benar surat beriluminasi didominasi bunga. Karena yang saya teliti itu surat-surat formal, saya yakin surat-surat itu bukan surat cinta, walaupun dihiasi bunga-bunga. Apakah gambar bunga itu tepat untuk hubungan diplomasi, itulah yang terjadi.

Untuk Pak Yus: Dalam surat ini ada dua alat komunikasi yang digunakan, yakni gambar dan teks. Ini bisa dilihat sosial budayanya. Dari bahasa yang dipakai, feodalisme begitu kental, misalnya untuk Gubernur Jenderal Batavia dipakai *Kangjeng*.

Untuk penanya dari Bandung: Untuk naskah *codex unicus* memang tidak ada penyalinan. Kalau terjadi korup, saya tidak akan dengan begitu saja menghilangkan kata yang dianggap korup itu. Kata yang dianggap

korup itu belum tentu benar-benar korup pada masanya dan saya tidak mau kehilangan data sejarah. Oleh karena itu, pada penelitian awal semua akan saya lihat secara rinci agar saya dapat melihatnya secara rinci. Memang ada gambar yang benar-benar mendukung teks. Tentang naskah varian harus dianggap sebagai naskah yang berbeda. Semua itu memang naskah yang berbeda.

Jawaban: Sri Widati

Sinonim dari kata *bojo* itu *semah*, bisa laki-laki bisa perempuan. *Simah* akronim dari *isining omah*, sebagai simbol seperti halnya *munthu* dan *lemper*. Kata *semah* juga masih berlaku. Ketika mengatakan *simah*, kita sebenarnya sudah mengadakan pembagian fungsi. Masyarakat Jawa sebetulnya egaliter, perbedaan laki-laki dan perempuan tidak pernah disebutkan. Sekarang gerakan perempuan sudah bergerak ke kesetaraan gender. Dalam sastra Jawa, roman *Katresnan* ditulis oleh laki-laki, demikian juga *Kembang Kapas*. Saya setuju gerakan feminisme tidak hanya dilakukan oleh perempuan. Sudah sejak lama kesetaraan gender itu ditampilkan dalam sastra Jawa, seperti yang ditampilkan oleh Suparta Brata. Dalam karya sastra yang ditulis laki-laki berbeda endingnya dengan yang ditulis perempuan.

Untuk Mbak Medy Lukito: Sastra wangi memang sedang marak, dan itu merupakan arus massa. Biarkanlah masyarakat yang menilai. Apakah akan langgeng atau tidak, seperti Inul banyak dibicarakan orang, itu sekadar budaya masal.

Untuk Pak Rodi: Benar, serat-serat *nitik* ditulis oleh kaum pria. Akan tetapi, ada yang ditulis kaum wanita, misalnya *Babad Nitik Mangkunegara I*, ditulis oleh perempuan. Dalam *Babad Nitik Mangkunegara I* ini diceritakan kehebatan tentara wanita pada masa Magkunegara I. Di samping itu, diceritakan pula tugas keperempuanan yang dilakukan oleh tentara wanita tersebut. *Babad Celereng* juga ditulis oleh seorang perempuan. Memang pujangga pada masa itu mayoritas laki-laki dan diangkat oleh raja. *Serat Centini* memang sering disebut sebagai ensiklopedi dan seksologi Jawa.

MULTIKULTURALISME SASTRA INDONESIA MODERN MEMANTAPKAN PERAN SASTRA INDONESIA MODERN DALAM MENGHADAPI BUDAYA GLOBAL

Puji Santosa

Pusat Bahasa, Jakarta

ABSTRAK

Pemahaman multikulturalisme dalam sastra Indonesia modern tidak jauh berbeda dengan pluralisme agama. Berbagai-bagai agama di Indonesia itu dapat dipersatukan dengan sikap toleransi beragama dan menghormati semua agama. Artinya, setiap pemeluk agama menghormati hak dan kewajiban pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Demikian halnya dengan sastra Indonesia modern, berbagai-bagai kebudayaan yang terdapat dalam sastra Indonesia modern pun--sejak kelahirannya, seputar awal abad kedua-puluh hingga kini--dapat dipersatukan dengan sikap tetap teguh menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sebagai sarana pengucapan sastra Indonesia modern. Artinya, berbagai latar sosial-budaya pengarang, kandungan berbagai budaya dalam sastra, dan berbagai teori pendekatan dalam mengkaji sastra Indonesia modern mampu sebagai wadah temu budaya dan temu wawasan pembaca sastra di Indonesia.

Multikulturalisme dalam sastra Indonesia modern dapat memantapkan peran sastra Indonesia modern dalam menghadapi budaya global. Sebab, multikulturalisme sastra Indonesia modern itu meliputi (1) pemakaian laras budaya bahasa Indonesia, (2) penggalian nilai-nilai budaya sendiri atau budaya lokal, (3) peramuan pengaruh budaya asing sebagai dampak budaya global, dan (4) penerimaan atau penyaringan budaya modern atau global dalam kehidupan bersastra. Keempat unsur budaya tersebut mampu memperkuat persatuan bangsa Indonesia di tengah ancaman disintegrasi bangsa dalam rangka menghormati perbedaan dan mengedepankan rasio. Sikap menghormati perbedaan itulah yang mampu memantapkan peran sastra Indonesia modern dalam menghadapi budaya global.

Gelombang budaya global menghantam budaya-budaya lokal dan regional tanpa pandang tempat dan waktu. Di mana pun dan kapan pun, termasuk di Indonesia, terus-menerus datang budaya global yang memengaruhi perilaku kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dunia semakin mengecil, persaingan semakin tajam,

informasi semakin canggih, dan pasar bebas pun mulai merasuki kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Salah satu alternatif sebagai penangkal budaya global itu adalah mengapresiasi sastra Indonesia modern. Sastra Indonesia modern menampakkan adanya multikulturalisme. Hal itu jelas mencerminkan adanya perbedaan aspirasi, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan wawasan yang tetap dipersatukan dengan laras bahasa Indonesia sebagai sarana pengucapan sastra Indonesia modern dan sikap menghormati perbedaan itu.

Kata Kunci: multikulturalisme, sastra Indonesia, laras budaya bahasa Indonesia, penggalian nilai-nilai budaya sendiri atau budaya lokal, peramuan pengaruh budaya asing sebagai dampak budaya global, dan penerimaan atau penyaringan budaya global, serta memperkuat persatuan bangsa Indonesia sebagai daya upaya memantapkan peran sastra Indonesia modern dalam menghadapi budaya global.

Pendahuluan

Multikulturalisme dapat diartikan ‘berbagai-bagai kebudayaan yang berbeda-beda di dalam suatu masyarakat’. Inti dari multikulturalisme adalah keberagaman. Seperti halnya pengertian pluralisme agama, yaitu berbagai agama dan berbeda-beda di dalam suatu masyarakat. Demikian juga dengan multikulturalisme dalam sastra Indonesia modern, yaitu berbagai kebudayaan yang terdapat dalam sastra Indonesia modern.

Pluralisme agama di Indonesia dapat dipersatukan dengan adanya toleransi umat beragama dalam menghormati semua pemeluk agama, yang berarti menghormati perbedaan agama dengan mengedepankan pertimbangan rasio. Keberadaan bangsa Indonesia pun bersifat multikultural dan ternyata dapat dipersatukan dengan sikap menjunjung tinggi semboyan “bhineka tunggal ika”. Multikulturalisme dalam sastra Indonesia modern pun dapat dipersatukan dengan sikap tetap menjunjung bahasa persatuan, yaitu pemakaian laras budaya bahasa Indonesia dari berbagai pengarang di seluruh antero pelosok negeri ini, sebagai wahana pengucapan sastra Indonesia modern. Semangat untuk tetap menjunjung bahasa Indonesia seperti ikrar Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, menjadi dasar keutamaan yang dipegang teguh oleh setiap pengarang sastra Indonesia modern dari kelahirannya hingga kini. Dengan sikap tetap menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sastra Indonesia modern pun tetap eksis dan menjadi perekat antarsuku, antaragama, antarras, dan antargolongan dalam memahami budaya bangsa, baik yang bersifat lokal maupun global, serta sejarah intelektual bangsa.

Sastra Indonesia modern dapat diartikan sebagai 'karya sastra yang aslinya ditulis dalam bahasa Indonesia setelah mendapat pengaruh kebudayaan asing' (KBBI, 1988:787)¹. Pendapat itu diperkuat oleh Ajip Rosidi (1991:755) yang menyatakan bahwa sastra Indonesia adalah 'karya sastra modern sebagai hasil pengaruh kebudayaan dan kesusastraan Barat yang ditulis dalam bahasa Indonesia, yang mulai muncul pada dasawarsa kedua pada abad kedua puluh'. Kedua batasan tentang sastra Indonesia modern itu dipertegas oleh hasil Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII, Jakarta, 26--30 Oktober 1998 sebagai berikut.

Selama ini, dengan bersumber pada budaya sendiri dan pengaruh-pengaruh asing yang sudah diramu ke dalam budaya Indonesia, masyarakat Indonesia telah mampu menghasilkan banyak karya sastra Indonesia dan daerah. Kemampuan untuk menggali nilai-nilai budaya sendiri dan meramu pengaruh asing ke dalam banyak karya sastra Indonesia itu merupakan modal dasar apresiasi dan kreativitas untuk menciptakan kehidupan sastra yang lebih baik."

Dengan mengacu pada ketiga pernyataan tentang sastra Indonesia modern tersebut, kondisi sastra Indonesia sejak kelahirannya, seputar awal abad dua puluh, hingga kini berada dalam situasi multikulturalisme. Secara substansial pernyataan tentang sastra Indonesia modern di atas mengandung unsur budaya yang beragam, antara lain, (1) pemakaian laras budaya bahasa Indonesia, (2) penggalian nilai-nilai budaya sendiri, (3) peramuan pengaruh budaya asing sebagai dampak budaya global, dan (4) penerimaan atau penyaringan budaya modern dalam kehidupan sastra Indonesia modern sehingga keempat unsur budaya tersebut menjadi modal dasar memperkuat persatuan bangsa Indonesia di tengah ancaman disintegrasi bangsa. Dengan bergulirnya era reformasi dan tuntutan desentralisasi dalam segala bidang ini jelas dapat menjadikan nilai lebih dan dinamis dalam kehidupan sastra Indonesia modern sebagai kandungan multikulturalisme, sekaligus menjadi ajang dialog budaya atau wahana pertemuan berbagai kebudayaan di bawah semangat keindonesian baru.

Pemberdayaan Pemakaian Laras Budaya Bahasa Indonesia

Sudah barang tentu bahasa Indonesia merupakan sarana utama pengucapan sastra Indonesia modern. Namun, bagi seberapa besar pengarang

¹ Batasan *sastra Indonesia* dalam KBBI edisi ketiga cerakan pertama (2001:1002) frasa "setelah mendapat pengaruh kebudayaan asing" dihapus. Sementara, batasan *sastra modern* adalah sastra yang berkembang setelah ada pertemuan dan pengaruh kebudayaan Barat (KBBI, 2001:1002)

sastra Indonesia modern, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua, setelah bahasa ibunya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila dalam karya sastra yang mereka tulis terdapat sejumlah kosakata, frasa, dan kalimat bahasa daerah. Hal itu dimungkinkan karena masyarakat Indonesia berada dalam tataran situasi bilingual atau multilingual. Dalam masyarakat yang demikian itu, pengarang akan lebih mudah dan leluasa menciptakan situasi kedwibahasaan (*diglosia*) secara alamiah. Di sinilah terjadi pemakaian bahasa Indonesia yang tidak lagi "baik dan benar" berdasarkan ukuran pemakaian kaidah bahasa Indonesia, tetapi memungkinkan terjadinya alih kode (*code-switching*), campur kode (*code-mixing*), dan interferensi (*interference*), seperti yang terdapat dalam sajak-sajak Darmanto Jatman bertajuk "Sori Gusti" (2002).

Perlu kita sadari bahwa motivasi timbulnya kosakata, frasa, dan kalimat bahasa daerah dan bahasa asing dalam karya sastra Indonesia modern merupakan gejala perubahan situasi tindak tutur dari daerah ke nasional atau sebaliknya dari nasional ke daerah, dan juga dari asing ke nasional atau dari nasional ke asing. Situasi yang demikian itu memungkinkan timbulnya jenis alih kode situasional (*situational switching*) dan alih kode metaforis (*metaphorical switching*) sebagai sarana retorika pengarang, daya ungkap estetis, dan sekaligus sebagai daya pikat yang mampu menimbulkan pesona. Di sini kita baru menyadari bahwa pengarang sastra Indonesia modern itu berada dalam jalur transisi antara daerah dan nasional ataupun daerah, nasional, dan asing. Ada asumsi bahwa pengarang yang berasal dari daerah yang bukan penutur asli bahasa Indonesia pada umumnya masih dalam taraf belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Bahasa ibu yang dikuasai secara intuitif adalah bahasa daerah sehingga konsep pemahaman tentang alam semesta, lingkungan tempat tinggal, sistem kekerabatan, tata ekosistem kemasyarakatan, dan falsafah hidup yang diajarkan oleh leluhur atau nenek moyangnya akan terasa kental dengan bahasa daerahnya yang mewarnai bahasa Indonesia ketika pengarang itu harus menulis dengan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia tidak mampu mewadahi semua konsep bahasa daerah yang ada. Ketika pengarang sastra Indonesia modern harus menulis dengan bahasa Indonesia, ada semacam hambatan atau kesukaran menerjemahkan beberapa kosakata khas bahasa daerah itu ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atas dasar alasan ini tidaklah mengherankan jika pengarang begitu saja mengambil kosakata bahasa daerah sebagai khazanah bahasa Indonesia. Padanan kosakata bahasa Indonesia dianggap oleh pengarang tidak sesuai dengan konsep, tujuan, dan maksud dari bahasa daerahnya. Hal itu terjadi pada diri beberapa pengarang sastra Indonesia modern, seperti Linus Suryadi A.G., Umar Kayam, Y.B. Mangunwijaya, Dorothea Rosa Herliany, dan Darmanto Yatman.

Persoalan bahasa Indonesia dalam karya sastra Indonesia modern saja sudah terdapat gejala multikulturalisme, apalagi dengan hal yang lainnya. Laras

budaya bahasa Indonesia yang digunakan oleh pengarang dari daratan Sumatera--yang konon merupakan asal dari bahasa Indonesia--akan berbeda jauh dengan laras budaya bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pengarang dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Dayak, Banjar, Papua, Maluku, Timor, Minahasa, dan Bugis. Hal itu tidak mengherankan dalam awal perkembangan sastra Indonesia modern para pengarang dari daratan Sumatera lebih mampu menulis sastra dalam bahasa Indonesia daripada pengarang yang berasal dari daerah lain. Situasi itu sangat dimungkinkan karena bahasa Melayu yang diangkat sebagai bahasa nasional (Indonesia) berasal dari seputar daratan Pulau Sumatera. Namun, apakah pengarang dari daratan Sumatera itu tidak mengalami kesulitan mengekspresikan "dunia imajiner" mereka ke dalam karya sastra Indonesia? Taufik Ikram Jamil dari Pusat Pengajian Bahasa dan Budaya Melayu di Riau, Pekanbaru, menyatakan dalam novelnya, *Hempasan Gelombang* (1999:2--3), sebagai berikut.

Ia senantiasa menjadi juara di kelas. Cuma saja, pelajaran bahasa nasionalnya tidak pernah lebih dari tujuh. Sesuatu yang sebenarnya kurang menyenangkan hatiku karena bagaimanapun ia adalah seorang Melayu--seseorang yang bahasa ibunya konon menjadi bahasa nasional. Seperti tanpa beban saja ia mengatakan bahwa kenyataan itu sudah menjadi sejarah.

Dengan demikian ia punya alasan untuk mengatakan bahwa bagi seorang Melayu, mempelajari bahasa nasional adalah sesuatu yang sulit kalau orang tersebut tidak membebaskan dirinya dari kesadaran tentang bahasa nasional berasal dari bahasa ibunya. Sama sulitnya seorang pakar reka bentuk yang harus memperbaharui bangunan lama dibandingkan membuat bangunan baru.

Ternyata orang Melayu Riau sendiri dalam mempelajari bahasa Indonesia tidak selalu mendapatkan nilai lebih dari tujuh. Artinya, nilai bahasa Indonesianya belum sempurna. Hal itu sangat dimungkinkan karena bahasa Indonesia yang berkembang sekarang tampaknya menyesuaikan dengan perkembangan dinamika zaman. Khazanah kosakata dan frasa bahasa Indonesia yang ada sekarang ini tidak lagi sesempit "dunia Melayu". Adaptasi dari istilah asing dan pungutan dari bahasa daerah jelas memperluas perkembangan bahasa Indonesia. Asumsi ini baru dapat dibenarkan setelah orang-orang Melayu-Riau itu mengikuti tes UKBI yang dilenggarakan oleh Pusat Bahasa, misalnya.

Bahasa Indonesia yang digunakan Amir Hamzah dalam dua buah kumpulan sajaknya *Nyanyi Sunyi* (1937) dan *Buah Rindu* (1941) masih setia dengan kosakata arkais. Bahasa Melayu yang tidak lagi digunakan dalam bahasa Indonesia sekarang cukup subur dalam dua buah kumpulan sajak

tersebut. Orang-orang Melayu di Malaysia pun perlu membuka kamus untuk memahami makna kosakata dalam sajak-sajak Amir Hamzah. Hal itu terbukti ketika Sutan Takdir Alisyahbana (seputar tahun 1970-an) menerbitkan sajak-sajak Amir Hamzah di Malaysia perlu disertai uraian (semacam parafase) dan catatan kosakata sukar (senarai), misalnya kata *juriat*, *sempana*, *jemala*, *terban*, *ripuk*, *rampak*, *lintang pukang*, *pokok purba*, *redam terbelam*, *jung bertudung*, *jauhri*, *asaka*, *swarna*, *hauri*, *canggai*, *pitunang*, *terkelar*, *kesturi*, *tepas*, *disangkak*, *tercingah pangah*, dan *terulik* (Alisyahbana, 1996:37--54).

Pemakaian laras budaya bahasa Indonesia yang digunakan Bokor Hutasuhut dalam novelnya, *Penakluk Ujung Dunia* (1964, 1988), juga diwarnai oleh kosakata khas bahasa Batak. Novel yang selesai ditulis oleh Bokor Hutasuhut pada tahun 1960 itu pada penerbitan pertamanya (1964 oleh penerbit Pembangunan, Jakarta) tidak menyertakan senarai kosakata Batak-Indonesia. Hal yang demikian tentu sangat menyulitkan pemahaman isi novel tersebut bagi etnik lain di luar Batak. Kode-kode bahasa di dalam novel tersebut tidak terpahami bagi orang di luar etnik Batak yang tidak memahami bahasa Batak. Namun, pada penerbitan kedua (1988 oleh penerbit Pustaka Karya Grafika Utama, Jakarta) dalam halaman 199--200 disertakan "daftar istilah", seperti kata *ama ni Bolpung*, *ampangngardang*, *ampataga*, *berandak*, *bolatan*, *bona ni pasolgit*, *buhul*, *bungkas*, *curup*, *dolok*, *gelagah*, *luhak*, *manortar*, *mardege*, *margondang*, *martandang*, *menjilam*, *mora*, *parhitean*, *pargonci*, *purada*, *sopo bolon*, *sanduduk*, *temterasan*, *tuhil*, dan *ura*. Dengan diadikannya "daftar istilah" dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu pembaca di luar etnik Batak yang tidak memahami konsep dunia Batak dapat memahami kandungan novel tersebut.

Dengan mengacu pada kasus pemakaian laras budaya bahasa Indonesia di atas, sebenarnya kita tidak perlu meributkan diri ketika Linus Suryadi A.G. pertama menerbitkan *Pengakuan Pariyem* (1981) dengan mengobrol kosakata bahasa Jawa di dalamnya. Prosa liris yang diberi lampiran kosakata Jawa-Indonesia merupakan suatu bukti nyata adanya multikulturalisme dalam budaya berbahasa Indonesia. Pengarang prosa liris *Pengakuan Pariyem* ini sepenuhnya menyadari bahwa pemakaian bahasa Jawa di dalamnya akan menyulitkan pemahaman isi novel tersebut bagi mereka yang tidak mengerti konsep pemikiran dunia Jawa. Penerbitan dengan skala nasional, diterbitkan di Jakarta oleh penerbit yang memiliki jaringan secara nasional pula, sudah pada tempatnya bila disertakan senarai kosakata bahasa Jawa-Indonesia. Kehadiran senarai kosakata tersebut mampu membantu pemahaman pembaca sastra di luar etnik Jawa yang tidak memahami bahasa Jawa.

Bahasa Indonesia sebagai sarana pengucapan karya sastra Indonesia modern, menurut Kuntjaraningrat (1985:527--538), merupakan wujud nyata kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Kehadiran sastra Indonesia modern yang menggunakan bahasa Indonesia memenuhi fungsi (1) memperkuat

identitas orang sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan (2) memperkuat solidaritas antara warganegara dari negara yang bersangkutan sehingga memperkokoh persatuan Indonesia. Atas dasar pemikiran itu sudah sewajarnya bila karya sastra Indonesia modern mampu menjadi wadah atau ajang temu budaya, baik antaretnik di Indonesia maupun dunia. Novel *Jalan Menikung* karya Umar Kayam (1999), misalnya, mempertemukan berbagai etnik di dalamnya. Lingkup utama novel itu memang berbicara tentang dunia Jawa, tetapi muncul perkawinan antaretnik Jawa dengan Minangkabau (Lantip dan Halimah), Jawa dengan Yahudi (Eko dan Claire Levin), Jawa dengan Barat atau Eropa (Marijan dan Marie, Tommi dan Jenette), dan Jawa dengan keturunan Cina (Anna dan Boy Saputra). Pertemuan berbagai bahasa, etnik, warna kulit, dan budaya pun terjadi dalam novel yang berbahasa Indonesia seperti itu.

Penggalian Budaya Sendiri

Apa yang dimaksud dengan (1) bersumber pada budaya sendiri, (2) budaya Indonesia, dan (3) menggali nilai-nilai budaya sendiri sebagai Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII? Pengertian pertama menunjuk adanya potensi budaya kita sendiri sebagai sumber aktivitas dan kreativitas dalam kehidupan bersastra. Hasil budaya bangsa kita yang sudah dimiliki, baik secara nasional maupun daerah, seperti adat-istiadat, bahasa, kesenian, teknologi, tata ekosistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan kepada Tuhan, itu dapat menjadi modal dasar apresiasi sastra.

Pengertian kedua merujuk pada kehidupan sistem politik di negeri kita. Sejak para pemuda-pemudi kita mengikrarkan "Sumpah Pemuda", 28 Oktober 1928, di Jakarta, yang berisi tiga hal pokok: (1) mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, (2) mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan (3) menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sejak itu pulalah diakui keberadaan "budaya Indonesia". Setelah dikumandangkan Proklamasi 17 Agustus 1945, dan secara defakto dan yuridis formal berdiri negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), semua budaya yang memiliki skala nasional diangkat sebagai "budaya Indonesia". Ketentuan ini pun berlaku surut ke belakang sehingga karya sastra yang berbahasa Melayu dan lahir sebelum negara Republik Indonesia berdiri pun dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari "budaya Indonesia". Sastra Indonesia modern yang menggunakan laras budaya bahasa Indonesia, lagu kebangsaan "Indonesia Raya", bendera kebangsaan Sang Saka Merah Putih, UUD 45, Pancasila, dan Lambang Negara Garuda Pancasila merupakan beberapa contoh bukti nyata kebudayaan Indonesia yang tidak diwarnai sama sekali oleh budaya daerah.

Pengertian ketiga itu merujuk kembali pada pengertian yang pertama. Potensi budaya bangsa, baik secara nasional maupun daerah, perlu digali nilai-nilainya, dan diangkat martabatnya ke dalam kehidupan sastra yang bersifat mendunia. Pada masa awal penulisan sastra Indonesia modern, misalnya kehadiran soneta Indonesia masa pra-Pujangga Baru (Santosa, 1996, 1999, dan

2000), menggali unsur nilai budaya sendiri, yaitu pantun, karmina, syair, pepatah-petitih, dan gurindam yang dipadukan dengan unsur budaya asing. Muhammad Yamin dan kawan-kawannya secara kreatif menggali potensi nilai-nilai budaya sendiri ke dalam sonetanya meski tetap kita akui bahwa pengaruh kuat tradisi soneta Angkatan 80 Negeri Belanda (*De Tachtigers*) tetap dominan dalam bentuk dan gaya ungkapnya. Tentu masalah ini tidak hanya berhenti pada soneta masa pra-Pujangga Baru, tetapi juga soneta Pujangga Baru, pasca-Pujangga Baru, Angkatan 66, dan Angkatan 2000 sekalipun. Pada beberapa penulis soneta Indonesia di kemudian hari, misalnya soneta Sapardi Djoko Damono dalam "Sonet X", soneta Ajip Rosidi dalam "Soneta dari Manhattan", dan soneta Eka Budianta dalam "Soneta Jatidiri", penggalian nilai budaya sendiri itu tidak lagi menggali nilai-nilai dari bentuk pantun, karmina, syair, gurindam, dan pepatah-petitih, tetapi beralih ke mantra, *dang-ding* Sunda, dan *jula-juli kidungan ludruk* Jawa Timuran. Orientasi soneta mereka pun bukan lagi berkiblat ke Angkatan 80 Negeri Belanda, melainkan ke soneta Barat secara umum dan terutama soneta Shakespeare atau soneta Inggris.

Sastrawan yang mengangkat potensi budaya sendiri, terutama budaya daerah ke dalam sastra Indonesia modern, oleh para kritikus sastra sering disebut dengan warna lokal (*local color*) atau warna setempat. Karya sastra yang mengangkat warna lokal martabat budaya daerahnya telah menjadi sebuah kecenderungan umum. Hal ini tidak mengherankan bagi kita karena sejak kelahirannya pada awal abad XX, sastra Indonesia telah bersumber pada budaya sendiri. Kita sebut saja, misalnya roman-roman Balai Pustaka, *Siti Nurbaya* (Marah Rusli, 1922), *Cinta yang Membawa Maut* (Nursinah Iskandar, 1925), *Pertemuan* (Abas Sutan Pamuntjak Nan Sati, 1927), *Darah Muda* (Adinegoro, 1927), *Asmara Jaya* (Adinegoro, 1928), *Salah Asuhan* (Abdoel Moeis, 1928), dan *Salah Pilih* (Nur Sutan Iskandar, 1928) mengangkat unsur adat masyarakat Minangkabau dalam sastra Indonesia modern (Ali, 1994).

Budaya Minangkabau dengan segala adat-istiadatnya menjadi sumber kreativitas sastrawan yang berasal dari daerah Sumatera Barat tersebut, seperti Hamka (*Djemput Mamaknya*, 1930; *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*, 1938; *Merantau ke Deli*, 1939), Nur Sutan Iskandar (*Karena Mentua*, 1932), Aman Datuk Madjainda (*Rusmala Dewi*, 1932), M. Enri (*Karena Anak Kandung*, 1940), dan Marah Rusli (*Anak dan Kemenakan*, 1956). Mereka mengangkat persoalan (1) kawin paksa dan hubungannya dengan adat, (2) anggapan tentang kawin dengan orang di luar sukunya, (3) kebiasaan beristri banyak, (4) soal keturunan, (5) perkawinan sesuku, (6) keinginan mengubah sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau, (7) adat memining, dan (8) kebiasaan merantau. Para pengarang Sumatera Barat yang lahir kemudian pun, seperti A.A. Navis (*Kemarau*, 1967), Wisran Hadi (*Cindua Mato*, 1977), Chairul Harun (*Warisan*, 1979), Darman Munir (*Bako*, 1987), dan Lukman Ali (*Pekan Selasa*, 1999), tidak luput pula menggali nilai-nilai budaya sendiri, yaitu budaya daerah

Minangkabau ke dalam karya sastra Indonesia modern. Mereka berpijak pada bumi sendiri.

Selain daerah Minangkabau, penggalian nilai-nilai budaya sendiri ke dalam budaya Indonesia terjadi pula pada budaya Jawa. Pengarang dari Jawa, seperti Linus Suryadi A.G. (*Pengakuan Pariyem*, 1981; dan *Tirta Kamandanu*, 1994), Umar Kayam (*Sri Sumarah dan Bawuk*, 1975; *Para Priyayi*, 1992; dan *Jalan Menikung*, 1999), Y.B. Mangunwijaya (*Burung-Burung Manyar*, 1983; *Roro Mendut*, 1984, *Genduk Duku*, 1987; *Lusi Lindri*, 1987, dan *Durga Umayi*, 1990), Ahmad Tohari (*Ronggeng Dukuh Paruk*, 1980), dan Dorothea Rosa Herliany (*Blencong*, 1993) menghadirkan dunia Jawa dengan berbagai persoalannya. Budaya Jawa yang identik dengan dunia wayang, burung perkutut, keris, *katuranggan*, *narima*, *pasrah*, *lego-lilo*, dan hal-hal yang supernatural seolah-olah menjadi hidup kembali, semacam "renaisan kebudayaan Jawa", dalam panggung sejarah kesusastraan Indonesia modern. Dunia Jawa yang terkenal dengan sekuler, harmoni, sinkretisme, dan segala tindak-tanduknya dalam kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi tampak jelas terefleksi dalam karya sastra Indonesia modern. Keanekaragaman budaya bangsa yang demikian hanya dapat kita simak secara saksama melalui sebuah karya sastra, tidak dalam wujud buku-buku pengetahuan tentang sosiologi, antropologi, politik, dan ilmu sosial kemasyarakatan yang lainnya. Jelaslah dalam masalah multikulturalisme ini sastra Indonesia modern memberi sumbangan yang signifikan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak ada lagi yang lainnya. Sekali lagi, hanya sastra Indonesia modern yang mampu mengakui hak-hak perbedaan di antara berbagai budaya, sekaligus menjadi ajang temu budaya antaretnik di Indonesia. Dialog budaya akan mampu menjembatani perbedaan ras, suku, agama, dan antargolongan di Indonesia.

Penyair dari Jawa, W.S. Rendra dalam *Balada Orang-Orang Tercinta* (1957) menggali nilai-nilai cerita rakyat di Jawa, *tembang palaran*, dan *tembang dolanan anak-anak*. Hal demikian dilakukan pula oleh Goenawan Mohamad yang menggali "estetika puisi sebagai pasemon" (Santosa, 2000) dalam *Asmaradana* (1992) *Misalkan Kita di Sarajevo* (1998), serta *Sajak-Sajak Lengkap Goenawan Mohamad* (2001, editor Ayu Utami dan Sitok Srengenge). Sumber kreativitas Goenawan Mohamad adalah menggali potensi khazanah cerita rakyat ("Dongeng Sebelum Tidur"), babad Blambangan-Majapahit ("Asmaradana"), babad Tanah Jawi ("Penangkapan Sukra"), cerita pewayangan Adiparwa ("Pariksit"), serat Centini ("Persetubuhan Kunthi"), dan sastra tembang awal abad XX, Balsafah Gatolotjo ("Gatoloco"). Sapardi Djoko Damono pun melakukan penggalian cerita-ceria pewayangan dalam kumpulan sajaknya *Hujan Bulan Juni* (1994) dan *Ayat-Ayat Api* (2000), seperti dalam sajaknya "Benih", "Setangan Kenangan", "Sita Sihir", "Telinga", dan "Pokok Kayu". Demikian juga yang dilakukan oleh Subagio Sastrowardojo dalam *Dan Kematian*

Makin Akrab (1995), Herman J. Waluyo dalam *Kidung Megatruh* (1992), dan Darmanto Yatman dalam bukunya *Ki Blaka Suta Bla Bla* (1980), *Karta Iya Bilang Mboten* (1981), *Isteri* (1997), dan *Sori Gusti* (2002) yang sama-sama menggali budaya sendiri, berpijak pada bumi sendiri sebagai sumber aktivitas dan kreativitas menulis sajak, menulis sastra dalam menghadapi budaya global.

Penggalian nilai budaya sendiri juga dilakukan oleh pengarang-pengarang dari Sunda Jawa Barat, misalnya Ajip Rosidi, Ramadhan K.H., dan Achdiat Kartamihardja melalui novel-novel dan cerita pendek yang ditulisnya. Pengarang yang disebut terakhir, Achdiat Kartamihardja, mampu mengumpulkan sebanyak 41 cerita rakyat Sunda "Si Kabayan" dalam bukunya *Si Kabayan Manusia Lucu* (1997). Firman Muntaco dan S.M. Ardan setia menulis kehidupan masyarakat Betawi yang terpinggirkan oleh para kaum urban, misalnya dalam buku kumpulan cerpen *Terang Bulan Terang di Kali* (1974). Kehidupan masyarakat Betawi tempo dulu dan hubungannya dengan kaum peranakan Tionghoa pun digali dan diceritakan kembali oleh Remy Sylado dalam buku *Ca-Bau-Kan* (1999).

Dari daerah lain di luar Sumatera dan Jawa pun, misalnya dari Bali kita temukan Oka Rusmini dalam novelnya, *Sagra* (1996), dan beberapa cerpennya yang dimuat dalam *Horison*, misalnya "Sang Pemahat" (2000), menggali nilai-nilai budaya Bali ke dalam karya sastra Indonesia modern. Pengarang lain dari Bali, misalnya Rasta Sindhu (*Sahabatku Hans Schmitter*, 1968), Faisal Baraas (*Sanur Tetap Ramai*, 1970), Putu Wijaya (*Tiba-Tiba Malam*, 1972, dan *Dasar*, 1993), Ngurah Persua (*Tugu Kenangan*, 1984), dan Aryantha Soethama (*Suzan*, 1988) yang juga menggali nilai-nilai budaya Bali dalam karya sastra Indonesia modern. Dari daerah Nusa Tenggara kita menemukan pula Putu Arya Tirtawirya, Gerson Poyk, dan Otto J. Gaut, yang juga mengekspresikan nilai-nilai budaya di Nusa Tenggara. Otto J. Gaut yang tidak seproduktif pengarang pendahulunya, dalam novelnya *Mawar Padang Ara* (1997), ia mampu memenangi sayembara menulis novel majalah wanita *Femina* (1995), dan menjadi cerminan yang tak terhitung budaya Nusa Tenggara.

Sejalan dengan otonomi daerah dan era keterbukaan yang digulirkan oleh para reformis membuka jalan bagi daerah untuk menunjukkan jatidiriya. Peran budaya daerah menjadi sangat urgen bagi perkembangan sastra Indonesia selanjutnya. Terlebih, jika dalam karya sastra yang mereka tampilkan mampu menunjukkan adanya kebhineka tunggalikaan sebagai ajang temu budaya dan perekat pergaulan antarsuku, ras, agama, dan antargolongan, akan menjadi andil nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan bersumber pada budaya sendiri dalam menampilkan wajah budaya Indonesia menjadi tonggak sejarah yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, para penulis putra daerah tidak perlu berkecil hati mengangkat martabat budaya daerah ke dalam karya sastra Indonesia modern. Justru budaya daerah itulah yang menjadi akar dan pilar budaya Indonesia. Dengan

demikian, budaya daerah menjadi substansi utama dalam pengembangan budaya Indonesia baru dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas. Dengan bersumber pada budaya daerah, kita akan mampu mencapai cita-cita luhur bangsa, adil makmur-sejahtera lahir dan batin. Kita tidak mungkin mampu mencapai Indonesia baru tanpa kehadiran budaya daerah dalam khazanah budaya Indonesia.

Peramuan Budaya Asing sebagai Kiat Menghadapi Budaya Global

Peramuan budaya asing sebagai kiat menghadapi budaya global, terutama Barat, sudah ada dalam awal perkembangan sastra Indonesia modern. Telah dikemukakan di atas bahwa lahirnya soneta Indonesia, selain menggali dari potensi budaya sendiri, juga pengaruh budaya asing. Tanpa kehadiran budaya asing, terutama Barat, sulit bagi Muhammad Yamin dan kawan-kawannya menciptakan soneta khas Indonesia. Hal ini diakui oleh Budi Darma (1998:3) bahwa budaya asing yang paling kuat berpengaruh terhadap kehidupan sastra Indonesia adalah budaya Barat. Pengaruh budaya barat terhadap sastra Indonesia bukan hanya terjadi pada karya sastra itu sendiri, melainkan juga pada pemikiran yang ada di balik karya sastra. Pengaruh budaya barat dalam karya sastra terletak pada konvensi penulisan karya sastra, misalnya *genre*, tema, penyampaian gagasan, dan gaya bercerita. Novel *Ziarah* (Iwan Simatupang, 1968), misalnya, dilansir secara kuat dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme Barat. Demikian juga novel *Telegram* (1972) dan *Stasiun* (1978) karya Putu Wijaya sebagai novel yang mendapat pengaruh kuat dari jenis novel aliran kesadaran.

Pandangan pengaruh Barat dalam dunia kesusastraan Indonesia modern menyebabkan segala teori sastra diimpor dari Barat mulai strukturalisme, semiotika, komparatif, pragmatik, mimesis, ekspresif, resepsi sastra, hermeneutik, psikoanalisis, feminisme, sampai pada dekonstruksi masuk ke dalam negeri kita dan mendapat sambutan meriah. Dunia pendidikan kita yang sejak awal sudah dijejali dengan teori teori pemikiran Barat sehingga mau tidak mau membuat perangkat bagi diri kita sendiri. Semua karya sastra kita didekati, didedah, dan dianalisis dengan teori sastra Barat. Hal ini tampak jelas pada skripsi, tesis, bahkan disertasi doktor sastra juga memanfaatkan teori sastra Barat. Dalam menganalisis perkembangan soneta di Indonesia, misalnya, yang menggunakan pendekatan sejarah sastra tidak terlepas dari teori sastra Barat. Analisis soneta dengan menggunakan pendekatan komparatif, misalnya ketika menelusuri teks secara genetika atau generik, mau tidak mau kita bersentuhan dengan intertekstual Julia Kristeva atau Michael Riffaterre yang datang dari Barat. Perbandingan bentuk dan tema soneta di Indonesia dan di Barat pun melibatkan teori sastra Barat. Seolah-olah kita sudah terbelenggu dengan teori sastra Barat sehingga sukar untuk menghindari pengaruh Barat sebagai dampak budaya global.

Pengaruh budaya asing dalam kesusastraan Indonesia tidak hanya

didominasi oleh Barat, tetapi juga India dan Timur Tengah. Dua kebudayaan besar di belahan Asia bagian selatan dan barat ini ikut mewarnai dunia sastra Indonesia. Dunia India dengan membawa agama Hindu dan Budha serta epos besar *Ramayana* dan *Mahabharata*, mampu menembus pasaran domestik negeri Indonesia. Karya seni dan filsafat India menjadi bagian yang tak terpisahkan pula dalam kehidupan sastra Indonesia. Muhammad Yamin, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Amal Hamzah, dan Sutan Takdir Alisyahbana juga ikut terpengaruh oleh gaya kepenyairan Rabindranath Tagore, sang pujangga terkenal dari India, dengan gaya lirik romantiknya yang ingin kembali ke alam semurni-murninya.

Muhammad Yamin pernah menerjemahkan karya Tagore, yaitu *Menantikan Surat dari Raja* (1928) dan *Di Dalam dan di Luar Lingkungan Rumah Tangga* (1933). Sajak karya Muhammad Yamin yang berjudul "Tanah Air" (*Jong Sumatera* IV, 1922) merupakan saduran dari karya Tagore "Wandee Mataram". Demikian pula sajak Yamin yang berjudul "Gita Gembala" mengingatkan kita pada *Gitanjali* karya Tagore, yang juga pernah diterjemahkan oleh Amal Hamzah (1952). Amir Hamzah yang dijuluki sebagai Raja Penyair Pujangga Baru oleh H.B. Jassin pun terpengaruh kuat oleh dunia India, terutama Hindu dan gaya kepenyairan Tagore. Sajak-sajak lirik romantik Amir Hamzah yang memiliki hasrat kuat bersatu dengan alam merupakan penjelmaan Tagore di Indonesia. Apalagi Amir Hamzah sendiri pernah menerjemahkan *Setinggi Timur* (1939) dan *Bhagawatgita* (1933) yang tak lain juga merupakan napas kehidupan sastra dari dunia India.

Nama lain sastrawan Indonesia yang ikut terpengaruh kuat oleh gaya kepenyairan Tagore adalah Sanusi Pane. Sanusi Pane merupakan tokoh yang secara fanatik menganut aliran garis keras India. Setelah studinya setahun di India, konsepsi kepengarangan Sanusi Pane berkiblat ke India, sebuah negeri yang amat dikaguminya. Sajak-sajak Sanusi Pane yang terkumpul dalam *Puspa Mega* (1927) dan *Pancaran Cinta* (1928) secara jelas mencerminkan lirik romantik gaya Tagore. Karya drama yang ditulis oleh Sanusi Pane pun, seperti *Sang Garuda* (1928), *Airlangga* (1929), *Kertajaya* (1932), *Sandyakala Ning Majapahit* (1933), dan *Manusia Baru* (1940) merupakan pengejawantahan dunia India dalam sastra Indonesia modern. Hal ini secara tegas diakui sendiri oleh Sanusi Pane dalam sebuah sajak yang ditulisnya, yaitu "Aku mencarinya di kebun India".

Apabila Sanusi Pane lebih cenderung mengagumi India dari sisi kehinduannya, tidak demikian yang terjadi pada penulis peranakan Tionghoa, Kwee Tek Hoay. Dalam dramanya yang berjudul *Bidjilada* (1935) dan *Mahabhiniskramana* (1936), Hoay lebih cenderung memilih dunia India dengan agama Budhanya. Meskipun karya Kwee Tek Hoay ini lebih cenderung sebagai bentuk dakwah penyebaran agama Budha di Indonesia, pengemasannya dalam bentuk karya drama menjadi sebuah alternatif yang perlu kita perhitungkan kehadirannya.

Dunia Timur Tengah cukup berpengaruh kuat terhadap kehidupan sastra Indonesia. Belahan Asia bagian barat itu membawa dua agama besar di dunia, yaitu Nasrani dan Islam. Kedua agama besar itu berpengaruh sekali terhadap kehidupan sastra Indonesia. Masa Pujangga Baru sudah menampilkan begitu jelasnya warna sastra yang memiliki pengaruh dua agama tersebut. Penyair J.E. Tatengkeng dalam *Rindu Dendam* (1934)-nya mengekspresikan dunia Nasrani. Penyair Amir Hamzah, Samadi, Rifai Ali, dan Hamka secara jelas memperlihatkan dunia keislaman dalam karya sastra yang ditulisnya. Mereka memberikan suatu andil yang nyata dalam menyerap budaya keagamaan dalam karya sastra Indonesia modern.

Sastrawan yang lahir setelah Pujangga Baru tampak lebih variatif dalam mengekspresikan dunia keagamaan melalui karya sastra yang ditulisnya. Teeuw (1982:119--135) dalam artikelnya yang bertajuk "Sang Kristus dalam Puisi Indonesia Baru" mencatat beberapa penyair yang pernah menulis tentang dunia Nasrani, antara lain, Chairil Anwar ("Isa: Kepada Nasrani Sejati"), Sitor Situmorang ("Cathedrale de Chartes" dan "Kristus di Medan Perang"), W.S. Rendra ("Balada Penyaliban", "Litani bagi Domba Kudus", "Nyanyian Angsa", dan "Khotbah"), dan Subagio Sastrowardojo dalam beberapa sajaknya yang mengacu pada Kitab Kejadian (Genesis). Hal ini membuktikan betapa kuat pengaruh Nasrani dalam kehidupan sastra Indonesia modern. Karya terakhir Romo Mangunwijaya dalam *Pohon-Pohon Sesawi* (1999) pun merepresentasikan secara jelas kehidupan para rohaniawan Nasrani dalam biara yang mengabdikan pada Kristus.

Dunia keislaman dengan kesufiannya hidup subur dalam khazanah sastra Indonesia modern. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki umat pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Abdul Hadi W.M. (1999) merupakan seorang penyair dan pengamat sastra Islam di Indonesia yang paling kuat saat ini. Disertasi yang dibuat oleh Abdul Hadi W.M. di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universitas Sains Malaysia, "*Estetika Sastra Sufistik: Kajian Hermeneutik terhadap Karya-Karya Shaykh Hamzah Fansuri*" (1997) merupakan bukti kuat obsesinya terhadap kajian sastra yang bernapaskan keislaman. Dalam beberapa esainya, yang kemudian dibukukan dalam *Kembali ke Akar Kembali ke Sumber: Esai-Esai Sastra Profetik dan Sufistik* (Pustaka Firdaus, 1999), Abdul Hadi menyebut-nyebut nama Danarto, Kuntowidjojo, M. Fudoli Zaini, Taufiq Ismail, Sutardji Calzoum Bachri, Mohamad Diponegoro, Ajip Rosidi, Emha Ainun Nadjib, K.H. Mustofa Bisri, D. Zawawi Imron, Hamid Jabbar, Ikranagara, Ajamudin Tifani, Ahmad Nurullah, Jamal D. Rahman, dan Acep Zamzam Noor (1999:13) yang selalu menyuarakan napas keislaman dalam karya yang mereka tulis. Taufiq Ismail (1994) pun pernah bekerja sama dengan grup musik Bimbo membuat khazidah Balada Nabi-Nabi, sebanyak 22 syair balada nabi-nabi. Puisi kenabian, misalnya sajak tentang Nuh (Santosa, 2003), mampu merepresentasikan sejarah keimanan

umat terpilih sebagai pembelajaran dan teladan dalam kehidupan masa kini bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman.

Penyaringan Budaya Modern sebagai Penangkal Budaya Global

Istilah *modern*--dalam pengertian *sastra Indonesia modern*--pada awalnya dipahami dengan berpatokan digunakannya huruf Latin, disebarluaskannya dalam bentuk cetakan dengan mesin cetak, dan tidak secara langsung berkaitan dengan pandangan hidup yang tersurat dan yang tersirat di dalamnya (Damono, 1999:15). Hal ini mengingatkan kita bahwa sebelum dasawarsa kedua pada abad kedua puluh tersebut di daerah-daerah yang berada dalam kekuasaan kolonial Belanda (dan juga Inggris) semua bentuk karya sastra Indonesia ditulis dengan huruf lain, seperti Jawi atau Arab Pegon, Batak, dan Jawa yang sebagian dalam bentuk cetak dan sebagian lagi dalam bentuk tulisan tangan atau manuskrip.

Kenyataan di atas membuktikan adanya peralihan tradisi penulisan sastra Indonesia dari sastra yang bersifat tradisional, terbelakang dan primitif ke kehidupan sastra yang lebih baik, moderat, dan dinamis. Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus mengglobal, kehidupan sastra di Indonesia juga diharapkan semakin baik dan mampu menembus dunia internasional. Sebagai warga sastra dunia, sastra Indonesia memang menempati posisi marginal dari sastra kelas dunia yang banyak diperhatikan oleh para kritikus dari negara maju lain. Sastra yang berasal dari belahan dunia ketiga hanya berperan sebagai pelengkap penderita, meskipun sudah banyak karya sastra Indonesia yang diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, seperti Inggris, Belanda, Jerman, Perancis, Jepang, Arab, dan Benggali.

Koentjaraningrat (1985:530) mengartikan *modern* sebagai peradaban dunia masa kini, yaitu budaya global, misalnya budaya perkotaan, budaya metropolitan, dan kebudayaan yang memanfaatkan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Penerimaan budaya modern dalam sastra Indonesia terlihat jelas dalam novel Indonesia mutakhir, seperti *Saman* (1998) dan *Larung* (2002) karya Ayu Utami, *Supernova* (2001) dan *Supernova: Akar* (2002) karya Dewi Lestari, dan *Area X* (2001) karya Eliza Vitri Handayani. Karya-karya mereka sangat menonjolkan unsur "gaya hidup metropolitan", suatu gaya hidup yang meniru peradaban kota-kota besar di dunia sebagai perwujudan budaya global. Para kritikus menyebutnya sebagai fenomena global. Hal ini dimulai dari gaya berpakaian, makanan, gaya berbicara, gaya berpikir, tingkah laku, dan pergaulan hidup yang serba bebas tanpa norma kesusilaan, agama, dan adat-istiadat. Bahkan, jangkauan dunia ke depan yang penuh dengan gaya hidup materialisme dan pasar bebas menjadi kecenderungan budaya modern dalam kehidupan sastra Indonesia modern saat ini atau yang akan datang. Penyaringan budaya modern dalam sastra Indonesia modern itu dapat sebagai penangkal budaya global, yang berarti tetap memantapkan peran sastra

Indonesia modern dalam menghadapi budaya global, misalnya pengaruh internet dan komunikasi canggih dengan cara tetap mau membaca karya sastra Indonesia modern yang multikulturalisme itu

Penutup

Sebenarnya masih banyak masalah yang perlu kita bicarakan dalam membahas multikulturalisme sastra Indonesia modern untuk memantapkan peran sastra Indonesia modern dalam menghadapi budaya global. Namun, dalam makalah ini tidak dibicarakan semua yang menyangkut perkembangan budaya sastra Indonesia modern sebagai penangkal budaya global. Meskipun demikian, uraian di atas diharapkan dapat menangkap esensi yang sebenarnya tentang multikulturalisme sastra Indonesia modern" yang mampu memantapkan peran sastra Indonesia modern dalam menghadapi budaya global. Hal itu dapat dilakukan dengan menghormati perbedaan dan menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia melalui sikap menghargai kreativitas seni yang berbeda dan beragam, serta mengapresiasinya sebagai kekayaan wawasan intelektual bangsa Indonesia.

Unsur kebudayaan yang membentuk multikulturalisme dalam sastra Indonesia modern hingga mampu memprkukuh persatuan bangsa Indonesia itu, antara lain, adalah (1) pemberdayaan pemakaian laras bahasa Indonesia yang multilingualisme sebagai sarana pengucapan sastra Indonesia modern, (2) penggalian budaya yang bersumber pada budaya sendiri atau budaya lokal sehingga menunjukkan kebhinnekaan suku, agama, ras, dan antargolongan sebagai akar budaya bangsa, (3) peramuan pengaruh budaya asing yang multimajemuk sebagai dampak budaya global, dan (4) penyaringan budaya modern, dunia perkotaan, gaya hidup kekinian, dan teknologi canggih dewasa ini, sebagai kewujudan penerimaan era globalisasi dan pasar bebas ataupun penangkal budaya global. Multikulturalisme dalam sastra Indonesia modern itu secara nyata menunjukkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu pun berkaitan erat dengan kehidupan bersastra. Dalam sastra terefleksikan kehidupan masyarakat yang multimajemuk sehingga secara nyata dapat sebagai cerminan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang bermartabat. Indonesia, yang sedang dalam keadaan krisis multi-dimensional seperti saat ini, kehidupan sastra kita pun ikut terimbas dengan keadaan tersebut. Sastra-sastra yang bercorak reformasi dan keadaan negeri yang dilanda berbagai kerusuhan, disintegrasi bangsa, teror bom, kekacauan politik, perang melawan sparatis, pemberontak, ikut pula mewarnai sastra Indonesia modern sehingga banyak orang mengatakan *Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia* (Taufiq Ismail, 1998).

DAFTAR PUSTAKA

A. Acuan

- Ali, Lukman. 1994. *Unsur Adat Minangkabau dalam Sastra Indonesia 1922--1956*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Alisyahbana, Sutan Takdir. 1996. *Amir Hamzah Penyair Besar Dua Zaman*. Cetaskan ke-6. Jakarta: Dian Rakyat.
- Damono, Sapardi Djoko. 1998. "Pengaruh Asing dalam Sastra Indonesia". Dalam *Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan.
- 1999. "Awal Perkembangan Sastra Modern di Indonesia: Kasus Sastra Indonesia dan Jawa". Dalam *Politik, Ideologi, dan Sastra Hibrida*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Darma, Budi. 1998. "Sastra Indonesia dan Forum Internasional". Dalam *Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Darma-Putra, I Nyoman. 2001. "Interaksi Bali dan Barat dan Kesadaran Kultural Sastrawan Bali". *Horison* Nomor 5 Tahun XXXV, Edisi Mei 2001.
- Hadi W.M., Abdul. 1999. *Kembali ke Akar Kembali ke Sumber*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Koentjaraningrat, R.M. 1985. "Kebudayaan Nasional dan Peradaban Dunia Masa Kini". Dalam Sulastin Sutrisno *et al* (editor). *Bahasa-Sastra-Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Alois A. 2003. "Benturan Peradaban, Multikulturalisme, dan Fungsi Rasio". *Bentara* Nomor 4 Tahun 4, *Kompas*, Jumat, 4 April. 2003: 41.
- Palguna, IBM Dharma. 1997. "Rabindranath Tagore dalam Sastra Indonesia". *Horison* Nomor 3 Tahun XXXI, Maret 1997.
- Rosidi, Ajip. 1991. "Sastra Daerah dan Sastra Indonesia" dalam S.R.H. Sitanggang *et al* (editor). *Kongres Bahasa Indonesia V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Santosa, Puji. 1993. *Ancangan Semiotika dan Pengkajian Susastra*. Bandung: Angkasa.
- 1996. *Soneta Indonesia: Analisis Struktur dan Tematik*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- 1999. "Perkembangan Soneta dan Jatidiri Bangsa". *Pangsura* Bilangan 9 Jilid 5 Julai-Desember 1999. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam.
- 2000. "Estetika Puisi Sebagai Pasemon". Dalam *Kakilangit* Nomor 39, *Horison* Nomor 4 Tahun XXXIV, Edisi April 2000.
- 2000. "Soneta Masa Pra-Pujangga Baru". *Kakilangit* Nomor 46, *Horison* Nomor 11 Tahun XXXIV, Edisi November 2000.
- 2003. *Sori Gusti: Keberagaman Tujuh Banjaran*. Dalam *Kakilangit* Nomor 75 Sisipan majalah *Horison* Nomor 3 Tahun XXXVII, Edisi Maret 2003.
- 2003. *Bahtera Kandas di Bukit: Kajian Semiotika Sajak-Sajak Nuh*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Tim Penyusun Kamus. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi Ketiga, Cetakan Pertama) Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Perumus. 1998. "Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII". Jakarta: Pusat Bahasa.
- Teeuw, A. 1982. "Sang Kristus dalam Puisi Indonesia Baru". Dalam Satyagraha Hoerip (editor). *Sejumlah Masalah Sastra*. Jakarta: Sinar Harapan.

B. Data

- Damono, Sapardi Djoko. 1994. *Hujan Bulan Juni*. Jakarta: Grasindo.
- 2000. *Ayat-Ayat Api*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hamzah, Amir. 1995. *Nyanyi Sunyi*. Cetakan ke-12. Jakarta: Dian Rakyat.
- 1996. *Buah Rindu*. Cetakan ke-10. Jakarta: Dian Rakyat.
- Hutasuhut, Bokor. 1964 *Penakluk Ujung Dunia*. Cetakan Pertama, Jakarta: Pembangunan,
- 1988. *Penakluk Ujung Dunia*. Cetakan Kedua, Jakarta: Pustaka Karya Grafika Utama.
- Gaut, Otto J. 1997. *Mawar Padang Ara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, Taufiq. 1998. *Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ananda.
- Jamil, Taufik Ikram. 1999. *Hembasan Gelombang*. Jakarta: Grasindo.

- Jatman, Darmanto. 2002. *Sori Gusti*. Semarang: Limpad.
- Kayam, Umar. 1975. *Sri Sumarah dan Bauuk*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- 1992. *Para Priyayi*. Jakarta: Grafiti.
- 1999. *Jalan Menikung*. Jakarta: Grafiti.
- Lestari, Dewi. 2001. *Supernova*. Bandung: Truedee Books.
- 2002. *Supernova: Akar*. Bandung: Truedee Books.
- Mangunwijaya, J.B. 1983. *Burung-Burung Manyar*. Jakarta: Jambatan.
- 1984. *Roro Mendut*. Jakarta: Gramedia.
- 1987. *Genduk Duku*. Jakarta: Gramedia
- 1987. *Lusi Lindri*. Jakarta: Gramedia.
- 1990. *Durga Umayi*. Jakarta: Gratifiti.
- 1999. *Pohon-Pohon Sesawi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mohamad, Goenawan. 1992. *Asmaradana*. Jakarta: Grasindo.
- 1998. *Misalkan Kita di Sarajevo*. Jakarta: Kalam.
- 2001. *Sajak-Sajak Lengkap*. Jakarta: Metaphor Publising.
- Suryadi A.G., Linus. 1981. *Pengakuan Pariyem*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sylado, Remy. 1999. *Ca-Bau-Kan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tatengkeng, J.E. 1974. *Rindu Dendam*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Utami, Ayu. 1998. *Saman*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Kalam.
- 2001. *Larung*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Kalam.
- Vitria Handayani, Eliza. 2001. *Area X*. Dalam *Kakilangit, Horison* Edisi Januari--September 2001.
- Waluyo, Herman J. 1991. *Kidung Megatruh*. Surakarta: Hiski Komda Surakarta.

PUISI DAN KESADARAN BERBANGSA: INDONESIA SEBAGAI MALIM KUNDANG

Jamal D. Rahman

Judul yang diajukan panitia Kongres Bahasa Indonesia VIII¹ kepada saya mengandaikan dua persoalan tentang kedudukan sastra dalam masyarakat kita. Persoalan pertama menyangkut pandangan bahwa apresiasi masyarakat kita terhadap sastra masih relatif rendah dan karena itu perlu ditingkatkan melalui program yang amat konkret, yaitu menyebarluaskan karya sastra. Persoalan kedua menyangkut pentingnya memacu fungsi pragmatis sastra bagi kehidupan masyarakat dalam rangka memantapkan kesadaran berbangsa. Yang terakhir ini pun mengandaikan bahwa fungsi pragmatis sastra bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks berbangsa, masih relatif rendah pula. Dua persoalan tersebut tentu saja merupakan masalah lama, tetapi kiranya tetap relevan untuk terus kita pertimbangkan. Meskipun ada beberapa kemajuan di bidang apresiasi sastra masyarakat, yang antara lain ditandai dengan maraknya penerbitan buku-buku sastra belakangan ini, kemajuan itu tidaklah sebanding dengan, bahkan jauh dari apa yang kita harapkan.

Dua persoalan tersebut saling berhubungan sebagai lingkaran setan atau ibarat ayam dan telur. Di situ diandaikan bahwa karena apresiasi masyarakat kita terhadap sastra relatif rendah, mereka tak akan menemukan fungsi pragmatis sastra dalam pengertiannya yang secara sosial amat berarti. Sebaliknya, karena masyarakat kita tak merasakan adanya fungsi pragmatis sastra, mereka cenderung menjauhi atau menjauhkan sastra dari kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks inilah sastra nyaris tak pernah terlibat atau dilibatkan dalam isu penting pada tataran sosial apalagi negara-bangsa. Sastra seakan diisolasi sebagai persoalan masyarakat sastra belaka. Untuk menaikkan fungsi pragmatis atau peran sastra pada tataran negara-bangsa, judul yang diajukan kepada saya meniscayakan satu langkah yang harus diambil, yaitu tingkatan apresiasi sastra masyarakat agar menjadi jalan bagi fungsi pragmatis dan peran sastra pada tataran negara-bangsa.

Dua persoalan tersebut, yakni rendahnya apresiasi sastra masyarakat kita di satu pihak dan rendahnya fungsi pragmatis sastra di pihak lain, bersumber dari banyak hal: dari keengganan para sastrawan untuk melibatkan sastra dalam kehidupan konkret, terutama pada level sosial apalagi negara-bangsa, hingga keengganan masyarakat untuk mengapresiasi khazanah budaya mereka sendiri, yang antara lain mewujudkan dalam karya sastra. Harus segera dikatakan bahwa keterlibatan sastra dalam kehidupan konkret pada level sosial dan negara-bangsa sesungguhnya amat bergantung pada cara masyarakat kita memaknai karya sastra dan mencari relevansinya dengan kehidupan aktual kita. Namun, ini jelas tidak mudah karena kemauan dan kemampuan masyarakat kita memaknai karya sastra dan mencari relevansinya dengan kehidupan

aktual kita amat bergantung pada daya apresiasi masyarakat kita terhadap sastra itu sendiri. Oleh karena itu, akar dua persoalan di atas tampaknya tertanam dalam-dalam di tanah lain, yaitu pengajaran sastra di sekolah kita. Inilah tempat pertama-tama secara formal seseorang diperkenalkan pada sastra dan sebisa mungkin kepadanya ditanamkan fungsi pragmatis sastra dalam batas yang amat minim sekalipun. Demikianlah kepada anak-anak diperkenalkan beberapa sajak Chairil Anwar, misalnya, seraya diperkenalkan pula hubungan sajak Chairil Anwar dengan perjuangan kemerdekaan.

Kiranya sulit dibantah bahwa pengajaran sastra di sekolah mengandung persoalan dan kelemahan yang amat serius, baik dan segi substansi, metodologi, maupun sarana pendukungnya. Di sekolah-sekolah kita sastra diajarkan lebih sebagai teori, istilah teknis yang relatif rumit, dan banyak hal sebagai hafalan. Kepada siswa SMP, misalnya, diajarkan bentuk puisi lama: mantra, syair, pantun, talibun, gurindam, dan lain-lain sebagai istilah teknis yang mesti mereka hafal. Kepada siswa-siswa SMU diajarkan angkatan dalam sastra Indonesia berikut sejumlah tokohnya yang mesti mereka hafal pula. Dengan itu, siswa kita belajar sastra tanpa harus membaca sastra itu sendiri dan sedemikian rupa melakukan lompatan: mempelajari apa yang sebenarnya merupakan konsumsi para sarjana sastra. Dalam situasi seperti itu, buku sastra tak perlu disediakan di perpustakaan sekolah karena toh bukan merupakan tuntutan pembelajaran. Dengan demikian, siswa kita mengenal sastra tanpa mengalaminya.

Betapapun seriusnya persoalan pengajaran sastra, saya melihat potensi yang demikian besar di sekolah-sekolah kita untuk mengatasi dua persoalan di atas, sejauh kita dapat mengelola dan menggalinya dengan baik. Potensi itu ternyata terus menggelora, betapapun iklim amat tidak kondusif untuk meng-*actus*-kannya. Saya merasa melihat apresiasi sastra di sekolah-sekolah dan jarak yang sangat dekat. Khususnya dan pengalaman mendampingi para sastrawan terjun ke sekolah-sekolah di seluruh provinsi di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi sepanjang tahun 2000-2003, pada hemat saya ada yang perlu diluruskan dari pandangan bahwa apresiasi sastra masyarakat (baca: siswa) kita rendah. Pengalaman saya menunjukkan bahwa apresiasi sastra siswa kita ternyata relatif tinggi. Mereka begitu antusias mengikuti acara sastra, menyaksikan pembacaan puisi, dan berdiskusi dengan para sastrawan. Mereka begitu antusias pula menulis karya sastra. Bersama guru bahasa dan sastra Indonesia, para siswa berusaha mencari terobosan di jalan sulit pengajaran sastra.

Apresiasi ini bagaimanapun adalah apresiasi minus membaca karya sastra. Mereka begitu bersemangat mengikuti acara sastra, tanpa disertai semangat yang sama untuk membaca karya sastra itu sendiri. Apresiasi sastra siswa kita tampaknya tumbuh dalam kultur tradisi lisan yang begitu mengakar, dan secara tidak sadar terus dipupuk dengan “mengembalikan” tradisi tulis (keberaksaraan) ke tradisi lisan (kelisanan). Demikianlah, karya sastra (yang

ditulis untuk dibaca) akhirnya “hanya” diapresiasi sebagai tontonan atau pertunjukan. Masalahnya adalah, ketika karya sastra (tulisan) melalui diapresiasi sebagai tradisi lisan, akhirnya berada di ambang batas antara tradisi tulisan dan tradisi lisan. Di ambang batas itu, karya sastra jadi gamang: tak cukup kukuh untuk berdiri sebagai karya tulisan (sehingga tidak dibaca), tetapi mustahil pula berdiri sebagai tradisi lisan (sehingga tetap menuntut untuk dibaca).

Fenomena sastra di tengah masyarakat kita sedikit-banyak merupakan replika dari fenomena apresiasi sastra di kalangan siswa tersebut. Khususnya pada acara memperingati peristiwa tertentu, yang di dalamnya ada acara sastra, mereka akan berbondong-bondong menyaksikannya. Mereka akan bertepuk tangan, tertawa, atau diam tercekam menyaksikan pembacaan puisi atau cerpen, misalnya. Sesudah itu, buku-buku sastra tetap tidak dibeli, yang artinya tidak dibaca. Di sini apresiasi sastra berhenti sebagai keriuhan di panggung pertunjukan. Dengan demikian, apresiasi sastra masyarakat kita adalah produk dari iklim umum apresiasi sastra di sekolah-sekolah kita. Tidak mengherankan kalau oplah buku sastra rata-rata tetap tiga ribu eksemplar sejak setengah abad lalu meskipun jumlah penduduk dan kaum terpelajar kita melonjak relatif tajam sepanjang puluhan tahun itu.

Ada baiknya di sini disinggung bahwa fenomena tersebut terbentuk dalam proses politik yang bersifat monolitik dan represif sepanjang Orde Baru. Mungkin tidak ada hubungan langsung antara keduanya, tetapi setidaknya ada paralelisme di sana. Bahkan, pada hemat saya, proses politik Orde Baru merupakan ranah subur bagi berlangsungnya fenomena itu. Logika di balik itu adalah: biarkan apresiasi sastra masyarakat kita rendah agar mereka tidak menuntut fungsi pragmatis dan praktis karya sastra itu sendiri di dunia politik. Logika ini masuk akal dengan satu pengandaian bahwa semakin tinggi apresiasi sastra masyarakat semakin tinggi pula tuntutan mereka terhadap keharusan karya sastra terlibat secara langsung dalam persoalan aktual, khususnya sosial dan politik. Apalagi, watak karya sastra sesungguhnya adalah menyediakan perangkat demokrasi, yang bagi politik Orde Baru merupakan ancaman serius. Politik represif Orde Baru dengan demikian tidak hanya beroperasi lewat perangkat keras seperti sejumlah peraturan dan pelarangan, melainkan juga lewat perangkat lunak semacam ini.

Paralelisme antara fenomena sastra dan realitas politik itu lebih transparan lagi dalam proses pembelajaran sastra di banyak sekolah kita. Kalau politik mengalami personalisasi pada Soeharto, karya sastra mengalami personalisasi pada sastrawan. Pandangan bahwa sastrawanlah yang paling tahu tentang sebuah karya sastra, termasuk dalam menafsirkan, bahkan membacakannya di depan publik, merupakan pandangan umum dalam proses pembelajaran sastra kita. Dari pengalaman terjun ke sekolah-sekolah, tidak mudah meyakinkan sebuah penafsiran terhadap karya sastra kepada para siswa bahkan guru, sebelum mereka mendengar langsung apa kata sastrawan. Secara teoretis dapat dikatakan, paradigma ekspresif—dalam pengertian M.H. Abrams

yang agak longgar—demikian merasuk dalam sistem pembelajaran sastra kita, meskipun dalam beberapa praktiknya yang digunakan adalah paradigma objektif. Paradigma ekspresif, kita tahu, beroperasi dengan asumsi bahwa karya sastra adalah ekspresi pengarang, sedangkan paradigma objektif beroperasi dengan asumsi bahwa dan sudut semantik karya sastra bersifat otonom.

Pada gilirannya adalah tafsir tunggal terhadap karya sastra. Merasuknya paradigma ekspresif dalam proses pembelajaran sastra segera membentuk pandangan bahwa hanya ada satu tafsir yang benar terhadap karya sastra. Karya sastra jadi kehilangan ambiguitasnya, dijauhkan dari kemungkinan penafsiran yang demikian kaya dan terbuka, dipisahkan dari spirit demokrasi yang dikandungnya. Pertanyaan berbentuk pilihan ganda dalam ujian resmi untuk sebagian bekerja dengan logika ini. Ini paralel dengan politik Orde Baru yang bersifat monolitik. Bedanya, represi monolit Orde Baru beroperasi dengan keras dalam politik, dan beroperasi dengan lunak dalam sastra.

Karya sastra adalah ranah permainan makna dan tafsir. Di situ perbedaan penafsiran mesti dirayakan. Hal itu berarti spirit demokrasi mesti dielu-elukan. Merayakan permainan tafsir terhadap karya sastra, berarti merayakan nilai-nilai demokrasi. Adalah penting mempraktikkan permainan makna dan tafsir terhadap karya sastra ini bersama siswa kita. Dari pengalaman majalah *Horison* dalam mempraktikkan hal ini dengan para siswa lewat puisi,² tampak bahwa karya sastra menggairahkan bukan pertama-tama karena estetikanya, melainkan karena ambiguitasnya. Karya sastra menyenangkan karena perbedaan bahkan pertentangan penafsiran yang dimungkinkannya. Dengan kata lain, sebuah puisi demikian mengasyikkan karena praktik demokrasi di dalamnya begitu menyenangkan dan para siswa tidak adu jotos karena berbeda pendapat satu sama lain.

Apresiasi masyarakat terhadap sastra tentu saja harus terus didorong agar segera bergerak dan apresiasi kelisanan ke apresiasi keberaksaraan. Karya sastra bagaimanapun ditulis pertama-tama untuk dibaca dengan segala tuntutan dan konsekuensi logisnya. Potensi ke arah sana, sebagaimana diuraikan di muka, jelas ada dan berpengharapan, tetapi tetap diperlukan berbagai stimulus untuk mengaktualkannya. Menyebarluaskan buku sastra melalui program yang terencana dalam skala besar-besaran merupakan keharusan yang mendesak. Perpustakaan dengan jumlah buku yang memadai mesti berdiri di setiap kota. Memang masyarakat kita sebenarnya memiliki daya dan mekanisme sendiri untuk mendistribusikan buku sastra ke berbagai daerah, sebagaimana dilakukan oleh beberapa penerbit untuk menembus pasar alternatif. Tetapi, bagaimanapun negara harus memelopori penyebaran karya sastra ini kepada masyarakat hingga daerah-daerah yang hanya mungkin dijangkau oleh negara, agar negara ada gunanya.

Dalam konteks memantapkan kesadaran berbangsa, keharusan mengembangkan apresiasi sastra masyarakat pada hemat saya memiliki kedudukan khusus. Hal itu penting direnungkan kembali ketika pada bulan Oktober 2003

ini kita mengenang Sumpah Pemuda 1928. Secara agak ekstrem ingin dikatakan bahwa hubungan puisi dan Indonesia adalah hubungan ibu kandung dan anak kandung. Kesadaran dan impian tentang Indonesia mula-mula muncul dalam puisi, yang ditulis oleh beberapa penyair—misalnya Ngudi Ginting Djawak,³ S.S.,⁴ Semar,⁵ Ar. Kamaloeddin Saropie,⁶ dan tentu Muhammad Yamin⁷— menjelang Sumpah Pemuda 1928. Dengan demikian, sekali lagi secara ekstrem, ibu kandung Indonesia adalah puisi. Puisilah yang mula-mula atau sekurang-kurangnya turut mengandung janin kesadaran berbangsa. Puisi jugalah yang mula-mula memperjuangkan dan dengan harap-harap cemas menunggu kelahiran bayi Indonesia. Dari rahimnyalah lahir bayi manis bernama *Indonesia*.⁸

Pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda dikumandangkan dengan penuh semangat. Sebagaimana pernah dikatakan Sutardji Calzoum Bachri, Sumpah Pemuda bagaimanapun merupakan puisi. Sutardji menulis pendapatnya sebagai berikut.

Teks Sumpah Pemuda bisa dipandang sebagai teks puisi yang ditulis dalam bahasa prosa, yang sarat dengan unsur puisi. Dalam gaya pengungkapannya sebagai puisi ia jauh lebih berhasil dibanding dengan penyair Pujangga Baru Rustam Effendi misalnya, yang ingin melepaskan diri dari bentuk persajakan tradisional namun tetap saja masih dalam bentuk pengungkapan tradisional yang ingin diberontaknya. Bahkan sebagai puisi dengan gaya bahasa prosa teks Sumpah Pemuda yang diciptakan tahun 1928 oleh “para penyair kolektif”, yakni para perumus teks tersebut, begitu maju dan modern sehingga baru pada tahun 1970-an bentuk pengungkapan prosa dalam puisi menjadi lazim⁹

Kalau Sumpah Pemuda adalah “tonggak resmi” yang secara formal melahirkan Indonesia, ibu kandung Indonesia dalam arti yang sesungguhnya tak lain adalah *puisi*.

Hubungan puisi sebagai ibu kandung dan Indonesia sebagai anak yang dilahirkannya tampak sangat intim dan hangat setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ibunda puisi seakan menimang-nimang, verdendang, dan mengelu-elukan sang bayi dengan perasaan bahagia, dengan seribu harapan, sebagaimana tampak misalnya pada sajak “Teratai” (1929) yang terkenal karya Sanoesi Pane berikut ini:

*Dalam kebun di tanah airku,
Tumbuh sekuntum bunga teratai,
Tersembunyi kembang indah permai,
Tidak terlihat orang yang lalu*

*Akarnya tumbuh di hati dunia,
Daun berseri Laksmi mengarang,
Biarpun ia diabaikan orang,
Seroja kembang gemilang mulia.*

*Teruslah, o Teratai Bahagia,
Berseri di kebun Indonesia,
Biar sedikit penjaga taman.*

*Biarpun engkau tidak dilihat,
Biarpun engkau tidak diminat,
Engkau pun turut menjaga Zaman.¹⁰*

Dalam perkembangannya kemudian, puisi terus mengasuh dan sedemikian rupa membesarkan sang anak dengan perasaan seorang ibu pada umumnya tentang anak yang mulai tumbuh: sedih, getir, cemas, sekaligus penuh harapan. Di bulan April 1934, misalnya, puisi penyair Ipih berdentang tentang anak yang belum lagi genap enam tahun itu, sebuah dendang pedih sebab sang anak ternyata hidup dalam terali penjajahan, tetapi tetap ada harapan akan kemerdekaan. Sajak Ipih itu berjudul "Nasib Tanah Airku" (1934).

...
*Seperti kembang hampirkan layu,
Lemah tampaknya, rawan dan sayu,
Demikianlah kau Indonesia*

Di tengah jalan itu semua, ia lupa pada sang ibu yang telah melahirkannya. Ia lupa pada impian dan harapan ibu kandungnya. Ia sibuk menyusun strategi politik, mengurus ekonomi dan olahraga, berbisnis, dan main golf. Sementara itu, sang ibu tak dipedulikannya. Sang ibu dibiarkan tersisih di pinggir jalan raya kehidupannya yang sibuk dan hiruk-pikuk. Sang ibu dibiarkan kesepian dan bahkan telantar di sudut-sudut kehidupannya yang tak terawat. Sang ibu—puisi itu— diperkenalkan di bangku sekolah tanpa anak-anak merasuk ke biru api hidupnya yang indah dan berkobar-kobar.

Sang anak tak hanya melupakan sang ibu. Ia bahkan durhaka pada impian, harapan, dan cita-cita sang ibu, yang dulu ditanamkan dalam-dalam ke jantung hidupnya tentang arti kemerdekaan dan masa depan yang gilang-gemilang. Ia membangun hidupnya sambil membangun juga kanker korupsi dalam tubuhnya. Ia membangun masa depannya sambil membentuk juga karakter kekerasan dalam dirinya. Ia menjaga keutuhan dirinya sekaligus memecah-belahnya. Dan, bahasa yang melalui sang ibu secara eksplisit me-

nyatakannya sebagai alat pemersatu, alih-alih dijadikannya alat pemecah belah.¹³ Pada taraf ini, ia bahkan durhaka langsung kepada dan di depan hidung ibu kandungnya sendiri. Ia jadi Malin Kundang.

Dalam perkembangan itu semua, sang ibu tentu saja geram dan marah. Ia bahkan murka pada sang anak. Sang ibu tak lagi melihat harapan pada anak yang sudah dewasa itu, seperti dahulu ketika sang ibu baru melahirkannya. Sajak Rendra berikut ini adalah salah satu bentuk kemarahan sang ibu kepada sang anak di tahun 1977.

*Menghisap sebatang lisong,
Melihat Indonesia Raya,
Mendengar 130 juta rakyat,
Dan di langit
Dua tiga cukong mengangkang,
Berak di atas kepala mereka.*

...

*Nasibmu malang amat celaka,
Hidup dirundung malapetaka,
Tidak mengenal masa Bahagia*

...

*Seperti men tan di kala pagi,
Kemerdekaan tentu datang lagi
Menerangi Tanah tempat lahirku.¹¹*

Demikianlah sang anak kemudian tumbuh dan mulai besar, dan sang ibu terus membesarkan dan melindunginya. Sang anak mulai memperjuangkan hidup dan kemerdekaan, dan sang ibu mendorong, memberi semangat, dan terus-menerus membesarkan hatinya. Ketika pada tahun 1940-an sang anak berada dalam detik-detik paling menentukan dalam perjuangan meraih kemerdekaan, sang ibu memberi semangat, seperti tampak dalam "Krawang-Bekasi" (1948), sajak saduran Chairil Anwar yang terkenal, atau sajaknya yang lain yang tak kalah terkenal, "Persetujuan dengan Bung Karno" (1948).

*Ayo! Bung Karno kasi tangan mari kita bikin janji
Aku sudah cukup lama dengar bicaramu,
Dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu*

*Dari mulai tgl. 17 Agustus 1945
Aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu
Aku sekarang api aku sekarang laut*

*Bung Karno! Kau dan aku satu zat satu urat
Di zatmu di zatku kapal-kapal kita berlayar
Di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh.¹²*

Indonesia pun merdeka. Dan, sebagai anak, ia sudah dewasa, maka ia harus menentukan sendiri hidup dan masa depannya. Ia harus berjuang sendiri membangun impian dan harapannya. Ia harus membangun sendiri keluarga dan menghidupinya. Ia menyusun langkah-langkah untuk membangun sistem politik, ekonomi, dan karakter budayanya. Ia membangun sendiri semua hal untuk kemajuan dan kesuksesan hidupnya.

*Bunga-bunga bangsa tahun depan
Berkunang-kunang pandang matanya,
Di bawah iklan berlampu neon.
Berjuta-juta harapan ibu dan bapak
Menjadi gemalau suara yang kacau,
Menjadi karang di bawah muka samudra
...¹⁴*

Kemudian pada tahun 1988, sajak Taufiq Ismail dengan baik menggambarkan perubahan pandangan sang ibu tentang anak kandungnya yang dulu membanggakan, tetapi kini ternyata amat memalukan.

I

*...
Negeriku baru enam tahun terhormat diakui dunia
Terasa hebat merebut merdeka dari Belanda
Sahabatku sekelas, Thomas Stone namanya,
Whitefish Bay kampung asalnya
Kagum dia pada revolusi Indonesia
...*

II

*Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak*

*Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, Lebuhraya Tun Razak
 Berjalan aku di Sixth Avenue, Maydan Tahrir dan Ginza
 Berjalan aku di Dam, Champs Élysées dan Mesopotamia
 Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam kaca mata
 Dan kubenamkan topi baret di kepala
 Malu aku jadi orang Indonesia.
 ...¹⁵*

Demikianlah Indonesia yang terpuruk krisis multidimensi adalah Malin Kundang yang terkutuk jadi batu setelah durhaka kepada sang ibu. Namun, Indonesia tampaknya lebih tragis dibanding Malin Kundang. Malin Kundang bagaimanapun adalah seorang anak perantau yang sukses secara ekonomi, sedangkan Indonesia adalah seorang anak yang jatuh miskin bahkan terbelit hutang teramat banyaknya.

Sampai kapan Indonesia akan terus jadi Malin Kundang? Masihkah puisi merasa sebagai ibu kandung yang pernah melahirkan Indonesia, ibu yang pernah memupuk kesadaran berbangsa?***

CATATAN

¹Judul yang diberikan panitia kepada saya adalah "Peningkatan Apresiasi Sastra Melalui Penyebarluasan Karya Sastra dalam Upaya Memantapkan Kesadaran Berbangsa". Kongres Bahasa Indonesia VIII diselenggarakan Hotel Indonesia, Jakarta, 14--17 Oktober 2003.

²Ada beberapa sajak yang digunakan dalam praktik itu. Salah satunya adalah sajak "Hikayat Bulan dan Khairan" karya penyair Husni Jamaluddin. Sajak tersebut selalu menarik perhatian para siswa, tampaknya karena ada unsur pornografis di dalamnya. Namun, setelah diajak mendiskusikan dan menafsirkan sajak tersebut, biasanya dengan menggunakan metode socratic, mereka akan sampai pada kesimpulan berbeda-beda tentang inti sajak itu sendiri, dan memandang anasir pornografis di dalamnya hanyalah alat yang digunakan penyair untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna.

³Sajak Ngudi Gintung Djawak berjudul "Indonesia", dimuat dalam *Bintang Hindia*, 28 Februari 1927. Di sini dikutip dari Suyono Suyatno *et al.* (ed.), *Antologi Puisi Indonesia Periode Awal* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 93--97:

*Indonesia ialah sekumpulan tempat,
 Di dalam lapang dan ada rapat;
 Hutan dan rimba sungai terdapat,
 Hasil yang terbit berlipat-lipat*

*Pulaunya Jawa serta Sumatra,
Tiada luput bertanam para;
Borneo, Celebes, udik utara,
Memberi hasil sebab dipiara.*

*Pulau Papua Ambon pun juga,
Memberi hasil juga berdua;
Tiada kurang kehidupan disua,
Dapat nafkah muda dan tua.*

*Pulau-pulau Maluku yakni,
Suburlah jua sesuatu kini;
Timor, Madura, dan p.p. di sini,
Semuanya memberi hasil begini.*

*Makmur pulau-pulau Indonesia pasti,
Hujan pun cukup Allah berkati;
Subur didapat Indonesia sejati,
Seperti Indonesia jarang didapati.*

...

⁴S.s. menulis sajak "Rapat Kebangsaan" (dimuat dalam *Soeloeh Ra'jat Indonesia*, 5 September 1928), "Semangat Indonesia" (dimuat dalam *Soeloeh Ra'jat Indonesia*, 12 September 1928), dan "Pada Bangsa dan Kaumku" (dimuat dalam *Soeloeh Ra'jat Indonesia*, 3 Oktober 1928). Di bawah ini adalah sajak "Semangat Indonesia", dikutip dari Suyono Suyatno *et all.* (ed.), *Ibid.*, hlm.111—112.

*Sabtu malam dua September,
Di Surabaya Stadstuin-theater,
Dipertunjukkan rasa nan santer,
Semangat Indonesia tidak sekaker.*

*Putra Indonesia di barat Sabang,
Di utara Sangir ada mendatang,
Di timur Papua orang bilang:
Bersatu, kemerdekaan nusa digalang!*

*Tua muda putra Sang Nusa,
Laki perempuan penuh dengan rasa,
Kecintaan tanah air dan bangsa,
Suara megah memenuhi angkasa.*

*Putra Ambon menunjukkan diri,
Di mana terdapat kegirangan sanubari,
Memuji kebesaran Nusa berseri,
Penuh kecintaan 'kan tanah negeri.*

*Minahasa putranya maju,
Cakalele gambar langkah nan laju,
Pahlawan kita di masa lalu,
Menghadapi musuh, si benalu.*

*Dan Timor sasando dibunyikan,
Musik asali nan menggentarkan,
Jiwa Indonesia sama merasakan,
Insaflah 'kan diri punya keelokan.*

*Krido Tomo dan Jong Sumatra,
Ketangkasan kita diperlihatkan segera,
Pencak, penolak bahaya dan mara,
Juga dididikkan sang putra.*

*Langen Bekso dan Jong Java,
Putih merah ditunjukkan serta,
Berlomba, pemusnakan raksasa:
Pencuri Putri kiasnya harta.*

⁵Sajak Semar berikut berjudul “Kuatkanlah Barisan” (dimuat dalam *Soeloeh Ra'jat Indonesia*, 17 Oktober 1928), di sini dikutip dari Suyono Suyatno *et al.* (ed.), *Ibid.*, hlm. 115.

...
*Insaf saudara, kaum dan bangsa!
Inilah buah dari pergerakan kita,
Penentang si khianat nan berdosa:
“Persatuan Indonesia” mulai dirasa.*

*Wahai pemimpinku sekawan!
Majulah, jangan berpaling haluan,
Putra Indonesia di belakang tuan,
Menunggu titah kita punya dewan.*

*Saudaraku, Putra Indonesia!
Teguhkanlah barisan kita sedia!
Makin membuta penyerangan bahaya.
Jangan syak, fajarlah: Indonesia Raya!*

⁶Puisi Ar. Kamaloeddin Saropie berjudul "Harapan Kromo" (dimuat dalam *Soeloeh Ra'jat Indonesia*, 24 Oktober 1928), di bawah ini dikutip dari Suyono Suyatno et al. (ed.), *Ibid.*, hlm. 115-116.

*Putra Indonesia ikhtiarkan lantas,
Permohonan kromo perburuhan luas,
Poenale Sanctie minta perhatian keras,
Pasti batalkan dan hilangkanlah lekas.*

...

*Edaran zaman, histori telah gambarkan,
Ekor kemalangan terderita di kemudian,
Endaklah Indonesier sejati sadar pikiran,
Estimewa yang berpengaruh, arifin, hartawan.*

*Nasionalis ditunjang rakyat terbanyak,
Nanti kuat bnasmi bahaya pengikat gerak,
Nah, bersama kerja keras, jangan berfalak,
Nasib merdeka kita arah dan wajib papak.*

⁷Sajak Muhammad Yamin "Indonesia Tumpah Darahku", yang ditulis dua hari sebelum Sumpah Pemuda dikumandangkan, sangat terkenal. Di sini dikutip dua bait saja, dikutip dari Taufiq Ismail et al. (ed.), *Horison Sastra Indonesia* (Jakarta: Horison, 2002), hlm. 33.

*Duduk di pantai tanah yang permai
Tempat gelombang pecah berderai
Berbuih putih di pasir terderai,
Tampaklah pulau di lautan hijau
Gunung-gemunung bagus rupanya,
Dilingkari air mulia tampaknya:
Tumpah darahku Indonesia namanya.*

*Lihatlah kelapa melambai-lambai
 Berdesir bunyinya sesayup sampai
 Tumbuh di pantai bercerai-berai
 Memagar daratan aman kelihatan;
 Dengarlah ombak datang berlagu
 Mengajari bumi ayah dan ibu,
 Indonesia namanya, tanah airku*

⁸Kesadaran berbangsa dalam lingkup yang lebih terbatas dalam sajak sudah muncul jauh sebelum tahun 1927 atau 1928. Sajak Muhammad Yamin dan Sanusi Pane yang disiarkan pada tahun 1921 di *Jong Sumatra* berbicara tentang Sumatra dan Andalas sebagai tanah air. Lihat terutama sajak Muhammad Yamin "Tanah Air" dan "Bahasa, Bangsa" dan sajak Sanusi Pane "Tanah Airku" dalam Suyono Suyatno *et all.* (ed.), *op. cit.*, h. 59--60 dan 65--66.

⁹Sutardji Calzoum Bachri, "Rasa Hormat Maksimal terbadap Puisi", *Horison*, Juli 2001

¹⁰Dikutip dari Suyono Suyatno *et all.* (ed.), *Ibid.*, hlm. 124

¹¹Dikutip dan Suyono Suyatno *et all.* (ed.), *Ibid.*, hlm. 142

¹²Chairil Anwar, *Aku ini Binatang Jalang* (Jakarta: Gramedia, 1991), cetakan ke-5, hlm. 71

¹³Salah satu spirit Sumpah Pemuda adalah bahwa bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu: berbahasa satu, bahasa Indonesia. Namun, pada praktiknya sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi, bahasa Indonesia sekaligus dijadikan alat pemecah persatuan. Pada zaman Orde Lama hal tersebut mewujud antara lain melalui adagium *kontra revolusioner*. Pada zaman Orde Baru hal tersebut mewujud melalui bahasa politik yang secara produktif diciptakan oleh rezim penguasa seperti *gebuk*, *subversif*, *ekstrim kiri*, *ekstrim kanan*, *organisasi tanpa bentuk*, *gerakan pengacau keamanan*, *aktor intelektual* dan lain-lain. Pada zaman reformasi (pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid) ia mewujud dalam bahasa politik *konspirasi menjatuhkan Gus Dur*, *HMI connection*, dan lain-lain. Semua kosakata tersebut diciptakan atau digunakan demi memperkuat usaha memasukkan orang atau sekelompok orang ke dalam kategori *mereka* yang harus dienyahkan demi keutuhan *kita*, tanpa mempersoalkan apakah *mereka* bukan bagian dari *kita*. Menjadikan bahasa sebagai pemecah persatuan inilah yang pernah saya sebut sebagai mengkhianati bahasa Indonesia yang diniatkan sebagai pemersatu oleh Sumpah

Pemuda. Lihat Jamal D. Rahman, "Mengkhianati Bahasa Indonesia", *Horison*, Oktober 2000.

¹⁴Rendra, *Potret Pembangunan dalam Puisi* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996, Cetakan ke-2), h. 33-35

¹⁵Taufiq Ismail, *Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia* (Jakarta: Yayasan Ananda, 1998), h. 19 Pondok Cabe, 14 Oktober 2003

BIODATA

Jamal D. Rahman (Indonesia), menulis puisi, esai, dan kritikan. Kumpulan puisinya: *Airmata Diam* (1993) dan *Reruntuhan Cahaya* (2003).

Menyelesaikan S2 pada FS (kini FIB) UI, Depok. Dia adalah alumnus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep, Madura, Jawa Timur, dan kemudian Institut Agama Islam Negeri (IAIN [kini Universitas Islam Negeri, UN]) Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia juga menulis masalah kesenian dan kebudayaan di berbagai media massa seperti *Kompas*, *Republika*, *Suara Pembaruan*, *Pikiran Rakyat*, *Jawa Pos*, *Media Indonesia*, *Horison*, *Koran Tempo*, dan *JurnalPuisi*.

Dia kerap diundang jadi pembicara dalam acara-acara sastra di beberapa kota Indonesia, Malaysia, dan Singapura, antara lain Program Penulisan Majelis Sastra Asia Tenggara Bidang Esai di Cisarua, Bogor (1999), Seminar Kritikan Sastra Melayu Serantau, Kuala Lumpur (2001), Pertemuan Penulis Asia Tenggara (South-East Asian Writers' Meet) di Kuala Lumpur (2001), dan Pertemuan Sastrawan Nusantara ke-12 di Singapura (2003).

Puisi-puisinya juga dimuat dalam sejumlah antologi bersama, di antaranya: *Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia* (2000), *dari Fansuri ke Handayani: Sastra Indonesia dalam Program Sastrawan Bicara Siswa Bertanya* (2001), *Horison Sastra Indonesia 1: Kitab Puisi* (2002) dan *Hijan Kelon & Puisi 2002* (2002). Tulisan-tulisannya juga dimuat dalam sejumlah buku, di antaranya *Islam dan Transformasi Budaya* (1993), *Romo Mangun di Mata Para Sahabat* (1997), *Tarekat Nurcholishy* (2001), dan *Ulama Perempuan Indonesia* (2002).

Jamal D. Rahman juga menjadi editor (bersama) beberapa buku: *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH Ali Yafie* (Bandung: Mizan, 1997), *dari Fansuri ke Handayani: Sastra Indonesia dalam Program Sastrawan Bicara Siswa Bertanya* (Jakarta: Horison, 2001), *Horison Sastra Indonesia 1-4* (Jakarta: Horison, 2002), dan *Kakilangit Sastra Pelajar* (Jakarta: Horison, 2002).

Di samping itu, dia pernah menjadi redaktur jurnal pemikiran Islam

Islamika (1993-1995), wartawan majalah *Ummat* (1995-1999), dan redaktur majalah sastra *Horison* (sejak 1993).

Kini dia adalah pemimpin redaksi majalah sastra *Horison* dan ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal	: Rabu, 15 Oktober 2003
Judul Makalah	: 1. Multikulturalisme Sastra Indonesia Modern Memantapkan Peran Sastra Indonesia Modern dalam Menghadapi Budaya Global 2. Puisi dan Kesadaran Berbangsa: Indonesia sebagai Malin Kundang
Pemakalah	: 1. Puji Santosa 2. Jamal D. Rahman
Pemandu	: Sudiro Satoto
Pencatat	: 1. Marida G. Siregar 2. Ardianto Bachtiar

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Joko P. (Universitas Bengkulu)
 - a. Pemakalah pertama belum menentukan batasan yang tegas tentang sastra Indonesia. Bagaimana dengan istilah yang serupa seperti sastra Nusantara dan sastra klasik?
 - b. Untuk pemakalah kedua, kapan sesungguhnya Indonesia lahir, pada 1928 atau 1945? Apakah pemakalah lupa bahwa lagu "Indonesia Raya" diciptakan dibuat pada 1927?

Jawaban:

Banyak pendapat tentang sastra Indonesia. Dalam Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII, yang diutamakan adalah sastra yang menggunakan bahasa Indonesia. Apakah nanti ditambah dengan ditulis oleh orang Indonesia atau mesin cetak, boleh saja, sedangkan istilah *Nusantara* lebih mengacu pada sastra daerah dan sastra klasik mengacu pada keunggulan sastra Melayu. Sastra dan bahasa Indonesia seharusnya mampu menghadapi arus globalisasi dan modern. Sebagai sarana pengungkapan jiwa, perasaan, dan pikiran bahasa Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kondisi zama, termasuk ragam dan jenis sastra. Revitalisasi sastra Nusantara/daerah sangat diperlukan.

2. **Pertanyaan:** Hunggu Tadjuddin Usup (IKIP Negeri Manado)

Bagi saya, terserah orang-orang berpendapat bahwa bahasa Indonesia adalah "bahasa kemunafikan", "bahasa korupsi", yang pasti bahasa Indonesia adalah media bagi modernisasi dan globalisasi. Dalam era ini sastra Indonesia terombang-ombing. Generasi sekarang lebih banyak mengenal tokoh kartun dari Jepang daripada mengenal sastrawan kita.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

Paulina Pannen, M. Yunus, Teguh Prakoso

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra, FKIP Universitas Terbuka

Pendahuluan

Kehadiran dan kecepatan perkembangan teknologi informasi (TI) telah menyebabkan terjadinya proses perubahan dramatis dalam segala aspek kehidupan. Kehadiran TI tidak memberikan pilihan lain kepada dunia pendidikan selain turut serta dalam memanfaatkannya. TI sekarang ini memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang bersifat global dari dan ke seluruh penjuru dunia sehingga batas wilayah suatu negara menjadi tiada dan negara-negara di dunia terhubungkan menjadi satu kesatuan yang disebut *global village* atau desa dunia. Melalui pemanfaatan TI, siapa saja dapat memperoleh layanan pendidikan dan institusi pendidikan mana saja dan kapan saja dikehendaki.

Menurut sebagian kalangan, TI adalah solusi bagi beragam masalah pendidikan. Secara khusus, pemanfaatan TI dalam pembelajaran dipercaya akan:

1. meningkatkan kualitas pembelajaran,
2. mengembangkan keterampilan TI (*TI skills*) yang diperlukan oleh siswa ketika bekerja dan dalam kehidupan nanti,
3. memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran,
4. menjawab *the technological imperative* (keharusan berpartisipasi dalam TI),
5. mengurangi biaya pendidikan, dan
6. meningkatkan rasio biaya-manfaat dalam pendidikan.

Sistem pendidikan yang tidak turut serta memanfaatkan TI akan menjadi kadaluwarsa dan kehilangan kredibilitasnya. Namun, di sisi lain ada juga pendapat yang menyatakan bahwa situasi ini lebih disebabkan oleh adanya konspirasi yang mengakibatkan terjadinya ketergantungan dunia pendidikan terhadap TI. Kedua pendapat itu tidak perlu diperdebatkan karena memiliki kesahihan tersendiri dari perspektif yang berbeda. Justru yang seharusnya menjadi perhatian adalah bagaimana dampak TI terhadap sistem pendidikan, terutama sistem pembelajaran, serta bagaimana strategi pemanfaatan TI dalam pembelajaran? Tentunya, untuk semua itu diperlukan langkah-langkah strategis agar dapat diperoleh hasil yang optimal.

Pembelajaran Bahasa Indonesia (BI) merupakan salah satu subsistem yang tidak luput dari arus perubahan yang disebabkan oleh kehadiran TI yang sangat intrusif. Dengan segala atributnya, TI menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan lagi dalam sistem pembelajaran BI.

Beragam kemungkinan ditawarkan oleh TI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran BI. Di antaranya ialah (1) TI untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional tenaga pengajar BI, (2) TI sebagai sumber belajar dalam pembelajaran BI, (3) TI sebagai alat bantu interaksi pembelajaran BI, dan (4) TI sebagai wadah pembelajaran, termasuk juga perubahan paradigma pembelajaran BI yang diakibatkan oleh pemanfaatan TI dalam pembelajaran BI.

Perubahan Budaya Pembelajaran Bahasa Indonesia

Pembelajaran BI memiliki tradisi, kaidah ilmiah, serta norma akademik yang menjadikannya sebagai suatu sistem budaya tersendiri. Dari masa ke masa tradisi pembelajaran BI mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, beragam kebutuhan masyarakat, serta kemajuan teknologi informasi.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, TI membawa dampak tersendiri terhadap sistem pembelajaran BI. TI menawarkan beragam bentuk pemanfaatan dalam sistem pembelajaran BI pada khususnya dan pembelajaran pada umumnya, yaitu *computer assisted instruction (CAI)*, *computer managed learning (CMI)*, dan *computer mediated communication (CMC)*. Bentuk pemanfaatan TI yang mutakhir dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran maya atau yang dikenal dengan istilah *virtual learning*. Proses pembelajaran maya terjadi pada kelas maya (*virtual classroom*) dan atau universitas maya (*virtual university*) yang berada dalam *cyberspace* (dunia *cyber*) melalui jaringan internet. Proses pembelajaran maya berintikan keterpisahan ruang dan waktu antara siswa dan tenaga pengajar, serta sistem belajar terbuka--yang berintikan akses yang terbuka dan kebebasan memilih ragam sumber belajar serta alur proses belajar oleh siswa. Pembelajaran maya yang memanfaatkan *the world wide web* (WWW) pada prinsipnya memberikan apa yang diinginkan setiap orang (dalam beragam bentuk), di tempat yang diinginkannya, pada saat yang diinginkannya (*to give what people want, where they want it, and when they want it - www*). Dengan demikian, siswa dapat memperoleh bahan ajar yang sudah dirancang dalam paket-paket pembelajaran yang tersedia dalam situs maya. Biasanya bahan ajar disediakan dalam bentuk multimedia terpadu, dengan kemungkinan untuk mencetak bagian-bagian tertentu pada *printer* seseorang. Siswa dapat mempelajari bahan ajar tersebut sendiri, tanpa bantuan belajar apa pun atau dari siapa pun. Jika diperlukan, siswa dapat memperoleh bantuan belajar dalam bentuk interaksi yang difasilitasi oleh komputer, yaitu belajar berbantuan komputer (*computer assisted learning* atau *interactive web pages*), belajar berbantuan tenaga pengajar secara *synchronous* (dalam titik waktu yang sama), maupun *asynchronous* (dalam titik waktu yang berbeda), dan atau belajar berbantuan sumber belajar lain seperti teman dan

pakar melalui surat elektronik (*e-mail*), diskusi (*chat-room*), perpustakaan (melalui kunjungan ke situs-situs basis informal yang ada dalam jaringan internet). Di samping itu, siswa juga memiliki catatan-catatan pribadi dalam *note-book*. Penilaian hasil belajar mahasiswa (*web-based evaluation*) juga dapat dilakukan secara terbuka melalui komputer--kapan saja mahasiswa merasa siap untuk dinilai (atau *embedded/terintegrasi* dalam *virtual course*).

Secara umum proses pembelajaran maya dapat menjadi sistem pembelajaran tersendiri (*instructor independent*) atau juga digabungkan dengan proses pembelajaran langsung (tatap muka di kelas) yang mengandalkan kehadiran tenaga pengajar (*instructor dependent*). Apa pun bentuknya, pemanfaatan TI dalam pembelajaran membawa perubahan tradisi atau budaya pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis TI, peran tenaga pengajar sebagai *the sole authority of knowledge* berubah menjadi fasilitator bagi siswa untuk berinteraksi dengan berbagai sumber belajar dan bersama siswa menemukan berbagai sumber belajar dan informasi terkini dalam bidang ilmunya. Dalam hal ini, tenaga pengajar dan siswa tidak mungkin lagi untuk bergantung hanya pada satu sumber belajar saja. Sumber belajar dalam pembelajaran berbasis TI tidak hanya terbatas pada ruang kelas, satu orang tenaga pengajar, satu buku teks, atau sumber yang terdapat di lingkungan institusi pendidikan itu sendiri, melainkan terbuka lintas institusi, lintas negara, dan lintas waktu.

Sementara itu, adanya tuntutan untuk berinteraksi dengan beragam sumber belajar mengakibatkan siswa perlu menguasai keterampilan navigasi informasi (*knowledge navigation*), keterampilan berkomunikasi dengan beragam sumber belajar, dan keterampilan belajar mandiri. Keterampilan tersebut merupakan rangkaian kompetensi yang harus dikuasai siswa dan menjadi indikator kualitas siswa pada era teknologi informasi ini. Dalam hal ini, siswa bukan lagi gelas kosong yang harus diisi oleh tenaga pengajar, melainkan merupakan manusia utuh, unik, memiliki potensi, serta kaya akan pengalaman belajar dan pengetahuan yang telah dikuasainya. Dengan demikian, siswa diasumsikan mampu untuk belajar secara mandiri melalui interaksinya dengan beragam sumber belajar.

Dengan perubahan-perubahan tersebut, budaya pembelajaran mengalami perubahan secara keseluruhan. TI secara nyata menyebabkan terjadinya perubahan budaya pembelajaran, dari pembelajaran yang berfokus pada tenaga pengajar atau materi (*teacher-centered* atau *content-centered*) menuju budaya pembelajaran yang berfokus pada siswa dan kompetensi atau pengalaman belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada siswa/kompetensi memiliki ciri utama yang berbeda dari pembelajaran berorientasi pada tenaga pengajar/materi. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut.

Pembelajaran berorientasi pada siswa atau kompetensi dicirikan oleh:

- 1) belajar,
- 2) siswa,
- 3) proses dan produk,
- 4) ragam alternatif, dan
- 5) penemuan atau konstruksi makna.

Pembelajaran berorientasi pada dosen atau materi dicirikan oleh:

- 1) mengajar,
- 2) dosen,
- 3) materi keilmuan,
- 4) jawaban yang benar atau baik,
- 5) penyajian oleh dosen, dan
- 6) perampatan.

Kendati perbedaan keduanya bersifat *continuum* (rentangan), pembelajaran berbasis TI akan secara kental diwarnai dengan pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan kompetensi. Dalam konteks ini, arti belajar dan mengajar atau menjadi tenaga pengajar juga berubah sebagaimana tampak dalam Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam pembelajaran berorientasi pada siswa dan kompetensi, belajar berarti menciptakan makna sebagai hasil interaksi siswa dengan lingkungan belajar dan beragam sumber belajar, termasuk tenaga pengajar. Dengan demikian, tidak ada lagi partisipasi siswa yang pasif menerima informasi keilmuan yang disampaikan dosen, dan kemudian mereproduksi dari informasi keilmuan secara benar dan tepat sebagai hasil belajar. Sementara itu, menjadi tenaga pengajar dalam pembelajaran berorientasi pada siswa dan kompetensi berarti menjadi perancang pengalaman belajar yang bermakna, dan menjadi fasilitator proses belajar siswa. Tenaga pengajar merupakan *scaffolder* yang membantu siswa untuk mengisi ketimpangan skemanya (*zone of proximal development*). Dengan demikian, dalam pembelajaran berorientasi pada siswa dan kompetensi, tenaga pengajar tidak lagi mengajar, tetapi memberi bantuan kepada siswa untuk berkembang. Perubahan budaya belajar tersebut memperlihatkan bahwa dalam budaya belajar yang baru ini siswa diposisikan sebagai pembelajar yang menggali, mengolah, dan membangun makna (pengetahuan, sikap, dan keterampilan). Orientasi pembelajaran pun bergeser dari *teaching* ke *learning*, dari *transmission* (sekadar penyampaian informasi) ke *transaction* dan *transformation* (memberdayakan siswa sebagai individu yang memiliki potensi dan kemampuan untuk menggali, mencari, serta mengolah dan memaknai informasi).

Tabel 1: Perbedaan Paradigma Pembelajaran

Pembelajaran berorientasi pada Tenaga Pengajar/Materi		Pembelajaran berorientasi pada Siswa dan Kompetensi	
Belajar adalah	Mengajar adalah	Belajar adalah	Menjadi tenaga pengajar adalah
... menghasilkan kinerja yang betul/ benar (correct performance of a task)	... menyampaikan informasi keilmuan yang akurat dan benar	... pemahaman pribadi (personal understanding)	... merancang tugas yang menantang
... proses yang kumulatif	... berurutan (sequential)	... sangat individual, bermakna, dan selektif	... mengobservasi perkembangan siswa, dan berinteraksi dengan siswa untuk menegosiasi makna
... menerima semua informasi keilmuan (receptive)	... menyampaikan informasi secara langsung kepada siswa	... aktif berpartisipasi (mental maupun fisik)	... membantu proses belajar siswa
... proses yang terjadi di luar kemudian masuk ke dalam diri siswa	... menata lingkungan sesuai urutan (sequence)	... mengkonstruksikan (membangun) makna	... menciptakan ketidakseimbangan yang menantang siswa untuk berpikir kritis
... berlatih dan menunjukkan keterampilan (yang benar)	... memberi penghargaan kepada tugas/ jawaban yang benar	... mengkaji dan mengintegrasikan beragam informasi dalam rangkaian kebermaknaan	... membantu siswa untuk mengkaji ulang dan menganalisis kasus/ serangkaian kejadian
... menghindari kesalahan	... menyampaikan "satu kebenaran" kepada siswa	... berani berbuat salah dan memperbaikinya	... menyajikan beragam perspektif, dan kesalahan siswa merupakan bagian yang melekat dalam proses belajar

Perubahan budaya pembelajaran yang diakibatkan oleh pemanfaatan TI sangat bergantung pada berbagai komponen dalam sistem pendukung pembelajaran 81. Tenaga pengajar merupakan salah satu komponen terpenting yang sangat berperan dalam perubahan tersebut. Perubahan budaya pembelajaran menuntut kemampuan kreatif, akses, serta wawasan tenaga pengajar tentang perubahan tersebut. Di samping itu, tenaga pengajar juga dituntut untuk memiliki keterampilan teknis penguasaan TI agar dapat melakukan perubahan secara operasional, dan bersikap

positif terhadap TI serta perubahan tersebut.

Di samping tenaga pengajar, siswa juga perlu dipersiapkan begitu juga para administrator pembelajaran karena tidak ada perubahan yang terjadi secara isolatif dan dalam kondisi vakum. Dengan demikian, perubahan budaya pembelajaran yang diakibatkan oleh pemanfaatan TI bukan hanya untuk segelintir orang, atau satu dua komponen saja, tetapi berlaku bagi semua tatanan sistem pembelajaran BI, bahkan sistem pendidikan di suatu institusi pendidikan secara umum. Konsekuensinya, imbas maupun hasil dari perubahan budaya pembelajaran juga menjadi milik seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembelajaran BI.

Iklim akademik yang diciptakan oleh pemanfaatan TI dalam pembelajaran BI adalah adanya transparansi pembelajaran (sehingga pembelajaran tidak menjadi ritual milik tenaga pengajar saja), keterbukaan akan keberagaman (karena sumber belajar yang tidak hanya satu, dan berbagai alternatif sumber informasi yang tersedia), serta proses evaluasi pembelajaran yang otentik dan berkelanjutan (sebagai bentuk akuntabilitas). Iklim akademik yang tertutup yang telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun temurun menjadi minimal atau bahkan hilang dan digantikan dengan iklim akademik yang terbuka dalam pembelajaran BI yang memanfaatkan TI.

Pemanfaatan TI dalam Pembelajaran BI

Berbagai kalangan mempersepsikan TI akan menjadikan pembelajaran lebih efektif, efisien, dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Namun, perlu diperhatikan bahwa TI bukanlah tujuan atau pembelajaran itu sendiri sehingga betapapun memesonanya TI dengan segala kapasitas dan atributnya, pembelajaran itu sendiri yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hasilnya.

Secara umum, TI dalam pembelajaran memiliki potensi untuk memberdayakan siswa, yaitu mendorong tumbuhnya keterampilan belajar siswa (*learning to learn*), keterampilan bernalar siswa (*higher order thinking skills*), keterampilan berkomunikasi (secara tertulis ataupun lisan), dan juga kemampuan siswa untuk menemukan beragam sumber belajar. Pemanfaatan TI yang dirancang dengan cermat dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, serta kemandirian siswa untuk menginisiasikan kontak, diskusi, dan refleksi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Oleh karena itu, pemanfaatan TI juga dipercaya dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerja secara kelompok, dan meningkatkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial siswa dalam pemanfaatan TI bukanlah keterampilan sosial dalam definisi tradisional, melainkan keterampilan sosial dalam era TI, misalnya, pemanfaatan telepon genggam, *short message services*, dan *palm notebook*.

Sekarang ini seseorang memiliki keterlibatan sosial yang jauh lebih tinggi daripada sebelum ada TI (misalnya *e-mail*, atau telepon genggam).

Secara operasional, TI dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sebagaimana media pembelajaran lain. Presentasi menggunakan *powerpoint* dan *LCD (liquid crystal display)* dapat digunakan oleh seorang tenaga pengajar dalam menyajikan materi pembelajaran. Begitu juga dengan video atau kaset audio. *E-mail* dapat digunakan untuk tenaga pengajar mengirimkan tugas individual kepada siswa, dan digunakan siswa untuk memasukkan tugasnya kepada tenaga pengajar atau berdiskusi dengan temannya tentang tugasnya. Jaringan internet juga dapat digunakan untuk mencari informasi yang terdapat di berbagai situs institusi ataupun publikasi ilmiah. Secara khusus, TI dalam pembelajaran BI dapat dimanfaatkan untuk mencari beragam sumber belajar, sebagai alat bantu interaksi pembelajaran, sebagai wahana penyediaan materi pembelajaran, mengakomodasikan produk hasil belajar siswa, dan berkomunikasi (siswa dengan siswa, siswa dengan tenaga pengajar, siswa dengan beragam sumber), serta untuk pengembangan profesionalitas tenaga pengajar.

TI untuk Beragam Sumber Belajar

TI dapat digunakan untuk mencari beragam sumber belajar yang ada di jaringan internet. Sumber belajar yang ada di jaringan internet memiliki ruang lingkup yang sangat luas yang berasal dari berbagai jenis informasi, misalnya, surat kabar, majalah ilmiah, catatan pribadi, kutipan, peribahasa, buku, dan iklan. Selain itu, sumber belajar yang ada di jaringan internet relatif bersifat mutakhir sehingga siswa dan tenaga pengajar dapat mengikuti perkembangan bidang ilmu dengan baik.

Mengingat ruang lingkupnya yang luas, mencari sumber belajar di jaringan internet memerlukan keterampilan tersendiri. Tenaga pengajar dan siswa perlu menguasai keterampilan temu kembali informasi (*information retrieval skills*) menggunakan mesin-mesin pencari informasi (*search engine*) di jaringan internet. Keterampilan temu kembali informasi dapat membantu tenaga pengajar dan siswa untuk membatasi ruang lingkup sumber belajar yang dibutuhkan.

Dalam hal Bahasa Indonesia, sumber belajar Bahasa Indonesia yang tersedia di jaringan internet belumlah terlalu banyak. Pada umumnya, sumber belajar yang tersedia pada jaringan internet dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, sumber belajar dapat digunakan dalam konteks belajar bahasa untuk belajar (memperoleh pengetahuan). Sumber belajar jenis pertama ini relatif cukup banyak, termasuk jurnal, berita, dan opini. Kedua, sumber belajar untuk perluasan wawasan kebahasaan dari linguistik, sastra, hingga keterampilan berbahasa. Di

antara berbagai sumber belajar BI yang tersedia di internet adalah sebagai berikut.

No.	Aspek	Alamat Situs	Informasi yang
	Pembelajaran BI		Disampaikan
1	Keterampilan Menulis	http://www.ialf.edu/kipbipa/papers/wahva.doc	Makalah keterampilan menulis
2	Keterampilan Berbicara	http://www.damar.or.id/artikel/keterampilandasarfasilitator.php	Berbicara sebagai Keterampilan Dasar Fasilitator
3	Keterampilan Menyimak	http://www.ialf.edu/kipbipa/papers/imRochima.doc	Artikel tentang pentingnya menyimak
4	Keterampilan Membaca	http://www.itb.ac.id/Ilp3/aa/bab03.doc	Keterampilan Membaca dan Belajar
5	Tata Bahasa	http://www.seasite.niu.edu/Indonesia/TataBahasa/Default.htm	Tata Bahasa Indonesia (Berbahasa Inggris)
6	Kosakata	http://www.mail-archive.com/i18n@linux.or.id/msg00119.html	Kosakata bahasa Indonesia (Berbahasa Inggris)
7	Kesusastraan	http://www.cybersastra.net	Perkembangan Sastra Terkini
8	Kebahasaan	http://www.bahasa-sastra.web.id	Perkembangan Bahasa dan Makalah Bahasa Indonesia (sastra)
9	Pengajaran Bahasa Indonesia	http://www.dikdasmen.depdiknas.q.o.id/html/plp/kompetensi_guru_bahasa_in.htm/ http://www.pdk.qo.id/Jurnal/32/pelaksanaan_pengajaran_bahasa_in.htm/	Kompetensi guru bahasa Indonesia

TI sebagai Alat Bantu Interaksi Pembelajaran BI

Memanfaatkan TI sebagai alat bantu interaksi pembelajaran BI memerlukan perancangan pembelajaran yang sistematis. Perlu dihindarkan pemanfaatan TI yang bersifat sekadar suplemen atau bagian tambahan yang tidak bermakna bagi proses pembelajaran. Oleh karena itu, sejak awal perlu ada kejelasan tentang keterampilan atau kompetensi yang hendak dicapai melalui pemanfaatan TI. Berturut-turut kemudian perlu dipertimbangkan dampak pengiring (*myturant effect*) dan nilai tambah (*added value*) yang diperoleh dari pemanfaatan TI (dibandingkan pemanfaatan media lain), jangka waktu interaksi, bagaimana interaksi akan dilaksanakan (Kontak dengan siapa? Strategi?).

Untuk keterampilan berbahasa, sumber belajar di jaringan internet serta TI dapat dimanfaatkan sebagai berikut.

Membaca	Keterampilan membaca cepat, membaca bermakna, inferensi, skimming dan scanning, analisis wacana
Menulis	Keterampilan menulis beragam jenis tulisan: surat, sinopsis, karya ilmiah, rangkuman, argumentasi, puisi, cerita pendek, dll.
Menyimak	Keterampilan mendengarkan - dari berbagai situs radio, televisi.
Berbicara	Latihan (<i>drill and practice</i>), diskusi, pengambilan keputusan, mengobrol.

Interaksi untuk keterampilan membaca, menulis, menyimak dapat diakomodasikan melalui pemanfaatan TI dan sumber belajar di internet. Namun, interaksi untuk keterampilan berbicara sampai saat ini masih memerlukan pemanfaatan TI yang berbasis komputer dalam bentuk *computer assisted instruction*, dan program simulasi yang lebih menekankan pada latihan berbicara (*drill and practice*).

Sementara itu, untuk unsur bahasa seperti kosakata, tata bahasa, kesusasteraan, dan kebahasaan, interaksi berbasis TI dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk kosakata, di jaringan internet terdapat berbagai kamus, termasuk tesaurus. Mudah-mudahan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* sudah masuk dalam internet, begitu juga brosur perkembangan bahasa Indonesia. Untuk kesusasteraan dan kebahasaan, analisis dan kajian berbagai karya dapat ditemukan di internet sehingga diskusi dan analisis lebih lanjut (perbandingan, argumentasi, dll.) dapat difasilitasi.

TI sebagai Wahana Materi Pembelajaran

TI dapat digunakan sebagai bagian terintegrasi dalam materi pembelajaran BI. Beragam sumber belajar yang dapat ditemukan di jaringan internet melalui pemanfaatan TI. Di samping itu, TI juga membantu tenaga pengajar yang mau dan ingin mengembangkan program pembelajarannya di internet. Tenaga pengajar dapat merancang suatu program pembelajaran yang sistematis, kemudian dilengkapi dengan beragam komponen, seperti komponen *e-text*, *evideo*, *e-audio*, sumber belajar lain (*URL addresses*), *e-test*, *eeercises/assignment*. Setelah itu, tenaga pengajar dapat membuat rancangan pembelajaran atau SAP untuk semua materi tersebut sehingga siswa kemudian dapat melakukan pembelajaran mandiri dengan menggunakan beragam komponen pembelajaran berbasis TI yang telah dirancang oleh tenaga pengajar.

TI sebagai wahana materi pembelajaran juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memuat hasil karyanya (produk dalam bentuk apapun) di jaringan internet. Siswa dapat secara kreatif membuat situsnya sendiri yang berisi hasil-hasil karyanya selama mengikuti proses pem-

belajaran. Dengan demikian, situs siswa akan menjadi portofolio yang menunjukkan hasil karya dan kompetensi yang dicapainya.

Peran TI sebagai wahana materi pembelajaran ini memudahkan diseminasi pembelajaran BI ke berbagai penjuru dunia. Terutama dalam rangka menyambut AFTA dan APEC, bukan tidak mungkin BI menjadi salah satu bahasa yang diminati oleh banyak orang asing untuk dipelajari. Hal itu terlihat dari banyaknya lowongan pekerjaan di Indonesia yang dibuka bagi orang asing. Materi pembelajaran BI yang ditempatkan di jaringan internet dapat menjadi materi pembelajaran BI yang bersifat global dan terbuka untuk diakses siapa saja di mana pun mereka berada. Bahkan, negara-negara seperti Belanda, Australia, dan Malaysia telah memiliki situs-situs khusus tentang BI seperti berikut.

Alamat Situs Internet Bahasa Indonesia di Belanda, Malaysia, dan Australia

No.	Negara	Alamat Situs	Informasi yang Disampaikan
1	Belanda	http://www.edvos.demon.nl/bahasa-indonesia/	Bahasa dan budaya Indonesia
2	Australia	http://www.expatriat.or.id/info/bahasa/html/	Bahasa Indonesia
3	Malaysia	http://tatabahasa.tripod.com/	Tata Bahasa Melayu (Indonesia)

TI dalam Pengembangan Profesional Tenaga Pengajar

TI memiliki peran penting dalam pengembangan profesional tenaga pengajar. Melalui pemanfaatan TI, tenaga pengajar dapat menjadikan internet sebagai perpustakaan, menjadikan e-mail sebagai alat komunikasi antarsejawat, menjadikan *bulletin board* sebagai sarana untuk memperoleh informasi mutakhir tentang bidang ilmunya dan menjadikan kesempatan *chatting* untuk mengobrol (atau berdiskusi) dengan santai tentang bidang ilmunya.

Berikut ini alamat situs beberapa perpustakaan digital, asosiasi profesi, jurnal, perguruan tinggi yang menawarkan program studi lanjut dalam bidang pendidikan BI.

No.	Jenis Informasi	Alamat Situs	Informasi yang Disampaikan
1	Perpustakaan <i>On-line</i>	http://www.lib.uum.edu.my/	Koleksi buku <i>on-line</i> (berbahasa Inggris)
2	Asosiasi Profesi	http://www.dewankehormatanpwi.com/aktivitas.php?Subiek=1/	Kode etik insan pers
3	Jurnal PT yang menawarkan beasiswa, termasuk jurusan bahasa Indonesia	http://www.dikti.org/linkPT.html/	Link perguruan tinggi se-Indonesia yang menawarkan beasiswa BPPS, termasuk BI

Optimalisasi Pemanfaatan TI dalam Pembelajaran BI

Kehadiran TI pada saat ini sudah tidak mungkin dihindarkan lagi. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan untuk menerima TI, dan kemampuan untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin. Untuk dapat memanfaatkan TI dalam pembelajaran BI secara optimal, diperlukan hal-hal berikut:

1. Visi Pembelajaran BI

Visi ini yang menjelaskan bagaimana pembelajaran BI seharusnya: karakteristik, proses, dan paradigmanya--pada masa mendatang. TI membawa perubahan dalam berbagai aspek pembelajaran BI, termasuk paradigma pembelajarannya. Apakah pembelajaran BI tetap berfokus pada materi dan tenaga pengajar? Ataukah pembelajaran BI yang diinginkan adalah yang berfokus pada siswa atau kompetensi? Apakah pembelajaran BI akan memiliki sifat fleksibel, dari sisi peserta pembelajaran serta akses? Apakah pembelajaran BI dipersepsikan memerlukan TI? Dalam hal ini, perlu ada kejelasan visi pembelajaran BI yang memanfaatkan TI, sehingga TI dapat dimanfaatkan, dengan optimal.

2. Realokasi Sumber Daya

Hal ini sangat penting karena dari waktu ke waktu penerimaan setiap lembaga pendidikan relatif tidak meningkat. Untuk memanfaatkan TI, yang memiliki *initial cost* yang sangat tinggi, diperlukan keberanian pimpinan lembaga pendidikan untuk merealokasikan sumberdaya sesuai dengan prioritas yang ditentukan. Alokasi sumberdaya ini dapat dibuat secara bertahap sehingga pengembangan pemanfaatan TI pun dilakukan secara bertahap dan sistematis.

3. Strategi Implementasi

Sesuai dengan alokasi sumberdaya yang dibuat bertahap, maka strategi implementasi pun perlu dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pentahapan ini menjamin bahwa langkah yang dilakukan tidak terlalu besar sehingga dapat menjungkirbalikkan

tradisi pembelajaran BI yang sekarang sudah berjalan dan banyak orang sudah merasa nyaman dengan hal itu. Pentahapan juga dapat memberikan gambaran tentang keuntungan dari pemanfaatan TI, contoh keberhasilan pemanfaatan TI yang kemudian dapat dirampatkan kepada kasus-kasus lainnya, serta nilai tambah yang dapat diperoleh melalui pemanfaatan TI (misalnya keterampilan tenaga pengajar, siswa)

4. **Infrastructure**

Sarana dan prasarana menjadi sangat penting dalam upaya pemanfaatan TI dalam pembelajaran BI. Pemanfaatan TI sangat bergantung pada kehadiran perangkat keras pendukung, perangkat lunak, jaringan, serta sumberdaya manusia yang dapat mendukung. Jika salah satu tidak tersedia, maka pemanfaatan TI tidak akan optimal.

5. **Akses siswa kepada TI**

Walaupun pemanfaatan sudah dirancang dengan sistematis dan cermat, jika siswa tidak atau belum memiliki akses terhadap TI, pemanfaatan TI akan menjadi beban semata. Jika memungkinkan, institusi pendidikan dapat menyediakan TI yang dapat diakses oleh siswa, atau institusi pendidikan dapat menjamin bahwa siswa dapat mengakses TI, misalnya, melalui penyediaan daftar warnet, *computer and internet rental*.

6. **Kesiapan Tenaga Pengajar**

Pembelajaran BI merupakan proses untuk *knowledge production*, *knowledge transmission*, dan *knowledge application* dalam bidang Bahasa Indonesia. Sementara itu, TI adalah alat yang dapat mempermudah dan mempercepat terjadinya proses tersebut. Tenaga pengajar perlu memiliki sikap dan pengetahuan yang jelas tentang hal tersebut sehingga tidak menjadikan TI sebagai pembelajaran BI itu sendiri. Oleh karena itu, persiapan tenaga pengajar dimulai dari tahap penyadaran, sampai tahap adopsi dan pemanfaatan perlu dilakukan, melalui berbagai cara, seperti pelatihan, *learning by doing*, sekolah lanjut. Kesiapan tenaga pengajar meliputi computer and internet literacy, pengetahuan teknis dan operasional komputer dan internet, keterampilan merancang pembelajaran BI berbasis TI keterampilan memproduksi pembelajaran BI berbasis TI, serta keterampilan mengintegrasikan TI dalam sistem pembelajaran BI secara umum. Institusi pendidikan perlu melakukan penataan tentang penghargaan bagi tenaga pengajar yang telah mulai berpartisipasi dalam pemanfaatan TI, sebagai salah satu bentuk motivasi eksternal.

7. Kendali Mutu dan Penjaminan Mutu

Inisiasi pembelajaran BI berbasis TI perlu disikapi sebagai proyek pengembangan kualitas pembelajaran BI. Dalam hal ini, perencanaan secara konseptual maupun operasional merupakan syarat yang tidak dapat ditawar. Pemantauan inisiasi selama dilaksanakan juga merupakan mekanisme pengendalian mutu yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian, evaluasi keberhasilan (*costeffectiveness* dan *cost efficiency*) menjadi mata rantai akhir untuk menentukan sejauhmana pembelajaran berbasis TI dapat memberikan hasil yang optimal. Perlu diyakinkan bahwa pembelajaran BI berbasis TI akan memberikan hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, bukannya berkurang atau menyimpang.

8. Kolaborasi dan Konsorsium

Pembelajaran BI berbasis TI, seperti juga pembelajaran berbasis TI lainnya, tidak mungkin untuk berdiri sendiri. Kolaborasi dan pengembangan jejaring keahlian merupakan landasan dasar dari keberhasilan pembelajaran BI berbasis TI. Artinya, dituntut kerjasama dari berbagai pihak dalam beragam peran untuk dapat mengembangkan pembelajaran BI berbasis TI, melaksanakannya, serta mengevaluasi dan merevisi untuk kemudian meningkatkan kualitasnya.

Kedelapan strategi tersebut memerlukan perencanaan dan juga sumberdaya yang tidak sedikit. Apakah kita mampu dan mau melakukan semua itu? Menurut Machiavelli dalam bukunya *The Prince*: *'There is nothing more difficult to plan, more doubtful of success, nor more dangerous to manage than the creation of a new order of things'*. Jika memang kita perlu berubah, kita dapat melakukannya.

Catatan Akhir

TI dapat membantu untuk memperkaya, mempermudah, dan mempercepat pembelajaran BI yang selama ini sudah dilaksanakan berdasarkan tradisi akademiknya. Dengan beragam kemudahan yang dijanjikan TI, pemanfaatan TI dipercaya akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran BI. Di samping itu, pembelajaran BI berbasis TI juga menyebabkan terbukanya akses terhadap pembelajaran bagi semua orang secara luas. Marilah kita menerima kehadiran TI dengan mata yang terbuka (tidak menjadi buta karena TI atau dibutakan oleh TI), pikiran terbuka (sehingga kita dapat mempelajarinya dan mengkaji secara mendalam keuntungannya bagi pembelajaran BI), dan hati yang terbuka (sehingga kita dapat membantu mereka yang belum dapat menerima TI atau belum memiliki akses terhadap TI).

DAFTAR PUSTAKA

- Barron, A.E., *et.al.* 2002. *Technologies for Education: A Practical Guide*. 4th Ed. Greenwood Village, CO: Libraries Unlimited.
- Khan, A.W. 2002. *Telecommunications and the Global Education Challenge*. PTC 2002 Plenaries.
- Newby, T. J., *et.al.* 2000. *Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction, Integrating Computers, and Using Media*. 2nd Ed. Upper Saddle River, N.J.: Merill Prentice Hall.
- Padolina, C.D. 2001. *IT for University Teaching*. Paper presented at the UP Alumni Council Meeting, Bahay Alumni, UP Diliman, Quezon City, June 15, 2001.
- Purbo, O.W. 2003. Indonesia. *Digital Review of Asia Pacific 2003/2004*.
- Teeler, D. & Gray, P. 2000. *How To Use The Internet in ELT*. Essex, England: Pearson Education Limited.

SASTRA INDONESIA DAN MULTIMEDIA

Medy Loekito

Penyair/Ketua Yayasan Multimedia Sastra

Pendahuluan

Akhir-akhir ini peranan komputer yang mendukung dan didukung teknik *multimedia* dan jalur internet semakin meningkat sehingga diprediksikan mesin pintar ini akan menjadi perangkat dominan dalam kehidupan manusia pada era sekian tahun mendatang. Apabila dahulu karya sastra atau laporan hanya berbentuk goresan tinta hitam tak bergerak di atas lembar-lembar kertas, dengan jumlah terbatas atau *photocopy* yang buram, sekarang sistem dalam mesin pintar yang akrab dikenal sebagai *artificial intelligent* dan *intelligent agent* telah memungkinkan segala jenis naskah tampil dengan berbagai variasi, lengkap dengan warna, suara, bahkan animasi. Tidak itu saja, karya juga bisa disebarluaskan dalam jumlah tak terbatas dan juga ke wilayah tak terbatas.

Meskipun di Indonesia peran mesin pintar ini belum dominan, penggunaan internet secara umum di seluruh dunia mencapai percepatan peningkatan yang cukup drastis, yakni sebanyak delapan kali lipat dalam kurun waktu 3 tahun. Jika pada tahun 1997 diperkirakan ada lebih kurang lima puluh juta pengguna internet, jumlah ini meningkat menjadi lebih kurang empat ratus juta pada tahun 2000.

Definisi Multimedia

Istilah *multimedia*, berdasarkan kamus *The American Heritage*, memiliki dua arti, yakni

1. segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan kombinasi berbagai media dan
2. segala sesuatu yang berhubungan dengan aplikasi komputer yang dapat mengombinasikan teks, gambar, animasi dan suara menjadi satu paket.

Namun, akhir-akhir ini, kata *multimedia* lebih sering dihubungkan dengan aplikasi komputer yang mengintegrasikan teks, gambar, animasi dan suara. Arti inilah yang selanjutnya akan diperbincangkan dalam makalah ini.

Istilah "multimedia" sendiri berasal dari bahasa Latin yakni *multus* yang berarti banyak, dan *medium* yang berarti medium. Beberapa ahli yang bergerak di bidang komputer dan siber, antara lain, Dr. Jean Paul Jacob, menyatakan bahwa multimedia adalah teknologi komputer yang memungkinkan penyimpanan, pengolahan dan penampilan berbagai kombinasi

elemen teks, gambar, dan suara.

Dengan demikian, merunut sejarah *multimedia*, harus melibatkan juga sejarah tentang komputer, teknologi komunikasi, film atau animasi, audio, dan sejarah perkembangan teks cetak.

Patokan utama dalam sejarah perkembangan multimedia dimulai dari tahun 1833 ketika Charles Babbage berhasil menciptakan mesin pintar atau *analytical machine* yang disebut-sebut sebagai mesin komputer pertama. Bentuk komputer yang lebih canggih kemudian muncul pada tahun 1939 dan dikenal sebagai komputer digital pertama.

Seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi mesin komputer, teknologi audio, komunikasi dan visual juga semakin maju, hingga lahirnya internet pada tahun 1983. Sebelas tahun kemudian, yakni sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan secara interaktif, misalnya untuk pelayanan belanja, banking, konser langsung, dan sebagainya. Pada tahap yang semakin canggih, teknik multimedia ini dilengkapi pula dengan sarana *hypermedia*.

Perkembangan Sastra Digital Indonesia

Perkembangan positif sastra yang disumbangkan oleh teknologi sesungguhnya tidak dapat hanya dinilai berdasarkan sosok materi hasil karya yang dihasilkan saja, tetapi juga harus dicermati peran timbal baliknya yang lain, seperti peran bahasa/symbol teknik, peran individu pekerja teknologi, serta fasilitas yang dimungkinkan oleh teknologi.

Dewasa ini perkembangan sastra Indonesia dengan menggunakan media *cyber* atau teknik *multimedia* dapat dikatakan masih belum menampakkan peningkatan yang signifikan. Perkembangannya terjadi secara perlahan, tetapi stabil dan mantap.

Secara umum, evaluasi dapat dilakukan melalui lima kelompok gejala utama yang tampak, yakni sebagai berikut.

1. Kualitas

- a) Peningkatan mutu karya sastra digital secara jelas terbaca dari hasil karya dari hari ke hari. Peningkatan mutu berdasarkan waktu ini dapat disimpulkan melalui pengamatan dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan.
- b) Kemudian, apabila media cetak konvensional semacam koran dan majalah masih dianggap sebagai satu-satunya alat ukur mutu karya, peningkatan mutu karya sastra digital ini juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah karya sastra digital yang berhasil menembus barikade redaktur sastra koran atau/dan majalah. Misalnya, nama-nama penyair baru seperti Rukmi Wisnu Wardani, Anggoro Saronto, Heri Latief, T.S. Pinang, serta beberapa nama lainnya, yang telah berhasil menembus koran, bahkan telah berhasil menerbit-

kan buku. Para penyair baru ini mengakui bahwa mereka lahir dan tumbuh berkat media digital.

Sekalipun demikian, alat ukur ini tidak dapat dibakukan sebagai alat ukur tunggal dan penentu karena tidak semua sastrawan *cyber* berminat untuk membiarkan karya-karyanya dimuat di media cetak konvensional. Masih banyak karya sastra digital yang tidak kalah mutunya dibandingkan dengan karya-karya sastra koran.

Aspek pendukung peningkatan mutu ini, antara lain, disebabkan oleh model interaksi bebas dan langsung yang menjadi ciri utama komunikasi melalui media siber. Proses pematangan terjadi lebih cepat dan kaya. "Lebih cepat" karena sifat siber yang tidak terbatas waktu, serta "lebih kaya" karena sifat penyampaian opini yang langsung dan tidak terbatas ruang. Kekayaan masukan ini juga disebabkan oleh karena beragamnya individu yang memberikan masukan beragamnya opini. Komentar atau kritik atas sebuah karya yang diberikan dari berbagai sudut pandang beda usia, gender, tingkat pendidikan, hingga latar belakang pekerjaan telah memberikan kekayaan informasi bagi penulis.

Luasnya wilayah edar media siber juga memudahkan pemuatan karya-karya sastra asing beserta terjemahannya. Penguasaan bahasa yang berbeda dari anggota kelompok diskusi, sangat berperan dalam penyediaan variasi serta kelengkapan karya sastra terjemahan dari berbagai bangsa dan bahasa. Di dalam *website cybersastra.net*, misalnya, telah dibentuk ruang-ruang karya terjemahan dari bahasa Arab, Jerman dan Inggris, selain tentunya ruang-ruang untuk karya sastra daerah Indonesia sendiri. Karya-karya terjemahan ini membuka cakrawala penulis maupun calon penulis sehingga dapat lebih arif dalam menulis.

2. Kuantitas

Secara kuantitas, perkembangan sastra digital Indonesia diindikasikan dari meningkatnya jumlah karya yang beredar di dunia siber serta jumlah penulis yang juga terus bertambah. Hitungan itu belum termasuk peningkatan jumlah para pengamat atau pelaku sastra pasif. Pada lampiran A dapat dilihat statistik aktivitas komunikasi dan statistik pertambahan anggota di dalam salah satu forum diskusi digital sastra Indonesia yang saat ini dapat dikatakan sebagai unggulan, yakni milis penyair@yahoogroups.com. Dalam statistik tersebut tampak adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Ilustrasi lainnya dapat dilihat pada lampiran B yang memuat statistik kunjungan pada *website: www.cybersastra.net*.

3. Wilayah

Peningkatan berdasarkan wilayah jangkauan juga bisa dijadikan acuan. Definisi *wilayah* yang digunakan di sini tidak hanya berdasarkan posisi

geografis, tetapi juga wilayah-wilayah pribadi berikut

A Wilayah Geografis,

Media *cyber* dapat menjangkau berbagai sudut dunia secara cepat. Hal itu memudahkan akses dari berbagai lokasi geografis ke obyek digital yang dituju. Hingga saat ini tercatat dalam milis "penyair" anggota-anggota dari berbagai kota di Indonesia, seperti Yogyakarta, Kupang, Pontianak, bahkan Soroako, hingga belahan dunia lain seperti Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Jerman, Singapura, Malaysia.

b) Wilayah per Pribadi,

Sifat keterbukaan media *cyber* juga memudahkan individu dari berbagai wilayah pribadi bergabung, baik wilayah usia, gender, pendidikan, pekerjaan maupun jabatan. Dalam milis "penyair", misalnya, terdapat seorang pelajar SLTP berusia 12 tahun hingga seorang paranormal berusia di atas 70 tahun. Keanekaragaman jenis latar belakang anggota milis "penyair" lainnya yang berhasil dipantau, antara lain, juru masak berusia 45 tahun di Belanda, penulis novel di Jakarta, berusia 56 tahun, ibu rumah tangga di Kanada, pustakawan di Ithaca, hingga karyawan bank di usia sekitar 30 tahun di Kupang.

4. Jenis

Meskipun tidak dapat dikatakan sebagai genre baru, sastra digital telah memberikan alternatif lain dalam penyajian karya sastra.

a. *Poetry Tree*

Sastra dalam pemaksimalan peran teknologi juga dapat menghasilkan karya baru, seperti puisi interaktif atau dikenal juga dengan judul *poetry tree*. Dalam pembuatan *poetry tree*, setiap pembaca dapat menambahkan secara bebas sebaris atau dua hingga empat baris kalimat pada puisi yang ditulis sebelumnya oleh penulis lain. Karena perbedaan daya persepsi, perbedaan gaya tulisan, tingkat penguasaan sastra, serta situasi, karya semacam *poetry tree* ini dapat menghasilkan sesuatu yang baru, segar, dan kadang mengejutkan.

b. Kolaborasi

Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah kolaborasi karya yang dibentuk oleh lebih dari seorang penulis. Berbeda dengan *poetry tree*, di sini setiap puisi berdiri sendiri, tetapi dapat dirangkai menjadi satu rangkaian kolaborasi yang harmonis.

Lihat misalnya puisi kolaborasi pada lampiran C. Pada lampiran ini hanya ditunjukkan sebagian dari seluruh 38 halaman kolaborasi antara dua penyair (Indah Irianita Puteri dan Idaman Andarmosoko) yang dimuat dalam milis penyair@yahoogroups.com.

c. Multimedia

Sastra multimedia melibatkan berbagai elemen, antara lain, teks, suara, gambar, simbol, metode dan perlengkapan. Dengan demikian, seniman sastra multimedia tidak hanya sastrawan, tetapi dapat juga disebut sebagai *digital artist* atau seniman digital.

Salah satu contoh karya sastra multimedia telah diluncurkan oleh Yayasan Multimedia Sastra pada tahun 2002. Dalam antologi digital berjudul "Cyberpuitika" ini dimuat kombinasi puisi dengan lukisan, foto, musik, dengan mempergunakan teknik yang paling sederhana yakni program *power point*. Meskipun hasil antologi puisi digital ini belum maksimal, aplikasi teknologi *multimedia* dalam sastra Indonesia telah diawali.

d. Sastra CG

CG atau *Computer Geeks* merupakan sebutan bagi para pekerja komputer, seperti *system-administrators* dan *programmers*. Di dalam kesibukannya bergumul dengan mesin-mesin pintar, mereka yang juga dikenal dengan sebutan *computer whizz*, telah mengadopsi berbagai kutipan karya sastra, lalu melibatkan kutipan karya sastra itu ke dalam fungsi teknologi dan meramunya menjadi santapan spiritual yang memberikan pencerahan terhadap pikiran dan perasaan.

Sebutan penyair murni memang tidak bisa disandangkan di bahu para CG. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menciptakan puisi sendiri. Selebihnya, apa yang mereka lakukan adalah menyalin karya-karya sastra, baik berupa puisi, penggalan fiksi, filosofi dan lagu-lagu, lalu diintegrasikan ke dalam pekerjaan mereka sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi dan algoritma yang dijalankan.

Terlepas dari interpretasi yang subjektif, fungsi kutipan sebagai santapan rohani dalam kasus sastra CG ini dapat dikatakan merupakan bagian hasil capaian suatu karya sastra. Fenomena budaya baru berdasarkan kesadaran individual ini secara perlahan telah menjadi semacam tradisi di kalangan para CG.

Perhatikan puisi CG yang dikutip dari "*Sadewa's Workbench*". Situs pribadi milik Asfar Sadewa ini:

100 buckets of bits on the bus

100 buckets of bits

take one down, short it to the ground ¹ *FF buckets of bits on the bus*

FF buckets of bits on the bus

FF buckets of bits

take one down, short it to the ground

FE buckets of bits on the bus

ad in fi n i tu m

Puisi berirama mirip lagu anak ayam turun seribu ini memuat istilah-istilah umum dalam pembuatan program komputer, seperti BIT, BUS, FF, dan FE sehingga agak sulit dicerna bagi mereka yang tidak bergerak di bidang komputer.

Perhatikan juga contoh berikut ini.

*I/O, I/O,
it's off to disk I go,
a bit or byte to read or write,
I/O, I/O, I/O,*

I/O merupakan kependekan dari *Input/Output*, sedangkan *Bit* dan *Byte* adalah satuan kapasitas dalam disket dan sistem *file*.

Membandingkan karya murni para CG dengan penyair profesional agaknya kurang proporsional. Namun, jika menyimak kutipan anonim di atas, kita telah membuka sebuah kesadaran baru akan fungsi istilah atau singkatan bagi irama puisi. Selain komposisi irama yang manis, penggunaan istilah-istilah *computer science* dalam puisi di atas membuktikan interrelasi yang cukup menawan antara seni dan teknologi.

Selain puisi-puisi pelepas lelah yang bersifat mudah dicerna dan menghibur, beberapa kutipan sastra yang memuat nilai filosofis sangat tinggi juga dilibatkan dalam keseharian para CG. Misalnya kutipan dari Goethe ini.

"It is not doing the thing we like to do, but liking the thing we have to do, that makes life blessed."

Puisi-puisi atau kutipan kata-kata bijak seperti beberapa contoh di atas bukan hanya dilibatkan dalam masalah atau kesulitan ketika membuat program. Banyak dari kutipan tersebut dirancang menjadi bagian dari *game* atau *screen saver*, di mana akan muncul kutipan berbeda setiap kali *mouse* ditekan atau setiap kali komputer digunakan.

Dalam posisinya yang telah menyatu dengan kegiatan sehari-hari para CG, fungsi sastra di sini bisa dikatakan cukup kuat. Inilah salah satu bukti konkrit keterlibatan positif sastra dalam kehidupan rasionalisme teknologi ditinjau dari paling tidak tiga sudut berbeda, yakni dari sudut pelaku, bahasa/symbol teknik, maupun dari sudut karya sastra digital.

5. Lain-Lain

Fenomena komputer dan teknologi komunikasi yang bisa menjadi alat pemersatu umat manusia dengan cara yang dapat dikatakan radikal,

yakni dengan cara pertukaran budaya, informasi dan buah pikiran, telah membawa dampak lainnya bagi perkembangan sastra.

- a) Pertukaran informasi dan interaksi antarbangsa melalui media *cyber* telah meningkatkan terbukanya wawasan para *netters* terhadap pluralisme yang merupakan benih perdamaian di muka bumi.
- b) Penyebaran karya sastra secara cepat dan luas.
- c) Komunikasi dan interaksi yang dijalin lewat dunia *cyber* telah menciptakan hubungan kekerabatan yang sangat akrab dan bermanfaat, dari mulai hubungan persahabatan, hingga *networking* atau pembentukan jaringan kerja, baik antarkomunitas sastra, maupun antardisiplin yang berbeda.
- d) Bukti konkret lainnya sebagai dampak positif sastra digital Indonesia adalah terbentuknya suatu organisasi berbasis dunia maya yang bekerja demi perkembangan sastra Indonesia. Pengembangan ini dilakukan tidak hanya di dalam dunia maya, tetapi juga melalui media konvensional. Hal ini dilakukan bukan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap media, tetapi semata-mata merupakan niat tulus untuk menjembatani kesenjangan digital yang saat ini masih sangat tinggi di Indonesia. Organisasi ini telah menghasilkan 3 buku antologi cetak dan 1 *cd-rom* antologi digital. Sebagian besar dari hasil penerbitan ini disumbangkan secara cuma-cuma ke berbagai sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Perkembangan Negatif atau Kelemahan Sastra Digital di Indonesia

Kelemahan atau pengaruh negatif dunia digital bagi umum dan bagi perdagangan komersi I tentu berbeda dengan penggunaannya bagi sastra. Dalam penggunaan umum, 66% responden yang dijangkau oleh Pacific Rekanprima menyatakan bahwa penggunaan internet jelas membawa pengaruh buruk. Pengaruh buruk yang dimaksud adalah penyalahgunaan waktu, penyalahgunaan dana, degradasi moral terutama karena pengaruh situs porno, mengurangi sosialisasi, pengaruh budaya barat, dan arus informasi tidak terbanding yang dapat mempengaruhi perkembangan mental anak-anak. Namun, bagi perkembangan sastra, kelemahan media internet tentu agak berbeda dengan dampaknya bagi umum. Selain kelemahan yang bersifat teknis, misalnya, serangan virus atau perbedaan program, perkembangan negatif atau kelemahan sastra digital di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Daya Beli

Hasil teknik multimedia sendiri tidak pelak lagi memang dipengaruhi oleh perlengkapan peralatan yang digunakan untuk mengomposisikan maupun untuk membaca hasilnya. Perkembangan teknologi digital dunia yang pesat memang tidak sebanding dengan

rendahnya konsumen di Indonesia karena kendala kemampuan finansial.

Berdasarkan riset yang dibuat oleh Pacific Rekanprima yang bekerja sama dengan Indonesian Internet Service Provider Association dan Indonesia Internet Business Community, 70,4% dari responden pengguna internet mengeluarkan biaya hidup rata-rata Rp1.000.000,00 hingga Rp2.000.000,00 per bulan untuk kebutuhan utama. Riset juga menunjukkan bahwa pengguna jasa warnet mengeluarkan biaya pemakaian rata-rata Rp5.000,00 hingga Rp20.000,00 per sekali datang. Jika dibandingkan dengan UMR di wilayah DKI Jaya, biaya penggunaan internet di warnet ini akan menyita 40% hingga 80% dari total biaya hidup per hari.

Lebih jauh lagi diketahui bahwa 80% responden tidak berlangganan internet secara tetap karena terbentur pada besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan perlengkapannya, seperti perangkat komputer dan jalur internet. Hal itu menunjukkan bahwa rendahnya daya beli masyarakat Indonesia terhadap perangkat internet merupakan kendala primer bagi perkembangan internet secara umum di Indonesia dan bagi sastra digital secara khusus.

2. Daya Persepsi

Kendala lainnya yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan persepsi sastra digital adalah cara penerjemahan bahasa dari budaya *virtual*. Hal itu dipengaruhi oleh banyak aspek, antara lain masalah kemampuan komunikasi dalam membaca, perbedaan gaya bahasa, daya penerimaan, dan pengolahan data masing-masing individu. Cara penerjemahan atau kemampuan membaca ini memengaruhi makna keseluruhan dari karya sastra.

3. Kemalasan

Kemudahan dan kenyamanan yang disediakan teknologi digital juga telah menimbulkan kemalasan generasi digital. Kemalasan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, tetapi juga terjadi pada pelaku sastra Indonesia. Kenyamanan dan kemudahan bersastra dalam dunia digital bebas hambatan mengakibatkan sastrawan digital enggan ber-susah-payah berkarya di media cetak.

4. Penjiplakan, Penggandaan, Hak Cipta

Perkembangan teknologi yang luar biasa menakjubkan dewasa ini telah menimbulkan kemudahan yang memungkinkan pembaca untuk meramu, menggandakan dan menyebarkan karya-karya orang lain. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa dengan terciptanya kondisi kemudahan ini, pemantauan penyalahgunaan karya seseorang menjadi masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diaplikasikan sesuai

dengan peraturan baku yang umumnya berlaku dalam dunia penerbitan.

Beberapa kasus pernah tercatat, baik berupa penjiplakan sebagian karya sastra yang beredar di media *cyber* maupun penggandaan karya tanpa izin. Untuk itu, paling tidak ada dua macam *copyright* atau peraturan tentang hak cipta yang terlibat, yakni *digital rights* dan *writer rights*.

Sejarah perkembangan mengenai hak cipta menyatakan bahwa setelah Maret 1989, semua karya otomatis memiliki hak cipta pada saat mereka diciptakan, dengan atau tanpa pemberitahuan peringatan mengenai hak cipta tersebut. Sementara itu, masa berlaku hak cipta sendiri bagi karya-karya yang dibuat setelah Januari 1978 adalah selama masa hidup penciptanya ditambah lima puluh tahun.

Kemudian, sebagaimana berlaku umum, meskipun hak cipta ada di tangan penulis, biasanya ada etika yang mengikat antara penulis dan penerbit, tentang sejauh mana hak cipta penulis ini dimiliki seorang penulis setelah karyanya diterbitkan. Hak cipta yang terbagi ini tergantung pada persetujuan antara penulis dan penerbit. Hal itu membawa kita pada tingkat *digital rights* atau hak cipta penerbit siber. Beberapa pendapat mengatakan bahwa *digital rights* tak dapat berpatokan pada satu hukum baku, tetapi harus dievaluasi kasus per kasus. Disinilah diperlukannya penanganan yang bijaksana guna mengatasi pertentangan antara urusan hak cipta dan perkembangan teknologi.

Contoh kasus per kasus dalam pengawasan *digital rights*, misalnya, dalam hal penggandaan sebuah karya. Apabila hukum diberlakukan secara kaku, perkembangan teknologi menuju segala kemudahan akan berkurang nilainya bagi perkembangan intelektual manusia. Untuk itu, penggandaan melalui media siber ini harus melibatkan minimal empat pertimbangan, yaitu tujuan penggandaan, sifat karya yang digandakan, dampaknya pada pasar, dan jumlah bagian yang digandakan.

Penggandaan karya yang bersifat ilmu pengetahuan tentu berbeda penanganannya dibandingkan dengan penggandaan ciptaan seni kreatif. Karya kreatif berhubungan dengan nilai komersial dan pasar, di samping nilai ide orisinal pencipta.

Etika yang sama berlaku dalam hal penerimaan karya melalui *email*. Menerima kiriman suatu karya melalui *email*, bukan berarti secara otomatis memiliki hak cipta karya tersebut. Setiap *email*, sebagaimana tulisan atau karya-karya lain, juga memiliki hak cipta meskipun tidak terlalu berat kasusnya karena nilai komersialnya seringkali tidak terlalu tinggi. Namun, bagaimanapun dalam rangka menaati hukum, izin pengutipan harus tetap diajukan kepada penulis asli apabila hendak melakukan pengutipan atau penyebaran. Hal pengajuan izin itu tentunya tidak berlaku bagi *email-email* bersifat himbauan atau semacam brosur,

atau semacam surat yang memerlukan keterlibatan banyak individu tanpa batasan tertentu.

5. Infrastruktur

Infrastruktur yang mendukung pemerataan dan pengembangan budaya digital, termasuk sastra digital, sangat berperan dalam menentukan seberapa jauh media baru tersebut bisa berdaya guna dan didayagunakan oleh masyarakat. Beberapa bagian pelosok di Indonesia atau beberapa institusi pemerintah yang bekerja untuk pengembangan sastra dan bahasa tercatat belum memiliki kelengkapan sarana ini. Kelengkapan infrastruktur itu menjadi salah satu penghambat perkembangan internet di Indonesia. Selain infrastruktur untuk *network* yang terbatas, juga fasilitas telekomunikasi yang masih sangat kurang.

6. Lain-lain

Kendala lainnya datang dari para pelaku sastra sendiri, yakni tidak habisnya tarik-ulur mengenai peran media siber dan aplikasi teknik *multimedia* dalam bersastra. Perdebatan mengenai layak atau tidaknya pelibatan digital dalam sastra sangat menghambat laju perkembangan sastra melalui media siber serta menimbulkan terbentuknya dua kubu yang saling berusaha melegalisir diri sendiri secara kurang sehat.

Masa Depan Sastra Multimedia

Sesungguhnya teknik *multimedia* menyediakan banyak kemungkinan eksplorasi dan ekspresi. Model yang paling sederhana dari produk *multimedia* bisa dilihat pada, misalnya, monitor petunjuk suatu museum. Dengan menekan layar monitor atau dengan memindahkan kursor, pengunjung dapat menemukan lokasi atau keterangan dari benda yang ingin dilihat, dengan cepat, dan tepat. Pada beberapa produk semacam ini, seringkali disisipkan *attract-loop* atau daya penarik yang muncul secara otomatis apabila program tidak diaktifkan selama beberapa waktu. Kegunaan dari *attract-loop* ini adalah untuk menarik perhatian pengunjung supaya mampir, melihat, dan membaca sehingga mengetahui dan terangsang untuk tahu lebih banyak lagi.

Model seperti tersebut di atas tentunya tak ada salahnya apabila diaplikasikan dalam program pengembangan sastra, misalnya, untuk ditempatkan pada institusi pendidikan atau institusi sastra dan bahasa atau juga perpustakaan. Beberapa program *multimedia* malah memberikan berbagai kemungkinan yang lebih "menakjubkan". Program tersebut bisa dibuat hingga memungkinkan seseorang untuk belajar menciptakan puisi dalam sekejap tanpa perlu tergantung pada guru. Melalui aplikasi program ini, penulis dibantu untuk menentukan kapan suatu bait harus dihentikan, juga diberi saran tentang kata berikut yang sebaiknya dipakai, atau bahkan

irama persajakan. Program semacam itu juga dapat mencegah penulis karbitan terjebak dalam *plagiarism*. Setiap kalimat lebih dari tiga suku kata, yang tepat sama dengan karya-karya penyair terkenal sebelumnya, akan mendapat "peringatan" dari mesin.

Di beberapa negara asing pada masa libur sekolah para pelajar telah terbiasa belajar dengan menggunakan *e-learning*. Mereka bisa menentukan kapan dan di mana akan belajar dengan sederhana saja, yakni duduk, buka komputer, panggil programnya, lalu belajar. Program semacam ini juga dapat diaplikasikan untuk pengajaran sastra di Indonesia sehingga peran digital di sini tidak hanya dilihat dari "apa yang dihasilkan", tetapi juga "bagaimana bisa menghasilkan".

Games-pun bukan lahan permainan yang haram bagi pengembangan sastra. Melalui *games* atau *media interaktif*, pengajaran sastra dapat diberikan sejak dini bagi anak-anak. Media ini dapat diperkaya dengan animasi, musik, suara, permainan huruf dan juga penayangan hasil karya anak. Pengajaran dalam bentuk *games* merupakan salah satu cara efektif dalam "memerangi" dominasi *games* yang bersifat permainan semata bagi anak-anak.

Selain itu, komputer dapat digunakan sebagai bank data atau tempat penyimpanan karya-karya yang pernah ditulis. Bank data ini bisa dibuat untuk diri sendiri, maupun untuk kepentingan yang lebih luas, misalnya, dijadikan semacam *digital library*. Selain berguna untuk pengajaran dan penulisan, *digital library* juga berguna untuk melestarikan karya-karya sastra yang wujud lahiriahnya mungkin sudah rusak. *Digital library* ini paling tidak memberikan tiga keuntungan, yakni pengiritan ruang, pengiritan waktu, penyelamatan isi naskah kuno. Dalam tahap-tahap menuju pemaksimalan peran komputer dan media siber seperti di atas, perlu juga dibenahi dan dilengkapi infrastruktur serta pelengkap-pelengkap lainnya, seperti penyusunan *cyberlaw* dan pendidikan/pelatihan teknologi digital.

Penutup

Evolusi teknologi dapat menjadi pendamping hidup yang nyaman apabila manusia dapat mengerti sifat dan karakter teknologi tersebut. Komputer, *multimedia*, serta *internet*, dieptakan untuk membantu manusia, bukan hanya dalam hal *entertainment*, tetapi juga dalam hal sastra. Insan sastra seyogyanya dapat mendayagunakan benda-benda tersebut untuk melestarikan sejarah masa lalu, tanpa perlu menutup diri bagi masa depan yang bagaimanapun juga tetap akan tiba. Segala kemudahan dan kemungkinan yang disediakan oleh teknologi, sebaiknya dapat diterima dengan sederhana tanpa menyederhanakan fungsi dan pemakaiannya.

Pada prinsipnya, *multimedia* adalah alat atau sarana, bagian tak terelakkan dari laju peradaban manusia. Teknik *multimedia* dan media siber memberikan berbagai kemungkinan pengolahan dan penyajian bagi sastra

Indonesia. Bagaimana alat itu didayagunakan untuk memberikan hasil yang maksimal atau memberikan arti dalam hidup kita atau juga memilih untuk tidak mempergunakannya semua adalah bergantung pada kita sendiri.

Dattar Rujukan:

- "Study on Indonesia Cyber Industry and Market", oleh Indonesia Internet Business Community
- mitis penyair@yahoogroups.com
- mitis puisikita@yahoogroups.com
- Sadewa's Workbench
- www.cybersastra.net
- www.computer.org
- www.education.yahoo.com
- www.pangaro.com
- www.groups.yahoo.com
- www.news.com.com
- www.korova.com
- www.ucalgary.ca
- www.atbany.edu
- www.techtarget.com
- www.xmt.com
- www.macdevcenter.co
- wawancara, Marcello: webmaster www.cybersastra.net
- wawancara, Kurniawan: pemimpin redaksi www.cybersastra.net
- wawancara, Asvega: digital artist
- wawancara, Samsul Bahri: moderator mitis
- penyair@yahoogroups.com

LAPORAN SIDANG

Hari, tanggal	: Kamis, 16 Oktober 2003
Judul makalah	: 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa 2. Sastra Indonesia dan Multimedia
Penyaji	: 1. Paulina Pannen 2. Medy Loekito
Pemandu	: Agus Darma
Pencatat	: 1. Murmahyati 2. Made Budiasa

TANYA JAWAB

1. **Penanya:** Muhammad Nurahmat (SMU 8 Yogyakarta)
Mengapa tidak dibuat CD (tentang novel, cerpen, dll) yang bisa dilihat dan dinikmati oleh kawan-kawan yang ada di pelosok.

Jawaban: Ibu Medi Loekito

Yang menjadi kendala dalam pembuatan CD adalah masalah program infra struktur, komputer harus modern, waktu dan tenaga yang profesional.

Jawaban: Ibu Paulina

- 1) Tidak perlu khawatir karena pemerintah Pustekom dan Dirjen Dikmenjur dan Dikdasmen sudah banyak berkolaborasi.
- 2) Sifatnya masih sporadis tidak berstruktur atau terdata dengan baik.
- 3) Salah satu contoh UT telah mengembangkan komputer diatracter.

2. **Penanya:** Hamid Jabbar (Sastrawan, Jakarta)
Apakah medium teknologi informasi dengan segala sistemnya betul-betul mengubah sastra yang ada?

Jawaban:

Ya.

3. **Penanya:** Sukadi (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta)
Apakah ada sponsor untuk melengkapi alat-alat teknologi informasi dan siapa yang bisa dihubungi?

Jawaban: Kedua pemakalah
Ada yang dapat dihubungi Grasindo, UNESCO, Ford Fondation.

KELANGSUNGAN HIDUP BAHASA MELAYU DAN PENGUKUHAN KETAHANAN BUDAYA BANGSA DALAM ERA GLOBALISASI

Dato' Haji A. Aziz bin Deraman

Ketua Pengarah

Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia

Bagi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, dan kerajaan Malaysia amnya, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak penganjur Kongres ini kerana penghargaan yang diberikan kepada Malaysia untuk mengisi ruang pembentangan kertas utama ini. Saya berbesar hati kerana diberi peluang untuk menyampaikan kertas kerja ini sebagai pemula kepada wacana keilmuan yang penting dalam kehangatan sambutan hari kemerdekaan kedua-dua negara kita. Tema kongres yang dipilih, iaitu "Pemberdayaan bahasa Indonesia memperkukuh ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi", sesungguhnya amat bertepatan dengan masa dan seiring pula dengan langkah serta wawasan kami di Malaysia.

Dalam kertas ini, kupasan saya terhadap tajuk akan merujuk kepada Bahasa Melayu di Malaysia dan peristiwa-peristiwa penting yang berkait dengannya yang mencorakkan masyarakat dan budayanya pada masa kini dan upaya-upaya yang diatur dalam menghadapi gelombang globalisasi.

Pengenalan

Dalam masa lebih kurang setengah abad kita menikmati kemerdekaan-- iaitu 56 tahun bagi Indonesia, dan 46 tahun bagi Malaysia--banyak sekali perkara yang mendasari pembangunan negara dan bangsa telah berlaku, baik di Malaysia mahupun di Indonesia, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, aspek sosial dan kebudayaan. Aspek bahasa yang menjadi wahana komunikasi untuk pembangunan semua bidang ini juga turut terseret, baik dari segi dasarnya mahupun pelaksanaannya. Pelbagai peristiwa penting telah berlaku kepada bahasa nasional atau bahasa kebangsaan negara masing-masing yang dapat kita senaraikan sebagai unsur yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan dasar aspek-aspek kehidupan yang lain-lain itu.

Pada dua tiga dasawarsa yang lalu, dan pada awal abad ke-21 ini-- yang digembar-gemburkan sebagai Milenium baru atau Alaf baru--seluruh dunia diterpa oleh fenomena baru yang menyangkut sebahagian besar aspek kehidupan kita. Kelahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (IT dan ICT), iaitu kemudahan moden dengan pelbagai aplikasi dan berteknologi tinggi ini, bukan sahaja menukar wajah kaedah dan cara berkomunikasi, malah sebahagian

besar gaya hidup manusia berubah rupa. Dalam gelombang yang melanda dunia sejagat ini, wahana utama komunikasi, iaitu bahasa, yang menjadi alat penyampai maklumat menghadapi cabaran/tantangan yang cukup besar untuk bersama-sama menjadi "global dan ringkas".

Di Malaysia, kesediaan kita menerima Teknologi Maklumat atau ringkasnya TM sebagai satu tujahan dalam wawasan 2020 (yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad), telah mula direalisasikan melalui pelbagai projek, khususnya projek mega Koridor Raya Multimedia (MSC). Projek yang menampilkan pelbagai aplikasi besar yang tidak pernah terfikirkan sebelum ini, seperti kerajaan elektronik, sekolah bestari dan kediaman pintar, telah lahir dan menjadi pemangkin kepada pembudayaan TM dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat. Di satu pihak, kita terasa seolah-olah kita diasak dengan begitu keras dan pantas dari semua penjuru oleh fenomena ini - TM kini sedang menerobos hampir semua aspek kehidupan kita, baik di pejabat/kantor, di rumah, di sekolah, di lebuh raya, apatah lagi di gedung-gedung besar.

Kita juga sedar bahawa peningkatan jumlah, saiz dan kualiti peralatan, jentera, perkakasan dan kemudahan hidup dengan begitu pantas ini hanyalah sekadar lambang fizikal pembangunan, begitu juga dengan begitu banyaknya bangunan pencakar langit dan puluhan pilihan alat perhubungan dan hiburan yang bersifat maya (virtual) yang datang bersama TM itu. Perubahan sebenar yang mencabar sebahagian kita di sini ialah yang menyangkut pemikiran, nilai, kepercayaan, cara hidup, tatasusila perhubungan dalam masyarakat dan bahasa yang menjadi inti pati kepada budaya dan jati diri bangsa kita, yang kini turut terjebak, dan sesekali seperti terancam, dalam arus globalisasi.

Suasana memperingati hari kemerdekaan yang baru kita rayakan seharusnya menyedarkan kita tentang tanggungjawab untuk meneruskan kelangsungan hidup bahasa dan budaya kita dan dengan mengukuhkan ketahanannya sebagai tonggak kedaulatan bangsa. Elemen ini sama pentingnya dengan aspek politik dan ekonomi yang menandai jati diri dan budaya bangsa yang verma-ruah. Marilah kita lihat hakikat ini dan peranan bahasa kita melalui perspektif sejarah, kemudian kita lihat pula perkembangan semasa dan cabaran yang dihadapinya, lalu seterusnya cabaran masa depan dan harapan bangsa kita terhadapnya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita tidak akan kehilangan jejak khususnya tentang jalan sejarah bahasa kita yang agak panjang, dan tidak pula lemas dalam gelombang globalisasi yang kelihatan mula mencairkan kekentalan ciri-ciri budaya nasional dan setempat, khususnya aspek bahasa.

Peristiwa Bahasa dalam Lipatan Sejarah

Menurut Hassan Ahmad,¹ seorang pemikir dan pemimpin bahasa yang

¹ Dato' Dr. Hassan Ahmad, dalam "Dasar Bahasa dan Pembangunan Negara di Malaysia". Siri Bicara Bahasa, Bil 9.

agak lantang di Malaysia (juga mantan Ketua Pengarah DBP), nilai atau peranan bahasa mempunyai dua makna sahaja, iaitu sebagai pembentuk atau penanda jati diri bangsa, dan, yang kedua sebagai alat atau penjana peradaban dan kemajuan manusia. Kesilapan taktik dan strategi pelaksanaan yang kita lakukan selama ini terhadap bahasa kita (bahasa Melayu) ialah, kita hanya mengutamakan nilai atau fungsi yang pertama itu sahaja, manakala fungsinya yang kedua itu hampir terabai dalam segala perencanaan pembangunan bangsa secara khusus dan peradaban kita secara umum.

Bahasa Melayu yang kini menjadi bahasa kebangsaan/nasional negara kita mempunyai sejarah yang panjang dan ini relevan dengan perkembangannya pada hari ini. Jumlah penutur bahasa Melayu/Indonesia kini mencecah hampir ke angka 300 juta orang. Kita wajar menoleh sedikit ke belakang untuk mempelajari sesuatu daripada zaman jaya dan zaman muram kita, kerana itulah antara matlamat mempelajari sejarah, iaitu mengambil iktibar dan pengajaran daripada fenomena dan peristiwa yang telah berlalu untuk kita merancang dan melaksanakan langkah peningkatan bagi waktu kini dan juga bagi waktu muka, bak pesan al-Marhum Presiden Sukarno "Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya".

Hakikat bahawa bahasa kita yang menjadi bahasa nasional/ kebangsaan dan bahasa peradaban di rantau ini memiliki akar sejarah dan tradisi yang cukup lama jangan kita lupai. Bahasa ini juga telah melalui ujian zaman selama dua alaf, khususnya pertembungan dengan beberapa tradisi besar dunia, seperti tamadun Hindu-Buddha, tamadun Islam, dan kemudian tamadun Barat. Oleh itu, kemampuan dan keampuhannya sebagai tonggak peradaban bangsa dan negara pada zaman ini, baik sebagai tonggak tamadun negara kita masing-masing secara khusus, mahupun sebagai tonggak peradaban negara-negara lain di rantau ini yang sama-sama mewarisi bahasa ini sebagai bahasa besar, tidak wajar diragui.

Bahasa Melayu sejak awal kurun Masihi telah mula muncul sebagai bahasa yang berwibawa dan diterima umum di Kepulauan Melayu, lalu diangkat menjadi *lingua franca* atau bahasa perhubungan antara pelbagai bangsa, termasuk yang datang rantau lain, seperti India, Cina, Asia Barat dan kemudian Eropah. Sriwijaya dengan kuasa kelautan atau maritim pada sekitar abad ke-7 Masihi juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kerajaan dan pentadbiran bagi seluruh jajahan takluknya yang meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Tanah Genting Kera dan Sri Lanka. Hal ini dibuktikan oleh penemuan batu-batu bersurat/prasasti pada abad ke-7 di Sumatera. Apabila kerajaan Majapahit yang berteraskan bahasa Jawa memerintah selepas itu, bahasa Melayu tidak pula hilang, masih kekal berfungsi sebagai bahasa perhubungan di rantau ini.

Kedudukan bahasa Melayu meningkat kembali apabila Kepulauan Melayu didatangi oleh risalah Islam yang menurut Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas membawa dua gagasan penting, iaitu *intelektualisme* dan *rasionalisme*.

Islam sebagai agama wahyu telah menghasilkan suatu transformasi kebudayaan, pemikiran dan pandangan hidup di kalangan sebilangan besar umat di rantau ini sehingga berlaku proses yang dikenal sebagai Islamisasi atau pengislaman.

Transformasi kebudayaan, pemikiran dan pandangan hidup yang berlaku ini turut memberikan kesan yang langsung kepada bahasa Melayu. Hal ini tidaklah menghairankan kerana sememangnya hubungan antara bahasa dengan pemikiran dan kebudayaan amatlah erat sebagaimana yang diuraikan oleh ahli bahasa dan ahli falsafah sepanjang zaman. Perubahan yang berlaku dalam pemikiran, pandangan hidup dan kebudayaan sesuatu masyarakat pasti terpancar pada bahasanya. Demikianlah sifat bahasa yang menjadikannya inti pati kepada sesuatu kebudayaan itu.

Transformasi pemikiran, pandangan hidup dan kebudayaan Melayu sesudah ketibaan Islam, dapat dilihat sebagai cabaran awal bagi bahasa Melayu, khususnya dari segi kosa kata. Tetapi hal ini telah dihadapi tanpa banyak masalah ketika itu, dengan masuknya, sekian banyak konsep Islam yang merangkum semua bidang utama atau teras dalam Islam, seperti tauhid, syariah, undang-undang (hukum) dan tasawuf. Transformasi dalam bentuk penyerapan konsep-konsep Islam ke dalam Bahasa Melayu secara harmonis itu menjadi salah satu faktor kekuatan dan ketahanan bahasa Melayu dalam menghadapi apa juga pengaruh yang mendatangnya kemudian. Signifikannya penyerapan kosa kata yang mewakili konsep-konsep Islam daripada bahasa Arab ialah bahawa bahasa Melayu telah melalui proses pengayaan kosa kata yang penting, daripada sudut pemikiran dan pandangan hidup yang baharu, baik yang merupakan istilah khusus mahupun kosa kata umum.

Yang kedua ialah lahirnya ragam bahasa persuratan dalam bahasa Melayu, terutamanya melalui karya para pemikir, ulama dan sasterawan yang cukup terkenal seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin al-Raniri, Abdul Samad al-Falambani, Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syeikh Daud al-Fatani dan lain--lain. Bahasa Melayu terus menjadi kaya dan subur dengan kepustakaan ilmu dan persuratan dengan hasil kegiatan intelektual dan kreatif pemuka Melayu-Islam ketika itu, hingga cukup mantap bentuk persuratannya untuk menjadi asas bahasa Melayu baharu yang kita warisi pada hari ini.

Peningkatan bahasa Melayu daripada sekadar bahasa perhubungan umum (*lingua franca*) menjadi bahasa persuratan merupakan mercu tanda kebangkitan peradaban yang lebih tinggi dan maju bagi bangsa kita, kerana sesebuah peradaban besar harus bertunjangkan bahasa persuratan.

Aspek perkembangan lain yang disebabkan oleh kedatangan Islam ialah pengenalan sistem tulisan Jawi (disebut juga Tulisan Melayu-Arab) yang diubahsuaikan daripada aksara Arab. Kewujudan tulisan yang praktis itu telah memungkinkan wujudnya persefahaman dan perpaduan kebangsaan, kerana hasil karya di pelbagai pusat tamadun Melayu dapat difahami oleh penduduk dari daerah yang berlainan. Tulisan Jawi juga besar sekali perannya kerana

semua karya dan dokumen dalam zaman bahasa Melayu klasik tertulis dalam Jawi, termasuk surat dan perjanjian antara kerajaan Melayu dengan kerajaan bukan Melayu atau antara pusat-pusat pemerintahan rantau ini dengan Eropah.

Wibawa bahasa kita di daerah ini menghadapi cabaran besar apabila kuasa Barat datang ke Alam Melayu dengan memaksakan penggunaan tulisan dan bahasa mereka dalam bidang-bidang yang menjadi teras tamadun, terutama pendidikan dan pentadbiran. Dalam kes di Malaysia, sejarah menunjukkan bagaimana kerajaan Inggeris telah meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa vernakular dalam sistem pendidikan yang berasaskan kaum. Sementara bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar sekolah Inggeris yang dikhaskan untuk anak bangsawan dan golongan elit, bahasa Melayu disetarakan dengan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil bagi mereka yang berketurunan Cina dan India dan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah Melayu sahaja. Demikianlah juga halnya dalam bidang pentadbiran dan urusan kenegaraan yang lain; bahasa Melayu dipinggirkan kerana dianggap sebagai bahasa anak jajahan.

Bahasa Melayu Selepas Merdeka dan Cabaran

Gerakan menentang penjajah untuk mendapat pembebasan oleh pihak yang terjajah adalah fenomena sejagat yang alamiah sifatnya. Demikianlah, gerakan menentang penjajah dan membebaskan tanah air yang tercantum dalam gagasan nasionalisme telah tercetus di Tanah Melayu diupayakan oleh pelbagai golongan, iaitu gerakan pelajar, kesatuan dan tokoh, penulis dan wartawan yang menyatakan cita-cita kemerdekaan dan perjuangan kebangsaan yang turut berlandaskan perjuangan mendaulatkan bahasa Melayu dengan terus-terang. Perjuangan selama kira-kira tiga dekad (1930-an hingga 31 Ogos 1957 di Tanah Melayu) ini pada hakikatnya bertunjangkan semangat kebangsaan dengan bahasa Melayu menjadi salah satu komponennya. Begitu juga di Indonesia, semangat kebangsaan ini disemarakkan dan dikobarkan dengan Bahasa Indonesia sebagai inti pati kepada "Sumpah Pemuda" 1928 .

Salah satu hasilnya, dalam pilihan raya pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955, Parti Perikatan yang terdiri daripada tiga parti politik yang mewakili tiga kaum terbesar, iaitu UMNO, MCA dan MIC dalam manifesto pilihan rayanya telah menjanjikan, antara lain untuk "menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dalam masa sepuluh tahun sesudah merdeka". Inilah cabaran awal yang ditangani oleh pemimpin dan rakyat Malaysia (Tanah Melayu) menjelang kemerdekaan.

Cabaran kedua ialah pengisian dalam bentuk perencanaan bahasa Melayu sebagai salah satu elemen pembangunan budaya bangsa. Setahun menjelang kemerdekaan (1956), bahasa Melayu telah diusulkan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara oleh Jawatankuasa Pelajaran Razak. Ini, kemudiannya diperkukuh oleh Penyata Rahman Talib, 1960. Kedua-dua

penyata itu menjadi asas Akta Pelajaran 1961, iaitu akta yang antara lain memperuntukkan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama sekolah. Inilah asas perubahan bahasa pengantar di sekolah jenis kebangsaan Inggeris, dari Bahasa Inggeris ke bahasa Melayu bermula pada tahun 1968 di peringkat sekolah rendah, dan seterusnya peringkat sekolah menengah pada tahun 1976. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di institusi pengajian tinggi telah terlaksana 13 tahun lebih awal apabila Universiti Kebangsaan Malaysia diwujudkan pada tahun 1970.²

Puluhan ribu sumber tenaga dan generasi yang berpendidikan melalui bahasa kebangsaan (bahasa Melayu) telah terhasil sejak itu, dan sebahagian besarnya menjadi penggerak jentera pembangunan negara dalam pelbagai bidang, seperti pentadbiran, pendidikan, kesihatan dan perubatan, ekonomi dan juga teknologi. Kemampuan bahasa Melayu menjadi wahana pembentukan warganegara yang berilmu dan berketrampilan sudah terbukti dalam sejarah pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan di Malaysia.

Peristiwa penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan itu amat besar ertinya dalam proses mendaulatkan bahasa Melayu dan meneruskan kelangsungan hidupnya sebagai bahasa utama dalam pembinaan sebuah negara bangsa.³

Usaha mendaulatkan bahasa Melayu turut direalisasikan dengan penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam urusan Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa awam. Penetapan ini, pada tahap idealnya, bererti bahawa seluruh jentera pentadbiran dan pengurusan pemerintah bergerak dengan berwahanakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional itu.

Peristiwa kedua yang penting menjelang kemerdekaan Tanah Melayu ialah pewujudan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Malaysia pada 22 Jun 1956. Peristiwa ini amat besar ertinya dalam sejarah dan proses pembinaan negara Malaysia apabila kita memahami peranan bahasa dan persuratan dalam mengisi erti kemerdekaan.

DBP, yang diwujudkan dengan matlamat utamanya untuk memajukan dan mengembangkan bahasa Melayu, pada asasnya berperanan mengisi erti bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Untuk tujuan itu, fungsi utama DBP direalisasikan dengan dua program besar, iaitu *pembinaan* dan *pengembangan bahasa*. Pembinaan bahasa bermaksud usaha mengukuhkan dan memantapkan sistem bahasa Melayu secara menyeluruh, meliputi sistem ejaan, sebutan, tatabahasa, perisitalan,

² Kedudukan ini bertahan selama 35 tahun, sehingga digantikan dengan Akta Pendidikan 1996.

³ Konsep negara bangsa yang saya gunakan dalam konteks ini ialah negara yang ditandai oleh suatu sempadan geopolitik kenegaraan dengan kewujudan satu bangsa dan satu nusa yang warganya mungkin terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik atau sukubangsa.

kosa kata dan laras bahasanya. Pemantapan aspek ini untuk menjadikannya bahasa yang cekap sebagai wahana pengungkap ilmu, teknologi dan segala bidang kehidupan moden telah mencapai tahap yang kukuh, walaupun pemantapan segi-segi tertentu masih terus berlaku, sesuai dengan keperluan semasa.

Sebagai contoh, daripada sudut peristilahan, telah digubal dan diselaraskan kira-kira 800,000 istilah untuk puluhan bidang ilmu dan profesional, termasuk bidang teknologi maklumat dan komunikasi, serta aeroangkasa. Daripada segi penyebarannya pula, telah diterbitkan glosari, kamus dan daftar istilah. Daripada segi penyediaan panduan bahasa, kamus ekabahasa dan dwibahasa untuk kegunaan umum dan pelajar telah diterbitkan dan penyusunan lebih banyak kamus sedang digiatkan. Aspek ejaan dan sebutan pula pada umumnya sudah lama mantap. Sistem ejaan Rumi, misalnya, telah dirumuskan pada tahun 1972 dan sistem ejaan bersama Malaysia-Indonesia.

Dalam hal tatabahasa, DBP telah mengemaskinikan rumus atau aturan yang asasannya diletakkan oleh Allahyarham Pendeta Za'ba. Kini hampir seluruh sistem pendidikan di Malaysia menjadikan tatabahasa tersebut rujukan asas dan utama sehingga tercapai keselarasan yang maksimum. Selain itu tumpuan diberikan juga kepada penyelidikan/penelitian bahasa untuk memperkaya khazanah bahasa Melayu, juga untuk membina pangkalan data untuk manfaat masyarakat umum. Untuk memasyarakatkan bahan yang terhasil daripada pembinaan bahasa, DBP secara khusus menubuhkan bahagian pengembangan bahasa Melayu untuk sektor awam, untuk sektor swasta dan untuk peringkat antarabangsa. Penerbitan pelbagai bahan dalam bentuk cetak dan elektronik dalam bahasa Melayu pula diusahakan, meliputi hal agama, falsafah, sastera dan budaya.

Pendukung bahasa Melayu di Malaysia percaya bahawa dasar-dasar kenegaraan seperti yang disebut di atas masih tetap relevan selagi rakyat bertekad untuk meneruskan kelangsungan hidup bahasanya, dan selagi rakyat percaya bahawa pembangunan dan kemajuan negara mestilah berasaskan acuan bangsa sendiri (Abdullah Hasan 2002). Dalam hal ini kita percaya bahawa bahasa Melayu mampu dan patut dijadikan wahana pembangunan bangsa dan negara, tentunya dengan sikap terbuka menerima sumbangan bahasa-bahasa lain dan tidak menolak keperluan menguasai bahasa-bahasa lain, lebih-lebih lagi dalam arus globalisasi ini. Bahasa sendiri tidak patut tergugat atau dipinggirkan dalam melaksanakan agenda pembangunan dalam negara kita, walaupun gelombang globalisasi melanda kita. Maknanya bahasa sendiri (bahasa Melayu) dijunjung bahasa asing dikelek.

Dekad-Dekad Peralihan

Secara umum telah dinyatakan sepintas lalu kedudukan bahasa Melayu sebagai salah satu wahana pembangunan di Malaysia pada pertengahan abad yang lalu. Pada keseluruhannya, perencanaan dan pelaksanaannya didukung

juga oleh dasar kenegaraan yang lain, terutama Dasar Ekonomi Baharu. Walau bagaimanapun tidak dapat kita sembunyikan hakikat bahawa masih ada ruang peningkatan yang perlu diisi dan malah masih perlu dilakukan untuk mengukuhkan keyakinan sebilangan rakyat Malaysia terhadap Dasar Bahasa Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan, khususnya di sektor swasta dan sektor pendidikan, dan juga untuk mengekalkan jati diri bangsa dan budaya setempat dalam arus kemajuan ini.

Sebagai dukungan kepada upaya memantapkan Bahasa Melayu di rantau ini, sebuah majlis bahasa bersama antara dua negara, Malaysia dan Indonesia, yang dinamai Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM) telah diwujudkan 30 tahun yang lalu. Majlis yang kemudiannya menjadi Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia (MABBIM), iaitu setelah kemasukan Brunei Darussalam sebagai anggotanya yang ketiga ini, berfungsi menyelaraskan aspek-aspek utama dalam sistem bahasa Melayu dan merencanakan pembinaan istilah untuk pelbagai bidang ilmu secara bersama. Antara pencapaian majlis ini yang besar impaknya dalam perkembangan Bahasa Melayu serantau ialah penyamaan sistem ejaan yang telah pun dilaksanakan pemakaiannya sejak tahun 1973 lagi. Dalam aspek peristilahan pula, lebih daripada 300,000 istilah dalam pelbagai bidang ilmu dan pengajian telah diselaraskan oleh MABBIM khususnya untuk kegunaan peringkat pengajian tinggi dan profesional di rantau ini.

Sebagai lanjutan kepada usaha yang dilaksanakan di bawah MABBIM, Kerajaan Malaysia telah meluluskan pula pewujudan sebuah majlis untuk menyelaraskan kegiatan pengembangan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa pada tahun 1997. Majlis yang dinamai Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) yang dengan rasminya terbentuk pada bulan Ogos 2000 itu, kini dianggotai oleh hampir 25 negara atau institusi yang mempunyai pusat pengajian Melayu, atau program kursus bahasa dan sastera Melayu. Melalui MABM, yang mengadakan sidangnya setiap tahun, Bahasa Melayu dikembangkan di luar dari wilayah berbahasa Melayu secara meluas dan lebih terancang hingga ke negara-negara Eropah seperti United Kingdom, Jerman, Belanda, Perancis, dan Rusia serta ke negara-negara Asia Timur seperti China, Jepun dan Korea.

Di Malaysia, sebagai usaha meningkatkan penghayatan semangat kecintaan kepada bahasa dan negara, DBP mengadakan program Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) pada bulan September setiap tahun. Program ini diwujudkan dengan matlamat untuk memperkukuh peranan bahasa dan persuratan kebangsaan sebagai asas jati diri dan citra bangsa dan negara. Program yang bermula sejak tahun 1999 ini merupakan lanjutan kepada program-program sebelumnya, terutama Bulan Bahasa Kebangsaan pada tahun 1960-an dan Gerakan Cintailah Bahasa Kita sejak tahun 1987, yang mengajak golongan muda/anak-anak sekolah mengenal, menghayati dan menyintai bahasa kebangsaan.

Akhir-akhir ini, kita merasakan wujud semacam cabaran, yang kelihatan

seolah-olah menghambat kelancaran pelaksanaan dasar bahasa di Malaysia. Cabaran ini berupa izin menggunakan bahasa lain (khususnya Bahasa Inggeris) sebagai bahasa pengantar ilmu di IPTS (1996), dan arahan penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar untuk mata pelajaran tertentu di sekolah rendah (2003). Kedua-dua keputusan ini telah mengundang pelbagai tanggapan, antaranya, ada yang mengandaikan wujudnya krisis keyakinan terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi, juga bahasa penyampai bidang sains dan matematik. Apapun, adalah terlalu awal untuk kita membuat penilaian terhadap hal ini. Lantaran itu, pihak-pihak yang bertanggungjawab kini sedang memberikan perhatian yang serius terhadap pelaksanaannya dan menimbangkan cadangan balas untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

Era Globalisasi, Cabaran, dan Harapan

Cabaran yang menjadi wacana sejagat hari ini sememangnya berbangkit daripada gelombang globalisasi, iaitu fenomena yang melanda hampir semua bahagian di dunia ini. Istilah globalisasi merujuk kepada suatu proses yang melibatkan penyebaran idea-idea, nilai-nilai dan produk-produk yang berasal dari tempat-tempat tertentu yang mewakili kebudayaan tertentu ke seluruh pelosok dunia dan diterima pula (secara rela mahupun secara alamiah) sebagai proses yang sarwajagat sifatnya. Dalam konteks ini, globalisasi yang saya maksudkan ialah globalisasi yang dicetuskan oleh kebudayaan Barat khususnya Amerika, kerana, sebelum ini pun, memang telah terjadi gelombang globalisasi yang didominasi oleh tradisi Islam.

Globalisasi yang bersumberkan kebudayaan Barat ini sedang mewarnai kehidupan duniawi sarwajagat. Ia meliputi hal-hal yang berkaitan dengan sistem nilai dan produk dalam pelbagai bidang kehidupan, daripada hiburan dan kesenian hingga teknologi maklumat, bahasa dan pemikiran. Proses globalisasi yang melanda seluruh umat dunia itu pula bersifat sehala hingga proses itu bersinonim pula dengan proses pembaratan (*westernization*) atau peng-Amerikaan (*Americanization*).

Kesan globalisasi yang paling ketara ialah penghakisan nilai dan unsur-unsur kebudayaan setempat dan kebangsaan walaupun secara beransur-ansur. Hal ini dikhuatiri akan melenyapkan jati diri dan citra bangsa kita pada suatu hari nanti. Apabila saya menekankan kekhuatiran akan kesan negatif globalisasi (tanpa menolak beberapa dampak positifnya), sebenarnya kekhuatiran saya bersabit dengan nasib bahasa Melayu sebagai salah satu unsur kebudayaan dan peradaban kita yang cukup penting.

Kesan globalisasi yang terpenting terhadap bahasa Melayu, pada pandangan saya, ialah jangkauan fungsi bahasa itu sebagai wahana penyampaian maklumat yang pasti tercabar oleh sebab dominasi bahasa lain yang menjadi alat proses globalisasi itu sendiri. Secara jujur perlu kita akui bahawa pada waktu ini bahasa Inggerislah yang tampaknya paling dominan sebagai bahasa penyampaian maklumat dalam pelbagai ranah atau bidang kehidupan, daripada

hal-hal yang berkaitan dengan peralatan, kesenian, hiburan, ilmu pengetahuan hingga kepada bidang teknologi, ekonomi, politik dan yang lain-lain lagi. Segala maklumat itu masuk ke dalam budaya kita melalui bahasa Inggeris. Sesiapa sahaja yang melayari internet, baik ia orang dewasa mahupun ia kanak-kanak, pasti memperoleh hampir semua maklumat yang dicarinya melalui bahasa Inggeris.

Bahasa Inggeris juga mendominasi sebahagian besar perisian komputer yang leluasa di pasaran. Jelas, dalam keadaan bahasa Inggeris begitu dominan dan bahasa Melayu pula baru setapak dua memasuki alam teknologi maklumat, agak sukar untuk kita meyakinkan diri sendiri bahawa tidak ada kesan pengurangan atau penyusutan wibawa dan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa moden, akibat globalisasi - meskipun dalam bentuk media lain, seperti media cetak dan media elektronik radio dan televisyen, bahasa Melayu masih jelas berfungsi dengan meluas.

Fenomena bahasa rojak yang agak berleluasa dalam media massa ini turut menjadi bukti bahawa gerakan mendaulatkan bahasa Melayu demi memastikan kelangsungannya pada masa hadapan dengan erti kata yang sebenar-benarnya, masih perlu ditingkatkan. Dengan wujudnya media dalam alam maya ([www/http](http://www/)) dan komunikasi singkat *sms* melalui telefon bimbit, hal ini menjadi semakin rumit. Dalam pada kita berkejar mengikut derasnya rentak kegiatan sekarang, kita terasa kita sentiasa lambat puluhan langkah di belakang teknologi, dan arus globalisasi pula begitu deras datang melanda, menelan apa sahaja dalam laluannya.

Globalisasi sering dikaitkan dengan hipotesis wujudnya sebuah desa sejagat, iaitu dunia tanpa sempadan. Hal ini menuntut kita membuat takrif atau definisi semula tentang konsep sempadan. Pemisahan, pengasingan dan sekali gus kedaulatan sesuatu negara dan bangsa yang dahulunya hampir secara mutlak ditandai oleh sempadan geopolitik termasuk bahasanya, kini sudah mula kelihatan tidak relevan lagi. Rempuhan globalisasi yang tidak bergantung pada variabel batas fizikal, sebaliknya melalui alam maya/siber, dengan sendirinya meruntuhkan sekian banyak sistem kenegaraan yang selama ini menjamin kedaulatan dan keselamatan entiti politik tertentu. Kini segala-galanya dapat masuk tanpa kawalan dan tapisan imigresen atau kastam. Sentuhan hujung jari pada papan kekunci komputer peribadi saja sudah cukup untuk kita menerima apa-apa sahaja maklumat dari sumber di serata dunia. Demikianlah, apabila kehidupan sebilangan besar kita kelak banyak berkaitan dan bergantung pada sumber maklumat melalui cara sedemikian, pasti akan kuranglah kebergantungan kita kepada bahasa kita sendiri yang selama ini menjadi wahana komunikasi terpenting untuk kelangsungan hidup kita.

Soal adakah pada satu waktu kelak kita hanya memerlukan satu bahasa sejagat sahaja sebagai kesan globalisasi masih agak jauh untuk kita ramalkan. Walau bagaimanapun usahlah diremehkan kesan penyusutan fungsi bahasa Melayu sebagai wahana kehidupan moden, angkara globalisasi, setidak-tidaknya

sebagai cabaran kepada kita semua untuk terus memperkasakan bahasa Melayu demi kelangsungan hidupnya dan hidup kita sebagai bangsa yang berjati diri, berperadaban dan berdaulat.

Aspek lain yang tidak kurang pentingnya ialah pencairan sistem bahasa Melayu oleh sebab pengaruh globalisasi yang memperkenalkan sekian banyak konsep baru, yang sebahagian mencemarkan konsep-konsep murni yang terkandung dalam sistem nilai, pandangan hidup dan falsafah bangsa kita. Konsep yang tidak serasi dengan sistem nilai dan pandangan hidup kita itu mungkin sahaja menjadikan bahasa Melayu bahasa yang cemar daripada sudut peranannya sebagai pembentuk minda generasi muda. Misalnya, konsep yang terbit daripada ranah hiburan yang berasaskan hedonisme dalam tradisi Barat, iaitu hiburan yang melampau, tentu sahaja merosakkan gaya dan pandangan hidup bangsa kita. Kegemparan demi kegemparan yang timbul akibat fenomena budaya samseng, *mafia*, *black metal*, misalnya, merupakan kesan langsung daripada proses globalisasi dalam bentuk yang negatif. Sekali lagi akan berlaku penjajahan pemikiran dan kebudayaan yang dipaksakan oleh satu tradisi asing di kalangan bangsa kita dan hal ini bukan kecil dampaknya kepada keutuhan budaya yang menjadi tunjang peradaban kita.

Selain itu, kekacauan dan kekeliruan yang berlaku dalam sistem linguistik bahasa Melayu sebagai akibat globalisasi juga tidak kurang membebankan benak kita. Kelemahan dalam penguasaan sistem bahasa Melayu pada sejumlah anggota masyarakat, ditambah pula oleh pengaruh struktur bahasa yang mendominasi pengaliran maklumat ke dalam masyarakat kita, menyebabkan munculnya pelbagai bentuk bahasa yang rancu dan janggal.

Pada sesetengah orang, perubahan aspek-aspek tertentu struktur linguistik mungkin dianggap fenomena yang lumrah, dan tidak perlu dirisaukan kerana perubahan ini, pada tahap tertentu, memang merupakan hal yang alamiah bagi bahasa yang hidup dan dinamis. Namun, jika perubahan yang berlaku begitu radikal dan keterlaluan, kita pasti akan kehilangan sebahagian jati diri yang ditandai oleh sistem Bahasa, baik daripada sudut gaya pengungkapan mahupun daripada sudut pemilihan kod-kod yang serasi dengan sistem nilai dan pandangan hidup kita. Anggota masyarakat yang kurang peka akan pentingnya jati diri, mudah sekali terikut-ikut dengan rentak dan gaya pengungkapan dalam bahasa asing. Gambaran fenomena ini bukan sahaja dapat kita saksikan dalam pelbagai media, bahkan kini telah menular suatu ragam bahasa perbualan melalui internet yang cukup, aneh, asing dan sama sekali tidak menggambarkan jati diri bangsa kita.

Arus globalisasi tidaklah membawa impak yang negatif semata-mata kepada peradaban bangsa kita. Banyak manfaat yang telah kita peroleh baik secara langsung mahupun secara tidak langsung, walaupun arusnya begitu deras. Hal ini ternyata benar apabila kita lihat kembali bahawa dengan memahami bahasa Inggeris, bahasa yang dianggap global itu kita dapat mencapai maklumat yang tidak terhinggakan banyaknya melalui pelbagai

saluran. Maklumat ini, sebahagian besarnya telahpun kita gunakan, kita olah dan kita jana untuk pembangunan minda dan negara bangsa kita. Tidaklah dapat kita nafikan sama sekali, bahawa kecekapan kita menggunakan peralatan berteknologi moden khususnya komputer, mesin faksimili, telefon bimbit dan sebagainya, sebahagian besarnya bergantung kepada keupayaan kita memahami bahasa Inggeris juga. Demikianlah juga halnya dengan usaha pembinaan bahasa Melayu. Antara lain, DBP Malaysia telah berhasil membina Pangkalan Data Korpus yang begitu besar, mengandungi ratusan juta data/maklumat Bahasa Melayu yang dihimpunkan daripada pelbagai sumber persuratan menggunakan sistem dan peralatan yang datang bersama-sama arus globalisasi.

Rumusan dan Cadangan

Kita telah menyentuh isu bagaimana negara kita yang sedang menuju kemerdekaan, meletakkan bahasanya, yang diangkat dan didaulatkan sebagai lambang jati diri bangsa dan budaya dalam peradabannya, sebagai satu elemen yang menjana semangat kebangsaan. Kita juga telah menelusur sejarah panjang bahasa Melayu yang gemilang yang kini sudah pun masuk ke alaf ketiga. Sejarah gemilang bahasa Melayu dalam beberapa fasa perkembangan peradaban Melayu telah dipertalikan dengan upaya kita menjadikannya salah satu asas penting dalam proses pembinaan negara bangsa, iaitu dengan mengangkat tarafnya menjadi bahasa kebangsaan/nasional, bahasa rasmi dan bahasa ilmu di negara kita masing-masing.

Secara am, Malaysia sudah boleh berbangga dengan pencapaian bahasanya yang telah memperlihatkan kejayaan yang cukup besar sejak mencapai kemerdekaan - dalam tempoh hampir setengah abad. Sungguhpun begitu, masih ada hambatan hambatan untuk kita benar-benar memantapkan taraf dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, khususnya dalam bidang ilmu sains dan teknologi, di samping tahap penggunaan bahasa kebangsaan itu sebagai bahasa rasmi di sektor swasta yang masih jauh daripada memuaskan. Pada bahagian kedua pula, telah dikupas tantangan yang dihadapi oleh bahasa Melayu, pada awalnya yang berpunca daripada situasi dalam negara sendiri, dan kemudian yang berakibat daripada gelombang globalisasi.

Apa pun, yang penting, pada hemat saya, ialah bahawa kita tidak patut terbawa-bawa oleh kepercayaan bahawa kita sudah tidak ada pilihan lagi, melainkan perlu memenuhi kelangsungan hidup yang dipengaruhi dan didominasi oleh globalisasi searah dari Barat hingga mengorbankan jati diri kita, terutama bahasa dan budaya. Kini, sudah mula kedengaran orang berkata bahawa bahasa dan budaya tidak penting. Yang penting ialah kemajuan bangsa. Bahasa dan budaya kita akan maju dengan sendirinya kelak apabila bangsa telah mencapai kemajuan. Tidak akan kurang sifat kebangsaan kita sekiranya kita mengurangkan penonjolan bahasa dan budaya kita! Walhal kita pernah mengisi ruang globalisasi itu secara serentak untuk memajukan bangsa dan

mengangkat bahasa dan budaya kita pada abad yang lalu.

Pandangan seumpama itu jelas tidak selaras dengan hasrat dan semangat yang dikaitkan dengan pengukuhan ketahanan budaya bangsa dan konsep kedaulatan negara. Kedua, fahaman bahawa kelangsungan hidup (*survival*) bererti kesediaan mengorbankan asas-asas kebangsaan dengan jelas bertentangan dengan idealisme bangsa yang bermaruah, berjati diri dan berwawasan jauh. Kita seharusnya tidak meletakkan bangsa dan negara kita dalam situasi untung rugi, dengan kuasa yang melanda kita senantiasa di pihak yang untung dan kita di pihak yang rugi. Sebaliknya jauh lebih baik jika kita mengupayakan agar kita dalam keadaan untung untung, iaitu kemajuan kita capai dengan tidak perlu kita mengorbankan asas-asas kebangsaan kita.

Bukanlah hajat kita untuk memberikan jalan penyelesaian yang mutlak terhadap segala tantangan yang diadapi. Malah, cetusan isu-isu yang dikemukakan itu diharapkan dapat sama-sama kita jadikan titik tolak untuk mengisi segala lompong yang ada dan juga untuk senantiasa menggerakkan apa-apa jua usaha menjadikan bahasa kita tetap utuh dan berdaya memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan peradaban kita. Kita patut yakin penuh kepada keupayaan Bahasa Melayu untuk memajukan bangsa dan negara kita, dengan tidak mengeneipkan kepentingan mengetahui bahasa asing untuk menimba ilmu dan maklumat. Untuk itu juga kedapatan banyak negara-negara maju mempelajari dan menguasai bahasa-bahasa kedua atau ketiga bertujuan mengenali peradaban bangsa-bangsa lain, termasuk mengenali peradaban Melayu melalui bahasa Melayu.

Demikianlah, beberapa cadangan dikemukakan untuk perhatian dan tindakan sesiapa sahaja yang memikirkan peri pentingnya mengukuhkan bahasa Melayu demi masa depan peradaban bangsa:

Pertama, dan yang paling penting ialah meningkatkan upaya dan kerjasama antara negara-negara yang bahasa induknya bahasa Melayu (khususnya negara anggota MABBIM) untuk meletakkan bahasa kita sebagai salah satu bahasa utama dalam hubungan dan komunikasi, setidak-tidaknya di rantau ini, baik daripada aspek perdagangan, mahupun aspek politik dan kebudayaan. Keampuhan bahasa Melayu harus diyakini untuk mendukung matlamat bersama. Dengan yang demikian barulah budaya bangsa dapat 'menumpang' kelangsungannya, dan arus globalisasi tidak menghakisnya.

Kedua, khususnya untuk mencapai tujuanyang di atas, keupayaan dan kemantapan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan penyampai maklumat harus dipertingkatkan secara bersepadu, dengan membanyakkan khazanah persuratan dalam pelbagai ranah dan bidang ilmu serta kehidupan, terutamanya dalam bidang falsafah, pemikiran, pengurusan dan MT. Bangsa kita harus berusaha dengan lebih gigih untuk menulis, menterjemah, menerbit dan menyebarkan buku dan bahan-bahan ilmu dalam bahasa Melayu. MABBIM, sebagai majlis fatwa dan pendukung bahasa Melayu, wajar mencari jalan dan bertindak segera untuk menangani kekurangan buku dan sumber maklumat

serta teknologi dalam bahasa Melayu. Manakala MABM pula wajar digunakan sebagai tapak penyebaran bahasa Melayu, bahan tentang bahasa dan peradaban kita. Kepustakaan berbahasa Melayu haruslah digerakkan bersama dengan penghasilan karya asli oleh puluhan ribu sarjana dan pemikir bangsa di rantau dunia Melayu ini. Buku-buku asing seberapa segera hendaklah diterjemahkan sebagaimana lajunya tindakan yang sama oleh Jepun, Korea dan Taiwan. Peranan Forum Kerjasama Penerbitan Serantau (FOKEPS) yang didukung oleh Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura itu patut difahami oleh semua para penerbit dan segera melakukan program kerjasama seutuhnya.

Ketiga, sebagai lanjutan kepada saranan yang di atas, peranan setiap badan kebahasaan di negara-negara anggota MABBIM perlu diperkukuh. Pusat Bahasa (PB) di Indonesia, yang setakat ini memang sudah dikenal ramai sebagai badan yang cukup banyak menghasilkan penelitian dalam pelbagai aspek bahasa, mungkin memerlukan wewenang atau 'mandat' yang kurang lebih sama dengan DBP Malaysia yang diberikan kuasa melalui Akta Parlimen, khususnya untuk melaksanakan hasil persetujuan bersama yang dicapai dalam setiap Sidang MABBIM. Dengan pengukuhan fungsinya, yang sepatutnya mencakupi aspek pengembangan, PB boleh mengatur rencana kerja yang mantap untuk pelaksanaan yang lebih berkesan, khususnya untuk menerobos ke bidang-bidang penghidupan yang utama seperti pendidikan, penyiaran dan penerbitan. Begitu juga, impak secara menyeluruh di wilayah yang lebih besar dijangka terhasil, sekiranya taraf dan wibawa Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei diperkukuh untuk tujuan yang sama.

Keempat, keupayaan dan kemantapan bahasa Melayu sebagai bahasa pengungkapan ilmu harus dipertingkatkan, khususnya di institusi-institusi pengajian tinggi baik di Malaysia mahupun di kalangan negara-negara serantau ini. Para pemimpin industri pendidikan, pengajar juga pengamal bidang-bidang profesional yang berkaitan dengannya, perlu diberi latihan secukupnya agar cekap menangani bidang pengajaran dan pendidikan dalam bahasa Melayu. Begitu juga, penelitian dan segala dapatannya hendaklah ditulis dan diterbitkan dalam bahasa kita. Bidang persuratan khususnya sastera yang tertulis dalam bahasa Melayu patut dikenali antara satu sama lain bermula dengan negara-negara serantau yang berbahasa Melayu. Promosi ke persada dunia sebijak yang mungkin dilakukan agar masyarakat dunia ikut mengenali kita melalui sastera kita. Itulah makanya Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA) dilahirkan dengan kesepakatan negara-negara anggota MABBIM dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama disamping membuka ruang kepada aliran keluar masuknya sastera serantau yang tertulis dalam bahasa-bahasa Asia Tenggara yang lain jua.

Kelima, semua pihak, terutamanya pihak yang membuat dasar pembangunan negara masing-masing, perlu memastikan bahasa Melayu digunakan dalam aktiviti rasmi di peringkat negara dan rantau, khususnya bagi mesyuarat dan pelbagai acara, seperti sidang, seminar, kolokium dan yang seumpamanya,

dan juga aktiviti sosial. Mahu tidak mahu, dalam zaman sains dan teknologi ini, semua kegiatan tidak lepas daripada pengaruh sains dan teknologi, justeru tindakan ini akan menyepadukan perkembangan Melayu bahasa dengan teknologi. Dalam situasi antarabangsa amalan dwibahasa dengan mengutamakan bahasa Melayu di kedudukan utama elok sekali dimulakan.

Keenam, dengan segala infrastruktur komunikasi yang tersedia, segala urusan boleh dibuat melalui multimedia. Perkembangan ini hendaklah diterima sebagai cabaran dan rangsangan untuk memajukan bahasa Melayu serta membangunkan teknologi maklumat dalam bahasa Melayu. Dalam perkembangan yang cukup pesat dan pantas ini, khususnya Koridor Raya Multimedia yang meliputi kawasan seluas 50 kilometer persegi - dari Pusat Bandar Kuala Lumpur hingga ke Lapangan Terbang Antarabangsa Sepang - yang membangunkan Bandar Putrajaya dan 'Bandar Siber' yang serba canggih ini, bahasa Melayu hendaklah dimasukkan sebagai satu komponen yang mendirikan sebahagian sistemnya. Dengan perspektif dan orientasi ini, tentulah bahasa Melayu dapat dibangun dan diperkembangkan dengan lebih meluas dan mantap.

Ketujuh, bahasa Melayu perlu diperlengkap dengan maklumat terkini, khususnya dalam aspek pernterjemahan dan pemprosesan maklumat melalui komputer, juga pengendalian urusan-urusan harian melalui komputer. Untuk mencapai tujuan tersebut kita perlu berusaha secara bersepadu melalui MABBIM contohnya, supaya bahasa kita mampu menjadi sebahagian daripada elemen yang membangunkan teknologi maklumat itu sendiri. Dengan kata lain, pelbagai maklumat yang terkandung dalam aneka jenis MT yang sedia ada harus terdapat dalam bahasa Melayu, di samping ada terjemahannya dalam bahasa itu, sejajar dengan hasrat untuk mensejagatkan bahasa Melayu. Teknologi maklumat merupakan saluran yang cukup penting, canggih, cekap dan pantas untuk tujuan tersebut.

Kelapan, pihak berwajib dan yang bertanggungjawab membuat dasar pembangunan negara dan pelaksanaannya perlu memastikan agar agenda pembangunan, pengukuhan dan penyebaran budaya bangsa mencakupi aspek bahasa dan persuratan. Dengan kata lain, hal membangunkan, mengukuhkan dan menyebarkan bahasa Melayu perlu menjadi salah satu agenda pembangunan negara yang tercakup dalam agenda 'kebudayaan'. Dengan itu, bahasa Melayu dapat dilaksanakan dan dipantau secara bersungguh-sungguh serta dinilai secara berkala seperti aspek pembangunan yang lain-lain. Agensi-agensi penyiaran seperti radio dan televisyen, syarikat telekomunikasi (Telekom Malaysia, Celcom misalnya), pelbagai majlis dan agensi lain yang berkait juga harus mempertingkatkan peranan masing-masing untuk memastikan bahasa Melayu tidak terpinggir oleh perkembangan teknologi maklumat terkini.

Kesembilan, bahasa Melayu perlu dikembangkan ke luar wilayah kita dan dipromosi seluas-luasnya agar orang luar memahami dan menggunakannya untuk mendapatkan maklumat dan ilmu yang terdapat dalam khazanah kita.

Kita harus ingat bahawa bahasa Inggeris bukanlah segala-galanya. Orang luar lebih senang mengenal budaya atau falsafah hidup kita melalui bahasa Melayu, lantaran persepsinya lebih tepat dan bahasanya berupaya menyampaikan cita rasa peradaban Melayu dalam erti kata luasnya itu dengan lebih berkesan. Begitu juga halnya, andaikata kita mahu mengenal budaya dan falsafah China, maka jalan yang terbaik ialah mendapatkan maklumatnya melalui bahasa China (Mandarin). Begitulah tanggapan kita, hinggakan kita menggalakkan anak bangsa kita juga mempelajari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan lain-lain, untuk mengenal budaya dan peradaban bangsa tersebut secara yang lebih dekat. Secara tidak langsung, kedua-dua keadaan ini membantu mengurangkan impak globalisasi sehalau yang amat kita khuatiri itu.

Akhirnya, kita semua, khususnya pencinta bahasa Melayu harus memainkan peranan sebagai penggerak kepada semua kegiatan bahasa kita. Yang lebih penting, kita harus menjadi teladan kepada masyarakat sekeliling dengan terus menerus menggunakan bahasa kita (tentunya yang baik dan benar) dalam semua aspek kehidupan kita, lebih-lebih lagi dalam menyalurkan maklumat, dan mengungkapkan buah fikiran serta segala yang berkaitan dengan kehidupan budaya kita – seperti pada hari ini.

Penutup Bicara

Perkembangan dalam bidang teknologi maklumat mutakhir harus dilihat sebagai suatu dorongan untuk mengembangkan bahasa (Melayu/Indonesia) dan menggalakkan pemberdayaannya secara terancang. Sebagai wahana pembinaan dan pemantapan budaya bangsa, dalam kesibukan dan kegigihan kita membina negara menuju ke arah negara maju dan negara industri, inilah satu aspek bersifat dalaman yang tidak boleh kita abaikan. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa adalah bidang utama kekuatan bangsa dan alat pengucapan kebudayaan, dan bahasa jugalah yang menjadi teras kebudayaan nasional. Justeru, bahasa yang mampu berkembang menyongsong dan menangani perubahan dari segi keperluan serta tuntutan baru peradaban manusia, pastinya akan mampu membina tamadun bangsa.

Akhirnya, kita, bangsa Malaysia-Indonesia, harus bersedia dan tahu menggunakan kebijaksanaan mengangkat nilai budaya, khususnya bahasa kita dalam konteks kemajuan teknologi maklumat dengan lebih berhemah, kerana pemberdayaan atau pemerdayaan bahasa Melayu/Indonesia sebagai alat pengukuh peradaban bangsa kita di rantau ini bergantung pada keupayaan kita, bangsa kita, untuk membina kemajuan dalam segala bidang yang berpengaruh besar melalui bahasa kita sendiri.

Sekian.

RUJUKAN

- A. Aziz Deraman, Dato' "*Bahasa dan Sastera Melayu dalam Menghadapi Wawasan 2020*". Kertas Kerja yang dibentangkan pada Hari Sastera XI, Pusat Latihan Telekom Melaka, 26-28 Mei 1995.
- _____, 1992. *Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia*. Kuala Lumpur: Arena Ilmu Sdn. Bhd. Ed Baru DBP 2000.
- Abdullah Hassan, Prof. Dr. 2002, "*Kemajuan Negara Beracukan Bahasa dan Budaya Melayu*". Siri Bicara Bahasa, Bil 14. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Persatuan Linguistik Malaysia.
- Awang Sariyan, Dr. 2002, "*Ceritera Tentang Kejayaan Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia*". Siri Bicara Bahasa, Bil 14. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Persatuan Linguistik Malaysia.
- _____, 1996. *Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Abdul Rahim Abu Bakar, Dato' Haji. 2002, "*Kelangsungan Hidup Bahasa Melayu sebagai Tonggak Negara Bangsa dalam Gelombang Globalisasi*". Siri Bicara Bahasa, Bil 7. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Persatuan Linguistik Malaysia.
- Aziz bin Deraman, Prof. Dr. "*Bahasa Melayu dalam Era dan Teknologi Maklumat: Status dan Cabaran*". Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Bahasa dan Sastera Sempena Sidang ke-40 MABBIM, Johor, Mac 2000.
- Hassan Ahmad, Dato' Dr. "*Memperkasa Bahasa Melayu-Indonesia dalam Mengukuhkan Peradaban Bangsa*". Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Bahasa dan Sastera sempena Sidang ke-42 MABBIM, Brunei Darussalam, Mac 2003.
- _____, 2002, "*Dasar Bahasa dan Pembangunan Negara di Malaysia*". Siri Bicara Bahasa, Bil 9. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Persatuan Linguistik Malaysia.
- James T. Collins, Dr. 1996. "*Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Antarabangsa*", Manifesto Budaya: Pupus Bahasa, Pupuslah Bangsa. Kuala Lumpur: Lohprint Sdn. Bhd.
- Mohd. Yusof Haji Othman, "*Bahasa Melayu Bahasa Sains dan Teknologi: Cabaran abad ke-21*". Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Bahasa dan Sastera sempena Sidang ke-21 MABBIM, Brunei Darussalam, Mac 2000.

Nik Safiah Karim, Dato' Dr. "*Persoalan Masyarakat Melayu Menjelang Abad Ke-21: Perspektif Bahasa Melayu Baru*". Monograf & Dokumentasi Gapena Jilid Satu, ITC Book Publisher, Kuala Lumpur, 1993;

Russel Jones, Dr. 1990. Sejarah Bahasa Melayu, Pensejarah Bahasa Melayu: Beberapa Pandangan Awal. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1990.

A. AZIZ BIN DERAMAN

Aziz Deraman dilahirkan di Pasir Puteh, Kelantan pada tahun 1948, dan merupakan Graduan Universiti Malaya (1971). Beliau pernah memegang jawatan sebagai Pengarah Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (1981 – 1987) dan Pengarah/Setiausaha Bahagian Kebudayaan (1987 – 1989) apabila Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan ditubuhkan.

Sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) beliau telah berkhidmat di Kementerian Luar Negeri (1971), Perbendaharaan Malaysia (1979-81), Kementerian Pembangunan Luar Bandar (1989-91), Timbalan Ketua Setiausaha, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat (1991-92) dan Setiausaha Bahagian Pembangunan dan Bekalan, Kementerian Pendidikan (1993-94) Beliau juga pernah menjadi tenaga pengajar sambilan di Yayasan Anda Akademik (1971 – 1976) dan pensyarah/tutor sambilan di Universiti Malaya (1971 – 1975). Mulai 1 Ogos 1994 beliau bertugas sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Malaysia.

Beliau banyak terlibat dalam seminar/persidangan berhubung dengan peradaban dan pembangunan kebudayaan di peringkat kebangsaan, serantau dan antara bangsa. Antara penulisan/terbitan/karya susunan beliau ialah: *Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia* (1975, ed baru 1994, DBP 2001), *Islam dan Kebudayaan Melayu* (1978, ed.), *Beberapa Aspek Pembangunan Kebudayaan Kebangsaan* (1978 ed.), *Perancangan dan Pentadbiran Kebudayaan di Malaysia* (1983), *Perayaan* (Malaysia Kita 1987), *Tamadun Melayu I - V* (1989, 1992 ed. bersama), *Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia* (1992; ed baru DBP 2000), *Kau dan Aku* (antologi puisi) (1994), *Bahtera Madani* (antologi puisi) (2001), *Gapura Diri* (antologi puisi) (2002).

Beliau juga bergiat cergas dan memegang jawatan dalam pertubuhan sukarela: Naib Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (PESAKA), Timbalan Presiden Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa (PERSILAT), Naib-Presiden Majlis Antarabangsa Festival dan Pertubuhan Kesenian Rakyat (CIOFF - *International Council of Folklore Festival and Folkarts Organisations*), Asia dan Oceania, Timbalan Pengerusi Persatuan Persahabatan Malaysia – China (PPMC).

Aziz pernah menjadi Ahli Jemaah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (1982 – 1989), Ahli Lembaga Pusat Seni Universiti Sains Malaysia (USM) (1982 – 1989), Ahli Lembaga Penasihat Fakulti Pengajian Bahasa Moden, Universiti Putra Malaysia (UPM), Pengerusi Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara, Ahli Lembaga Perbadanan Muzium Kelantan, Pengerusi Projek Pustaka Peringatan P. Ramlee, Ahli Lembaga Pengarah Instituti Terjemahan Negara Malaysia (ITNM), Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Karyawan Malaysia, Timbalan Pengerusi Panel Anugerah Sastra Negara (sejak 1994), Pengerusi Panel Hadiah Sastra Perdana (sejak 1994), Pengerusi Majlis Sastra Asia Tenggara (MASTERA) (sejak 1996), Pengerusi Panel Hadiah Sastra MASTERA, Pengerusi Tetap MABM (Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (sejak 2000).

Beliau dianugerahi: *UNESCO Fellowship On Cultural Planning and Programming* (1983) *US International Exchange Programme Award* (1984), *International Cultural Diploma of Honour* (ABIRA, U.S.A.) (1986), *Tokoh Budaya Kelantan* (1986) dan *K.M.N.* (1990), *J.S.M* (1997), *Dato' Mahkota Mindanao (D.M.M.)* (1999) *A.S. Pushkin Memorial Medal, Russia* (1999), *Dato' Paduka Setia Mahkota Kelantan (D.P.S.K)* (2001), *Profesor Tamu/Kehormat Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS), Guangzhou, China* (2001), *Darjah Setia Pangkuan Negeri (D.S.P.N) Pulau Pinang* (2003), *Tokoh PUSPA 2003 (Persatuan Penulis dan Seniman Kelantan)*, *Anugerah Khas Presiden ABIM 2003 (Angkatan Belia Islam Malaysia)*.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal	: Rabu, 15 Oktober 2003
Judul Makalah	: 1. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Melayu di Brunei Darussalam 2. Kelangsungan Hidup Bahasa Melayu dan Pengu- kuhan Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi
Pemakalah	: 1. Awang Abdul Hakim Haji Mohd. Yassin (Brunei Darussalam) 2. Dato Haji A. Aziz bin Deraman (Malaysia)
Pemandu	: Nafron Hasjim
Pencatat	: 1. Adnan Usmar 2. Sariah

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Hamamah (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Bahasa Inggris di Brunei sebagai bahasa utama. Hal itu sangat mem-
prihatinkan karena bahasa itu merupakan sarana ekspresi budaya. Apakah
tidak mengkhawatirkan jika masyarakat Brunei yang nota bene juga orang
Malaysia tetapi berekspresi budaya seperti orang Inggris. Misalnya orang
Arab yang menggunakan bahasa Prancis berperilaku seperti orang Prancis.
Upaya apa yang dilakukan pemerintah mengantisipasi masalah itu?

Jawaban:

- a. Pemerintah kerajaan telah mengantisipasi masalah tersebut dengan
membuat kebijakan antara lain melalui surat-surat keliling, per-
hubungan antara kerajaan dengan kerajaan dan swasta mesti meng-
gunakan bahasa Melayu. Begitu juga sekolah-sekolah harus meng-
gunakan bahasa Melayu yang lebih baik. Selain itu, pihak swasta juga,
seperti dewan perniagaan Tionghoa, antarbangsa, dan sebagainya
melalui kerja sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dan pihak-
pihak lain diharapkan terus.
- b. Kami juga di Malaysia bimbang tentang kedudukan itu atas persepsi
masyarakat terhadap bahasa Inggris dan bahasa kebangsaan. Kami
senantiasa mengatakan kepada mereka agar tidak mempertentang-
kannya karena dapat menimbulkan konflik. Bahasa kebangsaan
(bahasa Melayu) mempunyai peranan dan fungsi lain yang berbeda
dengan peranan dan fungsi bahasa Inggris. Jadi, bahasa Inggris juga
boleh mengukuhkan bahasa Melayu. Sebaliknya, bahasa Melayu dapat
juga mengukuhkan ilmu pengetahuan.

2. **Pertanyaan:** Prof. Tengku Ismail Husen (...)
- Menawarkan siapa di antara pengarang Indonesia yang akan menyerahkan hasil penelitiannya untuk dicetak di Malaysia. Akan tetapi, hasil penelitian naskah Melayu oleh peneliti Indonesia yang sudah diserahkan ke Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, sampai sekarang belum memperoleh jawaban. Bagaimana tindak lanjutnya?
 - Bahasa Melayu yang mana yang akan diangkat menjadi bahasa regional di Asia Tenggara?
 - Perlu memformulasikan ilmu sastra yang mandiri di kawasan Asean dengan membicarakan secara bersama antarnegara rumpun Melayu.

Jawaban:

- Tidak semua karya tulis yang dibawa ke Dewan Bahasa dapat diterbitkan. Karya-karya itu terlebih dulu dipanelkan untuk memperoleh keabsahan mutu kemudian diterbitkan oleh Dewan Bahasa.
 - Tidak terjawab.
 - Tidak terjawab.
3. **Pertanyaan:** Suyono (Universitas Negeri Malang)
- Mengapa Malaysia dan Brunei tidak membicarakan posisi bahasa daerah seperti yang dibicarakan di Kongres Bahasa Indonesia VIII sekarang?
 - Faktor apakah yang menyebabkan kegairahan penerbitan di Malaysia?

Jawaban:

- Bahasa daerah yang dibenarkan di Malaysia sekarang adalah bahasa daerah yang sudah mempunyai struktur linguistik. Bahasa Kadazan untuk orang Kadazan di Sabah, bahasa Iban untuk orang Dayak di Serawak, kami bina dan sudah diterbitkan sebagai teks sekolah. Buku teks itu diajarkan mulai tahun pertama dan kedua. Bahasa daerah Brunei tidak disinggung karena hanya berupa dialek dan ini tidak menjadi masalah. Mereka saling memahami dialek masing-masing, tetapi tetap ada bahasa Melayu standar.
 - Mereka yang menulis karya yang bermutu diberikan hadiah berupa uang atau penghargaan.
4. **Pertanyaan:** Drs. H.M. Tangkal Yunus, S.H. (Universitas Sumatera Utara)
- Mengapa jika ada sastrawan yang menciptakan syair/pantun dipandang mundur?
 - Bagaiman istilah aksara Arab-Melayu (Jaur) yang ada di Indonesia dan aksara Melayu-Arab yang ada di Brunei diseragamkan saja.

Jawaban:

- a. Saya mendukung pendapat Pak Yunus. Memang benar kalau kita katakan: anak Sumatera memasang luka

Luka dipasang di Tanjung Jati
Kasih Hamba takkan berubah
Bagai kerambah bersimpul

Anak merpati terbang seribu
Hinggap seekor di tengah halaman
Hendak mati di ujung kuku
Hendak berkubur di tapak tangan

Pantun di atas melambangkan tingginya peradaban Melayu. Program Dewan Bahasa Malaysia, pantun tidak ditinggalkan. Ada 4000 judul/naskah pantun yang sudah dikoleksi. Sastra lama terus dikaji dan dikembangkan. Malahan komponen sastra sudah masuk menjadi bagian dalam pengajaran bahasa yang disebut KOMSAS (Komponen Sastra dalam Bahasa). Materi untuk mengajarkan bahasa Inggris, yaitu (1) sastra Inggris dan (2) sastra berbahasa Inggris. Untuk sastra Inggris digunakan beberapa pilihan, yakni sastra berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Sebaliknya, sastra kebangsaan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hal itu dimaksudkan agar anak-anak yang belajar bahasa Inggris dapat mengetahui karya-karya sastrawan Malaysia, seperti karya Sama Said, Usman Awang, dan Krisbas dalam rangka mengukuhkan pengajaran bahasa Inggris.

- b. Aksara Melayu dalam abad yang lampau di Brunei dan Malaysia disebut tulisan Jawi bukan Melayu-Arab atau Arab-Melayu. Jawi itu Melayu. Jadi, gunakan saja tulisan (aksara) Jawi.

KESETARAAN PERLAKUAN

Bambang Kaswanti Purwo

Unika Atma Jaya

Pada masa-masa awal setelah Proklamasi Kemerdekaan RI—sebelum lahirnya Pusat Bahasa—di banyak tempat dapat dijumpai papan bertuliskan "Gunakanlah Bahasa Indonesia". Imbauan itu dirasakan perlu waktu itu supaya orang mulai membiasakan diri menggunakan bahasa nasional, dan tidak lagi memakai bahasa Belanda dalam percakapan sehari-hari. Pada masa orde baru, selama beberapa dekade terakhir ini--setelah Pusat Bahasa lahir--imbauan berganti menjadi "Pakailah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar", dan belakangan ini diperbarui menjadi "Berbahasa Indonesialah dengan Baik dan Benar". Imbauan ini dilandasi oleh keinginan agar bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang memiliki sistem yang lebih mantap: bahasa baku. Seiring dengan itu, para penuturnya pun diharapkan mau dan mampu menguasai penggunaan bahasa baku itu.

Sudah hampir 25 tahun Pusat Bahasa bergigih memasyarakatkan imbauan itu, melakukan berlaksa-laksa penyuluhan ke berbagai penjuru. Buku tata bahasa baku sudah terbit sampai edisi kedua dan tak lama lagi akan lahir edisi ketiganya. Kamus besar sudah sampai pada edisi kedua pula. Akan tetapi, jika direfleksikan: sudah berhasilkah usaha itu? Dari perencanaan bahasa, juga penyuluh bahasa, tidak jarang terdengar keluhan, misalnya, di banyak gerbang setiap kali menyambut hari kemerdekaan RI, masih banyak dijumpai penulisan secara salah: "Dirgahayu HUT RI ke" Belum lagi kesalahan penulisan istilah, penulisan ejaan, tanda baca, dan yang lain lagi.

Jika usaha itu dikatakan "belum berhasil", apa kiranya langkah yang dapat menjadi alternatif lain? Pendekatan "penyuluhan", apalagi yang bernada "instruktif", sudah saatnya ditinggalkan pada era reformasi ini. bersamaan dengan itu pula, imbauan yang lahir pada masa Orde Baru itu pun janganlah dipakai lagi.

Ada dua alasan mengapa imbauan itu perlu ditinggalkan. Pertama, telah terjadi perbedaan tafsiran mengenai arti "bahasa yang baik dan benar". Khalayak menganggap bahwa "bahasa yang baik dan benar" identik dengan "bahasa baku"; padahal, menurut perencanaan dan penyuluh bahasa, "baik" dan "benar" merupakan dua hal yang terpisah (TBBI, edisi kedua, 1993:22).

- | | |
|--|---------------------|
| (1) Berapakah Ibu mau menjual bayam ini? | [tidak baik, benar] |
| (2) Berapa nih, Bu, bayemnya? | [baik, tidak benar] |

Kalimat (1) adalah ragam baku, tetapi itu bahasa yang "tidak baik dan benar". Kalimat (2) adalah ragam tak baku, dan itu dapat disebut sebagai bahasa yang "baik dan tidak benar". Akan tetapi, apa jawabannya jika ditanyakan kepada guru yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah: mana kalimat yang merupakan bahasa yang "baik dan benar"? Mereka akan mengatakan kalimat (1). Kalimat (2) adalah contoh kebalikannya.

Hal kedua yang merupakan persoalan ialah pengertian "benar" dan "tidak benar". Pengertian "benar" dan "tidak benar"--menurut Pusat Bahasa--yang terdapat pada contoh (1) dan (2) berbeda dengan yang terdapat pada contoh (3) dan (4).

(3) dididik [benar]

(4) di didik [tidak benar]

Pengertian "benar" dan "tidak benar" pada (1) dan (2) merupakan tipe-tipe kalimat yang masing-masing memiliki konteksnya sendiri-sendiri; yang pertama konteks formal dan yang kedua konteks informal. Adapun pengertian "benar" dan "tidak benar" pada (3) dan (4) merupakan contoh kasus yang mengikuti atau tidak mengikuti kaidah baku (atau yang dibakukan).

Kecampuradukan pengertian ini, sekalipun selama ini belum tentu disadari sebagai sesuatu yang campur aduk, membingungkan para pemakai bahasa Indonesia, termasuk para pengajarnya, terutama di peringkat pendidikan dasar dan menengah. Suasana kebingungan dan pembingungan ini sudah barang tentu tidak merupakan daya dukung positif bagi "misi baik" yang dicanangkan sekitar 25 tahun yang lalu oleh Pusat Bahasa.

Keadaan diperumit lagi oleh apa yang tersirat dari penamaan "benar" dan "tidak benar" pada contoh (1) dan (2). Untuk contoh (3) dan (4), hal itu tidak menjadi masalah karena berkenaan dengan "penguasaan bahasa"; tidak ada sangkut pautnya dengan konteks pemakaian. Namun, untuk contoh (1) dan (2), penamaan itu menyiratkan bahwa pengertian "benar"--oleh Pusat Bahasa--hanya diberlakukan untuk kalimat yang menyandang sebutan "baku". Kalimat (2) yang dijumpai pada konteks informal, tidak "layak" memperoleh sebutan "benar", sekalipun benarbenarnya dipakai dan dijumpai sebagai bahasa yang hidup. Jadi, meskipun kalimat seperti pada (1)--dalam perbincangan linguistik--dapat disebut "ragam tinggi" dan kalimat seperti pada (2) "ragam rendah", itu hanyalah istilah atau penamaan. Kalimat seperti pada (2) tidak perlu "direndahkan" sebagai kalimat yang tidak pernah dapat disebut sebagai kalimat yang "benar". Istilah "benar" dan "tidak benar" dapat tetap dipakai pada contoh (3) dan (4) karena tidak ada sangkutpautnya dengan ragam formal dan informal, tetapi janganlah lagi pada contoh (1) dan (2).

Kalimat tipe (2) dan kalimat tipe (1) sama-sama merupakan bahasa yang "hidup". Perbedaannya hanyalah terletak pada konteks pemakaiannya. Keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling "menidakkan" (*complementary*), saling melengkapi, dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh karena itu, keduanya layak memperoleh perlakuan yang setara. Kalau yang satu dilimpahi banyak perhatian (banyak diteliti, dibuatkan buku tata bahasanya, kamusnya) yang satu juga samalah perhatiannya. Tidak ada pilih kasih, tidak ada anak emas dan anak tiri.

Pilih kasih pun terjadi di sekolah. Guru, termasuk penulis buku teks, merasa takut memakai teks seperti pada contoh (5) ini pada proses pembelajaran bahasa Indonesia. Alasannya sederhana: bukan contoh teks yang "baik dan benar" dan dapat "mengganggu" pengajaran bahasa baku.

- (5) Oom Bagito **yang** rada cakep. Oom, **saya banyak** punya *persoalan*, nih. **Saya** punya **pacar, namanya** B. **lih, itu anak** cukepnya **bukan main**, deh. Tapi **yang saya pikirkan** **begini**. **Si B itu kadangkadang mesra dan kadang-kadang** cuek. **Di sekolah** emang nyapa, tapi pas **pulang sekolah** cuek lagi. **Doi ini satu kelas** sama **saya**. Gimana nih, Oom? (Surat Kepada Redaksi, *HAI* 1-7 Agustus 1989, 33)

Jika teks seperti itu dikembangkan sebagai bahan ajar di kelas, apa yang lazim terjadi? Teks itu akan disunting, misalnya, menjadi seperti pada (6) ini, baru dapat menjadi bahan ajar di kelas.

- (6) Oom Bagito yang baik, saya mempunyai banyak persoalan, antara lain soal pacar. Pacar saya bernama B. Ia berparas amat tampan. Namun, yang satu ini selalu mengganggu pikiran saya. Si B itu pada suatu saat besar sekali perhatiannya, tetapi pada kesempatan lain sama sekali tidak ada perhatian. Di sekolah memang selalu menyapa, tetapi ketika pulang sekolah tidak lagi ada perhatian. Pacar saya ini satu kelas dengan saya. Bagaimana nasihat Oom?

Ini pendekatan "otoriter" dalam pengajaran bahasa baku, dengan akibat samping: menumbuhkan sikap merendahkan ragam bahasa seperti pada (5), ragam tak baku. Sikap negatif terhadap ragam tak baku itu justru dapat tidak memuluskan usaha membuat orang cinta pada bahasa baku.

Kecintaan itu dapat tumbuh dalam suasana kesetaraan, bebas dari ketakutan dan perlakuan merendahkan. Suasana seperti itulah yang perlu ditumbuhkan pada masa ini sebab, pengembangan ragam "tinggi II tidak dapat tanpa memperikutkan ragam II rendah"; keduanya kait-mengait, saling memerlukan.

Sekolah memang tidak mengajarkan ragam tak baku, tetapi jangan sampai mengharamkan pemanfaatan ragam itu sebagai batu loncatan bagi

pengajaran bahasa baku. Berdasarkan teks seperti (4) siswa, misalnya, dapat diminta memilah mana kata baku (kata yang bercetak tebal pada (4)) dan mana kata tak baku, lalu mencari apa padanan baku dari kata-kata tak baku itu. Pembahasan seperti ini dapat mengantarkan siswa pada pemertajaman pengetahuan tentang bahasa baku. Justru sikap positif memperlakukan ragam tak baku dapat menjadi jembatan yang memuluskan proses penguasaan bahasa baku.

LAPORAN SIDANG

- Hari, tanggal : Kamis, 16 Oktober 2003
- Judul Makalah : 1. Kesetaraan Perlakuan
2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Penerapannya
- Pemakalah : 1. Bambang Kaswanti Purwo
2. Kissumi Dwi Jaya (Pengganti waktu E. Ulrich Kratz)
- Pemandu : Kissumi Dwi Jaya (Merangkap Pembicara)
- Pencatat : 1. Ni Luh Partami (Balai Bahasa Denpasar)
2. Jonner Sianipar (Balai Bahasa Jayapura)

Bambang Kaswanti Purwo

Topik kita adalah KBK untuk SD sampai SMU. Awalnya KBK. Pada tahun 1984 saya membuat kritikan keras dalam bentuk buku terhadap kurikulum yang berlaku saat itu. Karena kritikan itu saya dipanggil membantu sampai sekarang. Ibu Kissumi dipanggil karena sebelum KBK berlaku dia seorang guru yang sudah mempraktekkan KBK.

Saya ingin menjelaskan bahwa kita cenderung diresahkan oleh kurikulum baru. Tahun 1984 ada kurikulum pragmatik. Tahun 1994 ganti lagi, Dema atau apa itu namanya. Sekarang KBK. Kalau melihat itu mungkin meresahkan tetapi sebagai guru kita menyadari kalau melihat dalamnya, apa yang kita ajarkan itu sebenarnya sama saja. Dari tahun 1984 sampai sekarang sebenarnya tidak ada bedanya, sebetulnya sama, hanya yang baru ini untuk mempertajam, memperbaiki dari masa ke masa. Misalnya, kalau kita lihat Kurikulum 1984, tercantum pokok bahasan, di kolom sebelah kanannya sebenarnya sudah KBK, tetapi karena dari dulu kita berpikir ke pokok bahasan padahal sebenarnya sudah KBK. Kurikulum 1994, yang namanya butir pembelajaran sebenarnya KBK juga. Jadi sama, hanya namanya lain.

Kalau kita lihat Kurikulum 1984, ihwal mengenai menyusun pertanyaan, tidak ada. Kita menyuruh siswa kita bertanya, tidak ada yang bertanya. Jadi, kompetensi pertanyaan tidak ada. Di Kurikulum 1994, mulai ada bagaimana cara menyusun pertanyaan. Konsentrasi kita mulai tajam melihat kurikulum ini. Makanya, saya menganjurkan janganlah kita resah dengan adanya nama-nama baru dalam kurikulum. Kita lihatlah esensi karena di situlah sebenarnya dunia kita.

Kalau kita lihat Kurikulum 1984, sebetulnya itu bukan kurikulum, melainkan silabus. Memang itu lebih mudah. Tahun 1994 sudah mulai mendekati kurikulum. KBK sekarang ini maunya pemerintah murni kurikulum yang dibuat secara nasional, tetapi silabusnya nanti lokal, oleh

daerah. KBK dari 2000 sampai 2003 ini ada tiga kali revisi. Kita bertanya-tanya, kapan *sih* mulainya KBK, katanya 2003/2004. Namanya apa? Kita tunggu-tunggu. Jawabannya akan ada karena sekarang masih proses. Pemerintah ingin tanggapan masyarakat atau koreksi. Yang kurang akan direvisi. Perbaiki sesuai dengan kritikan, sekarang hampir selesai. Pemikirannya adalah kita tumbuh bersama membuat kurikulum, bukan lagi pemerintah yang menyodorkan kurikulum. Ini yang saya tangkap dari lingkungan penyusunan kurikulum baru itu. Saya sebenarnya orang swasta jadi tidak mempunyai NIP untuk mengambil kebijakan untuk itu. Idenya adalah bahwa pemerintah ingin mengurangi cengkeramannya terhadap kita dalam mengelola bahasa Indonesia. Buku teks tahun 1994 bisa dipakai untuk KBK karena cara yang dipakai tidak dimasalahkan. *Output*-nya adalah yang dikeluarkan tahun 1984, 1994, atau yang baru nanti. Selanjutnya, silakan bagaimana para guru mau mencapai target itu dan caranya terserah masing-masing. Mata pelajaran yang masuk KBK yang paling menguntungkan adalah bahasa Indonesia karena sudah memiliki KBK sejak 1984. Contoh, tugas mandiri mata pelajaran geografi: Pilihlah salah satu industri di provinsi tempat tinggalmu, kemudian bahaslah lokasinya dengan melihat faktor bahan mentah, tenaga kerja, sumber tenaga, suplai air, fasilitas transportasi, dsb. Berarti kan bahasa Indonesia yang dititipkan pada mata pelajaran lain. Berarti tanggung jawab mengajar bahasa Indonesia tidak semata-mata beban tanggung jawab guru bahasa Indonesia, tetapi dilebarkan ke lintas bidang studi untuk memperbaiki kemampuan berbahasa Indonesia.

Kedua, yang ingin saya sampaikan adalah lama sekali pertikaian sastra dengan bahasa Indonesia. Sastra *kok nggak* ada tempatnya, cuma dimonopoli bahasa. Dalam KBK hendak dibuat tidak ada batas antara bahasa dan sastra. Keduanya sama-sama menggarap, berbicara, mendengarkan, menulis, dan sebagainya. Ada keterampilan berbahasa, ada temanya, dan sebagainya. Jadi, lahannya itu sama tetapi digarap dari dua sisi sehingga tidak menimbulkan "pertikaian" sastra dan bahasa.

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Triadnyani (Bali)

Kepada Pak Bambang, kalau antara bahasa dan sastra tidak ada batasnya, lantas evaluasinya seperti apa? Karena bagi kami di lapangan ihwal evaluasi menjadi permasalahan.

Jawaban: Bambang Kaswanti Purwo

Di dalam KBK dari segi bahasa akan ada, mendengarkan itu KBK-nya apa, menulis apa KBK-nya. Di sastra juga begitu: mendengarkan dan membaca sastra apa KBK-nya. Jadi, masing-masing punya uraian dari yang tadi, lalu ada indikatornya untuk mengetes. Kurikulum kan daftar yang harus diajarkan, yang harus dikuasai. Bagaimana menyampai-kannya terserah pada lokal, daerah atau sekolah-sekolah itu.

2. **Pertanyaan:** Muhammad Hasri (SMU Negeri 5 Makassar)

Kami tahun kedua (mungkin maksudnya: sudah 2 tahun) menggunakan KBK. Salah satu keterampilan yang sudah kami miliki adalah kesiapan untuk melakukan perubahan-perubahan karena sudah tiga kali perubahan, tiga kali kami bikin silabus. Belum selesai silabus yang satu datang lagi perubahan yang terakhir tersebut, dan kami siap melakukan hal tersebut. Saya sudah mengamati kompetensi dasar dan standar kompetensi dalam kurikulum itu. Saya melihat, jika itu semua kita aplikasikan masih belum seimbang antara porsi jam yang ada dan yang harus dicapai dalam kurikulum itu. Supaya setiap kompetensi dasar membawa hasil yang ditunjukkan oleh siswa, saya masih keteteran untuk mencapai standar minimal kurikulum tersebut.

- a. Mohon Pak Bambang yang ikut dalam perampingan kompetensi dasar itu supaya dirampingkan lagi.
- b. Beberapa bulan lalu kami bergabung dengan Yus Rusyana, beberapa guru se-Indonesia dan sastrawan menyepakati senarai karya sastra susunan Taufiq Ismail, yang merupakan bacaan wajib yang menjadi salah satu lampiran KBK. Saya melihat bahwa guru pasti keteteran mencapai hal tersebut meskipun hal itu sangat dibutuhkan karena merupakan bahan yang harus ada. Belum lagi titipan *lifeskill* yang diinginkan kurikulum tersebut. Saya melihat beban dalam KBK ini jauh lebih berat jika dibandingkan dengan beban pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Salah satu keputusan Menteri adalah bahwa salah satu model penilaian yang paling cocok untuk KBK itu adalah dengan portofolio. Daerah kami telah mencoba dua hal model pembelajaran portofolio dan penilaian dengan portofolio. Mohon masukan dari Bapak, prosedur, cara dan dibagaimanakan portofolio tersebut. Ada karya siswa yang bagus, ada satu sesi yang bisa mendokumentasikannya, tidak cukup dengan majalah dinding.

Jawaban: Bambang Kaswanti Purwo

- a. Yang namanya *dasar* dalam KD (kompetensi dasar) adalah bahan minimal yang harus dikuasai siswa. Kalaupun nilai lebih, yang dalam KBK ditandai dengan tanda bintang, tidak dicapai, itu pun sudah memadai. Akan tetapi, daftar minimal versi KBK yang terakhir ini adalah minimal bagi persepsi kelompok orang kecil-kecil, seperti saya dan guru yang mengharap ini. Jadi, harus ada interaksi antara pemakai di lapangan dan pengembang di sini. Itu akan sangat membantu tim kami untuk mencoba memperbaiki yang ada di lapangan. Kami tunggu masukan Bapak/Ibu lebih konkret masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

Mengenai lampiran sastra, memang lama saya sudah mengatakan bahwa bahan sastra apa *sih* yang bisa kita pakai. Kami juga lama sekali mendaftar sampai berapa kali mengundang para sastrawan supaya kita daftar yang dibutuhkan di sekolah untuk anak SD sampai SMU itu apa, kami diberi tahu.

Kissumi Dwi Jaya

Lampiran sastra sampai sekarang belum padu. Kami pernah mengadakan pertemuan sastra, memang ada, tetapi setelah dicari di lapangan, kami berpikir jadi mendua. Di satu sisi lampiran itu ideal tetapi ketika dicari di lapangan jangankan di daerah, di Jakarta saja tidak ditemukan. Contohnya, ada buku *Dari Jendela SMP*, Mira W., Gramedia, sekarang tidak ada. Kemudian setelah diputuskan ada buku Mark Twin, Balai pustaka. Setelah diteliti betul, bahasanya minta ampun, sulit sekali dipahami oleh siswa. Sebagai guru saya bicara ini tidak mungkin. Oleh karena itu, lampiran tersebut masih di-*pending* dengan harapan kalau nanti dilaksanakan di daerah, Bapak/Ibu bisa lampirkan sastra di situ sudah dikemukakan bahwa kalau kelas 1 itu bacaan anak-anak Indonesia, bacaan anak-anak asli. Kelas 2 bacaan remaja Indonesia, bacaan remaja terjemahan. Itu, sudahlah, buat persepsi sendiri seperti itu. Cari buku itu di daerah tidak harus sama persis. Kalau itu nanti lampiran tidak ada, tidak harus persis. Toh Bapak/Ibu kalau takut itu evaluasinya, lampiran itu kan tidak pernah ditanya judulnya apa. Tentu ada cuplikannya mau apa. Jadi, tidak ada persoalan untuk sastra itu kalau sampai detik terakhir belum ada lampiran. Bapak, Ibu tetap menyikapi bahwa satu jenjang SLTP membaca sembilan buku sastra. Judulnya kalau belum ada lampiran silakan Bapak/Ibu buat persepsi berdiri.

- b. Tidak semua yang dalam KBK itu bisa diujikan. Kalau soal NEM-nya berapa itu jadi masalah karena banyak hal yang tidak diujikan, tetapi itu diperlukan untuk masa depan anak kita. Misalnya membaca cepat diberi teks 500.000 kata waktunya cuma 5 menit terus mengerti. Bagaimana mengujinya dalam Ebtanas. Itu takkan diuji, tidak bisa diukur, tetapi apa ini tidak bisa kita ajarkan? Meskipun tidak diuji kecepatannya, dia kan bisa *scanning*, menggarap dengan cepat. Jadi, selain untuk Ebtanas itu akan berguna untuk *lifeskill* tadi.

Kalau kita hanya menguji siswa dengan status ujian itu, kan tidak *fair*. Makanya, perlu kita uji karya sepanjang tahun. Jadi, setiap pekerjaan rumah, dikumpulkan. Jadi dari awal guru mengatakan sekarang memakai ukuran kertas yang sama *you* suruh ngumpulkan setiap pe er dari pertama sampai akhir dibundel; ada daftar isinya, ada halaman dan sebagainya. Itu menjadi bahan evaluasi guru. Ini portofolio. Yang kedua, saya sedang berpikir begini: ada seorang tamu dari Amerika. Dia adalah guru bahasa Inggris. Dia bisa kami pakai untuk apa pun untuk membantu para guru. Jadi, saya mau mengundang para guru Bahasa Inggris SMP/SMU untuk memanfaatkan orang itu.

- 3. **Pertanyaan:** Mislina Tulsakdiyah (Guru SMP Negeri 4 Pancen, Malang)
 - a. Soal lingkaran dalam gambar yang disampaikan Pak Bambang, bisa diartikan oleh guru sebagai jam membaca saja atau menulis saja. Mestinya garis lingkaran itu tidak mati tetapi hanya dibuat titik-titik. Jadi, empat aspek itu bisa disampaikan lewat sastra dan seterusnya dengan tema tertentu.
 - b. Mengenai lampiran sastra, kami dari Jawa Timur mungkin tidak membutuhkan harus ada dari pusat karena dikhawatirkan jelas akan membunuh atau mengebiri kreativitas guru sehingga guru seakan-akan hanya harus itu meskipun ada sekian judul. Saya setuju dengan Ibu. Sudah diputuskan bahwa kelas 1, itu cerita anak, kelas 2 remaja dst.
 - c. Saya lebih senang melihat KBK draft pertama dan kedua, bukan apa-apa, tetapi draf ketiga ada pengikisan sana-sini terutama tentang kebahasaan, akhirnya banyak guru yang selama ini terbiasa diberi petunjuk oleh atasan itu sehingga draf pertama tentang KLK kan hilang di draf kedua dan ketiga. KLK itu bagus. Kami bisa berdampingan dengan guru bidang studi lain untuk omong-omong bagaimana mereka membuat satu laporan. Kami mengerjakan bahasanya dan mereka mengerjakan isinya.

Jawaban: Bambang Kaswanti Purwo

Kami juga lebih suka yang pertama dan kedua, tanpa materi pokok. Masalahnya ini harus dibuat secara keseluruhan dengan mata pelajaran yang lain. Ini hasil pertengkaran lama sebetulnya.

Jawaban: Kissumi Dwi Jaya

Semua catatan untuk materi pokok, itu sangat mengkhawatirkan. Kalau nanti kembali mengajarnya berorientasi pada materi, kami sudah berantem, tetapi sekali lagi, dari pihak tertentu tetap ngotot bahwa ada materi. Padahal, kami ngotot untuk adanya hasil belajar. Dengan hasil belajar, guru tidak akan bertanya lagi sudah ngajar apa? Materi apa yang diberikan? Dalam KBK kan bukan materi apa yang diberikan tetapi membelajarkan siswa sampai tingkat kompeten mana? Bukan materi apa. Jadi, mohon yang di sebelah kanan tadi (dari gambar *slide*) itu disikapi bukan sebagai bahan ajar. (Langsung ditambah komentar Bambang: Itu ada demi kesamaan dengan mata pelajaran yang lain, tetapi untuk bahasa itu sebenarnya tidak begitu penting, tidak relevan).

Tentang kebahasaan, untuk draf pertama dan kedua ada kebahasaan. Itu membahagiakan guru, ya karena Ibu/Bapak yakin sekali kalau mengajar kebahasaan, tetapi apa hasilnya selama ini dengan mengajar kebahasaan: apakah anak itu bisa juga berekspresi dengan teori kebahasaan yang kita berikan. Bapak Ibu sendiri yang menjawab. Di situ pun kami juga bertengkar. Satu sisi menginginkan ada kebahasaan, memunculkan kebahasaan integrasi; di sisi lain tidak ada kebahasaan. Saya sebagai guru memberi contoh kalau kebahasaan diintegrasikan umpamanya, teks pidato diintegrasikan dengan partikel kebahasaannya. Saya bertanya, kalau tiba-tiba siswa saya teks pidatonya bagus, tetapi tidak ada partikelnya, tolong saya diberi tahu, saya harus menilainya berapa? Yang tadi usul kebahasaan itu harus diintegrasikan: ya sudahlah, guru saja yang mengintegrasikan bukan kurikulum. Dan, itu didukung Pak Bambang. Sampai titik terakhir kebahasaan akhirnya dihilangkan. Kalau sudah dihilangkan, lampirannya juga ikut hilang? Lampirannya hilang berarti strategi pembelajarannya tidak berarti. Bapak/Ibu, kebahasaan itu muncul di kala tulisan siswa berproblem tentang kebahasaan, baru itu didampingi. Jadi, tidak pernah mengajar tiba-tiba kebahasaan, bla..bla..bla. Awalan pe..bla..bla..bla..bla..bla..bla.. Nah, seperti itu maksudnya.

Kemudian, tentang KKK: memang di draf ketiga tidak ada. Kalau Ibu punya pemahaman itu indah, Bapak/Ibu berhubungan dengan teman-teman. Memang itu harusnya sama-sama harus ada sembilan

KLK yang dijiwai semua mata pelajaran maka kompromi dalam satu sekolah. Itu hal bagus.

4. **Pertanyaan:** (Tidak menyebut nama)

Dari pembicaraan tadi ada yang tersurat dan ada pula yang tersirat. Dalam membuat KBK ini berapa lamanya, apakah mingguan, bulanan, apakah tahunan, ataukah harian. Pertanyaan ini saya tutup dengan dua buah pantun:

- Ujung Pandang kota yang lama
Suku-bangsa mengarungi samudra;
Dalam Undang-Undang Dasar 45
Bahasa Indonesia jadi Bahasa Negara.
- Buah langsung dan buah pokat
Manis rasanya dan lemak pula;
Berkembang pesat kehidupan masyarakat
Berkembang pula Bahasa Indonesia.

Jawaban: Kissumi Dwi Jaya

Luar biasa. Kalau guru Bahasa Indonesia pandai berpantun, pandai berpuisi, semua anaknya akan pandai berpantun. Karena kalau kita mengajarkan dengan kompetensi dasar, syarat pertamanya adalah gurunya harus kompeten. Sekarang berapa guru yang bisa menulis? Tanya pada diri sendiri.

Kalau ditanya waktu untuk KBK itu berapa, kami harus berpikirnya kumulatif, tidak bisa dihitung karena kalau pertemuan di Puskur, misalnya tiga hari. Contohnya, di dalam buku KBK siswa di SMP mempunyai kewajiban membaca buku pengetahuan populer atau buku penemuan. Itu atas dasar mencari tahu kepada anak-anak yang mempelajari hukum Archimedes, penemu bola lampu. Saya tanya, tahu penemu bola lampu? Tahu. Tahu bagaimana proses menemukan bola lampu? Dia melakukan percobaan sampai 2.500 kali percobaan, tahu tidak tentang itu? Tidak tahu. Dan saya tanya guru fisiknya, tahu tidak tentang itu. Tidak tahu. Kalau begitu anaknya saja suruh membaca, masuk dalam bahasa Indonesia agar etos kerja mereka muncul. Kita tahu anak kita adalah semua anak instan. Pak Bambang yang tidak setuju anak-anak membaca buku etika. Saya bayangkan anak-anak kami di sekolah sudah membaca *Chicken Soup*, tentang salat bagi yang muslim. Jadi, guru itu tidak usah menasihati, begitu maksud saya, tetapi menurut Pak Bambang, itu tidak usah. Itu terlalu berat.

Jadi, yang disetujui Pak Bambang dan tim, buku penemuan, biografi ada landasannya. Mengapa muncul buku biografi di SLTP? Anak-anak diminta untuk membaca buku biografi agar kita tidak usah memberi tahu kamu itu harus jadi begini, jadi begitu. Eksperimen saya di sekolah, siapa yang sudah membaca buku biografi saya suruh bercerita. Dia bercerita sangat menarik. Kemudian apa yang kamu dapat dari membaca buku biografi itu. Dia bercerita, bla..bla..bla..bla. Kebetulan dia perempuan. Dia membaca biografi Maria Carey (?). Dia mengatakan, saya ingin menjadi perempuan seperti Maria Carey. Apanya yang kamu ingin, seperti Maria Carey (Madame Curi). Saya kejar terus. Akhirnya, anak yang lain minta, Bu saya ingin membaca biografi.

Nah, apakah membuat KBK harian, bulanan? Itu tidak bisa.

Jawaban: Bambang Kaswanti Purwo

Idealnya, di Indonesia ini untuk pengembangan kurikulum harus ada riset lapangan, tetapi belum pernah ada. Jadi, dasarnya adalah, saya banyak membaca buku dipertemukan dengan Ibu Kissumi yang banyak di lapangan, tetapi bukan hasil penelitian. Ini kelemahan kita bersama. Kita tidak ada *action research* dari tiap-tiap guru, hidup, hasilnya ada, kita kuasai bersama. Itu paling berharga untuk memperbaiki kurikulum masa depan. Jadi, tanggapannya sekarang sebagai guru yang belum jadi yang masih harus kita bentuk lagi nanti.

Kalau kita bicara soal *policy* pemerintah, hal itu tidak ada finalnya. Ini adalah kurikulum yang tumbuh sehingga dapat diubah. Jangan sampai tidak boleh masuk lagi yang baru, tidak boleh berubah gara-gara kita labeli sudah final. Jadi, kalau 2003 sudah final, di 2004 bisa lagi diperbaiki. Jika tidak ada perbaikan, bila perlu berteriaklah dari bawah, ini perlu perbaikan, begitu.

5. **Pertanyaan:** Erni (Universitas Islam Riau, Pekanbaru)

Kesan saya KBK ini hanya ganti baju sedangkan isinya itu-itu juga; mungkin pengetahuan saya yang kurang tentang KBK, tetapi apa pun itu namanya, kami di UI Riau tolong disosialisasikan apa itu KBK karena khususnya di FKIP yang akan mendidik guru-guru yang akan mengajar di SMP, SMU yang akan menerapkan KBK itu. Kalau tidak bagaimana kami menerapkannya?

Jawaban: Kissumi Dwi Jaya

Sosialisasi paling mudah adalah Ibu dapat mengakses lewat internet. Itu perkembangan kurikulum terus-menerus ada dari draf 1.

Itu paling mudah dan sederhana. Kalau kegiatan sosialisasi sendiri kami berdua dengan Pak Bambang ini. Kalau dipanggil untuk sosialisasi ke provinsi mana, sepanjang kami kosong, itu kami penuhi.

Jawaban: Bambang Kaswanti Purwo

Yang ganti baju tadi, bukan ganti sebenarnya, yang diberi baju juga ikut tumbuh, tadinya agak banyak jerawat, misalnya. Jadi, ada semacam pertumbuhan secara terus-menerus.

6. **Pertanyaan:** Faturrofiqh (Guru SLTP Al-Hikmah Full Day, Surabaya)

Ketika mendengar paparan dari Pak Bambang dan Ibu, KBK itu seperti memberi satu harapan besar bagi sistem kurikulum dan pengajaran kita. Namun, perlu kita catat selama ini satu yang tidak kita miliki dalam pengajaran bahasa, kadang-kadang seperti tidak mempunyai visi. Saya pernah mendengar Dr. Dede Oetomo mengatakan bahwa mengajar bahasa itu ingin menjadikan seorang anak SD dan menengah itu ahli bahasa atau pandai berbahasa. Jadi, anak itu belajar bahasa atau mempelajari bahasa. Itu tentu *term* yang sangat berbeda antara mempelajari dan belajar bahasa. Dalam KBK sudah jelas bahwa siswa SD sampai siswa SMU adalah belajar bahasa. Biarlah mempelajari bahasa itu urusan perguruan tinggi yang diasah metodologinya untuk mengkaji bahasa. Sementara itu, anak SD sampai anak SMU dibekali agar mahir, terampil, cerdas, logis, dan punya intuisi yang tajam dengan bahasanya.

Jawaban: Bambang Kaswanti Purwo

Yang dibaca dalam KBK tadi bisa kami lihat bahwa belajar tentang bahasa tidak ada lagi. Mulai tahun 1994 sudah tidak ada lagi, mulai menipislah. Mengenai kebahasaan mau dibuang tadi karena memang untuk menghindari tadi itu. Memang intinya adalah bagaimana membekali siswa itu untuk menjadi fasih dalam berbahasa. Jadi belajar berbahasa itu yang sekarang ini sedang kita galakkan. Kalau sekarang ini belum tajam yang kita katakan tadi di situ, mari kita bersama-sama, jangan sampai masalah kurikulum diserahkan kepada orang-orang di pusat yang dianggap ahli, yang dianggap tahu segala-galanya. Itu tidak benar sebetulnya. Yang benar suara dari bawah itu, tetapi selama ini tidak pernah dibawa ke atas. Pemerintah sekarang ini sudah membuka tangan, mari kita manfaatkan bersama. Tahun 1984 saya dipakai Depdiknas karena saya tukang kritik. Sekarang silakan saya dikritik. Saya senang justru itulah yang diperlukan supaya kita mencapai yang paling baik, paling pas untuk kita bersama.

7. **Pertanyaan:** Frans Sidarta (Penerbit Erlangga)

Saya, penulis buku bahasa Indonesia yang ikut membuat pusing kita dan Bapak/Ibu guru-guru karena (1) yang tiga itu (kurikulum 1984, 1994, dan 2004 atau KBK). Buku saya oleh penerbit disuruh revisi lagi. Saya pusing. Oke, saya revisi. Saya ganti judul, tetapi isi mungkin sama. Dengan KBK ini, kita patut berbangga karena para ilmuwan itu ikut masuk bersama praktisi, bekerja sama membentuk satu kurikulum bukan lagi segelintir orang yang mempunyai *gawe* dan lain-lain itu. Sekarang ini saya lihat yang terlibat itu banyak. (2) Saya ingin memberi tahu, kepusingan yang lain nanti adalah munculnya di penerbit. Penerbit menginginkan satu yang pasti. Nah, Pak Bambang dan Ibu harus berhati-hati, orang tua akan ikut pusing untuk membayar buku. Bagaimana kalau kita hentikan, sampai 2004 ini jalankan dulu. Pak Bambang dan Ibu coba meneliti lagi tahun 2000 berapa, bikin lagi. Kalau dicetak terus tiap hari, saya senang, buku saya laku terus. Saya punya kesempatan membuat yang baru lagi. Saya melihat permasalahan muncul pada SDM-nya, guru. Kalau Pak Bambang mau kurikulum berhasil, intervensi orang yang buat soal, jangan mengeluarkan tata bahasa pada soal. Persoalannya adalah yang menyusun soal, lain, Pak Bambang yang membuat kurikulum, lain. Jadi, banyak yang membuat pusing. Saya hanya bertanggung jawab menulis, tetapi saya diminta membuat macam-macam hal.

Jawaban: Kissumi Dwi Jaya

Kalau Bapak pusing tentang buku yang berpedoman pada kurikulum yang belum jadi, itu kan mau pusing sendiri karena penerbitnya pada mau pusing. Pada draf 1 guru belum mencari buku, tetapi sudah disodori buku yang memakai draf 1. Begitu draf 2, penulisnya, penerbitnya pusing. Padahal, guru tenang-tenang saja. Buktinya, itu Bapak yang punya pilot proyek menggunakan KBK tidak pusing cari buku. Cuma karena di pasaran itu, penulisnya dan penerbit sudah bikin pusing, jadi pusing semuanya. Yang kedua, dalam KBK kita tidak harus mengikuti langkah-langkah apa yang ada dalam buku. Ini yang harus kita ubah sebagai guru. Selama ini guru itu lebih pusing kalau tidak ada buku dibandingkan dengan kurikulum. Ini yang harus diubah. Seharusnya guru mencermati dulu kurikulum, tahu persis tentang kurikulum, mau menggunakan buku apa saja. Jadi, supaya kita tidak pusing, silakan Bapak/Ibu mencermati dulu kurikulum. Bukunya, kalau mau berpusing-pusing silakan saja, tetapi jangan berteriak pusing. Jadi, seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, kita mengajar boleh memakai buku apa saja termasuk buku yang

lama asal guru bisa menyikapi kurikulum dan membelajarkan siswa dengan cerdas.

Tanggapan: Frans Sidarta (Penerbit Erlangga)

Saya anjurkan agar Pak Bambang berhenti membuat kurikulum dulu. Riset dulu supaya kami praktisi pengguna ini tidak pusing. Buat riset dulu lalu keluarkan hasil riset itu ke masyarakat.

Jawaban: Bambang Kaswanti Purwo

Begini, kalau tahun 1975, kita tenang-tenang saja karena ada buku paket. Akan tetapi, sebetulnya buku paket itu sudah terlambat. Kurikulum jadi, guru belajar buku paket. Kalau kurikulum keluar buku paket juga keluar, itu pasti tidak akan sama, isinya masih dulu. Itu memang hakikat orang menulis buku atau kamus, begitu keluar sudah terlambat. Dan perlu kita sadari tidak ada satu buku pun yang paling baik di dunia ini untuk kelas yang saya hadapi. Saya guru Bahasa Inggris, ada begitu banyak buku Bahasa Inggris juga dari luar negeri. Akan tetapi, saya tidak bisa pakai. Saya harus merombak sendiri untuk kelas saya. Guru yang jadi penentu terakhir, bukan pengembang kurikulum, bukan penulis buku, bukan penerbit, tetapi guru itu sendiri.

**PEMANFAATAN PERMAINAN BAHASA SEBAGAI BAHAN
PENGAJARAN BAHASA DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU
PENGAJARAN ILMU BAHASA DI INDONESIA**

I Dewa Putu Wijana

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Pendahuluan

Keberhasilan sebuah proses belajar-mengajar tidaklah semata-mata ditentukan oleh pengajar yang andal, masukan yang baik, fasilitas pengajaran (gedung, sekolah, alat-alat pengajaran, perpustakaan, laboratorium, dsb.) yang memadai, tetapi pemilihan bahan ajar yang tepat dan berkualitas juga memegang peranan yang cukup dominan. Bahan-bahan ajar yang terseleksi secara baik akan memberikan banyak manfaat, antara lain anak didik akan tertarik dan tumbuh minatnya untuk memahami dan menguasai bahan yang diajarkan; anak didik akan merasakan proses belajar-mengajar atau pengalihan ilmu itu sebagai aktivitas yang menyenangkan, bukannya sebagai kegiatan yang menjemukan yang secara terpaksa harus dijalani oleh mereka. Keter-tarikan dan tumbuhnya minat itu tentu saja akan menjadikan proses pengalihan ilmu itu akan lebih efektif, baik diukur dari waktu, tenaga, maupun dana yang dialokasikan dan nantinya akan dihabiskan.

Tidak tersedianya bahan ajar yang menarik agaknya telah lama dirasakan oleh berbagai kalangan, tidak terkecuali juga oleh para pengajar bahasa dan ilmu bahasa di dalam berbagai strata pendidikan. Dengan tidak mengingkari telah mulai diupayakannya bahan pelajaran yang diambilkan dari penggunaan bahasa yang konkret, dalam peng-ajaran ilmu bahasa khususnya, masih sangat banyak ditemukan pe-manfaatan bahan ajar yang bersifat abstrak yang bersumber dari buku-buku teks yang menggunakan pendekatan formal, seperti halnya Samsuri (1978), Ramlan (1987a), Ramlan (1987b), Verhaar (1996), dan Moeliono dkk. (1988). Selain itu, sering pula para pengajar menggunakan bahan ajar yang secara spontan didapatkan dari pembangkitan intuisiya sebagai penutur asli bahasa yang diajarkannya. Walaupun dilihat dari beberapa aspek, data intuitif yang abstrak ini menunjukkan keunggul-annya sehubungan dengan mudahnya dikreasikan setiap kali dibutuh-an, materi pengajaran seperti ini dalam kuantitas yang cukup banyak akan terasa kering dan cenderung membosankan karena tidak ter-bayangkan konteks pemakaiannya bagaimanapun piawainya para pengajar mengusahakan konteks itu. Selain itu, pengajaran bahasa dengan bahan seperti itu cenderung hanya mampu memberi bekal

pengetahuan yang bersifat kognitif bagi para pembelajar. Aspek afektif dan psikomotoriknya sangat sulit diharapkan. Bila keadaan ini terus-menerus berlangsung, tanpa ada niatan dari pihak yang berkompeten untuk mengubahnya dengan usaha mencari alternatif pendekatan lain yang lebih menjanjikan, dikhawatirkan mutu pengajaran bahasa di Indonesia sulit diharapkan peningkatannya. Sehubungan dengan itu, melalui makalah ini akan diusulkan sebuah alternatif pemanfaatan satu jenis teks (wacana) sebagai bahan pengajaran yang selama ini luput dari perhatian para pakar dan praktisi pengajaran bahasa di Indonesia. Teks yang dimaksud adalah teks permainan bahasa dengan berbagai *genre*-nya, seperti wacana yang ditemui dalam grafiti (tulisan di tembok), kartun, stiker, kaos oblong, peribahasa jenaka, dan teka-teki.

Sekurang-kurangnya ada tiga alasan yang mendasari mengapa teks permainan bahasa direkomendasikan menjadi salah satu alternatif bahan ajar pengajaran bahasa dalam makalah ini. Alasan pertama adalah permainan bahasa sudah sangat akrab dikenal oleh setiap pemakai bahasa. Crystal (1998) mengemukakan bahwa permainan bahasa sudah diperkenalkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya sejak usia yang sangat dini. Interaksi orang tua dengan permainan bahasa, bahkan lebih dahulu diperkenalkan sebelum anak-anak memperoleh aspek penguasaan yang lebih serius, seperti pengetahuan kognitif, larangan, dan peringatan. Bentuk komunikasi dengan ucapan yang dibuat-buat (vokalisasi) yang disertai dengan tingkah laku nonverbal yang khas ini telah diberikan beberapa saat saja setelah seorang anak-anak dilahirkan. Dengan piranti pemerolehan bahasa bawaannya, ternyata anak-anak kemudian mampu membedakan antara komunikasi yang serius dan main-main dalam waktu yang relatif singkat sehingga permainan bahasa itu sendiri tidak mengganggu anak-anak dalam menguasai kosa kata dan elemen gramatika bahasa secara natural (periksa juga Wijana, 2003: 16). Kegemaran akan permainan bahasa ini agaknya merupakan refleksi dari hakikat manusia sebagai makhluk bermain (*homo ludens*), yakni suka bermain termasuk dengan bahasa yang menjadi sarana komunikasi verbalnya. Bagaimana argumentasi Crystal (1998: 180) melihat peranan permainan bahasa di dalam meningkatkan kemampuan berbahasa dalam berbagai aspeknya dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Language play will help the development of pronunciation ability through its focus on the properties of sounds and sound contrasts, such as rhyming. Playing with word endings and decoding the syntax of riddles will help the acquisition of grammar. Readiness to play with words and names, to exchange puns and to engage in nonsense talk promote links with semantic development And

language play, by its nature, also contributes greatly to what in recent years has been called metalinguistic awareness.

Alasan kedua, permainan bahasa, seperti yang diisyaratkan oleh namanya, amat kaya akan manipulasi linguistik di dalam berbagai tataran (ortografis, fonologis, gramatika, dan pragmatis) yang bila dicermati merupakan fenomena lingual yang sangat besar manfaatnya untuk menerangkan konsep linguistik di dalam pengajaran ilmu bahasa yang selama ini luput dari perhatian para ahli, seperti Soedjatmiko (1991), Noerhadi (1989), Wijana (1995), dan Pradopo dkk. (1985). Dengan medium permainan bahasa ini, pengajaran aspek kebahasaan akan lebih variatif, dan terasa tidak langsung terkonsentrasi untuk tujuan pemahaman terhadap konsep linguistik itu sehingga kebosanan para pembelajar akan terhindarkan.

Alasan ketiga, aneka substansi yang menjadi topik perbincangan permainan bahasa di dalam berbagai *genre*-nya akan lebih memungkinkan pengajaran bahasa memberikan pengetahuan yang tidak semata-mata bersifat kognitif, tetapi mampu pula menyentuh ranah afektif dan psiko-motorik para pembelajar bahasa yang diwujudkan dengan keterlibatannya dalam bermain dan mengkreasikan wacana permainan bahasa.

Permainan Bahasa

Permainan bahasa adalah bentuk penggunaan bahasa yang tidak semestinya yang di dalamnya mengandung berbagai penyimpangan, seperti penyimpangan fonologis, gramatikal, kekacauan hubungan bentuk dan makna, dan bermacam-macam pelanggaran yang bersifat pragmatis (Wijana, 2003: 7; Apte, 1985) yang dimaksudkan untuk mencapai bermacam-macam tujuan, seperti melucu, mengkritik, menasihati, melarang, dan berbagai tujuan lain yang sering kali tidak mudah diidentifikasi. Permainan bahasa dalam berbagai macam wujudnya dikenal secara luas oleh para pemakai bahasa. Tidak seorang pun, lebih-lebih di abad ke-21 ini, tidak terlibat di dalam permainan bahasa, bagaimanapun kecilnya derajat keterlibatan itu, seperti apa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kutipan berikut ini.

Everyone plays with language or responds to language play. Some take mild pleasure from it; others are totally obsessed by it; but no one can avoid it. Indeed, as we enter the twenty first century, there seems to be more of it about than at any previous period of linguistic history (Crystal, 1998: 1).

Kutipan di atas kiranya juga menyarankan cukup mudah dan berlimpahnya data bila jenis wacana ini digunakan sebagai bahan pengajaran bahasa atau ilmu bahasa sehingga kekhawatiran akan ke-

kurangannya sama sekali tidak beralasan. Dalam bab tiga beserta seksinya berikut akan dipaparkan masalah pemanfaatan permainan bahasa dalam pengajaran ilmu bahasa. Data permainan bahasa yang digunakan dalam makalah ini diambilkan dari berbagai sumber, seperti majalah, surat kabar harian dan mingguan, buku kartun, dan tulisan pada kaos oblong, sesuai dengan yang tercantum di bagian bawah setiap data, kecuali yang karena berbagai hal tidak dapat diketahui sumbernya. Data yang berupa wacana kartun dapat dilihat dalam lampiran.

Pemanfaatan Permainan Bahasa dalam Pengajaran Ilmu Bahasa

Data yang terkumpul dari berbagai sumber menunjukkan bahwa wacana dan teks permainan bahasa mengandung manipulasi linguistik di dalam berbagai tataran kebahasaan, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang banyak di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menjelaskan konsep ilmu bahasa di dalam disiplin tersebut, di samping kelucuan dan substansinya diharapkan dapat menarik minat pembelajar, mengurangi kejenuhan, dan mengubah suasana kelas pengajaran ilmu bahasa yang selama ini terkesan cenderung membosankan.

a. Pemanfaatan Permainan Bahasa dalam Pengajaran Fonologi

Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang disebut *fon* tidak memiliki makna, tetapi memiliki potensi atau kapasitas untuk membedakan makna. Bunyi yang memiliki kapasitas membedakan makna disebut *fonem*, sedangkan yang tidak disebut *alofon*. Dalam pengajaran fonologi selama ini, penyajian status fonem dilakukan dengan mengontraskan bunyi yang memiliki kemiripan secara fonetis yang dicurigai potensial membedakan makna (Samsuri, 1978). Pengontrasan itu dilakukan secara abstrak di luar konteks pemakaiannya dengan menggunakan pasangan minimal. Misalnya, kapasitas pembeda makna bunyi [p] dan [b], [e] dan [j], [k] dan [g] dikontraskan dengan pasangan minimal *pagi* dan *bagi*; *cari* dan *jari*; dan *kali* dan *gali*. Penggunaan metode yang terus-menerus sama tanpa adanya usaha untuk memperbaharui atau menyelengi dengan cara yang lebih inovatif akan membawa kejenuhan bagi para pembelajar, bahkan tidak mustahil mereka akan merasakan ilmu (pengetahuan) yang didapat sebagai sesuatu yang tidak berguna. Bila hal yang terakhir ini terjadi, niat untuk mendalaminya tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam situasi seperti ini teks humor dapat dimanfaatkan. Pengajar-pengajar yang mau sedikit mengeluarkan usaha, misalnya dapat mengubah situasi ini dengan memanfaatkan wacana kartun (1) berikut ini untuk menerangkan perbedaan bunyi [u] dan [a]:

- (1) + Dul, sebelah rumahku janda kembang.
 - Jangan kau buat jadi janda kembang, lho!

Jika fenomena bahasa Inggris yang hendak diajarkan, permainan bahasa yang disebut dengan malapropisme (*malapropism*) (2) dan (3) berikut dapat digunakan untuk mengajarkan kontras bunyi [t] dan [sh] serta [a] dan [i].

- (2) *There you stand in your ivory shower.*
 (3) *Survival for the fattest.*

Identifikasi fonem tidak hanya dilakukan dengan pasangan minimal yang melibatkan satu bunyi yang berbeda, tetapi dapat pula dengan pasangan yang mirip yang melibatkan dua bunyi yang berbeda. Misalnya untuk membedakan kontras [l] dan [r] tidak hanya pasangan *tari* dan *tali* yang digunakan, tetapi dapat pula dengan pasangan mirip *dari* dan *kali* atau pasangan *kali* dan *cali*. Akan tetapi, untuk mencari situasi yang konkret pemakaian pasangan mirip ini tidaklah mudah. Melalui pengamatan yang saksama, teks permainan bahasa menyediakan data pemakaian yang cukup berlimpah untuk menerangkan pencarian fonem dengan pasangan yang mirip ini. Untuk jelasnya perhatikan wacana kartun yang melukiskan dialog polisi dan pria (4) di bawah ini. Yang dikontraskan adalah [g] dan [j] serta [d] dan wacana (5) yang berkonteks kasus duel sesama anggota DPR yang sangat memalukan, serta peribahasa jenaka (5a) yang bersubstansi masalah ketidakmampuan seksual:

- (4) + Apa benar kau menyimpan ganja di rumah ini?
 - Wah ... ini salah informasi!! Yang saya simpan janda, Pak, bukan ganja.

(*Humor*, No. 213, Februari 1989)

- (5) Gus Dur mengaku tidak pernah ada dial dengan Tommy Soeharto.
 - Kalau dialog?

Berkait kasus "duel" sesama anggota DPR, Fraksi PDIP minta maaf.

- Ini baru dial.

(*Kedaulatan Rakyat*, 2 Desember 2001)

- (5a) Bagai menegakkan barang basah.

(*Humor*, No. 04, 1990)

Bila teks (1) dan (2), dan (3), (4) dan (5) dapat menerangkan peranan fonem yang bersifat asosiatif (paradigmatik), teks humor (6) berikut sangat baik digunakan untuk menerangkan peranan fonem yang bersifat sintagmatik (Culler 1977, 10-13).

- (6) + Lagi tanam kedelai, Pak.
- Bukan kedelai tolol, aku sedang mengubur keledaiku yang mati.

Fenomena salah ucap (*slip of the tongue*) yang terjadi, baik secara natural maupun yang disengajakan, juga dapat digunakan untuk menerangkan peranan bunyi yang bersifat sintagmatik ini. Dalam bahasa Inggris untuk tujuan ini dapat dimanfaatkan frase atau kalimat *tips of the slongue* yang disimpangkan dari *slips of the tongue* dan *You have hissed all my mistery lesson* yang disimpangkan dari *You have missed my history lesson*, serta *You have tasted the whole worm* yang disimpangkan dari *You havewasted the whole term*. Dalam bahasa Indonesia, salah ucap *E ... ketemu gali* (seharusnya lagi) atau penyiar itu mengirimkan gula-gula, eh ... lagu-lagu dapat dimanfaatkan untuk tujuan serupa.

Di dalam mengajarkan ilmu bahasa pada tahap awal, perbedaan bunyi dan huruf yang secara berturut-turut merupakan objek primer (yang lebih penting dan menentukan) dan objek sekunder (yang kurang penting, dan tidak menentukan) linguistik tidaklah mudah diajarkan sehingga sering kali sampai tahap yang lebih lanjut pengetahuan dasar ini tidak dikuasai oleh para mahasiswa. Teks permainan bahasa (7) dan (8) yang berkonteks pemberantasan buta huruf dan pelayanan medis berikut (lihat lampiran) dapat digunakan untuk menerangkan bahwa bunyi bersifat fonologis, sedangkan huruf bersifat visual.

(7) DAERAH BEBAS BUTA AKSARA

(Minggu Pagi, 22, November 1992)

(8) Dokter, Suster, Ambulance

(Nova, 26 Juli 1992)

(9) KTT GNB, ARAB, KOREA

(Minggu Pagi, 13 September 1990)

Pengetahuan lain yang harus ditanamkan kepada setiap calon ahli bahasa adalah kekhasan struktur dan sistem yang dimiliki oleh setiap bahasa. Seperti yang dikemukakan oleh Whorf (1956) bahwa *Each language together with its individual sounds, words, and syntax reflects a separate social reality which is different from that which is reflected in another*. Dalam kaitannya dengan pengajaran kekhasan sistem fonologi sebuah bahasa, atau bahkan sebuah dialek, permainan bahasa yang berlimpah ditemukan dalam humor etnik (*ethnic joke*) dapat dimanfaatkan. Di dalam tataran fonologi etnik ini pada umumnya memanfaatkan gangguan wicara (*speech impedement*) yang dialami oleh etnik tertentu di dalam berkomunikasi dengan bahasa yang bukan bahasa ibunya. Misalnya, orang Bali tidak mampu mengucapkan bunyi [t] secara

dental atau alveolar karena dalam bahasa Bali hanya dikenal [th] yang palatal. Orang Cina tidak mampu mengucapkan [r], tetapi dapat mengucapkan [l]. Sebaliknya, orang Jepang tidak mampu mengucapkan [t], tetapi fasih melafalkan [r]. Orang Jawa, walaupun fasih membedakan [t] dan [th] serta [d] dan [dh], karena kekhasan sistem klusternya seringkali tidak mampu mengucapkan nama tempat yang dimulai dengan konsonan hambat bersuara, seperti *Bali*, *Bandung*, *Bogor*, dsb. Mereka akan mengucapkan tempat ini menjadi *mBali*, *Mbandung*, dan *mBogor*. Pengenalan bermacam-macam humor etnik ini diharapkan akan menyadarkan pembelajar akan kekhasan sistematika bahasa sehingga dapat menghapus sikap etnosentris yang berlebih-lebihan. Dengan demikian, sikap etnik tidak merasa bahwa bahasanya lebih lengkap dan lebih baik dari bahasa etnik lain, dan pada akhirnya solidaritas antar-etnik dapat ditumbuhkan. Selama ini agaknya belum pernah terlintas di dalam pikiran para pengajar ilmu bahasa untuk memanfaatkan humor etnik yang tersebar luas dalam iklan, sinetron, ketoprak humor, dan opera sabun sebagai bahan pengajaran ilmu bahasa.

b. Pemanfaatan Permainan Bahasa dalam Pengajaran Morfologi

Jika yang dibicarakan dalam fonologi adalah seluk-beluk bunyi bahasa yang menjadi kajian morfologi adalah seluk-beluk morfem, baik morfem bebas maupun terikat, dan peranan morfem itu dalam membentuk kata polimorfemik beserta proses pembentukannya. Salah satu masalah yang cukup penting di dalam morfologi adalah masalah yang berhubungan dengan identifikasi kata majemuk. Kata majemuk sering sulit dibedakan dengan kelompok kata (frasa). Bentuk kebahasaan *kamar kecil*, tanpa konteks yang jelas dapat diidentifikasi sebagai frasa 'kamar yang berukuran kecil' atau kata majemuk 'jamban, tempat buang air'. Dalam kalimat (10) *kamar kecil* adalah frase karena berparafrase dengan (12), sedangkan *kamar kecil* dalam (11) adalah kata majemuk karena tidak mungkin berparafrase (*) dengan (13).

- (10) Ayah membuat kamar kecil untuk tempat Dimas belajar.
- (11) Setiap kamar di hotel berbintang itu ada kamar kecil sehingga para tamu tidak harus keluar kamar bila hendak buang air.
- (12) Ayah membuat kamar yang berukuran kecil untuk tempat Dimas belajar.
- (13) *Setiap kamar di hotel berbintang itu ada kamar yang berukuran kecil sehingga para tamu tidak harus keluar kamar bila hendak buang air.

Para pembelajar tentu akan lebih tertarik minatnya dan lebih dalam pemahamannya mengenai kata majemuk *kamar mandi* itu jika pengajar

aktif melibatkannya dalam meresolusi kejenakaan wacana kartun (14) dan (15) berikut:

(14) Kamar kecil wanita.

(*Pesona Quiz*, No. 19)

(15) Kamar kecil.

(*Minggu Pagi*, 1 Maret 1992)

Sementara itu, teks humor (16) dan (17) digunakan untuk menerangkan kata majemuk idiomatis rumah tangga dan mencuri hati.

(16) + Kau sudah mempunyai rumah tangga.

- Rumah tangga yang bagaimana? Maksud Bapak rumah tangga itu rumah panggung.

(*Ayu Quiz*, No. 34)

(17) + Biar nggak makan, haram bagiku untuk meneuri.

- Jangan munafik. Kau kan yang tempo hari mencuri hati babuku.

(*Pesona Quiz*, No. 19)

Selain kata majemuk, masalah kata ulang (reduplikasi) juga sentral kedudukannya di dalam kajian morfologi bahasa Indonesia. Simatupang (1983) pada bagian awal disertasinya mengemukakan bahwa usaha pemerian bahasa-bahasa Austronesia, khususnya bahasa Indonesia akan terasa kurang lengkap apabila masalah reduplikasi dikesampingkan. Aneka macam makna reduplikasi akan kering, dan besar kemungkinan akan mendatangkan kejemuan bila diterangkan dengan contoh lepas, atau dengan kalimat buatan yang bersifat spontan. Untuk menerangkan makna perulangan yang menyatakan 'keserupaan', seperti *perangperangan* dan *mobil-mobilan*, para pengajar bahasa atau ilmu bahasa dapat menggunakan teks dialog dan murid (18) berikut ini.

(18) Guru: Tahun berapa terjadinya perang dunia pertama dan kedua?

Murid: Perang dunia pertama dari tahun 1914 sampai tahun 1918, sedang perang dunia kedua dari 1939 sampai tahun 1945.

Guru: Bagus. Sekarang menurut kamu bagaimana caranya agar jangan terjadi lagi perang yang mengerikan itu?

Murid: Gampang, Pak. Yang jadi tentara kan orang-orang dewasa. Nah mulai sekarang jangan menerima orang-orang dewasa untuk jadi tentara. Sebaiknya anak-anak saja yang diterima jadi tentara paling-paling Cuma terjadi perang-perangan.

(*Humor*, No. 217, 1 April 1989)

Di dalam studi morfologi dibahas pula aneka makna gramatikal morfem terikat. Sebuah morfem terikat memungkinkan memiliki berbagai makna gramatikal (alosem). Di dalam menguraikan makna gramatikal afiks *-in* bahasa Indonesia informal contoh wacana (19) yang berkonteks masalah kebobrokan pelayanan calon tenaga kerja sangat baik digunakan.

- (19) + Bu, apa sih fungsinya Departemen Tenaga Kerja?
 - Itu lho, Pak ... Tukang ngerjain orang.
 (IQ, No. 06)

c. Pemanfaatan Permainan Bahasa dalam Pengajaran Sintaksis

Yang menjadi pokok kajian sintaksis adalah seluk-beluk konstruksi lingual yang terbentuk dari penggabungan kata menjadi satuan yang lebih besar, seperti frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Luasnya lingkup kajian sintaksis sebagai konsekuensi beraneka macamnya kemungkinan kombinasi satuan lingual yang menjadi unsurnya mengakibatkan kajian cabang ilmu bahasa ini rumit permasalahannya. Permasalahan yang rumit ini dapat mendatangkan kejemuhan bila tidak ada usaha untuk mengatasinya. Dalam hubungan ini, tersedianya bahan yang menarik juga amat besar peranannya. Sejumlah teks humor agaknya dapat membantu menerangkan sejumlah masalah sintaksis.

Dalam pokok bahasan frasa endosentrik atributif misalnya ada permasalahan status hubungan unsur pusat (*head*) dengan pembatas (*modifier*)-nya. Kedudukan unsur pusat sebagai penguasa konstruksi dan peranan pembatas sebagai pengubah atau pembatas maknanya (Sudaryanto 1983) agaknya dapat diterangkan dengan teks (20), (21), dan (22) di bawah ini:

- (20) + Enak menantumu sopir. Kalau lebaran bisa jalan-jalan naik mobil.
 - Sopir mobil penyedot tinja, kok.
 (Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 116)
- (21) + Kau bilang di sini banjir sampai seleher.
 - Betulkan, seleher ayam.
 (Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 57)
- (22) + Enak jadi kapten kapal, sering ke luar negeri
 - Ke luar negeri apanya. Orang saya kapten kapal keruk.
 (Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 118)

Dalam (20), (21), dan (22) terlihat perubahan makna penguasa konstruksi sopir mobil yang mengasosiasikan kemewahan, seleher yang mengasosiasikan kegentingan, dan kapal yang mengasosiasikan kemewahan secara tiba-

tiba hilang, diubah atau dibatasi maknanya dengan kehadiran atribut penyedot tinja, ayam, dan keruk. Berubahnya asosiasi yang secara tiba-tiba dapat menimbulkan kelucuan karena menurut Wilson (1979: 10) "*Amusement is evoked by descending incongruity when the mind is unaware transferred from great things to small.*"

Pada tataran klausa, teks humor (23) dapat dimanfaatkan untuk menerangkan peranan elemen pembatas komplementatif terhadap verbanya yang berfungsi sebagai penguasa konstruksi. Dalam teks ini, makna kata *berdiri* yang berasosiasi dengan hal-hal yang berbau seksual berubah secara tiba-tiba menjadi hal yang berhubungan dengan ketakutan karena kehadiran elemen pembatas bulu romaku.

- (23) + Memang rumah tua itu ada hantunya.
 - Gimana kau tahu?
 + Malam-malam aku tidur sendiri di kamar depan.
 - Apa yang kau lihat?
 + Tiba-tiba pintu terbuka, masuk seorang wanita.
 - Nenek-nenek
 + Seorang wanita muda cantik jelita tanpa busana.
 - Ha .. ? Lalu apa yang terjadi?
 + Hii .. Tentu aja sambil tidur anu ... anuku berdiri.
 - Apamu yang berdiri?
 - Ya, bulu kudukku yang berdiri ... orang ketakutan setengah mati.

(Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 106)

Pada pembahasan mengenai kalimat majemuk atau kalimat kompleks para pengajar ilmu bahasa akan disibukkan dengan uraian mengenai fungsi konjungsi antarklausa dan aneka jenis pertalian semantis yang dinyatakannya. Dalam hubungan ini, sejumlah wacana permainan bahasa yang memanfaatkan pertalian antarklausa sangat bermanfaat digunakan sebagai selingan setelah para pembelajar bersusah payah memahami hubungan pertentangan, syarat, dan sebagainya. Teks (24), (25), dan (26) merupakan sebagian kecil contohnya:

- (24) + Bagaimana tampangku, macam koboi?
 - Ya, tapi naiknya kuda nil.
 (Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 123)
- (25) + Apa kapal selam ini masih bisa dipakai untuk menyelam?
 - Masih, tapi nggak bisa nimbul lagi.
 (Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 118)
- (26) + Kau mau kufoto telanjang buat kalender?
 - Mau aja, asal ada surat perintah dari yang berwajib.
 (Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 126)

Teks (24) dan (25) untuk menerangkan hubungan pertentangan, sedangkan teks (26) untuk menjelaskan hubungan syarat.

d. Pemanfaatan Permainan Bahasa dalam Pengajaran Semantik

Nelson (1990: 125) mengemukakan bahwa permainan bahasa sebagian besar atau mungkin secara keseluruhan bergantung pada permainan ketaksaan (*ambiguity*) yang dikreasikan dan dikombinasikan sedemikian rupa lewat berbagai bentuk manipulasi linguistik di dalam berbagai tatarannya, seperti apa yang terimplikasi dalam kutipan berikut.

Verbal humour generally depends on ambiguity: on the use of word, phrase, and sentence, or longer unit which can be understood in two different, usually conflicting ways. This in turns relates to the tendency, inherent in language, for different phonetic and semantic chains to cross one another. We have all encountered the type of utterance which, in all innocence, is suddenly to carry a second possible meaning which clashes with the first.

Pernyataan ini menyarankan bahwa aspek semantik merupakan sumber yang penting, atau bahkan yang paling penting di dalam permainan bahasa. Dengan demikian, semantik adalah cabang ilmu bahasa yang paling dominan dapat memanfaatkan permainan bahasa di dalam proses pengajarannya. Ambiguitas dalam berbagai tipenya, seperti homofoni, homografi, metafora, dan frasa amfibologi dapat dijelaskan secara lebih menarik dengan contoh wacana permainan bahasa berturut-turut berikut:

(27) Dilarang membajak kaset ini. Membajak sawah malah dianjurkan pemerintah.

(Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 44)

(28) + Jual air zam-zam ya, Bang?

- Di sini kan toko buku! Adanya Cuma air brush dan air mail, he, he, he

(Humor, No. 214, 1 April 1990)

(29) + OO .. Jadi ini Tanah Abang. Ya?

- Nyindir, ya? Abang ini melarat. Mana bisa punya tanah seluas ini.

(Humor, No. 213, 1 Februari 1989)

(30) + Bapak mau kawin lagi? Lha, berdiri tegak aja nggak bisa.

- Siapa bilang? Mau tahu buktinya?

(Humor, No. 213, 1 Februari 1989)

Tidak terbatas pada hubungan semantik homofoni, homografi, frasa amfibologi, dan metafora, teks permainan bahasa juga dapat dimanfaatkan untuk menerangkan hubungan-hubungan semantik yang lain, seperti sinonimi, antonimi, hiponimi, dan eufemisme. Perhatikan contoh (31) s.d. (33) berikut ini.

(31) + Apa Saudara tidak melihat ada larangan berhenti di tempat ini?

- Saya bukan berhenti kok. Cuma parkir.

+ Lho, apa bedanya berhenti dan parkir?

- Jauh! Berhenti itu gratis. Kalok parkir itu kan bayar.

(*Humor*, No. 241, 1 April 1990)

(32) + Kau mau mencari pekerjaan pak?

- Tidak pak, saya mau mencari penghasilan.

(*Dari Angka Sampai Zodiac*, hlm. 22)

(33) + Waduh .. Dompetku dicuri orang dibus, bu!

- Aku nggak tanya dompet. Aku minta uang.

(*Dari Angka Sampai Zodiac*, hlm. 8)

Wacana (31) kejenakaannya bersumber pada sinonimi, wacana (32) bersumber pada antonimi, dan Wacana (33a) bersumber pada eufemisme. Contoh wacana *kaos oblong* berikut misalnya sangat baik digunakan untuk menerangkan polisemi kata *no* dalam bahasa Inggris yang dapat bermakna 'tidak', 'jangan', 'tidak punya', 'tidak ada', dsb.

(33a) No aids, no sex, no kiss, no bed, no problem, no money, no way, no woman, no cry, no smoking, no time, no man, no ectasy, no comment, lah.

e. Pemanfaatan Permainan Bahasa dalam Pengajaran Pragmatik

Soedjatmiko dalam makalahnya yang berjudul "Aspek Sosiokultural dalam Humor" mengemukakan bahwa penyimpangan penggunaan bahasa dalam humor dapat ditinjau dari dua aspek, yakni aspek semantis dan aspek pragmatis. Lebih jauh dikatakan bahwa dari aspek pragmatis permainan bahasa menyimpangkan implikatur pertuturan. Di dalam pertuturan yang wajar menurut Grice (1975: 45) setiap peserta pertuturan diharuskan mematuhi prinsip kerja sama (*cooperative principle*) yang terjabar ke dalam berbagai maksim (*bidal*)-nya. Maksim itu adalah maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim of quality*), maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan maksim cara (*maxim of manner*). Secara berturut-turut maksim-maksim itu menghendaki penutur berbicara secara ringkas (tidak berlebih-lebihan). Perkataannya didasari bukti yang memadai; relevan dengan konteks pembicaraan; dan runtut, jelas (tidak kabur), serta tidak berbelit-belit. Berbagai kejanggalan akan terjadi bila prinsip ini dilanggar.

Dalam hal pelanggaran prinsip ini, pengajar ilmu bahasa dapat memberi contoh wacana permainan bahasa. Misalnya, wacana (34) dapat dimanfaatkan untuk menerangkan penyimpangan maksim kuantitas, (35) penyimpangan maksim kualitas, wacana (36) penyimpangan maksim relevansi, dan (37) penyimpangan maksim cara.

- (34) + Siapa nama istri Mas Koki?
- Mbak Yu
- (35) + Ini sate ayam atau kambing?
- Ayam berkepala kambing.
- (36) + Gamsut kok lima jari diacungin semua.
- Maju satu-satu belum tentu menang ... Lebih baik main kroyok.
- (37) Sengsara Membawa Nikmat
Lokalisasi
Nikmat Membawa Sengsara

Dalam (34) terdapat fenomena pemberian informasi yang tidak memadai; dalam (35) terdapat tuturan yang tidak didasari dengan fakta yang memadai; dalam (36) terdapat kontribusi yang tidak relevan dengan konteks pembicaraan; dan dalam (36) terdapat eksploitasi ketidakruntutan tuturan.

Kewajaran sebuah pertuturan tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap retorika tekstual (Leech 1983), tetapi ditentukan juga oleh prinsip yang bersifat interpersonal. Dalam hal yang terakhir ini, setiap peserta pertuturan secara pragmatis juga harus mempertimbangkan prinsip kesopanan (*politeness principles*) yang terjabar ke dalam 6 buah maksimnya, yakni maksim kebijaksanaan (*tact maxim*), maksim kemurahan (*generosity maxim*), maksim penerimaan (*approbation maxim*), maksim kerendahan hati (*modesty maxim*), maksim kecocokan (*agreement maxim*), dan maksim kesimpatian (*simpathy maxim*). Secara keseluruhan pada dasarnya maksim itu mengharuskan penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan keuntungan, rasa hormat, kecocokan, dan kesimpatian kepada orang lain. Bila prinsip ini dilanggar akan terjadi berbagai kejanggalan. Dalam hal pelanggaran itulah wacana permainan bahasa dapat memberikan contoh yang berlimpah-limpah kepada pengajar ilmu bahasa. Dengan demikian, para mahasiswa atau pembelajar bahasa akan semakin memahami segala sesuatu yang menjadi persyaratan dasar bagi terwujudnya pertuturan yang natural atau konvensional. Wacana (38) s.d. (43) berikut secara berturut-turut merupakan contoh pelanggaran maksim kesopanan tersebut di atas yang lazimnya jarang sekali ditemui dalam tuturan yang wajar.

- (38) + Dokter saya mau periksa jantung.
- Boleh ... tapi sebelum periksa jantung .. kantongmu saya periksa dulu.

(Kitty Quiz, No. 11)

- (39) + Pak, saya datang mau melamar anak bapak.
 - Boleh-boleh, anak gadisku ada lima, Tuti, Nika, Tina, Sari, Dewi. Mana kau pilih?
 + Mana saja Pak, kelima-limanya saya juga mau.
 - Kau ini cari istri, apa dagang wanita?
(Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 109)
- '(40) + Aku sudah pernah keliling dunia?
 - Huh! Modelmu aja ... paling juga pusing tujuh keliling kamu lakukan.
(Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 30)
- (41) + Bung, apa bisa betulin rantai sepeda.
 - Jangankan rantai sepeda, rantai tank pun aku bisa.
(Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 117)
- (42) + Air beriak tanda tak dalam.
 - Belum tentu, Moh. Ali banyak omong tapi menangan. Ada yang suka pidato tahunya melempem.
(Dari Angka Sampai Zodiac, hlm. 40)
- (43) + Anda sukses! Anak Anda kembar lima yang tiga meninggal.
(Humor, No. 213, 1 Februari 1989)

Dalam wacana (38) dan (39) terdapat fenomena usaha untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dalam (40) dan (41) terdapat gejala tidak menaruh hormat kepada orang lain, dan menonjolkan kemampuan diri sendiri. Dalam (42) dan (43) terlihat usaha memaksimalkan ketidaksetujuan dan rasa tidak bersimpati. Dalam tuturan yang wajar justru akan terjadi cara bertutur yang sebaliknya.

f. Pemanfaatan Permainan Bahasa dalam Sociolinguistik

Jika pragmatik berhubungan dengan studi bagaimana satuan kebahasaan dikomunikasikan, sociolinguistik berkaitan dengan bagaimana satuan kebahasaan berhubungan secara korelasional atau implikasional dengan faktor sosial dan situasional penuturannya. Dalam sociolinguistik, eksistensi satuan kebahasaan dipercayai sepenuhnya dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor kemasyarakatan, seperti identitas penutur (laki-laki, perempuan, kaya miskin), keformalan penuturan (resmi, setengah resmi, santai, dst.), tujuan penuturan (memberi informasi, berkelakar, membujuk, menghasut, dst.), dan bidang pemakaian (perbengkelan, komputer, masak-memasak, dst.).

Sehubungan dengan kerangka teoretis ini, wacana permainan bahasa yang penuturannya pada dasarnya ditujukan untuk bercanda di samping untuk tujuan yang lainnya, seperti mengkritik, menyindir, dan memberi pendidikan lazimnya juga dikomunikasikan dengan ragam bahasa tertentu,

yakni ragam bahasa informal (santai) walaupun tidak menutup kemungkinan pula dikomunikasikan dengan ragam bahasa yang lain. Di dalam masyarakat yang diglosik, seperti Indonesia, kecenderungan ini tampak jelas sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Apte (1985: 190) dalam kutipan berikut:

In societies with diglossia, speakers are not only aware of the 'high' and 'low' varieties of language but are also likely to use only the low variety for humor. The low variety may be used in caption for political cartoon, in radio soap opera, and in conversation with friends, family, and colleagues for the development of humor.

Dengan kenyataan ini, wacana permainan bahasa merupakan contoh yang baik untuk menerangkan variasi bahasa informal beserta berbagai macam cirinya. Berikut ini akan dicontohkan wacana permainan bahasa yang syarat akan ciri bahasa informal.

- (44) + Lho, kenapa kau ca? Keluar dari kamar bini kok pringas-pringis. Eh tu pinggang sama dada kenapa dipegangin terus? Habis perang ya sama binimu?
- Kagak .. Be. Biasa pinggang sama dada kumat lagi duh rasanya sakit buanget.
- + Ah ... babe kira habis berantem sama binimu. Kalau Cuma sakit pinggang sama dada, nih Babe punya obatnya. Nah, Bagaimana rasanya pinggang sama dadamu sekarang?
- Wah, benar-benar mujarab dan cespleng Be. Koyo cabe memang jempolan. Permissi Be! Maknya si oyo manggil saya tuh.

(*Humor*, No. 263, 1 Februari 1984)

Ciri bahasa informal pada (44) terlihat dalam penggunaan interjeksi (*lho, ah, eh, nah, dan wah*), pemakaian kata-kata bahasa Jawa dan dialek Jakarta (*babe, pringas-pringis, bini, buanget, dsb.*), pemakaian elemen gramatika dan struktur nonbaku (*pegangin* dan *tu pinggang*), pemakaian bentuk ringkas (*Ca, be, dan nih*), dsb. Lebih dari itu, ciri ragam informal ternyata merupakan sumber kejenakaan wacana permainan bahasa itu. Untuk ini, perhatikan wacana (45), (46), dan (47) yang kelucuannya secara berturut-turut mengandalkan elipsis atau penanggalan kata *istri, majalah, dan roti*. Seperti diketahui elipsis sebagai salah satu sumber ketaksaan yang potensial menimbulkan kejenakaan merupakan satu dari sekian banyak ciri penting ragam bahasa informal.

- (45) + Aku ingin punya istri yang baik hati, pintar, dan juga cantik.
- Kamu serakah ingin punya istri tiga sekaligus.

(*Humor*, No. 213 1989)

- (46) + Ah yang bener masak ada gadis cantik, mulus, baru kau tawarkan. Harga berapa juta?
 - Dasar hidung belang! Yang saya tawarkan ini Majalah Gadis.
(Humor, No. 217 1989)
- (47) + Kau mau makan clurit, ya?
 - Apa yang kau maksud roti cap clurit?
(Jelita Quiz, NO.1 0)

Penutup

Dari apa yang terurai di atas, secara jelas dapat dibuktikan bahwa wacana permainan bahasa yang dalam perwujudannya dapat dibedakan ke dalam berbagai *genre*, seperti kartun, teks humor, peribahasa jenaka, dan wacana kaos oblong mengandung berbagai "manipulasi" linguistik di dalam seluruh tataran kebahasaan sebagai sumber kejenakaannya. Elemen linguistik yang memanfaatkan beserta berbagai teknik pemanfaatannya, bila dicermati, ternyata merupakan fenomena pemakaian bahasa yang sangat besar gunanya sebagai bahan pengajaran berbagai konsep ilmu bahasa dalam berbagai cabang kajiannya (fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik) yang sejauh ini kurang mendapatkan perhatian dari para pengajar ilmu bahasa di dalam menjalankan profesinya.

Data yang dapat disediakan oleh wacana permainan bahasa jauh lebih tinggi kualitasnya daripada data abstrak yang diperoleh secara spontan di depan kelas, di samping persoalan yang menjadi pembincangannya juga lebih dapat dihayati oleh para pembelajar ilmu bahasa. Dari sudut pandang ini dapat disimpulkan penggunaan wacana permainan bahasa sebagai bahan pengajaran bahasa, selain akan menjadikan ilmu bahasa lebih menarik, juga akan lebih dapat menjamin peningkatan mutu pengajaran ilmu bahasa dibandingkan dengan berbagai jenis bahan ajar abstrak yang selama ini biasa digunakan. Dalam pada itu, perlu kiranya dikemukakan di sini bahwa bahan ajar hanyalah materi. Keberhasilan penyajian atau penyampaiannya sangat ditentukan oleh kemampuan para pengajarnya. Oleh karena itu, peranan tenaga pengajar yang andal tentu saja tidak dapat dikesampingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apte, Mahadev L. 1985. *Humor and Laughter*. Ithaca: Cornell University Press.
- Crystal, David. 1998. *Language Play*. London: Penguin Books.
- Grice, H.P. 1975. "Logic and Conversation". *Syntax and Semantics*. 3. Speech Act. New York: Academic Press.
- Leech, G.N. 1983. *Principles of Pragmatics*. New York: Longman.
- Moeliono, A.M. dkk. 1988. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nelson, T.G.A. 1990. *Comedy: The Theory of Comedy in Literature, Drama, and Cinema*. Oxford: Oxford University Press.
- Noerhadi, Toety H.eraty. 1989. "Kartun dan karikatur sebagai Wahana Kritik Sosial". *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial*. XVI. No.2. pp. 129-155.
- Pradopo, Sri widati, Siti Sundari Maharto, dan Faruk. 1985. *Humor dalam Sastra Jawa Modern*. Yogyakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Ramlan, M. 1987a. *Morfologi*. Yogyakarta: UB Karyono.
- 1987b. *Sintaksis*. Yogyakarta: UB Karyono.
- Samsuri. 1978. *Analisa Bahasa*. Jakarta: Airlangga.
- Simatupang, M.D.S. 1979. *Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soedjatmiko, Wuri. 1991. "Aspek Linguistik dan Sosiokultural dalam Humor." Kertas Kerja Pertemuan Linguistik Atma Jaya. Jakarta
- Sudaryanto. 1983. *Predikat-Objek dalam Bahasa Indonesia: Keselarasan Pola Urutan*. Jakarta: Djambatan.
- Verhaar, JWM. 1996. *Asas-asas Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Whorf, B.L. 1956. *Language, Thought, and Reality*. J.B. Carroll (Ed.) Cambridge: Mass. MIT Press.
- Wijana, I Dewa Putu. 1995. *Wacana Kartun dalam Bahasa Indonesia*. Disertasi Doktor. Pogram Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- 2003. "Wacana Dagadu, Permainan Bahasa, dan Ilmu Bahasa." *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wilson, Christopher P. 1979. *Jokes: Form, Content, Use, and Function*. London: Academic Press.

"KETOPRAK KOMEDI" DI TVRI JAWA TENGAH
(Upaya Media Elektronika di Daerah dalam Memelihara Bahasa dan
Budaya Daerah)

Gunoto Saparie

Pendahuluan

Perkembangan teknologi mutakhir dalam bidang komunikasi telah mengantarkan umat manusia pada zaman baru. Dalam 100 tahun terakhir, berbagai bentuk komunikasi modern telah bermunculan. Bentuk komunikasi modern ini, yang kebanyakan lebih berbentuk visual, mempengaruhi sistem sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Salah satu bentuk komunikasi moden ini adalah televisi.

Setelah lebih 100 tahun perkembangannya yang pesat, televisi memungkinkan jutaan orang menyaksikan satu peristiwa secara bersamaan. Di Indonesia, dengan adanya SKSD Palapa dan dukungan sarana *hardware* (perangkat keras) lainnya yang memadai dan semakin canggih, siaran televisi telah mampu menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak hanya menjangkau masyarakat kota saja, tetapi juga telah merambah masyarakat pedesaan. Kehadirannya pun semakin dirasakan penting bagi masyarakat.

Dengan sifatnya yang audio-visual, televisi memiliki banyak kelebihan dibandingkan media massa lainnya (radio ataupun media cetak). Dengan jaringan televisi yang luas, berbagai peristiwa tentu akan lebih memuaskan jika diliput dan disiarkan melalui tayangan televisi ketimbang media massa lainnya. Siaran berita dan hiburan akan lebih "jelas" disebarkan lewat televisi. Dengan sarana perangkat keras yang memadai, aktualitas informasi juga akan lebih baik ketimbang lewat media lain. Karena itu, televisi sebagai media massa sangatlah tepat untuk menyampaikan informasi dan hiburan melalui acara-acara dalam program slarannya.

Salah satu program acara itu adalah "Ketoprak Komedi" melalui siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jawa Tengah setiap Selasa, pukul 19.00 - 20.00 WIB. Acara yang menampilkan kesenian tradisional Jawa ini diharapkan dapat lebih efektif untuk menyampaikan hiburan dan informasi kepada masyarakat pemirsanya, yaitu masyarakat Jawa Tengah yang sebagian besar berlatar budaya Jawa. Dilihat dari sifat tayangan acara tersebut yang sederhana, dengan unsur banyolan (lawak, dagelan, humor) yang menonjol dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa, maka diperkirakan acara itu cukup memiliki daya tarik bagi pemirsanya. Sebagai salah satu media elektronika, TVRI Jawa

Tengah memang memiliki peran penting bagi upaya pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan budaya daerah, dalam hal ini Jawa. Komitmen yang sangat tinggi dari TVRI Jawa Tengah untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa dan budaya Jawa itulah yang menjadi faktor penentu tetap eksisnya acara bermuatan lokal.

"Ketoprak Komedi" di TVRI Jawa Tengah

Ketoprak adalah salah satu jenis kesenian tradisional Jawa. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *ketoprak* adalah sandiwara tradisional Jawa, biasanya memainkan cerita lama dengan iringan musik gamelan, disertai tari-tarian dan tembang. *Komedi* adalah sandiwara ringan yang penuh dengan kelucuan, meskipun kadang-kadang bersifat menyindir dan berakhir dengan bahagia. *Komedi* juga disebut *drama ria*.

Sebagai kesenian tradisional, "Ketoprak Komedi" di TVRI Jawa Tengah, yang banyak diwarnai humor dan senda gurau, dapat dikatakan merupakan pengembangan baru dari ketoprak konvensional yang biasanya terlalu serius. Unsur dalam "Ketoprak Komedi" adalah cerita, lawak (dagelan), pesan, tari, dan irama. Cerita bersumber dari babad dan tradisi lisan yang pernah atau masih hidup. Tetapi ceritanya dikaitkan dengan masalah yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan jalan ceritanya sederhana, tidak rumit. Iramanya dari alat musik gamelan atau gending, sebagai musik pengiring. Dalam praktiknya, seringkali sanggar pengisi acara "Ketoprak Komedi" memperkaya dengan tembang-tembang sebagai selingan.

Mengenai jumlah pemain atau pelaku dalam "Ketoprak Komedi" ini sangat bergantung pada dari tuntutan cerita. Biasanya berkisar antara 10 sampai 15 orang pemain.

Acara "Ketoprak Komedi" ini diselenggarakan dengan tujuan untuk melestarikan dan membina kebudayaan daerah, khususnya bahasa dan budaya Jawa. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi yang diemban TVRI Jawa Tengah, yaitu sebagai alat pelestari dan pembina kebudayaan. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui kesenian tradisional dan sekaligus memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Di samping itu, acara ini juga untuk memberikan kesempatan kepada sanggar seni tradisional yang berbobot dan berprestasi untuk tampil di layar TVRI Jawa Tengah sehingga lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah.

Dalam acara "Ketoprak Komedi" ini, jenis pesan yang disampaikan meliputi hampir semua aspek atau bidang kehidupan, misalnya menyangkut masalah kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, pendidikan,

kewanitaan, transmigrasi, dan keluarga berencana. Cara penyampaian pesannya disisipkan pada cerita yang berhubungan dengan masalah sehari-hari dan dibumbui dengan hal-hal lucu serta banyak humornya. Selain itu, sebagai selingan, pesannya disampaikan dengan disisipkan melalui syair-syair tembang yang dinyanyikan.

Dekorasi untuk acara "Ketoprak Komedi" disesuaikan dengan tema cerita, diusahakan secara sederhana, bersih, dan dekat dengan kenyataan sehari-hari masyarakat kecil. Dekorasi ini dibuat atau ditentukan oleh TVRI Jawa Tengah--dengan kesepakatan pengisi acara--petugas dekorasi televisi tersebut melihat langsung *gladi resik* atau latihan lengkap yang terakhir dari sanggar calon pengisi acara "Ketoprak Komedi". Dengan demikian, bentuk, warna, dan lokasi dekorasi dapat disesuaikan dengan tema cerita, warna busana, kostum, aksesoris, dan sebagainya, sedangkan busana pemain pada umumnya adalah dengan *ragam* "kejawen" (Jawa).

Seperti dikemukakan di atas, musik pengiring pada acara "Ketoprak Komedi" adalah irama gending Jawa yang berasal dari paduan bunyi gamelan dan dimainkan oleh kelompok karawitan. Kadang pengisi acara menyediakan atau membawa kelompok karawitan yang meliputi pemain musik dan alat musiknya (seperangkat gamelan), tetapi sering terjadi hanya berupa kaset yang berisi rekaman musik gending Jawa.

Gending tersebut biasanya digunakan sebagai iringan pembuka, yaitu ketika para pemain memasuki arena pentas juga dipergunakan ketika pergantian adegan ataupun babak serta mengiringi tari-tarian yang biasanya bersifat dinamis. Gending-gending tersebut pun sering dipergunakan sebagai iringan penutup, yaitu ketika para pemain turun pentas atau sa at cerita selesai dan layar televisi ditutup untuk diganti dengan acara lainnya.

Dalam acara "Ketoprak Komedi" ini bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Jawa, baik *ngoko*, *krama madya* maupun *krama inggil*, tetapi kadang dipakai bahasa Jawa dialek Banyumasan. Meskipun kadang muncul bahasa Indonesia yang sederhana dan umum dipakai sehari-hari di Jawa Tengah, khususnya di pedesaan, kadang ada semacam diglosia, yaitu situasi kebahasaan yang di dalamnya terdapat dua bahasa.

Kehadiran acara "Ketoprak Komedi" di TVRI Jawa Tengah harus diakui dapat mengundang kesegaran, mengusir ketegangan dan kejenuhan atau kebosanan. Karena adanya humor atau senda gurau, pemirsa sejenak bisa terhibur seakan terlepas dari rutinitas sehari-hari.

Tentu saja ada bermacam-macam cara untuk menciptakan humor atau kelucuan dalam "Ketoprak Komedi" ini. Ada yang dengan gerak, kostum, bunyi-bunyi dan musik, mimik, suara, gambaran situasi yang tidak cocok, *make up* (rias), dan cerita yang dibawakan.

Penciptaan humor dengan gerak, yaitu menciptakan gerak yang aneh-aneh yang menyimpang dari kebiasaan, misalnya berjalan manusia seperti ular dan kucing. Penciptaan humor dengan pakaian, yaitu memakai kostum yang aneh, tidak sama dengan pakaian yang biasa dipakai, misalnya baju surjan dan peci. Penciptaan humor dengan bunyi-bunyi, yaitu memunculkan bunyi tiba-tiba, musik yang iramanya khusus, bunyi yang langka, misalnya jika ada hantu suara musik yang mengiringi berbeda dengan musik biasa.

Pelawak Barat konon lebih senang menciptakan humor dengan mimik daripada kata-kata karena mimik lebih universal dan mudah diterima oleh penonton di seluruh dunia daripada dengan kata-kata. Tetapi, di Indonesia mimik dan gerak dalam lawak hanya membantu sedikit sekali karena pertunjukan kebanyakan diselingi gerakan di atas panggung dan tata lampu masih belum sempurna.

Cara penciptaan humor yang paling mudah adalah dengan suara karena yang tergerak indra pendengar. Orang akan tertawa jika mendengar suara yang lucu, misalnya bersuara seperti burung, menirukan suara binatang, bersuara seperti orang tua dan suara laki-laki diucapkan wanita, dan pidato orang terkenal. Termasuk penciptaan humor dengan suara ialah mengucapkan bahasa Indonesia dengan lafal bahasa Mandarin (Cina).

Cara penciptaan humor dengan penyimpangan konvensi budaya, yaitu lukisan situasi yang tidak cocok seperti "*Pitike dha KB kabeh*" (Ayamnya Ikut KB Semua). Bukankah yang biasa ikut keluarga berencana (KB) itu manusia? Jika ayam dikatakan ikut KB, hal itu merupakan penyimpangan konvensi budaya.

Kelucuan juga dapat dicipta dengan *make up*, yaitu menghias wajah dan kepala. Wajah, misalnya, dihias sedemikian rupa sehingga tidak dikenal aslinya, misalnya memakai kumis palsu, rambut palsu, dan wajah laki-laki dihias wanita.

Yang paling menarik adalah penciptaan humor dengan kata-kata. Penciptaan humor dengan kata-kata pada dasarnya adalah penyimpangan, baik penyimpangan makna, bentuk, maupun konvensi budaya. Kata-kata yang maknanya disimpangkan akan mengakibatkan konteks kalimat menjadi terasa aneh dan pemirsa pun tertawa karena adanya suatu hal yang tidak biasa.

Upaya TVRI Jawa Tengah dalam Pemeliharaan Budaya dan Bahasa Jawa

Media massa, termasuk media elektronika, memiliki peran penting bagi upaya pemeliharaan dan pengembangan budaya dan bahasa daerah. Sebagai media informasi dan komunikasi, TVRI Jawa Tengah tidak pernah lepas dari fungsi itu.

Terlepas dari kekurangan TVRI sebagai media massa pemerintah, ternyata dari sejak berdirinya sampai saat ini TVRI menunjukkan perkembangan, baik dari segi *software* (perangkat lunak) maupun *hardware* (perangkat keras), yang memang harus banyak membeli teknologi dari negeri lain.

Sebagai produk teknologi maju, televisi berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri yang telah banyak menyentuh kepentingan umat manusia. Karena adanya televisi, banyak terjadi perubahan di masyarakat. Dengan sifatnya yang audio visual, televisi mengakibatkan pesan yang dibawanya memiliki daya rangsang cukup tinggi.

Dengan melihat kemampuan dan keampuhan televisi ini, Pemerintah menempatkan TVRI sebagai media pemerintah. Tujuannya adalah agar TVRI dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan sehat bagi manusia Indonesia. TVRI Jawa Tengah, yang sebelumnya merupakan Stasiun Produksi Keliling (SPK) Semarang bersama SPK Pontianak, SPK Bandung, SPK Malang, SPK Banjarmasin, SPK Ambon, SPK Kupang, SPK, Jayapura, SPK Padang, dan SPK Banda Aceh, tentulah tidak terlepas dari hal itu.

Salah satu langkah Pemerintah dalam pengelolaan TVRI adalah agar materi untuk siaran televisi digali dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini dapat dilihat dari komposisi siaran TVRI, yaitu 20 persen dari luar negeri dan sisanya (80 persen) merupakan produksi TVRI sendiri.

Bidang perangkat keras, antara lain meliputi studio dan peralatannya, kamera, OB VAN, pemancar, stasiun *link* dan *microwave link*. TVRI memiliki sarana cukup lengkap dan canggih serta dapat diandalkan kemampuannya untuk menghasilkan siaran yang berbobot. Itu semua merupakan modal yang sangat penting untuk mengantisipasi keinginan pemirsa yang semakin kritis. Jadi, sekarang kemajuan TVRI sangat bergantung pada sarana perangkat lunak yang mendukungnya, termasuk kemampuan dan kreativitas para pengelola TVRI untuk menghasilkan siaran yang berbobot. Kreativitas tersebut tentu saja adalah kreativitas yang dilandasi akan fungsi TVRI sebagai media massa pemerintah yang menjalankan kebijaksanaan yang informatif, edukatif, dan persuasif.

Salah satu fungsi TVRI, selain sebagai alat informasi, pembentuk opini publik, pendidikan, hiburan, juga sebagai pelestari dan pembina kebudayaan. Kita tahu bahwa unsur budaya nasional bagi suatu negara yang telah memiliki kedaulatan penuh merupakan faktor penting dalam mendukung kedaulatan tersebut, di samping mendukung faktor politik, ekonomi, dan sosial.

TVRI sebagai media audio visual memang terpanggil untuk selalu mengembangkan daya cipta kreasi kebudayaan nasional tanpa menolak kebudayaan asing, yang telah menjadi milik internasional, tetapi harus

dengan kepribadian bangsa Indonesia. TVRI juga perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat guna ikut mengembangkan kecerdasan dan pendapatan dan guna memperoleh tingkat hidup yang lebih tinggi dan sehat. Selain itu, TVRI perlu menanamkan pengertian mental spiritual kepada masyarakat dalam melestarikan serta meningkatkan kehidupan yang bersumber pada Ketuhanan.

Salah satu upaya pelestarian bahasa dan budaya daerah, dalam hal ini Jawa, TVRI Jawa Tengah melakukannya dengan tayangan "Ketoprak Komedi". Tetapi sebagai media elektronika yang memiliki pemirsa di Jawa Tengah, yang masih akrab dengan budaya Jawa, mau tidak mau tayangan itu memang harus melayani keinginan pasarnya. Namun, dalam melayani keinginan pasar, sanggar-sanggar seni pengisi acara "Ketoprak Komedi" diharapkan tidak larut dalam arus komersial dan mengabaikan unsur estetika dan nilai-nilai tradisi. Para seniman boleh *ngeli ning aja nganti keli* (menghanyutkan diri, tetapi jangan sampai hanyut). Keraton (Yogyakarta dan Surakarta) memang menjadi pusat dan sumber budaya *adiluhung* yang harus dilestarikan dan dikembangkan, tetapi para seniman ketoprak tetap diberi kesempatan melakukan inovasi dan kreasi seni. Para seniman tertantang untuk menciptakan seni pertunjukan ketoprak sebagai seni yang cukup menghibur. Hal itu menyangkut inovasi dan kreasi dalam gending, adegan *spectacles*, baik tarian, peranan, dekorasi, maupun teknik pencahayaan (lampu).

"Ketoprak Komedi" di TVRI Jawa Tengah ini pada dasarnya merupakan seni pertunjukan audio-visual. Sebagai sebuah karya pertunjukan, proses berkaryanya belum dianggap selesai ketika karya tersebut belum dipergelarkan di depan publik. Televisi merupakan hasil teknologi modern sehingga sifat kesenian yang ditampilkan juga harus mengikuti kredo seni modern yang selalu dituntut menyajikan sifat kebaruan.

Usaha TVRI Jawa Tengah ini memang tidak berarti tanpa risiko. Ada yang menuding TVRI Jawa Tengah dengan "Ketoprak Komedi"-nya merusak nilai-nilai *adiluhung* seni tradisional Jawa. Kritik itu muncul terutama dari kalangan generasi tua yang belum sepenuhnya memahami konsep pembaruan para seniman muda.

Memang ketoprak pada dasarnya adalah tayangan seni tradisional yang sangat kuat berorientasi pada pakem. Dengan demikian, kredo berkesenian di televisi harus merupakan perpaduan dua pendekatan, yaitu antara seni modern dan seni tradisional. Oleh karena itu, upaya kompromi untuk memadukan yang modern dan yang tradisional harus terus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan sebagai seni pertunjukan. Dalam kompromi ini, bukan tidak mungkin ada yang terpaksa harus dikorbankan.

Sebagai salah satu produk industri, TVRI dituntut menampilkan keseimbangan antara segi bisnis dan idealisme. Karena itulah, para seniman kreatif pengisi acara "Ketoprak Komedi" diharapkan menyeimbangkan antara

kesenian yang komersial dan kesenian yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi. Diharapkan, meskipun hukum pasar diberlakukan, produk kesenian itu jangan sampai mempengaruhi kualitas karya. Hubungan antara pasar dan seniman haruslah saling menguntungkan meskipun untuk melakukannya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Tantangan TVRI Jawa Tengah

Tantangan yang dihadapi TVRI Jawa Tengah dengan "Ketoprak Komedi"-nya sangat besar. Tayangan program televisi yang sangat atraktif, tersedia banyak *channel*, dan bisa diakses sepanjang hari telah menghilangkan minat anak-anak, remaja, dan generasi muda untuk menonton acara "Ketoprak Komedi" serta acara lain bermuatan lokal. Keterasingan anak-anak, remaja, dan orang muda terhadap budaya dan bahasa Jawa makin dipertajam dengan derasnya terpaan informasi dan visual dari internet, *play station*, VCD, kalender bergambar atraktif, serta tabloid dan majalah yang menampilkan foto-foto yang memanjakan syahwat. Kita memang patut cemas sehingga perlu ada upaya keras agar anak-anak, remaja, dan anak muda mau peduli terhadap budaya dan bahasa Jawa. Celaknya, dewasa ini para pasangan muda di kota dan di suburban (pinggiran) dalam mendidik anaknya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa. Hal ini jelas merupakan tantangan tersendiri. Kalau sejak kecil lingkungan keluarga sudah tidak kondusif untuk pengenalan sastra Jawa, sementara lingkungan masyarakatnya juga demikian, maka yang akan terjadi pada generasi mendatang adalah keterasingan terhadap budayanya sendiri.

TVRI Jawa Tengah memang telah menjadi kekuatan tersendiri bagi upaya pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan budaya dan bahasa Jawa. Bukan hanya melalui tayangan "Ketoprak Komedi", melainkan juga acara lain, seperti "Obrolan Simpanglima", "Glithik Campursari", "Lesehan", "Drama Televisi Bahasa Jawa", "Wayang Orang", dan "Wayang Kulit" memiliki muatan Jawa yang sangat kental sesuai dengan kondisi kultural yang melingkupinya. Acara-acara itu paling tidak telah memberikan ruang tersendiri sebagai mediator bagi sosialisasi budaya dan bahasa Jawa dengan masyarakatnya. Salah satu karakterisasi televisi adalah sifat keserempakan atau simultan. Suatu acara pada waktu yang sama dapat dinikmati secara bersamaan oleh ratusan ribu, bahkan jutaan orang, yang tersebar di berbagai tempat. Selain itu, acara kesenian di televisi, seperti halnya tradisi lisan, dapat dinikmati oleh orang yang buta huruf. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap proses penciptaan, yaitu dalam pemilihan kata dan kalimat cenderung sederhana agar mudah dipahami. Materi yang sifatnya kompleks dan berat pun harus diungkapkan secara ringan agar

tidak menimbulkan kebingungan pemirsa.

TVRI yang kini telah berubah menjadi persero dituntut untuk mengelola program acaranya secara lebih profesional. Setiap acara yang disajikan harus mampu menarik pangsa pasar sebanyak mungkin dari berbagai lapisan masyarakat. Pada posisi semacam itu, tidak menutup kemungkinan program bermuatan lokal menjadi tergeser karena setiap program membutuhkan biaya besar, padahal untuk menutup biaya produksi diperlukan sponsor. Program bermuatan lokal tentu saja tidak bisa menjangkau wilayah yang lebih luas karena kendala bahasa. Hal ini sebuah tantangan yang tidak ringan karena luas jangkauan wilayah penyebaran program bermuatan lokal tidak hanya bergantung pada kekuatan pemancar dan kualitas teknologi transmisi.

Televisi, terutama televisi lokal seperti TVRI Jawa Tengah, sangat mungkin memunculkan suatu ruang atau rubrikasi programnya yang tidak lepas dari akar kebudayaan Jawa pada umumnya, baik ditinjau dari segi bahasa, peninggalan, maupun adat istiadat. Tentu saja dalam mengolah program dengan muatan Jawa tidak semata-mata berkulat pada peninggalan masa lampau, tetapi tetap terbuka terhadap pertumbuhan dan perkembangan budaya Jawa itu sendiri.

Bahasa Jawa, sebagai bagian dari ekspresi budaya Jawa, patut dipelihara, apalagi merupakan bahasa yang dipakai oleh penutur yang terbesar jumlahnya di antara bahasa-bahasa Nusantara. Tentu saja hal ini tidak ada kaitannya dengan superioritas atau inferioritas etnik, tetapi lebih didasarkan pada tugas kultural. Kemajemukan kultural bangsa dan suku bangsa adalah kekayaan ciptaan Tuhan. Dalam perspektif itu, pluralitas kultural menjadi penting untuk diakui sebagai kekayaan alamiah yang dianugerahkan Tuhan.

Memang ada tanda-tanda bahwa suatu bahasa sedang bergeser. Bahasa itu kehilangan basis wilayahnya dan jumlah penuturnya yang makin kecil. Bahasa Jawa memang bukan tidak mungkin mengalami hal itu, apalagi bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi, terus mendesak ranah-ranah penggunaan bahasa Jawa.

"Ketoprak Komedi" di TVRI Jawa Tengah memiliki kekuatan menembus ruang dan waktu yang mampu mengatasi kesenjangan berbagai lapisan masyarakat di wilayah itu dalam mengakses kesenian tradisional Jawa yang berkualitas. Kesenian televisi memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan membentuk suatu *genre* yang memperkaya khazanah dunia kesenian pada umumnya.

Meskipun fakta empirik menunjukkan bahwa "Ketoprak Komedi" di TVRI Jawa Tengah telah memberikan sumbangan besar bagi pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan bahasa serta budaya Jawa, perhatian kalangan akademisi dan pengamat sangat minim. Perhatian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan lembaga yang berkompeten dalam hal ini pun sangat kecil, padahal program TVRI Jawa Tengah yang bermuatan lokal seperti "Ketoprak Komedi" ini menghadapi tantangan besar dengan maraknya program acara televisi yang mampu menyedot perhatian anak-anak, remaja, bahkan orang-orang tua. Kalau kecenderungan demikian dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi ancaman bagi keberadaan program bermuatan lokal. Meskipun lembaga yang berkompeten kurang memberikan bantuan riil kepada TVRI Jawa Tengah, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda dari lembaga siaran itu untuk mengurangi komitmennya dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa dan budaya Jawa.

Problem utama yang dihadapi TVRI Jawa Tengah dan menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan "Ketoprak Komedi" adalah terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Harus diakui bahwa untuk menghasilkan program acara yang menarik dan berkualitas tinggi dibutuhkan dukungan fasilitas, daya, dan dana yang besar pula. TVRI yang kini telah menjadi persero tertantang untuk menggunakan manajemen penyiaran yang profesional, bukan sistem birokrasi seperti yang berlangsung selama ini.

Penutup

Acara "Ketoprak Komedi" di TVRI Jawa Tengah memiliki karakteristik dasar kesenian tradisional, yaitu tujuan tertentu. Bentuknya sandiwara komedi dengan unsur tari, pesan yang disampaikan melalui cerita, dialog memakai bahasa Jawa (baik *ngoko*, *krama madya*, dan *krama inggil*), musik pengiring dari alat musik gamelan (karawitan), dan jalan cerita dari babad sangat sederhana, mudah dipahami, tidak rumit.

"Ketoprak Komedi" termasuk jenis kesenian rakyat tradisional. Meskipun dalam bentuk baru, ia dapat dikatakan merupakan gabungan atau kombinasi media massa modern dengan media massa tradisional untuk penyebaran informasi dan hiburan kepada masyarakat. Selain terdapat media massa modern yang meliputi media elektronika (radio, televisi, dan film) dan media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, pamflet, dan sebagainya), terdapat pula jenis media massa yang disebut sebagai media massa tradisional, antara lain pertunjukan rakyat tradisional, juru dongeng keliling, dan juru pantun.

Jika dilihat dari struktur pertunjukan yang sangat sederhana dari kesenian tradisional yang disiarkan dalam acara "Ketoprak Komedi" TVRI Jawa Tengah tersebut, cerita babad yang dikaitkan dengan masalah sehari-hari banyak mengandalkan humor (banyol, lawakan). Jenis kesenian ini agaknya memiliki derajat kemampuan memuat informasi dan hiburan yang cukup tinggi.

"Ketoprak Komedi" di TVRI Jawa Tengah boleh dikatakan telah menjadi kekuatan tersendiri bagi upaya pemeliharaan bahasa dan budaya Jawa. Fakta empirik menunjukkan bahwa TVRI Jawa Tengah mampu menyelenggarakan berbagai acara bermuatan lokal seperti "Ketoprak Komedi" dengan tingkat frekuensi dan kontinuitas tinggi.

Di tengah persaingan dengan tayangan program televisi lain yang sangat atraktif, tantangan yang dihadapi TVRI Jawa Tengah sangat berat. Banyaknya *channel* yang lebih menarik dan bisa diakses hampir sepanjang hari, tidak mustahil akan menghilangkan minat anak-anak, remaja, dan generasi muda untuk menonton acara bermuatan lokal. Padahal berbagai program acara televisi dewasa ini cenderung menghadirkan realitas semu, tidak sesuai dengan citra diri bangsa, serta tidak merangsang keinginan anak-anak dan remaja untuk tahu lebih banyak mengenai bahasa dan budaya daerah.

"Ketoprak Komedi" dan acara lain bermuatan lokal di televisi membutuhkan perhatian kita bersama, apalagi dalam era otonomi daerah ini karena keberadaannya terbukti berperan besar bagi pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan budaya Jawa. Dengan adanya perhatian dan kepedulian para pakar, pemerhati bahasa dan budaya, legislatif, dan eksekutif, diharapkan acara bermuatan lokal di televisi tetap bisa eksis. Kita tentu tidak ingin budaya Barat yang cenderung materialistik makin mendominasi masyarakat pendukung bahasa dan budaya Jawa. Kita tentu tidak ingin pula perkembangan bahasa dan budaya Jawa dari satu generasi ke generasi selanjutnya selalu mengalami erosi. Dalam kaitan inilah, televisi lokal seperti TVRI Jawa Tengah tertantang untuk memunculkan suatu ruang atau rubrikasi program yang tidak lepas dari akar kebudayaan Jawa. Tentu saja mengolah program dengan muatan bahasa dan budaya Jawa tidak semata-mata berkutat pada peninggalan masa lampau, tetapi tetap pula terbuka terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dakir. 1983. *Dasar-Dasar Psikologi*. Jakarta: Siliwangi Offset
- Edwards, John. 1985. *Language, Society and Identity*. Oxford: Basis Blackwell
- Effendy, Onong U. 1979. *Komunikasi dan Modernisasi*. Bandung: Alumni
- 1981. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung: Alumni

- Goenoprawiro, Soesanto. 1984. *Lawak Teori dan Praktek Beserta Liku-Likunya*. Yogyakarta: Laporan Proyek Javanologi
- Idris, Suwardi. 1979. *Jurnalistik Televisi*. Jakarta: Departemen Penerangan RI
- Kertopati, Ton. 1968. *Dasar-Dasar Publistik*, Jilid I dan II. Jakarta: Soeroengan
- Kridalaksana, Harimurti. 1992. *Kamus Linguistik* Jakarta: Gramedia.
- Lindsay, Jennifer. 1991. *Klasik Kitsch Kontemporer: Sebuah Studi tentang Seni Pertunjukan Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Susanto, Astrid S. 1980. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Tim Penyusun Kamus. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahyudi, JB. 1986. *Media Komunikasi Massa Televisi*. Bandung: Alumni

LAPORAN SIDANG

- Hari, Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2003
- Judul Makalah : 1. Pemanfaatan Permainan Bahasa Sebagai Bahan Pengajaran Bahasa dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pengajaran Ilmu Bahasa di Indonesia
2. "Ketoprak Komedi" di TVRI Jawa Tengah
- Pemakalah : 1. Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana
2. Gunoto Saparie
- Pemandu : Dr. Abdul Junaidi
- Pencatat : 1. Sri Haryatmo
2. Haniah

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Sri Sayekti (Pusat Bahasa, Jakarta)
Permainan bahasa adalah sesuatu yang menarik. Apakah cara permainan bahasa Indonesia itu dapat berlaku untuk seluruh kelas sosial?

Jawaban:

Permainan kata itu memang mempunyai tingkatan tertentu bergantung pada kelas sosial masing-masing. Substansi itu mengandung tingkatan-tingkatan sesuai dengan kemampuan intelektual penuturnya, misalnya, anak kecil tentu saja berbeda dengan anak remaja, dan orang tua. Hal itu didasarkan pada standar kelayakan (layak dan tidaknya) dan siapa yang diajak bicara atau diajak humor. Ada jenis humor yang hanya dinikmati oleh masyarakat kelas bawah dan yang hanya bisa dinikmati oleh kelas atas.

2. **Pertanyaan:** Sucipta Raharja (*Suara Merdeka*, Semarang)
- Untuk Pak Putu: Yang berkaitan dengan permainan bahasa, ada ungkapan anak kecil yang mengatakan, "Bu, saya minta Pacar?" Menurut penanya, pernyataan anak tersebut dapat dikatakan nakal. Bagaimana menurut pemakalah? Mohon dikomentari.
 - Untuk Pak Gunoto: Penuturan ketoprak dengan bahasa Indonesia merupakan hal yang dianggap merusak. Mohon dipilihkan paparan mana data emik dan mana data epik.

Jawaban:

- a. Belum tentu anak kecil tidak tahu istilah *pacar* dan *acar*. Apakah hal itu termasuk yang dianggap positif atau negatif bergantung pada siapa yang melihat.
- b. Masuknya bahasa Indonesia pada ketoprak humor ini bergantung pada sanggar kesenian yang mengadakan petunjukan ketoprak. Meskipun demikian, secara keseluruhan cerita atau lakon ditampilkan dengan bahasa Jawa. Jadi, secara keseluruhan, bahasa Jawa masih dominan.

3. **Pertanyaan:** Sri Widati (Balai Bahasa Yogyakarta)

Untuk Gunoto: Menurut pengamatan saya, sebenarnya kethoprak komedi tidak jauh berbeda dengan ketoprak yang lain seperti ketoprak lesung dan ketoprak tradisional sebab ceritanya lebih banyak bersumber pada *pakem* (cerita sejarah dan babad). Ketoprak komedi lebih banyak tertuju pada unsur hiburan, sedangkan ketoprak tradisional pada *pakem* ceritanya. Apakah ketoprak komedi itu bisa berlanjut? Jika bisa, cerita yang ditayangkan hendaknya diambil dari cerita di luar *pakem*. Jika diambil lakon cerita *pakem*, ceritanya akan rusak karena tidak sesuai dengan *pakem* yang sudah ada.

Jawaban:

Ketoprak komedi memang tampak menyimpang dari *pakem* disebabkan oleh inovasi. Meskipun demikian, ada upaya dari TVRI agar tidak muncul kritik dan acara yang ditampilkan memiliki nilai jual. Dalam era globalisasi ini, agar TVRI bisa bersaing dengan TV swasta, acaranya harus menarik.

4. **Pertanyaan:** Wahyu Wibawa (Jakarta)

- a. Seperti yang diterangkan bahwa permainan bahasa adalah hal yang menarik. Berkaitan dengan itu, saya usulkan supaya permainan bahasa itu masuk dalam kurikulum pengajaran bahasa atau model ini dimasukkan dalam kursus agar dapat dinikmati oleh masyarakat.
- b. Apa maksud dimasukkannya ketoprak komedi di TVRI. Jika TVRI sudah tidak memiliki kompetensi lagi, sebaiknya TVRI dibubarkan saja.

Jawaban:

- a. Sebenarnya permainan bahasa yang ditawarkan ini tidak masuk pada kurikulum. Permainan bahasa semacam ini cukup diselipkan saja sebagai selingan karena, jika dimasukkan sebagai bahan utama, bisa merusak. Permainan ini bisa dianggap sebagai selingan ketika sedang mengajar di sekolah.

- b. Sebenarnya dimasukkannya ketoprak komedi dalam acara TVRI itu dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan (kesenian) Jawa. Tetapi, ceritanya digarap secara modern dan diberi inovasi baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam hal pembubaran TVRI, hal itu bukan kompetensi saya sebagai pengamat. Sebenarnya peralatan TVRI jauh lebih maju dan lebih canggih dibandingkan dengan TV swasta.
5. **Pertanyaan:** Sumarsono (Bali)
Bagaimana caranya agar guru bahasa Indonesia bisa berhumor dengan enak? Permainan bahasa memang layak masuk dalam kurikulum.
- Jawaban:**
Humor lebih tepat dimasukkan dalam folklor daripada masuk dalam kurikulum. Humor adalah bagian dari folklor.
6. **Pertanyaan:** Juhriah (Pusat Bahasa)
Untuk Pak Putu: Contoh keempat yang ditampilkan tidak hanya sekadar fonologi, tetapi juga pergantian kata, seperti kata *ganja* dan *janda*.
- Jawaban:**
Memang kata *janda* dan *ganja* ini berbeda, tetapi sama-sama fonem. Jadi, perubahan makna itu didukung oleh fonem.
7. **Pertanyaan:** Supriyadi (Universitas Sriwijaya)
- Untuk Pak Putu: Saran bahwa materi (permainan bahasa) ini bisa saja masuk dalam bagian dari kurikulum bahasa.
 - Untuk Pak Gunoto: Bagaimana pertunjukan ketoprak ini bisa berjalan. Bagaimana kaitannya dengan dana serta tanggapan penonton di Jawa Tengah?
- Jawaban:**
- Masuknya materi ini ke kurikulum bukan wewenang saya.
 - Dari mana sumber dana belum bisa diidentifikasi secara jelas. Tetapi, yang jelas banyak para penanggap ketoprak di berbagai daerah. Adapun masuknya bahasa Indonesia ke dalam acara ketoprak disukai oleh penonton di Jawa Tengah.

PENINGKATAN MUTU PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI ITALIA

Faizah Sunoto Rival

Instituto Universatitario Orientale, Napoli, Itali

Pendahuluan

Sepintas lalu antara Italia dan Indonesia terkesan hampir tidak ada hubungan tradisional dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Padahal, sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, sepanjang sejarah dunia lama, kita akan menemukan sederetan nama-nama orang Italia yang dapat dihubungkan dengan dunia Melayu-Indonesia.

Sebelum kita melangkah pada pembicaraan tentang hubungan kerja sama antara Indonesia dan Italia di Era Globalisasi ini, baiklah kita sejenak menelusuri kembali sejarah "dunia lama". Pada zaman eksplorasi dunia lama, tidak sedikit orang Italia yang mengunjungi Nusantara, baik untuk mengadu untung sebagai saudagar maupun dengan tujuan lain yang ada hubungannya dengan bidang ilmiah yang mereka minati masing-masing. Tidak dapat diabaikan pula pelaut, anak kapal dan pengembara yang turut berlayar dalam kapal-kapal Portugis dan Spanyol. Banyak di antara mereka yang meninggalkan nama dan karya yang kemudian menjadi acuan ilmu pada zaman dahulu di Eropa.

a. Sekilas Sejarah Hubungan Indonesia-Italia

Sejak permulaan tarikh Masehi Italia telah mengenal dunia Melayu-Indonesia. Dengan menelusuri kembali sejarah pelayaran dan penemuan dunia baru, ternyata bahwa dunia Melayu-Indonesia sudah lama dikenal di Italia. Tidak sedikit jejak yang kita temukan, baik tentang Italia di Indonesia maupun tentang Melayu-Indonesia di Italia.

Di bawah ini secara singkat, akan kita lihat sederetan nama serta peran mereka dalam hubungan dengan dunia Melayu-Indonesia. Pada permulaan tarikh Masehi sebuah berita tertua telah diberikan oleh Plinio (23-79M) dari kota Como di Italia Utara yang dalam salah satu laporan tertulisnya, menyebut-nyebut tentang sebuah tempat yang bernama Tapobrana. Nama ini sampai sekarang masih dianggap misterius sebab walaupun ada anggapan bahwa tempat itu adalah Sri Lanka, banyak teori yang menganggap bahwa Sumatralah yang dimaksudkannya¹.

¹ Bausani, Alessandro, *L'Indonesia nella Relazioni di Viaggio di Antonio Pigafetta*, IsMEO, Roma 1972.

Sebagaimana kita ketahui, kebanyakan orang Italia yang berlayar ke Nusantara ialah saudagar-saudagar, tetapi tidak kurang pula yang pergi mengembara untuk tujuan eksplorasi atau tujuan ilmiah (seperti bidang geografi, biologi dan botani) dan kemudian sebagai misionaris. Kiranya perlu dicatat bahwa bangsa Italia, berlainan dengan bangsa Eropa lainnya yang telah menjelajahi bumi Nusantara, adalah satu-satunya bangsa yang tidak berurusan dengan masalah penjajahan.

Eksplorasi Italia yang paling termashur, Marco Polo (1254-1324) telah memberikan berita tentang Nusantara yang dicatatnya dalam laporan perjalanan pulangnya dari Cina. Menyusul seorang rohaniawan Frate Odorico Pordenone (1265-1331), lalu Nicolò dei Conti (1395-1469), Ludovico De Varthema (1505-1507), Giovanni da Empoli (1480-1524)². Kemudian menyusul Filippo Sassetti (1520-1588), C. Federici (1563-1581) dan G. Balbi (1579-1588). Di bidang ilmiah nama yang sangat dikenal ialah ahli botani Odoardo Beccari (1843-1920) yang berkali-kali mengunjungi kepulauan Nusantara dan pernah bermukim di Kalimantan selama 3 tahun. Beccari telah memberikan sumbangannya dengan buku-buku yang ditulisnya, yaitu *Malesia*³, *Nuova Guinea, Celebes e Molucche*⁴ dan yang paling terkenal ialah *Nelle Foreste di Borneo*⁵ karena tulisan ini mengungkapkan berbagai fenomena dunia flora dan fauna Nusantara. Beccari rupanya tidak hanya seorang naturalis yang menumpahkan perhatiannya pada dunia flora dan fauna, tetapi memperhatikan pula adat, kebiasaan, tradisi, dan budaya setempat. Hal ini terlihat dari komentarnya mengenai "bahasa setempat" (bahasa Melayu) yang dikatakannya sebagai "bahasa yang manis, seperti bahasa Italia dari dunia Timur". Ditambahkannya pula bahwa gramatiknya sangat sederhana dan ucapannya sangat mudah, demikian mudahnya bagi telinga siapa pun untuk dapat menangkap arti dari setiap kata Melayu⁶. Demikian pula tak kalah terkenalnya nama Emilio Modigliani yang memusatkan perhatiannya pada tanah Toba, pulau Nias, Mentawai dan Enggano. Buku-buku yang ditulisnya ialah *Un Viaggio a Nias*⁷, *Fra i Batacchi indipendenti*⁸ dan *Isole delle Donne*⁹. Patut juga kita catat perhatian yang diberikan Modigliani terhadap kebudayaan setempat, terutama tentang puisi

² op.cit.

³ *Malesia* (1887-1890)

⁴ *Nuova Guinea, Celebes e Molucche* (1924)

⁵ *Nelle Foreste di Borneo* (1902)

⁶ Faizah Soenoto, "Bahasa Indonesia di Italia", makalah Kongres Internasional BIPA, Depok 1995

⁷ *Un Viaggio a Nias* (1890)

⁸ *Fra i Batacchi indipendenti* (1892)

⁹ *Isole delle Donne* (1894)

rakyat Melayu, yaitu pantun¹⁰. Sebagian besar dari tulisan dan laporan perjalanan orang Italia ini telah dijadikan sumber acuan dan bahan penelitian di Eropa pada masa itu.

Di antara saudagar, eksplorasi, dan naturalis yang mengadu untung yang kita sebutkan di atas, kita kenal nama Antonia Pigafetta (1480--1524), nama yang sangat penting dalam hubungannya dengan perkembangan bahasa Indonesia. Antonio Pigafetta, seorang bangsawan dari kota Vicenza di Italia Utara. Pigafetta mula-mula bekerja untuk Spanyol dan pada tahun 1519, ia mengikuti perjalanan mengelilingi dunia yang pertama dengan Ferdinando Magelhaens, seorang Portugis yang pada waktu itu bekerja untuk Spanyol. Dalam perjalanan yang bersejarah inilah Pigafetta telah membuat sebuah catatan tentang daftar kata yang termasyhur dengan judul *Vocaboli de questi popoli mori* (daftar kata orang Islam). Jadi, minat dan perhatiannya terhadap adat, kebiasaan dan bahasa setempat telah mendesaknya untuk membuat sebuah daftar kata yang sekarang menjadi bukti sejarah yang sangat penting dalam perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Antonio Pigafetta mencatat bahasa setempat yang disebutnya sebagai bahasa orang Moro, atau bahasa orang Islam, yang tidak lain dari bahasa yang pada waktu itu sudah dipergunakan hampir di seluruh Nusantara sebagai bahasa komunikasi, yang kemudian terkenal dengan sebutan *lingua franca*. Laporan yang disertai catatan berupa daftar kata yang terdiri atas sekitar 400 kata (tepatnya 436 kata), yang kemudian dianggap sebagai daftar kata atau kamus Melayu-Italia yang pertama, malah dapat dianggap sebagai kamus Melayu-Asing/Eropa yang pertama.¹¹

b. Tradisi yang Terputus

Setelah Antonio Pigafetta, 300 tahun kemudian barulah ada karya lain yang menyangkut Indonesia, yaitu dengan terbitnya sebuah kamus kecil yang dikompilasi oleh seorang saudagar yang bernama G. Gaggino (1846--1918). Kamus ini mempunyai ciri khas karena dilengkapi dengan lembaran tambahan yang berisi percakapan praktis bahasa Melayu, yang ditulis dengan tulisan Jawi, disertai dengan transkripsi bahasa Italianya¹². Gaggino bermukim di Singapura dan kemudian meninggal tahun 1918 di Garut, Jawa Barat.

Sebenarnya pernah diberitakan tentang adanya sebuah naskah Melayu lainnya yang tersimpan di Perpustakaan Vatikan yang dikenal dengan nama *Lexicon Malaicum*. Naskah ini tercantum dalam berkas Perpustakaan Vatikan dan diterbitkan pada tahun 1831, tercatat dengan

¹⁰ Faizah Soenoto, *Pantun Melayu di Italia*, Seminar Antara Bangsa Pantun, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dan Universiti Sains Malaysia, Kuala Lumpur 2002

¹¹ Bausani, Alessandro, op.cit

¹² Bausani Alessandro, op.cit

judul *Lexicon Malaicum cum grammatica*. Akan tetapi, karena tertulis dalam aksara Jawi, naskah itu lama tersimpan dan tertimbun di antara naskah-naskah Arab. Baru kemudian diketahui bahwa judul lengkapnya ialah *Malaicum cum grammatica* araba, jadi Kamus Melayu-Latin-Belanda dengan tata bahasa Arab. Bukan tata bahasa Melayu.¹³ Dengan melihat sederetan nama Italia yang cukup termashur di dunia Eropa, tetapi sangat sedikit dikenal atau diketahui di dunia Asia umumnya, di Tanah Melayu dan Indonesia khususnya, kiranya tidak ada salahnya untuk menyebutkannya kembali walaupun telah pernah saya tulis dalam beberapa makalah dalam berbagai kesempatan sebelum ini¹⁴.

c. Dunia Melayu yang Eksotik

Tradisi yang melekat pada bangsa Italia tentang dunia Melayu adalah pandangan bahasa Melayu itu yang eksotik¹⁵, yang diisi dengan roman petualangan yang menawan, penuh misteri dan khayalan oleh penulis Emilio Salgari (1862-1911)¹⁶. Kisah perompak Melayu telah mengisi dunia kanak-kanak dan remaja Italia sejak tahun 1883, yaitu sejak terbit roman pertamanya. Seri Roman Perompak Melayu, sebanyak 11 buku ini telah meninggalkan bekas yang tidak mudah digeser dan dihapus dari dunia fantasi Italia dari generasi ke generasi, sampai masa kini. Peran utamanya ialah seorang perompak-pahlawan, model Robin Hood yang bernama Sandokan. Kisah-kisahnyanya berlatar belakang “dunia Melayu”, tepatnya pulau Kalimantan (Borneo) yang penuh hutan rimba raya dengan margasatwa ini benar-benar memenuhi dunia fantasi remaja Italia sejak awal abad ke 20. Sampai sekarang roman ini terus menerus dicetak ulang dan terbit dalam berbagai bentuk, dari bentuk buku cerita sampai bentuk cerita bergambar/komik, dimainkan dalam bentuk teater sampai film dan ditayangkan sebagai film televisi dan cartoon. Betapa pun Emilio Salgari tidak pernah diakui sebagai seorang pengarang dalam dunia sastra, malah selalu disepelekan dan dikucilkan oleh para kritikus, namun ia tetap hidup dan hadir dalam tiga dimensi yang berbeda tapi saling berhubungan satu sama lain, yaitu dunia nyata, dunia fantasi dan dunia pengarang. Di awal abad 21 ini kita masih bisa menyaksikan film, kartun, dan menemukan buku roman “seri Perompak Melayu” Salgari. Dari roman Salgarilah, remaja Italia mengenal

¹³ Bausani, Alessandro op.cit.

¹⁴ Faizah Soenoto, “Kata-kata Melayu dalam Kamus Bahasa Italia”, sebuah catatan, World Congress on Malay Language, Kuala Lumpur 1995.

¹⁵ Bausani, Alessandro, op.cit.

¹⁶ Faizah Soenoto, *Seabad dengan Emilio Salgari: seri roman Perompak Melayu, PANGGUNG SEJARAH Persembahkan kepada Prof. Denys Lombard, Henri Chambert-Loir, Hasan Muarif Ambary (ed), Ecole française d'Extrême-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Yayasan Obor Indonesia, 1999.*

kata-kata keris, amok, durian, orango (orang hutan), babi rusa, kampong dan lain-lain¹⁷. Tidak mengherankan kalau sampai-sampai sastrawan nasional dan penyair Cesare Pavese (1908-1950), dalam puisinya yang berjudul *Mari del Sud*, memakai untaian yang dianggap “khas Salgari”:

Oh, da quando ho giocato ai pirati malesi
Oh, sejak aku masih bermain perompak Melayu

quanto tempo è trascorso
berapa lama sudah waktu berlalu¹⁸

Di sini ungkapan *da quando ho giocato ai pirati malesi*, mempunyai pengertian tentang sesuatu yang telah lama sekali berlalu.

d. Indonesia di Italia Pada Abad 20

Tradisi yang seolah-olah terputus ini, walaupun tetap dibayangi dengan kesan eksotik dan dunia khayalan ala Salgari, hidup kembali pada paruh ke dua abad 20 atas jasa beberapa ilmuwan Italia seperti G. Prampolini¹⁹, yang disusul kemudian oleh Prof. Alessandro Bausani²⁰ dan dilanjutkan oleh Prof. Luigi Santa Maria²¹. Menjelang akhir paruh kedua abad 20 minat dan studi Indonesia mulai terbuka. Kita kenal linguist Giulio Hasan Soravia²², Pietro Scarduelli²³, Vito di Bernardi²⁴, Guido Corradi²⁵. Demikian pula pada paruh ke dua abad 20 ini, tidak hanya muncul kembali minat Italia terhadap budaya Indonesia, tetapi juga minat Indonesia di bidang sastra dan budaya Italia. Sutan Takdir Alisyahbana menulis *Grotta*

¹⁷ Faizah Soenoto, op.cit.

¹⁸ Faizah Soenoto, ed, “Il Mondo Malese di Salgari”, un accenno alle parole malesi, *PERSEMBAHAN*, Studi in onore di Luigi Santa Maria, Series Minor LIII, IUO, Napoli 1998.

¹⁹ Prampolini, Giacomo, *Cinquanta Pantoen*, *STORIA UNIVERSALE DELLE LETTERATURE*, III ed. del 1959-1961 dan Pantun dwibahasa

²⁰ Bausani, Alessandro op.ci

²¹ Santa Maria, Luigi, *I prestiti portoghesi nel malese-indonesiano*, IUO, Napoli, 1967

²² Soravia, Giulio Hasan, “Renward Brandstetter e la linguistica austronesiana: “Wir Menschen der indonesischen Erde”, *PERSEMBAHAN*, IUO Napoli 1998

²³ Scarduelli, Pietro, “Headhunting in Indonesian cultures”, *PERSEMBAHAN*, Napoli 1998.

²⁴ Vito di Bernardi, *Introduzione allo studio del teatro indonesiano: Giava e Bali*, Firenze, La Casa Usher, 1985.

²⁵ Terjemahan *Bumi Manusia* (La Terra dell'uomo) Pramudya Ananta Toer, kolaborator

Azzurra²⁶ kisah kasih dengan latar belakang budaya dan alam Italia, Sitor Situmorang menciptakan beberapa sajak berlatar belakang Italia²⁷ demikian pula Ayip Rosidi²⁸. Dengan sengaja saya ingin menambahkan bahwa di penghujung abad 20 seorang penyair yang lahir tapi tak sempat menjadi besar, Zainal Muttaqien ²⁹telah menciptakan sajak-sajak tentang Italia dan juga terjemahan novel dan cerpen Italia³⁰.

Akhir abad 20 dan awal abad 21 ini walaupun masih perlahan-lahan telah mulai bermunculan tunas baru. Sederetan pendek nama baru muncul, yaitu mereka yang baru saja atau sedang menyelesaikan studi Doktor pun mulai menambah jumlah ilmuwan muda di bidang studi Indonesia seperti Dr. Antonia Soriente dan Massimo Sarappa. Mahasiswa dari program S2 di Universitas di kota lain pun mulai sering menghubungi Università degli Studi di Napoli L'Orientale (selanjutnya disebut UNO) sekadar mencari informasi tentang bahan atau nama pakar yang dapat membantu mereka. Minat mereka sangat bervariasi, dari bidang antropologi, etnologi, linguistik, sejarah, masalah lingkungan alam sampai teater klasik, wayang dan teater modern dan dunia perfilman Indonesia. Walaupun tunas-tunas muda ini bagaikan tumbuhan yang hidup di atas batu atau lahan gersang, karena studi mereka kebanyakan masih bersifat studi pribadi, belum tertampung dalam satu sarana penelitian ilmiah yang mapan dan menjamin, mereka terus hidup dan berupaya sering atas inisiatif sendiri untuk melanjutkan tradisi nenek moyang mereka yang sudah mengarungi samudra hanya untuk mengenal dunia Melayu-Indonesia. Oleh karena itu, saya kira, hal itu perlu mendapat perhatian-dari kedua pemerintah dan wajib kita tunjang.

Akhirnya, saya ingin memberikan perhatian pada karya tulis yang sering dilupakan atau terlupakan, yaitu karya-tulis yang berupa skripsi mahasiswa. Skripsi sebagai ujian terakhir yang harus dipertahankan sebelum memperoleh gelar kesarjana ini, patut dihargai dan alangkah baiknya kalau dapat diterbitkan. Skripsi sarjana ini tidak saja merupakan hasil karya penelitian tunas muda Italia, tetapi juga memuat pandangan dan penilaian dari bangsa Italia masa kini terhadap dunia Melayu- umumnya dan Indonesia khususnya dalam era globalisasi ini. Skripsi-skripsi tersebut sangat bervariasi. Pada awalnya karena hanya ada mata kuliah bahasa saja,

²⁶ Faizah Soenoto, *Grotta Azzurra, Sutan Takdir Alisjahbana dan Budaya Italia*, Simposium Internasional Relevansi Pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana: Kini dan Masa Depan, Jakarta 2002

²⁷ Sitor Situmorang, "Lagu gadis Itali", "Dermaga Venezia", "Verona", "Angin danau"

²⁸ Ajip Rosidi, "Pasar Minggu", dalam Faizah Soenoto, "Vengo, o signore, vengo. Un poeta alla ricerca di Dio", *UN RICORDO CHE NON SI SPESGNE, scritti di docenti e collaboratori dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli in memoria di Alessandro Bausani*, Napoli 1995.

²⁹ Zainal Muttaqien, *Seserpih Sepi, kumpulan sajak Zainal Muttaqien*, Jakarta 1999

³⁰ dalam persiapan.

skripsi mereka hanya berkisar dan terbatas pada tema bahasa-linguistik dan sastra Melayu-Indonesia saja. Akan tetapi, setelah wawasan budaya yang dapat mereka pelajari dan teliti makin meluas, tema skripsi pun menjadi lebih bervariasi. Tentu saja ini berkat kerja sama, baik antarpada dosen se fakultas, se universitas, atau antaraniversitas di Italia maupun antara lembaga pendidikan atau universitas Eropa lainnya, terutama yang memiliki hubungan kerja sama. Sejak ada kerja sama antarnegara Pasar Bersama Eropa dan diadakannya keseragaman dalam model atau sistem dan kurikulum, secara resmi, para calon sarjana dapat dibimbing dan/atau meminta pengajar dari baik sesama fakultas atau universitas di Italia maupun dari negara Eropa lainnya sebagai penyanggah atau pembimbing, tentu saja yang mempunyai konvensi dengan UNO. Dalam hal ini, Organisasi Erasmus yang mempunyai program pertukaran mahasiswa dan staf pengajar sangat membantu. Tidak saja memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melengkapi kuliah mereka di universitas/negara lain, secara timbal balik ujian yang mereka tempuh di universitas/negara lain pun diakui. Karena itulah, skripsi-skripsi tersebut dapat dianggap pula dianggap sebagai hasil konkret dari pengajaran bahasa dan budaya Indonesia di Italia.

(Sekadar memberikan bayangan, kami cantumkan beberapa judul skripsi sebagai Lampiran)

Studi Indonesia di Italia

Sengaja dipisahkan bab mengenai “bahasa Indonesia di Italia” dan “studi Indonesia di Italia” karena bahasa Indonesia di Italia kadang-kadang ada juga diajarkan pada sekolah atau kursus bahasa secara kasus atau menurut permintaan, atau pun diajarkan secara pribadi, sebagai kursus privat, sedangkan studi Indonesia mempunyai wadah dan sarana akademis. Tahun 1964 mungkin dapat dianggap sebagai tahun kelahiran studi Indonesia secara resmi di Italia karena pada tahun inilah atas jasa Prof. Alessandro Bausani, guru besar Islam yang membuat tafsir Al Quran dalam bahasa Italia³¹ dan Bahasa dan Budaya Persia, yang sangat mencintai bahasa dan kebudayaan Melayu-Indonesia, untuk pertama kalinya dibuka atau diaktifkan mata kuliah bahasa Indonesia pada sebuah lembaga resmi Italia, yaitu di Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Orientale Napoli. Sampai sekarang universitas itu merupakan satu-satunya Universitas Negeri yang mempunyai bahasa dan budaya Indonesia dalam kurikulum studinya.

Di Università degli Studi di Siena, Associate Professor Vito di Bernardi, dosen Storia della Danza e del Mimo dan Storia del Teatro Orientale, memberikan juga kuliah secara kasus tentang Teater Klasik

³¹ Bausani, Alessandro, *Il Corano, traduzione, introduzione e note di A. Bausani*, Firenze 1955

Jawa/Bali³². Dr. Scarduelli, peneliti pada Dipartimento di Sienza Antropologiche e Archeologiche di Universitas Torino, sampai sekarang masih satu-satunya antropolog Itali yang meneliti tentang Indonesia terutama tentang pulau Nias dan Alor ³³ Dapat juga disebut Prof. Giulio Hasan Soravia, dosen linguistik yang meneliti tentang bahasa-bahasa di Aceh dan membuat kamus kecil Melayu/Indonesia-Indonesia/Melayu-Italia³⁴.

a. Bahasa Indonesia di Italia

Di mana saja ada pengajaran bahasa Indonesia?

Selain di Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" satu-satunya lembaga resmi di Italia yang mempunyai mata kuliah bahasa dan budaya Indonesia dalam kurikulum studinya, sejak tahun lalu atas prakarsa pribadi seorang linguis, Prof. Giulio Hasan Soravia, bahasa Indonesia juga dapat dipelajari di Università degli Studi di Bologna. Ada lembaga lainnya yang juga memberikan peluang untuk studi Indonesia secara kasus, kalau diperlukan, misalnya persiapan bagi mereka yang akan bertugas keagamaan di Indonesia, yaitu pada Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi milik Tahta Suci Vatikan, Pontificia Universitas Gregoriana, Pontificia Istituto di Studi Orientali, Pontificia Università Urbaniana. Selain itu, lembaga semipemerintah, seperti Is.I.A.O Roma, Is.I.A.O. Milano, CESMEO di Torino. Di IsIAO (dulu IsMEO), misalnya yang membuka kursus untuk bermacam-macam bahasa Timur mempunyai juga kursus bahasa Indonesia, tetapi dengan syarat hanya dibuka kalau ada lebih dari 11 permintaan. Sampai sekarang yang mendaftar ke lembaga itu hampir tidak pernah mencapai jumlah tersebut, sebab jam pelajarannya yang diatur untuk dapat memberikan kesempatan pada para pekerja kantor, tidak cocok dengan permintaan lain. Oleh karena itu, tidak jarang kami menerima permintaan untuk kursus pribadi, yang tidak selalu dapat dilayani, berhubungan tempat dan waktu yang tidak memungkinkan. Perlu juga dicatat bahwa beberapa sekolah bahasa atau kursus bahasa, kadang-kadang memberikan peluang untuk kursus bahasa Indonesia, kalau ada permintaan, seperti dari pihak Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan Italia, Akademi Aeronautika, untuk persiapan bagi mereka yang akan bertugas di Indonesia.

b. Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (UNO) sebelumnya lebih dikenal dengan nama Istituto Universitario Orientale (IUO) adalah salah satu

³² Prof. Di Bernardi, Vito, op.cit.

³³ Dr. Scarduelli, Pietro, op. cit.

³⁴ Prof. Soravia, Giulio Hasan, op.cit.

di antara universitas tertua di Italia dan salah satu dari akademi orientalis yang tertua di Eropa yang menyelenggarakan studi Indonesia. UNO mempunyai reputasi dan prestasi tinggi di Italia yang terkenal sebagai pusat studi Asia dan Afrika. UNO lahir sebagai sebuah lembaga pendidikan terutama diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari Cina dan untuk mempersiapkan para misionaris dan rohaniawan yang akan dikirim ke Cina. Oleh karena itu, nama aslinya ialah Collegio dei Cinesi. Didirikan pada tahun 1732 oleh seorang misionaris Matteo Ripa Lembaga inilah yang kemudian oleh Kerajaan Napoli diganti namanya menjadi Real Colleggio Asiatico. Lembaga itu tahun 1878 menjadi Real Istituto Orientale di Napoli dan tahun 1957 menjadi Istituto Universitario Orientale di Napoli. Kata "Istituto" (institut) tetap dipertahankan walaupun sudah menjadi universitas negeri untuk memperingati sejarah kelahirannya sebagai sebuah institut pendidikan. Tahun-tahun terakhir ini ada penyeragaman nama universitas negeri di Italia, akhirnya menjadi Università degli Studi, seperti Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".

Dua pusat studi orientalis lainnya di Italia ialah universitas di Venezia dan Roma.

CATATAN: Saya merasa perlu mencantumkan bab mengenai Universitas ini karena banyak kesalahpahaman yang disebabkan oleh ketidak-tahuan. Karena nama IUO dulu memuat kata "institut", maka selalu dikira bahwa lembaga ini hanya sebuah lembaga kursus bahasa

c. Studi Indonesia di Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"

Universitas ini mempunyai 4 fakultas: Fakultas Sastra dan Filsafat, Fakultas Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Ilmu Politik dan Fakultas Studi Islam. Ketika pertama kali mata kuliah ini dibuka pada tahun 1964, bahasa Indonesia menjadi bagian dari Seminario di Indianistica, jadi dikelompokkan bersama studi India. Kemudian, setelah diadakan restrukturasi menurut Departemen, digabungkan dalam Dipartimento di Studi Asiatici atau Departemen Studi Asia dan akhirnya sekarang menjadi bagian dari Departemen Studi Asia dan Afrika, pada Fakultas Sastra di Universitas Orientale Napoli.

d. Bahasa Indonesia di Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'

Prof Bausani mulai memberikan kuliah tentang Indonesia tahun 1964. Bahasa Indonesia diberikan dalam bentuk teori linguistik dan latihan dalam bentuk bacaan dan analisis tata bahasa. Mengenai sastra dan budaya Indonesia, banyak diberikan tentang sastra Melayu klasik dan menjadi kuliah yang menarik sebab beliau memang ahli dan mendalami bidang ini.

Salah satu tulisan beliau yang kita kenal tentang teori tentang hikayat Melayu³⁵. Pada waktu itu belum ada tuntutan kecakapan berbahasa Indonesia. Bahasa hanya diajarkan sebagai alat untuk melanjutkan studi pribadi masing-masing. Setelah Prof. A. Bausani pindah ke Universitas Roma tahun 1971 dan kemudian pensiun, digantikan oleh Prof. Luigi Santa Maria yang lebih banyak memberikan kuliah dan teori sastra Indonesia Modern. Prof. Santa Maria mengepalai studi Indonesia di UNO dari tahun 1969.sampai pensiun tahun 1996. Karya beliau yang terkenal ialah mengenai kata kata pinzaman Portugis dalam bahasa Melayu/Indonesia³⁶.

Kehadiran kami sebagai associate professor yang kemudian ditambah dengan tenaga reader saudara Zainal Muttaqien SS, menambah wawasan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, terutama di bidang praktik. Banyak mahasiswa yang tidak lagi hanya mengenal dan mengetahui Indonesia dengan baik, tapi juga berbahasa Indonesia dengan cukup baik. Sayangnya sekarang posisi sebagai dosen untuk pengajaran bahasa dan budaya Indonesia karena situasi dan keadaan, tinggal satu tempat saja. Jadi, mulai tahun 1964 sebagai asisten dosen, sejak tahun 1998 hanya tinggal kami sendirian. Karena itu, kerja sama melalui Erasmus sangat kami anggap positif. Pertukaran staf dapat mengisi kekurangan yang ada di pusat studi masing-masing.

e. Program Pengajaran Bahasa Indonesia di Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'

Terbentuknya negara-negara pasar bersama Eropa telah memberikan beberapa perubahan pula dalam sistem studinya. Langkah pertama ialah penyeragaman sistem dan kurikulum universitas-universitasnya. Maka program pengajaran di UNO pun disesuaikan dengan sistem negara pasar bersama Eropa lainnya. Jadi kalau sebelum ini pendidikan akademis untuk bidang humaniora ditempuh dalam 4 tahun untuk mencapai sarjana penuh, yang dibagi dalam program 2 tahun (biennale) dan 4 tahun (quadriennale), sekarang studi untuk S-1 yang ditempuh dalam 3 tahun dengan program biennale dan quadriennale. Program S-1 kemudian dapat dilanjutkan dengan program S-2.

Bahan pengajaran bahasa selalu diusahakan untuk disesuaikan dengan bahan BIPA. Semua buku yang diterbitkan BIPA: FSUI dipakai sebagai referensi, di samping buku teks dari berbagai sumber atas pilihan pengajar masing-masing. Jadi, pengajaran bahasa yang dibagi menurut tingkat studi; tadinya dalam 4 tahun, sekarang 3 tahun untuk S1. Bahan Kesusastraan Indonesia, semula dibagi atas Kesusastraan Indonesia Modern,

³⁵ Bausani, Alessandro, *Note sulla struttura della Hikayat classica malese*, ANNALI, IUO, Napoli N.S., XII, 1962

³⁶ Santa Maria, Luigi, *I prestiti portoghesi nel malese-indonesiano*, IUO, Napoli 1967

untuk tingkat I dan II, yang dilanjutkan ke tingkat III dan IV, ditambah dengan Melayu Klasik dan naskah penguasaan membaca naskah Jawi. Sekarang bahan itu dibagi dalam 3 tingkat/tahun.

CATATAN: bahasa Indonesia yang diajarkan tentu saja hanya bahasa standar atau baku, walau pun diberikan contoh berbagai ragam bahasa yang ada, terutama tentang adanya perbedaan yang cukup nyata antara bahasa tulis dengan bahasa cakapan. Demikian pula munculnya ragam bahasa seperti apa yang disebut prokem, bahasa gaul, dan tentang kata-kata dari bahasa Jakarta. Diberikan pula contohnya seperti *nggak*, *deh*, *dong*, *aku*, *gue*, dan *lu*.

f. Mahasiswa Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'

Mahasiswa yang belajar di UNO biasanya datang dari seluruh Italia karena UNO adalah salah satu universitas yang mempunyai fakultas khusus untuk "oriental studies". Jadi, mereka yang berminat akan "studi ketimuran", harus memilih antara Napoli, Venezia atau Roma, tergantung pada bidang/bahasa timur apa yang mereka pilih.

Selain itu, sering pula kami menerima mahasiswa dari negara Eropa lainnya yang tergabung dalam organisasi ERASMUS. Misalnya beberapa tahun terakhir ini kami menerima setiap tahun selama satu semester antara 2 sampai 7 mahasiswa dari Inggris, Perancis atau Jerman yang datang ke UNO untuk mengikuti kuliah Sastra Indonesia. Setiap tahunnya, jumlah mahasiswa dari Italia berkisar antara 25 sampai 40 orang. Walaupun banyak di antara mereka yang hanya mengambil program studi 2 tahun/biennale, tetapi tahun-tahun terakhir ini justru banyak sekali yang menyelesaikan program 4 tahun/quadriennale dengan skripsi sarjana tentang Indonesia.

CATATAN: Tahun akademis 2001/2002 ada 6 skripsi sarjana, dengan catatan 4 di antaranya mendapatkan yudisium cum laude.

Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia di Italia

Setelah pendahuluan yang cukup panjang, di atas barulah kita tiba pada inti makalah, yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan kongres sesuai dengan tema dan tujuan kongres ini, yaitu "Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi" dan yang dilaksanakan di luar Indonesia dengan harapan agar memperoleh "Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia di Italia"

a. Tak Kenal Maka Tak Sayang

Motto tradisional ini sering sekali dipakai di Italia, sekadar untuk memberikan perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan hubungan Italia-Indonesia. Sampai-sampai pernah dipakai oleh perusahaan penerbangan kita Garuda guna mempromosikan pariwisata Indonesia. Kenyataannya memang demikian. Indonesia sangat sedikit dikenal di Italia. Walaupun sebenarnya bila dikatakan bahwa minat tak ada atau sedikit, bukan karena tidak berminat melainkan memang pada kenyataannya bidang studi ini, sampai sekarang hanya menjadi milik pribadi atau perorangan, milik segelintir orang, para pakar, peneliti, dan ilmuwan saja. Sampai beberapa tahun yang lalu, di luar dunia ilmiah atau dunia akademis, Indonesia masih dikacaukan dengan Indocina dan di mana gerakan tempat kepulauan terbesar di dunia ini, jarang yang dapat menyebutkan dengan tepat. Dapat dilihat dari motto "tidak resmi" yang sering dipromosikan di Italia juga: "Pulau Bali itu ada di Indonesia, bukan Indonesia yang di Bali".

Indonesia kemudian dikenal dan mulai menjadi berita, ketika ada masalah Timtim, misalnya, yang kemudian disusul dengan peristiwa krisis moneter dan politik di penghujung abad 20 serta berbagai kerusakan di awal abad 21 ini. Barulah Indonesia mulai sering disorot, mulai ramai dibicarakan walaupun tentu saja dengan nada negatif.

Namun, minat belajar sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi tersebut. Malah dapat dipastikan bahwa sikap para mahasiswa sangat positif, dengan catatan bahwa sejak situasi Indonesia disorot negatif, mahasiswa yang mendaftar untuk studi Indonesia relatif tidak berkurang dan cukup banyak dibandingkan dengan materi minor lainnya.

b. Sikap dan Minat Masyarakat/Pemerintah Italia terhadap Bahasa Indonesia

Menjawab pertanyaan bagaimana sikap dan minat masyarakat/pemerintah Italia terhadap bahasa Indonesia, sebagaimana dikatakan dalam bab di atas, baik masyarakat maupun pemerintah tidak dapat dikatakan mengecewakan, apalagi dari pihak Indonesia, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Kebudayaan antara Indonesia-Italia pada tanggal 20 Oktober 1997. Penandatanganan ini segera ditindaklanjuti dengan kerja sama di bidang kebudayaan, berupa kegiatan-kegiatan yang dapat dinikmati masyarakat Italia pada umumnya. Telah banyak dilaksanakan berbagai kegiatan di bidang kesenian, pertukaran pemuda Italia-Indonesia dan berbagai ragam promosi lainnya.

Memorandum of Understanding (MOU) di bidang pendidikan/ilmiah pernah ditandatangani di Jakarta antara beberapa universitas di Italia dengan beberapa universitas di Indonesia, dengan kehadiran pihak pemerintah Italia dan Indonesia sekitar tiga tahun yang lalu. Walaupun belum

terdengar tindak lanjutnya, diharapkan di masa depan hal itu paling sedikit tinggal mengisinya.

Harus kita akui bahwa kebanyakan pusat studi di luar Indonesia, tidak menganggap bahasa dan budaya Indonesia sebagai sebuah materi yang penting. Jadi, kalau di Italia saja masih bertahan dan bisa hidup, hal itu sudah sesuatu yang lumayan, mengingat hubungan Italia-Indonesia sangat terbatas. Apalagi, kepentingan langsung Italia di bidang politik, ekonomi sosial-budaya dengan Indonesia hampir tidak ada, kecuali mungkin kepentingan dagang untuk lahan ekspor barang mewah Italia dan sebaliknya.

Sebagaimana disinggung di atas, setelah paruh kedua abad 20 ini, perhatian dan minat cukup meningkat tidak saja di bidang sosial-politik dan ekonomi, tetapi juga di bidang budaya dan ilmiah. Misalnya, permintaan untuk mengisi dan menambah isi ensiklopedia Italia dalam butir yang memuat tentang Indonesia (pengarang, karya sastra) dan kolaborasi sebagai anggota redaksi dalam majalah sastra yang berprestasi tinggi. Akhirnya, untuk pertama kali tahun 2003 telah dirintis semacam persatuan peneliti dan pencinta Studi Asia Tenggara yang bernama ITASEAS atas prakarsa Dr. Pietro Masina. Hal ini harus dianggap sebagai sebuah langkah yang historis setelah berabad-abad hubungan Indonesia - Italia dan beberapa dekade studi Indonesia hadir di Italia. Kegiatan yang lebih bersifat promosi dan menyangkut kepariwisataan sudah sering diselenggarakan melalui hubungan langsung antara organisasi yang khusus atau secara swasta, misalnya pada kesempatan festival dengan mengadakan penghargaan di berbagai bidang kesenian seperti musik, film atau teater dan lain-lain. Demikian pula kunjungan misi kesenian, rombongan musik, wayang, dan lain sebagainya.

Pusat Studi Indonesia sebagai Pusat Informasi

Jurusan Indonesia di UNO tidak jarang dianggap tempat untuk mendapatkan informasi apa saja tentang Indonesia. Mulai dari permintaan untuk belajar bahasa untuk kepentingan pribadi, dagang, terjemahan, dan transaksi niaga sampai informasi pariwisata. Betapa pun hal ini sangat mengganggu, tetapi kalau mau mengambil manfaatnya, semua itu dapat dianggap positif sebagai kegiatan ekstrakurikuler untuk para mahasiswa, walaupun untuk ini perlu bimbingan dan pengorbanan waktu bagi pengajar, di luar tugas didaktis dan ilmiahnya.

Kerja Sama

Dalam uraian mengenai kerja sama, sengaja kami bagi dalam kerja sama antara Italia-Indonesia, Italia-Eropa, dan di Italia sendiri.

a. Kerja sama antara lembaga pengkajian/pengajaran bahasa di Italia dengan lembaga kebahasaan/perguruan tinggi Indonesia

Kerja sama ilmiah antara UNO dengan UI secara resmi dimulai sejak tahun 2000, ialah antara Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (dulu FSUI) Universitas Indonesia dengan Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale' (dulu IUO). Kerja sama itu berhubungan dengan bidang penelitian tentang analisis tekstual yang berjudul "Emotion and State of Mind in History/Literature"³⁷. Penelitian ini merupakan kerja sama antara lembaga penelitian di universitas Eropa yang berpusat di UNO dengan universitas-universitas di Asia. Sampai sekarang sudah ada kerja sama dengan universitas di Cina, Jepang, Korea, India, Thailandia, Malaysia, dan Indonesia. Kunjungan Prof. P. Santangelo dan Faizah Soenoto ke UI Jakarta bertujuan untuk menjajagi kemungkinan penandatanganan MOU, tetapi ternyata mendapat jawaban dari UI bahwa untuk sementara tidak diadakan penandatanganan MOU lagi, tetapi dianjurkan untuk mengadakan kerja sama ilmiah atau penelitian langsung antara Universitas/ Fakultas Italia dan Indonesia. Demikianlah sejak tahun 2000 telah ada hubungan kerja sama ilmiah dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, yaitu penelitian bersama di bidang analisis tekstual dengan Pusat Leksikologi dan Leksikografi dan Universitas Atma Jaya. Tujuan final dari penelitian ini ialah menerbitkan seri glosarium kata-kata *emotion and state of mind* berdasarkan naskah sastra dan/atau sejarah dari sebuah peradaban atau kebudayaan tertentu pada periode tertentu. Kerja sama ini sedang berjalan dan sementara ini diikuti oleh kelompok kerja bahasa Jawa, bahasa Melayu-Cina, bahasa Indonesia, bahasa Batak, dan bahasa Cina. Segera akan bergabung juga bahasa Sunda. Yang turut secara voluntir adalah peneliti dari jurusan bahasa Jerman. Beberapa pertemuan ilmiah setelah pertemuan yang pertama telah berlanjut secara rutin, baik pertemuan kerja kelompok maupun pertemuan internasional³⁸.

Di lain pihak, dari pihak Italia, ada hubungan kerja sama yang tidak langsung, yaitu berkenaan dengan pengajaran bahasa Italia di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang sudah dimulai 3 tahun yang lalu. Para pengajar bahasa Italia di UNJ adalah sarjana mantan mahasiswa Indonesia dari UNO Napoli. Mereka diambil oleh Pusat Kebudayaan Italia di Jakarta sekadar

³⁷ Prof. Paolo Santangelo, *A research on Emotion and States of Mind in Late Imperial China. Preliminary result*, in *Ming and Qing yanzhiu*, 1995.

³⁸ Workshop di UNO dengan tema "Expression of States of Mind in Asian Written and Figurative Sources", Napoli 2000; workshop di UNO dengan tema "Prototypical examples of Emotions in Southern and East Asia", Napoli 2001; workshop dengan tema "The presentation of emotions in Asia: peculiarities and analogies", Benevento 2002; International Workshop on Lexicology, Pusat Leksikologi dan Leksikografi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok 2002; International Workshop on "Passioni d'Oriente. Eros ed Emozioni nelle Civiltà Asiatiche", Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', Roma 2003.

untuk melancarkan adaptasi dengan kehidupan di Indonesia yang pasti memudahkan tugas pengajaran bahasa Italia, berhubung mereka sudah menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan juga budaya Indonesia.

b. Kerja Sama dengan Perwakilan Pemerintah Indonesia di Italia

Hubungan yang dapat dianggap resmi juga ialah antara Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan UNO Napoli. Kerja sama ini makin meningkat setelah ada penandatanganan Pertukaran Kebudayaan antara pemerintah Italia dan Indonesia tahun 1997. Kerja sama yang nyata misalnya berkenaan dengan darmasiswa, sayembara mengarang, kunjungan ceramah, kegiatan kesenian, dan pertukaran pemuda/mahasiswa.

1) Darmasiswa

Melalui Kedutaan Indonesia di Roma, UNO mendapat kesempatan untuk mengirimkan mahasiswa dengan memanfaatkan darmasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia setiap tahun kepada mahasiswa asing dari seluruh dunia. Darmasiswa ini sudah kami peroleh dan kami pergunakan walau tidak rutin setiap tahun, sejak tahun 1997. Sejak itu sudah ada 9 mahasiswa kami yang memanfaatkan darmasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia di Jakarta, Bandung, Malang, dan Yogyakarta. Itu belum termasuk para mahasiswa yang mengikuti kursus bahasa di Indonesia dengan biaya sendiri. Tentu saja hal ini merupakan kerja sama yang sangat kami hargai. Kesempatan untuk mengunjungi dan belajar bahasa dan budaya Indonesia di tempat selama 9 bulan juga merupakan salah satu daya tarik yang sangat besar bagi para calon mahasiswa kami di Napoli.

2) Sayembara Mengarang tentang Indonesia

Sejak 3 tahun terakhir ini, atas inisiatif KBRI terutama Atase Penerangan dan Informasi yang sangat aktif, setiap tahun diselenggarakan sayembara mengarang yang terbuka untuk semua pemuda Italia dari 18 sampai 21, kemudian 25 tahun. Karangan dengan tema, seperti "Indonesia di mata orang Italia" atau "Memajukan Pariwisata Indonesia" misalnya, sangat besar manfaatnya. Kegiatan ini sangat positif, baik dilihat dari sudut penjangkauan untuk menangkap minat dan pengetahuan Italia tentang Indonesia, maupun untuk memperoleh sekadar informasi langsung, mungkin sambil memonitor situasi minat dan perhatian Italia, baik di bidang pendidikan, budaya, sosial, ekonomi maupun politik. Sayembara ini menarik perhatian terutama bagi pemuda dan mahasiswa, khususnya karena hadiah untuk pemenang sayembara ialah tiket pesawat terbang Roma-Jakarta/Bali-Roma. Untuk ini, patut kami hargai inisiatif yang pasti sangat menunjang paling sedikit menarik mahasiswa juga.

3) Kunjungan Ceramah

Kunjungan-kunjungan resmi Duta Besar Republik Indonesia, Atase Kebudayaan ke UNO dengan acara bedah buku, ceramah-ceramah mengenai Indonesia, menambah wawasan dan pengenalan akan Indonesia.

4) Kegiatan Kesenian untuk Memperkenalkan Indonesia

Acara kesenian (seni tari, seni suara, musik) dan bidang budaya Indonesia lainnya diselenggarakan oleh perwakilan kita di Roma. Kegiatan yang sering melibatkan para mahasiswa, baik dalam peran langsung mau pun sebagai penyelenggara ini sangat menambah kedekatan para mahasiswa sehingga menambah pengetahuan mereka tentang adat istiadat dan kebiasaan dari daerah ke daerah atau bangsa Indonesia

5) Pertukaran Pemuda/Mahasiswa

Sejak tahun yang lalu telah dirintis pula pertukaran pemuda/mahasiswa Italia-Indonesia. Para pemuda/mahasiswa ini--dengan catatan biaya mereka tanggung sendiri - selama seminggu menjadi tamu Depdiknas di Jakarta, lalu mereka melanjutkan perjalanan ke luar kota (Bandung) dan menjadi tamu keluarga Indonesia selama beberapa hari, kemudian mereka bebas melanjutkan perjalanan dengan bantuan informasi dari pihak penyelenggara.

Tahun ini telah diselenggarakan pula acara kunjungan wartawan, semacam kunjungan timbal balik. Para wartawan Italia dari berbagai media komunikasi/massa seperti koran dan televisi diundang untuk mengunjungi dan meliput berita secara langsung ke daerah-daerah dan sebaliknya bagi wartawan Indonesia.

6) Kerja Sama dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan

Sebagaimana pengajaran bahasa Indonesia secara kasus, maka sering juga diadakan ceramah atau tukar pendapat terutama dengan tema agama-agama di Indonesia yang diselenggarakan oleh lembaga agama dan akademis Katolik bekerja sama dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan di Italia. Hal yang sama pernah juga diadakan di Firenze atas prakarsa Università degli Studi di Firenze (lihat butir 2.1).

c. Kerja Sama antar-Pusat Studi Indonesia di Eropa

Kerja sama antar-Pusat Studi Indonesia di Eropa sudah lama dirintis. Kerja sama ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan kerja, sanggar kerja, konferensi, seminar, atau kongres.

1) Lokakarya tentang Studi Indonesia di Eropa

Atas prakarsa Prof. Denys Lombard, tahun 1978 untuk pertama kalinya para pakar dan pencinta studi Indonesia di Eropa mengadakan sanggar kerja di Paris. Pertemuan ini diadakan sebagai lanjutan dan perincian dari Kongres Orientalis yang dilangsungkan di Paris beberapa tahun sebelumnya. Pertemuan ini kemudian mempunyai nama European colloquium of Indonesian Studies, lalu European colloquium of Malay-Indonesian Studies atau sering disebut dengan singkatan ECIMS, yang diadakan, mula-mula setahun sekali, kemudian dua tahun sekali, bergantian di masing-masing pusat studi Malay-Indonesia di Eropa. Setelah Paris, kegiatan itu diadakan di SOAS London, lalu IUO/UNO Napoli, Leiden, Sintra di Portugal, Passau di Jerman, Zurich, Kungälv di Swedia, Hull di Inggris, Berlin, Moskow dan selanjutnya.

Pada pertemuan ini biasanya dilaporkan kegiatan terakhir di tiap-tiap pusat studi di Eropa. Selain menghindari adanya penelitian ganda, kegiatan itu juga bertujuan untuk mencari kemungkinan kerja sama ilmiah.

2) Kerja Sama Ilmiah

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut di atas, antara lain, lahirilah kerja sama ilmiah seperti, kerja sama untuk membuat Indonesian Etymological Project yang akan dikerjakan bersama oleh Prof. Russell Jones dari Pusat Studi Indonesia di SOAS/Inggris, Prof. C.D. Grijns dari Rijksuniversiteit Leiden, Prof. Denys Lombard dari EHESS Paris dan Prof. L. Santa Maria dari IUO Napoli, kemudian juga Prof. J.G. de Casparis dan Prof. J.W. de Vries³⁹. Demikian pula, rencana untuk menerbitkan seri Roman Perompak Melayu Emilio Salgari antara Prof. Brian Duran dari Museum Antropologi London dan S. Faizah Soenoto dari IUO Napoli. Selain itu, diadakan juga kerja sama untuk menerbitkan glosari istilah *Emotion* dan *state of mind in history and literature* antara UNO-INALCO dan berbagai lembaga perguruan tinggi di Asia.

3) Kerja Sama di Bidang Pendidikan

Sejak ada organisasi Socrates yang kemudian diganti dengan Erasmus, timbullah kerja sama pendidikan antaruniversitas di Eropa. Kerja sama ini berupa kegiatan pertukaran mahasiswa dan/atau staf pengajar. Sebagai contoh, karena di UNO Napoli tidak ada mata kuliah khusus untuk Sejarah, Antropologi, atau Etnologi Indonesia, mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti kuliah di Universitas Eropa lainnya, yang mempunyai Studi Indonesia dan mata kuliah tersebut dalam kurikulumnya. Cara lain ialah

³⁹ Grijns, C.D., J.W. de Vries and L. Santa Maria (comps.), *European loan words in Indonesian. A check list of European origin in Bahasa Indonesia and Traditional Malay*, [Indonesian Etymological Project V], Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, Leiden 1983)

dengan pertukaran dosen (*mobile staff*). Dosen Sejarah dari Universitas Hull, misalnya, dalam beberapa tahun ini datang untuk memberikan kuliah singkat dan intensif selama 2 minggu di UNO Napoli. Sebaliknya, dari Napoli kami pergi ke Hull untuk mengajar sastra Indonesia sebab di Hull hanya ada mata kuliah bahasa Indonesia, tetapi tidak ada sastra Indonesia. Ujian yang mereka lakukan di universitas lain ini diakui di universitas masing-masing. Hal ini tidak terbatas hanya untuk kuliah, tetapi juga untuk skripsi sarjana. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk meminta pembimbing atau penyanggah dari universitas lain di Italia ataupun di Eropa. Hasil kerja sama ini sangat positif

4) Kerja Sama Antara Lembaga di Italia

Dalam lingkungan yang paling sempit ialah kerja sama antar-jurusan/departemen, antarfakultas, dan antaruniversitas. Karena mata kuliah bahasa dan sastra/budaya Indonesia secara resmi hanya ada di Napoli, selama ini kerja sama terutama kami adakan di bidang studi yang lebih terperinci, misalnya, dengan mengadakan ceramah-kuliah tentang teater klasik (wayang) Jawa dan Bali, oleh Prof. Vito di Bernardi, yang sering menjadi penyanggah ataupun pembimbing bagi mahasiswa yang menyiapkan skripsi di bidang teater. Kerja sama ini banyak dimanfaatkan dalam persiapan skripsi sarjana.

5) Prakarsa Pribadi

Yang terakhir ialah prakarsa pribadi pengajar, dengan memanfaatkan kunjungan pribadi dari para rekan dan kenalan baik di bidang ilmiah seperti bidang sastra, budaya dan seni, serta di bidang lainnya, dari Indonesia maupun dari Eropa, Asia, Amerika, Malaysia, atau Australia. Sejak awal berdirinya jurusan, inilah usaha pribadi yang menjadi satu-satunya sumber penunjang pengajaran bahasa dan budaya Indonesia di Napoli. Ceramah-ceramah insidental dari mereka yang kebetulan lewat karena menghadiri konferensi di salah satu negara lain di Eropa atau yang singgah sebagai wisatawan, yang penting telah berkenan untuk membagi ilmu. Sekadar sebagai contoh, dari Indonesia misalnya, ceramah Dr. Boen S. Oemarjati, Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana, Dr. Hermina Sutami, Dr. Woro Mastuti, Prof. Benny Hoed, dan Dr. Antonia Soriente diadakan setiap tahun secara rutin. Dari pihak sastrawan misalnya, W.S. Rendra dan Nirwan Dewanto, serta mereka yang berkunjung, seperti Taufik Ismail, Goenawan Mohamad, Ayu Utami, Sitok Srengenge, dan Dr. Titiek Pujiastuti.

(a) Ceramah tentang Indonesia

Pihak kami sendiri, hampir selalu mendapat permintaan untuk berceramah tentang berbagai tema mengenai Indonesia, mulai dari masakan Indonesia, adat perkawinan Indonesia, paling sering tentang wanita

Indonesia, wanita Islam di Indonesia, upacara 7 bulan, upacara *tedak siti*, sampai tema yang lebih ilmiah menyangkut budaya Indonesia.

(b) Publikasi tentang Bahasa dan Sastra Indonesia

Selain publikasi dalam bentuk karangan ilmiah dalam majalah dan terbitan ilmiah dari universitas dan lembaga ilmiah lainnya, buku teks tentang berbagai cabang budaya, kamus dan lain sebagainya, juga ensiklopedi merupakan rujukan yang dapat diandalkan. Walaupun masih sangat terbatas⁴⁰, sudah ada dimuat tambahan entri dalam ensiklopedi sejak tahun 50-an atas prakarsa G. Prampolini⁴¹.

POETICA, sebuah majalah sastra yang bermutu dan mempunyai prestasi tinggi, tahun 2003 ini memberikan kesempatan pada dosen-dosen dari semua jurusan bahasa dan budaya asing dari UNO untuk berkolaborasi sebagai anggota redaksi dengan tugas memeriksa dan mengisi dalam bidang masing-masing. Kami mendapat kehormatan untuk menjadi anggota redaksi untuk wilayah Asia Tenggara.

Akhirnya, permintaan untuk menambah dan mengisi entri dalam Ensiklopedi Italia. Misalnya saja dalam *Dizionario Bompiani delle Opere dei Personaggi*⁴², sebuah Ensiklopedi-kamus tentang Karya dan Tokoh Sastra. Sampai sekarang hanya ada satu entri yaitu roman Salah Asuhan, karya Abdul Muis. Entri yang hanya terdiri dari beberapa baris kalimat ini pun salah terjemahannya. Kali ini kami mendapat kesempatan untuk memasukkan 10 entri, tokoh dan karya sastranya.

Manfaat Apa yang Mereka Peroleh

Tanpa membesar-besarkan, sebagai seorang yang telah mengabdikan diri selama hampir 40 tahun di lapangan, kami hanya dapat mengatakan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini, walaupun belum banyak, hubungan di bidang ekonomi-perdagangan, import-eksport, informasi selain kerja sama budaya dan ilmiah sudah dapat dikatakan memadai walaupun kita masih harus terus meningkatkan usaha untuk memperkenalkan Indonesia dalam segala aspek. Bukan Indonesia yang mereka kenal dari dongeng-dongeng dan roman Perompak Melayu atau seperti yang didengar dari berita dan siaran dari sumber asing yang simpang siur ataupun dari literatur yang mungkin kurang menguntungkan bagi Indonesia, melainkan Indonesia atas dasar penelitian mutakhir yang paling sedikit dapat memberikan image dan kesan positif tentang apa dan bagaimana Indonesia.

⁴⁰ Santa Maria, Luigi, kontribusi dalam *Dizionario dei Capolavori*, UTET, Vol I, II, III, Torino 1987 (contributi al Grande Dizionario Enciclopedico sulle Letterature indonesiane, malese classica, malese moderna e giavanese)

⁴¹ op.cit

⁴² *Dizionario Bompiani delle Opere e dei Personaggi* (kontribusi S. Faizah Soenoto)

Dalam pilihan mereka untuk belajar bahasa Indonesia pun, dengan segala kerendahan hati, masih kami akui bahwa kebanyakan alasan memilih bahasa Indonesia ialah cukup dangkal, yaitu sebagai mata kuliah pelengkap, karena dianggap jauh lebih mudah dibandingkan dengan bahasa Timur lainnya. Sebab, sebagaimana kita ketahui, mata kuliah bahasa dan budaya Indonesia tergabung dalam kelompok bahasa-bahasa India lainnya seperti Urdu, Hindi, Sanskrit, kemudian tergabung dalam studi bahasa dan budaya Asia Timur dan Asia Timur Jauh, seperti bahasa dan budaya Cina, Jepang, Korea, dan Tibet. Alasan yang lebih serius ialah karena bahasa dan budaya Indonesia termasuk salah satu pelengkap dalam kurikulum studi, terutama studi Orientalis seperti Jurusan India, Cina. Jadi, bagi mereka, memilih bahasa Indonesia adalah sebuah pilihan yang sangat meringankan sebab mereka hanya mengambil program biennale, jadi dua tahun saja sehingga tidak usah belajar Sastra Melayu Klasik, yang mengharuskan juga untuk mempelajari tulisan Jawi untuk membaca naskah Melayu Klasik. Namun, pengalaman kami selama ini ialah setelah mengambil program biennale, tidak sedikit mahasiswa yang memutuskan untuk mengambil program 4 tahun yang membolehkan mereka untuk membuat skripsi dalam bidang studi Indonesia. Banyak juga yang akhirnya sampai mengambil 2 quadriennale walaupun keserjanaan mereka tetap untuk bahasa atau budaya lainnya. Sejak sekitar tahun 1997/1998, banyak mahasiswa dari Fakultas Ilmu Politik yang mengikuti kuliah studi Indonesia untuk melengkapi pengetahuan mereka dan menyiapkan skripsi yang berhubungan dengan studi Politik dan Sosial. Biasanya, untuk mereka, kami menawarkan program khusus dengan cara memberikan bahan bacaan atau daftar buku yang ada hubungannya dengan Ilmu Politik-Sosial. Perkembangan terakhir ini sangat terasa karena tidak jarang kami diminta untuk menjadi penyanggah skripsi mahasiswa dari Fakultas Ilmu Politik. Perlu dicatat juga ihwal bertambahnya minat dari Fakultas Sudi Islam. Sebagai catatan, sebelum dekade terakhir ini pengenalan Islam di Indonesia hampir tidak pernah mendapat perhatian.

Kendala

Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin sekali lagi kami harus mengulang, bahwa kekurang pahaman atau tak kenal maka tak sayang tadi merupakan kendala utama walaupun harus diakui bahwa situasi ini sudah sangat membaik. Kendala tradisi yang terputus, memang membuat kita agak kehilangan titik tolak-tak tahu dari mana harus mulai. Namun, sekarang ini pun sudah dapat diatasi dengan mengutamakan pengetahuan ilmu bumi, promosi pariwisata dan kegiatan kesenian, bagi para mahasiswa adalah mutlak sebagai langkah pertama sebelum lulus ujian masuk, paling sedikit harus menguasai ilmu bumi Indonesia.

Kendala lain, ialah bahan, materi atau buku-buku, termasuk kamus. Kami yakin kendala ini merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua pengajar di luar Indonesia. Hal yang sama tentu dihadapi juga oleh pengajar di negara lainnya yang masing-masing mempunyai sistem bahasa sendiri.

Tidak semua buku pegangan yang ada dapat dipakai untuk semua sasaran. Bahasa sasaran harus juga dijadikan bahan pertimbangan. Di samping tidak semua buku pegangan baik untuk dipakai. Misalnya saja, sebagian besar buku teks yang ada, bertolak dari bahasa Inggris sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan bahasa sasaran, misalnya bahasa Italia. Namun, masalah ini tentunya bukanlah suatu hal yang tidak dapat diatasi. Salah satu cara, biasanya pengajar menyiapkan catatan kuliah sendiri yang disesuaikan dengan sistem bahasa setempat. Jadi, catatan dan fotokopi masih merupakan keharusan. Buku-buku teks yang ada dan telah dipilih sebagai buku pegangan biasanya dipakai untuk latihan.

Kamus dwibahasa untuk bahasa Italia masih sangat sedikit. Yang terakhir terbit kamus dwibahasa Indonesia-Italia oleh Santa Maria⁴³ dan sebelumnya ada kamus dua jilid yang disusun oleh Padre Lorenzo Lini⁴⁴. Beberapa kamus kecil lain ialah kamus bahasa Melayu/Indonesia yang dijadikan satu oleh Soravia⁴⁵ dan kamus yang pernah dibuat oleh Kedutaan Besar Italia di Jakarta⁴⁶. Kamus Italia-Indonesia yang disusun oleh S. Faizah Soenoto R⁴⁷ terbit di Indonesia tahun 1996, dan edisi revisinya tahun 1999, serta cetakan ke III tahun 2002. Betapa pun masih penuh kekurangan. Dalam batas tertentu kamus-kamus ini telah membantu kelancaran kegiatan studi.

Jadi, jauh sebelum kendala tersebut di atas, kalau kita mau memahami mengapa studi Indonesia di Italia belum maju seperti di negara Eropa lainnya, salah satu sebabnya ialah studi Indonesia di Italia sejak lama berlangsung sebagai studi pribadi. Hal inilah yang menghambat kemajuan studi Indonesia. Studi pribadi pasti mengandung unsur positif karena ada ketekunan dan keseriusan, tetapi bisa menjadi negatif karena studi ini seolah-olah milik pribadi atau sekadar hanya hobby saja. Hal lainnya adalah karena menganggap bahwa ilmu ini adalah milik pribadi yang akan meng-

⁴³ Santa Maria, Luigi-Citro, Maria, *Dizionario Indonesiano-Italiano*, Is.I.A.O, Roma 1998

⁴⁴ Lini, Lorenzo, *Dizionario Italiano-Indonesiano*, Vol I dan *Indonesiano -Italiano*, Vol II, EMI, 1982

⁴⁵ Soravia, Giulio Hasan, *Dizionario Italiano-Malese/Indonesiano- Malese/ Indonesiano-Italiano*, Avallardi, 1995

⁴⁶ Kedutaan Besar untuk Indonesia, *Kamus Kecil Indonesia -Italia- Dizionario Italo-Indonesiano*, Jakarta 1979,

⁴⁷ S. Faizah Soenoto Rivai, *Kamus Italia-Indonesia-Disertai Tata Bahasa Italia Ringkas*, Gramedia, Jakarta 1996

akibatkan kurang toleransi terhadap peminat lainnya dan kemungkinan tidak memberikan peluang dan kesempatan untuk turut bersaing secara sehat. Mungkin ini merupakan salah satu sebab maka tidak banyak terbitan tentang studi Indonesia di Italia.

Akhirnya, satu kendala lain yang perlahan-lahan sudah mulai diatasi ialah masalah bahasa. Sebenarnya, terbitan atau tulisan tentang Indonesia di Italia, ada dan tidak juga terlalu sedikit. Akan tetapi, hampir semua ditulis dalam bahasa Italia. Akibatnya, tidak banyak yang mengetahui bahwa banyak terbitan yang unggul dan sangat bermanfaat untuk studi Indonesia. Tulisan-tulisan yang penting ini hampir tidak dikenal di luar Italia, terutama di Indonesia sendiri. Hal ini mulai diatasi karena beberapa majalah ilmiah--walaupun masih banyak pro dan kontra--telah menetapkan untuk memakai bahasa Inggris sebagai bahasa majalah ilmiah atau paling sedikit memuat ringkasannya dalam bahasa Inggris.⁴⁸ Kita berharap generasi baru akan lebih bersaing sehat demi peningkatan studi Indonesia di Italia.

Faktor Pendukung Usaha

Faktor pendukung usaha yang paling utama, sekali lagi sumber-daya manusia, yaitu usaha para pengajar sendiri. Misi yang kita emban adalah memperkenalkan budaya bangsa. Sampai tahun 1995 staf pengajarnya masih 3 orang sehingga dapat berbagi tugas pengajar bahasa, pengajar sastra dan budaya, serta pelatih kecakapan berbahasa. Akan tetapi, sejak tahun 1998 tinggal kami sendirian dan 2 tempat lain sudah dihapuskan dan untuk sementara belum ada tanda-tanda untuk menambah tenaga kerja lagi. Akibatnya, selain usaha pribadi, kerja sama dengan Pusat Studi Indonesia di negara Eropa lainnya, merupakan solusi yang unggul (lihat butir 4.3). Pendukung utama dalam tahun-tahun terakhir ini ialah kerja sama yang baik dengan Kedutaan Indonesia di Roma (lihat butir 4.2).

Simpulan

Sebagai simpulan, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di Italia dapat dikatakan positif. Minat dan perhatian Italia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sangat positif sehingga pembinaan dan tunjangan yang lebih intensif sangat diharapkan.

a. Kondisi dan Situasi

Meskipun kondisi dan situasi studi Indonesia di Italia masih dalam taraf pembinaan, hasilnya dapat dikatakan sama sekali tidak mengecewa-

⁴⁸ Beberapa tulisan A. Bausani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Melayu. Kami sendiri telah berkolaborasi dengan Dewan Bahasa Malaysia untuk menterjemahkan artikel A. Bausani

kan. Dengan partisipasi di kancah internasional dengan bermacam-macam makalah tentang studi Indonesia di Italia, Pusat Studi ini cukup dikenal di luar Italia, terutama di Eropa dan Malaysia. Pakar studi Indonesia berkebangsaan Italia pun mempunyai reputasi yang unggul di luar Italia. Dengan demikian, tradisi yang berkembang sejak berabad-abad rupanya sampai sekarang masih bisa diandalkan.

b. Saran dan Harapan

Pada kesempatan ini pula sekadar mengulang kembali pernyataan bersama para pengajar bahasa Indonesia di luar negeri pada Kongres Bahasa Indonesia V tahun 1988, tak ada salahnya kami ingin mengingatkan kembali bahwa pada waktu itu sebagian besar dari para pengajar bahasa dan budaya Indonesia di negeri asing sangat mendambakan adanya lembaga atau pusat kebudayaan Indonesia. Hal itu, tidak saja akan berdampak positif, tetapi pasti bisa menunjang peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia.

c. Penerjemahan

Sekadar saran lain ialah alangkah baiknya kalau dapat dilakukan penerjemahan beberapa karya tulis dari bahasa Italia agar tulisan ini dikenal juga di Indonesia.

Hal yang sama sudah dan sedang kami kerjakan juga di Italia. Misalnya, sebuah majalah sastra yang sangat bermutu sedang berusaha menerbitkan karya sastra dari seluruh dunia, termasuk Indonesia⁴⁹. Juga kami telah berkolaborasi untuk menambah butir nama atau karya Indonesia dalam Ensiklopedi Italia⁵⁰.

Akhir kata, semoga kerja sama yang telah dirintis berabad-abad yang lalu oleh O. Beccari, A. Pigafetta, E. Modigliani, G. Prampolini, A. Bausani, dan L. Santa Maria akan terus memperoleh kesinambungan dan Kongres Bahasa Indonesia sebagai sarana unggulan dan harapan untuk mencapai peningkatan kerja sama ilmiah dan persahabatan antara bangsa.

⁴⁹ majalah *POETICA* yang terbit di Napoli

⁵⁰ *Dizionario Enciclopedico Bompiani*, op. cit.

LAMPIRAN

Daftar beberapa skripsi sarjana dari Università degli Studi di Napoli L'Orientale

1. A. Mirabella, *Chairil Anwar un poeta dell'Angkatan '45*. 1970
2. Anna Merendino, *L'Islam in Indonesia*. 1976
3. Alessandra Sacchi, *Il sonetto nella letteratura malese-indonesiana in comparazione con il sonetto nella letteratura italiana, con riferimenti alle letterature olandese, portoghese e inglese*. 1986/87
4. Annalisa Sallusto, *Le problematiche dell'emigrazione interna in Indonesia (Transmigrasi) e Orang-orang Tran di Nh. Dini*. 1988/89
5. Caterina Michielli, *Il ruolo delle riviste femminile nella Letteratura contemporanea indonesiana*. 1989/90
6. Antonia Soriente, *Linguistica Indonesiana (perbandingan bahasa-bahasa Austronesia)* 1989
7. Elena Coletta, *Poesia come protesta sociale; RENDRA*. 1991/92
8. Assunta Montesano, *Mochtar Lubis: La "tigre" della Letteratura Indonesia*. 1991/92
9. Ferdinando Feniello, *Soewarsih Djojopoespito. Buiten het Gareel (1940), un romanzo indonesiano in lingua olandese*. 1992/93
10. Massimo Sarappa, *La figura dell'eroe culturale PANJI nella letteratura e nel teatro giavanese e malese*. 1993/94
11. Gabriella Ranno, *L'Attesa del Re Giusto: Il Messianesimo a Giava nel XIX e nel XX Secolo*. 1993/94
12. Maria Antonia Sgambati, *Sitor Situmorang: Poeta dei contrasti*. 1993/94
13. Marco Sbandi, *Pramoedya Ananta Toer ed il suo romanzo Keluarga Gerilya. L'internazionalismo della cultura indonesiana*. 1994/95
14. Maria Rachele Gambuti, *Gli aspetti letterari e storici nel romanzo 'Koelie' (1931 di Madelon Hermine Székély-Lilofs)*. 1994/95
15. Maria Grazia Giallonardo, *L'incontro tra due culture: Oriente e Occidente a confronto nel rapporto tra Abdullah e Raffles*. 1994/95
16. Cristina Bombasaro, *Riti Matrimoniali cinesi nei paesi del Sud-Est Asiatico*. 1992/93
17. Monica Menzione, *Bakdi Soemanto e il gruppo Yogya*. 1995/96
18. Gabriella De Leonardo, *Il fratello Asiatico: L'Immagine del Giappone nella letteratura indonesiana*. 1996

19. Gianfranco Vitolo, *Poesia Mbeling. Poesia Indonesiana Contemporanea anni '70*. 1996
20. Maria Grazia Giallonardo, *L'incontro tra due culture: Oriente e Occidente a confronto nel rapporto tra Abdullah e Raffles*. 1994/95
21. Loredana Gianotta, *H.B. Yassin critico letterario*. 1997/1998
22. Addolorata Caporasso, *Italia Meridionale e Asia Orientale. Presenze, apporti, suggestioni fra i secoli XVI-XVII*. 1998/99
23. Melania Gotto, *Pratiche matrimoniali tradizionali nella letteratura Tamil e Indonesiano: il matrimonio combinato*. 1998/99
24. Virginia Russo, *L'Immagine felle donne Indonesiane e giapponese nelle letterature e il suo ruolo nella società*. 1999/2000
25. Emilio Servo, *Indonesia, tra passato e futuro: Storia, politica ed economia del xx secolo in Indonesia*. 1999/2000
26. Boriello Maurizio, *Bhinneka Tunggal Ika: La rappresentazione dell'identità Nazionale nel cinema indonesiana*. 2000/01
27. Fabio D'Agostino, *Il ruolo del Turismo nello sviluppo regionale dell'Indonesia*. 2001/02
28. Sara Nunziata, *I problemi ambientali in una megapoli del SudEst Asiatico "Giacarta"*. 2000/01
29. Giovanna Chiarito, *La comunità cinese in Indonesia*. 2001/02
30. Antonia Rinaldi, *Kain Batik e Kain Tenun: Viaggio nell'Universo simbolico dei tessuti indonesiani*. 2000/01
31. Alesia Noce, *La ricerca delle emozioni nella letteratura indonesiana del periodo Balai Pustaka: Il romanzo "Siti Nurbaya"*. 2002/2003
32. Maria Giovanna Lombardi, *Bali. Dal Rito al Teatro*. 2001/02
33. Claudio Cozzolino, *Le Emozioni nella letteratura indonesiana contemporanea: Ayu Utami, identità e lingue*. 2001/02
34. Maurizio Petriccione, *Sensorialismo e sentimentalismo nella letteratura indonesiana contemporanea: Afrizal Malna e Zainal Muttaqien*. 2001/02
35. Raffaella Virna Lamberti, *"Il ruolo dell'investimento estero giapponese nello sviluppo economico dei Paesi del SudEst Asiatico"*. 2002/03
36. Angela Carnicella, *Letteratura indonesiana durante l'occupazione giapponese*. 2002/03
37. Viviana La Tona, *Gli stati di trance e possessione nella danza balinese*. 2002/03

38. Francesco Napolitano, *Un "Ars Amandi" giavanese*. Testo e traduzione del codice Lor 4058 (Anggulipravesa) dal Legatum Warnerianum della Biblioteca Universtaria di Leida. 2002/03
39. Licia Pizzi, *Nyai Loro Kidul, creazione ed Evoluzione di un mito*. L'immagine della mitologia femminile nella cultura indonesiana. 2002/03
40. Nadia Colella, *Putu Wijaya e il Tontonan* Fra tradizione e modernità. 2002/03

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2003
Judul Makalah : Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia di Italia
Pemakalah : Faisah Sunoto Rivai
Pemandu : Suparno
Pencatat : 1. Dhanu Priyo Prabowa
2. Mustamin Basran

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Zainuddin Hakim (Balai Bahasa Ujung Pandang)
- Apakah bahasa Indonesia yang diajarkan di Italia itu bahasa Indonesia baku?
 - Apa alasan mahasiswa Italia tertarik mempelajari bahasa Indonesia?
 - Apakah mahasiswa mengalami kesulitan ketika mempelajari bahasa Indonesia?

Jawaban:

- Bahasa Indonesia yang diajarkan kepada mahasiswa Italia adalah bahasa Indonesia baku. Pada awalnya diajarkan dalam jangka waktu 2--4 tahun. Namun, sekarang dipersingkat menjadi 1--3 tahun. Di samping itu, mereka diharuskan belajar sastra Melayu klasik dan huruf Jawi.
 - Untuk bekal melamar kerja, menjadi pegawai Departemen Luar Negeri Italia, atau menyukai bahasa-bahasa timur (Indonesia).
 - Mahasiswa Italia sering mengalami kesulitan mempelajari bahasa Indonesia karena adanya pengaruh bahasa daerah di dalam bahasa Indonesia. Diperlukan adanya perubahan interaksi proses belajar mengajar di kelas untuk mengimplementasikan KBK. Jumlah siswa maksimal untuk satu kelas merupakan suatu masalah dilematis. Hal itu merupakan tanggung jawab manajemen sekolah.
2. **Pertanyaan:** Prof. Diemroh Ikhsan, M.A., Ph.D. (Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya)
- Bagaimana posisi bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa timur lainnya?
 - Upaya apa saja yang dilakukan dalam kaitannya dengan pengajaran bahasa Indonesia di Italia?

Jawaban

- Dibandingkan dengan bahasa Cina, India, dan Urdu, bahasa Indonesia termasuk sangat sedikit peminatnya. Setiap tahun rata-rata mahasiswa Italia yang belajar bahasa Indonesia berjumlah 40 orang.

Selain bahasa, sastra Indonesia juga diajarkan. Sekarang mata kuliah bahasa Indonesia diubah menjadi mata kuliah kebudayaan.

- b. Selain memberikan pengajaran bahasa Indonesia, kami juga memberikan pelayanan informasi apa pun tentang Indonesia. Selain itu, kami juga memberikan pelayanan dan bantuan penerjemahan.

3. **Pertanyaan:** Dra. Moon Hidayati, M.Hum. (STKIP, Gorontalo)

- a. Dengan kurikulum apakah bahasa Indonesia diajarkan di Italia?
- b. Bagaimana caranya agar bahasa Inggris mudah diajarkan di Indonesia?
- c. Dengan metode apa bahasa Indonesia diajarkan di Italia?

Jawaban:

- a. Berdasarkan buku-buku BIPA dan buku-buku bahasa Indonesia dari negara-negara lain (Singapura, Amerika). Buku-buku dari negara tersebut hanya dipergunakan sebagai latihan. Semua materi pelajaran disampaikan dalam bahasa Italia.
- b. Saya tidak mengajar bahasa Inggris.
- c. Bahasa Indonesia diajarkan di Italia tidak dengan metode khusus.

4. **Pertanyaan:** Agus Dwiyanto (Pusat Pelatihan Bahasa Departemen Pertahanan, Jakarta)

- a. Apakah pelajaran bahasa Indonesia di Italia diberikan melalui tingkatan-tingkatan tertentu?
- b. Bagaimana keterampilan dan pengetahuan mahasiswa Italia dalam mempelajari bahasa Indonesia?

Jawaban:

- a. Tidak ada penjenjangan/tingkatan yang utama mereka menguasai bahasa Indonesia secara teoretis.
- b. Setiap mahasiswa harus memiliki keterampilan dan pengetahuan berbahasa Indonesia, misalnya tentang tata bahasa.

5. **Pertanyaan:** Prof. Dr. Mansoer Pateda (IKIP Negeri Gorontalo)

- a. Mereka yang lulus, biasanya bekerja sebagai apa? Apakah di Italia ada juga pengangguran?
- b. Apakah di Italia ada bahasa daerah dan bahasa nasional?
- c. Bagaimana pandangan mahasiswa bahasa Italia terhadap Indonesia?
- d. Bagaimana cara mengajarkan sastra/bahasa Indonesia di Italia?
- e. Apakah di Italia ada universitas terbuka?

Jawaban:

- a. Bekerja yang ada kaitannya dengan Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan nilai tambah untuk melamar pekerjaan. Di Italia ada juga pengangguran
- b. Di Italia juga ada bahasa daerah (Sicilia, Sardenia, dan Napoli). Bahasa-bahasa tersebut berbeda dengan bahasa Italia yang resmi

terutama pada logatnya.

- c. Pandangan orang Italia, terhadap Indonesia positif.
- d. Melalui berbagai cara, misalnya melalui kegiatan memasak. Di samping itu, juga diberikan pelajaran sastra Indonesia, khususnya sejarah sastra.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI AUSTRALIA: KEADAANNYA SEKARANG DAN PROSPEK MASA DATANG

Ismet Fanany

Deakin University, Melbourne, Australia

Waktu panitia Kongres bahasa Indonesia Ke-8 meminta saya membicarakan berbagai seluk-beluk pengajaran bahasa Indonesia di Australia, saya melihatnya sebagai sebuah tantangan yang besar dan sekaligus menggembirakan. Tantangan itu sangat besar karena pengajaran bahasa Indonesia di negara tetangga penting di selatan Indonesia itu sangatlah meluas. bahasa Indonesia diajarkan dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi dan dipelajari ratusan ribu anak-anak Australia setiap tahunnya. Permintaan itu sekaligus menggembirakan karena ia mencerminkan perhatian Pusat Bahasa terhadap pengajaran bahasa Indonesia di negara itu. Maka undangan itu saya sambut dengan besar hati dan hati-hati.

Pembicaraan di dalam kertas kerja ini akan dibagi kepada beberapa bagian: latar belakang umum, keadaan pengajaran bahasa Indonesia di Australia saat ini, beberapa masalah yang dihadapi, dan pemikiran tentang prospek masa datang, termasuk tentang kemungkinan kerja sama berbagai pihak di Indonesia dengan sekolah-sekolah dan institusi-institusi yang mengajarkan bahasa Indonesia di Australia.

Latar Belakang Umum

Menurut Neville Saunders dalam ceramahnya pada konferensi *Australian Society for Indonesian Language Educators* (ASILE) di Adelaide bulan Juli yang lalu, bahasa Indonesia mulai diajarkan di tingkat universitas di Australia pada tahun 1959 di Sydney University. Pada tingkat SMU, pengajaran bahasa Indonesia mulai di sekolah St Mary's High, juga di kota Sydney, pada tahun 1964. Tidak diketahui dengan pasti, kata Saunders, kapan dan di mana bahasa Indonesia mulai diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih rendah. Pada saat ini, bahasa Indonesia diajarkan mulai dari TK sampai tingkat perguruan tinggi.

Kalau dibandingkan dengan kebanyakan negara di luar Indonesia yang terdapat pengajaran bahasa Indonesia, terutama sekali beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat, Australia termasuk yang terlambat memulainya. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan tahun bahasa Indonesia mulai diajarkan di beberapa negara dunia:

TABEL 1
TEMPAT DAN TAHUN BAHASA INDONESIA MULAI DIAJARKAN
DI BEBERAPA NEGARA¹

Negara	Tahun
Amerika Serikat	1880-an
Australia	1959, universitas; 1964, SMU
Belanda	Pertengahan abad 19
Inggeris	1967
Jepang	1908
Jerman	1931
Korea Selatan	1964
Perancis	1841
RRC	1950

Tabel di atas tidaklah menyebutkan semua negara yang sekarang ini mengajarkan bahasa Indonesia. Ia diberikan sebagai contoh dan perbandingan pengajaran di Australia dan beberapa tempat di dunia.

Pada saat ini Australia satu-satunya negara di luar Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, di samping di universitas. bahasa Indonesia malah menjadi salah satu bahasa yang dianggap penting oleh pemerintah Australia. Di dalam *Review of the Commonwealth Languages Other Than English Programme*, Erebus Consulting Partners (2002) menyarankan supaya bahasa Indonesia dijadikan salah satu bahasa asing yang diberi prioritas .

Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia Dewasa Ini

Untuk meninjau pengajaran bahasa Indonesia di Australia saat ini, tiga hal akan dibicarakan: jumlah pelajar dan mahasiswa, perbandingannya dengan jumlah pelajar dan mahasiswa bahasa lain, dan keadaan pengajaran bahasa Indonesia kini.

Menurut laporan *Review of the Commonwealth Languages Other Than English Programme* di atas, pada tahun 2000 lebih dari 250 ribu anak-anak sekolah di seluruh Australia belajar bahasa Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 1994 (hampir 100 ribu pelajar) dan kenaikan yang pesat dari tahun 1997 (200 ribu pelajar). Angka-angka ini mendudukkan bahasa Indonesia di

¹ Sumber data di dalam tabel ini adalah sebagai berikut (menurut urutan negaranya): AS, Collins, 1998; Australia, Saunders, 2003; Belanda, Steinhauer, 1998; Inggeris, Kratz, 1998; Jepang, Alwi, 1995; Jerman, Nothofer, 1998; Korea Selatan, Chung, 1998; Perancis, Chamberts-Loir, 1998; dan RRC, Liang, 1988.

peringkat kedua bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa Asia lainnya sesudah Bahasa Jepang dan jauh di atas bahasa utama Asia lainnya, bahasa Cina. Pelajar bahasa Jepang mencatat angka hampir 200 ribu pada tahun 1994, lebih 250 ribu pada tahun 1997, dan mencapai sekitar 420 ribu pada tahun 2000. Dibandingkan dengan bahasa Cina, pelajar bahasa Indonesia jauh lebih banyak. Pada tahun 2000, pelajar bahasa Cina di sekolah-sekolah Australia kurang dari 100 ribu, sedangkan pada tahun 1994 jumlah anak-anak yang belajar bahasa itu sudah hampir 50 ribu. Dengan kata lain, bahasa Indonesia bukan saja menempati tempat kedua dari segi jumlah pelajar, tetapi perkembangannya paling pesat di antara tahun 1994-2000 bila dibandingkan dengan bahasa Asia mana pun.

Sekalipun secara sepiantas angka-angka itu mengesankan, bila dilihat lebih jauh, kedudukan bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia, di sekolah-sekolah Australia tidaklah terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa kelas 12, sama dengan kelas tiga SMU di Indonesia, merupakan kelas yang paling penting, termasuk dalam arti mata pelajaran yang dipilih pelajar. Berbeda dengan di Indonesia, anak kelas 12 Australia diwajibkan hanya mengambil satu mata pelajaran dari lima mata pelajaran yang harus mereka ambil, yaitu bahasa Inggris. Selain itu, mereka boleh memilih. LOTE atau bahasa selain bahasa Inggris adalah salah satu mata pelajaran yang boleh mereka pilih itu. Bila dilihat pada tingkat ini, "kepopuleran" bahasa Indonesia, dan LOTE pada umumnya, tampak menurun dengan tajam. Kalau ketiga bahasa Asia tadi dibandingkan pada tingkat ini, maka bahasa Indonesia menduduki urutan ketiga.

Untuk gambaran lebih jelas, di bawah ini diberikan angka pelajar 10 besar LOTE dari tahun 1995--2000.

TABLE 2
JUMLAH PELAJAR 10 BESAR LOTE DI AUSTRALIA
DI KELAS 12, 1995--2000
(angka dalam kurung menunjukkan persentase dari seluruh pelajar LOTE)

Tahun Ranking	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Jepang 5032 (21)	Jepang 5381 (22)	Jepang 5287 (21)	Jepang 5524 (22)	Jepang 5198 (22)	Jepang 5292 (22)
2	Perancis 4311 (18)	Perancis 4201 (17)	Perancis 3974 (16)	Perancis 4204 (17)	Perancis 4034 (17)	Perancis 4082 (17)
3	Jerman 2657 (11)	Jerman 2674 (11)	Jerman 2728 (11)	Jerman 2791 (11)	Jerman 2655 (11)	Cina 2935 (12)
4	Cina 2469 (10)	Cina 2361 (10)	Cina 2478 (10)	Cina 2692 (10)	Cina 2569 (11)	Jerman 2750 (11)
5	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Indonesia

	2227 (9)	2100 (9)	2141 (9)	2061 (8)	1924 (8)	2089 (9)
6	Indonesia 1451 (6)	Indonesia 1762 (7)	Indonesia 2000 (8)	Indonesia 2003 (8)	Indonesia 1820 (8)	Italia 1959 (8)
7	Yunani 1433 (6)	Yunani 1366 (5)	Yunani 1322 (5)	Yunani 1236 (4)	Yunani 1037 (4)	Yunani 954 (4)
8	Vietnam 1174 (5)	Vietnam 1038 (4)	Vietnam 868 (4)	Spanyol 785 (3)	Vietnam 782 (3)	Vietnam 678 (3)
9	Spanyol 728 (3)	Spanyol 767 (3)	Spanyol 727 (3)	Vietnam 774 (3)	Spanyol 785 (3)	Spanyol 626 (3)
10	Arab 524 (2)	Arab 589 (2)	Arab 516 (2)	Arab 628 (2)	Arab 516 (2)	Arab 545 (2)
Jumlah pelajar LOTE	22.214	24.670	24.755	25.570	24.051	24.562
% pelajar LOTE di kelas 12	14,05	14,45	14,33	14,43	13,18	13,22

Sumber: *Outcomes and National Reporting Branch*, DETYA,² seperti dikutip di dalam *Review of the Commonwealth LOTE Programme*, 2002, hal. xii.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1995 bahasa Indonesia berada pada peringkat keenam dari segi jumlah pelajar yang mempelajarinya di kelas 12, dengan jumlah pelajar sebanyak 1451 atau 6% dari seluruh pelajar di Australia yang belajar LOTE di kelas 12 pada tahun itu. Pada tahun 2000, kedudukan Indonesia naik ke urutan kelima dengan 2089 pelajar atau 9% dari seluruh pelajar LOTE di kelas 12 pada tahun itu. Akan tetapi, sejak tahun 1997 angka kenaikan itu kecil jumlahnya.

Tabel 2 juga memperlihatkan penurunan persentase anak-anak kelas 12 yang memilih LOTE, dari 14,05% pada tahun 1995 menjadi 13,22% pada tahun 2000 sekalipun jumlahnya meningkat dari 22.214 pelajar tahun 1995 menjadi 24.562 pada tahun 2000. Sementara itu, bahasa Indonesia memperlihatkan kecenderungan meningkat dan bahasa Jepang dan Perancis tetap menduduki tempat teratas dengan persentase yang stabil.

Di atas dikatakan bahwa dalam pengajaran LOTE, termasuk bahasa-bahasa Asia, di Australia ada perbedaan jumlah pelajar yang mencolok pada kelas TK-10 dan kelas 11--12. Sebelum hal ini dibicarakan lebih lanjut, angka-angka di dalam Tabel 3 berikut menggambarkan perbedaan mencolok tersebut.

² DETYA [Department of Education, Training and Youth Affairs-Departemen Pendidikan, Pelatihan dan Kepemudaan] sekarang ini telah berubah nama menjadi DEST (Department of Education, Science and Training-Departemen Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Pelatihan).

TABLE 3
JUMLAH ANAK-ANAK AUSTRALIA YANG BELAJAR SALAH SATU BAHASA
ASIA DARI TK-KELAS 12 PADA TAHUN 2000*

Kelas	Jumlah pelajar	Pelajar yang belajar salah satu bahasa Asia	Persentase pelajar yang belajar salah satu bahasa Asia
TK	192.927	43.043	22,3
Kelas 1	269.331	53.502	19,9
Kelas 2	268.446	51.521	19,2
Kelas 3	266.071	67.913	25,5
Kelas 4	266.378	76.909	28,9
Kelas 5	263.712	97.489	37,0
Kelas 6	261.185	102.566	39,3
Kelas 7	256.843	105.358	41,0
Kelas 8	255.707	77.402	30,3
Kelas 9	255.957	35.417	13,8
Kelas 10	251.461	21.606	8,6
Kelas 11	218.402	9.695	4,4
Kelas 12	185.810	8.135	4,4
Jumlah	3.212.230	750.556	23,4

Sumber: *Review of the Commonwealth LOTE Programme*, 2002, hal. xiii.

Catatan: * Jumlah pelajar di kelas 12 di dalam Tabel 3 ini tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam Tabel 2. Tidak jelas yang mana yang benar. Usaha untuk mencari penjelasannya dari Erebus Consulting Partners belum mendapat jawaban. Bagaimanapun, kecenderungan umum yang terdapat di dalamnya tetap benar.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat di dalam Tabel 3 di atas. Pada tahun 2000, 23,4% atau $\frac{3}{4}$ juta lebih anak sekolah Australia belajar salah satu bahasa Asia. Persentase tertinggi adalah pada kelas 5, 6 dan 7, yaitu masing-masingnya 37,0%, 37,3%, dan 41,0%. Pada kelas 11 dan 12, angka itu rontok menjadi 4,4% saja, atau dari 105.358 pelajar di kelas 7 menjadi hanya 8.135 pelajar di kelas 12. Jumlah dan persentase yang begitu rendah di kelas 12 barangkali disebabkan oleh beberapa hal. Seperti dikatakan di atas, LOTE wajib dipelajari pada tahun-tahun tertentu di antara kelas 1-9, tergantung negara bagiannya. Tetapi LOTE tidak diwajibkan di kelas 11-12. Angka di atas dapat berarti bahwa sebenarnya pelajar Australia tidak senang belajar LOTE. Bila diberi kesempatan memilih, sedikit saja di antara mereka yang memilihnya.

Perbedaan mencolok di kelas 11--12 dibandingkan kelas-kelas lain itu dapat pula berarti bahwa pengajaran LOTE di sekolah-sekolah tidak baik sehingga anak-anak enggan mengambilnya bila tidak diwajibkan. Pengajaran yang tidak baik itu memang sering terdengar dikeluhkan oleh berbagai pihak di Australia di dalam berbagai konferensi dan seminar bahasa. Masalah yang dihadapi pengajaran LOTE ini akan dibicarakan lebih lanjut nantinya pada bagian khusus. Keadaan yang semacam ini tidak terkecuali di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia.

Di tingkat universitas, bahasa Indonesia diajarkan di 25 dari 37 universitas yang mengajarkan LOTE. Bentuk dan tingkat pengajaran di ke-25 universitas itu tidak sama. Tabel 4 di bawah ini memberikan daftar universitas yang menawarkan bahasa Indonesia.

TABLE 4
UNIVERSITAS AUSTRALIA YANG MENGAJARKAN
BAHASA INDONESIA SERTA BENTUK DAN TINGKAT PENGAJARANNYA†

Universitas	S1	Hons	Masters	PhD	Diploma	Grad Diploma	Lainnya
Adelaide	*						
ANU	v	v	v	V	v	v	
Charles Sturt	1, 2						
Cowan							E
Curtin	v	v	v	V		v	GC
Deakin	v	v	P	P			
Griffith	v	v	v	V			
La Trobe	v	v	v	V	v	v	
Macquarie	1y, 2y						
Melbourne	v	v	v	V	v	v	
Monash	v	v	v	V	v	v	
Murdoch	v	v	v	V	v	v	v
NSW	v	v	v	V		v	
NTU	v					v	
QUT	v	v					
Sydney	v	v	v	V	v	v	v
Tasmania	v						
UNE	v	v	v	V	v	v	v

UQ	v	v	v	V	v	v *	
USQ	v	P	P	P	P	v	
UWA	v	v	v	V		v	v
UWS Macarthur	v	v	v	V		v	
VUT	v						
RMIT	v@						
UTS	v@						

Sumber: Australian Academy of the Humanities (2000) *Subjects of Small Enrolment in the Humanities: A Report by the Australian Academy of the Humanities*, hal. 60-61

Catatan: † Beberapa institusi tidak ada dalam daftar, yang terutama di antaranya Flinders dan Australian Defence Force Academy; Hons = Honours; * = bekerja sama dengan universitas lain; [nomor] = tingkat pengajaran; E = elektif; GC = graduate certificate; P = tergantung permintaan; y = dosen didatangkan dari tempat lain; @ = mahasiswa tidak dikelompokkan menurut tingkat atau masa belajar tetapi menurut keterampilan; ANU = Australian National University; NSW = University of New South Wales; NTU = Northern Territory University; QUT = Queensland University of Technology; UNE = University of New England; UQ = University of Queensland; USQ = University of Southern Queensland; UWA = University of Western Australia; UWS = University of Western Sydney; VUT = Victoria University of Technology; RMIT = Royal Melbourne Institute of Technology; UTS = University of Technology Sydney

Tabel 4 di atas memperlihatkan banyak bentuk keberbagaian. Ada universitas yang hanya mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sarjana muda (S-1) saja, ada yang sampai ke tingkat yang lebih tinggi seperti Honours, Masters maupun Ph.D. Selain itu, ada pula yang memberikan kuliah-kuliah khusus untuk mendapatkan sertifikat ataupun diploma. Kebanyakan universitas mengajarkan bahasa Indonesia dengan cara yang sama dengan mata kuliah lainnya, yaitu dengan dosen yang mereka angkat sendiri, tetapi ada pula universitas (Adelaide, misalnya) yang mengajarkannya dengan bekerja sama dengan universitas lain. Universitas Macquarie mendatangkan dosen dari tempat lain. Di dalam pengajaran, sebagian besar universitas menggunakan pengelompokan mahasiswa berdasarkan tingkat atau tahun, tetapi dua universitas, RMIT dan UTS, menggunakan keterampilan sebagai pedoman pengelompokan.

Sebenarnya keanekaragaman pengajaran bahasa Indonesia di tingkat universitas di Australia lebih banyak lagi dari yang terkandung di dalam Tabel 4 itu. Ada pula universitas, misalnya, yang mengadakan latihan khusus untuk guru-guru bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Deakin

merupakan salah satu universitas semacam itu. Ini dikerjakan di luar kelas biasa, seringkali pada jam-jam sesudah sekolah keluar atau pada akhir minggu. Contoh hal lain yang tidak bisa dilihat dari tabel di atas adalah cara mengurus mahasiswa yang sebelumnya belajar bahasa Indonesia di sekolah, terutama di kelas 11 dan 12. Ada universitas yang membuat kelas khusus untuk mereka, tetapi ada pula universitas yang mengadakan seleksi di awal tahun. Ini dilakukan bersama mahasiswa yang terlibat. Dengan persetujuan kedua belah pihak, ada di antara mereka yang ditempatkan di tingkat satu dan ada pula di tingkat dua, dan mereka dicampurkan dengan mahasiswa lainnya. Keberbagaian yang tidak kalah besarnya adalah menyangkut bahan dan cara pengajaran yang dipakai, penggunaan teknologi, dan sebagainya.

Jumlah mahasiswa juga berbeda-beda di setiap universitas itu. Jumlah itu tidaklah banyak. Di Deakin, misalnya, jumlah mahasiswa pada tahun 2003 ini sekitar 300 orang, yang terdiri dari mahasiswa biasa, mahasiswa jarak jauh, dan kelas khusus untuk guru-guru sekolah. Jumlah ini mencakup tingkat satu, dua, dan tiga, dan mahasiswa di dalam program Honours. Deakin saat ini memiliki mahasiswa bahasa Indonesia terbanyak di Australia.

Kalau ketiga bahasa utama Asia itu (Cina, Indonesia dan Jepang) dibandingkan, kelihatan bahasa Indonesia di tingkat universitas menempati urutan ketiga, baik dari sudut pandang jumlah universitas yang mengajarkannya maupun jumlah mahasiswa yang mengambilnya. Table 5 berikut memberikan gambaran yang terperinci.

TABEL 5
UNIVERSITAS YANG MENGAJARKAN BAHASA CINA, INDONESIA DAN
JEPANG SERTA JUMLAH MAHASISWANYA
PADA TAHUN 2001 (DALAM EFTSU†)*

Universitas	Cina	Indonesia	Jepang
ACU			20
Adelaide	73	Flinders	93
ANU	56	45	87
Ballarat	1		25
Bond	10		16
Canberra	12		27
Charles Sturt	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
Curtin	32	28	48
Deakin	69	90	
Edith Cowan	16	8	62
Flinders	Adelaide	34	Adelaide
Griffith	82	21	213
James Cook			39
La Trobe	40	30	73
Macquarie	92	Sydney	105

Melbourne	130	53	186
Monash	86	25	217
Murdoch	15	23	35
Newcastle	11		29
NSW	147	20	203
NTU		20	
QUT	Griffith/Queensland	11	63
RMIT	21	3	52
Southern Cross			8
Sydney	123	52	193
Tasmania	36	32	50
South Astralia	Adelaide	Flinders	32
UCQ			53
UNE	30	40	51
UQ	76	8	172
USQ	8	16	
UTS	91	Sydney	83
UWA	20	15	47
UWS	33	5	50
VUT	24	11	36
Wollongong			34

Sumber: Asian Studies Association of Australia (2002) *Maximizing Australia's Asia Knowledge: Repositioning and Renewal of a National Asset*, hal. 68

Catatan: † EFTSU = *Equivalent Full Time Student Unit* merupakan perhitungan jumlah mahasiswa yang rumit, tetapi secara kasar dapat dikatakan 1 EFTSU sama dengan delapan mahasiswa; * Tidak ada informasi diberikan untuk Charles Sturt; petak yang dikosongkan berarti bahasa yang bersangkutan tidak diajarkan; dan bila nama sebuah universitas diberikan di tempat angka, ini berarti universitas itulah yang mengajar dan menerima pendaftaran; ACU = Australian Catholic University; ANU = Australian National University; NSW = University of New South Wales; NTU = Northern Territory University; QUT = Queensland University of Technology; UCQ = University of Central Queensland; UNE = University of New England; UQ = University of Queensland; USQ = University of Southern Queensland; UWA = University of Western Australia; UWS = University of Western Sydney; VUT = Victoria University of Technology; RMIT = Royal Melbourne Institute of Technology; UTS = University of Technology Sydney

Sebanyak 32 dari universitas yang mengajarkan sedikitnya satu dari ketiga bahasa Asia itu mengajarkan bahasa Jepang, 29 mengajarkan bahasa Cina, dan 26 mengajarkan bahasa Indonesia. Empat universitas mengajarkan bahasa Indonesia dengan bekerja sama dengan satu atau lebih universitas lain, tiga universitas melakukan hal serupa dalam mengajarkan bahasa Cina, dan hanya satu universitas saja yang melakukan hal itu dalam pengajaran bahasa Jepang. Jumlah mahasiswa tertinggi dalam bahasa

Jepang tercatat sebanyak 217 EFTSU (Monash), bahasa Cina 147 EFTSU (UNSW), sedangkan bahasa Indonesia hanya 90 (Deakin).

Oleh karena itu, dalam banyak hal, bahasa Indonesia jauh berada di bawah dua bahasa utama Asia lainnya. Setelah peristiwa beruntun sesudah kejadian 11 September, yaitu pengeboman di Bali, pengadilan Amrozi dan Abu Bakar Ba'asyir, pengeboman hotel Marriott, pengajaran bahasa Indonesia menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Ini akan dibicarakan lebih lanjut nanti.

Beberapa Masalah yang Dihadapi

Mengingat begitu meluasnya pengajaran bahasa Indonesia di Australia, persoalan yang dihadapi banyak sekali: biaya, pengadaan dan pelatihan staf pengajar terutama di sekolah-sekolah, bahan ajar, minat yang menurun akhir-akhir ini karena keadaan di Indonesia dan keadaan hubungan Indonesia-Australia, persepsi masyarakat Australia tentang Indonesia, dan sebagainya. Beberapa persoalan itu merupakan persoalan umum yang dihadapi oleh semua LOTE di Australia, misalnya persoalan biaya dan pengadaan dan pelatihan guru. Akan tetapi, ada pula masalah yang merupakan masalah unik Indonesia, misalnya masalah persepsi dan keadaan hubungan Indonesia-Australia saat ini.

Tidaklah mungkin membicarakan semua masalah itu dengan mendalam di dalam kertas kerja ini. Pembicaraan di sini akan dititikberatkan pada masalah-masalah yang lebih merupakan masalah yang dihadapi pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia. Akan tetapi, di sana-sini, bila dianggap relevan, masalah lain itu juga akan disinggung.

Yang penting dalam membicarakan berbagai persoalan pengajaran bahasa Indonesia di Australia ini adalah implikasi persoalan itu terhadap kerja sama Indonesia-Australia yang lebih erat dalam usaha pemecahannya. Sekalipun Indonesia berdekatan, baik secara geografis maupun dalam arti hubungan kedua negara, peranan yang dimainkan pihak Indonesia saat ini dalam pengajaran bahasa Indonesia di Australia sangatlah kecil, kalau ada, baik peranan pribadi, institusi, organisasi, maupun pemerintah. Ini lebih terasa lagi mengingat begitu meluasnya bahasa Indonesia diajarkan di negara itu. Kalau dilihat di semua negara yang mengajarkannya di luar Indonesia, bahasa Indonesia mempunyai tempat istimewa di Australia. Tidak ada negara selain Australia yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, selain di universitas. Sangatlah disayangkan perhatian berbagai pihak di Indonesia dalam usaha pengembangan dan penyempurnaan pengajaran bahasa Indonesia di negara itu hampir tidak ada.

Persoalan pertama dan paling utama yang dihadapi pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia di Australia saat ini adalah persoalan biaya. Pemerintah Australia telah mengurangi biaya pengajaran bahasa pada

umumnya secara drastis. Pendanaan adalah salah satu aspek yang paling rumit dan mempengaruhi seluruh aspek pendidikan termasuk LOTE. Oleh karena itu, ia tidak akan dibicarakan secara terperinci, tetapi cukup dikatakan bahwa, pada konferensi ASILE yang disebutkan di awal makalah ini, masalah dana merupakan masalah yang dirasakan semua sekolah dan universitas. Ada program yang terancam keberadaannya. Ada program yang terpaksa mengurangi kegiatannya dan banyak dampak lainnya.

Masalah pendanaan ini disebutkan karena ia punya dampak pada hampir semua aspek pengajaran. Salah satu dampak penting yang patut disebutkan di sini adalah terhadap staf pengajar. Persoalan yang menyangkut staf pengajar ini termasuk jumlah dan tingkat keterampilan. Ini terutama sekali terasa di sekolah-sekolah. Akan tetapi, universitas juga makin lama makin merasakan berkurangnya staf pengajar. Deakin, misalnya, lima tahun yang lalu mempunyai empat staf penuh, ditambah dua mahasiswa pascasarjana yang masing-masingnya mengajar enam jam seminggu, dan satu dosen tamu dari Indonesia atau satu atau dua staf tidak tetap. Sekarang ini Deakin hanya mempunyai tiga staf penuh dan dua staf tidak tetap, sedangkan jumlah mahasiswanya hanya sekitar 13 EFTSU saja lebih sedikit dari lima tahun yang lalu itu.

Menurut *A Report by the Australian Academy of the Humanities* yang disebutkan di atas, di antara tahun 1997-99 saja, universitas di seluruh Australia kehilangan sebanyak 88 staf pengajar LOTE, lima di antaranya di dalam program bahasa Indonesia. Tekanan dana ini juga punya bentuk lain. Staf pengajar yang masih ada terpaksa memikul beban mengajar yang jauh lebih berat.

Di sekolah-sekolah, tekanan dana ini juga menjelma dalam berbagai bentuk. Banyak sekolah terpaksa menghentikan mata pelajaran bahasa Indonesia mereka karena tidak ada guru. Sekolah-sekolah yang ingin memperkenalkan mata pelajaran bahasa Indonesia tidak jadi melakukannya. Tidak kalah pentingnya, pelatihan guru-guru bahasa Indonesia terhenti. Di Victoria, misalnya, tahun 2003 buat pertama kali Deakin tidak menerima kelas baru untuk guru karena Departemen Pendidikan negara bagian itu tidak lagi diberi dana oleh pemerintah pusat atau menyediakan dana negara bagian untuk kelas baru. Tahun 2003 ini Deakin hanya melanjutkan kelas yang sudah ada, itu pun terancam kelanjutannya tahun 2004 nanti.

Persoalan penting kedua adalah penekanan pengajaran bahasa di Australia, termasuk bahasa Indonesia, pada kegunaannya sebagai alat pencari kerja. Dikatakan ini menjadi persoalan adalah karena penekanan yang terlalu besar, nyaris menjadi alasan satu-satunya. Makna akademik, misalnya, hampir tidak terdengar. Belajar bahasa untuk belajar kesusasteraan atau linguistik jarang sekali dibicarakan. Universitas mengatakan belajar sebuah bahasa akan menolong seorang tamatan mencari kerja. Itu saja. Oleh karena itu, mahasiswa memilih kuliah bahasa dengan pikiran begitu, benar

atau tidak, tepat atau tidak. Sesudah peristiwa internasional beruntun sejak peristiwa 11 September itu, persepsi di Australia adalah bahwa belajar bahasa Indonesia semakin tidak penting, semakin tidak mungkin menolong mereka mencari pekerjaan.

Yang menarik, penekanan yang begitu besar terhadap alat untuk mencari kerja itu tidaklah terdapat di negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, sesudah Perang Dunia I, belajar bahasa asing dilihat sebagai salah satu cara mengabdikan kepada negara dan dapat digunakan dalam pertahanan nasional (Olmstead, 1921; Wann, 1936; Carter, 1942; Welles, 2002). Pikiran dan perasaan semacam itu berlanjut sampai masa perang dingin sesudah Perang Dunia II. Oleh karena itu, kelas bahasa Rusia di universitas AS penuh pada masa perang dingin, tetapi sekarang ini menurun dan digantikan oleh bahasa Arab. Reaksi serupa terhadap peristiwa internasional tidak tampak di Australia.

Pandangan lain terhadap manfaat belajar bahasa asing di AS yang sudah lama dianut masyarakat negara itu adalah untuk mengembangkan apresiasi mahasiswa dalam bidang humaniora dan kapasitas intelektual mereka (lihat misalnya Purin, 1920; Martinez, 1938; Kenyon, *at al.*, 2000). Di Amerika juga ada pandangan bahwa belajar bahasa asing akan memperbaiki kemampuan anak dalam bahasa ibunya dan menolong mereka berpikir secara lebih teratur (Ogden, 1920; Thompson, 1936; Lantolf dan Sunderman, 2001). Di dalam konsep pengajaran bahasa asing di Australia, semua alasan ini tidak tampak, baik pada pihak yang merancang pengajaran bahasa asing itu seperti pemerintah atau institusi lain maupun dalam masyarakat, orang tua atau pun anak-anak yang belajar bahasa itu. Untuk pembicaraan lebih lanjut tentang asumsi pengajaran bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia di Australia ini (lihat Fanany, 2003).

Persoalan ketiga yang dihadapi pengajaran bahasa Indonesia di Australia saat ini adalah persoalan persepsi. Indonesia dianggap tidak lagi aman. Dulu, Indonesia tempat berkunjung dan belajar yang aman bagi orang Australia. Orang Indonesia kini dianggap tidak simpatik terhadap orang Australia, malah ada yang dianggap benci. Sebelum kejadian di Bali, dan kemudian Marriott Jakarta, betapa pun buruknya hubungan kedua negara, orang Indonesia tidak akan menyakiti orang Australia secara fisik. Orang Indonesia dianggap sopan dan menghargai tamu mereka, betapapun buruknya hubungan politik dan diplomatik kedua negara. Akan tetapi, kini persepsi itu sudah lenyap, hancur oleh ledakan bom di Bali dan di Jakarta itu. Orang Australia tidak lagi merasa aman di Indonesia. Sesudah bom Bali, buat pertama kali mahasiswa Australia yang sedang belajar di Indonesia disuruh pulang. Ini besar dengungunya di Australia. Program musim panas Deakin di Padang sudah dua tahun tidak dilaksanakan. Tahun ini akan dicoba lagi, tetapi peminatnya jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan persepsi tentang Indonesia yang disebutkan di atas itu tidak sepenuhnya salah. Australia tidaklah salah beranggapan demikian sekalipun ada kecenderungan untuk membesar-besarkannya. Kalau orang tua yang akan melepas anak belasan atau dua puluhan tahun mereka untuk belajar atau berkaryawisata ke Indonesia, tentulah mereka itu tidak dapat disalahkan kalau berpikir dua kali memberi anaknya izin pergi.

Persepsi lain tentang Indonesia di Australia yang juga punya dampak penting terhadap pengajaran bahasa Indonesia di negeri itu adalah bahwa Indonesia, orang Indonesia, kehidupan Indonesia merupakan sesuatu yang eksotik. Indonesia bukanlah negara seperti Inggris atau Selandia Baru atau AS atau Jepang yang merupakan negara moderen seperti Australia. Orang Indonesia dilihat sebagai bangsa dengan pandangan dan cara hidup yang 'aneh.' Kehidupan mereka diatur oleh upacara-upacara atau kepercayaan yang luar biasa. Kehidupan Indonesia dilukiskan melalui kesenian eksotik seperti wayang atau cara pemerintahan yang korup atau masyarakat yang tidak menghargai lingkungan. Indonesia dipenuhi oleh orang Islam yang tidak simpatik terhadap Australia. Pendek kata, Indonesia itu menarik dipelajari tetapi ia tidak berada di pihak Australia dalam berbagai isu sosial-politik internasional dan, karenanya, berada di pihak yang 'salah.'

Prospek Masa Depan

Banyak kalangan di Australia menguatirkan masa depan pengajaran bahasa dan kajian Indonesia di Australia. Hill (2003) memperingatkan bila kecenderungan sekarang ini berlanjut, pengajaran Bahasa dan kajian Indonesia di Australia akan mencapai titik yang mencemaskan. Ia mengutip laporan *Asian Studies Association of Australia* yang keluar tahun lalu bahwa "pembelajaran tentang Indonesia dan bahasa Indonesia mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir." Sekalipun Tabel 4 di atas memperlihatkan kecenderungan meningkat di sekolah-sekolah sampai tahun 2000, konferensi ASILE di Adelaide bulan Juli yang lalu jelas menunjukkan penurunan mencemaskan dalam tiga tahun terakhir, terutama di tingkat universitas.

Lalu apa yang dapat dan harus dikerjakan Indonesia untuk menolong supaya pengajaran dan pembelajaran Indonesia di Australia tidak mengalami kemunduran hebat? Sebelum menjawab pertanyaan itu, barangkali perlu dibicarakan mengapa Indonesia harus peduli. Apa untungnya bagi Indonesia tidak membiarkan pembelajaran tentang Indonesia dan bahasa Indonesia di Australia hancur? Apalagi kalau kita lihat tulisan Hill yang disebutkan di atas, kekuatiran berbagai pihak di Australia itu didasarkan atas kepentingan Australia, bukan kepentingan Indonesia. Misalnya, Australia kata mereka perlu tahu tentang Indonesia supaya mereka dapat berurusan dengan Indonesia secara lebih baik, lebih menguntungkan mereka. Dia mengutip

Stuart Macintyre yang berpendapat bahwa keamanan Australia tergantung pada “kemampuan yang lebih baik untuk memahami tetangga kita dan menjelaskan diri kita kepada mereka.”

Indonesia tidak boleh tersinggung karena alasan semacam itu. Ia tidak bermakna orang Australia akan memata-matai Indonesia atau melihat Indonesia sebagai ancaman dan mereka harus menjaga diri mereka. Masalah keamanan bersama itu sangat tergantung pada komunikasi yang jelas untuk membicarakan kepentingan bersama secara terus-terang dan jujur. Itulah yang termuat di dalam ucapan-ucapan seperti yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, di situlah letaknya kepentingan Indonesia berpartisipasi di dalam menjamin kemakmuran masa depan pengajaran bahasa dan kajian Indonesia di Australia itu.

Tidak ada salahnya Indonesia juga melihat pengajaran bahasa Indonesia di Australia itu dari sudut pandang kepentingannya sendiri. Adalah suatu hal yang menguntungkan Indonesia kalau masyarakat Australia mengerti Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan lebih baik, lebih menyeluruh, dan lebih tepat. Indonesia juga memerlukan hubungan kedua negara yang baik dan saling menguntungkan. Kalau orang Australia melihat Indonesia itu lebih dari sesuatu yang eksotik dan baik sebagai tempat liburan saja, tetapi bahwa ia juga ditinggali oleh orang-orang yang punya aspirasi masa depan yang tidak banyak bedanya dengan Australia, Indonesia juga akan mendapat untung dari pandangan semacam itu.

Masalah keamanan Indonesia masa depan, seperti juga Australia, sebagiannya tergantung pada hubungan Indonesia-Australia. Hubungan yang lebih baik, antara lain, dapat dipupuk melalui bidang pendidikan, termasuk bahasa. Guru-guru sekolah di Australia merupakan duta-duta Indonesia paling baik. Merekalah yang mewakili Indonesia dalam menjelaskan kepada generasi Australia berikutnya tentang Indonesia. Merekalah yang menentukan wajah Indonesia di dalam pikiran anak-anak Australia. Mereka sangatlah penting dan perlu mendapat perhatian besar dari pihak Indonesia.

Lalu apa yang dapat dan harus dikerjakan Indonesia? Secara ringkas, banyak. Seperti dikatakan di atas, partisipasi Indonesia selama ini hampir tidak ada, setidaknya-tidaknya tidak ada yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus. Tentu saja tidak semua persoalan yang disebutkan di atas dapat dipecahkan Indonesia, malah ada yang tidak dapat disertai Indonesia pun dalam usaha pemecahannya, misalnya masalah pendanaan tadi. Akan tetapi, beberapa dampak dari kekurangan dana itu dapat dipecahkan atau dikurangi dengan keikutsertaan Indonesia. Oleh karena itu, di bawah ini diberikan beberapa hal yang dapat dikerjakan berbagai pihak di Indonesia.

- a. Kekurangan staf pengajar, baik dari segi jumlah maupun keterampilan bahasa, merupakan salah satu masalah utama yang disebutkan di atas,

baik di sekolah maupun di universitas. Ini masalah yang besar dan tidak bisa dipecahkan dengan cepat. Akan tetapi, ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam bentuk kerja sama. Program guru atau dosen tamu perlu dipikirkan dengan serius. Ini tidak mudah. Guru yang dapat berbahasa Indonesia saja tidak cukup untuk dapat berfungsi secara efektif di sekolah atau universitas di Australia. Pelatihan dan persiapan perlu sekali. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan kegiatan yang sudah ada. Setiap tahun, misalnya, beberapa program musim panas untuk mahasiswa Australia diadakan di Indonesia. Pada waktu itu, dosen Indonesia yang ikut serta mengajar dalam program itu dapat dipersiapkan untuk datang ke Australia sebagai dosen tamu. Begitu pula dengan sekolah. Sekarang ini ada beberapa kunjungan sekolah Australia ke Indonesia setiap tahunnya. Pada masa itu, guru-guru Indonesia yang mungkin didatangkan sebagai guru tamu ke Australia dapat mulai dipersiapkan.

- b. Yang tidak kalah pentingnya, hal ini perlu melibatkan pemerintah, termasuk pemerintah daerah otonomi sekarang. Ini perlu karena program guru tamu semacam itu akan punya dampak terhadap tenaga pengajar di sekolah tempat calon guru tamu itu mengajar di Indonesia.
- c. Pihak Indonesia perlu berpartisipasi dalam pengadaan bahan. Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia kurang sekali, baik pribadi maupun institusi. Gagasan BIPA (bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) sudah muncul belakangan ini. Malah ada beberapa universitas yang menawarkan BIPA sebagai bidang studi. Kadang-kadang terdengar keluhan dari pihak Indonesia tentang tema bahan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri, termasuk di Australia. Di dalam sebuah konferensi, seorang peserta dari Indonesia yang tertarik dengan BIPA bertanya, "Mengapa orang Australia tampaknya cuma tertarik pada yang negatif-negatif saja tentang Indonesia?" Tentu pengamatan itu tidak sepenuhnya benar, tetapi seperti dikatakan di atas, kecenderungan itu memang terasa. Akan tetapi, tidak cukup bagi Indonesia mengeluhkannya saja. Indonesia hendaklah dapat menghasilkan bahan dengan topik dan tema yang lebih menyeluruh, dengan kaidah pengajaran dan pembelajaran yang kokoh.
- d. Bahan pengajaran sastra, misalnya, kurang sekali. Belum ada bahan sastra yang disusun khusus untuk pelajar asing yang dilengkapi dengan bahan diskusi dan evaluasi yang cocok. Untuk ini, kerja sama di antara institusi dan individu sangatlah mungkin.
- e. Karena begitu pentingnya peranan guru bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia, perhatian khusus sepatutnya diberikan kepada mereka. Alangkah baiknya kalau diadakan setiap tahun semacam kunjungan guru-guru bahasa Indonesia di Australia ke Indonesia. Ini dapat disponsori oleh kedua negara. Secara bergilir, ini diadakan untuk beberapa guru, misalnya 15 atau 20 orang per tahun, selama satu atau

dua minggu. Mereka melawat beberapa tempat di Indonesia dan mengadakan *workshop-workshop* pengajaran bahasa. Lebih dari itu, mereka akan melihat berbagai dimensi kehidupan Indonesia yang sebenarnya.

- f. Banyak lagi kegiatan kerja sama yang dapat dilakukan. Untuk memayungi semua itu, kiranya pihak pemerintah Indonesia, misalnya Pusat Bahasa atau Departemen Pendidikan Nasional mengadakan sebuah persetujuan dengan sebuah institusi Australia, misalnya Deakin University. Persetujuan pada tingkat ini dimaksudkan untuk memayungi kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas. Kedua badan ini bertanggung jawab memikirkan langkah-langkah kegiatan itu, mencari dananya dari kedua negara, dan mencari pelaksana setiap kegiatan yang diadakan itu serta memonitor pelaksanaannya. Amatlah menggembirakan bahwa Pusat Bahasa dan Deakin sudah setuju untuk menandatangani MoU sebagai salah satu langkah ke arah kerja sama itu.

Saran-saran di atas dimaksudkan sebagai contoh saja. Yang penting adalah kesadaran di Indonesia bahwa pengajaran bahasa Indonesia di Australia itu sama pentingnya bagi Australia dan Indonesia. Sekaranglah waktu yang paling tepat bagi Indonesia untuk ikut serta secara sungguh-sungguh dalam usaha pengembangan pengajaran dan pembelajaran bahasa dan kajian Indonesia di Australia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. 1995. "BIPA: Hari Ini dan Esok." Kertas kerja, Konferensi Internasional Pengajaran BIPA, Universitas Indonesia, Jakarta, 28-30 Agustus.
- Australian Academy of the Humanities. 2000. *Subjects of Small Enrolment in the Humanities: A Report by the Australian Academy of the Humanities*, Canberra.
- Asian Studies Association of Australia. 2002. *Maximizing Australia's Asia Knowledge: Repositioning and Renewal of a National Asset*, [no place of publication mentioned].
- Carter, B. 1942. "Foreign Language and Some Objectives of the Liberal Arts College," dalam *Modern Language Journal*, 26:424-430.
- Chambert-Loir, H. 1998. "Pengajaran bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Asing di Perancis." Kertas kerja, Kongres bahasa Indonesia ke-7, Jakarta 26-30 Oktober.

- Chung, Y.R. 1998. "Keadaan Pengajaran bahasa Indonesia di Korea". Dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Erebus Consulting Partners. 2002. *Review of the Commonwealth Languages Other Than English Programme: A Report to the Department of Education, Science and Training*, [no place of publication mentioned].
- Fanany, R. 2003. "Future Direction in the Teaching of Indonesian: Responses to a Changing Environment". Kertas kerja, ASILE Conference, Adelaide.
- Hill, D.T. 2003. "Neglected Neighbour". Dalam *The Australian*, 13 August, hal. 37.
- Kenyon, D. dkk. 2000. *Framework for the 2003 Foreign Language National Assessment of Educational Progress*, ACTFL and AIR, Washington, DC.
- Kratz, E.U. 1998. "Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Inggris". Kertas kerja, Kongres bahasa Indonesia ke-7, Jakarta 26-30 Oktober.
- Lantolf, J. dan Sunderland, G. 2001. "The Struggle for a Place in the Sun: Rationalizing Foreign Language Study in the Twentieth Century". Dalam *Modern Language Journal*, 85(1):5-25.
- Liang, L. 1988. "Pengajaran dan Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia di Tiongkok". Kertas kerja, Kongres Bahasa Indonesia ke-5, Jakarta 28 Oktober-2 November.
- Martinez, R. 1938. "How May Modern Languages Aid in International Understanding". Dalam *Modern Language Journal*, 22:589-590.
- Nothofer, B. 1998. "Perkembangan Pengajaran bahasa Indonesia di Jerman". Dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Ogden, R. 1920. "The Future of Modern Language in the High School". Dalam *Modern Language Journal*, 5:353-364.
- Olmstead, E. 1921. "A Justification of Modern Languages in Our School". Dalam *Modern Language Journal*, 6:1-11.
- Purin, C. 1920. "The Importance of Foreign Language Study in the General Scheme of American Education". Dalam *Modern Language Journal*, 4:325-330.
- Saunders, N. 2003. Ceramah umum pada konferensi Australian Society for Indonesian Language Educators (ASILE), Adelaide, 7-8 July.

- Steinhauer, H. 1998. "Pengajaran bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing di Belanda". Kertas kerja, Kongres bahasa Indonesia ke-7, Jakarta 26-30 Oktober.
- Thompson, R. 1936. "As Others See Us". Dalam *Modern Language Journal*, 20:341-342.
- Wann, H. 1936. "Youth Problems and the Study of Modern Foreign Languages". Dalam *Modern Language Journal*, 20:333-340.
- Welles, E. 2002. "Foreign Language Enrollment Numbers: Some (Mis)interpretations Explained". Dalam *Modern Language Journal*, 86:253-255.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2003
Judul Makalah : Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia: Keadaannya Sekarang dan Prospek di Masa Datang
Pemakalah : Dr. Ismet Fanany
Pemandu : H. Moh Tadjuddin
Pencatat : 1. Tirta Suwondo
2. I Nengah Budiasta

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Endah Sandra Ananda (Guru SMU Negeri 9 Bandarlampung)
Bagaimana cara yang dilakukan dalam pengajaran bahasa Indonesia di Australia? Apakah cara-cara pengajaran bahasa Indonesia yang dilakukan di Australia sudah sama dengan cara yang dilakukan di Indonesia? Apakah pengajaran bahasa Indonesia yang dilakukan di sekolah-sekolah Australia juga memanfaatkan karya sastra?

Jawaban:

Cara pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia cukup beragam. Hal ini disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Jadi, tidak ada cara baku yang diberlakukan secara umum. Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah, termasuk di perguruan tinggi, biasanya untuk mencapai target tertentu, misalnya agar kelak dapat pergi atau bekerja di Indonesia. Sementara itu, sistem yang digunakan di dalam pengajaran adalah sistem komunikatif, misalnya selain pengajaran tentang kalimat dan wacana juga interaksi langsung dengan cara berkunjung ke Indonesia. Yang diajarkan bukan sekadar bahasa (kalimat, tata bahasa, dan lain-lain), melainkan juga budaya (sesuai dengan sasarannya). Oleh karenanya, karya sastra termasuk salah satu bahan yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa Indonesia.

2. **Pertanyaan:** Widodo (Malang)
Selama ini ada beberapa lembaga kerja sama antara Indonesia dan Australia, misalnya ACCS. Mengapa pembicara tidak menyinggung keberadaan lembaga itu dan bagaimana kemungkinan dilakukan kerja sama sehingga kondisi (pengajaran) bahasa Indonesia di Australia kembali menjadi baik?

Jawaban:

Memang benar lembaga-lembaga itu ada dan hingga sekarang kerja sama masih terus dilakukan. Misalnya, lembaga seperti ACCS itu setiap tahun masih rutin mengirim mahasiswa Australia ke Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3. **Pertanyaan:** Asim Gunarwan (Universitas Indonesia)

Ketertarikan orang belajar bahasa asing terkadang ditentukan oleh faktor keuntungan apa yang akan diperoleh. Apakah ketertarikan orang Australia belajar bahasa Indonesia itu hanya didasari oleh bahasa Indonesia mudah dipelajari ataukah karena faktor lain? Mudah dipelajari karena bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin seperti halnya bahasa Inggris, sementara bahasa Jepang atau Cina menggunakan huruf Jepang dan Cina.

Jawaban:

Ketertarikan orang, terutama orang Australia, terhadap bahasa Indonesia bukan sekadar karena bahasa Indonesia lebih mudah dipahami, melainkan lebih karena ada kaitan emosional (kedekatan hubungan). Selain itu, mereka juga dipengaruhi oleh adanya harapan, misalnya harapan akan dapat bekerja di Indonesia atau hanya sekadar berkunjung ke Indonesia.

4. **Pertanyaan:** Fitri (Guru SMK Jogonalan, Klaten)

Kalau tidak salah, bulan Desember nanti ada semacam konferensi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia di Melbourne Australia. Apakah kami dimungkinkan dapat mengikuti konferensi tersebut?

Jawaban:

Memang benar. Pada tanggal 3—7 Desember 2003 akan diselenggarakan konferensi (promosi bahasa Indonesia) di Australia. Apabila Ibu nanti berkeinginan menghadiri konferensi tersebut, saya (pemakalah) bersedia mengirimkan informasi (syarat-syarat dan lain-lain) lewat e-mail.

5. **Pertanyaan:** Yohanes Tri Nugroho (Kantor Bahasa Palangkaraya)

Apakah di Australia ada lembaga seperti British Council atau Pusat Budaya? Kalau ada, lembaga ini dapat bekerja sama dengan Indonesia sehingga kondisi (pengajaran) bahasa Indonesia di Australia kembali menjadi lebih baik. Kalau tidak, saya usul agar lembaga itu dibentuk.

Jawaban:

Saya (pemakalah) tidak tahu persis apakah lembaga yang ada di Australia mirip atau sama dengan British Council. Yang jelas, sudah sejak lama ada lembaga AII (Australian-Indonesian Institute) yang selama ini melakukan kerja sama dengan Indonesia, termasuk kerja sama dalam hal bahasa Indonesia. Bahkan, ada juga badan atau lembaga AIBC (Australian-Indonesian Business Council) yang memperkuat hubungan Indonesia-Australia dalam bidang perdagangan.

PENINGKATAN MUTU PENGAJARAN DI BEIJING

Prof. Huang Chenfang

Universitas Peking

Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia Kongres Bahasa Indonesia, Bapak Dendy Sugono, yang telah mengundang saya ke Indonesia dan memberi kesempatan untuk menyampaikan makalah di forum ini. Saya sebagai seorang yang telah berkecimpung di bidang bahasa Indonesia selama lima puluh tahun lebih merasa gembira dan terharu karena diminta untuk membacakan makalah dalam kongres yang dihadiri oleh para pakar dan peminat bahasa Indonesia sehingga kita dapat bertukar pikiran, saling belajar, sekaligus menjalin persahabatan.

Banyak hal mengenai peningkatan mutu pengajaran yang dapat dibicarakan di sini untuk didiskusikan dan dibahas. Akan tetapi, atas terbatasnya waktu, saya akan membicarakan beberapa segi saja.

Reformasi di Bidang Sistem Pendidikan Seksi Bahasa Indonesia

a. *Keadaan Seksi Kami Sebelum Diadakan Reformasi*

Seksi kami didirikan pada tahun 1945. Sampai sekarang seksi kami sudah berusia 58 tahun. Sebelum diadakan reformasi, seksi kami hanya mendidik siswa S-1. Mata pelajaran yang diberikan pada waktu itu pada umumnya hanya bahasa Indonesia. Sejarah dan sastra Indonesia sedikit yang diberikan karena tidak merupakan tujuan bagi siswa. Setelah tamat dari universitas siswa dipekerjakan sebagai penerjemah atau bekerja di bidang yang menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun taraf bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan tentang Indonesia pada umumnya dapat memenuhi kebutuhan situasi masyarakat pada waktu itu, masih terasa benar bahwa pengetahuan siswa mengenai Indonesia terlalu sempit, tidak dapat memadai jika dibandingkan dengan perkembangan masyarakat yang demikian pesatnya dan kemajuan teknologi yang meningkat terus dari hari ke hari. Siswa tamatan kami merasa payah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasannya.

b. *Dasar-Dasar Pemikiran untuk Mengadakan Rreformasi*

1) *Era Globalisasi*

Kita semua berada dalam zaman teknologi canggih yang dihadapkan pada banyak persaingan dan tantangan. Di dunia ini terjadi lebih banyak lagi hubungan transnasional. Banyak negara yang berusaha

menghapuskan benteng atau rintangan internasional. Mereka menggunakan peti kemas di bidang pengangkutan, memunculkan internet di bidang komunikasi, memunculkan konsumen skala internasional, dan menelorkan parawisata global terutama oleh ekonomi pasaran masa kini, dan lain sebagainya. Terjadilah globalisasi yang ditandai oleh kecepatan meningkatnya perniagaan luar negeri yang lebih tinggi daripada meningkatnya nilai hasil produksi seluruh dunia; tingkat bertambahnya investasi transnasional lebih tinggi daripada nilai hasil produksi; hubungan antara negara dan masyarakat menjadi lebih erat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, kebutuhan ekonomi dan cara kehidupan masyarakat masa kini tak mungkin melepaskan diri dari hubungan dengan luar. Oleh sebab itu, mutlak diperlukan kerja sama antarnegara. Misalnya, penumpasan tindak pidana transnasional, penjualan narkotik transnasional, pembekuan terhadap teroris tidak mungkin berhasil baik atau tuntas bila dilakukan hanya satu negara. Hal itu memerlukan tindakan bersama dan kerja sama antara semua negara yang bersangkutan. Di sini bahasa sebagai alat berkomunikasi dan sebagai wadah pengangkut informasi akan memainkan peranan yang penting sekali.

2) **Asean**

Asean adalah satu perhimpunan yang penting di Asia Tenggara yang akan menguntungkan perkembangan ekonomi dan menguntungkan kestabilan dan perdamaian. Jumlah anggotanya dari 6 bertambah menjadi 10. Gagasan "Dialog Kerja Sama Asia" dari Perdana Menteri Thailand akan lebih menggiatkan usaha-usaha yang dilangsungkan Asean, sedangkan Mimbar Kawasan Asean akan menjadi mimbar yang diperlukan untuk berdialog dan kerja sama di bidang politik dan keamanan. Tiongkok dan Asean akan bersama-sama membangun Kawasan Perneragaan Bebas. Ini merupakan satu proyek besar yang akan mendorong perkembangan Tiongkok dengan Asean dalam jangka panjang dan akan menjadi pasaran bersama paling besar di dunia dengan jumlah konsumennya 1,7 miliar. Diperkirakan kelak jumlah ekspor kedua belah pihak akan masing-masing bertambah 50%.

Indonesia adalah salah satu negara anggota yang penting dari Asean. Hubungan rakyat Tiongkok dengan rakyat Indonesia sudah bersejarah lama. Setelah diadakan reformasi, baik di Tiongkok maupun di Indonesia, kunjungan timbal balik di tingkat tertinggi dan di kalangan rakyat bertambah banyak dan sukses. Dalam rangka kunjungan Presiden Indonesia Megawati ke Tiongkok, Ketua Negara

Jiang Zemin mengajukan 4 gagasan sebagai berikut:

- (1) melanjutkan terus hubungan dan kontak antarpejabat tingkat tertinggi kedua negara, mendorong kunjungan timbal balik, dan kerja sama antara pejabat berbagai tingkat kedua negara;
- (2) memperluas kerja sama di bidang ekonomi dan perniagaan kedua negara, lebih lanjut memperkuat dasar hubungan dua negara;
- (3) mempergiat penukaran kerja sama di bidang kebudayaan, olah raga dan pariwisata, mendorong saling mengerti dan persahabatan rakyat kedua negara;
- (4) mempererat kerja sama dalam urusan internasional dan kawasan, sama-sama melindungi hak dan kepentingan negara-negara sedang berkembang. Selain itu, ditandatangani juga beberapa persetujuan dan MOU, di antaranya persetujuan untuk mendirikan dua konsulat jenderal di negeri masing-masing, serta MOU tentang Tiongkok dan Indonesia dalam membentuk mimbar sumber energi.

Tiongkok dan Indonesia termasuk negara sedang berkembang, yang menghadapi soal dan tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan kemiskinan dan mengembangkan ekonomi. Untuk menyelesaikan tugas-tugas berat tercatat di atas itu, diperlukan sekali penguasaan bahasa yang didasari berbagai macam pengetahuan yang luas.

3) Reformasi Ekonomi dalam Negeri

Pada awal tahun 1980-an yang lalu, setelah diadakan reformasi di bidang ekonomi dan dijalankan politik pintu terbuka, ekonomi pasaran berangsur-angsur menggantikan politik yang direncanakan dan ditetapkan pemerintah. Sejak tahun 1990-an, ekonomi pasaran berkembang dengan pesatnya. Pembangunan di berbagai bidang meluncur dengan meroket. Jika diteliti secara cermat, beberapa faktor yang menentukan memainkan peranan penting sekali. Di sini saya hanya akan mengemukakan satu faktor, yaitu faktor lingkungan dan suasana yang stabil dan aman. Sejarah telah mengajar kami bahwa negara berada dalam kekacauan, peperangan dan tidak aman. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi negara akan mandek atau menurun, rakyat akan jatuh melarat sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1960-an di negeri kami. Itu merupakan pengalaman yang sangat pahit. Pada waktu itu, alat negara tidak dapat berjalan normal, ekonomi negara hampir ambruk semuanya, dimana-mana terdapat orang yang mati kelaparan, tuna karya, gelandangan, rakyat tidak dapat hidup tenteram. Hanya dalam beberapa tahun, negeri kami ketinggalan dari negara-negara maju

beberapa puluh tahun.

Setelah Tiongkok diterima sebagai anggota WTO, di samping segi-segi yang menguntungkan kami, negeri kami juga dihadapkan pada persaingan dan tantangan yang lebih meruncing. Yang ter-serang tidak hanya bidang-bidang ekonomi, perniagaan, perbankan dan lain sebagainya, bidang komunikasi akan ter-serang juga karena pertukaran pandangan tentang sistem, kebijakan, metode dan sebagainya. memerlukan bahasa sebagai pengantar. Di sini, penguasa bahasa yang didasari oleh berbagai macam ilmu pengetahuan yang luas akan memainkan peranan yang penting.

Persaingan di bidang ekonomi pada dasarnya ialah persaingan tenaga ahli, termasuk tenaga ahli bahasa dan penguasa bahasa. Oleh karena itu, harus diusahakan mendidik lebih banyak tenaga ahli, termasuk tenaga ahli dan penguasa bahasa yang didasari berbagai macam ilmu pengetahuan yang bermutu tinggi untuk diterjunkan ke kancah perjuangan dalam memelihara perdamaian dan ketenteraman dalam dan luar negeri, menciptakan suasana bersahabat dan hidup berdampingan secara damai dengan negeri-negeri di seluruh dunia terutama dengan negeri-negeri tetangga, sama-sama membangun negara makmur dan sejahtera dan rakyatnya hidup bahagia aman.

b. ***Beberapa Tindakan Sebagai Contoh***

Beberapa tindakan itu adalah sebagai berikut.

1) Mengubah Haluan Pengajaran

Jika dulu tujuan pengajaran diarahkan pada monoton tujuan, yaitu mendidik siswa menjadi penerjemah, sekarang diarahkan kepada multitujuan, yaitu mendidik siswa menguasai bahasa yang sempurna. Di samping itu, siswa harus menguasai juga berapa bidang ilmu pengetahuan, misalnya politik, ekonomi, sejarah, sastra, linguistik, kebudayaan Indonesia dan mata kuliah lainnya sehingga bahasa yang siswa kuasai itu didasari ilmu pengetahuan yang luas. Tanpa menguasai ilmu pengetahuan yang bersangkutan yang erat sekali dengan bahasa itu, siswa tidak mungkin menguasai bahasa yang benar, tepat, dan sempurna, tak mungkin menguasai bahasa yang bermutu tinggi dan tidak mungkin mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, mahasiswa tidak mungkin dapat menyelesaikan tugas yang dipikulkan padanya. Selain itu, setelah tamat dari universitas, siswa di samping dapat ditempatkan pada pos yang menggunakan bahasa, juga dapat ditempatkan pada pos-pos lain, misalnya akademi, lembaga penelitian, dan perhimpunan ilmiah.

(2) Membangun Pusat Pengajaran dan Pusat Penelitian

Untuk melaksanakan perubahan haluan yang diputuskan oleh seksi, kami harus mengubah seksi menjadi dua pusat. Jika dahulu seksi kami hanya merupakan pusat pengajaran saja, maka sekarang ditambah dengan pusat penelitian. Dalam perubahan ini, terlebih dulu para dosen harus mengubah struktur pengetahuannya. Mereka harus mengadakan penelitian satu atau beberapa objek ilmu pengetahuan mengenai Indonesia sehingga di samping dapat mengajar bahasa, mereka juga dapat memberi kuliah mata pelajaran lainnya. Selama 20 tahun ini, sampai kini mereka telah dapat memberi 20 macam lebih kuliah, tidak termasuk kuliah bahasa Indonesia.

(3) Mengubah Tingkat Penerimaan Siswa

Mengingat tuntutan zaman yang terus berkembang dengan pesatnya dan untuk dapat mengikuti kemajuan teknologi abad ke-21 dan untuk dapat memenuhi keperluan pembangunan ekonomi negeri kami yang memuncak, seksi kami harus dapat mendidik siswa yang bermutu tinggi yang dapat mengikuti era informasi teknologi masa kini. Untuk itu, selain seperti sedia kala menerima siswa S-1, seksi kami menerima siswa S-2 dan S-3 dengan mengingat bahwa para dosen kami selama ini telah mempersenjatai diri dengan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, sudah mampu memberi pendidikan kepada siswa S-2 dan S-3. Kami menyadari bahwa tindakan ini akan mendorong peningkatan mutu pengajaran. Menambah beban pengajaran para dosen akan mempercepat meningkatnya kualitas dosen. Sebaliknya dengan meningkatnya kualitas para dosen di bidang ilmu pengetahuan akan mempertinggi mutu pengajaran.

Menyusun Bahan Pelajaran yang Cocok Bagi Siswa Tiongkok

Bahan pelajaran merupakan salah satu faktor pokok untuk menyukseskan kuliah yang diberikan dosen. Tanpa bahan pelajaran yang cocok, sukar untuk menjamin mutu kuliah yang baik. Jika sudah tersedia sebuah buku pelajaran yang baik dan sempurna, dosen hanya tinggal menggunakannya. Ini boleh dikatakan bahwa pengajaran sudah berhasil 50%.

Faktor atau prinsip penting untuk menyusun sebuah bahan pelajaran yang perlu diperhatikan banyak juga. Berikut ini hanya satu faktor atau satu prinsip yang dibicarakan.

Bahan pelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di negeri kami, kami tidak bisa dan tidak boleh menjiplak atau

mengolah buku pelajaran bahasa Indonesia yang sudah diterbitkan di luar negeri kami. Kami harus menyusun bahan pelajaran yang khusus ditujukan untuk siswa Tiongkok. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus diadakan riset dasar terhadap keadaan siswa dan kebutuhan siswa waktu belajar bahasa Indonesia. Menurut apa yang kami riset dan kami simpulkan, keadaan siswa kami pada umumnya sebagai berikut:

a. Bahasa Ibu Mereka Adalah Bahasa Han

Siswa kami sejak kecil menggunakan bahasa Han atau bahasa dialek di daerahnya. Bahasa Indonesia sangat asing bagi mereka. Bahasa yang digunakan mereka waktu berpikir tentu bahasa Han atau bahasa dialek. Dengan demikian, terbentuklah pola berpikir yang umum di negeri kami yang agak berbeda dengan pola berpikir orang Indonesia. Pola berpikir yang sudah terbentuk sejak kecil itu melekat benar pada otak siswa sehingga tidak mudah untuk mengubahnya. Bahasa ibu dan pola berpikir itu mengganggu pembelajaran bahasa Indonesia siswa. Ketika siswa mau mengeluarkan isi hatinya, mereka berpikir kemudian menyusun kata-kata dalam bahasa Tionghoa. Setelah itu baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu terasa benar berbau bahasa Tionghoa atau kedengarannya agak janggal. Misalnya, dalam bidang fonetik beberapa fonem agak sukar dilafalkan siswa karena dalam bahasa Han tidak terdapat atau tidak sama pelafalannya, seperti konsonan getar *r*, konsonan bersuara *b*, *d*, *g* dengan pasangannya konsonan tak bersuara *p*, *t*, *k*. Dalam bidang bentuk kalimat, dalam bahasa Tionghoa tidak begitu banyak dipakai bentuk kalimat pasif, sedangkan dalam bahasa Indonesia kalimat pasif jauh lebih banyak. Gejala-gejala bahasa tersebut di atas itu merupakan titik kesukaran untuk siswa kami. Baik dalam proses pengajaran di kelas maupun dalam buku pelajaran, gejala-gejala bahasa itu harus dijadikan titik berat dan diberi banyak latihan dan bimbingan.

b. Suasana dan Lingkungan Belajar Siswa

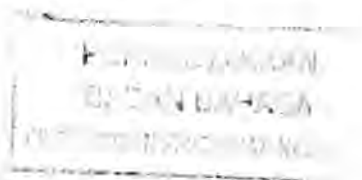
Dosen kami telah menyadari bahwa yang ada di sekeliling siswa bukan orang Indonesia, yang ada hanya orang Tionghoa yang setiap hari berbahasa Tionghoa saja. Jadi, kecuali di dalam kelas, tidak terdapat suasana dan lingkungan bahasa Indonesia. Ini sangat tidak menguntungkan siswa kami yang belajar bahasa Indonesia tanpa suasana dan lingkungan bahasa Indonesia. Belajar bahasa asing diperlukan dan diharuskan banyak pengulangan, lebih-lebih pengulangan latihan mendengar dan berbicara. Jika soal suasana dan lingkungan belajar bahasa Indonesia tidak mendapat perhatian yang semestinya, tidak dipelajari baik-baik, tidak dilakukan usaha dan tidak diambil tindakan untuk menutupi kekurangan dan mengatasi kesukaran yang dihadapi siswa

itu, agak sukar bagi siswa untuk menguasai bahasa Indonesia yang tulen yang khas Indonesia. Dengan kata lain, dalam suasana dan lingkungan tersebut di atas itu siswa sukar dapat meresapi dan menghayati rasa bahasa dan warna emosional bahasa yang terselip dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, rasa bahasa dan warna emosional bahasa tidak mungkin diperoleh hanya dari bahasa tertulis yang hanya mengandalkan buku. Soal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa siswa tidak begitu pandai menggunakan kata seru yang kaya rasa bahasa dan warna emosional bahasa yang beraneka ragam. Siswa lebih pandai melahirkan pikiran dengan bahasa yang kebuku-bukuan.

Tindakan-tindakan yang pernah kami ambil untuk menutupi kekurangan itu, antara lain ialah mengirim siswa kami ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia beberapa waktu, menggunakan alat-alat pengajaran audiovisual seperti menggunakan *slide*, komputer, televisi, *tape recorder*, dan *video recorder*. Selain itu, siswa menyusun bahan-bahan pelajaran sendiri yang salah satu tujuannya untuk mengatasi kekurangan itu dengan memperbanyak latihan lisan dan mendengar, baik untuk di dalam kelas maupun di luar kelas.

Judul bahan pelajaran dan buku yang kami susun, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) *Kamus Lengkap Indonesia Tionghoa*, diterbitkan tahun 2000 oleh PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, mengandung lema kata dasar 40.497 buah dan sublema kata jadian 26.932 buah. Jumlah seluruh kata mencapai 3.699.600 buah dengan ketebalan 1242 halaman. Dalam Prakata kamus itu *tercatat*: "Bangsa yang satu perlu mempelajari dan memahami bahasa bangsa yang lain. Itu adalah suatu pertanda bahwa S-l hubungan antara kedua bangsa itu sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi sehingga diperlukan bahasa masing-masing tampil ke muka untuk memainkan peranan dalam pergaulan kedua bangsa itu." Kemiskinan *tercatat* juga, "Sebagaimana diketahui, menyusun sebuah kamus dwibahasa yang lengkap merupakan suatu proyek besar-besaran yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa kepedulian dan sokongan berbagai kalangan dari kedua pihak. Terbitnya kamus ini boleh dikatakan adalah buah hasil penjelmaan kerja sama yang ikhlas itu."
- 2) *Kamus Baru Bahasa Indonesia-Tionghoa*, diterbitkan tahun 1989 oleh Penerbit Komersial, Beijing. Jumlah lema kata dasar 28.258 buah dan sublema kata jadian 20.369 buah dengan ketebalan 754 halaman.
- 3) *Sejarah Sastra Indonesia*, disusun oleh Profesor Universitas Peking Liang Liji. Dalam abstrak *Sejarah Sastra Indonesia*, dikatakan: "Indonesia adalah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia dan merupakan negara besar keempat dilihat dari jumlah penduduknya."



Negara yang bersifat multibangsa dan multibudaya ini bersejarah lama. Sejarah perkembangan sastranya memiliki gaya sendiri yang khas, empat kebudayaan besar di dunia--Kebudayaan Tiongkok, Kebudayaan India, Kebudayaan Islam Arab, dan Kebudayaan Barat--dalam periode sejarah yang berlainan telah langsung mempengaruhinya. Sastra Indonesia boleh dikatakan merupakan sastra yang telah banyak menyerap saripati 4 kebudayaan besar di dunia dan memiliki sifat menerima yang keras. Di samping itu, serta dapat pula mempertahankan sifat kepribadiannya yang istimewa. Dalam buku ini sedapat mungkin dikumpulkan bahan-bahan pertama. Dengan bertolak pada kenyataan sejarah Indonesia dan dipadukan dengan pengaruh empat kebudayaan besar di dunia, perkembangan sejarah sastra Indonesia dari zaman purba sampai kini diuraikan secara menyeluruh dan sistematis menjadi tujuh periode sejarah. Sastra Lisan Zaman Purba; Sastra Periode Pertama Masyarakat Feodal; Sastra Periode Kedua Masyarakat Feodal; Sastra Masa Peralihan Zaman Modern; Sastra Masa Kini Zaman Kekuasaan Kolonial Belanda; Sastra Masa Kini Zaman Pendudukan Jepang dan Sastra Masa Kini Setelah Merdeka."

- 4) *Buku Pelajaran Bahasa Indonesia*, tiga jilid untuk tingkat pertama dan tingkat kedua, telah dicetak ulang beberapa kali dan digunakan sebagai buku pelajaran di beberapa universitas di Tiongkok.
- 5) *Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Tingkat Tinggi*, menggunakan teks asli dan dilengkapi dengan daftar kata, penjelasan, dan latihan.
- 6) *Stilistika: Penerapannya pada Bahasa Indonesia*. Dalam kata pengantar antara lain dikatakan: "Mempelajari ilmu stilistika dan penerapannya pada bahasa Indonesia dimaksudkan supaya dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat dan efektif, dan sekaligus meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa Indonesia."
- 7) *Pertukaran Kebudayaan Tiongkok dengan Indonesia*, diterbitkan tahun 1999.
- 8) *Zhenghe dan Malaysia*, ditulis dalam bahasa Malaysia dan diterbitkan oleh Penerbit Universitas Nasional Malaysia.
- 9) *Seri Legenda Mitos Timur* jilid ketujuh, bagian Legenda Mitos Indonesia, termasuk legenda mitos Indonesia, legenda mitos Malaysia, legenda mitos Singapura dan legenda mitos Brunei, tebalnya 351 halaman.
- 10) *Kamus Adat Istiadat Indonesia*, merupakan sebagian dari isi Kamus Adat Istiadat dan Kebudayaan Timur.
- 11) Perkenalan tentang Indonesia, melingkupi politik, ekonomi, perdagangan, sejarah, ilmu bumi, kebudayaan, agama dsb.
- 12) *Ekonomi Indonesia Setelah Perang Dunia II*.

c. Latar Belakang Kebudayaan dan Latar Belakang Masyarakat

Hubungan bahasa dengan kebudayaan sangat erat sekali, bahasa adalah tanda pencatat kebudayaan dan merupakan wadah pengangkut kebudayaan. Bahasa mencatat dan mencerminkan kebudayaan tertentu dari suatu bangsa, sedangkan kebudayaan tertentu dari suatu bangsa akan memengaruhi dan mengikat munculnya dan berkembangnya suatu bahasa. Bahasa Indonesia dilatarbelakangi oleh kebudayaan dan adat istiadat orang Indonesia, bahasa Tionghoa dilatarbelakangi kebudayaan dan adat istiadat orang Tionghoa, sering terdapat kalimat yang hampir sama susunan dan pemakaian katanya karena latar belakang kebudayaannya tidak sama mungkin makna yang tersirat dalam kalimat atau perkataan itu tidak sama. Misalnya, "Si baju hijau ke mari lagi." Bahasa Tionghoanya: "*chuan lu yi fu de you lai le.*" Kedua kalimat di atas itu, susunan dan pemakaian katanya sama, tetapi makna kalimatnya tidak sama. Kalimat bahasa Indonesia bermakna: "Prajurit datang lagi," sedangkan makna kalimat bahasa Tionghoa: "Orang yang pakai baju hijau datang lagi." Adakalanya karena tidak begitu mengetahui kebudayaan Indonesia, orang tidak dapat mengerti dan tidak dapat menjelaskan kalimat atau kelompok kata yang dibacanya. Misalnya:

Yang lelaki gagah perkasa, campuran *Arjuna dan Gatotkaca.

Dan wanitanya *Srikandi, yang kecantikannya dilukiskan orang

Bahasa kami ini campuran, *gado-gado ...

Kelima orang itu sama-sama mengeluarkan rokoknya, empat di antaranya *merokok daun.

Yang diberi tanda * itu, sukar dimengerti oleh siswa.

Tatkala menemukan kalimat atau kelompok kata semacam itu, siswa sering salah paham atau salah tangkap karena kalimat atau kelompok kata semacam itu tidak dapat diartikan hanya menurut makna kata semula. Di sini makna semula sudah berubah, dan perubahan makna itu bergantung pada kebudayaan bangsa pemakai bahasa itu. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, bukan hanya pertukaran kata-kata dan tata bahasa semata-mata, termasuk juga pertukaran pengetahuan, kebudayaan, dan inferensi yang bukan dalam kategori bahasa. Oleh karena itu, kalau mau mempelajari dan menguasai suatu bahasa sampai sempurna dan mahir benar, kita harus mempelajari kebudayaan dan adat istiadat bangsa yang menciptakan bahasa itu.

Bahasa itu erat sekali hubungannya dengan masyarakat tempat bahasa itu tumbuh dan berkembang. Apa yang ada dalam masyarakat itu, akan ada kata-kata yang mencatatnya, mencerminkan keadaan masyarakat itu. Dua macam masyarakat yang berbeda akan berbeda

pula kata-kata yang digunakannya. Misalnya di Tiongkok, untuk menyatakan nama kendaraan yang dihela kuda ialah *maché*, sedangkan di Indonesia, di Yogyakarta disebut *andong*, di Priangan disebut *delman* atau *keretek*, di Sumatera disebut *bendi*, di daerah lain, lain lagi sebutannya. Contoh pertama ini dapat menerangkan bahwa pada 2000 tahun yang lalu, Tiongkok telah menjadi satu negara kesatuan dan menggunakan satu bahasa, sedangkan di Indonesia terdapat beberapa kerajaan dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Satu contoh kalimat lagi: "Kedua belah pihak datang dari daerah lain, berjumpa di kota *Gudeg*. Kota *Gudeg* hanya ada di Indonesia. Di Tiongkok tidak bisa ditemukan. Dalam kosakata bahasa Tionghoa tidak terdapat kata *durian*, *rambutan*, *pisitan* dan nama buah-buahan lain daerah tropik. Dari kata-kata itu dapat diketahui bahwa masyarakat atau daerah yang menghasilkan buah-buah semacam itu ialah daerah tropik, sedangkan Tiongkok bukan.

d. Titik Berat dan Titik Kesukaran Siswa

Setelah menganalisis keadaan siswa sebagaimana telah diuraikan di muka, pada umumnya dapat diketahui bahwa kelemahan dan kekurangan siswa, apa yang dibutuhkan mereka dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan apa yang harus dijadikan titik berat dan titik kesukaran waktu menyusun bahan pelajaran siswa dan waktu mengajarkan bahasa Indonesia kepada siswa kami. Selain itu, ketika mengajar di kelas kami juga memperhatikan reaksi, perubahan mimik, perubahan yang digambarkan pada air muka siswa. Kerutan dahi, picingan sebelah mata, belalakan mata menandakan masih ada soal yang belum terselesaikan pada siswa. Umumnya kalau penjelasan dosen di kelas dijawab dengan muka mesem, mereka merasa puas, kalau dijawab dengan muka masam boleh dikatakan siswa masih belum mengerti betul, masih belum puas. Dosen wajib mencatat soal-soal itu untuk dijadikan bahan pertimbangan waktu mengadakan perubahan bahan pelajaran.

Dengan cara-cara tersebut di atas itulah kami mengumpulkan dan menetapkan titik berat dan titik kesukaran bagi siswa.

Mengerahkan Keaktifan Belajar Siswa

Dosen dalam proses pengajaran memainkan peranan penting. Usaha dosen dalam menyusun bahan pelajaran, mempersiapkan rencana pengajaran, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan memberi penerangan kepada siswa harus mendapat penghargaan yang selayaknya. Kerja keras dan jerih payah para dosen harus diakui. Akan tetapi, jika seorang dosen hendak menunaikan tugas pengajarannya yang berat itu, jika hanya mengandalkan

usaha sepihak saja, mungkin tugas itu tak akan selesai atau tak akan selesai dengan tuntas dan sempurna. Tujuan mengajar dari dosen ialah mendidik siswa supaya menguasai ilmu pengetahuan. Dosen harus dapat mengerahkan keaktifan pihak siswa untuk belajar, menyadarkan mereka akan pentingnya pelajaran yang diberikan kepada mereka sehingga mereka dapat belajar dengan kesadaran yang tinggi. Soal ini tentu harus mendapat perhatian yang cukup dari pimpinan universitas, fakultas dan seksi. Jika soal ini tidak diselesaikan, mungkin akan menjadi hambatan atau perintang bagi penyelesaian tugas pengajaran dosen. Usaha dosen mungkin akan sia-sia dan gagal. Marilah kita sama-sama meneliti sebab-sebabnya sebagai berikut.

- a. Belajar dan menguasai semacam bahasa memerlukan keuletan dan kegigihan hati. Waktu mulai belajar bahasa, khususnya belajar bahasa Indonesia, siswa harus belajar melafalkan dengan tepat semua fonem dan lagu bahasa, serta harus menghafalkan banyak kata-kata baru. Proses penguasaannya itu ada yang memerlukan beberapa bulan, ada juga yang sampai tahunan. Latihan melafalkan satu fonem yang asing bagi mereka kadang-kadang harus diadakan pengulangan beberapa ratus sampai beberapa ribu kali sehingga ada siswa yang pecah-pecah bibirnya dan kering kerongkongan karenanya. Itu memang suatu latihan cara mekanis yang membosankan, tetapi sangat diperlukan. Untuk menguasai fonem-fonem yang tidak mengandung makna apa-apa itu, untuk menghafalkan ribuan kata baru yang tidak menarik, untuk memahami kaidah bahasa yang tidak menggairahkan hati, dan lain sebagainya diperlukan keteguhan dan kegigihan untuk bertahan terus, tidak terdapat jalan lain, tidak ada pilihan lain. Dalam soal ini ada sebagian siswa kurang bersemangat, kurang bergairah, yang perlu diberi pengajaran, dan perlu dibantu. Jika soal ini tidak dipecahkan pada tingkat rendah ketika siswa sedang berada dalam fase peletakan dasar bahasa, hal itu akan menghambat kemajuan pembelajaran siswa di kemudian hari.
- b. Harus disadari bahwa pentingnya bahasa yang dipelajarinya itu ialah untuk nusa dan bangsa, untuk mempererat persahabatan rakyat kedua negara, untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang stabil dan aman demi pembangunan ekonomi negaranya, serta untuk mendapatkan karier yang baik baginya. Tentang pentingnya bahasa Indonesia, sudah diuraikan di atas, tak akan diulang lagi di sini. Soalnya masih terdapat sebagian siswa belum menyadarinya, belum dapat menghayatinya benar sehingga tidak dapat mendorong keaktifan belajar mereka. Sebagai dosen, kami wajib menyadarkannya demi mendidik siswa yang siap pakai yang memiliki rasa tanggung jawab.

Pengajaran harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, pengajar dan pelajar. Kita boleh meminjam pepatah berikut: bertepuk sebelah tangan

tidak akan berbunyi. Tugas pengajaran, tugas meningkatkan mutu pengajaran pada umumnya hanya dibebankan kepada dosen yang tampil di muka kelas. Kelihatannya yang berperan utama hanya dosen, asal dosen itu mengajar dengan sebaik-baiknya, segala sesuatu akan beres semuanya. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Apabila ada seorang profesor yang memiliki pengetahuan yang luas, menguasai teori ilmu pengetahuan yang dalam dan banyak pengalaman dalam pengajaran, belum tentu hasil pengajarannya baik; tugas pengajarannya belum tentu dapat dikatakan sudah selesai dengan sempurna. Jika dilihat dari segi penunaian tugas pengajaran, kedua belah pihak memang penting, tetapi yang memainkan peranan utama, faktor yang menentukan ialah pelajar.

Pengajar hanya merupakan faktor luar, sedangkan pelajar merupakan faktor dalam. Dengan kata lain, dosen hanya memberikan pengetahuan dari luar, apakah pengetahuan itu diterima dan masuk ke dalam otak pelajar, itu ditentukan oleh sikap belajar siswa. Kendati seorang profesor nomor wahid dan ternama, jika pihak siswa tidak mau belajar tidak mau menerima, atau tidak mau belajar dengan tekun, otak mereka akan kosong melompong atau tidak berisi banyak. Hasil pengajaran profesor pada siswa itu boleh dikatakan gagal atau tidak berhasil benar. Untuk itu, pengajar harus berusaha bagaimana mengerahkan keaktifan belajar siswa, bagaimana menggugah hati siswa untuk tekun belajar dan bagaimana menyadarkan siswa untuk berani melawan tantangan yang dihadapinya.

Tindakan-tindakan yang pernah kami ambil, antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan mutu pengajaran merupakan salah satu tindakan yang paling penting. Isi pengajaran harus dapat mencerminkan perkembangan bahasa yang mutakhir dan cocok dengan keadaan siswa serta berguna bagi siswa sebagai bekal dalam pekerjaan mereka di kemudian hari. Titik berat dan titik kesukaran yang dipilih dosen sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa sehingga dapat menyingkirkan rintangan-rintangan pembelajaran di jalan yang sedang mereka tempuh. Isi pengajaran semacam itu pada umumnya dapat memikat minat belajar, menarik perhatian siswa untuk belajar. Ketika siswa melihat hasil belajarnya meningkat, mereka akan suka pada pelajaran itu dan kegairahan belajar mereka akan meningkat.
- b. Menjalin hubungan yang mesra antara dosen dengan siswa adalah tindakan yang penting pula. Pada umumnya siswa menghormati dan menghargai dosen. Akan tetapi, tidak sedikit siswa di samping menghormati juga merasa segan terhadap dosennya. Di samping menghargai, terdapat juga rasa takut pada dosen sehingga mereka tidak begitu berani mendekati dosen, seakan-akan ada sesuatu perintang untuk mengadakan usaha pendekatan dengan gurunya. Soal ini bisa mempengaruhi siswa dengan sungguh-sungguh belajar kepada dosen itu

dan tak dapat bekerja sama baik dengan gurunya untuk menyelesaikan tugas pengajaran. Ada baiknya apabila pihak dosen dengan tulus ikhlas mengambil inisiatif untuk mendekati siswa, berbicara dari hati ke hati, tetapi hendaknya dijaga supaya pengeluaran kata-kata jangan sampai menyinggung hati. Dapat diharapkan atas usaha dan ikhtiar dosen yang mengagumkan itu, hubungan mesra antara dosen dengan siswa akan terjalin.

- c. Memberikan pengarahan sekadarnya kepada siswa merupakan tindakan selanjutnya, soleh dicoba memberi pengarahan untuk meningkatkan kualitas psikologi dalam menghadapi kesukaran, membina keyakinan akan kemampuan sendiri untuk mengatasi kesukaran. Dosen menggugah rasa tanggung jawab siswa akan masyarakat yang sedang menantikan kecakapan dan pengetahuan yang akan mereka sumbangkan. Membangun masyarakat yang makmur membutuhkan berbagai bidang tenaga ahli, setiap anggota dari masyarakat itu wajib ikut memberikan andilnya, mengingatkan siswa bahwa ilmu pengetahuan merupakan pokok bekal hidup mereka di kemudian hari. Pengetahuan yang dimilikinya makin kaya dan dalam, imbalannya makin banyak dan tinggi, hidup mereka akan makin sejahtera dan bahagia. Akan tetapi, apabila segan berjerih payah menimba ilmu pengetahuan di masa muda, jangan diharapkan masa depan akan cemerlang.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal	: Kamis, 16 Oktober 2003
Judul Makalah	: Peningkatan Mutu Pengajaran bahasa Indonesia di Cina
Pemakalah	: Prof. Huang Cheng Fang
Pemandu	: A. Dahara
Pencatat	: 1. Dra. Ni Luh Komang Candrawati, M.Hum. 2. Drs. Pardi, M.Hum.

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Mujahir (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak)
 - a. Bagaimana cara pengajaran bahasa Indonesia di Cina?
 - b. Bagaimana kebijakan pemerintah RRC? Bagaimana pengajaran bahasa Indonesia di SD--SMU, yang dijelaskan hanya pada tingkat Universitas?

Jawaban:

Pemerintah RRC memiliki lembaga khusus yang menangani pengajaran bahasa asing yang tugasnya mengarahkan universitas-universitas yang membuka program pengajaran bahasa asing. Bahkan, ada penghargaan yang sangat baik terhadap profesor yang kerja dalam pengajaran bahasa asing. Selama ini hal itu baru dilakukan pada tingkat Universitas dari jenjang S-1, S-2, dan S-3 dalam program studi Indonesia.

2. **Pertanyaan:** Maryanto (Pusat Bahasa, Jakarta)
 - a. Apakah model pengajaran bahasa Indonesia di RRC telah memiliki model mapan?
 - b. Bagaimana faktor-faktor yang perlu dihadapi? Apakah RRC dapat bekerja sama dengan Pusat Bahasa dalam hal pengajaran bahasa Indonesia?

Jawaban:

Pengajaran bahasa Indonesia di RRC perlu dikemas sesuai dengan kebutuhan siswa. Kami telah berupaya menyusun beberapa bahan pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran bahasa Indonesia di RRC.

3. **Pertanyaan:** Sukamto (Pontianak)

Apakah ada perbedaan yang menonjol antara bahasa Indonesia dan bahasa Cina. Apa penekanannya?

Jawaban:

Memang, banyak perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Cina, seperti peletakan tanda petik. Pengajar harus memakai konsep-konsep kata yang rumit dalam bahasa Indonesia. Jadi, pengajaran bahasa Indonesia di RRC tidak cukup hanya memanfaatkan kata-kata yang tertera dalam kamus.

4. **Pertanyaan:** M. Muis (Pusat Bahasa, Jakarta)

Apa saja kamus bahasa Indonesia yang ada dan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa Indonesia di Cina?

Jawaban:

Ada tiga kamus yang disusun atas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk bekerja sama dengan Universitas Indonesia yang melahirkan *Kamus Cina-Indonesia*. Semua kamus itu disusun sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, bukan seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kamus itu khusus disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran bahasa Indonesia di Cina.

5. **Pertanyaan:** Dameria Nainggolan (Pusat Bahasa, Jakarta)

- a. Apakah telah ada program pengajaran bahasa Indonesia tingkat S-3 di Cina?
- b. Ada kata yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia, tetapi ada dalam bahasa Cina, *pisitas* itu apa artinya dan persamaannya dalam bahasa Indonesia?
- c. Bagaimana hubungan yang dekat antara guru dan siswa, ini apakah tidak mendorong siswa dan guru pada penilaian yang objektif?

Jawaban:

Di RRC telah ada studi Indonesia S-3. Kata *pisitas* itu nama buah yang sama dengan *duku*, tetapi masam. Jadi, sama dengan *kokosan* dalam bahasa Indonesia. Bahan pelajaran disusun atas kerja sama dengan Universitas Indonesia. Bahkan, Duta Besar Indonesia di Cina memberikan dukungan yang baik, termasuk para konsulat di berbagai kota di RRC.

6. **Pertanyaan:** Fairul Zabadi (Pusat Bahasa, Jakarta)

- a. Pengajaran bahasa Indonesia di Cina itu minat siswanya tergolong pada tingkat seberapa?
- b. Apakah peristiwa akhir-akhir ini menimbulkan citra negatif Indonesia? Apa langkah yang dilakukan dalam pengajaran bahasa Indonesia di Cina untuk mengatasi hal itu?

Jawaban:

Bahasa Indonesia diberikan di tingkat SD dan SLTP pada tahun 1960-an pada seluruh bahasa asing. Hubungannya dapat melanjutkan ke Universitas Peking. Di SD-Menengah belum ada, yang diutamakan bahasa Inggris. Pada umumnya pengajar dan siswa cinta Indonesia sehingga tidak mengalami kendala sebagai wujud rasa solidaritas selaku negara sedang berkembang yang sama-sama ingin maju. RI-RRC semakin mesra dalam membina persahabatan dan kerja sama, yang ditandai dengan ditandatanganinya piagam kerja sama antara RRC dan RI. Kami optimis akan berjalan baik.

PERKEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN PERISTILAHAN BAHASA INDONESIA DI BAWAH LEMBAGA-LEMBAGA RESMI KEBAHASAAN

Jerome Samuel
INALCO, Paris

Dengan makalah ini kami hendak membahas soal perkembangan dan pengembangan peristilahan bahasa Indonesia di bawah lembaga-lembaga resmi kebahasaan. Topik yang sangat luas ini akan kami singgung melalui beberapa catatan dan pertanyaan saja.

Perkembangan Peristilahan Bahasa Indonesia

a. Pendekatan Historis

- 1) Secara historis, sebagaimana telah diketahui soal pengembangan peristilahan Indonesia pertama digarap oleh Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938. Saat itu muncul kesadaran akan diperlukannya peristilahan Indonesia, bukan asing. Usaha-usaha yang pertama dimulai beberapa lama kemudian, yaitu pada tahun 1942--1945, di bawah naungan Komisi Istilah yang dikelola oleh Sutan Takdir Alisjahbana.
- 2) Namun, perlu diingatkan pula bahwa perkembangan dan pemodernan bahasa Melayu (kemudian bahasa Indonesia), baik kosakata umumnya maupun peristilahan, merupakan suatu proses yang sinambung dari zaman ke zaman, sejak abad VII Masehi (prasasti tertua dalam bahasa Melayu kuno) hingga masa kini, tanpa henti-hentinya.
- 3) Perkembangan peristilahan bahasa Indonesia pada zaman Indonesia merdeka dan secara kelembagaan, perlu kita bedakan antara dua periode yang berikut.

Pertama, usaha yang dikerjakan oleh Komisi Istilah di masa pemerintahan Soekarno. Pekerjaan Komisi Istilah kurang terarah dan efisien, tetapi membuahkan puluhan ribu istilah dan di antaranya tentu ada yang akhirnya mengakar dan terpakai luas sampai sekarang ini.

Kedua, usaha di bawah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (sekarang Pusat Bahasa), baik yang dilaksanakan langsung oleh lembaga tersebut maupun dalam rangka kerja sama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. Periode ini dimulai pada paruh pertama tahun 1970-an dan masih berlangsung. Berbeda dengan periode sebelumnya, kegiatan peristilahan ilmi merupakan hasil perencanaan bahasa, sifatnya boleh dikatakan sistematis dan berbagai bidang ilmu mendapatkan perhatian khusus dari para perancang istilah.

Di samping itu, kita jangan lupa bahwa pengembangan peristilahan oleh lembaga resmi kebahasaan hanyalah sebagian saja dari perkembangan istilah secara menyeluruh. Memang, para penutur

bahasa, terutama dari berbagai profesi atau sektor kerja memainkan peranan yang sangat menentukan dalam menciptakan istilah baru atau menerjemahkan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia, antara lain perguruan tinggi, media massa, sektor industri, dan sektor jasa.

b. Pendekatan tekstual

Kalau memikirkan soal istilah, kita harus mengaitkannya dengan beragam wacana ilmiah dan teknis, baik tulisan maupun lisan tempat istilah itu terdapat.

Keperluan para pemakai istilah dan teks iptek pun banyak berubah selama abad dua puluh dan sejak Indonesia merdeka. Awal mulanya, salah satu tuntutan yang sangat mendesak adalah melengkapi peristilahan untuk memenuhi kebutuhan penerjemahan dan penyusunan buku ajar di sekolah menengah, misalnya. Istilah-istilah itu tidak seberapa spesifik dan bersifat umum sekalipun tidak dapat digolongkan dalam kosakata umum.

Kini, literatur il-tek Indonesia di tingkat sekolah menengah sudah ada dan di tingkat perguruan tinggi sudah ada sebagian. Akan tetapi, kebutuhan tekstual dan istilah semakin spesifik dan semakin luas dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat pula.

c. Pendekatan Linguistik

Secara linguistik, kosakata setiap bahasa dapat berkembang atau dikembangkan dengan menggunakan berbagai cara yang tersedia untuk membentuk kata baru seperti: pemungutan (pemungutan langsung atau tidak langsung), pemajemukan, pengimbuhan, atau sintagmatisasi. Namun, rupanya semua cara itu tidak selalu digunakan, dan setiap zaman cenderung mengutamakan cara-cara tertentu. Ini sudah tampak jelas untuk pemungutan kata. Sepanjang sejarah bahasa Indonesia pernah meminjam kata dari bahasa Sanskerta, lalu Arab dan Persia, kemudian Portugis, Belanda, Inggris, dan lain-lain. Hal yang sama dapat diamati juga dari segi morfologi. Dalam konteks Indonesia abad dua puluh, peristilahan bahasa Indonesia bersumber pada peristilahan bahasa asing dan bersifat terjemahan, kecenderungan tadi harus kita kaitkan dengan bahasa asing yang menjadi bahasa sumber.

Pada tahun 1950-an, Komisi Istilah hampir selalu merujuk pada bahasa Belanda sehingga sering memilih untuk mencontoh bentuk istilah Belanda. Bahasa Belanda, sebagai bahasa rumpun Germania, banyak menggunakan pemajemukan kata. Jumlah kata majemuk yang diciptakan oleh Komisi Istilah cukup signifikan juga.

Sejak tahun 1960-an, bahasa Inggris menjadi bahasa sumber istilah yang pertama, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bahasa Inggris masuk juga rumpun Germania, tetapi telah mengalami pengaruh bahasa Prancis dan bahasa Latin yang sangat kental sehingga pengimbuhan dan pemakaian unsur kata dari bahasa Latin dan Yunani berperan besar dalam pembentukan istilah dan kosakata baru. Hal yang

serupa terjadi dengan pengembangan istilah bahasa Indonesia di era Pusat Bahasa. Salah satu cara yang cukup disukai oleh pakar dan terminolog Pusat Bahasa adalah "pengimbuhan kompleks" yang terdapat, misalnya, pada istilah berimbuhan *keter-an*. Imbuhan kompleks yang menggabungkan dua imbuhan, yaitu *ter-* dan *ke-an* itu, digunakan (dan kami rasa boleh dikatakan dirancang) untuk menerjemahkan akhiran Inggris *-ability* atau *-ivity*, misalnya, "keterkutuban" sebagai padanan istilah Inggris *polarizability*.

Sebagai contoh perbedaan antara ciptaan-ciptaan tahun 1950-an dengan tahun 1980 dan 1990-an, mari kita perhatikan konsep fisika yang definisinya adalah sebagai berikut: "kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik, getaran-getaran, atau kalor". Dalam bahasa Belanda konsep tersebut diungkapkan dengan kata majemuk *geleidingsvermogen* yang diterjemahkan oleh Komisi Istilah dengan istilah Indonesia "daya-hantar". Bahasa Inggris menggunakan istilah *conductivity* dan Pusat Bahasa menerjemahkannya dengan dua istilah Indonesia lain, yaitu "konduktivitas" dan "keterhantaran". Sampai sekarang, istilah "daya-hantar" masih tetap terpakai; istilah "konduktivitas" sudah diterima, tetapi istilah "keterhantaran", yang menurut kami adalah singkat, hemat, malah boleh dikatakan elegan, belum berakar benar di luar kalangan Pusat Bahasa.

d. Keberhasilan di Awal Era Reformasi

Pada masa pemerintahan Orde Baru dan di bidang peristilahan, kami melihat dua keberhasilan yang sangat menonjol, yakni sebagai berikut.

Pertama, penerapan konsep dan prinsip perencanaan bahasa. Langkah inilah yang memungkinkan Pusat Bahasa menentukan kaidah-kaidah pembentukan istilah yang terkumpul dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, kemudian memilih berbagai bidang ilmu untuk diolah secara terminologis dan peristilahannya dilengkapi dengan istilah yang perlu, sesuai dengan tata kerja yang teratur. Sampai akhir tahun 1995, Pusat Bahasa berhasil menciptakan sekitar 160.000 istilah dan menerbitkan tidak kurang dari 59 kamus istilah, yang kebanyakan melingkupi empat bidang ilmu dasar.

Kedua, terjalinnya hubungan kerja sama antara negara-negara yang berbahasa Melayu. Di sini kami menggunakan istilah "Melayu" dalam arti yang luas, yang mencakup ragam bahasa resmi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta dialek-dialek bahasa Melayu. Jadi, sejak dua puluh tahun silam, dua atau tiga kali setahun para terminolog lembaga resmi kebahasaan Indonesia, Malaysia, dan Brunei berkumpul dan menggarap bersama istilah-istilah baru. Melalui wadah itulah diciptakan sebagian dari 160.000 istilah yang kami sebutkan tadi.

Evaluasi

a. Pengembangan Istilah

Sekalipun hasil seperempat abad pengembangan peristilahan di Indo-

nesia patut dipuji, menurut kami beberapa pertanyaan masih belum terjawab, antara lain yang berikut.

Pertama, seberapa jauh puluhan ribu istilah ciptaan Pusat Bahasa menjadi insan linguistik yang hidup di tengah masyarakat penutur bahasa Indonesia? Memang kita tahu bahwa istilah baru yang tidak pernah menjelajahi dunia teks dan buku, tetapi hanya mendekam di tengah halaman-halaman kamus istilah yang bisa dikatakan mati dan sia-sia. Atau dengan kata lain, kami bertanya: sejauh mana keperluan masyarakat Indonesia, baik secara umum maupun di berbagai kalangan khusus, terpenuhi oleh istilah garapan Pusat Bahasa? Ini menyangkut soal implementasi istilah baru, yaitu keberterimaannya dan penyebarluasannya sampai titik istilah baru itu betul-betul mengakar di kalangan pemakainya.

Kedua, sudahkah muncul kesadaran kebahasaan bersama, antara tiga negara yang berbahasa Melayu? Setinggi berapa persen istilah Indonesia dan Malaysia hasil kerja sama MABBIM berbentuk dan bermakna sama di Indonesia dan di negara jiran? Secara konkretnya, dapatkah seorang mahasiswa Indonesia menggunakan buku terbitan Malaysia dan memahaminya dengan mudah? Adakah, katakan di Universiti Kebangsaan Malaysia, dosen yang menganjurkan buku-buku ilmu Indonesia kepada mahasiswanya? Dari segi industri informasi dan media, sejauh mana buku il-tek Indonesia dipasarkan di Malaysia dan sebaliknya? Kalau tidak, apa tujuan dan manfaat penyelarasan peristilahan bahasa Indonesia dan Malaysia?

Selama beberapa tahun terakhir ini kami mencoba mengevaluasi hasil usaha Pusat Bahasa di bidang istilah, terutama dari segi implementasi istilah-istilah baru lembaga tersebut dalam buku ajar sekolah menengah, dan dari segi penyelarasan istilah bahasa Indonesia dan Malaysia.

b. ***Penyebarluasan (pengakaran) istilah baru***

Keterbatasan penyebarluasan istilah baru Pusat Bahasa sudah diketahui oleh umum: sampai pertengahan tahun 1990-an, kamus istilah Pusat Bahasa relatif tidak keluar dari kalangan lembaga itu sendiri dan tidak mudah diperoleh di toko-toko buku. Pusat Bahasa kurang rela untuk membiarkan publikasinya dibajak, padahal inilah tanda buku yang laris, karena menarik perhatian para pembajak.

Akan tetapi, tentu saja publikasi bukan jalur satu-satunya untuk memasyarakatkan istilah baru. Sekali lagi, istilah sebagai insan linguistik hanyalah hidup di tengah sesamanya, dalam aneka ragam teks dan dalam tuturan pemakai bahasa. Di antara sekian jenis teks, kami memilih meneliti buku ajar, dengan asumsi bahwa pemakaian istilah baru lebih mudah dipaksakan pada kaum guru dan siswa. Namun, realita menunjuk hal lain.

Kami pernah mengevaluasi pemakaian istilah resmi bidang termodinamika dalam buku ajar pendidikan menengah dan atas. Ini sulit diukur secara statistika, tetapi kasarnya, katakan bahwa dari 61 istilah

yang kami kaji di buku sekolah dan kamus Pusat Bahasa, 32 sama, 24 beda, dan 5 tidak dikenal oleh Pusat Bahasa. Akan tetapi, mengingat naskah buku-buku ajaran sekolah dasar dan menengah dievaluasi dan dikoreksi oleh Pusat Bahasa sebelum diterbitkan, semestinya dalam buku-buku itu kita sama sekali tidak menemukan istilah-istilah bukan resmi. Rupanya penyusun buku ajar dan penerbit enggan mematuhi petunjuk dari Pusat Bahasa, apabila istilah rekaan Pusat Bahasa dianggap kurang dapat dipahami oleh para guru dan siswa. Sekadar sebagai contoh, berikut ini kami sebutkan beberapa istilah yang ditolak, yang tidak dipilih secara acak-acakan, tetapi yang mengungkapkan konsep-konsep dasar termodinamika.

Istilah "keterhantaran" belum bisa diterima, barangkali karena pemakaian dan makna imbuhan kompleks *keter-an* belum dikuasai secara luas, tetapi menurut kami, punya masa depan. Guru dan siswa lebih suka "daya-antar" atau "konduktivitas" (yang dianjurkan juga oleh Pusat Bahasa). Dalam korpus kami, istilah "bahang" tidak pernah muncul dan kami tidak yakin kalau di suatu saat "bahang" bisa menggantikan istilah "kalor" yang sangat lazim. Sama halnya dengan "ilian", istilah ciptaan Pusat Bahasa, untuk mengungkapkan sebuah fenomena fisika yang lebih dikenal sebagai "konveksi". Ini soal keberterimaan istilah yang perlu dikaji untuk dimengerti. Apa pun alasan perancang istilah untuk mengangkat istilah "ilian", "bahang" atau "keterhantaran", reaksi dari masyarakat pemakai harus ditanggapi dengan rendah hati, karena si perancang hanya menawarkan, sedangkan sang pemakai yang menentukan. Mengutip ejekan seorang sosiolinguist Prancis (L. Guespin), para terminolog jangan mencoba menanam pohon tropis di kutub utara.

c. *Kerja Sama di Mabbim*

Dalam hal ini, kami telah membandingkan peristilahan Indonesia dan Malaysia di bidang elektromagnetika, berdasarkan sebuah korpus yang terdiri atas beberapa kamus istilah terbitan Pusat Bahasa di Jakarta dan Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur. Di sini pula, analisis statistika korpus kami tidak sepenuhnya relevan karena tingkat penyelarasan istilah Indonesia dan Malaysia boleh bervariasi, ada istilah yang sama sepenuhnya, ada juga yang sama atau berbeda sebagian dan ada lagi yang sama sekali berbeda. Belum lagi, perbedaan bentuk istilah yang kadang-kadang menghambat pengertian timbal balik kadang tidak. Secara kasarnya, lebih kurang 60% istilah sama atau berbeda tetapi mudah dimengerti oleh lawan pihak, dan angka ini sudah cukup mengagumkan.

Di samping pasangan istilah yang bentuknya berbeda tanpa menghambat pengertian, misalnya:

Mal. "halaju" vs BI "kecepatan", untuk istilah Inggris *velocity*,

Terdapat juga istilah yang bakal sulit menyeberangi selat Malaka, seperti:

Mal. "nyahcas bara" vs BI "lucutan kilat", padanan istilah Inggris *glow discharge*.

Tanpa dibahas lebih panjang, cukup kami katakan bahwa sepertinya pihak Indonesia lebih inovatif dalam menerima unsur morfologis baru, sedangkan pihak Malaysia masih mempertahankan kemelayuan bahasa nasionalnya, misalnya:

Mal. "kefotoionan" vs BI "fotoionisasi" sebagai padanan istilah Inggris *photoionisation*,

atau:

Mal. "kesuperkonduksian" vs BI "adiketerhantaran" dan "superkonduktivitas" sebagai padanan istilah Inggris *superconductivity*.

Pentingnya kenyataan ini perlu ditekankan sebab pilihan masing-masing tidak hanya berdasarkan pertimbangan linguistik, tetapi juga dikarenakan latar belakang politik dan sosiolinguistik dua anggota Mabbim ini yang sangat berbeda. Ini wajar saja dan usaha penyeselarasan istilah antara berbagai negara yang berbahasa Prancis, terutama Prancis dan Québec, menghadapi kesulitan yang serupa. Salah satu simpulan dari dua pengalaman itu adalah bahwa kita harus menerima keragaman istilah dan kesinoniman, dua fenomena yang masih ditolak oleh sejumlah pakar terminologi.

Terakhir tentang keberhasilan usaha Mabbim, kami belum sempat mengukur implementasi istilah-istilah Dewan Bahasa dan Pustaka di Malaysia serta belum memantau arus informasi il-teknik antara Indonesia dan Malaysia sehingga pertanyaan kami tadi belum bisa kami jawab. Akan tetapi, beberapa kunjungan di toko-toko buku di Jakarta saja sudah membuktikan bahwa praktis terbitan Malaysia tidak dipasarkan di Indonesia. Di Indonesia, selain TKI yang merantau ke Semenanjung untuk mencari hidup, siapa yang perlu menguasai bahasa Malaysia? Atau memang istilah Mabbim diselaraskan buat pada TKI itu?

Simpulan

Dengan contoh yang kami sampaikan ini, telah kami garis bawahi beberapa kekurangan perkembangan peristilahan bahasa Indonesia di bawah lembaga resmi kebahasaan? Akan tetapi, kritik ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, sebagai berikut.

1. Selain Indonesia, banyak negara telah mencoba untuk memengaruhi atau mengarahkan perkembangan peristilahan bahasa nasionalnya, dan ini terjadi juga di negara-negara maju. Ambil contoh bahasa Prancis. Sejak tahun 1950-an, di Prancis telah didirikan komisi-komisi istilah

juga dengan tujuan terselubung menghambat pengaruh bahasa Inggris yang merajalela. Hasilnya baru dievaluasi sepuluh tahun yang lalu dan ternyata sangat minim. Hal serupa terjadi di Quebec, negara bagian Kanada yang berbahasa Prancis. Dengan berbagai pertimbangan sosial, ekonomi dan politik, antara akhir tahun 1970-an dan sampai awal tahun 1990-an, pemerintah Quebec berusaha untuk memprancisakan dunia kerja dan melengkapi keperluan peristilahannya dalam bahasa Prancis. Akhirnya, hasil kebijakan itu dinilai tidak sesuai dengan dana yang dihabiskan.

2. Sama seperti di sini, di banyak negara hasil politik istilah itu kurang memuaskan, kadang-kadang tidak meyakinkan atau tidak setinggi harapan-harapan semula.

Dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan tentang kesesuaian politik istilah dengan realita. Berikut ini kami sampaikan beberapa catatan.

1. Kebijakan lembaga kebahasaan harus didasari oleh pengetahuan dan pemahaman situasi sociolinguistik yang ada. Perubahan linguistik berencana dan perubahan linguistik alami atau spontan mempunyai logika masing-masing, tetapi keduanya terkait erat. Negara sendiri dan lembaga kebahasaannya berperan sebagai salah satu di antara sekian kekuatan yang memengaruhi situasi sociolinguistik masyarakat tertentu. Hal ini berlaku juga untuk soal peristilahan.
2. Kalau memang tujuan upaya peristilahan adalah untuk mengoptimalkan arus komunikasi di kalangan khusus, dapatkah lembaga resmi bergerak tanpa memperhatikan dan mengindahkan kebiasaan para penutur dalam beristilah? Dapatkah lembaga tersebut menjalankan kegiatannya tanpa meneliti keperluan masyarakat, konteks wacana il-tek, dan lain-lain terlebih dahulu? Kebiasaan beristilah para pemakai tidak jarang bertentangan dengan kaidah-kaidah pembentukan istilah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga resmi kebahasaan, dan sangat variatif. Kalau dilihat dengan kaca mata ilmu terminologi, hal ini dianggap boros. Namun, ini suatu kenyataan yang tidak terelakkan dan menurut kami implementasi kebijakan peristilahan sebaiknya memprioritaskan kebiasaan penutur daripada prinsip dan upaya para pakar terminologi.
3. Perlu kita titik beratkan pentingnya faktor waktu. Perubahan linguistik berlangsung dengan lambat, dan harus diukur dengan hitungan dasawarsa atau abad.
4. Seandainya penelitian kami tentang implementasi istilah diulang lima atau sepuluh tahun lagi, pastilah akan membawa hasil lain yang sangat mungkin lebih menggembirakan. Jadi, justru inilah yang pada hemat kami paling mendesak sekarang. Setelah seperempat abad politik istilah, setelah ratusan ribu istilah diciptakan dan puluhan kamus diterbitkan, kita perlu turun ke lapangan, meneliti hasil implementasi istilah, kebiasaan, dan keperluan kaum pemakai untuk mengevaluasi secara luas hasil kegiatan Pusat Bahasa dan mengarahkannya kembali bila perlu.

KHAZANAH KAMUS-KAMUS INDONESIA DAN MELAYU DI RUSIA

Victor A. Pogadaev
Universitas Negara Moskow

Sejarah leksikografi Indonesia di Rusia mulai pada abad XVIII bahwa atas perintah Ratu Ekaterina Agung sebuah kamus komparatif dari 180 bahasa dan logat termasuk bahasa Melayu/Indonesia diterbitkan Pada permulaan abad ke-XX daftar serupa itu diterbitkan sebagai lampiran buku *Negeri Belanda Tropika* yang ditulis oleh konsul Rusia di Jawa M.M. Bakunin (Bakunin, 1902) Kebutuhan sebenar akan kamus yang disusun betul-betul atas dasar ilmiah terasa sudah pada tahun 1920-an apabila penyelidikan Indonesia dianjurkan oleh para ahli Rusia ED. Polivanov dan L.A. Mervart (tentang L.A. Mervart lihat Pamickel, 1995; Pogadaev, 1996). Akan tetapi, langkah-langkah konkret dalam bidang ini diambil hanya pada tahun 1950-an ketika bahasa Indonesia mulai diajarkan di beberapa perguruan tinggi Moskow dan selanjutnya di Sanct Petersburg. Sejak itu, terbentuklah sekolah leksikografi bahasa Indonesia di Rusia dengan para leksikograf yang berpembawaan yang menyusun beberapa banyak kamus dan yang paling kecil seperti kamus saku hingga kamus besar sekali yang tidak kalah dengan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh W. Poerwadarminta di Indonesia (Poerwadarminta) ataupun *Kamus Dewan* Teuku Iskandar di Malaysia (Iskandar 1964) Setakat ini di Rusia diterbitkan lebih dari 15 buah kamus bahasa Indonesia dan bahasa Melayu (yang pertama pada tahun 1958) yang ciri-ciri khasnya diuraikan di bawah ini.

Pada tahun 1958 telah diterbitkan *Kamus Kantung Rusia-Indonesia* oleh N.F Bulygin L.I. Ushakova (Bulygin, 1958). Kamus itu memuat 7.000 perkataan. Kamus kecil ini (ukurannya 6 x 8.5 cm) adalah kamus bahasa Indonesia yang paling awal diterbitkan di Rusia: sebelumnya ada saja daftar kata yang disusun dan distensil untuk kegunaan dalam beberapa perguruan tinggi semata-mata. Kamus ini termasuk kamus saku yang dikeluarkan karena terjadi perkembangan pesat pertukaran wisatawan antara Rusia dengan negara-negara asing. Kamus ini terutama diperuntukkan bagi orang Rusia supaya mereka dapat bergaul dengan orang Indonesia di bahasanya Volume kecil menentukan isinya: dalam kamus itu dientrikan kata-kata yang paling sering dipakai dalam keadaan sehari-hari. Meskipun demikian, diberikan juga jumlah yang cukup pada simpulan bahasa dan rangkai kata.

Pada tahun 1958 juga diterbitkan sebuah kamus yang berjudul *Buku Percakapan Indonesia-Rusia* yang mengandung 1.000 ungkapan dan diusahakan oleh Bahagian Penerangan Kedutaan Besar Rusia di Indonesia dengan dibantu oleh Intojo, mahaguru bahasa dan sastra Indonesia di Moskow (Buku percakapan 1958). Kamus itu terdiri atas 13 bagian dengan tema-tema seperti berikut: pengenalan, di kota, lalu lintas (kereta api, udara,

laut), di toko, di teater (bioskop, konser), pertolongan pertama, kesehatan, olahraga, majalah dan koran, radio dan televisi, dan duane. Semua perkataan dan ungkapan Rusia diberi tanda ucapan fonetik dengan huruf Latin.

Tahun 1959 ditandai dengan penerbitan kamus baru yakni *Kamus Indonesia-Rusia* yang disusun oleh N.F. Bulygin dan L.I. Ushakova di bawah pimpinan Suhadiono (Bulygin 1959). Kamus itu ialah sebagai "pasangan" bagi *Kamus Kantung Rusia-Indonesia* (1958) yang diciptakan oleh para penyusun yang sama dan memuat kira-kira 8.000 kata. Perbendaharaan kata dipilih dengan sangat teliti supaya para pemakai bisa membaca dan mengerti teks-teks yang sedang kesukarannya dan bergaul dengan orang Indonesia. Keunggulan kamus ini ialah daftar kependekan dan akronim yang luas dipakai di Indonesia.

Peristiwa besar dalam bidang perkamusan ialah terbitnya pada tahun 1961 *Kamus Indonesia-Rusia* yang disusun oleh R.N. Korigodsky, O.N. Kondrashkin, dan B.I. Zinowjev dengan redaktur oleh Suhadiono dan A.S. Teselkin. Kamus ini ialah kamus bahasa Indonesia pertama yang begitu besar: memuat 45.000 kata masukan. Selama kira-kira 30 tahun kamus ini merupakan kamus bahasa Indonesia utama yang digunakan oleh para pakar bahasa, penerjemah, dan mahasiswa Rusia dan mendapat sambutan yang baik di luar negeri. Misalnya, seorang ahli linguistik Poland yang bernama R. Stiller pernah menulis: Mungkin tidak ada Kamus bahasa Melayu modern di dunia sekarang ini yang lebih baik daripada *Kamus Indonesia-Rusia* ini. Buku panduan yang sangat berisi itu sangat perlu untuk semua yang berkecimpung di alam penyelidikan Melayu" (Stiller 1965). Penilaian yang tinggi itu benar-benar wajar karena kamus ini sangat lengkap dan memuat kata-kata dan ungkapan kesusastraan dan politik, istilah berbagai macam ilmu pengetahuan dan sejumlah kata-kata yang perlu diketahui untuk membaca buku-buku kesusastraan lama. Kamus ini dilengkapi dengan daftar ringkas singkatan kata-kata Indonesia, daftar nama geografis, nama ukuran dan timbangan serta mata uang Indonesia yang disusun khas untuk kamus ini oleh S.S. Zakharov. Keistimewaan kamus ini ialah lampiran dengan makalah singkat tata bahasa bahasa Indonesia yang disusun oleh A.S. Teselkin. Oleh karena itu, untuk orang Rusia, kamus ini merupakan buku pelajaran yang dapat digunakan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bibliografinya berjumlah 13 buah kamus termasuk *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Modern Bahasa Indonesia* oleh Sutan Mohammad Zain (Zain, 1995), dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* oleh H.N. Arifin (Arifin, 1951).

Jumlah besar mahasiswa Indonesia yang dikirimkan ke Rusia untuk menuntut ilmu pada tahun 60-an menimbulkan kebutuhan menerbitkan kamus pelajaran. Siri kamus itu dibuka pada tahun 1963 dengan *Buku Pelajaran Percakapan Indonesia-Rusia*, susunan L.I. Ushakova dan E.S. Belkina, redaktur Intojo (Ushakova, 1963). Bukti ini merupakan kamus kecil yang kata-katanya didaftarkan sesuai dengan tema-tema tertentu dan terdiri daripada 12 bagian. Selain daripada itu ada dua bab yang penting: keterangan tentang abjad dan bunyi bahasa

Rusia serta keterangan singkat tentang tata bahasa bahasa Rusia, yakni maklumat yang pasti berguna bagi orang yang mulai belajar bahasa Rusia.

Pada tahun itu juga, diterbitkan sebuah lagi kamus yang berjudul *Kamus Pelajaran Rusia-Indonesia* yang disusun oleh A.G. Lordkipanidze dan A.P. Pavlenko, redaktur Intojo. Meskipun volume kamus itu tidak begitu besar (lebih kurang 7.000 kata). Kamus itu terkenal karena pemilihan saksama kata-kata dan padanan makna beserta contoh-contoh pemakaiannya sangat tepat. Lebih-lebih lagi, segala penjelasan serta petunjuk itu diberikan dalam bahasa Indonesia. Untuk sebanyak mungkin mempermudah ucapan kata-kata Rusia, diberikan abjad Rusia dengan penjelasan bagaimana bunyinya harus diucapkan. Selain itu kamus ini ada lampiran berupa daftar nama geografi.

Setahun kemudian, pada tahun 1964, diterbitkan pula *Kamus Pelajaran Indonesia-Rusia* yang disusun oleh A.S. Teselkin dan A.P. Pavlenko dengan perbendaharaan 7.000 kata yang juga diperuntukkan kepada orang Indonesia yang mulai mempelajari bahasa Rusia (Teselkin 1964). Dengan bantuannya, kita bisa menerjemahkan teks-teks yang tidak sukar dan menyusun kalimat-kalimat sederhana. Hampir tiap entri dijelaskan dengan contoh ungkapan. Segala macam keterangan dan tanda diberikan dalam bahasa Indonesia. Kelebihan kamus ini ialah lampiran ikhtisar tata bahasa Rusia yang disusun oleh A.S. Teselkin.

Di samping kamus umum, diusahakan juga penyusunan beberapa kamus khusus, antaranya ialah *Kamus Singkat Istilah Sosial Politik Bahasa Rusia-Indonesia* yang disusun oleh V.I. Pechkurov dan diterbitkan pada tahun 1966 (Pechkurov, 1966). Kamus itu memuat 2.500 kata dan leksikon politik bahasa Indonesia. Tentu, kamus ini mencerminkan situasi politik waktu itu di Indonesia dan memuat kata-kata yang sekarang tidak dipakai lagi ("pinggirperangisme", "text-bookthinkerisme") tetapi ianya berguna juga untuk membaca buku-buku masa silam. Yang tergolong kamus khusus juga ialah *Kamus Singkat Istilah Aritmetik Rusia-Indonesia* yang disusun oleh E.N. Samtsova dan memuat kira-kira 400 kata (Samtsova, 1966). Kamus ini disusun di Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa khas bagi para mahasiswa Indonesia jurusan ilmu eksakta. Ukurannya kecil sekali dan disusun tidak menurut abjad, tetapi sesuai dengan kurikulum pelajaran matematik yang meliputi 29 kuliah.

Pada tahun 1972 E.S. Belkina, A.P. Pavlenko, A.S. Teselkin dan L.I. Ushakova dengan Sjahrul Sjarif sebagai redaktur telah menyusun *Kamus Rusia-Indonesia* yang memuat kira-kira 27.000 kata. Kamus ini ialah kamus bahasa Rusia-Indonesia pertama yang diterbitkan dengan begitu lengkap dan yang memungkinkan untuk menerjemahkan teks-teks yang agak sukar dari cabang ilmu pengetahuan yang beraneka ragam dan karya-karya sastra Rusia. Penyusunan kamus ini sangat perlu karena bahasa Indonesia waktu itu banyak diajarkan di perguruan tinggi dan ada usaha untuk menerjemahkan karya-karya sastra klasik Rusia kepada bahasa Indonesia. Tentu tugas para penyusun kamus ini sangat kompleks karena pada masa itu peristilahan dalam bahasa Indonesia belum tersusun dengan sempurna dan

karena itu mereka terpaksa banyak menggunakan kata-kata pinjaman dan bahasa Belanda dan Inggris serta memberi terjemahan yang bersifat penjelasan yang panjang lebar. Misalnya, perkataan Rusia *abordaj* (Inggris: *boarding*) diterjemahkan dengan menggunakan dua belas patah kata Indonesia, yaitu "penjerangan dilaut setjara merapat pada kapal musuh dan menjerbu ke dalamnja" (ejaan lama). Perkataan *avral* (Inggris: *emergency job*) diterjemahkan dengan menggunakan sembilan patah kata, yaitu "pekerdjaan dikapal jang diwadajibkan kepada semua anak buahnja". Sangat lucu bunyinya terjemahan bagi perkataan *kukusyka* (Inggris: *Cuckoo*) yakni "burung jang mengeluarkan bunji kuku". Dalam kamus ini ada daftar nama geografi sebagai lampiran. Kata pengantar serta makalah tentang sistem penyusunan kamus diberikan untuk kemudahan pemakai dalam dua bahasa. Bibliografi berjumlah 10 kamus, termasuk *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh W.J.S. Poerwadarmita dan *Kamus Umum Inggris-Indonesia* oleh S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta (Wojowasito 1959).

Tahun 1977 ditandai dengan penerbitan *Kamus Malaysia-Rusia-Inggris* yang disusun oleh N.V. Rott, V.A. Pogadaev, dan A.P. Pavlenko dan memuat lebih kurang 15.000 kata (Rott, 1977). Penyusunan kamus ini adalah atas inisiatif ahli linguistik dan leksikograf Rusia yang ternama, A.P. Pavlenko (tentang A.R. Pavlenko lihat: Pogadaev, 1966) yang cergas berkecimpung dalam bidang linguistik dengan mengutamakan bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa Sunda, Bahasa Indonesia, dialek Jakarta). Tokoh itu patut juga dipuji karena dialah yang pertama sekali mengajarkan bahasa Melayu (versi Malaysia) di Universitas Moskow. Kamus itu ialah kamus bahasa Melayu pertama di Rusia dan disusun dalam tiga bahasa bukan saja karena waktu itu di Rusia penyusunan kamus beberapa bahasa menjadi populer melainkan juga karena mencerminkan situasi di Malaysia yang pluralistik masyarakatnya di samping berbagai usaha pemerintah Malaysia untuk membina semua bangsa di Semenanjung itu dalam satu kesatuan bangsa" (Telah diterima 1979). Kamus itu tidak begitu besar ukurannya, tetapi disainnya agak menarik dan mendapat hadiah pada pertandingan dalam badan penerbit. Kamus itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang belajar bahasa Melayu. Bibliografi berjumlah lima buah kamus, termasuk *An Unabridged Malay-English Dictionary* oleh Richard Winstedt (Winstedt, 1962) dan *Kamus Dewan* oleh Teuku Iskandar.

Sembilan tahun kemudian, pada 1986, diterbitkan juga *Kamus Bahasa Rusia-Bahasa Malaysia* yang disusun oleh V.A. Pogadaev selaku Ketua Penyusun dan N.V. Rott (Pogadaev, 1966). Kamus ini memuat lebih kurang 30.000 perkataan bermacam bidang yang memungkinkan membuat terjemahan teks-teks Rusia berbagai peringkat kesukarannya, termasuk karya sastra. Kamus ini tidak menguraikan makna kata melainkan menyediakan padanan bahasa Melayu. Untuk kemudahan para pembaca, prakata dan makalah "Tentang Susunan Kamus" diberikan dalam dua bahasa. Abdul Manaf Hamid, seorang pegawai kanan Kementerian Luar Negeri pernah menulis dalam suratnya kepada penerbit kamus ini: "Kami rasa memang tepat pada waktunya bahwa

kemus ini diterbitkan sekarang demi kepentingan serta perhubungan baik antara kedua negara kita terutama sekali ketika perhubungan dagang antara kedua negara kini berkembang. Sebagai sebuah negara berkembang, Malaysia sedang berusaha untuk meluaskan pengetahuan rakyatnya serta mendorong mereka mempelajari bahasa-bahasa terutama sekali yang berpengaruh di dunia".

Penerbitan kamus ini sangat dielu-elukan di Rusia. Misalnya seorang wartawan dan leksikograf S.S. Zacharov menyebut kamus ini sebagai kamus bahasa Timur yang terbaik di negara itu dan berpendapat bahwa karena kekayaan leksik dan ketepatan padanan kamus itu tidak kalah kepada karya leksikografi Inggeris antara lain kepada *Russian-Inggeris Dictionary* oleh M. Callaham (Nauchnaya konferentsia 1996). Di Malaysia munculnya kamus ini dipandang sebagai salah satu bukti tentang pengiktirafan bahasa Melayu sebagai berstatus internasional (Sajab Siraj, 1987). Bibliograti berjumlah 10 buah kamus termasuk *Kamus Dewan* dan *Kamus Dwibahasa Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia* (Kamus Dwibahasa, 1979).

Pada tahun 1990 diterbitkan pula *Kamus Besar Bahasa Indonesia-Rusia* dalam 2 jilid susunan R.N. Korigodskyi sebagai redaktur-koordinator, O.N. Kondrashkin, B.I. Zinowyeu, dan W.N. Losyagin (Korigodsky, 1990) Kamus ini memuatkan 56.000 kata dan 46.000 rangkai kata. Kamus ini benar-benar ialah kamus bahasa Indonesia yang paling lengkap yang pernah diterbitkan di Rusia. Pada mulanya kamus ini dirancang sebagai edisi kedua kepada *Kamus Bahasa Indonesia-Rusia* tahun 1961. Akan tetapi, selanjutnya R.N. Korigodskyi, selaku ketua mengajukan ide yang mengubah rancangan awal dan menjadikan kamus ini sebagai "Kamus Bahasa Melayu" dengan mendaftarkan perbendaharaan kata yang dipakai di Indonesia dan di Malaysia. Akhirnya proyek ini terbengkalai karena ternyata bahwa naskah awalnya yang disediakan hanya mencerminkan ciri-ciri khas bahasa Indonesia dan istilah khas Melayu "dianaktirikan". Tambahan pula bilangan terbesar ahli linguistik Rusia tidak menyokong proyek ini dengan alasan bahwa perbedaan antara kedua bahasa ini terlalu besar sehingga patut diterbitkan dua kamus yang tersendiri. Alasan ini ada benarnya dan dikukuhkan oleh pendirian ahli linguistik Malaysia sendiri. Misalnya, Lutfi Abas setelah menguraikan sebuah iklan dalam bahasa Melayu menarik simpulan bahwa ada 63% kata dari iklan itu yang tidak dipahami, disalahartikan, diragukan, dan dianggap aneh, oleh orang Indonesia (Lutfi Abas, 1971). Sesudah penyempurnaan ejaan jumlah kata seperti itu berkurang, tetapi ada pendapat bahwa persamaan leksik tidak melebihi 80 peratus (Ethnologue, 1999), Penerbitan *Kamus Istilah Hidrologi Malaysia-Indonesia-Inggeris* oleh UNESCO pada tahun 1982 (Kamus Hidrologi, 1982) dipandang sebagai bukti tentang kebenaran tendensi itu juga. Akhirnya, disetujui bahwa kamus yang waktu itu sedang disusun akan menjadi kamus bahasa Indonesia saja.

Ciri khas *Kamus Besar Bahasa Indonesia-Rusia* itu ialah unsur ensiklopedia, suatu hal yang tidak pernah ada dalam edisi sebelumnya.

Selain kata-kata biasa, dalam kamus ini dientrikan juga nama daerah yang bersejarah, badan pemerintah, parpol dan ormas Indonesia, provinsi dan daerah istimewa Indonesia, kotamadya dan kecamatan Jakarta Raya, daerah militer Indonesia, provinsi Cina, negeri-negeri Malaysia, nama koran dan majalah Indonesia yang utama, nama beberapa universitas Indonesia, nama negarawan, politikus, agama, ilmuwan dan budayawan Indonesia yang terkemuka, watak wayang, nama binatang, tumbuh-tumbuhan, alat kerja, dan lain-lain dengan penjelasan dan kadang-kadang ilustrasi. Cara penyusunan kata dan simpulan kata (tepat pada huruf yang pertama) memudahkan penggunaan kamus itu. Malangnya saja, kriteria kemasukan unsur ensikloedia itu kabur sekali (lihat ulasan: Pogadaev, 1990). Meskipun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa karya ini adalah karya yang paling ulung. Seperti yang ditulis oleh ahli linguistik Rusia, professor Institut Perhubungan Internasional di Moskow G.L. Kisselbrenner, "sekarang sudah bisa menyatakan dengan pasti bahwa kamus ini ialah terbitan yang berhasil. Ianya lulus ujian yang paling serius yakni ujian masa" (Kisselbrenner, 1994). Bibliografi kamus ini berjumlah 21 buah kamus termasuk semua kamus bahasa Indonesia ulung yang diterbitkan di luar negeri.

Pada tahun akhir-akhir ini di Rusia diterbitkan beberapa kamus kecil saja yakni *Kamus mini Rusia-Melayu* (Pogadaev, 1997), *Panduan Percakapan Indonesia-Rusia* (Pogadaev, 1997) dan *Panduan Percakapan Indonesia-Rusia, Rusia-Indonesia* (Pogadaev, 2000) yang disusun oleh V.A. Pogadaev dan S.S. Zakharov. Selain dari bab-bab yang biasa untuk panduan percakapan kamus-kamus tadi mengandung juga maklumat mengenai tempat-tempat menari di Rusia untuk para pelancong dari Malaysia dan Indonesia. Namun, kerja penyusunan kamus Indonesia/Melayu tetap dilaksanakan: dalam proses penerbitan adalah *Kamus Rusia-Indonesia Baru* yang disusun oleh L.N. Demidyuk dan V.A. Pogadaev.

BIBLIOGRAFI

(dalam bahasa Rusia)

- Bakunin 1902 - Bakunin M.M. .. *Tropicheskaya Gollandiya*. Pyaf let na ostrove Yava (Negeri Belanda Tropika. Lima tahun di pulau Jawa). Sanct-Petersburg.
- Belkina 1972 - Belkina E.S., Pavlenko AP., Ushakova L.I. *Russko-Indoneziyskiy slovar* (Kamus Rusia-Indonesia). Redaktur Sjahrul Sjarif. M.: "Sovetskaya entsiklopediya".
- Bulygin 1958 - Bulygin N.F., Ushakova L.I. *Kannanniy RusskoIndonesiyskiy Siovar* (Kamus Kantong Rusia-Indonesia). M.: "Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannih i natsional'nih slovarei". Bulygin 1959 - Bulygin N.F., Ushakova L.I. *Indoneziysko-Russkiy Siovat'* (Kamus Indonesia-Rusia). Redaktur Suhadiono. M.: "Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrsnnih i natsional'nih slovarei".
- Kisselbrenner 1994 - Kisselbrenner G.L. Ot Ekaterini do Suharto

(Sajak zaman Cathrine the Great sampai zaman Suharto) // Knizhnoe Obozrenie (Jurnal Tinjauan Buku), No. 11,15.3.1994.

- Korigodskiy 1961 - Korigodskiy R.N., Kondrashkin O.N., Zinovyev B.I. *Indoneziysko-Russkiy Siovar'* (Kamus Indonesia-Rusia). Redaktur Suhadiono dan A. S. Tesyolkin. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannih i natsional'nih slovarei'.
- Korigodskiy 1990- Korigodskiy R.N., Kondrashkin C.N., Zinowye B.I. dan W.N. Losyagin. *Bo/'shoy Indoneziysko-Russkiy Siovar'* (Kamus Besar Indonesia-Rusia). 2 jilid. Redaktur-Koordinatur R.N. Korigodskiy. M.: "Russkiy yazik".
- Lordkipanidze 1963- Lordkipanidze AG., Pavienko AR. *Uchebniy Russko-Indoneskiy Siovar'* (Kamus Pelajaran Rusia--Indonesia). Redaktur Intojo. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannih i natsional'nih slovarei'.
- Nauchnaya Korferentsiya 1996- Nauchnaya Konferentsiya "Izuchenie malayskogo yazika malayskoy literaturi v Rossii" (Persidangan ilmiah Pengajian bahasa dan sastra Melayu di Rusia" // 'Vostok (Oriens), No.3 hlm. 186.
- Pechkurov 1966- Pechkurov V.I. *Kratkiy Russko-Indoneskiy Slover' Obsyestvenno-Politicheskikh Terminov* (Kamus Singkat Istilah Sosial Politik Bahasa Rusia-Indonesia). M.: Institut Penerjemahan Tentara.
- Pogadaev 1986- Rogadaev V.A, Rott NV. *Russko-Meleyziyskiy Slaver'* (Kamus Babasa Rusia-Bahasa Malaysia). Ketua Penyusun V.A Pogadaev. M.: "Russkiy yazik".
- Pogadaev 1997- Pogadaev V.A, Zakharov S.S. *Russko-Malayskiy Razgovomik* (Kamus mini Rusia-Melayu). M.: Krasnaya gora".
- Pogadaev 1997- Pogadaev V.A .. Zakharov S.S. *Indoneziysko-Russkiy Razgovomik* (Panduan Percakapan Indonesia-Rusia). M.: "Drevo zhizni".
- Pogadaev 2000- Pogadaev V.A, Zakharov S.S. *IndoneziyskoRusskiy Russko-Indoneziyskiy Razgovomik* (Panduan Percakapan Indonesia-Rusia, Rusia-Indonesia). M. : " Muravei-Guide".
- Rott 1977- Rod N.V., Pogadaev V.A, Pavienko AR. *Malayziysko-Russko-Angliyskiy Siovar'* (Kamus Malaysia-Rusia-Inggeris). M. : "Russkiy yazik".
- Samtsova 1966- Samtsova E. N. *Kratkiy Russko-Indoneziyskiy Arifmeticheskikh Terminov* (Kamus Singkat Istikah Aritmetik Rusia-Indonesia). M.: Universitet Druzhbi Nerodov imeni P. LumLJmbi.
- Teselkin 1964- Teselkin AS., Pevlenko AR. *Uchebniy IndonesiyskoRusskiy Slaver'* (Kamus Pelajaran Ruis-IndonesLa). M.:

"Sovetskaya entsiklopediya".

Ushakova 1963- Ushakova L.I., Belkina E.S. *Uchebniy Indoneziysko-Russkiy Razgovorik* (Buku Pelajaran Percakapan IndonesiaRusia). Redaktur Intojo. M.: "Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannih i natsional'nih slovarei".

(dalam bahasa lain)

Arifin 1951 - Arifin H.N. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Telah diterima 1979 - Telah diterima //Berita Buana. 27.4.1979. Jakarta.

Buku Pertjakapan 1958 - *Buku Pertjakapan Indonesia-Rusia*. (1000 ungkapan). Diterbitkan oleh Bagian Penerangan Kedutaan Besar URSS di Indonesia. Jakarta.

Ethnologue 1999 - Barbara F. Grimes (ed.). *Ethnologue. Languages of the World*. SIL International.

Iskandar 1984 - Teuku Iskander. *Kamus Dewan*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Kamus Dwibahasa 1979 - Khalid M. Hussein. *Kamus Dwibahasa Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia*. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Kamus Hidrologi 1982 - *Kamus Istilah Hidrologi Malaysia-Indonesia-Inggeris*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Lufti Abas 1971 - Lufti Abas. Dapatkah orang Indonesia memahami bahasa Malaysia? //Jurnal Dewan Bahasa, 15:3, Mac. Kuala Lumpur.

Pemickel 1995 - Boris Pamickel. *Penelitian Sastera Nusantara di Rusia*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Poerwadarminta 1976 - Poerwadarminta W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, "Balai Pustaka".

Pogadaev 1990 - Victor Pogadaev. *Kamus Besar Bahasa Indonesia-Rusia* //Jurnal Dewan Bahasa. Kuala Lumpur, jilid 34. bil. 7, Julai, h 561-562.

Pogadaev 1996 - Victor Pogadaev. A. P. Pavlenko (1939-1970)//Jurnal Dewan Bahasa. Kuala Lumpur, jilid 40, bil. 1, Januari, h. 88-90.

Pogadaev 1996 - Victor Pogadaev. L. A. Mervart (1889-1965)//Jurnal Dewan Bahasa. Kuala Lumpur, jilid 40, bil. 3, Mac, h. 276 - 279.

Sajab Siraj 1987 - Sajab Siraj. *Kamus Bahasa Malaysia* Diterbitkan di Rusia !! "Berita Harian". 7.5.1987. Kuala Lumpur.

Stiller 1965 - Stiller R. (?)

Recznik Orientalistyczny, t XXVII, z.2. Warsaw.

Winstedt 1962 - Winstedt R.O. *An Unabridged Malay-Engglish Dictionary*. Singapore - Kuala Lumpur.

Wojowasito 1959 - Wojowasito S., Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Inggeris Indonesia*. Jakarta.

Zain 1955 - Zain S.M. *Kamus Moderen Bahasa Indonesia*. Jakarta

Victor A. Pogadaev ialah dosen Institut Negara-Negara Asia Afrika Universitas Negara Moscow dan konsultan penyelia sektor "Ensiklopedi Asia" di Institut Ketimuran Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Pada tahun 1970 selesai pelajaran pascasarjana di Universitas Negara Moscow dan mendapat Ph.D. Ikut serta dalam penyusunan beberapa kamus bahasa Melayu dan Indonesia dan Malaysia termasuk siri biografi tokoh-tokoh sejarah Indonesia (Ken Angrok, Gajah Mada, Sultan Agung, Surapati) dan siri Ensiklopedia Saku (Malaysia, Indonesia, Brunei). Berkecimpung juga dalam bidang penerjemahan sastera.

Anggota peninjau MABM, Anggota Persatuan Geografi Rusia, Persatuan Penyelidikan Timur Rusia dan anggota Badan Pengurus Persatuan Nusantara (Moscow).

Sejak bulan September 2001 dosen Bahasa dan Budaya Rusia di Universiti Malaya (Kuala Lumpur).

LAPORAN SIDANG

Hari, tanggal	: Kamis, 16 Oktober 2003
Judul makalah	: 1) Penyusunan Kamus Rusia Indonesia 2) Pengembangan Peristilahan Bahasa Indonesia
Penyaji	: 1) Victor A. Pogadaev disajikan oleh Lindmila Demidyuk (Rusia) 2) Jerome Samuel (Perancis)
Pemandu	: Mansur Pateda
Pencatat	: 1) Jerniati 2) Sukardi

TANYA JAWAB

1. **Penanya:** Ahmad (MAN Makassar)
Dalam penyusunan kamus bahasa Rusia-Indonesia berarti terjadi proses penerjemahan yang berkaitan erat dengan faktor budaya, yang menjadi masalah banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang dilatari oleh budaya masyarakat Indonesia yang tidak ada di Rusia. Apakah kamus di Rusia tetap menggunakan bahasa Indonesia juga? Atau ada kosakata yang mirip lalu dialihkan pada kosa kata yang mirip di Rusia?

Jawaban:

Pada dasarnya kosakata tersebut secara fungsional bisa mencari padanan atau persamaan. Misalnya situasi yang mencerminkan kerja keras. Namun, cara penggambaran itu mungkin akan berbeda karena bergantung pada faktor psikologis dan cara berpikir.

2. **Penanya:** Supri Samsuri (Universitas Muhammadiyah Makassar)
Bagaimana kriteria peristilahan yang cocok diserap dalam bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia dapat disejajarkan dengan bahasa lainnya di Eropa?

Jawaban:

Sudah ada kaidah, yaitu pedoman pembentukan istilah dengan cara mencari padanan dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia. Kalau tidak ada, baru kami mengambil atau menyerap dari bahasa Asing.

3. **Penanya:** Yus Rusyana (Univesitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
(1) Bagaimana istilah-istilah baru yang ada dapat tersebar dalam bahasa Erofah?
(2) Apakah bapak telah melakukan penelitian mengenai siswa/mahasiswa yang menggunakan kamus pada waktu mereka belajar, begitu pula para ilmuwan pada waktu menulis, mereka menggunakan

kamus? Ataukah mereka bebas saja menerjemahkan secara bebas saja?

Jawaban:

- (1) Dahulu penyebarluasan kamus yang diterbitkan Pusat Bahasa seolah-olah diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Akan tetapi, sekarang tampaknya sudah diubah. Buku-buku terbitan Pusat Bahasa hendaknya tidak mencantumkan lagi “tidak diperjualbelikan”. Kamus bukan satunya jalan untuk menyebarluaskan istilah-istilah baru, ada cara lain misalnya melalui buku-buku sekolah menengah umum. Pakar teknologi itu hendaknya mengikuti kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan mencoba mengarahkannya ke arah lain tanpa harus berharap terlalu tinggi. Di Prancis soal penyebaran istilah baru berbeda dengan di Indonesia khususnya di empat bidang ilmu dasar (matematika, fisika, kimia, dan biologi) keempat bidang ilmu itu semuanya hampir sudah ada istilahnya dan tidak perlu dilengkapi lagi, sedangkan di Indonesia, tampaknya belum ada.
- (2) Pemakaian kamus di kalangan siswa dan para ilmuwan belum saya kaji secara spesifik, tetapi saya sempat mengadakan penelitian dalam satu teknologi di subbidang metodologi lagam. Melalui penelitian itu saya mengetahui bahwa para ahli fisika itu rupanya jarang membuka kamus. Ini terjadi di luar kalangan akademis dan orang-orang di Erofah dan di Indonesia adalah hal yang sangat umum.

ICT DAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI DALAM DAN LUAR NEGARA

Paitoon M. Chaianara

Institut Pendidikan Nasional
Universiti Teknologi Nanyang, Singapura
pmchai@nie.edu.sg

Pendahuluan

ICT (*Information and Communications Technology*) dan pendidikan merupakan dua sasaran penting yang wajar diambil kira bagi negara yang sedang membangun pesat. Dengan demikian, penerapan ICT bagi pembelajaran dan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur jati ataupun penutur asing sama ada di dalam dan luar negara dapat dianggap kasus utama. Perkembangan ICT telah mewujudkan pelbagai uraian baru dalam merevolusi kaedah pembelajaran dan pengajaran bahasa, bahkan telah berangsur-angsur mengubah cara hidup para guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat.

Penciptaan media pendidikan telah diperlihatkan dengan sangat berkesan. Telah pula diperlihatkan media elektronik yang disebarkan dalam bentuk siaran (*broadcasting*) seperti radio dan televisyen melalui komputer, bahan-bahan percetakan dalam bentuk *web*, buku elektronik yang digelar *e-books*. Lantaran perkembangan ICT terdapat penyelidikan dan pengumpulan data informasi, bahan cetakan untuk perkhidmatan dalam bentuk perpustakaan digital dan yang digunakan sebagai asas data (*data base*) untuk dijadikan kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

ICT telah membentuk sistem pembelajaran dan pengajaran yang baru sama ada dalam bentuk sinkronik (*Synchronous*) dan bukan sinkronik (*Asynchronous*). Bentuk pembelajaran yang baru ini dapat dilihat melalui perbagai bentuk, seperti pengajaran elektronik atau Pengajaran-e (*e-Learning*), bentuk bilik darjah bersama dalam ruang siber (*cyber space*) yang dikenali sebagai bilik darjah-e (*e-Classroom*). Perkhidmatan pengajaran dalam bentuk paket dengan tujuan supaya proses pembelajaran dan pengajaran dikendalikan di mana saja dengan modal yang cukup rendah telah mulai disebarkan.

ICT telah membina kampus atau institusi pendidikan baru yang dikenali sebagai kapus informasi di bawah pengendalian dan pengendalian penggunaan komputer dan sistem telekomunikasi. Pembinaan institusi pendidikan baru ini difokuskan pada keberkesanan dalam pengendalian. Institusi pendidikan baru ini dikenali sebagai Sekolah-e (*e-School*) dan universiti-e (*e-University*).

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (*Information and Communications Technology*) dalam pendidikan telah banyak mengubah format pembelajaran dan pengajaran bahasa. Ini dapat dilihat dari beberapa sudut seperti (i) kemudahan untuk mendekati pelbagai sumber pengetahuan, (ii) peluasan tempat pembelajaran dan pengajaran sehingga tidak terbatas sempadan (iii) perpanjangan waktu pembelajaran menjadi 24 jam sehari, (iv) penciptaan mata pembelajaran dan pengajaran mengikuti keperluan pelajar. Format pembelajaran dan pengajaran baru ini dapat disifatkan sebagai bentuk pendidikan yang boleh dilakukan tanpa kira masa dan tempat. Format tersebut dibentuk secara *online* berleluasa, bahkan persidangan akademik melalui internet telah mulai muncul atau diadakan (www.techonline.com/osee) dengan tujuan agar penyaji makalah dalam jaringan tidak perlu lagi berkumpul di satu tempat persidangan yang ditetapkan. Lantaran perkembangan tersebut, Dewan Kulian Maya (*Virtual Lecture Hall*) telah dibina oleh beberapa buah universiti agar dapat meningkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi dalam visi membuka peluang semaksimum mungkin.

Penanaman modal atau pelaburan untuk pendidikan dewasa ini dan seterusnya bermula memberi keutamaan kepada “e” yang terkait dengan “pengajaran-e” (*e-Learning*), “Buku-e” (*e-Book*), “Bilik darjah-e” (*e-Classroom*) di samping menekankan kepada kepentingan peranan jangka waktu dan lokasi yang lebih berjimat. Dengan demikian, pelaburan pendidikan tidak akan ditekankan kepada bentuk konkrit seperti bangunan yang megah menikam langit, tetapi sebaliknya menekankan isi kandungan yang dapat dipelajari sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat, malahan lebih pantas dengan modal yang cukup rendah. Ini disebabkan oleh kejayaan atau mutu pendidikan dalam era baru ini yang tidak terletak pada bangunan atau luasnya kawasan institusi pengajian, tetapi terletak pada organisasi, ilmu pengetahuan, dan pengendalian pendidikan.

Teknologi jaringan dapat dianggap sebagai objek utama terpenting bagi institusi pendidikan yang menekankan kesatuan segala sistem komunikasi (*unified network*). Bagi kegunaan dalam proses mendekati data, informasi dan ilmu pengetahuan dengan berdasarkan IP *based*, jaringan institusi pendidikan terpaksa mencantumkan internet, intranet, jaringan telefon PABX, jaringan tanpa kawat (*wireless*). Ini termasuk sistem penyiaran (*Boardcasting*) seperti jaringan radio dan televisyen.

Pembinaan struktur asas teknologi bagi institusi pendidikan merupakan objek yang amat penting. Pembinaan ini juga harus menekankan penambahan mutu pengajaran, khususnya pembinaan kandungan dan perkembangan sistem penerapan agar pelaburan teknologi dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin.

Dengan pernyataan di atas, makalah ini akan mencoba memperlihatkan penerapan teknologi multimedia dalam pengajaran Bahasa

Indonesia (seterusnya BI) yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang tersedia ada dalam zaman globalisasi ini.

Format dan Pandangan ICT dalam Pengajaran Bahasa

Teknologi informasi dan multimedia telah digunakan dalam sistem pendidikan di Australia semenjak tahun 1986 sehingga kini belum memperlihatkan keupayaan dan kesannya dengan jelas. Setengah ahli pendidikan dan teknologi berpendapat bahawa sebenarnya penerapan teknologi informasi dan multimedia dalam sistem pendidikan masih dipersoalkan. Ada yang menyanjungi keajaibannya dan ada yang menyatakan ia merupakan jaringan kosong (*vapournet*). Lantaran ini, jalan tengah yang dipikirkan buat seketika ini ialah bagaimana ICT dapat digunakan secara berkesan dalam penerapan pembelajaran dan pengajaran bahasa.

Kepelbagaian teknologi baru semakin berleluasa yang disebabkan oleh setiap saat terdapat penelitian, pembinaan dan penciptaan ilmu pengetahuan terkini di sana-sini di samping kemunduran ilmu pengetahuan yang tidak dapat dipertahankan dalam era globalisasi ini. Pembelajaran dan pengajaran dalam era baru ini mulai bersifat sejagat dan pantas sejajar dengan perubahan yang sentiasa tangkas, bahkan memperolehi ilmu pengetahuan dalam jangka waktu yang amat singkat. Banyak negara yang berusaha agar kurikulum pengajaran bahasanya dapat disesuaikan menjadi lebih pendek dan dapat ditamatkan secepat mungkin. Kesemuanya telah melibatkan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran. Ada yang menyebarkan kaedah pembelajaran dan pengajaran seluas mungkin dan tumpuan secara langsung ditujukan kepada murid atau pelajar setiap tempat bahkan setiap waktu. Dengan ini sistem pembelajaran dan pengajaran telah banyak mengalami perubahan. Perubahan ini telah mewujudkan format pembelajaran dan pengajaran kepada dua bentuk iaitu (i) Pembelajaran dan pengajaran secara serentak atau sinkronik (*Synchronous Learning*) dan (ii) Pembelajaran dan pengajaran secara tidak serentak atau tidak sinkronik (*Asynchronous Learning*). Pengajaran bahasa pada zaman modern ini tidak terletak pada satu set buku teks lagi. Dengan kata lain, murid tidak hanya menggunakan buku-buku yang ditetapkan oleh guru, bahkan mereka dapat mencari sumber pengetahuan lain seperti perpustakaan digital dan sebagainya. Peranan guru telah berubah dari penggunaan kapur tulis dan papan hitam menjadi pembimbing yang telah berdiri di sebelah murid dengan tujuan agar murid dapat mencari ilmu pengetahuan dan mempelajari ilmu mengikuti bimbingan guru berkenaan. Murid-murid zaman modern ini seharusnya dibiarkan berdikari dalam mempertingkatkan ilmu, mempunyai daya kreatif dalam mempelajari sesuatu yang lebih baru. Dengan kata lain, mereka seharusnya mengubah sikap pasif menjadi aktif, bahkan bijak berinteraksi di antara satu sama lain

dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi sebagai alat pembelajaran masing-masing di samping membina peranan pembelajaran secara tidak serentak (Asynchronous). Dengan perubahan ini, penilaian pembelajaran tidak terletak pada hasil pemeriksaan sahaja, bahkan diubah keadaan pembelajaran dan pengajaran mengikut format lama menjadi satu proses pembinaan organisasi ilmu. Demikian halnya dengan guru yang harus ikut berubah dari peranan sebagai pengajar menjadi pembina ilmu (*Knowledge Constructor*) yang berupaya mengambil organisasi ilmu dari pelbagai sumber di samping membina pelajaran di laman *web*, membina sistem soal-jawab secara *online* untuk mengatasi perbatasan waktu dan jarak.

Model Pengajaran Bersinkronik

Model bersinkronik (*Synchronous Learning*) merupakan suatu bentuk pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan dengan menentukan waktu, tempat, murid dan disertai oleh guru untuk mewujudkan proses pembelajaran dan pengajaran. Ini termasuk penetapan jadual pembelajaran dan pengajaran. Model bersinkronik tersebut masih diperlukan untuk kanak-kanak di bangku sekolah rendah. Teknologi informasi dan komunikasi boleh dijadikan sebagai pembantu dalam pembelajaran dan pengajaran model bersinkronik. Sistem *slaid Power Point*, sistem model foto dan model pelbagai keadaan misalnya, boleh mengubah sikap murid dari pasif menjadi aktif di samping dapat mengurungi waktu pembelajaran dan pengajaran. Model ini juga didapati peranan guru bercenderung menjadi pembina dan petunjuk sumber pengetahuan yang berkenaan.

Selain menjadi alat saintifiks, teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu sistem pembelajaran dan pengajaran secara bersinkronik. Pembinaan korpus informasi dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar, dapat mewujudkan sistem interaksi melalui sidang video¹ (*video conference*). Sistem pendidikan cara ini seolah-olah murid dan guru berada di tempat yang berdekatan dan boleh berinteraksi di antara satu sama lain. Kemudahan model bersinkronik yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat mengatasi masalah jarak. Dengan kata lain, murid atau pelajar tidak perlu bepergian ke sekolah, kampus atau institusi pengajian yang ditetapkan. Dengan adanya bilik darjah maya (*virtual classroom*), sistem pengajaran boleh digunakan dalam pendidikan seumur hidup. Teknologi informasi dan komunikasi dapat lagi membantu dalam penyimpanan data-data aktivitas yang telah dilakukan. Ini termasuk penyimpanan senarai pembelajaran, pengajaran, penilaian, peninjauan se-

¹ Sidang yang menggunakan komunikasi data yang membenarkan sesuatu kumpulan orang di suatu tempat melihat dan mendengar kumpulan lain pada skrin video di tempat yang lain. Misalnya penggunaan dalam pendidikan jarak jauh.

lanjutnya, pengiriman informasi, bahkan dapat merekamkan semua pengajaran ke dalam server video yang boleh diterokai atau dipanggil semula pada bila-bila masa. Lantaran kemudahan tersebut maka dapat lagi mewujudkan pembelajaran mengikut keselesaan waktu masing-masing.

Model Pengajaran Tidak Bersinkronik

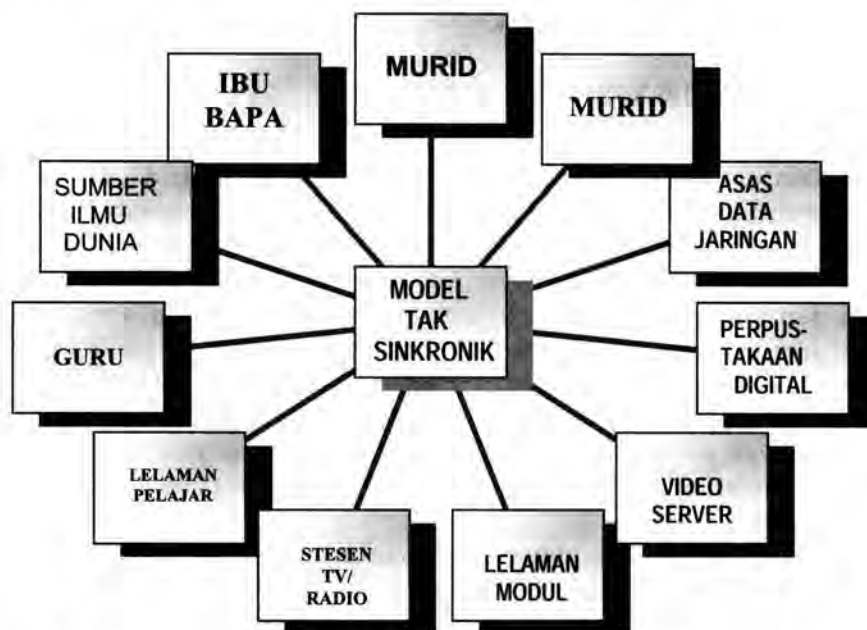
Model tak bersinkronik merupakan model pembelajaran dan pengajaran berbentuk 24 x 7, yaitu bentuk pendidikan yang dapat membina aktiviti pembelajaran dan pengajaran sepanjang 24 jam selama 7 hari. Bagi model pembelajaran dan pengajaran ini tidak perlu ditetapkan masa, tempat dan sebagainya. Yang pentingnya ialah media, yaitu bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat dijadikan alat pengendalian aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Model tak bersinkronik dewasa ini kebanyakan melibatkan pembelajaran dan pengajaran melalui jaringan (web). Model ini sangat memerlukan pelajaran dan alat bantu yang dimuat di dalam sistem pembelajaran dan pengajaran pada jaringan. Dengan ini penciptaan laman bagi sesuatu modul mengikut permintaan pembelajaran (*learning on demand*) sangat diperlukan.

Di antara alat yang dapat membantu model ini ialah sistem pos elektronik (*e-mail*) yang dapat melancarkan komunikasi antara murid dan guru atau antara murid dengan murid yang lain. Ini termasuk papan jaringan (*webboard*) yang dapat dimanfaatkan dalam pertukaran informasi, pandangan, dapatan, dan sebagainya. Teknologi pembelajaran dan pengajaran seperti ini sebenarnya baru sahaja berlaku. Ia dapat dibataskan semenjak 5--8 tahun yang lalu. Kebelakangan ini, sistem pembelajaran dan pengajaran model tak bersinkronik tersebut telah berkembang pesat di seluruh dunia².

Teknologi informasi dan komunikasi dapat mendekati berbagai lokasi data di seluruh dunia yang boleh menyokong pembelajaran seperti persiapan perpustakaan digital untuk mendapatkan data dan mencari pengetahuan yang dikehendaki melalui buku-e seperti laman http://www.freeality.com/questia/questia_online_library.htm, majalah dan bahan cetakan elektronik yang boleh dimanfaatkan. Dewasa ini didapati banyak alat media yang boleh membantu untuk mencipta laman yang mana data dan informasi dapat

² Format pembelajaran dan pengajaran model ini tidak hanya terbatas di sekolah sahaja, bahkan telahpun merebak ke rumah-rumah kediaman lapisan tengahan ke atas. Syarikat Broderbund, Syarikat Davidson & Associates dan Syarikat The Learning Company telah mencipta perisian pendidikan berbentuk hiburan. Perisian tersebut disediakan untuk keluarga besar yang mempunyai perkembangan 50% setahun. Di samping syarikat-syarikat tersebut, didapati saingan daripada syarikat-syarikat lain seperti Nintendo, Microsoft dan Paramount yang telah memasarkan perisiannya ke pasaran keluarga (home use).

disisipi secara digital. Model pembelajaran dan pengajaran tak bersinkronik biasanya dibentukkan seperti diagram yang berikut:-



ICT dan Pengajaran Bahasa

Pengendalian pembelajaran dan pengajaran bahasa apa pun persis dengan pengendalian lain secara umum yang harus menyesuaikan diri mengikuti persaingan zaman. Dewasa ini didapati pelbagai sumber ilmu pengetahuan yang tersedia di jaringan maya. Objek-objek yang terkait dengan ilmu pengetahuan semakin lama semakin bertambah banyak untuk dipelajari. Demikian halnya dengan pengajaran bahasa Indonesia yang seharusnya dikendalikan dengan pertimbangan penanaman modal yang rendah tetapi memperoleh ganjaran yang tinggi. Sesuai dengan kesediaan teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran dan pengajaran bahasa boleh dilakukan dengan pantas, singkat, dan mutunya terjamin dengan memanfaatkan sumber-sumber pengetahuan yang tersedia.

1. Paradigma dan Revolusi Pengajaran Bahasa

Kejayaan pengendalian pengajaran bahasa memerlukan perubahan paradigma, khususnya kebergantungan pada sistem tradisional atau metergantungan pada aktiviti yang lazim sehingga tidak berani diubahsuai. Paradigma tersebut terdiri atas paradigma sistem pengajaran tradisional dan paradigma sistem pengajaran baru.

Paradigma Sistem Pengajaran Tradisional

- 1) Pembelajaran dan pengajaran yang tergantung pada masa dan lokasi yang beranggapan bahwa harus dijalankan di tempat yang disediakan, ada jadwal tertentu. Kebergantungan ini merupakan kebergantungan fizikal.
- 2) Pembelajaran dan pengajaran dikendalikan dengan memakai sumber-sumber yang sama yang terdiri atas guru, buku, dan bahan cetakan yang tetap sama.
- 3) Sekolah/Jabatan bahasa berfungsi sebagai kilang perindustrial yang akan menghasilkan lepuhan pelajar yang persis sama.
- 4) Pembelajaran dan pengajaran dikendalikan secara satu hala. Fenomena yang sentiasa berlaku ialah bahwa murid atau pelajar adalah penerima yang pasif.
- 5) Guru seolah-olah berfungsi sebagai pusat pengajaran
- 6) Pembelajaran dan pengajaran bertujuan untuk menjawab soalan dan sistem penilaian hanya terbatas pada kertas pemeriksaan.
- 7) Bingkai pengajaran bahasa dan kurikulumnya sangat bergantung bahkan sukar dijangka. Ini termasuk ketergantungan guru ke atas panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan yang dikira tidak boleh diubahsuai lagi.

Paradigma Sistem Pengajaran Baru

- 1) pembelajaran dan pengajaran tidak bergantung pada waktu dan lokasi. Sistem pembelajaran dan pengajaran adalah berupa fizikal dan maya yang terdiri atas bentuk sinkronik dan asinkronik, mempelajari bila-bila masa, di mana-mana tempat dan dengan sesiapa sahaja.
- 2) Sekolah diibaratkan pintu gerbang ke dunia yang berleluasa yang boleh menyediakan sumber ilmu pengetahuan ke tahap jagat (*World Knowledge*). Pelajar mempelajari dengan cara mencari gali atau meninjau sumber pengetahuan di pelbagai tempat dan perbagai intelek.
- 3) Pembelajaran dilakukan dengan kerja sama dari semua pihak (*Collaboration*). Murid, guru, dan orang tua mempelajari bersama dan menekankan keaktifan, malah peranan guru diubah menjadi pemandu, pengarah, penasihat, serta pemberi ilmu atau sebagai penjelas dan salah satu sumber manusia yang mampu memberi ilmu pengetahuan kepada murid.
- 4) Pembelajaran menekankan kesesuaian, memperlihatkan kekuatan yang terdapat pada diri pelajar untuk digunakan dalam usaha pembelajaran dengan mengikut kemampuan masing-masing.
- 5) Guru dan murid dijadikan dua pusat pembelajaran dan pengajaran dengan cara memilih kekuatan yang ada pada kedua-dua pusat tersebut.
- 6) Pembelajaran dan pengajaran dilakukan secara bertolak ansur mengikut keadaan setempat dan alam persekitaran. Perubahan paradigma di

samping pemilikan wawasan boleh diubahsuai untuk mengikuti keadaan yang mendorong keberkesanan terhadap pembelajaran dan pengajaran di atas dasar pembelajaran yang terbaik yang tidak semestinya menanam modal yang tinggi.

2. Kaedah dan Format Pembelajaran dan Pengajaran

Bukan hanya perkakasan (*hardware*) dan alat teknologi sahaja yang diakui penting. Ini kerana yang menjadi dasar dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa ialah kandungan yang tersedia bersama kaidah dan format dalam pengendalian pembelajaran dan pengajaran. Walaupun teknologi dapat membina persekitaran dan boleh mempengaruhi pembelajaran kanak-kanak, hal ini tidak berarti hanya terserah kepada teknologi mengawal sistem pembelajaran dan pengajaran. Sistem pengajaran seharusnya menentukan teknologi agar dapat membawa perubahan yang terbaik dalam dunia pendidikan dengan tujuan supaya dapat memilih keupayaan teknologi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, persiapan pembelajaran dan pengajaran dapat dilakukan seperti berikut.

a) Penekanan Keupayaan Teknologi

Pembelajaran yang melibatkan teknologi multimedia sepatutnya menekankan pembelajaran yang menerapkan keupayaan teknologi berkenaan, bukan pembelajaran yang menumpukan kandungan teknologi. Tidak dapat dinafikan bahwa teknologi adalah satu cabang ilmu yang harus dipelajari, akan tetapi fungsinya hanya sebagai alat bantu mengajar sahaja yang diakui dapat mempertingkatkan dan memperluaskan ilmu pengetahuan semaksimum mungkin. Orang yang mengetahui selok-belok komputer berkemungkinan tidak pandai menerapkannya dalam proses pembelajaran bahasa bagi kanak-kanak, bahkan kanak-kanak yang mengetahui kaedah penggunaan komputer dengan baik tidak pula semestinya dapat mengendalikan komputer dengan baik dalam sistem pembelajaran dan pengajaran bahasa.

b) Sentiasa Menerokai Kandungan dan Kaidah Terbaru

Pembelajaran bahasa secara modern sepatutnya menekankan isi kandungan dan kaidah yang baru, bukan menekankan perkakasan atau alat teknologi. Dengan kata lain, keupayaan komputer harus sejajar dengan kegunaan dalam revolusi pengajaran bahasa yang menuju ke kaidah yang lebih berkesan. Pemesanan beberapa buah komputer ke bilik darjah tidak berarti bahwa bilik darjah telah menjangkau ke era baru. Dengan demikian, perancangan yang kemas harus dipikirkan

untuk memberi jaminan bahwa akan berlaku pembelajaran dan pengajaran yang relevan dengan keinginan kanak-kanak dan masyarakat sebenarnya.

c) *Menyediakan Rancangan Pemakaian Teknologi Satu Unit Pengajaran*

Guru sepatutnya harus berjinak-jinak dengan perisian komputer dan isi kandungan berkenaan untuk membuat keputusan sama ada perisian mana yang sesuai dalam pengajaran yang dirancangnya. Di Amerika Serikat didapati 15% peruntukan teknologi pendidikan digunakan untuk perkembangan sistem pembelajaran dan pengajaran yang sebenarnya yang tidak tepat dengan jangkaan kerajaan yang dikira akan digunakan sebanyak 30%. Ini menunjukkan bahwa banyak yang belum memahami hakikat ilmu pengetahuan yang lebih penting daripada masalah pemilikan komputer atau alat-alat multimedia.

d) *Menyelidiki dan Menguji Kebolehan Bentuk Pengajaran Bahasa*

Guru menyelidiki asas yang terkait dengan pengendalian pendidikan yang melibatkan teknologi. Guru membina atau memperkembangkan perisian, kandungan dan kaidah pengajaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Guru melakukan penyelidikan besar-besaran untuk melihat kesamaan atau perbezaan antara pengendalian pendidikan yang paling berkesan.

e) *Menyelidiki Bentuk Penggunaan Teknologi Multimedia*

Guru mengadakan penyelidikan penggunaan multimedia pada semua tahap untuk melihat kesan penggunaan multimedia sebenarnya. Guru mencari acuan yang sesuai untuk diterapkan secara realistik.

Persiapan Guru Bahasa dalam Abad Ke-21

Tidak lama lagi komputer akan mengambil alih tugas guru atau keutamaan guru akan menurun dan digantikannya dengan “guru elektronik” yang mengawal peralatan dan sistem pengajaran jarak jauh yang mampu mendekati murid berjuta-juta orang pada waktu yang sama. Akan tetapi, kita telah menemukan kebenaran bahwa sebenarnya teknologi dalam pendidikan masih bergantung pada guru yang lebih daripada keperluan yang berada di dalam bilik darjah. Perkembangan multimedia untuk pengajaran BI memerlukan persiapan guru dengan tujuan agar guru dapat memahami bahawa mereka terpaksa kerja keras, bahkan lebih berat daripada dahulu kala. Ini dilakukan karena gurulah akan menjadi pembina rancangan pengajaran, penyusun panduan penggunaan data mengikuti sistem internet

yang bersinambungan dengan kurikulum dan bersedia menjawab pertanyaan setelah media tanpa batasan berkenaan mulai digunakan. Persiapan guru untuk menghadapi revolusi teknologi multimedia dalam pengajaran bahasa dapat dilakukan dengan beberapa kaidah seperti berikut.

1. Mengenali Perkakasan dan Perisian

Guru bahasa harus menguasai perkakasan (*hardware*) dan perisian (*software*) komputer, pengendalian komputer bahkan secara dasar dapat menggunakan perisian tertentu untuk mengawal komputer. Dengan kata lain, guru dapat menerapkan peralatan multimedia untuk digunakan serentak dengan komputer. Ini termasuk mesin cetak, skaner, cakera laser, pemutar video dan sebagainya.

2. Menguasai Isi Kandung Bahasa Mengikut Kaedah Pembinaan Ilmu Pengetahuan

Bagi menguasai isi kandungan mengikut kaidah pembinaan ilmu pengetahuan (*knowledge construction*), guru harus bijak dalam merekakan ilmu pengetahuan secara kreatif berdasarkan pembinaan intelek. Dengan kata lain, pembinaan ilmu pengetahuan mengikut sistem kepakaran (*expert system*) yang dapat dijelaskan seperti berikut.

- a. Membina bentuk pengetahuan dengan bermu daripada perihal yang sudah diketahui kepada perihal yang belum diketahui dengan berdasarkan pengetahuan primitif (*primitive knowledge*) menuju ke pengetahuan terbaru. Pengetahuan terbaru ini merupakan gabungan pengetahuan lama yang boleh diwarisi untuk membentuk pengetahuan yang lebih baru.
- b. Mempunyai keseimbangan dalam sistem pembelajaran secara deduktif dan induktif sehingga boleh mempelajari sesuatu yang umum kemudian dikhususkan secara terperinci atau mempelajari sesuatu yang lebih khusus kemudian berpindah kepada yang umum.
- c. Dapat mencari penyelesaian dengan memberi alasan yang munasabah. simpulan yang diperoleh mungkin dihasilkan dari penalaran ke belakang (*backward reasoning*) atau penalaran ke depan (*forward reasoning*).

Pembentukan Semula Sistem Pengajaran BI

Pengendalian pengajaran yang dapat melahirkan suasana pembelajaran yang sesuai sangat bergantung pada teori pembelajaran atau pengetahuan mengenai proses atau kaidah pembelajaran yang sering dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, pengendalian pengajaran dapat dibagikan menjadi tiga bentuk, yaitu (i) kurikulum dan kandungan bagi pem-

belajaran, (ii) pengendalian pembelajaran dan pengajaran, dan (iii) media dan kaidah penggunaan media. Ketiga-tiga bentuk ini mungkin dapat digelar sebagai pengendalian suasana pembelajaran agar selaras dengan proses pembelajaran mengikuti pemikiran yang dipegang sebagai dasar. Dengan kata lain yang dianggap sebagai nadi dalam sistem pembelajaran dan pengajaran BI adalah kaidah pembelajaran dan pengajaran dan kurikulum. Perubahan yang berlaku dalam abad sekarang ialah perubahan arus pemikiran atau teori dasar yang digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. Teori konstruktivisme³ merupakan arus pemikiran baru yang sedang dikaji ketahanannya. Teori tersebut telah diperlakukan sebagai teori pendidikan yang lebih relevan dengan teknologi dan perkembangan bagi masyarakat zaman teknologi informasi dan komunikasi jika dibandingkan dengan teori-teori pendidikan yang lain.

Teras asasi teori ini ialah bahwa murid atau pelajar dianggap sebagai pusat pengajaran, sedangkan objektif pembelajaran ialah belajar untuk berpikir. Perubahan arus pemikiran ini mengakibatkan perubahan kaidah pengajaran bahasa dan kurikulumnya. Hal itu mendorong perubahan sistem pendidikan secara menyeluruh. Pandangan baru ini bersinambungan dengan bentuk dan kandungan yang dibentuk sebagai satu sistem pembelajaran dan pengajaran bahasa. Ini termasuk perbincangan mengenai alat media terbaru yang terkait dengan kemajuan teknologi semasa.

Revolusi pembelajaran dan pengajaran BI yang mengikuti aliran konstruktivisme ini harus menyesuaikan diri dengan dasar pengetahuan mengenai proses pengajaran yang terbaru. Perubahan peranan dan kepahaman guru bukan masalah hanya setakat guru sahaja, bahkan ia terkait dengan sistem pengendalian, sistem pembelajaran dan pengajaran di sekolah, sistem pentadbiran guru, penjadwalan masa pengajaran, penyusunan suasana bilik darjah dan sebagainya. Perubahan tersebut akan melintasi sempada persekolahan ke rumah murid. Ibu bapak mungkin tidak biasa dengan perubahan baru ini. Oleh karena itu, nilai dan kepercayaan yang telah ditanamkan dalam masyarakat terdahulu, dalam sistem pendidikan yang lama berkemungkinan menjadi halangan terhadap revolusi kurikulum pengajaran BI mengikut pandangan modern. Antara faktor yang mungkin dijadikan halangan terhadap revolusi pembelajaran dan pengajaran BI secara moden adalah seperti berikut:-

- 1) Kepercayaan dan nilai di antara orang-orang berkenaan berbeda.
- 2) Tenaga guru yang pandai mengajar tidak berbeda. Ini kerana walaupun guru-guru berkenaan didedahkan pengetahuan mengenai pandangan aliran Konstruktivisme secara teori, belum tentu guru dapat menyerap pandangan tersebut secara praktis.

³ Di Amerika Syarikat didapati selama satu dekad ternyata banyak penelitian, percubaan dan laporan mengenai keberkesanan ke atas teori konstruktivisme.

- 3) Murid-murid telah biasa dengan pembelajaran secara lama.
- 4) Faktor pengetahuan yang dikehendaki masih kurang. Faktor tersebut ialah teknik pengajaran, teknik yang akan digunakan dalam pengubahsuaian kurikulum.
- 5) Alat bantu mengajar yang terdiri atas buku, alat-alat media yang boleh disediakan oleh guru dan masyarakat, dan dihasilkan dengan kepakaran tertentu belum mencukupi.
- 6) Tekanan dalam keadaan pertentangan ke atas berubah. Penciptaan baru di bawah persekitaran lama yang harus menyesuaikan diri dan memerlukan kesabaran tinggi. Ini menyebabkan tekanan boleh berlaku ke atas semua pihak

Faktor yang diperlukan bagi kejayaan dalam revolusi ialah sebagai berikut.

- 1) Pengertian dan pandangan terhadap perubahan dilakukan secara bersistem.
- 2) Peluang sentiasa terbuka untuk guru dalam persiapan diri untuk revolusi sistem pengajarannya.
- 3) Perubahan budaya baru terjadi di sekolah dan dalam bilik darjah BI.
- 4) Penyusunan semula hubungan antara guru, murid, ibu bapa dan pentadbir.
- 5) Penanggungjawapan dilakukan ke atas peranan baru.
- 6) Pertolongan antara satu sama lain dalam transisi kaedah pembelajaran dan pengajaran bahasa.

Faktor tersebut di atas merupakan faktor penting yang harus diubahsuai agar proses revolusi sistem pembelajaran dan pengajaran BI dapat dilakukan secara berkesan.

Peranan Sekolah dan Guru Bahasa Indonesia

Sekolah model baru tidak mematikan peranan guru, tetapi sebaliknya merencanakan agar guru dapat pengubah kepada peranan baru. Peranan baru yang dikehendaki dalam sistem pembelajaran BI model baru ini ialah menjadi penolong pengarah dalam pembelajaran serta pembimbing murid sama ada secara perseorangan ataupun keompok. Ini termasuk memotivasikan murid supaya mereka dapat menerokai dunia pengetahuan (*world knowledge*) yang sesat dengan data dan informasi. Gurulah yang akan mengajar murid mengenali manfaat teknologi informasi dan komunikasi di samping berperan sebagai pembantu murid dalam pengumpulan, mengklasifikasi, dan menilai data atau informasi yang diperolehi.

Sekolah dalam era globalisasi ini seharusnya mempunyai hubungan rapat dengan semua institusi dalam masyarakat. Ini termasuk sumber data informasi di merata lokasi. Dengan demikian, sekolah dapat memanfaatkan

jaringan pengkalan data dari institusi yang ada dalam sesuatu masyarakat. Pencarian data serta informasi dan pembelajaran dapat mendorong sekolah menjadi pusat pengetahuan yang sempurna, bahkan mempunyai keupayaan untuk meneruskan bangun sebagai sekolah model baru yang sebenarnya.

ICT yang semakin kentara maju telah membatasi peranan perisian *off line* menjadi kurang diminati. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh (*tele-education*), sekolah maya (*virtual school*) atau sekolah siber (*cyber school*) semakin bertambah. Sekolah bentuk tersebut boleh mulai digunakan bila-bila masa sahaja dengan tidak terbatas lokasinya, bahkan dapat menghasilkan pengajaran yang lebih berkesan. Sekolah model baru ini dapat dipaparkan dalam diagram seperti berikut:-



Model Baru Pendidikan

Sumber: Reinventing School

<http://www.nap.edu/readingroom/books/techgap/navigate.cgi>

Perisian untuk Pembelajaran dan Pengajaran BI

Dalam penerapan perisian komputer atau teknologi bagi pengajaran kemahiran berbahasa didapati banyak yang berfokus kepada latih tubi dan praktis (*drill and practice*). Perisian *drill and practice* tidak jauh bezanya dengan lembaran kerja (*worksheet*) yang mengandungi soalan dan latihan menjawab pertanyaan mengikut format yang disediakan. Banyak hasil pene-

litian yang dilaporkan bahwa penggunaan komputer untuk tujuan sedemikian telah menunjukkan keberkesanaan dalam pembelajaran bahasa. Walau bagaimanapun terdapat beberapa ahli pendidikan yang masih mempunyai kesangsian terhadap hasil yang realistik bagi penggunaan perisian komputer untuk *drill and practice* tersebut. Mereka beranggapa bahwa kaedah tersebut merupakan pembelajaran yang dilakukan terhadap sesuatu yang sama sepanjang waktu. Tujuan yang paling penting untuk disampaikan kepada murid ialah agar murid dapat membina ilmu pengetahuan dari pengalaman yang dipelajari. Dengan demikian, pengajaran BI juga harus memberi tumpuan kepada pemikiran kreatif.

Keberadaan teknologi atau komputer bukan berarti bahwa ada sesuatu yang baru dalam sistem pendidikan. Perisian komputer yang membantu pembelajaran yang didapati kebanyakan hanya satu acuan penilanan kemahiran yang harus dibeli dengan harga yang tinggi. Ted S. Hasselbring dari *The Learning Technology Centre* menyatakan bahwa langkah-langkah yang perlu digunakan dalam sistem pembelajaran kemahiran ialah (i) membina kemahiran dasar, (ii) melatih sampai mahir, dan (iii) menerapkan kemahiran yang ada bagi aktiviti-aktiviti lain secara berbagai. Latih tubi dan praktis adalah proses pembelajaran pada langkah kedua.

Teori Pembelajaran BI Abad Ke-21

Dalam abad ke-21, ternyata teori konstruktivisme yang diciptakan oleh Jean Piaget dianggap sebagai teori pembelajaran bahasa yang diakui sangat berkesan. Dalam konteks pembelajaran BI, murid sendiri boleh membina ilmu pengetahuan melalui proses interaksi dengan alam persekitaran baru. Proses ini mendorong murid secara perlahan-lahan membina teori yang terkait dengan dunia mereka masing-masing. Teori-teori baru dalam diri murid akan semakin bertambah, semakin kukuh dengan menggunakan pelbagai logika yang dikumpul oleh dirinya.

Berdasarkan teori konstruktivisme, pembelajaran dan pengajaran BI dapat ditekankan kepada beberapa masalah seperti berikut.

- 1) Pembelajaran dan pengajaran memberi keutamaan kepada pengendalian disiplin cara berpikir dan kemahiran dalam mengatasi masalah. Dengan kata lain, keutamaan yang selama ini diberikan kepada kandungan seratus persen tidak dianggap penting sangat.
- 2) Kemahiran dasar dalam penguasaan BI bukan sesuatu yang harus dipelajari secara tersendiri, sebaliknya harus berkesinambungan dengan dunia sebenarnya dalam pengertian mempelajari sesuatu yang boleh dilakukan atau dapat dipraktikkan.
- 3) Sumber data BI yang berpotensi dalam pembelajaran seharusnya disediakan dengan sempurna untuk murid-murid berkenaan. Dengan kata

lain, guru BI harus menyediakan segala perisian atau peralatan yang dapat digunakan dalam mencari atau mendekati sumber data BI.

- 4) Murid tidak semestinya mempelajari semua isi kandungan BI yang didapati pada sumber jaringan. Ini terjadi karena pengetahuan yang selebihnya dapat mereka pelajari atau mereka cari sendiri jika mereka memahami kaidah pencarian data di jaringan internet.
- 5) Murid BI sentiasa menyadari bahwa mereka adalah arkitek yang akan merekakan bentuk BI untuk digunakan dalam masyarakat melalui pengetahuan dan kemahiran yang ada pada diri mereka.
- 6) Murid BI sepatutnya dipersiapkan lebih awal dalam mengenai kaidah pencarian pengkalan data BI. Pangkalan data terkait harus ditinjau oleh guru terlebih dahulu.

Berdasarkan falsafah konstruktivisme, proses pembelajaran dapat dihayati jika murid-murid mampu menggunakan segala pengetahuan yang ada pada diri mereka sebagai sumber penciptaan pengetahuan tambahan secara kreatif. Dengan demikian, guru BI sepatutnya menanamkan kemahiran berpikir yang dapat membina ilmu pengetahuan dan pada akhirnya dapat melahirkan ciri-ciri yang berikut.

- 1) Mempunyai sikap positif dalam melengkapai ilmu pengetahuan.
- 2) Mampu mencari pengetahuan dan memperluaskan pengetahuan.
- 3) Mampu memperluas batasan dan mengetahui kaidah pencarian yang dapat mendatangkan keperincian segala pengetahuan yang terkait dengan BI
- 4) Mampu menerapkan pengetahuan BI dengan baik.
- 5) Mempunyai pandangan secara kreatif.

Selain dari teori Konstruktivisme didapati pula satu lagi teori pembelajaran yang boleh diserapkan dalam kaidah pembelajaran BI. Teori tersebut ialah teori Konstruksionisme (*Constructionism*) yang dikemukakan oleh Seymour Papert. Teori ini merupakan lanjutan daripada teori Konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa pembelajaran adalah satu pencungkilan ilmu yang ada dalam diri murid untuk dipamerkan. Dengan demikian, pembelajaran BI yang mengikuti kaidah teori ini menekankan pembinaan pengetahuan sendiri. Jika murid sudah tersedia dengan “apa” di dalam diri sebagai asasnya, murid itu akan dapat menghubungkaitkannya dengan objek-objek yang lain sehingga dapat melahirkan pikiran yang lebih baru yang merupakan tahap seterusnya untuk memperluas pengetahuan yang sedia ada. Antara persekitaran yang harus disediakan bagi mencipta suasana pembinaan pengetahuan mengikuti pandangan Papert adalah seperti berikut.

- 1) Suasana dan persyaratan yang dapat membuka peluang murid membina pemikiran secara kreatif berdasarkan kepahaman mereka sebenarnya.
- 2) Keadaan persekitaran kepelbagaian masyarakat dapat mendorong murid bekerja sama atau sama-sama berpikir dengan orang-orang lain.

- 3) Keadaan pembelajaran secara natural bahkan mesra dapat mendorong murid mendekati dasar penciptaan pengetahuan dengan tanpa merisaukan masalah-masalah lain.

Lebuh Raya Raksasa (*Superhighway*) Pembelajaran BI

Internet diibaratkan sebagai lebuh raya raksasa yang mampu menghubungkan informasi untuk disampaikan ke destinasi yang dikehendaki. Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, jalan tersebut boleh dijadikan media bagi perhubungan informasi dan data dalam pengajaran bahasa. Penciptaan lebuh raya raksasa dalam pengajaran BI dapat melahirkan persekitaran baru dalam masyarakat. Persekitaran baru tersebut dapat memperkembangkan institusi-institusi pengajaran bahasa dalam pelbagai bentuk yang boleh dianggap sebagai jaringan pengajaran (*learning networks*) BI. Selain digunakan dalam perhubungan secara dasar, jaringan tersebut dapat digunakan untuk memperkembangkan aktiviti-aktiviti yang boleh memperlihatkan perubahan bersama.

Internet persis sama dengan semua teknologi baru yang dapat mewujudkan keadaan persekitaran baru dalam masyarakat. Keadaan baru tersebut mendorong perkembangan terhadap institusi dalam bentuk baru bagi sistem pendidikan. Yang jelas ialah bahwa jaringan pendidikan (*education networks*) selain bermaksud sebagai perhubungan secara dasar, ia boleh membawa pengertian perkembangan aktiviti yang dapat memperlihatkan perubahan bersama di antara golongan yang sentiasa berinteraksi antara satu sama lain.

Penciptaan bilik darjah dalam bentuk sidang video (video conference) dan perbualan melalui internet (*IRC-Internet Relay Chat*) juga dapat dijadikan satu model pembelajaran BI di bawah sistem persekolahan jaringan (*School on the Net*). Pembelajaran dalam bentuk ini dilakukan dengan adanya penetapan waktu, bahkan apabila tiba masanya, guru dan murid masing-masing berhadapan dengan monitor komputer. Setiap orang akan berdialog atau juga boleh melihat muka di antara satu sama lain walaupun berjauhan seripa batu.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran BI dengan menerapkan ICT dapat dilakukan seperti berikut:-

- 1) Berubah dari bilik darjah yang menggunakan kaidah menghafal kepada bilik darjah yang melatih murid meminati usaha berpikir secara kreatif dalam menghasilkan teori penggunaan BI mengikut pengalaman yang telah diterokai.

- 2) Menekankan pembelajaran secara sendiri. Murid bertanggung jawab ke atas diri sendiri. Cepat dan lambat dalam kejayaan bergantung pada diri masing-masing. Pembelajaran dilakukan secara berterusan dan dapat mencerminkan hasil tanpa bantuan orang lain.
- 3) Pembelajaran akan berubah dari guru sebagai pusat kepada murid atau diri sendiri sebagai pusat pembelajaran.
- 4) Memberi peluang kepada masyarakat setempat dalam melaksanakan pembelajaran murid.
- 5) Memberi kebebasan dalam pembelajaran agar semua murid dapat mencurahkan keupayaan diri masing-masing dalam mempertingkatkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan dirinya.
- 6) Kurikulum seharusnya bersifat terbuka dan menyadari akibat bahwa murid mempunyai keinginan dalam pembelajaran BI yang berbeza-beza.
- 7) Menyambung multimedia teknologi dengan jaringan seluruh dunia untuk dijadikan asas pembelajaran bahasa secara sendiri.

BIBLIOGRAFI

- Andika Dutha Bachari. 2001. Website Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing: Sebuah Upaya Pemanfaatan Teknologi Informasi. Makalah disampaikan pada Konferensi Internasional Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Grand Bali Beach Hotel 1-3 Oktober 2001
- Brian P. Bloomfield and Friends. 2000. *Information Technology and Organizations: Strategies, Networks, and Integration*. Oxford University Press, 2000
- Dustin Cowell. 2002. Pengajaran Bahasa Melayu /Bahasa Indonesia di Amerika Utara. Dalam <http://dbp.gov.my/mabm/sidamerikau.htm>.
- Paitoon M. Chaiyanara (1998). *Pengajaran Bahasa Melayu dan Teknologi Maklumat (Teaching of Malay language and information technology)*. Ceramah Tumasik VII, Kesatuan-Guru-guru Melayu Singapura. Singapura (11 July 1998)
- Paitoon M. Chaiyanara (1998). *Laman (Homepage) Edisi Melayu/Indonesia: Satu Pengenalan Perkembangan Teknologi Makmelkom (An introduction to information technology)*. Seminar Kebahasaan Sidang Ke-37 MABBIM. Kuala Terengganu, Malaysia (2-3 Mac 1998)
- <http://intranet.usc.edu.au/wacana/3/Sander.1.2.html>
- http://www.indomedia.com/intisari/2001/Nov/warna_soenjono2.htm
- <http://www.jagad.com/pages/Pendidikan/Bahasa/>

<http://www.kompas.com/kompas-etak/0210/08/DIKBUD/peng09.htm>

<http://www.mizan.com/portal/template/BacaPlong/kodeplong/211>

<http://www.pages-yourfavorite.com/ppsupi/prodibahasa.html>

<http://www.pendidikan.net/>

<http://www.searchindonesia.com/Education/Language/n3.phtml>

http://www.ut.ac.id/update_info/mfkip.htm

William H. Dutton, Malcolm Peltu. 1996. *Information and Communication Technologies: Visions and Realities*. Oxford University Press.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2003
Judul Makalah : ICT dan Pengajaran Bahasa Indonesia Abad Ke-21
Pemakalah : Paitoon M. Chaiyanara, Ph.D. (Singapura)
Pemandu : Ketut Artawa
Pencatat : 1. Ketut Mandala Putra
2. Puji Santosa

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Suharti (Guru SLTP Negeri 45 Bandung)
 - a. Bagaimana kurikulum selalu berubah? Dari Kurikulum 75, 84, 94, dan KBK ini semakin membuat guru-guru bingung?
 - b. Sebaik-baik kurikulum, guru harus sudah siap. Mohon bagaimana cara mengatasi KBK kebaikan dan kejelekannya, Pak? Persiapan gurulah yang penting.

Jawaban:

Persiapan guru di Singapura sudah dimulai menjelang abad 21, telah ada pengajaran bahasa Melayu dengan ICT. Dengan konsep ICT yang baru, yaitu adanya komputer dan internet, bagi kami itu tidak ada masalah. Di Indonesia yang jumlah penduduknya besar tidak mungkin hal itu dilakukan dalam waktu yang relatif pendek. Harus ada persiapan antara guru dan sarannya.

2. **Pertanyaan:** Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana (Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta)
 - a. Saya melihat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) itu membuat kita semakin menjadi manusia yang makin tergantung. Teknologi meningkatkan ketergantungan manusia terhadap sekelilingnya, termasuk kepada alat-alat, modal, kapital. Ini merupakan salah satu yang perlu kita pertimbangkan dalam dunia pendidikan. Bagaimana tanggapan Prof. Paitoon?
 - b. Dengan digunakannya teknologi informasi komunikasi itu terjadi perubahan di dalam hubungan di antara guru dan murid. Terjadi perubahan dalam proses belajar mengajar. Saya melihat dengan teknologi komunikasi informasi ini terjadi impersonalisasi dalam pendidikan sehingga roh pendidikan, yaitu penyampaian nilai-nilai yang dapat dilakukan melalui kontak pribadi antara murid dengan guru itu berubah sama sekali. Bahkan, dengan adanya teknologi ini

hubungan pribadi dan hormat-menghormati menjadi tidak ada sama sekali. Ini ada dampak personalitas pada murid yang diajarkan melalui teknologi ini. Saya melihat justru pendidikan di pesantren-pesantren itu pendidikan yang sangat ideal untuk menyampaikan nilai-nilai dan sikap hidup bagi para murid.. Bagaimana akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini di Singapura? Apakah sudah dipelajari akibatnya dalam dunia pendidikan, juga dalam perilaku dan kepribadian orang Singapura? Teknologi hanya sebagai sarana pengajaran, sedangkan apa yang kita lakukan di sekolah merupakan pendidikan.

Jawaban:

Terima kasih atas komentar Pak Harimurti. Kelemahan yang ada dari segi moralnya memang ini sudah kelihatan, yaitu tidak ada hormat-menghormati antara murid dan guru. Biarlah sekolah itu berlaku seperti biasanya yang dapat menciptakan laman pendidikan. Biarlah teknologi digunakan sebagai alat, bukan menguasai semua isi komputer. Pada tingkat sekolah rendah harus dibimbing oleh gurunya, tanpa guru murid tidak bisa apa-apa. Teknologi sebagai alat ini tidak terjadi mendadak begitu saja, sistem sinkronik seperti dilakukan di Australia.

Hal itu disebabkan oleh waktu sehingga terjadi *gap* 'kesenjangan', hormat-menghormati antara murid dan guru.

3. **Pertanyaan:** Widodo (Malang)

Bagaimana pelaksanaan ICT yang telah berjalan ini terkait dengan teori konstruktivisme? Saya memerlukan gambaran yang lebih konkret karena di Indonesia hal itu terlewat dalam pembelajaran bahasa dengan munculnya teori baru. Saya tidak mempunyai pegangan kuat terhadap teori itu.

Jawaban:

Dalam makalah saya sudah ada, tidak perlu saya ulangi itu karena hanya sarana saja.

4. **Pertanyaan:** Hartini (Guru SLTP Negeri 6 Pangkal Pinang)

Apakah hanya di Universitas Nanyang dilaksanakan ICT ini? Untuk selanjutnya apakah tingkat SLTP dan SLTA ke bawah juga dilaksanakan ICT itu? Menurut saya di tingkat universitas itu dapat dilakukan pengajarannya, di samping pendidikannya. Sementara itu, ditingkat SLTA ke bawah itu lebih diutamakan proses pendidikannya.

Jawaban:

(Tidak ada jawaban)

5. **Pertanyaan:** Dameria Nainggolan (Pusat Bahasa, Jakarta)

Sebagai tenaga pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, teknologi itu baik hanya sebagai alat, media, atau sarana penyampaian pembelajaran. Bagaimanapun hubungan langsung antara manusia dan manusia itu lebih penting. Lafal dengan mesin itu tidak sempurna yang langsung diucapkan oleh manusia yang asli atau betulan. Jadi, harus ada persentasi 60% unsur manusianya dan 40% unsur mesinnya. Saya masih percaya bahwa hubungan manusia dengan manusia kontak secara langsung itu hasilnya masih lebih baik dalam pembelajaran bahasa.

Jawaban:

Hubungan manusia dengan manusia memang lebih penting dan lebih baik dalam pembelajaran bahasa, terutama pengalaman dan alam sekitarnya. Dalam pembelajaran bahasa memang harus ada unsur manusianya. Ibu menyarankan 60% unsur manusia dan 40% unsur mesinnya itu untuk peringkat apa dan mana? Untuk pembelajaran bahasa di peringkat sekolah rendah harus kita tingkatkan persentase unsur manusianya. Kalau perlu bisa pembelajaran biasanya 100% unsur manusianya. Untuk sekolah rendah (dasar) pemakaian ICT cukup 5%, tetapi di peringkat sekolah yang lebih tinggi, menengah ke atas, tentu persentase mesinnya kita tingkatkan. Ini bergantung pada waktu yang akan kita gunakan.

6. **Pertanyaan:** Sudarsono (Universitas Tanjung Pura, Pontianak)

Ada pengalaman saya ketika belajar di Australia dengan mencoba untuk memperlancar sistem pembelajaran bahasa di Universitas Melbourne, Jurusan Bahasa Indonesia dengan Jurusan Bahasa Inggris di Universitas Tanjung Pura, menggunakan internet. Mahasiswa di Universitas Melbourne apabila mempunyai pekerjaan rumah dapat ditulis melalui internet lalu dikirimkan ke sahabatnya di Universitas Tanjung Pura untuk dikoreksi kesalahannya. Demikian juga sebaliknya, mereka dapat tukar-menukar pekerjaan melalui internet. Ada dua masukan yang saling menguntungkan. Masalahnya ini teknologi, maka masih ada kendala, misalnya listrik setiap saat mati dan provider internet tidak lancar untuk mengakses. Apa yang ditawarkan oleh Dr. Paitoon itu baru hubungan antara murid dan guru yang akan menyita waktu 24 jam per hari. Kalau guru itu seorang muslim, ketika harus salat, mandi, tidur, dan lain-lain berarti proses belajar mengajar bahasa itu berhenti. Apakah ada dan sudah dicoba interaksi itu tidak hanya antara guru dengan murid, tetapi dengan sesama murid atau rekan sebayanya. Saya kira guru itu hanya sebagai mediator. Dengan cara seperti ini tentu proses pembelajaran akan lebih hidup dan lebih baik tentunya.

Jawaban:

Masalah ICT untuk Indonesia yang terlalu luas ini tentu banyak kendalanya. Waktu guru 24 jam per hari untuk murid itu bukan berarti guru tidak boleh ke mana-mana, ini hanya sebagai simbol kesiapsiagaan guru yang harus senantiasa mengawasi, mengawal, melihat, dan memonitor murid. Program yang telah saya tawarkan itu hanya menampung pertanyaan murid apabila mereka mendapatkan persoalan. Jika ada persoalan, murid bertanya kepada guru yang ditulis di *board*. Murid mengetahui jawaban guru melalui *board* itu. Antara murid dan murid dapat saja mendiskusikan jawaban guru itu.

PENINGKATAN MUTU KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA MELALUI UJIAN KEMAMPUAN BAHASA INDONESIA: KASUS DI JEPANG

Yumi Kondo

Ketua Himpunan Penyelenggara Ujian Bahasa Indonesia (HIPUBI)
di Jepang

Pendahuluan

1) Ujian Kemampuan Bahasa Indonesia di Jepang

Sebelum menyelenggarakan ujian kemampuan bahasa Indonesia pertama kali di Jepang dua belas tahun yang lalu, kami belum memiliki standar penilaian tepat yang dapat dijadikan patokan untuk menilai kemampuan bahasa Indonesia bagi peserta ujian warga Jepang baik dari segi wacana, kosakata, tata bahasa, terjemahan, menyimak, lisan, maupun wicara. Sejak tahun 1992 ujian kemampuan bahasa Indonesia diselenggarakan oleh Himpunan Penyelenggara Ujian Bahasa Indonesia (HIPUBI) di Jepang dua kali dalam setahun. Selain peserta yang kebanyakan orang Jepang, ada juga peserta warga asing. Ujian tersebut yang selama ini hanya diselenggarakan di Tokyo, Osaka, Nagoya, dan Kyushu, pada bulan Juli 2003 ini mulai diadakan juga di Jakarta. Jumlah pesertanya 613 orang dan selama dua belas tahun ini telah tercatat 6.573 orang. Dewasa ini ratusan orang Jepang mengikuti ujian tersebut dengan berbagai motivasi, antara lain, untuk menilai kemampuannya dalam berbahasa Indonesia, untuk melakukan penelitian di Indonesia, dan untuk hubungan bisnis dengan Indonesia.

2) Sistem Ujian Kemampuan Bahasa Indonesia di Jepang

Ujian kemampuan bahasa Indonesia diselenggarakan oleh HIPUBI di Jepang, dua kali dalam setahun, yaitu ujian tertulis dan menyimak (*listening*) pada bulan Januari dan bulan Juli, kecuali ujian untuk tingkat A Spesial, disingkat A-SP yang diselenggarakan sekali setahun pada bulan Januari. Ujian lisan bagi yang lulus ujian tertulis dan kegiatan menyimak tingkat A dan B diselenggarakan pada bulan Maret dan September. Kegiatan itu untuk tingkat A-SP dilakukan pada bulan Maret.

Soal ujian terdiri atas 6 kelompok, yaitu soal ujian tertulis untuk tingkat E, tingkat D, tingkat C, tingkat B, tingkat A dan tingkat A-SP, dan soal ujian lisan untuk tingkat A-SP, A dan B. Materi ujian yang disajikan untuk tingkat E berupa pemahaman bahasa Indonesia permulaan, serta dapat berbicara dalam bahasa Indonesia yang mudah. Ujian tingkat D berupa pemahaman bahasa Indonesia dasar serta mampu

mengungkapkannya secara lisan. Ujian tingkat C berupa pemahaman bahasa Indonesia sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengungkapkannya secara lisan. Ujian tingkat B berupa pemahaman bahasa Indonesia yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja. Tingkat A berupa kemampuan pemahaman bahasa Indonesia yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat, serta kemampuan mengungkapkannya secara lisan. Ujian tingkat A Spesial berupa pemahaman secukupnya bahasa Indonesia yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat secara luas serta kemampuan menyampaikan kehendak sendiri. Hasil dari tingkat A Spesial dianggap mampu bekerja sebagai penerjemah spesialis bahasa Indonesia.

Peserta ujian untuk tingkat E ialah mereka yang pernah belajar bahasa Indonesia minimal 3--6 bulan (18--36 jam), untuk tingkat D, minimal 6 bulan--1 tahun (36--72 jam), tingkat C, minimal 1--3 tahun (72--216 jam), tingkat B, 3--5 tahun (minimal 216--360 jam), tingkat A, lebih dari 5 tahun (minimal 360 jam), dan tingkat A-SP, lebih dari 6 tahun (minimal 432 jam).

Soal ujian tertulis untuk tiap tingkat masing-masing, tingkat E, 35 soal dengan waktu yang tersedia 50 menit, tingkat D, 45 soal dengan waktu 70 menit, tingkat C, 50 soal dengan waktu 100 menit, tingkat B, 50 soal dengan waktu 100 menit, tingkat A, 50 soal dengan waktu 120 menit, dan tingkat A-SP, 8 soal dengan waktu 100 menit.

Kecuali tingkat A-SP, komposisi soal ujian tertulis untuk tingkat E sampai dengan A, terdiri atas (1) wacana, (2) soal wacana, (3) soal kosakata, (4) soal tata bahasa, (5) soal terjemahan dari bahasa Jepang ke Indonesia dan sebaliknya, dan (6) soal menyimak.

Sistem jawaban ialah pilihan ganda, kecuali Tingkat A-SP. Tiap soal terdiri atas 4 jawaban, di antaranya terdapat salah satu jawaban yang tepat.

Untuk ujian lisan tingkat B diadakan tanya jawab dari isi wacana yang sebelumnya telah disimak oleh peserta. Untuk tingkat A, peserta mendengarkan suara rekaman wacana dari *tape*, dicatat, dijelaskan rangkuman wacana tersebut, lalu diadakan tanya jawab. Untuk tingkat A-SP selain sama dengan tingkat A, juga ada soal terjemahan lisan dari bahasa Indonesia ke Jepang dan sebaliknya.

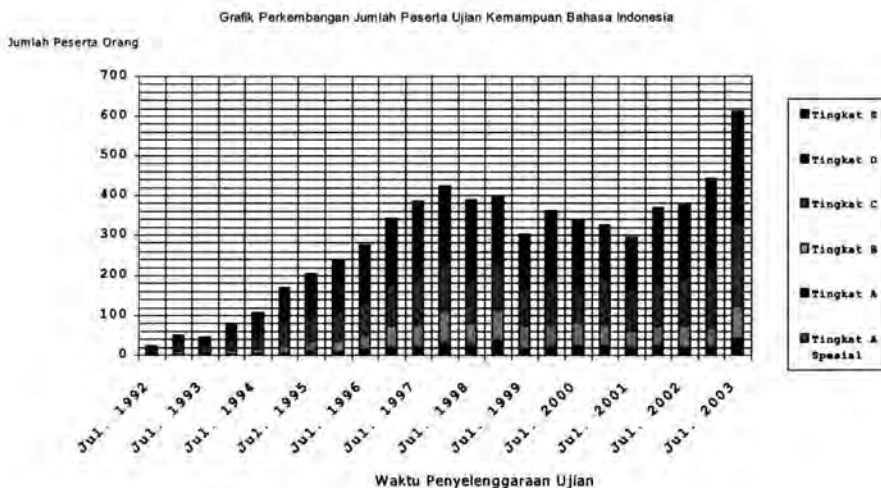
Sikap dan Minat Masyarakat di Jepang terhadap Bahasa Indonesia

Sejak tahun 1990 jumlah orang Jepang yang berminat belajar bahasa Indonesia makin banyak karena banyak wisatawan Jepang yang berbondong-bondong ke Indonesia, khususnya ke Pulau Bali untuk berlibur. Di samping itu, perusahaan-perusahaan Jepang yang menanam modal dan beroperasi di Indonesia menganjurkan atau mewajibkan para stafnya yang akan ditugaskan ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Dengan demikian, pada era sebelum pemerintahan mantan Presiden Suharto runtuh,

jumlah orang Jepang yang berminat belajar bahasa Indonesia terus meningkat.

Namun, serentetan peristiwa di Indonesia yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, seperti timbulnya berbagai kerusuhan di Jakarta dan Ambon disusuli peristiwa teror bom di Bali, telah memberi dampak mendalam terhadap minat belajar bahasa Indonesia di Jepang. Kemerosotan jumlah peminat yang belajar bahasa Indonesia ini telah menyebabkan peserta ujian kemampuan bahasa Indonesia pun berkurang. Rata-rata peserta ujian HIPUBI pada waktu itu, tercatat sekitar 400 orang. Kendati demikian, sejak tahun 2003 ini tampaknya telah pulih kembali karena peserta kali ini berjumlah 613 orang, suatu rekor paling tinggi selama 12 tahun ini. Perhatikan Grafik di bawah ini.

GRAFIK 1
HIMPUNAN PENYELENGGARA UJIAN BAHASA INDONESIA
(HIPUBI) di Jepang



1) Peserta Ujian Bahasa Indonesia di Jepang

Perbandingan peserta ujian menurut jenis kelamin pria 3 dan wanita 7 orang. Umur peserta adalah 20-an 60%, 30-an 25%, 40-an 9%, 50-an 4%, dan lebih dari 60-an 2%. Dapat dilihat bahwa hampir 85% peserta berusia 20-an atau 30-an. Jika dilihat dari segi pekerjaan, karyawan 30 %, mahasiswa 30 %, ibu rumah tangga 5 %, pegawai negeri 4 %, pengajar 2 %, dan yang lainnya misalnya wiraswastawan, orang yang tak memiliki pekerjaan tetap, dan lain-lain 29 %.

Mengenai motivasi menempuh ujian kemampuan bahasa Indonesia,

misalnya, dari kalangan mahasiswa adalah bahwa mereka yang memilih mata kuliah bahasa Indonesia pada perguruan tinggi akan melakukan penelitian di Indonesia atau melanjutkan studi di Indonesia. Selain itu, para karyawan lebih tertarik dengan kebudayaan dan kesenian Indonesia, misalnya tari Bali, gamelan, dan batik. Bagi karyawan, pekerjaannya ada kaitan dengan Indonesia. Bagi ibu rumah tangga karena akan mengikuti suaminya yang bertugas di Indonesia atau yang bersangkutan pernah berkunjung atau tinggal di Indonesia. Di samping itu, ada juga yang ingin melakukan komunikasi secara langsung dengan penduduk setempat tanpa penerjemah ketika berwisata ke Indonesia.

2) Perguruan Tinggi

Pada umumnya kebanyakan perguruan tinggi di Jepang tidak saja memfokuskan pendidikannya pada para mahasiswa saja, tetapi juga memberi kesempatan kepada masyarakat umum, misalnya karyawan, karyawan, dan ibu rumah tangga untuk menambah pengetahuan melalui berbagai program pendidikan ekstrauniversiter. Kesempatan tersebut diberikan melalui kursus-kursus pada malam hari yang dikenal sebagai *Open College*. Setelah selesai bekerja, para karyawan-karyawan yang pekerjaannya ada kaitan dengan Indonesia atau berminat terhadap negara, kesenian, dan kebudayaan Indonesia datang ke kampus perguruan tinggi pada malam hari untuk belajar bahasa Indonesia sehari atau dua hari dalam seminggu. Pengajar pada kursus-kursus tersebut terdiri atas bangsa Jepang dan penutur asli.

a. Peminat Kalangan Mahasiswa

Kami telah mengirim angket kepada 47 guru besar dan dosen bahasa Indonesia pada beberapa perguruan tinggi di Jepang beberapa waktu yang lalu mengenai pendidikan bahasa Indonesia di Jepang. Ternyata angket tersebut dijawab oleh 19 guru besar dan dosen dari 18 perguruan tinggi. Dari hasil angket tersebut diketahui bahwa jumlah mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti kuliah bahasa Indonesia dari para guru besar dan dosen tersebut tercatat 1.273 orang. Dengan demikian, diperkirakan bahwa paling sedikit sekitar 2.000 mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di Jepang.

Enam perguruan tinggi yang mempunyai jurusan bahasa Indonesia ialah Tokyo University of Foreign Studies, Osaka University of Foreign Studies, Kyoto Sangyo University, Tenri University, Lembaga Ilmu-Ilmu Bahasa Asia Afrika, dan Kyoto Career College of Foreign Languages.

Sifat mata kuliahnya pada umumnya mata kuliah wajib. Jam kuliahnya 270 sampai 800 menit per minggu. Jadi, mereka belajar bahasa Indonesia 4,5 jam sampai 13 jam seminggu. Ada berbagai tingkat yaitu mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas. Untuk tingkat dasar, buku

ajar yang digunakan disusun sendiri oleh guru besar dan dosen bersangkutan, sedangkan untuk tingkat atas materinya diambil dari artikel surat kabar atau majalah-majalah Indonesia, misalnya *Tempo*, *Kompas*, *Gatra*.

Jumlah perguruan tinggi yang memberi mata kuliah bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua pilihan, tercatat lebih dari 17, ialah Asia University, Chukyo Women's University, Chuo University, Daito Bunka University, Kanda University of International Studies, Keio University, Kokushikan University, Kyorin University, Kyushu International University, Meio University, Ritsumeikan Asia Pacific University, Senshu University, Setsunan University, Shukutoku University, Sophia University, Takushoku University, dan Tokyo University of Agriculture & Technology.

Bahasa Indonesia dianggap sangat penting sebagai bahasa asing di samping bahasa Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Portugal, dan Rusia untuk bahasa-bahasa Eropa, atau bahasa Cina, Korea, Vietnam, Thai untuk bahasa-bahasa Asia.

Sifat mata kuliahnya pada umumnya merupakan mata kuliah pilihan atau bebas. Jam kuliahnya 90 sampai 180 menit per minggu atau 1,5 jam sampai 3 jam per minggu. Kebanyakan memiliki kelas tingkat dasar, tetapi ada juga yang membuka kelas atas. Untuk tingkat dasar digunakan buku ajar yang disusun oleh guru besar atau dosen bersangkutan. Di samping itu, buku ajar dengan penjelasannya dalam bahasa Inggris juga digunakan. Untuk tingkat atas digunakan artikel yang dikutip dari surat kabar atau majalah.

Beberapa mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia pernah menempuh ujian kemampuan bahasa Indonesia. Biasanya yang pernah belajar selama satu tahun lulus ujian tingkat E atau D. Jika dibandingkan dengan bahasa Inggris yang telah dipelajari sejak SLTP, bahasa Indonesia merupakan bahasa asing yang baru dikenal para mahasiswa di perguruan tinggi sehingga mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia kurang dari satu tahun belum berani menempuh ujian tersebut. Dalam kaitan ini, ada juga perguruan tinggi yang menganjurkan atau mendorong para mahasiswanya agar menempuh ujian tersebut sebagai wahana untuk mengetes tingkat kemampuannya.

b. Peminat Umum

Kesempatan terbuka bagi umum untuk mempelajari bahasa Indonesia melalui kursus-kursus *Open College* yang dibuka oleh Keio University, Sophia University, Takushoku University, Wako University, Obirin University, Ferris University, dan sebagainya. Beberapa perguruan tinggi malahan membuka beberapa jenis kursus dengan beberapa tingkat dan mengadakan semacam tes pada akhir kursus untuk memberikan surat tamat belajar.

3) Lembaga Pendidikan Bahasa Indonesia untuk Orang Jepang

Selain perguruan tinggi, banyak lembaga pendidikan bahasa dan Culture Center yang mengadakan kursus bahasa Indonesia di Jepang. Kami sendiri mengelola INJ Culture Center yang memiliki 18 kelas kursus bahasa Indonesia dengan jumlah peserta kursus sekitar 150 orang. KBRI Tokyo juga membuka 3 kelas kursus bahasa Indonesia dengan jumlah peserta 38 orang. Selain itu, ada banyak lembaga bahasa Asia juga yang menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia, misalnya Yomiuri Culture Center, Asahi Culture Center, Mainichi Culture Center, NHK Culture Center, B & B Language Training School, Japan Asia Culture Center, Asia Bunka Kaikan, International Exchange Center - Chinese Asian languages School di Tokyo, I.C. Nagoya di Nagoya, Asia Library di Jepang di Osaka dan Jakarta Communication Club di Jakarta. Daftar lembaga yang mengadakan bahasa Indonesia dimuat juga pada homepage HIPUBI (URL : <http://www.i-kentei.com>) supaya peminat bahasa Indonesia mudah mengakses lembaga-lembaga tersebut jika berminat.

4) Perusahaan dan Lembaga Pemerintah di Jepang

Dalam merekrut staf baru, beberapa perusahaan ataupun lembaga pemerintah di Jepang, seperti JICA (Japan International Cooperation Agency) memprioritaskan pelamar yang telah lulus ujian kemampuan bahasa Indonesia tingkat A-SP, tingkat A dan B. Dengan demikian, calon pegawai yang ingin bekerja pada perusahaan atau lembaga tersebut akan giat belajar untuk menempuh ujian kemampuan bahasa Indonesia. Malahan ada perusahaan yang memberikan insentif kepada karyawan/ karyawatnya yang telah lulus ujian tersebut.

5) Perusahaan Penerbit Buku Ajar atau Kamus di Jepang

Dua puluh tahun yang lalu jenis buku ajar bahasa Indonesia yang terbit di Jepang hanya beberapa jilid. Saya sendiri yang mulai belajar bahasa Indonesia pada kursus malam waktu itu sangat terkejut setelah mengetahui langkanya buku ajar dan bahan rujukan bahasa Indonesia. Ketika masih mahasiswa jurusan sastra Inggris, saya belum pernah mengalami kesulitan dalam mencari buku atau bahan mengenai bahasa atau sastra Inggris. Malahan saking banyaknya, sulit sekali memilih-milih buku yang paling tepat untuk menyusun skripsi.

Pada tahun 1989 saya bekerja sama dengan Bapak Dominicus Bataone, seorang dosen bahasa Indonesia di Universitas Sophia untuk menyusun buku ajar bahasa Indonesia bagi orang Jepang, judulnya *Bataone no Indonesia go Koza Shokyu* (Kursus Dasar Bahasa Indonesia Bataone) yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit Mekong. Buku ajar bahasa Indonesia

yang diterbitkan pertama kali empat belas tahun yang lalu itu pada tahun 2003 telah mengalami cetak ulang ke-16 dan menjadi buku standar pada beberapa perguruan tinggi, lembaga, dan kursus bahasa, serta *Culture Center* di Jepang. Juga di Indonesia, banyak pebisnis Jepang memakai buku tersebut untuk belajar sendiri. Sejalan dengan meningkatnya minat belajar bahasa Indonesia di Jepang, sejak itu, kami menerbitkan 16 jilid buku mengenai tata bahasa, percakapan, cara menulis surat, kebudayaan Indonesia, dan lain-lain.

Akhir-akhir ini bermacam-macam buku bahasa Indonesia sudah diterbitkan di Jepang. Misalnya, 22 jenis buku ajar, 27 jenis buku percakapan, 4 jenis buku ajar mengarang dan cara menulis surat, 4 jenis buku kosakata, serta 16 jenis kamus terpanjang di toko-toko buku besar di Jepang. Daftar buku dan kamus bahasa Indonesia dimuat juga pada homepage HIPUBI (URL : http://www.i-kentei.com/mondaishu&_gakushusho.htm) dengan foto sampul depan. Mudah-mudahan buku ajar dan kamus-kamus yang lebih lengkap akan diterbitkan agar para peminat bahasa Indonesia dapat lebih bebas memilih sesuai dengan selera masing-masing.

Kerja Sama Lembaga Pengkajian/Ujian Bahasa Indonesia di Jepang dengan Lembaga Kebahasaan/Perguruan Tinggi di Indonesia

Untuk mengembangkan pendidikan bahasa Indonesia lebih luas kepada masyarakat Jepang, HIPUBI dan guru besar serta dosen pada perguruan tinggi mengharapkan adanya kerja sama dengan lembaga kebahasaan atau perguruan tinggi di Indonesia.

Sebagai contoh, waktu menerbitkan *Buku Percakapan Bahasa Indonesia Bergambar* dua tahun yang lalu, Dr. Dendy Sugono, Kepala Pusat Bahasa, Depdiknas, juga bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengecek naskah tersebut. Sebagai orang Jepang apalagi orang awam di bidang kebahasaan, kami akan sangat berterima kasih apabila para pakar lembaga kebahasaan dan perguruan tinggi di Indonesia bersedia mengulurkan tangan untuk membimbing, serta memberi petunjuk, dan nasihat yang bermanfaat bagi pengembangan bahasa Indonesia di Jepang.

1) HIPUBI di Jepang Kerja Sama dengan Pusat Bahasa

HIPUBI di Jepang telah mengadakan kerja sama dengan Pusat Bahasa, Depdiknas di Jakarta dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Ujian Kemampuan Bahasa Indonesia untuk orang Jepang. Kebetulan Dr. Dendy Sugono, Kepala Pusat Bahasa, Depdiknas, juga menjadi anggota Panitia Ujian tersebut. Bantuan serta nasihat Dr. Dendy Sugono dalam kaitannya dengan materi soal ujian tersebut sangat berharga dalam penyelenggaraan Ujian Kemampuan Bahasa Indonesia yang bermutu.

2) Kerja Sama Perguruan Tinggi di Jepang dengan Perguruan Tinggi di Indonesia

a. Widyawisata

Hampir semua perguruan tinggi di Jepang menyarankan agar para mahasiswa ikut serta pada program widyawisata di Indonesia selama 2 minggu sampai 1 bulan pada masa liburan. Tempat tujuan favorit ialah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali, tetapi ada juga yang ke Malang, Sumatra, dan Lombok.

b. Belajar di Indonesia

Setelah berwidyawisata, ada beberapa mahasiswa yang memanfaatkan waktu liburnya untuk belajar pada salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi yang paling banyak diminati ialah Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Gajah Mada (UGM). Selain itu, ada juga yang memilih Universitas Darma Persada (Unsada), Universitas Udayana (Unud), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Merdeka (Unmer), dan Universitas Brawijaya (Unibraw).

c. Hubungan Kerja Sama

Beberapa perguruan tinggi di Jepang telah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Misalnya Takushoku University dengan Unsada, Kyushu Internasional University dengan UI, Tenri University dan Senshu University dengan Unpad, Asia University dan Kyoto Sangyo University dengan UI dan Unpad, Ritsumeikan Asia Pacific University dengan UI dan UGM, Setsunan University dengan Universitas Dr. Sutomo di Surabaya, Keio University dengan UI, Unmer, dan Universitas Sanata Dharma. Sebaliknya, perguruan tinggi di Indonesia mengirim guru besar atau dosen tamu ke perguruan tinggi di Jepang dalam rangka program pertukaran tenaga pengajar atau mahasiswa.

Manfaat yang Diperoleh Lewat Penguasaan Bahasa Indonesia bagi Orang Jepang

Peminat yang belajar bahasa Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu (1) Mahasiswa yang bidang studinya berkaitan dengan politik, ekonomi, masalah lingkungan, atau kebudayaan Indonesia; (2) karyawan/karyawati atau para pegawai yang bekerja di Indonesia atau yang mempunyai mitra kerja dengan perusahaan Indonesia; dan (3) karyawati yang sering berlibur ke Indonesia sebagai wisatawan.

- 1) Mahasiswa yang bidang studinya ada kaitan dengan Indonesia harus menguasai bahasa Indonesia untuk dapat membaca kepustakaan ataupun bahan rujukan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kalau ke daerah-daerah terpencil untuk melakukan penelitian lapangan atau mengumpulkan informasi dan data melalui wawancara dengan penduduk setempat, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi mutlak.

Dalam kaitan ini, mulai tahun 2003, Setsunan University menerapkan sistem unit bagi mata kuliah bahasa Indonesia kepada mahasiswa yang lulus Ujian Kemampuan Bahasa Indonesia, Tingkat B ke atas dibebaskan dari kuliah bahasa Indonesia.

- 2) Karyawan/karyawati atau pegawai yang bekerja di Indonesia atau mempunyai mitra kerja dengan perusahaan Indonesia, penguasaan bahasa Indonesia dinilai sangat bermanfaat karena dapat berkomunikasi langsung dengan orang Indonesia tanpa penerjemah. Hal ini dapat mencegah salah paham. Selain itu, hubungan kerja dapat berjalan lancar. Kami mengira bahwa tidak ada orang Indonesia yang merasa tidak gembira kalau disapa oleh orang asing dalam bahasa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa jalinan persahabatan atau rasa kekeluargaan akan makin erat bila mampu berbahasa Indonesia dengan lancar.
- 3) Karyawati Jepang yang berumur 20 atau 30-an sering berlibur ke Indonesia sebagai turis. Kalau mereka dapat berbahasa Indonesia, pasti liburan mereka akan sangat menyenangkan. Karyawati yang pernah belajar bahasa Indonesia selama 80 menit per minggu dalam setahun dapat menikmati percakapan dasar. Bagi karyawati yang pernah belajar selama dua tahun, mereka dapat bebas berjalan-jalan sendirian ke mana-mana tanpa didampingi pemandu wisata.

Kendala yang Dihadapi dalam Usaha Pengkajian Pengajaran/Ujian Bahasa Indonesia

Pada saat ini, kami memanfaatkan situs internet yang sangat membantu kalau mencari bahan untuk belajar mengajar bahasa Indonesia. Banyak informasi mengenai bahasa Indonesia yang kami peroleh melalui situs internet. Walaupun demikian ada beberapa kendala yang masih kami hadapi, antara lain, sebagai berikut.

1) Bahasa Jurnalistik

Waktu HIPUBI membuat soal ujian bahasa Indonesia khususnya tingkat A spesial, tingkat A, dan tingkat B, bahan untuk soal wacana dikutip dari media cetak. Akan tetapi, kadang-kadang bahasa jurnalistik tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku. Para anggota Panitia Ujian

Bahasa Indonesia selalu ragu-ragu apakah teksnya harus diubah atau dibiarkan begitu saja. Meskipun bahasa jurnalistik dinilai belum taat asas, menurut pendapat kami, sebaiknya tidak diubah teksnya pada soal ujian karena peminat bahasa Indonesia perlu pula memahami bahasa jurnalistik.

2) Kekurangan Buku Pedoman atau Kamus yang Baik

Meskipun pemanfaatan situs internet sangat membantu, kami masih berpegang pada buku ajar atau kamus yang dicetak. Jika dibandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Prancis, buku-buku bahasa Indonesia yang terbit di Jepang jumlahnya masih terbatas. Apa lagi, buku bahasa Indonesia yang terbit di Indonesia juga tidak banyak masuk pasaran di Jepang. Kami yakin bahwa salah satu kunci untuk meningkatkan mutu berbahasa Indonesia ialah diterbitkannya banyak buku ajar atau kamus bahasa Indonesia yang baku dan bermutu. Dalam kaitan ini, kami harap Pusat Bahasa memprakarsai penerbitan beberapa jenis buku pedoman bahasa Indonesia yang baku, baik, dan teliti khususnya untuk pengajar bahasa Indonesia di luar negeri, termasuk Jepang.

Faktor Pendukung Usaha Peningkatan Mutu Kemampuan Berbahasa Indonesia

Ada dua keuntungan yang dapat diperoleh peminat bahasa Indonesia yang menempuh ujian kemampuan bahasa Indonesia di Jepang. Pertama, yang bersangkutan dapat menilai sendiri secara objektif tingkat kemampuan bahasa Indonesianya apakah telah ada kemajuan atau masih kurang. Apabila dari hasil ujian itu dia merasa masih kurang, hal tersebut akan mendorong yang bersangkutan untuk berusaha belajar lebih giat lagi. Kedua, dari hasil ujian tersebut, yang bersangkutan dapat menilai kekurangannya pada soal wacana, kosakata, tata bahasa, menyimak, terjemahan, atau percakapan. Dengan demikian, yang bersangkutan akan tekun memperdalam bidang yang dirasakan masih kurang agar dapat memahami, menguasai, dan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan anjuran Depdiknas.

Sebagai penutup, kami mohon petunjuk, nasihat, dan bantuan dari para pakar bahasa Indonesia yang hadir di Kongres Bahasa Indonesia VIII demi pengembangan dan peningkatan mutu Ujian Kemampuan Bahasa Indonesia di Jepang.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2003
Judul Makalah : Peningkatan Mutu Kemampuan Berbahasa Indonesia
Melalui Ujian Bahasa Indonesia: Kasus di Jepang
Pemakalah : Yumi Kondo
Pemandu : Ketut Artawa
Pencatat : 1. Ketut Mandala Putra
2. Puji Santosa

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Widodo (Malang)
Bagaimana standar kualifikasi pengajaran Bahasa Indonesia di Jepang?

Jawaban:

Penyelenggaraan HIPUBI di Jepang belum memiliki standar penilaian tepat yang dapat dijadikan patokan untuk menilai kemampuan bahasa Indonesia bagi warga Jepang. Ujian diadakan di universitas dan daerah lain, seperti Osaka, Nagoya, dan Kyushu.

2. **Pertanyaan:** Hartati (SLTP 6 Pangkal Pinang)
Apakah peserta ujian kemampuan Bahasa Indonesia di Jepang dapat menyelesaikan ujian dengan baik?

Jawaban:

Keuntungan yang dapat diperoleh peminat bahasa Indonesia yang menempuh ujian kemampuan bahasa Indonesia di Jepang adalah peserta dapat menilai sendiri secara objektif tingkat kemampuan bahasa Indonesianya, baik pada wacana, kosakata, tata bahasa menyimak, terjemahan, maupun percakapan.

3. **Saran/Informasi:** Dameria Nainggolan (Pusat Bahasa, Jakarta)
Saya memberitahukan kepada penyaji bahwa penyaji bisa mendapatkan buku-buku atau bahan-bahan ujian kemampuan berbahasa Indonesia secara gratis di Pusat Bahasa.

KESAN SEORANG PENUTUR ASING BAHASA INDONESIA TENTANG RAGAM TULIS 'ASAL JADI SAJA'

Bruce F. Jarvis
Australia

Pendahuluan

Saya mulai belajar bahasa Indonesia dua tahun sebelum ada Ejaan yang Disempurnakan, yang dikeluarkan waktu saya baru masuk kuliah S-1. Oleh karena itu, tidak begitu sulit bagi saya untuk mempelajari dan menerapkan kaidah-kaidah bahasa itu. Dua puluh tahun kemudian saya berdinis sebagai penerjemah dan editor pada Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

Di situlah saya sering menghadapi hambatan dalam penerjemahan berupa bahasa Indonesia yang ditulis dalam gaya bahasa yang dapat disebut *ragam asal jadi saja* (singkatnya, *ragam al-jasa*). Sulit diterjemahkan wacana tulis yang maksudnya kurang jelas. Supaya bahan penerjemahan dapat dialihbahasakan secara tepat, naskah asli harus diteliti dengan saksama sehingga maksud bahasa sumber dapat diungkapkan dalam bahasa sasaran tanpa penyimpangan makna.

Dari pengalaman sebagai penerjemah selama lima tahun di Bapindo, saya dapat menarik kesimpulan bahwa di mana-mana di bank itu terdapat gejala tulisan *ragam al-jasa*, antara lain, ejaan yang belum disempurnakan, bentuk dan struktur tata bahasa yang kurang terampil, serta penyusunan kalimat dan alinea yang menunjukkan penataan penalaran yang kurang cermat.

Judul di atas mengatakan "kesan" karena makalah ini bukan berdasarkan penelitian ilmiah, melainkan berdasarkan pengamatan atas berbagai jenis bahasa tulis, antara lain buku pelajaran sekolah (dari jenjang sekolah dasar sampai tingkat kuliah S-2), surat kabar dan majalah, peraturan dan perundang-undangan, pengumuman di berbagai macam organisasi, iklan dan brosur komersial, dan juga bahasa tulis yang ditayangkan di media massa elektronik.

Sudah barang tentu bahwa pembangunan Indonesia tidak dapat mencapai tingkat keberhasilan seperti telah ternyata dewasa ini jika tidak ada satu bahasa nasional. Meskipun demikian, karena tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi membawa berbagai serangan terhadap bahasa Indonesia, pengembangan alat komunikasi nasional itu mengalami halangan.

Salah satu halangan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu adalah ragam tulis asal jadi saja. Oleh karena itu, pemaparan ini

bermaksud menyampaikan hasil pengamatan seorang penerjemah dalam rangka meningkatkan bahasa Indonesia tulis dalam laporan dan komunikasi resmi yang lain, sebagai salah satu usaha meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi informasi untuk pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan dalam Ragam Tulis Bahasa Indonesia

Sebagai bahan utama saya banyak menemukan *ragam al-jasa* yang berupa Laporan Pembahasan Proyek (LPP) di Bapindo. LPP itu merupakan laporan mengenai kelayakan proyek untuk menerima kredit dari bank tersebut. Akan tetapi, sebelum saya membahas permasalahan dalam wacana LPP dan beberapa contoh ragam tulis lain, perlu dijelaskan bahwa ada hal-hal di luar bahasa yang perlu kita pertimbangkan karena hubungan antara masalah kebahasaan dan faktor bukan bahasa merupakan hubungan yang penting. Biasanya, ketika rekan saya mendengar sebutan *ragam al-jasa* yang dipikirkan hanya sikap orang terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut pendapat saya, sikap orang merupakan hanya salah satu faktor penyebab *ragam al-jasa* itu. Konteks sosial di luar bahasa tulis itu tidak bisa diabaikan begitu saja, tetapi juga tidak dapat saya bahas secara mendalam di sini.

Asal-usul *ragam al-jasa* dalam LPP itu tampaknya bermacam-macam, antara lain (a) si penulis terburu-buru karena laporan perlu diselesaikan secara mendadak, (b) penulis (atau anggota timnya) telah diganti sebelum laporan bisa diselesaikan, (c) penulis kurang hati-hati mengutip laporan-laporan lain yang serupa, (d) penalaran penulis kurang jernih, dan (e) penulis acuh tak acuh terhadap kaidah bahasa tulis karena dianggap tidak begitu mempengaruhi komunikasi. Masalah bahasa yang akan diutarakan itu bisa juga disebabkan oleh soal sepele, yaitu salah ketik saja. Akan tetapi, sebenarnya, salah ketik itu sendiri menimbulkan masalah lain, yaitu tanggung jawab atas hasil ketik/cetak, yang juga akan disinggung dalam makalah ini.¹

Barangkali sebagai akibat mementingkan pembaca intern bank itu, sikap penyusun dan cara penyusunan LPP menghasilkan *ragam al-jasa* yang dapat dibagi ke dalam dua subragam, yakni

- 1) *ragam gado-gado* (*campuran kode dalam linguistik*) yang mungkin karena sikap tidak positif terhadap bahasa nasional, yaitu ragu-ragu mengembangkannya, atau mungkin karena tidak sempat mengembangkannya (akibat sampingan dari pesatnya pembangunan?);
- 2) *ragam bakuk* (*mau baku tetapi menjadi kikuk*) yang merupakan bahasa tulis yang terforsir.

¹ Contoh yang paling lucu waktu saya menerjemahkan Keputusan KBI I-VII adalah "pengajaran bahasa Indonesia" diketik "penghajaran bahasa Indonesia".

Wacana LPP itu dilihat melalui penerapan suatu kerangka acuan penilaian, yaitu *Pedoman Penyusunan Laporan* (yang secara lengkap disajikan sebagai Lampiran) yang mencakup (1) tata letak; (2) isi laporan (pendahuluan, bagian pokok laporan, kesimpulan/saran, dan lampiran); serta (3) bahasa (gaya bahasa, kosakata, tata bahasa, ejaan/peristilahan, dan tanda baca). Pemaparan pada kesempatan ini akan memusatkan perhatiannya pada bagian bahasa karena pedoman tersebut telah diterapkan secara lebih lengkap pada pertemuan lain.²

Walaupun beraneka ragam, semua masalah tata letak dalam LPP dapat dikatakan soal *lingkungan bahasa* karena berhubungan dengan keterbacaan laporan. Misalnya, dua hal penting untuk memudahkan keputusan berdasarkan laporan adalah penomoran bagian yang konsisten dan batas pinggir kiri yang teratur. Kedua hal ini saling terkait dan jika tidak dipedulikan, pembaca akan sulit mengetahui tingkatan informasi yang dibacanya.

Masalah jarak antarbagian LPP tidak banyak mempengaruhi keterbacaannya, tetapi masalah serupa adalah jarak antarinformasi, yaitu penyajian yang tidak (sempat?) direncanakan sehingga menjadi informasi kepadatan. Banyak hal yang akan dipertimbangkan oleh pembaca tidak perlu ditulis panjang lebar sehingga pembaca enggan melihatnya, tetapi dapat disajikan berbentuk bagan, daftar atau grafik dari ciri, sebab atau alasan yang bersangkutan. Sama halnya dengan informasi berupa tabel-tabelan, yaitu tabel yang isinya belum diatur ke dalam kolom yang mudah disimak.

Berhubungan dengan Bagian Pokok Laporan, tanpa merinci setiap bab dan subbab LPP, berbagai problem kebahasaannya dikemukakan berikut ini.

- 1) Kutipan pasal LPP lain belum disesuaikan dengan proyek yang sedang dibahas.
- 2) Bab II *Ikhtisar dan Pendapat* kadang-kadang memberi rincian yang diambil dari bab lain, tempat informasi itu wajar disajikan, atau sebaliknya, mengacu kelebihan pada bab lain untuk informasi dasar.
- 3) Bab III *Perusahaan* suka memberikan data panjang lebar mengenai perizinan [biasanya *perijinan] perusahaan (yang sudah diperoleh, yakni nomor, tanggal pengeluaran, dsb.), sedangkan lebih baik disebutkan saja apa yang telah dimiliki dan apa yang belum, dengan rinciannya didaftarkan pada Bab V *Hukum dan Agunan*.
- 4) Informasi yang terpisah di sana-sini, misalnya penyelesaian soal yang menjadi prasyarat penandatanganan perjanjian kredit (PK), atau menjadi syarat untuk PK efektif (yaitu sebelum penarikan kredit), dapat lebih mudah disimak jika disajikan berupa daftar.
- 5) Pembahasan masalah hukum yang berupaya keras untuk berbahasa resmi sebab aspek hukum perlu diungkap dengan tepat dan tegas, tetapi

² Lihat Jarvis (1995).

upaya itu menjadi kikuk-inilah *ragam bakuk*.

- 6) Penjelasan yang berlebihan tentang dasar teori analisis risiko meskipun ringkasan yang disajikan berikutnya sudah cukup.
- 7) Judul kolom tabel yang menjelaskan risiko biasanya *beragam gado-gado*: Kelompok Risiko dan Keterangan serta *Preventative Action* 'langkah pencegahan' dan *Contingent Action* 'tindakan penanggulangan'.
- 8) Pembahasan mengenai *pemasaran* menyajikan banyak tabel (yang se-yogianya dijadikan lampiran?), tetapi simpulan dari data-data itu agak irit analisisnya: sekadar menjelaskan hal yang sudah nyata dalam tabel sendiri.
- 9) Data yang kedaluwarsa dikemukakan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang perkembangan yang mungkin terjadi sejak data itu diterbit;
- 10) Pembahasan aspek *pemasaran* yang kebanyakan memakai istilah bahasa Inggris yang dapat digolongkan menjadi: (a) jenis produk (yang mudah diindonesiakan dengan kata yang ada atau melalui penyesuaian ejaan) dan (b) hal pokok penilaian (misalnya dua konsep dasar *market space* dan *market share*³, yang tertukar satu sama lain dengan akibatnya teks bermakna me-*ngawur*).
- 11) Pengungkapan konsep mengacau dan membingungkan, misalnya 'perusahaan grup' yang selain memakai ejaan bahasa Inggris (*group*), sering disebut 'grup perusahaan' seolah-olah tiada beda artinya, yakni 'anggota kelompok perusahaan' dan 'kelompok perusahaan'.
- 12) Pembahasan aspek *teknik* merupakan sumber terkaya untuk *ragam gado-gado*, misalnya, proses produksi yang dijelaskan dengan istilah bahasa Inggris, bukan karena bahasa Indonesia tidak mampu menangani istilah teknis, melainkan karena perusahaanlah yang menyediakan penerangan dalam bahasa Inggris tentang mesin, teknologi, dsb.⁴.
- 13) Pembahasan aspek *keuangan* dan *ekonomi* menjadi juara dalam menyebarkan istilah bahasa Inggris yang tidak perlu dipakai karena peristilahan bahasa Indonesia dalam kedua ilmu itu sejak lama mapan sekali⁵.
- 14) Ketidakcocokan antara judul dan isi, khususnya aspek ekonomi, menurut ilmu ekonomi seharusnya 'makroekonomi' karena yang diutarakan

³ Padanannya, 'peluang pasar' dan 'pangsa pasar', hanya kadangkala dipakai.

⁴ Pihak bisnis tampaknya kurang berkesempatan mengalihbahasakan informasi asing. Simpulan ini berdasarkan upaya tim pembahas proyek untuk mengindonesiakan istilah dalam pembahasan Teknik dibandingkan dengan jumlah istilah bahasa Inggris di lampiran yang data-datanya disediakan oleh perusahaan.

⁵ Beberapa contoh: *banker's clause* 'klausal bank', *cash break even point* 'titik impas kas', *cash flow* ' arus dana', *debt to equity ratio (DER)* 'rasio utang modal', *interest during construction (IDe)* 'bunga masa konstruksi', *overheads* 'biaya nonoperasi', *past performance* 'prestasi usaha', dan *revolving loan* 'kredit berulang'.

adalah manfaat untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan⁶.

- 15) Tidak ada bab tersendiri untuk simpulan dan saran, tetapi setiap bab/subbab berakhir dengan *penilaian* yang, pada umumnya, hanya menyimpulkan pencapaian kelayakan dari segi tertentu (termasuk saran tentang syarat-syarat yang masih perlu dipenuhi) dalam ungkapan standar dengan akibatnya bisa menyimpang dari proyek yang dibahas dengan memberikan informasi yang berbeda dari informasi di bab/subbab yang bersangkutan⁷.

Untuk keterbacaan, selain masalah kepadatan informasi dan tabel-tabelan yang diuraikan di atas, ada tiga jenis problem lain, yaitu (1) uraian yang berkepanjangan atau bertele-tele, (2) penataan penalaran yang tidak logis, dan (3) kumpulan kalimat yang tidak nyata batasannya. Di bawah ada contoh teks (bersama koreksinya) yang memperlihatkan ketiga problem itu (dan yang lain!):⁸:

"Dengan ketentuan dan kondisi sebagaimana tsb diatas maka dalam rangka gadai saham kepada PT X dipersyaratkan agar sementara PT belum disahkan, maka dalam gadai saham (sebagaimana persyaratan Bank) dalam Aktanya disertai adanya penjelasan mengenai kondisi Perseroan dengan tetap mengikat PT X untuk menyerahkan asli saham-saham perseroan apabila nantinya PT X telah mendapatkan pengesahan dan saham telah dicetak, namun dengan catatan bahwa apabila saham belum dicetak masing-masing pemegang saham PT X menyerahkan saham sementara (resipi), dengan ketentuan PT X terikat untuk menyerahkan asli saham kepada Bank."

Koreksi:

"Dengan ketentuan dan kondisi sebagaimana tersebut di

⁶ Hal-hal yang dikemukakan mencakup penghematan dan/atau pendapatan devisa, serta penambahan nilai dalam negeri.

⁷ Kesimpulan kilat itu berbunyi kurang-lebih seperti ini, "Berdasarkan uraian di atas, ditinjau dari segi ini, dapat disimpulkan bahwa proyek ini cukup layak untuk dibiayai. Kata *layak* itu sering muncul sebagai *feasible* atau *viable* tanpa membedakan penggunaan kedua kata itu, yaitu *technically feasible* dan *financially viable*.

⁸ Bandingkan dengan bahasa dalam kutipan berikut ini yang dicap pada kuitansi pembayaran uang kuliah sebuah perguruan tinggi, * Akaptel "Buana Wisata" sebagai pilihan utama, karenanya uang yang telah diserahkan dengan alasan apapun tidak dapat ditarik kembali, yang kemudian dicatat sebagai sumbangan pada Akaptel "Buana Wisata" Yang disempurnakan sebagai berikut. Oleh karena Akademi Pariwisata dan Perhotelan (Akaptel) *Buana Wisata* dipilih sebagai pilihan utama, uang yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun, tetapi kemudian dicatat sebagai sumbangan kepada Akaptel *Buana Wisata*.

atas,#) dalam rangka gadai saham sebagai agunan kredit sesuai dengan persyaratan Bank, perlu dipersyaratkan kepada PT X dalam akta penggadaian saham sebagai berikut:

- adanya penjelasan mengenai kondisi perseroan (akta pendirian PT belum disahkan);
- apabila saham belum dicetak, tiap-tiap pemegang saham harus menyerahkan saham sementara (resipis);
- PT X tetap terikat untuk menyerahkan saham-saham asli bila perseroan telah disahkan dan saham telah dicetak."

#) {ketentuan adalah penerbitan saham atas nama perseroan dengan tiap-tiap pemegang saham berhak atas satu suara, sedangkan kondisi adalah akta pendirian PT yang belum disahkan oleh Menteri Kehakiman.}

Sekarang masalah kebahasaan akan dibahas secara lebih terperinci. Bagian 3 *Pedoman* yang digunakan untuk menganalisis segi bahasa dalam laporan, sebagaimana tersebut di atas, mencakup gaya bahasa, kosakata, tata bahasa, ejaan dan peristilahan, dan tanda baca.

Gaya Bahasa

a. Pantas untuk laporan?

Wacana laporan pada umumnya berfungsi informatif. Oleh karena itu, gaya bahasanya harus resmi dan tidak emosional. Gaya bahasa LPP memang biasanya sesuai dengan fungsi tersebut, yakni membicarakan fakta dan hubungannya. Namun, LPP juga bertujuan vokatif, yaitu menghimbau pembacanya bertindak: menyetujui usul pembiayaan proyek. Dengan demikian, LPP bisa juga bersifat argumentatif, misalnya setelah menjelaskan besarnya peluang pasar bagi produk yang direncanakan, pembaca harus diyakinkan adanya pangsa pasar cukup yang dapat diraih. Dengan kedua fungsi teks LPP tersebut terdapat masalah yang sama, yaitu pemakaian perkataan berlebihan. Wacana LPP itu cenderung menimbulkan kedua subragam *ragam al-jasa* walaupun ciri khas laporan ialah bahasa yang ringkas, jelas, dan teratur.

b. Bersifat terlalu resmi atau seperti percakapan?

Bahasa yang terlalu resmi (*ragam baku*) telah dibicarakan. Di pihak lain, bahasa yang seperti percakapan tidak ada di LPP berupa satuan wacana panjang. Namun, ada kata-kata bahasa lisan yang tidak pantas dalam laporan tertulis, misalnya *karenanya* (oleh karena itu), *dibanding* (dibandingkan dengan), *nantinya* (nanti atau kemudian), *nampaknya* (tampaknya), dan *tentunya* (tentu (saja)).

Kosakata

a. Terlalu rumit bagi pembaca atau bermakna tidak jelas?

Ada penyusun **LPP** yang berusaha memakai kosakata aspek teknik yang tidak sulit, tetapi ada penyusun yang mengarang skripsi-skripsian. Namun, hal yang membingungkan pembaca adalah pemakaian kata secara 'bermakna luas' sehingga maknanya kabur, yaitu dalam konteksnya kurang jelas. Beberapa contoh: *industri*, *proyek*, *cukup*, *potensial*, dan *produksi* dibicarakan lebih lanjut di bawah.

industri: (Menurut *KBBI*,⁹ nomina ini berarti "perusahaan untuk membuat atau menghasilkan (memproduksi) barang-barang".) Kata *industri* dipakai dalam **LPP** dengan tiga arti: (1) suatu bidang perekonomian yang tertentu, seperti *industri tekstil* (dalam arti yang luas); (2) perusahaan atau pabrik, misalnya mesin yang sama dengan yang dipakai oleh banyak industri sejenis; dan (3) sektor perekonomian di antara sektor pertanian dan sektor jasa. Dengan arti yang kedua, pembaca tidak tahu apakah maksudnya bidang tekstil yang sama atau pabrik beroperasi di bidang yang sama. Arti ketiga dapat diungkap dengan 'bidang manufaktur'.

proyek: (Menurut *KBBI*, nomina ini berarti 'rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan dengan saat penyelesaian yang tegas'.) Pada dasarnya, pemakaian *proyek* sesuai dengan arti tersebut, yaitu rencana pendirian/perluasan usaha. Namun, pemakaiannya sebagai adjektiva mungkin terlalu memperluas arti itu, misalnya *lokasi proyek* dan *tanah proyek* yang masing-masing bermaksud 'letak pendirian usaha' dan 'tanah tempat usaha akan dibangun'. Di **LPP** *proyek* bisa juga bermaksud lain, yakni (1) usaha yang berjalan dan sedang dibiayai bank atau (2) usaha yang dulu dibiayai (rencana yang telah dilaksanakan).

cukup: (Menurut *KBBI*, adjektiva ini berarti 'jumlahnya (banyaknya) dapat memenuhi kebutuhan; lengkap (komplet, dsb.); sudah memadai (tidak perlu ditambah lagi); agak sangat'.) Pemakaian adjektiva ini dari depan sampai belakang setiap **LPP** bisa dikatakan amat lebih dari cukup (!) sebagai pengukur nilai yang ternetral untuk kelayakan teknik, kemampuan mendapat laba, kemampuan melunasi kredit, daya saing, dan sebagainya. Kenetralan itu bisa diragukan: apakah artinya seperti sikap khas orang Jakarte--*cukupan ajé, deh--atau agak sangat?* Kesenjangan makna ini amat besar. Barangkali, maksudnya *sedang-sedang* 'dapat memenuhi kebutuhan', *sudah memenuhi persyaratan* (lengkap) atau

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (2001)

'berbobot' (agak sangat). Ada LPP yang memperbedakan maksud-maksud itu dengan kata-kata lain, misalnya, *sangat memuaskan* dan *sudah melewati kebutuhan*.

potensial: (Menurut KBBI, adverba ini berarti 'mempunyai potensi [kemungkinan untuk dapat dikembangkan (daya, kekuatan, kemampuan, kesanggupan); berkemampuan'.) Makna kata ini bagaikan tergantung di udara, yaitu setelah membaca tentang sesuatu yang *cukup potensial*, pembaca menjadi bingung sebab tidak jelas apa yang berpotensi. Sebagian wacana harus dibaca kembali agar mengetahui apa yang dapat dikembangkan.

produksi: (Menurut KBBI, nomina ini berarti 'hasil; penghasilan; barang yang dibuat atau dihasilkan; dan kegiatan untuk menimbulkan nilai suatu barang atau jasa'.) Meskipun konteks wacana dapat membantu dalam membedakan kedua makna ini, jika dilihat dari segi ilmu ekonomi, pemakaian *produksi* akan lebih jelas di LPP kalau dikatakan *hasil produksi* atau *proses produksi* bila mungkin terjadi salah paham.

b. Diterangkan istilah ilmiah dan teknis?

Istilah teknis mungkin tidak dijelaskan atau penjelasan terlambat setelah dipakai beberapa kali. Banyak istilah yang diambil dari bahasa Inggris tampaknya diterangkan secara kebetulan saja. Yang paling membingungkan ialah kata *share*. Kelihatan mudah diindonesiakan menjadi 'saham' bila mengingat perkembangan bursa efek. Akan tetapi, *share* itu merupakan semacam istilah prokem di LPP. Ungkapan asli yang lengkap adalah *share of project financing*, dan sekali-sekali terlihat di LPP 'share pembiayaan proyek' yang sebenarnya bermaksud 'dana sendiri (perusahaan)'.

c. Singkatan/akronim diterangkan bila tidak ada di daftar istilah?

Daftar Penjelasan pada awal LPP menerangkan singkatan dan akronim, tetapi biasanya tidak berdaya sama sekali! Sepanjang setiap LPP banyak singkatan lain digunakan tanpa penjelasan, khususnya di subbab Pemasaran dan Teknik; jumlahnya bisa dua kali lipat yang terdapat di daftar tersebut.

d. Sanding kata yang tidak lazim atau yang rancu?

Berbagai contoh masalah ini ditemukan di dalam LPP, antara lain:

- (1) *masing-masing* yang dipakai secara salah untuk mengganti *tiap-tiap* atau disalahtempatkan dalam kalimat;
- (2) gabungan kata dengan *mana*, seperti ... , *produk mana* ..., yang merupakan kerancuan gaya *di mana* sebagai kata penghubung penjelasan; dan

- (3) pasangan kata yang mubazir, seperti *adalah berupa* (adalah), *adalah merupakan* ('adalah' atau 'merupakan'), *berhubung karena* (karena), *disebabkan karena* ('karena' atau 'disebabkan oleh'), *karena sehingga* (karena), *meskipun apabila* (meskipun), *untuk selama* ('selama' atau 'untuk'), dan *seperti misalnya* ('seperti' atau 'misalnya').

Tata Bahasa

a. Tata kalimat (subjek + predikat [+ objek]) lengkap?

LPP seperti biasa dalam wacana tulis memperagakan berbagai kalimat majemuk, tetapi semua unsur mungkin tidak ada jika perlu atau terulang-ulang tanpa elipsis yang sesuai. Bandingkanlah contoh teks LPP, yang diberikan di bawah, dengan perbaikannya. Cobalah perhatikan juga beberapa masalah lain yang tercantum di dalam teks ini!

"Dalam memenuhi kebutuhan akan bahan baku utama berupa benang Poliester, Katun (*Cotton*) dan bahan pembantu lainnya berupa zat kimia, zat warna, benang jahit, kancing dan lain - lain tidaklah mengalami kesulitan baik dalam jumlah kualitas maupun kontinyuitas karena dalam hal ini telah menjalin hubungan dengan beberapa supplier lokal sebagai berikut:"

Teks ini dapat diperbaiki menjadi:

"Memenuhi kebutuhan akan bahan baku utama berupa benang poliester dan katun, serta bahan pembantu berupa zat kimia, zat warna, benang jahit, kancing, dan lain-lain tidaklah mengalami kesulitan, baik dalam jumlah, kualitas, maupun kontinuitas karena PT Z telah menjalin hubungan dengan beberapa penyuplai lokal sebagai berikut"

b. Susunan kalimat jelas dan tidak terlalu pelik?

Adakalanya informasi perlu cepat-cepat ditulis, tetapi akibatnya fakta dikumpulkan sedemikian rupa, baik sebagai kalimat maupun sebagai frasa, sampai menjadi satu alinea panjang, seperti contoh teks yang diberikan untuk masalah keterbacaan pada halaman 638 di atas.

c. Kata tugas dipakai dengan tepat?

Kata tugas yang dimaksud berupa kata penghubung (preposisi dan konjungsi). Problem ditemukan mencakup yang dibicarakan di bawah.

dimana: (Menurut KBBI, kata ini merupakan kata tanya untuk menerang-

kan tempat.) Penyalahgunaan *di mana* (ejaan pasca-EYD) merupakan pemakaian rancu sebagai kata penghubung serbaguna. Sebelum pemakaian rancu itu, ada kata penghubung *tempat* bila hubungan dimaksud memang berarti 'tempat'. Cara lain untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat adalah mengatur kembali penalaran, dan kemudian, bergantung pada hubungan yang ingin dinyatakan, menggunakan kata penghubung seperti *bahwa, bila, dan, dengan, jika, karena, yaitu, yang* bersama bentuk kata-kata berikutnya yang sesuai. Bahkan, kalimat panjang dapat dibagi menjadi dua atau tiga kalimat pendek.

berdasarkan: (Menurut *KBBI*, verba ini berarti 'menurut; memakai sebagai dasar, beralasan, bersendikan; bersumber pada'.) Berdasarkan pengamatan LPP, pemakaian utama verba *berdasarkan* (yang sering dipakai dengan *maka* yang tidak perlu) adalah juga sebagai kata penghubung serbaguna pada tingkatan wacana mana pun. Meskipun *berdasarkan* belum terdaftar sebagai kata tugas di *TBBBI*,¹⁰ izin untuk menyebarkannya mudah diperoleh di lapangan bahasa perbankan sebagaimana terwujud dalam pemakaian serba guna itu!

sehingga: Menurut *TBBBI*, kata ini merupakan konjungsi subordinatif dengan makna pengakibatan (yang bertugas menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak memiliki status sintaksis yang sama). Pemakaiannya sering memenuhi fungsi tersebut, yaitu menyatakan akibat dari tindakan/kegiatan/dsb. Walaupun demikian, ada penulis LPP yang memilih *sehingga* sebagai kata penghubung yang termudah untuk menggabungkan klausa (ataupun kalimat) tanpa mempedulikan hubungan antarinformasi yang sebenarnya.

daripada: (Menurut *TBBBI*, kata ini adalah preposisi gabungan yang menandai hubungan perbandingan.) Pemakaiannya sering memenuhi tugas tersebut dengan tepat, tetapi bisa juga mengikuti penyalahgunaan yang sangat berlaku sebagai tanda milik atau tanda arah.

maka: (Menurut *TBBBI*, kata ini adalah konjungsi subordinatif yang menandai hubungan pengakibatan.) Pemakaian *maka* biasanya mu-bazir dalam kombinasi tak logis, yaitu setelah anak kalimat dimulai dengan *Karena* yang menandai hubungan *sebab* atau *alasan*, atau dimulai dengan konjungsi yang menyatakan *syarat* (seperti *Apabila* dan *Jika*), induk kalimat dimulai dengan *maka* yang sebenarnya hanya mengganti fungsi tanda koma. Oleh karena itu, pemakaian kata tugas ini; bisa menimbulkan makna hubungan yang bertentangan.

Kombinasi kata tugas lain yang tidak logis, seperti *Walaupun ..., tetapi ...*

¹⁰ *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Rasa1 Alwi et al. (1998)*

(dua penanda 'perlawanan'), *Agar ...*, *sehingga ...* (penanda 'tujuan' dan penanda 'akibat'), dan *Karena ...*, *sehingga ...* (penanda 'sebab' dan penanda 'akibat').

d. Tidak ada kesalahan mendasar yang menghambat komunikasi?

Yang dimaksud dengan berat adalah kesalahan yang mengganggu penyampaian pesan, tetapi bisa juga mencakup kesalahan yang hanya menghambat komunikasi. Beberapa masalah itu diutarakan di bawah.

- 1) Preposisi yang tidak perlu pada awal kalimat, yang menimbulkan salah baca, acapkali terdapat di LPP. Beberapa contoh diberikan berikut ini. *Untuk biaya bangunan adalah sebagai berikut* yang cukup dimulai dengan *Biaya bangunan. Dari proyeksi neraca tersebut diatas menunjukkan sebagai berikut:* yang dapat diperbaiki menjadi *Proyeksi neraca tersebut menunjukkan keadaan sebagai berikut.*
- 2) Kesejajaran bentuk, khususnya dalam daftar informasi, tampaknya tidak diperhatikan di LPP sehingga komunikasi mungkin terhambat. Misalnya, "Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - Merupakan daerah industri, dimana pada saat ini telah terdapat banyak tekstil disekitarnya.
 - Sarana transportasi berupa jalan raya telah tersedia, oleh karenanya PT W tidak mengalami kesulitan mengenai pengangkutan produksi maupun pengadaan bahan baku."

Teks ini dapat diperbaiki sebagai berikut:

- "Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
- (a) lokasi yang berupa daerah industri yang telah terdapat banyak pabrik tekstil di sekitarnya;
 - (b) sarana transportasi yang berupa jalan raya telah tersedia, yang berarti PT W tidak akan mengalami kesulitan, baik dalam pengangkutan hasil produksi maupun pengadaan bahan baku."
- 3) Bentuk kata majemuk yang tidak lengkap, seperti dalam bahasa lisan, sering terdapat di LPP; selain *dibanding* untuk *dibandingkan dengan*, ada juga *sesuai* untuk *sesuai dengan*, misalnya *sesuai perkiraan* dan *sesuai ketentuan*.
 - 4) Nomina ulang mubazir yang terdapat di LPP bisa berupa yang rancu dari bentuk jamak bahasa Inggris atau yang menyusul kata penanda jumlah, seperti *beberapa kemudahan-kemudahan* dan *banyak berdiri pabrik-pabrik*.

Ejaan dan Peristilahan

a. Diterapkan Ejaan yang Disempurnakan?

Pemenggalan kata secara acak bisa menjadi penghambat komunikasi

LPP. Akan tetapi, bila menggunakan komputer, kelalaian itu dapat dihindari. Di antara kata yang ejaannya telah disempurnakan masih ada yang muncul bersamaan dengan ejaan lamanya. Misalnya, pernah terlihat *anggota* dan *anggauta* di dalam satu kalimat, serta *risiko* dan *resiko* dalam satu alinea. Ada lagi yang 'setengah jadi', seperti *analisa risiko* dan *analisis resiko* untuk 'analisis risiko'.

Kerap kali *di antara* ditulis serangkai dengan cara pra-EYD, yakni *diantara*. Sama halnya dengan *di atas*, *di bidang*, dan *di samping*. Untuk yang terakhir itu, ada orang yang salah anggap 'di'-nya boleh disambung jika artinya *selain itu*.

Di pihak lain, kata yang harus ditulis serangkai (seperti awalan modern) ternyata ditulis terpisah, misalnya *persaingan antarbank* menjadi *persaingan antar bank*. Awalan lain yang sering ditulis terpisah dalam LPP adalah *non-*, *purna-*, dan *pra-* (seperti *non operasional*, *purna jual*, dan *pra operasi* yang masing-masing harus ditulis *nonoperasional*, *purnajual*, dan *praoperasi*).

Kerja sama sering ditulis serangkai. Hal ini mungkin dapat dimaklumi karena kata majemuk *kerja sama* biasanya disusul dengan kata *dengan* yang merupakan salah satu arti kata *sama* dalam bahasa lisan. Adalah membingungkan bila tidak serangkai sebab tiada *kerjasama* antara *sama dengan dengan* itu! (N.B. Kata *dengan* yang dicetak tebal sebenarnya *dan* dalam bahasa Indonesia baku.)¹¹

b. Diterapkan Pedoman Umum Pembentukan Istilah?

Mengingat anjuran GBHN 1993, "penggunaan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari", masalah pemakaian istilah asing--yang tidak selalu dijelaskan--di wacana tulis seperti LPP seharusnya dapat dikurangi. Banyak istilah bidang tertentu tidak perlu dipungut dari bahasa Inggris¹². Istilah pungutan mungkin juga keliru bentuk atau ejaan, seperti **"claim supplier" [claim on supplier]*, **"non revolving" [non-revolving]*, **"over head" [overheads; overhead costs]*, **"skilf" [skilled]*, dan **"unskilf" [unskilled]*. Istilah pungutan ada juga yang setengah diindonesiakan, misalnya **"authority moneter"*!

¹¹ Keputusan KBI III (1978), Bagian IV, Tindak Lanjut (16): "Melakukan penelitian kembali terhadap kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang sudah ada dan apabila ada kaidah yang sudah tidak sesuai lagi, kaidah itu sebaiknya diperbaiki." Berdasarkan keputusan tersebut, saya sekarang selalu menulis *kerja sama* sebagai *kerjasama*!

¹² Misalnya di bidang tekstil: *knitting* 'perajutan', *dyeing* 'pencelupan', *finishing* 'penyempurnaan', *dryer* 'mesin pengering', dan *compressor* 'pemampat'.

Tanda Baca

a. Pemakaiannya tepat? (koma, titik koma, huruf besar, dsb.)

Di antara semua kelalaian dalam memakai tanda baca, yang paling menghambat penangkapan pesan adalah pemakaian satu atau dua tanda koma secara tidak tepat (asal jadi saja?) untuk memisahkan beberapa kalimat, seperti dalam contoh masalah keterbacaan pada halaman 638 di atas.

Huruf besar dipakai secara sembarangan, misalnya istilah pokok pembahasan dimulai dengan huruf besar meski bukan nama, seperti *Akta*, *Sponsor*, *Debitur*, dan *Biaya Proyek*. Huruf besar saja suka dipakai untuk singkatan, seperti *KVA* untuk *kVA*.

Tanda titik koma kurang dikenali, khususnya dalam daftar informasi. Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap butir yang menyusul tanda titik dua dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik, sedangkan tanda baca masing-masing yang benar adalah huruf kecil dan tanda titik koma¹³.

b. Tidak dilupakan dengan akibatnya teks bermakna ganda?

Tanda koma yang penting sering lenyap. Empat jenis penghambat komunikasi potensial ini dapat didaftarkan di sini beserta contoh dan perbaikannya.

- 1) Kelupaan tanda koma yang wajib setelah anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Di dalam kalimat berikut kurangnya tanda koma setelah kata *ekspor* menimbulkan makna yang tidak dimaksudkan. "Karena pemasaran PT *H* berorientasi ke ekspor teknologi ini sangat urgen" seakan-akan berarti bahwa PT *H* mengekspor teknologi dan pemasaran ekspor itu sangat mendesak. Sebenarnya, bila wacana LPP diperhatikan, yang dimaksudkan adalah mesin-mesin dengan teknologi tertentu sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekspor produk PT *H*.
- 2) Kelupaan tanda koma yang mengapit klausa atributif yang bersifat tidak membatasi. Misalnya, frasa *khususnya untuk tujuan ekspor* perlu diapit dengan tanda koma dalam kalimat berikut: *Untuk tahun-tahun mendatang industri pakaian jadi masih mempunyai prospek yang baik khususnya untuk tujuan ekspor karena diperkirakan adanya peningkatan permintaan.*
- 3) Kelupaan tanda koma yang perlu guna mencegah terjadinya salah baca, seperti dalam kedua contoh berikut ini. Tanda koma perlu di antara kata *perhitungan* dan *proyek* dalam kalimat ini: *Dari hasil perhitungan proyek*

¹³ Akibat penggunaan komputer? Sebenarnya hal ini bergantung pada jenis 'daftar' ybs. Apabila setiap butir merupakan 'buntut' kalimat yang dimulai di atas, perlu dimulai dengan huruf kecil. Tapi, bila setiap butir merupakan 'kalimat' sendiri, jadi perlu dimulai dengan huruf kapital.

PT K akan ..., dan di antara diperoleh dan perusahaan dalam kalimat ini: Menurut informasi yang diperoleh perusahaan tersebut saat ini mempunyai hubungan dengan ...".

- 4) Kelupaan tanda koma yang wajib setelah penghubung antarkalimat. Misalnya, ... , oleh karena itu PT F... yang diperbaiki menjadi Oleh karena itu, PT F ..., dan ... menyebabkan biaya penambangan menjadi mahal, disamping itu letak alat ..., yang diperbaiki menjadi ... menyebabkan biaya penambangan menjadi mahal. Di samping itu, letak alat

Catatan Penutup

Siapa yang bertanggung jawab untuk terbitan seperti brosur, situs internet, dan sebagainya? Baru-baru ini saya memberikan umpan balik kebahasaan kepada beberapa orang pemimpin lembaga pendidikan; bahasa dalam terbitannya yang dapat dibaca oleh masyarakat luas (sekampus, sedunia, atau kalangan pelanggan) itu sedikit bersifat 'asal jadi saja'.

Alasan agar masalah-masalah bahasa itu bisa dimaklumi adalah bahwa orang yang mengetiknya atau mencetaknya berpendidikan rendah! Katanya, ketepatan naskah asli yang diserahkan kepada pihak ketik/cetak itu sudah diperiksa, tetapi diubah dengan tidak sengaja oleh si pelaksana! Jadi, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Ada yang menambahkan bahwa karena atasannya yang membayar pihak percetakan, menjadi sia-sia memarahi si tukang cetak-"Apa boleh buat!" katanya.

Soal ini merupakan perbedaan kebudayaan bagi penutur asing bahasa Indonesia ini. Di negara saya, meskipun yang mengetik atau mencetaknya adalah lulusan jenjang pendidikan yang kurang tinggi, pertanggungjawaban atas penerbitan masih dipegang oleh seorang pemimpin. Sebelum terbitan sampai di depan mata masyarakat, cetak coba atau konsep ketikan diperiksa kembali oleh orang yang bertanggung jawab atau orang yang harus menandatangani dokumen.

Rangkuman Masalah Kebahasaan

Problem kebahasaan yang terkandung dalam LPP dan wacana tulis lain dapat dikategorikan secara terperinci, misalnya menurut unsur kalimat, jenis kalimat, bentuk kata, dan kelas kata, atau berdasarkan aspek lain, seperti ejaan dan tanda baca. Akan tetapi, karena simpulan semacam itu perlu penelitian yang lebih mantap daripada pengamatan saya, masalah kebahasaan yang telah saya uraikan itu dapat disimpulkan menjadi tiga golongan.

a. Peristilahan

Pencampuran bahasa secara sewenang-wenang terwujud di bidang ilmu tertentu dalam pemakaian istilah bahasa Inggris (yang setidak-tidak-

nya dapat dicetak miring) yang sering tidak dijelaskan, dan/atau yang telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, dan/atau yang dapat disesuaikan melalui prosedur pembentukan istilah. Selain itu, pemakaian kata gaya bahasa lisan dan istilah 'prokem' khas bidang ilmu tertentu harus dihindari.

b. Pemakaian Kata

Masalah golongan ini dapat dibagi menjadi dua subkelompok sebagai berikut.

- (1) Kata yang dalam pemakaiannya bermakna terlalu luas, yaitu tidak sesuai dengan maksud penulis yang sebenarnya.
- (2) Kata tugas yang pemakaiannya tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu preposisi dan konjungsi (termasuk yang rancu) yang dipakai secara terlalu bebas sehingga fungsinya sebagai kata penghubung menyasar.

c. Penyusunan Kalimat

Ketidakjelasan susunan kalimat dalam wacana tulis dapat digolongkan sebagai berikut.

- (1) Hubungan intrakalimat yang merupakan soal ketidaklengkapan unsur kalimat dan/atau kelalaian tanda baca (khususnya tanda koma) dan/atau ketidaktepatan kata tugas;
- (b) Hubungan antarkalimat yang pada dasarnya merupakan soal penyalahgunaan kata tugas, termasuk yang rancu dan yang serba guna;
- (c) Penalaran pesan tidak jelas yang pada umumnya merupakan akibat dari terjadinya soal (a) dan/atau (b), tetapi juga dapat disebabkan oleh ketidakiritan dalam memakai kata, yaitu perkataan yang berlebihan (termasuk bila elipsis perlu) dan/atau pemakaian kata-kata mubazir.

Simpulan dan Saran

Sebagai akibat mementingkan pembaca intern suatu organisasi, sikap penyusun dan cara penyusunan laporan dan banyak wacana tulis lain menghasilkan *ragam al-jasa* yang terdiri atas dua subragam, yakni (1) campuran kode (*ragam gado-gado*) dan (2) bahasa tulis yang terforsir (*ragam baku*). Untuk menanggulangi masalah kebahasaan seperti ini, perlu digalakkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia tulis di berbagai industri, antara lain berupa penyuluhan serta penyusunan kamus istilah.

Penyusunan wacana tulis yang akan dibaca oleh masyarakat di luar suatu organisasi, seperti brosur berisi informasi produk/jasa dan situs internet yang bisa dibaca sedunia, perlu ditingkatkan kewaspadaannya terhadap pengungkapan yang tepat agar citra organisasi yang bersangkutan tidak tercemar atau ditertawakan. Orang yang bertanggung jawab atas 'hasil' suatu terbitan harus lebih sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawabnya!

Tanggapan atas saran tadi yang pernah saya terima adalah "tapi sudah lama sejak saya belajar bahasa Indonesia; saya kurang tahu aturannya saat ini". Justru karena selama era globalisasi bahasa Indonesia telah berkembang dengan pesat, orang yang sudah lama selesai pendidikan formalnya harus lebih memperhatikan masalah ejaan yang tepat, harus lebih mengikuti prosedur pembentukan istilah, dan harus lebih mempelajari kaidah tata bahasa baku dalam ragam tulis. Kalau para pemimpin mengeluh tidak sempat, hal itu harus ditugaskan kepada seorang ahli bahasa (editor).

Sumber Rujukan Pustaka

- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1989. "Sejarah, Keadaan Sekarang, dan Harapan Masa Depan Bahasa Indonesia", Seminar di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Alwi, Hasan, *et al.* 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-3 Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, E. Zaenal. 1987. *Kata-Kata Mutakhir*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
- Arifin, E. Zaenal dan Farid Hadi. 1992. *1001 Kesalahan dalam Pemakaian Bahasa Indonesia*. Jakarta: Akapress.
- Badudu, J.S. 1984. "Masalah Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Hukum", Ceramah pada Penataran Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 24 Maret 1984, dalam J.S. Badudu, 1985. *Cakrawala Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Chaer, Abdul. 1988. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bahrata Karya Aksara.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992. *Petunjuk Praktis Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka
- Hartono, Sunaryati. 1990. "Pemakaian Kata Asing di dalam Kegiatan Badan Usaha Ditinjau dari Pembinaan Hukum Nasional", makalah pada seminar Dampak Pemakaian Kata Asing di dalam Bahasa Indonesia, 23--24 Maret 1990, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Hastuti, Sri. 1985. *Permasalahan dalam Bahasa Indonesia*. Klaten: Intan.

- Hoed, Benny, *et al.* 1993. *Konsep. Pedoman bagi Penerjemah*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Jarvis, Bruce F. 1989. "Pola Linguistik dan Tingkatan Makna di Balik Semboyan 'Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar'", makalah pada Pertemuan Ilmiah Regional Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), 2--3 November 1989, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
- _____. 1995. "Laporan Studi Kelayakan Proyek: Penalaran dalam Berbahasa Indonesia di Dunia Perbankan", makalah pada Kongres Nasional MLI.
- Kridalaksana, Harimurti. 1984. *Kamus Linguistik*. Edisi ke-2. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1985. Edisi Ke-2. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende, Flores, NTT: Nusa Indah.
- Latief, A. 1988. "Beberapa Masalah Unsur Serapan dalam Bahasa Indonesia", makalah pada Kongres Bahasa Indonesia V, Yakarta.
- Moeliono, Anton M., *et al.* 1987. *Masalah Bahasa yang Dapat Anda Atasi Sendiri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeliono, Anton M. 1989. *Kembara Bahasa: Kumpulan Karangan Tersebar*. Jakarta: Gramedia.
- Nababan, P.W.J. 1984. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Sakri, Adjat. 1984, *Ed. Ke-2. Petunjuk bagi Pengarang, Penyunting, dan Korektor*. Bandung: ITB.
- Siahaan, Bistok A. 1987. *Pengembangan Materi Pengajaran Bahasa*. Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugono, Dendy. 1989. *Ed. Ke-2. Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: PT Priastu.
- Tarigan, Henry Guntur. 1985. *Pengajaran Gaya Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- _____. 1986. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- _____. 1987. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.
- Wedhawati, *et al.* 1991. *Yang Penting Buat Anda: Para Pejabat, Eksekutif, Wartawan, dan Dosen*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

1. PERIKSA TATA LETAK

- 1.1 Judul laporan sesuai dengan tujuan?
- 1.2 Subjudul bab sesuai dengan isi?
- 1.3 Penomoran bagian konsisten?
- 1.4 Jarak antarbagian?
- 1.5 Batas pinggir kiri teratur?
- 1.6 Setiap tabel/grafik/bagan/dsb. diberi nomor urut dan judul?
- 1.7 Halaman dan lampiran diberi nomor?

2. PERIKSA ISI LAPORAN**2.1 Pendahuluan**

- 2.1.1 Termasuk Pokok Acuan Tugas (PAT)?
- 2.1.2 Tujuan laporan dinyatakan dengan jelas?

2.2 Bagian Pokok Laporan

- 2.2.1 Tersusun dengan baik?
- 2.2.2 Jelas terbaca?
- 2.2.3 Mencakup semua tujuan (yang ada dalam pendahuluan)?
- 2.2.4 Diuraikan semua informasi yang penting?
- 2.2.5 Terulangi informasi?
- 2.2.6 Tidak ada data terinci yang pantasnya di Lampiran?
- 2.2.7 Bagian sesuai dengan tujuannya?

2.3 Simpulan dan Saran

- 2.3.1 Secara logis berdasarkan informasi di bagian pokok laporan?
- 2.3.2 Tidak menyajikan informasi baru atau data yang terinci?

2.4 Lampiran

- 2.4.1 Data disajikan dengan jelas?
- 2.4.2 Setiap tabel/grafik/bagan/dsb. sudah berjudul dan bernomor?

3. PERIKSA BAHASA**3.1 Gaya Bahasa**

- 3.1.1 Pantas untuk laporan?
- 3.1.2 Bersifat terlalu resmi atau seperti percakapan?

3.2 Kosakata

- 3.2.1 Terlalu rumit bagi pembaca atau bermakna tidak jelas?
- 3.2.2 Diterangkan istilah ilmiah dan teknis?
- 3.2.3 Singkatan/akronim diterangkan bila tidak di daftar istilah?
- 3.2.4 Sanding kata yang tidak lazim atau yang rancu?

3.3 Tata Bahasa

- 3.3.1 Tata kalimat (subjek + predikat [+ objek]) lengkap?
- 3.3.2 Susunan kalimat jelas dan tidak terlalu pelik?
- 3.3.3 Kata tugas dipakai dengan tepat?
- 3.3.4 Tidak ada kesalahan mendasar yang menghambat komunikasi?

3.4 Ejaan dan Peristilahan

- 3.4.1 Diterapkan Ejaan yang Disempurnakan?
- 3.4.2 Diterapkan Pedoman Umum Pembentukan Istilah?

3.5 Tanda Baca

3.5.1 Pemakaian tepat? (koma, titik koma, huruf besar, dsb.)

3.5.2 Tidak dilupakan dengan akibatnya teks bermakna ganda?

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2003
Judul Makalah : Kesan Seorang Penutur Asing Bahasa Indonesia
tentang Ragam Tulis "Asal Jadi Saja"
Pemakalah : Bruce F. Jarvis
Pemandu : Mashadi Said
Pencatat : 1. Ni Luh Partami
2. Jonner Sianipar

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Muhammad Hasri (SMU 5, Makassar)
Dari sekian banyak kesalahan berbahasa dalam ragam *Aljasa* itu, aspek apa yang dominan mengalami kesalahan itu dan bagaimana cara memperbaikinya serta dari mana memulainya?
2. **Pertanyaan:** Faturrofiqh (Guru SLTP AL-Hikmah Full Day School, Surabaya)
Mohon Pak Bruce menjelaskan model pengajaran di Australia atau negara lain untuk membandingkannya dengan pendidikan bahasa di Indonesia yang kurang memberdayakan anak didik. Kemampuan seorang pelajar untuk berbicara, menulis, dan mendengar tidak dimaksimalkan dalam pengajaran bahasa Indonesia.
3. **Pertanyaan:** Nurhayati (Universitas Sriwijaya Palembang)
Tampaknya pembelajaran bahasa Indonesia itu gagal total. Dari makalah halaman 10: "... memenuhi kebutuhan dan selanjutnya...", teks yang Bapak perbaiki masih tetap tanpa subjek.

Jawaban:

Untuk penanya pertama, kesalahan yang paling menonjol, itu susah. Akan tetapi, mungkin yang pertama adalah kekurangcermatan pemakaian tanda baca, khususnya dalam tulisan resmi seperti bahasa hukum. Namun, seperti yang diutarakan Ibu Nurhayati tadi, pemakaian kata tugas dengan makna semanya, seperti serba guna, itu sangat membingungkan. Memang lebih gampang orang mengkritik daripada memberi solusinya. Saya belum berpengalaman banyak di lapangan pendidikan SMP atau SMA, tetapi waktu saya mengajar di Australia di kursus kejuruan, ada kesan bahwa, bukan orang Indonesia saja, tetapi juga orang dari mancanegara, banyak orang latar belakang pendidikan terlalu banyak hapalan, tidak bisa *ngerti* tetapi hapal saja. Untuk 20 pertanyaan

misalnya, banyak orang mampu hafal 600 jawaban. Ini membuat pusing saja. Mungkin sama problem yang dihadapi di sini, terlalu sibuk memikirkan ujian dan hapal dari pengertiannya. Jadi, perlu laboratorium praktik dan menulis bahasa.

PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA DI SURINAME

Roesman Darmohoetomo

Pendahuluan

Peran Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang penting untuk dipelajari di banyak negara di dunia, antara lain Australia, Korea, Jepang, Cina, Rusia, Italia, Belanda, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing perlu dikembangkan demi perluasan penyebaran penggunaan bahasa Indonesia ke kawasan mancanegara.

Alinea tersebut di atas saya kutip dari salah satu latar belakang Kongres Bahasa Indonesia VIII yang sedang diadakan sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa penulis mengetengahkan pengembangan bahasa Indonesia di Suriname, salah satu negara kecil di Amerika Selatan yang mungkin kurang diperhitungkan, bahkan mungkin ada yang belum mengenal atau mendengar tentang negara tersebut. Meskipun Suriname suatu negara kecil yang berpenduduk kurang dari setengah juta jiwa yang dapat berbahasa Indonesia sudah mencapai bilangan ribuan orang.

Sejarah menunjukkan bahwa pada saat Suriname dan Indonesia masih menjadi jajahan Belanda, yaitu pada tahun 1890, untuk meningkatkan produksi perkebunannya, Belanda mendatangkan imigran dari Indonesia (Hindia Belanda saat itu) yang kebanyakan berasal dari Jawa Tengah karena pada saat itu Jawa Tengah sudah merupakan wilayah yang cukup padat penduduknya. Selain itu, Belanda juga mendatangkan imigran dari Cina dan India.

Dari tahun 1890 hingga 1939 jumlah seluruh imigran dari Indonesia tersebut mencapai 32.956 orang dengan menggunakan 34 kali pengangkutan. Orang-orang keturunan Jawa (Indonesia) ini bekerja sebagai buruh perkebunan Belanda berdasarkan sistem kontrak. Berdasarkan perjanjian yang ada, para buruh tersebut memiliki hak untuk kembali ke negara asalnya (repatriasi) apabila telah habis masa kontraknya. Dalam periode tahun 1890—1939 tercatat 8.120 orang yang kembali ke Indonesia dan pada tahun 1947 terjadi lagi gelombang repatriasi sebanyak 1.700 orang. Repatriasi massal yang terakhir terjadi pada tahun 1954, yaitu sekitar 1.000 orang. Sebagian besar dari para imigran ternyata telah memilih untuk tetap tinggal di Suriname walaupun kontrak kerja mereka sudah berakhir, yang akhirnya beranak pinak sampai sekarang.

Sampai saat ini berdasarkan data statistik terakhir terdapat lebih kurang 80.000 orang keturunan Jawa (dari Indonesia) atau 18% dari seluruh penduduk Republik Suriname yang berjumlah 450.000 orang. Penduduk

Suriname terdiri dari beberapa etnik, yaitu Hindustan (34%), Kreol (33%), Jawa (18%), Bush Negro (9%), Amerindian (2%), serta Cina, Eropa dan Lebanon (4%).

Etnik Jawa yang berada di Suriname karena adanya ikatan emosional dengan tanah leluhurnya, mereka rata-rata mempunyai keinginan untuk mengunjungi Indonesia meskipun hanya sekali selama hidupnya. Atas pertimbangan tersebut, mereka yang akan mengunjungi Indonesia yang tinggal di kota Paramaribo sebelum ke Indonesia terlebih dahulu mengikuti kursus bahasa Indonesia agar dapat lebih lancar berkomunikasi. Namun, banyak juga yang memang ingin mengetahui dan mempelajari bahasa Indonesia. Faktor-faktor lain yang mendorong orang-orang Suriname untuk mempelajari bahasa Indonesia yaitu telah ditayangkannya film-film Indonesia seperti film-film silat, komedi, horor, dan sinetron, setiap hari oleh TV Garuda, sebuah stasiun TV milik warganegara Suriname keturunan Jawa. Di samping itu, di radio Bersama dan radio Percaya dibacakan warta berita dalam bahasa Indonesia dan Acara Halo Apa Kabar yang disertai dengan pemutaran lagu-lagu Indonesia dan Jawa. Ditambah lagi, kalau ada ulang tahun TV atau Radio milik orang Jawa, mereka selalu mendatangkan penyanyi-penyanyi dari Indonesia seperti Mus Mulyadi, Didi Kempot, Ina Herlina, Tuty Tri Sedy, Sentot Kempot, Edy Nuansa, dan Andhy Zhate yang mungkin di Indonesia nama-nama tersebut ada yang tidak dikenal.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bahasa Indonesia di Suriname, yaitu menumbuhkan motivasi bagi para peserta kursus khususnya dari kalangan muda karena rata-rata mereka bertanya setelah dapat berbahasa Indonesia terus mau apa. Lain halnya dengan orang-orang yang ingin ke Indonesia yang rata-rata mereka sudah tua-tua umurnya (karena untuk ke Indonesia mereka harus menabung terlebih dahulu).

Pembahasan

a. Faktor-Faktor Pendorong

Pada bab pendahuluan sebatas telah penulis kemukakan faktor-faktor pendorong mengapa orang-orang Suriname mempelajari bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat penulis uraikan sebagai berikut.

- 1) Adanya faktor hubungan emosional bahwa rata-rata orang Suriname keturunan Indonesia mempunyai keinginan untuk berkunjung ke tempat kelahiran nenek moyangnya di Indonesia meskipun hanya sekali selama hidupnya. Kalau masih ditemukan, sekaligus mereka melacak/mencari sanak familinya di samping juga bertamasya untuk membuktikan bahwa apakah betul Indonesia lebih maju daripada yang mereka bayangkan karena ada yang membayangkan bahwa Indonesia (Jawa) itu keadaannya masih seperti yang diceritakan oleh nenek atau kakeknya dulu. Mereka membayangkan bahwa Indonesia itu masih seperti "kebonan" (istilah perdesaan bagi orang-orang Suriname) dan

secara kebetulan mereka sering melihat film-film silat Indonesia yang ditayangkan oleh TV Garuda, yang bertemakan cerita-cerita kerajaan jaman dahulu, yang tentu saja lokasi *shooting*-nya kebanyakan di hutan-hutan. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, mereka mengharapkan akan lebih lancar berkomunikasi di Indonesia dan akan dapat menawar harga barang-barang agar dapat lebih murah.

- 2) Dengan telah ditayangkannya film-film Indonesia oleh TV Garuda di Paramaribo pada setiap malam, semakin banyak penduduk Paramaribo yang ingin mengetahui ceritanya. Beberapa peserta kursus mengatakan bahwa alasan mengikuti kursus bahasa Indonesia karena ingin mengetahui cerita film-film tersebut.
- 3) Adanya siaran berita dalam bahasa Indonesia seminggu sekali dari Radio Bersama dan Radio Percaya. Bahan-bahannya ditunjang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo, di samping acara Halo Apa Kabar yang penulis asuh sendiri.
- 4) Adanya lagu-lagu Indonesia yang sering diperdengarkan oleh TV Garuda, Radio Bersama, dan Radio Percaya. Pada bulan September yang lalu bertambah lagi satu stasiun radio yang mengudarakan lagu-lagu Indonesia, yaitu Radio Mustika.
- 5) Adanya artis-artis penyanyi Indonesia yang sering didatangkan ke Suriname. Mereka, selain mendendangkan lagu-lagu Jawa juga lagu-lagu dalam bahasa Indonesia, dan lagu-lagu tersebut sedang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi lokal.

b. Permasalahan/Hambatan

- 1) Kegiatan kursus bahasa Indonesia di KBRI Paramaribo diadakan seminggu sekali dengan lama periode enam bulan. Kursus dibagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat pemula dan tingkat lanjutan. Setelah lulus dari tingkat pemula, peserta dapat melanjutkan ke tingkat lanjutan. Kursus tanpa dipungut biaya, bahkan bahan-bahan kursus diberikan secara cuma-cuma. Meskipun demikian, semangat sebagian besar para peserta banyak yang kendur, ini terlihat ketika waktu ujian pesertanya paling banyak tinggal 10—20%. Padahal, metode pengajaran sudah dibuat sedemikian rupa agar menarik.
- 2) Kurangnya motivasi para peserta kursus, umumnya dari kalangan muda. Mereka bertanya bahwa setelah selesai kursus, terus mau apa. Apakah kalau sudah dapat berbahasa Indonesia dapat diterima bekerja di KBRI, atau mungkin ada kemudahan-kemudahan lain.
- 3) Masih diperlukan buku-buku bacaan yang pas atau cocok dengan peserta yang baru pertama kali belajar bahasa Indonesia. Yang dipakai selama ini adalah buku-buku pelajaran *Pandai Berbahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar*.

- 4) Hambatan lainnya adalah masalah ejaan. Ejaan bahasa Indonesia berlainan dengan ejaan yang dipergunakan di Suriname, tetapi hal tersebut tidak begitu menjadi hambatan yang serius karena kalau sudah sering membaca buku-buku bacaan bahasa Indonesia, mereka lama-kelamaan akan terbiasa.

c. Mengatasi Masalah

- 1) Untuk memberikan motivasi kepada para peserta kursus pada bulan Juli 1990 telah dibentuk Ikatan Alumni Kursus Bahasa Indonesia (IKAKBI). Organisasi tersebut mempunyai kegiatan sebagai berikut.
 - a) IKAKBI mengadakan pertemuan secara rutin sekaligus mempraktikkan percakapan bahasa Indonesia yang telah diajarkan pada waktu kursus. Pada acara tersebut setiap orang diberi giliran untuk membawakan topik yang akan dibahas bersama.
 - b) Kalau ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI, anggota IKAKBI sering dilibatkan, antara lain diberi kesempatan untuk menunggu stan promosi dagang INDOFAIR, Bazar, dan lain-lain.
 - c) IKAKBI mengadakan kegiatan siaran bahasa Indonesia pada acara warta berita, apa kabar, dan acara kursus bahasa Indonesia melalui radio.
 - d) IKAKBI mengadakan kegiatan olahraga bersama dan rekreasi bersama secara rutin yang diikuti oleh para anggota IKAKBI dan staf KBRI.
 - e) Anggota IKAKBI yang sebagian besar adalah orang Jawa, juga aktif dalam kegiatan kursus bahasa Jawa yang diselenggarakan oleh KBRI Paramaribo. Kursus ini dikandung maksud untuk mendorong dan menggugah serta melestarikan bahasa Jawa agar tetap dipergunakan karena KBRI melihat, khususnya para generasi muda Suriname yang mempergunakan bahasa Jawa sudah semakin berkurang. Mereka lebih suka menggunakan bahasa Belanda atau Taki-Taki (bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Suku Kreol).
- 2) Kepada para generasi muda Suriname, pemerintah Indonesia memberikan bantuan beasiswa dan darma siswa untuk belajar di Indonesia, antara lain di UGM, ISI Yogyakarta, STSI Surakarta, pondok-pondok pesantren dan IAIN bagi yang berminat dalam bidangnya masing-masing dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Bantuan beasiswa dan darma siswa ini merupakan tindak lanjut dari salah satu perjanjian yang telah ditandatangani oleh Republik Suriname dan Republik Indonesia sehingga dapat ditawarkan kepada para peserta kursus guna memberikan motivasi. Paling tidak kalau mereka sudah dapat berbahasa Indonesia, seandainya berminat mengikuti beasiswa atau

darma siswa masalah komunikasi baik dalam pergaulan maupun di dunia pendidikan di Indonesia nantinya sudah tidak ada persoalan lagi.

- 3) Dengan semakin meningkatnya hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Republik Suriname, akhir-akhir ini beberapa pengusaha Indonesia datang ke Suriname untuk menjajagi perluasan pasar dan usahanya di Suriname. Pada waktunya nanti, apabila ada pengusaha Indonesia yang membuka usahanya di Suriname, bagi para generasi muda Suriname yang dapat berbahasa Indonesia, kemungkinan besar dapat diterima bekerja di perusahaan Indonesia tersebut.

d. Peluang

Pengembangan bahasa Indonesia di Paramaribo (Suriname) kemungkinan masih dapat ditingkatkan lagi dengan cara-cara sebagai berikut.

- 1) Perlu dicarikan cara atau metode pengajaran bahasa Indonesia khusus untuk orang-orang asing. Penulis sendiri belum mengetahui bagaimana cara-cara yang dipakai di Australia, Jepang, Cina, dan lain-lain. Barangkali pada kesempatan yang baik ini penulis bisa mendapatkan informasinya.
- 2) Untuk meningkatkan mutu pengajaran kursus bahasa Indonesia, kami masih membutuhkan bantuan buku-buku bacaan yang tepat bagi para peserta kursus tingkat pemula atau lanjutan.
- 3) Para pengajar kursus bahasa Indonesia hampir semuanya adalah bukan profesinya, jadi hanya bersifat amatiran saja. Kalau kepada para pengajar kursus diberikan pembekalan khusus bagaimana cara mengajar bahasa Indonesia dengan baik, penulis yakin hasilnya akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Simpulan dan Saran

- a. Suriname merupakan negara kecil di Amerika Latin yang penduduknya sebanyak kurang lebih 80.000 jiwa keturunan Jawa (Indonesia) yang masih mempunyai ikatan historis/emosional di samping ikatan tradisi dan seni budaya dengan Indonesia. Rata-rata orang Suriname keturunan Jawa (Indonesia) mempunyai keinginan meskipun hanya sekali selama hidupnya, untuk pergi ke tanah leluhurnya di Indonesia. Hal itu merupakan salah satu faktor mengapa bahasa Indonesia dipelajari di Paramaribo, Suriname, selain memang ada beberapa orang yang betul-betul ingin mengetahui dan mempelajari.
- b. Motivasi bagi para kaum muda masih bisa ditingkatkan, antara lain dengan adanya tawaran beasiswa, darma siswa, dan peluang-peluang lain untuk masa depan mereka.
- c. Pemberian pembekalan kepada para pengajar khususnya, bagaimana menjadi pengajar bahasa Indonesia yang baik untuk para peserta asing

- perlu mendapat perhatian dalam kongres ini.
- d. Untuk meningkatkan mutu pengajaran, kiranya diperlukan bantuan buku-buku bacaan yang tepat bagi para peserta asing pada tingkat pemula dan tingkat lanjutan, khususnya untuk Suriname.
- e. Dengan semakin berkembangnya bahasa Indonesia di negara Suriname, sudah barang tentu hal itu akan lebih mempererat hubungan antara kedua negara di berbagai bidang dan semakin mengangkat nama Indonesia di dunia internasional.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal : Kamis 16 Oktober 2003
Judul Makalah : Pengembangan Bahasa Indonesia di Suriname
Pemakalah : Roesman Darmohoetomo (Suriname)
Pemandu : Threes Y. Kumanireng
Pencatat : 1. Dra. Ni Wayan Aryani, M. Hum.
2. Dra. Marida Gahara Siregar, M.Hum.

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** ...(...)
 - a. Apakah pendidikan bahasa Indonesia hanya berbentuk kursus saja?
 - b. Apakah tidak semua penduduk di Suriname diberikan pendidikan bahasa Indonesia? Misalnya dari SD sampai dengan perguruan tinggi.

Jawaban:

- a. Mengenai pelajaran bahasa Indonesia itu tidak mungkin diajarkan di dalam pendidikan formal karena bahasa nasional orang Suriname adalah bahasa Belanda.
 - b. Hanya orang-orang Jawa yang berkeinginan untuk tahu bahasa Indonesia.
2. **Pertanyaan:** Dra. Hj. Suhartini Hartono, M.Pd. (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta)
 - a. Dari 80.000 penduduk Jawa di Suriname itu apakah tidak diadakan kursus-kursus untuk putra putrinya sehingga mereka betul-betul bisa menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar?
 - b. Apakah ada kegiatan rutin seperti sarasehan antarorang Jawa?

Jawaban:

- a. Kalau khusus pelajaran bahasa Indonesia untuk orang-orang itu tidak ada.
 - b. Keinginan orang-orang Suriname yang berasal dari Jawa (Indonesia) untuk mengadakan reuni itu tidak ada karena orang-orang Jawa keturunan Indonesia itu ada beberapa distrik dan tempatnya saling berjauhan, misalnya yang di Maribo dan lain sebagainya.
3. **Pertanyaan:** Ahmad Bastari Sowan (Sumatera Selatan)
Bagaimana sikap pemerintah Suriname dan sikap anggota masyarakat yang bukan berasal dari masyarakat Indonesia yang ada di Suriname

terhadap perkembangan bahasa Indonesia di Suriname.

Jawaban:

Di sana tidak dibatasi jika satu suku ingin mengembangkan kebudayaannya. Suriname mempunyai akar kebudayaan dari beberapa suku. Agama tidak menjadi masalah atau tidak dibatasi.

4. **Pertanyaan:** Drs. Daud Jalmaf, M.Pd. (Maluku)
Merasa salut atas perjuangan Bapak Roesman terhadap bahasa Indonesia di Suriname. Setuju terhadap cara belajar yang dikemukakan itu. Bahasa Indonesia dipelajari sebagai bahasa asing di Suriname sama halnya seperti bahasa asing yang lain. Belajar dimulai dari kosakata yang sederhana bukan dimulai dari gramer, melainkan melalui suatu sistem belajar mengajar.
5. **Pertanyaan:** Prof. Dr. Kamaruddin (Makassar)
- Bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia di Suriname?
 - Apakah Suriname mencontoh model pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di Indonesia.
 - Bagaimana sumber-sumber pembelajarannya?
 - Apakah sudah ada karya sastra yang dikarang orang Suriname dengan menggunakan bahasa Indonesia?

Jawaban:

- Ada seorang Indonesia yang bekerja di KBBI, Maribo yang menyusun buku-buku panduan sama seperti di Suriname.
 - Tidak ada hubungan dengan Indonesia.
 - Menerima masukan dari guru-guru di Suriname dan diolah.
 - Belum ada, karena belum banyak orang yang menguasai bahasa Indonesia.
6. **Pertanyaan:** Drs. Syafwan Hadi (Balai Bahasa Medan)
Apakah ada gangguan atau interferensi bahasa yang dipakai di Suriname dengan bahasa Indonesia?

Jawaban:

Tidak ada gangguan, tetapi kadang ada satu atau dua kata dalam bahasa pergaulan yang namanya *taki-taki*.

7. **Saran:** Dalman (Lampung)
Permasalahan yang ada di Suriname itu sebetulnya terletak pada proses pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Jika hanya kursus yang diadakan di Suriname yaitu bahasa Indonesia, itu tidak akan berkembang

di Suriname. Oleh karena itu, disarankan agar di Suriname didirikan sekolah dari TK, SD, sampai perguruan tinggi dan menempatkan pelajaran bahasa Indonesia itu pada kurikulum, seperti pelajaran bahasa Inggris di Indonesia.

8. **Pertanyaan:** Sarif Suwandi (Palembang)

- a. Dalam dunia pendidikan di Indonesia ada istilah muatan lokal dari tingkat SD, SLTP, sampai dengan SMU. Bagaimana kalau bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam muatan lokal untuk pendidikan di Suriname?
- b. Di Suriname didirikan gedung untuk belajar bahasa Indonesia. Bagaimana jika di tempat tersebut diadakan lomba pidato dan mengarang bahasa Indonesia?

Jawaban:

Lomba sudah sering diadakan di gedung tersebut, terutama bagi lulusan bahasa Indonesia, tetapi pemenangnya belum dianggap mampu bersaing dengan penutur bahasa Indonesia di Indonesia.

PENGAJARAN BIPA DI INDONESIA

Fuad Abdul Hamied

Ketua Umum

Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APBIPA)

Makalah ini akan mencoba memberikan sebagian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana kondisi pengajaran BIPA di Indonesia saat ini, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta, maupun yang dikelola lembaga asing? Bagaimana peran APBIPA dalam upaya memantapkan pengajaran BIPA? Apa yang dibutuhkan dalam pengajaran BIPA di dalam dan di luar negeri? Strategi apa yang diperlukan untuk memantapkan pengajaran BIPA?

Kondisi Pengajaran

Tatkala diminta merespons kondisi pengajaran BIPA di Indonesia, kita pada dasarnya masih mencari bentuk dan belum ada standardisasi (catatan: apakah standardisasi itu perlu? Masih merupakan bahan pergunjungan tersendiri) yang bisa dijadikan pola pengembangan pengajaran BIPA bagi lembaga yang baru akan memulainya. Pengajaran BIPA di Indonesia, baik dari sisi kelembagaan maupun isi program serta layanan pembelajarannya masih beraneka. Berdasarkan hasil pengamatan dan peninjauan ke beberapa lembaga penyelenggara pengajaran BIPA diperoleh informasi bahwa terdapat bentuk kelembagaan yang bersifat mandiri sebagai sebuah lembaga non-formal dengan tawaran program jangka pendek, dan juga yang terintegrasi dengan program pengajaran bahasa Indonesia atau bahasa asing pada tingkat lembaga pendidikan tinggi.

Pengajaran BIPA akan terkukuhkan dengan adanya lembaga pendidikan tenaga ke-BIPA-an. Berbagai universitas dan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, seperti UPI, UI, UGM, IALF, UKSW, dan UNUD menawarkan pembelajaran BIPA dengan berbagai formatnya, tetapi di antara lembaga tersebut amat langka, kalau tidak dikatakan tidak ada, yang menawarkan pendidikan bagi guru BIPA terutama dalam format program gelar. Dalam rancangan di antara universitas tersebut kini tengah dirancang program bergelar untuk guru BIPA baik pada strata sarjana maupun pada strata magister, seperti yang mulai ditawarkan oleh Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia mulai tahun akademik 2003--2004 ini. Tentu saja pengadaan sebuah program pendidikan bagi guru BIPA tidak bisa sekadar menyelenggarakan program begitu saja, tetapi justru menuntut mutu serta akuntabilitas dalam segala aspeknya, baik kelembagaan maupun isi dan proses pendidikan yang ditawarkannya.

Pengajaran BIPA telah berjalan di sejumlah perguruan tinggi, baik di Eropa, termasuk Eropa Timur seperti Rusia, di Amerika, di Australia maupun di sejumlah negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang, Cina dan Korea Selatan. Dalam kurun waktu yang panjang, pengalaman pengajaran BIPA telah melahirkan berbagai bentuk cara mengajar dan bahan ajar dengan hasil pengajaran yang beraneka. Di dalam negeri, karena berbagai tuntutan kebutuhan interaksi antar bangsa, BIPA di tawarkan di berbagai lembaga, baik perguruan tinggi seperti UNP di Padang, UNSRI di Palembang, UI dan Universitas Atmajaya di Jakarta, ITB, UNPAD dan UPI di Bandung, UGM dan UNY di Yogyakarta dan UKSW di Salatiga, UM di Malang, IKIP Singaraja dan UNM di Ujung Pandang, maupun lembaga-lembaga swasta yang sangat aktif seperti LIA Jakarta dan IALF Bali.

Seperti yang diamati oleh Suhardi (2000, KIPBIPA III) penyelenggara pengajaran BIPA di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang bervariasi. Di antara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terjemahan, pendekatan struktural, pendekatan integratif, dan pendekatan komunikatif. Di Universitas Sebelas Maret Surakarta, Wiryatmaja (2000) melihat berdasarkan pengalaman mengajarnya bahwa diperlukan perlakuan yang memberi penekanan pada pengenalan dan latihan mengidentifikasi dan memproduksi sejumlah fonem bahasa Indonesia tertentu untuk menghindari kesalahan tipikal yang dibuat oleh pembelajar BIPA itu. Bahan ajar yang akan dikembangkan menjadi sangat spesifik. Aziz (2000), misalnya, mengamati perlunya memperhatikan secara khusus kekhasan tindak tutur bahasa Indonesia yang lebih komprehensif, tidak hanya dengan memasukkan unsur budaya dalam arti sempit seperti tarian dan pakaian adat tetapi juga unsur budaya yang lebih luas pemakaiannya yaitu unsur budaya tindak tutur.

Pengajaran BIPA di beberapa lembaga swasta telah diselenggarakan dengan tatanan yang dipersiapkan dengan cukup matang. Misalnya, sejak 1999 Lembaga Bahasa LIA serius mengembangkan pengajaran BIPA dengan mendirikan Program Bahasa Indonesia LIA, membuka beberapa kelas luar dan dalam, memberikan pembekalan kepada guru bahasa Indonesia, dan guru-guru BIPA-nya mengikuti berbagai seminar dan lokakarya, serta menyusun bahan ajar sendiri. Pola belajar di LIA ini mengikuti model Paket 30 jam. Sejak 1999 itu LIA menunjuk Tim yang bertugas menyusun buku pegangan bahasa Indonesia (Herman, 2003). Di IALF Bali yang telah menyelenggarakan pengajaran BIPA dengan tertata baik sejak awal tahun 1990-an, para pengajarnya bahkan telah memasukkan teknik pengajaran kesadaran lintas budaya yang dikembangkan dengan teknik penyampaian menggunakan bahasa sasaran, dengan komik strip, kuliah budaya dan pengalaman imersi budaya melalui keluarga Indonesia di Bali (Bundhowi, 2003). Dalam hal aspek budaya pada pengajaran BIPA ini terdapat kenyataan yang memerlukan perhatian, khususnya berkenaan dengan bahan ajar BIPA.

Masih banyak bahan ajar BIPA yang belum dibuat secara sungguh-sungguh yang meliputi aspek budaya masyarakat Indonesia di dalamnya. Menurut Mustakim (2003) hal ini terbukti hanya 24 buku dari 43 buku ajar BIPA yang diamatinya menyajikan aspek sosial budaya masyarakat Indonesia (56%).

Di Universitas Udayana animo orang asing yang belajar di Program BIPA kian meningkat. Pengajaran yang diselenggarakan sejak akhir tahun 1990-an telah memberikan layanan kepada mahasiswa mancanegara yang datang dari Amerika, Australia, Kanada, Korea, Denmark, dan yang paling banyak dari Jepang. Kebutuhan komunikatif merupakan dorongan utama mereka belajar BIPA (Sudipa, 2003). Karena dorongan pentingnya pengembangan kemampuan komunikatif ini juga, mengapa pengajaran BIPA di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung yang bekerja sama sejak kurang lebih lima tahun yang lalu dengan Pusat Bahasa *Australian Defence Force* menggunakan secara intensif kelompok masyarakat dengan berbagai tingkat sosial dan beraneka profesi sebagai narasumber pembelajarannya. Siswa-siswa peserta kegiatan itu masuk ke RT2 dan RW2 serta terlibat dalam beberapa kegiatan masyarakat. Selain itu, aspek pengajaran yang spesifik kebahasaan pun mendapat perhatian khusus dalam pengajaran BIPA. Di Universitas Indonesia (Yuwono dan Yuwono, 2003) melihat pentingnya perhatian terhadap imbuhan dan pengimbuhan dalam pengajaran BIPA. Program BIPA di UI, menurut mereka, meyakini perlunya pengajaran tata bahasa diberikan dengan pempunian perhatian yang lebih besar diarahkan pada imbuhan dan pengimbuhan.

Teknik spesifik untuk pengembangan keterampilan berbahasa juga mendapat perhatian di beberapa tempat pengajaran BIPA di Indonesia. Sebagaimana dilaporkan oleh Sutarna (2003) di IKIP Singaraja yang memberikan layanan BIPA kepada mahasiswa Asian Studies dari La Trobe University, para pengajar BIPA menggunakan teknik tanya-jawab pramenulis. Cara seperti ini di samping membantu kelancaran pengembangan keterampilan menulis dalam bahasa Indonesia juga memperkuat keterampilan berbicara mereka, sedangkan untuk mengembangkan pengajaran yang interaktif, para pengajar di Universitas Pendidikan Indonesia memanfaatkan wayang sebagai teknik pembelajarannya (Sulistiauwaty, 2003). Budaya tradisional Indonesia seperti wayang ini merupakan daya tarik tersendiri bagi mahasiswa BIPA dan sekaligus sambil mempelajari aspek-aspek khusus kebahasaan para mahasiswa dapat memperoleh informasi tentang budaya khas Indonesia.

Peran APBIPA

Bagaimana peran APBIPA dalam upaya memantapkan pengajaran BIPA? Pengajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam pengem-

bangun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional. Untuk itu, diperlukan wadah/asosiasi untuk mewujudkan upaya bersama bagi peningkatan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pembentukan asosiasi ini juga sebagai tindak lanjut dari Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing kesatu dan kedua; masing-masing diselenggarakan di Universitas Satya Wacana dan IKIP Padang. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Oktober 1999 bertempat di kampus Universitas Pendidikan Indonesia, didirikan suatu organisasi yang bernama Asosiasi Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang disingkat APBIPA.

Asosiasi ini merupakan organisasi profesi yang bergerak dalam bidang pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk berbagai jenjang dan strata pendidikan serta berdasarkan keahlian dan profesi keguruan bahasa Indonesia. APBIPA mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) mengadakan kerja sama dan upaya bersama bagi pengembangan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing ke arah yang lebih profesional; dan
- b) memberikan kesempatan kepada para pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik perseorangan dan/atau institusi dari berbagai jenjang dan strata pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri yang menjadi asosiasi ini untuk menyampaikan pengalaman, hasil penelitian, dan gagasan dalam bidang pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing.

Asosiasi BIPA masih berjalan tertatih-tatih. Pengembangannya akan sangat tergantung pada dukungan para anggotanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini para peserta kongres yang berminat dan mempunyai kepedulian diberi peluang untuk mendaftarkan diri sebagai anggota APBIPA. Peran APBIPA akan menjadi signifikan tatkala organisasi ini bergeser ke arah organisasi profesi dengan menjunjung dan menerapkan profesionalisme dalam pengembangan dirinya. Untuk menjernihkan pengertian berbagai istilah yang terkait dengan kata *profesi* ini, kita lihat bentuk-bentuk dan pemahaman lazim yang ada. Profesi sebagaimana disebutkan di atas digunakan dalam kaitan dengan pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Orang yang menjadikan dirinya anggota dari profesi tersebut diharapkan mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tersebut, dan bila anggota profesi mempunyai tampilan dan sifat seperti itu, ia disebut *profesional*. Istilah ini dapat digunakan pula baik sebagai adjektiva atau kata sifat maupun sebagai nomina atau kata benda, sedangkan proses yang dilakukan atau dikembangkan untuk menjadikan seseorang itu profesional disebut *profesionalisasi*. Lewat profesionalisasi, derajat penampilan profesional dari seseorang atau dari satu profesi akan terbentuk. Derajat penampilan profesional ini disebut

profesionalisme. Istilah ini juga digunakan merujuk pada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.

Secara ringkas dapatlah dikatakan bahwa profesionalisme itu harus ditunjang oleh keahlian, komitmen, dan keterampilan yang relevan. Keseluruhan penunjang ini hanya dapat dikembangkan lewat pendidikan prajabatan dan pendidikan dalam jabatan, sedangkan dalam hubungannya dengan sikap dan komitmen serta derajat penampilan dari para profesional itu, ciri-ciri profesi harus berkembang dengan memadai. Ciri-ciri profesi itu meliputi (1) fungsi dan signifikansi sosial dari profesi tersebut, (2) keterampilan para anggota profesi yang diperoleh lewat pendidikan dan/atau latihan yang akuntabel, (3) adanya disiplin ilmu yang kukuh, (4) kode etik, dan (5) imbalan finansial atau material terhadap layanan yang diberikan oleh para profesional ini.

Berdasarkan kajian komparatif dan pendekatan empiris, ternyata bahwa profesionalisasi sebagai proses yang ditujukan pada perbaikan profesionalitas melibatkan peubah infra-struktural, kelembagaan, dan ke-perilaku yang jamak dan rumit. Oleh karena itu, perencanaan profesionalisasi menuntut pengamatan data empirik dan prospektif secara saksama, disertai pertimbangan konseptual yang komprehensif-antisipatif berhubung dengan berbagai peubah terkait. Peubah-peubah yang jamak itu mencakup nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, kedudukan atau status sosial ekonomi warga masyarakat, aspirasi masyarakat untuk pembangunan, rencana dan kebijakan pemerintah, skala pertumbuhan organisasi-organisasi, tingkat perkembangan iptek modern, dan tingkat perkembangan spesialisasi dalam pekerjaan atau jabatan. Lebih lanjut peubah-peubah itu mencakup pula jenis dan mutu pendidikan ataupun latihan bagi calon profesional, sumber daya dan pengorganisasian program pendidikan/pelatihan itu, serta sistem ujian dan sertifikasi. Peubah-peubah itu juga mencakup persyaratan untuk izin praktik, komitmen dan tanggung jawab profesional, organisasi dan kode etik profesional, pengakuan dan sistem imbalan, suasana lingkungan kerja, sistem pengawasan, perlindungan profesi, dan dasar perundang-undangnya.

Dengan memperhatikan butir-butir di atas, pendidikan prajabatan bagi pengajar BIPA untuk pembentukan keahlian dan etika profesional, meskipun jelas bukan satu-satunya peubah penting, hendaknya dianalisis dan direncanakan untuk dikelola secara profesional. Berbagai faktor yang mempunyai peluang turut berkontribusi dalam terbinanya wawasan, kemampuan/keahlian dan kiat-kiat profesional serta dampak pengiringnya, hendaknya diidentifikasi dengan cermat, direncanakan, dan diseleksi untuk pengadaannya berdasar standar yang teruji sah. Program-program pendidikan profesional (prajabatan) itu, yang antara lain meliputi kurikulum, staf pengajar, siswa, fasilitas, anggaran, sistem belajar dan ujian, sistem

pengelolaan, lulusan, dan alumni serta demikian juga pengorganisasian lembaganya harus diakreditasi berdasarkan suatu sistem evaluasi dan pengembangan yang absah. Program-program pelatihan dan pengembangan dalam jabatan terikat juga pada sistem akreditasi yang serupa. Kebijakan profesionalisasi hendaknya memprioritaskan secara bertahap spektrum tertentu pada kelompok guru, konselor, pengelola satuan pendidikan, dan pengelola sistem pendidikan dalam satu jaringan kerja yang terpadu. Pada tahap berikutnya profesionalisasi diperluas bagi ahli-ahli lainnya yang menyertai kelompok-kelompok itu.

Lembaga pendidikan yang mengemban misi, tugas, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan tenaga kependidikan yang profesional, termasuk pengajar BIPA yang profesional, pertama-tama dituntut untuk mampu memprofesionalkan dirinya lebih dulu. Dengan tidak mengurangi hak-hak otonominya, lembaga pendidikan itu hendaknya memelihara jaringan tri-partit dengan para pengelola satuan/sistem pendidikan, organisasi profesional ataupun para profesionalnya sendiri. Sekarang dalam konteks menghadapi masa depan yang makin rumit, pada lembaga itu hendaknya ada pengkajian serta pengembangan konsep-konsep yang makin komprehensif mengenai wawasan, nilai-nilai etika umum dan etika profesi, pranata sosial budaya, ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu rekayasa yang relevan. Namun, yang lebih penting lagi ialah adanya kegiatan-kegiatan praktik bagi latihan serta pembentukan kemampuan dan keahlian khusus, termasuk kiat-kiatnya yang sesuai dengan standar praktik yang dituntut oleh profesi yang bersangkutan.

Selain kemampuan intelektual dan kemampuan teknik-praktikal, pendidikan profesional tenaga pengajar BIPA hendaknya memberi perhatian khusus untuk menumbuhkan organisasinya dengan menghidupkan kode etik, solidaritas, dan rasa kolegal sebagaimana yang biasa ditemukan dalam profesi-profesi yang telah mapan. Pendidikan profesional pengajar BIPA itu hendaknya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ikatan bersama yang akan membantu menegakkan subkultur okupasional yang khusus dalam kultur profesi kependidikan bersama. Dengan demikian, pendidikan profesional itu bertanggung jawab untuk menanamkan pola citra, rasa, sikap, sistem nilai dan kepercayaan khusus yang sesuai dengan etika profesi yang bersangkutan.

Standar performansi bagi tiap kelompok tenaga profesional pengajar BIPA hendaknya diidentifikasi dan diberi batasan-batasan yang konkret. Ini hendaknya dikerjakan bersama oleh para pelaku dan para pengelola dengan bantuan tenaga ahli, lalu dikembangkan dan dimantapkan sedemikian rupa sehingga memunculkan identitas profesi pengajar BIPA tersebut. Dengan langkah ini, anggota profesi pengajar BIPA itu tidak akan lebih suka untuk mengidentifikasi dirinya dengan disiplin keilmuan teoretisnya seperti linguistik atau cabang ilmu terkait lainnya melainkan lebih bangga dengan

disiplin mempraktikkan keahlian profesionalnya. Standar mutu praktik yang jelas, demikian juga identifikasi macam-macam tugas yang jelas sebagai batasan dari ruang lingkup tanggung jawab akan memantapkan tuntutan nyata terhadap otoritas para anggota profesi ini. Di satu pihak ia merupakan *input* bagi penyusunan program pendidikan/pelatihan dan di lain pihak ia menyajikan komitmen pelayanan pada tuntutan masyarakat.

Pada gilirannya kemandirian otoritas dalam pendidikan dan kepiawaian dalam memberi tanggapan terhadap tuntutan masyarakat akan menjelmakan pengakuan yang ajeg terhadap mutu prestasi serta profesi yang bersangkutan. Semua ini perlu diantisipasi karena masalah pendidikan dan pengelolaannya yang makin rumit yang lahir dari kebutuhan objektif atau karena keharusan normatif dan memerlukan penyelesaian oleh ahli-ahli dengan sistem serta cara kerja yang profesional.

Pengajar BIPA yang profesional mampu menunjukkan bukan hanya kualifikasi formal ke-BIPA-an yang telah diperoleh lewat pendidikan atau pelatihan melainkan juga liputan karakteristik yang sekurang-kurangnya mencakupi sikap, pemahaman, keterampilan, dan kebiasaan.

Sikap

Guru BIPA hendaknya percaya bahwa tersebarnya BIPA secara menjangat dapat diupayakan untuk melahirkan komunikasi lintas budaya dan antarkelompok dan akhirnya menciptakan dunia yang lebih stabil dan beradab. Agar mampu secara tepat mengajarkan bahasa asing tersebut, guru BIPA harus mengembangkan minat terhadap bahasa dan budaya siswanya dan dengan demikian dia bukan hanya akan memahami permasalahan pembelajaran melainkan juga memotivasi siswa untuk mengikuti contoh dari guru itu sekaitan dengan BIPA. Dalam hal ini ia percaya bahwa bahasa dan budaya siswanya patut dihormati, bahwa siswanya harus didorong untuk membinanya, dan bahwa tingkah laku berbahasa Indonesia yang harus diajarkan sebagai satu cara untuk memperluas komunikasi, pengalaman, dan pencapaiannya serta bukan sebagai cara untuk menghilangkan tingkah laku berbahasa ibunya. Sekaitan dengan tuntutan kemajuan teknologi, guru BIPA profesional percaya bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperluas dan menganekakan interaksi lintas budaya merupakan cara yang potensial untuk digunakan oleh guru dalam mengajar BIPA itu.

Pemahaman

Dalam hal pemahaman, guru BIPA dituntut untuk memahami bahwa salah satu perbedaan penting antarpemahaman nonasli dan pemahaman asli yang belajar BIPA ialah bahwa pemahaman nonasli menyiapkan dirinya, terutama untuk komunikasi lintas budaya, sedangkan pemahaman asli berupaya untuk

meningkatkan kompetensinya dalam berkomunikasi dengan anggota budayanya sendiri. Selain itu, guru BIPA diharapkan memahami bahwa bahasa hanyalah satu di antara sistem pesan yang digunakan dalam komunikasi insani; bahwa budaya merupakan kumpulan sistem pesan yang mensyaratkan pemiliknya untuk berbagi ciri-ciri pandangan dan tingkah laku tertentu; dan bahwa cara pandang dan tingkah laku yang lazim ini akan membuat anggota satu budaya berinteraksi dengan ciri budaya lain dengan cara yang khas.

Pemahaman lain berkenaan dengan kenyataan bahwa jenis tata bahasa tertentu memberi ruang lebih pada fenomena atau tingkah laku bahasa yang khas dan bahwa satu jenis tata bahasa sebagai akibatnya akan berfungsi lebih baik dari yang lainnya sebagai landasan untuk pengajaran kompetensi dalam satu jenis tingkah laku bahasa tertentu. Selain itu diharapkan terdapat pemahaman bahwa model teori komunikasi lebih cocok untuk pengajaran kompetensi dalam komunikasi lintas budaya ketimbang tata bahasa tradisional, struktural dan/atau transformasi generatif. Dalam hal pajaran dini, guru BIPA diharapkan pula memahami bahwa mengarahkan siswa ke situasi interaksi lintas budaya yang bermakna sedini mungkin merupakan hal yang penting guna memotivasi mereka agar belajar dan menjadikan mereka komunikator lintas budaya yang baik.

Keterampilan

Keterampilan di sini mencakup keterampilan linguistik dan pedagogis. Dalam hal ini guru BIPA diharapkan mampu memanfaatkan analisis kontrastif bagi bahasa siswa dan BIPA untuk penyiapan bahan pengajaran yang dirancang guna membantu siswanya dalam mengatasi masalah pembelajarannya. Keterampilan berikut adalah keterampilan dalam menggunakan analisis sosiolinguistik tentang ragam bahasa yang digunakan dalam situasi interaksi lintas budaya dalam bahasa sasaran dalam hal agar bisa mengidentifikasi situasi yang mungkin dihadapi siswanya. Guru juga diharapkan mampu memilih bahan teks untuk pengajarannya, yang bisa membantu siswanya dalam memperoleh kemahiran pada bahasa sasarannya; mampu membandingkan ciri-ciri bahasa dan budaya siswanya dengan apa yang ada dalam BIPA dan budayannya dan mengidentifikasi situasi interaksi lintas budaya yang signifikan; mampu memilih dan mengajarkan siswanya untuk berinteraksi dengan teks sastra yang cocok dengan tingkat kemampuan bahasa siswanya, yang akan memberikan wawasan kepada mereka berkenaan dengan masalah interaksi pemilik budaya bahasa ibu dan budaya bahasa sasarannya; mampu melibatkan siswanya dalam permainan atau permainan peran interaksi lintas budaya dan membuat siswanya sadar akan aspek struktural dari situasi-situasi yang mereka kuasai agar menjadi kompeten dalam tingkah laku yang harus dimilikinya;

mampu memilih dan mengorganisasikan kegiatan interaksi lintas budaya yang cocok untuk latar belakang dan kebutuhan siswanya dalam komunikasi lintas budaya yang sesungguhnya; dan mampu mengukur dan mengevaluasi kemahiran, kemajuan, dan bakat siswanya dalam keterampilan komunikasi lintas budaya dan mampu memberikan umpan balik dari hasil evaluasinya terhadap kegiatan pengajarannya.

Kebiasaan

Dalam hal ini, guru BIPA dituntut menggunakan setiap kesempatan yang tepat untuk berinteraksi sedapat mungkin dalam bahasa dan budaya siswanya sehingga mereka akan melihat berdasarkan contoh tersebut bahwa guru itu menghargai budaya mereka dan dengan demikian mereka akan termotivasi untuk berinteraksi dalam bahasa sasaran sebanyak mungkin. Kebiasaan lain ialah mengamati dan menyimpan dalam benaknya serta dalam buku catatannya ciri-ciri tingkah laku interaksi lintas budaya yang bisa digunakannya dalam memberikan kompetensi tertentu pada situasi-situasi tertentu pula. Selain itu, guru BIPA diharapkan tetap mencari situasi interaksi lintas budaya yang mutakhir dari bacaannya yang akan memperdalam pemahamannya berkenaan dengan apa yang dilakukan siswanya dalam beraneka interaksi lintas budaya.

Dalam kaitan dengan pendidikan pengajar BIPA, pada Rapat Umum APBIPA yang diadakan Oktober 2001 bersamaan dengan KIPBIPA IV di Bali, gagasan untuk mengembangkan program *Graduate Certificate* ditawarkan kepada perguruan tinggi dengan lama program antara 1 semester sampai dengan 2 semester. Salah satu program pascasarjana yang menanggapi tawaran ini adalah Program Pascasarjana UPI yang pada tahun akademik 2003--2004 ini telah menawarkan tiga jenis program pengajaran BIPA, yaitu *certificate*, *graduate diploma* dan *master of education* dalam *the teaching of Indonesian as a Foreign Language* (TIFL).

Kebutuhan Pengajaran

Apa yang dibutuhkan dalam pengajaran BIPA di dalam dan di luar negeri? Di dalam negeri diperlukan adanya upaya penataan bentuk program, pengembangan bahan ajar, tukar menukar informasi penyelenggaraan dan pengembangan metodologi pengajaran, serta penciptaan daya tarik layanan secara akademik atau dari sisi fasilitas. Di luar negeri perlu ada kerja sama yang kuat antara pengembang program BIPA dengan perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara masing-masing, baik dalam upaya penawaran program BIPA di Indonesia, maupun pemberian layanan pengajaran BIPA di negara yang bersangkutan. Untuk itu, informasi ke-BIPA-an dan bahan ajar BIPA yang bermartabat dari sisi isi atau metodologi perlu disediakan

sehingga akan mempermudah upaya pengembangan pengajaran di negara tersebut.

Bentuk program yang telah dikembangkan di beberapa lembaga seperti di UI, UPI, LIA Jakarta, IALF Bali, dan di lembaga lainnya dapat dijadikan acuan untuk dikembangkan lebih lanjut. Program pengajaran BIPA, baik yang bersifat pelatihan non-gelar maupun yang bersifat pendidikan gelar perlu memperoleh perhatian dalam hal pembakuannya sehingga program yang akan dikembangkan di tempat lain dalam ikut mengacu kepada program yang telah ada. Tentu saja ini juga akan menyangkut pada pengembangan bahan ajar. Kini sudah saatnya dimunculkan berbagai bahan ajar dengan kualitas yang baik sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa mutakhir baik dari sisi isi maupun metodologi dan instrumentasi pengajarannya dan juga dengan kuantitas yang memadai sehingga dapat memasok bahan ke berbagai negara yang sedang mengembangkan pengajaran BIPA di sana. Untuk itu, kerja sama horizontal antara Pusat Bahasa, APBIPA, dan perwakilan RI di luar negeri serta dengan pengajar dan pengembang bahan ajar BIPA yang professional sudah menjadi keniscayaan.

Strategi Pemantapan

Pertanyaan berikut adalah strategi apa yang diperlukan untuk memantapkan pengajaran BIPA. Inti jawaban terletak pada profesionalisasi pengajar BIPA dengan semua persyaratan pendukung dan konsekuensi ikutannya.

Fungsi dan signifikansi sosial. Secara sosial kemasyarakatan, terutama dalam konteks masyarakat internasional, pengajaran BIPA mempunyai posisi yang cukup signifikan. Perhatian dunia internasional dalam berbagai bentuk teramati, baik dalam format penyuguhan program studi maupun akses yang luas terhadap sumber-sumber dan konteks BIPA itu sendiri lewat teknologi informasi dan komunikasi. Program studi BIPA ditawarkan di banyak negara, merentang luas di seluruh benua. Kehadiran peserta KIPBIPA dari berbagai negara sejak KIPBIPA I hingga KIPBIPA IV ini merupakan bukti tak bisa dipungkiri tentang signifikansi BIPA pada ajang interaksi global. Hal ini diperkuat lagi dengan besarnya populasi pemakai bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu atau bahasa primer dan posisi strategis Negara Republik Indonesia secara geografis sehingga menjadi tempat perlintasan tak terhindarkan. Fungsi dan signifikansi sosial BIPA akan dapat diperkuat dengan meningkatkan komunikasi antarpe-BIPA, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan berbagai media yang ada dan yang secara kreatif telah dikembangkan seperti berjamurnya berbagai situs jaringan internet yang menyediakan bahan ajar,

sumber pengembangan bahan, dan informasi yang amat banyak tentang Indonesia.

Pendidikan yang akuntabel. Profesionalisasi BIPA akan terkukuhkan dengan adanya lembaga pendidikan tenaga ke-BIPA-an. Berbagai universitas dan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, seperti UPI, UI, UGM, IALF, UKSW, dan UNUD menawarkan pembelajaran BIPA dengan berbagai formatnya, tetapi di antara lembaga tersebut amat langka, kalau tidak dikatakan tidak ada, yang menawarkan pendidikan bagi guru BIPA terutama dalam format program gelar. Dalam rancangan di antara universitas tersebut kini tengah dirancang program bergelar untuk guru BIPA, baik pada strata sarjana maupun pada strata magister. Tentu saja pengadaan sebuah program pendidikan bagi guru BIPA tidak bisa sekadar menyelenggarakan program begitu saja, tetapi justru menuntut mutu serta akuntabilitas dalam segala aspeknya, baik kelembagaan maupun isi dan proses pendidikan yang ditawarkannya.

Disiplin ilmu yang kukuh. Dari segi disiplin ilmu profesionalisasi BIPA akan berkaitan erat dengan perkembangan pada disiplin linguistik dan pedagogi yang tentu saja secara khusus berkaitan dengan bahasa Indonesia. Linguistik bahasa Indonesia telah berada pada tahap pengembangan yang cukup menggembirakan dengan munculnya produk seperti *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dari segi pedagogi, kita masih banyak memanfaatkan pedagogi pengajaran B2 yang berkembang, terutama untuk pengajaran EFL/ESL. Tentu saja pedagogi BIPA memerlukan kajian dan pengembangan lebih lanjut.

Kode etik. Kode etik merupakan ciri keprofesionalan sebuah profesi. Kode etik pengajar BIPA memang saat ini belum terumuskan secara eksplisit, tetapi gambaran yang berkaitan dengan sikap, pemahaman, keterampilan, dan kebiasaan yang dibahas di bagian terdahulu dari makalah ini sudah bisa dijadikan landasan untuk pengembangan kode etik pengajar BIPA itu.

Penutup

Pengajaran BIPA di Indonesia sudah merekah dengan baik. Lembaga penyaji pengajaran BIPA sudah banyak. Peminat profesional pengajaran BIPA bertambah terus seperti terlihat dari keramaian KIPBIPA I sampai dengan KIPBIPA IV. Gejolak sosial politik di dalam negeri memang berpengaruh terhadap pengajaran BIPA, seperti yang terjadi dengan mengecilnya jumlah pelajar BIPA dari Australia. Untuk memperkuat pengajaran BIPA selanjutnya, upaya kerja sama yang lebih teratur dan tertata perlu dilakukan antara Pusat Bahasa, APBIPA, lembaga penyelenggara BIPA, dan lembaga terkait lainnya. Begitu juga antara lembaga-lembaga tersebut dengan pengajar dan pengembang program, metodologi, dan bahan ajar

BIPA. Dalam kaitan dengan itu, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir di berbagai kegiatan APBIPA, khususnya KIPBIPA V yang akan diselenggarakan di Ujung Pandang tahun depan. Informasi lebih rinci mengenai KIPBIPA V dapat diperoleh dengan mengakses situs jaringan www.unm.ac.id/kipbipav. Sedangkan informasi tentang Asosiasi Pengajar BIPA (APBIPA) dapat diakses di situs jaringan www.apbipa.or.id atau www.apbipa.org. Pada situs ini, kami juga menyediakan *link* ke berbagai situs penting lainnya. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz. A. 2000. "Usia, Jenis Kelamin, dan Masalah Kesantunan dalam Berbahasa Indonesia". Dalam *Prosiding KIPBIPA IV*. Bali: IALF.
- Hamied, Fuad A. 2001. *Pengembangan Profesionalisme BIPA*. Denpasar, Bali: Makalah KIPBIPA IV, 1--3 Oktober 2001.
- Herman, E. 2003. "Bahan Ajar yang Bertopik dan Bertingkat Kesulitan Runtut". Dalam *Prosiding KIPBIPA IV*. Bali: IALF.
- IALF Bali. 2003. *Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) IV*. Diselenggarakan dengan dukungan Pusat Bahasa dan APBIPA di Denpasar, Bali, 1--3 Oktober 2001.
- Universitas Pendidikan Indonesia. 2000. *Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) III*. Diselenggarakan atas kerja sama dengan Pusat Bahasa di Bandung, 11--13 Oktober 1999.
- Wiryatmaja, S. 2003. Penekanan Sejumlah Fonem Bahasa Indonesia bagi Pembelajar Awal BIPA. *Prosiding KIPBIPA III*.

PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN *EFL*: DAPATKAH TERWUJUD DI SEKOLAH KITA?

Chuzaimah Dahlan Diem

Dalam beberapa tahun terakhir ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan gencar menyosialisasikan rencana inovasi pendidikan, yaitu pengubahan kurikulum yang lama, Kurikulum 1994 menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (selanjutnya KBK). Ini berarti bahwa dalam konteks pendidikan nasional, pengembangan isi kurikulum termasuk kurikulum bahasa Inggris sebagai bahasa asing (selanjutnya *EFL*) dalam proses pembelajaran dan pembelajaran sangat tergantung pada peran dan sikap berbagai pihak, seperti kepala sekolah, para guru *EFL*, dan pustakawan. Bagaimana setiap individu terkait menyikapi pengubahan tersebut serta bagaimana ketersediaan keteraksesan berbagai bahan bacaan sebagai sarana penunjang proses pembelajaran dan pembelajaran menjadi faktor yang paling menentukan. Bukankah tujuan akhir dari suatu pendidikan di sekolah adalah menyiapkan anak bangsa menjadi insan-insan mandiri dengan penuh tanggung jawab (Baca juga Zen, 2002). Oleh karena itu, pertanyaan yang sangat mendasar sehubungan dengan pengubahan kurikulum dan keinginan untuk menciptakan insan-insan yang mandiri ini adalah apakah dengan adanya KBK ini proses pembelajaran dan pembelajaran *EFL* di sekolah akan benar-benar membawa pengubahan yang signifikan dalam segi kualitas anak didik?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, diperlukan tiga hal agar pembaruan itu dapat betul-betul membawa dampak positif seperti yang diinginkan. Ketiga hal tersebut mencakup (1) kepedulian kepala sekolah; (2) keberadaan guru *EFL* yang inovatif dan berkualitas; dan (3) ketersediaan sarana penunjang yang memadai dan yang dikelola dengan inovasi sesuai dengan tuntutan pengubahan kurikulum baru tersebut. Untuk itu, menurut Fullan dan Stiegelbauer (1991) diperlukan sikap dan tingkah laku yang konkrit yang didasari keyakinan dan pemahaman sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi era global.

Berhasil tidaknya suatu pembaruan pembelajaran dan pembelajaran *EFL* di sekolah, misalnya, sangat tergantung pada kebijakan kepala sekolah serta kualitas dan keefektifan guru *EFL* serta keterkaitan mata pelajaran *EFL* dengan mata pelajaran lain, terutama dalam kegiatan literasi (membaca, menulis, dan bernalar). Pembaruan dalam pembelajaran literasi inilah yang akan menjadi pokok bahasan dalam makalah ini dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran dan pembelajaran *EFL* di sekolah.

Di satu pihak, kepala sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya karena ia berfungsi sebagai penentu apakah guru-guru termasuk guru *EFL* mengembangkan kemampuannya secara profesional dan berkesinambungan. Di lain pihak, para guru *EFL*, mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran dan pembelajaran karena mereka merupakan individu-individu yang akan membawa perubahan itu dalam aktivitas di kelas. Selanjutnya, proses ini akan lebih bermakna apabila pustakawan dapat dilibatkan secara aktif sebagai penyedia berbagai jenis bahan bacaan dan sebagai tenaga teknis di bidang informasi. Apabila kepala sekolah, guru, dan pustakawan kurang memahami tugas dan fungsinya, atau penyimpangan yang terjadi dalam pengimplementasian kurikulum di kelas mungkin tak dapat dihindari.

Pengimplementasian berbagai inovasi dalam kurikulum baru *EFL* bukanlah tanpa permasalahan. Di antara permasalahan yang mungkin muncul berpangkal pada langkanya kepala sekolah yang peduli dan guru *EFL* yang berkualitas yang dapat menyesuaikan perannya dalam proses belajar mengajar (karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang materi-materi baru dan cara penyajiannya) dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Kurangnya kepedulian, pengetahuan, dan keterampilan itu membawa dampak pada rendahnya konsep diri sehingga tanpa disadari mereka kembali terperangkap dalam sikap dan cara-cara tradisional yang selama ini sudah mendarah daging. Untuk melaksanakan pembaruan dalam pendidikan bahasa Inggris berdasarkan KBK dibutuhkan pengetahuan, strategi, dan keterampilan baru dengan komitmen yang penuh dari berbagai pihak terkait, terutama kepala sekolah dan guru *EFL* itu sendiri yang merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran *EFL*. Sebagaimana dikemukakan oleh Amstrong (1989), pengimplementasian suatu pembaruan secara baik tidak akan terjadi kecuali orang-orang yang terlibat melaksanakan pembaruan itu sungguh-sungguh memahami tugasnya dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan berikutnya akan berkisar pada topik yang berkaitan dengan kepala sekolah dan guru *EFL* yang keduanya merupakan pengemban kurikulum baru. Selanjutnya, meskipun guru yang berkualitas terdapat pada semua bidang studi, pokok bahasan utama makalah ini diarahkan kepada guru *EFL*, terutama dalam aktivitasnya mengembangkan keterampilan **literasi** yang akhir-akhir ini semakin diperlukan. Apalagi hal itu dikaitkan dengan kenyataan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia yang berdasarkan penelitian *International Association for the Evaluation of Educational Achievement* masih berada pada peringkat paling rendah di dunia, yaitu ke 30 dari 31 negara yang menjadi sampel (Dikutip dalam Elley, 1992:14).

Kepala Sekolah dan Proses Pembaruan KBK

Pesatnya arus globalisasi tampaknya telah mengharuskan praktisi pendidikan, terutama kepala sekolah dan guru, harus secara inovatif menyesuaikan filosofi, substansi, atau isi pembelajaran, teknik mengajar, dan sarana-prasarana sekolah dengan berbagai kebutuhan siswa untuk mengimbangi kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sangat pesat. Oleh karena itu, dalam menerapkan KBK, kepala sekolah merupakan pemeran utama dan sangat menentukan apakah pengubahan ke arah perbaikan telah terjadi atau belum meskipun ia tidak berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas (Baca Bower, 1990).

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan kepala sekolah agar inovasi pendidikan yang menjwai KBK tersebut membawa hasil yang positif dan maksimal. Pertama, kepala sekolah harus memberikan dukungan, baik moril maupun materiil bagi para guru *EFL* agar berkembang secara profesional. Sekolah akan mengalami pengubahan secara lebih efektif jika kepala sekolah memainkan peranan aktif dalam memfasilitasi guru-guru untuk melakukan perbaikan. Hanya kepala sekolah yang aktif dan senantiasa berpartisipasi dalam menerapkan pembaruan akan sukses membawa pengubahan (Muncey & McQuillan, 1996) karena tingkat penerapan pembaruan di sekolah sangat ditentukan oleh tindakan-tindakan dan perhatian kepala sekolah tentang pembaruan tersebut (Hall, *et al.*, dikutip dalam Fullan, 1992).

Kedua, di samping memberikan dukungan dan dorongan, kepala sekolah dapat memberikan berbagai tekanan positif kepada guru karena hal itu sangat penting untuk keberhasilan penerapan suatu pembaruan. Tekanan yang positif dan dilakukan bersama-sama dengan suatu dorongan dapat mempercepat terjadinya pengubahan. Menurut Fullan (1992) tekanan tanpa dukungan akan menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam bekerja dan akibatnya akan terjadi penolakan; sebaliknya dukungan tanpa tekanan akan mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, kepala sekolah harus menggabungkan kedua unsur tersebut dengan bijak jika ia menginginkan keberhasilan dalam penerapan inovasi pembaruan yang kemudian betul-betul membawa pengubahan.

Partisipasi aktif, kepedulian, dan dukungan yang terus menerus dari kepala sekolah akan memotivasi guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam menerapkan pembaruan di kelas. Guru yang termotivasi akan menyukseskan berbagai bentuk inovasi, tanpa motivasi yang kuat serta tanpa pengubahan dalam sikap dan tingkah laku, inovasi dan pengubahan tidak akan berjalan secara tepat.

Agar dapat memberikan dukungan kepada guru secara optimal, kepala sekolah sendiri harus mengerti dan memahami dimensi pengubahan yang ada dan mempunyai kemauan untuk melakukan pengubahan. Dengan

kata lain, agar dapat mengubah orang lain (guru, pustakawan, dan staf administratif lainnya), kepala sekolah harus terlebih dahulu mengubah sikap, tingkah laku, dan meningkatkan kemampuan serta keterampilannya sendiri. Kepala sekolah harus betul-betul terlibat secara langsung dalam mengimplementasikan perubahan, yaitu merencanakan dan mengembangkan kurikulum, memberikan bantuan profesional kepada guru, serta menyediakan fasilitas, seperti perpustakaan dan laboratorium bahasa dengan sebaik-baiknya.

Hal lain yang harus dilakukan kepala sekolah adalah menyediakan atau memungkinkan terjadinya pengembangan keprofesionalan para guru. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, perubahan kurikulum berarti perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan strategi. Oleh karena itu, guru membutuhkan adanya pengembangan profesional agar mereka dapat mengimplementasikan pembaruan yang diharapkan di era global secara optimal. Kepala sekolah yang peduli dapat mengirimkan guru untuk mengikuti penataran, mendorong mereka untuk melakukan penelitian serta menyediakan tempat dan waktu untuk melakukan berbagai diskusi antarkolega dan/atau bimbingan.

Akhirnya, kepala sekolah juga perlu melaksanakan supervisi dan memberikan penilaian terhadap berbagai kegiatan guru. Supervisi dan penilaian menjadi sangat penting demi keberhasilan pembaruan, yaitu untuk memperbaiki kemampuan profesional guru dan untuk mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Di samping itu, supervisi dan penilaian ini juga memungkinkan kepala sekolah untuk mengidentifikasi kekeliruan dan kekuatan dalam melaksanakan kegiatan dan kemudian diharapkan dapat memberikan bantuan kepada guru untuk memperbaiki kekeliruan agar tidak terulang dan memberikan penguatan sehingga perencanaan pada masa yang akan datang akan menjadi lebih terarah dan membuahkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi kepala sekolah yang memiliki komitmen, seseorang harus memiliki kemauan, keterbukaan, dan berbagai keterampilan, seperti keterampilan instruksional dan keterampilan manajerial. Keterampilan instruksional dibutuhkan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada guru dalam mengimplementasikan berbagai pendekatan, metode, dan strategi mengajar dengan materi yang relevan, serta tindakan lainnya dengan penuh rasa tanggung jawab, sedangkan keterampilan manajerial diperlukan untuk mengelola sekolah sebagai suatu organisasi yang dinamis sehingga baik perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, maupun pengevaluasian hasil dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Keterampilan Literasi dalam EFL: Unsur Utama dalam KBK

Pada tahun 2000 *International Reading Association* mengeluarkan suatu pernyataan bahwa setiap anak patut mendapatkan guru literasi yang berkualitas karena mereka itu dapat membuat perubahan dalam meningkatkan prestasi dan motivasi untuk membaca (IRA Board of Directors, 2000).

Pernyataan tersebut merupakan referensi yang tepat dalam pembaruan pendidikan di dunia, termasuk Indonesia, terutama dalam menyosialisasikan pembaruan kurikulum sekolah dasar dan menengah untuk mengimbangi kepesatan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global. Pernyataan posisi itu sendiri menyetengahkan pentingnya kualitas guru dalam pembelajaran dan pembelajaran literasi, baik pada bidang studi EFL maupun pada bidang studi lain berdasarkan berbagai hasil penelitian. Menurut penelitian tersebut, guru yang berkualitas memiliki beberapa keunggulan, baik ditinjau dari segi pengetahuan maupun tingkah laku, yaitu sebagai berikut.

- a. Mereka memahami perkembangan literasi (membaca, menulis, dan bernalar) dan mempunyai keyakinan bahwa semua anak dapat belajar membaca dan menulis.
- b. Mereka secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kemajuan anak secara individual dan mengaitkan pembelajaran literasi dengan pengalaman anak sebelumnya.
- c. Mereka mengetahui berbagai metode atau teknik pengajaran membaca dan menulis, kapan menggunakan setiap metode, dan bagaimana menggabungkan berbagai metode ke dalam program pembelajaran yang efektif.
- d. Mereka mampu menawarkan berbagai jenis bahan dan wacana untuk dibaca anak.
- e. Mereka menggunakan berbagai strategi pengelompokan kelas secara fleksibel dalam rangka menyesuaikan pembelajaran bagi setiap anak.
- f. Mereka merupakan “pelatih” kegiatan literasi yang baik (seperti menyediakan bantuan secara strategis).

Selanjutnya, guru literasi yang berkualitas juga memiliki berbagai karakteristik guru yang baik pada umumnya. Mereka memiliki pengetahuan tentang substansi bidang studi dan pedagogik yang andal, dapat mengelola kelas sehingga terdapat tingkat keterlibatan yang tinggi, menggunakan strategi motivasi yang kuat yang mendorong pembelajaran mandiri, memiliki harapan yang tinggi terhadap prestasi anak, dan membantu anak yang memiliki kesulitan dalam belajar bahasa Inggris.

Karena membaca merupakan kegiatan utama dalam KBK, orang yang juga berperanan penting dalam kegiatan ini adalah pustakawan. Pustakawan sekolah yang berkualitas adalah pustakawan yang inovatif yang selalu mengutamakan keteraksesan informasi yang relevan demi tercapainya pembelajaran dan pembelajaran di sekolahnya. Oleh karena itu, pelibatan

pustakawan dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas sangat diperlukan. Kerja sama yang baik tidak hanya diperlukan antara guru dan pustakawan tetapi juga antarpustakawan dari perpustakaan-perpustakaan lain, terutama perpustakaan daerah dan perpustakaan nasional melalui *networking* yang terpadu demi terlaksananya penerapan KBK. Dengan demikian, keteraksesan terhadap berbagai jenis bahan bacaan sebagai sarana penunjang kegiatan utama pembelajaran dan pembelajaran, termasuk *EFL*, di kelas dapat diperoleh dengan mudah.

Pengaruh Guru *EFL* terhadap Prestasi dan Motivasi Anak

Guru yang berkualitas dapat membuat perubahan dalam proses pembelajaran dan pembelajaran serta motivasi anak. Sebagai bukti, telah banyak penelitian yang mencatat besarnya pengaruh guru terhadap skor membaca anak (Jordan, Mendro, Weerasinghe, & Dallas Public Schools, 1997; Sanders & Rivers, 1996; Wright, Horn, & Sanders, 1997). Selanjutnya, keefektifan guru—baik yang diukur melalui skor berbagai tes profisiensi (Ferguson, 1991), melalui catatan tentang peningkatan skor siswa, melalui kebiasaan membaca dan belajar siswa, melalui tingkat pendidikan guru, jenis pengangkatan guru (guru tetap, guru percobaan, guru pengganti), konsep diri guru (Diem, 2000; Diem, 1998), maupun melalui pengalaman mengajar (Armour, Clay, Bruno, & Allend, 1990; Diem, *et al.*, 2001)—berkorelasi tinggi dengan prestasi membaca anak. Di samping itu, guru juga memiliki efek yang kuat terhadap motivasi anak untuk membaca (Ruddell, 1995; Skinner & Belmont, 1993).

Perkembangan Literasi di Sekolah

Menurut *International Reading Association* (1999), guru literasi yang berkualitas sangat memahami bahwa perkembangan literasi anak dimulai dari sebelum anak masuk sekolah dan terus berlanjut selama kariernya sebagai siswa. Mereka memahami definisi membaca sebagai suatu sistem pembentukan pemahaman terhadap wacana yang kompleks sehingga memerlukan:

- a. pembinaan dan pemeliharaan motivasi untuk membaca dan menulis;
- b. pengembangan strategi yang tepat untuk membentuk pemahaman apa yang tertulis;
- c. latar belakang informasi dan kosakata yang cukup untuk membantu perkembangan pemahaman dalam membaca;
- d. kemampuan membaca dengan cepat;
- e. kemampuan mendeteksi kata-kata yang belum dikenal/baru; dan
- f. keterampilan dan pengetahuan untuk memahami bagaimana fonem atau bunyi berkaitan dengan tulisan.

(Lihat juga Snow, Burns, & Griffin, 1998)

Guru *EFL* yang berkualitas memahami semua komponen membaca yang mempengaruhi setiap tingkatan membaca. Namun, mereka juga menyadari bahwa keseimbangan pengajaran yang berkaitan erat dengan komponen tersebut bergeser sesuai dengan masa perkembangan setiap anak. Guru *EFL* yang berkualitas memahami bagaimana perkembangan membaca dan menulis saling terkait sehingga mereka dapat mengintegrasikan pembelajaran secara efektif untuk memanfaatkan perkembangan anak dalam kedua area tersebut. Mereka mengenal urutan perkembangan membaca anak dan juga yakin bahwa seluruh anak dapat membaca dan menulis dalam bahasa Inggris.

Cara Menilai Kemajuan Literasi Anak

Guru *EFL* yang berkualitas mengenal berbagai rentangan teknik penilaian, mulai dari berbagai tes pencapaian kelompok yang telah baku sampai dengan berbagai teknik penilaian informal yang mereka gunakan sehari-hari di kelas. Mereka menggunakan informasi yang berasal dari berbagai kelompok alat ukur yang standar sebagai suatu sumber informasi tentang kemajuan membaca dan menulis anak. Mereka menyadari bahwa berbagai tes pencapaian yang baku dapat menjadi indikator keabsahan dan keterpercayaan tentang kinerja kelompok, tetapi tes tersebut dapat memberikan informasi yang menyesatkan tentang kinerja anak secara individu. Mereka juga sangat menyadari bahwa penilaian tentang kemajuan anak harus berdasarkan informasi dari berbagai sumber, dan oleh karena itu, mereka tidak membuat putusan pembelajaran hanya berdasarkan satu ukuran.

Guru *EFL* yang berkualitas secara taat asas mengamati anak sesuai dengan usaha anak setiap hari. Mereka memahami bahwa melibatkan anak untuk mengevaluasi diri sendiri memiliki keuntungan, baik dari segi kognitif maupun motivasional. Di kelas, guru menggunakan alat ukur yang bervariasi, termasuk konferensi dengan siswa, penganalisisan contoh hasil membaca dan menulis anak, melakukan berbagai catatan dan inventori membaca informal, catatan anekdot tentang kinerja anak, daftar cacah pengamatan, dan alat ukur lain yang sejenis. Mereka mengenal sejarah pembelajaran setiap anak dan latar belakang literasi keluarganya. Dari pengamatan mereka dan evaluasi diri yang dilakukan si anak, mereka mengetahui perkembangan membaca anak dan mereka dapat mengaitkan perkembangan itu dengan berbagai standar yang relevan. Mereka menggunakan pengetahuan ini untuk perencanaan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Metode Pembelajaran *EFL* Berdasarkan Kebutuhan Anak

Guru *EFL* yang berkualitas mengetahui berbagai filosofi, metode, dan strategi pembelajaran. Mereka memahami bahwa pembelajaran membaca

dan menulis dalam bahasa Inggris yang berkualitas mencakup seluruh unsur membaca yang penting. Mereka sadar bahwa strategi pembelajaran cukup bervariasi bergantung kepada berbagai dimensi, termasuk komponen membaca yang ditargetkan oleh pembelajaran, seperti mengucapkan kata, memahami wacana, membangun minat, dan juga kadar pembelajaran--apakah terpusat pada guru atau siswa, dan apakah eksplisit atau implisit. Mereka memahami bahwa anak-anak berbeda dalam memberikan respons terhadap berbagai jenis pembelajaran dibandingkan dengan orang dewasa dan mereka memilih strategi yang paling efisien untuk digunakan di kelasnya. Mereka mengetahui teknik intervensi awal dan meyakinkan anak bahwa mereka akan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan setelah kebutuhannya jelas, misalnya, di kelas *English for Young Learners* yang diberikan sebagai muatan lokal di sekolah dasar, guru *EFL* menghadapi berbagai jenis anak, anak yang baru mengenal beberapa kata dan mendapat kesulitan untuk mengeja kata yang dibacanya, anak yang fasih dan gemar membaca yang dapat membaca apa saja yang ada di hadapannya, dan anak yang lancar membaca nyaring tetapi susah memahami bacaan dan kurang motivasi untuk membaca. Dalam kasus pembaca yang mendapatkan kesulitan dalam membaca, guru *EFL* yang berkualitas biasanya berusaha mengenal anak tersebut dan mengetahui sejarah pembelajarannya sehingga ia dapat menyediakan akses terhadap buku-buku tentang topik yang diajarkan dengan jauh lebih mudah untuk dimengerti oleh kelasnya. Guru dapat bekerja dengan anak-anak yang sama dalam kelompok kecil untuk membangun kosakata dan mengenalnya dengan cepat dan guru dapat menyediakan akomodasi yang tepat agar anak dapat mengambil manfaat dari pengajaran pemahaman, serta terus berusaha mempelajari substansi penting meskipun mereka mendapat kesulitan dalam membaca.

Jenis Wacana dan Bahan Bacaan Di dalam Kelas *Efl*

Guru *EFL* yang berkualitas menyediakan berbagai jenis bahan bacaan di kelas mereka. Kadang-kadang mereka bergantung pada satu atau beberapa serial bacaan sebagai tempat berlabuhnya program membaca mereka, tetapi mereka juga memiliki bahan-bahan suplemen dan perpustakaan kelas yang kaya yang memuat paling sedikit tujuh buah buku per anak. Mereka membaca untuk siswanya dan menyediakan waktu bagi anak untuk membaca mandiri di kelas. Mereka sadar akan kemampuan membaca dan minat anak serta mereka menyediakan berbagai buku pilihan yang menarik bagi anak dan dalam kapabilitas membaca. Guru *EFL* yang berkualitas mengenal kesusastaan anak, termasuk di dalamnya berbagai jenis fiksi dan nonfiksi. Dengan dibantu pustakawan, ia juga menggunakan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum untuk meyakinkan keteraksesan terhadap

buku-buku yang tepat dan memotivasi anak agar tetap membaca (Diem, 2000).

Pengaturan Kelas *EFL* dalam Proses Pembelajaran Literasi

Guru *EFL* mengatur kelasnya sedemikian rupa sehingga jadwal dapat diprediksi. Guru tersebut menggunakan strategi pengelompokan yang fleksibel. Apabila ada informasi yang sulit tetapi perlu dipahami oleh seluruh kelas, guru yang berkualitas akan menggunakan pembelajaran secara eksplisit, langsung, dan dalam kelompok besar. Mereka mencontohkan strategi atau keterampilan yang penting, mendemonstrasikan bagaimana dan kapan menggunakannya, serta menjelaskan mengapa itu penting. Guru membimbing anak dalam menggunakan strategi atau keterampilan tertentu dengan mengurangi bantuan dan mengharapkan siswa memiliki tanggung jawab yang lebih besar ketika mereka sudah lebih terampil. Mereka menyediakan berbagai kesempatan untuk latihan secara individual dan mengamati anak dalam menggunakan keterampilan atau strateginya. Selama aktivitas latihan, mereka mengamati siswa secara cermat dengan memberikan pertanyaan atau komentar yang menggerakkan anak untuk maju. Mereka juga mengetahui anak yang mana akan memperoleh keuntungan dari semua unsur suatu pelajaran pengajaran langsung mengenai keterampilan atau strategi tertentu dan anak yang mana yang memerlukan pengajaran langsung atau pengulangan dalam waktu singkat yang diikuti dengan latihan secara mandiri. Mereka menggunakan latihan berkelompok untuk mengakomodasi berbagai perbedaan yang ada.

Guru *EFL* yang berkualitas juga memahami bahwa pengajaran langsung dalam kelompok besar banyak menghabiskan waktu dan biaya dan itu tidak bermanfaat bagi kebanyakan anak di kelas. Mereka mengetahui kapan mengatur anak dalam kelompok besar untuk pengajaran eksplisit langsung, kapan pengajaran dengan kelompok kecil atau pengajaran individual secara lebih tepat, dan kapan anak-anak dapat belajar sendiri dengan lebih efisien. Mereka membantu anak agar maju dalam pembelajaran literasi dengan menggunakan tipe pengajaran, tingkat bantuan, dan jumlah latihan yang diterima anak secara bervariasi. Mereka tidak mengizinkan anak untuk menghabiskan waktu hanya dengan mempelajari apa yang telah mereka ketahui dan/atau yang telah dapat mereka kerjakan.

Cara Berinteraksi dalam Kelas *EFL*

Guru *EFL* yang berkualitas sering berinteraksi dengan setiap anak dalam kegiatan pengajarannya sehari-hari. Ketika membantu anak memecahkan permasalahan atau melatih keterampilan dan strategi baru, mereka melatih atau *merancah* anak dengan memberikan bantuan pada momentum yang strategis. Mereka terlatih dalam mengamati kinerja anak

dan menggunakan interaksi nonformal untuk mendapatkan perhatian anak terhadap aspek-aspek penting mengenai apa yang mereka pelajari dan kerjakan. Mereka sering membantu anak dalam tugas yang sulit sehingga anak-anak dapat bergerak maju untuk menyelesaikan tugas dengan sukses.

Penting untuk dicatat bahwa pengajaran seperti itu tidaklah bersifat insidental ataupun tidak sistematis. Guru *EFL* yang berkualitas mengetahui anak-anak berada dalam perkembangan literasinya dan mereka mengetahui pula kemungkinan langkah-langkah berikutnya. Mereka membantu anak menggunakan langkah itu dengan menyediakan sejumlah bantuan yang tepat pada saat yang tepat pula.

Penutup

Sejalan dengan akan diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi dan berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengimplimentasian pembaruan di bidang kurikulum di sekolah bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, melainkan dapat dilakukan secara asal oleh setiap pihak yang terkait memiliki komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembelajaran dan pembelajaran *EFL* yang berkualitas disarankan agar:

- a. kepala sekolah selalu menjadi pemimpin pembelajaran yang mendukung usaha guru *EFL* untuk memperbaiki pengajarannya;
- b. para guru *EFL* tetap memandang diri mereka sendiri sebagai pembelajar seumur hidup dan terus berusaha memperbaiki kegiatan literasi (membaca, menulis, dan bernalar) mereka;
- c. para pustakawan membantu guru dan siswa dalam menyediakan akses terhadap informasi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan pembelajaran *EFL*.
- d. para pembuat peraturan dan kebijakan memahami peran guru *EFL* yang kompleks dalam proses pembelajaran, termasuk pembelajaran literasi dan memastikan bahwa para guru *EFL* memiliki berbagai sumber dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengajar.
- e. Pembuat peraturan dan kebijakan seharusnya tidak bergantung pada hanya satu aturan yang cocok untuk seluruh tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, D.G. 1989. *Developing and Documenting The Curriculum*. New South Wales: Allen & Unwin.
- Armour, T.C., Clay, C., Bruno, K., & Allen, B.A. 1990. *An Outlier Study of Elementary and Middle Schools in New York City: Final Report*. New York, NY: New York City Board of Education.

- Bowers, B.C. 1990. "Initiating Change in Schools". Dalam *Research Roundup Journal*, 6, 3.
- Depdiknas. 1999. *Pembinaan Minat Baca dan Pengembangan Perpustakaan: Materi Pelatihan Calon Kepala Sekolah*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Diem, C.D. 2000a. "Kebiasaan Membaca dan Kemampuan Berbahasa Inggris Guru SMU Se-Provinsi Sumatera Selatan". Dalam *Forum Pendidikan*, 25(03), 257--268.
- Diem, C.D. 2000b. "Keteraksasan Bahan Bacaan: Salah Satu Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa". Dalam *Mimbar Pendidikan Bahasa & Seni*, 28, 25--30.
- Diem, C.D. 1998. "Teacher Self-concept and Teacher Effectiveness as Perceived by Teachers of English and Students of Senior High Schools". Dalam *The Journal of Education*, 5(3), 154--165.
- Diem, C.D., Ihsan, D., Purnomo, M.E., & Indrawati, S. 2001. Developing Students' Reading and Learning Habit Through Acceleration of Reading Comprehension and Study Skills. *Domestic Collaborative Research Grant--URGE Project, Directorate General of Higher Education Department of National Education: Research report*. Palembang: Sriwijaya University.
- Elley, W.B. 1992. *How in The World do Students Read? IEA Study of Reading Literacy*. Hamburg: The International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
- Ferguson, R. 1991. "Paying for Public Education: New Evidence on How and Why Money Matters". Dalam *Harvard Journal on Legislation*, 28, 465--498.
- Fullan, M.G. 1992. *Successful School Improvement*. Buckingham: Open University Press.
- Fullan, M.G. & Stiegelbauer, S. 1991. *The New Meaning of Educational Change*. 2nd ed. London: Cassell Educational Limited.
- International Reading Association. 2000. *Excellent Reading Teachers: A Position Statement of The International Reading Association*. Newark, DE: Board of Directors.
- International Reading Association. 1999. *Using Multiple Methods of Beginning Reading Instruction: A position Statement of The International Reading Association*. Newark, DE: Author.

- Jordan, H.R., Mendro, R.L., Weeringhe, D., & Dallas Public Schools. 1997. *Teacher Effects on Longitudinal Student Achievement*. Paper Presented at CREATE Annual Meeting, Indianapolis, Indiana.
- Muncey, D.E. & McQuillan, P.J. 1996. *Reform and Resistance in Schools and Classrooms*. London: Yale University Press.
- Ruddell, R.B. 1995. "Those Influential Literacy Teachers: Meaning Negotiators and Innovation Builders". Dalam *The Reading Teacher*, 48, 1-31.
- Sanders, W.L., & Rivers, J.C. 1996. *Cumulative and Residual Effects of Teachers on Future Student Academic Achievement: Research Progress Report*. Knoxville, TN: University of Tennessee Value-Added Research and Assessment Center.
- Skinner, E.A., & Belmont, M.J. 1993. "Motivation in The Classroom: Reciprocal Effects of Teacher Behavior and Student Engagement Across The School Year". Dalam *Journal of Educational Psychology*, 85, 571--581.
- Snow, C.E., Burns, M.S., & Griffin, P. (Eds.). 1998. *Preventing Reading Difficulties in Young Children*. Washington, DC: National Academy Press.
- Zen, M.T. 2002. "Proses Pembangunan Bangsa dan Pendidikan Nasional." Makalah disampaikan pada seminar sehari mengenai *Strategi Pendidikan Jangka Panjang Berwawasan Kebangsaan*, diselenggarakan oleh Forum Rektor dan Kosgoro, tanggal 24 Oktober 2002, di Institut Teknologi Bandung.

LAPORAN SIDANG

- Hari, Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2003
- Judul Makalah : 1. Pengajaran BIPA di Indonesia
2. Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Pembelajaran EFL: Dapatkah Terwujud di Sekolah-Sekolah Kita di Indonesia
- Pemakalah : 1. Prof. Fuad Abdul Hamied
2. Prof. Chuzaimah Dahlan Diem
- Pemandu : Felicia N. Utorodewo
- Pencatat : 1. Dra. Haniah
2. Drs. Pardi, M.Hum.

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Widodo (Universitas Negeri Malang)

- Bagaimana dengan sejumlah lembaga BIPA yang belum terekam oleh organisasi BIPA?
- Bagaimana pendapat pembicara dengan adanya BIPA terimplisit dalam bidang studi lain? Jadi, adanya minat belajar bahasa Indonesia untuk memasuki bidang studi lain.
- Apakah BIPA berorientasi pada sisifilusi, diplomso, pascasarjana, dan lain-lain?

Jawaban: Prof. Fuad Abdul Hamied

- Bagi BIPA yang belum terekam, diharapkan bergabung.
- Memang BIPA dimanfaatkan untuk ilmu khusus, ke depan perlu dipikirkan lagi.
- Diupayakan BIPA bersertifikasi 1 semester, diploma 1, diploma 2, dan seterusnya. Diarahkan BIPA sebagai program konsentrasi bukan program studi.

2. Pertanyaan: Prof. Dr. Asim Gunarwan (Universitas Indonesia)

Apakah nama BIPA tidak lebih baik diganti BIBPA atau BIPBA.

Jawaban: Prof. Fuad Abdul Hamied

- Hal nama akan diupayakan dibicarakan pada kongres BIPA 2004 di Sulawesi.
- Diharapkan ada 3 komponen yang menentukan keberhasilan siswa dalam pengajaran EFL. Apakah siswa tidak perlu dipertimbangkan sebagai faktor penting penentu keberhasilan BA?

3. **Pertanyaan:** Mohamad Aduh (...)

Pengajar BIPA itu honorinya rendah sehingga pengajarnya mengundurkan diri dan BIPA diganti/diajarkan oleh orang di luar disiplin BA. Apakah BIPA dapat membuat standardisasi bagi penghargaan pengajar BIPA?

Jawaban: Prof. Fuad Abdul Hamied

Akan diupayakan BIPA menjadi organisasi profesi yang dapat memperbaiki penghargaan bagi pengajar BIPA.

4. **Pertanyaan:** Putra (Universitas Udayana)

- a. Apakah variabel intern-seperti lingkungan sosial tidak perlu diperhatikan?
- b. Uraian hanya terbatas pada EFL formal (spesifik SD, TK, dan SMP/SMA), bagaimana bagi EFL pada pendidikan nonformal?
- c. Bagaimanakah bahasa asing terintegrasi dengan perpustakaan?

Jawaban: Prof. Chuzaimah Dahlan Diem

- a. Perlu analisis pembelajaran
- b. Situasi pembelajaran dalam kaitannya dengan siswa perlu dipertimbangkan. Jika perlu, akan lebih baik jika siswa terbangun oleh lingkungan sehingga memiliki kesempatan untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajari.
- c. Pustakawan harus berupaya membangun situasi siswa untuk termotivasi belajar BA.

Jawaban: Prof. Fuad Abdul Hamied

Memang siswa perlu dipertimbangkan. Akan tetapi, yang terpenting adalah 3 komponen itu, (kepala sekolah, guru, dan pustakawan). Kuncinya, keberhasilan pengajaran BA terletak pada kemampuan guru dalam mendorong minat belajar siswa.

PERAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN MUTU PENGUNAAN BAHASA INDONESIA DI ERA REFORMASI

Parni Hadi

Wartawan/Anggota Badan Pertimbangan Bahasa

Jika judul naskah ini merupakan sebuah pertanyaan, jawabannya amatlah mudah: “Jelas amat sangat penting!” Sejarah pers (media massa) Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, demikian pula sebaliknya. Bahkan, keduanya, pers nasional dan Bahasa Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan asing.

Era reformasi di Indonesia, yang dimulai tahun 1998, berlangsung dalam era globalisasi informasi. Era yang penuh dengan hiruk pikuk perubahan di segala bidang kehidupan. Berkat kemajuan teknologi informasi, era ini juga disebut era informasi yang ditandai dengan membanjirnya informasi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan segala dampak positif dan negatifnya. Media cetak bermunculan tumbuh di berbagai daerah berkat kebebasan pers, tapi sebagian (besar) media cetak baru itu berguguran karena persaingan ketat dan kurang persiapan. Sementara itu, media elektronik, radio dan televisi, yang juga tumbuh pesat tampak lebih stabil. Di antara beberapa alasannya adalah (1) karena mendengarkan radio dan menonton televisi lebih murah daripada membaca media cetak (praktis tidak perlu mengeluarkan biaya, kecuali untuk membeli pesawatnya), (2) mendengarkan radio dan menonton televisi tidak memaksa orang untuk berpikir seserius ketika membaca, dan (3) cocok dengan budaya duduk, mendengar, dan menonton dari sebagian besar masyarakat kita. Oleh karena itu, era reformasi ini dalam bidang komunikasi dan informasi lebih pas disebut era media elektronik, terutama televisi, jika dilihat dari jangkauan dan dampaknya kepada masyarakat, termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia.

Sebelum membicarakan kondisi umum penggunaan bahasa Indonesia di media massa elektronik, kendala dan strategi untuk mengatasinya, izinkanlah saya mengajak Anda menelusuri kilas balik hubungan timbal balik antara wartawan (media massa) dan bahasa Indonesia sejak Kongres Bahasa Indonesia I sampai VII dan keputusan-keputusan penting yang menyangkut hubungan antara keduanya. Saya merasa terhormat diundang untuk membahas topik ini karena setelah 28 tahun bergiat di media cetak sebagai wartawan, sejak tahun 2000 saya juga menggeluti profesi baru sebagai penyaji acara atau dalang bincang-bincang (*talk show master*) di radio dan televisi.

Dari Kongres ke Kongres

Setelah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara wartawan (pers) bahasa Indonesia diakui oleh Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 sampai Kongres VII 1988. Salah satu keputusan Kongres I di Solo, setelah mendengar saran Adinegoro (almarhum), salah seorang tokoh perintis pers Indonesia, berbunyi, "Sudah waktunya kaum wartawan berdaya upaya mencari jalan-jalan untuk memperbaiki bahasa di dalam persuratkabaran, karena itu berharap supaya Perdi (Persatoean Djoernalis Indonesia) bermufakat tentang hal itu dengan anggota-anggotanya dan komisi yang akan dibentuk oleh Kongres yang baru bersama-sama pengurus pusat Perdi (ejaan dan istilah telah disesuaikan dengan yang kini berlaku).

Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954 secara khusus membentuk Seksi E yang bertugas membahas tiga topik, yakni (1) fungsi bahasa Indonesia dalam pers, (2) bahasa Indonesia dalam pers, dan (3) bahasa Indonesia dalam penyiaran radio. Kala itu media massa belumlah semaju sekarang, media cetak belumlah sebanyak sekarang, dan pesawat televisi belum dikenal. Kongres ini mengeluarkan resolusi tentang bahasa Indonesia dalam pers dan radio. Resolusi itu di bagian "Mengingat" antara lain menyebutkan bahwa alat dari pers dan radio adalah bahasa Indonesia. Di bagian "Menimbang", antara lain tertulis:

- (1) Bahasa sebagai alat pers dan radio harus dibuat seefektif-efektifnya atau dijadikan sebaik-baiknya.
- (2) Kebaikan bahasa sebagai alat Pers dan Radio terletak pada sifat mudah dan jelas.
- (3) Sifat mudah dan jelas itu terjadi jika mengikuti pertumbuhan bahasa dengan timbulnya kata-kata, langgam-langgam, gaya dan ungkapan-ungkapan baru di dalam masyarakat.

Kemudian, resolusi itu menyatakan pendapat sbb:

- (1) Bahasa Indonesia di dalam pers dan radio tak dapat dianggap sebagai bahasa yang tak terpelihara dan rusak.
- (2) Bahasa Indonesia di dalam pers dan radio adalah bahasa masyarakat umum yang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masyarakat.
- (3) Pers dan radio hendaknya sedapat mungkin berusaha memperhatikan tata bahasa yang resmi.
- (4) Menganggap perlu supaya dilanjutkan adanya kerjasama yang lebih erat antara pers dan radio dengan Balai-balai Bahasa.

Kongres Bahasa Indonesia III tahun 1978 di Jakarta juga memberi perhatian masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di bidang komunikasi. Kesimpulan umum Kongres itu di bidang komunikasi antara lain menyebutkan bahwa media massa merupakan salah satu sarana penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam

rangka pembangunan bangsa karena media massa memiliki pengaruh yang luas dalam masyarakat. Media massa diakui telah memberikan sumbangan yang berharga dengan pertumbuhan bahasa Indonesia. Namun, disebutkan pula bahwa kenyataan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun lisan. Misalnya, ada kata yang cenderung kehilangan maknanya yang sesungguhnya dan dalam ragam lisan belum ada lafal baku. Juga disebutkan pemakaian bahasa daerah dan asing dalam keadaan atau kesempatan tertentu.

Kongres menyarankan tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut sebagai berikut.

1. Untuk mencegah erosi bahasa perlu diadakan penelitian mendalam tentang sebab-sebabnya
2. Kerja sama antara wartawan dan ahli bahasa dalam penumbuhan bahasa Indonesia perlu digalakkan.
3. Perlu diadakan penataran bahasa Indonesia untuk wartawan surat kabar, televisi, dan radio, baik pemerintah maupun swasta.
4. Pejabat negara, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam segala jenjang hendaknya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang lebih cermat, baik dalam komunikasi resmi maupun dalam pergaulan resmi.
5. Perlu dipikirkan kemungkinan penempatan ahli-ahli bahasa di kantor-kantor Pemerintah dan swasta untuk memantapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan masing-masing.
6. Sebaiknya, surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia menyediakan "Pojok Bahasa" yang memuat petunjuk praktis penggunaan bahasa Indonesia.
7. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bersama dengan Dewan Pers dan lembaga lain hendaknya segera menyusun pedoman lafal baku bahasa Indonesia yang didasarkan atas penelitian, antara lain, untuk penyiar televisi dan radio.
8. Sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pers, televisi, serta radio dapat melakukan kerja sama yang lebih efektif dalam usaha keefisienan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan baku.

Kongres Bahasa Indonesia IV (1983) di Jakarta

Kongres ini mencatat media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa mempunyai pengaruh luas di dalam masyarakat. Kenyataan juga menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun secara

lisan, masih memiliki kelemahan. Kecenderungan menghilangkan kata-kata dalam media cetak, misalnya, sering mengakibatkan makna kalimat menyimpang atau hilang sama sekali. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih ada pemakaian unsur-unsur bahasa daerah atau bahasa asing yang tidak perlu. Tindak lanjut yang disarankan adalah semua petugas pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti lurah, guru, juru penerang, penyiar RRI/TVRI, dan staf redaksi media cetak, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kongres Bahasa Indonesia V (1988) di Jakarta

Kongres ini mencatat bahwa media massa merupakan komunikator pembangunan yang memanfaatkan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, media massa seperti surat kabar dan majalah, hendaknya memiliki tenaga kebahasaan yang khusus membina bahasa siaran sehingga bahasa media massa dapat dijadikan contoh bagi masyarakat.

Kongres Bahasa Indonesia VI (1993) di Jakarta

Sebagai media komunikasi yang mempergunakan bahasa, media massa telah membuktikan diri sebagai sarana yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Di samping itu, dunia pers dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam meningkatkan sikap positif dan apresiatif serta menggalakkan penggunaan bahasa yang lebih cendekia dengan mengungkapkan bahasa secara lebih rasional dan berpegang pada konvensi-konvensi bahasa yang sudah baku. Oleh sebab itu, peranan media massa sebagai penyebar sekaligus sebagai tolok ukur penggunaan bahasa yang baik dan benar harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Tindak Lanjut :

- a. Untuk meningkatkan sikap positif dan menggalakan penggunaan bahasa yang lebih cendekia, media cetak dianjurkan menyediakan rubrik bahasa sebagai sarana pembaca untuk berdialog mengenali bahasa.
- b. Dalam memperkaya bahasa Indonesia, dunia pers telah menunjukkan kepeloporannya dalam menerima unsur serapan. Bagi perkembangan bahasa, hal itu sama sekali tidak merugikan. Namun, pengguna bahasa dalam pers dianjurkan juga menggali kekayaan bahasa dari bahasa serumpun dan bahasa daerah.
- c. Selain penguasaan bahasa, minat terhadap sastra hendaknya menjadi bahan pertimbangan khusus dalam penerimaan calon wartawan.
- d. Setiap media massa dianjurkan untuk mengangkat redaktur khusus bahasa agar pemantauan dan evaluasi atas bahasa yang dipergunakan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Kongres Bahasa Indonesia VII (1998) di Jakarta

Kongres ini mencatat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teknologi informasi, dan tantangan kehidupan dalam era globalisasi menuntut agar kualitas bahasa Indonesia ditingkatkan dan kemampuan daya ungkapnya dikembangkan. Untuk itu, unsur-unsur bahasa seperti sintaksis dan kosakata, termasuk peristilahan, perlu diperkaya. Kongres ini mengusulkan tindak lanjut antara lain sebagai berikut.

- a. Pengembangan peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diprioritaskan dan pengembangan kosakata perlu ditingkatkan, antara lain, dengan penyerapan kata dari bahasa lain melalui kaidah penyerapan yang lebih mantap.
- b. Penggunaan eufemisme secara berlebihan dengan maksud menutup-nutupi kenyataan yang negatif harus dihindarkan, sedangkan eufemisme yang berkaitan dengan kesopansantunan berbahasa serta adat istiadat perlu dilestarikan.
- c. Bahasa Indonesia dalam iklan, selain harus mengutamakan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga perlu berpedoman pada norma-norma sosial budaya bangsa sehingga kata-kata yang berkonotasi vulgar tidak digunakan.

Dukungan UU Penyiaran

Kongres Bahasa VIII 2003 di Jakarta ini berlangsung lima tahun setelah Gerakan Reformasi diluncurkan. Yang harus dicatat, upaya untuk meningkatkan peran media massa elektronik dalam peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia mendapat dukungan luar biasa dari UU Penyiaran. Bahasa Indonesia mendapat tempat yang penting dan terhormat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahasa siaran, yakni dalam Bab IV bagian kedua dalam tiga pasal, yakni Pasal 37, 38 dan 39.

Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 38

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Pasal 39

- (1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.
- (2) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- (3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tuna rungu.

Apa dan siapa yang salah?

Jadi, sudah jelas bahwa media massa elektronik sesuai dengan perintah UU harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akan tetapi, kenyataannya keluhan terhadap mutu bahasa Indonesia yang digunakan dalam siaran media massa elektronik belum sirna. Bahkan, apa yang dapat dianggap sebagai kekurangan dan pelanggaran seperti yang telah dicatat oleh kongres-kongres bahasa sebelumnya semakin menjadi-jadi. Apa dan siapa yang salah? Apakah insan penyiaran tidak serius dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ataukah karena pelanggaran atas perintah UU ini tidak ada sanksinya, kecuali untuk Pasal 39 ayat 1 yang dikenakan sanksi administratif? Sanksi administratif itu pun tidak khusus hanya untuk pelanggaran pasal 39 ayat 1, tetapi untuk banyak pasal seperti diatur dalam Bab V tentang Sanksi Administratif, Pasal 55.

Sanksi Administratif itu dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Lebih celaka lagi, jika UU ini hanya dianggap tulisan di atas kertas belaka dan apa yang dimaksud dengan ancaman sanksi administratif itu dianggap hanya sebagai angin lalu saja. Toh UU yang memiliki sanksi pidana saja tidak ditakuti. Apalagi, kini sudah menjadi rahasia umum bahwa supremasi hukum yang menjadi tuntutan agenda reformasi tinggal menjadi kenangan belaka.

Baik, Benar, dan Menghibur

Salah satu syarat bahasa untuk siaran radio dan lebih-lebih televisi adalah harus menghibur. Kesan umum terhadap apa yang disebut sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang formal dan karenanya kaku. Karena dianggap kaku, kurang disukai oleh para penyiar dan pembawa acara televisi. Sebuah acara televisi pertama-tama harus enak ditonton oleh para pemirsa. Bahasa lisan lebih luwes dibanding bahasa tulisan. Intonasi berperan penting untuk membuat sebuah acara yang disajikan menarik sekalipun mungkin itu menyalahi apa yang disebut sebagai lafal baku. Bahkan, kata-kata tidak cukup menarik tanpa bantuan gerakan anggota tubuh dan ekspresi wajah. Kata-kata, apalagi harus mengikuti kaidah-kaidah yang dianggap baik dan benar, membuat dahi berkerinyit karena harus berpikir, sedangkan gerakan anggota tubuh dan ekspresi wajah secara spontan dapat membuat orang tertawa atau menangis. Penggunaan bahasa daerah dan asing, kecuali mungkin karena belum ada kosakata baku dalam bahasa Indonesia, dapat membuat sebuah acara lebih menarik karena menyajikan sesuatu yang baru, di samping menambah pengetahuan.

Tulisan ini tidak bermaksud membela kesalahan-kesalahan yang bukan main banyaknya yang dilakukan oleh pembaca berita dan pemandu acara, baik dalam gramatika, intonasi, fonologi, morfologi, diksi (pilihan kata-kata), terjemahan, maupun sintaksisnya. Berikut adalah salah satu contoh kesalahan gramatikal: "Berita terakhir diterima redaksi...." Seharusnya, "Berita terakhir yang diterima redaksi...." Mungkin, si pembaca berita terpengaruh atau tidak mengerti maksud ungkapan dalam bahasa Inggris: "*Latest news received by the editor....*" (past participial). Sering kali kata *yang* untuk menunjukkan anak kalimat tidak diucapkan sebagai pengganti tanda baca koma (,) seperti dalam berita berikut: Amin, lahir 20 tahun lalu, baru mendapat kesempatan untuk disunat kemarin berkat gerakan khitanan massal yang diselenggarakan partai politik A. Dalam bentuk bahasa lisan mestinya berita itu dibaca: Amin yang lahir 20 tahun lalu dst. Ada juga contoh kesalahan terjemahan yang menggelikan, seperti, *Presidential candidate George Walker Bush with his running mate...* diterjemahkan menjadi Calon Presiden George Walker Bush dengan teman berlarnya....

Bahasa gado-gado juga masih banyak dipakai dalam berita seperti contoh berikut: Ada *contingency plan*, *sweeping* tablig jamaah, dugaan *money politics*, dan "*jangan ngoyo, rileks aja!*". Ada juga kesalahan yang diucapkan oleh narasumber, kebetulan pejabat tinggi lagi, contohnya: "Suatu tindakan-tindakan...." Bahasa gado-gado lebih banyak lagi dipergunakan dalam iklan seperti contoh berikut: Di-clear-in saja. Ngeclearin siapa takut? Mau nge-trend, ya pakai ...! Aku ngejoss di sini, kamu ngejoss di sana (entah apa maksudnya).

Strategi peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia di media massa elektronik

Jika subjudul di atas merupakan sebuah pertanyaan, jawabannya jika harus baru atau lain daripada yang sudah dirumuskan dalam kongres-kongres sebelumnya adalah: Sulit!

Terus terang, apa yang diharapkan dan dikeluhkan serta tindak lanjut untuk mengatasinya sudah disebut-sebut dalam kongres-kongres sebelumnya. Tinggal melaksanakan saja dan itulah yang sulit dilakukan oleh bangsa Indonesia. Jika saja keputusan kongres terdahulu dilaksanakan, keluhan itu mestinya tidak ada lagi atau minimal berkurang.

Sekali lagi, tanpa maksud membela kesalahan insan penyiaran, justru, maafkan jika salah, saya khawatir jangan-jangan Pusat Bahasa dan para ahli bahasa yang harus mengubah paradigma apa yang disebut bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Saya yakin, Pusat Bahasa dan para ahli bahasa sudah tahu bahwa bahasa itu berkembang sesuai dinamika masyarakat penggunaannya yang dalam era globalisasi ini mendapatkan banyak masukan dari luar negeri.

Apakah perlu dibentuk polisi bahasa untuk menindak para pelanggar UU Penyiaran? Anda sudah tahu jawabannya. Perlu UU tentang kebahasaan, silakan! Menjadikan Pusat Bahasa lebih berwibawa dengan meningkatkannya menjadi lembaga nondepartemen, silakan! Saya setuju-setuju saja. Juga saya setuju semua usul tindak lanjut yang dihasilkan Kongres Bahasa Indonesia I sampai dengan VII mengenai peningkatan penguasaan berbahasa Indonesia bagi wartawan, pembaca berita, pembawa acara dan para narasumber serta pengisi acara di media elektronik. Silakan dilaksanakan, saya mendukung sepenuhnya.

Jika Anda ingin sesuatu yang baru, boleh juga. Mumpung kini para elit politik sedang sibuk menyiapkan pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota langsung, saya mengusulkan diadakan tes kemampuan berbahasa Indonesia dari para calon. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan media massa elektronik untuk melaksanakan perlombaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat juga media massa elektronik dilibatkan untuk memilih pejabat dan tokoh publik terbaik dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan penampilan mereka yang sudah lampau. Pokoknya, kerja sama antara Pusat Bahasa dan media elektronik perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia.

Bahan bacaan:

1. Hasil-hasil Kongres Bahasa Indonesia I-VII.
2. UU No. 32, 2002 tentang Penyiaran
3. Makalah-makalah Kongres Bahasa Indonesia I-VII
4. *How To Talk So People Listen*, Sonya Hamlin

5. *The Quick & Easy Way To Effective Speaking*
6. *How to Think, Speak and Write Effectively*, Robert Flesch
7. *New Survey of Journalism*, George Fox Mott
8. UU No.40,1999 tentang Pers
9. Kode Etik Wartawan Indonesia.

PERANAN MEDIA MASSA CETAK DALAM PENINGKATAN MUTU PENGUNAAN BAHASA INDONESIA

Tarman Azzam

Ketua Umum PWI Pusat

Secara universal di negara dan bangsa manapun, peranan pers (khususnya media massa cetak) sangat besar dalam pembinaan bahasa. Demikian pula di Indonesia. Pers merupakan institusi pertama, samalah dengan dunia pendidikan, 'yang sangat terkait pada maju mundurnya penggunaan bahasa dengan kaidah-kaidah yang benar. Jika pers melakukan tindakan serampangan dalam menggunakan bahasa jurnalistiknya, niscaya hal itu merupakan tindakan yang juga akan merusak kaidah-kaidah bahasa. Akan tetapi, tidak jarang pula, inovasi pers itu sekaligus dapat memperkaya bahasa.

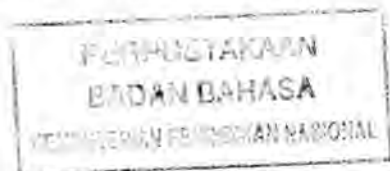
Pers Cetak Nasional

Secara umum, kualitas pers cetak Indonesia telah sangat maju dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun dari segi oplah, ternyata tiras media massa cetak secara nasional relatif tidak bertambah. Malah untuk ukuran surat kabar harian justru mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Totalitas oplah media cetak kini sekitar 15 juta eksemplar, meliputi 4,8 juta eksemplar surat kabar harian, 5 juta eksemplar majalah dan buletin, serta 5,2 juta eksemplar tabloid. Dengan data itu, berarti oplah surat kabar harian turun dari 5,4 juta eksemplar tahun 1997.

Mengapa terjadi kondisi *stagnan*, malahan merosot, pada pertumbuhan oplah media masa cetak? Pertama, karena tumbuh berkembangnya media elektronik radio dan televisi. Masyarakat Indonesia agaknya lebih suka mendengar dan menonton daripada membaca. Terutama akibat berkembang pesatnya televisi swasta, para *audience* akhirnya lebih menyukai siaran TV karena mengandung banyak sekali informasi dan hiburan, suatu hal yang menyenangkan dan tidak melelahkan.

Kedua, *reading habits* manusia Indonesia memang masih tetap rendah. Membaca belum menjadi kebiasaan yang membudaya dalam masyarakat Indonesia. Membaca agaknya pekerjaan yang jauh lebih berat dibandingkan mendengar dan menonton.

Ketiga, daya beli manusia Indonesia relatif masih rendah. Harga buku, koran, majalah, dan bahan bacaan lainnya relatif masih mahal. Oleh karena itu, pilihan masyarakat untuk membelinya masih sangat terbatas. Juga belum terlalu kuat gengsi orang Indonesia untuk memiliki



bahan bacaan tersebut.

Keempat, belum semua penerbitan pers dikelola secara sungguh-sungguh profesional, terutama karena memang sebagian pemilik dan pengelolanya belum profesional. Malahan masih cukup banyak praktisi pers cetak tidak memenuhi standar kompetensi profesi. Hal ini antara lain karena Dewan Pers belum menetapkan standar yang baku atas kompetensi profesi pers dan standar organisasi wartawan yang harus dihormati dan ditaati secara nasional. Akibat kelemahan ini, masih banyak para redaktur media cetak menggunakan bahasa Indonesia yang serampangan.

Kelima, media cetak lebih memilih bahasa yang mudah dipahami publik, misalnya, dengan menggunakan bahasa lisan sehari-hari, baik bahasa pergaulan maupun bahasa daerah yang campur baur, bahkan juga bahasa *prokem*. Kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar kurang ditaati dan dikembangkan.

Keenam, disiplin ilmiah para praktisi pers bermacam ragam, tidak sedikit mereka berasal dari pendidikan non-sosial, menyebabkan cara berpikir dan bertindak mereka sangat pragmatis.

Ketujuh, kurangnya partisipasi para pakar bahasa dan institusi yang kompeten dalam mengkritisi bahasa media massa cetak.

Kedelapan, kebijakan politik nasional belum membuka peluang yang besar kepada publik untuk menikmati bahan bacaan yang bermutu, tersedia luas, dan murah meriah.

Kualitas Bahasa Pers

Sebenarnya cukup banyak media cetak yang berdisiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia secara benar. Malahan beberapa penerbitan pers menyumbangkan halaman mereka secara kontinu untuk pengembangan dan bimbingan bahasa Indonesia dalam upaya mendidik publik agar terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Adalah pers juga yang memopulerkan beberapa kata istilah yang kemudian memperkayakan bahasa Indonesia. Misalnya, kata *Anda*, yang kemudian berkembang menjadi kata umum dalam pergaulan dan memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, pers melakukan prakarsa, kreativitas dan inovasi dengan mengambil beberapa istilah asing yang di-Indonesiakan lantaran tidak mudah menggantikan dan menyamakannya dengan kata-kata bahasa Indonesia.

Pada beberapa penerbitan pers belakangan ini malahan ada yang menggunakan bahasa dan istilah yang, mungkin, terlalu vulgar dan sama sekali tidak mengindahkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, kata-kata atau kalimat yang digunakan tersebut justru disukai publik dan lebih komunikatif.

Hal seperti ini tentu harus dikritisi dan menjadi tantangan bagi para pakar bahasa Indonesia agar dipedulikan, diberi perhatian yang lebih serius, dan tidak boleh ditinggalkan. Di lain pihak, Dewan Pers dan Majelis Etik organisasi-organisasi protes kewartawanan, termasuk Dewan Kehormatan PWI tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap perkembangan penggunaan bahasa centang perenang dalam media massa tersebut. Namun, sebenarnya cukup banyak media massa yang memang bertekad menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam karya-karya jurnalistiknya. Untuk itu, secara nasional PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) umpamanya selalu mengkritisi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam segala lomba karya jurnalistik. Para wartawan yang menggunakan bahasa Indonesia secara serampangan, baik dalam laporan berupa berita, reportase, *feature*, editorial dan sebagainya niscaya karya jurnalistiknya tidak akan dimenangkan, atau tidak memperoleh nilai prima.

Tantangan Masa Depan

Tantangan masa depan bahasa Indonesia adalah bagaimana membuat kesinambungannya sehingga mampu menerobos, diakui, dan digunakan dalam pergaulan antarbangsa. Kelalaian dalam pembangunan bahasa Indonesia itu bisa menyebabkan, pada langkah dekat, tersingkirnya bahasa Indonesia oleh bahasa Melayu Semenanjung Malaysia. Padahal, kedua bahasa sama-sama bersumber dari bahasa Melayu, yang kemudian berkembang sesuai dengan tuntutan zaman pada tiap-tiap wilayah komunitas penggunaannya.

Tantangan masa depan tersebut harus diantisipasi oleh segenap pihak yang berkompeten dalam pengembangan bahasa Indonesia.

Untuk memperkaya khazanah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai liputan pers, terutama media cetak, sangat diperlukan adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk lebih mendorong para wartawan dan praktisi pers secara sungguh-sungguh menggunakan media massa yang mereka kelola menjadi ajang pendidikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk hal itu, sangat perlu adanya sosialisasi yang luas mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang sungguh-sungguh memenuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

JAKARTA, 14 OKTOBER 2003

LAPORAN SIDANG

Hari, tanggal	: Rabu, 15 Oktober 2003
Judul Makalah	: 1. Peran Media Massa Elektronik dalam Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia 2. Peran Media Massa Cetak dalam Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia
Penyaji	: 1. Parni Hadi 2. Arman Azzam
Pemandu	: Taufik Ikram Jamil
Pencatat	: 1. Ida Bagus Maha Indra 2. Luh Anik Mayani

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** A. Ratu (Manado)

Surat kabar yang terbit di Manado ada dua jenis, yaitu surat kabar yang berbahasa Indonesia 'baik dan benar' dan surat kabar yang berbahasa vulgar. Dari keduanya, justru yang laris terjual adalah surat kabar yang dikemas dengan menggunakan bahasa yang vulgar karena harganya murah. Saya mengusulkan anggota pers minimal berstrata satu, kalau perlu dari jurusan bahasa.

Jawaban: Parni Hadi

Penggunaan bahasa yang baik tidak laku, bahasa yang vulgar lebih laku, itulah cermin masyarakat kita. Sering kali sikap masyarakat kita 'hanya ingin gampang' atau 'ingin menggampangkan'. Hal tersebut bersifat kultural yang berkaitan dengan *values* atau nilai masyarakat yang seharusnya dikoreksi.

Jawaban: Tarman Azzam

Penggunaan bahasa yang vulgar laris. Pertanyaannya, yang salah siapa? *Kan* kesalahan publik. Kalau korannya jelek, ya jangan dibeli. Repotnya, pers ada dalam keadaan yang dilematik, suguhanannya tidak bagus tetapi publik malah senang. Sebenarnya dalam proses penerimaan wartawan termasuk menjadi anggota PWI ada tes bahasa. Kalau mereka tidak lulus tes itu, mereka tidak akan lolos.

2. **Pertanyaan:** Dr. Yayah B. Lumintintang (Pusat Bahasa)

Ada dua hal yang mencuat di media elektronik yaitu masalah durasi dan hukum pasar atau *rating*. Masalah durasi menjadi penting bagi saya, karena yang saya soroti hanya masalah bahasanya saja dan bukan *setting* serta porsi-porsi yang tidak memerlukan pembakuan bahasa. Memang bahasa yang baik dan benar harus didasarkan atas jenisnya. Bahasa jurnalistik adalah sebuah laras bahasa tersendiri yang berbeda dari bahasa ilmiah atau bahasa birokrat. Masalah durasi menjadi masalah yang sangat serius karena jika saya menganjurkan bentuk yang baku, yang baik dan benar sesuai dengan konteks atau tuntutan komunikasi dalam program yang ditayangkan, durasi sering dijadikan alasan untuk tidak menggunakan bentuk baku tersebut. Padahal, dari data yang saya dapatkan, kejadiannya justru sebaliknya. Contohnya pemborosan pemakaian kata dalam 'pelaku peledakan bom' yang seharusnya bisa disingkat dengan kata 'pengebom' saja. Padahal, kalau dihitung durasinya, kata 'pelaku peledakan bom' memerlukan durasi yang lebih panjang dibandingkan dengan kata 'pengebom'. Jadi, soal durasi harus ditinjau kembali karena durasi bersifat semu, konsep bahwa bahasa pers itu harus singkat, padat, efektif, dan sebagainya justru menunjukkan bahwa bahasa perslah yang paling boros. Bahkan, dalam satu berita satu informasi diulang berkali-kali sehingga bagi saya, konsep ekonomi bahasa dalam pers, mohon maaf, omong kosong bagi saya.

Jawaban: Parni Hadi

Durasi seringkali hanya merupakan ucapan presenter atau redaktur saja. Memang harus pendek, padat tapi *kok* panjang, tapi saya setuju, memang sering kali sembrono dan kurang cerdas.

Jawaban: Tarman Azzam

Saya senang pandangan Bu Yayah. Memang bahasa jurnalistik tidak sama dengan bahasa lisan, beda dengan bahasa tulisan, beda dengan bahasa ilmiah. Malahan bahasa jurnalistik untuk media cetak di majalah dan di koran berbeda. Bahasa jurnalistik untuk radio berbeda dengan bahasa jurnalistik televisi. Karena itu, bekas wartawan media cetak yang ingin masuk menjadi wartawan televisi harus belajar lagi bagaimana bahasa jurnalistik televisi dan sebaliknya. Memang bahasa pers harus jelas, singkat, padat, dan lengkap, tapi yang paling penting apakah pesan yang disampaikan itu dapat diterima oleh pemirsas atau pembaca. Bahasa pers memang merupakan bahasa tersendiri sehingga ia mempunyai *trade mark* tersendiri.

3. **Pertanyaan:** Ahmad Fadrun (Universitas Mataram)

Kecenderungan paling menonjol dalam bahasa jurnalistik adalah pembuatan judul yang sangat bernuansa emosi. Kemudian, ada dua sikap pembaca yang menafsirkan teks tersebut, yaitu (1) memahami secara internal teks; apa adanya dan (2) memahami teks tersebut secara konotatif. Jika teks dengan bahasa emotif itu dibuat, isinya akan ada pencampuran antara berita dan opini. Apakah dibenarkan menggunakan kata-kata yang bersifat emotif dalam pers sebab kata-kata itu sulit untuk dimaknai secara denotatif saja, tetapi akan muncul makna-makna ekstra dari teks itu sendiri (atau katakanlah konotatif). Yang kedua apakah bapak tidak takut akan terjadi masalah seperti wartawan Tempo?

Jawaban: Parni Hadi

Tentang penggunaan kata emotif, penyajian berita lebih-lebih dalam media massa elektronik harus menghibur, lebih menarik. Sesuatu yang emosi, yang bersifat menyentak, emosional, sensasional tidak boleh mengurangi kadar kecendikiaan, intelektualitas. Jadi, isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk mem-percerdas, membentuk watak dan moral, kemajuan, dan kekuatan bangsa serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Jawaban: Tarman Azzam

Bahasa yang digunakan wartawan sangat tergantung pada pengalamannya, situasi di mana mereka bekerja, lelahkah, santaikah, atau dikejar *dead line* yang tidak ada ampunnya bisa saja melahirkan ekspresi macam-macam sehingga ada penggunaan kata-kata emosi yang menimbulkan kemarahan. Saya pernah *diajarin* bahwa wartawan tidak hanya harus sopan tapi juga kurang ajar. Wartawan harus bisa mengungkapkan informasi dan bukan membuat marah publik dan tidak mendidik publik. Pers tidak hanya mengikuti publik, pers harus mampu memberi edukasi pada publik.

4. **Pertanyaan:** Sukadi (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)

Saya mendapat kesan bahwa kedua penyaji mempunyai sikap siap diserang bahkan pada akhir presentasi siap digugat, menunggu digugat. Namun, saya tidak akan menggugat apalagi menyerang karena rekan media massa sudah berusaha bersungguh-sungguh dari Kongres Bahasa I dan seterusnya untuk memperbaiki bahasa Indonesiannya. Saya sarankan agar topik pada pertemuan siang ini diubah menjadi 'apa yang sudah disumbangkan media massa bagi pembinaan bahasa Indonesia' bukan 'apa kesalahan media massa dalam pembinaan bahasa Indonesia'.

5. **Pertanyaan:** Prof. Dr. Amran Halim (Pusat Bahasa)

- a. Pertama, Pusat Bahasa sebaiknya bersifat kritis, menunjuk sejumlah petugas hanya untuk menonton televisi dan menyampaikan kekurangannya itu pada penulis atau pembaca dan menyampaikan perbaikan yang perlu diadakan. Pusat Bahasa dapat membentuk tim khusus untuk mengamati bahasa yang digunakan oleh media massa. PB segera menyiapkan bahan pendidikan kepada para wartawan baik yang sudah bertugas tetapi belum menguasai bahasa Indonesia dan terutama bagi wartawan yang belum pernah mengikuti pendidikan bahasa Indonesia.
- b. Kedua, saya ingin memberi penghargaan kepada Pak Parni dan Pak Tarman atas keterbukaannya menerima kritik. Pertama, ada pemborosan dalam jumlah kata dan ada bunga-bunga dalam bahasa tulis, yang memakan waktu, tetapi tidak ada intinya. Ada tiga insan media pers yang perlu diperhatikan: pembaca berita yang bahasa Indonesianya sudah jauh lebih baik, tetapi yang sangat mengganggu adalah bahasa presenter yang lafalnya salah, bentuk kalimatnya tidak betul, lafal Inggrisnya belepotan. Contohnya pengucapan kata psikologi yang diucapkan dengan bunyi [h] [psikhologi]. Jadi, bahasa presenter perlu diperbaiki. Ketiga adalah wartawan lapangan yang sering mengikuti bahasa pemberi berita, meskipun bahasa tersebut salah. Sering kali wartawan lapangan tidak menyeleksi mana unsur inti dan mana yang tidak inti dalam berita, terutama sekali dalam tulisan media cetak. PB juga seharusnya menerima tantangan dari bapak-bapak tadi agar tidak membuat-buat istilah-istilah bahasa itu secara keterlaluan.

Jawaban: Parni Hadi

Pemborosan yang dilakukan wartawan, tidak bisa membedakan mana yang inti dan mana yang bukan. Hal itu dapat terjadi karena tiga kemungkinan, yaitu wartawan diburu waktu, wartawan sembrono, dan wartawan kurang cerdas. Saya setuju presenter perlu dites, barangkali PB bisa melibatkan dirinya untuk menjadi penguji bagi calon presenter. Saya terima usul Bapak. Wartawan juga harus dikoreksi terus-menerus agar tidak besar kepala.

Jawaban: Tarman Azzam

Saya senang kalau memang lembaga bahasa Indonesia peduli dengan bahasa pers. Pusat Bahasa dapat bekerja sama dengan PWI untuk mengkritisi hal ini. Presenter melakukan kesalahan pada pelafalan, hal itu tergantung pada kemampuan presenter itu sendiri. Untuk istilah-

istilah sulit, para redaktur kami ditemani kamus. Kalau Pusat Bahasa mau turun tangan, saya pikir itu jalan terbaik dan seharusnya menjadi salah satu keputusan kongres ini.

BAHASA MEDIA MASSA: LARAS BAHASA JURNALISTIK YANG PERLU DIKEMBANGKAN

Mulyadi Eko Purnomo
Universitas Sriwijaya

Abstrak

Secara sosiolinguistik, bahasa media massa sebenarnya dapat dipandang sebagai ragam atau laras bahasa tersendiri yang biasanya dibandingkan dengan bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Dalam hal itu, bahasa media massa dianggap titik tengah antara bahasa ilmiah yang lugas, objektif, dan argumentatif dan bahasa susastra yang metaforik, fiksional-imajinatif, dan naratif-ekspresionis. Ada beberapa ciri gramatikal bahasa media massa (cetak). Salah satu ciri yang penting adalah adanya pemadatan struktur, baik morfologis maupun sintaktis. Pemadatan struktur morfologis, misalnya, berupa penghilangan afiks tertentu, sedangkan pemadatan struktur sintaktis berupa penghilangan preposisi pada frasa idiomatis, penghilangan konjungtor pada kalimat majemuk, dan adanya konstruksi partisipial. Walaupun demikian, harus dibedakan secara tegas antara laras bahasa dan penyimpangan struktur, atau penyimpangan mana yang merupakan ciri laras bahasa media massa (laras jurnalistik), dan penyimpangan mana yang harus dihindari. Dengan menyebut beberapa contoh “penyimpangan struktur” yang ditemukan pada bahasa massa cetak terbitan Palembang, dicoba dianalisis penyimpangan itu. Ternyata, ada penyimpangan yang dapat dengan mudah dikategorikan sebagai laras bahasa jurnalistik, ada penyimpangan yang harus dihindari, tetapi ada juga penyimpangan yang tidak mudah dikategorikan ke dalam laras jurnalistik atau penyimpangan yang terlarang. Di sinilah perlunya pengembangan laras jurnalistik itu dengan mendiskusikan dan mengompromikan karakteristik laras jurnalistik itu.

Pendahuluan

Secara sosiolinguistik, bahasa Indonesia (BI) memiliki variasi jika dilihat dari berbagai segi, seperti bidang pemakaian, pemakai bahasa itu, daerah pemakaian, dan kurun waktu pemakaian. Bahasa yang digunakan dalam bidang kepolisian, misalnya, agak berbeda dari bahasa

yang digunakan di lingkungan kedokteran. Demikian juga, BI yang digunakan pada masa lalu agak berbeda dari BI yang digunakan pada saat sekarang. BI yang digunakan untuk penulisan berita surat kabar, berbeda dari BI yang digunakan dalam makalah ilmiah dan BI yang digunakan dalam bacaan sastra (Sudaryanto, 1995).

Sebagai salah satu ranah pemakaian bahasa, media massa cetak menyebabkan timbulnya variasi bahasa. Variasi itu dapat dipandang sebagai laras (*style*) tersendiri apabila terjadi secara sistematis. Oleh karena itu, timbulnya laras jurnalistik dianggap sebagai sesuatu yang wajar sebagai akibat dari perkembangan variasi itu. Variasi bahasa (BI) ragam jurnalistik ini berbeda dari bahasa ragam ilmiah dan ragam sastra seperti yang dikemukakan di atas. Bahasa Indonesia laras jurnalistik sebagai perwujudan dari pemakaian BI dalam ranah jurnalistik juga dapat ditemukan terjadinya dalam penggunaan BI pada media cetak di tanah air, apakah yang terbit di Jakarta atau yang terbit di daerah. Laras jurnalistik itu berupa penggunaan unsur bahasa yang khas, yang tidak ditemukan pada bidang lain, atau bisa juga berupa penggunaan unsur bahasa yang juga ditemukan pada bidang lain.

Secara sosiolinguistik, bahasa media massa sebenarnya dapat dipandang sebagai ragam atau laras bahasa tersendiri, yang biasanya dibandingkan dengan bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Dalam hal itu, bahasa media massa dianggap "titik tengah" antara bahasa ilmiah yang lugas, objektif, dan argumentatif serta bahasa sastra yang metaforik, fiktional-imajinatif, dan naratif-ekspresionis.

Berdasarkan pendapat berbagai pihak, baik praktisi pers maupun ahli bahasa, diketahui bahwa bahasa laras jurnalistik memiliki karakteristik tertentu. Seperti dikemukakan Hadi (1998), di samping masih terikat pada prinsip BI yang baik dan benar, bahasa pers memiliki karakteristik yang berpegang pada prinsip singkat, padat, lugas, dan menarik. Sementara itu, Sugono (1998) mengemukakan ciri BI laras jurnalistik, khususnya dalam struktur sintaksis, sebagai adanya bentuk partisipial, adanya penggantian konjungtor *bahwa* dengan tanda koma, adanya frasa nominal penyulihan, dan verba transitif tanpa objek, serta penggunaan konjungtor *sedangkan* dan *sehingga* di awal kalimat. Dari berbagai pendapat tentang karakteristik bahasa jurnalistik atau bahasa pers (Lihat juga Mujiyanto, 1995; Suwandi, 1995; dan Soewarno, 1995), dapat disimpulkan sementara adanya pemadatan atau penyederhanaan struktur sintaktis. Penyederhaan itu bisa berupa penghilangan konjungtor tertentu atau butir leksikal tertentu. Di samping ciri, itu terdapat ciri lain yang cukup menonjol, yaitu digunakannya bahasa daerah dan bahasa asing tertentu di tengah-tengah kalimat bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata daerah dan kosakata asing ini boleh jadi di-

manfaatkan untuk mencapai efek kemenarikan dan kedekatan kepada pembaca. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Seperti dikemukakan oleh Sumarsono (2000), dalam surat kabar yang terbit di Bali, penggunaan bahasa Bali cukup penting untuk diperhatikan walaupun beberapa kosakata daerah Bali itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Dari fenomena penggunaan BI dalam media cetak yang ada di Palembang, ditemukan adanya gejala pemadatan struktur sebagai konsekuensi dari ekonomi bahasa, dan adanya penggunaan kosakata tertentu, apakah dari bahasa asing, atau bahasa daerah. Perhatikan contoh berikut.

- (1) Ditanya apakah dalam pertemuan itu sempat dibahas soal pengamanan Sidang Paripurna DPR pada 30 April mendatang, Wimar tidak memberikan jawaban secara tegas.
- (2) Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar mengatakan, materi yang dibahas sama dengan pertemuan sebelumnya: kondisi keamanan tanah air.
- (3) Pasarancam posisi Presiden
- (4) Atasi narkoba, dibentuk BKND Mura
- (5) Penesan kena bacok

Kalimat (1) di atas adalah contoh konstruksi partisipial, yang sebenarnya juga merupakan gejala pemadatan struktur kalimat dengan menghilangkan konjungtor keterangan waktu *ketika*. Kalimat (2) merupakan contoh penggantian konjungtor *bahwa* dengan tanda koma setelah kata *mengatakan*. Kalimat (3) merupakan contoh pemadatan struktur morfologis yang berupa penghilangan prefiks *meng-*. Pada kalimat (4) terdapat dua gejala pemadatan sekaligus, yaitu penghilangan prefiks *meng-* pada *atasi* dan penghilangan preposisi/konjungtor *untuk* di depan kata *atasi* itu. Pada kalimat (5) terdapat juga penghilangan konjungtor *karena* pada kalimat.

Makalah ini membahas ihwal pemadatan struktur dalam media massa cetak, dan membahas mana pemadatan struktur yang dapat dianggap sebagai laras bahasa jurnalistik, mana pemadatan struktur yang tidak gramatikal. Sebagian data diambil dari penelitian Purnomo, dkk. (2001).

Pemadatan Struktur

Pemadatan struktur dalam media massa cetak merupakan hal yang banyak terjadi. Hal ini mungkin disebabkan oleh diberlakukannya prinsip ekonomi bahasa sebagai salah satu prinsip bahasa jurnalistik (media cetak) yang penting. Seperti dikemukakan sebelumnya, pe-

madatan atau penyederhanaan struktur itu terjadi, baik pada tingkat morfologi maupun pada tingkat sintaksis.

Pemadatan Struktur Morfologis

Pemadatan struktur morfologis pada media massa cetak dapat berupa penghilangan afiks, terutama pada judul atau subjudul berita, dan juga pada tubuh berita walaupun kemunculannya sangat sedikit. Penghilangan afiks pada judul/subjudul berita meliputi penghilangan prefiks *meng-*, penghilangan prefiks *ber-*, *ter-*, dan penghilangan konfiks *di/-kan*.

Pada umumnya media massa cetak dalam menampilkan judul/subjudul berita cenderung menghilangkan prefiks *meng-* pada verba. Penghilangan prefiks *meng-* tersebut dapat dilihat pada contoh judul (6)—(9) berikut.

- (6) BEM se-Jabotabek *protes* pembelian Sukhoi
- (7) Filipina-MILF *setujui* gencatan senjata
- (8) Dishub *kembangkan* sektor angkutan laut

Memang, afiks *meng-* merupakan prefiks yang paling sering dihilangkan pada judul/subjudul berita pada media massa cetak. Berdasarkan contoh-contoh itu, penghilangan prefiks *meng-* dapat terjadi, baik dengan atau tanpa akhiran *-i* atau *-kan*. Pada judul/subjudul berita, hanya prefiks *meng-* saja yang dihilangkan, sedangkan akhiran *-i* atau *-kan* tetap dibubuhkan pada verbanya.

Dalam judul/subjudul berita di media massa cetak terdapat pula penghilangan prefiks *ber-* sebagai upaya pemadatan struktur morfologis. Perhatikan contoh berikut.

- (9) Residivis *teriak* maling, polisi babak belur
- (10) Ingin *kerja* jutaan rupiah amblas
- (11) Ribuan mahasiswa *demo* di DPRD

Dalam judul/subjudul berita, konfiks *di/-kan* pada verba juga sering dihilangkan. Walaupun kemunculannya tidak banyak, terdapat gejala penghilangan konfiks ini sehingga verba itu mengalami pemadatan struktur morfologis berupa bentuk dasarnya saja. Inilah contohnya.

- (12) *Butuh* SIM berbasis internet
- (13) *Perlu* perda baru bagi penumpasan becak

Verba *butuh* dan *perlu* pada (49) dan (50) di atas itu sebenarnya memiliki bentuk lengkap *dibutuhkan* dan *diperlukan*. Walaupun demikian, gejala ini tampaknya tidak banyak terjadi. Apabila diamati dengan saksama, penghilangan konfiks *di/-kan* itu hanya terjadi pada kata *perlu* atau *butuh* dan sinonimnya, tidak terjadi pada verba lain.

Pemadatan Struktur Sintaktis

Pemadatan struktur sintaktis yang ditemukan pada media cetak (terbitan Palembang) ada beberapa jenis, meliputi (1) penghilangan preposisi pada frasa biasa, (2) penghilangan preposisi pada frasa idiomatis, (3) penghilangan konjungtor pada kalimat majemuk, (4) penghilangan unsur kalimat pada kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta (5) adanya konstruksi partisipial.

Penghilangan preposisi pada frasa biasa dapat terjadi pada berbagai jenis preposisi bahasa Indonesia. Penghilangan preposisi *dengan* pada frasa biasa tersebut dapat dilihat pada contoh berikut.

- (14) Hanya Ø mengirim e-mail kepada setiap orang yang ada di buku alamat dan akibatnya membuat server e-mail menjadi terlalu sibuk.
- (15) Pada babak kedua, ia akan bertemu Ø petenis peringkat 23, Nathalie D. dari Perancis.

Di samping preposisi *dengan*, preposisi *di*, *pada*, *kepada*, dan *ke* juga sering dihilangkan di media massa cetak. Preposisi *di* dapat bermakna 'tempat berada', sedangkan preposisi *pada* bermakna 'waktu berada'.

- (16) Pembahasannya, menurut dia apakah akan menambah atau tidak diperkirakan Ø akhir bulan ini.
- (17) Darman yang menyaksikan kejadian tersebut segera meminta pertolongan Ø warga sekitar dan membawa Daud ke RS Charitas.
- (18) Perbincangan berbelok Ø soal harga kebutuhan pokok

Preposisi lain yang juga sering dihilangkan adalah preposisi *agar*, *bagi*, dan *dari*. Inilah beberapa contohnya.

- (19) Demo pro kontra menuntut Ø Gus Dur mundur tak terbendung.
- (20) Hukuman mati Ø penginjak kitab suci Alquran.

- (21) Dana Ø pihak ketiga yang berhasil dihimpun BCA sampai tahun 2000 mencapai Rp85,95 trilyun,....

Selain pada preposisi biasa, penghilangan preposisi pada frasa idiomatis juga sering terjadi di media massa cetak. Preposisi pada frasa idiomatis yang sering dihilangkan yaitu preposisi *dengan*. Preposisi *dengan* biasanya secara idiomatis bergabung dengan kata *berkaitan*, *terkait*, *berhubungan*, *sehubungan*, *berhubung*, *dibandingkan*, *sesuai*, dan *bertepatan*. Penghilangan preposisi tersebut terdapat pada kalimat-kalimat berikut.

- (22) Terkait Ø itu, ketua DPRD Palembang yang juga mantan ketua DPC PDIP sepertinya keberatan untuk melakukan pelantikan.
(23) Namun berdasarkan data yang ada, jumlah tersebut menurun jika dibandingkan Ø data tahun 1999 lalu.
(24) LBH PAN: Musdalub sesuai Ø aturan.

Masih berkaitan dengan penghilangan preposisi pada frasa idiomatis, tampaknya preposisi *dari* pada konstruksi frasa idiomatis *terdiri dari* dan *akan* pada konstruksi frasa idiomatis *akan tetapi* juga sering dihilangkan. Penghilangan preposisi tersebut dapat dilihat pada contoh kalimat berikut.

- (25) Sebanyak 34 anggota Polres OKU naik pangkat, yang terdiri Ø 7 personil perwira pertama (Pama), 26 personil Bintara, 1 personil Tamtama.
(26) Ø Tetapi para karyawan itu sempat kecewa, lantaran tidak ada respons.

Di samping penghilangan preposisi *dari* atau *atas* pada frasa idiomatis *terdiri dari* atau *terdiri atas*, terdapat pula penghilangan preposisi *pada* pada frasa idiomatis *tergantung pada*. Contoh penghilangan preposisi itu dapat dikemukakan berikut ini.

- (27) Integrasi bangsa tergantung Ø pemimpinnya.
(28) Order percetakan masih tergantung Ø Pemerintah.

Pada kalimat majemuk konjungtor yang sering dihilangkan adalah konjungtor *bahwa* yang diganti atau tidak diganti dengan tanda

koma (,) setelah kata *mengatakan*. Contoh penghilangan konjungtor tersebut terdapat pada kalimat berikut.

- (29) Antasari mengatakan, Ø masyarakat yang meminta dirinya mengundurkan diri sebaiknya dilakukan dengan prosedur yang benar.

Penghilangan konjungtor *bahwa* terjadi pada klausa subordinatif yang menyatakan isi utaraan atau ujaran sumber berita. Ini terjadi pada kalimat tidak langsung. Konjungtor *bahwa* biasanya digunakan setelah kata *mengatakan*, *menyatakan*, *menjelaskan*, *mengungkapkan*, *menuturkan*, *berpendapat*, *beranggapan*, dan sebagainya yang senada dengan itu yang menyatakan utaraan atau ujaran sumber berita yang dikutip secara tidak langsung. Beberapa contoh lain dapat dikemukakan berikut ini.

- (30) Adnan Buyung berpendapat Ø seharusnya tersangka mendapatkan hak untuk didengar dan dikonfrontasi.
(31) Sementara itu, Kapolda Metro Jaya ... mengungkapkan, Ø pihaknya akan menurunkan 9000 anggota polisi
(32) Rizal mengakui, Ø membengkaknya angka defisit anggaran terkait dengan kenaikan suku bunga dan melamahnya nilai tukar rupiah.

Pada kalimat-kalimat itu dapat dilihat adanya penghilangan konjungtor *bahwa* sebelum klausa objektif yang menyatakan isi utaraan yang dinyatakan oleh sumber berita. Penghilangan konjungtor *bahwa* seperti itu hampir selalu terjadi pada kalimat tidak langsung.

Di samping penghilangan konjungtor *bahwa* yang banyak ditemukan, terdapat juga penghilangan konjungtor yang lain, seperti *karena*, *sebab*, atau *akibat*. Contoh berikut ini adalah judul berita.

- (33) Ø Ngutil, Bujangan Ditangkap Satpam.
(34) Sekarat Ø tersetrum listrik.

Pada dua kalimat itu dapat diamati adanya penghilangan konjungtor *karena* yang terdapat sebelum kata *ngutil* dan *tersetrum*.

Selain *karena*, konjungtor yang juga sering dihilangkan adalah konjungtor *ketika* pada klausa noninti yang menyatakan hubungan waktu. Perhatikan contoh berikut.

- (35) Ø Putri sulungnya ulang tahun, Marzuki jadi menteri
- (36) Kapoltabes Palembang, Kombes Pol. Drs. Abdurachman, Ø dikonfirmasi wartawan membenarkan peristiwa tersebut

Selain penghilangan konjungtor subordinatif, yaitu konjungtor pada kalimat majemuk subordinatif, terdapat pula penghilangan konjungtor pada kalimat majemuk koordinatif. Konjungtor yang dihapuskan itu adalah konjungtor *sedangkan* dan *dan* seperti yang terdapat pada contoh berikut.

- (37) Yang duitnya tebal diperhatikan, Ø yang biasa kurang diurus.
- (38) Bob Hasan kelabakan, Ø satu napi tewas, Ø satu sipir disandera.

Termasuk dalam pemadatan struktur adalah penghilangan unsur kalimat. Unsur kalimat berkaitan dengan unsur-unsur yang berfungsi sebagai subjek (S), predikat (P), objek (O), pelengkap (Pel.), dan keterangan (K). Penghilangan atau pelesapan unsur kalimat itu terjadi, baik pada kalimat tunggal maupun pada kalimat majemuk. Penghilangan unsur kalimat pada kalimat tunggal pada umumnya terdapat pada judul atau subjudul berita. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghematan.

Berikut disajikan contoh-contoh penghilangan unsur S dalam kalimat tunggal yang juga merupakan judul berita.

- (39) Ø Hendak memihak, malah dikeroyok
- (40) Ø Tunda keinginan bikin anak
- (41) Ø Sulit Mendeteksi Pengangguran di Lahat
- (42) Ø Diringkus Dua Jam Usai Merampok

Penghilangan unsur subjek terdapat pada kalimat (39)–(42). Pada kalimat (39) unsur subjeknya adalah seseorang, sedangkan kalimat (40) unsur subjeknya seorang artis. Pada kalimat (41) terdapat penghilangan unsur subjek, yaitu pemerintah daerah, sedangkan dalam kalimat (42) juga terdapat penghilangan unsur subjek, seorang penjahat.

Selain penghilangan unsur kalimat pada kalimat tunggal, terdapat pula penghilangan unsur itu pada kalimat majemuk. Pelesapan S sering terjadi pada kalimat majemuk yang diawali dengan konjungtor yang berfungsi sebagai konjungtor antarkalimat seperti, konjungtor *maka* dan *sebab* seperti yang terdapat pada kalimat berikut.

- (43) Maka, setelah Ø mendapatkan bukti cukup, dia digrebek di rumahnya.
- (44) Sebab, jika Ø hanya bermain imbang, apalagi kalah, PSG bakal tersisih.

Di samping pelesapan S, pada media massa cetak juga terdapat pelesapan O. Pelesapan O dapat dilihat pada contoh kalimat-kalimat berikut.

- (45) Maksudnya, secara pendanaan, pemerintah kabupaten membantu Ø .
- (46) Namun, jalur kendaraan tak dapat distop karena itulah satu-satunya jalan antarprovinsi di Sumsel yang bisa dilalui Ø.
- (47) Tetapi, gara-gara ulahnya itu, Abubakar ditangkap Ø Sabtu (17/2) sekitar 21 WIB di rumah P3N Pendopo.

Berdasarkan data di atas, unsur yang sering dilesapkan dalam kalimat majemuk adalah unsur S dan O. Pelesapan terjadi apabila S atau O merujuk pada kata yang sama yang telah disebutkan pada klausa atau kalimat sebelumnya.

Konstruksi partisipial sering ditemukan pada media massa cetak. Pada konstruksi tersebut terjadi pemadatan struktur dengan pelesapan konjuntor atau preposisi pada awal kalimat. Bentuk konstruksi itu ada yang aktif dan ada pula yang pasif. Berikut contoh konstruksi partisipial dimaksud.

- (48) Melihat rekannya tersungkur, petugas terpancing emosinya dan bertindak represif untuk membubarkan aksi.
- (49) Dibandingkan Ramadan tahun lalu, omset transaksi kredit tahun ini masih di bawah Ramadan tahun lalu.
- (50) Diduga melakukan penggelapan uang milik toko tempatnya bekerja, Syamsul digiring ke Poleskta Ilir Barat Palembang.

Berdasarkan data di atas, dapat dikemukakan bahwa pada konstruksi partisipial sering terjadi pemadatan struktur kalimat dengan pelesapan konjuntor atau preposisi pada awal kalimat.

Antara Laras dan Kesalahan

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa media massa memiliki laras sendiri dalam menggunakan bahasa. Walaupun

demikian, yang perlu didiskusikan adalah apakah dengan alasan “laras” pemakai bahasa boleh melanggar aturan tata bahasa yang sudah baku atau dibakukan. Masalah ini mungkin tidak mudah dijawab, tetapi beberapa pokok pikiran dapat dikemukakan.

Pertama, laras bahasa tidak boleh melanggar aturan tata bahasa. Ihwal laras sebenarnya adalah ihwal retorika, bukan gramatika. Oleh karena itu, laras apa pun tidak bisa meninggalkan aturan tata bahasa. Hal ini lebih-lebih berlaku pada bahasa tulis yang menghendaki keakuratan dan kejelasan ungkapan gagasan. Kejelasan dan keakuratan ungkapan gagasan itu akan dapat dijamin dengan patuhnya penulis pada aturan tata bahasa. Oleh karena itu, harus dibedakan secara tegas, mana variasi bahasa yang dapat dianggap sebagai laras dan mana variasi penggunaan bahasa yang menyimpang dari aturan tata bahasa.

Kedua, dalam hal pemadatan struktur bahasa media cetak, ada yang dapat dipandang sebagai laras karena tidak menyimpang dari aturan tata bahasa, ada pula yang tidak dapat dipandang sebagai laras karena menyimpang dari aturan tata bahasa. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

LARAS	KESALAHAN
• Penghilangan afiks pada judul/subjudul berita • Penghilangan afiks yang tidak menyebabkan perubahan makna	• Penghilangan afiks pada judul berita yang menyebabkan perubahan makna • Penghilangan afiks pada verba dasar terikat • Penghilangan afiks pada teks berita
• Penghilangan preposisi pada frasa biasa • Penghilangan konjungtor bahwa yang tidak mengganggu struktur • Penghilangan konjungtor koordinatif • Penggunaan konjungtor antarklausa untuk antar kalimat • Penghilangan konjungtor/preposisi pada konstruksi partisipial	• Penghilangan preposisi pada frasa idiomatik • Penghilangan konjungtor bahwa yang mengganggu struktur • Penggunaan konjungtor <i>kalaupun</i> untuk <i>bahwa</i>
• Pelepasan subjek pada klausa noninti	• Pelepasan subjek pada klausa inti • Penghilangan objek pada verba transitif

Penghilangan afiks pada judul/subjudul berita mungkin dapat dipandang sebagai laras jurnalistik asalkan, pertama, tidak mengubah makna atau tidak menimbulkan makna ganda dan, kedua, penghilangan

afiks itu tidak dilakukan pada afiks dasar terikat. Perhatikan contoh-contoh berikut.

- (51) PDI-P *bantah* kesepakatan 7 partai/*Bahas* memorandum II di Rakernas PAN
- (52) Pertamina *serahkan* penyaluran listrik ke PLN

Verba *bantah*, *bahas*, dan *serahkan* pada kalimat-kalimat itu mengalami penghilangan afiks *meng-*, tetapi tidak menyebabkan perbedaan makna jika dibandingkan dengan bentuk lengkapnya *membantah*, *membahas*, dan *menyerahkan*.

Walaupun pada umumnya prefiks *meng-* pada judul/subjudul mengalami pelesapan, pada bentuk-bentuk verba tertentu prefiks *meng-* itu tidak dihilangkan. Prefiks *meng-* yang tidak dihilangkan itu terdapat pada verba yang termasuk verba aktif intransitif walaupun pembubuhan prefiks *meng-* itu digunakan dalam bentuk tidak sempurna, yaitu hanya nasalnya (*ng-* atau *nge-*) saja. Hal ini diperkirakan karena pengaruh dari bahasa daerah, baik bahasa Melayu Palembang, bahasa Melayu dialek Jakarta, maupun bahasa Jawa, bahkan dengan menggunakan bahasa daerah itu secara utuh. Perhatikan contoh berikut.

- (53) *Ngaku* digaji Rp 315 juta, Dewan *ngotaki*
- (54) Mayat lelaki *ngapung* di lorong Kuto Baru
- (55) *Ngerampok* toko emas ditujuh massa/*Diduga* untuk modal *nikah*
- (56) *Diduga ngamuk*, dikapak wong

Pada contoh-contoh itu dapat dilihat adanya bentuk verba yang berprefiks nasal saja, baik yang dari bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, bahkan ada kata bahasa daerah digunakan secara utuh. Kata *ngaku*, *ngapung*, dan *ngamuk* adalah verba yang dibentuk dengan prefiks nasal yang merupakan bentuk tidak sempurna dari prefiks *meng-*, atau bisa juga dianggap sebagai kosakata bahasa daerah yang digunakan secara utuh, yang kebetulan bentuk dasarnya juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Bentuk verba bahasa Indonesia yang benar adalah *mengaku*, *mengapung*, dan *mengamuk*. Halnya sedikit berbeda dengan kata *ngerampok*. Kata ini adalah verba yang bentuk dasarnya adalah bahasa Indonesia, tetapi prefiksnya adalah prefiks yang berasal dari bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu dialek Jakarta. Bentuk baku untuk kata *ngerampok* adalah *merampok*. Di samping itu, ada verba bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu Palembang yang digunakan secara utuh,

yaitu kata *ngotaki* 'membohongi' dan *ngatoi* 'mengejek' atau 'mengolok-olok'.

Di samping itu, ada verba yang harus ditulis lengkap dengan afiks *meng-* seperti pada contoh berikut.

- (57) Diperlakukan tak adil, *mengadu* ke Kapolda
- (58) Diringkus dua jam usai *merampok*
- (59) Mahasiswa UMP *meninggal mendadak*
- (60) Omzet pedagang pasar atas *melemah*
- (61) Sembilan gedung SEN di Palembang *memperhatikan*

Apabila diperhatikan, verba dalam bentuk yang lengkap seperti pada (57)–(61) di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah verba yang tidak dapat digunakan tanpa prefiks *meng-*, kedua verba yang apabila digunakan tanpa prefiks *meng-* akan menimbulkan makna yang berbeda. Kalimat-kalimat berikut adalah kalimat di atas yang ditulis kembali dengan menghilangkan prefiks *meng-* pada verbanya.

- (62) Diperlakukan tak adil, **adu* ke Kapolda
- (63) Diringkus dua jam usai **rampok*
- (64) Mahasiswa UMP **tinggal* mendadak
- (65) ?Omzet pedagang pasar atas *lemah*
- (66) **Sembilan* gedung SDN di Palembang *perhatikan*

Kalimat (62) menjadi tidak berterima karena kata *adu* yang merupakan verba intransitif tidak dapat digunakan tanpa prefiks *meng-*. Kata ini dapat digunakan tanpa prefiks hanya dalam bentuk majemuk seperti pada *adu domba*. Pada (63) kata *rampok* tanpa prefiks dapat berupa nomina, dapat pula berupa verba transitif sehingga kalimat seperti *Ditangkap dua jam usai rampok bank* dapat diterima. Pada (64) kata *tinggal* berbeda maknanya dengan kata *meninggal*; *tinggal* 'bertempat tinggal, beralamat', sedangkan *meninggal* bermakna 'meninggal dunia, mati'. Dengan begitu, kata *tinggal* tidak dapat digunakan dalam konteks kalimat itu. Kata *lemah* pada kalimat (65) memang masih ada hubungan makna dengan kata *melemah*, tetapi sedikit berbeda; *melemah* 'menjadi lemah' yang berbeda dengan 'lemah' saja. Pada (66) kata *memperhatikan* sebenarnya dapat digunakan tanpa prefiks tetapi harus ada objeknya, misalnya *memperhatikan pemerintah*, tetapi bila digunakan tanpa objek prefiks *meng-* harus digunakan.

Selain prefiks *meng-*, prefiks *ber-* juga dapat dihilangkan dalam judul/subjudul berita. Perhatikan contoh-contoh berikut.

- (67) Residivis *teriak* maling, polisi babak belur
- (68) Ingin *kerja*, jutaan rupiah amblas
- (69) Ribuan mahasiswa *demo* di DPRD

Hal itu berbeda dengan penggunaan prefiks *ber-* pada contoh-contoh berikut yang ditulis secara lengkap oleh wartawan pada judul/subjudul berita di bawah ini.

- (70) Kloter 34 *berangkat* 15 Februari
- (71) Pangkat Baru Resmi *Berlaku*
- (72) Pagi kepung istana, malam duduki DPR/*Bertahan* sampai Gus Dur mundur
- (73) Tewas, Sakit Gigi *Berkumur* Air Aki

Pada kalimat (70)—(73) di atas, verba berprefiks *ber-* ditulis secara lengkap. Apabila prefiks *ber-* di atas itu dihilangkan, kalimat menjadi seperti kalimat berikut ini.

- (74) *Kloter 34 *angkat* 15 Februari
- (75) *Pangkat baru resmi *laku*
- (76) Pagi kepung istana, malam duduki DPR/?*Tahan* sampai Gus Dur mundur
- (77) *Tewas, sakit gigi *kumur* air aki

Pada (74), penghilangan prefiks *ber-* menyebabkan kalimat itu tidak berterima karena verba *berangkat* memiliki makna 'bertolak' atau 'bergerak dari suatu tempat untuk bepergian' yang berbeda atau tidak berhubungan dengan bentuk dasar *angkat*. Pada (75) kata *berlaku* memiliki makna yang berbeda dengan kata *laku*, *berlaku* 'terjadi' atau 'menjadi hukum positif', sedangkan *laku* 'terjual'. Oleh karena itu, verba *laku* tidak berterima apabila digunakan dalam konteks kalimat itu. Sementara itu, pada (76), kata *bertahan* memiliki makna yang berbeda dengan *tahan* walaupun masih berhubungan dan dapat digunakan dalam konteks kalimat itu. Akan tetapi, yang dimaksud oleh berita itu adalah *bertahan* dalam arti tidak beranjak atau bergerak dari tempat itu sampai targetnya tercapai, bukan *tahan* dalam arti kuat menahan. Pada (77) kata *kumur* tidak dapat digunakan tanpa prefiks *ber-* sebagai verba sehingga bentuk *kumur* tidak berterima dalam konteks kalimat itu.

Apabila verba dengan prefiks *meng-* dan *ber-* cenderung mengalami pemadatan bentuk morfologis pada judul/subjudul berita dengan penghilangan prefiks itu, sebaliknya verba dengan prefiks *di-* tidak dapat

mengalami pemadatan struktur jika digunakan pada judul/subjudul berita. Hal tersebut dapat dilihat pada judul/subjudul berikut.

- (78) Kantor MA *dilempari* tomat, Marzuki *diminta* mundur/Gus Dur *dianggap* lamban
- (79) Jakgung-Jampidsus *diadukan* ke polisi/*Dituduh* merampas kemerdekaan Ginanjar
- (80) Mobil *disalip*, saling pukul

Pada judul (78) jika prefiks *di-* dihapuskan pada kata *dilempari*, makna menjadi tidak logis, baik dengan maupun tanpa sufik *-i*. Sementara itu, pelepasan prefiks *di-* pada kata *diminta* dan *dianggap* akan mengubah makna sehingga yang diminta mundur bukan Marzuki dan yang dianggap lamban bukan Gus Dur. Pada judul (79) pelepasan prefiks *di-* pada verba *diadukan* akan membuat kalimat itu tidak berterima karena kalimat itu akan menjadi aktif transitif yang tidak berobjek. Kata *dituduh* jika tanpa prefiks *di-* akan menyebabkan makna kalimat itu berubah menjadi 'jakgung-jampidsus mengadukan seserang kepada polisi' padahal yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu Jakgung-Jampidsus justru diadukan ke polisi (oleh pihak Ginanjar). Pada (80), penghilangan prefiks *di-* pada kalimat Mobil ***disalip***, saling pukul akan membuat kalimat itu tidak berterima karena kalimat itu akan menjadi kalimat aktif transitif tanpa objek.

Selain prefiks *di-*, prefiks lain yang tidak dapat dihilangkan untuk memadatkan struktur morfologis pada judul/subjudul berita adalah prefiks *ter-* seperti pada contoh berikut.

- (81) *Dikeroyok*, warga OPI *terkapar*
- (82) Kompor meledak, 22 unit rumah musnah *terbakar*
- (83) Kades Segayam *terancam* dipecat

Pada judul/subjudul (81)–(83) itu terdapat verba berprefiks *ter-*, yaitu pada kata *terkapar*, *terbakar*, dan *terancam*. Sebagaimana yang terjadi pada verba berprefiks *di-*, prefiks *ter-* juga tidak dapat dihilangkan untuk memadatkan struktur morfologis. Pada (81), jika prefiks *ter-* dihilangkan akan membuat kalimat itu tidak berterima, demikian juga dengan kalimat (82). Sementara itu, pada (83), penghilangan prefiks *ter-* akan mengubah makna kalimat itu menjadi 'kades segayam mengancam dipecat' padahal dalam berita itu yang terjadi justru Kades Segayam itu yang *terancam* akan dipecat karena melakukan kesalahan.

Apabila prefiks *meng-* dan *ber-* dapat dihilangkan dalam judul/subjudul berita, tidak demikian halnya apabila terjadi pada teks berita. Dalam teks berita, afiks harus digunakan secara lengkap kecuali pada verba dasar yang dapat langsung digunakan (Alwi, dkk. 1998). Di bawah ini dikemukakan contoh penghilangan afiks pada verba predikat yang terdapat pada teks berita.

- (84) Informasi yang dihimpun di RSMH Palembang, malam kejadian Suhardi, isteri, dan anaknya tengah *istirahat*.
- (85) Setiap truk bermuatan barang termasuk mobil pribadi, keluar masuk kawasan terpaksa *hati-hati*.
- (86) Keduanya *jalan kaki* menuju rumah masing-masing.
- (87) Apalagi kalau hujan turun, beberapa lubang akan tergenang air, jalannya sendiri *jadi* sangat licin.
- (88) Tahun ini Umar *punya* estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 3,8 persen.

Pada contoh (84)–(88) di atas itu terdapat verba tanpa prefiks yang digunakan. Apabila dikembalikan pada bentuk lengkapnya, verba-verba itu seharusnya berprefiks *ber-*, atau *meng-*, dan *meng-/i*. Pada (84)–(86), verba-verba di dalam kalimat itu seharusnya berprefiks *ber-*; kata *istirahat*, *hati-hati*, dan *jalan kaki* seharusnya *beristirahat*, *berhati-hati*, dan *berjalan kaki*. Sementara itu, pada kalimat (87) dan (88), verbanya harus berprefiks *meng-* dan *meng-/i*; kata *jadi* dan *punya* seharusnya *menjadi* dan *mempunyai*.

Pada kalimat majemuk, konjungtor yang sering dihilangkan adalah konjungtor *bahwa* yang diganti atau tidak diganti dengan tanda koma (,). Penghilangan konjungtor *bahwa* terjadi pada klausa subordinatif yang menyatakan isi utaraan atau ujaran sumber berita. Ini terjadi pada kalimat tidak langsung. Konjungtor *bahwa* biasanya digunakan setelah kata *mengatakan*, *menyatakan*, *menjelaskan*, *mengungkapkan*, *menuturkan*, *berpendapat*, *beranggapan*, dan sebagainya yang senada dengan itu yang menyatakan utaraan atau ujaran sumber berita yang dikutip secara tidak langsung. Beberapa contoh lain dapat dikemukakan berikut ini.

- (89) Iskandar juga menuturkan Ø aksi penodongan itu dilakukannya bersana enam orang temannya.
- (90) Adnan Buyung berpendapat Ø seharusnya tersangka mendapatkan hak untuk didengar dan dikonfrontasi.

- (91) Rizal mengakui, Ø membengkaknya angka defisit anggaran terkait dengan kenaikansuku bunga dan melamahnya nilai tukar rupiah.

Pada kalimat-kalimat itu dapat dilihat adanya penghilangan konjungtor *bahwa* sebelum klausa objektif yang menyatakan isi dari utaraan yang dinyatakan oleh sumber berita. Penghilangan konjungtor *bahwa* seperti itu hampir selalu terjadi pada kalimat tidak langsung.

Memang, secara formal, sesuai dengan pemakaian bahasa tulis yang baku, penghilangan konjungtor *bahwa* itu dapat merancukan apakah kalimat itu kalimat langsung atau tidak langsung. Disebut kalimat langsung tidak tepat karena tidak menggunakan tanda petik langsung dari sumber berita; disebut kalimat tidak langsung juga kurang tepat karena tidak ada penanda utaraan tidak langsung, yaitu konjungtor *bahwa*. Akan tetapi, kerancuan bentuk itu relatif tidak mengganggu kerancuan semantis.

Hal yang berbeda adalah penghilangan konjungtor *bahwa* pada kalimat (92) dan (93) berikut. Kedua kalimat itu tidak dapat dikembalikan kepada bentuk lengkapnya dengan menambahkan konjungtor *bahwa* begitu saja tanpa perubahan struktur. Hal ini terjadi karena kerancuan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung memengaruhi pula semantisnya. Perhatikan kalimat (94) dan (95) yang dilengkapi dengan konjungtor *bahwa* sesudah kata *menjelaskan* dan *mengatakan*.

- (92) Tentang besaran-besaran moneter yang diubah dalam APBN 2001, Rizal menjelaskan Ø ada beberapa poin.
(93) Menanggapi usulan ini, salah satu pengusaha pengadaan barang yang dihubungi mengatakan setuju dengan usulan tersebut.
(94) Tentang besaran-besaran moneter yang diubah dalam APBN 2001, Rizal menjelaskan **bahwa* ada beberapa poin.
(95) Menanggapi usulan ini, salah satu pengusaha pengadaan barang yang dihubungi mengatakan **bahwa* setuju dengan usulan tersebut.

Kalimat (94) dan (95) di atas tidak gramatikal karena pada klausa setelah konjungtor *bahwa* tidak memiliki subjek. Di sinilah terjadinya kerancuan semantis antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat yang benar, baik kalimat langsung maupun kalimat

tidak langsung, yang merupakan perbaikan dari kalimat (92) dan (93) adalah sebagai berikut.

- (96) Tentang besaran-besaran moneter yang diubah dalam APBN 2001, Rizal menjelaskan bahwa hal itu ada beberapa poin.
- (97) Tentang besaran-besaran moneter yang diubah dalam APBN 2001, Rizal menjelaskan, "Ada beberapa poin."
- (98) Menanggapi usulan ini, salah satu pengusaha pengadaan barang yang dihubungi mengatakan *bahwa ia* setuju dengan usulan tersebut.
- (99) Menanggapi usulan ini, salah satu pengusaha pengadaan barang yang dihubungi mengatakan, "Saya setuju dengan usulan tersebut."

Yang menarik juga kadang-kadang dalam jurnalsitik itu penggunaan konjungtor *bahwa* itu tetap dipertahankan, seperti kalimat berikut ini.

- (100) Mengenai memorandum, Ichlasul menilai bahwa hal itu mengarah pada *impeachment* yang merupakan satu-satunya prosedur untuk mengganti presiden di tengah jalan.
- (101) Sedangkan anggota Senat Filipina, Oscar Mareno menyatakan bahwa Buenaventura harus segera mundur karena kepercayaan publik atas kepemimpinannya sudah luntur.

Di samping penghilangan konjungtor *bahwa* yang banyak ditemukan, terdapat juga penghilangan konjungtor yang lain, seperti *karena*, *sebab*, atau *akibat*. Perhatikan contoh berikut ini.

- (102) Ø Ngutil, Bujangan Ditangkap Satpam.

Pada kalimat itu dapat diamati adanya penghilangan konjungtor *karena* yang terdapat sebelum kata *ngutil*.

Kalimat-kalimat di bawah ini masih berkaitan dengan penghilangan konjungtor *karena*, tetapi agak berbeda. Apabila pada kalimat (102) konjungtor yang dihilangkan terletak pada awal kalimat, pada kalimat-kalimat berikut penghilangan itu terdapat pada tengah kalimat. Dengan kata lain, apabila pada kalimat (102) klausa noninti terletak sebelum klausa inti, pada kalimat-kalimat berikut ini klausa noninti terletak sesudah klausa inti dengan konjungtor *karena* dihilangkan. Perhatikan contoh berikut.

- (103) Ibu pingsan, Ø anak kandung hancurkan dagangan.
 (104) Dua remaja Siring Agung ditangkap, Ø cabuli bocah.

Pada kalimat di atas itu dapat dilihat adanya penghilangan konjungtor *karena* atau *sebab* pada awal klausa noninti. Apabila konjungtor itu dikembalikan, kalimat-kalimat itu akan menjadi seperti di bawah ini.

- (105) Ibu pingsan *karena* anak kandung hancurkan barang dagangan.
 (106) Dua remaja Siring Agung ditangkap *karena* cabuli bocah.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana membedakan penghilangan konjungtor *karena* pada kedua kelompok ini. Jika dilihat dari bentuk ortografisnya, keduanya tampak sama, yaitu dengan membubuhkan tanda koma antara klausa inti dan klausa noninti entah klausa inti itu di depan atau di belakang. Tanpa membaca isi beritanya, pembaca bisa salah paham menghadapi kedua bentuk ini. Bandingkan kalimat (102) di atas yang dikutip kembali di bawah ini.

- (107) *Ngutil*, bujangan ditangkap Satpam.
 (108) Ibu pingsan, anak kandung hancurkan dagangan.

Memang, secara logika dapat dinalarkan bahwa pada kalimat (107) *ngutil* (mencuri) menjadi penyebab *bujangan ditangkap satpam*, semenantara pada kalimat (108) *ibu pingsan* merupakan akibat dari *anak kandung hancurkan barang dagangan* yang menjadi penyebab. Akan tetapi, pada kalimat (107) di atas hubungan sebab-akibat ini bisa berlaku sebaliknya, yaitu *Ibu pingsan karena anak kandung hancurkan dagangan*, atau *karena ibu pingsan, anak kandung hancurkan dagangan*.

Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa dalam laras jurnalistik itu sering ditemui penggunaan konjungtor yang salah. Hal ini terjadi karena konjungtor yang digunakan itu adalah konjungtor yang menghubungkan antarklausa, tetapi digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang terpisah. Akibatnya, yang terjadi adalah kalimat yang didahului oleh konjungtor antarklausa. Untuk itu, perhatikan contoh kalimat berikut.

- (109) *Sedangkan* anak semata wayangnya itu tetap bersama suaminya.

- (110) *Sehingga* wanita ini tidak pernah membedakan kedua anak tirinya tersebut.
- (111) *Karena* kita kan punya aturan.

Bagaimana dengan pelesapan unsur kalimat? Pada penghilangan unsur kalimat, yang perlu diperhatikan adalah pelesapan unsur S, terutama pada teks berita. Perhatikan contoh berikut.

- (112) Maka, setelah Ø_i mendapatkan bukti cukup, dia_j digrebek di rumahnya.
- (113) Sebab, jika Ø_i hanya bermain imbang, apalagi kalah, PSG_i bakal tersisih.

Pada kalimat (112) pelesapan S terjadi pada klausa pertama antara kata *setelah* dan *mendapatkan*. Pada kalimat itu konjungtor *maka* berfungsi sebagai konjungtor antarkalimat yang menghubungkan kalimat itu dengan kalimat sebelumnya. Subjek yang dilesapkan pada kalimat tersebut merujuk pada kata *polisi* yang berbeda dari pronomina *dia* yang ada pada kalimat itu. Sementara itu, pada kalimat (113) pelesapan S terdapat pada klausa pertama tetapi unsur yang berfungsi sebagai S tersebut muncul pada klausa kedua. Oleh sebab itu, pada kalimat (112), subjek klausa pertama harus dimunculkan, sedangkan pada kalimat (113) bisa tidak dimunculkan.

Di samping penghilangan unsur S, yang juga perlu diperhatikan adalah penghilangan unsur O pada kalimat yang predikatnya berupa verba transitif. Perhatikan contoh berikut.

- (114) Maksudnya, secara pendanaan, pemerintah kabupaten membantu Ø.

Kalimat (114) yang diawali dengan kata *maksudnya* menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, O yang dilesapkan berkaitan dengan unsur yang sama, yang telah diungkapkan atau ditulis pada kalimat sebelumnya. Hal ini terbukti jika kalimat sebelumnya dirunut kembali, seperti yang terlihat pada kalimat berikut.

- (115) Pemkab Mura tak akan lepas tangan dengan perubahan status *Kotif Lubuk Linggau* menjadi kota. Maksudnya, secara pendanaan, pemerintah kabupaten membantu Ø.

Dengan merunut kembali kalimat sebelumnya terbukti bahwa O yang dihapuskan pada kalimat (114) terdapat pada kalimat sebelumnya yaitu *Kotif Lubuk Linggau*. Oleh karena itu, unsur yang sama yang terdapat pada kalimat sebelumnya dapat dihapuskan pada kalimat berikutnya, dalam hal ini, unsur O-nya. Walaupun demikian, karena kalimat kedua itu merupakan kalimat yang mandiri, untuk memperjelas objeknya dapat dilakukan dengan menambahkan pronomina *-nya* pada verba *membantu*.

Termasuk ke dalam pemadatan struktur ini adalah konstruksi partisipial. Pada media massa, konstruksi partisipial ini terjadi dengan penghilangan preposisi atau konjungtor sebelum predikat klausa tergantung. Inilah beberapa contohnya.

- (116) Melihat rekannya tersungkur, petugas terpancing emosinya dan bertindak represif untuk membubarkan aksi.
- (117) Dibandingkan Ramadan tahun lalu, omset transaksi kredit tahun ini masih di bawah Ramadan tahun lalu.

Walaupun demikian, tampaknya terdapat ketidakkonsistenan pada media massa cetak di Palembang. Selain terdapat konstruksi partisipial, terdapat pula bentuk konstruksi lengkap walupun kemunculannya sangat sedikit. Maksudnya, kalimat dalam laras jurnalistik itu telah menggunakan struktur yang benar (baku), seperti pada contoh di bawah ini.

- (118) Untuk mengatasi kondisi itu, PLN harus meningkatkan pembelian daya listrik yang dihasilkan oleh PLTU Paiton Swasta I dari 10% menjadi 45%.
- (119) Diduga karena emosi, Bensi mengambil pisau dan menghajar temannya sehingga mengalami luka tusuk di bahu dan jari kanan.

Pada kalimat (118) terdapat pengantar kalimat *untuk mengatasi kondisi itu*, telah memiliki struktur yang benar sebagai pengisi slot klausa subordinatif (noninti), yaitu dengan hadirnya preposisi *untuk*. Sementara itu, pada kalimat (119), klausa subordinatif penanda keterangan sebab juga telah dilengkapi dengan konjungtor *karena*.

Berdasarkan data di atas, dapat dikemukakan bahwa pada konstruksi partisipial sering terjadi pemadatan struktur kalimat dengan pelepasan konjungtor atau preposisi pada awal kalimat. Kehadiran konjungtor atau preposisi pada konstruksi tersebut bersifat *mana suka (optional)* sebagai laras jurnalistik. Hal ini terbukti dengan pelepasan

dan atau pemunculan konjungtor atau preposisi pada konstruksi tersebut menjadikan kalimat tetap gramatikal.

Penutup

Untuk menutup uraian ini dikemukakan hal-hal berikut. Pertama, pemadatan struktur secara umum dapat dipandang sebagai ciri laras jurnalistik, khususnya media massa cetak. Kedua, pemadatan struktur itu ada yang dapat dipandang sebagai laras bahasa karena tidak melanggar kaidah tata bahasa, ada juga yang tidak dapat dipandang sebagai laras bahasa karena melanggar kaidah tata bahasa. Dalam hal yang terakhir itu, penggunaannya harus dihindari; yang harus digunakan adalah struktur yang benar. Beberapa hal mungkin belum sepenuhnya dapat disepakati pada kesempatan ini, seperti penghilangan preposisi pada frasa idiomatis, penggunaan konjungtor bahwa secara eksplisit pada konstruksi tertentu, dan tidak dilesapkannya unsur kalimat pada konstruksi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H., S. Dardjowidjojo dan A.M. Moeliono. 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chaer, A. 1995. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, P. 1998. "Peran Pers dalam Pemasyarakatan Hasil Pembakuan Bahasa Indonesia." Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: 26—30 Oktober 1998.
- Kridalaksana, H. 1989. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mujiyanto, S.Y. 1995. "Jatidiri Bahasa Jurnalistik: Ihwal Pemakaian dan Karakteristiknya." dalam Sudaryanto dan Sulistiyo. Ed. *Ragam Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang: Penerbit Citra Almamater.
- Purnomo, M.E., S. Indrawati, Ernalida, J. Endardi, dan D. Susilawati. 2001. "Bahasa Laras Jurnalistik Media Massa Cetak Terbitan Palembang." Laporan Penelitian belum diterbitkan. Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Selatan dan Balai Bahasa Palembang.

- Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII. Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: 26—30 Oktober 1998.
- Samsuri. 1985. *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sastra Hudaya.
- Soewandi, A.M.S. 1985. "Ragam Jurnalistik: Apa, Mengapa, di Mana?" dalam Sudaryanto dan Sulistiyo. Ed. *Ragam Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang: Penerbit Citra Almamater.
- Soewarno. 1995. "Peranan Media Cetak dalam Pengembangan Bahasa Indonesia." dalam Sudaryanto dan Sulistiyo. Ed. *Ragam Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang: Penerbit Citra Almamater.
- Sudaryanto. 1990. *Aneka Konsep Kedataan Lingual dalam Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sudaryanto. 1993. *Motode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sudaryanto. 1995. "Ragam Jurnalistik Bahasa Indonesia sebagai Ragam Bahasa Kreatif." Dalam Sudaryanto dan Sulistiyo. Ed. *Ragam Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang: Penerbit Citra Almamater.
- Sugono, D. 1995. *Pelesapan Subjek dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sugono, D. 1998. "Struktur Kalimat Bahasa Indonesia: Penerapan dan Pemasyarakatannya." Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: 26—30 Oktober 1998.
- Sumarsono. 2000. "Kosakata Bahasa Bali dalam Koran Lokal Bali Post." *Linguistik Indonesia*. Tahun 18, No. 1: 51—60.
- Tobing, S. 1998. "Pemanfaatan Media Radio dan Televisi dalam Pembinaan Bahasa Indonesia." Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: 26—30 Oktober 1998.

MENGKAJI ULANG PERAN MEDIA MASSA DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA

Kasmansyah
Universitas Sriwijaya

1. Pendahuluan

Dalam era global sekarang peran media massa (media massa cetak dan media massa elektronik) dirasakan sangat penting dalam mewarnai kehidupan masyarakat kita. Sebagian besar masyarakat sudah terbiasa menonton acara televisi, membaca surat kabar, tabloid, dan majalah, serta mendengarkan siaran radio. Kebiasaan menonton acara televisi—terutama televisi swasta membaca surat kabar, tabloid, dan majalah, serta mendengarkan siaran radio itu secara faktual menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat. Hal itu tampak dengan berkembang pesatnya jumlah stasiun televisi, jumlah penerbitan media massa cetak, dan jumlah stasiun radio siaran di Indonesia. Secara kuantitas, perkembangan stasiun televisi, penerbitan media massa cetak, dan stasiun radio itu, tentunya sangat mengembirakan. Namun, apabila dikaitkan dengan peran media massa terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia masih perlu dikaji ulang.

Perlunya pengkajian ulang peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia didasarkan pada kenyataan cukup banyak media massa, baik media massa cetak, maupun media massa elektronik berperan sebagai sarana informasi dan hiburan saja, yang lebih mengutamakan segi bisnis sehingga cenderung mengabaikan media massa sebagai sarana pembinaan bahasa Indonesia.

Upaya pembinaan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, satu di antaranya melalui media massa, baik media massa cetak (surat kabar, majalah, buletin, tabloid, atau jurnal), maupun media massa elektronik (radio siaran, atau televisi). Pembinaan bahasa Indonesia melalui media massa dapat berwujud pembinaan sikap dan kemampuan berbahasa (berbicara, menulis) yang dikaitkan dengan berbagai aktivitas kebahasaan, sedangkan hasil pengembangan bahasa seperti pembakuan ejaan dan tata bahasa, pemekaran kosakata, dan pembentukan istilah-istilah baru merupakan hal yang perlu dipublikasikan (Taha, 1998; Sunaryo dan Sri Sukesi Adiwimarta, 1998; Kasmansyah, 2003).

Secara faktual pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dapat berwujud adanya materi khusus atau rubrik khusus bahasa Indonesia, seperti Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI, atau di RRI beberapa waktu yang lalu. Selain itu, pembinaan dan pengem-

bangun bahasa dapat pula merupakan aplikasi pemakaian bahasa Indonesia dalam setiap rubrik atau materi acara media massa, seperti dalam penulisan berita, artikel, tajuk rencana, pojok, cerita pendek, sinema elektronik (sinetron), film, kartun, atau siaran berita di televisi, serta acara dialog di televisi atau radio. Pembinaan bahasa melalui rubrik khusus pembinaan bahasa Indonesia tampaknya tidak begitu berhasil karena kenyataannya yang menonton atau mendengar acara tersebut sangat terbatas—bahkan cenderung sama sekali tidak ditonton atau didengarkan (Adhitama, 1998; Taha, 1998).

Tulisan tentang peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia belum banyak ditulis orang, walaupun ada baru sebatas pemakaian bahasa Indonesia di media massa, seperti yang ditulis oleh Adhitama (1998), Astraatmaja (1998), Ishadi Sk (1998), Taha (1998) dalam bentuk makalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Sebagian besar tulisan itu menyimpulkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa—terutama media massa cetak—cenderung memprihatinkan. Saat ini, hal yang sama juga masih berlaku dan lebih memprihatinkan karena kalau dulu kesalahan pemakaian bahasa Indonesia didominasi media massa cetak, sedangkan sekarang media massa elektronik termasuk juga di dalamnya (Kasmansyah, 2003).

Jika mengacu kepada fakta itu, tampaknya media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia belum berperan seperti yang diharapkan. Hal itu sangat erat kaitannya dengan adanya perubahan era, dari era orde baru ke era reformasi dalam suasana era globalisasi. Dulu, organisasi yang berkaitan dengan media masaa tidak banyak, kita mengenal Departemen Penerangan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), yang saat itu sangat berperan terhadap kelangsungan hidup penerbit surat kabar, stasiun televisi, dan stasiun radio siaran. Hal seperti itu, tidak mungkin lagi terjadi sekarang, karena media massa cenderung diberi kebebasan, termasuk dalam menentukan organisasi yang menaungi media massanya. Saat ini ada 43 organisasi pers, dan 23 lembaga pengawasan pers, yang kesemuanya independen (daftar organisasi pers terlampir). Banyaknya organisasi pers dan lembaga pengawasan pers itu berdampak pula terhadap pengontrolan setiap aktivitas media massa yang ada, termasuk pengontrolan terhadap peran media massa dalam pembinaan bahasa Indonesia.

Tulisan ini mencoba mengkaji ulang peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam tulisan ini akan dikemukakan keadaan bahasa Indonesia dalam media massa, peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indo-

nesia, serta pemikiran tentang alternatif kebijakan, strategi, maupun sistem--pendidikan, rekrutmen tenaga kerja di bidang media massa, dan bidang-bidang lain--yang berkait dengan pembinaan bahasa Indonesia dan terakhir penutup.

2. Bahasa Indonesia dalam Media Massa

Pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa perkembangannya tergolong pesat, sejalan dengan berkembang pesatnya jumlah media massa yang ada. Namun, kualitas pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa tampaknya untuk hal-hal tertentu menunjukkan adanya penurunan. Berikut ini secara berurutan pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa cetak dan media massa elektronik. Pada dasarnya pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa cetak tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dikemukakan Taha (1998), Sunaryo dan Sri Sukesu Adiwimarta (1998), Adhitama (1998), seperti: (1) banyaknya kesalahan penggunaan ejaan, diksi, kalimat efektif, pengembangan paragraf; (2) bahasa Indonesia yang digunakan dalam media massa cetak, termasuk juga media massa elektronik, cenderung lebih banyak menggunakan kata atau bahasa bentuk pengasaran (*disfemisme*) yang merupakan kebalikan bentuk eufemisme (penghalusan) (Ali Masri, 2003); (3) adanya kecenderungan bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia, hal itu terlihat dari aktivitas kebahasaan yang ada, mereka lebih merasa bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah walaupun sebenarnya situasi dan kondisi saat itu sangat memungkinkan; (4) apabila bahasa yang digunakan dalam media massa cetak itu dianalisis, kemudian dikritik atau disalahkan, mereka berkilah gaya jurnalistik berbeda dengan kaidah bahasa Indonesia--walaupun sebenarnya antara gaya jurnalistik dan salah dalam penggunaan bahasa Indonesia sangat berbeda konteks (Eko Purnomo, 2003).

Pemakaian bahasa Indonesia yang digunakan radio siaran tampaknya: (1) banyak menggunakan bahasa gaul, bahasa daerah tertentu, bahkan sering pula ditemukan menggunakan bahasa lisan yang campur aduk (seperti mencampuradukkan penggunaan bahasa gaul, bahasa asing, dan bahasa Indonesia dalam konteks yang sama); (2) penggunaan bahasa Indonesia tidak begitu memperhatikan etika bahasa yang santun--mereka cenderung menyenangi hal-hal yang vulgar, *disfemisme*, dan berbau pornografi atau pornoaksi; (3) ada anggapan bahwa siaran radio bila menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap kaku, tidak komunikatif, dan berkesan kampungan.

Pemakaian bahasa Indonesia di televisi Indonesia--terutama televisi swasta, hal yang sangat menonjol dalam pemakaian bahasa

Indonesia adalah: (1) adanya kecenderungan bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia, mereka lebih merasa bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, hal itu seperti yang sering kita lihat di beberapa stasiun televisi (Metro TV, SCTV, TVRI) penggunaan nama judul acara sering menggunakan bahasa Inggris; (2) adanya diskriminasi pemakaian bahasa, ada kecenderungan bahasa Inggris lebih diutamakan dibandingkan dengan bahasa asing lainnya—walaupun bahasa asing itu tergolong bahasa asing yang internasional; (3) film asing yang berbahasa Inggris diterjemahkan menggunakan teks bahasa Indonesia, sedangkan film asing lainnya disulih suara walaupun bahasa asli film tersebut termasuk kategori bahasa asing yang internasional, seperti bahasa Arab, Cina, Perancis, dan Rusia; (4) sikap dan etika berbahasa cenderung dilanggar, terutama dalam menggunakan kata sapaan hormat dan kesopanan dalam berbahasa (Kasmansyah, 2003).

Jika merujuk pada pemakaian bahasa di televisi, tampaknya masalah sulih suara film asing nonberbahasa Inggris perlu pengkajian yang mendalam. Hal ini berkaitan dengan “konsep bahasa menunjukkan bangsa” saat ini cenderung sudah tidak sepenuhnya dapat diterima lagi sebagai slogan bahasa Indonesia yang sejak zaman Raja Ali Haji digunakan seperti yang pernah diungkapkan Usman (1970) beberapa tahun yang lalu. Berikut ini dikemukakan hal-hal yang menjadi kendala dalam mewujudkan peran media massa (khususnya televisi) dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia—terutama fenomena sulih suara film atau sinetron asing nonberbahasa Inggris terhadap budaya kita.

Fenomena sosial yang berkembang sekarang menunjukkan bahwa upaya mengindonesiakan film-film asing atau sinetron asing yang bukan berbahasa Inggris secara kasat mata pembinaan bahasa Indonesia sudah berhasil, namun dampak sosial budaya akibat kebijakan tersebut sangat perlu dikaji secara mendalam karena sudah sangat mengkhawatirkan (Kasmansyah, 2003).

Berdasarkan data *Survey Research Indonesia* (SRI), lebih dari 70% acara yang ditayangkan televisi Indonesia dalam bentuk hiburan, selebihnya dalam bentuk berita, itu pun diselingi dengan berbagai tayangan iklan. Sebagian tayangan hiburan itu merupakan produksi Amerika (40%), India (20%), Mandarin (20%), selebihnya produksi Indonesia dan sebagian produksi negara-negara Asean dan Arab (Gatra, Nomor 16, Senin, 3 Maret 2003; <http://www.forum.co.id/> diakses 7 Juni 2003). Populasi film (sinetron) asing yang disulih suara ke dalam bahasa Indonesia tergolong paling tinggi dan paling banyak ditonton (beberapa contoh film, sinetron, atau animasi yang disulih suara dan ditayangkan televisi dapat dilihat pada lampiran). Setakad ini, kita sudah terbiasa

menonton film, sinetron, atau film kartun yang sudah disulih suara ke dalam bahasa Indonesia seperti telenovela, sinetron serial remaja, sinetron anak-anak, atau animasi anak-anak. Hal itu dapat dibuktikan bahwa kita mengenal banyaknya telenovela (Amerika Latin) seperti *Cinta Paulina*, *Cinta Mariana*, *Corazon Salvaje* (*Hati yang Berduri*), *Locura de Amor* (*Ada Cinta di Sekolah*) *Abrazame muy Fuerte* (*Carmenita*), *Betty la Fea*, *Maria Elena*, *Vivan Los Ninos*, *Wild Angel*, *Carita De Angel*, *Luisa Fernando*, atau serial remaja (Mandarin, Jepang) seperti: *Percikan Cinta*, *Meteor Garden 2*, *2 Cinta 2 Masa*, *Hati yang Luka*, atau serial anak-anak (India) seperti: *Shaka Laka Boom Boom*, atau film kartun anak-anak (Jepang, Amerika Latin) seperti: *Dora Emon*, *Sincan*, dan *Bety Toons*. Selain itu, kita juga sudah terbiasa menonton film-film lepas produk India dan Mandarin yang semuanya disulih suara ke dalam bahasa Indonesia.

Merujuk fakta dan data yang ada, fenomena sosial dan budaya yang tampak di antaranya semakin banyaknya penonton film, sinetron, animasi yang disulih suara, mulai dari pembantu rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, orang tua, remaja, dan anak-anak, daripada melakukan kegiatan yang produktif. Ditinjau dari sisi stasiun televisi, tentu merupakan hal yang baik karena semakin banyak yang menonton siaran televisi, berarti dapat menaikkan peringkat acara (*rating*), yang berarti pemasukan dari iklan akan bertambah pula untuk stasiun televisi tersebut (Baran, dan Dennis K. Davis, 2000).

Secara sosiologis sulih suara merupakan upaya mendekatkan budaya melalui pendekatan bahasa yang digunakan, terlepas apakah budaya yang ditayangkan oleh film, sinetron, atau animasi tersebut berbeda atau sama dengan budaya kita. Dengan sulih suara, kita terbiasa menonton adegan berbahasa yang “tidak mengenal” sapaan hormat, seperti seorang anak yang biasa “ber-kau-kau atau berkamu-kamu” kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tuanya. Kita juga sudah terbiasa mendengarkan sapaan: “bapak mertua, ibu mertua, kakak ipar, adik ipar” yang lazim untuk film Mandarin atau India, termasuk dalam penggunaan kata-kata yang tergolong tabu diucapkan secara terbuka, seperti: kata kencan, bercumbu, berciuman, abortus, vagina, penis, mensturasi, berselingkuh, kondom, dan spiral. Kata-kata itu sudah dianggap bukan lagi sesuatu yang tabu.

Secara psikologis dan sosiologis sesuatu yang pada awalnya tidak disenangi, apabila dilakukan berulang-ulang sebagaimana banyaknya film-film atau sinetron yang sudah disulih suara ke dalam bahasa Indonesia yang setiap hari ditayangkan di berbagai televisi swasta walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan budaya kita, lambat-laun akan terbiasa. Bila sudah terbiasa, lama-lama menjadi kebiasaan, yang pada akhirnya menjadi budaya

(Gerungan, 1991). Bila sesuatu menjadi budaya, tentu berdampak pada hilangnya identitas kita sebagai bangsa yang berbudaya (Rakhmat, 2000).

Kegiatan sulih suara ke dalam bahasa Indonesia, satu sisi menunjukkan pembinaan bahasa Indonesia berhasil, tetapi dari sisi sosial budaya masih perlu dikaji ulang karena banyak sisi negatifnya. Pengkajian ulang dapat dimulai dari pola kebijakan bahasa nasional yang berdampak pada kebijakan publik, seperti, kebijakan perfilman dan penyiaran, baik berdasarkan sosiologis, antropologis, maupun edukatif. Salah satu alternatif yang mungkin dapat ditempuh adalah: (1) semua film, sinetron, dan film kartun/animasi yang berbahasa asing tidak disulih suara, tetapi diterjemahkan menggunakan teks berbahasa Indonesia, tetapi harus diseleksi secara ketat; dan (2) sulih suara ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan hanya untuk film ilmu pengetahuan dan yang dapat membangkitkan semangat kerja dan etos kerja masyarakat kita. Alternatif ini, tentu perlu dilakukan secara hati-hati dengan cara merundingkannya dengan berbagai lembaga dan pihak-pihak yang terkait dengan media massa elektronik secara arif dan bijak.

3. Peran Media Massa dan Alternatif Pembinaan Bahasa Indonesia

Peran media massa dalam pembinaan bahasa Indonesia sampai saat ini sangat penting, karena dalam era global sekarang media massa merupakan sarana komunikasi yang paling efektif dalam mempengaruhi sikap dan perilaku manusia, baik yang positif maupun yang negatif, termasuk dalam mempengaruhi sikap bahasa (Mulyana, 2000). Akhir-akhir ini peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia lebih mengarah kepada hal yang negatif, terutama berkaitan dengan penulisan sikap negatif terhadap bahasa Indonesia, contoh-contoh pemakaian bahasa yang berkesan mengabaikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Jika merujuk fakta yang ada, media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia perannya masih belum optimal. Belum optimalnya peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu disebabkan beberapa faktor yang saling mempengaruhi, mulai dari pola kebijakan kebahasaan, strategi, maupun sistem pendidikan dan rekrutmen tenaga kerja di bidang media massa dan bahasa, tenaga pembina bahasa Indonesia, hingga bidang-bidang lain yang berkaitan dengan pembinaan bahasa Indonesia.

Pola Kebijakan dan Kerja Sama Kebahasaan

Kebijakan kebahasaan di Indonesia selama ini mengacu pada pola kebijakan politik bahasa nasional yang di dalamnya mengatur arah dan kebijakan kebahasaan di Indonesia (Halim ed., 1984). Dalam kebijakan politik bahasa nasional itu, Indonesia mengenal adanya bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ketiga bahasa itu di Indonesia digunakan

sesuai dengan situasi dan kondisi saat menggunakannya. Kebijakan tentang kedudukan dan fungsi ketiga bahasa yang digunakan di Indonesia itu sebenarnya sudah ada dalam politik bahasa nasional. Namun, kenyataannya pada tahap pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya komitmen yang tegas dan jelas sampai pada petunjuk teknis dan petunjuk pengawasan pola kebijakan kebahasaan dari pengambil kebijakan publik di Indonesia, seperti: DPR, pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga dan organisasi pers, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia.

Untuk mewujudkan hal itu, tentunya semua pihak yang terlibat langsung dalam bidang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bidang media massa perlu melakukan kerja sama yang mengikat, terencana, dan berkesinambungan dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia seperti: Pusat Bahasa, Balai Bahasa, Perguruan Tinggi (Fakultas Sastra, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Komunikasi), Lembaga Pers (Organisasi Pers, Lembaga Pengawas Pers), penerbit media massa cetak, stasiun televisi, stasiun radio siaran, biro-biro periklanan, rumah produksi film/sinetron, importir film dan sinetron. Selama ini, seperti yang dikemukakan Hasyim (1998) kerja sama antara Pusat Bahasa dan lembaga media massa belum optimal, bahkan berkesan hanya sekedar pelengkap kerja sama.

Strategi Pembinaan Bahasa Indonesia

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan agar media massa dapat berperan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah strategi yang pernah dikemukakan Latief (1998) pada Kongres Bahasa Indonesia VI seperti adanya evaluasi secara menyeluruh, terencana, dan bersungguh-sungguh dalam kegiatan penyuluhan bahasa yang diperincinya ke dalam 11 butir (siapa yang akan dijadikan sasaran, mengapa mereka dipilih, apa kebutuhan mereka, apakah bahan tersedia, bagaimana tingkat keberterimaan bahan, siapa penyuluh, media penyuluhan, teknik penyuluhan, frekuensi penyuluhan, kemasan penyuluhan, dan bagaimana pemasaran penyuluhan) dapat pula diterapkan dalam strategi pembinaan bahasa Indonesia, tentunya disesuaikan dengan ruang lingkup pembinaan bahasa Indonesia untuk media massa.

Selain itu, strategi yang mungkin dapat dilakukan adalah tidak ada salahnya meniru pola $5W + 1H$ (apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa) yang digunakan dalam proses meliput dan menulis berita. Hal yang menjadi kendala utama selama ini adalah masalah belum adanya tenaga pembina atau penyuluh yang dapat memenuhi persyaratan, baik dari keahlian di bidang kebahasaan, maupun keahlian dalam bidang media massa. Selama ini, ada kesan tenaga pembina atau penyuluh bahasa tergolong

“awam” bidang media massa, padahal pembinaan bahasa Indonesia untuk lingkup media massa banyak hal teknis yang menjadi kendala di lapangan dalam menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti pada media massa cetak, radio siaran, dan televisi, di samping harus pula memperhitungkan dari segi bisnis, antara idealis dan kapitalis.

Sistem Pendidikan dan Rekrutmen Tenaga Kerja

Sebagaimana sudah dikemukakan, salah satu kendala utama dalam pembinaan bahasa Indonesia di lingkungan media massa adalah masalah tenaga pembina atau penyuluh, yang secara tidak langsung berkaitan pula dengan mutu tenaga kerja, baik yang berkaitan dengan tenaga di bidang kebahasaan, maupun di bidang media massa. Ini berarti, berkaitan pula dengan lembaga yang meluluskan tenaga kerja tersebut, yaitu lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan nonformal. Pembicaraan tentang lembaga pendidikan, tentu tidak dapat dilepaskan dengan sistem pendidikan bahasa dan pendidikan ilmu komunikasi dan jurnalistik di Indonesia. Hampir sebagian besar tenaga kerja di bidang media massa merupakan lulusan pendidikan formal—mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, baik yang berkaitan dengan bidang media massa, maupun yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan bidang media massa.

Dampak langsung dari latar belakang pendidikan tenaga kerja yang berkecimpung dalam bidang media massa adalah mutu kerja di bidang media massa belum memenuhi persyaratan. Memang telah ada beberapa penerbitan media massa cetak dan media massa elektronik yang tenaga kerjanya sudah memenuhi uji mutu, sebagian besar masih di bawah standar uji mutu tenaga kerja yang profesional. Selain itu, selama ini sistem pendidikan bidang komunikasi dan jurnalistik berkesan “menganaktirikan” materi bahasa Indonesia dibandingkan materi bidang komunikasi dan jurnalistik. Artinya, sistem pendidikan komunikasi dan jurnalistik masih bersifat parsial, belum integral. Demikian pula dengan sistem pendidikan dalam lingkungan bahasa dan sastra tidak pernah memasukkan materi ilmu komunikasi dan jurnalistik dalam kurikulum bahasa Indonesia. Ironisnya, kajian bahasa dalam media massa ada yang dikaji oleh sarjana bahasa walaupun yang bersangkutan “tidak pernah belajar” ilmu komunikasi, padahal dalam era global sekarang ada kecenderungan batas disiplin ilmu sudah mengarah kepada multidisiplin (Mulyana, 2000; Eko Purnomo, 2003).

Sejalan dengan itu, sudah saatnya pemikiran tentang adanya multidisiplin di perguruan tinggi perlu diwujudkan, paling tidak dari segi kurikulum yang integral, antara kurikulum bahasa dan komunikasi. Hal ini sudah pernah dirintis di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP

Universitas Sriwijaya selama dua periode kurikulum, yaitu Kurikulum 1996 dan Kurikulum 2001 dan tampaknya cukup berhasil. Pada Kurikulum 1996 ada lima mata kuliah bidang komunikasi dengan bobot 12 sks yang diberikan kepada mahasiswa, yaitu mata kuliah: Pengantar Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik, Bahasa Jurnalistik, Hukum Pers dan Kode Etik, Keterampilan Pers dan Jurnalistik, dan Kehumasan. Kurikulum 1996 ini selain diikuti mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, juga diberi kesempatan bagi mahasiswa program studi lain karena merupakan mata kuliah paket khusus. Pada Kurikulum 2001 ada empat mata kuliah dengan bobot 8 sks yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, mata kuliahnya sama dengan Kurikulum 1996, kecuali mata kuliah Hukum Pers dan Kode Etik. Untuk dapat mengikuti mata kuliah komunikasi dan jurnalistik, ada prasyarat mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah menyimak, berbicara, dan menulis.

Berdasarkan pengalaman penulis mengasuh beberapa mata kuliah komunikasi dan jurnalistik masalah-masalah bahasa dan media massa ternyata dapat dikurangi. Ini berarti, adanya integrasi antara bidang bahasa dan bidang komunikasi yang berdampak positif dibandingkan bila secara parsial. Idealnya, wartawan mengetahui masalah-masalah kebahasaan, demikian juga ahli bahasa menguasai juga masalah-masalah media massa.

Selain masalah sistem pendidikan, masalah penerimaan tenaga kerja di bidang media massa dan bidang bahasa, perlu sistem rekrutmen yang mengharuskan calon tenaga kerja menguasai bidang media massa dan/atau juga menguasai bidang bahasa, demikian pula untuk rekrutmen tenaga kerja bidang kebahasaan hendaknya juga menguasai bidang media massa. Mudah-mudahan sistem rekrutmen tenaga kerja seperti ini dapat meningkatkan kinerja sehingga peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dapat terwujud secara optimal.

4. Penutup

Peran media massa dalam era global sekarang merupakan hal yang penting dan dapat “mewarnai” kehidupan masyarakat, baik yang positif maupun yang negatif. Untuk mewujudkan peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah perlu adanya komitmen yang jelas dan tegas dari lembaga publik yang terkait dengan media massa dan bidang kebahasaan, terutama pengambil kebijakan publik, seperti: DPR, Pemerintah, Pusat Bahasa, Dewan Pers, Organisasi Pers dan Pengawasan Pers, Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Penerbit Media Massa Cetak (surat kabar, majalah, tabloid, buletin), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Stasiun Radio Siaran, Komisi Penyiaran Indonesia, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Pers, Stasiun Televisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adul, M. Asfandi. 1981. *Bahasa Indonesia Baku dan Fungsi Guru dalam Pembinaan Bahasa Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ali Masri, R.H.M., N. Ahmad, dan M.E. Purnomo. 2001. "Kesinoniman Disfemisme dalam Surat Kabar Terbitan Palembang" *Lingua*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2001. Palembang: JPBS-FKIP Unsri, LB Unsri, PSPB PPs Unsri, MLI Cabang Palembang.
- Adhitama, Prahastoeti. 1998. "Pembinaan Bahasa Indonesia Melalui Media Massa" Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Astraatmaja, Atmakusumah. 1998. "Bahasa Indonesia dalam Media Massa" Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Baran, Stanley J. dan Dennis K. Davis. 2000. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Canada: Wadsworth.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 1995. *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, S. 1998. "Peningkatan Mutu Tenaga Kebahasaan dalam Pembinaan Bahasa Indonesia". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fishman, Joshua A.. 1972. *The Sociology of Language*. Rowley Massachussts: Newbury House Publishers
- Gerungan, W.A.. 1991. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresco.
- Gunarwan, Asim. 1998. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia di dalam Era Globalisasi." Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Halim, Amran (Ed.). 1984. *Politik Bahasa Nasional 1*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Hasjim, Nafron. 1998. "Peningkatkan Kerja Sama Kebahasaan dan Kesastraan." Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ishadi Sk. 1998. "Pendidikan Bahasa Indonesia Melalui Media Elektronik," dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*, Penyunting Penyelia Hasan Alwi, Dendy Sugono, S.R.H. Sitanggang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Juti, Muradi. 1998. "Peningkatan Mutu Pemasyarakatan Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Memperkukuh Jati Diri Bangsa dalam Era Globalisasi" Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kridalaksana, Harimurti. 1982. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende-Flores: Nusa Indah.
- Latif, H.A.. 1998. "Strategi Penyuluhan Bahasa: Suatu Pemikiran" dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*, Penyunting Penyelia Hasan Alwi, Dendy Sugono, S.R.H. Sitanggang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Latief, A.. 1998. "Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan: Masa Kini dan Masa Depan." Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lapoliwa, Hans. 1998. "Lafal Bahasa Indonesia Baku." Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lapoliwa, Hans. 1998. "Strategi Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa: Beberapa Pokok Pikiran" dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*, Penyunting Penyelia Hasan Alwi, Dendy Sugono, S.R.H. Sitanggang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lauer, Robert H.. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeliono, Anton M. 1998. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di dalam Era Globalisasi." Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyana, Deddy. 1999. *Nuansa-Nuansa Komunikasi, Menoropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. 2000. *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 200. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Sunaryo, Adi dan Sri Sukei Adiwimarta. 1998. "Pengembangan Istilah dalam Era Globalisasi." Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Taha, Zainuddin. 1998. "Pembinaan Bahasa Indonesia Melalui Media Cetak" dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*, Penyunting Penyelia Hasan Alwi, Dendy Sugono, S.R.H. Sitanggang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Usman, Zuber. 1970. *Bahasa Persatuan: Kedudukan, Sedjarah, Persoalan-persoalannya*. Djakarta: Gunung Agung.
- Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wardhaugh, Ronald. 1986. *An Introduction to Sociolinguistics*. New York: McGraw Hill Books Company.

DAFTAR ORGANISASI PERS INDONESIA

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2. Sekretariat Wartawan Independen Indonesia (SWII)
3. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)
4. Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HIWAMI)
5. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)
6. Himpunan Insan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)
7. Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI)
8. Komite Wartawan Indonesia (KWI)
9. Aliansi Jurnalistik Indonesia (ALJI)
10. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)
11. Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia
12. Ikatan Wartawan Republik Indonesia (IWARI)
13. Persatuan Wartawan Foto Indonesia (PWFI)
14. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)
15. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
16. Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SERIKAT PEWARTA)
17. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
18. Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI)
19. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)
20. Asosiasi Wartawan Ekonomi (AWE)
21. Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)
22. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)
23. Silaturahmi Wartawan Muslim Indonesia (SWAMI)
24. Ikatan Wartawati Indonesia (IWI)
25. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KO-WAPPI)
26. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPPK)
27. Asosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia, Gerakan Moral Peduli Amanat Rakyat (ASWARI GEMPAR)
28. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)
29. Persatuan Pers Nasional Indonesia (PPNI)
30. Komite Wartawan Independen Indonesia (KWII)
31. Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI)
32. Persatuan Wartawan Independen Indonesia (PWII)
33. Komite Perlindungan Wartawan Indonesia (KPWI)
34. Komite Jurnalis Indonesia (KJI)
35. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)
36. Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI)
37. Gabungan Wartawan Indonesia (GAWANI)
38. Federasi Wartawan Independent Indonesia Baru (FWIIB)
39. Persekutuan Oikumene Jurnalis Kristen Indonesia (PROJUSTISIA)
40. Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-REFORMASI)
41. Aliansi Wartawan Indonesia (AWI)
42. Komite Jurnalis Indonesia (KJI)
43. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBA)

Sumber: Dewan Pers

JUMLAH STASIUN RADIO SIARAN SWASTA DI INDONESIA

No	Provinsi	AM	FM	Jml	No	Provinsi	AM	FM	Jml
1	D.I. Aceh (NAD)	34	26	60	14	Bali	10	10	20
2	Sumatera Utara	51	32	83	15	Nusa Tenggara Barat	6	6	12
3	Sumatera Barat	17	5	22	16	Nusa Tenggara Timur	2	4	6
4	Riau	10	19	29	17	Kalimantan Selatan	19	10	29
5	Jambi	10	4	14	18	Kalimantan Barat	14	8	22
6	Bengkulu	7	4	11	19	Kalimantan Tengah	12	6	18
7	Sumatera Selatan	25	19	64	20	Kalimantan Timur	4	16	20
8	Lampung	27	16	43	21	Sulawesi Tengah	10	3	13
9	Dki Jakarta	4	35	39	22	Sulawesi Selatan	19	14	33
10	Jawa Barat	67	57	124	23	Sulawesi Utara	5	13	18
11	Jawa Tengah	81	38	119	24	Sulawesi Tenggara	1	2	3
12	D.I. Yogyakarta	10	11	21	25	Maluku	5	3	8
13	Jawa Timur	59	43	102	26	Irian Jaya (Papua)	2	-	2
Jumlah seluruh Indonesia							502	413	915

Sumber: PRSSNI

**FILM ATAU SINETRON ASING NON-BERBAHASA INGGRIS
YANG DITAYANGKAN DI TELEVISI INDONESIA**

No	Judul Film atau Telenovela	Televisi yang Menayangkan	Jam Tayang	Hari Penayangan	Jenis Film/ Telenovela	Jumlah Penayangan Per Minggu
1	Maria Elena	TV 7	09.00	Senin—Kamis	Serial	4
2	Rauzan	Lativi	13.30	Senin—Kamis	Serial	4
3	Vivan Los Ninos	SCTV	16.30	Senin—Jumat	Serial	5
4	Wild Angel	Indosiar	09.00	Senin—Jumat	Serial	5
5	Carita De Angel	RCTI	17.30	Senin—Minggu	Serial	7
6	Luisa Fernando	Trans TV	11.00	Senin—Jumat	Serial	5
7	Judes Wife	ANTV	14.30	Senin—Jumat	Serial	7
8	American Family	SCTV	00.30	Minggu	Serial	1
9	Strawberry on the Short Cake	Indosiar	17.00	Senin—Kamis	Serial	4
10	Percikan Cinta	ANTV	12.00	Senin—Jumat	Serial	5
11	Meteor Garden 2	Indosiar	20.30	Kamis	Serial	1
12	2 Cinta 2 Masa	ANTV	18.30	Senin—Selasa	Serial	2
13	Fantasy	Indosiar	17.00	Jumat	Serial	1
14	Hati yang Luka	TPI	11.00	Senin	Serial	1
15	GTO	Indosiar	10.00	Minggu	Serial	1
16	Glass Shoes	Trans TV	14.30	Senin-Kamis	Serial	4
17	Shaka Laka Boom Boom	SCTV	16.00	Senin—Jumat	Serial	5
18	Bety Toons	RCTI	08.00	Selasa—Kamis	Serial Animasi	3
19	Dora Emon	RCTI	08.00	Sabtu—Minggu	Serial animasi	2
20	Sincan	RCTI	10.00	Minggu	Serial Animasi	1
21	Digimon	Indosiar	07.00	Minggu	Serial Animasi	1
22	Let's and Go	RCTI	06.30	Minggu	Serial Animasi	1
23	Chibi Maruko Chan	RCTI	07.00	Minggu	Serial Animasi	1
24	Hamtaro	RCTI	07.30	Minggu	Serial Animasi	1
25	Ditektif Conan	Indonesiar	08.30	Minggu	Serial Animasi	1
26	Inuyasya	Indosiar	09.30	Minggu	Serial Animasi	1
27	Nonoko Chan	SCTV	07.30	Minggu	Serial Animasi	1
28	The Secret Ako Chan	Indosiar	06.30	Senin—Rabu	Serial Animasi	3
21	Saint Seiya	Indosiar	06.30	Kamis	Serial Animasi	1
22	Dragon Ball Z	Indosiar	09.00	Minggu, Rabu	Serial Animasi	2

Sumber: *Tabloid Bintang*, No. 633, Minggu Kedua, Juni 2003

BAHASA INDONESIA DALAM EDITORIAL *MEDIA INDONESIA*

Yusrita Yanti

Fakultas Sastra Universitas Bung Hatta

Pendahuluan

Era globalisasi dan reformasi menyebabkan makin terbukanya perubahan terhadap bahasa Indonesia (BI), baik untuk pemerikayaan maupun pencedekiaannya. Sebaliknya, situasi ini malah bisa berdampak pemiskinan dan pemerikosaan BI itu sendiri. Mencuatnya nilai transparansi dan demokrasi di Indonesia saat ini telah menyebabkan masyarakat mudah mengungkapkan segala rasa dengan kemampuan bahasa yang dimilikinya untuk mengkritisi fenomena sosial yang ada.

Salah satu media massa yang digunakan untuk berkomunikasi adalah surat kabar. Surat kabar sangat berperan dalam menggelar informasi yang mendidik dan mencerdaskan bangsa serta mengembangkan aspek-aspek linguistik bahasa Indonesia kepada masyarakat seperti pilihan kata (diksi), pengembangan kosakata, struktur kalimat, dan makna kata denotasi serta konotasi dan majasi. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dari jurnalis sangat diperlukan. Komunikasi akan berjalan dengan baik dan mengena sasaran apabila dalam penyampaian informasi, komentar, dan kritikan digunakan bahasa yang efektif, jelas, lugas, tajam, menarik, dan santun.

Makalah ini akan memaparkan sebagian dari hasil penelitian penulis terhadap BI yang digunakan dalam kolom editorial sebuah surat kabar, *Media Indonesia*. Kolom ini membahas dan mengkritisi permasalahan sosial, budaya, dan politik yang sedang dialami masyarakat Indonesia sehingga BI yang digunakan mempunyai ciri khas tertentu.

Data penelitian ini dikumpulkan secara acak dari tanggal 19 Februari--24 Mei 2003. Dari data terkumpul, ditemukan pemakaian BI yang dihiasi alih kode atau campur kode/bahasa (*code mixing*) seperti bahasa Inggris, bahasa asing lainnya, dan bahasa daerah. Kecenderungan pemakaian campur kode itu tidak diikuti oleh terjemahan atau padanannya dalam bahasa Indonesia; walaupun terkadang padanan kata-kata tersebut ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian, ditemukan pemakaian pilihan kata yang cenderung mengacu kepada makna konotasi dan majasi. Selanjutnya, dari segi struktur kalimat ditemukan penggunaan kata dan frasa yang lewah, tidak pada tempatnya, tapi pada makalah ini tidak akan dibahas. Pada kesempatan ini, penulis hanya memaparkan temuan variasi plihan kata atau diksi dan campur kode

yang menghiasi editorial itu. Kemudian, akan didiskusikan beberapa upaya ke depan yang perlu dilakukan.

1. Diksi dan Makna Majasi

Seperti diketahui, menulis bukanlah persoalan yang mudah karena kita harus bisa menampilkan informasi secara wajar, segar, dan enak dibaca. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan untuk membuat indah dan komunikatifnya sebuah tulisan, diantaranya penggunaan sinonim kata yang bervariasi dan pilihan kata atau diksi berdasarkan acuan makna majasi. Hal ini tentu saja tidak mudah bagi penulis maupun jurnalis untuk mengembangkan pengetahuan bahasanya dengan memperluas kosakata bahasa yang diketahuinya.

Dale, *et al.* (1977) dalam Tarigan (1984), mengatakan bahwa majas (*figure of speech*) merupakan bahasa kias, yaitu bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan cara memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum sehingga penggunaan majas tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu atau tautan pikiran lain. Majas mampu menghimbau indera pembaca karena lebih kongkrit dan dapat menghidupkan tulisan.

Moeliono (1982) membagi tiga jenis majas yang terpenting, yakni (1) majas perbandingan yang mencakupi: (a) perumpamaan, (b) kiasan (metafor), dan (c) penginsanan (personifikasi); (2) majas pertentangan yang terdiri atas (a) hiperbol, (b) litotes, dan (c) ironi; (3) majas pertautan mencakupi (a) metonomia, (b) sinekdoke, (c) kilatan (alusi), dan (d) eufemisme.

Bila disimak lebih lanjut, pilihan kata yang digunakan oleh seorang penulis sangat erat hubungannya dengan makna. Makna satu kata atau ungkapan dapat mengacu kepada makna harfiah (denotasi), konotasi, dan makna majasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa diksi seseorang di dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, ternyata mempunyai daya tarik tersendiri dan dapat menentukan efektif tidaknya sebuah komunikasi. Cara seperti ini dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan daya imajinasi dan daya kreativitas berbahasa. Biasanya, diksi yang dikembangkan melalui acuan makna tersebut akan menciptakan suatu tekstur dan pesona tersendiri dalam suatu tulisan.

2. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Editorial Media Indonesia

Dari hasil analisis, ditemukan pemakaian variasi pilihan kata, penggunaan majas personifikasi, metafora, dan hiperbol serta penggunaan kosakata BI yang tidak baku.

2.1 Personifikasi, Metafora, dan Hiperbola

Daya tarik penggunaan majas personifikasi dalam menyampaikan informasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya cukup marak digunakan dalam editorial ini karena memberikan nilai rasa tersendiri. Pada contoh (1) tampak pemakaian majas perbandingan penginsanan (personifikasi). Artinya, majas yang melekatkan sifat-sifat insani kepada barang yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak. Di sini, dikatakan bahwa PBB dapat *mengelus* Yusril Ihza, PBB dianggap mempunyai sifat yang sama dengan makhluk hidup yang bisa mengelus. Bandingkan dengan (1b) bila verba mengelus diganti dengan mencalonkan atau mengusulkan nilai rasa kalimat itu akan berbeda.

- (1) a. PDIP kembali mencalonkan Megawati,PBB mengelus Yusril Ihza...
- b. PDIP kembali mencalonkan Megawati,.....PBB mencalonkan/mengusulkan Yusril Ihza ...

Contoh lain dari personifikasi yang ditemukan.

- (2) Provinsi *beranak pinak*, kabupaten dan kota *beranak cucu*, semua mekar bertambah jumlahnya. [MI: 28/3-2003]
- (3) a. Tanpa memedulikan protes dunia, *Amerika Serikat* (AS) kemarin mulai *menghajar* Irak. [MI: 21/3-2003]
- (4) a. AS menutup *telinganya*.
- (5) ..., dunia kembali melupakan *kelakuan* AS yang telah sewenang-wenang terhadap Irak. [MI, 24/3-2003]

Pemakaian majas personifikasi tersebut terasa menghidupkan kalimat, bandingkan bila frasa “beranak pinak” diganti dengan “berkembang”, sedangkan “beranak cucu”, diganti dengan “bertambah” sehingga kalimat itu terasa hambar dan kurang hidup.

Pada contoh (6) berikut terdapat pemakaian kata *ban utama* dan *ban serep* yang merupakan majas perbandingan kiasan (metafora), yaitu perbandingan yang implisit, dimana sifat yang ada pada *ban utama* sebagai penggerak mobil mengacu kepada Presiden yang menjalankan pemerintahan dan *ban serep* sebagai ban cadangan untuk menggantikan ban utama bila sedang rusak. Ban serep ini mengacu kepada wakil Presiden yang tugasnya mewakili Presiden bila berhalangan. Pada contoh tersebut juga diselipkan dialek betawi *ogah* dan *serep* yang merupakan kosakata tidak standar.

- (6) Semua mau menjadi *ban utama* dan *ogah* menjadi *ban serep*.

Penggunaan majas metafora tidak saja ditemukan di dalam paragraf tapi juga pada judul editorial tersebut. Perhatikan beberapa contoh berikut.

- (7) a. Tiada Emas Loyang pun jadi [MI: 5/3- 2003]
b. Tiada yang agung yang tidak pun jadi
c. Tiada yang agung yang hina pun jadi.
- (8) a. Hangat-hangat Tahi Ayam [MI: 28/4-2003]
b. Cepat dingin
- (9) a. Presiden Es Lilin [MI: 15/3-2003]
b. Presiden S-1
- (10) a. Goyang Inul dan Demokrasi [MI: 30/4-2003]
b. Tarian Inul dan Demokrasi

Dari contoh (7a--10a) tampak penggunaan kata perbandingan *emas* dan *loyang*. Secara metaforis, kata *emas* mengacu pada sesuatu yang murni, agung, luhur, dan mulia, sedangkan *loyang* berarti sebaliknya. Frasa *hangat-hangat tahi ayam*, sesuatu yang dikiaskan cepat dingin atau tidak bertahan lama. Judul ini mengkritisi pemerintah yang menangani permasalahan yang tidak pernah tuntas, mula-mula bersemangat kemudian diam tanpa terlihat hasilnya. Kemudian, frasa *Presiden dan es lilin*, mengacu kepada pendidikan Presiden yang diusulkan minimal S-1. Angka satu sama dengan es lilin; sedangkan *goyang Inul dan demokrasi*, pilihan kata *goyang* alih-alih *tari* lebih mempunyai nilai rasa apalagi ditambah dengan penggunaan nama Inul, seorang artis dangdut yang lagi terkenal dengan goyang *ngebornya*. Pilihan kata tersebut akan berbeda nilai rasanya (*sense of meaning*) bila contoh tersebut di atas diubah seperti yang tampak pada (7b--10b).

Apabila ditelusuri lebih lanjut, pemakaian BI dalam Editorial *Media Indonesia* juga diwarnai oleh penggunaan majas lainnya, yaitu hiperbola. Yang dimaksud dengan hiperbola adalah ungkapan yang melebih-lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan, baik itu jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya. Perhatikan contoh (17 dan 18), kata atau verba *menaklukkan*, *meruntuhkan* dan *mengguncangkan*.

- (11) Inilah anak desa yang menapak karier jauh dari bawah, kemudian *menaklukkan* Jakarta. Bahkan, *meruntuhkan* langit hiburan nasional.
- (12) Goyang Inul Daratista berhasil *mengguncang* panggung hiburan Indonesia.

Pilihan kata sangat berperan dalam menentukan komunikatif tidaknya suatu pesan yang akan disampaikan. Untuk itu, Hamilton menyarankan agar menggunakan kata-kata secara tepat, akurat, dan jelas dengan memperhatikan makna denotasi dan konotasi. Perhatikan beberapa kata berikut yang punya makna denotasi yang sama, tapi punya makna konotasi berbeda (baca Yanti, Y., 2003).

- (15)a. *National leader* 'pemimpin nasional' → berkonotasi positif (+)
- b. *Politician* 'politikus' → berkonotasi negatif (-)

Pada contoh (15) kata *pemimpin nasional* berkonotasi positif sedangkan kata *politikus* berkonotasi negatif karena orang beranggapan yang berbau politik dapat menggunakan segala cara yang terkadang cara itu merugikan. Dari data juga ditemukan kata-kata yang berkonotasi (-), contoh:

- (16)a. Rhoma dinilai telah *memasung* hak berekspresi.
[MI: 30/4-2003]
- b. Rhoma dinilai telah *melarang/menahan/menghambat* hak berekspresi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia verba *memasung* (16a) berarti 'membelenggu seseorang dengan pasung', yaitu alat untuk menghukum orang, berbentuk kayu atau kayu berlubang, dipasangkan pada kaki, tangan atau leher. Tentu saja pilihan kata ini akan lebih berkonotasi negatif bila verba *memasung* dibandingkan dengan verba *melarang*, *menahan*, atau *menghambat*. Seperti yang dikatakan Moeliono (1989) bahwa makna konotasi mengacu kepada jumlah semua tautan pikiran yang menerbitkan nilai rasa dan konotasi itu dapat bersifat pribadi dan bergantung pada pengalaman orang seorang dengan kata atau dengan barang atau gagasan yang diacu oleh kata itu. Bagi masyarakat makna verba *memasung* sangat menyakitkan dan berat sekali jika dibandingkan dengan penggunaan verba *melarang*, *menghambat*, atau *menahan*. Beberapa contoh lain.

- (17)a. Uang telah *merasuki* tidak saja saku anggota DPRD, tetapi jiwa dan raga mereka.
- b. Uang telah *memasuki* tidak saja saku anggota DPRD, tetapi jiwa dan raga mereka.

Pada contoh (17), secara denotatif verba *merasuki* bersinonim dengan *memasuki*, tapi berbeda nilai rasa, verba *merasuki* berkonotasi negatif (-) daripada verba *memasuki*.

Konsep kesinoniman diartikan sebagai sesuatu yang memiliki makna yang kurang lebih sama dengan ungkapan lain. Kata *kurang lebih* dipakai karena relasi sinonimi tidak selalu mengandung kesamaan makna yang sempurna, misalnya, kata *pergi* dan *berangkat*. Seperti yang dikatakan Verhar (1991) bahwa kesinoniman ada yang murni, yaitu dua kata memiliki makna yang persis sama; di samping itu ada yang mirip, kesinoniman bagian ini tidak sama betul. Di sini terdapat perbedaan makna, tetapi perbedaannya tidak terlalu mencolok, misalnya *menyenangkan* dan *memuaskan*.

Kecenderungan untuk menggunakan pilihan kata seperti itu ditujukan agar informasi atau pesan yang disampaikan akan lebih komunikatif dan menarik untuk dibaca dan dibahas lebih dalam bukan hanya sekadar menarik perhatian (*interest catching*). Perhatikan sejumlah contoh lain berikut ini.

- (18) a. *Mengetuk hati* Nurani Bush
b. *Menasehati* Bush
- (19) a. *Mengawasi semut* di KPU
b. *Mengawasi anggota* KPU
- (20) a. Aceh tanpa *darah*.
b. Aceh tanpa *perang*.

Pada contoh (18^a--20a) tampak ada perbedaan nilai rasa bila dibandingkan dengan (18b--20b) yaitu *mengetuk hati* alih-alih *menasehati*, *semut* alih-alih *anggota*, dan kata *darah* alih-alih *perang*. Seperti yang dikatakan Hamilton, G. (1991) *The power of a single word is incredible*, artinya kekuatan satu kata sangat menakjubkan bahkan dalam dunia bisnis penggunaan kata yang tepat untuk tujuan tertentu sangat memberikan dampak positif. Jadi, makna verba *mengetuk* secara denotatif artinya 'memukul dengan sesuatu' dan berbeda dengan verba *menasehati* yang sifatnya abstrak tidak bisa dikenakan langsung kepada objek yang dituju. Begitu juga kata *semut* sebagai pengganti kata anggota KPU. Makna yang terkandung adalah bahwa semut menyukai gula, ada gula pasti semut berdatangan, hal seperti ini lebih dikenal dengan metafora. Fenomena ini dikaitkan dengan situasi sosial yang ada di KPU dan jumlah uang yang diperlukan selama persiapan pemilu. Kemudian kata *darah* lebih berkonotasi negatif daripada kata *perang*. Tampaknya, alasan penggunaan majas ini bertujuan untuk menggelitik hati pembaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi yang

akan digelar, sedangkan alasan lain adalah untuk memelihara prinsip kesopanan berbahasa tanpa melupakan tujuan utama, yaitu mengkritik secara halus dan sopan.

Kenyataan penggunaan diksi yang bervariasi tersebut mengisyaratkan bahwa kosakata bahasa Indonesia itu perlu digali dan dikembangkan melalui perluasan makna. Moeliono (1989) menyarankan ada sejumlah cara untuk memperluas kosakata, yaitu (1) pemakaian kamus umum dan sinonim yang baik, (2) pemasukan kata baru di dalam tulisan dan pembicaraan, (3) usaha membaca jenis tulisan sebanyak-banyaknya, (4) pemilihan kata, baik karena makna denotasi maupun konotasi, (5) pemilihan kata yang konkret dan kata yang abstrak, (6) pemilihan kata umum dan kata khusus, dan (7) penggunaan majas.

Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah cara ini sudah dilakukan oleh para penulis maupun jurnalis? Sepintas, dapat dinilai pemakaian kosakata bahasa Indonesia di surat kabar masih monoton, kaku, dan cenderung diwarnai penggunaan kata-kata asing (campur kode), seperti bahasa Inggris. Padahal, bahasa Indonesia sangat kaya dengan kosakatanya ditambah lagi dengan kekayaan kosakata bahasa daerah.

Lumintintang (1998) dalam Alwi, dkk. (2000), mengatakan bahwa penggubah lagu seperti Guruh Soekarno Putra telah membuktikan dan memperlihatkan kepada kita bahwa betapa kayanya kosakata bahasa Indonesia tersebut. Misalnya, kata *suka* cenderung disulih dengan sinonimnya yang bernuansa sama, seperti *cita*, *ria*, *riang*, *gembira*, *senang*, atau *bahagia*; sedangkan kata *duka* ditukarnya dengan *nestapa*, *derita*, *lara*, *sedih*, *murung*, *haru*, *sendu*, atau *rawan*.

Memang diperlukan kreativitas si penulis untuk memperluas kosakata bahasa Indonesia seperti yang disarankan Moeliono karena surat kabar mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Tentunya, cukup ampuh untuk memasyarakatkan kekayaan kosakata bahasa Indonesia itu ataupun bahasa daerah secara meluas ke seluruh pelosok Indonesia.

2.2 Alih Kode atau Campur Kode

Richards, J. *et all.* (1985) mengatakan bahwa alih kode (*code switching*) adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh seorang pembicara atau penulis dari satu bahasa ke bahasa lain. Menurut mereka, alih kode dapat terjadi di dalam suatu percakapan apabila seorang pembicara berbicara dalam satu bahasa kemudian lawan bicara menjawab dengan bahasa lain. Kemudian, seseorang juga bisa mulai bicara dengan satu bahasa kemudian beralih ke bahasa lain di tengah pembicaraan, atau terkadang di kalimat yang diujarkannya.

Ada banyak alasan kenapa orang beralih kode (bahasa) atau bercampur kode dalam suatu tuturan atau kalimat, di antaranya karena mempertimbangkan faktor solidaritas, kesukuan, status sosial, fungsi afektif, dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut (lihat Holmes, J. 2001:35)

- (a) Tamati : **Engari** [so] now we return to more important matters.
'Jadi sekarang kita kembali ke permasalahan yang lebih penting'
(b) Ming : Confiscated by Customs, **dà gài** [probably]

Pada contoh (a) Tamati memulai percakapannya dengan *engari* (bahasa Maori) atau *so* (bahasa Inggris), sedangkan (b), Ming juga beralih kode atau bercampur kode dari bahasa Inggris ke bahasa Cina (*Cantonese Chinese*), bedanya dia menggunakannya di akhir kalimat, *dà gài* 'barangkali'.

Pemakaian campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa lain seperti bahasa daerah dan Inggris juga sering ditemukan di Indonesia. Perhatikan contoh (c--d) yang terdapat campur kode antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sedangkan contoh (d) campur kode bahasa Indonesia dan bahasa Minang, dan (f) campur kode bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

- (c) *Well*, pokok bahasan hari ini diawali dengan...
(d) Sebaiknya kita dukung rencana *go pulic* dari perusahaan ini
(e) berbicara masyarakat Minang harus memperhatikan *kato nan ampek* (kata nan empat) jika ingin dikatakan sopan.
(f) "Wah..., tambah cantik sekarang, *piye kabare*, *Nduk?*"

Alasan kenapa orang menggunakan campur kode tersebut bermacam-macam di antaranya, si pembicara ingin menunjukkan latar pendidikannya, kesukuan, ungkapan perasaan (kesal atau sayang), atau tidak adanya padanan kata pada suatu topik pembicaraan.

Gejala campur kode ini biasa terjadi pada masyarakat bilingual atau multilingual. Menurut Ohoiwutun, P. (2002), di Filipina gejala ini dikenal dengan *halo-halo* atau *mix-mix*, yaitu campuran antara bahasa Inggris dengan salah satu bahasa daerah di Filipina; sedangkan di Indonesia dikenal dengan bahasa *gado-gado* yang diibaratkan sajian *gado-gado* yang terdapat campuran dari berbagai macam sayuran. Artinya, penggunaan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan salah satu bahasa daerah (bahasa Minang, Jawa, Batak, Sunda, dsb.)

Holmes, J. (2001) mengatakan secara umum ada empat faktor sosial yang mempengaruhi pilihan bahasa seseorang, yaitu (1) siapa yang berbicara dan kepada siapa dia berbicara, (2) konteks sosial atau tempat pembicaraan berlangsung, (3) topik yang sedang dibicarakan, dan (4) fungsi mengapa berbicara apakah sebagai fungsi afektif atau acuan.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa secara umum tingkat keterampilan berbahasa seseorang dalam mengembangkan kosakata mencerminkan pengalamannya terhadap bahasa yang diketahuinya. Oleh karena itu, muncul variasi bahasa yang berakibat terjadinya pilihan kata yang berbeda dan terjadinya campur kode atau alih kode.

Bahasa Indonesia yang digunakan oleh media cetak baik surat kabar maupun majalah, masih terlihat marak pemakaian campur kode antara bahasa Indonesia dan Inggris. Hal itu disebabkan di antaranya belum adanya padanan kata asing itu dalam bahasa Indonesia karena sulit diterjemahkan dan bila diterjemahkan akan berbentuk kalimat yang panjang karena ingin mengungkapkan perasaan tentang sesuatu yang menambah nilai rasa, dan karena faktor sosial yang lain yang mempengaruhi.

Dari data yang penulis kumpulkan, ternyata pemakaian campur kode juga marak menghiasi editorial *Media Indonesia* tersebut. Perhatikan sejumlah contoh berikut.

- (21) Dalam waktu dekat, DPR akan melakukan *fit and proper test* terhadap calon Gubernur Bank Indonesia. [MI: 3/3-2003]
- (22) Untuk pertama kali, pada hari ini, DPR akan *uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)* terhadap calon Gubernur Bank Indonesia. [12/5-2003]

Pada contoh (21) tampak pemakaian bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris, yaitu frasa *fit and proper test* tanpa diterangkan maknanya dalam bahasa Indonesia, sedangkan pada contoh (22) maksud frasa itu ditulis dalam bahasa Indonesia--uji kepatutan dan kelayakan--baru muncul frasa bahasa Inggris tersebut. Untuk sesuatu yang baru cara seperti (22) perlu dilakukan sesering mungkin agar istilah asing yang baru itu dikenal masyarakat dan seterusnya cukup digunakan padanan dalam bahasa Indonesia itu. Menurut penulis, inilah yang perlu dilakukan untuk membuat bahasa Indonesia tidak terus seperti gado-gado. Namun, bahasa Indonesia *gado-gado* tetap mewarnai kolom editorial itu, malah sering pula terjadi pengulangan istilah asing yang sama, bahkan istilah atau kata asing itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Perhatikan sejumlah contoh lain.

- (23) Di lain pihak, inilah rumusan yang cukup *fair*. Sebab, pencalonan adalah satu perkara, sedangkan terpilih atau tidak adalah perkara yang lain lagi. Ia kembali bergantung kepada masyarakat pemilih, yang notabene mayoritas perempuan, apakah memang memilih perempuan [MI: 19/2-2003]
- (24) Sampai kemudian muncullah draf RUU TNI yang membangkitkan kembali kecurigaan bahwa tentara ingin *come back* ke panggung kekuasaan. [MI: 6/3-2003]
- (25) Sebab, yang berkuasa boleh berubah, system boleh berganti, tetapi korupsi tetap *survive*. [MI: 7/3-2003]
- (26) Sebuah pemerintahan yang gemar memelihara *pending matters* pasti pula akan memetik *pending dangers*, yang kemudian kaget karena menyimpan bom waktu. [MI: 26/3-2003]
- (27) Untuk manusia semacam itu, *Fiat justitia et pereat mundus* tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh-adalah adagium yang terlalu agung. [MI: 5/3-2003]

Munculnya campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah (bahasa Jawa) juga ditemukan seperti yang tampak pada (28--29). Kata *njomplang* 'tidak seimbang' dan *nyeleneh* 'berani' merupakan ungkapan bahasa Jawa yang menyebabkan tambahan nilai rasa pada kelompok tertentu (Jawa). Kasus seperti ini patut dihargai karena fenomena ini mencerminkan keberadaan multietnis yang ada di Indonesia sekaligus juga memasyarakatkan bahasa daerah kepada masyarakat yang bukan Jawa. Tapi, tentu sebaiknya istilah daerah itu dibuatkan maksudnya dalam bahasa Indonesia biar semua orang bisa menikmati ungkapan tersebut.

- (28) Keterwakilan perempuan di parlemen yang hanya 9 % itu jelas luar biasa *njomplang*. [MI: 19/2-2003]
- (29) Satu-satunya orang yang *nyeleneh* dalam kabinet itu hanyalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie yang sejak dulu tetap konsisten menentang IMF. [MI: 28/2-2003]

Penggunaan campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kelihatan seperti *diagungkan* sehingga ditemukan kemunculan yang berulang-ulang dalam satu editorial atau satu topik seperti yang

tampak pada contoh (31--38). Apapun alasannya, menurut penulis mungkin editor sengaja menggunakan istilah dalam pertandingan olahraga lari ini, *mencuri start* untuk menambah nilai rasa atau menimbulkan tautan pikiran ke hal lain sehingga kata tersebut berkonotasi negatif (-).

- (30) Seni mencuri *start* kampanye. (Judul)
- (31) Salah satu kelakuan kotor itu adalah mencuri *start* kampanye.
- (32) Itulah sebabnya, dalam pertandingan lari, mencuri *start* tergolong dosa yang berat, yang menyebabkan kemenangan dapat dibatalkan dan sang pelari terkena diskualifikasi.
- (33) Tegasnya, keduanya telah mencuri *start* kampanye.
- (34) Tentu saja, PDIP maupun PPP menolak anggapan mereka mencuri *start* kampanye.
- (35) Mencuri *start* hampir pasti dilakukan oleh siapa pun yang sedang berkuasa.
- (36) Sebab, memang, salah satu keuntungan yang sedang berkuasa, bahwa ia bisa mencuri *start*.
- (37) Lagi pula, justru seni berpolitik adalah bagaimana tetap mencuri *start* sekalipun ketahuan. [MI: 8/4-2003]

Hal yang sama juga tampak pada (39--40) frasa *spirit of the nation* yang bisa diartikan dengan 'semangat bangsa' sama-sama mempunyai nilai rasa dan berkonotasi (+), tetapi yang muncul tetap versi bahasa Inggris.

- (38) Momentum yang seharusnya memberi energi bagi lahirnya *spirit of the nation* untuk kebangkitan dibasmi sedemikian rupa sehingga momentum berubah menjadi malapetaka.
- (39) Suara yang membangkitkan *spirit of the nation*. [MI: 23/3-2003]

Gejala campur kode yang muncul bisa saja disebabkan oleh adanya perlindungan dari ragam jurnalistik, yaitu laras bahasa yang dilindungi *licentia poetica* sehingga boleh mempunyai gaya dan keunikan tersendiri. Kekhasan itu tidak saja pada pilihan bahasa yang dipakai melainkan penggunaan bentuk kalimat juga mempunyai ciri khas tersendiri. Akibatnya, dari segi struktur kalimat, kita sering melihat pelanggaran kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sugono (1998) dalam Alwi, dkk (2000) membenarkan pendapat tersebut bahwa

struktur kalimat yang digunakan media cetak memiliki kekhasan sendiri, khususnya pada bentuk partisipial.

Namun, bila dikaitkan fenomena ini dengan salah satu fungsi surat kabar, yaitu sebagai pencedekiaan kosakata bahasa Indonesia dan dalam upaya memasyarakatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat, rasanya perlu diperhatikan rambu-rambu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tersebut.

Kembali pada pemakaian campur kode di dalam editorial *Media Indonesia*, terlihat bahwa kata-kata asing yang digunakan pada umumnya ada padanannya atau dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi, penggunaan campur kode tetap dipakai. Selanjutnya, daftar kata asing dan daerah yang dipakai dalam campur kode itu disajikan pada Tabel 1a dan 1b (lihat lampiran).

Pada kasus pemakaian campur kode, terkesan bahwa bahasa Indonesia kurang bergengsi dibandingkan bahasa Inggris, apalagi dalam era globalisasi ini masyarakat dituntut untuk pandai berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa gado-gado pun dihalalkan. Apakah hal ini akan tetap dibiarkan? Kalau, ya, tentu saja kita bisa membayangkan bagaimana nasib bahasa Indonesia nantinya. Kalau tidak, bagaimana upaya pembuat kebijakan untuk menyikapi fenomena ini.

3. Upaya Rekayasa Bahasa Indonesia

Gejala campur kode erat sekali berkaitan dengan pengembangan unsur leksikal atau kosakata BI. Untuk pengembangan pada masa datang, perlu dilakukan suatu rekayasa terhadap bahasa Indonesia tersebut. Dardjowidjojo (2003) mengatakan bahwa rekayasa bahasa dapat dilakukan pada tataran fonologi, sintak, dan semantik. Selanjutnya ia mengatakan bahwa istilah rekayasa (*engineering*) ini dikemukakan oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Namun, Takdir membatasi pada tataran semantik, yaitu pada pengembangan unsur leksikal. Hasrat Takdir untuk memoderenkan bahasa Indonesia banyak mendapat tantangan karena ia cenderung menganut aliran internasionalisme dari pada nativisme.

Lebih lanjut Dardjowidjojo mengemukakan bahwa dua aliran ini tidak sama dasar pemikirannya. Kelompok nativisme berpijak pada akar kriteria yang telah ditetapkan oleh Komite Bahasa Indonesia tahun 1940, yaitu bahwa dalam pengembangan bahasa Indonesia kita harus lebih dulu melihat/mencari kata-kata dari bahasa Indonesia itu sendiri atau bahasa Melayu, apabila gagal, baru melirik bahasa yang ada di

negara Asia, dan bila gagal lagi baru kita melirik bahasa lain termasuk bahasa Inggris. Sebaliknya, aliran internasionalisme lebih cenderung mengadopsi kata-kata dari bahasa internasional daripada terus menggali kata-kata bahasa Indonesia dan bahasa daerah (informasi lebih lanjut baca Dardjowidjojo, 2003:227--247).

Di dalam upaya pemekaran kosakata BI, dua paham di atas sama baiknya, tapi menurut penulis untuk menggali kekayaan budaya Indonesia, paham nativisme cukup ampuh untuk diterapkan. Apabila dibandingkan dengan paham internasionalisme, memang paham nativisme terkesan sangat sulit dilaksanakan karena membutuhkan waktu dan usaha keras dari kita semua, terutama para linguist yang berkompeten di bidang itu.

Untuk kelompok nativisme, Moeliono (2001) dalam Dardjowidjojo (2003) telah mengemukakan suatu model untuk pemekaran kosakata bahasa Indonesia ini (lihat diagram 1). Kemudian, diagram ini dimodifikasi oleh Dardjowidjojo yang cenderung menganut aliran internasionalisme. Dardjowidjojo kurang setuju bila kita tetap memaksakan diri untuk menampilkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang tidak umum atau tidak dikenal masyarakat. Katanya, hal yang demikian terlalu ekstrim karena akan melahirkan kata-kata yang akhirnya tidak dimengerti orang. Jadi, baginya lebih baik diagram tersebut diubah dengan menghilangkan langkah (2--4). Bila benturan itu terjadi, cukup hanya melirik bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang umum saja, jika tidak ada lebih baik melirik bahasa asing atau bahasa Inggris itu sendiri. Apakah dengan cara mengadopsinya (dengan melakukan penyesuaian aspek-aspek fonologis, ortografis, dan sintaktis) atau melakukan penerjemahan (lihat diagram 2) yang hasilnya nanti (sama dengan Moeliono) akan menelurkan kata-kata yang akurat, singkat, tidak berkonotasi negatif, dan manis kedengarannya.

Apa pun pilihannya, tentu yang kita inginkan adalah bagaimana upaya kita untuk membuat masyarakat lebih mencintai bahasa Indonesia, tentu saja dengan menggali potensi yang ada untuk mengangkat derajat bahasa Indonesia itu semakin tinggi. Yang penting kita sadar bahwa bahasa Indonesia, termasuk bahasa daerah yang dipayunginya, merupakan aset budaya nasional yang perlu dipupuk dan dikembangkan keberadaanya.

4. Upaya Pengembangan Bahasa Indonesia

Dari hasil telaah bahasa Indonesia dalam kolom editorial *Media Indonesia* ini, ada beberapa catatan yang perlu dikembangkan, seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa variasi pilihan kata di dalam editorial tersebut dikemas dengan cukup unik karena ingin menciptakan

suatu tekstur tersendiri bagi pembaca. Keunikan itu menciptakan tautan pikiran pembaca kepada suatu peristiwa dan kondisi tertentu. Situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Sehubungan dengan itu, penulis editorial dapat dikatakan mampu mengekspresikan ungkapan perasaan yang sedang dialami masyarakat Indonesia. Penataan kosakatanya diperluas menurut sinonim kata, makna konotasi dan majasi sehingga melahirkan bahasa Indonesia yang memesona sehingga membuat pembaca berkeinginan untuk menelusuri tulisan itu lebih lanjut.

Terlepas dari itu, bahasa Indonesia yang ada tak luput dari pemakaian istilah asing sehingga bahasa Indonesia dalam editorial itu tidak mulus karena munculnya bercak-bercak kecil dalam kalimat itu. Artinya, pada tataran kalimat tersebut terdapat kata, frasa, dan kalimat dari bahasa lain yang seharusnya dicarikan padanan kata untuk itu. Perhatikan contoh (40--42), misalkan *KPU Watch* menjadi "Pengawas KPU", kata *absurd* menjadi *glanyong*³, sedangkan kalimat *time is over* diterjemahkan saja secara harfiah 'waktu sudah habis'.

- (40) a. Sangat baik jika kalangan LSM tidak hanya jalannya pemilu di tingkat masyarakat, tetapi juga melahirkan semacam **KPU Watch**. [MI: 18/3-2003]
- b. Sangat baik jika kalangan LSM tidak hanya jalannya pemilu di tingkat masyarakat, tetapi juga melahirkan semacam *Pengawas KPU*"
- (41) a. Di sinilah **absurd** dan anehnya tindakan seorang Bush.
- b. Di sinilah *glanyong* dan anehnya tindakan seorang Bush.
- (42) a. **Time is over** bagi diplomasi.
- b. *Waktu sudah habis* bagi diplomasi.

Untuk menyikapi keunikan bahasa Indonesia dalam editorial *Media Indonesia*, disarankan beberapa hal berikut.

- a. Pemakaian diksi yang mengacu pada makna konotasi dan majasi perlu disikapi secara positif dan lebih ditingkatkan pemakaiannya. Untuk itu, para penulis dan jurnalis agar lebih akrab dengan kamus, baik umum maupun khusus untuk memasyarakatkan sinonim kata BI yang ada seperti yang disarankan Moeliono (1989).
- b. Pemakaian bahasa daerah pada konteks tertentu diperlukan agar masyarakat mengenal bahasa daerah tersebut dengan catatan

³ Kata *glanyong* (bahasa Jawa) sebagai padanan kata *absurd* (bahasa Inggris) diusulkan oleh Sudjoko 1993 (dalam Dardjowidjojo 2003).

- bahasa atau ungkapan yang baru itu diterjemahkan ke dalam BI atau mencari padanan yang sesuai.
- c. Gejala campur kode, khususnya untuk campur kode antara bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya diupayakan untuk diminimalkan atau dihindarkan dengan mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu diupayakan tindakan rekayasa kosakata bahasa Indonesia dengan menggunakan model yang diusulkan Moeliono (2001) (lihat diagram 1 terlampir)
 - d. Lebih ditingkatkannya hubungan kerja sama antara para linguist, balai bahasa atau lembaga pusat kajian bahasa dan budaya dengan berbagai instansi media cetak termasuk media elektronik.
 - e. Untuk pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia disarankan untuk menerapkan metode pengajaran bahasa Indonesia yang berbasis kosakata.
 - f. Perlu ditingkatkan jumlah penelitian terhadap Bahasa Indonesia yang dipakai surat kabar secara komprehensif dengan berbagai sudut pandang linguistik.
 - g. Peningkatan fungsi organisasi profesi Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) dalam menyebarkan informasi kebahasaan.

REFERENSI

- Alwi, Hasan. Dendy Sugono, dan Abdul Razak Zaidan. 2000. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi. Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Depdiknas.
- Boeschoten, Hendrik. 1998. "Codeswitching, codemixing, and code alternation: What a difference. *In Trends in Linguistics Studies and Monographs 106: Codeswitching Worldwide*. Editor Rodolfo Jacobson. Mouton de Gruyter.
- Brown, G. dan Yule, G. 1996. *Analisis Wacana*. Jakarta: Gramedia. Terjemahan I. Soetikno. *Discourse Analysis*. 1983. Cambridge University Press.
- Crystal, David. 1991. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Dardjowidjojo, Soenjono. 2002. "Takdir's Language Engineering: Reiterated". Dalam *Rampai Bahasa, Pendidikan, dan Budaya. Kumpulan Esai Soenjono Dardjowodjojo*. Penyunting Katharina E. Sukanto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 2003. *Rampai Bahasa, Pendidikan, dan Budaya. Kumpulan Esai Soenjono Dardjowodjojo*. Penyunting Katharina E. Sukanto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fromkin and Rodman. 1988. *Introduction to Language*. 4th Edition. Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston, INC.
- Hamilton, Greygory. 1990. *Public Speaking for College and Career*. 2nd Edition. New York: McGraw-Hill Publishing Company.
- Holmes, Janet. 1995. *An Introduction to General Sociolinguistics*. London: Longman.
- 2001. *An Introduction to General Sociolinguistics*. 2nd Edition. London: Longman.
- Keraf, Gorys. 1994. *Diksi dan Gaya Bahasa. Komposisi Lanjutan I*. Jakarta: Gramedia.
- Mc Manish. 1991. *Language Files*. 5th Edition. Columbus: Ohio State University Press.
- Moeliono, Anton M. 1989. *Kembara Bahasa: Kumpulan Karangan Tersebar*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ohoiwutun, Paul. 2002. *Sociolinguistik. Memahami Bahasa dalam Konteks Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Visipro.
- Richards, Jack. et all. 1985. *Longman Dictionary of Applied Linguistics*. England: Longman.
- Romaine, Suzanne. 1994. *Language in Society.: An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Oxford University Press.
- Tarigan, H.G.1984. *Pengajaran Kosakata*. Bandung: Angkasa
- Toogood, Granville N. 1997. *The Articulate Executive*. Alih Bahasa: Bern Hidayat. *Eksekutif Memimpin dengan Kata-Kata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yanti, Yusrita. 1998. "Pesona Diksi Bahasa Indonesia di dalam Karya Sastra: Perluasan Kosakata Menurut Makna." Fakultas Sastra, Universitas Bung Hatta.

- , 2001. "Analisis Kohesi Gramatikal di dalam Cerita Pendek Bahasa Inggris." Laporan Penelitian LPPM. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- , 2002a "Bahasa Perempuan Sulit Dimengerti Pria" tulisan ilmiah populer. Padang: *Singgalang*, 3 November 2002.
- , 2002b. "Bahasa Gaul" Padang: *Haluan*, 10 November 2002.
- , 2002d. "Potensi Sastra Lisan, "Kaba" dalam Membentuk Moral Bangsa". Makalah dalam Ceramah Umum dengan Tim Yogyakarta. Padang: Fakultas Sastra, Universitas Bung Hatta.
- , 2003a. "Utak-atik Bahasa dalam Wacana Politik" Padang: Fakultas Sastra, Universitas Bung Hatta.
- , 2003c. "Utak-atik Bahasa Gaul di dalam SMS". Makalah Seminar Bulanan Fakultas Sastra, Universitas Bung Hatta, 8 Maret 2003.
- , 2003d. "Potensi Diri dan Seni Berkomunikasi di depan Umum" dalam *Cakrawala Baru: Liberamicorum untuk Prof. Soenjono Dardjowidjojo, Ph.D.* Sukamto, Katharina E. (penyunting). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tabel 1a. Daftar kata Asing/Daerah dalam Editorial MI

No.	Campur Kode BI + B Lain		Terjemahan dalam BI		
	B Asing (Inggris, Arab, Latin)	B Daerah (B Jawa)	Ada	Tidak	Catatan
1	I love you		V	V	
2	gender				
3	fair			V	
4	tax amnesty		V		pengampunan pajak
5	public goods.				
6	fit and proper test		V	V	uji kepatutan dan kelayakan
7	track record				
8	Fiat justicia et pereat mundus- (Lat.)		V		tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh
9	come back			V	
10	survive			V	
11	fair			V	
12	taushiyah (Arb.)			V	
13	President			V	
14	Transparency International			V	
15	sense of territory			V	
16	checks and balances			V	
17	godfather			V	
18	KPU Watch			V	
19	Time is over			V	
20	absurd			V	
21	benefit			V	
22	spirit of the nation			V	
23	The New Emerging Forces			V	
24	superpower			V	
25	pending matters			V	
26	pending dangers			V	
27	public utilities			V	
28	point of no return			V	
29	de facto			V	
30	de jure			V	
31	data base			V	
32	mainstream			V	

33	Vacuum cleaner		V	
34	power sharing		V	
35	nation		V	
36	Iraq under Attack		V	
37	start		V	
38	Joint campaign		V	
39		Nyleneh	V	
40		Njomplang	V	

Tabel 1b: Daftar Kata Asing dalam Editorial MI

No.	Campur Kode BI dan B Lain	Terjemahan dalam BI		
		Ada	Tidak	Catatan
37	Iraq under Attack		V	
38	disorder		V	
39	game is over		V	
40	Power		V	
41	track record		V	
42	social support		V	
43	post-factum		V	
44	Joint Council Meeting/JCM		V	
45	cessation of hostilities agreement		V	
46	Joint Committee Security		V	
47	show of force		V	
48	showbiz		V	
49	honorable mention	V		Juara Harapan
50	lip service		V	
51	success story		V	
52	good governance		V	
53	platform		V	
54	strong governance		V	
55	strong man		V	
56	sense of priority		V	
57	honoris causa		V	
58	vulgar		V	
59	track record		V	
60	To forgive, not to forget		V	
61	cover both sides		V	
62	happy		V	
63	right or wrong is my country		V	
64	'modern'		V	

LAPORAN SIDANG

- Hari, tanggal : Rabu, 15 Oktober 2003
- Judul makalah : 1. Bahasa Media Massa: Laras Bahasa Jurnalistik yang perlu Dikembangkan
2. Mengkaji Ulang Peran Media Massa dalam Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia
3. Bahasa Indonesia dalam Editorial *Media Indonesia*
- Penyaji : 1. Mulyadi Eko Purnomo
2. Kasmansyah
3. Yusrita Yanti
- Pemandu : Frans Rumbrawer
- Pencatat : 1. Jerniati
2. S.S.T Wisnu Sasangka

TANYA JAWAB

1. **Penanya:** Sukendar (Guru SMU Magelang, Jawa Tengah)
Sejauh mana pengaruh penggunaan bahasa terhadap moral pengguna bahasa?

Jawaban:

Pengaruhnya sangat banyak, baik yang negatif maupun yang positif. Pengaruh yang positif dapat mendidik, sedangkan yang negatif tidak. Seharusnya bahasa di media massa itu yang baik sebab pengaruhnya sangat luar biasa terhadap pembaca

2. **Penanya:** Yayah B. Lumintintang (Pusat Bahasa)
Apakah betul bahasa jurnalistik harus berdasarkan konotasi majasi dan imaji?

Jawaban:

Dari segi jurnalistik saya melihat makna kata dari segi konotasi dan majasi. Majasi itu justru yang menarik sebab dapat menjadi materi pengajaran bahasa Indonesia.

3. **Penanya:** Isristiyana (Dosen Universitas Suryakencana)
Konsep apa yang digunakan untuk membedakan laras?

Jawaban:

Saya menggunakan konsep yang ada dalam tata bahasa. Konstruksi kalimat ada yang dapat dijadikan sebagai laras.

4. **Penanya:** Maryono Dwi Raharjo (Dekan Fakultas Sastra, UNS)
Bagaimana peran yang positif terhadap media massa itu seperti apa? Kalau yang negatif pasti banyak. Jika porno subur, negara pasti hancur.

Jawaban:

Seharusnya bahasa di media massa itu yang baik sebab pengaruhnya terhadap pembaca sangat luar biasa.

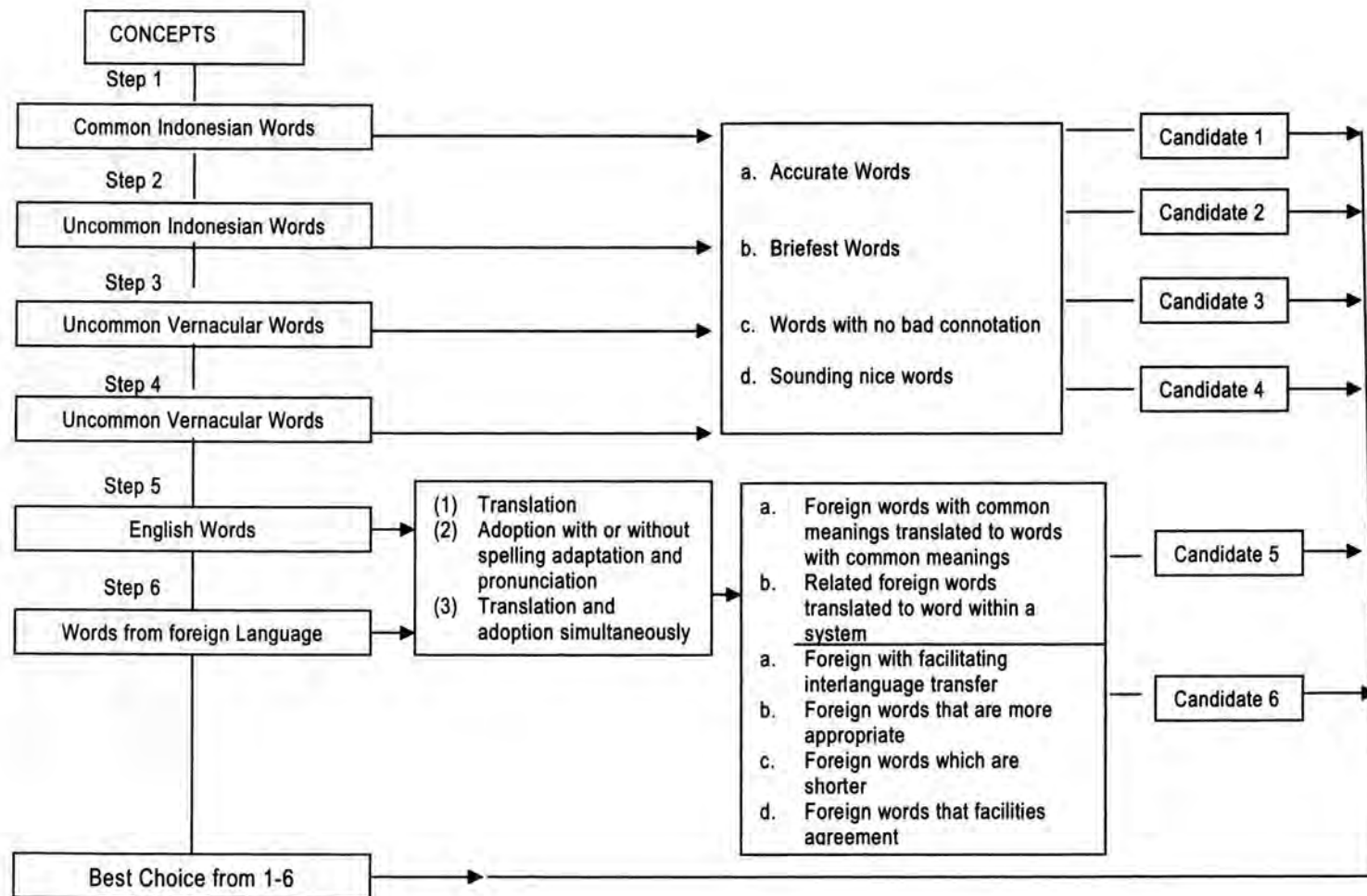


Diagram 1: The Neo-nativists' Approach to Word Borrowing (Moeliono (2001) dikutip dari Dardjowidjojo (2003:239).

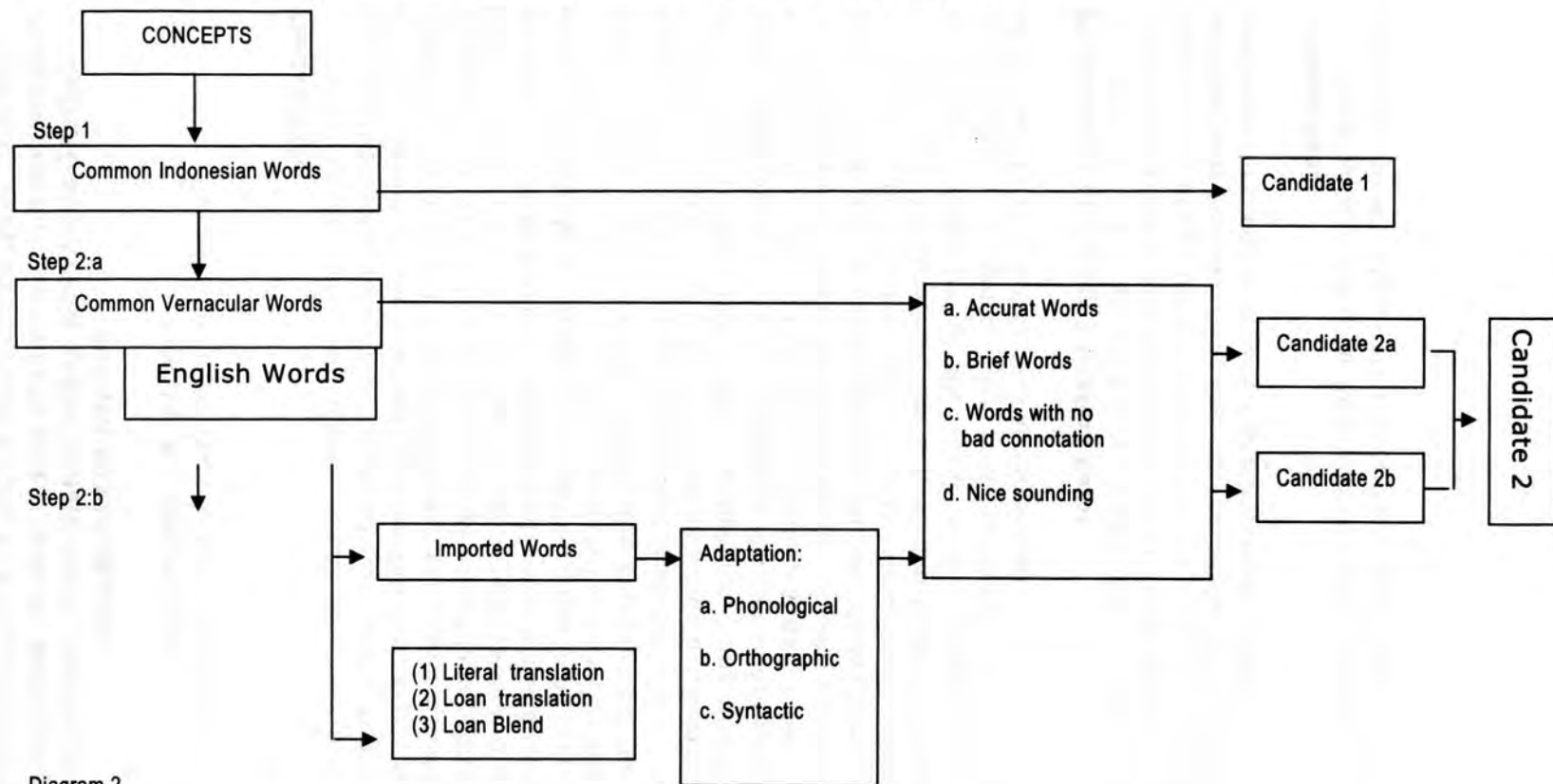


Diagram 2

(Dardjowidjojo: 2003)

KETERSEDIAAN, KEBERMANFAATAN DAN KEBERMAKNAAN BAHASA MINANGKABAU DALAM MEDIA SURAT KABAR, RADIO DAN TELEVISI DI PADANG SUMATERA BARAT DALAM MEMELIHARA BAHASA DAN BUDAYA MINANGKABAU

Prof. Dr. M. Zaim, M.Hum

Universitas Negeri Padang/MLI Cabang Padang

Pendahuluan

Surat kabar, radio, dan televisi adalah tiga jenis media massa yang dimanfaatkan oleh masyarakat, baik sebagai sarana komunikasi, sumber informasi aktual maupun sebagai sumber hiburan. Ketiga media massa ini digemari oleh masyarakat Sumatera Barat yang dikenal sebagai masyarakat Minangkabau. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pertumbuhan surat kabar, dan tumbuh berkembangnya radio-radio swasta di kota Padang. Di samping itu, TVRI Stasiun Padang masih tetap bertahan dengan program-program budaya Minangkabau di tengah kesulitan dana yang dihadapinya.

Hal yang menarik pada ketiga jenis media massa ini adalah tersedianya rubrik, acara, atau program yang dikemas dalam bahasa Minangkabau, bahasa asli (*native language*) masyarakat Sumatera Barat. Tulisan ini mencoba menganalisis ketersediaan, kebermanfaatan, dan kebermaknaan rubrik, acara, atau program berbahasa Minangkabau yang disajikan oleh ketiga jenis media massa ini dalam kaitannya dengan upaya memelihara bahasa dan budaya daerah, yaitu bahasa dan budaya Minangkabau.

Ketersediaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pada jenis rubrik, acara, atau program apa saja bahasa Minangkabau digunakan. Kebermaknaan, maksudnya, adalah sejauh mana rubrik, acara, atau program itu bermakna dalam memelihara bahasa dan budaya Minangkabau. Kebermanfaatan maksudnya adalah sejauh mana manfaat acara itu dirasakan oleh pembaca, pendengar, dan pemirsa masyarakat Minangkabau dalam memelihara bahasa dan budaya Minangkabau.

Media massa di Padang Sumatera Barat

Pada saat ini, ada tiga jenis media massa yang muncul dan berkembang di Padang Sumatera Barat, yaitu surat kabar, radio, dan televisi. Ketiga media massa ini mempunyai segmen pencapir (pendengar, pembaca, pemirsa) yang berbeda. Ada yang diperuntukkan untuk segmen kaula muda, masyarakat menengah ke atas, dan masyarakat umum.

a. Surat Kabar

Surat kabar adalah media informasi berita dan hiburan yang dikemas untuk konsumsi sehari-hari masyarakat. Surat kabar merupakan media

massa cetak utama yang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Jenis media cetak ini mudah ditemukan dan dapat dibaca oleh berbagai kalangan.

Perkembangan penerbitan surat kabar berkembang dengan pesat di era reformasi ini. Pada era orde baru jumlah surat kabar harian di Padang hanya tiga buah, yaitu *Haluan*, *Singgalang*, dan *Semangat*, serta satu surat kabar mingguan, yaitu *Canang*. Namun, sekarang ini telah berkembang menjadi sepuluh surat kabar seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Surat Kabar yang terbit di Padang Sumatera Barat

No	Nama Surat Kabar	Moto	Jenis Surat Kabar
1.	<i>Haluan</i>	Mencerdaskan kehidupan masyarakat demi kemajuan bangsa	Harian
2.	<i>Singgalang</i>	Membina harga diri untuk kesejahteraan nusa dan bangsa	Harian
3.	<i>Mimbar Minang</i>	Untuk pembaruan dan silaturahmi	Harian
4.	<i>Padang Ekspres</i>	Koran Nasional dari Sumbar	Harian
5.	<i>Pos Metro Padang</i>	Terbit Nonstop	Harian
6.	<i>Zaman</i>	-	Mingguan
7.	<i>Serambi Pos</i>	Informasi Aktual Ranah Minang	Mingguan
8.	<i>Garda Minang</i>	Tajam Aktual dan Faktual	Mingguan
9.	<i>Rakyat Mandiri</i>	Suara Nurani Rakyat	Mingguan
10	<i>Media Sumbar</i>	Informasi Independen yang Terpercaya	Mingguan

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 buah surat kabar di Padang, lima berupa surat kabar harian dan lima lainnya surat kabar mingguan. Dua yang pertama merupakan pemain lama dan delapan lainnya muncul dan berkembang di era reformasi.

b. Radio

Ada beberapa pemancar/studio radio yang ada di Kota Padang, sebagian berupa radio milik pemerintah (RRI) dan sebagian lagi merupakan radio swasta niaga. Pemancar radio yang ada di Padang Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Radio di Padang Sumatera Barat

No	Nama Radio	Jenis	Segmen Pasar	Keterangan
1.	RRI Padang	AM	Umum	
2.	Suara Subuh	AM	Umum	
3.	RRI Programa 2 FM	FM	Umum	
4.	RRI Programa 3 FM	FM	Umum	
5.	Padang FM	FM	Umum	
6.	Sushi FM	FM	Menengah ke atas	
7.	Classy FM	FM	Menengah ke atas	
8.	Arbes Rasonia	FM	Kaula muda	
9.	SIP FM	FM	Kaula muda	

Dari sembilan pemancar radio di Padang, dua pemancar berfrekuensi AM dan tujuh pemancar berfrekuensi FM. Lima radio (RRI Padang, Suara Subuh, Padang FM, RRI Programa 2, dan RRI Programa 3) mempunyai segmen pasar umum, dua radio (Sushi FM dan Classy FM) mempunyai segmen pasar menengah ke atas, dan dua radio (Arbes dan SIPP FM) mempunyai segmen pasar kaula muda.

c. Televisi

Di samping media massa surat kabar dan radio, Kota Padang juga mempunyai satu stasiun televisi, yaitu TVRI Stasiun Padang. Stasiun televisi ini menyiarkan acara daerah mulai pukul 16.00 sore sampai 19.00 malam. Dalam tiga jam siaran ini, TVRI Stasiun Padang menyajikan acara berita ranah minang, dialog, kesenian tradisional, dan musik/hiburan.

Bahasa dan Budaya Minangkabau

a. Bahasa Minangkabau

Bahasa Minangkabau (BM) adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat Minangkabau di perantauan. Jumlah penutur bahasa Minangkabau saat ini sekitar enam juta orang. Di samping bahasa Minangkabau, di Sumatera Barat juga terdapat bahasa Mentawai yang digunakan oleh Masyarakat di kepulauan Mentawai, bagian barat propinsi Sumatera Barat.

Seperti bahasa lain di dunia, Bahasa Minangkabau mempunyai ragam bahasa sehari-hari dan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi khusus. Jenis yang kedua ini dapat dikelompokkan ke dalam Sastra Minangkabau. Menurut Djamaris (2002), sastra Minangkabau dapat berupa sastra lisan dan sastra tertulis. Sastra lisan ini dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu puisi, prosa, dan drama.

Selanjutnya Djamaris (2002) menyatakan, puisi dalam sastra Minangkabau dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu (1) mantra, puisi yang diciptakan untuk mendapatkan kekuatan gaib dan sakti, (2) pantun, sejenis puisi yang terdiri atas empat baris bersajak a b a b, dua baris pertama berupa sampiran dan dua baris terakhir berupa isi, (3) talibun, hampir sama dengan pantun tetapi jumlah barisnya lebih dari empat dan jumlahnya selalu genap, (4) pepatah petiti, hampir sama dengan peribahasa dalam sastra Indonesia, yaitu ungkapan yang mengandung pengertian yang dalam, luas, tepat, halus dan kiasan, (5) teka teki, yaitu pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga jawabannya sukar ditebak, (6) syair, yaitu puisi yang terdiri atas empat baris, bersajak a a a a, dan keempat barisnya berupa isi, serta (7) pasambahan, yaitu pembicaraan dua pihak untuk menyampaikan maksud dan tujuan dengan hormat dan pilihan kata serta kiasan dengan irama tertentu.

Prosa dalam sastra Minangkabau terdiri atas *curito*, *kaba*, dan *tambo*. *Curito* (cerita) merupakan cerita pendek, sederhana, isinya bersifat dongeng, dan bahasanya bahasa prosa biasa. Termasuk dalam jenis cerita ini, di samping dongeng, adalah legenda, misalnya *Si Malin Kundang*. *Kaba* adalah cerita prosa berirama yang berbentuk narasi (kisah) dan tergolong cerita panjang, misalnya *Kaba Anggun nan Tungga*. *Tambo* merupakan karya sastra yang menceritakan sejarah (asal usul) suku bangsa, negeri, dan adat Minangkabau.

Drama dalam sastra Minangkabau berbentuk *randai*, yaitu pentas tradisional Minangkabau yang dimainkan di lapangan terbuka dalam bentuk arena. *Randai* mengandung unsur dialog, tari, lagu, dan musik (saluang, talempong).

b. Budaya Minangkabau

Dalam konsep sehari-hari istilah kebudayaan dipahami sebagai hal-hal yang mengacu kepada sesuatu yang indah, seperti tari-tarian, seni rupa, seni suara, dan kesusasteraan. Dalam ilmu antropologi, istilah kebudayaan didefinisikan oleh Koentjaraningrat (1990) sebagai “keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Definisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya beberapa tindakan manusia yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar. Filsafat hidup orang Minang adalah “Alam takambang jadi guru”, dunia di sekitar kita merupakan lingkungan tempat semua kenyataan dan kejadian serta rahasia di balik kejadian itu dapat dipelajari dan dijadikan guru.

Budaya, menurut KBBI (2001), adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju), adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dengan demikian, adat istiadat, atau kebiasaan masyarakat Minangkabau, baik berupa tindakan, gagasan, mau-

pun hasil karya masyarakat Minangkabau dapat dinyatakan sebagai budaya Minangkabau. Oleh karena itu, adat istiadat, kebiasaan, gagasan, kesenian (tari, musik, drama), dan karya sastra yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau dapat digolongkan kepada kebudayaan Minangkabau.

Ketersediaan Bahasa Minangkabau pada Media Massa di Padang Sumatera Barat

Seperti layaknya media massa nasional, media massa di Padang, Sumatera Barat menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan misinya. Namun, bahasa Minangkabau, sebagai salah satu bahasa daerah, digunakan pada beberapa rubrik, program, dan acara pada media massa yang ada di Padang. Penggunaan bahasa Minangkabau ini terkait dengan menyajikan budaya Minangkabau. Berikut ini akan dijelaskan ketersediaan bahasa dan budaya Minangkabau tersebut pada media massa di Padang, yaitu surat kabar, radio, dan televisi.

a. Surat Kabar

Tidak semua surat kabar yang terbit di Padang menyediakan bahasa dan budaya Minangkabau dalam surat kabarnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Ketersediaan Bahasa dan Budaya Minangkabau dalam Surat Kabar di Padang Sumatera Barat

No	Nama Surat Kabar	Jenis Tulisan					
		Opini	Judul Kolom	Judul Halaman	Judul Berita	Cerita	Pantun
1.	<i>Haluan</i>						
2.	<i>Singalang</i>	√	√	√	√	√	√
3.	<i>Mimbar Minang</i>	√					
4.	<i>Padang Ekspres</i>	√					
5.	<i>Pos Metro Padang</i>		√				√
6.	<i>Zaman</i>		√				
7.	<i>Serambi Pos</i>	√					√
8.	<i>Garda Minang</i>	√					
9.	<i>Rakyat Mandiri</i>						
10.	<i>Media Sumbar</i>	√					

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 10 surat kabar, hanya 8 yang menyediakan bahasa dan budaya Minangkabau. Dari segi ketersediaan bahasa Minangkabau di surat kabar, hampir semua surat kabar menggunakan bahasa Minangkabau dalam menyampaikan opini baik berupa karikatur maupun komentar. Beberapa surat kabar juga menggunakan

bahasa Minangkabau untuk memberi judul kolom dan judul berita. Sementara, hanya surat kabar Singgalang yang menggunakan bahasa Minangkabau dalam berbagai jenis tulisan, seperti cerita (cerpen dan cerbung) dan pantun.

Dari 10 surat kabar yang terbit di Padang, lima surat kabar menyajikan bahasa Minang pada pojok opininya. Pada dua surat kabar, yaitu surat kabar *Singgalang* dan *Media Sumbang*, menyampaikan opini ini dalam bentuk karikatur dan dalam bentuk pojok opini. Sementara tiga surat kabar lagi, yaitu *Padang Ekspres*, *Serambi Pos*, *Garda Minang*, dan *Mimbar Minang* menyajikannya dalam bentuk pojok opini. Lihatlah contoh berikut ini.

b. Karikatur Berbahasa Minang

Karikatur berbahasa Minangkabau merupakan penyampaian opini lewat gambar karikatur dengan menggunakan dialog berbahasa Minangkabau. Lihatlah contoh berikut ini:

(1) *Tanbaro (Singgalang)*

(Gambar dialog antara cucu dengan kakeknya, yang dalam BM disebut *inyiak*)

+ *Inyiak picayo nyiak?* (Kakek percaya kek?)

- *Lai Senek* (Ada sedikit)

+ *Awak indak* (Saya tidak)

(2) *Opini (Media Sumbang)*

(Gambar dialog antara dua orang dewasa, yang satu pakai peci dan yang lainnya tidak)

+ *Ado dana Rp.250 juta untuak penertiban Terminal Bayangan. Tapi kok tatap indak bisa ditertibkan?? Di ma salahnyo??* (Ada dana Rp. 250 juta untuk penertiban Terminal Bayangan. Tapi kok tetap tidak bisa ditertibkan?? Dimana salahnya??)

- *Komitmen moral nan randah, atau?? Antahlah, Ngkul!* (Komitmen moral yang rendah, atau.....? Entahlah, pak!!)

Karikatur seperti contoh di atas biasanya berupa dialog antara dua orang dalam BM sesuai dengan topik yang sedang hangat-hangatnya dibi-citakan pada surat kabar hari itu.

c. Pojok Opini

Pola penyampaian pojok opini sama pada semua surat kabar yang terbit di Padang, yaitu kutipan berita pada baris pertama, kemudian diikuti dengan penyampaian opini dalam bahasa Minangkabau. Lihatlah contoh berikut ini.

(3) POJOK

Soal invasi, Saddam-Bush Adu Panco

- *Bush indak barani.*

SLTP No. 34 Padang Diresmikan

- *Horee, anak bisa sakola...*

Disambut positif. Syafii Jadi Wapres

- *Mudah-mudahan urang awak jadi Presiden*

(*Padang Ekspres*, Selasa 8 April 2003, hal. 4)

(4) Galitiak Garda....

+ Punyo izin dan Dokumen Kayu Tetap dikawal?

- *Kaolah!, lah dikawal pulo mangko kabanyak pitih kalua!*

+ SP BUMN Yes!, BUMD No!

- *Oh Yess...!, Oh No...!, Ondeh Mandeh!*

+ Mendagri Membatalkan Pemilihan Ulang Wako dan Wawako Padang.

- *Ondeh mandeh, Hilang pitih masuak.*

Angku Garda

(*Garda Minang*, Rabu 11-17 Juni 2003, hal. 1)

(5) SARABI Bakuah

+ Dua anggota DPRD Agam dari PPP adu jotos.

- *Rancak mah...*

+ Bursa Wako Pariaman hangat.

- *Ma nan hangat jo sala lauak sudah bagoreang, Jo...?*

+ Setelah ijazah palsu dan SK palsu, kini beredar pula SK Mendagri palsu.

- *Padang memang suko kepalsuan.*

Bung Seram

(*Serambi Pos*, Senin, 23-29 Juni 2003, hal. 2)

(6) Kopi Pahit

+ Mendagri larang Pilwako Padang hari ini.

- *Tangka bana mah...*

+ Demi walikota, wakil Bupati Pariaman mundur.

- *Mantap, Jo...?*

(*Mimbar Minang*, Rabu, 30 Juli 2003, hal. 1)

Contoh (3) adalah “Pojok” versi *Padang Ekspres* tanpa ada identitas pemberi opini. Contoh (4) dengan judul pojok *Galitiak Garda* dan pemberi opini adalah *Angku Garda*, contoh (5) dengan judul pojok *Sarabi bakuah* dengan pemberi opini *Bung Seram*, dan contoh (6) dengan judul pojok *Kopi Pahit* tanpa identitas pemberi opini. Lihatlah ungkapan-ungkapan BM yang menunjukkan Opini pada data di atas.

- a. *Bush indak barani.* (Bush tidak berani)
- b. *Horee, anak bisa sakola...* (Horee anak bisa sekolah)
- c. *Mudah-mudahan urang awak jadi Presiden* (Mudah-mudahan orang kita jadi Presiden)
- d. *Kaolah!, lah dikawal pulo mangko kabanyak pitih kalua!* (Rasain, sudah dikawal pula maka banyak duit keluar)
- e. *Oh Yess...!, Oh No...!, Ondeh Mandeh!* (Oh ya...! Oh tidak.... Ya mak!)
- f. *Ondeh mandeh, Hilang Pitih masuk.* (Ya mak, hilang duit masuk)
- g. *Rancak mah...* (Bagus nih...)
- h. *Ma nan hangat jo sala lauak sudah bagoreang, Jo...?* (Mana yang hangat dibandingkan sala lauak baru saja digoreng, kah..?)
- i. *Padang memang suko kepalsuan.* (Padang memang suka kepalsuan)
- j. *Tangka bana, mah!*

Ungkapan-ungkapan di atas merupakan opini berupa tanggapan, keluhan, rasa gembira, pernyataan, dan sebagainya.

d. Judul Kolom

Yang dimaksud dengan judul kolom di sini adalah subjudul yang ada pada halaman tertentu isi suatu surat kabar. Judul-judul kolom berbahasa Minang itu misalnya:

- a. *Nan Takana-Takana Juo* (Yang masih teringat-ingat)
- b. *Lamak dek Awak Katuju dek Urang* (Enak sama kita, senang sama orang)
- c. *Silek Kato* (Silat kata)
- d. *Kampiun Serambi* (sejenis makanan “kampiun” yang disajikan oleh koran Serambi)
- e. *Surek dari Rantau* (surat dari rantau)

e. Judul Halaman

Yang dimaksud dengan judul halaman adalah judul yang diberikan pada lembaran-lembaran tertentu di surat kabar. Judul-judul halaman berbahasa Minangkabau itu misalnya:

- a. *Raso jo Pareso* (Rasa dan Periksa)
- b. *Umbuik Mudo* (Generasi Muda)
- c. *Ranah Bundo* (Berita kampung halaman)

f. Judul Berita

Yang dimaksud dengan judul berita di sini adalah pemakaian bahasa Minangkabau untuk judul berita. Misalnya:

- a. Nostalgia Gelanggang Bukik Ambacang: *Ompek-ompek Kudo nan Lopeh, Agam Juo Pacu nan Manang* (Empat-empat kuda dilepas, Agam juga yang menang berpacu)
- b. *Disiko Indak, nan Disitu Iyo* (Di sini tidak, yang di sana ya).

g. Cerita dan Karya Sastra

Cerita dan karya sastra bahasa Minang yang ada dalam surat kabar dapat berupa:

- a. *curito* (cerita), yaitu cerita yang terjadi pada seseorang dan disampaikan dalam bahasa Minang formal, misalnya cerita yang disajikan pada kolom *Nan takana-takana juo, Senggang, Lamak dek awak katuju dek urang*, dan *Kakobeh*
- b. cerita pendek, yaitu cerita pendek yang disampaikan dalam bahasa Minang, misalnya *Maliang Jemputan (Singgalang)*
- c. cerita bersambung, yaitu berupa cerita bersambung yang ditulis dalam bahasa Minang formal.
- d. pantun, yaitu sejenis puisi yang bersajak a b a b. Pantun ini dapat berupa pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun biasa. Misalnya:

*Rang kurai mamasak kacang padi
Handak dibaok ka Nagari Taluak
Sabana banyak parangai padusi kini
Bantuak elok parangainyo buruak*
(“Pantun Jenaka” *Posmetro*, 20 Juli 2003)

*Sungai Saria Pakan Rabaa
Luruih jalannyo ka Sicincin
Nasib denaiko antah ka baa
Mancaliak adiak batuka cincin*
(“Mari kito bapantun” *Serambi Pos*, 23 Juni 2003)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan bahasa Minangkabau di surat kabar sangat bervariasi, mulai dari sepotong karikatur, opini, judul halaman, judul kolom, sampai ke bentuk cerita (cerpen dan cerbung) yang berupa karya sastra dan pantun sebagai salah satu budaya Minang yang dominan dapat kita temukan pada setiap penggunaan bahasa Minangkabau dalam masyarakat Minangkabau.

k. Radio

Radio-radio di Padang juga bervariasi dalam hal penggunaan bahasa Minang dalam siarannya. Lihatlah Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Ketersediaan bahasa dan Budaya Minangkabau dalam
Radio di Padang Sumatera Barat

No	Nama Radio	Jenis Acara				Ket
		Berita	Iklan	Hiburan	Dialog	
1.	RRI Padang	√	√	√	√	
2.	RRI Programa II	√	√	√	√	
3.	RRI Programa III			√		
4.	Sushi FM			√	√	
5.	Arbes Rasonia			√	√	
6.	Classy FM			√		
7.	Padang FM			√	√	
8.	SIP FM			√		

Di radio yang ada di Padang, bahasa Minangkabau digunakan dalam program berita, iklan, hiburan (musik Minang modern dan tradisional), dan dialog. Namun, setiap radio mempunyai kebijakan tersendiri dalam menentukan siaran berbahasa Minangkabau. RRI Padang dan RRI Programa 2 misalnya menggunakan bahasa Minangkabau untuk berita, iklan, hiburan dan dialog, sementara Sushi FM hanya untuk hiburan dan dialog. Arbes Rasonia hanya untuk dialog.

l. Televisi

TVRI Stasiun Padang mempunyai program khusus “dialog” dalam bahasa Minangkabau dalam suatu kemasan acara yang disebut dengan *Carito Lapau*. Acara ini menggambarkan budaya berkumpul-kumpulnya pria Minangkabau di *lapau* (kedai kopi) dan mengupas persoalan aktual yang terjadi, baik di lingkungan mereka maupun situasi kenegaraan. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Minangkabau sehari-hari. Acara ini disiarkan dengan durasi satu jam, yaitu dari pukul 17.00--18.00 WIB. Acara ini merupakan program unggulan TVRI Stasiun Padang dan semula disajikan satu kali seminggu setiap hari Sabtu, namun kemudian menjadi satu kali lima belas hari. Pengisi acara ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih sesuai dengan topik yang dibahas pada hari itu.

Di samping acara *carito lapau*, bahasa Minangkabau juga digunakan oleh TVRI stasiun Padang dalam acara dialog “Kesehatan Keluarga” yang dengan kocak dibawakan oleh *One* dengan bahasa Minang dialek Padang

Pariamannya. Acara ini berupa dialog interaktif dengan memberi kesempatan kepada pemirsa ikut bertanya dan berkomentar dalam dialog yang disajikan.

Di samping kedua acara itu, pada setiap hari Selasa, TVRI Stasiun Padang juga menyajikan acara budaya Minangkabau berupa seni pertunjukan *randai* (drama tradisional Minangkabau), *saluang* (musik tradisional minang diiringi dengan tukang dendang), dan *rabab* (musik tradisional Minangkabau diiringi dengan tukang *kaba*).

Dua acara khas Musik Minang yang menggambarkan budaya Minang juga diprogramkan oleh TVRI Stasiun Padang, yaitu *badendang* yang menyajikan nyanyi-nyanyi Minangkabau yang sedang dan pernah berjaya di bumi nusantara, serta *gamad* yang menyajikan musik Melayu Minang.

Kebermanfaat Bahasa Minangkabau pada Media massa di Padang Sumatera Barat

Bahasa Minangkabau yang digunakan dalam media massa di Padang adalah BM sebagai alat komunikasi, yaitu mengomunikasikan informasi-informasi aktual dan hiburan kepada masyarakat pendengarnya, yaitu masyarakat Minangkabau. Setiap media massa mencoba menyeleksi program acara apa saja yang layak disampaikan dalam BM.

Surat kabar sebagai media cetak memilih menyampaikan opini, berita, dan hiburan untuk disampaikan dalam BM. Radio sebagai media audio memilih berita, dialog, dan hiburan sebagai acara yang perlu disampaikan dalam BM. Sementara televisi memilih dialog dan hiburan sebagai acara yang perlu disampaikan dalam BM. Ini semua mengindikasikan kebermanfaatan program berbahasa Minang untuk dibaca, didengar, dan ditonton dengan nyaman dan santai. Opini, berita dan hiburan enak dibaca pada suasana santai. Berita, dialog dan hiburan juga enak didengar dalam waktu senggang. Demikian pula dialog yang disampaikan dalam bentuk hiburan, dan hiburan itu sendiri enak ditonton dalam suasana yang santai juga. Jadi, pemilihan acara ini dengan mempertimbangkan suasana yang memungkinkan dihadapi pembaca, pendengar dan pemirsa. Apabila suasana ini diperhatikan oleh pemilih program, pembaca, pendengar, dan pemirsa tentu akan merasakan manfaat semuanya ini bagi mereka.

Kebermanfaatan bahasa Minangkabau dalam media massa ini dapat pula dilihat dari fungsi bahasa yang digunakan dalam penggunaan BM ini. Secara umum ada tiga fungsi bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual (Sudaryanto, 1990). Fungsi ideasional berkaitan dengan peran bahasa untuk mengungkapkan 'isi', pengungkapan pengalaman penutur tentang dunia nyata. Fungsi interpersonal berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan menjaga hubungan sosial. Fungsi tekstual berkaitan dengan fungsi bahasa untuk membentuk berbagai mata rantai kebahasaan dan mata rantai unsur situasi yang memungkinkan digunakannya bahasa oleh pemakainya. Bahasa Minangkabau yang diguna-

kan oleh media massa di Padang menggunakan ketiga fungsi bahasa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jenis acara, program, dan rubrik yang disajikan media massa.

Kebermaknaan Bahasa Minangkabau pada Media massa di Padang Sumatera Barat

Yang dimaksud dengan kebermaknaan di sini adalah sejauh mana rubrik, acara atau program berbahasa Minangkabau pada media surat kabar, radio, dan televisi tersebut bermakna dalam memelihara bahasa dan budaya Minangkabau. Hal ini dapat dilihat dari jenis bahasa yang digunakan dan jenis budaya yang ditulis, disiarkan, dan ditayangkan pada media massa di Padang.

Bahasa Minangkabau yang digunakan oleh media massa di Padang bervariasi, mulai dari bahasa Minangkabau informal, bahasa Minangkabau formal, sampai bahasa Minangkabau *frozen*. Rubrik opini pada surat kabar, misalnya, disajikan dalam bentuk bahasa Minangkabau informal, demikian juga pada acara dialog dan hiburan. Sementara pada beberapa tulisan, misalnya pada kolom *Raso jo Pareso*, ada rubrik *Lamak dek Awak Katuju dek Urang*, *Nan Takana-takana Juo*, dan *Camin Situasi* digunakan bahasa Minangkabau formal. bahasa Minangkabau klasik yang cenderung berupa bahasa Minangkabau *frozen* digunakan dalam dialog “randai”.

Jenis budaya yang digunakan adalah sastra Minangkabau, seperti *carito*, kaba, dan pantun; kesenian tradisional, seperti tari Minang, musik saluang, rabab dan talempong, serta drama tradisional Minangkabau, yaitu *randai*. Kebiasaan lelaki Minang duduk di lepau sambil bertukar pikiran juga dikemas untuk menyampaikan dialog tentang masalah yang hangat dibicarakan dan dikemas dengan menarik oleh TVRI Stasiun Padang.

Semua acara di atas menggambarkan betapa bermaknanya bahasa Minangkabau yang digunakan oleh media massa di Padang dalam memelihara kebudayaan Minangkabau. Tidak hanya jenis bahasa Minangkabau informal yang digunakan, bahasa Minangkabau formal dan sastra juga digunakan, baik di surat kabar, radio maupun televisi. Demikian juga, kebudayaan Minangkabau disajikan dalam kemasan bahasa tulis dan bahasa lisan yang mencerminkan kebudayaan Minangkabau secara menyeluruh.

Simpulan

Bahasa Minangkabau digunakan oleh media massa yang terbit di Padang untuk memelihara budaya Minangkabau. Hal ini dapat dibuktikan dengan digunakannya bahasa Minangkabau dalam berbagai jenis rubrik, program, dan acara baik pada surat kabar, radio, maupun televisi. Pada media surat kabar, bahasa Minangkabau digunakan untuk menyampaikan opini, judul berita, judul halaman, judul kolom dan menyampaikan cerita

berupa cerita pendek dan cerita bersambung. Di samping itu, bahasa Minangkabau juga digunakan untuk menyampaikan pengalaman yang tak terlupakan. Pada media radio, bahasa Minangkabau digunakan untuk menyampaikan berita, iklan, dialog informal, dan hiburan musik. Sementara pada media televisi, bahasa Minangkabau digunakan untuk menyampaikan budaya Minang yang berupa dialog spesifik Minangkabau *curito lapau* dan kesenian tradisional berupa randai, saluang, rabab, dan musik tradisional minang lainnya.

Tersedianya sarana berbahasa Minangkabau pada media cetak, audio, dan audio visual ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan dianggap lebih informatif karena disampaikan dalam bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Demikian juga untuk budaya Minangkabau, dengan disiarikannya kesenian-kesenian tradisional (tari, nyanyi, rabab, saluang, randai) pada TVRI Stasiun Padang, masyarakat merasa masih mempunyai kesenian seperti ini yang mulai kurang diminati generasi muda Minangkabau.

Kebermaknaan acara ini dapat dilihat dari antusias pembaca, pendengar, dan penonton membaca, mendengar, dan menonton acara-acara berbahasa Minang ini. Secara umum masyarakat merasa tergugah hatinya untuk menikmati sajian-sajian acara ini setiap kali acara ini muncul, baik di surat kabar, radio, maupun televisi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Djamaris, Edward. 2002. *Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Koentjaraningrat. 1990. *bahasa Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryanto. 1990. *Menguak Fungsi Hakiki Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suriasumantri, Jujun (1998). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

**PERAN MEDIA MASSA
DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA MELALUI PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR:
PEMBERDAYAAN RAGAM BAHASA INDONESIA**

Imelda Vance
Balai Bahasa Pekanbaru

Pendahuluan

Media massa baik cetak maupun elektronik mempunyai kemampuan besar untuk mempengaruhi .. masyarakat Berita-berita yang disampaikan media massa merupakan informasi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat. Di samping itu, cara media massa menyampaikan informasi (perilaku berbahasa) juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam berbahasa.

Akhir-akhir ini media massa sering mendapat kritikan baik karena isi berita maupun karena bahasa yang digunakan. Media massa sering dikatakan tidak mendidik, juga dikatakan sebagai pen cetus dan pemicu perpecahan karena berita-berita yang diturunkannya. Individu dengan individu, individu dengan institusi, institusi dengan institusi saling tuntutan atau saling mengajukan somasi setelah mendengar atau membaca pe ll lberitaan media massa. Di samping itu, para pemerhati bahasa Indonesia menilai bahasa yang digunakan oleh media massa belum sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbagai kesalahan kebahasaan ditemukan seperti kesalahan morfologis, kesalahan sintaksis, kesalahan penyerapan istilah, dan kesalahan ejaan (media massa cetak).

Dalam situasi yang dipenuhi rasa curiga dan isu perpecahan saat ini, dibutuhkan ikhtiar seluruh elemen bangsa termasuk media massa untuk membangkitkan kembali kepekaan perasaan kemanusiaan. Salah satu upaya untuk membangkitkan kepekaan tersebut dari pihak media massa adalah menyampaikan berita dengan bahasa Indonesia yang sesuai ragam dan kaidah serta mempertimbangkan kondisi psikologis sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi perpecahan, saling curiga, jatuh-menjatuhkan martabat, dan sebagainya. Iklim yang harus ditumbuhkan adalah kebebasan mengemukakan pendapat secara bermartabat: boleh berbeda pendapat, tapi tidak dengan menjatuhkan martabat orang lain.

Kesalahan-kesalahan berbahasa media massa yang diperbincangkan pemerhati bahasa Indonesia di atas cenderung tertuju pada penggunaan bahasa Indonesia ragam formal (dan beku). Padahal, bahasa Indonesia tidak hanya memiliki ragam formal. tapi juga memiliki ragam konsultatif, ragam

santai, dan ragam akrab. Apakah ragam-ragam tersebut tidak mendapat tempat di media massa sehingga agak luput dari perhatian pemerhati bahasa?

Makalah ini ditujukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah di atas dalam kerangka tugas media massa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Media Massa dan Pencerdasan Kehidupan Bangsa

Media massa selain sebagai media informasi juga merupakan media hiburan. Kelihantannya, karena fungsinya yang terakhir inilah media massa lebih diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Informasi-informasi dan hiburan yang disajikan diharapkan dapat menjadi makanan bagi kognisi dan juga bagi afeksi masyarakat. Dengan kata lain informasi dan hiburan yang disampaikan oleh media massa dapat mencerdaskan bangsa Indonesia baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.

Kecerdasan merupakan faktor yang sangat berperan dalam kelangsungan kehidupan manusia. Selama ini konsep kecerdasan lebih terfokus pada kecerdasan intelektual (IQ), terutama mengenai kemampuan untuk mengetahui dan memahami segala hal dengan sangat baik (sempurna), tidak termasuk di dalamnya kemampuan berbahasa. Penelitian-penelitian terakhir menunjukkan bahwa manusia tidak hanya memiliki kecerdasan tunggal (IQ), tapi memiliki kecerdasan yang multi dan dapat ditingkatkan (Gardner dalam Nggermanto, 2002). Secara garis besar kecerdasan yang multi tersebut dan yang sangat berperan dalam kehidupan dapat dikelompokkan atas kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ).

Dalam IQ terkandung kecerdasan linguistik dan matematis, dalam EQ terkandung kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Sementara itu, SQ lebih terfokus pada hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Nggermanto, 2002). Penelitian yang dikembangkan oleh Daniel Goleman (dalam Nggermanto, 2002) menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang dalam kehidupan hanya 4% ditentukan oleh IQ dan 75% ditentukan oleh EQ.

Seperti telah dikatakan di atas, bahwa IQ memiliki dimensi kecerdasan linguistik dan kecerdasan matematis. Kecerdasan linguistik banyak terlibat dalam aktivitas membaca, menulis, berbicara dan mendengar. Kecerdasan matematik-logis digunakan untuk memecahkan masalah berbentuk logika simbolis dan matematika abstrak.

Daniel Goleman mengadaptasi EQ menjadi sebagai berikut:

Kesadaran diri; mengetahui apa yang kita rasakan suatu saat dan menggunakannya untuk mengambil keputusan diri sendiri; memiliki tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.

Pengaturan diri; menangani emosi kita sedemikian sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas; peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran; mampu pulih kembali dari tekanan emosi

Motivasi; menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi.

Empati; merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang.

Keterampilan sosial; menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial; berinteraksi dengan lancar; menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk memimpin, bermusyawarah, dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim (Nggermanto, 2002).

Kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi merupakan dimensi kecerdasan intrapersonal dalam EQ. Sementara itu, empati dan keterampilan sosial merupakan dimensi kecerdasan interpersonal dalam EO. Kecerdasan intrapersonal dibutuhkan untuk memahami diri sendiri. Kecerdasan tersebut merupakan kepekaan seseorang mengenai suasana hati dan kecakapannya sendiri. Di lain pihak, kecerdasan interpersonal dibutuhkan dalam komunikasi dan juga dalam memahami orang lain.

Dari uraian di atas, ternyata baik IQ maupun EO berkaitan dengan kemampuan penggunaan bahasa. Artinya, kemampuan penggunaan bahasa termasuk salah satu kecerdasan.

Pada akhirnya, jika dihubungkan dengan tugas media massa mencerdaskan kehidupan bangsa, maka media massa diharapkan dapat meningkatkan berbagai kecerdasan tersebut, baik melalui informasi yang diberikan maupun melalui cara memberikan informasi tersebut (perilaku berbahasa).

Media Massa dan Penggunaan Bahasa Indonesia secara Baik dan Benar

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat juga diartikan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Berbahasa Indonesia secara baik dan benar tidak hanya berbahasa sesuai dengan kaidah. Konsep tersebut dapat disederhanakan pengertiannya menjadi menggunakan ragam bahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi komunikasi dan sesuai dengan kaidah masing-masing ragam tersebut.

Dari pengkajian terhadap ragam bahasa dari sudut pandang produksi, bahasa memiliki ragam lisan dan ragam tulisan. Begitu juga halnya dengan bahasa Indonesia. Dari sudut pandang penggunaan berdasarkan

situasi dan kondisi, maka akan terdapat bahasa ragam baku, ragam formal, ragam konsultatif, ragam santai, dan ragam akrab. Baik bahasa Indonesia ragam lisan maupun bahasa Indonesia ragam tulis, keduanya memiliki ragam sesuai situasi dan kondisi pemakaiannya.

Bahasa Indonesia yang digunakan oleh media massa memang memiliki karakteristik tersendiri. Bahasa tersebut memiliki ciri singkat, jelas, lugas, menarik. Ciri yang demikian disebabkan oleh sifat media massa sebagai media informasi sehingga fokusnya adalah bagaimana informasi dapat disampaikan dengan bahasa yang singkat dan menarik minat pemirsa/pendengar atau pembaca. Akan tetapi, media massa juga harus menyadari bahwa ia juga merupakan media hiburan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan tidak hanya untuk pemberitaan, tapi juga acara-acara hiburan dalam media elektronik dan rubrik-rubrik hiburan dalam media cetak.

Pada media elektronik, terdapat beragam acara. Ada acara berita dengan berbagai jenis bentuk dan judul, acara dialog yang mengulas topik-topik yang biasanya sedang hangat diperbincangkan, sinetron, musik, olahraga, infotainment, dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan media cetak, terdapat berbagai jenis rubrik atau tulisan. Ada juga berita dengan berbagai macam bentuk dan judulnya, tajuk rencana yang merupakan ulasan atau tanggapan redaksi terhadap situasi, kritik, dan koreksi terhadap sesuatu yang kurang baik, ulasan tentang suatu masalah atau artikel tentang salah satu cabang ilmu, iklan tempat dunia usaha menawarkan usahanya dan sebagainya. Masing-masing jenis acara dan tulisan itu menggunakan pengungkapan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan sifat khas kebutuhan pemakainya. Bahasa berita lain dengan bahasa iklan, bahasa iklan berbeda dengan bahasa tajuk. Bahasa tajuk tidak sama dengan bahasa pojok, bahasa pojok lain pula dengan bahasa artikel dan lain sebagainya.

Acara berita pada media massa elektronik, misalnya, memang menggunakan bahasa Indonesia ragam lisan formal. Acara wawancara atau dialog menggunakan bahasa Indonesia ragam lisan konsultatif. Acara konsultasi kesehatan, kecantikan, masakan, musik akan lebih cocok dan mengena jika menggunakan bahasa Indonesia ragam santai.

Rubrik pojok atau iklan pada media cetak tidak menggunakan bahasa Indonesia ragam tulis resmi. Kelihatannya akan sangat lucu jika acara atau rubrik tersebut menggunakan bahasa Indonesia ragam baku atau ragam resmi. Kesan yang akan sampai kepada pembaca adalah ketidaktepatan penggunaan bahasa untuk isi yang disampaikan dalam rubrik tersebut.

Media Massa, EQ, dan Pemberdayaan Ragam Bahasa Indonesia

Selama ini dalam penggunaan bahasa atau dalam suatu peristiwa

tutur (*speech event*), penutur yang ingin komunikasinya berhasil akan selalu mempertimbangkan faktor-faktor baik yang bersifat linguistik maupun nonlinguistik. Faktor nonlinguistik tersebut biasanya bersifat sosial-situasional. Hymes (dalam Nababan, 1993) menyingkat faktor nonlinguistik tersebut dengan SPEAKING, yang merupakan singkatan dari: *S*(etting and *Scene*), *P*(articipants), *E*(nds) (*purpose and goal*), *A*(ct sequences), *K*(ey) (*tone or spirit of act*), *I* (*nstrumentalities*), *N*(orms) (*of interaction and interpretation*), dan *G*(enres). Tidak jauh berbeda dengan peristiwa tutur, tindak tutur (*speech event*) walaupun cenderung bersifat individual, namun masih mempertimbangkan faktor linguistik dan faktor nonlinguistik yang bersifat sosial-situasional. Faktor-faktor nonlinguistik tersebut adalah posisi penutur (kepada siapa menyampaikan tuturan) dan situasi tuturan (dalam situasi bagaimana tuturan tersebut disampaikan). Faktor kepada siapa menyampaikan tuturan bersifat sosial, yaitu berbicara kepada anak kecil, kepada teman seprofesi, kepada atasan, dan sebagainya.

Saat ini kenyataan-kenyataan komunikasi yang terdapat di tengah masyarakat kita beserta segala dampaknya memperlihatkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas belum cukup menentukan komunikasi akan lebih berhasil. Hudson (1980) pernah menyinggung faktor kecerdasan ikut menentukan komunikasi yang lebih berhasil, tapi Hudson tidak menjelaskan kecerdasan yang bagaimana yang dimaksudkannya.

Jika dihubungkan dengan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki manusia, maka faktor EQ-lah yang akan sangat membantu komunikasi yang lebih berhasil di samping faktor-faktor linguistik dan sosial-situasional yang telah disebutkan di atas. Agar komunikasi lebih berhasil, media massa selaku pengguna bahasa Indonesia (apa pun ragam bahasa Indonesia yang dipilih) harus mempertimbangkan hal yang dalam EQ disebut kemampuan untuk berempati.

Kemampuan untuk berempati dalam EQ tersebut akan menuntun pengguna bahasa dalam hal ini media massa Indonesia untuk memilih dan menggunakan kata-kata dan struktur kalimat serta intonasi (bahasa ragam lisan) secara tepat sehingga pihak yang dituju atau orang-orang yang dibicarakan tidak tersinggung, pertanyaan tidak diinterpretasikan sebagai pernyataan, dan juga pendengar/pemirsa dapat memperoleh informasi yang mencerdaskan nalar dan emosi mereka.

Peran Media Massa dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia secara Baik dan Benar

Peran yang diharapkan dari media massa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat berupa sebagai berikut. Pertama, tertib menggunakan

bahasa Indonesia (ragam bahasa Indonesia) dalam mata acara untuk media elektronik dan dalam rubrik untuk media cetak. Maksudnya, jika situasi dan kondisi mengharapakan penggunaan bahasa Indonesia ragam formal, maka gunakanlah bahasa Indonesia tersebut sebagaimana mestinya baik menyangkut pilihan kata, kalimat, ejaan maupun lafal (bahasa Indonesia ragam lisan). Begitu juga halnya dengan bahasa Indonesia ragam lainnya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan tertib sesuai ragam dan kaidah merupakan cermin tertib dalam berpikir dan bertindak. Selain itu, diharapkan informasi atau maksud yang ingin disampaikan dapat cepat ditangkap oleh pemirsa/pendengar atau pembaca media massa. Lebih jauh, jika informasi itu berisi pengetahuan yang dapat mencerdaskan bangsa Indonesia, maka tentu pengetahuan tersebut dapat cepat diterima oleh pemirsa/pendengar dan pembaca media massa.

Kedua, teladan menggunakan bahasa Indonesia (ragam bahasa Indonesia) dalam mata acara untuk media elektronik dan dalam rubrik untuk media cetak. Media massa diharapkan mampu memberi contoh bagaimana menggunakan ragam-ragam bahasa Indonesia dengan tepat dalam masing-masing acara atau rubrik. Pemakaian ragam bahasa yang tercermin dalam masing-masing acara atau rubrik tersebut akan melatih pemirsa atau pembaca untuk juga memahami dan menggunakan ragam bahasa Indonesia untuk situasi dan kondisi yang berbeda sifatnya. Di samping itu, media massa dapat mempertimbangkan faktor EQ dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dengan demikian kemampuan untuk berkomunikasi yang termasuk ke dalam EQ dapat dimiliki dan diterapkan oleh pemirsa/pendengar atau pembaca. Selanjutnya, mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Ketiga, penyediaan ruang bahasa Indonesia sebagai mata acara tersendiri bagi media elektronik dan rubrik tersendiri untuk media cetak. Ide ini sudah lama disinggung oleh para pemerhati bahasa Indonesia. Tampaknya sampai saat ini belum mendapat sambutan yang baik dari media massa baik elektronik maupun cetak. Padahal, upaya tersebut dapat menjadi ruang konsultasi dan informasi masalah kebahasaan. Semoga akan terwujud.

Segala pekerjaan pedang itu
boleh dibuat dengan kalam
Adapun pekerjaan kalam itu
tiada boleh dibuat dengan pedang
Maka itulah ibarat yang terlebih nyatanya
Dan beberapa ribu dan laksa pedang yang sudah
terhunus dengan segores kalam jadi tersarung
(Raja Ali Haji)

Setetes air yang sadar emosi diri
Derajatnya meninggi bagai mutiara
Setangkai rumput yang sadar emosi diri
Berkembang memenuhi taman
(Muhammad Iqbal)

DAFTAR PUSTAKA

- Hudson, R.A. 1980. *Sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nababan, P.W.J. 1993. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia
- Nggermato, Agus. 2002. *Quantum Quotient (Kecerdasan Emosi): Cara Cepat Melejitkan IQ, EQ, dan SQ secara Harmonis*. Bandung: Penerbit Nuansa.

LAPORAN SIDANG

- Hari, tanggal : Jumat, 17 Oktober 2003
- Judul : 1. Ketersediaan, Kebermanfaatan, dan Kebermaknaan Bahasa Minangkabau dalam Media Surat Kabar, Radio, dan Televisi di Padang, Sumatera Barat
2. Peran Media Massa dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan benar: Pemberdayaan Ragam Bahasa Indonesia
- Penyaji : 1. M. Zaim
2. Imelda Yance
- Pemandu : Chairil Effendi
- Pencatat : 1. Tengku Syarfina
2. Sariah

TANYA JAWAB

1. **Penanya:** Zulkifli (Balai Bahasa Banjarmasin)
- (1) Apakah pemanfaatan kolom pada surat kabar dipandang sebagai sarana terkait dalam upaya pemeliharaan dan perencanaan bahasa daerah?
- (2) Apakah ada penurunan kemampuan bahasa Minang?
- (3) Apakah empati digunakan dalam etika bicara

Jawaban

- (1) Memang, sebagian besar Surat Kabar Minang tidak secara jelas merencanakan rubrik-rubrik bahasa Minang. Satu-satunya surat kabar dengan konsisten menggunakan bahasa Minang adalah Surat Kabar *Singgalang*. Koran tersebut secara khusus sejak awal berdirinya sampai sekarang, setiap hari Minggu menyediakan rubrik-rubrik yang terkait dengan bahasa Minang, termasuk karya sastranya. Berarti, Surat Kabar *Singgalang* telah merencanakan dengan baik dan konsisten serta menggunakan bahasa Minang yang baik. Demikian juga penggunaan bahasa Minang di radio, misalnya pada malam hari ada arena untuk bahasa Minang dan pagi harinya ada celoteh pagi.
- (2) Penurunan itu ada dan menimbulkan kecemasan. Ada satu keluarga di Jakarta yang menggunakan bahasa Minang asli untuk berkomunikasi di rumah dan menggunakan bahasa Indonesia di luar

rumah. Di sisi lain, keluarga muda menggunakan bahasa Indonesia kepada anak-anaknya dan anak mereka memperoleh bahasa Minang dari lingkungan pergaulan.

- (3) Sopan santun masuk dalam empati bangsa Indonesia terdiri atas berbagai etnik, sudah pasti memiliki budaya. Jika kita mengetahui budaya suatu daerah, kita dapat menggunakan pilihan kata, sapaan, intonasi, dan kalimat yang tepat. Acara dialog dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan empati, mencerdaskan bangsa secara emosi.

2. **Penanya:** Ishak Ngeljaratan (Makassar)

Ada Kecenderungan bahwa bahasa daerah itu tidak hidup karena bahwa surat kabar berpanjangan tangan dari kapitalis dan ragamnya cenderung merusak bahasa. Ada kesan unsur surat kabar menawarkan berita-berita yang menyenangkan dan TV menjual seks serta mucikari menjual seleb roti. Apakah bahasa daerah dipergunakan untuk iklan media massa?

Jawaban:

Di Sumatera Barat, bahasa Minang dipergunakan sebagai bahasa iklan. Contohnya dalam dialog sebuah iklan menggunakan bahasa Minang.

3. **Penanya:** Laude Sijaraju (Sulawesi Tenggara)

Apakah peranan bahasa Minang terhadap pengembangan bahasa nasional?

Jawaban:

Perannya dalam masalah kebahasaan adalah dari segi ragam bahasa itu sendiri. Ragam bahasa itu terdiri atas informal, formal, dan frozen (bahasa beku). Artinya, keragaman bahasa itu terlihat dari keragaman media yang memunculkan bahasa tersebut. Dari segi pemertahanan bahasa sudah dapat dilihat bahwa ragam bahasa Minang memberi sumbangan terhadap bahasa nasional.

4. **Penanya:** Muchtar Chaniago

Adakah kekhawatiran pemakalah terhadap perkembangan bahasa daerah sesuai dengan penelitian-penelitian pemakalah semala ini?

Jawaban:

Ada kekhawatiran itu, yakni ketidakmauan pasangan muda menggunakan bahasa Minang di lingkungan keluarga. Akhirnya, anak-anak mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan bahasa Minang menjadi bahasa kedua.

5. **Penanya:** Abdul Wahab (Universitas Negeri Malang)
Apakah judul-judul dalam surat kabar dapat diperbaiki?

Jawaban:

Bahasa Indonesia yang digunakan selebriti, ungkapan-ungkapan yang diambil dari beberapa tokoh tanpa memperhatikan konteksnya dapat:

- (1) Salah interpretasi. Misalnya, dari sebuah pertanyaan diinterpretasikan sebagai pertanyaan;
- (2) Bisa dianggap sebagai bahasa resmi karena kurang tepatnya penggunaan bahasa dalam konteks yang benar dapat memicu konflik.

BAHASA INDONESIA, INDUSTRI BUDAYA POPULER, DAN TELEVISI

Garin Nugroho

Pelaku dan Pengamat Film dan Televisi

Pokok-Pokok Masalah

1. Pasca 1998, bahasa Indonesia (khususnya sastra) dihadapkan dengan euforia kebebasan ekspresi yang disertai masa produksi industri budaya populer, khususnya lewat limpah ruahnya industri televisi. Sementara, masa emas bahasa Indonesia lewat perancangan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh TVRI mengalami transformasi baru ke arah kebebasan berbahasa sesuai dengan tuntutan industri-industri televisi. Pada akhirnya, bahasa Indonesia dalam industri budaya populer dihadapkan dengan peran baru dalam dunia penuh pertentangan, mengingat industri televisi bertumbuh dalam karakter negatif, yakni kecenderungan serba cepat, mudah, gampang, dan banyak.
2. Bahasa Indonesia menghadapi hubungan baru dengan bahasa daerah dalam perspektif otonomi daerah. Hal ini bisa dikaji dalam perspektif munculnya televisi--televisi lokal. Situasi dan kondisi semacam ini disertai dengan euforia perlawanan terhadap sentralisme, seringkali bahasa Indonesia diasumsikan dalam sentralisme itu sendiri, bersama nilai-nilai Pancasila dan Persatuan.
3. Limpah ruah industri televisi (10 kanal) membawa bahasa Indonesia ke dalam lompatan era tradisi lisan kedua dengan kecenderungan--kecenderungannya sendiri. Persoalannya, pelompatan dari tradisi lisan pertama (sebelum era radio) ke era tradisi lisan kedua, tanpa disertai pematangan tradisi baca dan tulis yang matang.
4. Industri budaya populer melalui pegas televisi membawa kecenderungan negatif tradisi lisan dalam perbandingannya dengan tertulis, yakni budaya banyak bicara tanpa seleksi. Kehilangan kemampuan analisa, serta budaya menggampangkan. Akibat lebih jauh, para pemimpin yang menjadi panduan berbahasa lebih menggunakan budaya lisan dalam mimbar televisi daripada budaya tertulis.
5. Industri budaya populer melalui pegas televisi menjadi peta baru perjumpaan bahasa Indonesia dalam dunia bahasa global, nasional, dan lokal yang sedang mencari status dan peranan baru.
6. Industri televisi yang bertumbuh dalam teknokapitalis *rating* membawa bahasa Indonesia dalam institusi industri budaya televisi yang negatif, yakni dalam ukuran-ukuran nominal *rating*. Suatu ukuran industri yang berumbuh tidak produktif dalam menunjang perkembangan bahasa Indonesia.

7. Industri televisi dalam budaya *rating* dengan skala enam sampai delapan kota besar, membawa bahasa Indonesia dalam pertemuannya dengan program-program terpopuler, yakni bahasa Indonesia dalam budaya Jawa (Ketoprak Humor) ataupun bahasa Betawi (bahasa Indonesia dalam dialek Jakarta).
8. Perkembangan sastra dalam industri budaya populer yang negatif mengalami pelemahan yang luar biasa karena nilai-nilai sastra berlawanan dengan nilai-nilai teknokapitalis *rating* yang negatif.
9. Status dan peran bahasa Indonesia akan berhadapan dengan generasi baru masyarakat televisi dan tumbuh dalam bias industri televisi.

PENYAKIT MENULAR SOK-INGGRIS DALAM BAHASA INDONESIA

Remy Silado

Awal pekan pada Oktober lalu, sebelum meninggalkan Hotel Santika di Jalan Jenderal Sudirman, Yogya—yang interiornya sangat Jawa, antara lain terpasangnya sebuah perangkat waditra di bawah gunung kuningan—resepsionisnya yang mengenakan kebaya Jawa meminta saya menulis kesan-kesan di buku khusus. Sehari sebelum saya, telah menginap encik menteri Samsul Maarif dan telah pula menulis kesannya di buku itu.

Yang hebat, encik menteri yang mengurus media pers ini tidak menulis kesannya dalam bahasa Indonesia yang wajar, melainkan dengan bahasa yang centang-perenang, yaitu Inggris nercampur Indonesia. Tulisnya, *Like other guests, I feel good stay in Santika*. Manajemen tahu bagaimana memperlakukan tamu secara profesional."

Untuk kalimat bahasa Inggris, jika encik menteri melakukan salah eja menyangkut apa yang lazim disebut orang sebagai perubahan bentuk kata kerja dalam mengacu waktu, maka itu urusannya. Tetapi, mengeja *management* yang tidak jelas, apakah ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia--sebab dalam bahasa Inggris ejaannya *management* sedang serapannya dalam bahasa Indonesia 'manajemen' dengan 'j' dan tanpa 't'--kiranya bisa menjadi urusan yang menarik untuk obrolan, gunjingan, dan bualan.

Sama sekali tidak ada keberatan dalam tulisan ini yang hendak mengatakan bahwa orang Indonesia tak boleh beringgris-inggris. Di bawah nanti kita hanya akan melihat bagaimana bahasa Indonesia menjadi tidak keruan karena pemakainya, terutama kalangan orang terpelajar, dalam bercakap ataupun menulis tampak seperti kesurupan, jor-joran, menghias bahasa Indonesianya dengan kata-kata, istilah-istilah, bahkan kalimat-kalimat tertentu bahasa Inggris. Dan, tidaklah jelas apa maunya, apakah supaya kelihatan cendekia, ataukah sekadar menunjukkan bakat ganit atau kebolehan bersolek?

Tak disangka bahwa *prayojana* ke Inggris telah menjadi garis kebijakan pengembangan bahasa di tahun-tahun awal bahasa Indonesia dilembagakan di atas kesadaran berbangsa.

Sepuluh tahun setelah Sumpah Pemuda, Komite Bahasa menggariskan kebijakannya mengenai pengembangan kosakata bahasa Indonesia dengan ketentuan: (1) mencari kata dari bahasa Indonesia sendiri, (2) jika tidak ada mengambil dari bahasa daerah, (3) jika masih tidak ada mengambil dari bahasa Asia, (4) jika tetap tidak ada barulah mengambil dari bahasa asing, khususnya Inggris.

Dengan menyebut secara langsung, Inggris, maka serta merta dengan itu terjadi kerepotan mengganti kata-kata serapan bahasa Belanda yang sudah lama terpakai dengan kata-kata baru dari bahasa Inggris. Misalnya, yang diajarkan di sekolah-sekolah, *potlot* jadi *pensil*, *jurk* jadi *gaun*, dan belakangan ini *korting* jadi *diskon*.

Sampai batas itu, rasanya wajar. Yang cenderung menjadi tidak wajar, atau bilanglah lebih keras, tidak waras, adalah kebiasaan yang menular saat ini--yang bukan hanya memasygulkan, mengibakan, tetapi sekaligus menjengkelkan--bercakap atau menulis bahasa Indonesia dengan sebanyaknya melintaskan kata-kata atau istilah-istilah bahasa Inggris secara bulat tanpa mematikannya terlebih dulu. Maksud saya, menyesuaikan dengan lafal yang lazim dalam bahasa tutur. Dan, celakanya, karena yang melakukan kegenitan itu adalah para tokoh masyarakat, dan disiarkan pula oleh pers, masyarakat pun menganggap itu adalah bahasa Indonesia yang bagus.

Coba sejenak kita perhatikan isi surat kabar hari ini, 16 Oktober 2003 menyangkut kata-kata atau istilah-istilah bahasa Inggris yang dilintaskan bulat-bulat tanpa dimatikan terlebih dulu. Disebut di bawah menurut urutan alfabet:

1. **KOMPAS**

- a. "... apalagi saya yang *fresh from the oven*." (Dari Mendesain Sampai Purna Jual, hlm. 37).
- b. "... akan dilengkapi dengan *convention hall*, *ballroom*, *international food court* ..." (Waspada! Maraknya Pembangunan Pusat Perdagangan, hlm. 44)
- c. "... bunga SBI dan naiknya *yield to maturity* obligasi pemerintah ..." (Investasi Obligasi Pemerintah Semakin Menjanjikan, hlm. 25).

2. **KORAN TEMPO**

- a. "Soal *timing* juga menarik." (Editorial), Misteri Al-Ghozi, hlm. B7).
- b. "Rasanya belum lama kita mendengar kor pertumbuhan yang dipacu konsumsi, *consumption led growth*." (Lagu Lama di Akhir Tahun, hlm. B7).
- c. "Kecipir yang *totally edible* ... disebut sebagai *the global restructuring of agrofood systems*." (Petani, Pangan, dan Keragaman Hayati, hlm. B7).

3. **MEDIA INDONESIA**

- a. "Keuntungan *return earning* yang diraih ..." (PT PLN Sulit Kembangkan Investasi, hlm. 2).

- b. "... menawarkan harga di atas *owner estimate*." (Bulog Batalkan Lelang CPO, hlm. 2).
 - c. "... kelas dunia di bidang *loyalty marketing* ..." (Brian Wolf Hadir di Jakarta, hl. 2).
4. **POS KOTA**
- a. "... sangat strategis untuk mengembangkan *culture of globalism*." (NU & Muhammadiyah Harus Bersatu Bentengi Umat Dari Racun Radikalisme, hlm. 22)
 - b. "Terima 15 perkara Judicial Review." (judul berita, hlm. 22).
 - c. "... Mega itu dapat dilihat dari tingkat *grass roots*." (Soetardjo: Mega Terpopuler, hlm. 22).
5. **RAKYAT MERDEKA**
- a. "*The Politics News Leajer*." (Semboyan, hlm. 1)
 - b. Nama-nama rubrik: "*Online 1*" (jl. 50; "*On-Line 2*" (hlm. 3); "*World Star*" (hlm. 7); "*Correct*" (hlm. 11); "*Wanted!*" (hlm. 14); "*Corrupt, No!*" (hlm. 15).
 - c. "Tapi kalau dilihat dari *balance of payment* di BI, banyak sekali *capital inflow*." (Investasi RT Tahun 2004 Suram, hlm. 13).
6. **REPUBLIKA**
- a. "... ungkap Ruang Chunping, *commander in chief* sistem roket ..." (Kebangkitan Cina di Luar Angkasa, hlm. 1)
 - b. "... Bush tidak akan mengunjungi lokasi *ground zero* yang di atasnya ..." (Bush Akan Bertemu 4 Tokoh Islam, hlm. 1).
 - c. "Pasanglah tangki dan *conversion kit* ..." (Iklan Pertamina, hlm. 1).

Bahwa melintasnya kata-kata bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia memang patut diterima sebagai sesuatu yang galib dalam perkembangan tatanan kebudayaan dunia. Bukan hanya bahasa Indonesia satu-satunya yang tidak sanggup bertahan terhadap 'serangan' bahasa Inggris tersebut. Berikut ini kita akan melihat juga bagaimana bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Malaysia, sebagai negeri yang pernah dijajah Inggris, dan bahasa-bahasa yang mestinya dianggap kuat karena latar belakang kebudayaannya yang harus dikatakan sangat kuat, yaitu Arab dan Jepang.

Berbeda dengan Indonesia saat ini yang melintaskan kata-kata bahasa Inggris secara bulat, di Malaysia, Arab, dan Jepang, kata-kata bahasa Inggris tersebut telah dimatikan sesuai dengan lafal yang berlaku dalam bahasa tuturnya. Misalnya, di Malaysia kata-kata bahasa Inggris seperti *towel* diserap menjadi *tuala*, *bag* jadi *beg*, *basin* jadi *besen*, *button* jadi *butang*, *size* jadi *saiz*, *acre* jadi *ekar*, *brag* jadi *borak*, *bicycle* jadi *besikal*,

cube jadi *kiub*, *gunny sack* jadi *guni*, *summons* jadi *saman*, dan *tyre* jadi *tayar*.

Kemudian, di Arab, kata-kata bahasa Inggris seperti *manager* diserap menjadi *al-modir*, *toilet* jadi *al-tualit*, *sugar* jadi *sukar*, *sandwich* jadi *sandawitsh*, *beefsteak* jadi *bufstek*, *ice cream* jadi *ayskrim*, *bicycle* jadi *bisiklit*, *cigarette* jadi *siraja*, *supermarket* jadi *supir markit*, *folk music* jadi *musika fulkluriyyah*, *color slide* jadi *slayd bil'alwan*, *pipe* jadi *bayb*, dan *battery* jadi *al-battariyyah*.

Lantas, di Jepang, kata-kata bahasa Inggris seperti *manager* diserap menjadi *manejasan*, *ham end eggs* jadi *hamuegg*, *fruit juice* jadi *furutsu jusu*, *sandwich* jadi *sando-ichi*, *ice cream* jadi *aisukurimu*, *snack* jadi *sunakku*, *apple pie* jadi *appuruppai*, *whiskey* jadi *uisuki*, *concert hall* jadi *konsato haru*, *motor boat* jadi *mataboto*, *shopping centre* jadi *shoppingu senta*, *beth cubes* jadi *basu kyubu*, dan *eye liner* jadi *airaina*.

Barangkali cara mematikan kata bahasa Inggris sesuai dengan lafal yang pas dengan bahasa tutur merupakan cara yang lebih baik daripada ketentuan atau tawaran untuk mencari padanannya, baik dari bahasa Indonesia sendiri atau bahasa daerah maupun bahasa Asia sebagaimana yang diacu komite bahasa tersebut. Sebab, usaha yang boleh jadi baik, bisa-bisa malah membuat bahasa Indonesia menjadi asing sendiri, lucu, dan aneh. Kita dapat melihat hal itu dalam bahasa Malaysia. Bandingkan kata-kata berikut ini dalam bahasa Malaysia, Indonesia, dan Inggris.

Inggris	Malaysia	Indonesia
exist	wujud	eksis
grammar	nahu	tata bahasa
juice	nira	jus
laboratory	makmal	laboratorium
legacy	pesaka	legasi
life-bouy	lampung	lifebouy
limit	had	limit
melancholy	rawan	melankoli
motive	muslihat	motif
oval	lunjung	oval
paragraph	peranggan	paragraf
petition	rayu	petisi
friendly	berjinak-jinak	ramah
propaganda	dasyah	propaganda
slogan	cogan	slogan
property	khazanah	properti
chaos	gamat	chaos
bed-bug	pijat-pijat	kutu busuk

security	cagaran	sekuriti
runner up	naib	runner up
launching	pelancaran	peluncuran
ratio	nisbah	rasio
conference	mesyuarat	konferensi
self respect	maruah	maruah
graduate	siswazah	wisuda
short time	suntuk	short time
vaccinate	cucuk	vaksinasi
seat belt	tali kaledar	sabuk
sex	jautina	seks
talk show	tayang celoteh	gelar wicara

Dari catatan tersebut, dapat dilihat banyak istilah dari bahasa Inggris yang telah umum dipakai dalam bahasa Indonesia, sekaligus menunjukkan keengganan pemakai bahasa Indonesia untuk mencoba mencari padanan atau terjemahan kata-kata bahasa Inggris tersebut dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia pun menjadi seperti keranjang sampah kata-kata bahasa Inggris.

Sementara itu, kesan genit dan bersolek dengan bahasa centang-perentang ini, yaitu masuknya kata-kata bahasa Inggris yang tidak dimatikan terlebih dulu, dalam contoh pertama bahasa tulis, sebagai *bilanglah biang-kerok, tersua* dalam buku *TuanKu Rao*, karya Mangaraja Onggang Parlindungan, ahli bom tarik, pangkat letnan kolonel AD, pensiunan Nrp 13.3.13.

Perhatikan saja alinea pertama tulisannya itu dalam bab Tanah Batak di Zaman Djahiliyah, "Dibandingkan kepada itu, asal-usul dari Suku Bangsa Batak di sekitar Danau Toba, malahan relatively paling simple dapat re-constructed. How?? Dengan cemapring Ethnology, Philology, Mythology, and Folklore. Whay?? Suku Bangsa Batak hingga Abad Ke-XIX setjara suka-rela berkurung in Splendid Isolation di Pegunungan Bukit Brisan, selama 3.000 tahun, selama $\pm$ 100 generations. Very strange customs untuk sesuatu Suku Bangsa jang hidup di atas sesuatu pulau. How come??"

Bayangkan, sepanjang 691 halaman Parlindungan menulis bukunya dengan gaya bahasa centang-perenang begini. Apakah dengan bergenit-genit seperti itu penulis ini mencapai orgasme, tidak seorang pun tahu.

Tetapi, yang jelas gaya Parlindungan ini sekarang menular kembali dalam diri banyak tokoh masyarakat: pejabat pemerintah, para anggota legislatif, ahli ekonomi, petinggi militer, dll.

Jika kebiasaan beringgris-inggris ini mundur pada tahun-tahun sebelum Sumpah Pemuda sampai masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan, dengan melihat model lagu-lagu--baca: lirik, kemudian baca: puisi, dan terakhir baca: sastra--dari apa yang disebut sebagai 'selera KNIL' dan 'selera nyai', dengan berani orang mengatakannya--demikian Soekarno mengatakan itu dalam manipol, pidatonya pada 17 Agustus 1959--sebagai ciri hitam-putih dari bangsa yang tidak berkepribadian, bangsa yang mengambang, bangsa yang tidak berharkat.

Dapat dimengerti jika orang menyebut KNIL dan *nyai* sebagai bangsa yang tidak berkepribadian, anggota KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) adalah orang-orang pribumi yang berperang demi Belanda untuk menumpas bangsanya sendiri. Sementara itu, *nyai* adalah perempuan pribumi yang diperistri oleh Belanda dalam status konkubinase, Oleh orang Belanda sendiri, KNIL diartikan sebagai Klein Niet Intelligent Leger, maksudnya tentara kerdil tidak cerdas. (Periksa Henk Salleveldt, *Het Woordenboek van Jan Soldaat in Indonesie*, A.W. Sijthoff Alphen aan den Rijn, 1980).

Dari golongan inilah--golongan yang disebut tadi sebagai bangsa yang tidak berkepribadian tersebut--meleluri model ekspresi bahasa centang-perenang dalam lagu-lagunya tersebut. Dua lagu dari sekian banyak lagu yang menjadi selera KNIL dan selera *nyai* itu adalah:

WAAROM HUIL JE TOCH NONA MANIS

Waarom huil je toch Nona Manis
Saja inget terlaloe padamoe
Droog je traantjes maar Nona Manis
Shall I come back again to you.

dan

VAARWEL MIJN SCHAT MIJN NONA MANIS

Vaarwel mijn schat mijn Nona Manis
Do not forget djangan la loepa kepada saja
Deep in jou hartje you always think of me
Ik blijft steeds dromen van mijn sweetheart.

(Dua lagu di atas dapat diperiksa dalam rekaman keroncong-hawaian Soeara Istana dan Andres, penyanyi Belanda yang pernah dikenal mendunia melalui hit *Storybook Children*).

Kendati begitu, suka atau tidak, dalam kenyataannya lirik-lirik lagu 'selera KNIL' atau 'selera *nyai*' ini, semestinya dilihat sebagai genus atas

perpuisian Indonesia masa lampau. Bahwa selain proses Melayu-Tionghoa, tidak kalah mustahak diperhitungkan puisi Indo-Belanda dalam nyanyian-nyanyian populer kegemaran Belanda dan perempuan piaraan Belanda.

Yang menarik--demikian cerita seorang pensiunan KNIL dalam obrolan di De Koempoelan, nama restoran di sayap kiri museum KNIL, Bronbeek, di Arnhem, Belanda--bahwa puisi-puisi Indo-Belanda dengan bahasa yang centang-perenang itu, pada masanya sanggup memacu gairah cinta-kasih justru di saat-saat darurat akan kemungkinan terjadinya perang karena terbentangnya perasaan benci antara yang dijajah dan yang menjajah.

Salah satu ciri yang tipikal dari puisi-puisi Indo-Belanda itu adalah kedudukan perempuan dalam kehidupan lebih dipandang dari sosoknya ketimbang sisiknya, atau lebih pada manfaatnya ketimbang maratabatnya. Ini terlihat pada ungkapan *meoie meisje* dan bukan *lieve meisje* seperti dalam lagu berikut.

OLE! OLE! BANDOENG
Ole! Ole! Bandoeng
Mooie meisjes je vind hun aleen daar
Manise
Ole! Ole! Bandoeng
Maar jou hartje moet niet djadi bingoeng
Het is so fijn in kota Bandoeng
Het is daar friesjes de wind
Come from the goenoengs
Veel jongelui en nona wonen daar
Kota Bandoeng is goed voor pas getround paar.

Dalam lirik di atas ini selain bahasa Belanda yang ajek, dan sepotong-dua bahasa Inggris, muncul pula kata bahasa Spanyol, interjeksi 'ole! ole!--jadi bukan oleh-oleh sebagaimana dinyanyikan orang saat ini--serta ekspresi khas Ambon, 'manise'.

Lirik dengan bahasa yang genit itu ditambah pula oleh penampilan penyanyi-penyanyi perempuan yang seronok--waktu itu disebut 'crooner', bukan *singer*, konon menyanyi bukan dengan *voice* tetapi dengan *noise*--dengan memasang nama-namanya sebagai *miss*. Ingat saja nama-nama berikut: Miss Dja, Miss Riboet, Miss Rukiah, Miss Netty, Miss Tjitjih, dst.

Saking maraknya *miss*, dan diingat penampilannya yang genit, seronok, eksklusif, orang pun menyebut fenomena itu sebagai *misselijk*. Bahasa Belanda *lijk* berarti bagaikan atau seperti. Namun, *misselijk* dalam bahasa Belanda berarti mual, menimbulkan rasa muak, atau ingin muntah.

Sekarang, banyak tokoh yang berbicara centang-perenang dengan kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang ditaburi kata-kata bahasa Inggris

sehingga terkesan genit dan seronok. Apakah tidak boleh jika mereka disebut juga *mislek* (*miselijk*)?

Celaknya, orang-orang yang patut dikatakan *mislek* itu, tidak merasa melakukan 'kesalahan'.

Saya mencatat penyakit sok-Inggris yang paling memasygulkan, mengibakan, sekaligus menjengkelkan, pada sebuah acara debat calon presiden yang ditayangkan TV selepas jatuhnya Orde Baru. Di dalam acara di UI itu, ditampilkan Amien Rais, Sri Bintang Pamungkas, dan Yusril Ihza Mahendra.

Dalam rangka menjatuhkan Yusril di depan umum, Amien berkata, "Yusril mau jadi presiden, tapi berbahasa Inggrisnya saja belepotan, tidak lancar."

Lo? Memangny mereka berdebat untuk menjadi presiden Amerika?

Saya kok kuatir, bangsa Indonesia yang melupakan Sumpah Pemuda, bisa-bisa pada besok-lusa-tulat-tubin akan disumpahi pemuda.

Encik Amien memang orang yang paling gemar beringgris-inggris dalam kalimat lisan bahasa Indonesianya. Selain beliau, masih banyak lagi--telah saya contohkan dalam makalah yang saya sampaikan kepada pengajar-pengajar bahasa Indonesia seluruh Australia yang berkonferensi di Universitas Melbourne setahun lampau. (Periksa Esai-Esai Bentara, Kompas, 2002).

Jadi, ada apa dengan orang Indonesia yang menohok Sumpah Pemuda itu?

Diharapkan, hanya lewat sastra, bahasa Indonesia dapat menjadi dinya, berharkat. Sebab dalam sastra konon orang dapat menimba hal-hal muazan dari kemampuan berpikir tertib dan kemampuan mengejawantah dorongan-dorongan perasaan keindahan.

Ada pihak-pihak yang terpanggil--mestinya ini merupakan tanggung-jawab pemerintah--untuk memajukan sastra Indonesia melalui penghargaan khusus dengan sejumlah uang. Nama penghargaan itu adalah Khatulistiwa Literary Award.

Tetapi apa yang menarik, untuk tidak berkata janggal dari peng-anugrahan itu? Tak lain, lagi-lagi bahasa Inggris. Malahan, coba simak undangan untuk acara penganugrahannya pada besok malam, 17 Oktober 2003: "Invitation. Khatulistiwa Literary Award, Indonesia's Best Fiction Award 2002-2003. Raising the awareness of Indonesia literature and encouraging the reading culture. QB World Books request the pleasure of your attendance at the ceremony of Khatulistiwa Literary Award, Indonesia's Best Fiction Award 2002-2003."

Aduh, Mak. Kapan gerakan kita bisa berbahasa Indonesia dengan tenang di Indonesia?

Barangkali kita patut menimba konfidensi bangsa-bangsa Eropa di sekitar perbatasan dengan Inggris menyangkut 'pertahanan' yang kuat terhadap bahasanya.

Di Belanda--bangsa yang pernah menjajah Indonesia--tiga bahasa, yaitu Inggris, Perancis, dan Jerman, telah diajarkan di sekolah sejak SMP, dan anak-anak itu pun dapat bercakap dengan lancar ketiga bahasa tersebut. Tetapi, bahasa Belandanya tetap terpelihara dan digunakan dengan bangga. Di jalan raya tidak perlu ada tulisan-tulisan kereseh-peseh *bushway*, *ring road*, *underpass*, atau *three in one*. Yang mentereng adalah semboyan Belanda *bob jij of bob ik* untuk mengingatkan orang jangan mabuk dalam mengendarai oto di jalan. Pokoknya, orang Belanda bangga pada bahasanya. Padahal sastra Belanda, sebagai pendukung bahasanya, relatif lebih kecil dibandingkan Inggris di baratnya, Jerman di timurnya, dan Perancis di selatannya.

Khususnya Perancis, jangan lupa bahwa sastranya telah menjadi ingatan tentang pikiran-pikiran besar yang menopang akarnya, dengan ratusan nama yang harum, yang terus disebut melalui bangku-bangku sekolah. Tidaklah heran jika orang Perancis pun sangat percaya diri terhadap bahasanya. Bahkan, gambaran umum orang terhadap Perancis adalah: mereka *tidak mau* berbicara bahasa Inggris.

Awal pekan pada April lalu, di Hotel Fiat, Rue de Douai, Paris--hotel yang katakanlah setingkat harga inapnya dengan Santika di Yogya tadi--saya bertanya dalam bahasa Inggris belepotan kepada resepsionisnya. Sang resepsionis, yang mengenakan stelan jas dasi yang sangat Perancis, benar *tidak mau* menjawab pertanyaan saya dengan bahasa Inggris. Dia berkata dengan amat percaya diri, *Vous êtes à Paris, donc essayez de parler en Français, s'il vous plat*.

Edan juga, kata saya.

Saya berpikir dan berahap, siapa nyana di waktu mendatang orang Indonesia pun bisa dengan percaya diri berkata, "Anda berada di Jakarta, maka saya akan merasa sangat dihormati jika Anda dapat berbicara dalam bahasa Indonesia."

Sudah tentu, sebagai orang yang menulis karya sastra, prosa, dan puisi, rindu-dendam ini seyogyanya dibaca sebagai tanggung jawab nasional. Dan, di dalam sastra, saya memang tidak berbicara tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi yang tepat dan indah.***

LAPORAN SIDANG

- Hari, tanggal : Kamis, 16 Oktober 2003
- Judul makalah : 1) Peran Film dalam Peningkatan Penggunaan Bahasa
2) Peran Media Massa dalam Memasyarakatkan dan
Meningkatkan Apresiasi Sastra
- Penyaji : 1) Garin Nugroho
2) Remy Silado
- Pemandu : Ayu Sutarto
- Pencatat : 1) Edi Setyanto
2) I.G.K. Maha Indra

TANYA JAWAB

1. **Penanya:** Usman Abdulmanaf (Universitas Negeri Padang)
Pertanyaan ini saya tujukan kepada Mas Remy Silado dan Mas Garin Nugroho. Ada sejumlah orang yang beranggapan bahwa mereka tidak mampu menciptakan karya sastra yang baik atau tidak mampu berekspresi secara total tanpa menggunakan bahasa daerahnya. Hal itu mengakibatkan lahirnya sebuah karya sastra yang bahasa Indonesia bercampur aduk dengan bahasa daerah. Yang saya tanyakan kepada pemakalah berdua adalah mungkinkah dilahirkan karya sastra yang bernilai tinggi tanpa mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Yang kedua, mungkinkah, seorang pengarang bisa berekspresi secara total tanpa harus mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Tolong, apakah, ehmm Mas Garin dan Mas Remy bisa berikan contoh-contoh, bukti-bukti kalau Mas Garin, eh, dan seorang kreator juga bahwa tanpa mencampuradukkan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia.
2. **Penanya:** Elly Tulelle (Papua)
Saya sangat bangga pada sore hari ini bisa bertemu langsung dengan pakar sastra, antara lain, Garin Nugroho dan Mas remy Silado. Barangkali ini saran atau usul khususnya kepada Mas Garin Nugroho. Ada sebuah film, yaitu "Sekali Saja Aku Mencintaimu" yang intrinsik, yang unsur intrinsiknya mengambil latar di Papua. Barangkali film ini sebagian kecil yang menitikberatkan pada masalah cinta. Akan tetapi, barangkali, tolong, Mas Remy eh, Mas Garin barangkali anak-anak kami di Papua itu sangat mendambakan untuk lebih diapa, diangkat cerita mereka mengenai masalah pendidikan. Jadi, nanti tolong, kalau

bisa nanti, masalah yang di tanah Papua sana itu banyak sekali yang harus kita angkat karena masih alami. Jadi kami hanya sarankan kepada Mas Garin. Kalau seandainya masih mencintai tanah Papua yang begitu alami dan sangat indah tolonglah diangkat cerita masalah pendidikan yang ada di sekolah-sekolah itu. Supaya anak-anak ini jangan sampai di di eh merasa bahwa mereka tertinggal jauh dengan saudara-saudara mereka yang ada di Nusantara ini. Terima kasih.

3. **Penanya:** Agus Joko Purwadi (Universitas Bengkulu)

Ehh pada Mas Garin, pernyataan Mas Garin tadi juga mengingatkan saya terhadap apa pendapat Walter J. Ong bahwa negara Asia Tenggara pada umumnya, termasuk Indonesia belum matang pada budaya kemahir wacanaan tetapi tiba-tiba muncul budaya *oral litere* lagi. Nah saya merasakan, ini mungkin hanya tambahan pendapat saja. Maraknya *broker-broker* penulisan skripsi dan disertasi itu akibat dari semua itu. Kemudian, yang kedua di daerah-daerah ada juga keengganan menulis. Oleh karena itu, untuk keperluan naik pangkat ke golongan IV menyuruh orang lain untuk menulis. Nah, jadi ingatan saya itu, budaya *litere* itu ya ada tulis. Nah, kemudian untuk mas Yopie Tambayong itu mengingatkan saya pada pendapat Dr. Sujoko dari ITB, bahwa bangsa kita itu dihindangi penyakit *kroco jiwo*, rasa rendah diri yang sangat marah. Itu saja, terima kasih

Jawaban:

1. **Garin Nugroho**

Pertama saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir tentang tradisi lisan. Ttu perlu kajian khusus karena tradisi lisan kita yang terbaru menghadapi tradisi lisan *audio visual* baru. Kalau kita lihat seni bidang dalam tradisi lisan Aceh Tengah, misalkan, ketika ia bertutur sejarah kebakaran dan kecelakaan dari suatu rumah, ia menggunakan idiom-idiom bahasa dalam ikon-ikon bahasa yang dalam kekerasannya dimunculkan langsung. Karena berita itu dituangkan dalam tradisi lisan tanpa visual. Jadi, penutur akan bergerak pergi tanpa melakukan pemvisualan kekerasan penggambaran dari kekerasan itu sendiri. Itu terjadi dari berbagai tradisi lisan. Dan sekarang di televisi, tradisi lisan kita disetai penggambaran yang keluar juga malah menimbulkan masalah karena yang keluar dari etika televisi itu sendiri. Misalkan, pemerksaan *dilihtakan*, "maaf saja", celana dalamnya. Mayat yang *seenak-enaknya* muncul. Tradisi lisan bahasa kita kemudian ada perkembangan bagaimana otonomi daerah, bagaimana menggunakan bahasa daerah seperti di televisi Jawa Timur yang beritanya menggunakan bahasa daerah dan pemerksa itu disebut *kendu*. *Kendu* itu kasar sekali karena mencoba menggunakan bahasa daerah sebagai bagian dari

otonomi daerah. Akibatnya apa? Penerjemahan berita-berita ke dalam bahasa daerah itu bukan penerimaan atas berita, tapi malah membuat tertawa semuanya yang menonton karena tiba-tiba ada sesuatu edosentrisme yang sangat besar terhadap daerah itu menggunakan bahasa Surabaya. Orang Surabaya sendiri kalau ditanya tertawa sendiri *Mengkentu* dalam bahasa Surabaya itu kasar sekali. Demikian pula dalam bahasa daerah kemudian disebut "Siraha Sentet" yang mendengar bukannya terharu, tetapi tertawa. Nah gejala-gejala tradisi lisan kita dalam masyarakat baru ini menurut saya ini merupakan global ketiga dari "Sumpah Pemuda". Kemudian pada tahun 70-an bahwa ketika itu ruang *meeting*, kata-kata itu masuk, swastanisasi muncul tahun itu. Komik-komik lokal masih beradaptasi, seperti Gundala Putra Petir. Tapi pascatahun 1980-an mulai komik-komik global. Itulah globalisme ketiga dan bagaimana bahasa Indonesia menghadapi ini. Jadi, ini merupakan tantangan tersendiri antara hubungan lokal dengan nasional seperti yang saya katakan tadi atau bahasa Inggris global. Contohnya tahun 90-an berapa kata politik yang muncul di Indonesia dan sulit diterjemahkan. Saya itu Lembaga Sosial Masyarakat yang mengembangkan radio komunikasi. Saya kalau menerangkannya susah, saya gunakan istilah Radio Paguyuban. Wah pengaruh Jawa anti. Jadi, begitu bahasa Inggris netral jadinya. Tapi, tidak mengerti cara kerjanya. Tapi, begitu ngomong Radio Paguyuban "Oo kayak arisan ya? Yah, kayak arisan kerjanya gampang-gampang. Tapi, begitu saya ngomong radio komunikasi tidak ada akar kerjanya, bingung. Mulai dari nama pekerjaan ini, akuntabilitas, akseptabilitas, seluruhnya berapa banyak kata politik dalam 1998 ini juga betul-betul tantangan baru dan bagaimana otonomi bahasa daerah menggunakan bahasa daerah juga untuk bagian budaya populer, seperti berita yang berbahasa Jawa di Surabaya itu. Jawaban tentang tradisi lisan, tentu saja jawaban yang tidak langsung atas pertanyaan Anda. Kemudian tentang campur aduk mungkin ee ... Bang Remy bisa menjawab secara langsung, tetapi hubungan netral multikultural dan tidak mungkin dianggap ciri dari Indonesia sendiri. Persoalannya adalah persoalan bahwa seperti saya dalam membikin film di daerah-daerah, rata-rata saya membiarkan seperti sesuai dengan keadaannya, seperti saya membikin "Bulan Bersusun I Lalang" di Solo itu ada yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah. Misalnya, saya bertemu dengan ibu saya. Ibu saya ngomong dengan bahasa Jawa, saya kadang-kadang karena tidak bisa berbahasa Jawa, saya kadang-kadang karena tidak bisa berbahasa Jawa lagi, saya menggunakan bahasa Indonesia. Menurut saya karya-karya yang menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia serta perjumpaan kedua-duanya akan selalu mendapat tantangan dan peran baru di dalam masyarakat.

Menurut saya, karya-karya yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan perjumpaan kedua-duanya, akan selalu mendapat tantangan dan peran baru di dalam masyarakat.

2. Remy Silado

Pertanyaan untuk saya mengenai “Dapatkah sastra menjadi besar tanpa kepengaruhan bahasa daerah. Itu kalau tidak salah. Dari pertanyaan itu saya melihat kesan-kesan orang takut menggunakan bahasa daerah dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya kalau kita betul-betul membaca karya sastra sebelum dari pujangga baru, taruhlah kita baca karyanya Merari Siregar *Azab dan Sengsara*. Kita lihat di situ setingnya adalah daerah tempat dia lahir. Ada banyak kata yang disambungkan oleh penulis yang berasal dari Batak ke dalam bahasa Indonesia. Ada kata yang sekarang dihilangkan dalam Kamus Baku Bahasa Indonesia, kata *Horas*. Dalam *Kamus Umum Purwadarminta* masih kata *horas* tetapi dalam kamus yang baru dihilangkan. Padahal, kata itu belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, mengapa kita berprasangka buruk terhadap bahasa daerah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Yang memberi kesan seakan-akan bahasa Indonesia terkotorkan oleh bahasa daerah. Setelah Merari Siregar, lahir pujanga baru. Kita melihat beberapa kata bahasa Minang yang disumbangkan oleh pengarang-pengarang, peserta-peserta yang kebetulan datang dari tanah Minang ke dalam sastra Indonesia. Sebut sebuah nama orang Minang. Sekarang setelah tahun 80-an ke sini telah banyak datang yang berlatar belakang Jawa sebagai tidak bisa ditolak juga kata-kata bahasa Jawa masuk ke dalam. Buat saya kata-kata bahasa daerah itu melengkapi bahasa Melayu kita yang sangat miskin. Seperti kata *bulan* sebagai *candra*, bulan sebagai *month*, *bulan* sebagai datang pada perempuan. Itu tetap bulan. Tapi dalam bahasa Jawa beda. Misalnya, ada *candra* ada *sasih*. Dan, harus diingat pula, jangan mengira bahwa yang menjadi bahasa Indonesia adalah bahasa asli. Perhatikan saja kata-kata dalam Teks Proklamasi, hanya ada beberapa saja yang asli, yaitu kata “yang”, lainnya semua bahasa asing. Kata *proklamasi* (bahasa Belanda), yaitu dari kata *proklamation*, *kami* bahasa *campa*, dalam *tempo* bahasa Italia. Soekarno-Hatta. Soekarno bahasa Sansekerta. Hatta Arab. Tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang kita anggap asli. Saya tidak pakai dari bapak yang di depan itu pakai dasi. Perhatikan pakaian yang digunakan oleh Bapak itu dari bawah sampai ke atas. Tidak ada satu pun kata yang berasal dari bahasa Indonesia yang dipakai Bapak itu. Sepatu, bahasa Italia, kaus kaki bahasa Belanda, *celana* ee.. bahasa Persia. Begitu kita bilang *hem* bahasa Belanda, *dasi* bahasa Belanda. Demikian pula, yang perempuan lebih-lebih sama. Misalnya, kata BH, tahukah ibu-ibu BH. Itu adalah *Best the Hower* artinaya ‘pemegang susu’. Kita tidak akan

menerjemahkan dengan kata kutang. Perempuan pun dari kaki sampai atas semua kata asing, sebab mulai dari sepatu, sandal sampai ke jilbab. Jadi, tidak ada prasangka kita terhadap bahasa dari luar yang memperkaya bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu sangat detail untuk perasaan yang tidak kita miliki dalam bahasa Indonesia. Antara *plintat-plintut*, *mencla-mencle* ada kadar-kadarnya. Jadi, justru masuknya kata bahasa daerah dalam bahasa Indonesia memperkaya bahasa Indonesia. Yang menjadi persoalan, apakah karya sastra itu menjadi besar atau tidak, itu bergantung juga kepada kekuatan nalar pengarang yang bersangkutan. Apa yang diberikan arti kehidupan dan filsafat. Sebuah karya sastra kalau hanya sekadar cerita, ya buang saja ke tong sampah. Ketika sudah menjadi novel harus ada pemikiran di dalam. Hal ini yang kita belum. Kita cemburu misalnya melihat orang Asia lainnya yang berbicara mengenai manusia sebagai manusia universal. Kita belum ke tahap itu. Dan, karya yang besar bergantung pada nilai universalnya. Dia harus memberikan pengharapan kepada orang yang sedih, terus memberikan penghiburan kepada orang yang kalut. Itu tugas pengarang/pesastra dalam membuat karya sastranya. Jadi, begitu terima kasih.

Topik Panel 1:

MASALAH PENGAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DALAM DUNIA PENDIDIKAN

MENUJU PENGAJARAN BAHASA DAN SASTRA YANG BERMAKNA

Suminto A. Sayuti

Universitas Negeri Yogyakarta

1/

"Bangsa kita menderita sakit rabun membaca dan lumpuh menulis". Kalimat itu sering disampaikan oleh Taufiq Ismail dalam berbagai forum.¹⁾ Sindiran kritis tersebut ujung-ujungnya dialamatkan pada kegagalan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di sekolah. Artinya, pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang selama ini dilaksanakan melalui sistem persekolahan belum mampu memenuhi harapan sebagian besar masyarakat. Pengajaran bahasa dan sastra Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam menunaikan imperatif luhur yang diembannya, baik dalam perspektif edukatif maupun kultural.

Dalam perspektif yang pertama, sesungguhnya pelaksanaan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia diharapkan mampu mencapai tingkatan yang

¹⁾ Bahkan, menurut pengakuannya, ia merasa *gregetan* terhadap pengajaran sastra lebih dari 30 tahun. Sejak akhir tahun 1960-an Taufiq Ismail merenungkan apa yang sering disebut sebagai keterpencilan sastra kita di masyarakat, posisi sastra Indonesia yang cuma di trotoar peradaban bangsa, dan masalah petikan puisi dan novel kita yang tidak berada di dalam hati dan tidak terucapkan dalam pidato para pemuka negara, serta minimnya jumlah doktor sastra. Ia pun membuat identifikasi gejala dan kemungkinan penyebabnya: (1) merosotnya minat masyarakat dalam membaca karya sastra; (2) rendahnya tiras buku sastra; (3) merosotnya mutu karya sastra; (4) sepiya ulasan dan kritik sastra; (5) kurang menaikinya jumlah pengulas dan kritikus sastra, (6) seretnya pertambahan S-3 ilmu sastra dibandingkan dengan S-3 ilmu eksakta/sains dan ilmu ekonomi/sosial; (7) hanya terdapat satu-satunya majalah bulanan sastra; (8) masih adanya pelarangan karya sastra; (9) lambatnya proses desentralisasi kegiatan sastra; (10) sangat kurangnya diadakan sayembara-sayembara sastra; (11) kurangnya penghargaan pada karya sastra dan sastrawannya; (12) kurang dikenalnya sastra Indonesia di luar negeri melalui terjemahan bahasa asing; (13) tidak adanya acara sastra dan pembicaraan buku sastra di televisi, dan (14) merosotnya baca buku sastra dan pelajaran mengarang di sekolah.

terkait dengan upaya "mencerdaskan kehidupan bangsa," menuju kehidupan yang lebih modern dan beradab. Sementara itu, dalam perspektif yang kedua, pengajaran di bidang itu seharusnya mampu mencapai tingkatan kontributif sebagai unsur pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa.

Kedua persepektif tersebut kini akan begitu terasa pentingnya. Era kesejagatan hampir selalu berimplikasi pada persoalan kontak bahasa dan kontak budaya. Tegur-sapa budaya lokal dengan budaya nasional, budaya nasional dengan budaya regional dan global, merupakan suatu hal yang makin tak terhindarkan. Kita menjadi pejalan budaya pulang-balik: lokal-nasional-global. Untuk itu, di dalam merambahnya, kita perlu berpikir dan bertindak secara sadar dan mandiri. Dengan cara demikian, tegur-sapa kultural yang salah satunya akan berpengaruh besar terhadap masalah kebahasaan dan kesastraan itu berlangsung sewajarnya. Kedua perspektif yang sudah disebutkan di atas itulah yang seharusnya menjadi pangkal etos kerja tatkala bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi.

Kegagalan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia juga menunjukkan bahwa kedudukan BI sebagai bahasa negara belum sepenuhnya terimplementasikan. Padahal, kedudukan semacam itu mengandung imperatif yang mengikat. Artinya, BI harus berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu implikasi konkretnya, BI dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan,²⁾ di samping sebagai substansi yang diajarkan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang muara akhirnya adalah menempatkan fungsi strategis BI dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, terutama dalam dua perspektif yang sudah dikemukakan di atas: edukatif dan kultural.

Pada hakikatnya tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah adalah untuk mengembangkan keterampilan berbahasa, baik secara lisan maupun tertulis, serta menumbuhkan apresiasi sastra. Pelaksanaan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dinyatakan bermakna apabila tujuan tersebut tercapai, yakni berkembangnya keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, serta tumbuhnya apresiasi sastra secara baik di kalangan siswa. Dengan kata lain, untuk mencapai kebermaknaannya, pembelajaran bahasa dan sastra sudah seharusnya lebih diarahkan pada pembinaan keterampilan berkomunikasi dalam berbagai situasi, serta pembinaan sikap kritis dan menghargai teks-teks sastra.

Tentu dapat dimaklumi mengapa persoalan apresiasi sastra menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam dan lewat pengajaran sastra. Tercapainya tujuan tersebut juga akan berpengaruh besar pada kehidupan

²⁾ Implikasi lainnya, BI dipergunakan sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan, dan sebagai sarana penguasaan dan pengembangan berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, perdagangan, industri, kebudayaan, pariwisata, politik, dan ipteks.

sastra suatu bangsa, misalnya saja: (1) karya-karya sastra tidak lagi terpengcil dari masyarakatnya; (2) para sastrawan tidak menjadi "makhluk marginal" yang perlu "diwaspadai"; (3) masyarakat dapat memetik hikmah dari karya-karya sastra yang berupa nilai-nilai kemanusiaan, yang pada gilirannya dapat mempertinggi derajat budi pekerti. Akan tetapi, idealisasi semacam itu hingga kini masih belum sepenuhnya menjadi kenyataan.

2/.

Dalam hubungannya dengan masalah tersebut, sejumlah hal dapat diidentifikasi, misalnya saja penyampaian materi teoretis yang berlebihan. Akibatnya, kemampuan berbahasa siswa kurang mendapat perhatian. Hal ini diperparah oleh adanya anggapan yang mengedepan bahwa metode ceramah di depan kelas merupakan metode terbaik.³⁾

Contoh lain secara nyata terjadi dalam pembelajaran menulis. Pembelajaran keterampilan ini masih dilakukan secara tradisional dengan menekankan pada hasil tulisan siswa, bukan pada proses yang seharusnya dilakukan.⁴⁾ Pendekatan tradisional dalam pembelajaran menulis ditekankan pada hasil berupa tulisan yang telah jadi, tidak pada yang dikerjakan siswa ketika menulis. Para siswa langsung berpraktik menulis tanpa belajar bagaimana caranya menulis. Guru biasanya menyediakan beberapa macam judul/topik karangan dan meminta siswa untuk memilih salah satunya. Para siswa kemudian diminta untuk secara langsung menulis. Setelah selesai, hasil kerja siswa dikumpulkan, dikoreksi, dan dinilai oleh guru. Kegiatan-kegiatan ini terus-menerus terjadi yang mengakibatkan para siswa merasa jenuh dan kurang menyenangkan pembelajaran menulis. Mereka akhirnya berpendapat bahwa kegiatan pembelajaran menulis merupakan suatu beban yang membebankan. Akhirnya, keterampilan menulis para siswa sangat rendah.

Hal yang serupa juga terjadi dalam pembelajaran membaca.⁵⁾ Siswa diminta untuk membaca (nyaring atau dalam hati), guru memberi penjelasan kata-kata sulit yang terdapat dalam bacaan. Pada fase akhir kegiatan pembelajaran, siswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang isi bacaan atau menceritakan isi bacaan secara lisan/tulisan. Secara terus-menerus kegiatan macam itu dilakukan. Para siswa pun menuai kejenuhan dalam kegiatan membaca.

Jika pembelajaran membaca dan menulis saja masih dilakukan secara tradisional (sedikit sekali ada upaya inovasi pembelajaran), apalagi keterampilan mendengarkan dan berbicara. Guru jarang sekali melakukan kegiatan pembelajaran menyimak. Keterampilan menyimak dianggap keterampilan pasif yang semua siswa bisa melakukannya. Demikian pula halnya dengan keterampilan

³⁾ Herman J. Waluyo, *Suara Merdeka*, 19 Oktober 2002

⁴⁾ Syamsi, 2000, lihat juga : Zuchdi, 1995

⁵⁾ Syamsi, 2000

berbicara. Pembelajaran keterampilan berbicara hanya dilakukan sepiantas lalu. Melatih siswa untuk berpidato, berceramah, atau bercerita umumnya dianggap sebagai kegiatan yang mubazir. Apalagi dalam evaluasi pembelajaran (tes sumatif, ehta, ebtanas, uan) tidak pernah ada evaluasi keterampilan berbicara siswa.

Pendek kata, dalam pengajaran bahasa aspek gramatik cenderung diajarkan secara terpisah; pengajaran dipusatkan pada upaya membantu siswa membuat kalimat yang benar strukturnya tanpa mempertimbangkan konteks; sebagian besar waktu belajar dipergunakan untuk menghafalkan kaidah bahasa; dan kesempatan praktik berbahasa menjadi begitu terbatas.

3/.

Pembelajaran apresiasi sastra dapat dikatakan lebih parah lagi.⁶⁾ Siswa lebih banyak diberikan nama-nama pengarang dan karyanya tanpa pernah mendapat kesempatan untuk mengenal, menikmati, dan menghayati karya sastra. Mereka cukup diperkenalkan dengan ringkasan isi novel. Oleh karena itu, wajarlah jika sastra benar-benar sangat asing bagi siswa.

Pada sisi lain, secara lebih spesifik, diduga terdapat tiga kecenderungan utama yang sering terjadi dalam pengajaran sastra di sekolah. Pertama, apabila berkenaan dengan makna teks, para guru lebih mengistimewakan intensi pengarang secara berlebihan sebagai sesuatu yang "terbaik". Kedua, teks seringkali disikapi sebagai sebuah dunia yang tertutup bagi siswa. Guru-guru cenderung menyarankan bahwa sejumlah tafsiran terhadap teks tertentu tidak bisa dilakukan secara sederhana. Ketiga, guru seringkali mendevaluasi latar belakang dan pengalaman siswa dalam kaitannya dengan membaca teks.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut, di satu sisi, disebabkan oleh begitu kuat dan mengakarnya pandangan realisme ekspresif.⁷⁾ Di samping itu,

⁶⁾ Sudah sejak tahun lima puluhan persoalan ini, paling tidak menurut catatan Ajip Rosidi, menjadi pembicaraan dan perdebatan yang tak putus-putusnya dalam berbagai forum seminar, simposium, dan upaya lain yang sejenis. Hingga kini sudah tak terhitung lagi, berapa jumlah kertas kerja, makalah, yang membicarakan persoalan itu. Sekedar menyebut contoh, tahun 1991 Umar Kayam, dalam Pilnas HISKI di Yogya, sudah mengusulkan agar pengajaran sastra dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tahun 1998, baik dalam Pilnas HISKI IX (Bandungan, Semarang, 22--24 Oktober 1998) maupun dalam Kongres Bahasa Indonesia VII (Jakarta, 26--30 Oktober 1998), usulan serupa masih juga mengemuka. Pandangan-pandangan yang ada itu pada prinsipnya menghendaki adanya pembaharuan pengajaran sastra dari berbagai seginya, misalnya dari sudut pandang teori yang dijadikan pijakan berikut implikasinya dalam pembelajaran.

⁷⁾ Menurut Catherine Belsey (lewat Thomson, 1992), realisme ekspresif merupakan ajaran yang mempertimbangkan sastra sebagai teks yang ditulis oleh individu yang secara persoalan begitu berbakat dan memperoleh dorongan ilahiah,

pandangan yang berkeyakinan bahwa "hanya terdapat satu tafsir teks yang secara objektif benar", merupakan penyebab lain timbulnya kecenderungan yang terjadi dalam proses pengajaran sastra.

4/.

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai berikut kenyataan yang dihadapi pengajaran bahasa, orientasi metodologis yang selama ini dipakai dan ternyata kurang bermakna, harus disesuaikan. Pendekatan pengajaran yang dipergunakan hendaknya pendekatan yang mampu menciptakan situasi yang berpotensi mengeleminir kerisauan para siswa. Misalnya saja pendekatan yang melibatkan para siswa secara personal (dan kontekstual) dalam kegiatan belajar. Dengan pendekatan ini, minat dan interest siswa pada pendapat, perasaan, dan minat siswa lain dapat ditumbuhkan secara wajar, di samping mereka juga diharapkan tidak akan merasa tertekan tatkala mengekspresikan suatu hal dalam topik-topik yang didiskusikan di kelas. Untuk itu, hal-hal berikut ini harus menjadi perhatian utama dalam menyiapkan strategi dan melaksanakan proses pengajaran bahasa di kelas; (a) Fokus awal pelajaran bahasa adalah pemerolehan kompetensi komunikatif, bukan ketepatan gramatik; (b) Perubahan dan peningkatan siswa dalam menemukan kaidah bahasa lewat dan dalam kegiatan berbahasa menjadi arahnya; (c) Guru tidak boleh memaksa siswa untuk mempelajari bahasa, sebaliknya, siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh bahasa.

Seiring dengan diberlakukannya KBK yang jelas-jelas menuntut agar pelaksanaan pengajaran lebih ditekankan pada pengembangan keterampilan berbahasa dan bersastra siswa, perlu segera dicari alternatif model pengajaran bahasa dan sastra yang sesuai.

Dalam kaitannya dengan strategi pembelajaran berbicara, terdapat beberapa model yang bisa dilakukan, antara lain percakapan (seperti analisis propaganda iklan, membandingkan dua pelaku dalam dua cerita, atau topik-topik lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah), berbicara estetik, berbicara bertujuan, dan aktivitas drama. Untuk memulai percakapan dapat meminta seorang siswa sebagai sukarelawan atau guru mengajukan pertanyaan. Agar percakapan tetap berlangsung, siswa diminta secara bergantian memberi komentar atau mengajukan pertanyaan atau mendukung pendapat orang lain. Untuk menutup percakapan dapat dilakukan dengan pencapaian konsensus atau kesimpulan yang disepakati bersama.

Berbicara estetik dapat berupa percakapan tentang sastra, bercerita, dan

yang secara langsung mengkomunikasikan beberapa aspek kondisi manusia. Sementara itu, pembaca dipertimbangkan sebagai individu bebas, ahitoris, bercitarasa baik, dan secara takzim mengakui adanya suatu kebenaran abadi. Bagi ajaran ini, semua ditulis berdasarkan pengalaman personal dan merefleksikan kehidupan dengan suatu implikasi bahwa terdapat suatu hubungan langsung antara bahasa dan realitas.

teater pembaca. Percakapan tentang sastra dapat dilakukan setelah siswa membaca atau mendengarkan karya sastra. Siswa dapat menyampaikan pendapat dan komentar mereka tentang karya sastra yang baru mereka baca/dengar. Bercerita (mendongeng) adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Kegiatan ini sangat menyenangkan dan sekaligus merangsang imajinasi anak. Langkah-langkah dapat bercerita adalah memilih cerita, mempersiapkan diri untuk bercerita, menambah peraga, dan menyampaikan cerita. Teater pembaca adalah presentasi pembacaan naskah drama oleh sekelompok siswa. Langkah-langkah kegiatannya, memilih naskah, latihan, dan presentasi.

Kegiatan berbicara bertujuan dapat berupa laporan lisan, wawancara, atau debat. Dalam laporan lisan, siswa dapat diminta untuk memberikan informasi topik tertentu atau melaporkan hasil membaca buku.⁸⁾ Wawancara juga dapat dilakukan oleh para siswa.⁹⁾ Debat juga dapat dilakukan jika ada isu kontraditif yang menarik. Sebagian siswa mungkin setuju atau tidak setuju terhadap isu tersebut.¹⁰⁾

Dalam kaitannya dengan pembelajaran membaca dapat digunakan pendekatan proses, yakni proses membaca. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan keterampilan membaca siswa.¹¹⁾ Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk juga menyimpulkan bahwa pembelajaran menulis.¹²⁾ Sementara itu, pembelajaran menyimak dapat dilakukan sendiri

⁸⁾ Langkah-langkah pembelajarannya adalah memilih topik, mencari dan menyusun informasi, membuat peraga, dan mempresentasikan.

⁹⁾ Langkah-langkahnya perencanaan, melakukan wawancara, dan berbagai pengalaman hasil wawancara.

¹⁰⁾ Langkah-langkah pembelajarannya adalah tentukan isu/usul, mengelompokkan siswa yang setuju dan yang tidak setuju, dan melakukan debat. Untuk melaksanakannya dapat dilakukan prosedur: (1) pertanyaan pertama dan ketiga mendukung usul, (2) pertanyaan kedua dan keempat menolak, (3) pertanyaan sanggahan pertama dan ketiga disampaikan kelompok siswa setuju, dan (4) pertanyaan sanggahan kedua dan keempat dilakukan kelompok siswa tak setuju.

¹¹⁾ Syamsi, 2000. Menurut hasil penelitian Palmer et.al (1994), siswa akan mendapatkan keuntungan jika proses, seperti proses membacanya diperagakan di hadapan siswa. Adapun proses membaca meliputi: persiapan untuk membaca, membaca, merespon, mengeksplorasi teks, dan memperluas interpretasi (Tomkins & Hoskisson, 1995). Selain dengan pendekatan proses, dan pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan berbagai teknik atau strategi, seperti SQ3R, STUDY, PQRS, OK5R, dan EVOKER. Berbagai teknik tersebut dapat dilakukan secara bervariasi sehingga dapat mencegah kejenuhan.

¹²⁾ Syamsi, 2000. Pembelajaran menulis dengan pendekatan proses meliputi lima langkah, yakni pramenulis, menulis draf, merevisi, menyunting, dan mempublikasi (Tomkins & Hoskisson, 1995).

atau bersama-sama dengan pembelajaran berbicara atau membaca. Hal penting yang perlu dilakukan adalah perlunya perhatian terhadap proses menyimak itu sendiri.¹³⁾

Akhirnya, pembelajaran tata bahasa¹⁴⁾ akan sangat tepat jika dilakukan secara terpadu dan kontekstual dengan pembelajaran keterampilan berbahasa baik menyimak, membaca, menulis, maupun berbicara. Setelah siswa melakukan kegiatan menyimak, misalnya, kegiatan dapat dilanjutkan dengan diskusi tentang kalimat. Pada kesempatan itu, guru dapat mengambil beberapa contoh kalimat yang ada pada bahan simakan untuk dikaji bersama-sama. Biarkan siswa menganalisis sendiri apa dan bagaimanakah kalimat itu. Yang penting adalah bahwa guru hendaknya tidak memberikan ceramah tentang tata bahasa itu. Demikian pula halnya dengan pembelajaran kosa kata.¹⁵⁾

6/.

Dalam rangka mengupayakan pencapaian tujuan pengajaran sastra yang apresiatif, sudah saatnya kecenderungan yang ada selama ini diimbangi, kalau belum bisa diganti, dari satu segi, dengan perspektif lain. Misalnya saja dengan pandangan yang **tidak hanya** mempertimbangkan "membaca" sastra sebagai proses "*transmission*", pemindahan makna yang dibangun secara menyeluruh oleh pengarang dan dikomunikasikan kepada pembaca, tanpa perubahan, melalui sarana teks. Hal ini perlu diupayakan agar implikasinya dalam praktik pembelajaran tidak hanya menekankan *delivery system* dan terlampaui kognitif.

Salah satu model pembelajaran sastra yang apresiatif adalah pembelajaran

¹³⁾ Proses menyimak meliputi menerima lambang lisan, memberi perhatian, dan menentukan makna. Ada berbagai macam menyimak yang dapat dilakukan, seperti menyimak estetik, menyimak kritis, menyimak komperhensif, dan sebagainya. Dalam menyimak estetik, misalnya, dapat dilakukan langkah-langkah: a) prediksi, b) menyusun imajinasi mental, c) menghubungkan dengan pengalaman pribadi, d) menghubungkan dengan pengalaman literatur, e) memperhatikan keindahan dan kekuatan bahasa, dan f) menggunakan pengetahuan untuk pemahaman lebih lanjut.

¹⁴⁾ yang meliputi tata bunyi, ejaan, tata kata, tata kalimat, paragraf, dan wacana

¹⁵⁾ Untuk ini dapat digunakan metode langsung atau taklangsung. Dengan metode langsung, guru dapat secara khusus mengajak siswa untuk mengkaji tentang sinonim, antonim, atau yang lain dengan menggunakan berbagai strategi seperti penggunaan kamus, semantik *mapping*, atau diagram pohon. Dengan metode taklangsung, guru dapat mengajak siswa untuk mengkaji penggunaan kosa kata tertentu setelah mereka mengikuti kegiatan keterampilan berbahasa. Setelah membaca, misalnya, guru bisa mengajak siswa untuk mengkaji homonim atau homograf yang terdapat dalam bacaan. Pada hakikatnya, berbagai pengalaman kegiatan berbahasa dapat meningkatkan dan memperkaya penguasaan kosa kata seseorang. Oleh karena itu, metode taklangsung ini sungguh sangat bermanfaat dalam peningkatan penguasaan kosa kata siswa.

sastra dengan pendekatan resepsi sastra.¹⁶⁾ Pembelajaran sastra dengan pendekatan ini menghendaki siswa untuk lebih banyak berinteraksi dengan karya sastra. Tanpa banyak diberikan teori, siswa diminta langsung mengenal (dengan membaca atau mendengarkan), menikmati, dan menghayati karya sastra tertentu.

Perspektif resepsi sastra mengubah fokus perhatian terhadap sastra: **dari** teks **ke** pembaca (dalam kaitan ini, baca: siswa dan guru). Sastra bukanlah sebuah objek, melainkan sebuah pengalaman, dan pembaca bukanlah konsumen, melainkan peraga aktif yang membawa teks ke dalam kehidupan pikirannya.

Aktivitas pembaca sastra tersebut hampir dipastikan selalu tidak bebas hambatan, baik hambatan tekstual maupun kultural. Pembacaan dipandu oleh teks dan dipengaruhi oleh sejarah pembaca, baik yang personel, literer, maupun kultural; di samping juga oleh sistem kepercayaan dan konvensi-konvensi membaca yang telah diinternalisasikan, yakni yang oleh Iser disebut "repertoire" pembaca dan oleh Ian Reid disebut "bingkai ekstratekstual." Apa yang pembaca bawa membentuk cara mereka membuat teks itu bermakna.

Dalam tindakan membaca, pembaca dilibatkan dalam proses penyusunan makna secara berkesinambungan, membangkitkan harapan mengenai apa yang ada dalam teks dalam kaitannya dengan apa yang tampak, membentuk harapan baru, dan secara retrospektif mengubah hipotesis-hipotesis terdahulu. Oleh karena itu, respons merupakan sebuah proses *selfcorrection* yang dinamis.¹⁷⁾

Proses pembuatan teks terutama melibatkan pembentukan imaji-imaji mental (kesan dan perasaan indera) dan mengisi kesenjangan, kekosongan, atau indeterminasi. Pandangan resepsi mengamsumsikan bahwa teks literer membentuk sebuah kesatuan organis: koherensi karya yang datang dari hubungan-hubungan harmonis elemen-elemen (bagian-bagian individual) pembangunannya. Tugas pembaca adalah menetapkan makna di antara indeterminasi yang muncul.

Pokok-pokok pikiran tersebut mengimplikasikan bahwa strategi transaksional merupakan salah satu strategi yang tepat dan perlu dikembangkan dalam pengajaran sastra, apalagi jika dikaitkan dengan pencapaian tujuan utamanya, yakni terbinanya apresiasi sastra. Hal ini dimungkinkan karena pembaca hampir selalu memperhitungkan latar belakang pengalaman dan pengetahuannya tatkala mereka terlibat dalam penyusunan makna teks yang dihadapinya. Caranya, pembaca "memanggil kembali" skema internal yang telah mereka

¹⁶⁾ Dalam penelitiannya terhadap siswa SMP, Wiyatni dan Kastam Syamsi (2002) menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan resepsi sastra dapat meningkatkan apresiasi sastra siswa dan sikap siswa terhadap sastra.

¹⁷⁾ Dalam hubungan ini Iser mengatakan bahwa, "*Troughout the reading process there is a continual interplay between modified expectations and transformed memory.*"

miliki dan mengoperasikannya tatkala berhadapan dengan teks dalam rangka pemahamannya.

Lewat "transaksi-transaksi"-nya dengan teks, pembaca menyusun makna dalam rentangan kemungkinan yang disediakan oleh teks tertentu. Terdapat "konstruk baru," makna baru yang disusun berdasarkan atas serpihan teks yang digelutinya.

Transaksi itu pada hakikatnya merupakan konversasi atau dialog terus-menerus antara teks dan pembaca: "sebuah negosiasi antara apa yang diketahui pembaca dan apa yang disajikan teks." Negosiasi itu sendiri, dengan demikian, merupakan suatu proses yang meniscayakan pergeseran **diri** makna yang didasarkan pada teks, *meaning-getting*, **ke** konseptualisasi membaca sebagai *meaning-making*.

Akan tetapi, membangun negosiasi antara pembaca dan teks tidak pernah bisa dikerjakan dalam satu situasi yang terisolasi dari lingkungan sosial tempat pembacaan dan pembelajaran sastra berlangsung. Itulah sebabnya membangun negosiasi juga meniscayakan adanya perubahan yang sinambung mengenai hal yang sebelumnya telah dihipotesiskan. Makna dalam sastra adalah sebuah opini, dan opini hanya dapat dihipotesiskan lewat negosiasi yang, antara lain, dikembangkan dalam strategi transaksional. Oleh karena itu, strategi ini mengandaikan seorang pengajar sastra sebagai *fellow builder*, yang dekat, tetapi tidak sama, dengan seorang "arsitek."

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan strategi transaksional dalam pembelajaran sastra tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip berikut.

Transactional Approaches (Teacher as Fellow Builder)

<i>Goals of Learning</i>	<i>Collaboratively generated between students and teacher</i>
<i>Role in Learning</i>	<i>Student negotiated</i>
<i>Methods of Learning</i>	<i>Student constructed (negotiated with teacher)</i>
<i>Procedures in Group</i>	<i>Student constructed</i>
<i>Functioning</i>	
<i>Content of Learning</i>	<i>Student and teacher negotiated</i>

(Straw, 1996)

Dalam hubungan ini, perlu juga diperhatikan prinsip *literature as exploration*, yang mengisyaratkan bahwa peranan pembaca dalam proses yang melaluinya mereka menafsirkan sastra, memungkinkan emosi dan intelektualnya berfungsi kontributif untuk membangkitkan pengalaman literer.

Membangkitkan harapan, mengubah, memeriksa, dan memperluas kesan serta memecahkan teka-teki (dalam teks) merupakan sesuatu yang bersifat aktif. Aktivitas yang bertahap itu dapat dikembangkan melalui pengajaran. Selama pengajaran berlangsung, guru dapat membawa siswa untuk menduga-duga, merefleksikan dan membuat proses berpikir mereka eksplisit dan karenanya, refleksi dan proses berpikir itu hendaknya dipertimbangkan sebagai sarana yang dapat dipergunakan.

Para siswa dapat dibantu untuk mengajukan pertanyaan secara aktif dan, jika diperlukan, menyanggah teks: mereka dibawa masuk ke dalam situasi "perseteruan" dengan teks yang sedang dibacanya. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui cara-cara: (1) Memformulasikan teka-teki mereka sendiri dan bukannya menjawab pertanyaan pengajarnya; (2) Melakukan spekulasi dan merumuskan hipotesis. Cara ini merupakan aktivitas yang diarahkan melalui metode-metode pengajaran tertentu, yakni metode yang menghindarkan diri dari sifat memberikan hukuman jika siswa melakukan kesalahan (menurut versi guru); (3) Mencocokkan ideologi-ideologi tekstual dengan ideologi yang dimiliki para siswa, misalnya saja dengan mengajukan pertanyaan "Siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, di mana, mengapa?" "Desain apa yang dimiliki teks ini menurut pendapat saya, seharusnya saya menentang dan berseteru dengannya?"

Uraian di atas jelas mengandaikan bahwa karya-karya sastra memang tersedia secara cukup dan dibaca, baik oleh guru maupun siswa, sebagai bagian dari kehidupan sastra suatu bangsa dalam keseluruhannya. Upaya apapun akan menjadi sia-sia tatkala buku-buku sastra memang tidak dibaca sama sekali karena berbagai alasan, termasuk karena tidak tersedianya buku-buku sastra di perpustakaan sekolah.

PUSTAKA PEMANDU

- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono (ed.). 2002. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Yayasan Obor Indonesia.
- Alwi, Hasan. 2000. "Pengembangan Kurikulum Bahasa." *Makalah Konaspi*. Jakarta: UNJ.
- Anonim. 19 Februari 2002. "Pengajaran Bahasa Masih Teoritis", *Suara Merdeka*. Selasa 19 Februari 2002.
- Bull, G. 1996. "Using Children's Literature to Support Children's Learning: An Investigation of the Pedagogy of Literature" dalam Sue Clancy. 1996. *Literary Theory and Children's Literature*. Faculty of Education, Charles Sturt University, Australia.

- Calkins, L.M. 1983. *Lesson form a Child: on the Teaching and Learning of Writing*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Cullinan. 1989. "A Transactional View of Reading"
- Sue Clancy. 1996. *Literary Theory and Children's Literature*. Faculty of Education, Charles Sturt University, Austarlia.
- Djojonegoro, Wardiman. 1998. "Peningkatan Peran Instansi Pemerintah dalam Pembinaan Bahasa Indonesia." *Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Graves, D.H. 1983. *Writing: Teachers and Children at Work*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Holub, Robert C. 1984. *Reception Theory. A Critical Introduction*. London: Methuen.
- [Http://www.pdk.go.id/Journal/32](http://www.pdk.go.id/Journal/32)
- Iser, Wolfgang. 1983. *The Implied Reader, Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett*. Baltimore and London: The Johns Hopkins Press.
- Joyce, Bruce and Weil, Marsha. 1980. *Models of Teaching (2nd)*. New Jerssy: Prentice-Hall, Inc.
- Kasbolah, Kasihani. 1989. "Mengapa Kurikulum Berubah?" Dalam Majalah *IKA IKIP Malang*. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Norton, D.E. (1989). *The Effective Teaching of Language Arts. Third Edition*. Columbus: Merrill Publishing Company.
- Palmer, B.C., et. al. (1994). *Developing Cultural Literacy Troygh the Writing Process*. Boston: Allyn and Bacon.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1985. "Estetika Resepsi dan Teori Penerapannya", dalam *Bahasa dan Sastra, Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purwo, Bambang Kaswanti. 1990. *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa, Menyibak Kurikulum 1984*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- , 2002. "Perkembangan Pengajaran Bahasa". Dalam Hasan Alwi dan Dendy Sugono (ed.). 2002. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Yayasan Obor Indonesia.
- , (ed.). 1991. *Butir-Butir Sastra dan Bahasa, Pembaharuan Pengajaran*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Roe, B.D., Stoodt, B.D., and Burns, P.C. (1995). *Secondary School Instruction: The Content Areas. Fifth Edition*. Boston: The Houghton Mifflin Company.
- Sayuti, Suminto A. 1998. "Signifikansi dan Penggunaan Teori Sastra Kontemporer bagi Pengajaran Sastra". Makalah Ilmiah Pertemuan Ilmiah Daerah I HISKI KOMDA DIY. Yogyakarta: Hiski Komda DIY dan Universitas Ahmad Dahlan (25 Juli 1998).
- , 1983. Hakikat Teks Sastra dalam Perspektif Semiotik dan Estetika Resepsi" dalam *Al Qalam* (Jurnal Kependidikan). Yogyakarta: IKIP Muhammadiyah.
- , 1997. "Pragmatik Sastra" dalam *Widyaparwa*. Nomor 49. Oktober 1997. hh. 89-105.
- Segers, Rien T. 1978. *The Evaluation of Literary Texts. An Experimental Investigation into the Rationalization of Value Judgments with Reference to Seniotics and Esthetics of Reception*. Lisse: The Peter de Ridder Press.
- Selden, Raman and Widdowson, Peter. 1993. *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*. Great Britain: The University Press of Kentucky.
- Straw, S. 1988. "Reading and Response to Literatur: Transactionalizing Intruction" dalam Sue Clancy. 1996. *Literary Theory and Children's Literature*. Faculty of Education, Charles Sturt University, Australia.
- Sumardi, Muljanto. 1994. "Linguistik dan Pengajaran Bahasa." dalam Liberty P. Sihombing, dkk (ed.). *Bahasa Cendekia: Seuntai Karangan untuk Anton M. Moeliono*. Jakarta: PT Intermasa.
- Suparno. 1998. "Pengajaran bahasa Indonesia di Sekolah." *Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Syamsi, K. (2000). "Peningkatan Keterampilan Siswa Sekolah Dasar dalam Menulis (Penelitian Tindakan)", dalam *Jurnal Kependidikan (Terakreditasi)*, No. 2, Th. XXX, 2000.
- , (2000). "Peningkatan Keterampilan Siswa Sekolah Dasar dalam Membaca (Penelitian Tindakan)", dalam *Cakrawala Pendidikan (Terakreditasi)*, November 2000, Th. XIX, No. 4.
- Thomson, J. 1992. "The Significance and Uses of Contemporary Literary Theory for the Teaching of Literature" dalam Sue Clancy. 1996. *Literary Theory and Children's Literature*. Faculty of Education, Charles Sturt University, Australia.
- Tomkins, G.E., and Hoskisson, K. (1995). *Language Arts: Content and Teaching Strategies. Third Edition*. Englewood Cliffs, New Jersey: Merrill.

- Wiyatmi dan Syamsi, K. (2002). "Peningkatan Apresiasi Sastra Siswa SLTP dengan Pendekatan Resepsi Sastra", dalam *Cakrawala Pendidikan (Terakreditasi)*, Februari 2002, Th. XXI, No. 1.
- Zuchdi, D. (1996). *Pembelajaran Menulis dengan Pendekatan Proses*. Pidato Ilmiah pada Sidang Senat FPBS IKIP Yogyakarta tanggal 15 November 1996.
- (1995) "Pendekatan Komunkatif dalam Pengajaran Bahasa", *Makalah untuk Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat*. Yogyakarta: LPM IKIP Yogyakarta.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH

Suparno

Universitas Negeri Malang

1. Pengajaran bahasa Indonesia di sekolah kurang berhasil. Gambaran kurang berhasilnya pengajaran bahasa Indonesia tersebut terlihat pada
 - a. Tampilan pemakaian bahasa Indonesia masyarakat Indonesia, terutama tokoh masyarakat dan pejabat yang masih memperhatikan, dan
 - b. pemakaian bahasa Indonesia pada media massa yang masih kurang baik.
2. Budaya menjadi hambatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
 - a. Budaya belajar siswa kita masih budaya belajar untuk ujian/ memecahkan soal. Para siswa mampu mengerjakan soal bahasa Indonesia, dalam arti mempelajari bahasa Indonesia untuk dapat lulus, tetapi bukan belajar untuk mampu berbahasa Indonesia.
 - b. Kondisi kelas yang kurang kondusif, yang ditandai dengan
 - (1) Jumlah siswa yang besar (seperti daya tampung kelas yang hanya 40 siswa diisi oleh 50 siswa) berakibat pengelolaan dan pengajaran bahasa Indonesia tidak efektif dan tidak efisien. Jumlah siswa yang terlalu banyak per kelas menyebabkan guru tidak dapat membentuk kemahiran terbatas.
 - (2) Sarana dan prasarana pembelajaran bahasa Indonesia kurang memadai.
 - c. Kemampuan guru masih kurang memadai. Guru bahasa Indonesia masih belum bisa menjadi model bagi siswa untuk berbahasa Indonesia dengan baik. Kemampuan guru sebagai pemimpin, pembelajaran, dan model bertutur bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu ditingkatkan sehingga dapat menjadi contoh bagi siswanya. Untuk mengatasi hambatan pengajaran bahasa Indonesia tersebut, dapat dilakukan melalui hal-hal berikut.
 - a) Dipilih pendekatan pengajaran yang tepat yang memungkinkan siswa memiliki kemampuan belajar secara mandiri. Kondisi guru, kelas, dan sekolah harus dikondisikan sedemikian rupa agar siswa dapat mandiri dan kreatif.
 - b) Bahasa Indonesia harus diberikan/diajarkan secara kreatif.

BAHASA INDONESIA DI PERGURUAN TINGGI

Satriyo Soemantri Brodjonegoro

A. Kondisi Perkuliahan Bahasa Indonesia Saat Ini

1. Beban studi masih sedikit: 2 SKS
2. Ada kesan pengulangan materi yang pernah diperoleh di tingkat pendidikan menengah.
3. Kuliah bahasa Indonesia kurang dirasakan manfaatnya, baik oleh dosen maupun mahasiswa.
4. Kuliah bahasa Indonesia terasa membosankan/memberatkan/membebani dosen dan mahasiswa. Bahkan, ada perguruan tinggi yang ingin menghapuskan perkuliahan bahasa Indonesia.

B. Masalah yang Mengemuka

1. Kualifikasi dan kemampuan dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia masih rendah.
2. Motivasi dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia sangat rendah.
3. Metode yang dipakai tidak tepat sasaran.
4. Komitmen pimpinan perguruan tinggi masih rendah.
5. Kesulitan penerapan dalam tulisan ilmiah karena keterbatasan istilah-istilah baku untuk istilah-istilah keilmuan, khususnya di bidang MIPA.

C. Upaya untuk Mengatasi Masalah Perkuliahan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi

1. Perlu diterapkan metode pembelajaran yang efektif, misalnya, materi cara membaca cepat dan membuat tulisan ilmiah.
2. Proses pembelajaran harus mampu mengaktifkan peran mahasiswa.
3. Pengajaran istilah baku untuk keperluan tulisan ilmiah.
4. Metode pembelajaran harus sesuai dengan bidang studi atau fakultas masing-masing agar ada korelasinya dengan disiplin keilmuan masing-masing.

D. Harapan terhadap Perguruan Tinggi

1. Perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dan kelompok terdidik dituntut untuk memberi contoh berbahasa Indonesia yang runtut dan taat asas karena perguruan tinggi dituntut untuk selalu dapat menuangkan pikirannya secara tertulis dalam berbagai bentuk dan tujuan.
2. Secara umum, kemampuan dosen dan mahasiswa dalam menulis yang masih lemah perlu terus ditingkatkan.

PENYELESAIAN MASALAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA YANG ESENSIAL

Indra Djati Sidi

1. Ada banyak masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia, cara keluar dari masalah tersebut adalah dengan keluar dari "kerangkeng" permasalahan yang dari duludulu selalu diperdebatkan. Kita harus keluar dari jeratan kurikulum lama dengan cara memakai kurikulum baru. Kurikulum baru tersebut harus menjawab hal yang esensial dalam permasalahan pendidikan, yaitu berorientasi pada "apa yang dibutuhkan oleh siswa saat ini". Pembelajaran bahasa Indonesia dengan kurikulum yang baru tersebut harus "*student centre kurikulum*" untuk menumbuhkan "*life skill*" siswa.
2. Kurikulum yang baru harus dibuat untuk mengatasi kemajuan zaman atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak saat ini.
3. Materi pembelajaran yang padat tidak menjamin siswa mampu bersaing di era kompetisi global saat ini.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal	: Selasa, 14 Oktober 2003
Topik Makalah	: Masalah Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Dunia Pendidikan
Panelis	: 1. Suminto A. Sayuti 2. Suparno 3. Satriyo Soemantri Brojonegoro 4. Indrajati Sidi
Pemandu	: Amran Halim
Pencatat	: 1. Ganjar Harimansyah W. 2. Ida Ayu Mirah Purwiathi

TANYA JAWAB

1. **Tanggapan:** Ishak Ngeljarastan (Makassar)
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik mencerminkan budi yang luhur. Para pemimpin perlu memberi contoh dalam berbahasa dan mengeluarkan pikirannya karena pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar mencerminkan pikiran yang benar. Sekarang, sudahkah para pemimpin kita memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal, merekalah yang harus memberi contoh paling penting dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. **Pertanyaan:** Marsel Robot (Koordinator Pemasyarakatan Bahasa Indonesia, NTT)
Ada gejala proses penghancuran bahasa Indonesia lewat buku-buku yang ditawarkan ke sekolah-sekolah. Banyak buku dari penerbit yang dimasukkan ke sekolah-sekolah dengan kualitas bahasa Indonesia yang sangat buruk.

Jawaban: Indra Djati Sidi

Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan IKAPI telah mengantisipasi hal-hal tersebut. Intinya agar para penerbit dapat mematuhi peraturan dan nilai-nilai dalam penerbitannya, terutama dalam penggunaan bahasanya.

3. **Pertanyaan:** Pranowo (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)
 - a. Ada dua versi KBR yang beredar sekarang. Dari kedua versi tersebut mana yang dipakai?
 - b. Analisis kebutuhan perkuliahan bahasa Indonesia di perguruan tinggi

- tidak diberlakukan sehingga tidak ada ketentuan yang bisa dipegang. Bagaimana dengan masalah ini?
- c. Harus ada tindak lanjut dari keputusan kongres ini tentang materi perkuliahan di perguruan tinggi.

Jawaban: Indra Djati Sidi

Kurikulum yang dikeluarkan sebelumnya telah disenergikan dengan yang ada sekarang. Kita bisa membandingkan keduanya dan memiliki alternatif atau perbandingan. Kita bisa melihat kesinergisannya.

Jawaban: Satriyo Soemantri Brodjonegoro

Kebutuhan pokok bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah bagaimana cara membaca cepat dan dapat menulis karya ilmiah dengan runtut, cermat, dan taat asas. Kebutuhan ini merupakan hasil analisis dari kebutuhan pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi dari metode atau pendekatan kuliah bahasa Indonesia selama ini. Pada intinya, bagaimana nanti mahasiswa mampu membaca dengan cepat dan menulis karya ilmiah dengan baik.

4. **Pertanyaan:** Asrumi (Universitas Negeri Jember)

Bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan-tingkatan seperti halnya bahasa Jawa. Oleh karena itu, muncul materi etika berbahasa sehingga moral bangsa kita dapat ditingkatkan. Bisakah materi ini diterapkan dan diarahkan kepada siswa.

Jawaban: Indra Djati Sidi

Pada intinya, seperti dikatakan sebelumnya yang harus segera kita lakukan adalah menemukan kebutuhan siswa yang nyata saat ini. Pemakaian bahasa Indonesia dan pembelajaran bahasa Indonesia, yang utama harus tepat sasaran dan khas sesuai dengan kebutuhan zaman. Etika atau budi pekerti ini memang telah dimasukkan ke dalam pelajaran yang bersifat kurikuler dan ekstrakurikuler.

5. **Pertanyaan:** Muhamdanah Hasti (SMU Negeri 5 Makassar)

Mungkinkah UKBI dijadikan standar untuk mengujikan bahasa Indonesia di sekolah sebagai pengganti tes atau ujian, seperti UAN, yang ada di sekolah.

Jawaban: Suparno

UKBI bisa dijadikan standar pengujian jika standarnya baku. Uji kemahiran berbahasa siswa memerlukan sistem dan standar yang bisa mengukur hasil pembelajaran bahasa Indonesia siswa.

6. **Pertanyaan:** Taufik Ismail (Sastrawan/Horison)

- a. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi cukup dengan materi membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Tata bahasa cukup diajarkan di SD dan SMP/SLTP saja.
- b. Kerja sama antara pemerintah, guru, sastrawan, dan penerbit perlu terus digalakkan untuk memajukan bahasa dan sastra Indonesia.

Jawaban: Indra Djati Sidi

Saya setuju dengan Pak Taufik. Kerja sama itu harus diupayakan berjalan terus.

Tanggapan: Suminto A. Sayuti

- a. Pembelajaran sastra bukan untuk menjadikan siswa seorang sastrawan, melainkan mampu mengapresiasi, serta mengasah hati dan pikirannya.
- b. Pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra membutuhkan keteladanan. Guru atau dosen harus menjadi proyeksi cita-cita siswa atau mahasiswa. Jika siswa atau mahasiswa diharapkan terampil menulis, guru atau dosen harus memberi contoh pentingnya budaya menulis ini.
- c. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebenarnya harus kembali pada kesadaran masing-masing pribadi.

Tanggapan: Suparno

- a. Slogan-slogan yang menggunakan bahasa Indonesia selama ini dapat dikaitkan dengan perilaku kita.
- b. Pendekatan yang diharapkan untuk kurikulum baru adalah pendekatan yang memungkinkan siswa dapat mandiri dan termotivasi untuk belajar terus-menerus.

Topik Panel 2:

PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA

PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Dr. Oentarto Sindung Mawardi, M.Si

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Depatemen Dalam Negeri

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu kepulauan, baik kepulauan yang besar maupun yang kecil, demikian pula dengan suku bangsanya yang mempunyai berbagai budaya daerah yang satu sama lain saling berbeda merupakan suatu potensi sekaligus tantangan yang sangat besar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman geografis, suku, agama, bahasa (*sekitar 700 bahasa etnik*), dan adat istiadat telah membentuk budaya lokal sendiri-sendiri dengan nilai-nilai luhur yang berbeda satu dengan lainnya. Secara administratif keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan adat istiadat tersebut tersebar di 31 provinsi dan 410 kabupaten/kota.

Pancasila sebagai landasan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengkristalisasikan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat sebagai pedoman, penuntun dan pengikat moral, serta norma sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Potensi yang terbentuk dari budaya-budaya lokal yang beragam tersebut harus dikenali lebih dalam dengan tetap dilandasi semangat *Bhinneka Tunggal Ika*.

Wawasan nusantara, sebagai landasan visional, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenali diri yang serba beragam dan lingkungan yang serba berubah serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hankam.

Pengenalan Budaya Lokal dan Ketahanan Nasional Indonesia

Pengenalan dan penggalan potensi nilai-nilai budaya merupakan suatu langkah untuk membangun ketahanan budaya serta ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ketahanan nasional tidaklah tetap, tetapi dapat meningkat atau menurun bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Dengan kondisi seperti ini, ketahanan nasional haruslah dibina secara terus-menerus dan sinergik bermodalkan keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional.

Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di bidang kebudayaan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, baik yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Keanekaragaman budaya yang ada dapat terus ditumbuhkembangkan agar dapat memperkaya khazanah budaya Indonesia dan pada gilirannya akan tumbuh menjadi budaya nasional bangsa Indonesia.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pengenalan dan Pengembangan Budaya Lokal

Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengenalan dan pengembangan budaya lokal antara lain adalah

- (1) adanya marginalisasi budaya lokal daerah dari budaya dan politik nasional;
- (2) adanya penyeragaman budaya secara nasional di masa lalu;
- (3) masih rendahnya pemahaman budaya lokal daerah oleh masyarakat;
- (4) belum memadainya peraturan perundang-undangan yang ada;
- (5) adanya disparitas kualitas sumber daya manusia.

Kita semua menyadari bahwa pengenalan budaya lokal daerah telah mengalami marginalisasi, terutama budaya lokal masyarakat yang komunitasnya relatif kecil, yang ditunjukkan dengan adanya upaya penyeragaman budaya secara nasional, adanya disparitas kualitas sumber daya manusia dari suatu daerah dengan daerah lainnya, serta kondisi pengenalan masya-

rakat dan tokoh-tokoh masyarakat terhadap budaya-budaya lokal daerah belum seperti yang diharapkan, ditambah lagi dengan kondisi peraturan perundang-undangan yang belum memadai.

Pemahaman budaya lokal daerah pada masyarakat kita saat ini masih sangat memprihatinkan di semua strata/tingkat kehidupan walaupun telah diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam budaya daerah dan setiap daerah mempunyai budaya lokal sendiri-sendiri yang satu dengan yang lain sangat berbeda. Masyarakat di setiap daerah umumnya tidak atau belum tentu mengetahui apalagi memahami budaya daerah lain, terlebih daerah yang relatif kecil komunitasnya. Fenomena yang lebih memprihatinkan bagi kehidupan sosial budaya lokal daerah saat ini adalah semakin berkurangnya pengetahuan dan pemahaman akan nilai budaya lokal daerah oleh masyarakat di setiap daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perlindungan dan penyebarluasan budaya lokal di samping diduga akibat faktor eksternal terhadap budaya lokal ataupun disebabkan oleh keterbukaan sosial budaya sebagai dampak modernisasi dan globalisasi informasi.

Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi budaya lokal adalah adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang kurang pas dengan budaya lokal. Pada masa pemerintahan masa lalu, misalnya, budaya lokal ini sering dianggap tidak begitu penting sehingga banyak terjadi penyeragaman yang tidak bisa dimengerti dan sulit dicari alasan kebenarannya. Dalam hal pemerintahan desa, misalnya, pembinaannya diseragamkan di seluruh Indonesia meskipun pada kenyataannya kondisi lingkungan dan adat istiadat desa di satu tempat dengan tempat lainnya belum tentu sama. Pada umumnya hal ini diadopsi secara langsung dan disamakan dengan kondisi di Pulau Jawa. Di Sumatera Barat, misalnya, sejak turun temurun desa dikenal dengan nama "nagari" dengan ciri khas yang melekat padanya. Di Tapanuli desa disebut dengan nama "huta", yang masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan kondisinya sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan nuansa di Pulau Jawa. Demikian pula halnya dengan daerah-daerah lain yang kondisinya sangat jauh berbeda dengan kondisi di Pulau Jawa.

Kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur, membina dan mengembangkan masalah budaya lokal daerah ini belum terlalu mengembirakan. Di masa lalu kita mengenal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur beberapa penyeragaman termasuk budaya lokal daerah ini. Selama lebih kurang 30 tahun nuansa penyeragaman dalam segala hal sangat dirasakan dampaknya. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur otonomi daerah, budaya lokal daerah mulai terangkat kembali dan ditempatkan sesuai dengan proporsi sebagaimana mestinya. Desa, misalnya pada UU Nomor 5 Tahun 1979, diseragamkan pembinaannya. UU Nomor 22 Tahun 1999 telah mengembalikan kepada pola lama sesuai dengan asal usulnya dan setiap daerah diberi kewenangan untuk mengaturnya sesuai dengan kondisi setempat.

Arus globalisasi tentu saja akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia di seluruh dunia. Pengaruh itu, antara lain, akan terlihat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Salah satu hal pokok yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah identitas bangsa. Kalau kita berbicara tentang identitas bangsa, mau tidak mau kita akan berbicara tentang kebudayaan, dan kalau kita berbicara tentang kebudayaan, kita akan mempersoalkan bahasa. Itu sebabnya Makagiansar (1990) menekankan perlunya kesadaran tentang identitas budaya. Bahkan, Emil Salim (1990) menyatakan upaya mempertahankan identitas merupakan prioritas yang harus diperjuangkan mati-matian dengan ciri utama keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa itu tecermin, antara lain, dari sikap lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing daripada penggunaan bahasa Indonesia, misalnya dalam penamaan kompleks perumahan, dan sikap mementingkan kegiatan tertentu, misalnya demi kegiatan pengembangan pariwisata dan bisnis. Syukurlah sikap seperti itu mulai disadari dan diambil langkah-langkah nyata mengganti kata-kata asing dengan kata-kata Indonesia.

Peran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Budaya Lokal

Bahasa etnik/daerah atau sering disebut bahasa ibu (*minor language*) telah menjadi agenda UNESCO dengan menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mempertahankan pemakaian serta memberdayakan fungsi bahasa etnik/daerah. Kondisi tersebut sangatlah relevan dengan kondisi Indonesia yang terdapat sekitar 700 bahasa etnik, dengan jumlah penutur yang sangat beragam, dari puluhan ribu sampai puluhan juta. Dalam konteks sosiolinguistik, pemertahanan (*language maintenance*) bahasa ibu/daerah tersebut adalah dalam konteks bilingual yang dalam hal ini terdapat bahasa ibu/daerah (*minor language*) berhadapan dengan bahasa utama (*major language*), seperti bahasa nasional. Menurut Crystal (1997), upaya pemertahanan bahasa ibu/daerah (*language maintenance*) lazim didefinisikan sebagai upaya untuk, antara lain

1. mewujudkan diversitas kultural,
2. memelihara identitas etnik,
3. memungkinkan adaptabilitas sosial,
4. secara psikologis menambah rasa aman bagi anak/seseorang, dan
5. meningkatkan kepekaan linguistik.

Kelima tujuan di atas satu sama lain saling terkait dalam konteks kebudayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan bahasa ibu/daerah seyogianya merupakan bagian dari strategi kebudayaan. Ada beberapa alasan pentingnya memberdayakan bahasa ibu/daerah sebagai bagian dari strategi kebudayaan, antara lain, sebagai berikut.

- a. Bahasa adalah sarana kebudayaan. Umumnya orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah lebih banyak didasari oleh minat mempelajari budaya daripada bahasanya.
- b. Dalam konteks Indonesia, rujukan budaya nasional pada mulanya tiada lain adalah budaya-budaya etnik. Kita tidak boleh melupakan bahwa negara kesatuan Indonesia ini terbentuk atas kesepakatan kelompok-kelompok etnik untuk berhimpun diri dalam sebuah organisasi yang disebut negara kesatuan.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa bahasa dan sastra daerah sangatlah penting untuk menumbuhkembangkan budaya lokal yang nantinya diharapkan dapat menjadi potensi yang sangat berarti dalam membangun daerah.

Bahasa dan Sastra Daerah dalam Konteks Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah yang sangat mendasar adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat, mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah, serta meningkatkan peran serta masyarakat. Hal ini tecermin dari kewenangan yang telah diserahkan ke daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, dan juga selain kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya yang

menjadi kewenangan provinsi. Kewenangan wajib kabupaten dan kota meliputi bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, serta tenaga kerja.

Secara rinci, pengaturan kewenangan telah diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Jika dilihat cakupan urusan dari bidang kewenangan, agar tidak saling bertentangan dengan kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten/kota dilakukan melalui mekanisme pengakuan oleh pemerintah terhadap kewenangan riil kabupaten/kota berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Pengembangan bahasa dan sastra berhubungan dengan kewenangan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, baik yang dimiliki pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah berupa penyediaan standar, pedoman, fasilitasi dan bimbingan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra. Kewenangan untuk penyelenggaraan kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah merupakan bagian dari kewenangan provinsi karena bahasa dan sastra daerah pada dasarnya berkembang dari masyarakat di desa-desa, kampung-kampung, serta kelompok masyarakat tradisional yang secara kewilayahan berada dalam wilayah kabupaten/kota. Mulai di kabupaten/kota dilakukan kegiatan operasional pengembangan bahasa dan sastra daerah.

Pada tingkat nasional sudah ada Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang mendapat mandat dari pemerintah untuk melakukan perencanaan bahasa. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum ada lembaga yang memiliki kewenangan serupa. Untuk itu, kelembagaan yang menangani urusan bahasa dan sastra daerah harus ditata dan merupakan rangkaian dari penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

Strategi untuk Peningkatan Peran Bahasa dan Sastra Daerah

Dengan melihat pentingnya bahasa dan sastra daerah dalam membumihkembangkan budaya lokal, dapat ditempuh beberapa strategi untuk lebih meningkatkan peran bahasa dan sastra daerah, yaitu berupa strategi pemeliharaan maupun sosialisasinya.

Strategi pemeliharaan bahasa dan sastra daerah dapat berupa penerbitan peraturan daerah tentang pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan tujuan untuk

- a. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
- b. memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra, dan aksara daerah;
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa, sastra, dan aksara daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;
- d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra, dan aksara daerah.

Strategi pemeliharaan bahasa dan sastra daerah tersebut juga dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan bahasa, sastra, dan aksara daerah di sekolah dan kurikulum pendidikan di luar sekolah, kegiatankegiatan yang bertemakan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan aksara daerah, serta peran serta masyarakat lainnya.

Bagaimana pun hebatnya sebuah peraturan, yang jauh lebih penting adalah realisasi peraturan itu sehingga perlu adanya strategi sosialisasi. Lahirnya peraturan daerah merupakan tahap awal dari pembuatan kebijakan. Peraturan daerah seyogianya segera diikuti dengan suatu rencana kerja yang terpadu untuk menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di daerah yang melibatkan para pakar terkait, seperti ahli perencanaan bahasa, linguistik, sastra, seni, pengajaran bahasa, penerbitan, naskah, dan kebudayaan. Produk pengaturan serta petunjuk teknis yang dihasilkan hendaknya disosialisasikan secara bertahap kepada berbagai lembaga, seperti perguruan tinggi, DPRD, dinas-dinas, lembaga penerbitan, sekolah-sekolah serta petugas kebudayaan di provinsi, kabupaten, dan kota.

Untuk itu, perencanaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah seyogianya dilakukan secara profesional dan institusional dengan mempertimbangkan hal-hal berikut.

- a. Revitalisasi bahasa dan sastra daerah dilakukan melalui atau sebagai konsekuensi logis dari revitalisasi kebudayaan daerah.
- b. Revitalisasi bahasa dan sastra daerah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti media massa, perguruan tinggi, sekolah, lingkungan seni, dan organisasi sosial secara sistemik dengan target sosialisasi kelompok yang terfokus.
- c. Pengajaran bahasa daerah di sekolah lebih mengutamakan pengenalan sastra daripada linguistik.
- d. Di sekolah-sekolah dan bahkan perguruan tinggi apresiasi dan kajian kritis terhadap karya sastra daerah seyogianya dilakukan sebelum

mengapresiasi dan melakukan kajian kritis terhadap karya sastra Indonesia dan asing.

Berdasarkan Petunjuk Penerangan Muatan Lokal (Depdikbud, 1987) yang dimaksud muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan kebutuhan daerah yang perlu dipelajari oleh murid. Dalam pelaksanaannya pengajaran muatan lokal itu menyangkut banyak aspek, misalnya kebudayaan daerah, pariwisata, industri rumah tangga, kerajinan rakyat, dan agrobisnis. Di daerah tertentu, tekanan pengajaran muatan lokal diarahkan pada pengajaran bahasa daerah. Salah satu tujuan yang tersirat dari upaya ini adalah kiat menangkal arus globalisasi.

Keanekaragaman bahasa daerah yang dimiliki Indonesia serta dipergunakan secara berdampingan dengan bahasa Indonesia diharapkan dapat saling mengisi dalam perubahan sehingga akan menciptakan ketahanan budaya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ideologi penyatu bangsa, yakni Pancasila. Persoalan keanekaragaman bahasa nasional telah kita selesaikan melalui ikrar besar Sumpah Pemuda 1928.

Penutup

Pengembangan bahasa dan sastra daerah merupakan suatu cermi upaya untuk mendorong kemajuan daerah yang tidak saja melalui pembangunan ekonomi dan fisik daerah, tetapi membangun pula sosial budaya serta nilai-nilai luhur yang dikandungnya untuk menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini sudah menjadi falsafah pembangunan nasional kita dengan tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Pengembangan bahasa dan sastra daerah sebagai sarana kebudayaan diharapkan dapat mendorong kreativitas masyarakat di setiap daerah untuk menggali segenap potensi budaya daerah yang diharapkan dapat menjadi modal sebagai identitas daerah. Namun, jika kita mencermati adanya konflik etnik yang terjadi akhir-akhir ini, baik di Indonesia maupun di negara lain, yang pada umumnya disebabkan oleh kecenderungan yang berlebihan untuk menunjukkan identitas etniknya, pengembangan dan pemberdayaan bahasa dan sastra daerah haruslah tetap dalam kerangka NKRI. Hal itu dapat kita pahami pula dari perjalanan bahasa dan budaya Indonesia yang merupakan produk dari suatu proses interaksi antarbahasa daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah juga telah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memanfaatkan nilai-nilai lokalitas untuk memacu pem-

bangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan prinsip bahwa negara Republik Indonesia berbentuk kesatuan, budaya daerah yang kuat akan memperkuat ketahanan sosial budaya daerah dan ketahanan sosial budaya daerah yang kuat akan menjadi modal bagi ketahanan bangsa yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Crystal, David. 1997. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Edisi Kedua.
- Ensiklopedia Budaya Sunda*. 2001. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Depdikbud, 1987. *Language Planning: An Introduction*. San Fransisco: Chandler and Sharp.
- Salim, Emil, 1990. "Pembekalan Kemampuan Intelektual untuk Menjinakkan Gelombang Globalisasi." Dalam *Mimbar Pendidikan*, Th. IX/4. Bandung: University Press.
- Hassan, Abdullah. (Ed.) 1994. *Language Planning in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Makagiansar, M. 1990. "Dimensi dan Tantangan Pendidikan dalam Era Globalisasi." Dalam *Mimbar Pendidikan*. Th. 1X/4. Bandung: University Press.
- Noss, Richard B. 1994. "The Unique Context of Language Planning in Southeast Asia." Dalam Hassan, (ed.) 1--51.
- Rubin, Joan dan Bjorn H. Jernudd. (Eds.) 1971. *Can Language Be Planned? Sociolinguistic Theory and Practice for Developing Nations*. Honolulu: The University Press of Hawai.

PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Benyamin Lakitan

Asisten Ekonomi, Keuangan, dan Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Sumatera Selatan dan Guru Besar Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan keragaman bahasa dan sastra daerah. Sebagai contoh, di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan saja paling tidak dikenal beberapa bahasa daerah yang berbeda, yakni bahasa Palembang, Musi, Ogan, Kayuagung, Komering, Ranau, Panesalc, Belide, Enim, Besemah, Semende, Rawas, Rambang, Sindang, dan Aji. Bahasa-bahasa daerah ini masih secara intensif digunakan sebagai media komunikasi pada tiap-tiap daerah yang menjadi lokasi bermukim bagi tiap-tiap suku yang bersangkutan.

Walaupun bahasa daerah masih digunakan sebagai media komunikasi dalam lingkungan masyarakatnya, sastra daerah yang menggunakan media bahasa daerah dirasakan semakin menurun, baik kuantitas, kualitas, dan intensitas penyajiannya. Sesungguhnya, bukan hanya sastra daerah yang disinyalir telah mengalami penurunan, melainkan juga hampir semua jenis kesenian daerah telah sangat berkurang peminatnya. Jarang ada seniman saat ini yang mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan kesenian daerah, termasuk sastra daerah. Apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan sastra daerah juga dirasakan menurun.

Pada saat ini pertanyaan yang lebih relevan untuk dijawab bukanlah, "Bagaimana kita meningkatkan peran bahasa dan sastra daerah dalam memperkokoh ketahanan budaya bangsa?", melainkan mungkin lebih tepat kalau kita mulai dengan menjawab pertanyaan, "Bagaimana kita dapat menjaga agar bahasa dan sastra daerah tidak punah dan upaya untuk menggalakkan kembali pengembangannya serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra daerah?" Baru kemudian kita dapat berharap bahwa bahasa dan sastra daerah tersebut dapat diperankan untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa. Setujukah Anda?

Untuk dapat berperan, sesuatu itu harus ada (atau tetap ada) terlebih dahulu, sedangkan untuk memperkokoh, sesuatu tersebut harus juga memiliki kekuatan. Bahasa dan sastra daerah baru dapat diharapkan berperan dalam memperkokoh ketahanan budaya bangsa jika bahasa dan sastra daerah tersebut dapat dipelihara eksistensinya dan dikembangkan ke

arah yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

Peran Bahasa dan Sastra Daerah Mendukung Ketahanan Budaya Bangsa

Bahasa daerah merupakan unsur kebudayaan nasional dan sastra daerah merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa daerah sebagai medianya. Dengan demikian, bahasa dan sastra daerah secara langsung merupakan bagian dan budaya Indonesia Indonesia.

Sebagai bagian dan budaya bangsa Indonesia, bahasa dan sastra daerah dapat berperan mendukung ketahanan bangsa melalui kontribusinya dalam (1) memperkaya keragaman budaya bangsa, hal ini hanya dapat terjadi jika identitas/keunikan tetap dipertahankan; (2) menyosialisasikan nilai-nilai budaya bangsa kepada masyarakat penutur/pengguna bahasa daerah yang bersangkutan, dalam hal ini bahasa daerah lebih berfungsi sebagai alat komunikasi; dan (3) memperkuat dan memperkaya nilai-nilai budaya bangsa, peran ini akan menjadi penting jika bahasa dan sastra daerah tersebut selain dipertahankan eksistensinya, difungsikan sebagai alat komunikasi, juga dikembangkan oleh masyarakat penggunaanya.

Peran sebagaimana yang disebutkan pada butir (1) dapat tercapai jika dan hanya jika eksistensi bahasa dan sastra daerah dapat dipertahankan. Jika bahasa dan sastra daerah menjadi punah, tentu saja konsekuensinya tidak hanya peran pada butir (1) yang hilang, tetapi juga semua peran, termasuk (2) dan (3) akan pula hilang bersama punahnya bahasa dan sastra daerah tersebut.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa besaran (*magnitude*) peran bahasa dan sastra daerah tergantung pada status keberadaannya, mulai dari eksistensinya, intensitas penggunaannya, dan tingkat pengembangannya.

Nilai-Nilai Budaya dalam Sastra Daerah

Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam semua sastra daerah adalah nilai-nilai yang berpihak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, terutama terkait dengan anjuran untuk berperilaku baik. Nilai-nilai tersebut sering dicerminkan melalui karakter dan tokoh utama dalam prosa rakyat atau melalui ungkapan yang diekspresikan dalam puisi-puisi rakyat. Nilai-nilai tersebut, antara lain (a) tingkah laku dan tutur kata yang baik; (b) kesetiaan; (c) semangat kebersamaan; (d) anti kekerasan; (e) keberanian untuk melakukan pembaharuan; (f) tidak mudah putus asa; (g) keberanian membela kebenaran; (h) bertanggung jawab; (i) kasih sayang; dan (j) pandai bersyukur.

Tingkah laku dan tutur kata yang baik hampir selalu merupakan ciri karakter dan setiap tokoh utama dalam cerita rakyat. Memang sering diberi warna dengan sifat-sifat tertentu yang sedikit agak keluar dari figur tokoh ideal. Hal itu sering dilakukan hanya untuk mengingatkan bahwa tokoh utama tersebut tetaplah manusia biasa. Citra tokoh utama yang baik (sering nyaris sempurna) itu sering dikontraskan dengan tokoh jahat yang mempunyai karakter 180 derajat berlawanan dengan tokoh utama tersebut.

Nilai-nilai kesetiaan sering pula menjadi tema sentral dalam cerita rakyat/sastra daerah, misalnya kesetiaan hewan peliharaan terhadap tuannya, kesetiaan bawahan terhadap majikannya, atau kesetiaan individu terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Pada dasarnya, kesetiaan yang dimaksud dalam cerita rakyat adalah kesetiaan terhadap nilai-nilai yang luhur/mulia/baik walaupun nilai-nilai tersebut dipersonifikasikan dalam bentuk tokoh-tokoh anutan dalam cerita tersebut. Tokoh-tokoh jahat sering juga memiliki pengikut, tetapi kepatuhan pengikut-pengikut tersebut lebih dilandasi oleh rasa takut yang mendalam, utang budi, atau karena pamrih.

Semangat kebersamaan atau kesetiakawanan sosial sering menjadi pesan yang terkandung dalam cerita rakyat atau sastra daerah. Diingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial perlu berinteraksi satu dengan yang lain, dan tokoh dalam cerita yang suka menyendiri dianggap aneh. Untuk menyampaikan pesan kesetiakawanan sosial ini, dalam cerita sering dimunculkan suatu bentuk 'musuh-bersama' (*common enemy*), misalnya figur seorang penguasa yang zalim, dukun aliran hitam yang sesat, makhluk jadijadian yang buas dan kejam, bencana alam, atau bentuk-bentuk musuh bersama lainnya.

Nilai lain yang sering terkandung dalam sastra daerah adalah sifat anti kekerasan. Sering digambarkan bahwa tokoh utama dalam cerita tersebut walaupun sakti mandraguna, selalu mengalah. Walaupun diperlakukan semena-mena oleh tokoh-tokoh jahat sampai ke batas toleransi yang kadang-kadang membuat pembaca cerita tersebut geram. Tokoh baik ini biasanya baru melakukan pembalasan jika telah tersinggung harga dirinya atau jika telah menyentuh kehormatan keluarganya atau jika orang-orang yang sangat dicintainya ikut teraniaya.

Cerita rakyat atau sastra daerah umumnya sangat kental nuansa permainan perasaan dan emosi, baik berupa cerita yang diniatkan pengarangnya untuk menguras air mata pembacanya maupun yang diniatkan untuk menghibur pembaca hingga tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi, jika disimak secara cermat, akan ditemukan pesan nilai-nilai untuk melakukan pembaharuan terhadap suatu sistem yang telah

dianggap mapan, misalnya dengan menampilkan tokoh raja (atau penguasa lainnya) yang mau menerima dan mengimplementasikan masukan atau saran dari bawahan atau rakyatnya, sedangkan pada masa itu raja berkuasa mutlak dan titah raja selalu dianggap benar. Nilai-nilai pembaharuan ini jelas dilandasi dengan logika atau pemikiran yang rasional.

Tidak mudah putus asa merupakan nilai yang sering terkandung dalam cerita rakyat atau sastra daerah. Sifat tidak mudah putus asa ini sering menjadi salah satu sifat yang dimiliki oleh tokoh utama dalam cerita rakyat. Tokoh utama tersebut di awal cerita sering ditampilkan sebagai seorang hamba sahaya yang kemudian sepanjang perjalanan hidupnya selalu dihadapkan dengan berbagai aral rintangan, tetapi kemudian di akhir cerita ditutup dengan keberhasilan tokoh tersebut mencapai suatu kedudukan atau status sosial yang tinggi, misalnya menjadi menantu raja yang kemudian mewarisi tahta kerajaan.

Cerita rakyat atau sastra daerah yang bersifat religius sering dimulai dengan nilai-nilai keberanian membela kebenaran walaupun berbagai bentuk konsekuensi yang berat (secara fisik dan perasaan) harus diterima; bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan walaupun dihadapkan oleh berbagai macam bentuk godaan dan ancaman; kasih sayang sesama umat terutama dari individu atau kelompok yang secara material lebih beruntung kepada kelompok umat yang kurang beruntung; dan sifat pandai bersyukur atas segala nikmat yang kurang beruntung; dan sifat pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Esa.

Nilai-nilai baik yang dicuplik dalam tulisan ini hanyalah sebagian dari nilai-nilai baik yang terkandung dalam cerita rakyat atau sastra daerah.

Strategi dan Upaya Peningkatan Peran Bahasa dan Sastra Daerah

Langkah paling awal yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan peran bahasa dan sastra daerah dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa adalah dengan memelihara eksistensi dari bahasa dan sastra daerah tersebut. Upaya ini tampaknya tidak akan semakin ringan di masa yang akan datang, terutama dengan semakin baiknya kualitas dan jangkauan infrastruktur telekomunikasi yang akan lebih memacu penggunaan bahasa nasional dan bahkan bahasa global. Interaksi sosial antardaerah, lintas etnis, atau antarbangsa tidak akan menggunakan bahasa daerah sebagai media komunikasinya.

Mobilitas penduduk yang semakin tinggi, baik frekuensi maupun ruang jangkanya, menyebabkan semakin banyak individu yang secara faktual harus berinteraksi dengan individu lain dan etnis, ras, atau bangsa yang berbeda. Bahasa yang digunakan dalam proses interaksi ini tentu bukan bahasa daerah masing-masing. Dengan demikian, penggunaan bahasa daerah akan makin berkurang frekuensinya.

Peran bahasa dan sastra daerah untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa hanya akan menjadi signifikan jika dilandasi dengan suatu rasa kebanggaan atas bahasa dan sastra daerah tersebut. Rasa bangga tersebut sesungguhnya tidak akan diperoleh hanya dari bahasa dan sastranya sendiri karena bahasa dan sastra merupakan suatu media komunikasi. Rasa bangga akan lebih ditentukan oleh substansi dan nilai-nilai yang terkandung yang dikomunikasikan melalui media bahasa dan sastra daerah tersebut.

Upaya peningkatan peran bahasa dan sastra daerah dengan cara memperkenalkan atau menyosialisasikan bahasa dan sastra daerah tersebut kepada masyarakat luas di luar kelompok masyarakat penuturnya rasanya tidak akan membuahkan hasil yang berarti. Ambil contoh yang sederhana, banyak orang yang menyukai lagu-lagu berbahasa asing (dan daerah), tetapi yang bersangkutan sesungguhnya tidak mengerti bahasa yang digunakan. Hal ini berarti orang tersebut hanya menyukai irama lagu tersebut bukan bahasanya. Oleh sebab itu, strategi yang lebih baik adalah menggunakan bahasa dan sastra daerah sebagai media komunikasi untuk menyosialisasikan nilai-nilai positif dan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat dan diminati masyarakat. Peran fungsional bahasa dan sastra daerah sepatutnya lebih dikedepankan dibandingkan dengan upaya sosialisasi materialnya.

Penutup

Tulisan ringkas ini lebih merupakan opini pribadi dan diharapkan tidak diposisikan sebagai sebuah makalah ilmiah karena penulisan makalah ini tidak dibekali dengan pemahaman yang komprehensif tentang bahasa dan sastra daerah serta tidak didasarkan atas referensi-referensi yang relevan dengan topik ini sebagaimana lazimnya *academic paper*.

PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA

H. Muhammad Adnan Tiro

Pendahuluan

Bahasa dan sastra daerah di Indonesia beraneka ragam antaretnis dan antardaerah. Demikian banyak ragamnya sampai ada penulis lebih 670 macam bahasa daerah.

Setiap bahasa daerah pada umumnya mempunyai produk-produk sastra, baik lisan maupun tertulis, dengan berbagai macam bentuknya. Ada berbentuk cerita rakyat, pesan-pesan (paseng dalam bahasa Bugis), dan nyanyian (elong dalam bahasa Bugis) yang termuat dalam lontarak bahasa daerah (Bugis, Makassar, Mandar, dan Tanah Toraja di Sulawesi Selatan). Konsekuensinya akan lebih banyak lagi jumlah sastra daerah yang vertebaran di seluruh nusantara tercinta ini.

Secara yuridis formal ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 32 sebagai berikut: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Dalam Pasal 36 ditegaskan bahwa "Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia". Dalam perubahan keempat UUD 1945 ditegaskan bahwa (1) "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional". Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 32 ditegaskan bahwa "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Dalam penjelasan Pasal 36 ditegaskan bahwa "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup".

Dari acuan di atas, selanjutnya dapat dikatakan bahwa bahasa dan

sastra daerah akan menjadi, sebagai, bagian utama/penting/substansial dari kebudayaan Indonesia. Yang dimaksudkan ialah bahasa dan sastra daerah yang dipelihara dengan baik oleh rakyat daerah masing-masing. Karena setiap daerah, masyarakat di daerah, adalah bagian terpadu dari negara RI, bangsa Indonesia, bahasa dan sastra daerah itu akan dihormati, dipelihara, dan dimajukan oleh negara, dan Pemerintah RI. Selanjutnya, bahasa dan sastra suatu daerah akan dihormati dan disenangi oleh daerah, etnis lain di tanah air yang pada gilirannya akan menimbulkan perasaan memiliki, "milik kita" bukan hanya "milikmu", bukan hanya "milik kami".

Di sinilah letak peran dan pentingnya pembahasan tentang cara dan strategi peningkatan dan pemantapan peran bahasa dan sastra daerah dalam mendukung/memperkukuh ketahanan budaya bangsa Indonesia yang secara singkat tertera di bawah ini. Untuk kesempurnaannya, diharapkan sumbang saran dan kritik konstruktif dari peserta dan atas perhatian pserta, saya ucapkan terima kasih.

Peranan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai Pendukung Ketahanan Budaya Bangsa

Budaya bangsa bertahan bila didukung oleh peran bahasa dan sastra daerah sebagai puncak kebudayaan di daerah-daerah. Tanpa ketahanan bahasa dan sastra daerah, merupakan bagian dari kebudayaan daerah tidak mungkin mendukung dan menopang ketahanan budaya bangsa. Bahasa dan sastra daerah hanya bisa bertahan kalau dihormati, dipelihara, dan dimajukan, atau dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintahnya. Selanjutnya, dapat dipertanyakan apa saja peranan bahasa dan sastra daerah dalam mendukung ketahanan budaya bangsa.

Dalam kesempatan ini, dapat dikemukakan beberapa peran bahasa dan sastra daerah dalam mendukung ketahanan budaya bangsa sebagai berikut.

1) Peran Pengayaan

Bahasa dan sastra daerah di Indonesia sebagai bagian dari puncak kebudayaan akan memperkaya khazanah kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Semakin banyak bahasa dan sastra daerah yang dihormati, dipelihara, dan dimajukan oleh daerah dan/atau oleh negara akan semakin kaya dan menariklah budaya bangsa yang pada gilirannya akan lebih mempertinggi ketahanannya.

Tanpa daya tarik yang semakin menanjak seiring dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan pembangunan, masyarakat akan lebih mudah lari mencari dan menemukan nilai-nilai budaya bangsa lain. Dengan pengayaan bahasa, dan sastra daerah, budaya bangsa Indonesia akan bisa bertahan

dari infiltrasi dan pengaruh-pengaruh negatif budaya bangsa lain pada era global dewasa ini.

2) Peran Pelengkap (*Complement*)

Bahasa dan sastra daerah yang dipelihara oleh masyarakatnya, apalagi bila dihormati, dipelihara, dan dimajukan oleh negara akan melengkapi bahasa dan sastra dari daerah lain, bahasa, dan sastra Indonesia dalam rangka pengembangan budaya bangsa Indonesia. Tanpa dilengkapi oleh bahasa dan sastra daerah-daerah di Indonesia akan kurang kuatlah kebudayaan bangsa yang pada gilirannya akan mengganggu ketahanannya.

3) Peran Penambah (*Supplement*)

Bahasa dan sastra daerah akan menjadi penambah bahasa dan sastra daerah lain dalam lingkup budaya bangsa. Tanpa memelihara, menghormati, memajukan bahasa dan sastra daerah tertentu, akan berkuranglah bobot kebudayaan bangsa. Kalau gejala ini terjadi atau diikuti juga oleh daerah-daerah lain, akan semakin lemah/rapuhlah ketahanan budaya bangsa Indonesia. Konsekuensinya adalah kita akan mudah diintervensi oleh nilai-nilai budaya bangsa lain tanpa kemampuan selektif yang memadai.

4) Peran Penopang/Penyangga

Budaya bangsa tidak bisa bertahan tanpa tiang-tiang penyangga atau pilar-pilar penopang yang kokoh-kuat. Dikatakan demikian karena budaya bangsa itu sendiri terdiri atas puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah. Apalah arti puncak-puncak itu tanpa tiang-tiang atau pilar-pilar budaya daerah, yang terwujud, antara lain, dalam bentuk bahasa dan sastra daerah. Tanpa pilar-pilar itu budaya bangsa akan mudah ambruk, runtuh berkeping-keping tanpa arti dan fungsi bagi bangsa itu sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya perangkat, perekat dan integrator komponen-komponen budaya daerah oleh ketahanan budaya bangsa, bahasa dan sastra Indonesia, yang bersifat "multikultural" atau "bhinneka tunggal ika".

Nilai-Nilai Budaya dalam Sastra Daerah yang Dapat Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa

Bentuk-bentuk sastra daerah yang sering ditemukan dalam lontarak (di Sulawesi Selatan), antara lain, cerita rakyat, pesan-pesan (*paseng* dalam bahasa Bugis), dan nyanyian-nyanyian (*elong* dalam bahasa Bugis). Nilai-nilai budaya yang dapat ditemukan dalam karya sastra di Sulawesi Selatan, antara lain, sebagai berikut.

1) Siri

Konsep siri diberi arti yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keahlian para penulis. Sekalipun demikian, dari berbagai sumber dapat ditemukan bahwa konsep siri bermakna:

- (1) malu, dan harga diri atau martabat sebagai intinya.
- (2) daya pendorong untuk membinasakan siapa saja yang telah menyinggung rasa kehormatan, harga diri, martabat seseorang;
- (3) daya pendorong untuk bekerja keras dan/atau berusaha sebanyak mungkin guna meningkatkan martabat.

(Fachruddin AE. 1991; dan Mattulada dalam Koentjaraningrat 1976)

Bahkan sistem nilai budaya yang paling bernilai di Sulawesi Selatan yang merupakan puncak kebudayaan ialah *triple concept* kebudayaan: *siri*, *pesse* (solidaritas sosial) dan *were* (nasib) (Zainal Abidin Farid A., 1992; Fachruddin A.E., 1991).

Sebagai contoh ungkapan-ungkapan yang diberikan kepada konsep siri dikemukakan sebagai berikut.

Siri' emmi rionrowang ri-lino (Bugis) yang artinya hanya untuk *siri'* itu sajalah kita tinggal di dunia. *Siri* dalam hal ini memberi identitas sosial dan martabat kepada orang Bugis. Hanya kalau ada martabat itulah maka hidup itu ada arti baginya.

Mate ri siri'na (Bugis) artinya "mati dalam siri" atau mati untuk menegakkan martabat diri, yang dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat.

Mate siri' artinya suatu "mati siri" atau orang yang sudah hilang martabat dirinya, adalah seperti bangkai hidup. Demikian orang Bugis-Makassar yang "mate siri" akan melakukan *jallo* atau *amuk* sampai ia mati sendiri. *Jallo* yang demikian disebut "*napaentengi siri'na*" (bahasa Makassar), artinya ditegakkannya kembali martabat dirinya. Kalau ia mati dalam *jallonya* itu, ia disebut "*warowane to-engka siri'na*" artinya jantan yang ada martabat dirinya, demikian Mattulada dalam Koentjaraningrat, 1976.

Salah satu ungkapan yang terkait dengan *pesse* adalah sebagai berikut.

Mau teppekkua riasennge' seajing (sempurna)

Rekkog tania sirina peresse babuana si, yang artinya:

Biar bagaimana yang dikatakan keluarga (sekampung)

Jika bukan karena rasa malunya, tentu akan ada belas kasihannya.

2) Kerja Keras (Bahasa Bugis Re-so)

Nilai budaya *re-so* (kerja keras) ini biasanya dituangkan dalam bentuk *e-long* sebagai berikut.

"Re-so pa natinuhu, masero naleteti, pammase dewata", yang artinya hanya kerja yang tekun, sering menjadi titian rahmat Ilahi.

3) Kejujuran (*Lempu* dalam Bahasa Bugis)

Lempu berarti lurus, yang selanjutnya diperluas maknanya menjadi jujur, adil atau bersih. Nilai budaya "*lempu*" dalam bentuk *elong* Bugis dikemukakan sebagai berikut.

*Dua I kuala sappo,
Unganna panasae,
Belo kamukue,*

yang berarti

Dua kujadikan pagar,
Kembangnya nangka,
Hiasan kuku

Kembang nangka dalam bahasa Bugis disebut lampu yang berasosiasi bunyi dengan lempu. Hiasan kuku bahasa Bugisnya *pacci*, yang berasosiasi bunyi dengan *pacing* yang berarti kebersihan. Jadi, *elong* ini berisi anjuran agar hidup dan kehidupan menggunakan dua pagar untuk diri, yaitu kejujuran dan kebersihan.

Sungguh akan aman dan sentosalah suatu negeri jika lempu atau kejujuran itu terdapat pada tiga pihak, seperti yang dikatakan oleh Puang Rimaqgalatung (Fachruddin, A.E., 1991) sebagai berikut ini

*Allalengeng malempu,
Papallaleng malempu,
Tomallaleng malempu,*

yang artinya:

Perjalanan yang jujur,
Yang memperjalankan jujur,
Yang berjalan pun jujur.

4) Keberanian (*Warani* dalam Bahasa Bugis)

Jika dalam bahasa Melayu/Indonesia ada perkataan "Jantan atau lelaki anaknya orang", dalam bahasa Bugis terdapat ungkapan: "*Woroane' anqna taue*"

Dengan demikian, jika seorang lelaki tidak berani melakukan sesuatu perbuatan yang menuntut keberanian, ia biasanya disuruh mengganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Ungkapan lainnya sebagai berikut ini.

Ia mi woroane' maperennge' artinya yang lelaki hanya yang dapat menahan diri (untuk menguasai atau meredam perasaan takutnya).

5) Keteguhan Pendirian (*Getteng* dalam bahasa Bugis)

Nilai budaya *getteng* dalam bahasa Bugis, antara lain, terdapat dalam ungkapan berikut ini.

*Pura baqbaraq sompeqku,
Pura tengkisiq gulikku,
Uleqbireng ngi relennge' toallie",*

yang artinya:

Layar telah kukembangkan
Kemudi sudah kupasang
Kupilih tenggelam daripada surat kembali.

6) Kewajaran (*Appasitinajang* dalam bahasa Bugis)

Nilai budaya *appasitinajang*, antara lain, dapat dilihat dalam petuah berikut ini.

Ajaq mugaukeng ngi padammu rupa tau ri rauq tessitinajae'

yang artinya

janganlah engkau perbuat sesuatu yang tidak patut terhadap sesama manusia.

Ripariajang ngi ri ajangge', riparilau' i ri laue', riparimaniang ngi ri maniangye', ripariaseq i ri aseqe', ripariawa i ri awae'

yang artinya

ditempatkan di Barat yang Barat, ditempatkan di Timur yang Timur,
ditempatkan di Selatan yang Selatan, ditempatkan di atas yang atas,
ditempatkan di bawah yang bawah.

Ini menunjukkan bahwa seseorang dianggap bijaksana jika ia mampu atau pandai menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan tempatnya yang layak.

Nilai-nilai budaya daerah Sulawesi Selatan, khususnya Bugis-Makassar, tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan dikomunikasikan dengan kiat yang baik kepada masyarakat daerah lain yang mempunyai bahasa dan sastra daerah yang berbeda. Pada gilirannya akan timbulkan pemahaman, kesenangan, dan sikap positif terhadap budaya daerah tertentu. Konsekuensinya akan bisa ditransfer oleh daerah-daerah lain dengan menggunakan dan/atau menggali nilai-nilai budaya yang relevan, sama atau mirip dengan bahasa dan sastra daerahnya masing-masing. Selanjutnya, akan dimainkan peran-peran bahasa dan sastra daerah dalam mendukung ketahanan budaya bangsa seperti tertera pada bagian terdahulu.

Cara Meningkatkan Peran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Upaya Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa

Peran bahasa dan sastra daerah yang telah diajukan sebelumnya akan lebih meningkat dalam memperkuat, bukan hanya mendukung, ketahanan budaya bangsa bila ditempuh cara-cara peningkatan berikut ini.

- 1) Inventarisasi dan penelitian atau kajian seluruh bahasa dan sastra daerah beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing jika ditinjau dari ketahanan budaya bangsa Indonesia. Untuk lebih menghayati komponen, kekuatan, dan kelemahan setiap bahasa dan sastra daerah selanjutnya perlu ditempuh cara berikut ini.
- 2) Lomba ekspose, lisan dan atau tertulis, dan penulisan bahasa dan sastra daerah. Kegiatan dimulai dari tingkat kecamatan, antarkecamatan, antarkabupaten/kota, dan terakhir antarpropinsi di tingkat nasional. Kegiatan ini akan lebih menarik kalau disertai dengan hadiah menarik bagi pemenang.
- 3) Membukukan karya sastra. Karya bahasa dan sastra daerah yang berhasil menang dalam lomba tersebut dan karya-karya lainnya yang dipandang signifikan kontribusinya terhadap ketahanan budaya bangsa.
- 4) Mengindonesiakan, menerjemahkan, dan menerbitkan dalam bahasa Indonesia, karya-karya bahasa dan sastra daerah yang terangkat pada butir ketiga di atas. Cara demikian diharapkan akan lebih komunikatif terhadap daerah-daerah lain di tanah air Indonesia tercinta ini.
- 5) Menginkluskikan bahasa dan sastra daerah dalam berkomunikasi, lisan dan atau tertulis, dalam kehidupan sehari-hari. Cara ini akan lebih berpengaruh kalau ditampilkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin

pemerintahan, keorganisasian, dan tokoh agama.

Strategi yang Perlu Ditempuh untuk Memantapkan Peran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Rangka Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa

Peningkatan peranan bahasa dan sastra daerah yang telah diajukan sebelumnya akan mantap dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa bila ditempuh strategi-strategi berikut ini.

- 1) Kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, dan sejenisnya dilakukan secara rutin dan terencana guna memelihara dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah dalam rangka memperkuat ketahanan budaya bangsa Indonesia.
- 2) Mengembangkan perpustakaan, pusat koleksi informasi dan komunikasi, tentang bahasa dan sastra daerah, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Koleksi bahasa dan sastra daerah minimal ada pada setiap daerah pemakai utama bahasa daerah itu. Koleksi yang sudah diindonesiakan diperlukan pada setiap perpustakaan wilayah/daerah provinsi dan perpustakaan nasional, termasuk di kampus-kampus perguruan tinggi.
- 3) Bahasa dan sastra daerah dijadikan kurikulum muatan lokal (kurlok) yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh daerah pengguna bahasa dan sastra daerah masing-masing. Kurikulum demikian minimal diperlukan pada jenjang SLTA ke bawah pada setiap jenis dan satuan pendidikan.
- 4) Mengajarkan dan mengujikan bahasa dan sastra daerah masing-masing pada setiap jenis, jenjang dan satuan pendidikan. Dengan demikian, tamatan setiap satuan pendidikan diharapkan mempunyai kompetensi minimal, sesuai dengan jenjangnya, dalam memahami, menggunakan, dan/atau mengembangkan bahasa dan sastra daerah masing-masing.
- 5) Mengusulkan dan/atau mengembangkan peraturan daerah (perda) yang menopang pemeliharaan dan pengembangan, penulisan dan penerbitan bahasa dan sastra daerah masing-masing. Dalam hal ini tentu saja tidak boleh dilupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna menjaga sinergitas dengan budaya bangsa Indonesia.

Penutup

Sesudah diajukan uraian singkat di atas, ada baiknya dikemukakan beberapa simpulan yang langsung dirangkaikan dengan saran terkait seperti tertera di bawah ini.

- 1) Penggunaan bahasa dan sastra daerah sebagai "sisipan" dalam berkomunikasi bahasa Indonesia di daerah tertentu menimbulkan sentimen,

semangat atau perasaan kesamaan, senasib-sepenanggungan, dalam suatu daerah, provinsi dan/atau kabupaten/kota. Konsekuensinya akan memudahkan masyarakat bertindak, berbuat sesuai dengan pesan yang tersurat dan tersirat dalam komunikasi itu. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa dan sastra daerah "cukup berarti" perannya dalam menentukan sikap masyarakat di daerah terhadap program-program pembangunan dan pemerintahan yang sedang digalakkan. Untuk itu, disarankan agar Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan biaya secara terpadu untuk memelihara dan mengembangkan, penulisan dan penerbitan naskah-naskah bahasa dan sastra daerah.

- 2) Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sastra daerah Sulsel yang dapat memperkuat ketahanan budaya bangsa antara lain: *sirik, reso, lempu, warani, getteng* dan *appasitinajang*. Kalau aparat pemerintah, daerah, dan pusat mengamalkan secara konsekuen nilai-nilai ini dalam perilakunya sehari-hari, kemungkinan besar negara kita tidak akan mengalami krisis multidimensi yang begitu lama, terutama krisis moral yang diwarnai oleh gejala korupsi. Untuk itu, Pemerintah Pusat agar menganggarkan penerjemahan dan penerbitan sastra daerah yang berisi nilai-nilai tersebut dan nilai-nilai lainnya yang relevan dan menopang atau memperkuat ketahanan budaya bangsa untuk dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan utama di sekolah-sekolah pada semua jenjang, jenis, dan satuan pendidikan.
- 3) Karena pengembangan bahasa dan budaya daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, sedangkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (PP No. 25/2000), seharusnya anggaran pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah oleh pemerintah daerah provinsi bersama kabupaten/kota, dan untuk terjemahan dan penerbitan bahasa Indonesianya masing-masing dilakukan oleh pemerintah pusat.
- 4) Semua cara dan strategi atau upaya yang telah diajukan untuk meningkatkan dan memantapkan peran bahasa dan sastra daerah dalam rangka memperkuat ketahanan budaya bangsa tidak akan terlaksana tanpa dukungan dana yang memadai, baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah atas peran serta dan partisipasi aktif masyarakat lokal-nasional. Kalau memang kita mempunyai komitmen untuk melaksanakan isi Pasal 32 dan Pasal 36 UUD 1945 beserta penjelasan dan perubahannya, disarankan peningkatan secara bertahap anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan sastra yang menopang kekukuhan/ketahanan budaya bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid. 1997. Keterbukaan, Kepribadian dan Integrasi Nasional (Makalah), Makassar; Panitia Peringatan Hari Jadi Ke-328 Sulsel.
- Fachruddin, A.E. 1991. Beberapa Nilai Sosial Budaya dalam Ungkapan dan Sastra Bugis. (Makalah Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar), Makassar: IKIP Ujung Pandang.
- Hasan Alwi dan Dendy Sugono (eds.). 2000. Politik Bahasa (Risalah Seminar Politik Bahasa). Jakarta: Pusat Bahasa, Depdiknas.
- Koentjaraningrat (ed.) 1976. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Martono, Daniel T. Sparringa (eds.). 2003. Hidup Berbangsa dan Etika Multikultural. Surabaya: Forum Rektor Indonesia Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya.
- Mochtar Husein. 1997. Nilai-Nilai Fundamental Budaya Sulsel sebagai Unsur Pemersatu Bangsa (Unsur Etnis Mandar). (Makalah Panitia Hari Jadi Ke 328 Sulsel. Makassar.
- Nuridin Yatim. 1997. Aspek-Aspek Budaya Daerah yang Menunjang Ketahanan Budaya Nasional (Unsur Etnis Makassar). (Makalah Panitia Hari Jadi Ke 328 Sulsel. Makassar.
- Stanislaus Sandarupa. 1997. Komponen-Komponen Budaya Lokal dalam Menunjang Integrasi Nasional (Etnis Toraja). (Makalah Panitia Hari Jadi Ke-328 Sulsel. Makassar.
- Zainal Abidin Farid, A. 1997. Nilai Budaya sebagai Faktor Pemantapan Jatidiri Bangsa. (Makalah Panitia Hari Jadi Ke-328 Sulsel. Makassar.

FUNGSI BAHASA ETNIK UNTUK MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN

Robert Sibarani

Universitas Sumatera Utara dan Rektor Universitas Danna Agung Medan

Pengantar

Jika mencermati kekurangtepatan penggunaan istilah budaya atau kebudayaan seperti istilah *budaya korupsi*, *budaya KKN*, *budaya malas*, dan *budaya kekerasan* serta memperhatikan kekurangpahaman sebagian masyarakat tentang kebudayaan seperti kebudayaan selalu dianggap "membebani" masyarakat atau kebudayaan hanya dianggap sebagai "tontonan" belaka, perlu mempertegas definisi kebudayaan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hakikat kebudayaan.

Pertanyaan yang harus dijawab oleh para ahli budaya berkenaan dengan definisi kebudayaan adalah untuk apakah kebudayaan bagi masyarakatnya atau mengapa masyarakat perlu mempertahankan kebudayaannya. Secara pragmatis, kebudayaan adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bermanfaat untuk mempertahankan dan mengembangkan cara hidupnya. Oleh karena itu, kebudayaan yang merupakan kebiasaan hidup suatu masyarakat harus membawa masyarakat lebih sejahtera dan/atau lebih bahagia. Kemungkinan kebudayaan hanya dapat membahagiakan masyarakatnya tanpa ada hubungan dengan peningkatan kesejahteraan mereka atau kadang-kadang hanya menonjol pada peningkatan kesejahteraannya tanpa secara langsung memperlihatkan kedamaian pada diri mereka.

Bahasa sebagai bagian kebudayaan dan sekaligus bahasa yang berperan untuk pengembangan kebudayaan juga harus mendapat perhatian dalam perumusan kebudayaan kita. Peran bahasa etnik, bahasa Indonesia, dan bahasa asing perlu mendapat perhatian dalam konteks kebudayaan di Indonesia.

Tipe Kebudayaan Indonesia

Kebudayaan harus dapat menjadikan masyarakat lebih damai dan lebih sejahtera, bukan sebaliknya menjadi beban terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, semua kebudayaan yang tidak bermanfaat untuk kedamaian (kebahagiaan) dan kesejahteraan manusia akan punah secara alamiah. Dengan demikian, kebudayaan dapat didefinisikan sebagai

berikut. *Kebudayaan* adalah keseluruhan kebiasaan manusia yang tercermin dalam pengetahuan, tindakan, dan hasil karyanya sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya untuk mencapai kedamaian dan/atau kesejahteraan hidupnya.

Dalam kenyataan kemajemukan budaya bangsa kita dewasa ini, paling tidak ada tiga tipe kebudayaan yang perlu mendapat perhatian di Indonesia, yakni (1) kebudayaan etnik, (2) kebudayaan baru yang berakar pada kebudayaan etnik atau kebudayaan baru-etnik, dan (3) kebudayaan baru yang berorientasi pada kebudayaan asing atau kebudayaan baru-asing.

Kebudayaan tipe pertama, yakni kebudayaan etnik masih mudah kita temukan karena semua kebudayaan suku bangsa yang masih dipelihara oleh masyarakatnya termasuk 'kebudayaan etnik. Karena penghitungan etnik dan penghitungan kebudayaan sering paralel dengan jumlah bahasa etnik, etnik di Indonesia kurang lebih 706 etnik karena bahasa etnik yang ada di Indonesia ada sekitar 706. Dalam hal bahasa, sebagai bagian kebudayaan, bahasa etnik adalah bahasa suku bangsa yang dipergunakan oleh masyarakat etnik di Indonesia seperti bahasa Batak Toba, bahasa Melayu, bahasa Batak Karo, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Semua unsur kebudayaan yang masih mengandung kebiasaan etnik tergolong ke dalam kebudayaan etnik seperti pelaksanaan adat dan pola bercocok tanam, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kebudayaan etnik ini makin lama makin menipis.

Kebudayaan tipe kedua, yakni kebudayaan baru yang berakar dari kebudayaan etnik adalah semua kebudayaan baru yang terlihat unsur atau akar budaya etniknya. Kebudayaan ini 'dapat disingkat dengan kebudayaan baru-etnik untuk menunjukkan bahwa kebudayaan ini adalah kebudayaan yang baru dikenal bangsa kita, tetapi masih memiliki nuansa tradisi etnik. Dalam hal bahasa, bahasa Indonesia merupakan kebudayaan tipe kedua ini karena bahasa Indonesia sudah menjadi kebudayaan baru yang jelas-jelas berakar dari .kebudayaan etnik. Akar utamanya adalah bahasa Melayu, tetapi sudah mendapat penambahan kosakata baru yang bukan hanya berasal dari kebudayaan etnik. Dalam hal kesenian, semua lagu-lagu dan musik pop yang masih tampak tradisi etniknya tergolong dalam kebudayaan tipe kedua ini.

Kebudayaan tipe ketiga adalah kebudayaan baru yang berorientasi pada kebudayaan asing tampak jelas pada pola kehidupan generasi kita sekarang ini. Untuk singkatnya, kebudayaan ini disebut dengan kebudayaan baru-asing. Pola makan anak-anak kita, cara berpakaian kita, dan pola hidup generasi muda kita sudah mengarah

pada kebudayaan asing, yang sering kita anggap kebudayaan "modern". Hampir tidak ada beda kita dari bangsa lain jika kita memiliki kebudayaan tipe ketiga ini. Seandainya, bahasa Indonesia kita verorientasi pada kebudayaan asing, misalnya dengan menerima begitu banyak kosakata dari bahasa Inggris, seperti bahasa Melayu di Malaysia, bahasa itu termasuk kebudayaan tipe ketiga. Mungkin ada tipe keempat kebudayaan, seperti kebudayaan etnik yang langsung berorientasi pada kebudayaan asing (etnik-asing), tetapi paling tidak ketiga jenis kebudayaan di atas yang tampak jelas sekarang ini dalam kebudayaan kita.

Ketiga tipe kebudayaan itu adalah kebudayaan bangsa atau kebudayaan Indonesia. Istilah kebudayaan nasional sebaiknya dihilangkan dalam terminologi kebudayaan kita karena maknanya mengandung hubungan subordinasi-superordinasi apalagi "puncak-puncak" kebudayaan daerah dianggap sebagai kebudayaan nasional. Padahal, kebudayaan tidak dapat dinilai dengan makna yang mengandung hubungan subordinasi-superordinasi seperti itu.

Bagaimana perlakuan kita terhadap ketiga tipe kebudayaan itu? Dalam penguatan identitas budaya kita, usaha revitalisasi kebudayaan harus difokuskan pada pemberdayaan kebudayaan etnik (tipe pertama) atau paling tidak pada kebudayaan baru yang berakar pada tradisi etnik (tipe kedua). Dengan membudayakan atau membiasakan diri dengan kebudayaan etnik dan kebudayaan baru-etnik, bangsa kita akan lebih menghargai kebudayaan kita sendiri dan akan lebih bermanfaat, baik untuk identitas bangsa kita maupun untuk perbaikan ekonomi kita. Apabila bangsa kita membiasakan diri dengan kebudayaan baru-etnik, identitas budaya bangsa kita akan lebih jelas berbeda dengan budaya bangsa lain dan akan membutuhkan kreativitas baru yang dapat memanfaatkan tradisi etnik. Secara ekonomi pun, hal itu akan lebih bermanfaat karena semakin banyak permintaan (*demand*) terhadap sumber-sumber atau bahan-bahan etnik maka semakin menguntungkan pada masyarakat kita. Agar budaya bangsa kita lebih maju, pemanfaatan terhadap sumber-sumber etnik harus digalakkan dengan kreativitas dan ciptaan baru karena menguntungkan secara ekonomis dan pada gilirannya akan memperkuat identitas budaya politik bangsa kita sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

Bahasa Etnik

Sebelum dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berasal dari bahasa Melayu Riau, semua etnik di

nusantara ini menggunakan bahasa etnik sebagai alat komunikasi sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, kelestarian dan pemertahanan bahasa etnik tampaknya semakin mengkhawatirkan karena adanya sikap bahasa masyarakat kita yang berat sebelah. Padahal, kedudukan setiap bahasa sama atau sederajat berdasarkan sudut pandang linguistik. Tidak ada bahasa yang disebut primitif. Betapapun miskinnya kehidupan suatu masyarakat, mereka tetap kava akan bahasa sebagai alat komunikasi. Bagaimanapun rendahnya sistem pengetahuan suatu masyarakat, mereka pasti memiliki sistem komunikasi simbolis yang memadai. Betapapun primitifnya suatu masyarakat jika ditinjau dari sudut pandang lain, mereka memiliki bahasa yang sangat berkembang. Betapapun sedikitnya jumlah penutur suatu bahasa, mereka pasti mempunyai kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan konsep pikiran mereka. Peranan bahasa yang sangat penting dalam kebudayaan suatu masyarakat dapat membuktikan bahwa bahasa mereka akan selalu berkembang. Bahasa yang mereka gunakan mempunyai perbendaharaan kata dan gramatika yang memadai, yang tidak lebih rendah daripada perbendaharaan kata dan gramatika bahasa lain. Dengan demikian, meskipun bahasa etnik tertentu memiliki masyarakat penutur yang lebih sedikit daripada penutur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bahasa etnik itu secara linguistis mempunyai kedudukan yang sama dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yakni sama-sama berfungsi sebagai alat komunikasi masyarakat penuturnya. Bahasa-bahasa itu mempunyai tingkat kepadan perbendaharaan kata dan gramatika yang sama untuk mengungkapkan konsep pikiran penuturnya.

Sebagai alat komunikasi, setiap bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau amanat dari penyapa (pengirim) kepada pesapa (penerima). Komunikasi melalui bahasa dapat dikatakan berhasil apabila amanat atau pesan yang disampaikan penyapa dapat diterima pesapa seperti apa yang dimaksudkan penyapa. Interaksi masyarakat yang sangat beragam, sistem komunikasi yang luas, perkembangan teknologi yang canggih, dan kebijakan pemerintah menyebabkan bahasa etnik kadang-kadang tidak lagi digunakan untuk mengungkapkan konsep pikiran dan budaya etnik itu secara bebas, tetapi telah digantikan oleh bahasa Indonesia. Seolah-olah ada perintah untuk tidak berbahasa etnik di depan umum meskipun peserta komunikasi itu berasal dan lebih fasih berbahasa etnik. Bahkan, yang lebih menyedihkan, ada sementara orang yang merasa "malu" berbahasa etnik jika didengar orang dari etnik lain. Sebaliknya, ada orang yang merasa tidak enak/senang jika dia mendengar orang berbahasa etnik.

Padahal, pada kenyataannya, sebagai alat komunikasi yang harus dapat digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dunia modern, bahasa etnik terus diperkaya dengan cara menerima kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kontak bahasa semacam itu mengakibatkan bahwa bahasa etnik tidak lagi hanya bahasa yang memperkaya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa yang diperkaya bahasa Indonesia.

Jika ditinjau persentase saling pengaruh antara keduanya, pengaruh bahasa Indonesia ke dalam bahasa etnik lebih besar daripada pengaruh bahasa etnik ke dalam bahasa Indonesia terutama di bidang pengembangan kosakata. Bahkan, kadang-kadang kata-kata dalam bahasa Indonesia lebih sering muncul ketika berkomunikasi secara resmi meskipun terdapat padanan kata-kata itu dalam bahasa etnik.

Kasus bahasa etnik yang saya maksudkan di sini lebih saya fokuskan pada bahasa etnik di Sumatera Utara, yakni bahasa Nias dan bahasa-bahasa Batak, seperti bahasa Batak Toba, bahasa Batak Karo, bahasa Batak Simalungun, bahasa Batak Pakpak-Dairi, dan bahasa Batak Angkola-Mandailing. Bahasa Melayu di Sumatera Utara tidak begitu bermasalah karena memiliki persamaan dengan bahasa Indonesia.

Situasi Kebahasaan di Indonesia

Ada tiga masalah bahasa yang harus mendapat perhatian di Indonesia yakni bahasa etnik, bahasa nasional, dan bahasa asing. Di samping sebagai alat komunikasi antarpemutur pada setiap bahasa itu, bahasa etnik sangat penting terutama dalam pelestarian kebudayaan dan pengetahuan etnik. Bahasa nasional sangat penting terutama dalam persatuan bangsa dan penyebaran pengetahuan, dan bahasa asing sangat penting terutama dalam penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dari dunia yang berbahasa asing. Dengan demikian, masyarakat Indonesia seharusnya dituntut sebagai masyarakat yang multilingual, yakni masyarakat yang sedikitnya menguasai satu bahasa etnik, bahasa nasional, dan bahasa asing. Jika dilihat hasil sensus penduduk tahun 1990, 107.066.316 orang (67,80 %) penduduk Indonesia tergolong masyarakat bilingual (dapat berbahasa Indonesia di samping menguasai salah satu bahasa etnik); 23.802.520 orang (15,07 %) penduduk Indonesia tergolong masyarakat monolingual berbahasa Indonesia dan 27.055.488 orang (17,13%) penduduk Indonesia tergolong masyarakat monolingual berbahasa etnik.

Sudah pasti, hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menguasai bahasa asing di samping menguasai bahasa etnik dan

bahasa nasional (Indonesia). Jika data itu masih bisa dipercaya, itu berarti bahwa terdapat 84,93 % masyarakat Indonesia yang dapat berbahasa etnik empat belas tahun yang lalu meskipun persentase itu pasti sudah semakin berkurang.

Jika penanganan kebahasaan di Indonesia berjalan seperti sekarang ini dalam waktu yang cukup lama, tampaknya situasi kebahasaan kita pada waktu mendatang akan mengarah pada masyarakat monolingual berbahasa Indonesia dan masyarakat bilingual berbahasa Indonesia dan berbahasa asing. Kalaupun terdapat masyarakat multilingual, masyarakat itu menguasai bahasa Indonesia dan beberapa bahasa asing. Itu berarti bahwa masa depan bahasa etnik akan terancam. Ada beberapa faktor penyebabnya terutama situasi kebahasaan di Sumatera Utara. Pertama, generasi muda memiliki kecenderungan pergi ke kota atau merantau ke tempat lain. Karena situasi dan tuntutan interaksi masyarakat di kota, mereka cenderung berbahasa Indonesia. Anak-anak mereka pun kemudian akan menjadi penutur bahasa Indonesia dan tidak dapat lagi menguasai bahasa etnik. Penghuni etnik asal adalah orang-orang tua yang disebabkan oleh keterbatasan usianya tidak mungkin meneruskan pelestarian bahasa etniknya. Kedua, masyarakat ekonomi/ berpendidikan menengah ke atas cenderung lebih senang berbahasa Indonesia daripada berbahasa etnik meskipun mereka sama-sama berbahasa ibu yang sama. Faktor penyebab yang mengakibatkan mereka cenderung berbahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, mereka sudah terbiasa dalam pergaulan dengan masyarakat dari etnik lain sehingga terbawa-bawa dan lebih terlatih dalam komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dialami seseorang ketika dia diminta berbicara dalam bahasa etnik pada acara umum. Meskipun dia penutur bahasa etnik tertentu, dia lebih fasih berbicara secara resmi dalam bahasa Indonesia. Kedua, mereka malu berbahasa etnik. Ini mungkin yang lebih "berbahaya" dalam pelestarian bahasa etnik. Hal ini dialami terutama oleh generasi muda atau mahasiswa di kota-kota. Mereka, terutama sekali wanita, malu berbahasa etnik kalau didengar masyarakat dari suku lain sehingga mereka kadang-kadang berbicara sangat pelan supaya tidak didengar orang di sekeliling mereka. Kondisi ini pun akan merugikan dalam pelestarian bahasa etnik jika hal itu terus berlangsung. Sebaiknya, kita perlu tahu bahwa tidaklah salah jika kita berbahasa etnik sepanjang peserta komunikasi yang terlibat itu mengerti bahasa etnik itu atau orang yang di sekeliling yang berbicara itu tidak terlibat dalam komunikasi itu. Bila perlu, peserta komunikasi itu dapat menerjemahkannya kepada orang yang tidak mengerti bahasa

etnik tersebut. Bahasa etnik adalah kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan pelestarian bahasa etnik secara efektif hanyalah dengan memakainya sebagai alat komunikasi. Secara sosiolinguistik dan secara antropolinguistik, situasi komunikasi seperti itu sangat dimungkinkan.

Sebenarnya, Pemerintah telah menetapkan landasan hak hidup dan pelestarian bahasa etnik dalam beberapa momen penting. Pertama, rumusan butir ketiga Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tidaklah mengabaikan bahasa-bahasa etnik, tetapi hanya mengatakan bahwa suku-suku bangsa di Indonesia perlu menjunjung satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia tanpa menghilangkan bahasa etnik. Kedua, penjelasan Pasal 36 UUD 1945 dengan jelas menyiratkan bahwa bahasa-bahasa etnik tetap digunakan oleh penuturnya dan dipelihara oleh negara. Ketiga, pelestarian bahasa etnik telah mendapat perhatian dalam GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, dan GBHN 1993 baik dalam kaitannya dengan pengembangan bahasa Indonesia maupun dalam rangka pengembangan bahasa etnik itu. Akan tetapi, meskipun hal itu dituliskan dalam dokumen penting, pelaksanaan atau realisasinya hampir tidak pernah berjalan.

Harus diakui juga bahwa selama ini telah banyak dilakukan penelitian terhadap bahasa-bahasa etnik di Indonesia terutama oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi penelitian itu lebih difokuskan pada penginventarisasian dan pendeskripsian bahasa-bahasa etnik itu dan kurang memperhitungkan masyarakat penutur dan masa depan bahasa-bahasa etnik itu. Padahal, walaupun semua bahasa etnik diinventarisasi dan dideskripsikan, hal itu kurang berarti tanpa mengikutsertakan masyarakat penutur bahasa-bahasa etnik tersebut. Kecenderungan yang terjadi sekarang adalah kurangnya penutur bahasa etnik dan lunturnya penghargaan dan sikap bahasa masyarakat terhadap bahasa etnik. Pada masa mendatang, mungkin perlu kajian ulang terhadap penelitian bahasa etnik, yakni lebih memfokuskan pada usaha peningkatan pemakaian bahasa etnik dan peningkatan sikap masyarakat terhadap bahasa etnik.

Peranan Bahasa sebagai Perekat Budaya

Kata *perekat* dalam tulisan ini diartikan sebagai 'pemersatu', 'sesuatu yang membuat jadi dekat', dan/atau 'sesuatu yang mempereratkan'. Atas dasar pengertian itu, peranan bahasa sebagai perekat budaya dalam kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengimplikasikan tiga pengertian besar sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

Pertama, bahasa berfungsi untuk merekatkan suatu kebudayaan yang terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing terpisah menjadi satu kebudayaan yang utuh dan 'berkomplementer sebagai satu identitas budaya. Bahasa pada fungsi pertama ini adalah bahasa etnik atau bahasa daerah yang berperan sebagai alat berpikir dan alat berasa (emosi) masyarakat lokal atau etnik tertentu, baik yang terwujud dalam gagasan, tindakan berpola maupun hasil karya masyarakat etnik itu sesuai dengan wujud kebudayaan.

Sebagai alat berpikir lokal, bahasa dimanfaatkan sebagai media mengembangkan pola kehidupan masyarakat etnik dari zaman sebelum mengenal bahasa Indonesia sampai setelah masyarakat dapat berbahasa Indonesia. Bahkan, sampai sekarang bahasa etnik masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat etnik untuk berhitung atau untuk memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupannya. Penutur yang bahasa pertamanya bahasa etnik pada umumnya menggunakan bahasa etnik ketika berbicara dalam dirinya atau berpikir internal. Di tingkat SD pada beberapa sekolah di daerah kabupaten, bahasa etnik juga masih digunakan sebagai bahasa pengantar. Sebagai alat berasa lokal, bahasa etnik (terutama bagi masyarakat yang bahasa pertamanya bahasa etnik) masih lebih cocok sebagai penyampai daya emosinya, baik berupa emosi positif seperti rasa senang, rasa bangga, rasa aman, rasa cinta, rasa damai, rasa adil, rasa lega, rasa terharu, rasa kasihan, dan rasa percaya maupun emosi negatif seperti rasa kecewa, rasa frustrasi, rasa iri, rasa cemburu, rasa curiga, rasa sepi, rasa susah, rasa sedih, rasa takut, rasa malu, rasa marah, dan rasa benci. Penutur yang bahasa pertamanya bahasa etnik pada umumnya lebih sering menggunakan bahasa etnik itu ketika menjerit atau meratap.

Emosi dan pikiran lokal ini juga tampak pada kecenderungan seseorang merasa dekat pada suatu budaya etnik tertentu apabila dia mengetahui bahasa etnik itu. Apabila orang Jawa tahu bahasa Toba, dia akan merasa dekat pada budaya Toba dan orang Toba akan menerima orang Jawa itu sebagai bagian dari masyarakat Toba. Lihatlah betapa banyak orang Tionghoa di daerah Toba-Samosir dan Tapanuli Utara yang telah diangkat menjadi orang Toba dengan penabalan marga. Sebaliknya, kalau ada dua orang Karo, satu dapat berbahasa Karo dan satu lagi tidak dapat berbahasa Karo, saya yakin orang yang dapat berbahasa Karo itu akan lebih dekat perasaannya pada budaya Karo daripada orang yang tidak dapat berbahasa Karo itu. Cara berpikir orang yang dapat berbahasa etnik itu pun--terutama tentang kehidupan etnik akan lebih luas daripada orang yang tidak dapat berbahasa etnik.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, perasaan seperti ini sering

terjadi. Masyarakat disatukan karena mereka dapat saling berkomunikasi. Seseorang akan merasa terasing jika dia tidak dapat mengerti bahasa etnik suatu kelompok masyarakat ketika terjadi tindak komunikasi dengan menggunakan bahasa etnik itu. Di samping itu, suatu bahasa etnik sekaligus kita gunakan untuk mengidentifikasi suku dan kebudayaan etnik. 'Penghitungan jumlah bahasa tampaknya sama dengan penghitungan jumlah suku dan kebudayaan etnik. Sekadar penambah informasi bahwa ada sekitar 706 bahasa di Indonesia meskipun sekitar 240 di antaranya berada di Irian Jaya. Dengan demikian, jelaslah bahasa etnik mempererat, mempersatukan, dan merekatkan pikiran dan emosi etnik sebagai identitas etnik.

Atas dasar itu, dalam konteks otonomi daerah, bahasa etnik sangat penting dalam rangka penguatan identitas kebudayaan etnik dengan penggalian potensi budaya melalui pemanfaatan bahasa etnik. Kebudayaan etnik dan kebudayaan baru-etnik, sebagaimana tipe kebudayaan I dan II di atas, akan dapat dipertahankan, direvitalisasi, dipahami dengan bantuan bahasa.

Kedua, bahasa berfungsi untuk merekatkan kebudayaan-kebudayaan etnik menjadi satu keluarga yang rukun, saling menghargai, dan saling mendukung menjadi satu identitas kekayaan bersama. Sebagaimana yang disebutkan di atas, ada sekitar 706 bahasa etnik di Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa betapa sulitnya seorang pejabat seperti presiden berkomunikasi dengan rakyatnya seandainya tidak ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa nasional kita. Akan tetapi, hal itu tidak dialami bangsa kita karena bahasa Indonesia dapat mempersatukan bangsa kita yang terdiri atas beratus-ratus etnik dengan bahasa etniknya masing-masing. Cara pandang, cara berpikir, dan cara mengekspresikan emosi masyarakat etnik dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia meskipun pada mulanya agak sulit dan janggal.

Di samping peranannya yang mempersatukan budaya etnik, bahasa Indonesia juga telah mempersatukan sebagian besar masyarakat Indonesia yang lahir dan dibesarkan di kota-kota. Pada umumnya, bahasa pertama mereka adalah bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa etnik meskipun orang tua mereka masih berbahasa etnik. Mereka, pada umumnya generasi muda, dipersatukan oleh bahasa Indonesia.

Kehadiran bahasa Indonesia di negara kita memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya sangat jelas karena kita dapat berkomunikasi, saling mengerti, saling memahami, dan mudah mendapatkan pengetahuan karena bantuan bahasa Indonesia. Akan

tetapi, di sisi lain, sudah muncul generasi baru kita yang tidak dapat lagi berbahasa etnik sehingga dia dengan sendirinya akan kehilangan identitas budaya etniknya. Pengembangan dan pengajaran bahasa Indonesia yang "terlalu" maju tanpa menghiraukan bahasa etnik mengakibatkan dampak negatif pada masa depan bahasa etnik di negara kita ini. Kita lupa bahwa salah satu cara mematikan suatu bahasa adalah mengajarkan bahasa lain pada penutur bahasa itu dengan menyuntikkan "martabat" yang lebih besar pada bahasa yang diajarkan dan melemahkan "muruah" bahasa yang dimiliki.

Bahasa Indonesia, sebagaimana bahasa etnik, juga merupakan alat berpikir dan berasa masyarakat, tetapi lebih berfokus pada pikiran dan emosi nasional. Pikiran dan emosi nasional mengarah pada suatu tingkatan yang sudah keluar menjangkau etnik-etnik lain. Apa yang dipikirkan, dikembangkan, diterapkan, dirasakan, dipersepsikan, dan dikhayalkan bukan lagi hanya untuk kepentingan kelompok etniknya, melainkan untuk kepentingan etnik lain atau sedikitnya tidak merugikan etnik atau kelompok lain.

Pikiran dan emosi nasional yang disampaikan oleh bahasa itu menjadi pembeda kita dari masyarakat lain. Singkatnya, bahasa Indonesia di sini berfungsi sebagai alat berpikir dan menyampaikan emosi secara nasional untuk menjadi identitas budaya nasional kita. Meskipun Indonesia dan 'Malaysia sama-sama berbahasa "Melayu", kita tetap dapat membedakan identitas budaya keduanya karena bahasa Melayu di Indonesia (bahasa Indonesia) dan bahasa Melayu di Malaysia (bahasa Malaysia) sudah berbeda.

Bahasa memang penting untuk mempererat hubungan emosional masyarakat penuturnya. Andaikanlah ada dua pasang orang Indonesia yang tinggal di .Iuar negeri. Pasangan pertama sama-sama dapat berbahasa Indonesia, tetapi satu orang dari pasangan kedua tidak dapat berbahasa Indonesia, hubungan emosional mereka terutama perasaan keindonesiaan mereka akan berbeda. Hubungan emosional pasangan pertama lebih erat daripada hubungan emosional pasangan kedua.

Suatu ketika, ada dua orang sedang makan pada meja yang berbeda di sebuah kantin di Hamburg, Jerman. Yang satu mengira bahwa orang yang di hadapannya adalah orang Amerika Latin, demikian juga sebaliknya. Setiap kali mereka bertepatan makan pada kantin yang sama, mereka saling mencurigai, bahkan beranggapan saling melotot seperti "mencari musuh". Pada waktu berikutnya, seorang di antaranya mendengar orang yang satu lagi berbahasa Indonesia dengan sesama orang Indonesia, serta merta muncul hubungan emosionalnya dengan mengatakan, "Rupanya Anda orang Indonesia."

Hubungan bahasa dengan kebudayaan yang terakhir ini perlu juga dibuktikan dengan pergi ke Berastagi untuk membeli jeruk dengan menggunakan bahasa Karo dan bahasa Inggris. Mungkin, harga jeruk itu lebih murah dengan menggunakan bahasa Karo dan lebih mahal dengan menggunakan bahasa Inggris.

Ketiga, bahasa berfungsi untuk merekatkan kebudayaan-kebudayaan negara yang berbeda menjadi satu wawasan bersama untuk saling mengerti dan saling menghargai. Banyak orang yang sudah merasa dekat pada kebudayaan Amerika, Inggris, Australia atau penutur asli bahasa Inggris karena dia tahu bahasa Inggris. Meskipun masih dalam tahap "merasa", ini adalah bukti betapa bahasa asing dapat mendekatkan orang terhadap budaya asing itu.

Orang asing yang dapat berbahasa Indonesia akan dapat mengawinkan pola berpikir dan berasa menurut budaya asing dan budaya Indonesia sehingga dia dapat menerapkan bahasa dan budaya yang tepat apabila dia berinteraksi di lingkungan masyarakat. Rasa kedekatan atau keekatan kita pada orang yang dapat berbahasa Indonesia itu pun akan segera muncul.

Wawasan intelektual dan wawasan emosional seseorang akan lebih mengglobal apabila dia dapat berbahasa asing, dalam hal ini, bahasa internasional. Hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun peranan penerjemah dapat mengatasi ketidakpahaman suatu bahasa asing, hal itu hanya dapat mengalihkan wawasan intelektual, tetapi tidak dapat mengalihkan wawasan emosional.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa bahasa--baik bahasa etnik, bahasa Indonesia maupun bahasa asing berfungsi untuk mempersatukan, mempereratkan, dan merekatkan budaya-budaya yang berbeda menjadi satu keluarga besar budaya.

Fungsi bahasa sebagai perekat budaya sebagaimana yang disinggung di atas lebih difokuskan pada *covert culture* atau *untouchable culture* (budaya ide) sebagaimana yang ditonjolkan oleh paradigma kognitif. Budaya yang direkatkan oleh bahasa dalam diri manusia adalah kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya. Dengan kata lain, bahasa dapat mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional¹⁾.

Melalui pelambangan sebagai salah satu sifat hakiki bahasa, orang dapat berpikir abstrak atau berpikir objektif tanpa kehadiran objek itu di hadapannya dan orang dapat berpikir sistematis yang

1 Baca Tampubolon dalam "reran Bahasa dalam Memaiukan Bangsa" (2001).

memungkinkan proses berpikir berlangsung dengan efektif dan efisien.

Bahasa berperan untuk melakukan kategorisasi logis dalam mengidentifikasi dan mencirikan objek-objek serta membuat proposisi yang mengandung logika dan daya kritis. Tanpa kemampuan kategorisasi logis dan proposisi, orang tidak akan dapat berpikir kritis dan mengembangkan kecerdasan intelektualnya.

Bahasa juga berperan penting untuk mengembangkan kecerdasan intelektual melalui sumber-sumber informasi, seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah ilmiah, serta media massa cetak dan elektronik. Semua sumber informasi itu menggunakan bahasa sebagai medianya. Sumber informasi intelektualitas ini akan mendorong perkembangan daya nalar analitis, sintesis, selektif, inovatif, dan kreatif serta mengembangkan wawasan masyarakat. Sumber informasi emosi dapat diperoleh dari karya sastra, buku-buku budaya, dan buku-buku teologi.

Kecerdasan emosional juga akan terbangun lewat kategorisasi emotif seperti pengidentifikasian dan pencirian hal yang berkenaan dengan segala seluk-beluk emosi seperti pengidentifikasian perbedaan antara rasa senang dan rasa bahagia. Intonasi yang tepat dan gaya bahasa yang bagus juga akan dapat menggugah emosi sehingga lawan bicara akan terpengaruh terhadap pesan bahasa kita atau akan terdapat daya perlokusi secara pragmatik.

Aspek bahasa yang sangat penting dalam pengembangan kecerdasan emosional adalah masalah kesantunan bahasa. Kesantunan (kesopansantunan) sama dengan tata krama atau etiket. Kesantunan atau etiket adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi persyaratan yang disepakati dalam perilaku sosial.

Apabila kita memperhatikan pengertiannya, kesantunan dapat dilihat dari berbagai segi dalam pergaulan sehari-hari. Pertama, kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan sehari-hari. Ketika orang dikatakan santun, dalam diri seseorang itu tergambar nilai sopan santun atau nilai etiket yang berlaku secara baik dalam masyarakat tempat seseorang itu mengambil bagian sebagai anggota masyarakat. Ketika dia dikatakan santun, kita memberikan nilai kepadanya, baik yang dievaluasi dalam seketika maupun yang dievaluasi secara konvensional dan melalui proses yang panjang dalam pergaulan sehari-hari. Sudah tentu, evaluasi

dalam proses yang panjang akan lebih mengekalkan nilai yang diberikan kepadanya. Kedua, kesantunan sangat kontekstual, yakni berlaku dalam suatu masyarakat, tempat atau situasi tertentu, tetapi belum tentu berlaku bagi masyarakat, tempat atau situasi lain. Ketika orang bertemu dengan teman dekat, boleh saja kita menggunakan kata yang agak kasar dengan suara yang keras, tetapi hal itu tidaklah santun apabila ditujukan kepada tamu yang baru kita kenal. Ketiga, kesantunan selalu bipolar, yakni memiliki hubungan dua kutub seperti antara anak dengan orang tua; antara orang yang masih muda dengan orang yang lebih tua; antara tuan rumah dan tamu; antara pria dan wanita; antara seorang pembaca dan pemberi informasi. Keempat, kesantunan tecermin dalam cara bertutur kata (berbahasa), cara berbuat (bertindak), dan cara berpakaian.

Kesantunan bahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Di dalam tindak komunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan norma budaya yang hidup dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma budaya, dia tidak jarang dituduh orang yang aneh, egois, sombong, acuh, tidak beradab atau bahkan tidak berbudaya.

Kesantunan bahasa sangat penting diperhatikan para peserta komunikasi demi lancarnya komunikasi. Oleh karena itu, masalah kesantunan bahasa harus mendapat perhatian terutama dalam berkomunikasi. Dengan mengetahui kesantunan bahasa, sebagai bagian tata cara berbahasa, diharapkan agar orang lebih cepat memahami pesan yang disampaikan dalam komunikasi karena tata cara berbahasa bertujuan mengatur hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apa yang sebaiknya kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu.
- 2) Ragam bahasa apa yang sewajarnya kita pakai dalam situasi tertentu.
- 3) Kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara kita dan menyela pembicaraan orang lain.
- 4) Bagaimana kita mengatur kenyaringan suara ketika berbicara.
- 5) Bagaimana sikap dan gerak-gerik kita ketika berbicara, dan juga.
- 6) Kapan kita harus diam atau jangan berbicara.

Tata cara berbahasa seseorang dipengaruhi norma-norma budaya suku bangsa atau kelompok masyarakat tertentu. Tata cara berbahasa orang Inggris berbeda dengan tata cara berbahasa orang Amerika meskipun mereka sama-sama berbahasa Inggris. Tata cara berbahasa orang Jawa juga berbeda dengan tata cara berbahasa orang Aceh

meskipun mereka sama-sama berbahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan yang sudah mendarah daging sangat berpengaruh pada komunikasi seseorang. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari atau memahami norma-norma budaya dalam 'berbahasa atau berkomunikasi. Namun, tata cara berbahasa yang mengikuti norma-norma budaya akan menghasilkan kesantunan bahasa atau kesantunan komunikasi.

Bagaimanakah pembentukan kesantunan bahasa itu? Kesantunan bahasa, sebagaimana yang disinggung sebelumnya, menggambarkan kesantunan atau kesopansantunan penuturnya. Kesantunan berbahasa sedikitnya dapat dilakukan dengan lima cara. Pertama, kita perlu menerapkan prinsip kesopanan (*politeness principle*) dalam berbahasa, yakni sebuah prinsip yang berusaha untuk memaksimalkan kesenangan atau kearifan, keuntungan, rasa salut atau yang mengutamakan keuntungan untuk orang lain dan kerugian untuk diri sendiri, maksim kemurahan yang mengutamakan kesalutan/ rasa hormat pada orang lain dan rasa kurang hormat pada diri sendiri, maksim kerendahan hati yang mengutamakan pujian pada orang lain dan rasa rendah hati pada diri sendiri, maksim kecocokan yang mengutamakan kecocokan kepada orang lain, dan maksim kesimpatikan yang mengutamakan rasa simpati pada orang lain. Dengan menerapkan prinsip kesopanan ini, orang tidak lagi menggunakan ungkapan-ungkapan yang merendahkan orang lain seperti, "Ah, kalau begitu semua orang tahu," "Rupanya itu saja yang dia tahu," dan sebagainya.

Kedua, kesantunan berbahasa harus menghindari kata-kata tabu (*taboo*) dalam berkomunikasi. Pada kebanyakan masyarakat, kata-kata yang berbau seks, kata-kata yang merujuk pada organ-organ tubuh yang lazim ditutupi pakaian, kata-kata yang merujuk pada sesuatu benda yang menjijikkan, nama-nama hewan yang digunakan untuk menyapa orang, dan kata-kata "kotor" atau "kasar" termasuk kata-kata yang tabu atau yang tidak lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari kecuali untuk tujuan tertentu.

Ketiga, sehubungan dengan penghindaran kata-kata tabu itu, penggunaan eufemisme (ungkapan yang halus sebagai pengganti segala yang tabu) perlu dilakukan agar bahasa kita terjaga dan sopan. Namun, bahasa itu akan menjadi tidak santun apabila menggunakan eufemisme yang berlebihan atau apabila bahasa itu terlalu eufemistik. Jika eufemisme itu telah menggeser pengertian suatu kata, bukan untuk memperhalus kata-kata yang tabu, eufemisme itu mengakibatkan ketidaksantunan suatu bahasa seperti orang 'miskin' diganti menjadi orang 'prasejahtera'. Di sini telah terjadi kebohongan publik. Ke-

bohongan itu merupakan bagian dari ketidaksantunan bahasa.

Keempat, kesantunan juga dapat tercapai dengan menggunakan pilihan kata yang *honorifik*, yaitu ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Kata-kata sapaan yang halus dan kata-kata kelas tinggi pada suatu tingkatan bahasa seperti ragam *kromo inggil* dalam bahasa Jawa perlu digunakan kepada orang yang tingkat sosial dan usianya lebih tinggi daripada pembicara atau kepada orang yang kita hormati. Meskipun kata *engkau*, *Anda*, *Saudara*, dan *Bapak/Ibu* secara denotatif sama maknanya, efek kesantunannya berbeda. Bahkan, percakapan yang tidak menggunakan kata sapaan pun dapat mengakibatkan kekurangsantunan.

Kelima, kesantunan dapat juga tercapai dengan menerapkan tindak tutur tidak langsung (*indirect speech act*), yaitu jenis ujaran yang disampaikan dengan menggunakan modus kalimat yang berbeda dari maksud kalimatnya. Berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif) yang digunakan untuk memberitakan atau menginformasikan sesuatu, kalimat tanya (interogatif) yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah (imperatif) yang digunakan untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan atau permohonan. Apabila kalimat berita digunakan untuk memberitakan, kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat perintah untuk memerintah seperti fungsinya secara konvensional, tindak tutur yang dihasilkan adalah tindak tutur langsung (*direct speech act*). Akan tetapi, apabila kalimat berita atau kalimat tanya digunakan untuk menyuruh, tindak tutur yang dihasilkan adalah tindak tutur tidak langsung. Dalam berbahasa, tindak tutur tidak langsung biasanya lebih sopan daripada tindak tutur langsung seperti terlihat di bawah ini:

(1) Pangkaslah rambut Bapak!

(2) Rambut Bapak sudah panjang.

Kalimat (2), tindak tutur tidak langsung, lebih sopan daripada kalimat (1), tindak tutur langsung meskipun makna atau maksud kedua kalimat itu sama. Kemungkinan besar, efek komunikasi kalimat pertama lebih baik daripada efek kalimat pertama.

Namun, karena berbahasa bukan bersifat absolut, melainkan kontekstual, tindak tutur tidak langsung ini pun harus disesuaikan dengan konteks situasi komunikasi sehingga maksud kalimat yang digunakan tidak kabur. Sepanjang maksud kalimat itu sama, penutur diperbolehkan menggunakan tindak tutur tidak langsung, tetapi kalau berubah, sebaiknya menggunakan tindak tutur langsung.

Keenam, kesantunan bahasa dapat dibentuk dengan menerapkan aspek-aspek nonlinguistik yang tepat. Karena tata cara berbahasa

selalu dikaitkan dengan penggunaan bahasa sebagai sistem komunikasi, jenis tanda lain yang turut ambil bagian dalam komunikasi seperti unsur paralinguistik, kinetik, dan proksemika perlu diperhatikan untuk mencapai kesantunan bahasa.

Tujuan utama kesantunan bahasa adalah memperlancar komunikasi sehingga bahasa yang sengaja dibelit-belitkan, yang tidak tepat sasaran atau tidak menyatakan yang sebenarnya karena enggan kepada orang yang lebih tua seperti yang sering ditudingkan kepada masyarakat Melayu/Indonesia justru merupakan ketidaksantunan bahasa. Singkatnya, apabila bahasa yang digunakan seseorang sengaja mengaburkan komunikasi, bahasa yang digunakannya menjadi tidak santun. Oleh karena itu, bahasa yang sengaja mengaburkan berita kebenaran termasuk dalam ketidaksantunan.

Dengan demikian, kesantunan bahasa sebagai ciri khas masyarakat Melayu/Indonesia harus dipertahankan sebagai bagian dari peradaban masyarakat Melayu/Indonesia, tetapi kesantunan bahasa tidak boleh disalahgunakan untuk menghambat kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan kebenaran. Kesantunan bahasa juga tidak boleh terlalu eufemistik sehingga menjadi kebohongan. Dengan menerapkan kesantunan bahasa ini, ketersinggungan akan dapat dihindari yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik di masyarakat.

Penutup

Kenyataan menunjukkan bahwa di satu sisi, perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita semakin meningkat, tetapi di sisi lain, masa depan bahasa etnik semakin terancam. Semua kita pasti sepakat bahwa kita menginginkan kedua-duanya berjalan beriring ke arah perkembangannya yang wajar dan hal itu tidak mustahil dapat terjadi. Kunci utama adalah niat, rasa bangga, sikap bahasa, dan kesadaran kita semua untuk meningkatkan kedua-duanya. Kita harus menanamkan dalam diri kita terutama dalam diri generasi muda bahwa penguasaan bahasa etnik merupakan kebanggaan. Di samping pemer kaya bahasa Indonesia, bahasa etnik merupakan identitas bangsa. Janganlah kita menganggap bahwa "pemer kaya" itu berarti posisi subordinasi.

Peran para orang tua di kota sangat penting dalam pelestarian bahasa etnik. Jika orang tua (terutama orang tua yang menguasai satu bahasa etnik) menggunakan bahasa etnik ketika berkomunikasi dengan anak-anaknya di rumah, si anak dengan sendirinya akan mendapat

dasar pengetahuan bahasa etnik. Para orang tua perlu mengetahui bahwa semakin banyak si anak mengetahui bahasa maka semakin luas wawasan berpikirnya dan semakin mudah mengetahui bahasa-bahasa lain. Tidaklah sebaliknya bahwa semakin banyak bahasa dikuasai si anak maka semakin terbatas kemampuannya untuk menguasai pengetahuan lain.

Penggunaan bahasa etnik di tempat umum oleh masyarakat penutur bahasa etnik tidak perlu dicurigai atau dianggap sebagai "kesalahan", tetapi bahkan harus dihargai sepanjang tidak mengganggu orang lain. Kecurigaan itu tidak perlu. Di samping itu, penguatan bahasa etnik sebagai identitas etnik tidak perlu dikhawatirkan karena tidak akan mengganggu persatuan bangsa jika identitas etnik itu diterima dan dihargai sebagai kekayaan bangsa. Bahkan, jika identitas etnik sebagai kekayaan bangsa itu "ditutupi" atau dicoba untuk dihapuskan, akan mengganggu persatuan bangsa. Dengan demikian, kita perlu melakukan reorientasi atau kajian ulang terhadap fungsi dan kedudukan bahasa etnik yang dilakukan selama ini.

Berkenaan dengan kebudayaan etnik, "nyawa" kebudayaan etnik sangat tergantung pada kehidupan bahasa etnik yang menjadi wahana dan medianya. Oleh karena itu, untuk kita orang Indonesia, bahasa etnik, bahasa Indonesia, dan bahasa asing adalah tiga bahasa yang memiliki kedudukan dan peran yang masing-masing penting dalam era globalisasi mendatang. Dengan demikian, janganlah malu berbahasa etnik, pupuklah bahasa nasional, dan kuasailah bahasa asing!

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, Sutan Takdir. 1979. *Arti Bahasa, Pikiran, dan Kebudayaan dalam Hubungan Sumpah Pemuda 1928* (Pidato Sambutan Sutan Takdir Alisyahbana pada Upacara Penyerahan Gelar Doctor Honoris Causa pada tanggal 27 Oktober 1979 oleh Universitas Indonesia). Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Beratha, Ni Luh Sutjiati. 1998. "Materi Linguistik Kebudayaan" dalam *Linguistika Tahun V Edisi 9*, September 1998. Denpasar: Program Magister (S2) Linguistik, Universitas Udayana.
- Crystal, David. 1980. *A First Dictionary of Linguistics and Phonetics*. London: Andre Deutsch.

- , 1989. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dashefsky, Arnold. (Ed.) 1975. *Ethnic Identity in Society*. Connecticut: Rand McNally College Publishing Company.
- De Jong, P.E. De Josselin dan Erik Schwimmer. 1982. *Symbolic Anthropology in The Netherlands*. Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff.
- Duranti, Alessandro (ed.). 1997. *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- , 2001. *Linguistic Anthropology*. Massachusetts: Blackwell Publishers
- Edward, John. 1985. *Language, Society and Identity*. Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- Foley, William A. 1997. *Anthropological Linguistics: An Introduction*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Foster, Mary LeCron and Lucy Jayne Botscharow. 1990. *The Life of Symbols*. Colorado: Westview Press.
- Gordon, George, N. 1969. *The Languages of Communication*. New York: Hasting House.
- Hutchinson, John and Anthony D. Smith. (Ed.). 1996. *Ethnicity*. Oxford: Oxford University Press.
- Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kottak, Conrad Philip. 1991. *Anthropology*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Levi-Strauss, Claude. 1972. *Structural Antropology*. Great Britain: Penguin Books.
- Light, Donald, dkk. 1989. *Sociology*. New York: Alfred A. Knopf
- Manners, Robert A. and David Kaplan, ed. 1968. *Theory in Anthropology*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- McManis, Carolyn, dkk. 1988. *Language Files*. Ohio: The Ohio State University.
- Nababan, P.W.J. 1986. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Royce, Anya Peterson. 1982. *Ethnic Identity: Strategies of Diversity*. Bloomington: Indiana University Press.

- Sibarani, Robert. 1992. *Hakikat Bahasa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , 1998. *Makna Nama dalam Masyarakat Batak Toba*. Medan: Lembaga Penelitian USU.
- , 2002. *Antropolinguistik sebagai Penaung Hubungan Bahasa dengan Kebudayaan*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar tanggal 19 Januari 2002). Medan: USU Press.
- Sibarani, Robert dan Henry Guntur Tarigan (Peny. dan Pen.). 1993. *Makna Nama dalam Bahasa Nusantara: Sebuah Kajian Antropolinguistik*. Bandung: Penerbit Bumi Siliwangi.
- Tampubolon, Daulat P. 2001. "Peran Bahasa dalam Memajukan Bangsa" dalam *Linguistik Indonesia*. Tahun 19, NO. 1
- Wardhaugh, Ronald. 1986. *An Introduction to Sociolinguistics*. New York: Basil Blackwell.
- Zanden, James W. Vander. 1988. *The Social Experience: An Introduction to Sociology*. New York: Random House.
- , 1990. *Sociology: The Core*. New York: McGraw-Hill, Inc.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal	: Rabu, 15 Oktober 2003
Topik Makalah	: Peran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa
Penyaji	: 1. Oentarto Sindung Mawardi disajikan oleh Wahyu Najib 2. Benyamin Lakitan 3. H. Muhammad Adnan Tiro disajikan oleh H. Ambo Enre Abdullah 4. Robert Sibarani
Pemandu	: Anton M. Moeliono
Pencatat	: 1. Ganjar Harimansyah W. 2. Dedi Puryadi

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Mansoer Pateda (IKIP Negeri Gorontalo)

Pertanyaan ini saya ajukan untuk keempat panelis. Menurut pendapat saya, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah itu perlu landasan hukum. Pertanyaannya, siapa yang verwenang mengeluarkannya, baik dalam bentuk surat keputusan atau Perda tentang pembinaan dan pengembangan bahasa daerah itu? Apakah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, atau gubernur? Bagaimana menurut pendapat panelis tentang hal ini?

2. **Pertanyaan:** Abdul Wahab (Universitas Negeri Malang)

Satu sikap yang harus dipertahankan terhadap bahasa daerah ialah bahwa bahasa daerah meskipun kecil harus tetap dipertahankan. Saya mempunyai pandangan lain, yaitu habitat dari penutur bahasa daerah itu yang harus perlu juga dipertahankan. Kalau habitat penutur itu rusak atau ekologinya rusak oleh karena eksplorasi tak terbatas, pertambangan yang merusak alam sehingga habitat rusak dan penuturnya rusak. Ini menyangkut adanya peranan otonomi daerah dalam mengaturnya, jangan-jangan otonomi daerah malah merusak habitat penutur bahasa daerah itu. Sekarang, peranan bahasa daerah dalam budaya Indonesia kita akui bisa mengungkapkan perasaan, etika,

estetika, dan nilai-nilai itu dengan perspektif budaya dari bahasa daerah itu. Sebagai contoh, sekarang ada kekeliruan yang sudah menjalar, seperti apa yang diungkapkan oleh Clifford Geertz, yang buku-bukunya banyak dipakai sebagai “Bibel” oleh para peneliti bahasa yang berkaitan dengan sosiologi, di dalam pembukaan bukunya saja sudah salah, yaitu *nyuwun pangestu dhateng sedaya kalepatan kula*. Bagaimana orang bisa memberikan restu terhadap suatu kesalahan. Jadi, di sini ada perspektif budaya yang salah. Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan tanggapan dari para panelis mengenai bagaimana otonomi daerah itu apakah tidak merusak habitat dari penutur bahasa daerah itu?

3. **Pertanyaan:** Turiyo Ragil Putra (Sastrawan Jawa Tengah)

Ada upaya yang bisa ditempuh agar bahasa dan sastra daerah tidak punah. Yang pertama, adanya kebanggaan diri terhadap bahasa daerah, tetapi bukan berarti tidak mencintai bahasa Indonesia. Yang kedua, penanaman penghargaan terhadap bahasa dan sastra daerah sebagai kekakayaan historis bahkan religius, seperti penghargaan generasi muda terhadap lagu *Ilir-Ilir* di Jawa. Yang ketiga, saya ingin agar peran balai bahasa perlu ditingkatkan. Balai bahasa perlu berperan dalam mempertahankan bahasa dan sastra daerah dan tidak hanya bahasa dan sastra Indonesia. Sampai seberapa jauh peranan balai-balai bahasa dan Pusat Bahasa dalam peranannya mempertahankan bahasa dan sastra daerah?

Jawaban: Wahyu Najib

Untuk menjawab pertanyaan Pak Mansoer Pateda dari Gorontalo, kami sudah menyampaikan bahwa kewenangan tentang bahasa daerah ini sebenarnya sudah melekat di daerah. Masalahnya, kenapa dari daerah itu sendiri itu tidak menyiapkan, misalnya membentuk lembaga bahasa itu. Yang penting dalam hal ini adalah tugas dan fungsi pembinaan bahasa daerah itu bisa melekat atau ikut pada satu dinas atau biro, barangkali, meskipun dana dari APBD belum ada sehingga tidak ada kekhawatiran kalau bahasa daerah dan bahasa Indonesia di daerah itu tidak dibina dengan baik karena kita terus terang dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tampaknya ada *down ...* terhadap dinas-dinas yang ada di daerah. Tentunya, di kabupaten-kabupaten yang tadinya banyak dinas, sekarang, dengan adanya PP Nomor 8 itu hanya menjadi maksimal 14 dinas dan di provinsi yang

tadinya lebih dari 10 dinas menjadi hanya 8 dinas. Ini memerlukan suatu kecermatan kalau memang daerah itu sangat antusias dan berkehendak untuk membina bahasa daerah dengan baik, tetapi mestinya pembinaan bahasa itu harus ada yang melaksanakan kewenangan tersebut di daerah. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22, sesuai dengan PP Nomor 25, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/67/2002, jelas-jelas kewenangan pembinaan itu melekat di pemerintahan provinsi atau pemerintahan kota dan kabupaten. Oleh karena itu, tentunya pemerintah di daerah dengan adanya kongres ini tergugah untuk aktif dalam pembinaan bahasa dan sastra daerah. Barangkali nanti, perwakilan dari pemerintah di kabupaten/kota dan provinsi perlu mengingatkan kembali kepada gubernur, bupati, atau walikota supaya masalah bahasa ini yang kewenangannya sudah melekat pada pemerintah di daerah ada bidang yang melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan bahasa.

Jawaban: Benyamin Lakitan

Upaya pelestarian bahasa daerah akan ditentukan oleh penuturnya. Bahasa daerah tak akan lestari melalui produk hukum seperti perda, Undang-undang atau kepres atau melalui kurikulum muatan lokal. Pelestarian bahasa daerah harus sampai pada hal yang fundamental, yaitu rasa kebanggaan terhadap bahasa daerah.

Jawaban: Robert Sibarani

Pelestarian bahasa daerah tidak hanya penutur tetapi semua komponen dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalam lingkungan masyarakatnya. Keterkaitan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebenarnya sudah dekat. Untuk itu, penggunaan bahasa daerah di tempat umum tidak dilarang.

4. **Pertanyaan:** Prof. K.M.A. M. Usop (FKIP Universitas Palangkaraya)

Sebenarnya kebudayaan Indonesia sudah ada mozaik-mozaik dari budaya daerah. Kebudayaan daerah dan kebudayaan Indonesia sudah saling menunjang. Bahasa daerah memiliki nilai yang dapat membantu dalam pengembangan bahasa Indonesia.

5. **Pertanyaan:** Aminulatif (Balai Bahasa Palembang)

Pemakaian bahasa daerah oleh para penuturnya adalah pelestarian terhadap bahasa daerah itu sendiri, seperti pemakaian bahasa daerah di dalam upacara-upacara adat perlu dilestarikan karena memiliki nilai-nilai yang khas, termasuk nilai religi.

6. **Pertanyaan:** Solihin (MGMP Bahasa Indonesia, Lebak, Banten)

Dalam situasi pembicaraan, ketua salah satu kelompok berbicara dalam bahasa daerah dikhawatirkan ada orang yang tidak mengerti bahasa daerah tersebut akan tersinggung dan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

7. **Saran:** Riris K. Toha Sarumpaet (Universitas Indonesia)

Bahasa dan sastra daerah perlu dipertahankan dan dilestarikan dengan secara aktif memanfaatkan dan menghidupkannya. Perlu pendidikan untuk menghargai bahasa dan sastra daerah, dengan memanfaatkannya di rumah, misalnya, sekolah *harus* kembali mengajarkan bahasa dan sastra daerah di samping bahasa asing. Untuk menghindari disintegrasi, diwajibkan siswa juga mempelajari bahasa dan sastra daerah yang bukan bahasa dan sastra daerah aslinya.

8. **Saran:** G. Sukadi (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta)

Peran bahasa Indonesia memperkuat ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi. Saya berpendapat bahwa ibarat rumah, *tidak ada* rumah yang kukuh dapat bertahan *hanya ditopang* oleh *tiang utama (saka guru)*, tetapi oleh *semua tiang* baik *tiang utama* maupun *tiang pendukung*. Bahasa daerah mempunyai peran sendiri mendukung peran bahasa Indonesia dalam menegakkan budaya bangsa bahasa daerah perlu dilestarikan.

Pemandu:

Ada pertanyaan pokok di dalam tema panel kita, yaitu peranan bahasa dan sastra daerah dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa, apakah bahasa dan sastra daerah dalam ketahanan budaya bangsa itu

mempersatukan atau justru memperbedakan atau kalau tidak memecahkan.

Jawaban

Betul bahwa bahasa Indonesia sudah kita akui dapat mempersatukan bangsa kita yang terdiri atas berbagai suku, tetapi di sisi lain dengan diperkenalkannya bahasa Indonesia kepada penutur bahasa daerah ada persoalan yang perlu diperhatikan.

Topik 3:

**BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI NEGARA
DAN KEGIATAN KENEGARAAN**

**BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI NEGARA
DAN KEGIATAN KENEGARAAN**

Anwar Suprijadi

Kepala Lembaga Administrasi Negara

"Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa."

(Putusan KBI VII 1998)

Pendahuluan

Sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Bahasa Indonesia kini bukan hanya berkedudukan sebagai bahasa persatuan melainkan juga sebagai bahasa negara, sebagai sarana komunikasi resmi, baik lisan maupun tulisan, dalam administrasi negara dan kegiatan kenegaraan.

Kesadaran berbahasa Indonesia yang baik, benar, demokratis, dan lugas di kalangan para pejabat, aparatur pemerintah, dan tokoh anutan masyarakat akan mendorong perkembangan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang mencerminkan jati diri dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi negara dan kegiatan kenegaraan perlu dibina dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memperkuat ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi. Tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi sekarang ini justru terletak pada kemauan dan kemampuan para penutur bahasa di kalangan aparatur dan pejabat pemerintahan dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar, demokratis, dan lugas.

Pembahasan mengenai bahasa seringkali dikaitkan dengan budaya karena bahasa memang lahir dalam suatu budaya (*culture*) tertentu. Temuan teoretis yang penting dalam hal bahasa adalah sebagaimana disampaikan Saussure, (Littlejohn, 1996: 340) yang membedakan antara bahasa formal

(*langue*) dan penggunaan bahasa aktual dalam komunikasi (*parole*). Dua istilah ini disamakan dengan bahasa dan percakapan. Bahasa (*langue*) adalah suatu sistem formal yang dapat dianalisis terpisah dari penggunaan aktualnya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, percakapan (*parole*) adalah penggunaan bahasa untuk menyelesaikan berbagai tujuan.

Kedua jenis bahasa tersebut (*langue* dan *parole*) dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Bahasa yang berbentuk tulisan dan lisan tersebut juga terbagi ke dalam dua kelompok: *formal* dan *nonformal*. Peraturan perundang-undangan atau naskah-naskah kebijakan biasanya menggunakan bahasa tertulis-formal, sedangkan surat/nota dinas untuk teman sejawat, misalnya, lebih banyak menggunakan bahasa tulisan-nonformal. Pada penggunaan bahasa lisan-formal, dapat dilihat pada percakapan antara bawahan dan atasan atau orang yang dihormati, sedangkan percakapan antarteman sejawat atau percakapan antara petugas layanan dan yang dilayani biasanya menggunakan bahasa lisan-nonformal.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII tanggal 14--17 Oktober 2003 ini, salah satu topik yang akan dibahas adalah "*Bahasa Indonesia sebagai Sarana Administrasi Negara dan Kegiatan Kenegaraan*". Dengan judul yang sama dengan topik tersebut, makalah ini akan mencoba membahas dan memberikan jawaban terhadap tiga pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu:

- a. Bagaimana mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi negara?
- b. Bagaimana peran instansi pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia?
- c. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan instansi pemerintah?

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara

Penyelenggaraan administrasi negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari lebih dikenal dengan istilah pelayanan umum. Hal itu sesuai dengan kenyataan interaksi antara masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah pada umumnya dan khususnya di daerah, yang pada umumnya berhubungan dengan pemberian layanan atas berbagai kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat oleh lembaga-lembaga pemerintah yang bersangkutan. Masyarakat mengenal administrasi negara dari berbagai pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, mulai dari pembuatan akta kelahiran, kartu penduduk, surat izin mengemudi, surat keterangan nikah, hingga akta kematian. Selain itu, juga melalui penyelenggaraan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan, pembuatan

dan pemeliharaan jalan dan prasarana lingkungan permukiman, penyediaan air bersih, listrik, pelayanan telepon, dan sebagainya.

Penyelenggaraan administrasi negara secara konseptual sesungguhnya lebih luas daripada pelayanan umum oleh Pemerintah kepada masyarakat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, jilid I (1991: 1) mengartikan administrasi negara sebagai berikut: *"...keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi terciptanya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara Republik Indonesia seperti ditetapkan dalam UUD 1945."*

Dengan pengertian seperti itu, penyelenggaraan administrasi negara mencakup segala jenis kebijakan dan tindakan lembaga-lembaga pemerintah, para pejabat pemerintah, dan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang diarahkan untuk memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak.

Karena penyelenggaraan administrasi negara melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda, khususnya ragam bahasa daerah, penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi administrasi negara menjadi penting. Dalam UUD 1945 Pasal 36 ditetapkan bahwa: "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia." Artinya, bahasa Indonesia dengan demikian merupakan bahasa resmi yang digunakan sebagai sarana komunikasi, baik lisan maupun tulisan dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan. Hal ini sangat membantu aparatur negara dalam berinteraksi dengan masyarakat dengan berbagai ragam bahasa daerah masing-masing.

Namun, dalam era reformasi terdapat kecenderungan penggunaan bahasa asing (terutama) bahasa Inggris dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan. Sebagai contoh penggunaan kata/istilah *stakeholders* untuk menyebut pihak-pihak yang terkait dengan suatu pelayanan publik. Memang hal ini bukan merupakan sesuatu yang baru karena pada masa orde lama dan awal orde baru, proses penyelenggaraan administrasi negara juga dipengaruhi oleh bahasa asing yakni bahasa Belanda. Hal ini, terutama terlihat pada peraturan perundangan atau kebijakan bahkan dalam pembicaraan sehari-hari di antara para pejabat pemerintahan di masa itu.

Dalam perkembangannya, administrasi negara sering tidak hindarkan dari penggunaan kata/istilah asing yang belum ada padanannya sehingga terkadang digunakan kata/istilah asingnya karena jika diterjemahkan justru akan terasa janggal. Contohnya penggunaan kata *governance*. Kata itu kadang diterjemahkan dengan pengelolaan, pemerintahan, dan pemerintahan.

Adapun untuk kata-kata asing yang sudah ada padanannya maka yang digunakan dalam penyelenggaraan administrasi negara atau pelayanan publik adalah padanan kata tersebut, misalnya *partisipasi* yang berasal dari kata *participation* dan administrasi berasal dari kata *administration*. Proses pengindonesiaan kata/istilah asing tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang tertuang dalam buku Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Yang menjadi permasalahan adalah penggunaan kata/istilah asing tersebut kadang-kadang dilakukan tidak pada tempatnya. Kata *partisipasi* mungkin akan lebih tepat digunakan dalam bahasa formal dalam laporan, naskah pidato kenegaraan, atau hal lain yang bersifat resmi, terlebih penggunaan kata *participation* akan lebih cocok untuk pembicaraan atau naskah resmi. Namun, untuk menghadapi masyarakat dalam melakukan pelayanan umum sehari-hari, penggunaan kata *partisipasi* apalagi *participation* kurang tepat dan karena lebih tepat menggunakan padanan katanya, yaitu 'ikut serta' atau 'peran serta'.

Peminjaman bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, pada umumnya dilatarbelakangi keinginan untuk (1) mengisi kekosongan kosakata bahasa Indonesia, (2) memberikan kecukupan arti semantis, (3) memenuhi keperluan penggunaan kata secara praktis, (4) mengisi register tertentu, (5) memungkinkan kata asing masuk ke sistem bahasa Indonesia. Untuk itu, penggunaan kata/istilah asing yang telah ada padanan katanya-apalagi diucapkan atau dituliskan dengan cara yang kurang tepat justru akan mengurangi mutu penggunaan bahasa tersebut.

Di samping pengindonesiaan kata/istilah asing, dalam EYD juga diatur pembentukan frasa, kalimat, singkatan (akronim), persamaan (sinonim), dan sebagainya. Kesemuanya itu memberikan pedoman atau panduan kepada kita untuk melakukan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Namun, dalam praktiknya, memang belum semua aturan yang tertuang dalam EYD dilaksanakan. Sebagai contoh, akronim yang digunakan dalam instansi pemerintah, misalnya Depdagri (Departemen Dalam Negeri), Setda (Sekretariat Daerah), dan Sekda (Sekretaris Daerah).

Jika kita mengikuti pedoman EYD, akronimnya bukan 'Depdagri', tetapi 'DDN', yakni huruf pertamanya saja; 'Sekda untuk sekretaris daerah, sebagaimana singkatan Seswapres (Sekretaris Wakil Presiden) dan juga Sesneg (Sekretaris Negara), dan seterusnya. Namun, hal tersebut terasa dibenarkan karena telah disetujui oleh semua pihak. Padahal, jika ditinjau dari pedoman EYD, penyingkatan tersebut kurang tepat.

Permasalahan lainnya adalah bahwa penggunaan bahasa Indonesia sering dipengaruhi oleh budaya feodal, yang mengakibatkan perbedaan penggunaan bahasa secara berbeda untuk seseorang yang mempunyai

pangkat/derajat tertentu. Hal ini kemudian biasanya melibatkan bahasa daerah tertentu untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang/pihak yang diajak berbicara, contohnya *dengan segala hormat kami haturkan (Jw)*.... Hal itu, menunjukkan budaya feodal yang dilakukan untuk menghormati orang yang lebih tinggi derajat atau kedudukannya. Hal tersebut kurang mendukung penggunaan bahasa Indonesia, terutama di lingkungan instansi pemerintah karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang demokratis dan tidak mengenal tingkatan atau *unda-usuk* seperti dalam bahasa Jawa/Sunda.

Selain itu, salah satu permasalahan penggunaan bahasa Indonesia adalah karena adanya pengaruh mode, yakni orang menggunakan istilah-istilah atau kata-kata asing agar ia kelihatan pandai dan memiliki wawasan luas. Misalnya: "Maaf, pendapat kita tidak *significant* sehingga permasalahan ini perlu dibahas pada pertemuan berikutnya." Penggunaan kata *significant* di sini dimaksudkan untuk menggantikan kata *sejalan/selaras*. Namun, kemudian malah menjadi tidak kena karena kata *significant* berarti 'kesesuaian yang didukung oleh data-data statistik tertentu.' Hal itu tidak terlalu bermasalah jika seseorang tadi berbicara pada forum ilmiah dan dalam konteks yang tepat di hadapan para cendekiawan bukan masyarakat awam.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi negara dan kegiatan kenegaraan dapat dikatakan belum baik dan masih perlu dikembangkan. Belum terciptanya mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi dan kegiatan kenegaraan juga disebabkan oleh adanya penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah yang tidak tepat, terutama pada kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti pidato pejabat negara, dan penerimaan tamu negara.

Peran Instansi Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Bahasa Indonesia

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dalam rangka meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai sarana administrasi negara dan kegiatan kenegaraan. Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia telah dimulai sejak zaman orde baru. Ketika itu, setiap melakukan kegiatan kenegaraan, apakah dalam memberikan sambutan resmi ataupun kegiatan menerima tamu negara, mantan Presiden Soeharto selalu menggunakan bahasa Indonesia.

Selanjutnya, menurut informasi yang diperoleh LAN, upaya peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan instansi pemerintah telah dilakukan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional melalui berbagai kegiatan, baik kerja sama maupun penyuluhan yang melibatkan tidak hanya instansi Pemerintah, baik pusat maupun

daerah tetapi juga swasta, masyarakat dan kalangan perguruan tinggi. Kerja sama dengan instansi Pemerintah Pusat, antara lain telah dilakukan dengan Departemen Penerangan (TVRI dan RRI), Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Departemen Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi, Perusahaan Umum Listrik Negara, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu kerja sama juga dilakukan dengan seluruh pemerintah daerah provinsi, yang waktu itu masih mencakup kerja sama dengan 26 propinsi se-Indonesia. Sementara itu, kerja sama dengan pihak swasta dilakukan dengan PT Elnusa Yellow Pages dan berbagai perusahaan swasta yang tergabung dalam REI (Real Estate Indonesia). Sementara itu, kerja sama dengan kalangan perguruan tinggi, antara lain dengan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Adapun kerja sama dengan masyarakat dilakukan secara individu/perorangan dan kelompok, seperti Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dan organisasi profesi kebahasaan dan kesastraan.

Selain itu, upaya-upaya peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia juga dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa melalui berbagai kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan langsung adalah penyuluhan yang disampaikan secara tatap muka dengan masyarakat pesuluh secara langsung dalam berbagai kesempatan, baik di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa maupun di instansi lain. Penyuluhan langsung dilakukan berdasarkan permintaan dan kunjungan serta penyuluhan dilakukan berdasarkan kerja sama, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan instansi lain, sedangkan penyuluhan tak langsung adalah penyuluhan yang disampaikan melalui media, seperti surat, telepon, dan terbitan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, LAN menyambut baik upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan mutu penggunaan bahasa, khususnya dalam lingkungan instansi pemerintah. LAN sendiri sampai saat ini belum secara optimal melakukan upaya-upaya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan. Untuk itu, forum ini merupakan momentum yang sangat baik bagi para penyelenggara administrasi pada umumnya dan LAN pada khususnya untuk ikut serta dalam mewujudkan mutu penggunaan bahasa Indonesia yang diinginkan. Sehubungan dengan hal inilah, kiranya perlu disusun strategi yang terencana dan terarah dengan baik untuk menciptakan atau mewujudkan mutu penggunaan bahasa Indonesia di kalangan instansi pemerintah.

Strategi Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia

Menurut pandangan kami, ada beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana administrasi negara dan kegiatan kenegaraan, antara lain sebagai berikut.

Pertama, melanjutkan berbagai upaya kerja sama serta penyuluhan yang telah dirintis pada masa-masa yang lalu, tetapi dengan terus memper-timbangkan perkembangan strategis yang berlangsung dari waktu ke waktu. Salah satu perkembangan strategis yang dimaksud adalah terbitnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Perubahan yang terjadi adalah bahwa dengan UU tersebut, pemerintah kabupaten dan kota saat ini memiliki kewenangan yang sangat besar dalam melaksanakan administrasi pemerintah daerahnya, yang pada era sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Oleh karena itu, arah kerja sama dalam peningkatan mutu bahasa Indonesia juga harus berubah, yaitu tidak hanya melakukan kerja sama dengan pemerintah propinsi tetapi juga dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Selain menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, juga perlu dipertimbangkan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat lainnya. Selain yang telah disebutkan di atas, misalnya menjalin kerja sama dengan Sekretariat Negara, Kantor MENPAN, LAN, dan BKN. Hal itu sangat penting karena instansi-instansi tersebut bertanggung jawab pada penyelenggaraan administrasi negara. Khusus untuk LAN, tugas pokok dan fungsinya adalah pada pengembangan sistem administrasi negara dan pendidikan dan pelatihan PNS. Untuk itu, kerja sama Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional dengan LAN akan sangat efektif dalam meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana administrasi negara dan kegiatan kenegaraan.

Kedua, dalam rekrutmen pegawai, baik Pusat maupun daerah, perlu dipertimbangkan masuknya sarjana bahasa atau sarjana lain atau calon pegawai yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang cukup baik. Hal ini sangat penting mengingat bahwa setiap instansi pemerintah memerlukan pegawai yang memiliki kemampuan memadai dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara itu, untuk keperluan penyusunan pelaporan, penyusunan naskah pidato dan sebagainya dapat dipenuhi melalui diklat-diklat teknis tentang penggunaan bahasa dalam berbagai keperluan tersebut.

Ketiga, perlu dilakukan kegiatan penelitian atau kajian untuk meng-identifikasi, menganalisis, dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang selama ini dirasakan menghambat pencapaian mutu penggunaan bahasa Indonesia. Dari penelitian atau kajian tersebut (yang dapat dilakukan

melalui kerja sama dengan berbagai pihak) diharapkan dapat dihasilkan saran-rekomendasi yang dapat diterapkan bagi perbaikan langkah/upaya untuk mencapai mutu yang diharapkan.

Keempat, perlu upaya nyata untuk memasukkan kurikulum penggunaan bahasa Indonesia dalam diklat-diklat struktural yang berada di bawah koordinasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat), misalnya Diklatpim Tingkat IV, III, II, dan I yang berada di bawah koordinasi Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, jika memungkinkan, dapat dilaksanakan diklat teknis tentang penggunaan bahasa Indonesia atau paling tidak dapat dimasukkan sebagai salah satu mata ajar dalam diklat teknis maupun fungsional tersebut.

Kelima, perlunya sosialisasi secara lebih intensif produk-produk yang dihasilkan oleh Pusat Bahasa, Depdiknas, terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu bahasa Indonesia di lingkungan instansi pemerintah. Kegiatan itu harus didukung pula oleh sarana teknologi tinggi (*high technology*), seperti penggunaan teknologi komputer-informatika, dan internet.

Keenam, menggalang komitmen dan menciptakan kesadaran bersama dari seluruh instansi pemerintah untuk berbahasa bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi negara dan kegiatan kenegaraan akan dapat diwujudkan.

Penutup

Penggunaan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan memiliki legalitas yang sangat kuat karena dijamin dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD 1945. Namun sangat disayangkan, kekuatan legal formal tersebut ternyata belum menjadi insprasi bagi para penyelenggara administrasi negara dan kegiatan kenegaraan untuk melaksanakan amanat tersebut.

Dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia banyak mengalami permasalahan baik karena pengaruh bahasa asing maupun pengaruh berbagai bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Akibatnya, mutu penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana administrasi negara dan kegiatan kenegaraan belum sesuai dengan harapan, yakni sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku-salah satunya adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).

Sehubungan dengan hal tersebut, ada berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkup instansi pemerintah. Namun, upaya-upaya tersebut perlu terus dilaksanakan dan

ditingkatkan seiring dengan perkembangan strategis yang terjadi dari waktu ke waktu. Salah satu perkembangan strategis yang perlu menjadi pertimbangan adalah terbitnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam kaitan ini kami menawarkan enam strategi bagi peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan. Namun, pada intinya mutu penggunaan bahasa Indonesia tersebut terletak pada komitmen dan kesadaran bersama para penyelenggara administrasi negara dan kegiatan kenegaraan, yang tentu saja didukung oleh kemampuan yang cukup memadai.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEGIATAN KENEGARAAN

Daulat P. Tampubolon

Lembaga Konsultasi Pendidikan Bermutu Indonesia
(LKPMI) Medan

Pendahuluan

Tanggal 28 Oktober 1928 adalah suatu tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena tanggal itu adalah hari lahirnya tiga unsur dasar eksistensi bangsa ini, yaitu kebangsaan Indonesia yang satu, tanah air Indonesia yang satu, dan bahasa Indonesia (BI) sebagai bahasa kebangsaan. Ketiganya dinyatakan dalam bentuk Sumpah Pemuda oleh para pemuda yang mewakili seluruh daerah Indonesia dalam Kongres Pemuda pada tanggal itu. Dengan demikian, pada tanggal 28 Oktober 2003 mendatang ini kita akan memperingati Ulang Tahun Intan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia sudah tiga perempat abad (75 tahun) sebagai bahasa kebangsaan dan 58 tahun sebagai bahasa negara. Oleh karena itu, sudah pantas Kongres Bahasa Indonesia VIII ini diadakan secara istimewa.

Keistimewaan Kongres Bahasa Indonesia VIII ini hendaknya tidak terutama terletak pada ritus, tetapi pada substansi. Bukan seremoni yang utama, melainkan evaluasi diri (*self-assessment*). Bagaimana mutu penggunaan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa kebangsaan maupun bahasa negara selama ini? Pertanyaan inilah yang perlu dijawab dalam evaluasi diri. Jawaban pertanyaan ini hendaklah dijadikan dasar untuk peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia di masa selanjutnya.

Dalam kaitan evaluasi diri dimaksud, kiranya sudah tepat **Bahasa Indonesia sebagai Sarana Administrasi Negara dan Kegiatan Kenegaraan** menjadi salah satu topik diskusi panel dalam kongres ini, sebagaimana ditetapkan oleh Panitia. Ketepatan pilihan itu diperkuat lagi dengan tiga pertanyaan pokok yang perlu dijawab berkenaan dengan topik itu, yaitu (1) Bagaimana mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan? (2) Bagaimana peran instansi pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia? (3) Strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan instansi pemerintah?

Dalam makalah ini penulis akan memusatkan pembahasan pada ketiga pertanyaan di atas, setelah lebih dahulu mengemukakan beberapa pandangan teoretis sebagai dasar. Karena keterbatasan waktu, dan luasnya

cakupan topik, penulis tidak berkesempatan melakukan penelitian khusus untuk makalah ini. Pengalaman dan pengamatan penulis sehari-hari adalah sumber data utama untuk pembahasan.

Penggunaan Bahasa dan Mutu Penggunaan Bahasa

1) Penggunaan Bahasa

Bahasa dapat didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh organ-organ artikulasi manusia yang bersifat arbitrari dan konvensional, serta dapat diterjemahkan menjadi lambang tulisan, dan yang dipergunakan sebagai alat berpikir dan merasa, memahami pikiran dan perasaan, serta menyatakan pikiran dan perasaan dalam masyarakat (Tampubolon, 1994; 1996). Dengan demikian, bahasa tidak terlepas dari pikiran dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori kecerdasan emosional (KE) dan kecerdasan intelektual (KI), dapat juga dikatakan bahwa bahasa, KE, dan KI manusia saling mempengaruhi (Goleman, 1997; Shapiro, 1997; Segal, 1997; Patton, 1997).

Penggunaan bahasa (*language usage*) dapat diartikan sebagai cara-cara mempergunakan unsur dan kaidah bahasa sesuai dengan konteks komunikasi dalam masyarakat. Dalam linguistik, penggunaan bahasa berada dalam daerah (*domain*) pragmatik, yang mencakup pragmatolinguistik dan sosiopragmatik. Dalam sosiopragmatik umumnya ada lima faktor utama yang selalu dipertimbangkan dalam penggunaan bahasa. Dalam bahasa Inggris, kelima faktor itu disebut "*The 5 Wh's*", yaitu: *who* (siapa pembicara), *what* (apa isi pembicaraan), *whom* (kepada siapa atau dengan siapa berbicara), *when* (kapan berbicara), dan *where* (di mana berbicara). Walaupun kelima faktor itu dikaitkan hanya dengan bahasa lisan dalam penjelasan di atas, kelimanya berlaku juga pada bahasa tertulis. Pemilihan unsur-unsur bahasa, gaya bahasa, tindak tutur (*speech act*), dan penggunaannya dengan kaidah bahasa dilakukan dengan memperhatikan kelima faktor itu. Kelimanya adalah faktor-faktor yang membentuk konteks komunikasi. Pada dasarnya, kelima faktor itulah yang menyebabkan timbulnya dan berkembangnya ragam-ragam bahasa.

Salah satu ragam bahasa yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah bahasa politik. Lasswell *et al* (1949 : 8) mendefinisikan bahasa politik dengan singkat, tetapi jelas: "*The language of politics is the language of power. Power is decision-making*". (Bahasa politik adalah bahasa kekuasaan. Kekuasaan adalah pengambilan keputusan). Selanjutnya, dikatakan bahwa bahasa politik mencakup, antara lain, slogan politik, hukum dan perundang-undangan, sumpah atau janji jabatan, dan berbagai wacana politik serta administrasi negara. Dengan demikian, apabila

kita berbicara tentang bahasa Indonesia sebagai sarana administrasi negara dan kegiatan kenegaraan, sebagaimana topik diskusi panel ini, kita akan membicarakan penggunaan BI sebagai bahasa politik. Dalam kaitannya dengan kelima faktor tersebut terdahulu, dalam bahasa politik, yang merupakan *what* ialah berkenaan dengan kekuasaan negara dan pengambilan keputusan dengan berbagai aspek kenegaraan terkait dan yang merupakan *who* dan *whom* ialah pihak pemegang kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan pemberi kekuasaan (rakyat) secara bergiliran.

Pada pendahuluan telah disinggung tentang bahasa kebangsaan dan bahasa negara. Samakah makna kedua istilah ini dengan bahasa politik? Pada dasarnya, bahasa kebangsaan dan bahasa negara adalah sama. Namun, dalam konteks Indonesia terdapat perbedaan dari segi historis. Bahasa kebangsaan, dalam hal ini BI, jauh lebih dahulu ada (28 Oktober 1928) daripada bahasa negara (17 Agustus 1945). Dengan kata lain, timbulnya bahasa kebangsaan, sejalan dengan mantapnya konsep kebangsaan, sedangkan bahasa negara ada setelah adanya undang-undang dasar bahasa bersangkutan telah diundangkan. Perbedaan antara bahasa negara dan bahasa politik terutama terletak pada faktor *what*. Bahasa negara mempunyai *what* yang lebih luas daripada bahasa politik. Dapat juga dikatakan bahwa bahasa politik adalah bagian dari bahasa negara.

Perkembangan dan ciri-ciri bahasa politik umumnya bergantung pada kecenderungan atau dominasi ideologi tokoh-tokoh politisi yang berkuasa dalam setiap zaman atau periode. Dalam konteks perkembangan di Indonesia sejak permulaan kemerdekaan, kita sudah mengalami tiga periode politik penting, yaitu: Periode Soekarno (disebut juga Periode Orde Lama), Periode Suharto (disebut juga Periode Orde Baru), dan Periode Reformasi (setelah jatuhnya Suharto). Bahasa politik dalam tiap-tiap periode itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda.

2) Mutu Penggunaan Bahasa

Mutu dapat diartikan sebagai paduan atribut-atribut produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (Rinehart, 1993; Tampubolon, 1999:9; 2001:108). Dalam hal bahasa, produk ialah bahasa (ragam bahasa) yang digunakan oleh seseorang atau lembaga (*institution*) dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Pelanggan ialah *whom*, yaitu, pendengar dan pembaca. Dalam hubungan itu perlu diperhatikan bahwa pelanggan, dalam hal ini, terutama pendengar, dapat juga memproduksi bahasa (pembicara) sendiri. Hal itu terjadi dalam apa yang disebut oleh Vigotsky (1981) sebagai *inner speech* (berbicara pada diri sendiri terutama dalam hati). Dengan demikian, mutu penggunaan bahasa dapat diartikan sebagai paduan ciri-ciri

bahasa yang dipergunakan yang sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pembaca.

Apa ciri-ciri bahasa yang dipergunakan, yang sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pembaca? Kebutuhan di sini mencakup terutama ide atau makna yang terkandung dalam bahasa itu, gaya, dan tingkat kesulitan memahami bahasa itu. Dalam menentukan ciri-ciri dimaksud, kebutuhan tersebut yang terutama harus diperhatikan dan ini tentu juga berkaitan erat dengan *The 5 Wh's* yang dikemukakan terdahulu. Berdasarkan semua hal tersebut, secara umum ciri-ciri pokok bahasa yang dipergunakan adalah yang berikut.

Relevansi Semantik

Secara esensial, relevansi semantik ialah kesesuaian dan signifikansi ide atau makna yang terkandung dalam bahasa yang digunakan. Apakah ide (informasi) itu sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pembaca? Apakah ide itu perlu baginya? Seberapa signifikan ide itu? Dalam hubungan itu, sudah tentu tercakup pertimbangan usia, tingkat pendidikan, latar belakang, dan bidang kehidupan pendengar atau pembaca bersangkutan.

Faktor-faktor lain yang terimplikasi dalam relevansi semantik ialah apa yang disebut gejala-gejala kematian bahasa (Tampubolon, 1999), terutama represi linguistik dan monopoli semantik. Di samping itu, juga terimplikasi faktor-faktor positif seperti situasi menang-menang, demokrasi, dan keseimbangan KE dan KI. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa relevansi semantik merupakan ciri utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan mutu penggunaan bahasa.

Akuntabilitas Gramatikal

Akuntabilitas gramatikal pada dasarnya adalah ketepatan penggunaan kaidah-kaidah tata bahasa, termasuk kaidah-kaidah pengujaran dalam bahasa lisan, dan kaidah-kaidah ejaan dalam bahasa tertulis untuk menyatakan ide. Pertanyaan pokok ialah Apakah bahasa yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan (terpercaya) dari segi tata bahasa? Karena tata bahasa mengandung unsur-unsur logika seperti proposisi (subjek-predikat-objek atau argumen predikat), ketunggalan-kejamaan, dan diterangkan—menerangkan maka akuntabilitas gramatikal juga mengimplikasikan logika-logika bahasa.

Berkaitan dengan logika bahasa, khususnya dalam bahasa tulis, ada dua jenis struktur logika yang perlu diperhatikan, yaitu struktur deduktif, dan struktur induktif. Keduanya didasarkan pada dua cara (metode) berpikir, yaitu cara berpikir deduktif dan induktif. Cara berpikir deduktif ialah prosedur berpikir yang mulai dari hal yang umum dan mendasar,

diikuti oleh uraian atau penjelasan. Sebaliknya, cara berpikir induktif adalah prosedur berpikir yang dimulai dengan uraian atau deskripsi dan diakhiri dengan simpulan (hal yang umum dan mendasar). Kedua jenis struktur logika tersebut perlu diperhatikan dalam bahasa tulis, khususnya dalam bentuk paragraf. Ada paragraf yang berstruktur deduktif dan ada yang berstruktur induktif jika penulis mempergunakan logika bahasa yang benar. Perlu diperhatikan bahwa logika bahasa berkaitan erat dengan pengendalian rasio (KI).

Efisiensi Leksikal

Efisiensi leksikal ialah ketepatan seleksi dan kehematan penggunaan kata-kata. Pertanyaan pokok dalam hal ini ialah kata atau kata-kata yang paling tepat, tetapi tidak boros, digunakan untuk menyatakan ide bersangkutan agar cepat dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca? Apakah perlu dengan sebanyak mungkin kata? Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan bahwa dalam era informasi dan globalisasi yang sedang dan akan terus berkembang, kecenderungan untuk simplifikasi dan spesialisasi bahasa juga berkembang (Tampubolon, 1996). Kalau dapat dinyatakan dengan satu kata, mengapa harus dengan banyak kata? Inilah kecenderungan yang semakin berkembang, terlebih-lebih di bawah pengaruh teknologi komputer. Dalam arti simplifikasi juga termasuk struktur ejaan.

Efektivitas Ekspresi

Efektivitas ekspresi ialah ketepatan penggunaan gaya bahasa, tindak tutur (*speech act*), dan intonasi (lagu suara), serta bahasa tubuh (*body language*) untuk menyatakan ide bersangkutan sehingga dengan cepat dan tepat memengaruhi pikiran dan perasaan pendengar atau pembaca. Intonasi dan bahasa tubuh tentu hanya dipergunakan dalam bahasa lisan. Gaya bahasa, tindak tutur, intonasi, dan bahasa tubuh manakah yang paling tepat dipergunakan agar ide bersangkutan mudah dipahami dan dirasakan oleh pendengar atau pembaca? Dengan demikian, efektivitas ekspresi mengimplikasikan adanya pengendalian rasio (KI) dan emosi (KE).

Keempat ciri pokok di atas dapat juga disebut ciri-ciri (atribut-atribut) mutu penggunaan bahasa. Ciri-ciri itu dapat dipergunakan sebagai tolok ukur, atau setidaknya sebagai indikator mutu penggunaan bahasa. Paduan keempat ciri itu, dengan tingkat tertentu, ada pada setiap bahasa (ragam bahasa) yang dipergunakan. Jika paduan keempat ciri itu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pembaca, bahasa yang dipergunakan dikatakan bermutu.

Akhirnya, perlu digarisbawahi betapa pentingnya pemahaman yang tepat tentang konsep “pelanggan” dalam berkomunikasi dengan bahasa.

Pelanggan pada dasarnya adalah pihak yang dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Pada kesesuaian itulah terdapat paduan keempat ciri di atas. Sering terjadi bahwa pembicara tidak memperhatikan kebutuhan pendengarannya (pelanggannya) sehingga pendengarnya bosan. Penulis juga sering demikian sehingga pembacanya (pelanggannya) bosan, bahkan tak mau membaca tulisan itu. Penonjolan diri dalam berbicara atau dalam tulisan pada umumnya tidak sesuai dengan paduan keempat ciri di atas. Oleh karena itu, bahasa yang dipergunakan dengan kecenderungan yang demikian umumnya tidak bermutu.

Mutu Penggunaan BI Sebagai Bahasa Politik

Pada bagian 2.1 terdahulu telah dijelaskan bahwa bahasa politik adalah bahasa kekuasaan yang mencakup berbagai aspek pengambilan keputusan kenegaraan, termasuk antara lain hukum dan perundang-undangan, administrasi negara, dan wacana politik. Pembahasan berikut adalah berkenaan dengan penggunaan BI sebagai bahasa politik, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan umumnya.

1) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara

Administrasi negara meliputi berbagai aspek penyelenggaraan negara yang pada pokoknya terdiri dari: (1) hukum dan perundang-undangan, dan (2) korespondensi atau surat-menyurat. Jelas bahwa bahasa yang dipergunakan dalam kedua aspek pokok itu terutama adalah bahasa yang tertulis formal.

Jika dilihat dari keempat ciri mutu penggunaan bahasa yang dikemukakan pada bagian 2.2, secara umum dapat dikatakan bahwa mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi negara sejak permulaan kemerdekaan meningkatkan secara berkelanjutan. Sekadar ilustrasi, berikut adalah kutipan dari BI dalam hukum dan perundang-undangan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.

Tabel 1
Bahasa Politik Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi
dalam Hukum dan Perundang-undangan

Orde Lama	Orde Baru	Orde Reformasi
1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan .	1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan .	1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan .
2. Prësiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.	2. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.	2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Prësiden dan Wakil Prësiden memegang djabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.	3. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.	3. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat di-pilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
4. Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dipahamkan , kalau hanya dibatja tekstnja saja. Untuk dapat mengerti sungguh-sungguh maksudnja Undang-undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempeladjadi juga terdjadinja tekst itu, harus diketahui keterangan-keterangan dan djuga harus diketahui dalam suasana apa tekst itu dibikin .	4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu dituang-kan dalam rumusan yang sederhana dan jelas, yang men-cermin-kan suara hati nurani manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan mampu secara terus menerus menggelora-kan semangat serta memberikan keyakinan dan harapan akan hari depan yang lebih baik, sehingga Pedoman itu dapat mudah diresapi , dihayati , dan diamalkan .	4. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan , membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.
No. 1 s.d. 4 dari Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, oleh Prof. M. Yamin, SH).	(No. 1 s.d. 3 UUD 1945; No. 4 dari TAP-TAP MPR 1978).	(No. 1 s.d. 3 dari Amanden UUD 1945, Tahun 1999; No. 4 TAP-TAP MPR 1998).

Dari kutipan-kutipan di atas dapat dilihat hal-hal berikut.

a. Dari Segi Relevansi Semantik

Dari segi relevansi semantik secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kutipan-kutipan di atas cukup baik. Di samping itu, terlihat juga adanya peningkatan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya sistem politik. Semasa Orde Lama, kekuasaan Presiden terasa sangat besar (No. 2), dan dapat dipilih berulang-ulang lebih dua periode (No. 3). Hal ini dipertahankan pada masa Orde Baru. Bahkan, dalam praksis, keanggotaan dan penentuan anggota-anggota MPR diatur sedemikian rupa sehingga pasti memenangkan Presiden yang sedang menjabat. Akan tetapi, pada Orde Reformasi, keadaan itu diubah ke arah yang lebih demokratis dan terbuka (No. 2 dan 3).

b. Dari Segi Akuntabilitas Gramatikal

Ada tiga perkembangan yang menarik berkenaan dengan akuntabilitas gramatikal dalam kutipan-kutipan di atas, yaitu penggunaan kaidah-kaidah ejaan, afiksasi, dan logika bahasa. Pada Orde Lama, terlihat kecenderungan mempergunakan ejaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah fonetis. Hal ini terlihat, antara lain, dari ejaan *ē* pada **Prēsīdēn** dan **Dēwan**. Pada Orde Baru, hal itu diubah menjadi ejaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah fonemis sehingga lebih efisien. Pada Orde Reformasi, kaidah-kaidah fonemis itu dipertahankan.

Dalam hal penggunaan afiksasi pada Orde Lama, ada dua gejala yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan *-kan* pada **dipahamkan** dan *-nja* pada **maksudnja Undang-undang Dasar**. Penggunaan akhiran *-kan* tak tepat; yang tepat ialah akhiran *-i*. Penggunaan *-nja* pada frasa itu tak perlu. Penggunaan *-nja* tersebut mungkin karena pengaruh bahasa Belanda. Pada Orde Baru, penggunaan kedua afiks itu sudah diperbaiki sebagaimana dapat dilihat pada kata yang digarisbawahi (No. 4). Pada Orde Reformasi perbaikan itu dipertahankan (No. 4).

Berkenaan dengan logika bahasa, yang menarik ialah tentang kejelasan proposisi yang terkandung dalam kalimat. Pada masa Orde Lama, kutipan No. 4 terdiri dari 42 kata, semuanya dalam dua kalimat. Proposisi tiap-tiap kalimat itu mudah ditentukan. Kutipan No. 4 pada Orde Baru terdiri atas 51 kata, semuanya dalam satu kalimat. Di samping itu, kalimat yang terdiri dari 51 kata itu adalah merupakan suatu paragraf. Dan, struktur pragraf ini tidak sesuai dengan struktur paragraf yang dikemukakan pada 2.2b. Akibatnya, tidak mudah menemukan proposisi kalimat itu dengan tepat. Pada Orde Reformasi, kutipan No. 4 terdiri atas 45 kata, dan terdapat

dalam tiga kalimat. Oleh karena itu, proposisi setiap kalimat mudah ditemukan dengan tepat. Ketepatan dan kecepatan menemukan proposisi berpengaruh signifikan pada relevansi semantik. Dalam bahasa politik Orde Baru ada gejala-gejala perekayasa semantik sebagaimana telah disinggung pada bagian 2.2a.

c. Dari Segi Efisiensi Leksikal

Dalam hal efisiensi leksikal, ada dua aspek yang perlu diperhatikan pada kutipan-kutipan di atas, yaitu struktur ejaan dan jumlah kata dalam satu kalimat. Pada Orde Lama, struktur ejaan kurang efisien karena didasarkan pada kaidah-kaidah fonetis. Hal ini telah diperbaiki pada Orde Baru dengan adanya Ejaan Baru yang ditetapkan oleh Pusat Bahasa dan yang didasarkan pada kaidah-kaidah fonemis. Pada Orde Reformasi, perbaikan itu dipertahankan.

Berkenaan dengan jumlah kata dalam satu kalimat, terlihat kecenderungan meningkat pada Orde Baru, sebagaimana disebut di atas. Namun, karena kutipan di atas masih terbatas, belum dapat diambil sebagai kesimpulan umum.

d. Dari Segi Efektivitas Ekspresi

Dari segi efektivitas ekspresi, penggunaan bahasa Indonesia dalam kutipan-kutipan di atas dapat dikatakan cukup baik secara umum. Namun, dalam hal gaya bahasa, khususnya berkenaan dengan nuansa demokrasi dan keterbukaan, perlu diperhatikan bahwa pada Orde Reformasi lebih terasa. Hal itu akan lebih jelas dalam pembicaraan tentang wacana politik pada bagian berikut.

Sebagaimana disebut pada permulaan, kutipan-kutipan di atas adalah sekadar gambaran tentang perkembangan penggunaan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi negara sejak permulaan kemerdekaan (Orde Lama). Perkembangan itu menunjukkan peningkatan mutu yang berkelanjutan meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan pada keempat ciri mutu yang telah dikemukakan. Kutipan-kutipan di atas adalah berkenaan dengan hukum dan perundang-undangan. Pengalaman dan pengamatan penulis sejak tahun 1946 sewaktu masih belajar di Sekolah Guru B (SGB), terutama sejak tahun 1952 sewaktu mulai menjadi guru, juga sesuai dengan perkembangan tersebut. Dan, perkembangan demikian juga terdapat pada penggunaan bahasa Indonesia dalam surat-menyurat. Mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam surat-menyurat umumnya bahkan lebih baik karena sudah ada struktur standar berkaitan dengan keempat ciri mutu tersebut terdahulu.

Dalam Wacana Politik

Wacana politik (*political discourse*) ialah percakapan dalam berbagai bentuk berkenaan dengan penyelenggaraan negara (pemerintahan). Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa politik baik lisan maupun tertulis. Sebagaimana halnya dengan penggunaan BI dalam penyelenggaraan administrasi negara, mutu penggunaan BI dalam wacana politik umumnya juga meningkat secara berkelanjutan sejak permulaan kemerdekaan. Dalam membicarakan bahasa politik umumnya, ada lima kategori politik yang perlu diperhatikan, yaitu, mitos politik, doktrin politik, miranda, rumus politik, dan semboyan politik (Tampubolon, 1999). Kelima kategori inilah yang diamati dari segi keempat ciri mutu terdahulu dalam membicarakan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam wacana politik.

Mitos politik ialah suatu ide politik yang sepenuhnya diyakini oleh suatu rezim politik sebagai kebenaran walaupun belum tentu benar. Pada masa Orde Lama, misalnya, *nasionalisme* atau *kebangsaan* dan *demokrasi terpimpin* adalah mitos politik. Pada masa Orde Baru, mitos politik, antara lain, ialah *Demokrasi Pancasila*, *keamanan nasional*, dan *pembangunan nasional*. Dan pada Orde Reformasi, mitos politik antara lain ialah *reformasi*, *demokrasi*, *transparansi*, dan *desentralisasi*.

Doktrin politik pada dasarnya adalah visi dan misi suatu bangsa dan negara. Doktrin politik dapat tetap dan dapat juga berubah apabila orde atau rezim berganti. Doktrin politik umumnya tersusun dalam bentuk proklamasi dan pendahuluan suatu konstitusi. Doktrin politik bangsa dan negara Indonesia ialah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditandatangani oleh Soekarno – Hatta, dan juga Pembukaan UUD 1945, terdapat visi dan misi bangsa dan negara Indonesia. Doktrin politik tersebut belum berubah hingga Orde Reformasi sekarang ini.

Miranda adalah pernyataan politik yang membangkitkan semangat, emosi, rasa bangga, dan keyakinan serta loyalitas tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kategori politik ini biasanya sering dipergunakan dalam pidato-pidato politik, terutama oleh seorang orator seperti Bung Karno. Ucapan beliau seperti “Ini dadaku, mana dadamu”, *To hell with your aids*, dan “Dengan Proklamasi dan Konstitusi Proklamasi, maka berputarlah roda-djantera Revolusi merebahkan kolonialisme dan imperialisme, dan bangunlah kedaulatan Indonesia” adalah miranda. Pada masa Orde Baru, miranda yang biasa terdengar, antara lain, ialah “Demi Persatuan dan kesatuan bangsa”, “Tinggal landas pembangunan”, “Demi keamanan dan ketertiban masyarakat”, dan “Kesetiakawanan Sosial”. Dalam Orde Reformasi yang sedang berkembang, miranda yang sering terdengar, antara lain, ialah

“Rakyat berhak menyatakan pendapatnya dengan bebas”, “Masyarakat ikut serta mengawasi pemerintah”, “Hak asasi manusia harus dihormati”.

Rumus politik adalah ketentuan politik yang biasanya tersusun dalam bentuk undang-undang, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan penyelenggaraan negara. UUD 1945 dan berbagai rumusan hukum dan perundang-undangan sebagaimana dibicarakan pada bagian 3.1 adalah rumusan politik.

Semboyan politik atau slogan politik adalah pernyataan yang terdiri atas kata, frasa, atau kalimat pendek tentang cita-cita, pandangan atau filosofi hidup, atau aspirasi, yang bernuansa agak keras dan tegas. Pada masa Orde Lama, khususnya di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, di antara semboyan-semboyan politik yang populer ialah “Merdeka atau mati”, “Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh”, dan “Patah tumbuh hilang berganti”. Di antara semboyan-semboyan politik yang biasa dipergunakan semasa Orde Baru ialah “Memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila”, “Ganyang Komunis”, “Memasyarakatkan Pancasila dan mem-Pancasilakan masyarakat”, dan “Kebebasan yang bertanggung-jawab”. Pada masa Orde Baru Reformasi, di antara semboyan-semboyan politik yang biasa dipergunakan ialah “Meperbaharui tatanan politik”, “Peningkatan mutu kehidupan”, “Menegakkan hak asasi manusia”, “Menghapuskan KKN”, dan “Menuju masyarakat madani (*civil society*)”.

Dari data-data bahasa politik di atas dan bedasarkan pengalaman dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya bahasa politik berubah sesuai dengan pergantian orde atau rezim politik. Namun, doktrin politik tidak berubah. Rumus politik, khususnya UUD 1945, hingga taraf tertentu juga berubah sebagaimana dapat dilihat dalam Amendemen UUD 1945 yang dibuat oleh Orde Reformasi pada tahun 1999. Perubahan yang paling menarik ialah dalam miranda dan semboyan politik. Pada masa Orde Lama, kedua kategori ini secara semantik pada umumnya membawa pesan utama memperkokoh nasionalisme serta kesatuan dan persatuan bangsa. Pada masa Orde Baru pesan utama yang dibawa oleh kedua kategori itu ialah keamanan dan ketertiban serta pembangunan nasional. Dan pada Orde Reformasi pesan utama yang dibawa oleh keduanya ialah demokrasi, transparansi, dan hak asasi manusia.

Perubahan-perubahan dalam penggunaan kategori-kategori politik di atas jelas menunjukkan situasi yang dihadapi dan sistem politik yang dianut oleh orde politik bersangkutan. Perubahan-perubahan demikian umumnya terjadi di negara-negara sedang berkembang. Akan tetapi, di negara-negara yang sudah maju, jarang, bahkan dapat dikatakan tak terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Di Amerika Serikat, misalnya, walaupun kekuasaan politik berpindah dari tangan Partai Republik ke tangan Partai Demokrat, perubahan dalam penggunaan kategori-kategori politik seperti di atas tidak

banyak terjadi. Bahasa politik tak banyak berubah. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa kedewasaan (kematangan) suatu bangsa dapat juga dilihat dari kemantapan (stabilitas) bahasa politik yang dipergunakan oleh bangsa itu.

Jika dilihat dari segi keempat ciri mutu penggunaan bahasa yang dikemukakan terdahulu, mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam wacana politik secara umum dapat dikatakan baik. Namun, perlu diperhatikan beberapa kelemahan mendasar yang terjadi pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi.

Dalam bahasa politik Orde Baru, ada tiga kelemahan mendasar, yaitu represi linguistik, monopoli semantik, dan gaya topeng (Tampubolon, 1999: 6, 21, 24). Represi linguistik ialah penekanan dan pembatasan atas kebebasan rakyat menyatakan pikiran dan perasaannya dengan bahasa yang dilakukan oleh penguasa dengan memperlakukakan bahasa. Dengan kata lain, bahasa politik yang dipergunakan oleh penguasa sering mengandung makna yang “menyebabkan rasa takut” pada rakyat. Sekadar contoh adalah kalimat-kalimat berikut.

- (1) Ada kelompok yang *dicurigai* menginginkan terciptanya kekacauan, dengan tujuan dan kepentingan politik tertentu.
- (2) Unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat akhir-akhir ini dapat dikategorikan tindakan *subversif*.

Kata *dicurigai* dan *subversif* pada masing-masing kalimat itu mengandung makna yang menimbulkan rasa takut pada masyarakat untuk menyatakan pikiran dan perasaannya, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

Monopoli semantik ialah penguasaan atas pemakaian (pemberian arti atau penafsiran) kosakata, kalimat, dan wacana yang mengandung ide-ide politik hanya oleh penguasa (elite kekuasaan) saja, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh rakyat. Sebagai contoh, kata *membina* pada dasarnya mengandung komponen-semantik (makna) aksi, pengalaman, peningkatan. Ketiga komponen itu juga mengandung konotasi pengendalian. Dalam kata *pembinaan*, yang sangat sering dipergunakan semasa Orde Baru, ketiga komponen semantik itu juga terkandung, tetapi dalam praksis yang paling diutamakan oleh penguasa adalah pengendalian. Dan, ini dipatuhi oleh masyarakat.

Gaya topeng ialah gaya bahasa yang mengutamakan penghalusan semantik secara berlebihan sehingga semua kedengaran dan terasa baik, tetapi kebenaran yang sesungguhnya tertutupi. Mungkin gaya topeng dapat juga diartikan sebagai “eufemisme berlebihan”. Kalimat-kalimat berikut adalah sebagai contoh penggunaan gaya topeng semasa Orde Baru.

- (1) Pemerintah terus mengusahakan **anggaran berimbang**.
- (2) Berbagai tarif terpaksa **disesuaikan** sehubungan dengan krisis moneter yang berkepanjangan.

Frasa *anggaran berimbang* terasa menyenangkan pikiran dan perasaan, karena pendapatan sesuai dengan belanja. Akan tetapi, kebenaran yang tersembunyi di balik frasa yang indah itu ialah *utang luar negeri* yang jumlahnya hampir 60% dari seluruh anggaran. Demikian juga kata *disesuaikan* terasa baik, tetapi kebenaran yang sesungguhnya ialah *tarif dinaikkan*.

Represi linguistik dan monopoli semantik tidak sesuai dengan relevansi semantik. Dan, gaya topeng, selain bertentangan dengan relevansi semantik, juga tak sesuai dengan efektivitas ekspresi. Berdasarkan kenyataan-kenyataan ini dapat dikatakan bahwa mutu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa politik dalam masa Orde Baru kurang baik.

Pada masa Orde Reformasi yang sedang belangsung dewasa ini, ketiga kelemahan dasar tersebut di atas umumnya tidak tampak lagi. Kenyataan ini adalah suatu peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam wacana politik. Hasil utamanya ialah bahwa rakyat juga, baik secara individu maupun kelompok, sudah berani menyatakan pikiran dan perasaannya secara terbuka. Namun, kelemahan mendasar yang masih sering terlihat dalam bahasa politik Orde Reformasi ialah dalam logika bahasa. Kalimat-kalimat berikut adalah sekedar contoh ¹⁾:

- (1) **Dengan** selesainya irigasi itu **meningkatkan** produksi padi di daerah itu.
- (2) **Akibat** ledakan tersebut **menyebabkan** banyak korban.
- (2) **Beberapa bagian-bagian** dari bom ditemukan.
- (3) Pemerintah akan berterima kasih bila ada **suatu pemikiran-pemikiran** yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pada contoh (1), kelemahan logika bahasa ialah tidak adanya **proposisi** (subjek, predikat) yang jelas. Pada contoh (2), kelemahan logika bahasa ialah **kontroversi makna** karena penggunaan kata *akibat* dan *menyebabkan*. Dan pada contoh (3) dan (4), kelemahan logika bahasa ialah **miskonsepsi tentang singularitas-pluralitas**. Pada contoh (3) terjadi **pluralitas berlebihan** karena penggunaan kata *beberapa* yang diikuti oleh *bagian-bagian*. Pada contoh (4), terjadi **kontradiksi singularitas-pluralitas** karena penggunaan kata *suatu* yang diikuti oleh *pemikiran-pemikiran*. Kelemahan dalam logika bahasa adalah kelemahan dalam akuntabilitas gramatikal. Oleh karena itu, jika dilihat dari data-data kelemahan di atas, mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam wacana politik Orde Reformasi masih belum cukup baik.

Berdasarkan pembahasan pada 3.1 dan 3.2 di atas, dapat diambil simpulan berikut.

¹⁾ Kalima-kalimat ini diucapkan oleh pejabat-pejabat negara dalam wawancara di berbagai televisi.

- a. Bahasa Indonesia sudah memiliki unsur-unsur linguistik yang cukup dan mantap sebagai bahasa modern sehingga mampu dipergunakan sebagai bahasa politik, baik dalam penyelenggaraan administrasi negara maupun dalam berbagai wacana politik.
- b. Bahasa politik, dalam arti tingkat intensitas dan ekstensitas penggunaan masing-masing kategori politik, selalu berubah apabila orde politik berganti. Perubahan demikian umumnya terjadi di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Di negara-negara maju, perubahan demikian hampir tak terjadi. Dengan demikian, sifat sistem kekuasaan dan tingkat kedewasaan perpolitikan dalam suatu negara dapat dilihat dari bahasa politiknya.
- c. Mutu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa politik, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan, secara umum dapat dikatakan baik dan terus meningkat sejak permulaan kemerdekaan. Namun, dalam setiap orde politik masih terdapat kelemahan-kelemahan mendasar tertentu, baik dari segi relevansi semantik dan akuntabilitas gramatikal maupun efisiensi leksikal dan efektivitas ekspresi.
- d. Penyebab akar kelemahan-kelemahan mendasar dalam penggunaan BI tersebut ialah (1) rendahnya mutu pendidikan nasional, termasuk mutu pengajaran bahasa Indonesia; (2) belum meratanya penggunaan bahasa Indonesia di seluruh daerah sehingga masih banyak terjadi interferensi bahasa daerah; dan (3) belum tersedianya buku-buku referensi yang cukup kaya dan terpercaya, khususnya kamus bahasa Indonesia.

Strategi Peningkatan Mutu Penggunaan BI

Dalam setiap usaha peningkatan mutu, yang pertama harus dilakukan ialah menemukan masalah pokok dan sebab akar (akar) masalah itu. Setelah masalah pokok dan sebab akarnya ditemukan, diusahakanlah cara mengatasinya yang paling tepat. Yang sering terjadi ialah bahwa bukan sebab akar yang diatasi sehingga masalah yang sama akan timbul lagi dalam usaha peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia, demikian juga strateginya.

1) Peningkatan Mutu Pendidikan

Masyarakat umumnya sudah mengetahui bahwa **masalah pokok** pendidikan nasional ialah mutunya yang sangat rendah. Dalam pendidikan dimaksud sudah tentu termasuk pendidikan bahasa Indonesia (dalam arti pengajaran bahasa Indonesia), yang masih belum diketahui dengan jelas

ialah jawaban atas pertanyaan, Apa **akar** (sebab akar) masalah pokok pendidikan nasional itu? Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis, ada lima akar masalah pendidikan nasional kita dan kelimanya belum diatasi secara sungguh-sungguh hingga sekarang. Jika ingin meningkatkan mutu pendidikan nasional, kelima akar masalah itu harus diatasi dengan serius. Secara garis besar kelimanya diuraikan di bawah ini.

a. Komitmen Nasional untuk Pendidikan Sangat Lemah

Kata komitmen mengandung arti (1) paham dan sadar akan sesuatu yang terbaik sebagai kebutuhan utama; (2) berani mengambil keputusan untuk mencapainya; (3) berjanji kepada diri sendiri, masyarakat dan Tuhan untuk melakukan keputusan itu, dan (4) berani melaksanakan keputusan itu dengan jujur serta sepenuh dan setulus hati.

Komitmen nasional dalam arti di ataslah yang sangat lemah selama ini, terutama di pihak legislatif dan eksekutif. Dalam praksis selama ini, kelihatannya arti komitmen hanya No. (1) dan (2). Hal itu dapat dilihat, misalnya, dari kenyataan bahwa sudah diputuskan oleh legislatif bahwa anggaran pendidikan harus 20 %, bahkan dicantumkan dalam Amendemen UUD 1945, tetapi dalam kenyataannya anggaran pendidikan tak sampai 5 %. Dan yang paling tak terlaksana ialah arti No. (4).

Benarkah tidak cukup dana negara untuk pendidikan? Jawaban pertanyaan ini ialah ada tidaknya komitmen nasional yang kuat. Jika ada komitmen nasional yang kuat, pasti ada dana yang cukup. Dengan komitmen nasional yang kuat, para pejabat negara, **terutama pejabat tinggi** baik legislatif maupun eksekutif dari pusat hingga daerah, harus mampu menunjukkan **keteladanan dalam kejujuran pelaksanaan tugas, penghematan penyelenggaraan negara, dan kesederhanaan hidup** sehari-hari. Rakyat sungguh rindu melihat dan akan sangat menghargai, pejabat tinggi, terutama yang sudah mempunyai, menyumbangkan gajinya dan berbagai fasilitas dinasnyanya untuk pendidikan. Alangkah agungnya para pejabat tinggi yang bersedia hanya memakai mobil kijang yang sederhana sebagai mobil dinasnyanya agar dana untuk mobil mewah itu dapat menjadi dana untuk pendidikan. Keteladanan seperti itu dari pusat hingga daerah di semua departemen, lembaga, dan BUMN, akan menghemat dana yang jumlahnya sangat besar dan akan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan. Di samping itu, kejujuran dalam pengelolaan pajak negara dan sumber-sumber dana negara lainnya akan meningkatkan pendapatan negara. Itulah komitmen nasional yang kuat!

b. Pandangan Filosofis Pendidikan Ketinggalan

Apa pendidikan? Apa produk pendidikan? Apa mutu pendidikan? Itulah tiga pertanyaan filosofis pokok yang perlu dijawab tentang pendidikan.

Selama ini pendidikan diartikan dengan berbagai cara. Dikatakan, misalnya, pendidikan adalah proses pendewasaan manusia. Pemahaman seperti itu tentu tidak salah. Akan tetapi, untuk menghadapi abad ke-21 atau era globalisasi dan informasi, pemahaman itu perlu direformasi agar lebih membumi. Dalam paradigma baru, pendidikan diartikan sebagai jasa atau pelayanan, yang berupa proses-proses bersifat sekuler (Rinehart, 1993; Tampubolon, 2001; 2003). Produk pendidikan (dalam arti lembaga pendidikan atau sekolah) selama ini diartikan sebagai lulusan. Akan tetapi, apakah hanya sekolah yang membuat peserta didik lulus, terlebih-lebih dalam era informasi? Jika jujur, jawabanya tentu tidak. Oleh karena itu, dalam paradigma baru, produk pendidikan adalah jasa pendidikan yang umumnya berupa proses-proses pelayanan. Mutu pendidikan selama ini diartikan sebagai daya serap peserta didik atas materi ajar, yang diindikasikan dengan nilai-nilai ujian. Akan tetapi, ternyata sangat sering para lulusan tak diterima di dunia kerja karena kemampuannya tidak sesuai. Dalam paradigma baru, mutu diartikan sebagai kesesuaian paduan atribut-atribut mutu produk (jasa) pendidikan dengan kebutuhan para pelanggan pendidikan, terutama para peserta didik dan dunia kerja. Pengertian mutu inilah yang menjadi dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang belakangan ini diperkenalkan, tetapi banyak orang bingung karena tak tahu dasar filosofisnya.

c. Sistem Pemberdayaan Guru Sangat Lemah

Sistem pemberdayaan guru mempunyai tiga subsistem: (1) subsistem pendidikan/pelatihan prajabatan; (2) subsistem pendidikan/pelatihan dalam-jabatan; dan (3) subsistem kesejahteraan.

Ketiga subsistem itu sangat lemah dalam sistem pendidikan nasional. Lembaga Pendidikan Guru (LPG) sangat kecau (goyah) belakangan ini. Ada "Mantan IKIP", tapi masih ada IKIP, FKIP, dan STKIP. Di samping itu, masih ada PGSD dan PGSM. Mana lembaga yang standar untuk menghasilkan guru, untuk tiap jenjang pendidikan termasuk guru BI? Dapat dikatakan tak ada. Akan tetapi, yang paling lemah lagi ialah subsistem kesejahteraan. Gaji guru di Indonesia termasuk terendah di dunia.

d. Sistem Manajemen Pendidikan yang Sentralistis dan Birokratis

Pada zaman Orde Baru, hampir semua kegiatan kenegaraan, termasuk pendidikan, dikelola di pusat. Setelah UU otonomi daerah, pengelolaan ini pada dasarnya sudah berubah. Akan tetapi, menurut pengalaman dan pengamatan penulis, sifat dan sikap para pejabat masih seperti pada masa Orde Baru. Dengan kata lain, sentralisasi dan birokrasi pada umumnya

hanya berpindah dari pusat ke kabupaten dan kota. Para kepala sekolah dan guru di sekolah masih tetap bersifat menunggu keputusan atasan, belum mampu dan berani berprakarsa sesuai dengan prinsip-prinsip MBS.

e. Sistem Pengajaran yang Paternalistik

Sejalan dengan pandangan pendidikan tradisional dan prinsip manajemen sentralistik-birokratis, sistem pengajaran umumnya masih bersifat paternalistik. Guru yang menentukan. Yang terjadi ialah arus informasi satu arah. Jarang terjadi dialog. Hal itu tentu juga berlaku dalam pengajaran bahasa Indonesia. Yang memperburuk keadaan lagi ialah bahwa para guru jarang membuat persiapan (rencana) mengajar yang cukup matang dan jarang melakukan pengendalian mutu pengajarannya melalui tugas-tugas rumah peserta didik yang diperiksa, dikembalikan dan dibicarakan. Penyebabnya ialah kebanyakan guru telah menjadi "guru biasa di luar", dan dosen menjadi "dosen biasa di luar", (bukan dosen luar biasa), karena gaji tak cukup untuk kehidupan yang dasar. Sistem pengajaran selama ini mengakibatkan kemandirian peserta didik yang sangat lemah, termasuk dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sistem pengajaran selama ini perlu direformasi menjadi **sistem pembelajaran** peserta didik dimotivasi untuk mandiri.

2) Pemerataan Penggunaan Bahasa Indonesia secara Bermutu

Cara terbaik untuk pemerataan penggunaan BI secara bermutu ialah melalui pendidikan bermutu sebagaimana dikemukakan di atas. Dalam hubungan ini, perkembangan pelaksanaan otonomi daerah tampaknya mempunyai dampak negatif. Di berbagai kabupaten, terutama kecamatan yang penulis kunjungi, ada kecenderungan untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah. Kecenderungan ini dapat memperlemah posisi dan peran bahasa Indonesia. Di berbagai sekolah (di luar kelas) dan kantor pemerintah, penggunaan bahasa daerah sudah lebih sering. Agaknya, perlu ada ketentuan pemerintah yang jelas tentang perkembangan ini. Sebaiknya, perkembangan penggunaan bahasa di Indonesia, khususnya di daerah-daerah, diarahkan pada kedwibahasaan yang seimbang (*compound bilingualism*), yakni kompetensi dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah adalah sama (seimbang). Kedua bahasa itu dikuasai dengan baik.

Cara lain yang tak kurang pentingnya untuk pemerataan penggunaan BI secara bermutu ialah melalui berbagai media massa dan pengembangan perpustakaan-perpustakaan desa. Dalam hubungan peranan media massa, perlu diperhatikan agar bahasa Indonesia yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia yang bermutu dan yang tidak bercampur dengan berbagai unsur bahasa daerah. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan bahwa bahasa

lima akar masalah pokok pendidikan. Dalam pemerataan penggunaan bahasa Indonesia secara bermutu, selain pendidikan, media massa dan perpustakaan-perpustakaan di pedesaan juga sangat berperan.

Data-data yang menjadi dasar pembahasan dalam makalah ini sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian yang lebih lengkap sangat dibutuhkan. Namun, penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat dalam dikusi ini setidaknya sebagai perangsang.

KEPUSTAKAAN

- Aitchison, Jean, (1981). *Language Change: Progress or Decay ?* Bungay, Suffolk : The Chancer Press.
- Benjamin, Robert L. (1970). *Semantics and Language Analysis*, New York: The Boobs – Merrill Company, Inc.
- Bobrow, Daniel G. (1975). *Dimensions of Representation*. Dalam "Representation and Understanding ; Studies in Cognitive Science", ed. Daniel G. Bobrow et.al. New York : Academic Press, Inc.
- Bresman, Joan and Kaplan, Ronald M. (1982). *Grammars as Mental Representations of Language: Introduction*. Dalam "The Mental Representation of Grammatical Relation", ed. Joan Bresman, Cambridge, Mass : The MIT Press.
- Chafe, Wallace, L. (1971). *Eaning and The Structure of Language*, Chicago : The University of Chicago Press.
- Clark, Herbert H. and Clark, Live V. (1977). *Psychology and Language: And Introduction to Psycholinguistics*. New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Coulthard, Malcolm. (1979). *And Introduction to Discourse Analysis*. London: Longman.
- Dhakidae, Daniel. (1996). *Bahasa dan Kekasaan: Bahasa Jurnal dan Politik Orde Baru*. Dalam "Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru", ed. Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim. Bandung: Penerbit Mizan.
- Giles, Howard. (1979). *Sociolinguistics and Social Psychology: And Introductory Essay*. Dalam "Language and Social Psychology", ed. Howard Giles and Robert N. St. Clair. Oxford: Basil Blackwell.

- Goleman, Daniel. (1995). *Emotional Intelligence*. Diterjemahkan: Kecerdasan Emosional, T. Hermaya. Jakarta : Gramedia.
- Lasswell, Harold D. et.al. (1965). *Studies in Quantitative Sementics: Language of Politics*. Canbridge, Mass : The MIT Press.
- Levinson, Stephen C. (1983). *Pragmatics*. London: Cambridge Univer-sity Press.
- Paivio, Allen & Begs, Ian. (1981). *Psychology of Language*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Patton, Patricia. (1997). *Emotional Intelligence in The Workplace*. Diterjemahkan: Emotional Inteligence di Tempat Kerja, (1998), oleh Ir. Julia Tahitoe, MM. Jakarta, PT Gramedia.
- Rinehart, Gray. (1993). *Quality Education*. Milwaikee: ASQC Quality Press.
- Shapiro, Lawrence E. (1997). *How to Raise a Child With a High EQ: A Parent's Guide to Emotional Intelligence*. Diterjemahkan: Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak, oleh Alex Tri Kuntoro. Jakarta : PT Gramedia.
- Segal, Jeanme. (1997). *Raising Your Emotional Intelligence*. Diterjemahkan: Meningkatkan Kecerdasan Emosional: Program Emosi Anda, oleh Dian Paramesti Bahar. Jakarta: Citra Angkasa Publishing.
- Tampubolon, Daulat P. (1997). *Bahasa dan Tanggung Jawab Kemanusiaan*. Dalam "Bahasawan Cendekia", (ed.) Liberty Sihombing dkk. Jakarta: PT Internusa.
- (1996). *Bahasa Indonesia Abad Ke-21; Spesialisasi, Simplifikasi, dan Efektuasi*. Dalam "Bahas", No.24, Tahun XXII, FPBS – IKIP Medan.
- (1999). *Gejala-gejala Kematian Bahasa: Suatu Observasi Ragam Politik Orde Baru*. Dalam PELBBA No.12, Tahun 1999. Jakarta ; Atmajaya.
- (1999). *Peran Bahasa Dalam Memajukan Bangsa*. Makalah disajikan dalam Kongres Linguistik 1999 di Jakarta.
- (2001). *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- (1993). *Mengembangkan Minat dan Kebiasaan Membaca Pada Anak*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- (2003). *Pendidikan Bermutu*. Medan: LKPBI.

SERTIFIKASI UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA DALAM "STRATIFIKASI" APARATUR NEGARA

Dendy Sugono

Pusat Bahasa

Pengantar

Ikrar bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ungkapan "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia" telah kita pahami bersama sebagai tekad bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa itu bagi kehidupan berbangsa. Sementara itu, bagi kehidupan bernegara pun telah dilembagakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yaitu Pasal 36 UUD 45. Baik rumusan Sumpah Pemuda maupun UUD 45 dapat dipahami sebagai kemauan politik untuk menjunjung bahasa Indonesia. Apa indikator bahwa bahasa Indonesia telah dijunjung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita?

Untuk lebih memahami dua pernyataan politik tersebut, ungkapan "menjunjung bahasa Indonesia" perlu diberi definisi yang mengungkapkan dimensi tinggi, tamsil mengangkat sesuatu ke atas. Seberapa tinggi bahasa Indonesia dijunjung sangat bergantung pada seberapa tinggi mutu/kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan perkataan lain, dapat dipostulatkan bahwa semakin tinggi mutu berbahasa Indonesia seseorang semakin tinggi pula orang itu menjunjung bahasa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, siapa (saja) yang harus memiliki mutu/kualitas tinggi dalam penggunaan bahasa Indonesia? Jawaban yang perlu diusulkan pertama adalah bahwa aparatur negara harus bermutu tinggi dalam berbahasa Indonesia karena merekalah penyelenggara negara, abdi bangsa, dan lain-lain.

Aparatur negara adalah satu kelompok penutur bahasa Indonesia yang perlu selalu mengendalikan mutu berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada semacam 'pengendalian' mutu berbahasa Indonesia di kalangan aparatur negara agar setiap aparatur negara dapat menyesuaikan diri antara tugas kenegaraan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Asumsinya adalah mutu berbahasa Indonesia sangat berpengaruh terhadap mutu pelaksanaan tugas kenegaraan setiap aparatur. Bagaimana mengendalikan mutu berbahasa Indonesia di kalangan aparatur negara? Caranya adalah dengan melakukan pengukuran kemampuan berbahasa Indonesia sewaktu-waktu. Untuk itu, melalui kesempatan ini, Pusat Bahasa memasyarakatkan sarana pengukuran kemampuan berbahasa Indonesia yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.

Mutu Layanan Aparatur Negara

Layanan aparatur negara diperlukan sepanjang hayat kita. Begitu dilahirkan dari sang ibu, kita membutuhkan layanan aparatur negara untuk membuat akta kelahiran. Kemudian pada usia tujuh belas tahun, kita memerlukan jasa aparatur negara untuk menerbitkan kartu tanda penduduk (KTP). Ketika kita sibuk mencari lowongan pekerja, datanglah kebutuhan akan layanan aparatur negara untuk membuat kartu kuning dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan surat keterangan dari kantor kepolisian. Bahkan, begitu hayat tidak dikandung badan, kita masih memerlukan layanan aparatur negara untuk membuat surat keterangan mati, surat izin pemakaman, dan sebagainya.

Layanan aparatur negara dibutuhkan untuk semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan ekonomi, layanan itu diperlukan, misalnya dalam hal pengurusan izin berusaha dan registrasi hasil-hasil produksi. Dalam dunia pendidikan, kita memerlukan berbagai layanan aparatur negara, misalnya pengajaran. Kegiatan politik juga tidak terlepas dari kebutuhan akan layanan aparatur negara. Misalnya, untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pemilu, setiap partai politik harus melalui proses layanan aparatur negara yang dalam hal ini, misalnya, layanan dari Lembaga Pemilihan Umum. Sangatlah sulit untuk mencari sisi kehidupan kita yang benar-benar lepas dari layanan aparatur negara.

Aparatur negara bertugas memberi layanan kepada masyarakat, baik dalam administrasi maupun pembangunan. Karena layanan administrasi dan pembangunan itu dikomunikasikan kepada masyarakat dengan bahasa Indonesia, mutu layanan aparatur negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur negara untuk memberdayakan bahasa Indonesia. Apabila aparatur negara tidak dapat memberdayakan bahasa Indonesia sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas layanannya, agaknya sulit bagi masyarakat untuk berharap agar layanan yang diperoleh bermutu tinggi.

Apa yang diharapkan dapat menjamin bahwa layanan aparatur negara bermutu tinggi? Kita telah lama mengenal stratifikasi aparatur negara menurut kepangkatan dan/atau jabatan. Berdasarkan stratifikasi itu, mestinya kita dapat berharap bahwa semakin tinggi strata aparatur negara akan semakin bermutu layanan yang diberikan aparatur yang bersangkutan kepada masyarakat. Stratifikasi itu tampak, misalnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

**Eselon dan Jejang Pangkat Jabatan Struktural
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994**

No	Eselon	Jenjang Pangkat/Golongan Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Golongan Ruang	Pangkat	Golongan Ruang
1.	IA	Pembina Utama	IV/e	Pembina Utama	IV/e
2.	IB	Pembina Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
3.	IIA	Pembina Utama	IV/c	Pembina Utama	IV/d
4.	IIB	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama	IV/c
5.	IIIA	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
6.	IIIB	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
7.	IVA	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
8.	IVB	Penata Muda	III/b	Penata	III/c
9.	VA	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tk. I	III/b
10.	VB	Pengatur Tingkat I	II/d	Penata Muda	III/a

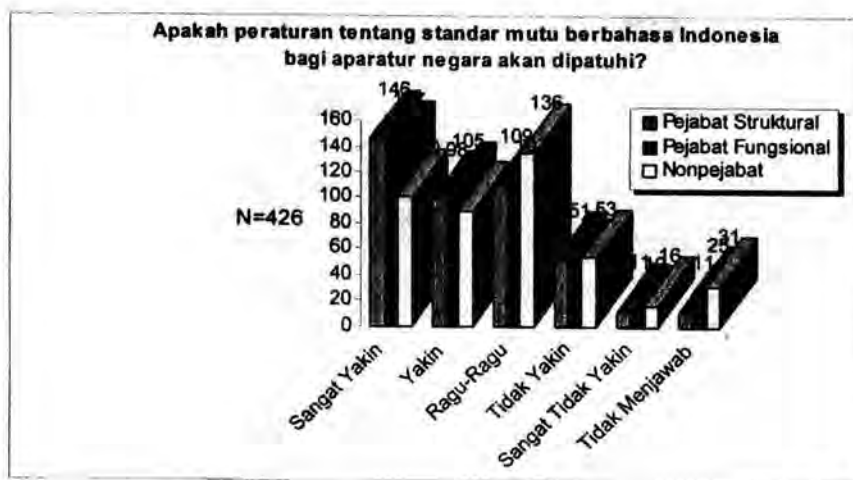
Kemampuan aparatur negara yang mempunyai pangkat Penata Muda dituntut memiliki kemampuan lebih daripada mereka menduduki pangkat Pengatur. Demikian pula aparatur negara yang berpangkat Penata dan Pembina. Hal yang sama terjadi pula pada aparatur negara yang menduduki jabatan fungsional.

Stratifikasi aparatur negara menurut jabatan struktural dan jabatan fungsional yang disusun secara berjenjang menuntut kemampuan yang verjenjang pula. Kemampuan itu termasuk di dalamnya kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Berikut adalah hasil kuesioner yang disebarakan kepada peserta Kongres Bahasa Indonesia VIII pada hari pertama, sebanyak 426 responden.



Grafik di atas menunjukkan bahwa responden sangat yakin jika mutu berbahasa Indonesia perlu distandarkan bagi pejabat struktural.



Grafik di atas menunjukkan bahwa responden sangat yakin bahwa peraturan tentang standar mutu berbahasa Indonesia akan dipatuhi oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional, tetapi responden ragu-ragu apakah aparatur negara nonpejabat akan mematuhi peraturan itu.

Aparatur Negara pada Era Pasar Bebas

Kita tahu bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan diri bergabung ke dalam wadah perdagangan bebas yang disebut WTO (*World Trade Organization*). Organisasi itu bermaksud membebaskan pasar, baik pasar barang maupun layanan (jasa), di suatu negara anggotanya agar pasar itu dapat diakses secara bebas oleh negara anggota lain. Ihwal pasar bebas itu perlu disinggung pada kesempatan ini karena perlu ada ancaman bagi aparatur negara dari sisi kebahasaan untuk menghadapi tantangan serta peluang dari pasar bebas. Intinya adalah pada era itu aparatur negara akan memberikan layanannya tidak hanya kepada masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat internasional yang melakukan usaha dagang di Indonesia. Bagaimana menjaga bahasa Indonesia agar tetap menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat luas termasuk para pelaku dagang di era pasar bebas?

Bisa jadi era perdagangan bebas akan membuat bahasa Indonesia tidak berdaya. Ketidakberdayaan itu akan terjadi jika perdagangan bebas memberikan peluang berdagang tanpa syarat kebahasaan kepada setiap pelaku dagang. Sebagai contoh, dokter-dokter internasional mempraktik di Indonesia dengan bahasa mereka, sedangkan pasiennya orang Indonesia yang tidak terbiasa mengungkapkan perasaan tentang kesehatannya dengan

nikasi dasar kesintasan (survival).

Setiap tipe baterai UKBI berisi lima bagian, yaitu Seksi I: Mendengarkan. Seksi ini menguji kemampuan pejuji dalam memahami bahasa Indonesia lisan yang berupa dialog dan uraian yang rekam. Seksi II: Merespons Kaidah. Seksi ini menguji kemampuan pejuji dalam merespons kaidah bahasa Indonesia. Seksi III: Membaca. Seksi ini menguji kemampuan pejuji dalam memahami bahasa Indonesia tulis yang berupa wacana. Seksi IV: Menulis. Seksi ini menguji kemampuan pejuji dalam mempresentasikan gambar/tabel/grafik dalam wacana bahasa Indonesia tulis. Seksi V: Berbicara. Seksi ini menguji kemampuan pejuji dalam mempresentasikan gambar/tabel/grafik dalam wacana bahasa Indonesia lisan (dialog dan monolog).

Pembakuan tes UKBI dilakukan melalui berbagai tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan materi soal tentang berbagai bidang ilmu dari media cetak dan media elektronik. Tahap kedua adalah penyusunan, penilaian, dan pembahasan soal oleh pakar bahasa dan pakar pengetesan. Tahap ketiga, setelah butir-butir soal disusun menjadi sebuah baterai UKBI, baterai UKBI itu diujicobakan kepada pengguna bahasa Indonesia dari kelompok yang berpendidikan menengah sampai dengan kelompok yang berpendidikan tinggi dengan mempertimbangkan tipe lembaga pendidikan, minat/jurusan, dan prestasi akademik pejuji coba soal. Tahap keempat adalah analisis kesahihan dan keandalan hasil uji coba dengan menggunakan rumus statistika. Berdasarkan hasil analisis, butir soal yang tidak berkualitas disingkirkan atau direvisi. Butir soal yang berkualitas ditetapkan sebagai butir soal baku dan dimasukkan dalam bank soal. Sebelum digunakan, butir soal yang berkualitas dan diketahui bobotnya disusun menjadi sebuah baterai soal.

Basil Sertifikasi UKBI terhadap Aparatur Negara

Selama periode Juli 2002--September 2003 Pusat Bahasa telah memberikan Sertifikat UKBI kepada 559 aparatur negara, yang masing-masing adalah 323 aparatur negara nonpejabat dan 236 pejabat fungsional guru bahasa Indonesia pada sekolah menengah. Dari jumlah aparatur negara itu hanya terdapat enam aparatur negara yang memperoleh skor UKBI dengan predikat Unggul, 142 aparatur yang memperoleh skor dengan predikat Madya. Proporsi terbesar (49%) adalah aparatur negara yang memperoleh skor dengan predikat Semenjana. Bahkan, yang mendapat skor dengan predikat Marginal cukup besar, yaitu 20%. Masih ada empat persen aparatur yang menyandang predikat Terbatas.

Hasil sertifikasi UKBI pada aparatur negara yang berjabatan fungsional guru bahasa Indonesia memperlihatkan keprihatinan kita semua.

Sangatlah jarang guru bahasa Indonesia yang memiliki kemampuan unggul. Menurut basil sertifikasi itu, hanya ada empat orang guru. Sementara itu, hampir separuh guru bahasa Indonesia memiliki kemampuan berbahasa Indonesia di bawah kemampuan rata-rata penutur bahasa Indonesia. Guru yang mempunyai kemampuan rata-rata saja banya seperempat dari jumlah guru yang ada.

Berikut adalah hasil sertifikasi aparatur negara (nonpejabat dan guru bahasa Indonesia).

Peringkat (Predikat)	Aparatur Negara		Jumlah
	Non-pejabat	Guru	
III (Unggul)	4 (1%)	2 (1%)	6 (1%)
IV (Madya)	91 (28%)	51 (22%)	142 (25%)
V (Semenjana)	139 (43%)	133 (56%)	272 (49%)
VI (Marginal)	70 (22%)	44 (19%)	144 (20%)
VII (Terbatas)	19 (6%)	6 (3%)	25 (4%)
Jumlah	323 (100%)	236 (100%)	559 (100%)

Penutup

Isi pernyataan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan UUD 1945 perlu lebih dipahami dengan mengartikan ungkapan "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia" dengan definisi yang mengungkapkan dimensi tinggi. Seberapa tinggi bahasa Indonesia dijunjung sangat bergantung pada seberapa tinggi kedudukan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sertifikasi dalam penjenjangan kepangkatan aparatur negara tidak semata-mata dimaksudkan untuk membedakan beban tugas, tanggung jawab, hak serta wewenang aparatur negara yang bersangkutan, tetapi juga menyiratkan tuntutan mutu berbahasa Indonesia. Karena mutu berbahasa Indonesia berpengaruh pada kualitas layanan aparatur negara kepada masyarakat, standar ideal mutu berbahasa aparatur negara terlu ditetapkan. Penetapan standar mutu itu dilakukan dengan sertifikasi, misalnya dengan sertifikasi UKBI.

LAPORAN SIDANG

Hari/tanggal	: Kamis, 17 Oktober 2003
Topik Makalah	: Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Administrasi Negara dan Kegiatan Kenegaraan
Pembicara	: 1. D.P. Tampubolon 2. Anwar Supriadi 3. Dendy Sugono
Pemandu	: Dr. Hasan Alwi
Pencatat	: 1. Wiwin Erni Siti Nurlina 2. Jonner Sianipar

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Nurdin Yatim (untuk Anwar Supriyadi)
 - a. Apakah usaha untuk bersikap demokrasi dalam berbahasa, (apakah kita menghilangkan sikap hormat-menghormati).
 - b. Apakah bahasa politik itu tidak meliputi bahasa kerja (apakah usaha pembakuan 265 ribu bahasa/istilah di dunia sudah dianggap bersifat akademik).
2. **Pertanyaan:** Nursalim (Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur)

Setiap daerah ada pedoman tata penulisan, yang di dalamnya masih banyak terdapat aspek bahasa yang tidak sesuai dengan kebijakan bahasa dari Pusat Bahasa. Bagaimana tanggapannya dalam hal ini?
3. **Pertanyaan:** Bagiono (Direktorat Menengah Kejuruan)

Kami anjurkan tamatan SMU diuji dengan UKBI dengan tingkat-tingkat, misalnya tingkat unggul dan tingkat madya.

Jawaban: Anwar Supriadi

- a. Bahwa di era reformasi ini kita sedang menghadapi masalah serius, yaitu tingkat pendidikan kita untuk berdemokrasi belum cukup. Aspek saling menghormati belum tercapai.
- b. Tata naskah memang dibuat di daerah-daerah. Sebaiknya dibuat di pusat dengan bekerja sama antara Lembaga Administrasi Negara dan Pusat Bahasa.

Jawaban: D.P. Tampubolon

- a. Masalah pengembangan demokrasi belum sesungguhnya, mungkin disebabkan saling kurang pengertian antarbudaya. Jadi, jangan

ditafsirkan lain-lain.

- b. Bahasa politik adalah bahasa kekuasaan, yang berarti pengambilan keputusan mengenai perundang-undangan, administrasi negara, peraturan negara, dan sebagainya. Yang paling pokok adalah bahasa administrasi dan hukum.
- c. Sumber daya manusia kita memang belum baik sehingga membuat naskah juga salah-salah. Itu sebabnya tata naskah di daerah pun kurang baik.

Jawaban: Dendy Sugono

- a. Kami telah melakukan penyebaran informasi atau pemasyarakatan bahasa Indonesia melalui buku-buku terbitan, juga lewat internet, *home page* di Laman Pusat Bahasa.
- b. Tentang diadakan tes UKBI, sebenarnya hal itu sudah diusulkan ketika Kongres Bahasa Indonesia IV, Kongres Bahasa Indonesia V, dan seterusnya untuk membuat tes standar bahasa Indonesia. Baru sekarang terealisasi.
- c. Pembakuan tes berkaitan dengan keperluan. Memang, diperlukan peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia dan perlunya pembuatan standar pembakuan.
- d. Kita bekerja sama dalam pembuatan kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia. Pembuatan tes peningkatan mutu di SMK dan SMU berbeda pengukurannya. Standar dalam UKBI pada beberapa eselon, pembuatannya dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara yang bekerja sama dengan Pusat Bahasa.

Topik 4:
**PERAN MEDIA MASSA DI DAERAH
DALAM MEMELIHARA BAHASA DAN BUDAYA DAERAH**

**PERAN HARIAN SINGGALANG
DALAM MEMELIHARA BAHASA DAN BUDAYA DAERAH**

Haji Darlis Syofyan
Pemimpin Redaksi Harian *Singgalang*

Pendahuluan

Sebelum masuk ke topik makalah ini, saya ingin memperkenalkan dulu tentang harian *Singgalang*. Harian itu adalah surat kabar harian yang diterbitkan di Padang, beredar selain di Sumatra Barat dan provinsi tetangga, juga ke seluruh wilayah negara ini bahkan ke negara jiran Singapura dan Malaysia. Di mana ada warung nasi padang, di sana ada *Singgalang*.

Kerja sama dengan warung nasi Padang ini sudah sejak lama dilakukan. Sejak terbit 18 Desember 1968, waktu itu *Singgalang* terbit satu kali seminggu. Kemudian, surat kabar itu berkembang menjadi dua kali seminggu dan sejak 18 Desember 1979 menjadi harian terbit delapan halaman. Sehari menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-39 (16 Agustus 1984), surat kabar *Singgalang* terbit 12 halaman setiap hari. Kini surat kabar itu telah berkembang terbit 16 sampai 24 halaman setiap hari.

Edisi perdana *Singgalang*, yang terbit di Padang 18 Desember 1958 itu, mampu menarik hati masyarakat ranah Minang, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Hal itu terjadi karena informasi yang diberikan adalah tentang masyarakat daerah Sumatra Barat baik di kampung halaman maupun di perantauan sehingga *Singgalang* menjadi titian informasi antara kampung halaman dan perantauan.

Selain itu, motonya juga tepat dengan kondisi Sumatra Barat dan ranah Minang waktu itu, yang bertahun-tahun terpukul karena trauma yang ditimbulkan pergolakan daerah dan tekanan pemerintahan Orde Lama. Moto *Singgalang* adalah, "Membina Harga Diri untuk Kesejahteraan Nusa dan Bangsa".

Sifatnya yang khas, antara lain, tersaji sebagai bacaan yang penuh senda gurau dan kritik Minang yang sehat, dan sampai kini menempatkan *Singgalang* menjadi rujukan masyarakat Minang di kampung halaman serta rantau, yang bahkan disebut sebagai satu-satunya surat kabar urang awak di Indonesia.

Surat kabar yang didirikan oleh empat sekawan, Nasrul Siddik St. Mangkuto, Nazif Basir St. Pamenan, Salius Sutan Sati, Haji Basril Djabar (kini Pemimpin Umum Harian *Singgalang*), dikenal sebagai surat kabar kritis sampai saat ini sebagai salah satu resep untuk menarik pembaca, ibarat kesukaan urang awak terhadap makanan yang pedas-pedas.

Peranan Memelihara Bahasa dan Budaya Daerah

Komitmen, memelihara bahasa daerah, bagi harian *Singgalang*, masuk dalam paket misi surat kabar. Oleh karena itu, pada waktu surat kabar ini masih merupakan mingguan, bahasa Minangnya dominan, terutama dalam pemakaian judul, tulisan tentang budaya, adat, cerita, dan kebiasaan masyarakat Minang.

Redaksi *Singgalang* menyadari betul menyajikan bahasa Minang itulah sebagai upaya membangun segmen pembaca yang kuat. Pengelola surat kabar ini mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan tersebut, sekaligus memperjuangkan idealisme.

Untuk memenuhi target bisnis, memanfaatkan lima juta warga Minang di kampung halaman dan jumlah yang sama di perantauan. Inilah yang membuat *Singgalang* besar yang di lain pihak mempertahankan bahasa dan budaya Minangkabau adalah suatu pilihan idealisme untuk membangun masyarakat Minang yang kuat sebagai salah satu pilar persatuan bangsa ini.

Memang adakalanya misi yang merupakan perwujudan idealisme itu muncul lebih kuat jika dibandingkan dengan semangat dan dorongan bisnis. Rasa tanggung jawab untuk memelihara bahasa dan budaya daerah sebagai aset nasional adalah identitas *Singgalang* yang lebih menonjol dibanding dengan kehadirannya sebagai barang dagangan.

Semua itu dilaksanakan dengan mengemban fungsi bahasa secara umum, sebagai alat komunikasi. Itulah keunggulan yang dibangun *Singgalang* ketika masyarakat Minang di kampung dan rantau merindukan media komunikasi, hadirilah surat kabar ini dengan bahasa Minangnya yang sekaligus adalah melaksanakan fungsi budaya.

Dengan tampilan beberapa rubrik dan cerita berbahasa Minangkabau itu, harapan redaksi terpenuhi tuntutan untuk pengembangan kebudayaan, pewarisan' kebudayaan kepada generasi muda serta membuktikan kepada masyarakat pembaca bahwa kebudayaan Minang itu benar-benar suatu kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya.

Dalam perjalanan surat kabar ini kita juga telah memetik beberapa mutiara, antara lain, dengan penyajian bahasa Minang itu muncul makin banyak peminat untuk memperdalam pemahaman terhadap budaya Minangkabau melalui surat kabar harian *Singgalang*.

Tanpa disadari *Singgaling* dengan menerbitkan rubrik yang memakai bahasa daerah itu, telah melakukan pembudayaan terhadap seseorang ataupun telah pula memberikan kesempatan kepada masyarakat dari etnis lainnya untuk mengenal budaya Minangkabau, misalnya, dengan menyajikan petatah petitiyah yang dilengkapi dengan urai papar tentang pesan budaya yang dibawahnya.

Suatu ungkapan dalam bahasa Minang itu, kami sajikan dengan utuh, dan mengupayakan membuat terjemahannya ke bahasa Indonesia untuk dikenal oleh mereka yang tidak bisa berbahasa Minang.

Sampai saat ini harian *Singgaling* masih tetap beranggapan bahwa jika ingin membicarakan serta mengungkapkan suatu konsep dalam kebudayaan Minang karena selalu ada petatah-petitihnya. Istilahnya kita hidangkan ke pembaca dengan bahasa aslinya sebab kalau kita pakai padanannya dalam bahasa lain, tidak masuk atau tidak tepat dengan arti yang ingin kita ungkapkan.

Kondisi Penggunaan Bahasa Daerah Saat Ini di Singgaling

Sejak surat kabar *Singgaling* terbit harian, porsi penggunaan bahasa daerah di surat kabar ini hanya ada di edisi Minggu. Hal itu ditampung dalam beberapa rubrik, antara lain, sebagai berikut.

a. Raso jo pareso

Rubrik yang menampung cerita tentang anak manusia, dalam berbuat itu haruslah mengukur dari semua aspek. Pengambilan keputusan harus dipertimbangkan apakah sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau. Keputusan itu harus diukur dengan norma seperti disebutkan dalam pepatah, 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah' (adat bersendikan agama Islam dan agama itu bersendikan Kitabullah Alquran).

b. Umbuik mudo

Rubrik *umbuik mudo* menampung bagaimana muda-mudi Minangkabau itu harus bersikap menghadapi orang tua, mamak, dan penghulu? Bagaimana seharusnya mereka berpakaian serta bergaul dengan teman sebaya dan sebagainya.

c. Rantau Batuah

Cerita rantau menekankan kegiatan orang rantau dalam beradat istiadat, misalnya dalam mempertunangkan anak, pesta perkawinan, acara turun mandi anak, dan sebagainya.

d. *Ranah Bunda*

Ranah Bunda adalah cerita tentang kampung halaman, terutama dalam kegiatan budaya, pesta perkawinan, mengangkat datuk, serta penghulu dan sebagainya.

e. *Cerita Klasik Minang*

Cerita-cerita klasik Minang ini dikemas dalam rubrik "Senggang" dan ditulis dalam bahasa Minang. Umumnya cerita itu menyangkut soal kehidupan bermasyarakat yang seharusnya dilakukah oleh orang Minang.

Visi dan Misi *Singgalang* Memelihara Bahasa dari Budaya Daerah

a. **Visi**

Harian *Singgalang* harus tampil sebagai penyelamat bahasa dan budaya, khususnya Minangkabau, walaupun arus globalisasi masuk semakin deras.

Visi ini harus diperkuat dengan tetap menyajikan rubrik-rubrik yang mendukung untuk itu. Selama ini bahasa dan budaya bagi etnik Minangkabau telah memberikan arti kepada semua kegiatan serta perilaku manusia dan memberikan makna yang tinggi untuk menjadi masyarakat yang berbudaya.

b. **Misi**

Sementara itu, misi yang diemban *Singgalang* adalah dengan komunikasi yang interaktif, baik bagi masyarakat di kampung halaman maupun di perantauan atau antara kampung halaman dan rantau sehingga terpelihara dan lestari bahasa dan budaya Minangkabau.

Penutup

Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan oleh media massa dalam pengembangan bahasa serta budaya daerah adalah sebagai berikut.

1. Media harus tetap menampilkan rubrik-rubrik khusus serta artikel, tentang peranan bahasa daerah sebagai *sine qua non* (yang mesti ada) bagi kebudayaan dan masyarakat.
2. Media memberi tempat terhadap bahasa daerah untuk tetap membangun sistem komunikasi sehingga memberi makna terhadap budaya, khususnya Minangkabau.
3. Media menempatkan posisi bahasa dan budaya daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia sangat majemuk, yang terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa, menyumbang pada kekayaan bahasa daerah (sekitar 300) dan

dialek yang masih aktif dipergunakan sebagai bahasa percakapan di tiap-tiap daerah. Bahasa-bahasa daerah yang utama adalah bahasa Aceh, Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Media harus mendorong kemajemukan bahasa di Indonesia memperkaya dan memperkuat bahasa persatuan yang dapat dipergunakan di seluruh pelosok Indonesia. Media harus membangun opini bahwa kebutuhan akan adanya bahasa persatuan ini mendorong masyarakat menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional yang telah ditetapkan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

ADAKAH HARAPAN BAGI PERS BERBAHASA SUNDA?

Karno Kartadibrata

Wakil Pimpinan Redaksi Majalah *Mangle*, Bandung

Pengantar

Sejak koran berbahasa Sunda *Sipatahoenan* terbit pada tahun 1923 di Tasikmalaya, pers berbahasa Sunda sampai sekarang tidak pernah mati. Pada tahun 60-an, misalnya, ketika koran *Sipatahoenan* tidak terbit lagi, penerbitan pers berbahasa Sunda justru semakin marak. Seolah-olah berlomba, beberapa majalah seperti *Langensari*, *Sari*, *Cempaka*, *Baranangsiang*, dan *Sangkuriang* bermunculan. Sebelumnya, pada tahun 50-an, telah terbit majalah *Warga* dan *Mangle*. Memang beberapa majalah kemudian hilang dari peredaran, tetapi majalah *Mangle*, koran mingguan *Kujang*, *Gapura*, dan *Giwangkara* tetap terbit sampai sekarang.

Dengan demikian, di saat sekarang pun ketika pers telah masuk ke dunia industri dan informasi menjadi komoditas yang berakibat kompetisi semakin hebat, pers berbahasa Sunda tetap bertahan meskipun masih banyak kekurangan, baik dalam aspek permodalan, teknologi maupun manajemen. Artinya, masih banyak yang perlu dibenahi bila pers berbahasa Sunda ingin tetap hidup dan mencapai kedudukan setara dengan pers lainnya.

Tulisan ini bermaksud memaparkan beberapa permasalahan pokok yang dihadapi pers berbahasa Sunda dewasa ini. Selanjutnya dicoba dikemukakan beberapa gagasan sebagai jalan keluar.

Lima Pijakan

Faktor apakah sebenarnya yang mendorong beberapa pihak di Jawa Barat, baik perseorangan maupun lembaga menerbitkan pers berbahasa Sunda? Dorongan apakah yang paling utama, komersial atau idealisme? Daripada menerbitkan pers berbahasa Sunda bukankah lebih menguntungkan menerbitkan pers berbahasa Indonesia?

Bila kita menengok ke belakang ketika bangsa kita berupaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan pers menamakan dirinya "pers pejoang", idealismelah yang menjadi dorongan utama. Sebagai contoh, ketika koran *Sipatahoenan* terbit, tidak seorang pun pengelolanya mendapat bayaran atau gaji. Mulai pimpinan redaksi sampai pesuruh semuanya membaktikan diri untuk Tanah Air. Uang hasil yang tersisa sesudah pengeluaran biaya, dikumpulkan untuk menambah modal.

Dengan demikian, pers merupakan lembaga sosial-kultural dan bukan lembaga bisnis. Baru pada waktu kemudian, pertimbangan mencari keuntungan masuk perhitungan.

Sampai sekarang pun, pengusaha pers berbahasa Sunda masih sering mengatakan bahwa dorongan utama mereka menerbitkan koran atau majalah semata-mata karena idealisme belaka (terkenal ucapan mereka, "*ngamumule basa jeung budaya Sunda*") yang berarti, 'memajukan bahasa dan kebudayaan Sunda'. Akan tetapi, sebagaimana juga berusaha di bidang lainnya, tentu saja bahan baku harus dibeli dan karyawan harus digaji. Oleh karena itu, perhitungan keuntungan pada akhirnya tidak mungkin luput dari pertimbangan. Dengan kata lain, setiap pengusaha pers berbahasa Sunda sebenarnya mempunyai juga pertimbangan bahwa membuka usaha di bidang pers bukan sama sekali tidak membawa keuntungan.

Ada beberapa pijakan yang memperkuat pertimbangan seperti itu.

Pertama, penduduk Jawa Barat yang mayoritas orang Sunda makin lama makin bertambah jumlahnya. Taruhlah penduduk Jawa Barat yang bisa berbahasa Sunda mencapai 30 juta. Bukankah jumlah itu merupakan pasar luar biasa? Tidak heran jika di kalangan media massa sering terdengar ucapan "Coba ambil satu persen dari sejumlah itu dan kemudian menjadi langganan koran atau majalah. Bukankah oplag besar sekali?"

Patut pula dicatat tingkat pendidikan masyarakat Jawa Barat termasuk tinggi. Beberapa perguruan tinggi terkenal seperti ITB dan Universitas Padjadjaran berlokasi di Jawa Barat. Begitu pula pendapatan penduduk Jawa Barat semakin lama semakin meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan. Semua itu memperkuat anggapan bahwa berusaha di bidang pers berbahasa Sunda bisa menguntungkan.

Kedua, bahasa Sunda sebagai bahasa ibu masyarakat Jawa Barat lebih komunikatif. Meskipun memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bangsa kita dalam pergaulan sehari-hari masih memakai bahasa ibu. Demikianlah yang terjadi di masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Batak dan sebagainya. Ternyata, bahasa daerah dalam beberapa hal mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang kehadirannya relatif masih baru. Misalnya saja, bahasa daerah lebih kaya dalam beberapa bentuk ungkapan dan bisa lebih ekspresif karena sangat mengandung perasaan. Oleh karena itu, bahasa daerah bisa efektif dalam menyampaikan pesan tertentu atau menjelaskan suatu permasalahan.

Pers yang di antaranya bisa berfungsi melaksanakan komunikasi dua arah antara Pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain akan lebih komunikatif bila memakai bahasa daerah. Terlebih lagi, penduduk di beberapa tempat masih lebih mengerti bahasa daerah daripada bahasa Indonesia.

Dengan demikian, pers berbahasa Sunda sangat bermanfaat dan efektif sebagai sarana komunikasi sosial.

Ketiga, pers berbahasa daerah mempunyai "ceruk" tersendiri. Banyaknya penerbitan pers, khususnya yang terbit di ibukota, seakan-akan menghabiskan lahan usaha bagi penerbitan pers berbahasa daerah. Terlebih lagi dengan makin banyaknya penerbitan pers yang mengkhususkan diri menggarap bidang-bidang tertentu seperti pertanian, hukum, dan otomotif.

Dalam keadaan seperti itu, masih adakah lahan yang tersisa bagi penerbitan pers berbahasa Sunda yang bergelut pada oplah 10.000 eksemplar bahkan bisa kurang dari itu? Namun, bertolak dari teori atau pandangan bahwa setiap makhluk sebenarnya mempunyai *ceruk* atau *niche* tersendiri, bisa saja disimpulkan, pers berbahasa Sunda pun bisa berkembang asal mampu menemukan *niche* atau *ceruk*-nya. Hal itu bisa berkaitan dengan khalayak pembaca atau muatan isi penerbitannya. Dengan demikian, baik dalam isi maupun sasaran pembaca, pers berbahasa Sunda bisa menetapkan pilihan. Tentu saja semua ini memerlukan pengamatan dan penelitian, bukan hanya berdasarkan keinginan. Survei terhadap keinginan pembaca agar bisa menetapkan muatan isi, dengan demikian selayaknya diadakan secara teratur dan berkala.

Masyarakat Sunda yang sekarang hidup di kota dan telah mencapai kehidupan yang mapan, bisa diduga masih menyimpan kenangan akan budayanya sendiri. Mereka sudah barang tentu ingin menerima informasi mengenai daerahnya sendiri termasuk perkembangan kebudayaannya. Mereka masih mempunyai rasa cinta akan memiliki budaya sendiri dan tidak ingin semuanya itu musnah. Media massa Sunda sebenarnya bisa memanfaatkan keadaan psikologis seperti itu dengan menyajikan tulisan mengenai keadaan daerah di Jawa Barat lengkap dengan kisah manusianya.

Siapakah, golongan manakah yang memenuhi kriteria seperti itu? Di manakah mereka, bagaimanakah caranya untuk meraih mereka agar menjadi pembaca media massa Sunda? Semua ini tentu bisa dilacak bila kebijakan pemasaran telah ditetapkan dengan jelas.

Keempat, arus globalisasi tidak melemahkan, tetapi justru memperkuat keinginan masyarakat mencari jati diri. Meluasnya pengaruh globalisasi menimbulkan kecemasan di sementara pihak bahwa kekhasan setiap bangsa, baik di bidang etika, pergaulan sosial, maupun ekspresi seni dan bidang lainnya, akan terlindas. Di bidang mode, misalnya, begitu derasnya mode terakhir dari Amerika Serikat, Eropa, dan negara maju lainnya masuk ke negara kita. Secara serempak muda-mudi di negara kita meniru model (potongan rambut atau pakaian) yang sedang populer di sana. Begitu Demi Moore memangkas pendek rambutnya, seperti dapat ditonton dalam film *Ghost*, seperti demam mode rambut seperti itu melanda kaum wanita di

negara kita. Dengan derasnyanya arus globalisasi, bukankah akan terjadi penyeragaman di dunia dan menghilangkan kekhasan budaya di tiap bangsa? Bukankah hal itu merupakan ancaman bagi kekhasan pengucapan bangsa kita di bidang kesenian, perilaku sosial, termasuk kreativitas dan selera?

Kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Arus globalisasi dalam beberapa hal justru meningkatkan hasrat masyarakat mencari jati diri. Hal ini terjadi, baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Di Amerika Serikat, misalnya, hasrat mendalami agama tumbuh dengan kuatnya demikian pula di negara kita. Mereka yang tadinya acuh tak acuh terhadap agama, sekarang timbul hasratnya untuk mendalami semua itu seperti terlihat di kampus-kampus, khususnya di kota-kota besar.

Hal seperti itu bisa dihubungkan pula dengan tumbuhnya kembali hasrat untuk memajukan budaya etnis. Bahasa daerah yang semula tidak diperhatikan sekarang diangkat ke Kongres Bahasa dan dibuka dengan resmi oleh pejabat negara. Makanan tradisional sekarang telah masuk ke restoran dan beberapa jenis kesenian telah masuk ke hotel berbintang dan ditayangkan pula di TV. Semua ini sebenarnya merupakan peluang besar bagi pers berbahasa daerah untuk mengembangkan diri.

Kelima, semangat paguyuban untuk memajukan daerah sendiri sangat kuat. Di daerah Sumatra Barat semangat ini bisa dibuktikan dengan suksesnya Gerakan Minang Seribu. Tiap orang Minang di rantau secara serempak mengirimkan uangnya paling sedikit Rp1000,00 untuk dipakai memajukan daerahnya sendiri. Hal yang sama terjadi ketika majalah *Mangle* mengajak tokoh-tokoh tertentu di Jawa Barat menyumbangkan uangnya untuk dipakai membeli majalah *Mangle* yang kemudian disebarakan di desa-desa terpencil. Sambutan ternyata sangat baik.

Semangat paguyuban seperti itu sebenarnya sangat baik bila selamanya ditimbulkan dan diperkuat. Media massa berbahasa Sunda bisa mengajak tokoh-tokoh di Jawa Barat untuk memajukan daerahnya termasuk memajukan kehidupan pers.

Manajemen, Redaksional, dan Finansial

Kelima pijakan itu tidak akan berarti apa-apa bila tidak diikuti dengan persyaratan berupa kesiapan di bidang manajemen, redaksional dan finansial. Kesiapan manajemen akan mampu menggerakkan semua sumber daya, baik yang ada di perusahaan maupun di masyarakat untuk mencapai tujuan. Sementara itu, kesiapan redaksional akan mampu menyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pembaca, artinya sesuai dengan syarat-syarat jurnalistik yang diharapkan. Kesiapan finansial menjamin persediaan dana agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan setiap waktu.

Kesiapan Manajemen

Perusahaan pers hanya bisa hidup dengan baik bila cukup sumber daya dan mampu memanfaatkannya. Sumber daya itu, manusia, dana, sarana lainnya, bisa berada, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Manajemen pers yang sangat diharapkan adalah manajemen yang bisa mendayagunakan sumber daya di perusahaan (manusia, dana dan sebagainya) dan sumber daya di luar perusahaan sehingga semua potensi dapat dikerahkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ciri utama manajemen demikian adalah terbuka dan mendorong semua pihak berperan serta (partisipatif). Dengan terciptanya kondisi terbuka di perusahaan, akan memudahkan pengawasan dari satu komponen terhadap komponen lainnya. Direksi, misalnya, tidak akan berbuat semaunya karena mendapat pengawasan dari komisaris, pemegang saham dan serikat karyawan. Akibat pengawasan itu, aturan main di perusahaan bisa bejalan dan penyimpangan dapat ditekan sekecil mungkin. Aturan main sebagai rujukan bersama tidak disusun sepihak, tetapi bersama-sama, melibatkan tingkat manajemen dan karyawan. Dengan demikian, sampai batas tertentu, keadilan dapat diwujudkan.

Salah satu penyakit kronis yang merusak pers berbahasa Sunda adalah sering timbulnya konflik antara direksi dan karyawan akibat tidak terwujudnya keadilan. Misalnya saja distribusi pendapatan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan. Itulah di antaranya yang menyebabkan pers berbahasa Sunda yang telah hidup subur di tahun-tahun 60-an tidak bisa bertahan lama. Kalaupun ada yang bisa bertahan sulit berkembang dengan pesat bak peribahasa "Bagai kerakap tumbuh di batu, hidup tidak mati tak mau".

Manajemen terbuka dan partisipatif akan menjamin kepentingan semua pihak bertolak dari kesepakatan yang telah disusun bersama. Di perusahaan nonpers kesepakatan seperti itu disebut KKB (kesepakatan kerja bersama) yang menjamin hak-hak dan kewajiban, baik tingkat manajemen maupun karyawan. Karena karyawan pers bukan buruh, tetapi pemegang saham, ketentuan pihak karyawan memiliki saham sebesar 20% hendaknya mendapat perhatian saksama baik dari pengelola perusahaan maupun dari pemerintah. Kelemahan ketentuan itu adalah sampai sekarang belum ada pegangan yang jelas. Meskipun demikian, asal ada kemauan kuat dari tingkat manajemen dan serikat karyawan maka ketentuan itu bisa dilaksanakan. Dengan demikian, pihak karyawan akan ikut bersama-sama menentukan jalannya perusahaan. Semangat kerja pun akan timbul karena mereka tahu keuntungan tidak jatuh pada direksi atau pemilik saja tetapi sampai juga ketangan mereka.

Kesiapan Redaksional

Terlepas dari kekurangannya, mingguan tabloid *Detik* telah membuktikan bahwa kepekaan jajaran redaksi terhadap aspirasi yang sedang tumbuh di masyarakat dapat membuat media massa disukai masyarakat. Patut dicatat mingguan *Detik* terbit di saat pemerintah sedang gencar melancarkan keterbukaan di segala bidang: politik, ekonomi, dan sebagainya. Di saat koran-koran lain ragu-ragu bagaimana mengisi ajakan keterbukaan itu, mingguan *Detik* secara gesit tampil dengan penyajian isi yang lugas dan menggigit. Penyajian isi seperti itulah yang disukai pembaca mengingat mereka telah sekian lama hanya disuguhi tulisan koran-koran yang terlalu hati-hati penyajiannya. Ternyata, penyajian tulisan sekitar politik dapat menarik perhatian pembaca yang mungkin telah jenuh disuguhi tulisan hiburan sekitar gosip kehidupan artis.

Memang kemudian mingguan *Detik* tidak lama hidupnya karena larangan terbit dari Pemerintah. Meskipun demikian, sebagaimana dibahas dalam tajuk rencana koran *Kompas*, kepekaan redaksi terhadap aspirasi pembacalah yang membuat mingguan tabloid itu disenangi pembaca. Kemampuan redaksi seperti itulah yang masih kurang dimiliki jajaran redaksi pers berbahasa Sunda. Isu-isu penting apakah yang menarik perhatian masyarakat Sunda? Bagaimanakah caranya isu-isu dituangkan dalam penulisan agar menarik untuk dibaca? Semua ini tetap merupakan permasalahan yang harus dijawab redaksi pers berbahasa Sunda.

Hal lain yang sangat penting, tetapi kurang ditangani adalah penguasaan jajaran redaksi terhadap penggunaan bahasa. Masih sering timbul salah anggapan bahwa ragam bahasa jurnalistik seolah-olah bahasa yang tidak punya aturan. Dengan demikian, tumbuh sikap menganggap enteng penguasaan bahasa. Padahal, ragam bahasa jurnalistik tetap bertolak dari penggunaan bahasa yang baik dan benar. Seorang sastrawan harus mampu menggali potensi bahasa agar dapat dituangkan menjadi karya sastra yang unggul. Demikian pula wartawan harus mampu menggali potensi bahasa agar dapat disajikan menjadi karya jurnalistik yang unggul pula. Bagaimanakah penyajian tulisan dalam koran atau majalah bisa disenangi pembaca bila bahasa sebagai "bahan baku" tidak dikuasai penggunaannya?

Dalam penggunaan bahasa Sunda memang ada masalah yaitu menyangkut penggunaan *undhak usuk* bahasa. Masalah ini sungguh pelik bila dikaitkan dengan ragam bahasa jurnalistik. Di satu pihak bahasa pers menyaratkan demokratisasi penggunaan bahasa karena tanpa itu tidak akan tercipta komunikasi yang komunikatif dan akrab, tetapi di pihak lain *undhak usuk* bahasa justru mensyaratkan ada tingkatan-tingkatan dalam pemakaian bahasa. Misalnya saja terhadap Bapak Gubernur dan Bapak

Bupati mesti memakai kata *gumujeung* (artinya:tertawa), tetapi kata itu terlalu halus bila dipakai untuk tukang becak, misalnya. Nah, bagaimana jalan keluar permasalahan bahasa seperti itu?

Namun, karena *undhak usuk* bahasa telah menjadi kenyataan dalam penggunaan bahasa di masyarakat Sunda, tidak ada jalan lain, yaitu tetap menggunakannya. Tentu saja dalam hal ini wartawan diminta dapat kreatif artinya meskipun tetap menggunakan *undhak usuk* bahasa, tetapi harus mampu menyajikannya secara komunikatif dan akrab.

Kesiapan Finansial

Pengelolaan perusahaan pers secara profesional akan banyak membutuhkan dana, baik untuk biaya peliputan tulisan maupun untuk membeli teknologi cetak. Penyajian tulisan yang lengkap dan akurat tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih lagi harus didukung tenaga wartawan yang jumlahnya memadai. Teknologi cetak juga selayaknya mengikuti zaman karena pembaca sekarang bukan saja menyenangi isi yang aktual, melainkan juga lebih suka bila isi yang baik disertai dengan tata rupa yang indah.

Dari manakah dana dapat diperoleh?

Perusahaan pers yang statis umumnya hanya mengandalkan pemasukan dana dari penjualan produk penerbitannya dan tidak menggali dana yang baru. Kebijakan seperti itu akan menyulitkan bila oplah tetap saja tidak meningkat. Oleh karena itu, mestilah diterapkan kebijakan pendanaan yang dinamis. Artinya, segala sumber dana harus digali. Misalnya saja melalui kredit bank, berbagai macam bentuk kerja sama (mengundang investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan) dan bantuan-bantuan lainnya. Semua kemungkinan ini tentu saja harus digali dan jangan dilewatkan. Hanya manajemen yang dinamis dan mempunyai akses yang luas terhadap sumber dana bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Sekarang dan Masa yang Akan Datang

Bagaimanakah keadaan pers berbahasa Sunda sekarang?

Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, keadaan pers berbahasa Sunda masih banyak kekurangannya, baik dalam aspek permodalan, manajemen, maupun teknologi cetak. Dari semua kekurangan itu, langkanya sumber daya manusia yang unggul benar-benar merupakan penghalang.

Jadi, perencanaan yang harus dimulai dari sekarang adalah mendidik sumber daya manusia yang akan mengelola perusahaan pers Sunda di masa yang akan datang. Sementara itu, pengelola yang sudah ada sekarang sudah barang tentu harus meningkatkan kecakapannya, baik di bidang manajemen

maupun redaksional. Namun, yang lebih penting adalah menyiapkan regenerasi agar dalam waktu 10--20 tahun ke depan pers berbahasa Sunda mencapai kemantapannya.

Semua jalur hendaknya ditempuh. Pertama, menata perusahaan pers berbahasa Sunda itu sendiri. Kedua, menciptakan kondisi di masyarakat agar kehadiran pers Sunda mendapat sambutan yang baik. Rasa memiliki terhadap pers berbahasa Sunda hendaknya terus ditumbuhkan. Tokoh masyarakat, baik secara informal maupun formal bisa diajak turut serta memajukan pers berbahasa Sunda.

Masyarakat dan Pemerintah akan tumbuh perhatiannya terhadap pers Sunda bila pers itu sendiri giat menumbuhkan dirinya sendiri. Dengan demikian, pengelola pers berbahasa Sunda sudah seharusnya bekerja keras, tidak henti-hentinya bergumul meraih segala kemungkinan agar perusahaannya berkembang.

Rangkuman dan Saran-Saran

Jumlah penduduk masyarakat Sunda sangat besar dan tingkat pendidikan serta kemakmurannya juga makin meningkat. Keadaan seperti ini merupakan lahan subur bagi perusahaan pers berbahasa Sunda untuk mengembangkan kegiatannya. Selain itu masih banyak peluang lain, seperti kuatnya kecintaan masyarakat Sunda terhadap budaya sendiri, kentalnya semangat paguyuban dan hasrat yang tidak pernah padam untuk memajukan etnis sendiri. Kongres Bahasa Sunda telah diadakan beberapa kali dan mendapat perhatian besar dari masyarakat serta pemerintah membuktikan dugaan di atas. Demikian juga sambutan positif dari tokoh-tokoh masyarakat Sunda ketika mereka diajak membeli majalah *Mangle* untuk disebar-kan ke desa-desa tertinggal.

Namun, peluang besar seperti itu belum dimanfaatkan secara maksimal mengingat pers berbahasa Sunda sampai sekarang masih dililit banyak kesulitan, baik dalam aspek permodalan, manajemen maupun teknologi cetak. Dengan demikian, pers berbahasa Sunda harus terus memantapkan dirinya sendiri agar siap di bidang manajemen redaksional dan finansial. Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan, pertama menata perusahaan pers itu sendiri agar setiap komponen mencapai kemantapannya, kedua, menyiasati ke luar agar masyarakat mempunyai apresiasi yang baik terhadap kehadiran pers berbahasa Sunda.

Dari sekian faktor yang perlu diperbaiki, sumber daya manusia menempati kedudukan sentral. Hanya sumber daya manusia unggul yang akan mampu membawa pers berbahasa Sunda keluar dari kesulitan yang sedang dialami sekarang ini.

Beberapa saran di bawah ini perlu mendapat perhatian:

1. Pendidikan dan latihan bagi pengelola pers berbahasa Sunda baik di bidang manajemen, redaksional, pemasaran dan bidang lainnya perlu diselenggarakan secara sistematis dan kontinu. SPS dan PWI hendaknya menaruh perhatian terhadap pendidikan dan pelatihan ini.
2. Kesejahteraan hidup karyawan pers sangat perlu diperhatikan dan terus diupayakan perbaikannya. Oleh karena itu, ketetapan bahwa karyawan pers mendapat bagian saham sebanyak 20% hendaknya dilaksanakan di setiap perusahaan pers.
3. Pers berbahasa Sunda hanya dapat hidup dengan pesat bila masyarakat Sunda mempunyai apresiasi yang baik terhadap kebudayaannya. Oleh karena itu, upaya memajukan kebudayaan Sunda perlu mendapat perhatian dan bantuan dari semua pihak khususnya dari pemerintah.
4. Upaya memberi motivasi seperti hadiah-hadiah untuk karya jurnalistik yang baik (hadiah jurnalistik Adinegoro dsb.) hendaknya diikuti juga di lingkungan pers berbahasa Sunda. Ada baiknya bila di Jawa Barat, PWI misalnya memberi hadiah jurnalistik Moh. Kurdi untuk jurnalistik berbahasa Sunda yang berkualitas.
5. Kegiatan Hari Pers Nasional selain membahas kehidupan pers nasional ada baiknya juga membahas kehidupan pers berbahasa daerah. Media massa berbahasa Sunda sangat baik sekali bila setiap bulan Februari bertepatan dengan Hari Pers Nasional mengadakan forum pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi pers berbahasa Sunda. Dalam pembahasan itu setiap permasalahan dicari jalan keluarnya sehingga diharapkan permasalahan Sunda akan mencapai kemajuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Djuarsa Sendjaja, *Ekologi Media: Analisis dan Aplikasi Teori "Niche" dalam penelitian tentang Kompetisi Antar industri Media*, dalam Jurnal Ikatan ssarjana Komunikasi Indonesia, Oktober, 1993.
2. Soebagio IN, *Sebelas Perintis Pers Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1976.

PERAN SKH WASPADA DALAM MEMELIHARA BAHASA DAN BUDAYA DAERAH

Drs. Sofyan Harahap

Redaktur Eksekutif SKH di Medan

Pendahuluan

Untuk memelihara bahasa dan budaya daerah tentunya tidak hanya tugas orang-orang pers semata, tetapi tanggung jawab kita--semua elemen bangsa--yang cinta bahasa dan kebudayaan Indonesia. Benar bahwa kontribusi pers dalam meningkatkan minat baca, memelihara bahasa dan budaya tidak perlu diragukan lagi. Proses kemajuan bahasa Indonesia dan kebudayaan daerah sering kali diketahui masyarakat lewat pemberitaan media massa. Kalaupun ada pihak yang menggugat bahwa sebenarnya pers punya andil dalam merusak bahasa dan pelit dalam memberikan kolom-kolomnya. Hal itu hendaknya tidak perlu dibesar-besarkan karena pers punya alasan untuk itu.

Kontroversial mengenai peran media massa dalam memajukan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar kelihatannya tak pernah surut dari dulu hingga saat ini. Masalahnya adalah karakteristik cara kerja insan pers dituntut harus cepat. Cepat dalam mencari berita di lapangan dan cepat pula dalam menuliskan beritanya di media masing-masing di tempat si wartawan bekerja agar masyarakat luas cepat mendapatkan informasi terbaru.

Bahasa Jurnalistik

Pekerjaan wartawan memang dikejar waktu (*deadline*) sehingga bagi mereka yang bertugas, baik di lapangan dalam melaksanakan tugas mencari berita (*reporting*) maupun bagi redaktur yang memperbaiki dan menilai berita (*editing*) sama-sama dikejar waktu. Mereka bekerja dengan waktu yang terbatas. Jadi, *deadline* merupakan poin penting yang mutlak harus dipatuhi oleh segenap insan pers di mana pun dia berada.

Pekerjaan wartawan yang selalu dikejar-kejar waktu itulah yang membuat komunitas pers seringkali membuat kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia baku. Hal itu bisa terjadi karena insan pers tidak punya banyak waktu untuk berpikir dalam menulis berita yang baik dan benar sesuai keinginan pakar bahasa Indonesia. Tuntutan *deadline* tidak bisa diabaikan oleh insan pers. Konsekuensi logis dari karakteristik kerja wartawan dan redaktur itulah yang melahirkan fenomena variasi bahasa pers, populer dengan sebutan bahasa jurnalistik.

Pertanyaannya sekarang: Apa dan bagaimana bahasa jurnalistik itu?

Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh insan pers yang bekerja di media cetak dan elektronik. Sepintas masyarakat awam menilai tidak ada perbedaan bahasa jurnalistik dengan bahasa Indonesia yang dipakai dalam penulisan buku, pidato, seminar dan lain-lain karena sama-sama bisa dimengerti. Namun, kalau diamati dengan saksama, masyarakat (pembaca) yang kritis bisa menemukan dan merasakan perbedaannya.

Jika mengingat fungsi media massa dan karakteristik kerjanya yang selalu diburu-buru oleh waktu guna mengejar *deadline*, pemakaian bahasa di kalangan insan pers pun punya ciri khas, yakni cenderung singkat, padat, sederhana, menarik, jelas, benar dan tentunya harus komunikatif. Tujuan insan pers menggunakan bahasa jurnalistik tentunya agar pesan-pesan berupa informasi dapat dimengerti oleh komunikan tanpa harus mengerutkan kening. Ingat! Pembaca media massa tidak hanya dari kalangan orang-orang berpendidikan tinggi, tetapi juga kalangan menengah dan bawah (*wong cilik*).

Sifat bahasa jurnalistik anti dalam penggunaan kalimat panjang seperti halnya dalam penggunaan bahasa buku dan pidato-pidatoan para pejabat pemerintah sehingga bahasa jurnalistik lebih mudah dimengerti oleh masyarakat karena ditulis dalam bentuk berita langsung (*straight news*) sehingga poin yang penting sengaja ditempatkan di bagian atas menjadi teras berita (*lead*) sehingga dengan membaca judul dan *lead*-nya saja pembaca sudah mengerti akan isinya.

Berdasarkan pengalaman kita sehari-hari dalam membaca surat kabar, jarang yang lama, berkisar hanya setengah jam saja. Itu sebabnya berita dibuat seefektif dan seefisien mungkin dengan menggunakan kalimat yang pendek-pendek. Informasinya ditulis dengan menggunakan gaya piramida terbalik. Jadi, para wartawan dan redaktur selalu ingin memuaskan pembacanya, keingintahuan pembaca langsung terjawab.

Bahasa jurnalistik lahir dan berkembang membentuk variasi tersendiri dalam masyarakat sesuai dengan tuntutan pasar di zamannya. Bagaimanapun juga fungsi yang diemban media massa dan karakteristiknya yang mementingkan laporan tercepat dan keterbatasan halaman dan waktu, membuat komunitas pers tidak bisa divonis merusak kaidah dan perkembangan bahasa Indonesia.

Kalau terkadang para wartawan dan redaktur di media massa membuat kesalahan dalam menulis berita dan membuat judul yang dipotong pada awalnya dan dibuat singkat, tetapi hal itu bukanlah tanpa sebab. Dasar utamanya untuk efisiensi kata mengingat kolomnya terbatas. Dalam media massa cetak ada kiat membuat judul agar menarik perhatian pem-

bacanya sehingga tentu saja berbeda dengan judul-judul dalam penulisan buku ilmiah.

Sebagaimana bahasa-bahasa lainnya yang berkembang di masyarakat, maka bahasa jurnalistik pun terus berkembang mengikuti zamannya, dan tidak terbantah punya andil yang cukup besar dalam memperkaya--khususnya dalam menambah perbendaharaan kata-kata baru--khazanah bahasa Indonesia yang juga terus berkembang sesuai dengan apa yang dialami oleh pemakainya.

Rubrik Seni dan Budaya

Di surat kabar, majalah, dan media elektronik (radio dan televisi) rubrik seni dan budaya mendapat tempat khusus. Rubrik ini selalu diprioritaskan. Padahal, segi komersialnya kurang sekali. Pemasang iklan tidak berminat memasang iklan di halaman tersebut. Mengapa? Jawabannya tiada lain karena hanya kalangan tertentu yang menyenangkannya.

Pada dasarnya, media massa berkewajiban dalam mengembangkan seni dan budaya di daerahnya masing-masing. Ini terkait dengan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Itu sebabnya media massa membuka rubrik yang berkaitan dengan pendidikan, seni, dan budaya. Hal itu membuktikan media massa tidak semata-mata mengejar profit, tetapi juga memiliki idealisme dalam memajukan seni dan budaya khususnya di daerahnya masing-masing.

Sayangnya, kegiatan seni dan budaya berupa karya teater, tarian dan lain-lain dalam bentuk pentas (pegelaran) masih belum memasyarakat. Sulit mencari kegiatan seni dan budaya yang berkualitas tinggi, kebanyakan dilakukan kurang persiapan sehingga kurang menarik perhatian masyarakat pencinta seni dan budaya. Penontonnya sedikit. Begitu juga kegiatan budaya di suatu daerah oleh etnis tertentu terbilang minim. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya keseriusan pekerja seni dan para pembina seni dan budaya itu sendiri. Faktor kurangnya dana selalu menghantui pekerja seni karena umumnya pagelaran seni sulit dijual. Kiranya hal ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah sehingga kegiatan seni dan budaya tidak semakin suram di masa mendatang

Peran SKH *Waspada*

SKH *Waspada* terbit sejak 11 Januari 1947 di Medan. Saat ini terbit dengan 16 halaman setiap harinya. Porsi pemuatan berita lebih dari 60 persen, sisanya features, foto, opini, tajuk, agenda, karikatur plus iklan. Mengapa porsi berita dominan? Hal itu sejalan dengan tuntutan pasar masyarakat ingin mengetahui perkembangan dan informasi seputar kejadian terkini di dalam dan luar negeri.

Namun begitu, SKH *Waspada* membuka berbagai ragam rubrik, di antaranya rubrik Budaya setiap hari Minggu satu halaman penuh. Selain itu, berbagai kegiatan seni dan budaya selalu diekspose di halaman berita sehingga bisa dikatakan hampir setiap hari ada saja kegiatan seni dan budaya dari puluhan etnis di Sumut dan Aceh yang dimuat di berbagai halaman, seperti halaman Sumut, Aceh, Medan Metropolitan, Nusantara, dan Nasional.

Halaman Budaya *Waspada* berisi karangan khas (*features*) beraneka kegiatan seni dan budaya masyarakat Sumut dan Aceh, ada juga rubrik puisi, cerita pendek, profil seniman dan karangan bebas berupa kritik dari peminat seni dan budaya. Sayangnya, karangan bebas dari para seniman dan budayawan yang berkualitas relatif sedikit. Jarang masuk ke redaksi. Hal ini menimbulkan tanda tanya.

Hemat saya, berdasarkan pengamatan dan omong-omong dengan redaktur Budaya *Waspada* (Sdr. Adi Mujaibir) penulis seni dan budaya cenderung malas menulis di media massa. Faktor penyebabnya bisa karena honorinya kecil, kurang mampu menulis, dan takut menimbulkan polemik. Faktanya sesama pekerja seni dan budaya selalu berpolemik, saling menjelekkan penampilan rekannya dan polemik itu berlangsung cukup lama, berlarut-larut serta tidak mendidik.

SKH *Waspada* berupaya meniadakan polemik. Kalaupun ada tanggapan cukup sekali saja dimuat setelah itu ditutup karena berdasarkan pengalaman polemik hanya membuang-buang waktu, halaman, dan pikiran.

SKH *Waspada* dalam kiprahnya memelihara bahasa yang pertama tentunya dengan cara meningkatkan SDM (sumber daya manusia) para wartawan di lapangan, baik yang status koresponden daerah maupun reporter kota dan staf redaksi. Caranya adalah dengan saling melakukan koreksi jika terjadi kesalahan dalam ejaan dan kalimat. Selain itu, setiap enam bulan sekali mendatangkan pakar bahasa dari kalangan kampus (USU dan Unimed) untuk ceramah sekaligus tanya jawab (diskusi) seputar pemakaian bahasa di SKH *Waspada* dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan serupa di penerbitan berikutnya.

Karena sirkulasi SKH *Waspada* sebagian besar di daerah-daerah SKH *Waspada*, terkadang memuat istilah dan kata-kata yang populer di daerah (Sumut dan Aceh). Memasukkan kata-kata berbahasa daerah pada awalnya dengan mengartikannya, tetapi bila sudah populer tidak lagi perlu dijelaskan. Umumnya, untuk berita-berita daerah penggunaan bahasa daerah sebagai warna dan daya tarik dibenarkan. Namun, untuk konsumsi halaman depan, hal itu dilakukan secara selektif. Ungkapan *kombur malotop* (Asahan), *kupak-kapik*, *rorak* (Labuhanbilik), *hanapeng* (Aceh) kini sudah umum dipakai dalam masyarakat di Sumut dan Aceh.

Sementara itu, untuk pendidikan masyarakat, SKH *Waspada* membuka rubrik seputar bahasa Indonesia yang benar. Rubrik ini bekerja sama dengan Balai Bahasa Medan sehingga masyarakat luas mengerti bahasa yang baku dan tidak baku serta cara penggunaannya dalam kalimat. Untuk memelihara budaya daerah agar tetap terpelihara dengan baik, SKH *Waspada* selalu aktif dalam meliput event budaya, seperti pesta Mejuah-juah di Nias, pesta Danau Toba di Parapat, pesta Adat Karo, Sibolga, dan Melayu. Kontribusi *Waspada* dalam konteks peliputan berita dengan membuka lembaran khusus sejak persiapan sampai *event* budaya tersebut berlangsung.

Satu hal yang juga dilakukan SKH *Waspada* saat ini adalah memasyarakatkan budaya membaca di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Bagian redaksi dan pemasaran saling bekerja sama mengajak pihak sekolah yang punya majalah dinding dengan memberikan surat kabar gratis untuk dipajangkan di sekolah agar komunitas sekolah dapat membacanya. Memang hanya satu lembar, tetapi bagi komunitas sekolah yang ingin membeli untuk dibawa pulang disediakan dengan harga khusus hanya Rp1000,00 per eksemplarnya. Diharapkan dari partisipasi peran *Waspada* tersebut dapat memupuk dan menumbuhkan-kembangkan minat membaca di kalangan pelajar dan guru di sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelajar yang tentunya bermanfaat buat masa depan mereka ke depan.

Justru itu Kongres Bahasa Indonesia VIII 2003 merupakan momentum untuk mendorong semua elemen bangsa peduli pada pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, lewat kongres ini diharapkan pula semua elemen bangsa memiliki komitmen yang tulus untuk mengatasi kendala yang ada selama ini bagi perkembangan bahasa dan budaya daerah.

Penutup

Bahasa adalah alat ilmu pengetahuan dan bahasa seseorang adalah cermin jalan pikirannya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia haruslah baik, baik lisan maupun tulisan. Peran media massa sangat signifikan dalam meningkatkan dan memajukan bahasa Indonesia. Untuk itu, pengelola media massa haruslah orang-orang yang komitmen dengan perkembangan bahasa Indonesia. Begitu juga dalam memajukan perkembangan budaya daerah yang beraneka ragam media massa hendaknya tidak pilih kasih karena tiap-tiap etnis punya ciri khas dan kelebihan masing-masing.

SKH *Waspada* merasa berkewajiban untuk memajukan bahasa dan budaya daerah. Hal itu dibuktikan dengan liputan yang berkaitan dengan bahasa, seni dan budaya, termasuk membuka rubrik khusus. Namun,

kemajuan bahasa dan budaya daerah tidak lepas dari peran Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, untuk menggairahkan budaya membaca sasaran utama yang harus segera dilakukan adalah mendekati komunitas siswa dan mahasiswa. Caranya dengan menyediakan bahan bacaan yang bermutu dan memotivasi mereka untuk membaca karena manfaatnya sangat besar. Kiranya departemen terkait menaruh perhatian serius akan pentingnya budaya membaca ini dengan terlebih dahulu menyingkirkan hambatan-hambatannya, antara lain mahalnnya harga buku, sedikitnya buku yang berkualitas, mengawasi dan mengurangi menonton televisi (imbauan bagi orang tua), termasuk meningkatkan kemampuan anak didik membaca. Kalau ada anggapan kemampuan membaca dianggap selesai ketika pendidikan dasar telah terlewati, pandangan seperti itu sangatlah keliru karena sebagaimana perlunya kemampuan menulis diasah, membaca pun memerlukan keahlian. Anak didik harus dibiasakan membaca dengan cepat dan tepat serta mengerti apa yang sedang dibaca dan dapat pula bersikap kritis serta mengambil simpulan dan manfaat dari buku yang dibacanya. Dengan penumbuhan budaya membaca, setiap orang akan merasakan sebagai suatu kebutuhan sehingga apabila tidak membaca sesuatu yang bermutu sehari saja terasa ada yang kurang dalam dirinya.

KEARIFAN BAHASA LOKAL PADA PERS BERBAHASA INDONESIA

Drs. Arwan Tuti Artha

Redaktur Bahasa SKH *Kedaulatan Rakyat*

Membaca Masalah

Bahasa, sebagaimana ditunjukkan Leonard Bloomfield (1995) memainkan peranan penting dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bahasa pun berkembang dari waktu ke waktu. Bahasa juga mempunyai pengaruh yang luar biasa, termasuk yang membedakan manusia dari binatang. Apabila dibicarakan dalam forum kongres, memang benar karena bahasa tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Termasuk pers yang memanfaatkannya sebagai alat komunikasi dengan publik.

Oleh sebab itu, bahasa--terutama dalam pers cetak--sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat. Apalagi bahasa itulah yang dibaca secara serentak di seluruh wilayah sehingga diharapkan ada peran spesifik pada bahasa dan pers itu sendiri, yakni bisa sebagai *anutan*, sebagai referensi atau sebagai contoh yang benar. Artinya, bahasa pers tidak bisa membebaskan diri dari aturan kebahasaan. Bahasa pers harus diciptakan dengan kesadaran meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia (terutama pers berbahasa Indonesia) dan bahasa daerah (bagi pers berbahasa daerah). Tentu, bukan sebaliknya untuk merusak dan membinasakan bahasa.

Apabila pers selalu melakukan kesalahan bahasa atau tidak memilih penggunaan bahasa yang cerdas, berkualitas dan sesuai dengan situasinya, kesalahan tersebut akan berpengaruh pula pada kesalahan pemakaian bahasa pada masyarakat, mengingat perannya sebagai *anutan* tadi. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan wartawan dalam menulis berita, antara lain kesalahan ejaan untuk penulisan kata, baik dalam menulis kata dasar, kata imbuhan, kata pinjaman maupun kata serapan. Meskipun pelan-pelan kesalahan itu kian mengecil, berkat adanya kesadaran kebahasaan di kalangan insan pers. Kesadaran kebahasaan inilah yang kita harapkan mampu menuntun pembaca untuk tidak melakukan kesalahan.

Tulisan ini setidaknya akan membicarakan masalah yang berkaitan dengan posisi surat kabar daerah, kekuatan bahasa di luar bahasa Indonesia dan peran SKH *Kedaulatan Rakyat* dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Tulisan ini juga dikerjakan dalam kesibukan sehingga tidak tersedia waktu yang cukup panjang untuk melakukan penelitian yang lebih serius lagi.

Posisi Koran Daerah

Semenjak terjadi perubahan politik pasca-Orde Baru, kita melihat pers banyak bertumbuhan. Seiring dengan semakin banyaknya media informasi itu, penggunaan bahasa informasi pun semakin bervariasi. Di samping itu, karena diterapkannya sistem desentralisasi melalui otonomi daerah, kita pun melihat banyak media informasi yang membidik wilayah-wilayah ke-daerahan sebab kewenangan yang diberikan secara lebih pada daerah itu sangat memungkinkan terjadinya informasi menarik dari daerah. Oleh sebab itu, peran pers (media informasi) daerah menjadi sangat besar. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Sejauh mana peran itu menyangkut pada pemeliharaan bahasa Indonesia ketika banyak muncul ungkapan dalam bahasa daerah.

Pada masa lalu, pers atau koran daerah hidupnya kembang-kempis, tirasnya kecil dan selalu kalah bersaing dengan pers pusat. Orientasi informasi pada masa lalu itu memang masih sentralistik sehingga pers daerah belum terlalu memfokuskan pada peristiwa-peristiwa daerah. Boleh dikata, pers daerah pada masa lalu hanya memperoleh sisa-sisa dari informasi yang sudah ditangkapi oleh pers pusat.

Setelah terjadi perubahan politik dan kekuasaan, pers daerah mulai bangkit dan mendapat tempat, bersamaan dengan banyak tumbuhnya kebebasan pers. Kehadiran koran daerah menjadi sangat penting sebagai penyampai informasi kepada masyarakat di daerah sebab banyak sekali kejadian dan hal yang perlu diinformasikan kepada publik. Peristiwa-peristiwa daerah itu sebenarnya tak kalah hebat dengan peristiwa di pusat pada masa lalu. Karena pers daerah harus bisa mengakomodasi peristiwa yang terjadi di daerah, selain juga disebabkan oleh adanya sistem otonomi daerah yang diberlakukan dan terjadinya pemberdayaan daerah, pers daerah kemudian menjadi sentral bagi informasi di daerah. Misalnya terjadinya peristiwa menggemparkan di Purbalingga karena Sumanto makan mayat. Terjadi penyelewengan dana atau terjadi politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota legislatif, gunung meletus, gedung sekolah dibakar, perampokan ratusan juta rupiah di siang bolong terhadap nasabah bank, dan seterusnya, yang menjadi wacana menarik di daerah-daerah.

Di sisi lain, sangat mungkin pengelola pers daerah memikirkan bagaimana bahasa yang paling tepat disampaikan pada pembaca di daerah. Ungkapan bahasa Indonesia murni kadang-kadang tidak terlalu pas atau belum mewakili pengertian yang sesuai. Pada saat itu tak terhindarkan penggunaan bahasa daerah yang sudah sangat dikenal dan akrab dipakai setiap hari. Dipilihnya ungkapan dalam bahasa daerah yang lebih mengena untuk menunjukkan objek informasi artinya ada kekuatan bahasa di luar

bahasa Indonesia yang perlu diperhatikan. Semakin banyak koran daerah diterbitkan atau banyak dibidiknya terbitan khusus daerah diharapkan bisa menampung ungkapan-ungkapan dalam bahasa daerah. Ini menguntungkan, karena bahasa daerah akan tetap memperoleh aktualisasinya dan penyalurannya melalui media formal.

Kekuatan Bahasa di Luar Bahasa Indonesia

Masyarakat Indonesia mengenal bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing sebagai alat komunikasi. Pada saat apa kita menggunakan bahasa Indonesia dan pada saat apa kita menggunakan bahasa daerah, kita pahami sebagai penerapan bahasa untuk situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, untuk komunikasi antaretnik, dipergunakanlah bahasa Indonesia, sedangkan untuk komunikasi interetnik, digunakan bahasa daerah. Namun, dalam praktiknya bisa terjadi percampuradukan bahasa. Di tengah penggunaan bahasa Indonesia, bisa saja muncul bahasa daerah atau bahasa asing.

Kenyataan semacam itu, ternyata juga bisa ditemukan dalam pers Indonesia sehingga selain digunakan bahasa Indonesia ada bahasa lain yang dipergunakan. Munculnya kekuatan bahasa di luar bahasa Indonesia, bisa kita pandang sangat positif karena pemungutan bahasa daerah itu menunjukkan kuatnya posisi koran daerah dan pendekatan pers pada masyarakat. Pemungutan bahasa daerah juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. Kenyataan ini didukung pula dengan penyediaan rubrik untuk menampung secara khusus informasi kedaerahan pada koran-koran pusat. Surat kabar yang terbit di daerah Jawa Timur sangat mungkin bila memanfaatkan bahasa Jawa Timur sebagai bahasa informasinya. Apalagi koran tersebut tidak mungkin beredar di wilayah luar Jawa Timur begitu pula dengan surat kabar yang terbit di daerah Jawa Barat. Tentunya, akan terjadi pula pada surat kabar yang terbit di daerah Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, atau Papua sebab istilah yang berasal dari bahasa daerah itu diduga lebih pas dan lebih bisa dipahami daripada misalnya kurang tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Koran *Jawa Pos*, misalnya, mempunyai *Radar Solo* yang ditujukan untuk wilayah pembaca Solo, sedangkan *Kompas* menyediakan halaman Jawa Tengah dan DIY untuk melayani masyarakat pembaca di wilayah tersebut. Begitu pula dengan *Republika* melayani pembaca di wilayah Jawa Tengah dan DIY melalui rubrik "Kalam". Pada masa lalu, kecenderungan semacam itu tidak tampak. Dengan demikian, digunakannya bahasa daerah menjadi sangat relevan. Artinya, ada kekuatan bahasa di luar bahasa Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi. Kekuatan bahasa di luar bahasa Indonesia itu, terutama, mengacu pada bahasa daerah.

Contoh:

1. *Nggilani*, kebudayaan lokal jadi objek turisme.
2. Tawar-menawar masih *alot*.
3. Panwaslu *sambat* kepada Bupati.
4. Pedagang *klitikan* curi motor.
5. Sekarang *nembung*, besok sudah ada.

Contoh-contoh masuknya bahasa daerah dalam penyapaian informasi ini pada hemat kita masih tergolong santun, sopan, atau memang dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan logis. Bagaimana dengan pemilihan bahasa daerah (Jawa) yang kurang santun, sopan dan terkesan vulgar? Barangkali hal tersebut juga fenomena dari adanya kebebasan penggunaan bahasa pada pers daerah.

Contoh:

1. Keblinger Wedokan Montok, Tekor 18 Juta
2. Ngutil Kaos Dikamplengi di Malioboro
3. Ditembak Bokonge, Gembong Malmot Semarang Njungkel
4. Copet di Bringharjo Soyo Edan
5. Ngembat Duit Majikan Sopir Toko Dipenjara

Peran SKH Kedaulatan Rakyat

Apakah pers daerah tidak terlalu setia menggunakan bahasa Indonesia? Atau, justru memanfaatkan kekayaan bahasa daerah, sehingga penggunaan bahasa komunikasinya lebih diperkaya dengan ungkapan lokal. Dari beberapa pengamatan akhir-akhir ini kecenderungan memanfaatkan kekayaan bahasa daerah memang tampak cukup besar. Begitu pula dengan Surat Kabar Harian (SKH) *Kedaulatan Rakyat*--selanjutnya ditulis KR--sebagai surat kabar daerah terbit di Yogyakarta tidak bisa membebaskan diri dari penggunaan bahasa Jawa, untuk ungkapan-ungkapan tertentu. Kita menyadari bahwa KR adalah surat kabar berbahasa Indonesia, tetapi karena terbit di wilayah kultur Jawa, tak bisa terhindar dari penggunaan bahasa lokal.

Dalam kaitannya dengan pemeliharaan bahasa daerah, pers yang terbit di daerah, setelah terjadi desentralisasi dan pengaruh globalisasi, tentunya tak bisa ditinggalkan. Munculnya penggunaan bahasa daerah itu, yang menyebabkan terjadinya campur kode, dwibahasa atau multilingual, menjadi sangat kuat. Apalagi hanya dengan bahasa itulah ungkapan yang tepat diberikan kepada publik kalau diganti dengan ungkapan lain akan menjadi berbeda pengertiannya. Akibatnya, apabila bahasa yang muncul menjadi pengucapan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah alias terdapat dwi bahasa, kita bisa menempatkan di mana posisi pers lokal tersebut.

Secara kebetulan, KR mempunyai rubrik *Mekar Sari* yang terbit setiap hari Kamis. Rubrik tersebut menggunakan bahasa Jawa sebagai wahana komunikasinya, memuat cerita pendek (*cerkak*), *pedalangan*, *petung*, puisi (*geguritan*), tembang (*macapat*), laporan, dll. Pemunculan rubrik tersebut ditujukan khususnya pada mereka yang berminat pada bahasa dan budaya Jawa, untuk menampung gagasan, informasi, kreativitas, yang ditulis dalam bahasa Jawa. Dalam pemuatannya di KR, rubrik tersebut berdampingan dengan muatan-muatan dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itulah, ada beban khusus bagi pers lokal semacam KR ini yang dikaitkan dengan proses pemeliharaan bahasa daerah (Jawa).

Rubrik tersebut, karena menggunakan bahasa Jawa, artinya tersedia media pengembangan dan media pembelajaran terhadap bahasa Jawa. Kalau selama ini bahasa Jawa hanya bisa dipahami oleh generasi tua, diharapkan generasi muda pun bisa memahami. Atau, setidaknya ada keinginan bertanya apa arti kata-kata yang dituangkan dalam rubrik tersebut. Rubrik tersebut, dari hari ke hari ternyata memiliki peminat yang tinggi sebagaimana data pengunjung *online* yang dicetak 5 Agustus 2003, tercatat 12.587 Hits.

Dari sinilah KR ikut serta memelihara pelestarian bahasa Jawa. Keprihatinan kita selama ini adalah kian sedikitnya penutur bahasa Jawa karena hampir semua informasi disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bahkan, dalam menyongsong globalisasi sudah banyak masuk informasi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Apabila tidak ada kepedulian untuk melestarikan, dikhawatirkan generasi muda kita akan tidak mampu lagi menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi mereka. Dari pembaca yang cukup banyak itu, kita harapkan rubrik *Mekar Sari* ini tidak hanya bermanfaat bagi pembaca kalangan tua, tetapi juga dibaca oleh pembaca generasi muda.

Mengakhiri Masalah

Kita menyadari bahwa bahasa mempunyai peran yang sangat luar biasa. Pada masa lalu, peran dan fungsi bahasa yang lebih banyak diatur oleh Pemerintah melalui lembaga otoritas kebahasaan, seperti Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sekarang harus diserahkan pada media. Media itulah yang harus berperan sebagai polisi bahasa sehingga ungkapan-ungkapan yang muncul dalam media tersebut bukanlah ungkapan yang tidak gramatikal, bukan ungkapan yang vulgar atau kurang sesuai dengan massa pembacanya. Akan tetapi, ungkapan yang bisa mendukung citra media. Citra media itu sendiri sesungguhnya tercermin dari bahasa yang digunakannya.

Untuk itulah, media sebaiknya juga menjalankan peran tersebut dengan menempatkan redaktur sunting atau redaktur bahasa yang bertugas menjaga pemakaian bahasa informasi. Beban tersebut sebenarnya tidak perlu semata-mata diberikan secara khusus sebab redaktur tiap-tiap halaman pada dasarnya juga bisa berfungsi sebagai penjaga penggunaan bahasa.

Koran-koran mapan umumnya sudah memiliki perangkat tersebut sehingga relatif pemakaian bahasa informasi lebih terarah, lebih santun, lebih cerdas, lebih elegan. Pemakaian bahasa juga lebih terkendali, tidak terbawa oleh arus emosional atau terbawa pada penggunaan bahasa secara vulgar. Kalaupun harus menggunakan kekuatan bahasa di luar bahasa Indonesia, kata-kata tersebut tetap memberi kesan tidak asal comot.

PERAN MEDIA MASSA DI DAERAH DALAM MEMELIHARA BAHASA DAN BUDAYA DAERAH

H.M. Hoesni Thamrin

Banjarmasin Post

Pengantar

Suatu kehormatan bagi harian *Banjarmasin Post* yang diminta oleh Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia VIII untuk turut memberikan sumbang saran pada pertemuan akbar tersebut.

Dikatakan suatu kehormatan karena permintaan tersebut seperti-nya *Banjarmasin Post* mendapat durian runtuh. Sesungguhnya banyak media cetak dan penerbitan lain yang lebih berkompeten memberikan paparannya tentang topik yang diminta, yakni "Peran Media Massa di Daerah dalam Memelihara Bahasa dan Budaya Daerah." Apalagi sejak era reformasi telah bermunculan ratusan bahkan ribuan media baru di seluruh tanah air.

Pilihan penyelenggara jatuh pada Surat Kabar Harian (SKH) *Banjarmasin Post* yang tergabung dalam *Banjarmasin Post Group* di Kalimantan Selatan, kami kira mungkin karena dilihat dari usianya yang kini memasuki tahun terbit ke-33. Mudah-mudahan saja pilihan itu tidak meleset karena usia dewasa berarti banyak pengalaman suka dukanya. Apalagi harian itu embrio pada waktu terbitnya diawali dari perjuangan kampus oleh rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) sebagai media perjuangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) di konsulat Kalimantan Selatan.

Pengalaman utamanya adalah pasang-surutnya usaha penerbitan ini dari idealis yang menggebu-gebu (tahun 1966--1971) hingga memasuki penerbitan padat karya, padat modal dan padat teknologi sekarang ini. Tidak terkecuali adalah penataan manajemennya yang penuh persaingan, baik yang berkaitan dengan administrasi, personel maupun keredaksiannya. Untuk kerja keredaksian ini, tantangannya adalah mencari dan menyiapkan (*rekrutmen*) tenaga wartawan. Lebih khusus lagi adalah wartawan yang menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Terus terang saja *Banjarmasin Post* belum merasa puas dengan sajian bahasa Indonesia dan budaya daerah di berbagai rubriknya. Namun, sebagai media cetak yang ingin tetap eksis kami pun selalu berusaha memenuhi ketentuan normatif bahasa Indonesia dan ketentuan jurnalistik yang berlaku.

Kondisi Media Massa di Kalimantan Selatan

Secara kelembagaan media massa di daerah Kalimantan Selatan tidak banyak berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dalam makalah ini akan lebih banyak dibahas peran media massa yang berkaitan dengan media cetak. Pertumbuhan media cetak secara kuantitatif di Kalimantan Selatan sungguh luar biasa. Pada masa Orde Baru yang lalu saat diberlakukannya SIUPP di daerah ini hanya terdapat sebanyak sepuluh buah media cetak (harian dan tabloid mingguan). Akan tetapi, setelah dicabutnya Kepmen Penerangan No. 01/Kep/Menpen/1984 tentang SIUPP itu pada tahun 1998, hanya dalam waktu tiga tahun di Kalimantan Selatan telah terbit sebanyak 66 buah media cetak (harian, mingguan, dwimingguan, dan bulanan). Kalau pada masa Orde Baru yang lalu penerbitannya terpusat di ibu kota provinsi Banjarmasin, sekarang sebelas dari tiga belas kabupaten telah memiliki penerbitan media cetak. Dua kabupaten yang tidak memiliki media cetak sendiri itu adalah kabupaten baru hasil pemekaran. Media cetak yang terbit di kabupaten ini hampir seluruhnya berbentuk tabloid mingguan/dwimingguan dan sebagian besar adalah terbitan humasnya dengan pembiayaan dari APBD masing-masing.

Cepatnya penambahan media cetak di Kalimantan Selatan ini tidak terlepas karena mudahnya persyaratan untuk mendirikan sebuah penerbitan surat kabar. Kalau pada masa berlakunya SIUPP yang lalu dituntut tidak kurang dari 16 persyaratan, sekarang cukup dengan tiga persyaratan saja, yaitu harus berbadan hukum, ada pengelola dan penanggungjawabnya, serta memiliki modal untuk membiayai penerbitan dan karyawannya.

a. Penerbit Media Cetak

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalimantan Selatan (dengan inisiatif sendiri) pada bulan Juli 2002 yang lalu menjelang Konfercab telah melakukan evaluasi terhadap perkembangan ke-66 buah media tersebut dan menyimpulkannya ke dalam tiga kriteria, sebagai berikut.

- (1) Sekitar 20 persen yang benar-benar sehat bisa terbit kontinu dan konsisten.
- (2) Sekitar 40 persen penerbitannya kurang sehat (terbit Senin-Kamis).
- (3) Sebanyak 40 persen lainnya berpredikat hanya pernah terbit.

Kendala terbesar terhadap dua kriteria terakhir ini adalah karena lemahnya manajemen perusahaan dan keterbatasan kemampuan (kualitas) wartawannya.

Ada kecenderungan yang menafsirkan bahwa momen era reformasi ini adalah terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja, khususnya usaha di bidang penerbitan media cetak. Oleh karena itu,

banyak pemilik modal (menengah) di daerah yang mencoba memasuki usaha ini. Modal saja tanpa diimbangi kemampuan manajemen dan keterampilan wartawannya menyebabkan usahanya menjadi terkendala. Sementara di sisi lain, tantangan yang cukup berat adalah masalah pemasaran (*marketing*) karena harus bersaing dengan penerbitan lainnya yang sudah eksis, baik penerbitan daerah maupun penerbitan dari luar daerah.

b. Wartawan di Kalimantan Selatan

Sementara itu, berkaitan dengan menjamurnya penerbitan media cetak ini adalah bermunculannya sejumlah wartawan. Kalau rata-rata sebuah penerbitan merekrut sekitar 15 orang, di Kalimantan Selatan terdapat kurang lebih 900 orang wartawan ditambah lagi sejumlah koresponden media luar daerah. Suatu jumlah yang luar biasa potensialnya, seandainya standar profesi wartawan benar-benar diterapkan.

Dalam kenyataannya, tenaga wartawan sebanyak itu tidak cukup mendukung media tempatnya mengabdikan sehingga berakibat korannya terpaksa terbit kadang-kadang atau tidak terbit sama sekali seperti diuraikan di atas. Jika mengutip sumber PWI Cabang Kalimantan Selatan dalam *Buku Putih PWI Kalsel Tahun 2002*, anggotanya hanya terdaftar sebanyak 220 orang dari sekitar 900 orang yang berpredikat wartawan tersebut. Ke-220 wartawan anggota PWI Cabang Kalimantan Selatan tersebut tersebar di berbagai media di daerah ini (media cetak, media elektronik, dan kantor berita). Wartawan yang berada di luar organisasi PWI tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 40/1999 (tentang Pers) dimungkinkan dan diperkirakan ada yang bergabung pada organisasi wartawan lainnya yang juga tumbuh menjamur di era reformasi ini atau mungkin saja sama sekali tidak menjadi anggota salah satu organisasi wartawan yang telah ada.

c. Organisasi Wartawan

Menurut catatan, sejak era reformasi di Indonesia telah berdiri lebih dari 40 buah organisasi wartawan selain PWI. Hal itu dimungkinkan karena PWI bukan lagi satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia setelah pada tahun 1998 dicabutnya Keputusan Menteri Penerangan, No. 47/Kep/Menpen/1975. Dari 40 buah organisasi wartawan itu, 24 buah di antaranya bersepakat membuat kode etik yang diberi nama Kode Etik Wartawan Indonesia (disingkat KEWI). Sementara PWI yang sudah berusia 57 tahun, sebelumnya juga telah memiliki kode etik tersendiri, yaitu Kode Etik Jurnalistik PWI (disingkat KEJ). Dari 24 organisasi wartawan yang bersepakat membuat KEWI itu, di Kalimantan

Selatan hanya terdapat beberapa buah saja dan itu pun sama sekali tidak diketahui kepengurusannya dan tidak tampak aktivitas organisasinya.

Bahasa Indonesia di Media Cetak

Diketahui bahwa misi media massa dan khususnya media cetak adalah turut mencerdaskan bangsa dengan peran memberikan informasi yang benar, objektif, dan akurat. Kemudian, sebagai media pendidikan publik tidak dapat dipisahkan dengan perannya sebagai ajang hiburan. Sementara, di sisi lain dalam perannya turut menciptakan *good governance* dan transparansi, media juga menyanggah peran sebagai lembaga kontrol sosial. Tugas dan peran ini dilaksanakan secara simultan dan komparatif oleh masing-masing media. Oleh karena itu, dituntut kemampuan simulasi hingga materi yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami masyarakat, khususnya masyarakat pembaca.

Bagaimana cara menyampaikannya adalah akan tergantung pada kemampuan menggunakan bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi pada media cetak, media tulis dituntut keakuratannya hingga menjadi wadah pembelajaran guna mencerdaskan bangsa.

Sekarang pertanyaannya adalah apakah semua media cetak telah melakukan hal tersebut. Jawabannya adalah ternyata belum semua media cetak memperhatikan hal tersebut. Di wilayah Kalimantan Selatan, 20 persen media terbit kontinu dan konsisten. Sebanyak 15 buah penerbitan itu sangat bervariasi penggunaan dan penulisan bahasa Indonesianya.

Sebagai contoh sampel dari hasil penelitian Zulkifli Musaba pada *Banjarmasin Post* April 2001, ditemui kesalahan pemakaian yang sering dilakukan, terutama yang berkaitan dengan:

- a. penggunaan tanda baca: dalam penggunaan huruf,
- b. penggunaan kata: dalam pembentukan kata,
- c. pembentukan kalimat: dalam pembentukan paragraf,
- d. penyesuaian judul: dalam penalaran, dan
- e. kalimat mubazir.

Walaupun sampel itu dicontohkan dari *Banjarmasin Post*, ternyata kesalahan/kekeliruan terhadap pemakaian bahasa Indonesia tidaklah banyak berbeda dengan produk surat kabar lainnya di Kalimantan Selatan bahkan boleh dikatakan harian yang menjadi sampel ini lebih korek dan lebih santun.

Dalam penelitian tersebut diakui bahwa bahasa jurnalistik memang memiliki ciri tersendiri. Lebih spesifik lagi bahwa ragam bahasa koran atau surat kabar memiliki ciri tertentu. Keadaan ini memang sulit diseragamkan karena banyak bergantung pada karakteristik surat kabar

masing-masing dan menjadi kebiasaan yang berlanjut, misalnya, kebiasaan menulis inisial, membuat akronim, kutipan, dan singkatan sebagaimana jenis-jenis kesalahan/kekeliruan di atas.

Walaupun bahasa koran diakui spesifik dan memiliki ciri tertentu, hal itu bukanlah merupakan membenaran. Seyogianya cepat ataupun lambat kesalahan/kekeliruan itu tetap harus mematuhi ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, di sisi lain juga harus diakui bahwa bahasa koran yang salah/keliru itu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus itu akan menjadi sumbangan untuk pertumbuhan bahasa Indonesia itu sendiri. Selama ini perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia cukup familiar dengan bahasa asing maupun bahasa daerah bahkan saling menunjang dan saling berasimilasi serta berfusi sesamanya.

Bahasa Daerah dan Budaya Daerah

Yang dimaksudkan bahasa daerah di Kalimantan Selatan adalah bahasa Banjar (BB). Bahasa Banjar ini rumpunnya juga berasal dari bahasa Melayu. Dalam perkembangan awalnya, karena keadaan geografis, bahasa Banjar ini terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Banjar Kuala (hilir, muara) dan bahasa Banjar Pahuluan (Hulu). BB Kuala banyak dipergunakan oleh penduduk pesisir Kalsel, Kalteng, dan Kaltim.

BB Kuala ini lebih terbuka dan dinamis karena dipengaruhi faktor perdagangan dan mobilitas penduduknya, sedangkan BB Hulu tampaknya agak statis dan banyak dipergunakan oleh penduduk pedalaman (kabupaten-kabupaten di hulu sungai).

Walaupun ada pembagian wilayah tersebut, menurut Guru Besar FKIP, Unlam Prof. Abd. Djebbar Hapip, dalam pengantar *Kamus Bahasa Banjar-Indonesia* dikatakan bahwa kata dan kosakatanya terdapat banyak persamaannya. Artinya warga masyarakat di kedua wilayah tersebut dengan mudah dapat berkomunikasi dalam bahasa Banjar. Yang secara spesifik membedakannya hanyalah dalam dialek, lagu, tekanan, dan pengucapan terhadap fonem tertentu. Bahkan, dialek tersebut dapat pula terdengar dalam subdialek-subdialek (disebut dialek lokal) yang dipergunakan oleh komunitas yang lebih kecil lagi. Setiap kabupaten di hulu sungai mempunyai variasi dialek lokal tersebut.

Di muka disebutkan bahwa bahasa Banjar berasal dari rumpun Melayu sebagaimana juga bahasa Indonesia sehingga dengan demikian kata dan kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Banjar ada juga persamaannya. Karena banyak persamaan tersebut, warga Indonesia yang berasal dari luar Kalimantan bila berada di daerah ini bisa segera mengerti pembicaraan dan dialog dalam bahasa Banjar itu.

Terhadap bahasa Banjar sendiri, agar jangan sampai berkurang pemakaian dan pemahamannya oleh anak-anak sekolah, remaja dan pemuda, Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan pada tahun 1993 memutuskan dan memerintahkan agar bahasa Banjar menjadi salah satu muatan lokal untuk diajarkan di sekolah dasar dan sekolah menengah. Supaya menarik, penyampaian dalam pengajaran di sekolah-sekolah tersebut diikuti dengan penerbitan sejumlah buku cerita rakyat dalam bahasa Banjar. Perintah Gubernur Kalimantan Selatan agar bahasa Banjar dijadikan salah satu materi muatan lokal itu diperkuat lagi dengan hasil keputusan Musyawarah Besar Pembangunan Banua Banjar Tahun 2000.

Pengajaran dengan membaca cerita rakyat bahasa Banjar tersebut memang cukup efektif karena anak didik dan pembaca lainnya mendapat dua manfaat: mengenal dan belajar bahasa Banjar dan sekaligus terhibur oleh alur ceritanya.

Kalau pada bagian terdahulu, bahasa daerah dikembangkan lewat pendidikan di sekolah-sekolah dan penerbitan buku cerita rakyat dalam bahasa Banjar, jauh sebelum adanya keharusan bahasa Banjar sebagai muatan lokal, para penerbit surat kabar juga telah melakukan upaya yang serupa. Hampir semua surat kabar yang terbit di Kalsel secara sukarela selalu memberi tempat dan menyediakan ruang untuk bahasa Banjar tersebut. Hal ini terlihat dari rubrik-rubrik yang disediakan, baik berupa ruang pojok, opini, puisi, maupun kisah khusus dalam bahasa Banjar yang dimuat per episode harian ataupun secara bersambung.

Di samping penerbitan media cetak, juga media elektronik radio RRI, radio swasta dan televisi melakukan hal yang serupa, yakni memberi ruang untuk acara bahasa Banjar. Acara tersebut dikemas dalam bentuk dialog, peran peragaan atau lakon cerita dalam bahasa Banjar ataupun juga lewat lagu-lagu daerahnya.

Khusus untuk lakon cerita dalam budaya Banjar, walaupun agak terbatas, sekarang mulai digalakkan lagi karena adanya tuntutan dan kerinduan masyarakat terhadap budaya daerah. Lakon sajian budaya daerah Banjar yang tetap disenangi dan sudah bertaraf nasional adalah *mamanda*, *madihin*, dan *lamut*. Ketiga jenis budaya ini tetap tidak tersaingi karena spesifikasinya adalah harus dibawakan dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Banjar, dan kurang menarik bila diindonesiakan (dijadikan bahasa Indonesia). Pertunjukan tiga jenis hiburan budaya daerah ini oleh Taman Budaya Diknas diagendakan secara khusus lewat pentas pertunjukan dan diliput secara luas oleh berbagai media massa daerah.

Bahasa Banjar Lewat Kisah Palui

Secara khusus, pada bagian ini dicontohkan sosialisasi, pemasaran, dan pengembangan bahasa daerah Banjar dilakukan oleh *Banjarmasin Post*. Harian ini, yang terbit sejak 2 Agustus 1971, menyediakan rubrik khususnya untuk cerita bahasa Banjar. Rubrik ini diberi nama Kisah si Palui. Penggagas pembukaan rubrik ini adalah salah seorang pendiri *Banjarmasin Post*, yaitu Drs. H. Yustan Aziddin (alm.) yang juga adalah seorang dosen pengasuh materi pelajaran bahasa Indonesia di FKIP Unlam.

Gagasan Yustan Aziddin ini pertama-tama disambut hangat oleh pendiri lainnya, Drs. H. J. Djok Mantaya (alm.), dan sekaligus menyatakan tekadnya dengan sikap bahwa dalam *Banjarmasin Post* tiada hari tanpa Palui, artinya setiap hari harus ada Kisah si Palui dan ini terbukti sampai sekarang rubrik itu tetap ada.

Awal adanya rubrik Kisah si Palui diawali keresahan Yustan Aziddin yang sebagai dosen setiap hari bergelut dengan materi perkuliahan bahasa Indonesia. Mengapa dia tidak melakukan hal yang serupa terhadap bahasa daerah, yakni bahasa Banjar. Apalagi dilihatnya penggunaan bahasa Banjar sudah mulai terkontaminasi dengan bahasa ABG dan bahasa daerah lainnya. Jika melihat kenyataan demikian itu, di kalangan mahasiswanya lahirlah gagasan untuk mengangkat bahasa Banjar ke permukaan. Wadahnya tidak lain adalah rubrik Kisah si Palui. Jadi, lahirnya ide kisah Palui itu adalah untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Banjar agar tidak berangsur punah.

Banjarmasin Post yang 33 tahun tiada hari tanpa Palui tersebut hanya diasuh oleh tiga orang redaktur senior yang secara berurutan, pertama oleh HYA (Hj. Yustan Aziddin), kemudian diteruskan oleh MAK (Mas Abi Karsa) dan sampai sekarang oleh EMHATI (M. Hoesni Thamrin). Ketiga pengasuh ini, di samping ide dan kreativitasnya menulis Kisah si Palui itu juga menerima banyak masukan/kiriman dari masyarakat yang tentunya materi-materi tersebut harus diedit kembali sesuai dengan *platform* redaksi pengasuh.

Mengapa Harus Palui

Siapakah si Palui itu? Si Palui sesungguhnya adalah tokoh berkarakter imajinatif dan terdapat di setiap daerah di Indonesia, seperti Sunda, Jatim, Sulsel, dan Minang. Tokoh tersebut digambarkan sebagai orang yang cerdik, pintar, pandai, bijak, alim, kritis, dermawan, dan baik hati di satu sisi. Di sisi lainnya tokoh itu sangat kontroversial sebagai figur yang bodoh, dungu, kikir, pengecut, pembual, pemfitnah, dan kadang agak menyerempet-nyerempet porno. Padahal, kisah yang menyerempet-nyerempet ini yang banyak peminatnya. Oleh karena itu,

penulisan Kisah si Palui ini juga sangat memperhatikan kode etik jurnalistik agar tidak menyinggung dan merugikan pihak-pihak tertentu, seperti SARA. Karakter itu melekat pada dirinya secara bergantian sesuai sikon dan ceritanya.

Sesungguhnya, Kisah si Palui ini tidak jelas pemilik hak ciptanya, (nn=no name). Pernalarannya berlangsung dari mulut ke mulut, dari warung ke warung, turun-temurun dari datuk ke nenek, dari nenek ke anak, dari anak ke cucu, dan seterusnya.

Sesungguhnya karakter demikian itu walaupun imajinatif adalah penggambaran dari tingkah laku manusia, jadi ada pada setiap orang, ada pada pejabat, pada politisi, pada pedagang, pada guru dan tentunya juga pada Anda. Hanya saja kita enggan dan kadang malu mengakui karakter yang demikian itu, kecuali yang baik-baiknya saja. Oleh karena itu, Kisah si Palui, cerita rakyat dalam bahasa Banjar, ini menjadi tokoh kritis, melakukan sindiran, koreksi, dan kontrol sosial yang dituturkan dalam gaya humor, lucu dan banyolan. Prinsip ceritanya adalah membuat orang senyum tersungging, tertawa, dan diharapkan tidak akan tersinggung.

Banjarmasin Post pernah mengadakan dua kali angket terhadap rubrik-rubrik yang ada pada harian ini. Pada angket pertama tahun 1985, Kisah si Palui bahasa Banjar ini menduduki peringkat ke-6. Kemudian, pada angket tahun 1995 kedudukannya naik setingkat menjadi peringkat ke-5 setelah rubrik politik (nasional), kriminal/kota, olahraga, editorial, dan daerah. Ini berarti bahwa rubrik bahasa Banjar ini cukup mendapat perhatian pembacanya. Tidak berlebihan kalau saat itu Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi, Dr. H. J. Djok Mentaya (alm.), yang juga adalah pendiri harian ini pernah mengidolakan tokoh Palui sebagai maskotnya *Banjarmasin Post*.

Sumbangsih Bahasa Daerah

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa bahasa Banjar yang dituturkan dalam bahasa tertulis di media cetak surat kabar cukup mendapat respons dari masyarakat pembaca. Hal ini tidak terlepas dari kemasan sajiannya yang harus ditangani secara profesional oleh wartawan/redaktur pengasuhnya. Pengetahuan yang dituntut tidak hanya dasar-dasar jurnalistik, tetapi penguasaan bahasa Banjar itu sendiri dengan baik dan benar. Sedikit kesulitan yang mungkin ditemui adalah pada penulisan ataupun ucapan dari wilayah berbeda antara bahasa Banjar Kuala dan bahasa Banjar Hulu.

Redaksi *Banjarmasin Post* sering menerima laporan dari guru-guru sekolah, terutama sekolah dasar yang menyatakan telah meng-

kliping dan memanfaatkan kisah Palui yang ada di harian ini untuk bahan bacaan sebagai isi muatan lokal yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain diminati anak-anak didik dan juga masyarakat, kisah Palui ini juga banyak sekali dimanfaatkan oleh kalangan atas, khususnya para pejabat/pimpinan instansi luar daerah yang bertugas atau berdinasi di daerah ini. Mereka, termasuk juga ibu-ibu dan anak-anaknya mengaku banyak mengetahui dan belajar bahasa Banjar dengan membaca kisah si Palui yang tersaji setiap hari. Hal ini jelas turut membantu kelancaran kerja dan memudahkan komunikasi di kantor-kantornya.

Upaya Peningkatan

Bahasa daerah dan budaya daerah adalah bagian dari kesatuan bahasa Indonesia dan budaya nasional bahkan dalam NKRI. Pemerintahan otonomi sekarang ini haruslah lebih diperkuat akarnya pembinaannya. Bahasa dan budaya sudah teruji sejak dahulu hingga sekarang dan telah mampu melahirkan rasa kekerabatan, pengertian, kasih sayang, dan persaudaraan yang semuanya itu bermuara kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Media massa sudah jelas misinya, yakni meramu potensi yang ada itu, baik bahasa daerah maupun budaya daerah agar lebih terangkat dan lebih terkedepankan hingga setiap warganya benar-benar merasa memiliki. Sementara itu, yang tampak banyak terlibat dalam pengembangan bahasa daerah dan budaya daerah di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

1. Dinas Diknas. Selama ini memang diakui bahwa usaha pengembangan bahasa daerah dan budaya daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, berlangsung secara konvensional yang lebih banyak ditangani oleh instansi terkait di bawah payung Dinas Diknas beserta unit-unitnya.
2. Yang lebih tampak aktivitasnya menangani bahasa daerah dan budaya daerah ini adalah perguruan tinggi (Unlam) dengan program penelitian dan pengkajiannya, baik yang dibiayai dari APBN/APBD maupun kerja sama dengan lembaga luar negeri. Hasil penelitian dan pengkajian oleh pakar-pakar tersebut biasanya diterbitkan untuk keperluan terbatas atau ada juga yang dipasarkan untuk mahasiswa dan umum. Sekarang sudah tercatat puluhan jenis penelitian yang berkaitan dengan bahasa dan budaya daerah Banjar. Penerbitan buku-buku hasil penelitian dan pengkajian ini sangat monumental karena akan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi generasi berikutnya sebagai pelanjut mempertahankan kekayaan

bahasa dan budaya daerah.

3. Upaya insidental dan periodik sering dilakukan oleh LSM, sekolah, dan kelompok organisasi ibu-ibu yang dilaksanakan dalam bentuk lomba atau sayembara, yaitu lomba menulis/mengarang kisah dalam bahasa Banjar, lomba membaca kisah Palui, dan lain-lainnya.

Media massa memang keharusan untuk turut mengembangkan dan meningkatkan peran serta sosialisasi pemakaian bahasa daerah ini untuk pemupukan tanggung jawab dan kesadaran sebagai warga negara yang bermukim di salah satu wilayah di Indonesia. Keikutsertaan media massa turut mengembangkan hal itu akan banyak bergantung pada kerelaan dan keikhlasan menyediakan rubrik-rubrik khusus sekaligus memberi ruang dan rubrik di medianya.

Dituntut keikhlasan penerbit karena sekarang ini media massa atau media cetak benar-benar independen dan mandiri sebagai usaha bisnis yang mengedepankan profit. Sekarang ini, khusus bagi media cetak tiap milimeter (mm) ruang ada nilai jualnya. Hal itu berbeda sekali dengan kondisi beberapa waktu yang lalu, seperti imbauan dan permintaan Deppen untuk suatu rubrik atau penerbitan bisa segera dipenuhi seperti penerbitan suplemen atau koran KMD karena bisa dijadikan proyek.

Di sini yang paling penting adalah kesadaran dan tanggung jawab dan rasa memiliki, cinta bahasa Indonesia, cinta bahasa ibu di daerah tanah kelahiran, dan cinta budaya yang turut mmbesarkan dirinya menjadi insan beriman, bertakwa, dan berbudaya.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal	: Kamis, 16 Oktober 2003
Topik Makalah	: Peran Media Massa di Daerah dalam Memelihara Bahasa dan Budaya Daerah
Panelis	: 1. Haji Darlis Syofyan 2. Karno Kartadibrata disajikan oleh Yus Rusyana 3. Sofyan Harahap 4. Anwar Tuti Artha 5. H.M. Hoesni Thamrin
Pemandu	: Tan Leo Lee
Pencatat	: 1. Supriyanto Widodo 2. Toha Machsum

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Muhammad Darwis (Dosen Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar)
Bagaimana suka duka pers dalam mengawal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar?
2. **Pertanyaan:** Pinulang (Nusa Tenggara Barat)
Kongres Bahasa Indonesia VIII dilaksanakan pada era globalisasi. Peran pers/media massa sangat penting. Apa yang dilakukan redaktur ketika mengutip ucapan pejabat yang menggunakan istilah-istilah asing agar dimengerti khalayak?
3. **Pertanyaan:** Nelson L.T. (Balai Bahasa Medan)
 - a. Orang menulis di media massa untuk mencari uang. Di rubrik budaya orang juga menulis dengan tujuan yang sama, tetapi mengapa penghargaannya rendah. Apa solusinya agar rubrik budaya daerah menghasilkan uang?
 - b. Khusus kepada Bapak Sofyan Harahap, mengapa Bapak tidak menyinggung kerja sama SKH Waspada dengan Balai Bahasa Medan yang sudah berjalan beberapa bulan?
 - c. Mengapa koran masih diskriminatif dalam mengulas budaya daerah. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini?

4. **Saran:** Maya Indra (Guru SMU 1 Padang)
Pers daerah sebaiknya bekerja sama dengan balai bahasa setempat untuk mengadakan lomba-lomba berbahasa daerah. Rubrik budaya daerah khusus untuk anak-anak sebaiknya disertai pertanyaan dengan menyediakan hadiah.
5. **Pertanyaan:** Asrif (Universitas Hasanuddin, Makassar)
Ada pengakuan ketidakmampuan pers dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Perlu dicari konkretnya, seperti apakah teknis yang ditawarkan kepada khalayak terhadap peran media massa.
6. **Pertanyaan:** Zainuddin Hakim (Balai Bahasa Ujung Pandang)
Melihat peran dan fungsinya, media massa sebagai ujung tombak pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia memegang peran yang strategis dalam pembinaan bahasa dan sastra. Untuk itu, hendaknya pemberitaan tentang Kongres Bahasa Indonesia dapat diperbanyak. Bagaimana tanggapan Bapak-Bapak?
7. **Pertanyaan:** Tengku Abdullah (Aceh)
Saya bangga di beberapa daerah di Indonesia ada koran berbahasa daerah. Mengapa di Aceh tidak ada? Khusus kepada moderator, kira-kira apa penyebabnya?

Jawaban: Darlis Sofyan

- Rubrik budaya daerah tidak memiliki nilai jual karena peminat/pembacanya lebih sedikit sehingga yang mau memasang iklan sedikit. Untuk penanggulangannya, penerbit memberikan kemasan yang lebih baik sehingga dapat berdampak ekonomis.
- Pers sudah ada itika baik menjadikan surat kabar sebagai penjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Jawaban: Sofyan Harahap

- Redaktur sudah berusaha mengartikan istilah-istilah asing yang digunakan pejabat. Akan tetapi, kalau masih ada kesalahan-kesalahan khalayak mempunyai hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab dapat digunakan jika masyarakat dirugikan karena media massa milik kita semua, hak koreksi dapat dimanfaatkan. Berkaitan dengan itu, koran yang sudah mapan mengartikan istilah-istilah asing yang baru. *Kompas* sudah melaksanakan itu.
- Memang, sudah ada kerja sama dengan Balai Bahasa Medan, dengan membuka rubrik bahasa setiap Minggu. Itu dapat dicek kembali.

Solusinya adalah redaktur diharapkan menulis sendiri yang berbobot. Kenyataannya, banyak tokoh budaya yang menulis kurang berbobot, masih bersifat emosional. Bagi tokoh budaya yang berbobot diberi honor mahal, yakni sekitar Rp500.000,00.

Jawaban: Arwan Tuti Artha

- a. Pers mempunyai tanggung jawab dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, memang benar.
- b. Usaha-usaha pers sudah ada dan tidak mandek. Diusulkan Kongres juga mengundang para redaktur surat kabar. Pers juga ikut menyumbang dalam menyosialisasikan kata-kata *Anda* dan *mencolok*.
- c. *Kedaulatan Rakyat* telah melakukan hal yang disarankan oleh Ibu Maya Indra. Memang benar generasi muda mengalami kemunduran dalam hal menggunakan bahasa daerah. Akan tetapi, setelah Menteri Pendidikan Nasional membuat semacam undang-undang ada imbas dan manfaatnya.

Jawaban: Yus Rusyana

- a. Peranan bahasa daerah berat sekali menghadapi bahasa Indonesia.
- b. Media massa daerah juga mempunyai tanggung jawab dalam hal penggunaan bahasa daerah dengan baik dan benar.
- c. Redaktur telah memperbaiki tulisan yang berstruktur bahasa Indonesia menjadi berstruktur bahasa daerah.
- d. Media massa menambah ragam bahasa yang tadinya tidak ada, kini menjadi ada, yaitu ragam jurnalistik berbahasa daerah.
- e. Mengapa saya tetap menulis dalam bahasa daerah, meskipun saya juga menulis bahasa Indonesia sampai sekarang saya tidak dapat menjawabnya, kecuali ada kebutuhan tertentu yang tidak bisa dilabrak, misalnya, kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan rohani, kultur, dan pendidikan.
- f. Usaha-usaha konkret yang dilakukan media massa, misalnya sebagai berikut.
 - (1) Untuk menimbulkan minat anak-anak, di *Mangle* ada rubrik khusus untuk anak-anak.
 - (2) Untuk pemuda dan mahasiswa diadakan pelatihan jurnalistik berbahasa daerah.
 - (3) Penghargaan jurnalistik daerah tidak ada, yang ada penghargaan terhadap sastra daerah.
- g. Usaha-usaha untuk mentransliterasi naskah Aceh akan dibicarakan dengan pihak MANASA.

Jawaban: Sofyan Harahap

- a. Upaya konkret untuk pelestarian bahasa daerah dilakukan jika media massa telah membuka rubrik kebudayaan. Selanjutnya, masalah terpulang kepada masyarakat sendiri.
- b. Di Medan sulit mencari penulis berbahasa daerah. Dulu pernah ada penulis Mat Cetot, tetapi sekarang tidak ada lagi.
- c. Koran Medan dapat masuk Aceh karena ada rubrik berbahasa Aceh. Sebaliknya, tidak ada koran Aceh yang masuk rubrik berbahasa Medan.

Topik 5:
**PERAN ORGANISASI KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**

HIMPUNAN PEMBINA BAHASA INDONESIA
Peluang dan Tantangan

Dr. Sumardi

Sekretaris Umum HPBI Periode 1999--2003

Siapa

HPBI lahir pada 21 Februari 1974 di Pacet, Sindanglaya, Jawa Barat. Semula HPBI bernama Ikatan Guru Bahasa Indonesia (IGBI). Pada Munas I Tahun 1979 diputuskan IGBI diubah menjadi HPBI.

Dewasa ini HPBI telah memiliki 40 cabang dengan jumlah anggota sekitar 15.000 orang. Sekretariat Pengurus Pusat HPBI adalah d.a. Pusat Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. 4750405 Faks. 4750407

Ciri

HPBI adalah lembaga swadaya masyarakat yang beranggota ahli, profesional, dan atau pribadi yang menaruh perhatian terhadap usaha pengembangan dan pendayagunaan bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan pribadi, masyarakat, dan bangsa yang sejahtera lahir dan batin.

Keberagaman anggota (termasuk pengurus) HPBI itu menyebabkan organisasi ini bersifat inklusif, longgar, atau cair. Hal ini berbeda dengan organisasi profesi yang bersifat eksklusif, ketat. Sifat longgar ini mewarnai corak kegiatan dan perilaku anggota serta pengurus organisasi.

Visi

Menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana utama pengembangan pribadi, masyarakat, dan bangsa.

Misi

Membangun kesadaran dan kemampuan para anggota dan masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan:

- 1) iman, moral, dan mental;
- 2) kepribadian yang tangguh;
- 3) kemampuan memanfaatkan ilmu dan teknologi;

- 4) potensi diri anggota dan masyarakat;
- 5) produktivitas dan kreativitas;
- 6) sosial dan berbangsa.

Misi ini baru dapat dijalankan apabila para operatornya, yaitu para anggota dan pengurus HBPI, telah fasih dan terampil berbahasa Indonesia, baik untuk ranah produktif maupun ranah reseptif.

Peluang

Berikut ini beberapa peluang atau kesempatan yang perlu dibaca, digarap, dan dimanfaatkan oleh HPBI.

- 1) Simbiose mutualistis (yang wajar dan berimbang) antara pamrih pribadi dan organisasi adalah peluang yang menarik.
- 2) Dengan berpikir positif, kita melihat fakta bahwa peringkat SDMI pada posisi 112 di antara 170 bangsa yang diteliti UNDP tahun 2002 merupakan peluang bagi HPBI untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana utama untuk meningkatkan peringkat SDMI itu. Salah satu jalur untuk mengembangkan SDMI plus atau unggul itu adalah mengembangkan budaya baca, terutama di kalangan para anggota dan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa.
- 3) Mengembangkan berbagai inovasi seperti *Quantum Reading* merupakan peluang-peluang yang menantang bagi HPBI. Banyak pakar yang berpendapat walau sekarang zaman teknologi informasi (IT), media tulis masih merupakan sumber informasi ilmu dan teknologi yang tetap andal.
- 4) Jalur pengembangan SDMI unggul yang lain adalah budaya tulis. Jalur ini manfaatnya sangat jamak. Bagi penulis, dengan berkarya kemampuan menulis dan kedalaman ilmunya semakin menukik, serta ketajaman penalaran dan kreativitasnya juga semakin tinggi. Bagi pembaca, karya para penulis itu memberi keuntungan waktu yang luar biasa. Misalnya, buku yang merupakan laporan penelitian puluhan tahun dapat dibaca dalam waktu 1 minggu oleh pembaca yang terampil. Karena budaya tulis ini masih tipis dalam masyarakat profesional di Indonesia, hal ini dapat dipandang sebagai peluang emas HPBI untuk menumbuhkannya. Inovasi di bidang tulis-menulis seperti yang ditawarkan dalam *Quantum Writing* (Hernowo: 2003) perlu digalakkan.
- 5) Peluang ke dalam, mayoritas anggota HPBI adalah para pendidik. Beberapa di antara mereka belum memiliki budaya baca dan tulis. Ini juga peluang yang sangat strategis bagi HPBI untuk mengembangkan budaya baca tulis di kalangan anggotanya tersebut.

Tantangan

Banyak hambatan untuk melaksanakan beberapa misi dan atau

memanfaatkan berbagai peluang yang telah disinggung di muka.

Langkah pertama untuk mengatasi berbagai hambatan itu adalah memandangnya dengan pikiran positif (*possitive thinking*) dan mengubahnya sebagai tantangan (David J Schwartz: 1996).

a. Sibuk

"Aduh saya sibuk sekali!" "Maaf ya saya tidak dapat menghadiri rapat. Acara saya hari ini padat sekali!. Ucapan-ucapan apologis ini kadangkala terdengar di lingkungan HPBI. Ini dapat diubah menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas manajemen waktu. Ini tidak sulit. Buktinya banyak manajer yang cerdas mengelola waktu. Manajer cerdas itu juga dikaruniai waktu dan peluang yang sama, yaitu sehari semalam sama 24 jam.

b. Sumber Dana

Selama ini pembiayaan kegiatan-kegiatan penting di HPBI seperti seminar nasional dan munas mengandalkan bantuan-bantuan yang bersifat pratonis. Ini tidak buruk. Akan lebih bagus kalau hubungan subordinat (pemberi dan yang diberi) ini dapat ditingkatkan agar mencapai kesetaraan seperti dalam dunia usaha yang dikenal dengan istilah *sponsorship*. Dalam relasi antara sponsor dan yang disponsori biasanya muncul jargon 'sama-sama untung'.

Sumber pendanaan yang bersifat *sponsorship* ini dapat dikembangkan lebih luas dan kuat dengan syarat HPBI dengan sadar dan terencana membina pelobi dan jejaring relasi (*networking*).

c. Tim Kerja

Pat Williams, seorang manajer ulung Amerika dalam bukunya *The Magic of Team Work (2000)* menggarisbawahi pentingnya setiap anggota suatu organisasi melihat dan memfokuskan pada keunggulan anggota lain dan berusaha sekuat tenaga mensinergikannya. Cara pandang yang positif ini rasanya perlu ditumbuhkembangkan di kalangan HPBI. Ini merupakan tantangan yang perlu menjadi salah satu fokus HPBI.

d. Media

HPBI sudah punya majalah, yaitu *Tiara Bahasa*. Ini sebuah media yang sangat fungsional untuk mengembangkan budaya baca tulis serta mengembangkan kemampuan profesional kebahasaan dan kesastraan. Majalah ini mengalami kesulitan dalam pengumpulan naskah yang unggul dan kesulitan dalam pemasaran dan atau distribusi. Ini juga merupakan sebuah tantangan bagi anggota HPBI. Siapa yang memiliki potensi di kedua hal ini diundang untuk berpartisipasi.

e. KBK

Meningkatkan kepekaan membaca peluang adalah tantangan yang perlu diprioritaskan oleh para anggota dan organisasi. Bagi anggota dan organisasi HPBI, munculnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mesti dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan. Keberhasilan menjawab tantangan ini akan berpengaruh pada pencuatan kemampuan profesional di bidang kebahasaan dan kesastraan serta imbalan kesejahteraan.

Undangan

Di muka telah mengenai apa dan siapa HPBI itu, apa visi dan misinya, peluang-peluang apa saja yang perlu dilihat dan direbut oleh organisasi dan anggotanya serta tantangan-tantangan apa yang perlu dikritisi dan ditangani.

Semua itu menantang Anda, mengundang Anda terutama para anggota dan pengurus HPBI untuk menanganinya. Dengan peluang saling menguntungkan, semoga undangan ini singgah di hati Anda.

Makalah ini dilampiri sebuah artikel untuk remaja atau siswa SLTA sebagai salah satu model apresiasi sastra yang dikaitkan dengan pengembangan diri.

RUJUKAN

- Hernowo. 2003. *Quantum Reading*. Bandung: MLC . 2003. *Quantum Writing*. Bandung. MLC
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Schwartz, David J. 1996. *Berpikir dan Berjiwa Besar*. Cet ke-4. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Sumardi. 2000. *Buku Pelajaran Bahasa Indonesia SD; Sebagai Sarana Pengembangan Kepribadian, Penalaran, Kreativitas, dan Keterampilan Berkomunikasi Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Williams, Pat. 2000. *The Magic of Team Work: Kekuatan Magis Kerja Tim*. Jakarta: Grasindo.

APA YANG BISA DILAKUKAN FBMM?

TD Asmadi

Koordinator Forum Bahasa Media Massa (FBMM)

1. Forum Bahasa Media Massa (FBMM) secara resmi diumumkan berdirinya pada tanggal 31 Oktober 2002 dalam diskusi bulanan bahasa media massa di Lantai 5 Gedung Kompas-Gramedia Unit III di Jalan Palmerah Selatan 26—28, Jakarta Pusat. Kesepakatan untuk berdirinya organisasi ini tercapai dalam pertemuan seminggu sebelumnya di Harian *Kompas*, tepatnya tanggal 24 Oktober. Peresmian organisasi ini, antara lain, dihadiri oleh Kepala Pusat Bahasa, Dr. Dendy Sugono, sedangkan diskusi yang dilaksanakan bersamaan dengan peresmian tersebut, bertema “Bahasa Media Massa yang Efektif”, dengan pembicara dari Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta, Marah Sakti, dan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Abdul Latif.
2. Pertemuan-pertemuan untuk berdirinya organisasi bagi mereka yang menggeluti bahasa di media—juga mereka yang mencintai bahasa—ini dilakukan jauh sebelumnya. Pada 1992 sudah ada pertemuan-pertemuan semacam itu dengan prakarsa dari Majalah *Tempo* dan surat kabar *Kompas*. Pada masaa ini sudah ada kesepakatan untuk membahas berbagai masalah dan kemudian memutuskan sesuatu, kalau perlu dengan pemungutan suara. Hasilnya antara lain adalah beberapa padanan untuk kata atau istilah asing. Pertemuan para editor bahasa ini berlangsung dua minggu sekali setiap hari Rabu. Yang ikut selain *Tempo* dan *Kompas* adalah *Bobo*, *Femina*, *SWA*, *Humor*, *Gadis*, *Gelora*, *Antara*, *Gramedia Pustaka Utama*, dan *Grasindo*. Entah mengapa, mungkin beberapa pemrakarsa sudah berumur, pertemuan-pertemuan tersebut berhenti.
3. Pada akhir tahun 2001 *Tempo* berinisiatif mengundang beberapa media untuk membicarakan soal bahasa ini. Disepakati akan diadakan pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada awal tahun 2002 dilakukan pertemuan lagi dan dihadiri tidak kurang dari sepuluh orang. Sebagai kelanjutannya disepakati untuk mengadakan pertemuan yang lebih luas. *Kompas* menjadi tuan rumah pertama untuk pertemuan macam ini.
4. Tanggal 7 Maret adalah tanggal pertemuan bulanan pertama yang diperluas tersebut. Pokok bahasan yang ditentukan dan disajikan oleh tuan rumah adalah “Padanan Singkatan/Akronim Nama Organisasi”. Di sini dibahas berbagai nama organisasi internasional dan dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia.
5. Pertemuan kedua berlangsung bulan berikutnya dengan tempat masih di *Kompas*. Kali ini makalah masih diajukan oleh anggota asal *Kompas*,

Salomo Simanungkalit, dengan judul “Singkatan dan Kepala Orang Indonesia”. Pertemuan-pertemuan berikutnya di *Pikiran Rakyat* Bandung (Mei), RCTI (Juni), Antara (Juli), SCTV (Agustus), *Republika* (September), *Kompas* (Oktober), *Bentara Budaya* (Januari 2003), *Media Indonesia*/Metro TV (Februari), *Kompas* (Maret), Wisma Kompas Pacet (April), TV-7 (Juni), *Rakyat Merdeka* (Juli), SCTV (Agustus), dan *Kompas* (September). Pakar bahasa dan jurnalistik yang pernah menjadi narasumber diskusi kami, antara lain adalah Anton M. Moeliono, Hasan Alwi, Dendy Sugono, A Latief, Koenjana, Sudjoko, B. Rahmanto, Masmiar Mangiang, dan Widodo Edy Santoso (Bakosurtanal). Topik yang kami diskusikan antara lain meneropong bahasa media massa, bedah KBBI, kendala penyaji media elektronik, ekonomi bahasa, soal kosakata, dan bahasa rakyat.

6. Mengapa organisasi ini diberi nama forum dan bukan persatuan atau himpunan atau asosiasi dan sebagainya? Saat pertemuan untuk didirikannya organisasi ini, peserta berpendapat untuk sementara organisasi bersifat longgar. Sambil membenahi organisasi, forum ini berusaha menarik sebanyak mungkin anggota, terutama mereka yang benar-benar bergulat di bidang bahasa media massa—redaktur bahasa, anggota tim bahasa, editor bidang, wartawan, penyelaras bahasa, dan bahkan korektor—serta yang mencintai bahasa (dosen, mahasiswa, dan orang umum). Jika organisasi sudah kuat dengan pendukung yang dianggap juga banyak, kemungkinan menjadi sebuah “persatuan” atau “himpunan” atau “asosiasi” tidak tertutup. Susunan pengurus pun longgar. Kami hanya memiliki koordinator dan wakil-wakil koordinator ditambah dengan sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Wakil koordinator membidangi salah satu yang menjadi penopang FBMM, yaitu surat kabar, kantor berita, majalah, buku, televisi, dan radio. Oleh karena itu mohon maaf, meski anggota kami dari berbagai media, dari yang sopan sampai yang tidak, kami belum dapat menyatukan sikap.
7. FBMM sampai sekarang belum memiliki peraturan apa pun. Anggaran atau peraturan dasar organisasi juga belum disusun. Kami masih berpendapat, yang penting kini adalah timbulnya kesadaran terutama di kalangan media untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami ingin menghimpun dan memberi kesadaran pada mereka yang setiap hari bergelut dengan bahasa Indonesia agar menggunakannya dengan benar. Yang kami gariskan sebagai tujuan pun tidak muluk-muluk:
 - a. menyamakan penulisan (ejaan, tata bahasa, kosakata, dan alfabet) dan pelafalan di media massa;
 - b. menggiatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media massa;
 - c. membantu mengembangkan bahasa Indonesia.
8. Terus terang kami belum tahu apakah kami sudah melangkah maju

dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Yang kami rasakan adalah makin sadarnya para anggota kami untuk berbahasa Indonesia yang lebih baik. Semangat mereka bisa dikatakan tinggi. Kadang-kadang demikian tingginya sehingga “menggugat” beberapa kata yang tidak sesuai dengan kaidah, tetapi yang sudah umum dipakai. Di dalam media massa sendiri (yang muncul dalam cetakan atau siaran televisi) kemajuan sedikit saja terjadi. Ada beberapa perubahan terjadi di beberapa media massa, tetapi masih banyak sekali kesalahan yang muncul, baik menyangkut kosakata, tata bahasa, maupun logika bahasa. Kemajuan di media massa memang tidak sepenuhnya bergantung pada FBMM karena setiap media massa memiliki otonomi—yang kadang-kadang dapat disebut kesombongan—sendiri untuk menentukan mana yang baik dan benar bagi mereka. Bisa terjadi untuk suatu masalah, sekian media memiliki sekian pendirian pula. Ini dapat dipahami, tidak semua editor bahasa memiliki kekuasaan untuk mengubah tulisan/berita/artikel yang akan diterbitkan di medianya masing-masing. Ada pejabat yang lebih tinggi yang memiliki wewenang untuk menetapkan mana yang dapat diterbitkan mana yang tidak. Atau, walaupun memiliki, tidak semua halaman yang akan diterbitkan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan tenaga yang dimiliki. Bayangkan jika satu hari terbit 36 halaman (paling sedikit, dengan paling banyak 56 halaman), sementara editor yang memiliki wewenang hanya satu orang.

9. Untuk media massa cetak harian, masalah paling utama terletak pada asal tulisan paling hulu, yaitu wartawan. Kecenderungan makin merosotnya mutu bahasa Indonesia di kalangan lulusan perguruan tinggi (yang kemudian menjadi wartawan) bisa jadi juga menjadi salah satu sebab makin sulitnya tugas pada kepala desk/editor/subeditor membereskan tulisan-tulisan (berita/*feature*) yang masuk. Kendala waktu yang singkat (proses dari tulisan wartawan ke tahap disetujui untuk diterbitkan), yang kadang-kadang hanya satu jam, juga bisa menjadi sebab lain. Tenggang waktu antara dimulainya pekerjaan demikian sampai tahap disetujui untuk diterbitkan paling banyak adalah enam jam. Dalam waktu sekian ini ada puluhan ribu kata yang harus diperiksa. Ini gambaran sebenarnya dan bukan sebuah “pembenaran” dari ketidakmampuan. Ini hanya memberi gambaran bahwa dalam waktu yang singkat dapat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
10. Proses sebuah tulisan yang masuk untuk diterbitkan sebenarnya ditangani banyak orang, mulai dari wartawan, editor/wakil editor, subeditor, penyelarasa bahasa, sampai penyunting—ini untuk di *Kompas*. Di tempat lain, sebuah tulisan paling sedikit ditangani oleh dua orang. Biasanya yang meneliti isi tulisan adalah editor/wakil editor, lalu yang memeriksa bahasa adalah subeditor. Penyelarasa bahasa menyempurnakan yang telah dilakukan keduanya dengan memperhatikan lebih cermat

masalah bahasa. Kalau editor/wakil editor dan sub-editor “memeriksa” tulisan-tulisan bidang (politik, iptek, kebudayaan, metropolitan, ekonomi, daerah, atau olahraga), penyelaras bahasa mengamati halaman. Untuk satu bidang bisa dua penyelaras bahasa yang bertugas. Bagian yang paling akhir memeriksa—dan yang kemudian menyetujui untuk dicetak dengan paraf—adalah manajer produksi yang memiliki anak buah para penyunting. Mereka inilah yang memelototi kertas cetakan sebesar surat kabar sebenarnya (*print-out*). Masa-masa paling ramai lalu lintas naskah/tulisan adalah antara pukul 21.00-23.00. Tidak kurang dari 60 tulisan harus masuk dan diselesaikan.

11. Selain mutu naskah/tulisan yang tidak “memuaskan pelanggan” (maksudnya pemakai selanjutnya dalam rangkaian proses produksi), persoalan lain yang muncul adalah penggunaan bahasa asing. Kebanyakan wartawan “malas” membuka kamus untuk mencari padanan sebuah kata asing yang diucapkan oleh sumber berita. Oleh karena itu, muncul kata *sawmill* ‘penggergajian’, *gijzeling* ‘paksa badan’, *memorandum of understanding* ‘memorandum kesepahaman’, *underpass* ‘terowongan’, dan lain-lain. Para wartawan sebenarnya tidak sepenuhnya disalahkan dalam hal ini. Mereka hanya “memindahkan” yang dia dengar atau catat dari sumber berita, yaitu para pejabat negara, aparat keamanan dan pertahanan, aparat hukum, pebisnis, kalangan perbankan, dan para pengamat. Para pejabat dan lain-lainnya ini kalau berbicara sering menggunakan kata-kata asing dan jarang memberi padanan yang tepat untuk kata-kata asing-asing tersebut. Kemalasan wartawan dan kecongkakan para pejabat bersatu dalam tulisan yang dibuat.
12. Saat ini sebenarnya lebih banyak media yang sadar bahwa di antara mereka dan konsumen (pembaca) yang ada adalah bahasa. Bahasalah yang menjadi dagangan mereka. Oleh karena itu, bahasa harus baik dan mudah dicerna konsumen. Kini makin banyak media yang mempekerjakan redaktur bahasa untuk memperoleh bahasa yang baik tersebut. Di beberapa media bahkan redaktur bahasa dilengkapi juga penyelaras bahasa, sebuah peningkatan dari posisi korektor yang selama ini ada. Penyelaras ini memiliki wewenang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan korektor karena berhak mengubah kalimat yang dianggap tidak tepat. Beberapa media juga memiliki tim bahasa yang tugasnya menggariskan kata, istilah, nama geografi (kota, daerah, dan negara), penggunaan huruf besar dan kecil, padanan kata asing, dan lain-lain di mediana masing-masing.
13. FBMM sendiri sampai saat ini baru dalam tahap “membuka wawasan” ke pemimpin media untuk makin meningkatkan penampilan bahasa di media mereka dan karena itu makin perlunya seorang atau beberapa orang editor bahasa. Diskusi-diskusi yang diselenggarakan juga masih dalam taraf itu. Kami belum berani mengambil keputusan yang meng-

haruskan seluruh anggota kami (alias semua media) untuk menggunakan kata yang seragam. Kami berharap akan tiba saatnya kami menjadi “pemutus” atau “penentu” tentang kata, ejaan, istilah dan semacamnya itu. Kini kami masih longgar dan tidak mengambil sikap berkenaan dengan adanya berbagai perbedaan tersebut.

14. Sebagai gambaran bahwa banyak media berusaha untuk berbahasa yang baik dan benar, kami ingin menyampaikan bahwa untuk penerimaan wartawan pun bahasa Indonesia menjadi salah satu syarat kelulusan. Untuk mereka yang telah lulus pun dalam pendidikan kewartawanan bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran utama. Jika dalam “belajar bahasa” ini tidak lulus, mereka tidak bisa menjadi wartawan. Tentu saja, “ujiannya” bukan hanya bahasa Indonesia karena jurnalistik dalam semua aspeknya juga pelajaran utama.
15. Sebagai penutup, kami menyampaikan bahwa kami sudah memiliki *mailing list* yang diikuti sekitar 150 orang dari berbagai penjuru Nusantara. Juga ada rekan dari London dan Tokyo yang bergabung. Kami juga sudah memiliki situs web (www.fbmm.org.id). Diskusi di kalangan kami cukup intensif dan banyak manfaatnya bagi kami. FBMM mengharapkan kerja sama dengan semua pihak yang bergelut dengan bahasa Indonesia. Tekad kami untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar semoga mendapat bantuan, dorongan, dan simpati dari para pakar bahasa. Tanpa itu kami kekurangan garam untuk memasak tulisan/naskah yang masuk ke media-media kami.
16. Agar bersama-sama menghasilkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kami mengharapkan hal-hal seperti ini.
 - a. Berilah kami bahan baku (calon wartawan) yang bahasanya Indonesia yang baik. Jangan memberi kami kesulitan yang lebih besar karena bahasa mereka yang di bawah rata-rata. Memberi pelajaran jurnalistik sendiri sudah terlalu memakan banyak waktu
 - b. Para pejabat, pebisnis, pengusaha, pengamat, dan siapa saja yang berhubungan dengan media massa, bicaralah dengan bahasa Indonesia yang baik. Jangan gunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti hanya karena ingin disebut “orang yang pandai”.
 - c. Doronglah kami, beri kami masukan, dan kalau perlu tegurlah media massa yang berbahasa tidak baik dan benar, apalagi yang tidak senonoh.
 - d. Doronglah media yang belum memiliki editor bahasa agar mereka mulai memikirkan hal tersebut. Kalau perlu doronglah juga untuk adanya tim bahasa pada setiap media.

LAPORAN SIDANG

Hari, Tanggal	: Jumat, 17 Oktober 2003
Topik Makalah	: Peran Organisasi Kebahasaan dan Kesastraan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Panelis	: 1. Sumardi 2. T.D. Asmadi 3. Riris K. Toha Sarumpaet 4. Soenjono Dardjowidjojo
Pemandu	: A. Latief
Pencatat	: 1. Ni Putu Ekatini Negari 2. Sukardi Gau

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** ... (Universitas Muhammadiyah Makassar)

Keempat organisasi ini (FBMM, HPBI, MLI, dan Hiski) belum ada gaungnya. Disarankan ke depan agar gaungnya lebih keras lagi, dalam artian menjadi satu tujuan. Organisasi ini berjalan sendiri-sendiri sehingga di daerah (Sulawesi Selatan) belum terdengar gaungnya.

Jawaban: Soenjono Dardjowidjojo

Di dalam dunia keilmuan yang terjadi adalah bahwa kalau kita makin masuk ke dalam punya ladang sendiri-sendiri sehingga sastra dan bahasa mengapa tidak dijadikan satu. Akan tetapi, kalau kita masuk ke dalam topik-topik yang menjadi perhatian, masing-masing subilmu ini tentu akan berbeda. Oleh karena itulah ada HPBI, MLI, dan Hiski. Meskipun minatnya itu sama, spesifikasinya berbeda. Kalau diharapkan hanya satu organisasi kebahasaan di Indonesia, sukar untuk dapat direalisasikan

Jawaban: Sumardi

Saya berterima kasih atas pendapat bahwa gaung HPBI belum terasa di daerah. Justru itu yang menjadi tantangan HPBI dan mengajak masyarakat pemakai bahasa yang ada di daerah agar gaungnya terdengar keras di daerah.

Produk-produk kami sebenarnya memperlihatkan adanya kerja sama. Misalnya, MLI dan Hiski kegiatannya lebih banyak yang bersifat ilmiah. Kami tinggal memetikanya dan memasyarakatkan kepada anggota, terutama para guru.

Jawaban: Riris K. Toha Sarumpaet

Hiski sudah ada di 26 tempat di seluruh Indonesia. Di Makassar, kalau Hiski belum terdengar, diterima sebagai kritik dan dorongan yang sangat baik supaya kami mencoba lebih sungguh-sungguh untuk memperbaiki, supaya Anda lebih mendengar apa yang telah kami kerjakan. Tambahan lagi bahwa dunia sastra itu adalah dunia pemikiran. Kita mengadakan penelitian, berdiskusi, berkonferensi, menggondok dan mempertemukan gagasan-gagasan, dan itu kita sebar luaskan dalam bentuk tulisan.

Jawaban: T.D. Asmadi

Gaungnya yang nyata adalah di media. Supaya medianya baik, kami membina ke dalam dengan mengadakan diskusi-diskusi.

2. **Pertanyaan:** Hidayat (Hiski Kendari)

Dalam pertemuan-pertemuan Hiski, kami selalu membandingkan Hiski dengan IDI karena sama-sama organisasi profesi. Persoalannya adalah IDI begitu bermartabat, untuk menjadi dokter harus ada rekomendasi dari IDI sehingga mutu pelayanan dokter terjaga. Sekarang kita bicara tentang MLI, organisasi profesi di bidang kebahasaan. Ini berkaitan dengan problem dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang bermasalah. Dalam politik bahasa nasional, harus ada standarisasi untuk pengadaan guru. Seharusnya, pemerintah melibatkan organisasi profesi. Ada kewenangan pada organisasi profesi untuk menentukan apakah seseorang layak atau tidak menjadi guru bahasa atau sastra?

Jawaban: Riris K. Toha Sarumpaet

Saya sangat setuju apa yang Anda katakan mengenai standarisasi guru itu, kalau mungkin melibatkan organisasi profesi. Itu barangkali merupakan impian kita semua. Anda sampaikan ini dalam Kongres, mudah-mudahan dapat kita angkat ke tempat yang lebih luas. Saya pribadi, sebagai anggota Hiski, yang menjadi persoalan paling mendasar adalah di Hiski itu sendiri sarjana-sarjana sastra belum sungguh-sungguh percaya dengan apa yang dikerjakan, masih baru sampai luar-luarnya saja, belum sampai pada jiwa karya itu yang kita percaya bisa mengubah manusia. Apa yang Anda sarankan itu, mestinya bukan hanya guru yang menjadi lebih baik, tetapi juga bangsa kita.

3. **Pertanyaan:** ABG Ratu (Manado)

- a. Adanya akronim yang menarik di *Kompas* apakah itu sudah diseleksi, misalnya si seksi (siswa ekspor Indonesia), BBM, irek (irit dan ekonomis)?
- b. Di Sulawesi Utara banyak koran daerah barangkali ada materi yang bisa dikirim ke sana.

- c. Kepada Ketua Hiski, sastra belum "mendarat" pada siswa. Barangkali ini tugas berat bagi Hiski bahwa dalam waktu yang tidak lama dapat menciptakan suatu modus yang bagus supaya pengajaran sastra di sekolah bukan kongnitif, melainkan apresiatif.

Jawaban: T.D. Asmadi

- a. Masalah singkatan yang masuk kepada kami diterima oleh wartawan. Wartawan kurang cerdas memilahnya. Sekarang kita sama-sama bersepakat agar kita mengharamkan akronim.
- b. Sementara kami bergerak di Jakarta dulu, tetapi teman-teman di daerah diundang untuk ikut serta melalui internet.

Jawaban: Riris K. Toha Sarumpaet

Sastra agar mendarat di Indonesia. Sedang diupayakan pengajaran sastra di sekolah agar lebih apresiatif, sedang diupayakan dengan adanya KBK.

Jawaban: Soenjono Dardjowidjojo

Media massa bertujuan menyampaikan pesan sehemat mungkin. Dengan demikian, dibuatlah akronim.

Jawaban: Sumardi

Standardisasi guru bahasa dan sastra itu merupakan sasaran jangka panjang. Saat ini hal itu belum dapat dilaksanakan. Menurut data diperoleh sekitar 20% guru berpendidikan nonbahasa Indonesia. Sasaran jangka pendeknya adalah membuat guru-guru bahasa Indonesia berpendidikan bahasa dan sastra Indonesia.

4. **Pertanyaan:** Muhtar Chaniago

Sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan anggota, sepertinya belum maksimal.

Jawaban: Riris K. Toha Sarumpaet

Tiap tahun diadakan konferensi. Harapannya agar gagasan-gagasan yang dituangkan dalam makalah memungkinkan untuk diterbitkan.

Jawaban: Sumardi

Penataan administrasi terhadap 15.000 anggota belum rapi. Yang akan dilakukan terlebih dahulu mengoordinasi organisasi secara internal.

5. **Pertanyaan:** (Universitas Negeri Makassar)

Kesadaran anggota sebenarnya cukup tinggi, tetapi potensi daerah tidak diberdayakan. Saran saya, agar organisasi di daerah diberdayakan. Saran ditampung

6. **Pertanyaan:** A. Latief (Jakarta)

Mungkin para panelis bisa menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi.

Jawaban: Riris K. Toha Sarumpaet

Kendala utama yang sering muncul adalah tidak adanya kesadaran anggota akan pentingnya sastra. Kesadaran anggota dalam berorganisasi sangat rendah dan kurang tersedianya dana.

Jawaban: Sumardi

Di cabang-cabang tertentu masa kepengurusan sudah usai, tetapi tidak ada regenerasi. HPBI kewalahan melayani permintaan direktorat-direktorat dan daerah-daerah sebagai pembicara dalam seminar.

Jawaban: T.D. Asmadi

Bagi kami, masalah dana bukan masalah karena setiap kegiatan dibiayai oleh setiap penyelenggara kegiatan. Diskusi lebih banyak dilakukan melalui internet.

Jawaban: Soenjono Dardjowidjojo

Kesadaran akan profesionalisme kita tentang bahasa masih rendah. Misalnya, iuran Rp25.000,00 per tahun oleh anggota dianggap sangat berat. Sekarang ini, MLI mempunyai 47 cabang di Indonesia, yang terdiri atas 1.400 orang anggota yang memenuhi iuran hanya 47%.

PUTUSAN
KONGRES BAHASA INDONESIA VII
JAKARTA, 26–30 OKTOBER 1998

I. BAGIAN UMUM

Bahasa Indonesia sudah berkedudukan sebagai bahasa persatuan selama 70 tahun, sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selama kurun waktu itu (1928–1998), bahasa Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Di samping sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berkedudukan juga sebagai bahasa negara sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi, sarana pendukung kebudayaan nasional, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menghadapi tuntutan dan tantangan perkembangan kehidupan sosial dan budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan berbangsa dalam era globalisasi, dan teknologi informasi masa kini serta masa yang akan datang dalam milenium ketiga, mutu bahasa Indonesia perlu ditingkatkan dan kemampuan daya ungkapnya perlu dikembangkan. Untuk itu, buku tata bahasa, kamus, serta berbagai pedoman penggunaan bahasa perlu dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan pemberdayaan manusia Indonesia. Di samping itu, sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa, penutur bahasa Indonesia, terutama pejabat dan tokoh masyarakat harus memiliki kemampuan dan perilaku berbahasa yang baik sehingga bahasa Indonesia yang digunakannya dapat dijadikan anutan oleh masyarakat umum.

Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri dan pendukung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, penggunaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara, perlu dibina lebih lanjut untuk menghadapi tantangan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang penggunaannya makin meluas di Indonesia. Sementara itu, kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, sesuai dengan kebutuhan, perlu pula ditingkatkan.

Sastra merupakan salah satu unsur kebudayaan dan sarana ekspresi estetis yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan budaya serta menggambarkan kekayaan batiniah bangsa. Sesuai dengan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, pengembangan sastra sebagai unsur kebudayaan ditujukan kepada kemajuan adat dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, apresiasi dan sikap yang positif masyarakat terhadap sastra Indonesia perlu ditingkatkan melalui berbagai cara, terutama pengajaran, pemasyarakatan, dan

penelitian karya sastra.

Peranan Indonesia di dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting sehingga sekarang diajarkan di banyak negara. Dengan demikian, pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing perlu dikembangkan secara terencana dan terarah. Salah satu upaya yang perlu segera dilaksanakan adalah pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bahasa daerah di Indonesia dijamin hak hidupnya sesuai dengan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan bahasa daerah, yang merupakan aset budaya nasional, harus dilaksanakan agar bahasa dan sastra daerah dapat berkembang dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan, baik sebagai sarana penunjang komunikasi maupun sebagai salah satu sumber pemerikayaan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk itu, rencana terpadu mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah perlu segera disusun secara terarah.

II. BAGIAN KHUSUS

A. Memperkukuh Kedudukan Bahasa dalam Era Globalisasi

Era globalisasi ditandai, antara lain, oleh meningkatnya kontak budaya dan komunikasi antarbangsa, terutama dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam hubungan itu, kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia perlu dikukuhkan.

Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat pemersatu, pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa, serta wahana komunikasi ke arah kehidupan yang lebih modern dan beradab. Bahasa daerah merupakan sarana pembinaan dan pengembangan budaya, seni, dan tradisi daerah yang dapat memperkuat jati diri bangsa. Bahasa asing merupakan sarana komunikasi antarbangsa dan sarana alih iptek modern.

Untuk memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta memperjelas kedudukan bahasa asing di Indonesia dalam era globalisasi, tindak lanjut yang terpadu dan terarah perlu dipersiapkan dan dilakukan.

Tindak Lanjut

a. Bahasa Indonesia

1. Bahasa Indonesia perlu dibina tidak hanya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga oleh departemen/ instansi lain, organisasi profesi, dan dunia usaha.
2. Pengindonesiaan nama dan kata asing di tempat umum perlu diperluas dan dilaksanakan di seluruh Indonesia.

3. Pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang dipersiapkan dan/atau diterbitkan, antara lain, oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
4. Kemampuan berbahasa Indonesia para guru semua bidang studi di semua jenis dan jenjang pendidikan perlu ditingkatkan secara terarah dan terpadu.
5. Kemampuan berbahasa Indonesia para pejabat dan tokoh masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat memberikan teladan berbahasa yang baik.
6. Pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu makin ditingkatkan sehingga dapat menjangkau kelompok masyarakat yang masih buta bahasa Indonesia.
7. Pemerintah perlu memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

b. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

1. Pengajaran dan pemasyarakatan BIPA perlu ditingkatkan baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi dan/atau lembaga yang menyelenggarakan pengajaran BIPA perlu mengembangkan program dan bahan BIPA, termasuk metodologi pengajarannya, sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa asing.
3. Kantor perwakilan RI di luar negeri perlu lebih berperan dalam mendukung program pemasyarakatan BIPA di luar negeri.

c. Bahasa Daerah

1. Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sebagai bagian kebudayaan Indonesia yang hidup perlu dilaksanakan secara lebih terencana.
2. Penerbitan buku, surat kabar, dan majalah dalam bahasa daerah perlu digiatkan dan didorong.
3. Pengembangan bahan ajar bahasa daerah perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang telah diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan/atau lembaga lain di daerah yang bersangkutan.
4. Pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.

d. Bahasa Asing

1. Kemampuan peserta didik dalam berbahasa asing, terutama bahasa

Inggris, perlu ditingkatkan melalui pengembangan program, bahan ajar, dan metodologi pengajaran sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa asing.

2. Pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, melalui jalur luar sekolah perlu ditingkatkan mutunya dengan menyediakan berbagai kemudahan.
3. Sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di perguruan tinggi perlu dikembangkan.
4. Penerjemahan bahan pustaka sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia perlu digalakkan.

e. Organisasi Profesi

1. Organisasi profesi, termasuk organisasi profesi kebahasaan, dan dunia usaha perlu melibatkan diri secara lebih aktif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di bidangnya masing-masing.
2. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu terus meningkatkan kerja sama dengan organisasi profesi.
3. Organisasi profesi dalam bidang pengajaran bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, perlu dikembangkan.
4. Kerja sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan organisasi profesi kewartawanan perlu ditingkatkan untuk menyebarluaskan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk pemasyarakatan kata dan istilah baru.

f. Pemerintah Daerah

1. Pemerintah daerah perlu memainkan peranan yang lebih besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, antara lain, dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.
2. Para ahli bahasa di daerah perlu dilibatkan dalam meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan pemerintah daerah, terutama dalam dokumen resmi.
3. Pemerintah daerah perlu membuka peluang kerja yang lebih luas bagi sarjana bahasa, terutama jurusan bahasa daerah.

B. Meningkatkan Mutu Bahasa sebagai Sarana Komunikasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teknologi informasi, dan tantangan kehidupan dalam era globalisasi

menuntut agar kualitas bahasa Indonesia ditingkatkan dan kemampuan daya ungkapnya dikembangkan. Untuk itu, unsur-unsur bahasa seperti sintaksis dan kosakata, termasuk peristilahan, perlu diperkaya. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi di segala bidang perlu lebih dimantapkan untuk menghadapi kenyataan makin meluasnya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di Indonesia.

Tindak lanjut

1. Pengembangan peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diprioritaskan dan pengembangan kosakata perlu ditingkatkan, antara lain, dengan penyerapan kata dari bahasa lain melalui kaidah penyerapan yang lebih mantap.
2. Penggunaan eufemisme secara berlebihan dengan maksud menutup-nutupi kenyataan yang negatif harus dihindarkan, sedangkan eufemisme yang berkaitan dengan kesopansantunan berbahasa serta adat istiadat perlu dilestarikan.
3. Mutu pengajaran bahasa dan sastra perlu ditingkatkan dengan menekankan keterampilan berbahasa serta kemampuan mengapresiasi sastra.
4. Penyusunan buku ajar dan instrumen evaluasi berbagai bidang ilmu perlu lebih memperhatikan kaidah-kaidah bahasa baku.
5. Penguasaan bahasa Indonesia baku perlu dijadikan salah satu syarat utama dalam ihwal kepegawaian, seperti penerimaan, penempatan, dan kenaikan pangkat.
6. Di samping buku tata bahasa baku dan kamus yang sudah ada, perlu pula disusun dan diterbitkan buku tata bahasa dan kamus sekolah yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
7. Penelitian berbagai laras bahasa Indonesia perlu ditingkatkan untuk keperluan penyusunan buku panduan penggunaan laras bahasa Indonesia.
8. Bahasa Indonesia dalam iklan, selain harus mengutamakan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga perlu berpedoman pada norma-norma sosial budaya bangsa sehingga kata-kata yang berkonotasi vulgar tidak digunakan.
9. Buku-buku terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang merupakan pedoman pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dikaji ulang agar dapat lebih memenuhi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi.

C. Meningkatkan Apresiasi dan Daya Cipta Sastra

Karya sastra Indonesia dan daerah pada umumnya bersumber pada budaya Indonesia dan nilai-nilai budaya asing yang sudah diramu ke dalam

budaya Indonesia dan daerah. Kemampuan memadukan nilai-nilai budaya sendiri dengan nilai-nilai budaya asing ke dalam karya sastra itu merupakan modal dasar daya cipta untuk meningkatkan kualitas kehidupan sastra, yang selanjutnya merangsang perkembangan apresiasi sastra.

Apresiasi sastra dan kreativitas dalam sastra Indonesia dan daerah memperkaya kehidupan batiniah masyarakat Indonesia. Selain memperkukuh jati diri masyarakat Indonesia, kekayaan batiniah juga memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi warga dunia yang terhormat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan apresiasi dan kreativitas dalam sastra Indonesia dan daerah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu.

Tindak Lanjut

a. Meningkatkan Apresiasi Sastra

Untuk meningkatkan apresiasi sastra ditempuh usaha-usaha berikut.

1. Mutu pengajaran sastra perlu ditingkatkan dengan
 - a) menjadikan mata pelajaran sastra sebagai mata pelajaran yang otonom;
 - b) memperbanyak kegiatan membaca dan membahas karya-karya sastra serta memperbanyak latihan menulis karya sastra di sekolah menengah umum;
 - c) menyediakan sarana belajar yang lebih lengkap baik berupa buku asli, terjemahan, maupun saduran.
2. Penerbitan buku-buku sastra Indonesia dan daerah perlu didukung dan digiatkan.
3. Perpustakaan yang memiliki buku-buku sastra Indonesia dan daerah perlu diperbanyak sampai ke pelosok tanah air.
4. Komunitas sastra Indonesia dan daerah perlu dibina dan dikembangkan dengan melibatkan para sastrawan dalam berbagai kegiatan.
5. Penulisan kritik sastra Indonesia dan daerah perlu didorong untuk menjembatani karya sastra dengan pembacanya.

b. Meningkatkan Daya Cipta Sastra

Daya cipta sastra perlu ditingkatkan melalui usaha-usaha berikut.

1. Kemudahan untuk memperluas wawasan sastrawan perlu disediakan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam forum internasional.
2. Hambatan-hambatan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan menyebarluaskan karya sastra perlu diupayakan untuk dihilangkan.
3. Hak cipta karya sastra perlu dilindungi secara penuh.
4. Pemerintah perlu memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh sastra yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan

sastra Indonesia.

5. Karya-karya sastra terpilih dari komunitas sastra di berbagai daerah perlu diterbitkan.
6. Karya-karya sastra yang terbit dalam media massa cetak, terutama surat kabar, perlu dikembangkan lebih lanjut, misalnya, melalui penilaian dan penerbitan (dalam bentuk antologi).
7. Karya sastra Indonesia dan daerah perlu lebih diperkenalkan di forum internasional, antara lain, melalui penerjemahan.
8. Karya sastra daerah perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan, kalau perlu, ke dalam bahasa asing.

D. Rekomendasi

Putusan Kongres Bahasa Indonesia VI sebagian sudah dilaksanakan, sebagian sedang dalam pelaksanaan, dan sebagian lagi belum terlaksana. Untuk melaksanakan putusan Kongres Bahasa Indonesia VI yang belum terselesaikan dan putusan Kongres Bahasa Indonesia VII, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Melaksanakan putusan Kongres Bahasa Indonesia VI yang belum terlaksana atau belum tuntas.
2. Menyelenggarakan pertemuan nasional untuk mengembangkan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 dalam rangka menyusun kebijaksanaan bahasa nasional yang lebih mutakhir dan menyeluruh.
3. Menyelenggarakan pertemuan nasional untuk menyusun strategi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
4. Mengembangkan lebih lanjut terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa seperti *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
5. Mengupayakan penyebarluasan terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa agar dapat diperoleh di pasar bebas.

Untuk menopang pelaksanaan rekomendasi di atas, Kongres Bahasa Indonesia VII mengusulkan pembentukan *Badan Pertimbangan Bahasa* sebagai mitra Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Keanggotaan Badan Pertimbangan Bahasa terdiri atas pakar bahasa dan sastra, tokoh masyarakat, dan pakar bidang lain yang mempunyai minat dan perhatian terhadap bahasa dan sastra.
2. Tugas Badan Pertimbangan Bahasa ialah:
 - a. mengupayakan peningkatan status kelembagaan Pusat Pembinaan

- dan Pengembangan Bahasa;
- b. memberikan nasihat, diminta atau tidak diminta, kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam pelaksanaan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, termasuk pelaksanaan putusan Kongres Bahasa Indonesia VII;
 - c. melanjutkan pelaksanaan tugas Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia VI.

Jakarta, 30 Oktober 1998

Tim Perumus

- 1. Hasan Alwi (Ketua merangkap anggota)
- 2. Dendy Sugono (Sekretaris merangkap anggota)
- 3. A. Latief (anggota)
- 4. Amran Halim (anggota)
- 5. Soenjono Dardjowidjojo (anggota)
- 6. Yus Rusyana (anggota)
- 7. Budi Darma (anggota)
- 8. Fuad Abdul Hamied (anggota)
- 9. T.A. Ridwan (anggota)
- 10. Zainuddin Taha (anggota)

**LAPORAN KEPALA PUSAT BAHASA
PADA ACARA PENUTUPAN
KONGRES BAHASA INDONESIA VIII**

Assalamualaikum w.w.

Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore,

Yang terhormat Menteri Pendidikan Nasional,
Para Menteri Kabinet Gotong Royong atau yang mewakilinya,
Yang mulia para duta besar negara sahabat,
Para pemakalah dan peserta Kongres Bahasa Indonesia VIII yang berbahagia,

Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan laporan pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia VIII sebagai berikut.

Kongres Bahasa Indonesia VIII yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 75 tahun Sumpah Pemuda telah berlangsung selama 4 hari, yaitu pada tanggal 14—17 Oktober 2003 di Hotel Indonesia.

Tema Kongres Bahasa Indonesia VIII, “Bahasa Indonesia Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi,” telah dijabarkan ke dalam tiga pokok bahasan utama, yaitu masalah kebahasaan, kesastraan, dan bahasa media massa. Para peserta telah berbagi informasi, bertukar pikiran, dan telah menyampaikan gagasan segar bagi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra ke depan, yaitu pada era globalisasi.

Hadirin yang saya hormati,

Saya ingin menyampaikan beberapa hal “khusus” yang berkaitan dengan pelaksanaan kongres.

Kongres Bahasa Indonesia VIII dihadiri oleh 1.106 peserta, yang terdiri atas 1.068 peserta dalam negeri yang berasal dari 30 provinsi dan 38 peserta dari luar negeri, yang berasal dari 16 negara, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, Korea, Francis, Jepang, Cina, Bulgaria, Rusia, Belanda, Italia, Inggris, Amerika, dan Suriname. Provinsi yang mengirimkan peserta paling banyak adalah DKI Jakarta sebanyak 199 orang, disusul Sulawesi Selatan 86, Jawa Barat 52 orang, dan DI Yogyakarta 35 orang.

Kami juga ingin melaporkan kesehatan peserta selama kongres berlangsung. Berdasarkan catatan Tim Kesehatan, peserta yang mengalami gangguan kesehatan sebanyak 100 orang, kurang dari 10 persen). Sebagian besar mereka menderita penyakit batuk dan pilek sebanyak 68 orang, kelelahan 15 orang, maag 10 orang, tekanan darah tinggi 5 orang, dan alergi 2

orang. Alhamdulillah tidak ada peserta yang mengalami penyakit berat yang harus dirujuk ke rumah sakit. Mereka cukup ditangani oleh Tim Kesehatan di bawah koordinasi dr. Suryadji dari Pusat Kesegaran Jasmani, Depdiknas.

Para peserta, terutama yang berasal dari Jabotabek, petang ini akan meninggalkan arena kongres Hotel Indonesia. Sementara itu, peserta yang datang dari luar Jakarta sebagian besar akan kembali ke tempat mereka masing-masing pada hari Sabtu pagi besok. Dalam kaitan itu, saya, selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi pada acara yang lain dalam kesempatan yang akan datang.

Selaku Panitia penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia VIII, saya mohon maaf kepada seluruh peserta atas segala kekurangan: dalam pelayanan kami sejak dari persiapan hingga penyelenggaraan kongres ini.

Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak A. Malik Fadjar, Menteri Pendidikan Nasional, untuk menutup Kongres Bahasa Indonesia VIII secara resmi.

Terima kasih.

Wassalamualaikum w.w.

Dendy Sugono

Ketua Panitia Penyelenggara

**SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
PADA UPACARA PENUTUPAN KONGRES BAHASA INDONESIA VIII**

Jakarta, 17 Oktober 2003

Assalamualaikum w.w.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Setelah kita berhimpun di Hotel Indonesia ini untuk mengkaji berbagai permasalahan kebahasaan dan kesastraan serta media massa dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII, petang ini kita sampai pada saat-saat terakhir upacara penutupan. Selama hampir sepekan media massa kita, khususnya di ibu kota, diramaikan dengan berita seputar masalah bahasa, sastra, dan media massa terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selama 75 tahun, sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928) dan 58 tahun sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah kosakata, penutur, maupun luas persebarannya.

Dalam konteks itu tidak dapat dihindarkan masuknya unsur bahasa asing ataupun bahasa daerah ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Hal itu tentu memperkaya bahasa Indonesia sejalan perkembangan masyarakat penuturnya. Pertambahan kosakata itu tentu melalui proses menyesuaikan dengan perilaku bahasa Indonesia, bahkan keadaan itu menempatkan bahasa Indonesia sebagai "taman sari" yang indah. Selain pertambahan kosakata, bahasa Indonesia mengalami perluasan ranah pemakaiannya ke berbagai bidang kehidupan. Dalam penambahan jumlah penutur dan perluasan daerah penyebarannya, bahasa Indonesia hari ini telah merasuk ke pelosok tanah air sekalipun masih terdapat 15,6 juta penduduk Indonesia yang masih buta aksara.

Kontak budaya bangsa Indonesia dengan bangsa lain dalam pergaulan antarbangsa menempatkan bahasa kita dipelajari di banyak negara. Hal itu berarti bahwa pemakaian bahasa Indonesia meluas ke berbagai negara, sekurang-kurangnya di ruang kuliah atau ruang-ruang kursus tempat orang asing belajar bahasa Indonesia, sebagaimana tersirat dari kehadiran peserta Kongres ini dari berbagai negara. Saya juga memperoleh informasi bahwa bahasa Indonesia dalam media massa juga dibahas mengingat peran media massa yang amat strategis dalam pengelolaan masalah bahasa Indonesia ini.

Dalam hubungan itulah, kita menyadari perlunya penetapan garis haluan kebijakan bahasa, sastra, dan media massa secara menyeluruh dan berkelanjutan sebagai mata rantai yang tak putus dari satu Kongres ke Kongres yang berikutnya. Hal yang menggembirakan dalam kongres sekarang ini ialah makin berperannya generasi muda yang menjadi peserta kongres, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta aktif. Kuatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai perekat

persatuan bangsa dan penegas jati diri bangsa memang harus diakui sebagai sesuatu yang terbatas di kalangan pencinta bahasa.

Di sisi lain, karena pengaruh budaya global tidak sedikit khalayak yang kurang peduli akan fungsi utama bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang mengejawantah pada sikap “semaunya” dalam berbahasa. Kini sikap berbahasa “semaunya” itu tampaknya sedang dihadapi oleh sekelompok wartawan yang telah memiliki kesadaran untuk menjaga perkembangan bahasa Indonesia pada kerangka kaidah yang telah dibakukan. Pemeliharaan itu terwujud dalam bentuk organisasi profesi Forum Bahasa Media Massa.

Keinginan khalayak peserta kongres akan adanya undang-undang kebahasaan tampaknya harus disikapi dengan arif sebagai keinginan yang sepatutnya dipertimbangkan. Pemakaian bahasa yang dianggap “kebablasan” dan divonis sebagai perilaku berbahasa yang melanggar rambu-rambu yang digariskan para guru dan pakar bahasa hendaknya ditanggapi secara dewasa sehingga tidak perlu lagi muncul istilah polisi bahasa untuk para pengguna bahasa kita.

Apa yang telah diperbincangkan dalam kongres sekarang ini hendaknya menjadi bahan renungan kita untuk menatap masa depan bahasa kebangsaan kita di tengah-tengah arus globalisasi. Ada berbagai keinginan yang berkembang dalam masyarakat kita sesuai dengan keberagaman masyarakat. Ada yang menghendaki ketegasan dalam menghadapi pelanggaran kaidah kebahasaan. Ada yang menghendaki pertumbuhan kesadaran kebahasaan pada masyarakat tanpa kontrol negara, serta ada pula yang menghendaki kebebasan dalam mengawal perkembangan bahasa kebangsaan kita itu. Di tengah keberagaman keinginan seperti itu kita harus pandai-pandai memilih kebijakan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Akhirnya, saya ingin menegaskan bahwa melalui kongres, kita harus mempertegas komitmen yang diikrarkan oleh para pemuda 75 tahun yang lalu untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kepada seluruh peserta yang terdiri atas pejabat, cendekiawan, budayawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pakar, wakil mahasiswa, dan para peminat, baik dari seluruh Indonesia maupun yang datang dari mancanegara. Saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih dan selamat jalan kepada para peserta yang berasal dari luar Jakarta.

Dengan ucapan DIRGAHAYU BAHASA INDONESIA, kita tutup Kongres Bahasa Indonesia VIII.

Wassalamualaikum wr.wb.

Jakarta 17 Oktober 2003
Menteri Pendidikan Nasional

A. Malik Fadjar

**DAFTAR PEMAKALAH
KONGRES BAHASA INDONESIA VIII
JAKARTA, 2003**

DALAM NEGERI

No.	Nama Pemakalah	Jabatan/Alamat
1	Dr. Dendy Sugono	Kepala Pusat Bahasa
2	Prof. Dr. A. Malik Fadjar, M.Sc.	Menteri Pendidikan Nasional
3	Dr. Arry Akhmad Arman, M.T.	Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung
4	Susilo Bambang Yudhoyono	Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
5	Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.	Kompleks APMD, Jalan Ganesha III No. 39, Balirejo, Yogyakarta 55165
6	Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo	Komisi Hukum Nasional
7	Ir. Hernowo	Penerbit Mizan, Bandung
8	Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana	Rektor Universitas Katolik Atma Jaya
9	Prof. Dr. Yus Rusyana	Universitas Pendidikan Indonesia
10	Dr. Sumardi, M.Sc.	Sekretaris Umum HPBI
11	Prof. Dr. Soenjono Dardjowidjojo	Ketua MLI
12	Prof. Dr. Riris K. Toha-Sarumpaet	Ketua Hiski
13	T.D. Asmadi	Ketua Forum Bahasa Media Massa (FBMM)
14	Prof. Dr. D.P. Tampubolon	Universitas Sumatera Utara
15	Prof. Dr. Anwar Supriadi	Ketua Lembaga Administrasi Negara
16	Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brojonegoro	Dirjen Pendidikan Tinggi
17	Dr. Ir. Indra Djati Sidi	Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
18	dr. Fasli Jalai, Ph.D.	Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
19	Prof. Dr. Suminto A. Sayuti .	Universitas Negeri Yogyakarta
20	Dr. Oentarto Sindung Mawardi, M.Si.	Dirjen Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri
21	Prof. Dr. Benyamin Lakitan	Asisten Kesejahteraan Sosial Sekwilda Sumatera Selatan
22	H. Muhammad Adnan Tiro	Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan
23	Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S.	Universitas Sumatera Utara
24	Darlis Sofyan	Redaktur Bahasa Harian <i>Singgalang</i>
25	Karno Kartadibrata	Redaktur Bahasa Majalah <i>Mangle</i>
26	Drs. Sofyan Harahap	Redaktur Eksekutif Harian <i>Waspada</i>
27	Drs. Arwan Tuti Artha	Redaktur Bahasa Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>
28	Drs. M. Hoesni Thamrin	Redaktur Bahasa Harian <i>Banjarmasin Pos</i>

29	Dr. Paulina Pannen, M. Yunus, Teguh Prakoso	Dekan FKIP Univeritas Terbuka
30	Dr. Abdul Wahab	Universitas Negeri Malang
31	Prof. Dr. Fuad Abdul Hamied	Universitas Pendidikan Indonesia
32	Helena Agustien	Gombel Permai V/105 Semarang 50261
33	Dr. Hermina Sutarni	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, UI
34	Drs. Medy Loekito	Yayasan Sastra
35	Drs. Jamal D. Rahaman, M.Hum.	Majalah <i>Harisan</i>
36	Tarman Azzam	Ketua Umum PWI
37	Garin Nugroho	Jalan Bacang III/5, Gandaria, Jakarta Selatan
38	Remy Silado	Jalan Cipinang Muara III, Kav. PLN No. 69, Jakarta 13420
39	Drs. Parni Hadi	Villa Ragunan Permai Kav. 19, Jalan Poncol, Ragunan, Jakarta Selatan
40	Prof. Dr. Chuzaimah Dahlan Diem, M.L.S.	Program Studi Pendidikan Bahasa, PPS Universitas Sriwijaya
41	Gunoto Saparie	Jalan Pandanaran II/10, Semarang 50241
42	Drs. Puji Santosa, M.Hum.	Pusat Bahasa
43	Dra. Sri Widati	Balai Bahasa Yogyakarta
44	Drs. Widada Hs., M.Hum.	Balai Bahasa Semarang
45	Dr. Aron Meko Mbete	Fakultas Sastra Universitas Udayana
46	Dr. Sarwiji Suwandi	Universitas Negeri Sebelas Maret
47	Dr. I Wayan Bawa	Fakultas Sastra Universitas Udayana
48	Prof. Dr. Asim Gunarwan	Fakultas Ilmu Budaya Univeritas Indonesia
49	Dr. M. Zaim, M.Hum.	Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang
50	Imelda Yance, S.S., M.Hum.	Balai Bahasa Pakanbaru
51	Mulyadi Eko Purnomo	FKIP Universitas Sriwijaya
52	Drs. Kasmansyah, M.Si.	FKIP Universitas Sriwijaya
53	Yusrita Yanti	Fakultas Sastra Universitas Bung Hatta
54	Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana, S.U., M.A.	Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada
55	Drs. Ida Bagus Putra Yadnya, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Udayana
56	Dra. Mu'jizah, M.Hum.	Pusat Bahasa
57	Drs. Sugiyono, M.Hum.	Pusat Bahasa
58	Drs. C. Ruddyanto, M.A.	Pusat Bahasa
59	Dr. Yayah Bachria Mugnisjah	Pusat Bahasa

LUAR NEGERI

No.	Nama Pemakalah	Jabatan/Alamat
1	Dr. Ismet Fanany	School of Social and International, Studies, Deakin University, Australia
3	Awang Haji Abdul Hakim bin Haji Mohd. Yassin	Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam
4	Dato' Haji A. Aziz bin Deraman	Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
5	Prof. Madya Dr. Kamsiah Abdullah	17, Everitt Rd. North, Singapore 428530
6	Dr. Victor A. Pagadaev	Universitas Negara Moskow
7	Prof. Hein Steinhauer	Department of Southeast Asian Languages & Cultures, Leiden University
8	Prof. Huang Chen Fang	Deputy Director Institute of Indonesian and Malay Studies, Foreign Languages Building, Peking University
9	Prof. Madya Dr. Paitoon M. Chaiyanara	Nanyang Technological University, NIE 1 Nanyang Walk, Singapore 637616
10	Jerome Samuel	Archipel 22 Avenue, Du President Wilson 75016, France
11	Prof. Faizah Sunoto Rivai	Instituto Universitario Orientale Napoli, Italia
12	Yumi Kondo	Presiden Direktur Intercultural Networks Japan Inc. (INJ)
13	Roesman Darmohoetomo	Librastraat No.1, KBRI Suriname, Paramaribo, Amerika Selatan
14	Bruce F. Jarvis	3 Olney Street, Awaba NSW 2283, Australia

**DAFTAR PESERTA
KONGRES BAHASA INDONESIA VIII
JAKARTA, 2003**

DALAM NEGERI

Nanggoe Aceh Darussalam

No.	Nama	Instansi/Alamat
1	Drs. H. Teuku Alamsyah	Kesejahteraan Rakyat
2	Abdul Gani Asyik, Ph.D.	PBS FKIP Universitas Syiah Kuala
3	Dr. Rajab Bahry, M.Pd.	PBS FKIP Universitas Syiah Kuala
4	Drs. Teuku Abdullah, Sm.Hk.	PBS FKIP Universitas Syiah Kuala
5	Drs. Mukhlis A.Hamid, M.S.	PBS FKIP Universitas Syiah Kuala
6	Mazhar (Maskirbi)	Taman Budaya
7	Drs. Bakhtiar	SMU Negeri I Sabang
8	Dr. Abdul Djunaidi, M.S.	Balai Bahasa Banda Aceh
9	Drs. Syarifuddin	Balai Bahasa Banda Aceh
10	Drs. Heppy	Balai Bahasa Banda Aceh
11	Muhibbuddin, S.Ag.	Balai Bahasa Banda Aceh
12	Medri Osno, S.S.	Balai Bahasa Banda Aceh
13	Drs. Ridwan Ibrahim, M.Pd.	FKIP Universitas Syiah Kuala
14	Drs. Azmi Djakfar	Kepala Subdinas Kebudayaan
15	Drs. Ahmad As'Adi	Kepala Dinas Kebudayaan Aceh
16	Drs. H. Abdul Gani Brutu	Kepala Dinas Kebudayaan Aceh Singkil
17	Djufri Basyah	Kepala Seksi Dinas Kebudayaan
18	Drs. Junaidi B.	Kepala Seksi Dinas Kebudayaan

Sumatera Utara

19	Drs. H. Sofyan Nasution, S.H.	Asisten Kesra Sekda
20	Prof. Chainur Arrasyid, S.H.	Fakultas Hukum USU
21	Prof. H. Ahmad Samin Siregar	Fakultas Hukum USU
22	Tuanku Luckman Sinar, S.H.	Jalan Abdullah Lubis No. 47/42, Medan
23	Rahman S. Abdullah	Sekretaris Dewan Kesenian Sumatera Utara
24	Saiful Hidayat, S.S.	Jalan Sumber Bangun Gang Langgar No. 92 Marindal Medan
25	Drs. Hasan Basri, M.M.	Ketua MGMP Bahasa Indonesia Sumut
26	Dr. Khairil Ansyari, M.Pd.	Fakultas Sastra USU
27	Prof. Bahren Umar Siregar, Ph.D.	Ketua MLI Cabang USU
28	Prof. Dr. H.T. Amin Ridwan	Pascasarjana PPs USU
29	Suyadi San, S.Pd.	BEM Universitas Negeri Medan
30	Drs. Shafwan Hadi Umry	Balai Bahasa Medan
31	Drs. Amran Purba	Balai Bahasa Medan
32	Tengku Syarfina, S.S., M.Hum.	Balai Bahasa Medan
33	Drs. Martin	Balai Bahasa Medan

No.	Nama	Instansi/Alamat
34	Dra. Mukhamdanah	Balai Bahasa Medan
35	Nurelide, S.S.	Balai Bahasa Medan
36	Sahril, S.S.	Balai Bahasa Medan
37	Nelson Lumbantoruan, S.S.	Balai Bahasa Medan
38	Drs. Suryadi, M.Hum.	Politeknik Negeri Medan
39	Prof. Dra. Yusmaniar Noor	Universitas Negeri Medan
40	Drs. H.M. Tantawi Yunus, S.H.	Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara
41	Cipta Utama Hsb.	Perumnas Medan II
42	Drs. Syahnan Daulay, M.Pd.	Universitas Negeri Medan
43	Silvana Sinar, M.A., Ph.D.	Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara
44	Drs. M. Joharis	Universitas Negeri Medan

Sumatera Barat

45	Drs. H. Sultani Warman	Asisten III Sekda Sumatera Barat
46	Dr. H. Kamardi Rais Dt. P. Simulie	Ketua LKAAM Sumatera Barat
47	Dr. Mestika Zed	Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
48	Drs. Ivan Adilla, M.Hum.	FS Sastra Universitas Andalas
49	Prof. Dr. Anas Yasin, MA	Balai Bahasa Universitas Negeri Padang
50	Dra. Hj. Mailendra	Jalan Belitung No. 20 Wisma Warta Padang
51	Drs. Amris Nura	Universitas Negeri Padang
52	Gus tf Sakai	Jalan Jend. Sudirman, Gg. Melayu No. 10A
53	Dra. Erwina Burhanuddin, M.Hum.	Balai Bahasa Padang
54	Dra. Non Martis	Balai Bahasa Padang
55	Kartika Sari, S.S.	Balai Bahasa Padang
56	Rita Novita, S.S.	Balai Bahasa Padang
57	Syamsurizal, S.S.	Balai Bahasa Padang
58	Krisnawati, S.S.	Balai Bahasa Padang
59	Mulyadi, S.S.	Balai Bahasa Padang
60	Drs. Atmazaki, M.Pd.	Universitas Negeri Padang
61	Dr. Hasanuddin WS., M.Hum.	Universitas Negeri Padang
62	Christian Ly, S.S.	Universitas Ekasakti Padang
63	Drs. Zulfahmi HB., M.Hum.	IAIN Imam Bonjol Padang
64	Drs. Endut Akhadiat, M.Hum.	Universitas Bung Hatta
65	Drs. Oktavianus, M.Hum.	Universitas Andalas
66	Diah Noverita	Universitas Andalas
67	Dra. Agustina, M.Hum.	Universitas Negeri Padang
68	Dra. Yetti Morelent, M.Hum.	Universitas Bung Hatta
69	Prof. Dr. Marjusman Maksan	Universitas Negeri Padang

No.	Nama	Instansi/Alamat
-----	------	-----------------

Riau

70	Drs. H. Mustafa Kamal	Kepala Siro Kesra Kantor Gubernur Riau
71	Prof. Drs. Khailani Hasan, M.Pd.	FKIP Universitas Riau
72	Dra. Zaidat Dahlan	FKIP Universitas Riau
73	Drs. Al Azhar, M.A.	LKMR Bandar Serai, Pekanbaru
74	Prof. Drs. H. Suwardi, M.S.	Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau
75	Drs. H. Taufik Ikram Jamil	Direktur Akademi Kesenian Riau
76	Dra. Neni Hendriyani	Guru SMU 7 Pekanbaru
77	Prof. Dr. Mohammad Diah, M.Ed.	FKIP Universitas Riau
78	Drs. Agus Halim, M.Pd.	Balai Bahasa Pekanbaru
79	Dra. Ermitati, M.Hum.	Balai Bahasa Pekanbaru
80	Maryoto, S.Pd.	Balai Bahasa Pekanbaru
81	Dra. Sri Sabakti	Balai Bahasa Pekanbaru
82	Chrisna Putri Kurniati, S.S.	Balai Bahasa Pekanbaru
83	Imelda, S.S.	Balai Bahasa Pekanbaru
84	Yulita Fitriana, S.S.	Balai Bahasa Pekanbaru
85	Yanti Riswara, S.S.	Balai Bahasa Pekanbaru
86	Devi Fauziyah M., S.S.	Balai Bahasa Pekanbaru
87	Drs. M. Arifin, M.Pd.	UNIB Kepulauan Riau
88	Drs. Suhartono, M.Pd.	UNIB Kepulauan Riau
89	Syahriady	Jalan Meranti Surian No. 1 Labuh Baru, Pekanbaru
90	Dra. Evizariza, M.Hum.	Universitas Lancang Kuning

Sumatera Selatan

91	Drs. A. Bastari Suan	Jalan Jaksa Agung R. Suprpto, Gg Keluarga No. 22
92	Djohan Hanafiah	Anggota DPRD Sumatera Selatan
93	Drs. Subadiyono, M.Pd.	FKIP Universitas Sriwijaya
94	Prof. Nangsari Ahmad, Ph.D.	FKIP Universitas Sriwijaya
95	Drs. Zainul Arifin Aliana	FKIP Universitas Sriwijaya
96	Anwar Putra Bayu	Jalan Pangeran Ayin, Kompleks Bank Sumatera Selatan
97	Dra. Hj. Latifah Ratnawati, M.Hum.	Ketua HISKI Komda Sumatera Selatan
98	Prof. Dr. Chuzaimah Dahlan Diem	Ketua MLI Sumatera Selatan
99	Drs. Muslim	Guru SMU Negeri 17
100	Drs. Muslim	SL TP Sriguna Palembang
101	Sarjana, S.Pd.	SL TP LB-B.C YPAC Palembang
102	Prof. Dr. Amran Halim	Anggota Panitia Pengarah
103	Drs. B. Trisman, M.Hum.	Balai Bahasa Palembang
104	Aminulatif, S.E.	Balai Bahasa Palembang
105	Diah Susilawati, S.S.	Balai Bahasa Palembang

No.	Nama	Instansi/Alamat
106	Weni Oktavia, S.S.	Balai Bahasa Palembang
107	Nursis Twilovita, S.Pd.	Balai Bahasa Palembang
108	Dian Susilastri, S.S.	Balai Bahasa Palembang
109	Linny Oktaviany, S.Pd.	Balai Bahasa Palembang
110	Yeni Mastuti, S.Pd.	Balai Bahasa Palembang
111	Dra. Rusmaidar	Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya
112	Prof. Diemroh Iksan, MA, Ph.D.	Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya
113	Dra. Hj. Sri Rarasakti M.	FKIP Universitas Sriwijaya
114	Dra. Hj. Nurbaya	FKIP Universitas Sriwijaya
115	Drs. Supriyadi, M.Pd.	FKIP Universitas Sriwijaya
116	Drs. Suhardi Mukmin, M.Hum.	FKIP Universitas Sriwijaya
117	Dra. Siti Salamah Arifin	FKIP Universitas Sriwijaya
118	Dra. Nurhayati, M.Pd.	FKIP Universitas Sriwijaya
119	Drs. Zainul A. Naning, M.A.	Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya
120	Dra. Margaretha Dinar Sitinjak, M.A.	Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya
121	Drs. Surip Suwandi, M.Hum.	FKIP Universitas Sriwijaya
122	Eviliana, S.Pd.	Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya
123	Dra. Rita Hayati, M.A.	FKIP Universitas Sriwijaya
124	Netty Hartini, B.A.	SMK Negeri 4 Palembang
125	Dra. Hj. Ratu Wardarita, M.Pd.	Universitas PGRI Palembang

Jambi

126	Drs. Salim H.B.	Asisten II Sekda Provinsi Jambi
127	Dr. Herman Budiyo, M.Pd.	PBS FKIP Universitas Jambi
128	Dra. Warni Makmur, M.Hum.	PBS FKIP Universitas Jambi
129	Kemas Arsyad Somad, S.H., M.H.	Rektor Universitas Jambi
130	Drs. Hasan Kasim, S.H.	Kepala Biro Kesos, Sekda Provinsi Jambi
131	Drs. Maisyar Karim., M.Hum.	PBS FKIP Universitas Jambi
132	Amda Hafni, S.Pd.	Guru SMU 1 Jambi
133	Drs. Yon Adlis, M.A.	FKIP Universitas Jambi
134	Eddy Pahar Harahap	FKIP Universitas Jambi
135	Albertus Sinaga	FKIP Universitas Jambi
136	Drs. Larlen	FKIP Universitas Jambi
137	Mariyono	FKIP Universitas Jambi
138	Sudaryono	FKIP Universitas Jambi
139	Imam Suwardi	FKIP Universitas Jambi

No.	Nama	Instansi/Alamat
Bengkulu		
140	Ir. H. Fauzan Rahim	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
141	Drs. Agus Joko Purwadi, M.Pd.	FKIP Universitas Bengkulu
142	Ngudining Rahayu, M.Hum.	FKIP Universitas Bengkulu
143	Drs. H. Huzaifah Ismail	FKIP Universitas Bengkulu
144	H.M. Ikram	FKIP Universitas Bengkulu
145	Herman Suryadi	Unib Permai IV C/20 Blok VI
146	Drs. Rifai	Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMU
147	Sarwit Sarwono, M.Hum.	FKIP Universitas Bengkulu
148	Drs. Rokhmat Basuki, M.Hum.	Universitas Bengkulu

Kepulauan Bangka Belitung

149	Fanani, S.H.	Asisten Sekda Prov. Bangka Belitung
150	Drs. Asyraf Suryadin, M.Pd.	Jalan Imam Bonjol Gg. Dieng No. 18
151	Dra. Tien Rostini	d.a. SL TP Negeri 7 Sungailiat
152	Dra. Hartini	d.a. SL TP Negeri 6 Pangkalpinang
153	Suhaimi Sulaiman, BA	Jalan Kejaksaan No. 24, Pangkalpinang 33215
154	Muchtar Adjemain	Jalan Kejaksaan II No. 167, Muntok
155	Dra. S.R. Kunlistiani	d.a. SMU Negeri 2 Pangkalpinang

Banten

156	H. Hidayat Djohari, S.H., M.Si.	Karo Kesejahteraan Sosial
157	Prof. Dr. H. Yoyo Mulyana, M.Ed.	Rektor Univ. Sultan Ageng Tirtayasa
158	Iroh Sitti Zahroh, S.Pd.	Ketua HPBI Cabang Banten
159	Wan Anwar, M.Hum.	Kajur Bahasa dan Sastra, Univ. Sultan Ageng Tirtayasa
160	Toto St. Radik	Ketua Sanggar Sastra Indonesia, Serang
161	Drs. Solihin, M.Pd.	Ketua MGMP Bahasa Indonesia, Lebak
162	Teguh Prakoso, S.Pd.	FKIP Universitas Terbuka
163	Dra. Lis Setyawati, M.Pd.	FKIP Universitas Terbuka
164	Widyasari	FKIP Universitas Terbuka
165	Elizabeth Novi Kusumaningrum	Universitas Terbuka
166	Hascaryo Pramudibyanto	Universitas Terbuka
167	Adhi Susilo	Universitas Terbuka

No.	Nama	Instansi/Alamat
DKI Jakarta		
168	Dr. H. Achmad Hayadi, M.Sc.	Asisten Kesejahteraan Masyarakat
169	Drs. H. Husni Muchtar	Ketua Badan Kesatuan Bangsa
170	Yanti Sukamdani	Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, Perusahaan Periklanan Indonesia
171	Made Sudiarso, S.H., M.H.	Wakil Gubernur Lemhanas, BPHN
172	Prof. Dr. Edi Sedyawati	Universitas Indonesia
173	Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono	Universitas Indonesia
174	Dr. Bambang Kaswanti Purwo	Lembaga Bahasa Universitas Atmajaya
175	Dr. Multamia R.M.T. Lauder	Universitas Indonesia
176	Dr. Agus Dharma, S.H., Ph.D.	Kepala Pusdiklat Depdiknas
177	Dr. Myrna Laksman	Universitas Indonesia
178	Slamet Sukirnantono	Jalan Tirta Sari No. 11 Rt.006/03
179	Dr. Abdul Hadi W.M.	Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)
180	Prof. Dr. Achadiati Ikram	Universitas Indonesia
181	Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
182	Dr. Melani Budianta	Universitas Indonesia
183	Prof. Dr. Ayatrohaedi	Universitas Indonesia
184	Dr. Achmad H.P.	FPBS Universitas Negeri Jakarta
185	Prof. Dr. Benny H. Hoed	Universitas Indonesia
186	Dr. Ilza Mayuni	Dekan FPBS Universitas Negeri Jakarta
187	Prof. Dr. Sabarti Akhadijah	Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
188	Dr. Djati Kerami	Universitas Indonesia
189	Dr. Ignas Kleden	LP3ES
190	W.S. Rendra	Jalan Mangga Raya No. 89, Depok
191	Sutardji Couzum Bachri	Jalan Felisia II No. 31, Jati Bening II, Bekasi
192	Adi Kurdi	Perum Sukamaju Permai Blok T, Depok Timur
193	Putu Wijaya	Astia Puri II No.9, Jalan Kerta Mukti, Cireunde, Jakarta Selatan
194	Ramadhan K.H.	Jalan Deplu Raya No. 10, Bintaro, Jakarta Selatan
195	Drs. Sukesti, M.A.	Dinas Dikmenti Depdiknas
196	Drs. Ahmad Dasuki, M.M.	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
197	Dr. Bambang Indriyanto, M.Sc.	Kepala Pusjiran Balitbang
198	Dr. Wukir Ragil, S.H., M.Ed.	Kepala Pusat Perbukuan
199	Dr. Siskandar, MA	Kepala Pusat Kurikulum
200	Dra. Harina Yuhetty, M.Pd.	Kepala Pusat Teknologi Komunikasi

No.	Nama	Instansi/Alamat
201	Prof. Zamroni, Ph.D.	Direktur Pendidikan Menengah Umum
202	Bagiyono Djokosombogo	Staf Ahli Direktorat Dikmenjur
203	Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.	Ketua Jurusan Bahasa Indonesia
204	Dr. Oman Faturachman	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
205	Drs. Edi Sukardi, M.Pd.	Ketua HPBI Cabang DKI Jakarta
206	Dr. Jeni Harjatno	Ketua Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI)
207	Ahmad Nurhidayat	BEM Universitas Indonesia
208	Defrizal Siregar	BEM Universitas Negeri Jakarta
209	Sam'ani	BEM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
210	Zonvery L. Banurea	BEM Universitas Nasional
211	Andika Rizki	BEM Universitas Tri Sakti
212	Drs. Endo Senggono	Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin
213	Kapten Drs. Sudiyatno	Pendidikan Bahasa Badan Pendidikan dan Pelatihan, Dep. Hankam
214	Drs. Paul Permadi	Perpustakaan Nasional
215	Drs. Oman Sachroni, M.Si.	Arsip Nasional
216	Mohammad Sobari	LKBN Antara
217	Drs. Idris Alkas, M.Pd.	Bakohumas
218	Infani	Direktur PT Sigma Prokomunika
219	H. Masyhuri Sahid, M.A.	Majelis Ulama Indonesia
220	Drs. HM. Good Will Zubir	Muhammadiyah
221	KH. Hasyim Muzadi	Nahdatul Ulama
222	Pendeta Dr. Natan Setiabudi	Ketua Umum PGI
223	Weinata Sairin, M.Th.	Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen
224	Soedjito Kusumo Kartiko, S.E., MBA.	Perwakilan Umat Budha Indonesia
225	Kardinal Yulius Darmaatmaja, S.J.	Konvesi Wali Gereja Indonesia
226	Logena Ginting	Perwakilan Umat Hindu Indonesia
227	KH. Jaki Mubarak, MA	Dewan Masjid Indonesia
228	Helvj Diana Rosa	Jalan Cemara 2-3 Blok M, Kav DKI Cipayung
229	Giat Suwarno	Wakil Sekjen PGRI
230	Dr. Pudentia M.P.S.S.	Ketua Asosiasi Tradisi Lisan
231	Drs. Sam Mukhtar Chaniago, M.Si.	Ketua Forum Komunikasi, Dosen Bahasa Indonesia
232	Drs. H. Gandjar Suwargani	Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
233	Dr. Ir. Suharyadi, M.S.	Gedung Teja Buwana, (Kedaung Grup), Jalan Menteng Raya No. 29

No.	Nama	Instansi/Alamat
234	Willy Pramudiya	Aliansi Jurnalistik Independen Indonesia, Korp Wanita Indonesia
235	Dra. Nur Rifah Masykur	Forum Penerbit Indonesia
236	Eva Rosdiana Dewi	Persatuan Artis Film Indonesia
237	Drs. Hari Sulistyono	Direktur TVRI
238	Lanny Ratulangi	Direktur SCTV
239	Bernita	Direktur Rajawali RCTI
240	Anindya Bakri	Direktur ANTeve
241		Direktur Trans TV
242	Surya Paloh	Direktur Metro Televisi
243	Agus Parengkuan	Direktur TV-7
244	dr. Hidayat Tjandradjaya	Direktur Televisi Pendidikan Indonesia
245	dr. Handoko	Direktur Televisi Indosiar
246	Drs. Sukri	Radio Republik Indonesia
247	Rita Sri Hastuti	Direktur Radio Delta Insani Fm 99,50
248	Riko Alfonso	Harian Media Indonesia
249	Abdul Samal	Harian Republika
250	dr. Eko Budi Harsono	Harian Suara Pembaruan
251	Usman Gumanti	Harian Rakyat Merdeka
252	Drs. Mustopa	Harian Terbit
253	H.M. Sukri Burhan	Harian Pos Kota
254	Ayip	Harian Berita Buana
255	Linda Tanggodalla	Harian Bisnis Indonesia
256	Khairina	Redaksi Majalah Amanah
257		Redaksi Majalah Kosmopolitan
258	Irmira Irawati	Redaksi Majalah Swa Sembada
259	Farick Ziat	Redaksi Majalah Gadis
260		Redaksi Majalah Forum
261	Dr. Sri Sukesri Adiwimarta	Pusat Bahasa
262	Dra. Sri Timur Suratman	Pusat Bahasa
263	Drs. Adi Sunaryo, M.Hum.	Pusat Bahasa
264	Dr. A. Dahana	Universitas Indonesia
265	Prof. Dr. Basuki Suhardi	Universitas Indonesia
266	Drs. Nunus Supardi	Jalan Haji Saeli No. 9 Kemangisan, Jakarta Barat
267	dr. Widaninggar Widjajati, M.Ed.	Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani
268	Ismaida	Jalan Kebayoran lama 192, Jakarta Selatan
269	Bruce F. Jarvis	Pusat Bahasa
270	Anas Urbaningrum	Badan Pertimbangan Bahasa
271	Dr. Dewi Fortuna Anwar	Badan Pertimbangan Bahasa
272	Prof. Dr. Mieke Komar Kantaatmadja	Badan Pertimbangan Bahasa
273	Prof. Dr. Fuad Hasan	Badan Pertimbangan Bahasa

No.	Nama	Instansi/Alamat
274	Dr. Ono W. Purbo	Badan Pertimbangan Bahasa
275	Prof. Dr. Taufik Abdullah	Badan Pertimbangan Bahasa
276	Prof. Dr. Mien A. Rifai	Badan Pertimbangan Bahasa
277	Kris Handini, S.S.	Jalan Pembina 1 No. 35 Jakarta Timur
278	Kartika Handayani Ambari	Kokushika Universitas Tokyo, Jakarta Barat
279	Dra. Farida Ariyani	PPPG Bahasa, Jakarta
280	Dra. Elina Syarif	PPPG Bahasa, Jakarta
281	Drs. Mudini	PPPG Bahasa, Jakarta
282	Dra. Supratiningsih	PPPG Bahasa, Jakarta
283	Drs. Abdul Rohim	PPPG Bahasa, Jakarta
284	Drs. Endang	PPPG Bahasa, Jakarta
285	Dra. Endah	PPPG Bahasa, Jakarta
286	Dra. Hj. Ipon S. Purawijaya	PPPG Bahasa, Jakarta
287	Drs. Wanten. M.Hum.	Universitas Pancasila Jakarta SMUN 17 Jakarta Barat
288	Lita Pamela Kawira	FIPB Universitas Indonesia
289	Kushartanti	FIPB Universitas Indonesia
290	Dien Rovita	FIPB Universitas Indonesia
291	Erna Triswantini	FBS Universitas Negeri Jakarta
292	Tiodora Batuara, S.Pd.	SLTPN 13 Jakarta
293	Prof. Dr. Emzir	Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
294	Dr. Kinayati Djojoseuroto	Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
295	Edy Warsih, S.Pd.	SL TP Negeri 200, Jakarta Utara
296	Neng Sri Yeni	Jalan Angsana, Kebun Jeruk, Jakarta
297	Erlina Tri Purwanti, S.Pd.	SL TP 128 Halim Perdana Kusuma, Jakarta
298	Drs. Walija	FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta
299	Drs. Suyatno, M.Pd.	FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta
300	Drs. Nawawi, M.Pd.	FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta
301	Drs. Ade Hikmat, M.Pd.	FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta
302	Dra. Hj. Nini Ibrahim	FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta
303	Dra. Umul Qura	FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta
304	Yamin, S.Pd.	FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta
305	Drs. Wahyu Wibowo, M.M.	Direktur Depok Consulting Media

No.	Nama	Instansi/Alamat
306	Liliek Sofyan Achmad, S.F., M.A.	Direktur Depok Consulting Media
307	Tito W. Wojowasito	Universitas Indonesia
308	Dra. Inez Sapteno	Universitas Nasional Jakarta
309	Dra. Rs. Kurni Setyawati, M.M.	Aksek/LPK Tarakanita, Jakarta
310	Prof. Dr. Sakura H. Ridwan, M.Pd.	Universitas Negeri Jakarta
311	Dra. M. Jamilah	Universitas Negeri Jakarta
312	Dra. Fathiaty Murthado	Universitas Negeri Jakarta
313	Dra. Sintowati R.U., M.Pd.	Universitas Negeri Jakarta
314	Lucy Ruth Montolalu	Universitas Negeri Jakarta
315	Dra. Suhertuti, M.Pd.	Universitas Indonesia
316	Dra. Rosmid Rosa	Universitas Negeri Ja,karta
317	Dra. H. Zulfahnur Z.F., M.Pd.	Universitas Negeri Jakarta
318	Prof. Dr. Maidar Arsyad, M.P.	Universitas Negeri Jakarta
319	Dra. Sri Eka Lestari Ninggarwati	Universitas Negeri Jakarta
320	Felicia N. Utorodewo	Politeknik Universitas Indonesia
321	Untung Yuwono	Universitas Indonesia
322	Yoesoev	Universitas Indonesia
323	Sri Murniati Dewayani	Universitas Indonesia
324	Ibnu Wahyudi	Universitas Indonesia
325	Tommy Christomy	Universitas Indonesia
326	Priscila	Universitas Indonesia
327	Nitrasattri Handayani	Universitas Indonesia
328	Maria Indra Rukmi	Universitas Indonesia
329	Rasyid Sartuni	Universitas Indonesia
330	Dewaki Kramadibrata	Universitas Indonesia
331	Maman S. Mahayana	Universitas Indonesia
332	Yamin, S.Pd.	Universitas Indonesia
333	Frans Asisi Datang	Universitas Indonesia
334	Dra. Nurdjanah Kafrawi	Universitas Indonesia
335	Drs. Widjono, H.S.	Universitas Indonusa Esa Unggul
336	Dra. Hj. Suhartini Hartono, M.Pd.	Universitas Negeri Jakarta
337	Maria E. Susilowati	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta
338	Marsekal Madya TNI (Purn.) H. M. Soedjono	SMA Santo Antonius, Jakarta Kebayoran Baru, Jakarta
339	Drs. Olo Tahe Sinaga	SMU Negeri 36 Jakarta
340	Evie Hafifah	SMU Negeri 36 Jakarta
341	Drs. Eko Prasetyo	SMU Negeri 36 Jakarta
342	Drs. Gusrizal	STIE Setiabudi, Jakarta
343	Dra. Sri Indriyani, M.Pd.	Komite Nasional UNESCO untuk Indonesia
344	Mayor Drs. Agus Dwiyanto	Dephankam
345	Anggraeni, S.S., M.A.	Kejaksaan Agung RI
346	Asrom	Dinas Kebudayaan DKI Jakarta
347	Marnelly, S.Pd.	SMU Negeri 92 Jakarta Utara

No.	Nama	Instansi/Alamat
348	Y. Irnawati	SMU Negeri 52 Jakarta Utara
349	Posma Derita	SMU Negeri 52 Jakarta Utara
350	Wisaksono Noeradi	Konsuler Kehumasan Matari-PR
351	Maria Yosefina M. Kumaat	Universitas Indonesia
352	Dra. Junaiyah H.M., M.Hum.	Pusat Bahasa
353	Dra. Hani'ah, M.Hum.	Pusat Bahasa
354	Dra. Marida Gahara Siregar, M.Hum.	Pusat Bahasa
355	Drs. Puji Santosa, M.Hum.	Pusat Bahasa
356	Dra. Sastn Sunarti, M.Hum.	Pusat Bahasa
357	Drs. Zaenal Hakim, M.Hum.	Pusat Bahasa
358	Drs. A. Murad	Pusat Bahasa
359	Dra. Meity Taqdir Qodratillah	Pusat Bahasa
360	Drs. SST Wisnu Sasangka	Pusat Bahasa
361	Drs. Dedi Puryadi	Pusat Bahasa
362	Drs. Suyono Suyatno	Pusat Bahasa
363	Ardianto Bachtiar, S.S., M.Hum.	Pusat Bahasa
364	Drs. Jonner Sianipar	Pusat Bahasa
365	Dra. Dwi Agus Erinita	Pusat Bahasa

No.	Nama	Instansi/Alamat
Jawa Barat		
363	H. Ining Syachroni, S.H., M.Si.	Asisten Bidang Kesra Pemda Jawa Barat
364	Prof. Dr. H. Moh. Tadjuddin, M.A.	Jalan Antropologi No. 5 Kompleks Perumahan
365	Dr. Iskandarwassid, M.Pd.	Jalan Pasir Malaka E2 No. 32 Kompleks
366	Prof. Dr. Hj. T. Fatimah Djajasudarma	Dekan FS UNPAO, Bandung
367	Drs. H. Abdul Rochman	SMU Negeri 3 Bandung
368	Dra. Popong Otje Ojundjuran	Jalan Cipaganti 128, Bandung
369	Acil Bimbo	Jalan Biologi NO.4 Cigadung, Bandung
370	Drs. Ade S. Natawiria, M.Si.	Pembantu Rektor II Universitas Pakuan, Bogor
371	Acep Zamzam Noor	Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna,
372	Drs. Muh. Abdul Khak, M.Hum.	Balai Bahasa Bandung
373	Dra. Nantje Harijatiwidjaja	Balai Bahasa Bandung
374	Sariah, S.S., M.Pd.	Balai Bahasa Bandung
375	Dra. Rieza Utami Meithawati	Balai Bahasa Bandung
376	Dra. Yeni Mulyani Supriatin	Balai Bahasa Bandung
377	Umi Kulsum, S.S.	Balai Bahasa Bandung
378	Drs. Ayi Sofyan	Balai Bahasa Bandung
379	Nani Darheni, S.S.	Balai Bahasa Bandung
380	Lydia Irawati, S.S.	Balai Bahasa Bandung
381	Nia Kurnia, S.Pd.	Balai Bahasa Bandung
382	Resti Nurfaidah, S.S.	Balai Bahasa Bandung
383	Tri Wulandari, S.S.	Balai Bahasa Bandung
384	Famawati Sarang	Jalan A. Yani. No. 90, Bogor
385	Dra. Rosida Tiurma Manurung	Universitas Maranatha Bandung
386	Renny Sulistiyowati, S.S.	Institut Pertanian Bogor
387	Dra. Henny Krisnawati	FMIPA Institut Pertanian Bogor
388	Dra. Laksmi Arianti	FMIPA Institut Pertanian Bogor
389	Drs. Gugun Gunardi, M.Hum.	Fakultas Sastra Universitas Pajajaran Bandung
390	Dra. Tety Sulawati, M.Pd.	SMU Bumi Siliwangi, Bandung
391	Dra. Hj. Ice Sutari, M.Pd.	FPBS UPI Bandung
392	Dra. Novi Resmini, M.Pd.	FPBS UPI Bandung
393	Drs. Kuswara, M.Pd.	STKIP Sebelas April Sumedang
394	Dra. Hj. Siti Maryam, M.Pd.	FKIP UNSUR Cianjur
395	Dra. R. Panca Pertiwi Hidayati, M.Pd.	FKIP Universitas Pasundan Bandung
396	Dra. Hj. Nine Rusmiati	FKIP Universitas Pasundan Bandung
397	Dra. Yetti Heryati, M.Pd.	IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung
398	Dra. Hj. Enung K. Rukiati, M.Pd.	IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung

No.	Nama	Instansi/Alamat
399	Iis Ristiani, S.Pd., M.Pd.	Jalan Dr. Marwadi Raya, Cianjur
400	Dra. Hj. Dewi Amanah	Gang Mawar II No. 29 Purwakarta
401	Drs. Wahya, M.Hum.	Fakultas Sastra Unpad
402	Dra. Lina Meilinawati	Fakultas Sastra Unpad
403	Safrina	Universitas Pendidikan Indonesia
404	Drs. Jaja, M.Hum.	FKIP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
405	Drs. A. Rozak, M.Pd.	FKIP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
406	Dadang Suganda, M.Hum.	Fakultas Sastra Unpad
407	Nani Darmayanti, S.S.	Fakultas Sastra Unpad
408	Tri Sulistiyaningtyas, S.S.	Fakultas Sastra Unpad
409	Wogiyati, M.Hum.	Fakultas Sastra Unpad
410	Drs. Oyon Sofyan Umsari	LBSS Bandung
411	Suharti, M.Pd.	STKIP Subang
412	Dr. Cece Sobarna	Fakultas Sastra Universitas Pajajaran Bandung

Jawa Tengah

413	Dra. Datiningsih	Kabag Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
414	Prof. Dr. H.D. Edi Subroto	FS Universitas Sebelas Maret
415	Prof. Dr. Sudaryono	FS Universitas Diponegoro
416	Prof. Dr. Th. Sri Rahayu Priatmi, M.A.	FS Universitas Diponegoro
417	Drs. Murtidjono	Taman Budaya Jawa Tengah
418	Drs. H. Djawahir Muhammad	Dewan Kesenian Jawa Tengah
419	Prof. Dr. Rustono, M.Hum.	Ketua MLI Cabang Universitas Negeri Semarang
420	Prof. Dr. Maryono Dwiraharjo, S.U.	Dekan Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret Surakarta
421	Prof. Dr. H. Sudiro Satoto	Ketua HISKI Daerah Surakarta
422	Turiyo Ragilputra	Desa Kaibon Rt. 02/01 Kec. Ambal Kab. Kebumen
423	Drs. Mulyani M. Nur	SMU N 5 Semarang
424	Dra. Eko Sri Israhayu	SL TP Muhammadiyah II
425	Dorothea Rosa Herliany	Jalan Mayjen Bambang Sugeng 262 A
426	Drs. Gunawan Wibisono Adidarmojo	SLTP Negeri I, Sawit, Boyolali
427	Sunarti, S.S.	Balai Bahasa Semarang
428	Ganjar Harimansyah, S.S., M.Hum.	Balai Bahasa Semarang
429	Emma Maemunah, S.Pd.	Balai Bahasa Semarang
430	Rini Esti Utami, S.S.	Balai Bahasa Semarang
431	Azhari Dasman Darnis, S.Ag	Balai Bahasa Semarang

No.	Nama	Instansi/Alamat
432	Fitriana S.I., S.Pd.	SMK Negeri 1 Jogonalan Jawa Tengah
433	Bagiya, M.Hum.	Universitas Muhammadiyah Purworejo
434	Dr. Esti Ismawati, M.Pd.	Universitas Widya Dharma, Klaten
435	Drs. Asep Sukendar	SMU Taruna Nusantara, Magelang
436	Drs. Edi Suryanto, M.Pd.	FKIP Universitas Negeri Sebelas Maret
437	Sujipto Hadi	Redaksi Harian Suara Merdeka, Semarang
438	Drs. Triyantoro Triwikromo	Redaksi Harian Suara Merdeka, Semarang

DI Yogyakarta

439	Drs. Tombo Raharjo	Pengawas Dinas Pendidikan Kab. Bantul
440	Prof. Dr. Soepomo Poedjosoedarmo	FPBS Universitas Sanata Dharma
441	Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno	Fakultas Ilmu Budaya UGM
442	GBPH H. Joyokusumo	DPR RI Senayan Jakarta
443	Dra. Abidah EL Khalieqi	Gang Menur No. 42, Nayan, Maguwoharjo
444	Jabrohim	Ketua HISKI DI Yogyakarta
445	Drs. Hariadi, M.Pd.	Ketua HPBI Cabang Yogyakarta
446	Drs. Muhammad Nurrachmat Wirjosutedjo	SMU Negeri 8, Jl. Sidobali 1, Yogyakarta
447	Yudhi Ekaprasetia	Presiden BEM Universitas Gajah Mada Yogyakarta
448	Nh. Dini	Kawasan Lansia Sendowo Sinduadi
449	Prof. Dr. Ki Supriyoko	Badan Pertimbangan Bahasa
450	Drs. Syamsul Arifin. M.Hum.	Balai Bahasa Yogyakarta
451	Drs. Umar Sidik, S.I.P.	Balai Bahasa Yogyakarta
452	Drs. Tirta Suwondo, M.Hum.	Balai Bahasa Yogyakarta
453	Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina, M.Hum.	Balai Bahasa Yogyakarta
454	Drs. Dhanu Priyo Prabowa, M.Hum.	Balai Bahasa Yogyakarta
455	Drs. Adi Triyono, M.Hum.	Balai Bahasa Yogyakarta
456	Drs. Pardi, M.Hum.	Balai Bahasa Yogyakarta
457	Drs. Sri Haryatmo, M.Hum.	Balai Bahasa Yogyakarta
458	Drs. Edi Setiyanto, M.Hum.	Balai Bahasa Yogyakarta
459	Drs. Suharna	Balai Bahasa Yogyakarta
460	Drs. Herry Mardianto	Balai Bahasa Yogyakarta
461	Alfiah, S.Pd.	SDN Gondosuli Bantul, Yogyakarta
462	Heriyanto	SD Muhammadiyah Bojong Bantul, Yogyakarta

No.	Nama	Instansi/Alamat
463	Suwardi Endraswara	PBS Universitas Negeri Yogyakarta
464	Dr. Sudaryanto, M.Pd.	PPS Universitas Negeri Yogyakarta
465	Prof. Dr. Pujiati Suyata	PBI Universitas Negeri Yogyakarta
466	Santy	Pascasarjana Linguistik, UGM
467	Dr. Zamzani	PBS Universitas Negeri Yogyakarta
468	Kastam Syamsi, M.Pd.	PBS Universitas Negeri Yogyakarta
469	Dr. B. Widiyanto, M.Pd.	PBSID, FKIP Universitas Sanata Dharma
470	Dra. Yuliana Setyaningsih, M.Pd.	PBSID, FKIP Universitas Sanata Dharma
471	Drs. P. Haryanto	PBSID, FKIP Universitas Sanata Dharma
472	Dr. Pranowo, M.Pd.	PBSID, FKIP Universitas Sanata Dharma
473	Drs. Bambang Widiatmoko	Direktur Asdrafi, Yogyakarta

Jawa Timur

474	Ir. Kardani, M.M.	Asisten Kesejahteraan Masyarakat
475	Prof. Dr. Syafii	Rektor Universitas Negeri Malang
476	Dr. Ayu Sutarto	FS Universitas Negeri Jember
477	Prof. Dr. Budi Darma	Universitas Negeri Surabaya
478	Ir. Samsul Hadi	Bupati Banyuwangi
479	Drs. Suparlan	Kepala SMU Negeri 1 Glagah
480	Drs. M. Shoim Anwar	Jl. Raya Tandes Kidul 10, Surakarta
481	Drs. Sukono	Kepala SMU Negeri 1 Pademangan
482	Drs. Suyono, M.Pd.	Ketua HPBI Cabang Malang
483	Adi Setijowati	Ketua HISKI Universitas Airlangga
484	Prof. Dr. H. Suparno	Dekan Fak. Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Malang
485	Tri Haryanto, S.Pd.	SLTP N 6 Tuban
486	Fathurrofiq	SLTP AL Hikmah Full-Day School Surabaya
487	Drs. Slamet Riyadi, APU	Balai Bahasa Surabaya
488	Drs. Mashuri	Balai Bahasa Surabaya
489	Toha Machsum, M.Ag.	Balai Bahasa Surabaya
490	Luh Anik Mayani, M.Hum.	Balai Bahasa Surabaya
491	Desti Retnowati, S.S.	Balai Bahasa Surabaya
492	Yulitin Sungkowati, S.S.	Balai Bahasa Surabaya
493	Tri Winiasih, S.S.	Balai Bahasa Surabaya
494	Siti Komariah, S. Pd.	Balai Bahasa Surabaya
495	Dra. Foriyani Subiyatningsih	Balai Bahasa Surabaya
496	Drs. Asruni, M.Hum.	Fakultas Sastra Universitas Negeri Jember
497	Drs. M. Isnaeni Rodi	SL TP 3 Doku Blitar

No.	Nama	Instansi/Alamat
Bali		
498	Ida Bagus Ngurah Kasayatna, S.H.	Asisten II Bidang Ekbangesra Pemerintah
499	Dr. Ketut Artawa, MA	Fakultas Sastra Universitas Udayana
500	Prof. Dr. Dewa Komang Tantra, M.Sc.	IKIP Negeri Singaraja, Jl. A. Yani 67
501	Prof. Dr. Sumarsono, M.Ed.	Dosen IKIP Negeri Singaraja
502	Tan Lioe Ie	d.a. Perumahan Chandra Asri
503	Drs. Ida Bagus Gde Agastia	d.a. Majalah Warta Hindu Dharma
504	Drs. I Gusti Ngurah Oka Pemecutan	Jalan Kalimutu No. 15, Denpasar
505	Drs. I Gusti Ketut Tribana	SMU Negeri 6 Denpasar
506	Drs. I Nengah Sukarta, S.U.	Ketua MLI Cabang Udayana
507	Drs. I Gede Ariyasa	SMU N 1 Sidemen
508	Oka Rusmini	Jalan Nusakambangan Gang 38/100 C
509	Drs. Ida Bagus Darmasuta	Balai Bahasa Denpasar
510	Drs. I Wayan Tama, M.Hum.	Balai Bahasa Denpasar
511	Dra. Ida Ayu Mirah Purwiathi, M.Hum.	Balai Bahasa Denpasar
512	Drs. Ida Bagus Ketut Maha Indra, M.Hum.	Balai Bahasa Denpasar
513	Drs. I Made Budiasa, M.Si.	Balai Bahasa Denpasar
514	Dra. Ni Wayan Aryani, M.Hum.	Balai Bahasa Denpasar
515	Dra. Ni Putu Ekatini Negari, M.Hum.	Balai Bahasa Denpasar
516	Drs. I Nengah Budiasa, M.Hum.	Balai Bahasa Denpasar
517	Dra. Ni Luh Komang	Balai Bahasa Denpasar
518	Candrawati, M.Hum.	Balai Bahasa Denpasar
519	Drs. Ketut Mandala Putra, M.Hum.	Balai Bahasa Denpasar
520	Drs. I Wayan Sudiarta, M.Hum.	Balai Bahasa Denpasar
521	Dra. Ni Luh Partami, M.Hum.	Balai Bahasa Denpasar
522	Dra. Cokorda Istri Sukrawati	Balai Bahasa Denpasar
523	I Wayan Suken Bandana, S.S.	Balai Bahasa Denpasar
524	Drs. Ida Bagus Putraya, M.Pd.	Jl. Gede Gang Sambat, Singaraja
525	Drs. Nyoman Seloka Sudiara, M.Pd.	Jl. Melati Gang Pura Mumbul 6 Singaraja
526	Drs. I Nyoman Merdhana, M.Pd.	Jl. Yulistira Gang Mawar 16 Singaraja
527	I Gusti Ayu Agung Mas Triadnyani	Universitas Udayana
528	Nyoman Riasa	Program Magister IALF Bali
529	Dr. Ni Made Dhanawaty, M.S.	FS Universitas Udayana

No.	Nama	Instansi/Alamat
Nusa Tenggara Barat		
530	Drs. H. Lalu Bakri	Asisten Tatapraja, Pemprov. NTB
531	Husni Mu'adz, Ph.D.	FKIP Universitas Mataram
532	Dr. Ahmad Badrun	FKIP Universitas Mataram
533	Moch. Yamin	Jalan Pagesangan Indah V Blok D 142-143, Mataram 83127
534	H. Rasul MT	d.a. Jalan Paisadan 6 (depan RSU Mataram)
535	H. Dinullah Rayes	Jalan Dalam loka No. 1 Sumbawabesar
536	Hartadi, S.Pd.	Guru SMU/MGMP
537	Dr. Rusdiawan, M.Pd.	d.a. FKIP Universitas Mataram
538	Selamet Riyadi, S.Pd.	SDN 1 Sukamulia

Nusa Tenggara Timur

539	Ir. E. Thomas Salean, M.Si.	Asisten Bidang Kesejahteraan Sosial Pemprov NTT
540	Hayon G. Nico, M.Hum.	Dosen Sastra FKIP Undana
541	Drs. Tarno	Dosen Bahasa Indonesia FKIP Undana
542	Johanis Manulangga, M.Ed.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
543	Drs. Rudin Bally	Kepala UPTD Bahasa, Dinas P dan K
544	Drs. Marsel Robot, M.Hum.	d.a. Koordinator Pemasarakatan Bahasa Indonesia
545	Dra. Betty Riberu, S.Pd.	Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kota Kupang
546	Dr. Trees Y. Kumanireng	Koordinator Pemasarakatan Bahasa Indonesia

No.	Nama	Instansi/Alamat
Kalimantan Selatan		
547	Drs. H. Rusli Anwardi, M.M.	Asisten III Sekda Provinsi Kalimantan Selatan
548	Prof. Abdul Djebar Hapip, M.A.	FKIP Universitas Lambung Mangkurat
549	Dr. H. Djantera Kawi	Universitas Lambung Mangkurat
550	Drs. H. Muhammad Ramli	Kantor Pimpinan Muhammadiyah Kalimantan Selatan
551	Drs. H. Syarifuddin	LBB Kalimantan Selatan
552	M. Suriansyah Ideham, B.A.	LBB Kalimantan Selatan
553	Drs. H. Zulkifli, M.Pd.	Balai Bahasa Banjarmasin
554	Drs. Saefuddin	Balai Bahasa Banjarmasin
555	Ahmad Zaini, S.Ag.	Balai Bahasa Banjarmasin
556	Yuti Mahrita, S.Pd.	Balai Bahasa Banjarmasin
557	Drs. Muhammad Mugeni	Balai Bahasa Banjarmasin
558	Drs. H. Rustam Effendi	FKIP Universitas Lambung Mangkurat
559	Hj. Siti Raudah, S.Pd.	SL TP Negeri 5 Banjarmasin
560	Dra. Yuni Ratnawati	SMU Negeri II Tanjung
561	Taufik Lesmana, S.Pd.	SLTP Islam Syabilal Muhtadin
562	Dra. Maria L.A.S.	SKIP Universitas Lambung Mangkurat

Kalimantan Barat

563	Drs. Murdjani Abdullah	Asisten Kesejahteraan Sosial Sekwilda Kalimantan Barat
564	Dr. Sudarsono, M.A.	Universitas Tanjungpura
565	Drs. Ahadi Sulissusiawan, M.Pd.	Universitas Tanjungpura
566	H. Abang Imien Thaha	Jalan K.H. Wahid Hasyim Gang Amal No. 17
567	Yudhiswara @ Yuqi Wahono, S.H.	Jalan Tabrani Achmad Kompleks Navigasi No. 2
568	Dr. Chairil Effendi	HPBI Cabang Pontianak
569	Drs. Martono, M.Pd.	Ketua HPBI Cabang Pontianak SMU N 5 Pontianak
570	Mukadis, S.Pd.	SMU Negeri 5 Pontianak
571	Drs. Mujahir	Kantor Bahasa Pontianak
572	Drs. Sukanto, M.Pd.	Kantor Bahasa Pontianak
573	Santun Togatorop, S.Sos.	Kantor Bahasa Pontianak
574	Musfeptial, S.S.	Kantor Bahasa Pontianak
575	Adam Efendi, S.S.	Kantor Bahasa Pontianak
576	Haryanto, S.Pd.	Kantor Bahasa Pontianak
577	Ai Kurniati, S.S.	Kantor Bahasa Pontianak
578	Dra. Sulistiawati, M.Hum.	FKIP Universitas Tanjungpura
579	Prof. Dra. Hj. Suryati B. Azharie	FKIP Universitas Tanjungpura

No.	Nama	Instansi/Alamat
Kalimantan Timur		
580	Abu Helmi, S.E.	Asisten III (Kesra) Sekwilda Kalimantan Timur
581	Drs. Mursalim, M.Hurn.	Jl. Aziz Samad Blok G No. 46 RT 36
582	Drs. Herman A. Salam	d.a. Redaksi Kaltim Post
583	Drs. H. Syafruddin Pernyata, M.Hum.	Jl. Gajah Mada No. 1
584	Erminawati, S.Pd.	SMU Negeri 8, Samarinda
585	Hj. Widianingsih, S.Pd.	MTS Alfatihah Melak, Samarinda
586	Dra. Hj. Nurdiani	SL TPN 9 Sambutan-Asri, Samarinda
587	Drs. Mukni Baharuddin, S.H., M.M.	Kadiknas Pemerintah Kota, Samarinda
588	Dra. Siti Fatmawati, M.A.	BPG Samarinda
589	Dra. Atik Sulistyowati	Jalan Pelita RT. 25 Harapan Baru, Samarinda

Kalimantan Tengah

590	Ir. Achmad Diran	Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra
591	Drs. Albertus Purwaka	Jalan Sanggabuana II No. 73
592	Dra. Maria Arina Luardini, M.A.	FKIP Universitas Palangkaraya
593	Prof. H. K.M.A. M. Usop, M.A.	FKIP Universitas Palangkaraya
594	Drs. Kumpiady Widen, M.A., Ph.D.	FKIP Universitas Palangkaraya
595	Drs. Makmur Anwar	Jl. Anteng Kalang III/10
596	Lureyancee, S.Pd.	Penanggung Jawab MGMP
597	Drs. Yohanes Kalamper	Kantor Bahasa Palangkaraya
598	Elisten Parulian Sigi, S.S.	Kantor Bahasa Palangkaraya
599	Elis Setiati, S.Pd.	Kantor Bahasa Palangkaraya
600	Noor Hadi, S.Pd.	Kantor Bahasa Palangkaraya
601	Iwan Fauzi, S.Pd.	Kantor Bahasa Palangkaraya
602	Yohanes Tri Nugroho, S.S.	Kantor Bahasa Palangkaraya
603	Titik Wijanarti, S.S.	Kantor Bahasa Palangkaraya

Sulawesi Selatan

604	Drs. H. Hanafi Mappasomba, M.Pd.	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
605	Prof. Dr. Zainuddin Taha	Rektor Universitas Islam Makasar
606	Prof. Dr. H. Fachruddin A.E.	Jalan Jenderal Sudirman No. 23
607	Prof. Dr. M. Amin Rasyid, M.A.	Dosen FBS Universitas Negeri Makassar
608	Prof. Dr. Nurdin Yatim	Ketua Program Magister Linguistik, PPS UNHAS
609	Prof. Dr. Kamaruddin, M.A.	FBS Universitas Negeri Makassar
610	Hamzah A. Machmoed	Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

No.	Nama	Instansi/Alamat
611	Dr. Muhammad Rapi Tang, M.S.	Program Studi Sastra Indonesia
612	Drs. Ishak Ngeljaratan, MA	Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin
613	Drs. Muhammad Hasri, M.Hum.	SMU Negeri 5 Makassar
614	Rahmat, S.Pd.	SL TP Raiders Makassar
615	Drs. Zainuddin Hakim, M.Hum.	Balai Bahasa Ujung Pandang
616	Drs. Adri	Balai Bahasa Ujung Pandang
617	Dra. Jerniati I., M.Hum.	Balai Bahasa Ujung Pandang
618	Dra. Hj. Murmahyati, M.Hum.	Balai Bahasa Ujung Pandang
619	Drs. Adnan Usmar, M.Hum.	Balai Bahasa Ujung Pandang
620	Drs. H. Abdul Kadir Mulya	Balai Bahasa Ujung Pandang
621	Drs. H. Nasruddin	Balai Bahasa Ujung Pandang
622	Drs. H. Haruddin	Balai Bahasa Ujung Pandang
623	Drs. Syamsul Rijal	Balai Bahasa Ujung Pandang
624	Dra. Hj. Nur Azizah Syahril	Balai Bahasa Ujung Pandang
625	Drs. Ikhwan M. Said, M.Hum.	Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
626	Drs. Ismail Faisal, M.Hum.	FBS Universitas Negeri Makassar
627	Drs. H. Akmal Hamsa, M.Pd.	FBS Universitas Negeri Makassar
628	Drs. A. Wardihan P.	FBS Universitas Negeri Makassar
629	Muhammad Nasir, S.Pd.	SL TP Negeri 1, Pangkep
630	Dra. Munirah Kamaruddin	SMU Negeri 8, Makassar
631	Prof. Dr. Sugira Wahid	Jalan Usman Salengke No. 94, Goa
632	H.A. Gani Wahid	Jalan Usman Salengke No. 94, Goa
633	Prof. Dr. Hj. Sitti Hawang H.M.S.	FBS Universitas Negeri Makassar
634	Drs. Tadjuddin Maknu	Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
635	Dra. Makmudah, M.Hum.	Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar
636	Dra. Zemy Herlina	YPS Soroako Jalan Jawa No.1, Makassar
637	Sultan	SL TP YPS Soroaku Jalan Jawa No. 1
638	Drs. Asan Ahmad	YPS Soroako Jalan Jawa No.1, Makassar
639	Dra. Siti Rabbiah, M.Hum.	Universitas Muslimin Indonesia, Perumnas Antang, Makassar
640	Dr. Achmadtullah, M.Pd.	FBS Universitas Negeri Makassar
641	Dr. Ahmad Tolla, M.Pd.	Universitas Muslimin Indonesia
642	Ahyar Anwar, S.S., M.Si.	Universitas Negeri Makassar
643	Drs. Anshari, M.Hum.	Universitas Negeri Makassar
644	Drs. Syafrudin, M.Pd.	STKIP Cokroaminto, Kabupaten Pinrang

No.	Nama	Instansi/Alamat
Sulawesi Utara		
645	Drs. Iskandar L.A. Gobel	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra
646	Dra. Olga Karamoy, M.Hum.	Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi
647	Dr. G. Bawole	Universitas Negeri Manado
648	Dra. Hindun Lasena	SMK Negeri 1
649	Prof. Drs. A.B.G. Rattu	Fakultas Bahasa dan Seni, UNIMA
650	Dr. J. Akundanie	FBS Kampus UNIMA Tondano 95816
651	Iverdixon Tinungki	Jalan Asmara Haji, Tuminteng, Manado
652	Dra. J.M. Sendewana- Runtuwene	Ketua HI5KI Daerah Manado
653	Prof. Dr. H. Hunggu Tadjuddin Usup	Kantor Bahasa Manado
654	Drs. Jantje W. Rondonuwu	Kantor Bahasa Manado
655	Nuraidar Agus, S.S.	Kantor Bahasa Manado
656	Mulyanto, S.S.	Kantor Bahasa Manado
657	I Made Sudiana, S.S.	Kantor Bahasa Manado
658	Ratun Untoro, S.S.	Kantor Bahasa Manado
659	Asri M. Nur Hidayah, S.S.	Kantor Bahasa Manado

Sulawesi Tengah

660	Drs. H.A. Wahab Patunrangi, M.Si.	Asisten Kesra Pemda Sulawesi Tengah
661	Drs. Sofyan Inghuong	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
662	Drs. Indra B. Wumbu	Jalan Abdul Rokie
663	Drs. Tjatjo Tuan Sjaichu	FKIP Universitas Al-Khairat
664	Drs. Akhmad Syam, M.Pd.	FKIP Universitas Tadulako
665	Drs. A. Kadir Zakaria, M.Hum.	FKIP Universitas Tadulako
666	Drs. Efendi Dg. Palawa	FKIP Universitas Tadulako
667	Dra. Ny. Uhra AR Kadir L., M.Si.	Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran
668	Farida Yakub, S.Pd.	SMU Negri 2 Palu
669	Dra. Zainab, M.Hum.	Kantor Bahasa Palu
670	I Wayan Nitayadnya, S.S.	Kantor Bahasa Palu
671	Drs. Mustamin Basran, M.Hum.	Kantor Bahasa Palu
672	Aminah, S.S.	Kantor Bahasa Palu
673	Herawati, S.S.	Kantor Bahasa Palu
674	Deni Karsana, S.S.	Kantor Bahasa Palu
675	Wahidah, S.S.	Kantor Bahasa Palu

No.	Nama	Instansi/Alamat
-----	------	-----------------

Gorontalo

676	Ir. Bonny Moh. M. Ointu, M.Sc.	Asisten Kantor Gubernur Prov. Gorontalo
677	Prof. Dr. H. Mansoer Pateda	IKIP Negeri Gorontalo
678	Prof. Dr. H. Nani Tuloli	IKIP Negeri Gorontalo
679	Dr. Ibrahim Buloto	Anggota DPRD Prov. Gorontalo
680	Drs. Moh. Karmin Baruadi, M.Hum.	Ketua Hiski Daerah Gorontalo
681	Drs. Zainudin Panigoro	Kel. Dembe I Kota Barat Gorontalo
682	Dra. Moon Hidayati, M.Hum.	STKIP Gorontalo
683	Marina Pakaya	STKIP Gorontalo

Sulawesi Tenggara

684	Drs. H. Muchtar Silondae, S.H., M.Si.	Asisten Ketataprajaan Rakyat
685	Drs. Roni Muhtar, M.Pd.	FKIP Unhalu
686	Dra. Hj. Sakka Hasan	PGSO Unhalu
687	Dr. H. Hilaluddin Hanafi, M.Pd.	FKIP Unhalu, Kampus Bumi Tridharma
688	Drs. Ahid Hidayat, M.Hum.	Ketua HISKI Sulawesi Tenggara
689	Prof. H. Gani Wahid	Jalan By Pass Terusan
690	Prof. H. Siradjuddin Djarudju	Kompleks Unhalu Blok C NO.3
691	Irianto Ibrahim, S.Pd.	FKIP Unhalu
692	Drs. Hasmi	BTN Unhalu Blok K/5
693	Drs. H. Zalili Sailan, M.Pd.	FKIP Unhalu Kampus Bumi Tridharma

Maluku

694	Drs. H. Jatar Soamole	Kantor Gubernur Prov. Maluku
695	Drs. Th. Frans, M.Pd.	FKIP Universitas Pattimura
696	Dra. C. Sasabone, M.Pd.	FKIP Universitas Pattimura
697	Drs. Daud Jalmaf, M.Pd.	FKIP Universitas Pattimura
698	Drs. Zainuddin Notanubun, M.Pd.	FKIP Universitas Pattimura
699	Mariana Lewier, S.S., M.Hum.	FKIP Universitas Pattimura
700	Muhammad Suatkab, S.Pd.	SMU Muhammadiyah Ambon
701	Drs. Abdul Latief Rengur	FKIP Universitas Pattimura
702	Drs. Frans Thomas, M.Pd.	Universitas pattimura

Maluku Utara

703	Drs. Djidon Hangewa, M.S.	Pj. Bupati Halmahera Utara, Tobalu
704	Dra. Rainannur A. Latif, M.Hum.	Dosen Bahasa Universitas Hairun
705	Drs. Sidik Dere Siokona, M.Pd.	Ketua STKIP Kie Raha
706	Drs. H.M. Jusuf Abdurahman	Dosen Bahasa Universitas Hairun
707	Dr. Gufron Ali Ibrahim, M.S.	Universitas Hairun
708	Ali Lusubun, S.P.	Guru SMU Negeri 5

No.	Nama	Instansi/Alamat
Papua		
709	Dra. Huda Ida Imbiri	Anggota DPRD Prov. Papua
710	Yunus Wafon, S.Pd., M.Si.	Universitas Cenderawasih
711	Ny. Elly Tuhulele, S.Pd.	Ketua MGMP Bahasa Indonesia, Kota Jayapura
712	Dra. H. Wangober	Jalan Samratu Langi
713	Drs. Frans Rumbrawer, M.Si.	Balai Bahasa Jayapura
714	Drs. Chrisf Fautngil, M.A.	Balai Bahasa Jayapura
715	Sukardi Gau, S.S., M.Hum.	Balai Bahasa Jayapura
716	Arman, S.S., M.Hum.	Balai Bahasa Jayapura
717	Supriyanto Widodo, S. S., M.Hum.	Balai Bahasa Jayapura
718	Normawati, S.Pd.	Balai Bahasa Jayapura
719	Asmabuasappe, S.S.	Balai Bahasa Jayapura
720	Moh. Rosadi, S.S.	Balai Bahasa Jayapura
721	Suharyanto, S.S.	Balai Bahasa Jayapura

No.	Nama	Instansi/Alamat
-----	------	-----------------

LUAR NEGERI

Australia

1	Prof. James Sneddon	Dosen Scholl of Languages Griffith
2	Maria Ida Nurhayati	School of Humanities & Social Scineces, UNSW @ ADFA Northcoh Drive, Campbell, ACT 2600, Australia

Belanda

3	Barry Van Der Schoot	Stichting lending, Stichting lending, Gereformeerde, Univ. Laiden, Belanda
---	----------------------	---

Brunei Darussalam

4	Dato Haji Ali bin Haji Othman	Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam
5	Dato Haji Mahmud bin Haji Bakyr	Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam
6	Dr. Mataim Bakar	Fakulti Bahasa Melayu, Univ. Brunei Darussalam
7	Dr. Jaludin Chuchu	Fakulti Bahasa Melayu, Univ. Brunei Darussalam
8	Awang Hanafiah bin Haji Zaini	Fakulti Bahasa Melayu, Univ. Brunei Darussalam

Bulgaria

9	Dr. Krassin Himmirsky	11 Graf Ingatiev Str. , Sofia 1000, Bulgaria
---	-----------------------	--

China

10	Prof. Xu Younian	Guangdong University of Foreign Studies, Faculty or Eastern Language and Culture, Guangzhou 510420 P.R. Cina
11	Cai Jincheng (Gunawan)	Faculty of Eastern Languages and Culture Indonesian Departement, ice Dean, Guangdong University of Foreign Studies Guangzhou 510420 P.R. Cina
12	Profesor Zhang Yu'an	Indonesia-Malaysia Studies, Vice Chairman, Instute of Oriental Studies Director Peking University

No.	Nama	Instansi/Alamat
Jepang		
13	Kyoko Funada	Kanda University 6-11-2 Takamatsu nerima-ku, Tokyo 174-0075

Malaysia

14	Abang Patdeli bin Abang Haji Muhi	Dewan Bahasa dan Pustaka, Cawangan Serawak
15	Dr. Awang Sarian	Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Tkt. II Menara
16	Nur Hashimah Al	Bahagian Penerbitan Sastra, Dewan Bahasa dan Pustaka
17	Hasri Abas	Bahagian Kesusastraan, Dewan Bahasa dan Pustaka

Prancis

18	Dr. Monique L. Zaini	Prancis
----	----------------------	---------

Rusia

19	Prof. Lyudmila Demidyuk	Institute Asia Afrika, Universitas Negeri Moskow
----	-------------------------	---

Singapura

20	Dra. Johanna Wulansari Istanto	National University of Singapore
21	Drs. Masran B. Sabran	d.a. MBMS Ministry of Information and the arts of Hill Street
22	Dr. Abbas Mohd Shariff	Penolong Profesor, Bahagian Bahasa Asia dan Kebudayaan, Institut Pendidikan Nasional

Suriname

23	Roesman Darmo Hoetomo	Libra Straat 1, Paramari No. 60, Suriname
----	-----------------------	--

**PANITIA
KONGRES BAHASA INDONESIA VIII
JAKARTA, 2003**

A. Pelindung

- 1 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- 2 Menteri Pendidikan Nasional
- 3 Menteri Dalam Negeri
- 4 Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata
- 5 Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

B. Pengarah

- | | |
|---|------------|
| 1 Drs. Baedhowi, M.Si.
Sekretaris Jenderal Departemen
Pendidikan Nasional | Ketua |
| 2 Dr. Dendy Sugono
Kepala Pusat Bahasa | Sekretaris |
| 3 Prof. Dr. Jr. Satrio Soemantri
Brodjonegoro
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi | Anggota |
| 4 Dr. Ir. Indra Djati Sidi
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah | Anggota |
| 5 dr. Fasli Jajal, Ph.D.
Direktur Jenderal Pendidikan Luar
Sekolah dan Pemuda | Anggota |
| 6 Prof. Dr. Soenjono Dardjowidjojo
Ketua Masyarakat Linguistik Indonesia | Anggota |
| 7 Dr. Sumardi, M.Sc.
Sekretaris Himpunan Pembina Bahasa
Indonesia | Anggota |
| 8 Prof. Dr. Riris K. Toha-Sarumpaet
Ketua Himpunan Sarjana-Kesusastraan
Indonesia | Anggota |
| 9 Tarman Azzam
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia | Anggota |
| 10 Prof. Dr. Amran Halim
Guru Besar Universitas Sriwijaya | Anggota |
| 11 Prof. Dr. Anton M. Moeliono
Guru Besar Universitas Indonesia | Anggota |
| 12 Dr. Hasan Alwi
Pusat Bahasa | Anggota |

13 Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Anggota
14 Prof. Dr. Mien A. Rifai	Anggota
15 Dr. Taufiq Ismail	Anggota
16 Drs. Parni Hadi	Anggota

C. Panitia Penyelenggara

1 Dr. Dendy Sugono	Ketua
2 Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A.	Wakil Ketua
3 Dr. Hasan Alwi	Tim Teknis
4 Dr. S. Effendi	Tim Teknis
5 A. Latief, M.A.	Tim Teknis
6 Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil.	Tim Teknis
7 Dr. Edwar Djamaris	Tim Teknis
8 Dr. Nafron Hasjim	Tim Teknis
9 Dr. Yayah B. Lumintintang	Tim Teknis
10 Drs. Abdul Rozak Zaidan, M.A.	Ketua Bidang Persidangan
11 Drs. Amir Mahmud, M.Pd.	Ketua Seksi Permakalahan
12 Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum.	Ketua Seksi Acara Sidang
13 Drs. Mustakim, M.Hum.	Ketua Seksi Pelaporan
14 Dr. E. Zaenal Arifin	Ketua Bidang Informasi dan Seni
15 Dra. Jumariam, M.Ed.	Ketua Seksi Humas
16 Drs. Syamsarul, M.M.	Ketua Seksi Dokumentasi
17 Agnes Santi, S.Kom.	Ketua Seksi Pameran
18 Dra. Siti Zahra Yundiafi, M.Hum.	Ketua Seksi Pentas Seni
19 Drs. S. Amran Tasai, M.Hum.	Ketua Bidang Logistik
20 Hartatik, S.Sos.	Ketua Seksi Akomodasil Konsumsi
21 Drs. Margono	Ketua Seksi Keamanan
22 Erwin Subagio	Ketua Seksi Transportasi
23 dr. Surjadi	Ketua Seksi Kesehatan
24 Dra. Yeyen Maryani, M.Hum.	Ketua Bidang Sekretariat
25 Drs. Djamari	Ketua Seksi Surat-Menyurat
26 Sartono, S.Sos.	Ketua Seksi Pendaftaran
27 Drs. Sutaryo, M.M.	Ketua Seksi Keuangan/ Perjalanan
28 Drs. Suhadi	Ketua Seksi Penggandaan
29 Drs. Ys. Satim	Ketua Seksi Perlengkapan
30 Wahyu Hidayat, S.H.	Ketua Seksi Protokol
31 Drs. Utjen Djusen Ranabrata, M.Hum.	Ketua Seksi Penghargaan
32 Drs. Teguh Dewabrata	Ketua Seksi Usaha



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta Timur



ISBN 978-979-069-079-0